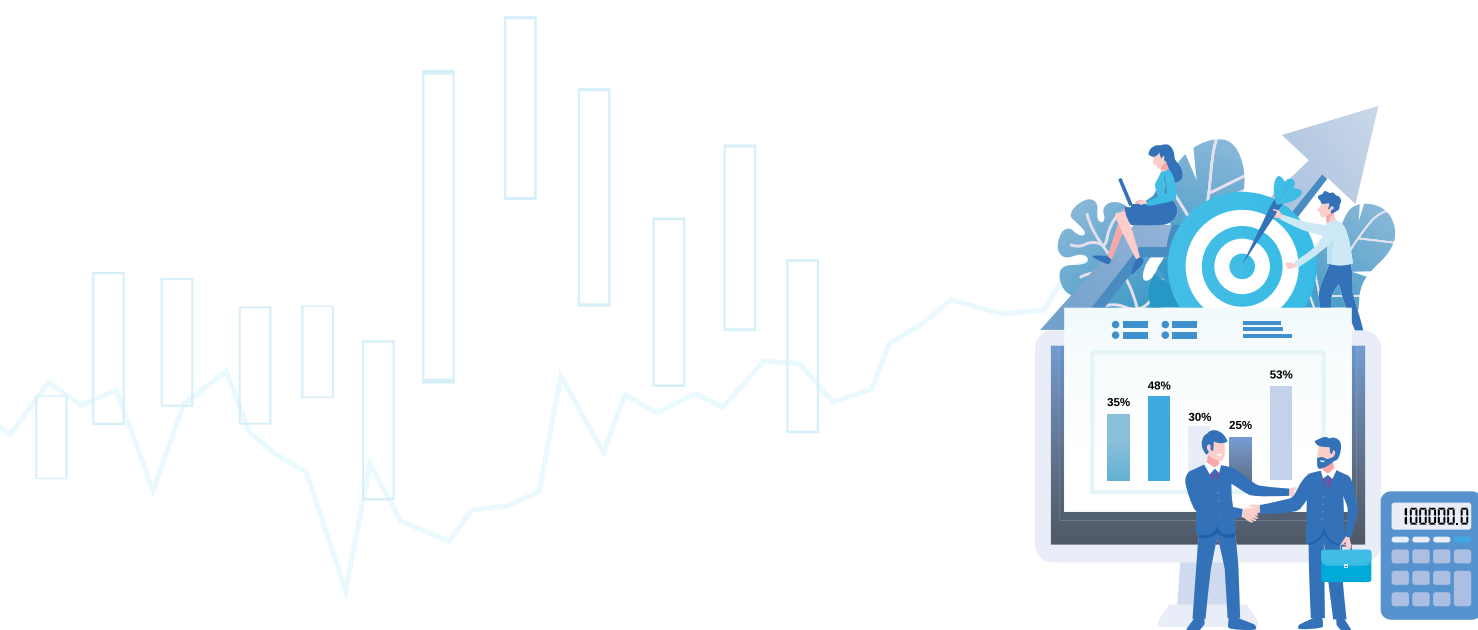




Rising Stronger for a Brighter Tomorrow

Bangkit Lebih Kuat
untuk Masa Depan Lebih Cerah



Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

Disclaimer and Limitation of Liability

Laporan tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang LPEI serta lingkungan bisnis di mana Perusahaan menjalankan kegiatan usaha. Pernyataan yang terdapat di Laporan Tahunan ini bukan menjadi jaminan kinerja di masa yang akan datang, karena hasil sebenarnya di masa depan dapat berbeda karena dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di luar kendali LPEI.

This annual report contains statements of financial condition, results of operations, projections, plans, strategies, policies, and objectives of Indonesia Eximbank, which are classified as forward-looking statements in compliance with applicable laws, except those that are historical in nature. Such statements involve prospective risks, uncertainties and could cause actual developments to differ materially from those reported.

Prospective statements in this Annual Report are based on assumptions about LPEI's current and future conditions and the business environment in which the Company conducts business. Statements contained in this Annual Report are not a guarantee of future performance, as actual future results may differ as they may be affected by factors beyond Indonesia Eximbank control.



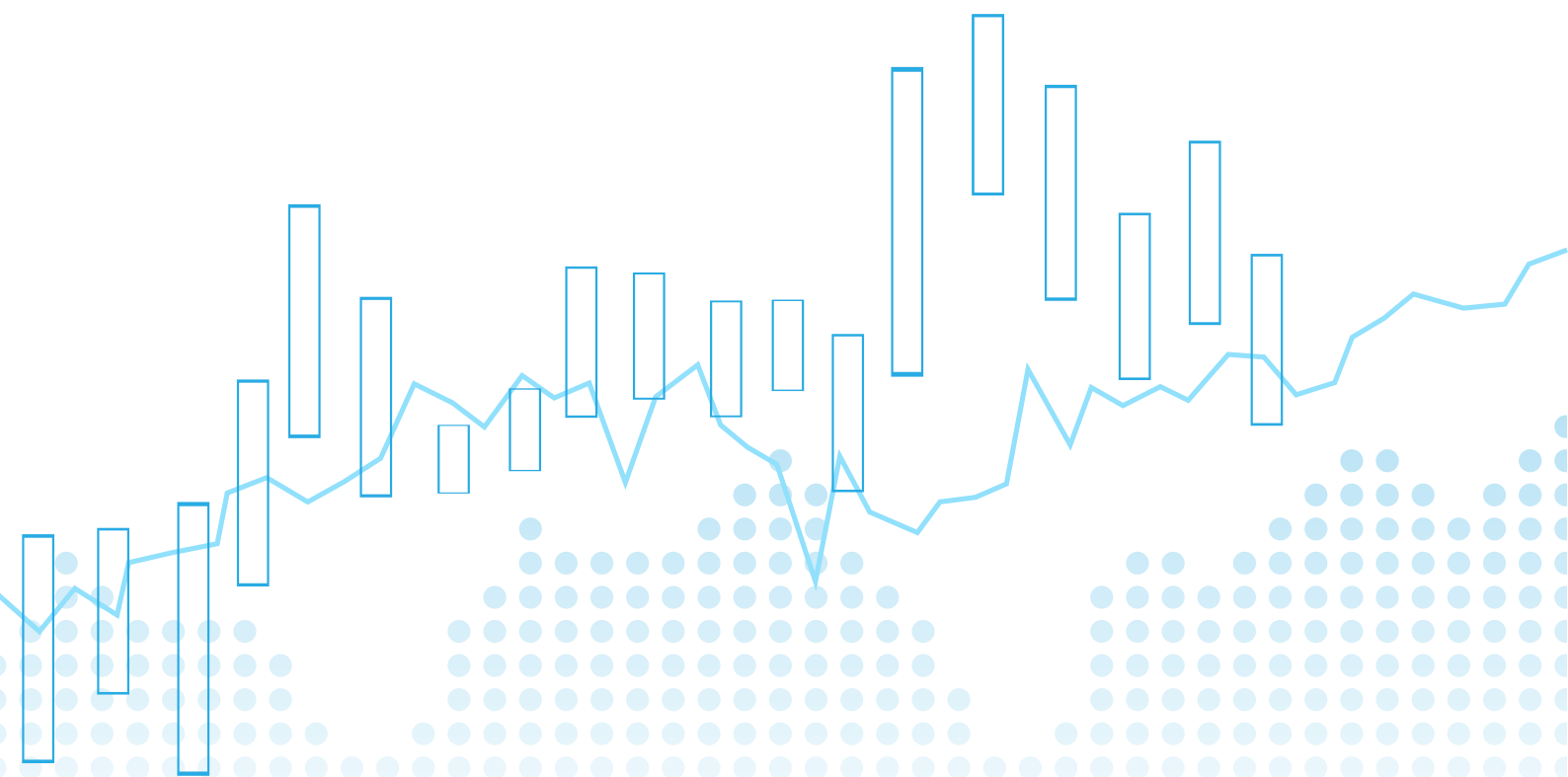
Tema dan Penjelasan Tema

Theme and Theme Explanation

Rising Stronger, for a Brighter Tomorrow

Bangkit Lebih Kuat untuk Masa Depan Lebih Cerah





Sebagai *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan RI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) senantiasa membangun ekosistem guna mendorong pertumbuhan ekspor melalui kerja sama, kolaborasi dan sinergi antar lembaga Pemerintah, Daerah dan instansi terkait lainnya.

Dukungan LPEI terhadap ekosistem ekspor nasional juga diwujudkan dengan menjadi narasumber maupun kontributor aktif dalam program Kementerian/ Lembaga seperti *sharing knowledge* tentang international trend dan *shifting global trend in trade*, mitigasi risiko transaksi melalui produk dan layanan perbankan dan topik-topik aktual lainnya dalam rangka pemulihan dan penguatan ekspor nasional.

LPEI membangun sinergi kelembagaan baik dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah serta lembaga terkait lainnya dalam Program Desa Devisa dan program *Coaching Program for New Exporter* (CPNE) yang dilakukan secara sistematis dan bertahap untuk mencetak para eksportir baru.

Indonesia Eximbank, functioning as a Special Mission Vehicle (SMV) of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, is actively developing a conducive ecosystem to foster export growth through cooperation, partnerships, and synergy among governmental, regional, and other relevant institutions.

Indonesia Eximbank's commitment to fortify the domestic export ecosystem is demonstrated by its participation as a resource and dynamic contributor in the various programs of Ministries/ Institutions. This includes sharing insights on the latest global trends in trade, mitigating transaction risks through banking products and services, and addressing other pertinent issues in the current context of revitalizing and strengthening national exports.

Indonesia Eximbank intertwines strategic institutional synergy including with the Central and Regional Governments and other relevant entities, to implement the Go Export Village and the Coaching Program for New Exporters (CPNE) in a systematic and gradual manner. These initiatives aim to cultivate new exporters.

Kesinambungan Tema

Theme Continuity



2023

HARMONI Hadirkan Semangat Kolaborasi Membangun Negeri

Spirit of Collaboration in Advancing the Nation

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI/Indonesia Eximbank) terus mendorong proses transformasi bisnis yang telah berlangsung sejak 2020, dengan melaksanakan perbaikan fundamental secara komprehensif baik bersifat organik maupun inorganik dalam berbagai aspek. Salah satu fokus transformasi LPEI adalah penguatan seluruh aspek pembiayaan, mulai dari proses *underwriting* sampai dengan pencairan dan *monitoring*. LPEI juga terus menyeimbangkan komposisi portofolio secara bertahap, serta meningkatkan peran dalam ekosistem ekspor terkait pelaksanaan mandat penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi, termasuk fokus pada pengembangan UMKM ekspor. Dengan demikian, LPEI terus memastikan pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan dan memberikan dampak pada pembangunan nasional.

Indonesia Eximbank (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/ LPEI) continues to encourage the business transformation process that has been ongoing since 2020, by implementing comprehensive fundamental improvements both organic and inorganic in various aspects. One of the focuses of Indonesia Eximbank's transformation is strengthening all aspects of financing, from the underwriting process to disbursement and monitoring. Indonesia Eximbank also continues to balance its portfolio composition in stages, as well as increasing Indonesia Eximbank's role in the export ecosystem regarding the implementation of guarantee mandates, insurance and consulting services, including a focus on developing export MSMEs. In this way, Indonesia Eximbank continues to ensure sustainable business growth and have an impact on national development.



2022

Supporting Export Ecosystem Strengthening Collaborations

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) secara aktif membangun kerjasama dengan berbagai institusi dan lembaga baik pemerintah daerah maupun pusat dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sehingga mampu mengembangkan produk berorientasi ekspor, serta mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan ekspor nasional. LPEI berperan sebagai fasilitator dan akselerator guna menjembatani kepentingan aktivitas dan pelaku ekspor dengan instansi terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan ekspor serta mempermudah aktivitas ekspor yang mengalami hambatan regulasi di negara tujuan ekspor. Selain itu, LPEI memberikan dukungan berupa layanan Finansial dan layanan non-finansial kepada pelaku UMKM berorientasi ekspor.

Indonesia Eximbank actively collaborates with various local and central government institutions and agencies to enhance the capabilities of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) for developing export-driven products and fostering a favorable business environment to boost national exports. Serving as a mediator and expeditor, Indonesia Eximbank connects exporters and export-related agencies to address barriers and facilitate export operations that encounter regulatory impediments in the destination countries. Additionally, Indonesia Eximbank extends financial and non-financial assistance to MSME communities with a focus on export-oriented ventures.



2021

Penguatan Mandat Institusi untuk Meningkatkan Ekspor dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Empowering Institutional Mandate in Supporting
Export and National Economic Recovery

Pemerintah memberikan mandat kepada LPEI untuk menyediakan penjaminan atas kredit modal kerja yang disalurkan oleh perbankan kepada pelaku usaha korporasi melalui program Penjaminan Pemerintah atau JAMINAH dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. terkait dengan hal tersebut, LPEI memiliki tiga peran penting dalam rangka meningkatkan Pemulihan Ekonomi Nasional dan ekspor nasional sebagai *Special Mission Vehicle* (SMV) kementerian keuangan yang meliputi Penjaminan Pemerintah untuk pelaku usaha korporasi; pelaksana pada program investasi pemerintah; dan penugasan khusus ekspor atau PKE dengan tujuan menyediakan pembiayaan ekspor.

Indonesia Eximbank has been given the mandates by the government to provide guarantees for working capital loans disbursement by banks to corporate business practitioners through the government guarantee program or JAMINAH in the framework of national economic recovery. as such, Indonesia Eximbank has three key roles in order to improve the national economic recovery and enhance the national exports as a Special Mission Vehicles (SMV) of the Ministry of Finance which includes government guarantees for corporate business players; the executor of government investment programs; and export-specific assignments or PKE with the aim at providing export financing.



2020

Menjadi Penggerak Pembangunan di Masa Pandemi & Beraspirasi menuju Resiliensi dengan Agility

Propelling the Nation during the Pandemic
& Aspires toward Resilience with Agility

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia mengimbangi masa pandemi di tahun 2020 melalui penguatan fondasi dengan misi "*Regain Our Footing*". tujuannya agar LPEI tetap menjadi penggerak pembangunan di masa pandemi. LPEI juga berupaya menjadi Lembaga yang penuh aspirasi menuju resiliensi dengan ketangkasan. Oleh karenanya di tahun 2020, LPEI memfokuskan pada tiga aspek agar mampu cepat beradaptasi dan tetap tangkas dalam situasi sulit. ketiga aspek tersebut yaitu melakukan restrukturisasi dan efisiensi, menjalankan mandat dan bisnis secara selektif termasuk Jasa konsultasi, dan penguatan proses Internal. ketiga aspek ini kemudian dituangkan menjadi sembilan prioritas utama, serta sekaligus menjadi strategi pengembangan bisnis LPEI di tahun 2020.

Indonesia Eximbank navigated the crisis in 2020 by strengthening its foundation through its "*Regain Our Footing*" mission in order to continue propelling the nation during the pandemic. Indonesia Eximbank also aspires toward resilience with agility. To that end, in 2020 Indonesia Eximbank focused on three improvement areas that would accelerate its capability to adapt and staying agile amid a difficult situation. These areas were restructuring and efficiency, selective exercise of mandate and business activities including the Advisory Services, and internal process strengthening. These aspects have been translated into nine key priorities that also formed Indonesia Eximbank's business development strategies in 2020.

Daftar Isi

Table of Content

2	Tentang Laporan Tahunan 2024 About the 2024 Annual Report
3	Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab Disclaimer and Limitation of Liability
4	Tema dan Penjelasan Tema Theme and Theme Explanation
6	Kesinambungan Tema Theme Continuity
8	Daftar Isi Table of Content
12	Komitmen Keberlanjutan LPEI Indonesia Eximbank Sustainability Commitment
13	Sekilas Kinerja LPEI di Tahun 2024 A Glimpse of Indonesia Eximbank Performance in 2024

67	Surat Pernyataan Direktur Eksekutif & Direktur Pelaksana Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan 2024 Statement Letter of Executive Director & Managing Directors Regarding Responsibility for the 2024 Annual Report and Sustainability Report



Profil Perusahaan

Company Profile

70	Identitas dan Informasi Umum Perusahaan Corporate Identity and General Information
72	Riwayat Singkat LPEI Brief History of LPEI
74	Kegiatan Usaha Business Activities
77	Wilayah Operasional Operational Area
78	Visi, Misi, dan Budaya LPEI Vision, Mission, and Culture of Indonesia Eximbank
81	Keanggotaan Dalam Asosiasi Membership In Associations
82	Struktur Organisasi Organizational Structure
84	Profil Dewan Direktur Profile of Board of Directors
90	Perubahan Komposisi Anggota Dewan Direktur Changes In the Composition of Board of Directors
92	Profil Direktur Pelaksana Managing Directors Profile
96	Perubahan Komposisi Anggota Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana Changes In the Composition of Executive Directors and Managing Directors
98	Profil Manajemen Senior Senior Management Profile
100	Komposisi Manajemen Senior The Composition of Senior Management
102	Demografi Karyawan Employees Demography
104	Komposisi Pemegang Saham Shareholders Composition
106	Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali, Baik Langsung maupun tidak Langsung Sampai Kepada Pemilik Individu yang Disajikan Dalam Bentuk Skema/Bagan Information On Major and/or Controlling Shareholders, Either Directly or Indirectly Up to Individual Owners, Presented In the Form of A Scheme/Chart
107	Daftar Entitas Anak, LPEI Asosiasi, dan Ventura Bersama Subsidiaries, Associated Entities, and Joint Ventures of Indonesia Eximbank
108	Struktur Grup Group Structure



Ikhtisar Utama

Performance Highlights

18	Ikhtisar Data Keuangan Penting Key Financial Highlights
21	Informasi Saham Information on Stock
22	Informasi Mengenai Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi yang Masih Beredar Information On Outstanding Bonds, Sukuk Or Convertible Bonds
24	Peringkat Lembaga Institution Rating
25	Peristiwa Penting Event Highlights



Laporan Manajemen

Management Report

33	Laporan Dewan Direktur Board of Directors Report
43	Laporan Direktur Eksekutif-Direktur Pelaksana Executive Director-Managing Director Report
63	Laporan Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board Report
66	Surat Pernyataan Dewan Direktur Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan 2024 Statement Letter of Board of Directors Regarding Responsibility for the 2024 Annual Report and Sustainability Report

109	Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Saham Share Issuance and Listing Chronology
109	Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya Chronology of Issuance and Listing of Debt Securities
112	Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accountant and Public Accountant Firm
114	Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Supporting Institutions and/or Professions
115	Penghargaan Awards
116	Informasi Pada Situs Web LPEI Information On Company Website

4

Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis

120	Tinjauan Perekonomian dan Industri Economic and Industry Review
132	Strategi dan Kebijakan Strategis 2024 Strategy and Strategic Policies In 2024
136	Tinjauan Kinerja per Segmen Usaha Performance Overview Per Business Segment
161	Tinjauan Keuangan Financial Overview

5

Fungsi Penunjang Bisnis Business Support Function

220	Teknologi Informasi Information Technology

6

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

228	Pencapaian Terbaik Dalam Penerapan Tata Kelola Yang Baik Best Achievement In the Implementation of Good Corporate Governance
229	Komitmen dan Kebijakan Penerapan Tata Kelola Pada LPEI Commitment and Policy to Governance Implementation At Indonesia Eximbank
230	Dasar Penerapan Tata Kelola LPEI Basis for Indonesia Eximbank Governance Implementation
232	Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola LPEI Implementation of Indonesia Eximbank Governance Principles

235	Perkembangan Penerapan Tata Kelola LPEI yang Baik di Lingkup LPEI Development of Implementation of Indonesia Eximbank Good Corporate Governance Within Indonesia Eximbank
248	Struktur Tata Kelola LPEI Indonesia Eximbank Governance Structure
261	Rapat Pengesahan Ratification Meeting
265	Dewan Direktur Board of Directors
273	Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana Executive Director and Managing Directors
286	Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board
294	Transparansi Informasi Tentang Dewan Direktur, Direktur Eksekutif Dan Direktur Pelaksana, Dan Dewan Pengawas Syariah Transparency of Information About Board of Directors, Executive Director, and Managing Directors
349	Organ Pendukung Dewan Direktur Board of Directors Supporting Organs
374	Organ Pendukung Direktur Eksekutif Executive Director Supporting Organs
463	Akuntan Publik Public Accountant
466	Fungsi Kepatuhan Compliance Function
474	Sistem Pengendalian Internal Internal Control System
478	Manajemen Risiko Risk Management
502	Perkara Hukum dan Upaya Penyelesaian Legal Cases and the Settlement
502	Sanksi Administratif Administrative Sanctions
503	Akses Informasi dan Data Perusahaan Access to Company Information and Data
504	Kode Etik Code of Conduct
508	Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Long-Term Performance-Based Compensation Policy
509	Kebijakan Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana dan Anggota Dewan Share Ownership Disclosure Policy for Executive Director, Managing Directors, and Board Members
510	Transparansi Manajemen Tentang Kepemilikan Saham Management Transparency On Share Ownership
511	Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System
518	Kebijakan Antikorupsi dan Anti Gratifikasi Anti-Corruption and Anti-Gratification Policies
524	Kebijakan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) Policy
527	Transparansi Keuangan dan Non-Keuangan Lembaga Financial and Non-Financial Transparency of Corporate

528	Buyback Saham dan/atau Obligasi Bond and Stock Buybacks
529	Kebijakan Barang dan Jasa Procurement of Goods and Services
532	Kebijakan Pencegahan <i>Insider Trading</i> Insider Trading Prevention Policy
532	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar Distribution of Funds to Related Parties and Large Exposure
533	Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kepentingan Politik Providing Funds for Social Activities and Political Interests
534	Transparansi Praktik <i>Bad Governance</i> Transparency of Bad Governance Practices
535	Penerapan Atas Pedoman Tata Kelola Lembaga Implementation of Good Corporate Governance Guidelines

1 Profil Laporan Keberlanjutan Sustainability Report Profile

540	Pernyataan dan Batasan Tanggung Jawab Disclaimer and Limitations of Responsibilities
541	Tentang Laporan Ini About This Report
543	Tentang LPEI About LPEI
544	Informasi Umum General Information
545	Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan Sustainability Performance Highlights

2 Komitmen Keberlanjutan Sustainability Commitment

550	Pengelolaan Topik Material Material Topic Management
553	Kerangka dan Strategi Keberlanjutan Sustainability Framework and Strategy
563	Visi Dan Misi Keberlanjutan Sustainability Vision and Mission
564	Membangun Budaya Keberlanjutan Building a Sustainability Culture

3 Tata Kelola Keberlanjutan Sustainability Governance

565	Kontribusi Pada Pencapaian SDGs Contribution to the Achievement of SDGs
568	Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan Those In Charge Of Sustainable Finance Implementation
571	Kode Etik dan Anti Korupsi Code of Conduct and Anti-Corruption
572	Kebijakan Pencegahan <i>Insider Trading</i> Insider Trading Prevention Policy
574	Pengelolaan dan Mitigasi Risiko Keuangan Berkelanjutan Employee Turnover and Recruitment
576	Pengelolaan Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Relationship Management with Stakeholders
579	Tantangan Dan Peluang Dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan Challenges And Opportunities In Implementing Sustainable Finance

4 Kinerja Ekonomi Economic Performance

582	Komitmen dan Kebijakan Mengelola Kinerja Ekonomi Commitment and Policies in Managing Economic Performance
583	Target dan Pencapaian Target and Achievement
584	Kebijakan Penilaian, Penyaringan, Pemantauan Risiko Pembiayaan Keberlanjutan Policy on Assessment, Screening, and Monitoring of Sustainable Financing Risk
585	Kinerja Portofolio Pembiayaan Keuangan Berkelanjutan Sustainable Financing Performance
586	Nilai Ekonomi Langsung Direct Economic Value
588	Kerja Sama Dengan Mitra Bisnis Cooperation With Partners
589	Kepuasan Nasabah Customer Satisfaction
590	Komitmen untuk Memberikan Layanan yang Setara Kepada Nasabah Commitment to Providing Equal Service to Customers
592	Produk Dievaluasi Untuk Keamanan Nasabah Products Evaluated for Customer Safety
593	Inovasi dan Pengembangan Produk atau Jasa Innovation and Product or Service Development
593	Akses Kantor Cabang dan Sarana Layanan Perbankan Access to Branch and Banking Services

594	Edukasi Produk dan Jasa Layanan LPEI Products Evaluated for Customer Safety
594	Jumlah Produk yang Ditarik Number of Products Recalled
595	Pengaduan Nasabah Customer Complaint
596	Survei Kepuasan Nasabah Customer Satisfaction Survey



Kinerja Lingkungan Environmental Performance

600	Komitmen dan Kebijakan Mengelola Kinerja Lingkungan Commitment and Policies In Managing Environmental Performance
601	<i>Sustainable Financing & Sustainable Funding</i> Sustainable Financing & Sustainable Funding
602	Program <i>Green Office</i> LPEI LPEI'S Green Office Program
603	Konsumsi Energi dan Emisi Yang Dihasilkan Energy Consumption and Generated Emission
606	Konsumsi Air Water Consumption
607	Pengelolaan Limbah Waste Management
608	Program Lingkungan Environmental Program
608	Kepatuhan Lingkungan Environmental Compliance

619	Perlindungan Terhadap Hak-Hak Karyawan Perempuan Protection of the Rights of Female Employees
621	Remunerasi dan Fasilitas Kesejahteraan Karyawan Employee Remuneration and Welfare Facilities
624	Kesehatan dan Keselamatan Kerja Occupational Health and Safety
626	Pelatihan dan Pengembangan Training and Development
638	Persiapan Pensiun Retirement Preparation
639	Rencana Pengembangan dan Pelatihan SDM HR Development and Training Plan
648	Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karier Performance Review and Career Development
650	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Social and Environmental
651	Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar Impact of Operations on Surrounding Communities
652	Pelaksanaan Program di Bidang Sosial dan Lingkungan Hidup Implementation of Social and Environmental Program
656	Kepatuhan Sosial Social Compliance
657	Tanggapan Umpan Balik Laporan Tahun Sebelumnya Feedback On Previous Year's Report
658	Lembar Umpan Balik Feedback Form
660	Indeks Isi POJK NO.51/OJK.03/2017 POJK NO.51/OJK.03/2017 Content Index
664	Keselaran Laporan Keberlanjutan Dengan Metrik ESG Alignment of the Sustainability Report with ESG Metrics
666	Indeks Isi Consolidated GRI Standard 2021 Consolidated Content Index of GRI Standard 2021
670	Indeks Isi GRI Financial Service Consolidated Content Index of GRI Financial Service

Laporan Keuangan Financial Report



Kinerja Sosial Social Performance

612	Komitmen dan Kebijakan Mengelola Kinerja Sosial Commitment and Policies In Managing Social Performance
614	Demografi Karyawan Employee Demographic
615	Perputaran dan Perekrutan Karyawan Employee Turnover and Recruitment
617	Praktik Kerja yang Adil dan Bertanggung Jawab Fair and Responsible Employment Practice
618	Lingkungan Kerja Ramah Disabilitas Disability-Friendly Work Environment
618	Perlindungan Terhadap HAM, Perlindungan Dari Pelecehan Seksual Dan Tindakan Diskriminasi Lainnya Protecting Human Rights, Protection Against Sexual Harrasment and Other Discriminations



Komitmen Keberlanjutan LPEI

Indonesia Eximbank Sustainability Commitment

Dengan berpegang pada prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan, LPEI berkomitmen untuk terus meningkatkan peran aktifnya dalam mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan melalui implementasi strategi yang mengintegrasikan aspek *Environmental, Social and Governance* (ESG) serta berpedoman pada prinsip *triple bottom lines* dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Langkah ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengukur sejauh mana kontribusi berkelanjutan LPEI kepada para pemangku kepentingannya.

By adhering to the principles of sustainable finance, Indonesia Eximbank is committed to continuously improving its active role in supporting sustainable economic development through the implementation of strategies that integrate Environmental, Social and Governance (ESG) aspects and are guided by the triple bottom lines principle in the business decision-making process. This step is taken as a way to measure the extent of Indonesia Eximbank sustainable contribution to its stakeholders.

Sekilas Kinerja LPEI di Tahun 2024

A Glimpse of Indonesia Eximbank Performance in 2024

Sepanjang tahun 2024, LPEI telah menjalankan seluruh mandat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia beserta perubahannya.

Throughout 2024, Indonesia Eximbank has carried out all mandates as mandated in Law of the Republic of Indonesia Act Number 2 of 2009 concerning Indonesia Eximbank.

Sekilas Kinerja | Highlights Performance

Pembiayaan Financing



Rp56,18 triliun
trillion

Outstanding Pembiayaan
Outstanding Financing

Penugasan Khusus Ekspor (PKE) National Interest Account (NIA)



Rp7,27 triliun
trillion

New Disbursement of 8 NIA Program

Penjaminan Guarantee



Rp6,59 triliun
trillion

Outstanding Penjaminan Komersial
Outstanding Commercial Guarantee

Asuransi Insurance



Rp10,86 triliun
trillion

Volume Asuransi
Insurance Volume

Trade Finance



Rp21,55 triliun
trillion

Volume Trade Finance

Jasa Konsultasi Advisory Services

484 Eksportir Baru
New Exporters

928 Desa Devisa Baru
Go Export Village

Kinerja Keberlanjutan | Sustainability Performance



LPEI bagi Lingkungan Hidup

Indonesia Eximbank for the Environment

Penyaluran pembiayaan sektor UMKM berorientasi ekspor

Financing of the export-
oriented MSME sector



Rp11,55
triliun
trillion

Intensitas Emisi Konsumsi Listrik

Emission Intensity of
Electricity Consumption



Rp0,002
Ton CO₂eq/M2



LPEI bagi Sosial Masyarakat

Indonesia Eximbank for Social Society

Program CSR

CSR Program



Rp5,50
Miliar
Billion

Program TJSL yang Mendukung

Pencapaian Tujuan SDGs

CSR Programs that Support the
Achievement of SDG Goals



Rp585,45
Miliar
Billion

Program TJSL yang Mendukung Kerangka ESG

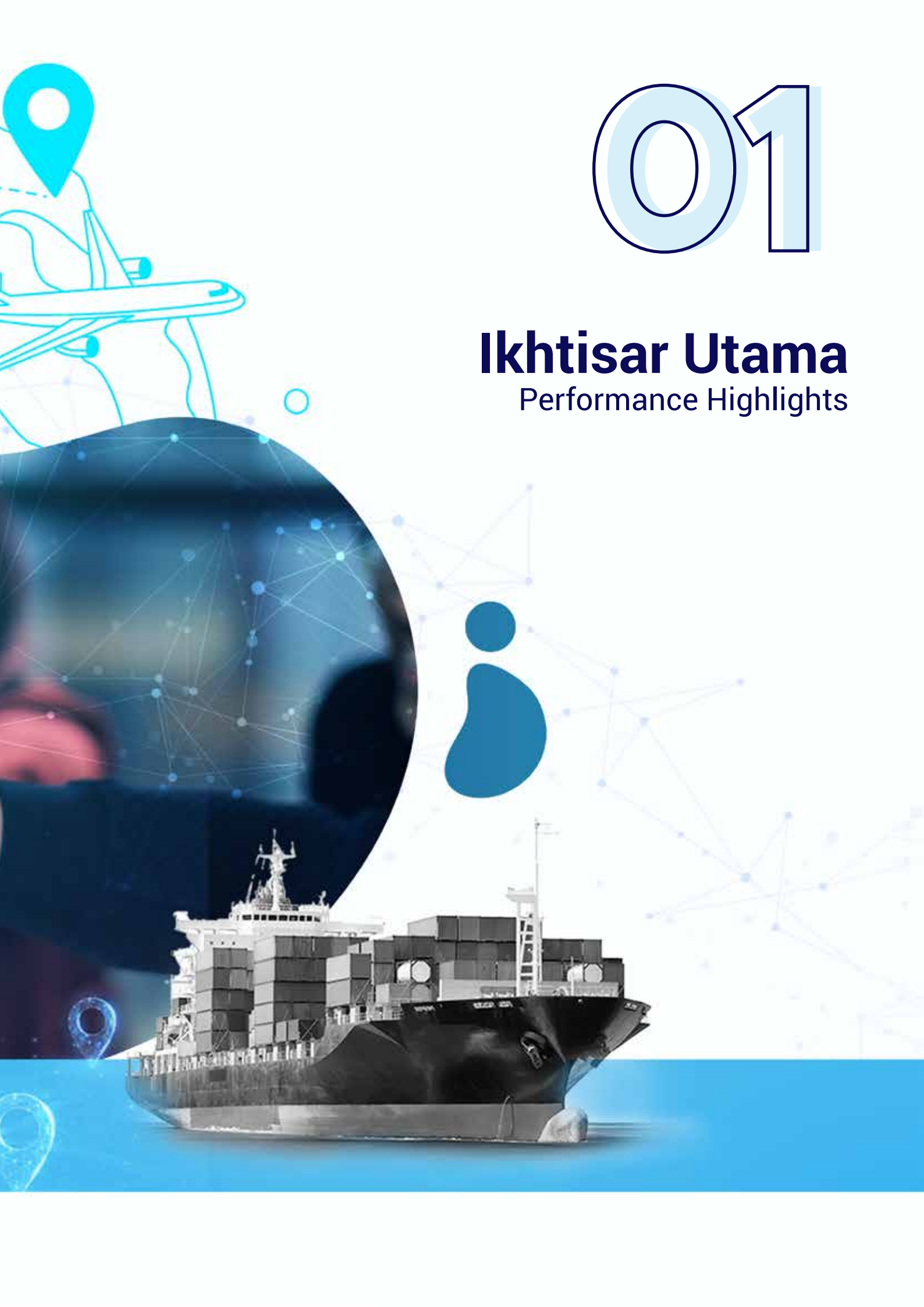
CSR Programs that Support
the ESG Framework



Rp4,467
Miliar
Billion







01

Ikhtisar Utama Performance Highlights



Ikhtisar Data Keuangan Penting

Key Financial Highlights

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Consolidated Statement of Financial Position

Tabel Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Financial Position

(Dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
(In Rp million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020
Total Aset Total Assets	49.112.997	51.349.279	83.815.752	89.040.921	92.084.560
Portofolio Tresuri - Bruto Treasury Portfolio - Gross	3.763.151	8.957.378	14.711.957	17.877.638	14.110.026
Portofolio Pembiayaan dan Piutang - Bruto Financing and Receivables Portfolio - Gross	56.108.451	73.823.211	83.636.003	83.963.162	90.408.073
Tagihan Derivatif Derivatives Receivables	50.674	85	-	6	-
Piutang Asuransi dan Penjaminan - Bruto Insurance Receivables and Guarantee - Gross	6.637	75.059	288.989	285.656	34.631
Aset Reasuransi Reinsurance Assets	4.056	2.933	3.544	2.615	1.284
Tagihan Akseptasi - Bruto Acceptance Receivables - Gross	138.647	153.852	151.161	460.540	562.727
Total Liabilitas Total Liabilities	35.120.367	42.587.812	56.947.507	58.920.543	67.288.011
Efek-Efek Utang yang Diterbitkan Debt Securities Issued	8.140.064	21.981.313	25.311.700	27.743.500	36.524.500
Pinjaman yang Diterima Fund Borrowings	24.863.560	18.352.943	29.297.065	28.799.571	28.599.773
Utang Asuransi Insurance Payables	2.692	5.534	6.306	4.055	2.563
Utang Penjaminan Guarantee Payables	1.738	18.427	61.715	62.363	560
Liabilitas Asuransi Insurance Liabilities	9.507	6.672	7.961	6.390	3.230
Total Ekuitas Total Equity	13.992.630	8.761.467	26.868.245	30.120.378	24.796.549

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Tabel Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
 Consolidated Profit or Loss and Other Comprehensive Income

(Dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
 (In Rp million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020
Pendapatan Bunga Interest Income	3.383.816	4.052.097	3.711.851	4.263.520	5.102.881
Beban Bunga Interest Expense	(2.656.651)	(3.128.893)	(2.936.114)	(3.057.215)	(4.262.993)
Pendapatan Bunga Bersih Net Interest Income	727.165	923.204	775.737	1.206.305	839.888
Pendapatan Operasional - Neto Operating Income - Net	980.174	1.182.281	961.951	1.421.725	1.157.483
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan Provision for Impairment Losses on Financial Assets Balance	(277.774)	(16.932.394)	(2.107.596)	(257.752)	(423.080)
Penyisihan Kerugian Estimasi Klaim Penjaminan Allowance for Impairment Losses on Estimated Guarantee Claim	1.185	2.994	(652)	(114)	(1.946)
Beban Operasional Operating Expenses	(685.089)	(794.033)	(762.488)	(758.763)	(676.887)
Pendapatan (Beban) Non Operasional - Neto Non-Operating Income (Expense) - Net	63.420	10.488	16.420	3.943	6.152
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Profit (Loss) Before Tax	81.916	(16.530.664)	(1.892.365)	409.039	61.722
Laba (Rugi) Setelah Pajak Profit (Loss) After Tax	232.525	(18.114.327)	(3.114.554)	387.396	288.388
(Rugi) Penghasilan Komprehensif Lain – Neto Other Comprehensive (Loss) Income - Net	(1.362)	7.549	(26.784)	14.890	109.837
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Comprehensive Income (Loss)	231.163	(18.106.778)	(3.141.338)	402.286	398.225
KOMITMEN & KONTINJENSI COMMITMENTS & CONTINGENCIES					
Irrevocable L/C Masih Berjalan Outstanding Irrevocable L/C	485.527	125.656	395.071	379.096	164.415
Penjaminan yang Diberikan Guarantees Facility	8,146,399	10.895.141	12.428.806	13.136.226	9.908.992
Asuransi Ekspor Export Insurance	2.088.935	2.039.586	1.103.998	480.622	843.895

Rasio Keuangan

Financial Ratio

Tabel Rasio Keuangan

Financial Ratio

(Dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)
(In percentage, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020
Kecukupan Modal (CAR) - Risiko Kredit Credit Risk - Capital Adequacy (CAR)	35,05	18,43	32,93	38,19	29,47
Kecukupan Modal (CAR) - Risiko Kredit, Pasar, dan Operasional Credit, Market, and Operational Risk - Capital Adequacy (CAR)	34,35	17,88	32,74	37,19	28,07
NPF Bruto NPF Gross	29,07	43,48	26,61	21,03	26,08
NPF Neto NPF Net	4,52	4,54	10,39	7,12	11,49
Pengembalian atas Aktiva (ROA) Return on Assets (ROA)	0,17	(22,74)	(2,19)	0,46	0,06
Pengembalian atas Ekuitas (ROE) Return on Equity (ROE)	2,51	(71,71)	(10,49)	1,54	1,41
Pendapatan Bunga Bersih Terhadap Aktiva Produktif (NIM) Net Interest Margin (NIM)	0,86	1,04	0,78	1,17	0,77
Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Operating Expenses to Operating Income (BOPO)	99,85	483,24	148,57	90,87	98,86
Posisi Devisa Neto Net Open Position	0,40	12,09	1,74	7,07	16,96
Kewajiban terhadap Ekuitas (kali) Debt to Equity (times)	2,51	4,86	2,12	1,96	2,71
Kewajiban terhadap Aset (kali) Debt to Assets (times)	0,72	0,83	0,68	0,66	0,73
Laba bersih terhadap pendapatan (margin laba bersih) Net Profit Margin	0,07	(4,47)	(0,84)	0,09	0,06

Laporan Arus Kas Konsolidasian

Consolidated Statement of Cash Flow

Tabel Arus Kas Konsolidasian

Consolidated Cash Flow

(Dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
(In Rp million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020
Arus Kas dari atau (untuk) Aktivitas Operasi Cash Flow from or (for) Operating Activities	2.983.234	8.547.359	(371.945)	7.466.129	7.121.718
Arus Kas dari atau (untuk) Aktivitas Investasi Cash Flow from or (for) Investing Activities	188.283	494.494	(1.459.883)	(48.527)	35.135
Arus Kas dari atau (untuk) Aktivitas Pendanaan Cash Flow from or (for) Financing Activities	(8.109.975)	(14.267.016)	(2.708.648)	(3.663.516)	(11.579.733)
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	(4.933.593)	(5.218.335)	(4.575.778)	3.778.801	(4.351.991)
Kas dan Setara Kas awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	7.523.540	12.741.875	17.317.653	13.538.852	17.890.843
Kas dan Setara Kas akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of the Year	2.589.947	7.523.540	12.741.875	17.317.653	13.538.852

Informasi Saham

Information on Stock

Ikhtisar Kinerja Saham

LPEI berfungsi sebagai SMV (*Special Mission Vehicle*) di bawah Kementerian Keuangan RI, di mana berdasarkan UU No. 2 Tahun 2009, seluruh modal LPEI 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan tidak terbagi atas saham. Dengan status tersebut, laporan ini tidak menyajikan informasi mengenai pergerakan harga saham, volume transaksi, maupun nilai kapitalisasi pasar terkait saham LPEI.

Aksi Korporasi

LPEI tidak melakukan aktivitas pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), atau penerbitan maupun distribusi dividen saham dan saham bonus. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi terkait yang dapat disajikan dalam laporan tahunan ini.

Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*)

LPEI juga tidak melakukan aktivitas pengurangan nilai nominal saham, penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*), maupun penghapusan pencatatan saham (*delisting*). Sehingga tidak terdapat informasi terkait yang dapat disajikan dalam laporan tahunan ini.

Stock Performance Highlights

LPEI functions as an SMV (*Special Mission Vehicle*) under the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, where, based on Act No. 2 of 2009, 100% of LPEI's capital is owned by the Government of the Republic of Indonesia and is not divided into shares. With this status, this report does not present information regarding stock price movements, transaction volume, or market capitalization values related to LPEI shares.

Corporate Actions

LPEI did not carry out stock splits, reverse stock mergers, or the issuance or distribution of stock dividends and bonus shares. Therefore, there is no related information that can be presented in this annual report.

Suspension and/or Delisting of Shares

LPEI also did not carry out activities to reduce the nominal value of shares, temporarily suspend stock trading (*suspension*), or delist shares. Therefore, there is no related information that can be presented in this annual report.

Informasi Mengenai Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi yang Masih Beredar

Information On Outstanding Bonds, Sukuk Or Convertible Bonds

Daftar Obligasi/Sukuk/Obligasi Konversi yang Masih Beredar (*Outstanding*)

Hingga 31 Desember 2024, LPEI masih memiliki obligasi korporasi dan sukuk yang belum mencapai jatuh tempo, dengan rincian sebagai berikut:

List of Outstanding Bonds/Sukuk/Convertible Bonds

As of December 31, 2024, LPEI still has corporate bonds and sukuk that have not matured, with the following details:

Tabel Obligasi Korporasi Indonesia Eximbank

Indonesia Eximbank Corporate Bonds

No.	Nama Efek Name of Securities	Seri Series	Jumlah yang <i>Outstanding</i> per 31 Desember 2024 (Rp miliar) Total Outstanding as of December 31, 2024 (Rp billion)	Tingkat Bunga per Tahun (%) Annual Interest Rate (%)	Tanggal Penerbitan Issuance Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Bursa Exchange	Peringkat Rating
1.	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV Tahun 2017 Indonesia Eximbank Shelf Bonds III Phase IV of 2017	E	1.266,00	9,40	23 Februari 2017 February 23, 2017	23 Februari 2027 February 23, 2027	PT Bursa Efek Indonesia	IdAAA (Pefindo)
2.	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI Tahun 2018 Indonesia Eximbank Shelf Bonds III Phase VI of 2018	C	206,00	6,90	14 Februari 2018 February 14, 2018	14 Februari 2025 February 14, 2025	PT Bursa Efek Indonesia	IdAAA (Pefindo)
3.	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I Tahun 2018 Indonesia Eximbank Shelf Bonds IV Phase I of 2018	C	1.756,00	8,30	6 Juni 2018 June 6, 2018	6 Juni 2025 June 6, 2025	PT Bursa Efek Indonesia	IdAAA (Pefindo)
4.	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II Tahun 2018 Indonesia Eximbank Shelf Bonds IV Phase II of 2018	D	1.324,00	8,75	05 September 2018 September 05, 2018	05 September 2025 September 05, 2025	PT Bursa Efek Indonesia	IdAAA (Pefindo)
5.	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III Tahun 2018 Indonesia Eximbank Shelf Bonds IV Phase III of 2018	D	380,00	9,75	08 November 2018 November 08, 2018	08 November 2025 November 08, 2025	PT Bursa Efek Indonesia	IdAAA (Pefindo)
6.	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Bonds IV Phase IV of 2019	D	278,00	9,25	23 April 2019 April 23, 2019	23 April 2026 April 23, 2026	PT Bursa Efek Indonesia	IdAAA (Pefindo)
		E	349,00	9,50	23 April 2019 April 23, 2019	23 April 2029 April 23, 2029	PT Bursa Efek Indonesia	IdAAA (Pefindo)
		F	625,00	9,80	23 April 2019 April 23, 2019	23 April 2034 April 23, 2034	PT Bursa Efek Indonesia	IdAAA (Pefindo)
7.	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Bonds IV Phase V of 2019	D	737,00	9,20	09 Juli 2019 July 09, 2019	09 Juli 2026 July 09, 2026	PT Bursa Efek Indonesia	IdAAA (Pefindo)

Tabel Obligasi Korporasi Indonesia Eximbank

Indonesia Eximbank Corporate Bonds

No.	Nama Efek Name of Securities	Seri Series	Jumlah yang Outstanding per 31 Desember 2024 (Rp miliar) Total Outstanding as of December 31, 2024 (Rp billion)	Tingkat Bunga per Tahun (%) Annual Interest Rate (%)	Tanggal Penerbitan Issuance Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Bursa Exchange	Peringkat Rating
8.	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Bonds IV Phase VI of 2019	D	714,50	8,50	03 September 2019 September 03, 2019	03 September 2026 September 03, 2026	PT Bursa Efek Indonesia	IdAAA (Pefindo)
9.	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Bonds IV Phase VII of 2019	D	112,00	8,50	29 Oktober 2019 October 29, 2019	29 Oktober 2026 October 29, 2026	PT Bursa Efek Indonesia	IdAAA (Pefindo)
		E	219,75	8,75	29 Oktober 2019 October 29, 2019	29 Oktober 2029 October 29, 2029	PT Bursa Efek Indonesia	IdAAA (Pefindo)
10.	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Bonds IV Phase VII of 2019	C	22,50	8,20	06 Desember 2019 December 06, 2019	06 Desember 2026 December 06, 2026	PT Bursa Efek Indonesia	IdAAA (Pefindo)
Jumlah Obligasi Total Bonds			7.989,75					

Tabel Sukuk Indonesia Eximbank

Indonesia Eximbank Sukuk

No.	Nama Efek Name of Securities	Seri Series	Jumlah yang Outstanding per 31 Desember 2024 (Rp miliar) Total Outstanding as of December 31, 2024 (Rp billion)	Tingkat Bunga per Tahun (%) Annual Interest Rate (%)	Tanggal Penerbitan Issuance Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Bursa Exchange	Peringkat Rating
1.	Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank I Tahap II Tahun 2018 Indonesia Eximbank Sukuk Mudharabah I Phase II of 2018	D	155	9,75	08 November 2018 November 08, 2018	08 November 2025 November 08, 2025	PT Bursa Efek Indonesia	IdAAA (Pefindo)
Jumlah Obligasi Total Bonds			155					

Medium Term Notes

No	Nama Efek Securities Name	Jumlah yang Outstanding per 31 Desember 2024 (Rp Miliar) Total Outstanding as of 31 December 2024 (Rp billion)	Tingkat Bunga per Tahun Interest Rate Per Annum	Tanggal Penerbitan Issued Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Bursa Exchange	Peringkat Rating
1	Euro Medium Term Note (EMTN) Programme IEB – 2017 (USD500,000,000)	-	3,875%	7 April 2017 April 7, 2017	6 April 2024 (sudah lunas) April 6, 2024 (paid in full)	Singapore Exchange Securities Trading Limited	BBB (Fitch) Baa2 (Moody's)



Peringkat Lembaga

Institution Rating

Tabel Peringkat LPEI untuk periode 2024

LPEI Rating Table for the period 2024

No.	Lembaga Pemeringkat Rating Agency	Peringkat Rating	Outlook
1.	Moody's	Baa2	Stable
2.	Fitch	BBB	Stable
3.	Pefindo	idAAA	Stable



Peristiwa Penting

Event Highlights



Januari

January



17 Januari 2024 | January 17, 2024

Peresmian Desa Devisa Exon

Inauguration of Exon Go Export Village

LPEI Bersama ExonMobil melakukan pendampingan Desa devisa Kerajinan Bojonegoro, Rotan & Kerupuk Ikan Gresik.

Jointly with ExonMobil, LPEI provided assistance to Bojonegoro Craft, Rattan & Gresik Fish Cracker of the Go Export Village.



31 Januari 2024 | January 31, 2024

Ekspor Kereta ke Selandia Baru

Train Exports to New Zealand

LPEI mendukung kereta PT INKA Multi Solusi (PT IMS) ekspor 60 unit dan 450 gerbong datar ke Selandia Baru melalui PKE alat Transportasi.

LPEI supported PT INKA Multi Solusi (PT IMS)'s train exports of 60 units and 450 flat cars to New Zealand through PKE Transportation equipment.



Maret

March



26 Maret 2024 | March 26, 2024

LPEI Goes to Campus UIN Syarif Hidayatullah

LPEI Goes to Campus UIN Syarif Hidayatullah

Seminar Nasional dengan tema "Implementasi Hukum Akad Syariah dalam Pembiayaan Ekspor" di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

National Seminar with the theme "Implementation of Sharia Contract Law in Export Financing" at UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.



April



29 April 2024 | April 29, 2024

Kerja sama LPEI dan Islamic Corporation for the Investment of Insurance and Export Credit (ICIEC)

LPEI and Islamic Corporation for the Investment of Insurance and Export Credit (ICIEC) Cooperation

Kerja sama yang mencakup penyediaan reasuransi syariah serta merupakan langkah strategis bersama untuk mendorong dukungan finansial berbasis syariah yang dapat dimanfaatkan para eksportir Indonesia.

The cooperation includes the provision of sharia reinsurance and is a strategic step together to encourage sharia-based financial support that can be utilized by Indonesian exporters.



30 April 2024 | April 30, 2024

Peresmian Desa Devisa Gula Aren Sulawesi Selatan

Inauguration of the South Sulawesi Palm Sugar Go Export Village

Melakukan pendampingan dan pelatihan kepada petani dan penderes gula aren di Maros, Sulawesi Selatan.

Providing assistance and training to palm sugar farmers and tappers in Maros, South Sulawesi.



Mei

May



2 Mei 2024 | May 2, 2024

Press Tour SMV BLU Kemenkeu RI

Press Tour SMV BLU Kemenkeu RI

Kolaborasi SMV BLU #KemenkeuSatu untuk mendorong Ekonomi Desa melalui peran APBN Dorong Perekonomian di Daerah Gunung Kidul, Yogyakarta.

SMV BLU #KemenkeuSatu Collaboration to Boost the Village's Economy through the role of APBN to Boost the Economy in Gunung Kidul, Yogyakarta.



27 Mei 2024 | May 27, 2024

LPEI raih penghargaan Best Sukuk Syariah

LPEI Received Best Sukuk Syariah award

LPEI mendapatkan penghargaan kategori Best Sukuk Syariah pada malam apresiasi ekonomi syariah yang digelar B Universe Media Group.

LPEI won the Best Sukuk Syariah category award at the sharia economic appreciation night held by B Universe Media Group.



Juni

June



1 Juni 2024 | June 1, 2024

Forum #BeraniMendunia

#BeraniMendunia Forum

Penyelenggaraan Forum #BeraniMendunia sebagai wadah diskusi dan kolaborasi untuk pelaku UKM berorientasi ekspor.

The #BeraniMendunia Forum is held as a forum for discussion and collaboration for export-oriented SMEs.



12-24 Juni 2024 | June 12-24, 2024

Pameran Global Sourcing Expo (GSE) Sydney

Global Sourcing Expo (GSE) Sydney Exhibition

LPEI berpartisipasi dan mendukung pelaku usaha Indonesia di Pameran Global Sourcing Expo (GSE) Sydney 2024.

LPEI participated and supported Indonesian business actors in the Global Sourcing Expo (GSE) Sydney 2024 Exhibition.



26-30 Juni 2024 | June 26-30, 2024

Pameran Consumer Fair

Consumer Fair Exhibition

Dukung Ekspor Indonesia, LPEI ikut serta dalam kegiatan Pameran Consumer Fair – Indonesia Halal Expo 2024 di Brunei Darussalam.

Supporting Indonesian Exports, LPEI participated in the Consumer Fair Exhibition - Indonesia Halal Expo 2024 in Brunei Darussalam.

**Juli**

July



17 Juli 2024 | July 17, 2024

Economic Outlook 2024
 Economic Outlook 2024

Bersama Moody's Analytics LPEI menyelenggarakan seminar dengan tema *Economy Outlook 2024: Optimism Amidst Uncertainty* di Jakarta. Together with Moody's Analytics, LPEI held a seminar with the theme Economy Outlook 2024: Optimism Amidst Uncertainty in Jakarta.



25 Juli 2024 | July 25, 2024

Kemenkeu Menyapa UI
 Ministry of Finance Greeted UI

SMV Kemenkeu berkolaborasi menyelenggarakan Kemenkeu Menyapa di Universitas Indonesia dengan tujuan memberi informasi dan edukasi kepada kalangan akademisi dan masyarakat luar tentang Kemenkeu dan SMV. SMV Ministry of Finance collaborated to hold Kemenkeu Menyapa at the University of Indonesia with the aim of providing information and education to academics and the wider community about the Ministry of Finance and SMV.

**September**5, 11 & 20 September 2024
September 5, 11 & 20, 2024
IEB Goes to Campus UI, Unpad, dan UGM
 IEB Goes to Campus UI, Unpad, and UGM

IEB Goes to Campus memperluas wawasan mahasiswa tentang ekonomi dan bisnis serta membangun jejaring melalui kunjungan ke Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (Unpad), dan Universitas Gadjah Mada (UGM). IEB Goes to Campus broadens students' insights into economics and business and builds networks through visits to the University of Indonesia (UI), Padjadjaran University (Unpad), and Gadjah Mada University (UGM).

**Oktober**

October



4 Oktober 2024 | October 4, 2024

Kerja sama dengan UKEF
 Cooperation with UKEF

LPEI menjalin kerja sama strategis dengan *United Kingdom Export Finance (UKEF)*, lembaga kredit ekspor pemerintah Inggris. LPEI has established a strategic partnership with United Kingdom Export Finance (UKEF), the UK government's export credit agency.



9-12 Oktober 2024 | October 9-12, 2024

Trade Expo Indonesia (TEI) 2024
 Trade Expo Indonesia (TEI) 2024

LPEI berpartisipasi dalam Pameran Internasional Trade Expo Indonesia (TEI) 2024. LPEI participated in the Trade Expo Indonesia (TEI) 2024 International Exhibition.



Oktober

October



21-24 Oktober 2024 | October 21-24, 2024

Ghana Exim Bank Study Visit Indonesia

Ghana Exim Bank Study Visit Indonesia

LPEI menerima kunjungan delegasi Ghana Export-Import Bank untuk mempelajari operasional, inovasi, dan strategi LPEI dalam membangun ekosistem ekspor nasional yang berkelanjutan

LPEI received a visit from the Ghana Export-Import Bank delegation to study LPEI's operations, innovations, and strategies in building a sustainable national export ecosystem



31 Oktober 2024 | October 31, 2024

Stellar Award Workplace 2024

Stellar Award Workplace 2024

LPEI mendapat dua penghargaan untuk kategori Stellar Workplace Recognition in Commitment & Stellar Workplace Recognition in Satisfaction Award 2024.

LPEI received two awards for the categories of Stellar Workplace Recognition in Commitment & Stellar Workplace Recognition in Satisfaction Award 2024.



November



22 November 2024 | November 22, 2024

Kunjungan Pemerintah Tajikistan

Visit of Tajikistan Government

Pertemuan dengan Pemerintah Tajikistan, H.E. Mr. Sherali Kabir, Minister of Industry and New Technologies, H.E. Mr. Sulton Rahimzoda, Chairman of the State Committee in Investment and State Property Management, dan para delegasi.

Meeting with Tajikistan Government, H.E. Mr. Sherali Kabir, Minister of Industry and New Technologies, H.E. Mr. Sulton Rahimzoda, Chairman of the State Committee in Investment and State Property Management, and delegates.



Desember

December



3 Desember 2024 | December 3, 2024

Kerja sama dengan PT KAI

Cooperation with PT KAI

Penandatanganan Perjanjian kerja sama antara LPEI dan PT KAI untuk mendukung pengangkutan Batubara.

Signing of Cooperation Agreement between LPEI and PT KAI to support coal transportation.



9 Desember 2024 | December 9, 2024

Sinergi LPEI dan PT Bio Farma (Persero)

Synergy between LPEI and PT Bio Farma (Persero)

Dukungan LPEI kepada PT Bio Farma (Persero) untuk mendorong daya saing industri farmasi Indonesia

LPEI's support to PT Bio Farma (Persero) to encourage the competitiveness of the Indonesian pharmaceutical industry

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank





02

Laporan Manajemen

Management Report



Sukatmo Padmosukarso

Plt. Ketua Dewan Direktur merangkap Direktutr Eksekutif
Acting Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director

Laporan Dewan Direktur

Board of Directors Report

Para Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI" atau "Lembaga") dengan penuh rasa syukur menyampaikan Laporan Tahunan Tahun 2024 ini sebagai wujud komitmen kami dalam menjalankan tugas pengawasan sesuai dengan Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur.

Menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks, LPEI berhasil menunjukkan ketangguhan dalam menjalankan perannya sebagai pendukung kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional melalui skema pembiayaan ekspor nasional. Bersama dengan ini, perkenankan kami untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur, yang mencakup pengawasan operasional dan implementasi kebijakan strategis yang dijalankan oleh Direktur Eksekutif dan jajaran Direktur Pelaksana untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.

Pandangan Terhadap Perkembangan Makroekonomi dan Kinerja Ekspor Nasional serta Posisi LPEI dalam Industri

Dewan Direktur memahami bahwa dalam menjalankan perannya di sepanjang tahun 2024 LPEI dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal, termasuk perkembangan makroekonomi global dan domestik yang berkaitan dengan kinerja ekspor Indonesia.

Perekonomian global diwarnai ketidakpastian yang tetap tinggi didorong oleh perubahan dinamika geopolitik yang berlangsung dengan cepat. Sejumlah peristiwa geopolitik, seperti perang di Ukraina, serangan Israel ke Palestina yang meluas ke Lebanon hingga Iran. Di Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang dikenal dengan kebijakan *America First* kembali terpilih sebagai Presiden AS untuk masa jabatan kedua (2025 – 2029) menambah ketidakpastian dalam perdagangan global.

Perkembangan tersebut berdampak pada pertumbuhan ekonomi global melalui divergensi pola pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut. AS relatif kuat sementara Uni Eropa cenderung mengalami stagnasi. Di kelompok negara *emerging* dan berkembang, pertumbuhan ekonomi Tiongkok melambat dipicu sektor *real estate* yang melanjutkan pelemahan dan *consumer confidence* yang rendah. Sedangkan di India, melambatnya pertumbuhan ekonomi disebabkan telah memudarnya *pent – up demand* yang terakumulasi selama pandemi.

Dear Respected Stakeholders,

With full gratitude, the Board of Directors of Indonesia Eximbank (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia or LPEI) is pleased to present the 2024 Annual Report as a reflection of our commitment in carrying out our supervisory duties in accordance with the Board of Directors' Work Guidelines.

Amid increasingly complex challenges, Indonesia Eximbank has demonstrated resilience in fulfilling its role as a policy support institution for the Government, aiming to drive the national export program through national export financing schemes. In this regard, we are honored to present this report on the execution of Board of Directors' duties and responsibilities, covering the supervision on operational and strategic policies implementation carried out by the Executive Director and the Managing Director for the financial year ending December 31, 2024.

Views on Macroeconomic Developments, National Export Performance, and Indonesia Eximbank's Position in the Industry

Board of Directors fully understands that in carrying out its role Throughout 2024, Indonesia Eximbank was influenced by many external factors, including global and domestic macroeconomic developments related to Indonesia's export performance.

The global economy was marked by continued high uncertainty, driven by rapidly changing geopolitical dynamics. Several geopolitical events occurred, such as the war in Ukraine, Israel's attacks on Palestine expanding to Lebanon and Iran. In the United States (US), Donald Trump, known for his "America First" policy, was re-elected as US President for a second term (2025–2029), adding further uncertainty to global trade.

These developments impacted global economic growth through the continued divergence of economic growth patterns. The US remained relatively strong, while the European Union tended toward stagnation. In emerging and developing countries, China's economic growth slowed down due to continued weakness in the real estate sector and low consumer confidence. Meanwhile in India, the economic slowdown was due to the fading of the pent-up demand accumulated during the pandemic.

Inflasi yang mulai mengarah pada sasaran di negara maju mendorong pemangkasan suku bunga di AS (The Fed memangkas hingga 100 basis poin) dan European Union (EU) (ECB memangkas hingga 135 basis poin) pada tahun 2024. Bank Indonesia (BI) sendiri sempat menaikkan BI Rate sebesar 25 bps dari 6,00% menjadi 6,25% pada bulan April 2024, seiring dengan dinamika pasar keuangan global, terutama dipengaruhi sinyal Fed. Saat itu, Fed Officials memberikan sinyal akan menunda pemangkasan suku bunga dari rencana awal, sehingga mendorong penguatan Dolar AS terhadap mata uang lainnya, termasuk Rupiah. Selanjutnya, BI kembali memangkas BI Rate sebesar 25 bps dari 6,25% menjadi 6,00% pada bulan September 2024 dan menahannya di level yang sama hingga akhir tahun 2024.

BI menetapkan kebijakan moneter untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak makin tingginya ketidakpastian perekonomian global akibat arah kebijakan AS dan eskalasi ketegangan geopolitik di berbagai wilayah. Nilai tukar Rupiah yang pada akhir tahun 2023 berada pada sekitar Rp15.500 per dolar AS, melemah hingga sekitar Rp16.102 per dolar AS pada akhir Desember 2024.

Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, IMF mengestimasi ekonomi dunia tahun 2024 tumbuh 3,2% *year-on-year* (yoy), melambat dari tahun sebelumnya (2023: 3,3% yoy). Di sisi perdagangan internasional, pertumbuhan volume perdagangan tahun 2024 diestimasi meningkat menjadi 3,4% yoy dibandingkan tahun sebelumnya (2023: 0,7% yoy).

Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terjaga di tengah potensi dampak rambatan global. Secara *full year* (2024), aktivitas ekonomi Indonesia tumbuh 5,03% yoy terutama didorong oleh permintaan domestik dan investasi yang tetap baik, khususnya investasi bangunan seiring penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Nilai ekspor Indonesia tahun 2024 mencapai USD264,70 miliar atau meningkat sebesar 2,29% yoy dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya (2023: USD258,77 miliar). Perkembangan tersebut didorong pertumbuhan ekspor nonmigas yang relatif tinggi seiring meningkatnya *demand* dari mitra dagang terbesar, seperti AS, India, Uni Eropa, Korea Selatan dan Thailand.

Dari sisi jenis produk, peningkatan ekspor utamanya ditopang oleh kenaikan ekspor: (i) Mesin dan Perlengkapan Elektrik, (ii) Logam Mulia dan Perhiasan/Permata, (iii) Nikel dan Barang Daripadanya, (iv) Alas Kaki, (v) Mesin dan Peralatan Mekanis dan (v) Berbagai Produk Kimia.

Inflation, which began to move toward target levels in developed countries, has prompted interest rate cuts in the US (The Fed cut by up to 100 basis points) and the European Union (ECB cut by up to 135 basis points) in 2024. Bank Indonesia (BI) itself raised the BI Rate by 25 basis points from 6.00% to 6.25% in April 2024, in line with global financial market dynamics, particularly influenced by signals from the Fed. At that time, Fed officials indicated a delay in rate cuts from the initial plan, which led to the strengthening of the US Dollar against other currencies, including the Rupiah. Subsequently, BI cut the BI Rate by 25 basis points from 6.25% back to 6.00% in September 2024 and held it steady at that level until the end of 2024.

BI adopted a monetary policy aimed at strengthening Rupiah exchange rate stability in response to rising global economic uncertainty caused by US policy direction and escalating geopolitical tensions in various regions. The Rupiah exchange rate, which stood at around Rp15,500 per US dollar at the end of 2023, weakened to around Rp16,102 per US dollar by the end of December 2024.

Taking these dynamics into account, the IMF estimated global economic growth in 2024 at 3.2% year-on-year (yoy), slowing from the previous year (2023: 3.3% yoy). In terms of international trade, the volume of global trade in 2024 was estimated to grow by 3.4% yoy, compared to 0.7% yoy in the previous year (2023).

Domestically, Indonesia's economic growth is still maintained amid the potential impact of the global slowdown. By full year (2024), Indonesia's economic activity grew by 5.03% yoy, mainly driven by domestic demand and investment that remains good, especially building investment in line with the completion of various National Strategic Projects (PSN).

Indonesia's export value in 2024 reached USD264.70 billion, an increase of 2.29% yoy compared to the same period in the previous year (2023: USD258.77 billion). This development was driven by export growth non-oil and gas export growth which is relatively high in line with the increasing demand from the largest trading partners, such as the US, from the largest trading partners, such as the US, India, the European Union, South Korea and Thailand. South Korea and Thailand.

In terms of product type, the increase in exports was mainly supported by the increase in exports of: (i) Electrical Machinery and Equipment, (ii) Precious Metals and Jewelry/Gems, (iii) Nickel and Goods Thereof, (iv) Footwear, (v) Machinery and Mechanical Equipment and (v) Various Chemical Products.

Pengawasan atas Perumusan serta Implementasi Strategi dan Kebijakan Lembaga

Dewan Direktur melakukan pengawasan arah dan penerapan strategi sepanjang tahun sejak awal perumusan RKAT hingga penerapan strategi dan kebijakan, hal ini dilakukan untuk memastikan LPEI tetap berada pada jalur yang tepat untuk mencapai tujuan jangka panjang di tengah kondisi yang dinamis.

Pengawasan atas perumusan dan penerapan strategi dan kebijakan Lembaga dilakukan melalui penyelenggaraan rapat secara berkala, di mana terdapat dua jenis rapat Dewan Direktur, yakni rapat untuk pengambilan keputusan kebijakan dan isu strategis, yang berfokus pada pengambilan keputusan kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembahasan isu-isu strategis LPEI, serta rapat untuk pengawasan operasional, yang difokuskan pada pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional LPEI.

Dewan Direktur telah mengadakan 32 rapat sepanjang tahun 2024. Selain itu, pengawasan dan peninjauan strategi juga dilakukan melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh Komite-komite di bawah Dewan Direktur. Penelaahan atas inisiatif-inisiatif kunci sebagai bagian dari transformasi Lembaga memberikan ruang bagi Dewan Direktur untuk memberikan umpan balik serta arahan dalam rapat-rapat yang berjalan di sepanjang tahun 2024 baik secara tatap muka, telekonferensi, atau melalui media elektronik lainnya.

Dewan Direktur menilai Direksi telah menjalankan dengan baik strategi dan kebijakan yang selama ini diterapkan dengan fokus melanjutkan tahapan *"fixing fundamental"*. Pada tahun 2024 tema strategis LPEI adalah *Rebalancing toward "Enabling Export Empowering Nation"* yang diterjemahkan ke dalam inisiatif strategi Lembaga yang terdiri dari 1) Pengembangan model bisnis baru melalui kolaborasi dengan ekosistem ekspor, 2) Penguatan Teknologi dan Infrastruktur, 3) Penguatan Organisasi untuk mendukung bisnis model baru, 4) Perbaikan Kualitas Aset, 5) Optimalisasi Pendanaan dan Likuiditas, 6) Manajemen Risiko dan GRC, serta 7) Komunikasi kepada *stakeholder*. Hingga akhir tahun 2024, kami melihat inisiatif tersebut mampu menjawab tantangan dan kebutuhan Lembaga dalam mencapai tujuan.

Penilaian terhadap Kinerja Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana Mengenai Pengelolaan Lembaga Tahun 2024

Direksi menilai bahwa Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) telah menunjukkan ketangkasan dalam mengelola Lembaga secara adaptif di tengah tantangan global dan domestik yang memengaruhi kinerja ekspor nasional. Meskipun terjadi turbulensi kinerja akibat berbagai faktor internal dan eksternal,

Supervision on the Formulation and Implementation of the Corporate Strategies and Policies

Board of Directors conducts oversight on the the direction and implementation of strategies Throughout the year, starting from the formulation of RKAT to the implementation of strategies and policies, which is done to ensure that Indonesia Eximbank remains on the right track to achieve its long-term goals amidst dynamic conditions.

Oversight on the formulation and implementation of the Institution's strategies and policies is carried out through regular meetings. There are two types of Board of Directors meetings, namely decision-making for policies and strategic issues meeting, which focus on making decisions regarding policy, evaluating policy implementation, and discussing Indonesia Eximbank's strategic issues, and operational supervision meeting, which focus on monitoring and supervising Indonesia Eximbank's operational activities.

Board of Directors held 32 meetings Throughout 2024. In addition, oversight and review of strategies are also carried out through reports submitted by the Committees under Board of Directors. The review of key initiatives as part of the Institution's transformation provides space for Board of Directors to give feedback and directives in meetings Throughout 2024, either face-to-face, teleconference, or through other electronic media.

Board of Directors assesses that the Director has effectively implemented the strategies and policies that have been adopted, with a focus on continuing the *"fixing fundamental"* stage. In 2024, Indonesia Eximbank's strategic theme is *Rebalancing toward "Enabling Export Empowering Nation"* which is translated into the Institution's strategic initiatives consisting of 1) Development of new business models through collaboration with the export ecosystem, 2) Strengthening Technology and Infrastructure, 3) Strengthening the Organization to support new business models, 4) Improvement of Asset Quality, 5) Optimization of Funding and Liquidity, 6) Risk Management and GRC, and 7) Communication to stakeholders. Until the end of 2024, we observed that these initiatives were able to address the challenges and needs of the Institution in achieving its objectives.

Assessment on the Performance of Executive Director and Managing Director in Managing the Corporate in 2024

Board of Directors assesses that the Executive Director and Managing Director of Indonesia Eximbank have shown agility in managing the Institution adaptively amid global and domestic challenges affecting national export performance. Despite performance turbulence due to various internal and external factors, Indonesia Eximbank's leadership remains



kepemimpinan LPEI tetap berfokus pada upaya menjaga stabilitas dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko yang *prudent*. Berbagai inisiatif seperti penyesuaian strategi bisnis telah dilakukan sebagai langkah proaktif dalam memitigasi dampak eksternal yang signifikan.

Selain itu, Direktur Pelaksana juga berhasil mengarahkan LPEI untuk memperkuat fondasi operasional demi meningkatkan ketahanan Lembaga dalam menghadapi setiap tantangan, sehingga memastikan keberlanjutan pertumbuhan bisnis dan menciptakan efisiensi proses yang mendorong kinerja jangka panjang. Upaya memperluas dukungan kepada pelaku UMKM berorientasi ekspor dan program pembiayaan yang kompetitif tetap dijalani, menunjukkan komitmen LPEI dalam mendorong perekonomian bangsa. Dibekali dengan strategi pemulihan yang solid dan kepemimpinan yang resilien, LPEI diposisikan untuk bangkit lebih kuat dan siap memanfaatkan peluang pertumbuhan ekspor di tahun-tahun mendatang.

Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana

Tahun 2025 masih belum lepas dari isu geofragmentasi, pemerintahan baru pasca Pemilu 2024 di banyak negara berpotensi memiliki preferensi kebijakan fiskal dan kebijakan perdagangan yang berbeda dari pemerintahan sebelumnya. Namun masih terdapat peluang peningkatan nilai ekspor dari komoditas yang berpeluang didorong oleh kenaikan harga, seperti emas sebagai *safe haven asset* di tengah ketidakpastian global dan minyak sawit yang prospek produksinya terbatas dan tingginya kebutuhan biodiesel di dalam negeri.

Momentum pertumbuhan ekspor dalam jangka pendek di awal tahun 2025, berpotensi diuntungkan dari *front-loading* permintaan AS yang meningkat karena pelaku usaha di AS mengantisipasi kebijakan tarif Trump atas produk impor dari negara lain. Namun, potensi pelemahan dari Tiongkok karena kondisi di dalam negeri dan perang dagang juga dapat menyebabkan permintaan yang lebih lemah dari Tiongkok untuk barang-barang asal Indonesia.

Peluang baru bagi ekspor Indonesia ke depannya sangat bergantung dari bagaimana perkembangan kebijakan secara global di berbagai negara tujuan ekspor. Namun, salah satu hal yang dapat diusahakan adalah upaya mendiversifikasi tujuan ekspor untuk memperluas pasar dan mengurangi ketergantungan pada satu atau beberapa negara, sehingga dapat meningkatkan stabilitas ekonomi. Sebagai lembaga yang memiliki mandat untuk mendorong pertumbuhan ekspor nasional dan membantu eksportir dalam mengembangkan kapasitas usahanya, LPEI melihat ini sebagai peluang guna mendukung eksportir dalam memperluas pasarnya.

focused on maintaining stability by prioritizing the principles of cautiousness and prudent risk management. Various initiatives such as business strategy adjustments have been carried out as a proactive step in mitigating significant external impacts.

In addition, the Managing Director has also successfully directed Indonesia Eximbank to strengthen its operational foundations in order to improve the institution's resilience in facing every challenge, thus ensuring the sustainability of business growth and creating process efficiencies that drive long-term performance. Efforts to expand support to export-oriented MSME players and competitive financing programs continue, demonstrating Indonesia Eximbank's commitment to boosting the nation's economy. Equipped with a solid recovery strategy and resilient leadership, Indonesia Eximbank is positioned to emerge stronger and ready to take advantage of export growth opportunities in the years to come.

Views on Business Outlook Formulated by Executive Director and Managing Director

The year 2025 will still be marked by geo-fragmentation issues, with newly elected governments after the 2024 elections in many countries potentially favoring fiscal and trade policies different from those of previous administrations. However, there are still opportunities for increased export value from commodities driven by price increases, such as gold as a safe haven asset amid global uncertainty and palm oil, which has limited production prospects and high domestic demand for biodiesel.

Short-term export growth momentum at the beginning of 2025 may benefit from front-loading demand from the U.S., as American business players anticipate Trump's tariff policies on imported products from other countries. However, potential economic weakening in China due to domestic conditions and ongoing trade tensions may result in weaker demand from China for Indonesian products.

Future opportunities for Indonesian exports will largely depend on how global policies develop in various export destination countries. However, one key effort that can be made is to diversify export destination to expand markets and reduce dependency on one or several countries, thereby enhancing economic stability. As an institution mandated to promote national export growth and assist exporters in developing their business capacity, Indonesia Eximbank perceives this as an opportunity to support exporters in expanding their market reach.

Memandang kondisi makro ekonomi tersebut di masa mendatang, Dewan Direktur merasa LPEI perlu untuk tetap proaktif dalam mengantisipasi kemungkinan risiko yang timbul atas dinamika politik, ekonomi, dan pasar keuangan global.

Tahun 2025, LPEI melanjutkan tema strategis yang diusung pada tahun 2024, yaitu *"Rebalancing toward enabling export empowering nation"*. Tema strategis ini diturunkan ke dalam 9 (sembilan) prioritas utama yakni 1) Peningkatan Kolaborasi dengan Ekosistem Ekspor, 2) Pertumbuhan Segmen Korporasi beserta *Value Chain*, 3) Peningkatan Layanan Digital UKM, 4) Percepatan *Collection* dan Optimalisasi *Recovery*, 5) Efisiensi Biaya Operasional dan Pendanaan, 6) Penguatan *Governance, Risk Management & Compliance*, 7) Penguatan IT Infrastruktur dan *Management Information System (MIS)*, 8) Penguatan *Human Capital*, dan 9) Penguatan Komunikasi dan *Stakeholder Engagement*.

Dewan Direktur menilai prospek usaha serta arah strategi yang disusun Direksi sebagaimana yang tertuang dalam RKAT telah mempertimbangkan berbagai faktor eksternal dan asumsi-asumsi penting yang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja Lembaga pada masa mendatang, sehingga diharapkan LPEI dapat bergerak dan bertumbuh lebih baik. Dengan memaksimalkan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki, Dewan Direktur optimis LPEI akan meraih pencapaian yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Pandangan atas Penerapan Tata Kelola Lembaga

Dewan Direktur memandang bahwa sepanjang tahun 2024, Direktur Pelaksana telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) di seluruh aspek pengelolaan Lembaga. Sebagai upaya memperkuat peran strategis LPEI sebagai pendukung ekspor nasional, penerapan GCG dilakukan secara konsisten dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Direktur Eksekutif dan dibantu oleh jajaran Direktur Pelaksana, telah memastikan bahwa setiap proses pengambilan keputusan strategis dilakukan dengan memegang teguh prinsip-prinsip GCG, guna menjaga seluruh amanat yang diberikan oleh kepentingan pemangku kepentingan

Dewan Direktur juga mengapresiasi upaya Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana dalam mendorong budaya tata kelola yang berintegritas melalui penguatan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal (*internal control*) guna meningkatkan transparansi serta efisiensi operasional. Inisiatif penguatan manajemen risiko dan kepatuhan internal yang dilakukan secara intensif dinilai mampu menjaga kualitas portofolio pembiayaan dan memitigasi potensi risiko di tengah ketidakpastian pasar global. Penerapan GCG yang solid ini turut memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan dan memastikan terciptanya proses bisnis yang berkelanjutan. Dewan Direktur percaya bahwa dengan landasan tata kelola yang kuat, LPEI mampu menjalani perannya dalam mendukung pertumbuhan ekspor nasional.

Considering these future macroeconomic conditions, Board of Directors believes that Indonesia Eximbank must remain proactive in anticipating potential risks arising from global political, economic, and financial market dynamics.

In 2025, Indonesia Eximbank continues the strategic theme carried out in 2024: *"Rebalancing toward enabling export empowering nation."* This theme is translated into 9 (nine) key strategic priorities, namely 1) Enhanced collaboration with the export ecosystem, 2) Growth of the corporate segment along with its value chain, 3) Improvement of SME digital services, 4) Acceleration of collection and optimization of recovery, 5) Efficiency in operational and funding costs, 6) Strengthening Governance, Risk Management & Compliance, 7) Strengthening IT infrastructure and Management Information Systems (MIS), 8) Strengthening Human Capital, and 9) Strengthening Communication and Stakeholder Engagement.

Board of Directors considers that the business outlook and strategic direction prepared by the Directors, as outlined in the RKAT, have taken into account various external factors and key assumptions expected to influence the Institution's performance in the future. Thus, it is hoped that Indonesia Eximbank can move forward and grow to be even better. By maximizing its capacity and capabilities, Board of Directors is optimistic that Indonesia Eximbank will achieve greater accomplishments in the future.

Views on the Corporate Governance

Board of Directors is of the opinion that Throughout 2024, the Managing Director has demonstrated a strong commitment to implementing Good Corporate Governance (GCG) principles across all aspects of institutional management. As part of efforts to strengthen Indonesia Eximbank's strategic role as a national export supporter, GCG has been consistently applied by prioritizing the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. The Executive Director, supported by Managing Directors, has ensured that every strategic decision-making process is carried out by upholding the principles of Good Corporate Governance (GCG), in order to safeguard the trust entrusted by all stakeholders.

Board of Directors also appreciates the Managing Director's efforts in fostering a culture of governance with integrity by strengthening risk management and internal control systems to enhance transparency and operational efficiency. The initiative to reinforce risk management and internal compliance that is conducted intensively have effectively maintained the quality of financing portfolio and mitigated potential risks amid global market uncertainties. This robust GCG implementation has further strengthened stakeholder trust and guaranteed the sustainability of business processes. Board of Directors believes that with a strong governance foundation, Indonesia Eximbank is well-positioned to fulfill its role in supporting the national export growth.

Penilaian Kinerja Komite di bawah Dewan Direktur

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur secara keseluruhan didukung oleh kinerja optimal dari sejumlah komite di bawah Dewan Direktur. Komite-komite tersebut meliputi Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko. Masing-masing komite telah melaksanakan peran strategisnya dalam memastikan pelaksanaan tata kelola yang baik serta pengambilan keputusan yang selaras dengan visi dan misi lembaga.

Dewan Direktur menilai bahwa komite-komite tersebut telah menjalani fungsinya dengan baik, sehingga mampu memberikan dukungan strategis yang berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaksanaan tata kelola LPEI. Setiap komite telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai dengan bidang masing-masing, memastikan bahwa setiap proses bisnis, pengelolaan risiko, serta pengembangan produk dan layanan dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Perubahan Komposisi Dewan Direktur

Selama tahun 2024, LPEI mengalami perubahan dalam susunan Dewan Direktur. Berikut adalah rangkaian kronologis perubahan komposisi Dewan Direktur LPEI sepanjang tahun 2024:

Performance Assessment of Committees under Board of Directors

The execution of duties and responsibilities by the Board of Directors is fully supported by the optimal performance of several committees under the Board. These committees include the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Monitoring Committee. Each committee has carried out its strategic role in ensuring the implementation of good governance and decision-making that aligns with the institution's vision and mission.

Board of Directors assesses that the committees have performed their functions well, thus providing strategic support that influences decision making and the implementation of Indonesia Eximbank's governance. Each committee has optimally carried out its roles and responsibilities in accordance with their respective fields, ensuring that every business process, risk management, and product and service development are undertaken by prioritizing the principles of transparency, accountability, and regulatory compliance.

Changes in Board of Directors Composition

During 2024, Indonesia Eximbank underwent changes in the composition of Board of Directors. The following is a chronological series of changes in the composition of Indonesia Eximbank's Board of Directors Throughout 2024:

Periode 1 Januari – 31 Agustus 2024 Period January 1 - August 31, 2024	Periode 1 September – 23 Desember 2024 Period September 1 - December 23, 2024	Periode 24 Desember – 28 Desember 2024 Period December 24 - December 28, 2024	Periode 29 Desember – 23 Januari 2025 Period December 29 - January 23, 2025	24 Januari – 12 Februari 2025 January 24th - February 12th, 2025	13 Februari – 19 Maret 2025 February 13 - March 19, 2025	20 Maret 2025 – Saat ini March 20, 2025 - Present
Rijani Tirtoso Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of the Board Director concurrently Executive Director	Rijani Tirtoso Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of the Board Director concurrently Executive Director	Yon Arsal Plt. Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Acting. Chairman Board of Directors concurrently Executive Director	Yon Arsal Plt. Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Acting. Chairman Board of Directors concurrently Executive Director	Yon Arsal Plt. Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Acting. Chairman Board of Directors concurrently Executive Director	Yon Arsal Plt. Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Acting. Chairman Board of Directors concurrently Executive Director	Sukatmo Padmosukarso Plt. Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Acting. Chairman of the Board Director concurrently Executive Director
Suminto Anggota Dewan Direktur Member of the Board Directors	Suminto Anggota Dewan Direktur Member of the Board Directors	Suminto Anggota Dewan Direktur Member of the Board Directors	Kasan Anggota Dewan Direktur Member of the Board Directors	Kasan Anggota Dewan Direktur Member of the Board Directors	Arus Gunawan Anggota Dewan Direktur Member of the Board Directors	Yon Arsal Anggota Dewan Direktur Member of the Board Directors
Yon Arsal Anggota Dewan Direktur Member of the Board Directors	Yon Arsal Anggota Dewan Direktur Member of the Board Directors	Kasan Anggota Dewan Direktur Member of the Board Directors	Arus Gunawan Anggota Dewan Direktur Member of the Board Directors	Arus Gunawan Anggota Dewan Direktur Member of the Board Directors	Dwi Teguh Wibowo Anggota Dewan Direktur Member of the Board Directors	Arus Gunawan Anggota Dewan Direktur Member of the Board Directors
Kasan Anggota Dewan Direktur Member of the Board Directors	Kasan Anggota Dewan Direktur Member of the Board Directors	Arus Gunawan Anggota Dewan Direktur Member of the Board Directors	Dwi Teguh Wibowo Anggota Dewan Direktur Member of the Board Directors	Dwi Teguh Wibowo Anggota Dewan Direktur Member of the Board Directors	Sukatmo Padmosukarso Anggota Dewan Direktur Member of the Board Directors	Dwi Teguh Wibowo Anggota Dewan Direktur Member of the Board Directors

Periode 1 Januari – 31 Agustus 2024 Period January 1 - August 31, 2024	Periode 1 September – 23 Desember 2024 Period September 1 - December 23, 2024	Periode 24 Desember – 28 Desember 2024 Period December 24 - December 28, 2024	Periode 29 Desember – 23 Januari 2025 Period December 29 - January 23, 2025	24 Januari – 12 Februari 2025 January 24th - February 12th, 2025	13 Februari – 19 Maret 2025 February 13 - March 19, 2025	20 Maret 2025 - Saat ini March 20, 2025 - Present
Arus Gunawan Anggota Dewan Direktur Member of the Board Directors	Arus Gunawan Anggota Dewan Direktur Member of the Board Directors			Sukatmo Padmosukarso Anggota Dewan Direktur Member of the Board Directors	Bambang Setyatmojo Anggota Dewan Direktur Member of the Board Directors	Bambang Setyatmojo Anggota Dewan Direktur Member of the Board Directors
D. James Rompas Anggota Dewan Direktur Member of the Board Directors				Bambang Setyatmojo Anggota Dewan Direktur Member of the Board Directors	Fajarini Puntodewi Anggota Dewan Direktur Member of the Board Directors	Fajarini Puntodewi Anggota Dewan Direktur Member of the Board Directors

Apresiasi dan Penutup

Kami selaku Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Direktur Pelaksana atas dedikasinya dalam menjalani tugas dan tanggung jawab dalam menahkodai perjalanan Lembaga. Kami juga ingin mengantarkan rasa terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam mendukung pencapaian kinerja LPEI sepanjang tahun 2024.

Dewan Direktur berkomitmen untuk terus menjaga peran strategis LPEI dalam memfasilitasi pembiayaan ekspor, melalui penyampaian saran dan arahan yang konstruktif kepada Direktur Pelaksana. Kami optimis bahwa dengan kolaborasi yang solid dan strategi yang tepat, LPEI akan mampu menghadapi tantangan global dan berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional di tahun-tahun mendatang.

Appreciation and Closing

We, the Board of Directors of Indonesia Eximbank, would like to express our highest appreciation to all members of Managing Directors for their dedication in carrying out their duties and responsibilities in leading the institution's journey. We would also like to extend our sincere gratitude to all stakeholders who have contributed to supporting Indonesia Eximbank's performance achievements Throughout 2024.

Board of Directors remains committed to preserving Indonesia Eximbank 's strategic role in facilitating export financing, by providing constructive input and guidance to the Executive Board. We are optimistic that with strong collaboration and the right strategies, Indonesia Eximbank will be able to deal with global challenges and make an even greater contribution to the national economy in the years to come.

Atas nama Dewan Direktur

On behalf of the Board of Directors



Sukatmo Padmosukarso

Plt. Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif

Acting Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director



Bambang Setyatmojo

Anggota Dewan Direktur
Member of Board of Directors



Dwi Teguh Wibowo

Anggota Dewan Direktur
Member of Board of Directors



Sukatmo Padmosukarso

Plt. Ketua Dewan Direktur
merangkap Direktur Eksekutif
Acting Chairman of Board of Directors
concurrently Executive Director



Yon Arsal
Anggota Dewan Direktur
Member of Board of Directors



Fajarini Puntodewi
Anggota Dewan Direktur
Member of Board of Directors



Arus Gunawan
Anggota Dewan Direktur
Member of Board of Directors



Sukatmo Padmosukarso

Plt. Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif
Acting Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director

Laporan Direktur Eksekutif–Direktur Pelaksana

Executive Director–Managing Director Report

Para Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Puji syukur kami panjatkan atas karunia-Nya, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mampu melalui tantangan besar di sepanjang tahun 2024. LPEI tetap memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan perannya, terutama dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor yang memiliki daya ungkit dan *developmental impact* terhadap ekspor, pendapatan dan penambahan lapangan kerja, serta konsisten melaksanakan mandat yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk dan mendorong ekspor nasional.

Dengan strategi yang solid seraya berpegang teguh pada etika lembaga dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, LPEI berfokus untuk memperbaiki kinerja, sehingga pada tahun 2024, LPEI mencatatkan kinerja di berbagai aspek yang cukup baik.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan laporan pelaksanaan kepengurusan Lembaga selama tahun 2024, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas LPEI kepada seluruh pemangku kepentingan. Laporan ini mencakup evaluasi kinerja sepanjang tahun 2024, strategi yang telah diterapkan, kendala yang dihadapi, serta analisis prospek usaha ke depan. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai pencapaian LPEI serta langkah-langkah strategis yang telah diambil untuk memastikan pelaksanaan mandat dari Undang-undang LPEI telah berjalan sesuai harapan pemegang saham.

Tinjauan Makroekonomi dan Kinerja Ekspor Nasional

Makroekonomi global tampaknya berada pada tingkat pertumbuhan yang terbatas untuk mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan—dengan kemungkinan adanya hambatan lebih lanjut dari ketidakpastian kebijakan yang meningkat dan pergeseran kebijakan perdagangan yang lebih terfragmentasi, ketegangan geopolitik, potensi inflasi tinggi, *aging population* hingga isu perubahan iklim.

Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terjaga tumbuh 5,03% yoy terutama didorong oleh permintaan domestik dan investasi yang tetap baik. Nilai ekspor mencapai USD264,70 miliar atau naik 2,29% yoy (dari USD258,77 miliar pada 2023), setelah mengalami penurunan pada tahun 2023 (-11,33%). Peningkatan nilai ekspor tahun 2024 salah satunya didukung oleh faktor harga. Pada kelompok komoditas logam, rata – rata harga emas melanjutkan tren penguatan selama

Dear Respected Stakeholders,

Praise and gratitude be upon God Almighty, since due to His blessings, Indonesia Eximbank has been able to overcome significant challenges Throughout the year of 2024. Indonesia Eximbank remains committed to fulfilling its role, especially in channeling financing to sectors that have a leverage effect and developmental impact on exports, income, and job creation, while consistently carrying out the mandate given by the government to enhance product competitiveness and encourage national exports.

With a solid strategy and strong adherence to institutional ethics and good governance principles, Indonesia Eximbank focused on improving performance, resulting in a positive record across various aspects in 2024.

On this joyful occasion, we would like to present the report on the Institution's management in 2024, as a form of transparency and accountability of Indonesia Eximbank to all stakeholders. This report includes an evaluation of performance Throughout 2024, the strategies implemented, the challenges faced, as well as an analysis of future business outlook. We hope this report provides a comprehensive overview of Indonesia Eximbank's achievements and the strategic measures taken to ensure that the mandate of Indonesia Eximbank Law has been executed in accordance with shareholders' expectations.

Macroeconomic Review and National Export Performance

The global macroeconomy appears to be at a limited growth rate to drive sustainable economic development—with possible further headwinds from rising policy uncertainty and a shift to more fragmented trade policies, geopolitical tensions, the potential for high inflation, an aging population and climate change issues.

In 2024, Indonesia's economic growth remained steady at 5.03% year-on-year, driven mainly by strong domestic demand and sustained investment. Export value reached USD264.70 billion, up 2.29% yoy (from USD258.77 billion in 2023), after a decline in 2023 (-11.33%). The increase of export value in 2024 was partly driven by price factors. In the metals commodity group, the average gold prices continued their five-year upward trend. The average gold price in 2024 reached USD2,390/t oz,

lima (5) tahun terakhir. Rata – rata harga emas tahun 2024 tercatat USD 2.390/t oz, naik 22,87% yoy, dipengaruhi faktor ketidakpastian global yaitu (a) konflik geopolitik, (b) perlambatan ekonomi global. Pada kelompok komoditas pertanian, rata – rata harga minyak sawit, karet, dan kopi mulai mengalami rebound hingga *double – digit*. Kenaikan harga minyak sawit didorong terbatasnya pasokan dan level permintaan yang baik, terutama dari Tiongkok dan India. Sedangkan, kenaikan harga karet dan kopi terjadi karena penurunan produksi akibat gangguan cuaca ekstrem. Sementara itu, rata – rata harga biji kakao mengalami peningkatan hingga *triple – digit* seiring turunnya produksi dari produsen utama dunia yaitu Pantai Gading dan Ghana. Untuk kelompok komoditas energi, rata-rata harga berada dalam tren yang menurun. Batubara menjadi komoditas yang mengalami kontraksi harga paling tajam dengan penurunan mencapai *double – digit* yaitu 22,30% yoy, disebabkan berlimpahnya pasokan.

Pada tahun 2025, pertumbuhan volume perdagangan barang dan jasa global akan lebih dipengaruhi faktor *front – loading* (kecenderungan untuk membeli barang – barang dalam jumlah besar lebih awal) sebagai antisipasi pembatasan perdagangan yang lebih ketat di masa depan.

Ketidakpastian eksternal di masa mendatang berpotensi menahan laju pertumbuhan, namun kekhawatiran atas kebijakan tarif AS, menjadi momentum untuk mencari peluang ekspor ke pasar lainnya sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pasar AS. Reformasi kebijakan untuk meningkatkan daya saing industri domestik dan mempermudah prosedur ekspor menjadi kunci dalam mempertahankan momentum pertumbuhan ekspor Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Dalam konteks inilah, peran LPEI menjadi semakin krusial terutama dalam menyediakan dukungan pembiayaan dan mitigasi risiko bagi para eksportir. LPEI mengemban mandat untuk (i) mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan ekspor nasional; (ii) mempercepat peningkatan ekspor nasional; (iii) membantu peningkatan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan memiliki keunggulan untuk ekspor; hingga (iv) mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk mengembangkan produk yang berorientasi ekspor.

Strategi dan Kebijakan Strategis Tahun 2024

Tema strategis tahun 2024 LPEI adalah “*Rebalancing toward enabling export empowering nation*” yang merupakan lanjutan tahapan “*Fixing The Fundamental*” dengan 9 prioritas utama, yaitu (i) Peningkatan kolaborasi dengan ekosistem ekspor, (ii) Pertumbuhan segmen UKM dan UMBE melalui *channel* tradisional dan digital; (iii) Peningkatan sektor/industri nilai tambah; (iv) Percepatan perbaikan kualitas aset; (v) Efisiensi biaya operasional dan pendanaan; (vi) Penguatan *Governance, Risk Management & Compliance*; (vii) Modernisasi

up 22.87% yoy, influenced by global uncertainty, including (a) geopolitical conflict and (b) a global economic slowdown. In the agricultural commodity group, the average prices for palm oil, rubber, and coffee rebounded to double-digit increases. The rise in palm oil prices was driven by limited supply and strong demand, especially from China and India. Meanwhile, rubber and coffee prices rose due to supply disruptions from extreme weather. Cocoa bean prices saw a triple-digit increase due to falling production in major producing countries such as Ivory Coast and Ghana. In contrast for energy commodities group, the average price experienced a downward trend. Coal saw the steepest price decline, falling by 22.30% yoy in a double-digit drop due to an oversupply in the market.

Looking ahead to 2025, the growth in global trade in goods and services will likely be influenced by front-loading (a tendency to purchase goods in larger quantities earlier), as an anticipation of tighter trade restrictions in the future.

Future external uncertainty may hinder growth, but concerns over potential US tariffs could serve as momentum for exploring alternative export markets, thus reducing dependence on the US market. Policy reforms to enhance domestic industry competitiveness and streamline export procedures are the key to maintaining Indonesia's export growth amid global uncertainty.

In this context, the role of Indonesia Eximbank becomes increasingly crucial, particularly in providing financing support and risk mitigation for exporters. Indonesia Eximbank carries the mandate to (i) foster a conducive business climate for boosting national exports, (ii) accelerate export growth, (iii) support the development of highly competitive domestic production capacity for export, and (iv) promote the development of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and cooperatives to develop export-oriented products.

Strategy and Strategic Policies in 2024

Indonesia Eximbank's strategic theme for 2024 is “*Rebalancing toward enabling export empowering nation*” which is a continuation of the “*Fixing The Fundamental*” stage with 9 main priorities, namely (i) Increasing collaboration with the export ecosystem, (ii) Growth of the SME and UMBE segments through traditional and digital channels; (iii) Increasing the value-added sector/industry; (iv) Accelerating asset quality improvement; (v) Efficiency of operational and funding costs; (vi) Strengthening *Governance, Risk Management &*

IT infrastruktur dan *core system*; (viii) Struktur Organisasi dan SDM untuk mendukung bisnis model baru; dan (ix) Manajemen komunikasi dan *stakeholder*.

Adapun langkah-langkah transformasi yang menjadi prioritas sesuai dengan strategi tersebut di atas dalam mencapai aspirasinya, antara lain:

1. Pengembangan *digital platform* untuk pelaku usaha berorientasi ekspor. Namun demikian perlu dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang baik;
2. Implementasi bisnis model baru beserta *monitoring*-nya telah dijalankan termasuk kesiapan infrastruktur, kebijakan dan organisasi dalam penerapannya;
3. Perbaikan kualitas aset melalui *collection* NPL Rp892 miliar dan hapus buku dari 105 debitur telah direalisasikan sebesar Rp15,89 triliun, sehingga jumlah NPL turun menjadi Rp16,31 triliun di Desember 2024 dari Rp32,1 triliun di Desember 2023;
4. Perubahan struktur organisasi sesuai dengan bisnis model baru telah berlaku secara efektif sejak 1 Februari 2024;
5. Telah dilakukan implementasi bisnis model baru dengan mekanisme *control tower* dan juga *export* forum untuk meningkatkan kinerja *goodbank* secara bertahap;
6. PMN telah dicairkan kepada LPEI sebesar Rp5 triliun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2024 yang telah disahkan oleh presiden;
7. Penguatan GRC (tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan) antara lain: profil risiko lembaga disusun dengan menggunakan SEOJK terbaru nomor 15 tahun 2022 dan penilaian *good corporate governance* dengan bantuan lembaga BPKP;
8. *Kick off project* Modernisasi *Core System* telah dilaksanakan dan akan dilakukan *monitoring* secara berkala;
9. Penguatan analisa risiko salah satunya melalui *Bank Statement Analyzer* (BSA) dan *Qualitative Credit Assessment* (QCA) untuk segmen UKME;
10. *Monitoring* pelaksanaan model bisnis baru telah diimplementasikan juga melalui 4DX (*4 Discipline Execution*) *monitoring*.

Peranan Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan Strategis Lembaga

Sesuai dengan Peraturan Direktur Eksekutif Nomor: 0004/PDE/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Pedoman Tata Kerja Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana bertanggung jawab secara kolektif dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Lembaga. Direktur Eksekutif, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Direktur, bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional LPEI dan mewakili Lembaga baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam menjalankan

Compliance; (vii) Modernization of IT infrastructure and core systems; (viii) Organizational Structure and HC to support new business models; and (ix) Communication and stakeholder management.

The priority transformation steps in accordance with the strategy above in achieving its aspirations include:

1. Development of a digital platform for export-oriented business actors. However, improvements need to be made in accordance with good Corporate Governance;
2. Implementation of new business models and their monitoring has been carried out including the readiness of infrastructure, policies and organizations in their implementation;
3. Improvement of asset quality through NPL collection of Rp892 billion and write-off from 105 debtors has been realized amounting to Rp15.89 trillion, hence the amount of NPL decreased to Rp16.31 trillion in December 2024 from Rp32.1 trillion in December 2023;
4. Changes in the organizational structure in accordance with the new business model have been effectively implemented since February 1, 2024;
5. Implementation of a new business model has been carried out with a control tower mechanism and also an export forum to gradually improve goodbank performance;
6. PMN has been disbursed to Indonesia Eximbank amounting to Rp5 trillion based on Government Regulation (PP) No. 50 of 2024 as ratified by the president;
7. Strengthening GRC (governance, risk management and compliance) including: the institution's risk profile is prepared using the latest SEOJK number 15 of 2022 and good corporate governance assessment with the assistance of BPKP institution;
8. Kick off project of Core System Modernization has been conducted and will be monitored periodically;
9. Strengthening risk analysis through Bank Statement Analyzer (BSA) and Qualitative Credit Assessment (QCA) for the UKME segment;
10. Monitoring of new business model has also been implemented through 4DX (4 Discipline Execution) monitoring.

The Role of Executive Director and Managing Directors in Formulating the Institution's Strategy and Strategic Policy

In accordance with Executive Director Regulation Number: 0004/PDE/02/2024 dated February 29, 2024 concerning the Work Guidelines for Managing Directors of Indonesia Eximbank Executive Director and Managing Director are collectively responsible for formulating the corporate strategy and strategic policy. The Executive Director, who also serves as Chairman of the Board of Directors, is responsible for the implementation of Indonesia Eximbank's operations and represents the corporate both in and out of court. In carrying out these

tugasnya, Direktur Eksekutif dibantu oleh Direktur Pelaksana yang mengawasi berbagai bidang operasional. Bersama-sama, kami merumuskan dan menetapkan kebijakan strategis serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional LPEI, memastikan bahwa setiap keputusan sejalan dengan visi dan misi lembaga.

Sepanjang tahun 2024, kolaborasi antara Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana telah menghasilkan berbagai inisiatif strategis yang memperkuat peran LPEI dalam mendukung ekspor nasional. Tujuan tersebut direalisasikan dengan berfokus pada implementasi prinsip GCG sebagai landasan dalam setiap pengambilan keputusan, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional Lembaga. Seluruh jajaran Direktur berkomitmen untuk menjaga kepemimpinan yang visioner dan responsif, sehingga LPEI dapat meningkatkan daya saing ekspor Indonesia di kancah global.

Proses yang Dilakukan Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana untuk Memastikan Implementasi Strategi

Sejalan dengan jajaran Direktur Pelaksana dengan konsisten menjalani serangkaian proses dalam rangka memastikan implementasi strategi dilaksanakan sesuai dengan rencana. Proses tersebut diawali dengan mengacu pada *Board Manual* yang mengatur tugas dan tanggung jawab Direktur Pelaksana. Selaras dengan strategi yang ditetapkan, kami terus berkoordinasi secara dinamis sehingga strategi yang dijalankan tetap relevan dan berada pada jalur yang diharapkan.

Selanjutnya, Direktur Pelaksana melakukan pengawasan secara intensif terhadap penerapan strategi sepanjang tahun 2024. Sebagai upaya memastikan kelancaran implementasi strategi, kami terus melakukan pemantauan melalui rapat koordinasi yang membahas perkembangan Lembaga. Rapat tersebut dilakukan dengan tujuan untuk evaluasi hasil kinerja dan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan pasar.

Perbandingan antara Pencapaian Target dengan Realisasi

Kinerja keuangan dan non keuangan LPEI posisi 31 Desember 2024, secara umum dibandingkan dengan targetnya menunjukkan pencapaian antara lain:

1. *Outstanding* Pembiayaan sebesar Rp56,2 triliun atau 96% dari targetnya yang sebesar Rp58,6 triliun. Sementara itu *outstanding* pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor (NIA) tercatat sebesar Rp4,1 triliun naik 5% YoY atau 82% dari targetnya.
2. Total Penjaminan komersial termasuk NIA pada Desember 2024 tercatat Rp6,59 triliun, 65% dari targetnya yang sebesar Rp10,18 triliun atau turun 15% YoY. Sementara itu, Penjaminan PEN sebesar Rp1,56 miliar turun 50% YoY seiring telah berakhirnya program Jaminah di Desember 2022.

duties, the Executive Director is assisted by the Managing Directors who oversee various operational areas. Together, we formulate and determine strategic policies and supervise Indonesia Eximbank's operational activities, ensuring that every decision is in line with the institution's vision and mission.

Throughout 2024, the collaboration between Executive Director and Managing Directors has resulted in various strategic initiatives that strengthen the role of Indonesia Eximbank in supporting national exports. This goal was realized by focusing on the implementation of GCG principles as a basis for every decision, to ensure transparency and accountability in the Institution's operations. All Directors are committed to maintaining visionary and responsive leadership, so that Indonesia Eximbank can increase the competitiveness of Indonesian exports on the global stage.

Processes Carried Out by Executive Directors and Managing Directors to Ensure the Implementation of Strategies

All levels of Managing Directors consistently undergo a series of processes to ensure that strategies are implemented according to plan. The process begins with reference to the Board Manual which regulates the duties and responsibilities of Managing Directors. In line with the established strategy, we continue to coordinate dynamically to ensure that the strategy remains relevant and on track.

Furthermore, Managing Directors will conduct intensive supervision of strategy implementation Throughout 2024. To ensure smooth strategy implementation, we will continue to monitor the situation through coordination meetings to discuss the organization's progress. These meetings are held to evaluate performance results and make adjustments according to market needs.

Comparison between Target Achievement and Realization

Indonesia Eximbank's financial and non-financial performance as of December 31, 2024, in general compared to its target shows the following achievements:

1. Outstanding Financing amounted to Rp56.2 trillion or 96% of its target of Rp58.6 trillion. Meanwhile, outstanding financing for National Interest Account (NIA) was recorded at Rp4.1 trillion, up 5% YoY or 82% of its target.
2. Total commercial guarantees including NIA as of December 2024 were recorded at Rp6.59 trillion, 65% of its target of Rp10.18 trillion or down 15% YoY. Meanwhile, PEN Guarantee amounted to Rp1.56 billion, down 50% YoY as the Jaminah program ended in December 2022.

3. Volume Asuransi pada Desember 2024 sebesar Rp10,86 triliun, 82% dari targetnya yang sebesar Rp13,19 triliun atau turun 10% YoY dengan retensi sendiri sebesar Rp5,43 triliun atau 82% dibandingkan dengan target.
 4. *Outstanding NPL gross* tercatat sebesar Rp16,3 triliun, membaik 49,2% yoy, namun lebih rendah dari target sebesar Rp15,3 triliun. Pada tahun 2024 LPEI telah melakukan upaya perbaikan kolektibilitas sebesar Rp245,8 miliar. NPL net tercatat sebesar Rp2,5 triliun, membaik 24,4% yoy namun demikian lebih baik dibandingkan target yang sebesar Rp2,6 triliun.
 5. LPEI mencatatkan laba bersih tahun 2024 tercatat sebesar Rp233 miliar, 95% dari targetnya yang sebesar Rp244 miliar atau meningkat signifikan setelah membukukan rugi di tahun lalu. Hal ini utamanya disebabkan oleh: (i) efisiensi biaya dari Rp794 miliar di tahun 2023 menjadi Rp685 miliar di tahun 2024 atau lebih rendah dari target yang sebesar Rp825 miliar; (ii) penurunan biaya CKPN yang signifikan dari Rp16,9 triliun menjadi Rp278 miliar; dan (iii) *reversal* atas kelebihan cadangan DTA (*Deferred Tax Asset*) tahun lalu yang dibentuk untuk mengantisipasi dampak dari perubahan PMK 74 tahun 2024.
 6. Rasio keuangan utama secara umum menunjukkan pencapaian sebagai berikut:
 - a. Rasio permodalan (CAR) pada level yang cukup kuat untuk menopang pertumbuhan ke depan. Pada Desember tahun 2024 CAR tercatat sebesar 34,2% di mana target sebesar 34,9%. CAR naik YoY dari 17,8% menjadi 34,2% di Desember 2024 yang disebabkan oleh penambahan PMN sebesar Rp5 triliun;
 - b. Rasio Kualitas Aset (NPL *ratio*) pada Desember tahun 2024 yaitu rasio NPL *gross* tercatat sebesar 29,07% belum mencapai target yang sebesar 26,04%. Sementara itu, rasio NPL net tercatat sebesar 4,52% atau sedikit di atas target yang sebesar 4,46%;
 - c. Rasio Rentabilitas pada Desember tahun 2024 yaitu, ROA 0,2%, ROE 2,5%, dan NIM 0,9% dibandingkan target sebesar ROA 0,5%, ROE 2,0%, dan NIM 1,3%.
 7. Jasa Konsultasi tahun 2024 telah melakukan aktivitas untuk mendorong para pelaku UKM Indonesia antara lain:
 - a. CPNE telah dilakukan di 13 Provinsi sebanyak 92 kali pelatihan yang dihadiri oleh 1.245 UKM, dan telah menghasilkan 484 eksportir baru ;
 - b. *Community Development* telah dilakukan pendampingan bersama Kemenkeu Satu, dan Pemerintah Daerah dalam program Desa Devisa dengan komoditas makanan & minuman, kerajinan, kopi, kelapa & turunan, dan kakao. Sejak tahun 2019, telah menghasilkan total 1.845 Desa Devisa baru yang berdampak langsung dan tidak langsung kepada 179.205 petani dan pengrajin penerima manfaat;
 - c. *Marketing handholding* telah dilaksanakan 33 (tiga puluh tiga) *Business Matching* bersama dengan 22 intitusi terkait dengan jumlah peserta total 868 UKM .
3. Insurance volume in December 2024 amounted to Rp10.86 trillion, 82% of its target of Rp13.19 trillion or down 10% YoY with self-retention of Rp5.43 trillion or 82% compared to the target.
 4. Outstanding gross NPL was recorded at Rp16.3 trillion, an improvement of 49.2% yoy, but lower than the target of Rp15.3 trillion. In 2024 Indonesia Eximbank has made efforts to improve collectibility amounting to Rp245.8 billion. Net NPLs were recorded at Rp2.5 trillion, an improvement of 24.4% yoy but better than the target of Rp2.6 trillion.
 5. Indonesia Eximbank recorded a net profit of Rp233 billion, 95% of its target of Rp244 billion or a significant improvement after posting a loss last year. This was mainly due to: (i) cost efficiency from Rp794 billion in 2023 to Rp685 billion in 2024 or lower than the target of Rp825 billion; (ii) significant reduction in provision for impairment losses from Rp16.9 trillion to Rp278 billion; and (iii) reversal of last year's excess DTA (*Deferred Tax Asset*) reserve formed to anticipate the impact of the changes in PMK 74 in 2024.
 6. Key financial ratios generally showed the following achievements:
 - a. Capital ratio (CAR) at a level that is strong enough to support future growth. In December 2024, CAR was recorded at 34.2%, while the target was 34.9%. CAR increased YoY from 17.8% to 34.2% in December 2024 due to the additional PMN of Rp5 trillion;
 - b. Asset Quality Ratio (NPL ratio) in December 2024, namely the gross NPL ratio was recorded at 29.07%, not yet reaching the target of 26.04%. Meanwhile, the net NPL ratio was recorded at 4.52% or slightly above the target of 4.46%;
 - c. Profitability Ratio in December 2024, namely, ROA 0.2%, ROE 2.5%, and NIM 0.9% compared to the target of ROA 0.5%, ROE 2.0%, and NIM 1.3%.
 7. Advisory Services in 2024 has carried out activities to encourage Indonesian SMEs, among others:
 - a. CPNE has been carried out in 13 Provinces for 92 trainings attended by 1,245 SMEs, and has produced 484 new exporters;
 - b. Community Development has been carried out assistance with the Ministry of Finance One, and the Regional Government in the Foreign Exchange Village program with food & beverage commodities, crafts, coffee, coconut & derivatives, and cocoa. Since 2019, it has produced a total of 1,845 new Go Export Village with direct and indirect impacts on 179,205 beneficiary farmers and craftsmen;
 - c. Marketing handholding has been carried out 33 (thirty-thCee) Business Matching together with 22 related institutions with a total of 868 SME participants.



Kendala dan Strategi Penyelesaiannya

Dengan kondisi ekonomi global yang tidak menentu, juga dampak dari perlambatan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara maju, tekanan inflasi, serta volatilitas nilai tukar, tahun 2024 masih menjadi tahun yang penuh dinamika dan tantangan bagi LPEI.

Terkait mandat, beberapa hal yang menjadi kendala bagi LPEI yakni portfolio pembiayaan *goodbank* yang menjadi *engine revenue* belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, sementara kinerja Penjaminan dan Asuransi juga masih di bawah target. Di sisi pendapatan, *Pre-Provisioning Operating Profit* (PPoP) LPEI juga belum memenuhi target. Adapun strategi yang dilakukan oleh LPEI di antaranya telah dilakukan implementasi bisnis model baru dengan mekanisme *control tower* dan juga *export forum* untuk meningkatkan kinerja *goodbank* secara bertahap. Untuk mendukung pencapaian bisnis juga dilakukan *crash program* untuk meningkatkan *performance* bisnis dalam pencapaian target.

Di sisi penyelesaian kualitas aset, tingginya pembiayaan bermasalah dan *Loan at Risk* (LAR) membutuhkan pencadangan 100% terutama debitur yang diproyeksikan sangat sulit memperbaiki kinerja. Untuk itu, telah dilakukan *assessment* bersama antara anak perusahaan LPEI, yakni PT IEBPA dan unit manajemen risiko untuk pemetaan kondisi masing-masing debitur terhadap kebutuhan CKPN. Penambahan CKPN telah dicadangkan untuk rencana hapus buku tahun 2025. Adapun peran PT IEBPA untuk perbaikan kualitas aset yakni melalui *collection* dan hapus buku.

Analisis Prospek Usaha

Perkembangan arus ekspor Indonesia diproyeksikan mengalami penyesuaian di tahun 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengutarakan *forecast* bahwa pada Januari 2025, nilai ekspor Indonesia mencapai USD 21,45 miliar, mengalami penurunan sebesar 8,56% dibandingkan Desember 2024. Namun, secara tahunan, ekspor mengalami kenaikan sebesar 4,68% dibandingkan Januari 2024. Penurunan ekspor ini disebabkan oleh turunnya ekspor nonmigas sebesar 6,96% serta ekspor migas yang turun lebih tajam, yaitu 31,35%. Komoditas yang mengalami penurunan terbesar adalah bahan bakar mineral, yang turun 22,01%, sementara peningkatan terbesar terjadi pada logam mulia dan perhiasan/permata dengan kenaikan 25,38%. Dari sisi negara tujuan, ekspor terbesar masih ke Tiongkok (USD4,57 miliar), diikuti oleh Amerika Serikat dan India, dengan kontribusi gabungan mencapai hampir 40% dari total ekspor nonmigas.

Secara sektoral, ekspor industri pengolahan mengalami kenaikan 14,02% dibandingkan Januari 2024, sementara sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh signifikan sebesar 45,46%. Sebaliknya, ekspor sektor pertambangan mengalami kontraksi hingga 26,45% akibat turunnya ekspor

Challenges and Resolution Strategies

Given the uncertain global economic condition, along with the impact of slowing economic growth in several developed countries, inflationary pressures, and exchange rate volatility, the year of 2024 remains a dynamic and challenging year for Indonesia Eximbank.

Regarding its mandate, several issues have become challenges for Indonesia Eximbank. The financing portfolio of the "good bank," which is expected to be a revenue engine, has yet to show significant growth. Meanwhile, the performance of the Guarantee and Insurance segments also remains below target. In terms of Revenue, Indonesia Eximbank's Pre-Provisioning Operating Profit (PPoP) has not yet met the target. To address this, LPEI has implemented a new business model using a control tower mechanism and established an export forum to gradually improve the performance of the good bank. Additionally, a crash program has been implemented to improve overall business performance in achieving targets.

In terms of asset quality resolution, the high level of non-performing loans and Loans at Risk (LAR) has required 100% provisioning, particularly for debtors projected to have very limited recovery potential. To address this, a joint assessment has been conducted between Indonesia Eximbank's subsidiaries, namely PT IEBPA, and the risk management unit to map each debtor's condition with regard to CKPN (Allowance for Impairment Losses) requirements. Additional CKPN has been reserved for planned write-offs in 2025. PT IEBPA's role in asset quality improvement involves both collection efforts and write-offs.

Business Outlook Analysis

The development of Indonesia's export flows are projected to undergo adjustments in 2025. The Central Statistics Agency (BPS) has forecasted that in January 2025, Indonesia's export value will reach USD21.45 billion, reflecting a decrease of 8.56% compared to December 2024. However, on a year-over-year basis, exports have increased by 4.68% compared to January 2024. This decline is primarily driven by a 6.96% drop in non-oil and gas exports and a sharper 31.35% decline in oil and gas exports. The largest decline was recorded in mineral fuels, which fell by 22.01%, while the highest increase was seen in precious metals and jewelry, which grew by 25.38%. From a destination country perspective, China remains Indonesia's largest export market with a total value of USD4.57 billion, followed by the United States and India, with a combined contribution of nearly 40% of total non-oil and gas exports.

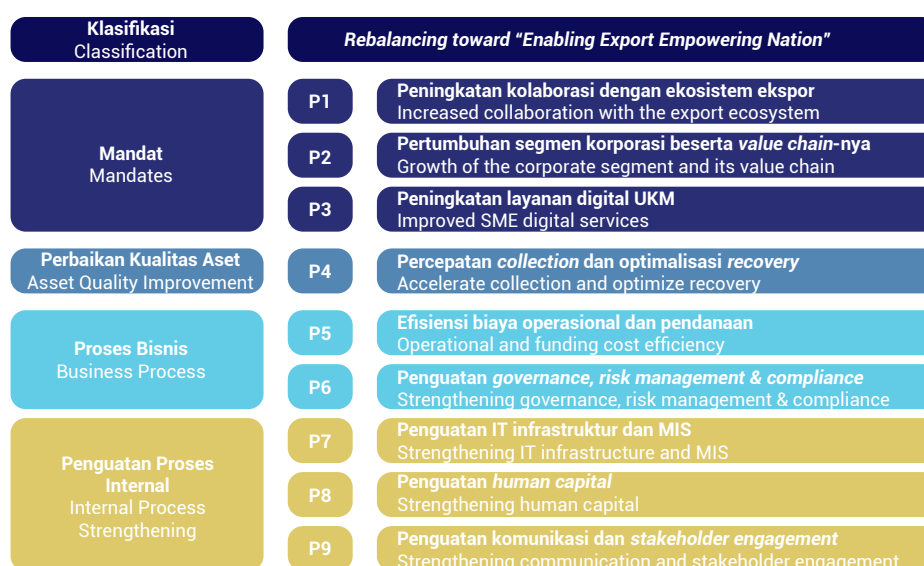
By sector, the manufacturing industry exports recorded a 14.02% increase compared to January 2024, while the agriculture, forestry, and fisheries sector experienced significant growth of 45.46%. In contrast, mining sector exports contracted by 26.45% due to declining copper ore and coal exports. From

bijih tembaga dan batu bara. Dari sisi asal barang, ekspor terbesar berasal dari Provinsi Jawa Barat, Kepulauan Riau, dan Jawa Timur. Dengan tren ini, meskipun ekspor mengalami tekanan dari sisi bulan ke bulan, secara tahunan masih menunjukkan pertumbuhan, terutama didorong oleh sektor industri pengolahan dan pertanian yang semakin berkontribusi terhadap kinerja ekspor nasional.

Tahun 2025, LPEI melanjutkan tema strategis yang diusung pada tahun 2024, yaitu *"Rebalancing toward enabling export empowering nation"*. Tema strategis ini diturunkan ke dalam 9 (sembilan) prioritas utama Lembaga, seperti yang termuat pada gambar berikut.

a regional perspective, the largest export contributions came from the provinces of West Java, Riau Islands, and East Java. Despite monthly fluctuations, the overall annual trend remains positive, mainly driven by stronger contributions from the manufacturing and agricultural sectors, which continue to play a growing role in Indonesia's national export performance.

In 2025, LPEI continues the strategic theme carried in 2024, namely *"Rebalancing toward enabling export empowering nation"*. This strategic theme is derived into 9 (nine) main priorities of the Institute, as shown in the following figure.



Sembilan prioritas utama Lembaga tahun 2025 di atas diimplementasikan ke dalam inisiatif strategi Lembaga saat ini dan model bisnis ke depan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kolaborasi dengan Ekosistem Ekspor
Strategi pengembangan model bisnis baru melalui kolaborasi dengan ekosistem ekspor telah dimulai sejak tahun 2024. Strategi ini berfokus pada pengembangan kerja sama dengan berbagai *economic actor* yang ada di dalam ekosistem ekspor baik dengan menggunakan instrumen keuangan maupun non-keuangan melalui berbagai jenis jaringan penyaluran.

Pada tahun 2025 pengembangan bisnis model baru ini masih terus dilakukan pendalaman, baik dalam proses pemetaan *economic actor*, instrumen yang tepat, serta *channel* yang dapat digunakan untuk menghubungkan seluruh *economic actor* dalam ekosistem ekspor.

The nine main priorities of the Institution in 2025 above are implemented into the corporate current strategic initiatives and future business models as follows:

1. Increasing Collaboration with the Export Ecosystem
The strategy for developing a new business model through collaboration with the export ecosystem has been started since 2024. This strategy focuses on developing cooperation with various economic actors in the export ecosystem, both using financial and non-financial instruments through various types of distribution networks.

In 2025, the development of this new business model will continue to be explored, both in the process of mapping economic actors, appropriate instruments, and channels that can be used to connect all economic actors in the export ecosystem.

2. Pertumbuhan Segmen Korporasi beserta *Value Chain*-nya Strategi melalui *value chain* ini, memanfaatkan relasi yang telah terbina antara korporasi/UMBE sebagai *anchor* dengan perusahaan yang berada dalam rantai pasok *anchor* baik itu Korporasi, UMBE maupun UKME, sehingga probabilitas penetrasi akan menjadi lebih mudah dengan *Risk Acceptance Criteria* (RAC) tertentu.
3. Peningkatan Layanan Digital UKM Saat ini LPEI sedang mengembangkan *cross border digital platform* yang akan membantu untuk mempertemukan antara pembeli dan penjual baik yang ada di dalam negeri, maupun luar negeri. Dalam pengembangannya, pada tahun 2025, LPEI akan berfokus pada peningkatan layanan digital UKM antara lain pada layanan jasa konsultasi. Layanan jasa konsultasi yang dimaksud akan difokuskan antara lain pada konten edukasi berupa *e-learning* dan *eksporpedia* baik yang tersedia gratis maupun berbayar secara terjangkau.
4. Percepatan *Collection* dan Optimalisasi *Recovery* Usaha penurunan NPL *gross* difokuskan pada percepatan *collection* NPL sebesar Rp643 miliar, hapus buku sebesar Rp6,6 triliun dari 50 debitur dan upaya lainnya. Sedangkan untuk menurunkan NPL net selain dilakukan usaha-usaha tersebut di atas akan dilakukan juga dengan menambah CKPN NPL dan meningkatkan *outstanding* pembiayaan *good bank*.
5. Efisiensi Biaya Operasional dan Pendanaan Tahun 2025, akan terus dilakukan optimalisasi pendanaan dan likuiditas yang akan dipantau secara rutin melalui ALCO. Adapun di tahun 2025, diharapkan sesuai rencana akan menerima pinjaman Rp10 triliun yang akan digunakan untuk pengembangan kapasitas usaha untuk mendukung ekspor nasional.

Selain itu beberapa strategi alternatif pendanaan yang akan dieksplor di tahun 2025 untuk optimalisasi dana murah antara lain sebagai berikut:

- a. Dana DHE sebagai *core funding* retail secara bertahap dengan target DHE USD14 juta.
- b. *Ample bank lines* untuk mendukung likuiditas.
- c. *Medium term notes*.
- d. Pinjaman baik dari Pemerintah maupun sumber dana lainnya
- e. Dana hibah berbasis SDG (*Sustainable Development Goals*)/ESG (*Environmental, social and Governance*).

Keseluruhan strategi alternatif pendanaan dan pinjaman pemerintah ini diharapkan dapat menurunkan *cost of fund* dan menjaga kecukupan likuiditas.

6. Penguatan *Governance, Risk Management & Compliance* Tahun 2025, LPEI akan terus memperkuat pada sisi *governance, risk management & compliance* melalui inovasi-inovasi.

2. Growth of the Corporate Segment and its Value Chain This strategy through the value chain utilizes the relationships that have been built between corporations/UMBE as anchors with companies in the anchor supply chain, be it Corporations, UMBE or SMEs, so that the probability of penetration will be easier with certain risk acceptance criteria (RAC).
3. Improving Digital Services for SMEs Currently, Indonesia Eximbank is developing a cross-border digital platform that will help bring together buyers and sellers both domestically and abroad. In its development, in 2025, Indonesia Eximbank will focus on improving digital services for SMEs, including advisory services. The consulting services in question will focus on educational content in the form of e-learning and Eksporpedia, both available for free and for affordable fees.
4. Accelerating Collection and Optimizing Recovery Efforts to reduce gross NPL are focused on accelerating NPL collection of Rp643 billion, writing off Rp6.6 trillion from 50 debtors, and other efforts. Meanwhile, to reduce net NPL, in addition to the efforts mentioned above, will also be done by increasing CKPN NPL and increasing outstanding good bank financing.
5. Efficiency of Operational Expenses and Funding In 2025, funding and liquidity optimization will continue to be carried out which will be monitored routinely through ALCO. In 2025, it is expected that according to plan, a loan of Rp10 trillion will be received and used to develop business capacity to support national exports.

In addition, several alternative funding strategies that will be explored in 2025 to optimize low-cost funds include the following:

- a. DHE funds as core retail funding in stages with a target of DHE USD14 million.
- b. Ample bank lines to support liquidity.
- c. Medium term notes.
- d. Loans from both the Government and other funding sources
- e. SDG (*Sustainable Development Goals*) / ESG (*Environmental, Social and Governance*) based grant funds.

All of these alternative funding strategies and government loans are expected to reduce the cost of funds and maintain adequate liquidity.

6. Strengthening Governance, Risk Management & Compliance In 2025, Indonesia Eximbank will continue to strengthen governance, risk management & compliance through innovations.

7. **Penguatan Infrastruktur IT dan MIS**
Tahun 2025 dari sisi Infrastruktur IT dan MIS (*Management Information System*), LPEI akan meneruskan apa yang sudah di mulai pada tahun sebelumnya. Keseluruhan *project* untuk aplikasi dan infrastruktur yang akan dijalankan pada tahun 2025 merupakan kelanjutan implementasi inisiatif yang telah direncanakan pada rencana strategis TI tahun 2023-2027 untuk mewujudkan IT sebagai *strategic enabler* yang mendukung Rencana Jangka Panjang Lembaga.
8. **Penguatan *Human Capital***
Pada tahun 2025, LPEI berfokus pada 5 strategi utama untuk memperkuat *human capital*, antara lain melalui strategi sebagai berikut:
 - a. *Organization Design*
 - b. *People and Capabilities*
 - c. *Productivity*
 - d. *Performance Management & Reward System*
 - e. *Culture*
9. **Penguatan Komunikasi dan *Stakeholder Engagement***
Strategi komunikasi LPEI pada tahun 2025 adalah akan melakukan peningkatan komunikasi yang efektif baik itu melalui kampanye "berani mendunia" dan aktivitas *stakeholder engagement* dengan berbagai *stakeholder*.

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Lembaga Tahun 2024

Direktur Pelaksana senantiasa memegang teguh komitmen dalam menerapkan nilai-nilai *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mengelola serta menyusun strategi dan kebijakan Lembaga. Hal tersebut menjadi landasan kami dalam menghadapi tantangan dalam pembiayaan ekspor. Direksi meyakini bahwa penerapan GCG merupakan aspek dasar dalam menciptakan struktur Lembaga yang kokoh dan berkelanjutan. Selaras dengan komitmen tersebut, kami senantiasa menjaga integritas dan kepercayaan segenap pemangku kepentingan dengan mematuhi regulasi, menerapkan praktik bisnis yang sehat dan melakukan pengendalian risiko secara konsisten. Segala kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dan diimplementasikan oleh LPEI bertujuan untuk mendukung penerapan GCG, guna meningkatkan kinerja dan melindungi kepentingan seluruh *stakeholders*.

Penerapan tata kelola LPEI diperkuat melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistleblowing System* (WBS), yang menjadi pilar dalam menjaga dan melindungi Lembaga dari adanya penyimpangan yang dapat merugikan baik secara material maupun non material. LPEI juga secara rutin melakukan sosialisasi WBS melalui berbagai media untuk memastikan bahwa seluruh insan Lembaga serta pemangku kepentingan mengetahui pentingnya mekanisme WBS.

7. **Strengthening IT and MIS Infrastructure**
In 2025, in terms of IT Infrastructure and MIS (*Management Information System*), Indonesia Eximbank will continue what was started in the previous year. The entire project for applications and infrastructure that will be carried out in 2025 is a continuation of the implementation of initiatives that have been planned in the 2023-2027 IT strategic plan to realize IT as a strategic enabler that supports the Institution's Long-Term Plan.
8. **Strengthening Human Capital**
In 2025, Indonesia Eximbank will focus on 5 main strategies to strengthen human capital, including through the following strategies:
 - a. *Organization Design*
 - b. *People and Capabilities*
 - c. *Productivity*
 - d. *Performance Management & Reward System*
 - e. *Culture*
9. **Strengthening Communication and Stakeholder Engagement**
Indonesia Eximbank's communication strategy in 2025 is to increase effective communication, both through the "berani mendunia" campaign and stakeholder engagement activities with various stakeholders.

Development of the Corporate Governance in 2024

Managing Directors constantly uphold their commitment to implementing Good Corporate Governance (GCG) values in managing and formulating the Institution's strategies and policies. This is our foundation in facing the challenges of export financing. The Directors believe that the implementation of GCG is a fundamental aspect in creating a solid and sustainable institutional structure. In line with this commitment, we always maintain the integrity and trust of all stakeholders by complying with regulations, applying sound business practices and conducting consistent risk control. All policies established and implemented by Indonesia Eximbank aim to support the implementation of GCG, in order to improve performance and protect the interests of all stakeholders.

The implementation of Indonesia Eximbank's governance is strengthened through the Whistleblowing System (WBS), which is a pillar in maintaining and protecting the Institution from irregularities that can cause material or non-material damage. Indonesia Eximbank also routinely disseminates information about the WBS through various media to ensure that all employees of the Institution and stakeholders are aware of the importance of the WBS mechanism.

Kami menilai bahwa seluruh organ yang berperan dalam tata kelola LPEI telah melaksanakan fungsi serta wewenangnya dengan baik, sehingga Lembaga dapat terus berjalan ke depan dengan berpegang teguh kepada Kode Etik dan kebijakan internal lainnya.

Pencapaian Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Keberlanjutan bagi LPEI lebih dari sekadar komitmen dan telah menjadi bagian dari strategi utama dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang inklusif, berkontribusi secara sosial, dan memperhatikan lingkungan. Kami percaya bahwa penerapan prinsip keberlanjutan akan memperkuat daya saing ekspor Indonesia sekaligus menciptakan nilai jangka panjang bagi masyarakat, lingkungan, dan seluruh pemangku kepentingan.

Komitmen LPEI dalam Keberlanjutan

Komitmen LPEI terhadap keberlanjutan tertuang dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang disusun secara tahunan. LPEI meyakini bahwa keberlanjutan merupakan bagian penting dari strategi bisnis jangka pendek maupun jangka panjang, serta menjadi fondasi penting dalam mendukung transformasi ekonomi nasional menuju arah yang lebih hijau dan inklusif.

LPEI terus berupaya untuk mengintegrasikan aspek *Environmental, Social, Governance* (ESG) dalam operasionalnya dengan mulai menerapkan ESG *Checklist* untuk memetakan tingkat penerapan aspek ESG oleh nasabah pembiayaan. Melalui pendekatan ini, LPEI membangun komunikasi aktif dengan nasabah guna mendalami pemahaman serta mendukung upaya mereka dalam mengadopsi prinsip keberlanjutan.

Di sisi kelembagaan, LPEI menjalankan budaya *Green Office Lifestyle* serta program-program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai wujud kontribusi nyata terhadap pelestarian lingkungan dan pembangunan sosial masyarakat di sekitar wilayah kerja LPEI.

Dampak Positif dari Penerapan Keberlanjutan

Selama tahun 2024, berbagai inisiatif keberlanjutan telah membawa dampak positif yang signifikan. Dalam kegiatan usaha, LPEI berhasil membangun kesadaran bersama dengan para nasabah terkait pentingnya penerapan prinsip ESG dalam aktivitas bisnis mereka. Dialog yang terjalin dari implementasi ESG *Checklist* menjadi landasan awal untuk menciptakan kolaborasi yang lebih erat menuju praktik bisnis yang bertanggung jawab.

We assess that all organs that play a role in the governance of Indonesia Eximbank have carried out their functions and authorities properly, enabling the corporate to continue moving forward by adhering to the Code of Conduct and other internal policies.

Achievement of Sustainable Finance Implementation

Sustainability for Indonesia Eximbank is more than just a commitment and has become part of the main strategy in supporting national economic development that is inclusive, socially contributing, and environmentally considerate. We believe that implementing sustainability principles will strengthen Indonesia's export competitiveness while creating long-term value for society, the environment, and all stakeholders.

Sustainable Finance Action Plan

Indonesia Eximbank's commitment to sustainability is set out in its annual Sustainable Finance Action Plan (RAKB). Indonesia Eximbank believes that sustainability is an important part of short and long term business strategy, and an important foundation in supporting the transformation of the national economy towards a greener and more inclusive direction.

Indonesia Eximbank continues to integrate Environmental, Social, Governance (ESG) aspects in its operations by starting to implement the ESG Checklist to map the level of application of ESG aspects by financing customers. Through this approach, Indonesia Eximbank builds active communication with customers to deepen their understanding and support their efforts in adopting sustainability principles.

On the institutional side, Indonesia Eximbank implements a Green Office Lifestyle culture as well as Corporate Social Responsibility (CSR) programs as a form of real contribution to environmental preservation and social development of communities around its working area.

Positive Impact of Sustainability Implementation

During 2024, a number of sustainability initiatives have brought significant positive impacts. In business activities, Indonesia Eximbank succeeded in building mutual awareness with customers regarding the importance of applying ESG principles in their business activities. The dialogue established from the implementation of ESG Checklist became the initial foundation for creating closer collaboration towards responsible business practices.

Dari sisi ekonomi, LPEI mencatat penyaluran pembiayaan untuk Usaha Menengah Berorientasi Ekspor (UMBE) sebesar Rp11,5 triliun yakni 20,58% dari total Pembiayaan LPEI secara keseluruhan. Penyaluran pembiayaan ini menjadi bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Peningkatan signifikan penyaluran pembiayaan UMBE pada tahun 2024 mencerminkan komitmen LPEI dalam memperluas akses pembiayaan kepada pelaku usaha segmen kecil dan menengah berorientasi ekspor yang selama ini menghadapi tantangan keterbatasan modal dan akses pasar global.

Melalui dukungan pembiayaan yang lebih inklusif, LPEI turut mendorong pemerataan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing UMBE Indonesia di pasar internasional. Dampak positif dari peningkatan pembiayaan ini terlihat dari semakin banyaknya pelaku usaha kecil dan menengah yang mampu menembus pasar ekspor, mengadopsi praktik usaha berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas produk dan kapasitas produksinya.

Di sisi kelembagaan, LPEI secara konsisten melaksanakan berbagai program TJSL dan pada tahun 2024 secara garis besar mencakup di bidang pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas kesehatan, pelatihan dan sharing session, pelestarian lingkungan serta penyediaan infrastruktur. Pelaksanaan TJSL menegaskan pemberian manfaat langsung LPEI kepada masyarakat dan meningkatkan reputasi Lembaga sebagai institusi yang peduli dan bertanggung jawab. Semakin luasnya jangkauan masyarakat yang merasakan manfaat program TJSL menunjukkan efektivitas pendekatan keberlanjutan yang dijalankan LPEI.

Selain mengimplementasikan prinsip keberlanjutan dalam pelaksanaan peran LPEI, LPEI juga menerapkannya dalam budaya kerja dan proses kerja operasional sehari-hari (*Green Office Lifestyle*) dalam bentuk langkah-langkah yang bertujuan pada efisiensi energi, mengurangi emisi karbon, serta budaya daur ulang.

Berbagai program keberlanjutan dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan turut mendukung pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) atau SDGs khususnya dalam pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta penciptaan kerja layak. Kontribusi LPEI dalam pencapaian SDGs sudah sesuai dengan *core business* Lembaga di bidang pembiayaan ekspor untuk kesejahteraan sosial.

In terms of economy, Indonesia Eximbank recorded the distribution of financing for Export-Oriented Medium Enterprises (UMBE) amounting to Rp11.5 trillion, which is 20.58% of the total Indonesia Eximbank Financing as a whole. This financing distribution is an important part of sustainable economic development strategy. The significant increase in the distribution of UMBE financing in 2024 reflects Indonesia Eximbank's commitment to expanding access to financing to export-oriented small and medium segment businesses that have been facing challenges of limited capital and global market access.

Through more inclusive financing support, Indonesia Eximbank also encourages economic equality, job creation, and increases the competitiveness of Indonesian MSMEs in the international market. The positive impact of this increased financing can be seen from the increasing number of small and medium enterprises that are able to penetrate the export market, adopt sustainable business practices, and improve product quality and production capacity.

In terms of institutional, Indonesia Eximbank consistently carries out various CSR programs and in 2024 broadly covered the community empowerment, health quality improvement, training and sharing sessions, environmental preservation and infrastructure assistance sector. The implementation of CSR emphasizes Indonesia Eximbank's direct benefit to the community and enhances the corporate reputation as a caring and responsible corporate. The wider range of people who benefit from CSR programs demonstrates the effectiveness of Indonesia Eximbank's sustainability approach.

In addition to implementing sustainability principles in the execution of its role, Indonesia Eximbank also applies them in its work culture and daily operational work processes (*Green Office Lifestyle*) in the form of measures aimed at energy efficiency, reducing carbon emissions, and a culture of recycling.

Various economic, social, and environmental sustainability programs also support the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), especially in poverty alleviation, inclusive economic growth, and decent work creation. Indonesia Eximbank's contribution to the achievement of SDGs is in accordance with the Institute's core business in the field of export financing for social welfare.

Target dan Upaya Pencapaian Keberlanjutan

Dampak positif dari penerapan prinsip keberlanjutan terlihat dari peningkatan persentase pembiayaan atas pelaku usaha UMKM dari total pembiayaan LPEI setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa pembiayaan ekspor dijalankan secara tepat dan memberikan manfaat maksimal bagi pemangku kepentingan.

Dalam menerapkan prinsip keberlanjutan, LPEI juga memiliki target lainnya secara jangka pendek dan panjang yang mengacu pada 8 Prinsip Keuangan Berkelanjutan sesuai POJK 51/2017, yang tercermin dalam RAKB. Beberapa target utama yang telah mulai diimplementasikan pada tahun 2024 antara lain: penerapan ESG *Checklist* di seluruh portofolio *good bank*, pemetaan risiko keberlanjutan, penghitungan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) untuk *scope 2*, serta pelaksanaan program TJSL yang selaras dengan ESG dan SDGs.

Guna mendukung pencapaian target tersebut, LPEI secara aktif mengikuti berbagai sesi *information sharing* mengenai keberlanjutan serta menjalin komunikasi dengan berbagai lembaga, termasuk menggali potensi sumber dana hijau. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dalam bidang ESG dan SDG juga menjadi fokus kebijakan dan program kerja, melalui kepesertaan secara konsisten dalam pelatihan topik terkait yang relevan.

Tantangan dan Strategi Menghadapinya

LPEI menyadari bahwa upaya menerapkan prinsip keberlanjutan secara utuh dan konsisten, tidak terlepas dari berbagai tantangan. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam area ESG dan SDG menjadi faktor utama yang harus segera diatasi. Selain itu, sistem informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi juga menghambat inventarisasi emisi dan perhitungan penggunaan energi, selain itu juga belum tersedianya alat ukur risiko ESG yang spesifik. Tantangan lain proses transisi menuju penyaluran pembiayaan hijau adalah belum tersedianya dukungan pendanaan hijau.

Menyikapi tantangan ini, Manajemen memiliki komitmen untuk secara sistematis mengambil langkah-langkah strategis, dimulai dari penyusunan perencanaan strategis, penyusunan dan penyempurnaan kebijakan internal, penguatan kapasitas pegawai, serta penetapan program TJSL berbasis ESG.

Terdapat peluang besar dalam investasi hijau, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dapat mempercepat proses transformasi ekonomi menuju arah yang lebih berkelanjutan serta memperkuat ketahanan terhadap risiko perubahan iklim. Kami siap untuk memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk mengatasi tantangan-tantangan dan memaksimalkan kontribusi usaha terhadap keberlanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Targets and Efforts to Achieve Sustainability

The positive impact of applying sustainability principles is reflected in the increasing percentage of financing provided to MSMEs out of Indonesia Eximbank's total financing each year. This indicates that export financing is being carried out appropriately and provides maximum benefits to stakeholders.

In implementing sustainability principles, Indonesia Eximbank also has other short- and long-term targets based on the 8 Principles of Sustainable Finance as outlined in POJK 51/2017, which are reflected in the Sustainable Finance Action Plan (RAKB). Several key targets that started to be implemented in 2024 include: the application of an ESG Checklist across good bank portfolio, sustainability risk mapping, calculation of Greenhouse Gas (GHG) emissions for scope 2, and the execution of CSR programs aligned with ESG and SDGs.

To support the achievement of these targets, Indonesia Eximbank actively participates in information-sharing sessions on sustainability and maintains communication with various institutions, including exploring opportunities for green funding sources. Strengthening human capital capacity in the fields of ESG and SDG is also a policy and work program focus, carried out by consistent participation in relevant topic training.

Challenges and Resolution Strategies

Indonesia Eximbank realizes that the efforts made to implement sustainability principles comprehensively and consistently are not without challenges. Limited human capital capacity in the field of ESG and SDG is a major factor that must be addressed immediately. In addition, the lack of fully integrated information systems hinders the inventory of emissions and the calculation of energy usage, and there is also no specific ESG risk measurement tool available yet. Another challenge is the transition process toward green financing, hampered by the lack of available green funding support.

In response to these challenges, Management is committed to systematically taking strategic measures, starting from preparing strategic plans, drafting and refining internal policies, strengthening employee capacity, and setting ESG-based CSR programs.

There are significant opportunities in green investment, both from domestic and international sources, which can accelerate the economic transformation process toward greater sustainability and strengthen resilience against climate change risks. We are ready to leverage every opportunity to overcome these challenges and maximize business contributions to sustainability for all stakeholders.

Penilaian Kinerja Komite di bawah Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Lembaga, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana dibantu oleh komite-komite di bawahnya, yaitu Komite Manajemen Risiko, Komite Pengembangan Produk, Komite Kebijakan dan Pedoman, Komite Assets & Liabilities Management, Komite Teknologi Sistem Informasi, Komite Pengadaan, Komite Jasa Konsultasi, Komite Pembiayaan, dan Komite Sumber Daya Manusia.

Untuk tahun 2024, Manajemen memberikan penilaian positif terhadap kontribusi dan kinerja yang telah diberikan oleh seluruh komite dengan berlandaskan pada tolok ukur penilaian sebagai berikut:

1. Komite Manajemen Risiko
Komite Manajemen Risiko memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan risiko yang optimal di LPEI. Sepanjang tahun 2024, Komite Manajemen Risiko aktif memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif terkait kebijakan dan implementasi Manajemen Risiko, termasuk perubahannya. Selain itu, Komite Manajemen Risiko juga mengevaluasi serta mengusulkan perbaikan terhadap Komite Kebijakan Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan Manajemen Risiko. Berbagai keputusan bisnis yang belum tercakup dalam prosedur juga menjadi perhatian dalam rekomendasi yang diberikan. Dengan keterlibatan aktifnya, Komite Manajemen Risiko berkontribusi signifikan dalam memperkuat kepatuhan terhadap regulasi dan efektivitas mitigasi risiko. Di tahun 2024, Komite Manajemen Risiko mengadakan 24 (dua puluh empat) kali rapat dengan tingkat kehadiran rata-rata anggota mencapai 92%.
2. Komite Pengembangan Produk
Sepanjang tahun 2024, LPEI terus berupaya mengoptimalkan pengembangan produk dan layanan guna mendukung pertumbuhan ekspor nasional. Dalam hal ini, Komite Pengembangan Produk memainkan peran strategis dalam merumuskan rekomendasi yang relevan dengan dinamika industri dan kebutuhan pemangku kepentingan. Berbagai rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya berkontribusi pada peluncuran produk baru, tetapi juga penyempurnaan prosedur dan ketentuan internal. Sepanjang tahun, Komite Pengembangan Produk mengadakan 10 (sepuluh) kali rapat dengan tingkat kehadiran rata-rata anggota mencapai 99,3%.
3. Komite Kebijakan dan Pedoman
Sepanjang tahun 2024, Komite Kebijakan dan Pedoman terus berperan aktif dalam memperkuat tata kelola internal LPEI. Komite Kebijakan dan Pedoman tidak hanya memberikan rekomendasi strategis kepada Direktur Eksekutif terkait penyusunan dan implementasi peraturan

Performance Assessment of Committees under Executive Director and Managing Directors

In carrying out the duties and responsibilities of managing the Institution, Executive Director and Managing Directors are assisted by the committees under them, namely Risk Management Committee, Product Development Committee, Policy and Guidelines Committee, Assets & Liabilities Management Committee, Information Systems Technology Committee, Procurement Committee, Consulting Services Committee, Financing Committee, and Human Capital Committee.

For 2024, the Management gave a positive assessment on the contributions and performance that have been given by all committees based on the following assessment benchmarks:

1. Risk Management Committee
Risk Management Committee has a strategic role in ensuring optimal risk management at Indonesia Eximbank. Throughout 2024, Risk Management Committee actively provided recommendations to the Executive Director regarding Risk Management policies and implementation, including changes. Risk Management Committee also evaluated and proposed improvements to the Financing, Guarantee, and Insurance Policy Committee in order to improve the effectiveness of Risk Management implementation. Various business decisions that are not yet covered in the procedures are also a concern in the recommendations given. With its active involvement, Risk Management Committee contributes significantly to strengthening regulatory compliance and the effectiveness of risk mitigation. In 2024, Risk Management Committee held 24 (twenty four) meetings with an average member attendance rate of 92%.
2. Product Development Committee
Throughout 2024, Indonesia Eximbank continues to optimize product and service development to support national export growth. In this regard, Product Development Committee plays a strategic role in formulating recommendations that are relevant to industry dynamics and stakeholder needs. The various recommendations produced not only contribute to the launch of new products, but also to the improvement of internal procedures and provisions. Throughout the year, Product Development Committee held 10 (ten) meetings with an average member attendance rate of 99.3%.
3. Policy and Guidelines Committee
Throughout 2024, Policy and Guidelines Committee continues to play an active role in strengthening Indonesia Eximbank's internal governance. Policy and Guidelines Committee not only provides strategic recommendations to the Executive Director regarding the preparation and

internal, tetapi juga memastikan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan yang diterapkan. Dengan pendekatan yang sistematis, Komite Kebijakan dan Pedoman berkontribusi dalam mengatasi berbagai tantangan yang muncul serta menjaga keseimbangan antara kepatuhan regulasi dan efisiensi operasional. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Kebijakan dan Pedoman mengadakan 20 (dua puluh) kali rapat dengan tingkat kehadiran rata-rata anggota mencapai 100%.

4. **Komite Assets & Liabilities Management**
Sepanjang tahun 2024, Komite Assets dan Liabilities Management menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung stabilitas keuangan LPEI. Melalui evaluasi menyeluruh, Direktur Eksekutif menilai bahwa Komite Assets dan Liabilities Management telah beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Komite Assets dan Liabilities Management memberikan rekomendasi strategis terkait kebijakan manajemen risiko, batasan, serta pedoman pengelolaan aset dan liabilitas dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang relevan. Keputusan yang dihasilkan bertujuan untuk menjaga keseimbangan finansial dan memastikan keberlanjutan operasional LPEI. Sepanjang tahun, Komite Assets & Liabilities Management mengadakan 16 (enam belas) kali rapat dengan tingkat kehadiran rata-rata anggota mencapai 81%.
5. **Komite Teknologi Sistem Informasi**
Sepanjang tahun 2024, penguatan infrastruktur teknologi sistem informasi menjadi salah satu fokus utama dalam mendukung operasional LPEI. Komite Teknologi Sistem Informasi berperan dalam memberikan rekomendasi strategis kepada Direktur Eksekutif, mencakup perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pengembangan sistem informasi. Selain itu, Komite Teknologi Sistem Informasi turut menetapkan arah kebijakan untuk pengembangan jangka menengah dan panjang, termasuk rencana investasi teknologi yang selaras dengan kebutuhan LPEI. Keberadaan Komite Teknologi Sistem Informasi memastikan implementasi teknologi dilakukan secara optimal sesuai dengan strategi dan tantangan yang dihadapi. Sepanjang tahun, komite telah mengadakan 5 (lima) kali rapat dengan tingkat kehadiran rata-rata anggota mencapai 79%.
6. **Komite Pengadaan**
Komite Pengadaan memiliki peran strategis dalam memastikan proses pengadaan di LPEI berjalan efektif dan sesuai aturan. Sepanjang tahun 2024, Komite Pengadaan aktif memberikan rekomendasi yang mendukung optimalisasi pengadaan, dengan fokus pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Rekomendasi tersebut mencakup perbaikan dalam pelaksanaan pengadaan agar lebih tepat guna tanpa mengabaikan prinsip kepatuhan dan kualitas. Selain itu, Komite Pengadaan berkontribusi dalam merumuskan langkah-langkah peningkatan yang sejalan dengan kebijakan yang berlaku. Komitmen ini tercermin dalam 68 (enam puluh delapan) kali rapat dengan tingkat kehadiran rata-rata anggota mencapai 80%.

implementation of internal regulations, but also ensures the effectiveness of supervision of the compliance applied. With a systematic approach, Policy and Guidelines Committee contributes to overcoming various challenges that arise and maintaining a balance between regulatory compliance and operational efficiency. In carrying out its duties, Policy and Guidelines Committee held 20 (twenty) meetings with an average attendance rate of 100% of members.

4. **Assets & Liabilities Management Committee**
Throughout 2024, Assets and Liabilities Management Committee optimally carried out its role in supporting Indonesia Eximbank's financial stability. Through a comprehensive evaluation, the Executive Director assessed that Assets and Liabilities Management Committee had operated in accordance with applicable regulations. Assets and Liabilities Management Committee provided strategic recommendations regarding risk management policies, limitations, and guidelines for managing assets and liabilities by considering relevant internal and external factors. The resulting decisions aim to maintain financial balance and ensure the sustainability of Indonesia Eximbank's operations. Throughout the year, Assets & Liabilities Management Committee held 16 (sixteen) meetings with an average attendance rate of 81%.
5. **Information System Technology Committee**
Throughout 2024, strengthening information system technology infrastructure was one of the main focuses in supporting Indonesia Eximbank's operations. The Information System Technology Committee plays a role in providing strategic recommendations to the Executive Director, including planning, supervision, and evaluation of information system development. In addition, Information System Technology Committee also determines the policy direction for medium and long-term development, including technology investment plans that are in line with Indonesia Eximbank's needs. The existence of Information System Technology Committee ensures that technology implementation is carried out optimally in accordance with the strategies and challenges faced. Throughout the year, the committee has held 5 (five) meetings with an average member attendance rate of 79%.
6. **Procurement Committee**
Procurement Committee has a strategic role in ensuring that the procurement process at Indonesia Eximbank runs effectively and in accordance with regulations. Throughout 2024, Procurement Committee actively provided recommendations that support procurement optimization, with a focus on efficiency, transparency, and accountability. These recommendations include improvements in the implementation of procurement to be more effective without ignoring the principles of compliance and quality. In addition, Procurement Committee contributes to formulating improvement measures in line with applicable policies. This commitment is reflected in 68 (sixty-eight) meetings with an average attendance rate of 80%.

7. Komite Jasa Konsultasi

Sepanjang tahun 2024, Komite Jasa Konsultasi berperan aktif dalam mendukung efektivitas program jasa konsultasi melalui berbagai rekomendasi strategis kepada Direktur Eksekutif. Setiap keputusan yang diusulkan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, mitigasi risiko, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Jasa Konsultasi memberikan arahan terkait persetujuan prinsip atas program jasa konsultasi, sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam RKAT. Dengan kontribusi tersebut, Direktur Eksekutif menilai bahwa peran Komite Jasa Konsultasi berpengaruh positif terhadap kelancaran perencanaan dan implementasi program. Sepanjang tahun 2024, Komite Jasa Konsultasi menggelar 3 (tiga) kali rapat dengan tingkat kehadiran rata-rata anggota mencapai 95%.

8. Komite Pembiayaan

Sepanjang tahun 2024, Komite Pembiayaan berperan penting dalam memastikan proses pengambilan keputusan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan regulasi yang berlaku. Berbagai keputusan strategis telah ditetapkan, termasuk persetujuan proposal pembiayaan, penjaminan, asuransi, serta kebijakan treasury. Selain itu, Komite Pembiayaan turut berkontribusi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dan penetapan kualitas aktiva produk berdasarkan batasan yang telah ditetapkan. Dengan perannya yang krusial, Komite Pembiayaan menjadi bagian integral dalam menjaga stabilitas operasional dan manajemen risiko di LPEI. Selama tahun 2024, Komite Pembiayaan telah mengadakan 275 (dua ratus tujuh puluh lima) rapat untuk segmen UKM dan 288 (dua ratus delapan puluh delapan) rapat untuk segmen Non-UKM, dengan tingkat kehadiran anggota mencapai 100%.

9. Komite Sumber Daya Manusia

Sepanjang tahun 2024, Komite Sumber Daya Manusia berperan aktif dalam memberikan arahan strategis terkait kebijakan SDM. Komite Sumber Daya Manusia tidak hanya mengusulkan penyempurnaan kebijakan, tetapi juga memastikan implementasinya selaras dengan sasaran dan strategi Lembaga. Selain itu, pengembangan nilai-nilai Lembaga tetap menjadi perhatian utama untuk memperkuat budaya organisasi. Dengan konsistensi dalam memberikan masukan yang konstruktif, komite mendukung efektivitas pengelolaan SDM sekaligus memperkuat identitas dan tujuan strategis LPEI. Sepanjang tahun, Komite Sumber Daya Manusia telah mengadakan 12 (dua belas) kali rapat dengan tingkat kehadiran rata-rata anggota mencapai 100%.

7. Advisory Services Committee

Throughout 2024, Advisory Services Committee plays an active role in supporting the effectiveness of consulting services program through various strategic recommendations to the Executive Director. Each proposed decision takes into account the principles of prudence, risk mitigation, and compliance with applicable regulations. In carrying out its duties, Advisory Services Committee provides direction regarding the approval of the principles of advisory services programs, in line with the provisions contained in the RKAT. With this contribution, the Executive Director assesses that the role of Advisory Services Committee has a positive impact on the smooth planning and implementation of the program. Throughout 2024, Advisory Services Committee held 3 (three) meetings with an average member attendance rate of 95%.

8. Financing Committee

Throughout 2024, Financing Committee played an important role in ensuring the decision-making process was in accordance with the principles of prudence and applicable regulations. Various strategic decisions have been made, including approval of financing proposals, guarantees, insurance, and treasury policies. In addition, Financing Committee also contributed to the resolution of problematic financing and determination of product asset quality based on predetermined limits. With its crucial role, Financing Committee is an integral part of maintaining operational stability and risk management at Indonesia Eximbank. During 2024, Financing Committee held 275 (two hundred and seventy-five) meetings for SME segment and 288 (two hundred and eighty-eight) meetings for Non-SME segment, with a member attendance rate of 100%.

9. Human Capital Committee

Throughout 2024, Human Capital Committee played an active role in providing strategic direction related to HC policies. Human Capital Committee not only proposes policy improvements, but also ensures that their implementation is in line with the goals and strategies of the corporate. In addition, the development of the corporate values remains a primary concern to strengthen the organizational culture. By consistently providing constructive input, the committee supports the effectiveness of HC management while strengthening the identity and strategic goals of Indonesia Eximbank. Throughout the year, Human Capital Committee has held 12 (twelve) meetings with an average attendance rate of 100% of members.

Perubahan Komposisi Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana

Di sepanjang tahun 2024, terdapat perubahan Direktur Eksekutif dan jajaran Direktur Pelaksana.

Berikut kronologis perubahan Direktur Eksekutif dan jajaran Direktur Pelaksana hingga Laporan ini diterbitkan.

Changes in the Composition of Executive Director and Managing Directors

Throughout 2024, there were changes in Executive Directors and Managing Directors members.

The following is a Chronology of changes in Executive Directors and Managing Directors members until this Report was published.

Periode 1 Januari 2024 – 16 Juli 2024 Period of January 1, 2024 – July 16, 2024	Periode 17 Juli 2024 - 31 Agustus 2024 Period of July 17, 2024 – August 31, 2024	Periode 1 September 2024 – 24 November 2024 Period of September 1, 2024 – November 24, 2024	Periode 24 November 2024 – 28 Desember 2024 Period of November 24, 2024 – December 28, 2024	28 Desember 2024 – 31 Desember 2024 Period of December 28, 2024 – December 31, 2024
Rijani Tirtoso Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of Board of Directors and Executive Director	Rijani Tirtoso Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of Board of Directors and Executive Director	Rijani Tirtoso Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of Board of Directors and Executive Director	Rijani Tirtoso Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of Board of Directors and Executive Director	Yon Aarsal Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Acting Chairman of Board of Directors and Executive Director
Dikdik Yustandi Direktur Pelaksana Bisnis Managing Director of Business	Maqin U. Norhadi Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis merangkap Direktur Pelaksana Bisnis Managing Director of Business Development and Managing Director of Business	Sam Malee Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit Managing Director of Risk Management & Credit	Sam Malee Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit Managing Director of Risk Management & Credit	Sam Malee Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit Merangkap Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan dan SDM Managing Director of Credit & Risk Management concurrently Acting Managing Director of Corporate Secretary, Compliance & HC
Maqin U. Norhadi Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis Managing Director of Business Development	Agus Windiarto Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional, & Teknologi Informasi Managing Director of Finance, Operations & Information Technology	Anton Herdianto Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pelaksana Bisnis Acting Managing Director of Business	Anton Herdianto Direktur Pelaksana Bisnis Managing Director of Business	Anton Herdianto Direktur Pelaksana Bisnis Managing Director of Business
Agus Windiarto Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional, & Teknologi Informasi Managing Director of Finance, Operations & Information Technology	Chesna F. Anwar Plt. Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan, & Sumber Daya Manusia Acting Managing Director of Corporate Secretary, Compliance, & HC	Maqin U. Norhadi Plt. Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis Acting Managing Director of Business Development	Maqin U. Norhadi Plt. Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis Acting Managing Director of Business Development	Maqin U. Norhadi Plt. Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis Acting Managing Director of Business Development
Chesna F. Anwar Plt. Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan, & Sumber Daya Manusia Acting Managing Director of Corporate Secretary, Compliance, & HC	Sam Malee Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit Managing Director of Risk Management & Credit	Anwar Harsono Plt. Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional, & Teknologi Informasi Acting Managing Director of Finance, Operations & Information Technology	Anwar Harsono Plt. Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional, & Teknologi Informasi Acting Managing Director of Finance, Operations & Information Technology	Anwar Harsono Plt. Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional, & Teknologi Informasi Acting Managing Director of Finance, Operations & Information Technology
Sam Malee Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit Managing Director of Risk Management & Credit		T. Wahyu Prihadi Wibowo Plt. Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan, & Sumber Daya Manusia Acting Managing Director of Corporate Secretary, Compliance, & HC	T. Wahyu Prihadi Wibowo Plt. Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan, & Sumber Daya Manusia Acting Managing Director of Corporate Secretary, Compliance, & HC	

Apresiasi dan Penutup

Atas nama segenap jajaran Direktur Pelaksana LPEI, perkenalkan kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dewan Direktur atas arahan dan saran konstruktif yang diberikan sepanjang tahun 2024 ini. Kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemegang Saham, regulator, dan para pemangku kepentingan atas dukungannya, sehingga LPEI dapat ikut berperan dalam menjadikan eksportir Indonesia sebagai pelaku usaha yang disegani di tataran global.

Sebagai penutup Laporan Manajemen ini, kami berharap bahwa segala upaya yang telah dikerahkan sepanjang tahun, dapat menjadi batu lonjakan bagi LPEI dalam mendorong kinerjanya di masa yang akan datang. Dengan demikian, kami berharap agar kegiatan ekspor Indonesia dapat terus tumbuh optimis, meningkatkan citra karya anak bangsa pada tingkat dunia.

Appreciation and Closing Remarks

On behalf of the entire team of Managing Directors at Indonesia Eximbank, we would like to express our deepest gratitude to the Board of Directors for their guidance and constructive advice Throughout 2024. We would also like to extend our sincere appreciation to our Shareholders, regulators, and stakeholders for their unwavering support, enabling Indonesia Eximbank to contribute to positioning Indonesian exporters as respected players on the global stage.

As we conclude this Management Report, we hope that all the efforts made Throughout the year will serve as a stepping stone for Indonesia Eximbank to further enhance its performance in the future. With this, we remain optimistic that Indonesia's export sector will continue to grow, further elevating the nation's reputation on the world stage.

Atas Nama Direksi

On Behalf of Directors



Sukatmo Padmosukarso

Plt. Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif

Acting Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director



Maqin U. Norhadi

Plt. Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis
Acting Managing Director of Business Development

Sukatmo Padmosukarso

Plt. Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif
Acting Chairman of the Board of Directors concurrently
Executive Director



Anwar Harsono

**Plt. Direktur Pelaksana Keuangan,
Operasional, & Teknologi Informasi**
Acting Managing Director of Finance,
Operations and Information Technology

Sam Malee

**Direktur Pelaksana Manajemen
Risiko & Kredit Merangkap Direktur
Pelaksana Sekretariat Lembaga,
Kepatuhan dan SDM**
Managing Director of Credit & Risk
Management concurrently Acting
Managing Director of Corporate
Secretary, Compliance & HC

Anton Herdianto

Direktur Pelaksana Bisnis
Managing Director of Business



Kanny Hidayat, SE., MA

Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of the Sharia Supervisory Board

Laporan Dewan Pengawas Syariah

Sharia Supervisory Board Report

**Assalamu'alaikum warahmatullaahi
wabarakatuh
Bismillaahirrahmaanirrahim**

Kepada seluruh Pemangku Kepentingan yang kami hormati,
Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam.

Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami selaku Dewan Pengawas Syariah (DPS) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI" atau "Lembaga") untuk menyampaikan laporan terkait kinerja dan pelaksanaan tugas sepanjang tahun 2024 dalam menjaga kepatuhan syariah dalam operasional unit syariah LPEI dan memberikan nasihat serta masukan kepada Direktur Eksekutif serta seluruh jajaran Manajemen. Tercantum pada laporan ini, Kami sampaikan hasil pengawasan seluruh inisiatif Syariah LPEI, yang senantiasa Kami jaga untuk tetap sesuai dengan kodrat Syariah dan prinsip Tata Kelola usaha yang baik (GCG).

Penerapan nilai-nilai Syariah pada kegiatan pembiayaan ekspor LPEI senantiasa terikat kuat dengan amanat yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

DPS menilai sepanjang tahun 2024 tidak melanggar prinsip-prinsip Syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI. Meskipun oleh beragam tantangan baik pada level global maupun nasional, namun LPEI tetap memegang teguh prinsip Syariah dalam menjalankan roda usaha. Atas komitmen tersebut, DPS mengapresiasi segenap jajaran Direksi dalam menjaga konsistensi pada perancangan inisiasi Lembaga, serta segenap Insan Lembaga dalam menerapkan budaya kerja yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

**Assalamu'alaikum warahmatullaahi
wabarakatuh
Bismillaahirrahmaanirrahim**

Dear respected Stakeholders,
First and foremost, let us express our gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala for the blessings and grace that He has bestowed upon us. Let us also send blessings and peace upon our beloved Prophet Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam.

On this auspicious occasion, please allow us as the Sharia Supervisory Board (SSB) of the Indonesia Eximbank ("LPEI" or "Corporate") to submit a report related to the Performance and implementation of duties Throughout the year 2024 in maintaining sharia compliance in the operations of the LPEI sharia unit and providing advice and input to the Executive Director and all levels of Management. Included in this report, we submit the results of supervision of all LPEI Sharia initiatives, which we always maintain to remain in accordance with the nature of Sharia and the principles of Good Corporate Governance (GCG).

Implementation of Sharia values in export financing activities LPEI's export financing activities are always strongly bound by the mandate set forth in Law No. 2 of 2009. contained in Law Number 2 of 2009 on the Indonesian Export Financing Agency.

SSB assesses that the implementation of Indonesia Eximbank's strategic policies Throughout 2024 did not violate Islamic Sharia principles. Despite facing various challenges at both global and national levels, Indonesia Eximbank has remained steadfast in upholding Sharia principles in its operations. For this commitment, SSB appreciates the entire Board of Directors for maintaining consistency in the institution's initiatives, as well as all Indonesia Eximbank personnel for fostering a work culture aligned with Islamic values.



DPS berharap bahwa seluruh inisiasi, komitmen, dan upaya ini dapat terus berlanjut pada tahun-tahun. DPS senantiasa berupaya untuk menjaga setiap langkah-langkah Lembaga agar tetap sejalan dengan fatwa DSN-MUI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui penerbitan opini DPS LPE, pelaksanaan uji petik, dan diskusi pada forum rapat DPS yang dilakukan secara rutin setiap bulannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik, hidayah, dan inayah serta meridhai dan menjaga kita semua di LPEI dan Negara tercinta dalam menjalankan seluruh aktivitas kita. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullaahi wa barakatuh
Dewan Pengawas Syariah

SSB hopes that all initiatives, commitments, and efforts will continue in the years ahead. SSB will always strive to ensure that each step taken by the Institution remains in line with the fatwas of DSN-MUI and applicable laws and regulations through issuing the opinion of Indonesia Eximbank's SSB, conducting spot checks, and holding discussions in the SSB Meetings that are held regularly each month. May Allah Subhanahu wa Ta'ala always grant us blessings, guidance, and protection, and may He keep us in His favor as we carry out our activities in Indonesia Eximbank and our beloved country. Ameen Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullaahi wa barakatuh
Sharia Supervisory Board

Jakarta, April 2025

Atas Nama Dewan Pengawas Syariah

On behalf of the Sharia Supervisory Board

Kanny Hidayat, SE.,MA

Ketua Dewan Pengawas Syariah

Chairman of the Sharia Supervisory Board



Kanny Hidayat, SE., MA

Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of the Sharia Supervisory Board



Dr. Yulizar D. Sanrego, M.Ec

Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of Sharia Supervisory Board

Surat Pernyataan Dewan Direktur Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan 2024

Statement Letter of Board of Directors Regarding Responsibility for the 2024 Annual Report and Sustainability Report

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tahun 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Lembaga.

We, the undersigned, declare that all information in the Annual Report and Sustainability Report of the Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) for 2024 has been fully contained and take full responsibility for the accuracy of the contents of the Institution's Annual Report and Sustainability Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus this statement is made truthfully.

Jakarta, April 2025

Dewan Direktur
Board of Directors

Sukatmo Padmosukarso

Plt. Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif
Acting Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director

Yon Aarsal

Anggota Dewan Direktur
Member of Board of Directors

Fajarini Puntodewi

Anggota Dewan Direktur
Member of Board of Directors

Dwi Teguh Wibowo

Anggota Dewan Direktur
Member of Board of Directors

Arus Gunawan

Anggota Dewan Direktur
Member of Board of Directors

Bambang Setyatmojo

Anggota Dewan Direktur
Member of Board of Directors

Surat Pernyataan Direktur Eksekutif & Direktur Pelaksana Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan 2024

Statement Letter of Executive Director & Managing Directors Regarding Responsibility for the 2024 Annual Report and Sustainability Report

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tahun 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Lembaga.

We, the undersigned, declare that all information in the Annual Report and Sustainability Report of the Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) for 2024 has been fully contained and take full responsibility for the accuracy of the contents of the Institution's Annual Report and Sustainability Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus this statement is made truthfully.

Jakarta, April 2025

Direktur Eksekutif & Direktur Pelaksana
Executive Director & Managing Directors



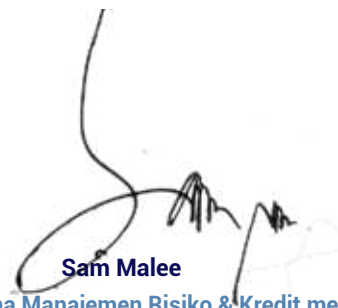
Sukatmo Padmosukarso

Plt. Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif
Acting Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director



Anton Herdianto

Direktur Pelaksana Bisnis
Managing Director of Business



Sam Malee

Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit merangkap Plt. Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan & SDM
Managing Director of Credit & Risk Management concurrently Acting Managing Director of Corporate Secretary, Compliance & HC



Maqin U. Norhadi

Plt. Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis
Acting Managing Director of Business Development



Anwar Harsono

Plt. Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional, & Teknologi Informasi
Acting Managing Director of Finance, Operations, & Information Technology



03

Profil Perusahaan

Company Profile



Identitas dan Informasi Umum Perusahaan

Corporate Identity and General Information



Nama Perusahaan Company's Name	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Indonesia Eximbank
Informasi Perubahan Nama Name Changes Information	Tidak terdapat perubahan nama Lembaga pada tahun buku. Informasi lengkap terkait perubahan nama dan identitas Lembaga, disampaikan pada pembahasan Riwayat Singkat LPEI, Laporan ini. There were no changes to the Institution's name during the financial year. Complete information regarding name and identity changes of the Institution is provided in Brief History of Indonesia Eximbank section of this Report.
Tanggal Pendirian Date of Establishment	01 September 2009 September 01, 2009
Bidang Usaha Line of Business	Lembaga keuangan khusus yang didirikan untuk melaksanakan Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) melalui penyediaan Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi, serta Jasa Konsultasi baik secara konvensional, maupun berdasarkan prinsip syariah baik di dalam, maupun di luar negeri. A Financial Institution established specifically to provide the National Export Financing in the form of Financing, Guarantee and Insurance as well as Advisory Services conventionally and on sharia principle-based, domestically or overseas.
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4957. Act of the Republic of Indonesia No. 2 of 2009 on Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Addition of the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4957.
Jenis/Badan Hukum Perusahaan Legal Status of Entity	Lembaga Keuangan Khusus yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 Special Financial Institution established under the Act No. 2 of 2009.
Modal Dasar Authorized Capital	Rp4.321.586.806.472 Rp4,321,586,806,472
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully-Paid in Capital	Rp38.280.843.825.687 (Per 31 Desember 2024) Rp38,280,843,825,687 (as of December 31, 2024)
Kepemilikan Saham Share Ownership	100% milik Pemerintah Indonesia dan tidak terbagi atas saham 100% Government-owned and not divided into shares
Bursa Efek Stock Exchange	Obligasi LPEI dicatat dan diperdagangkan pada: Bursa Efek Indonesia (IDX) dan Bursa Efek Singapura (SGX) LPEI bonds are listed and traded on: 1. Indonesia Stock Exchange (IDX); and 2. Singapore Stock Exchange (SGX)
Kode Obligasi di BEI Bond Codes on the IDX	BEXI
Jumlah Karyawan Number of Employees	521 orang (2024) 521 employees (2024)
Jaringan Usaha Business Network	1 Kantor Pusat 3 Kantor Wilayah 4 Kantor Cabang 1 Kantor Area 1 Head Office 3 Regional Offices 4 Branch Offices 1 Area Office

Akses Terhadap Perusahaan Termasuk Kantor Cabang atau Perwakilan

Access to the Company Including Branch or Representative Offices

Jaringan Kantor Office Network	Alamat Address		
Kantor Pusat Head Office	Prosperity Tower, 1st floor District 8, SCBD, Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta, 12190, Indonesia	Tel : +62 (21) 3950 3600 Fax : (62-21) 395 03699 E-mail : corpsec@indonesiaeximbank.go.id Website : www.indonesiaeximbank.go.id	Media Sosial / Social Media Facebook: EximbankID Instagram: @indonesiaeximbank X: Eximbank_ID YouTube: Indonesia Eximbank LinkedIn : Indonesia-eximbank
ENTITAS ANAK SUBSIDIARY			
PT IEB Prima Aset	Gedung Prosperity lantai 33 District 8, SCBD Lot. 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190		
KANTOR WILAYAH REGIONAL OFFICES			
Kantor Wilayah I Regional I Office	Prosperity Tower Lantai 1, District 8, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Tel. (62-21) 395 03600 Fax. (62-21) 395 03600		
Kantor Wilayah II Regional II Office	LPEI Kantor Cabang Surakarta, Gedung Indonesia Eximbank Jl. Dr. Radjiman No. 457, Bumi, Laweyan, Surakarta 57148, Jawa Tengah Tel. : 0271-740999		
Kantor Wilayah III Regional III Office	Intiland Tower 2nd Floor, Suite 1 Jl. Panglima Sudirman 101-103, Surabaya 60271, Indonesia Tel. : (62-31) 534 9382 Fax. : (62-31) 534 9383		
KANTOR CABANG BRANCH OFFICE			
Makassar	Gedung Keuangan Negara II (GKN II), Lt. 5 Jl. Urip Sumoharjo Km.4, Panakkukang Makassar 90232, Indonesia		
Balikpapan	Grand Sudirman Building Panin Tower, Main Lobby 203 Jl. Jend. Sudirman No. 7, Balikpapan 76411, Indonesia Tel. : (62-542) 721 9810 Fax. : (62-542) 721 9820		
Batam	Graha Pena Batam Building 7th Floor, Unit 704 Jl. Raya Batam Center, Batam 29461, Indonesia Tel. : (62-778) 461 414 Fax. : (62-778) 460 125		
Denpasar	Gedung Keuangan Negara Jalan Kusuma Atmaja, Sumerta Kelod Denpasar – Bali, 80234 Tel. : (62-361) 235 065 Fax. : (62-361) 235 065		
KANTOR AREA AREA OFFICE			
Medan	B&G Tower, J.W. Marriott 6th Floor, Unit 607-610 Jl. Putri Hijau No. 10, Medan 20111, Indonesia Tel. : (62-61) 800 10098 Fax. : (62-81) 800 10096		

Riwayat Singkat LPEI

Brief History of LPEI



Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI" atau "Indonesia Eximbank") merupakan lembaga khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai *Special Mission Vehicle* (SMV) di bawah naungan Kementerian Keuangan RI untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional. Pendirian LPEI mengacu pada UU No. 2 Tahun 2009 ("UU No. 2/2009") tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dengan modal awal pembentukan ditetapkan paling sedikit Rp4 triliun. Modal tersebut merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

LPEI resmi beroperasi pada tanggal 1 September 2009 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 336/KMK.06/2009 pada tanggal 24 Agustus 2009 tentang Penetapan Tanggal Operasionalisasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 2/2009, LPEI berfungsi mendukung program ekspor nasional melalui Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) dengan menerapkan skema pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. Penyaluran PEN dapat dilakukan dalam bentuk Pembiayaan, Penjaminan, dan/atau Asuransi yang diberikan kepada badan usaha termasuk perseorangan berbentuk badan hukum, maupun yang tidak berbentuk badan hukum, serta kepada badan usaha yang berdomisili di dalam, maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia dan termasuk perorangan. Selain itu, PEN yang disalurkan LPEI juga dapat dilakukan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

Indonesia Eximbank is a specialised financial institution established by the Government of Indonesia as a Special Mission Vehicle (SMV) under the auspices of the Indonesian Ministry of Finance to support the implementation of national export financing activities. The establishment of Indonesia Eximbank pursuant to Act No. 2 of 2009 on Indonesia Eximbank, with an initial capital of at least Rp4 trillion. The capital is a state treasury that is separated and not divided into shares.

Indonesia Eximbank officially operated on September 1, 2009 in accordance with Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 336/KMK.06/2009 on August 24, 2009 concerning Determination of the Operationalisation of Indonesia Eximbank. As mandated in article 5 paragraph (1) of Act No. 2/2009, Indonesia Eximbank functions to support the national export program through National Export Financing (PEN) by implementing financing, guarantee and insurance schemes. The distribution of PEN can be carried out in the form of Financing, Guarantee, and/or Insurance provided to business entities including individuals in the form of legal entities, as well as those that are not in the form of legal entities, as well as to business entities, including individuals, domiciled inside and outside the territory of the Republic of Indonesia. In addition, PEN channeled by Indonesia Eximbank can also be carried out in either conventional financings or Sharia-based financing.

Dalam menjalankan fungsinya, LPEI memiliki tugas untuk:

- Menyalurkan pembiayaan, penjaminan dan/ atau asuransi dalam rangka ekspor, maupun menghasilkan barang dan jasa dan/atau usaha lain yang menunjang ekspor;
- Menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan, tetapi mempunyai prospek untuk peningkatan ekspor nasional; dan
- Membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial dan/ atau penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia.

Di samping melakukan kegiatan penyaluran pembiayaan, LPEI juga dapat memberikan bimbingan dan Jasa Konsultasi kepada Bank, Lembaga Keuangan, Eksportir, produsen barang ekspor, khususnya usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dan melakukan kegiatan lain yang menunjang tugas dan wewenang LPEI sepanjang tidak bertentangan dengan UU No. 2/2009.

Sebagai lembaga khusus yang dibentuk oleh Pemerintah, organ tertinggi dalam struktur tata kelola LPEI dipimpin oleh Dewan Direktur yang bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional LPEI. Sementara itu pelaksana operasional LPEI menjadi tanggung jawab penuh Direktur Eksekutif. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Eksekutif dibantu oleh paling banyak 5 (lima) orang Direktur Pelaksana.

Sebagai lembaga yang mendapatkan amanat untuk menjadi katalis ekspor Indonesia, eksistensi LPEI di Indonesia diyakini telah berkontribusi dalam mendukung kegiatan ekspor Indonesia terutama dalam membantu para pelaku ekspor khususnya UMKM yang berorientasi ekspor agar semakin berdaya saing dengan usaha yang berkelanjutan dan dapat mendukung penguatan ekonomi nasional. Selain itu, LPEI juga terus memperluas jalinan kerja sama dengan pihak-pihak yang kredibel untuk memperkuat posisinya dalam meningkatkan bisnis asuransi untuk mendorong ekspor nasional.

Informasi Perubahan Nama LPEI

Sejak pertama kali didirikan tanggal 1 September 2009, LPEI tidak pernah melakukan perubahan nama maupun identitas Lembaga lainnya, seperti status hukum.

In carrying out its functions, the duties of Indonesia Eximbank are as follows:

- Disbursement of financing, guarantee and/or insurance for exports or producing goods and services and/or other businesses supporting export;
- Providing financing for the transactions or projects that falls into the category that cannot be financed by banks, but has the prospects to increase the national exports; and
- Assisting in overcoming the barriers encountered by the Banks or Financial Institutions in providing financing for Exporters that are commercially potential and/or important in Indonesia's economic development.

In addition to carrying out financing distribution, Indonesia Eximbank also provides Advisory Services to the Banks, Financial Institutions, Exporters, export goods producers, particularly in the micro, small and medium enterprises segment, and cooperatives; and carries out other activities that support the duties and authorities of Indonesia Eximbank that are in line with Act No. 2/2009.

As a specialised institution established by the Government, the sole organ of Indonesia Eximbank's governance structure is led by Board of Directors who is responsible for formulating and establishing policies, as well as supervising the operations of Indonesia Eximbank. Meanwhile, the operational implementation of Indonesia Eximbank is the responsibility of Executive Director. Executive Director is assisted by a maximum of 5 (five) Managing Directors in the implementation of his/her duties.

As an institution that has the mandate to become a catalyst for Indonesian exports, Indonesia Eximbank's existence in Indonesia is believed to have contributed to supporting Indonesia's export activities, especially in helping exporters, especially export-oriented MSMEs, to be more competitive with sustainable businesses and can support the strengthening of the national economy. In addition, Indonesia Eximbank's also continues to expand its cooperation with credible parties to strengthen its position in increasing the insurance business to encourage national exports.

Information On Name Changes of Indonesia Eximbank

Since its establishment on September 1, 2009, there were no changes on the Company's identity, name or legal status.

Kegiatan Usaha

Business Activities

Kegiatan Usaha Berdasarkan Amanat Undang-undang LPEI

Sebagaimana tertuang pada mandat UU No. 2/2009, LPEI dibentuk untuk mendukung Program Ekspor nasional dengan memberikan Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) yang terdiri dari penyediaan Pembiayaan, Penjaminan, dan/atau Asuransi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, LPEI melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Pembiayaan yang diberikan dapat disalurkan dalam bentuk pembiayaan modal kerja ekspor dan/atau pembiayaan investasi ekspor.
2. Penjaminan yang diberikan dapat berupa:
 - a. Penjaminan bagi eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang dan/atau jasa di luar negeri;
 - b. Penjaminan bagi importir barang dan jasa Indonesia di luar negeri atas pembayaran yang telah diberikan kepada eksportir Indonesia untuk pembiayaan kontrak ekspor atas penjualan barang dan/atau jasa atau pemenuhan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan Indonesia;
 - c. Penjaminan bagi Bank yang menjadi mitra penyediaan pembiayaan transaksi ekspor yang telah diberikan kepada eksportir Indonesia; dan
 - d. Penjaminan dalam rangka tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang seluruhnya atau sebagian merupakan kegiatan yang menunjang ekspor.
3. Asuransi dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. Asuransi atas risiko kegagalan ekspor;
 - b. Asuransi atas risiko kegagalan bayar;
 - c. Asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri; dan/atau
 - d. Asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor.

Selain melakukan kegiatan usaha konvensional, LPEI juga dapat memberikan PEN berdasarkan prinsip syariah.

Di samping menyalurkan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi kepada nasabah, LPEI juga dapat memberikan bimbingan dan jasa konsultasi kepada Bank, lembaga keuangan, eksportir, produsen barang ekspor, serta melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor (Eximbank) di negara lain, antara lain penyediaan *Counter Guarantee* (kontra garansi), *Joint Guarantee* (penjaminan bersama), pembiayaan substitusi impor, serta pembiayaan impor bahan baku yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Business Activities Based On The Mandate Of The Law

As mandated by Law No. 2/2009, Indonesia Eximbank was established to support National Export Program by providing National Export Financing (PEN), which consists of Financing, Guarantee and/or Insurance. Therefore, the business sectors carried out are:

1. The financing disbursements are provided in the form of export working capital financing and investment export financing.
2. The guarantees are provided in the form of:
 - a. Guarantee for Indonesian exporters on payments received from the overseas buyer of goods and/or services;
 - b. Guarantee for Indonesian importer of goods and services abroad for the payment of which has been provided to Indonesian exporters to finance export contracts on the sale of goods and/or services or fulfilment of work or services carried out by the Indonesian companies;
 - c. Guarantee to Bank's partner in providing financing export transaction that has been provided to Indonesian Exporters; and/or
 - d. Guarantee in the framework of tenders related to the implementation of projects that partly or entirely support export activities.
3. Insurances are provided in the form of:
 - a. Insurance to cover the risk of failure on export;
 - b. Insurance to cover the risk of payment failure;
 - c. Insurance to cover the investment by Indonesian companies abroad, and/or
 - d. Insurance to cover the political risk in the country's export destinations.

Other than conventional business activities, Indonesia Eximbank also provides the National Export Financing of the Sharia principles-based.

Apart from providing financing, guarantee, and insurance to customers, Indonesia Eximbank also provides mentoring and advisory services to Banks, Financial Institutions, exporters, export goods manufacturers, as well as carries out other activities commonly conducted by the Export Financing Institution (Eximbank) in other countries, among others counter guarantee, joint guarantee, import substitution financing, as well as imports of raw materials financing implemented to meet the national needs.

Tidak hanya itu, LPEI juga dapat menjalankan Penugasan Khusus Pemerintah atau *National Interest Account*, yaitu penugasan yang diberikan pemerintah kepada LPEI untuk menyediakan Pembiayaan Ekspor atas transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, tetapi dianggap perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, pendanaan LPEI diperoleh dari:

1. Penerbitan surat berharga;
2. Pinjaman jangka pendek, menengah, dan/atau panjang yang bersumber dari pemerintah asing, lembaga multilateral, bank dan serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dari dalam, maupun luar negeri, dan Pemerintah;
3. Hibah;
4. Penempatan dana oleh Bank Indonesia; dan
5. Penyertaan Modal Negara.

Produk dan Jasa

PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan Modal Kerja Ekspor (PMKE)
 - a. PMKE
 - PMKE Transaksional
 - PMKE Jangka Pendek
 - PMKE Revolving
 - PMKE Term Loan
 - PMKE Fixed Loan
 - b. Trade Finance
 - Trust Receipt Financing
 - Pembiayaan Pre-Ekspor
 - Pembiayaan Wesel Ekspor (PWE)
 - Buyer's Credit
 - Account Payable (AP) Financing
 - Account Receivable (AR) Financing
 - Supply Chain Financing
 - Approved Payable Financing
 - Correspondent Bank Bill Discounting (CBBD)
 - Auto purchase
 - Documentary Collection
 - c. Non- Cash Loan/Financing
 - Penerbitan LC/SKBDN
 - LC/SKBDN Sight/Ussance
2. Pembiayaan Investasi Ekspor (PIE)
 - a. Pembiayaan Investasi
 - b. Plasma Perkebunan
 - c. Plasma Pertambakan

Indonesia Eximbank is also able to carry out Government Special Assignment or National Interest Account. This is an assignment from the government to Indonesia Eximbank to provide Export Financing for transactions or projects that are commercially difficult to implement, but considered necessary by the Government to support the export policies or programs.

Indonesia Eximbank source of funds can be obtained from:

1. The issuance of securities/bonds;
2. Short-term, medium and/or long-term borrowings from foreign governments, multilateral institutions, banks and financial institutions, and the Government;
3. Grants;
4. Placements by Bank Indonesia, and;
5. Government Capital Injection

Product and Services

FINANCING

1. Export Working Capital Financing (PMKE)
 - a. PMKE
 - PMKE Transactional
 - PMKE Short-Term
 - PMKE Revolving
 - PMKE Term Loan
 - PMKE Fixed Loan
 - b. Trade Finance
 - Trust Receipt Financing
 - Pre-Export Financing
 - Export Bills Financing (PWE)
 - Buyer's Credit
 - Account Payable (AP) Financing
 - Account Receivable (AR) Financing
 - Supply Chain Financing
 - Approved Payable Financing
 - Correspondent Bank Bill Discounting (CBBD)
 - Auto purchase
 - Documentary Collection
 - c. Non-Cash Loan/Financing
 - LC/SKBDN Issuance
 - LC/SKBDN Sight/Ussance
2. Export Investment Financing (PIE);
 - a. Investment Financing
 - b. Plantation Plasma;
 - c. Aquaculture Plasma;



3. Produk Pembiayaan Lain
 - a. Pembiayaan Luar Negeri
4. Akad Syariah Produk Pembiayaan Ekspor Nasional, antara lain:
 - a. Akad Murabahah
 - b. Akad Musyarakah
 - c. Akad Musyarakah Mutanaqishah
 - d. Akad Ijarah Munthahiya Bittamlik (IMBT)
 - e. Akad Wakalah bil Ujah dan Qardh
 - f. Akad Hawalah bil Ujah
 - g. Akad Kafalah bil Ujah
 - h. Akad Tabarru

PENJAMINAN

1. Penjaminan Proyek
2. Jaminan Kepabeanaan
3. Penjaminan Kredit/Pembiayaan

ASURANSI

1. Proteksi Piutang Dagang
2. Marine Cargo
3. Asuransi Investasi Luar Negeri

JASA KONSULTASI

1. Pelatihan Ekspor (Coaching Program for New Exporter - CPNE)
2. Marketing Handholding
3. Community Development (Desa Devisa)
4. Rumah Ekspor
5. Program Kemitraan

PENUGASAN KHUSUS EKSPOR

Penugasan Khusus dan Penugasan Pemerintah Lainnya

1. PKE Penerbangan
2. Alat Transportasi
3. KEK Mandalika
4. Pariwisata SP
5. UKM
6. Kawasan
7. Trade Finance
8. Industri Farmasi
9. Penjaminan Kredit PEN
10. Penugasan Investasi Pemerintah

TATA KELOLA DEvisa HASIL EKSPOR (DHE)

1. Optimus
2. Prime
3. DARE

3. Other Financing Products
 - a. Overseas Financing
4. National Export Financing Product Sharia Contract, such as:
 - a. Murabahah Contract
 - b. Musyarakah Contract
 - c. Musyarakah Mutanaqishah Contract
 - d. Ijarah Munthahiya Bittamlik (IMBT) Contract
 - e. Wakalah bil Ujah and Qardh Contract
 - f. Hawalah bil Ujah Contract
 - g. Kafalah bil Ujah Contract
 - h. Tabarru Contract

GUARANTEE

1. Project Guarantee
2. Custom Bond
3. Credit Guarantee/Financing

INSURANCE

1. Trade Credit Insurance
2. Marine Cargo
3. Overseas Investment Insurance

ADVISORY SERVICES

1. Export Coaching (Coaching Program for new Exporter - CPNE)
2. Marketing Handholdin
3. Community Development (Go Export Village)
4. Rumah Ekspor
5. Program Kemitraan

SPECIAL EXPORT ASSIGNMENT

National Interest Account and Other Assignments

1. PKE Aviation
2. Transportation Special Assignment
3. PKE Mandalika
4. SP Tourism
5. SME
6. Regions
7. Trade Finance
8. Pharmaceutical Industry
9. PEN Credit Guarantee
10. Government Investment Assignment

DHE GOVERNANCE

1. Optimus
2. Prime
3. DARE

Wilayah Operasional

Operational Area

Hingga akhir tahun 2024, LPEI memiliki 9 kantor di kota-kota yang tersebar di Indonesia, terdiri dari 1 Kantor Pusat, 3 Kantor Wilayah, 4 Kantor Cabang, dan 1 Kantor Area.

By the end of 2024, Indonesia Eximbank had 9 offices in various cities across Indonesia, consisting of 1 Head Office, 3 Regional Offices, 4 Branch Offices, and 1 Area Office.



Kantor Wilayah

Regional Offices

Kantor Wilayah I

Prosperity Tower Lantai 1, District 8, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190,

Indonesia

Tel. (62-21) 395 03600
Fax. (62-21) 395 03600

Kantor Wilayah II

LPEI Kantor Cabang Surakarta, Gedung Indonesia Eximbank Jl. Dr. Radjiman No. 457, Bumi, Laweyan, Surakarta 57148, Jawa Tengah
Tel. : 0271-740999

Kantor Wilayah III

Intiland Tower 2nd Floor, Suite 1 Jl. Panglima Sudirman 101-103, Surabaya 60271, Indonesia
Tel. : (62-31) 534 9382
Fax. : (62-31) 534 9383

Kantor Cabang

Branch Offices

Makassar

Gedung Keuangan Negara II (GKN II), Lt. 5 Jl. Urip Sumoharjo Km.4, Panakkukang
Makassar 90232, Indonesia

Balikpapan

Grand Sudirman Building Panin Tower, Main Lobby 203 Jl. Jend. Sudirman No. 7, Balikpapan 76411, Indonesia
Tel. : (62-542) 721 9810
Fax. : (62-542) 721 9820

Batam

Graha Pena Batam Building 7th Floor, Unit 704 Jl. Raya Batam Center, Batam 29461, Indonesia
Tel. : (62-778) 461 414
Fax. : (62-778) 460 125

Denpasar

Gedung Keuangan Negara Jalan Kusuma Atmaja, Sumerta Kelod Denpasar – Bali, 80234
Tel. : (62-361) 235 065
Fax. : (62-361) 235 065

Kantor Area

Area Offices

Medan

B&G Tower, J.W. Marriott 6th Floor, Unit 607-610 Jl. Putri Hijau No. 10, Medan 20111, Indonesia
Tel. : (62-61) 800 10098
Fax. : (62-81) 800 10096

Visi, Misi, dan Budaya LPEI

Vision, Mission, and Culture of Indonesia Eximbank



Visi Vision

“Menjadi Eximbank yang unggul dan kredibel dalam mendorong ekspor nasional yang berdaya saing tinggi pada tataran global.”

To become an Eximbank that is credible and excels in promoting national export with high competitiveness on the global level.

Penjelasan Pernyataan Visi

- LPEI memiliki kemampuan untuk mengemban tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 2/2009 dan memposisikan LPEI menjadi mitra ekonomi global yang dapat dipercaya.
- LPEI ikut berperan dalam menjadikan eksportir Indonesia sebagai pelaku usaha yang disegani di tataran global, karena mampu menghasilkan produk dan jasa ekspor yang berkelas dunia.

Explanation of Vision Statement

- Indonesia Eximbank has the ability to carry out its duties and functions as mandated in Act No. 2/2009 and position Indonesia Eximbank as a trusted global economic partner.
- Indonesia Eximbank has the roles in promoting Indonesian exporters as respectful business players in the global markets with world-class export products and services.

Misi Mission



- Mendorong kesinambungan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekspor nasional yang berkelanjutan,
- Memberikan layanan pembiayaan ekspor nasional dan jasa konsultasi yang berkualitas sebagai solusi terhadap kebutuhan ekspor Indonesia, dan
- Meningkatkan kemampuan pelaku usaha, termasuk usaha kecil dan menengah, untuk menghasilkan produk berorientasi ekspor yang unggul dan berdaya saing.

- Encourage the sustainability of conducive business climate for the sustainable growth of national export.
- Provide national export financing services and consultancy services as the solution to the needs of Indonesian export.
- Improve the ability of business perpetrators, including the small and medium enterprises, to produce superior and competitive export-oriented products.

Penjelasan Pernyataan Misi

- LPEI menjadi penggerak dalam melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah lain untuk menciptakan lingkungan ekspor yang kondusif guna mendukung pertumbuhan ekspor Indonesia yang berkelanjutan.
- Memberikan layanan pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi yang berkualitas sebagai solusi bernilai tambah terhadap kebutuhan ekspor yang spesifik.
- LPEI mendapatkan mandat untuk menggerakkan pelaku usaha di Indonesia, termasuk usaha kecil dan menengah yang mampu menghasilkan produk berorientasi ekspor yang berdaya saing.

Explanation of Mission Statement

- Indonesia Eximbank is the driving force in the coordination with other government agencies in the creation of conducive export environment towards sustainable growth of Indonesia's exports.
- Providing high-quality financing, guarantee, insurance and consultation services as a value-added solution to specific export needs.
- Indonesia Eximbank has a mandate to mobilize businesses in Indonesia, including Small and Medium Enterprise sector, to be capable of producing competitive export-oriented products.

Review Visi dan Misi

Visi dan Misi LPEI telah disetujui oleh Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI. Pada tahun 2024, tidak terdapat perubahan Visi, Misi, Nilai-nilai, dan Komitmen terhadap pemangku kepentingan.

Budaya Kerja Lembaga

Budaya kerja merupakan sebuah nilai, kepercayaan, dan norma bersama yang dapat dijunjung tinggi oleh seluruh insan Lembaga. Dalam rangka mendukung Visi dan Misi, LPEI telah dilakukan penyesuaian terhadap nilai budaya LPEI untuk dapat menjadi dasar dan acuan bagi seluruh Eximbanker dalam bersikap dan berperilaku guna mendukung dan meningkatkan kinerja dan produktivitas melalui proses penyelarasan bersama seluruh Dewan Direktur dan Manajemen serta Pejabat Struktural, yang disebut dengan *Redefining Us* melalui tahapan proses:

1. *Diagnostic Findings & Condition Assessment*
2. *Senior Leaders' Workshop*
3. *Leaders Workshop Detailing*
4. *Small Group Fine-tuning*
5. *Persetujuan Rabom*

Nilai budaya Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) ditetapkan dalam PDE Nomor 0010/PDE/07/2022 tentang Nilai-Nilai Budaya Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia pada tanggal 11 Juli 2022. Adapun nilai budaya LPEI adalah APIK (*Agile, Profesional, Integritas, Kreatif*) dengan penjelasan sebagai berikut:

Vision and Mission Review

Indonesia Eximbank's Vision and Mission have been approved by Board of Directors and Managing Directors of Indonesia Eximbank. In 2024, there were no changes to the Vision, Mission, Values, and Commitment to stakeholders

Corporate Culture

Work culture is a set of shared values, beliefs, and norms that can be upheld by all members of the institution. To support the Institution's Vision and Mission, adjustments have been made to the Institution's cultural values. This Cultural value refers to attitude, beliefs, belief pattern and also goals in behavior to sustain work Excellence. This adjustment was through a joint alignment process of the entire Board of Directors and Management and Structural Officers, which is called *Redefining Us* by going through 5 stages of the process:

1. *Diagnostic Findings & Condition Assessment*
2. *Senior Leaders' Workshop*
3. *Leaders Workshop Detailing*
4. *Small Group Fine-tuning*
5. *Final Approval from Management*

The culture value of Indonesia Eximbank has been enacted in the Regulation of Executive Director concerning Culture Value of Indonesia Eximbank on Number 0010/PDE/07/2022. Indonesia Eximbank culture value known as APIK (*Agile, Professional, Integrity, Creative*)



Pada penerapannya, Budaya LPEI wajib dimengerti, dipahami, dan diterapkan dengan baik oleh setiap Eximbanker. Lebih lanjut, dalam mendukung program penguatan nilai Budaya LPEI dilakukan berdasarkan pilar-pilar penerapan Budaya LPEI antara lain namun tidak terbatas pada:

1. Budaya eksekusi secara berkolaborasi Utamakan perilaku disiplin dan fokus dalam mengeksekusi target untuk pelaksanaan mandat Undang-undang dengan mengasah kemampuan secara tepat guna dan tepat sasaran.
2. Budaya berkinerja tinggi
Pencapaian unggul melalui disiplin *monitoring* kinerja secara sistematis, membangun sistem penilaian kinerja yang dapat diandalkan dan objektif.
3. Budaya sadar tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan
Disiplin taat asas, meningkatkan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional Lembaga serta membangun, budaya kesadaran terhadap risiko dan kepatuhan.
4. Budaya pembelajaran berkelanjutan
Pedoman Perilaku yang mengedepankan pembaruan kapabilitas yang sesuai dengan tren dan kebutuhan pasar melalui berbagai metode, seperti *sharing knowledge*, *coaching & mentoring* dengan berbasis kompetensi.

Furthermore, to support the Indonesia Eximbank cultural value strengthening program, it is referred to pillars of Indonesia Eximbank Culture Implementation which are included in but not limited to:

1. Collaborative execution culture
Prioritize disciplined behavior and focus on executing targets for the implementation of the mandate of the Law (Act of the Republic of Indonesia Number 2 of 2009) by honing skills in an effective and proper manner.
2. Performance driven culture
Excellent achievement through the systematic performance monitoring discipline, building a reliable and objective performance appraisal system.
3. Governance, risk, & compliance culture
Adherence to principles, improves compliance with the Institution's operational systems and procedures, and builds awareness culture to risk and compliance.
4. Earning culture
A code of conduct that emphasizes renewal capabilities according to market trends and needs through various methods, such as sharing knowledge, competency-based coaching & mentoring.

Keanggotaan Dalam Asosiasi

Membership In Associations

Berikut ini adalah daftar keanggotaan LPEI dalam asosiasi industri, termasuk namun tidak terbatas:

The following is a list of Indonesia Eximbank's memberships in industry associations, which include memberships but not limited to:

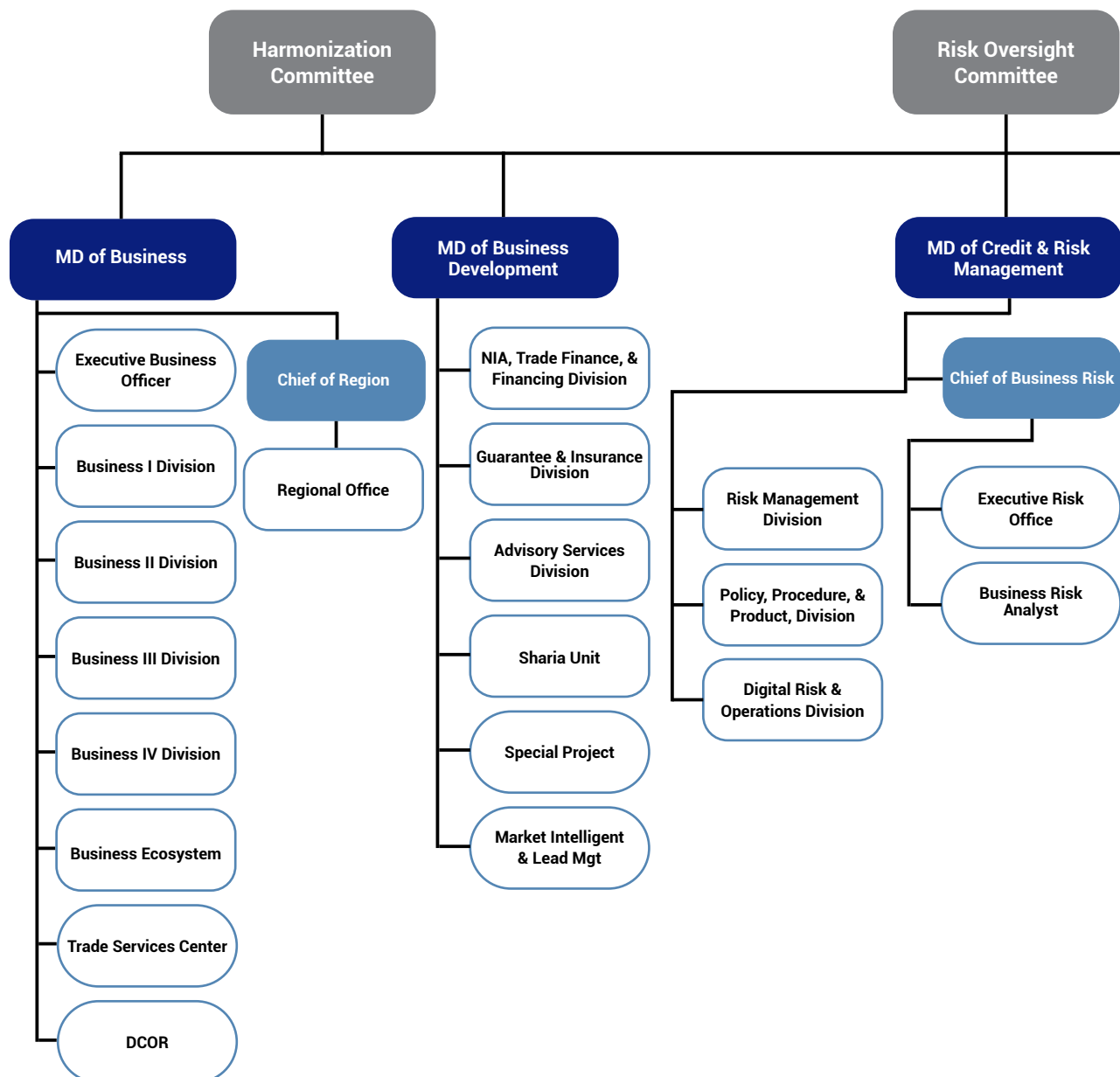
No	Nama Forum Forum Name	Keterangan Description	Skala Scale	Telah Bergabung Year of Joining
1	AEBF	<i>Asian EXIM Banks Forum (AEBF)</i> merupakan forum yang beranggotakan Eximbank-Eximbank di Asia dan Oceania. Forum AEBF diadakan sebagai upaya dalam meningkatkan kerja sama dan menciptakan bagi anggota Eximbank dalam rangka meningkatkan perdagangan dan investasi global. Asian EXIM Banks Forum (AEBF) is a forum with members of Eximbanks from Asia and Oceania. AEBF Forum was established to improve collaboration and creation of global trading and investment for Eximbank members.	Internasional International	1999
2	G-NEXID	<i>Global Network of Export-Import Banks and Development Finance Institutions (G-NEXID)</i> merupakan organisasi <i>non-profit</i> yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama bilateral dan multilateral antara anggota dengan tujuan mempromosikan perdagangan dan investasi pada negara <i>South-South</i> (negara berkembang). Global Network of Export-Import Banks and Development Finance Institutions (G-NEXID) is a non-profit organization aims at improving bilateral and multilateral collaboration between members with the goals to promote trading and investment of developed countries.	Internasional International	2007
3	Berne Union	<i>Berne Union</i> adalah organisasi internasional untuk lembaga global <i>export credit and investment insurance (ECA)</i> yang bertujuan untuk mendukung perkembangan produk dan skema fasilitas asuransi kredit dan asuransi investasi. Berne Union is an international organization for global export credit and investment insurance (ECA) institutions that aims a supporting the development of credit and investment insurance facilities product and scheme.	Internasional International	2015
4	Aman Union	<i>Aman Union</i> merupakan <i>forum commercial</i> dan <i>non-commercial risk insurers</i> dan <i>reinsurers</i> bagi negara-negara anggota <i>Organization of Islamic Cooperation (OIC)</i> . Aman Union is a commercial and non-commercial forum for insurers and reinsurers of members countries of Organization of Islamic Cooperation (OIC).	Internasional International	2018
5	AAUI	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) merupakan organisasi yang menjadi wadah perkumpulan seluruh perusahaan asuransi umum dan reasuransi di Indonesia. Indonesian General Insurance Association (AAUI) is an organization catered as a forum of all general insurance and reinsurance companies in Indonesia.	Nasional National	2017
6	FCI	<i>Factor Chain International (FCI)</i> merupakan asosiasi internasional yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda yang menaungi Bank dan/atau Lembaga Keuangan pelaku usaha <i>Factoring</i> yang menawarkan solusi <i>cross-border receivables finance</i> kepada membernya untuk mengembangkan bisnis <i>trade finance</i> . Factor Chain International (FCI) is an international association with head office in Amsterdam, Holland that manage the Banks and/or Financial Institutions engage in Factoring that offers cross-border receivables finance solution to its members to develop trade finance business.	Internasional International	2019
7.	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) adalah organisasi yang menjadi wadah bagi pelaku industri sistem pembayaran di Indonesia. ASPI bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta keamanan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran di Indonesia. The Indonesian Payment System Association (ASPI) is an organization that serves as a forum for payment system industry players in Indonesia. ASPI aims to increase effectiveness, efficiency, and security in the implementation of payment systems in Indonesia.	Nasional National	2011

Struktur Organisasi

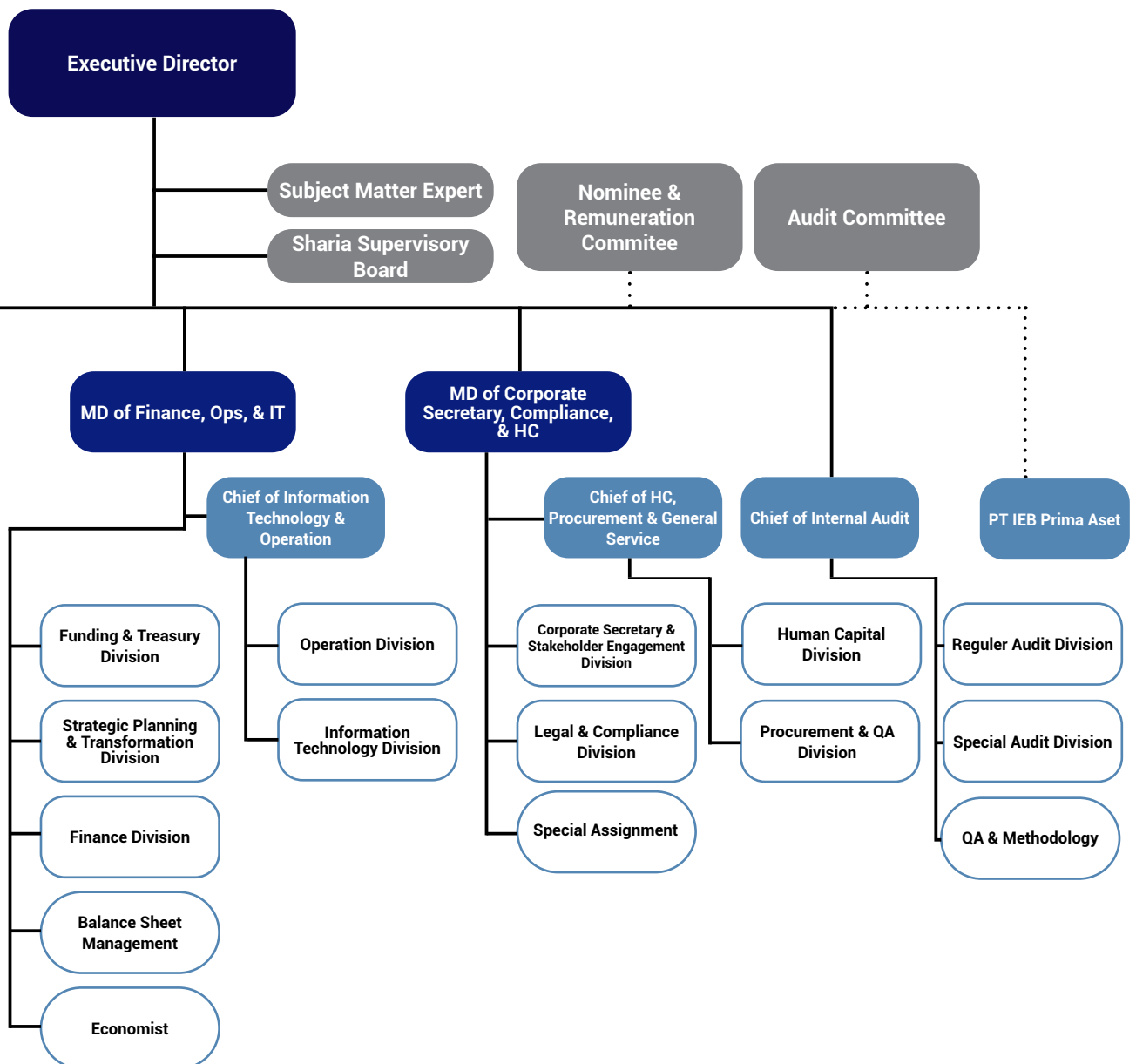
Organizational Structure

Struktur Organisasi LPEI per 31 Desember 2024, telah ditetapkan melalui Peraturan Direktur Eksekutif No. 0001/PDE/01/2024 tentang Pedoman dan Tata Kerja Organisasi LPEI dan disempurnakan lebih lanjut sebagaimana Keputusan Direktur Eksekutif No.0013/KDE/06/2024 tentang penyempurnaan struktur organisasi LPEI, Keputusan Direktur Eksekutif 0037.01/KDE/11/2024, serta Keputusan Direktur Eksekutif 0046/KDE/12/2024 tentang penataan pembidangan unit kerja dalam struktur organisasi LPEI dengan rincian sebagai berikut:

Struktur Organisasi LPEI per 31 Desember 2024
Indonesia Eximbank Organization Structure As of December 31, 2024



The organizational structure of Indonesia Eximbank as of December 31, 2024, has been established through the Executive Director Regulation No. 0001/PDE/01/2024 on Indonesia Eximbank Organizational Guidelines and Work Procedures and further refined as per Executive Director Decree No. 0013/KDE/06/2024 on the refinement of Indonesia Eximbank's organizational structure, Executive Director Decree No. 0037.01/KDE/11/2024, and Executive Director Decree No. 0046/KDE/12/2024 on the structuring of work unit divisions within Indonesia Eximbank's organizational structure, with details as follows:



Profil Dewan Direktur

Profile of Board of Directors



Sukatmo Padmosukarso

Plt. Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif
Acting Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director

Warga negara Indonesia
Indonesian Citizenship

Usia 67 tahun
67 years old

Bekasi
Bekasi

Dasar Hukum Pengangkatan	Appointment Basis
Menjabat sebagai Plt. Ketua Dewan Direktur, merangkap Direktur Eksekutif sejak 20 Maret 2025 berdasarkan MK No. PRIN-2/MK.06/2025	Served as Acting. Chairman of the Board of Directors, concurrently Executive Director since March 20, 2025 based on MK No. PRIN-2/MK.06/2025
Riwayat Pendidikan	Educational Background
- Master of Business Administration (MBA), Curtin University of Technology, Australia 1994 - Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia, Indonesia 1986 - Sarjana Muda Jurusan Bahasa Inggris, IKIP Surakarta, Indonesia 1979	- Master of Business Administration (MBA), Curtin University of Technology, Australia (1994) - Bachelor's Degree in Economics, Universitas Indonesia, Indonesia (1986) - Associate Degree in English Language, IKIP Surakarta, Indonesia (1979)
Riwayat Karier	Career Background
- Komisaris Independen, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (2016 – 2024) - President Director, PT Indonesia Infrastructure Finance (2014 – 2016) - Komisaris Independen, PT Rabo Bank Internasional Indonesia (2009 – 2014) - Ketua Pengurus Yayasan Institute Perbanas (2009 – 2019) - Wakil Presiden Direktur, PT Pos Indonesia (2009 – 2013) - Wakil Presiden Direktur, PT Bank Internasional Indonesia (2002 – 2009) - Vice President Risk Management, PT Bank Mandiri (Persero) (1999 – 2002)	- Independent Commissioner, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (2016 – 2024) - President Director, PT Indonesia Infrastructure Finance (2014 – 2016) - Independent Commissioner, PT Rabo Bank International Indonesia (2009 – 2014) - Chairman, Perbanas Institute Foundation (2009 – 2019) - Deputy President Director, PT Pos Indonesia (2009 – 2013) - Deputy President Director, PT Bank Internasional Indonesia (2002 – 2009) - Vice President of Risk Management, PT Bank Mandiri (Persero) (1999 – 2002)
Rangkap Jabatan	Concurrent Position
- Senior Partner PT Asta Konsultan Indonesia (2016 – sekarang) - Ketua Badan Pelaksana Harian Yayasan Pendidikan Perbanas (2019 – sekarang) - Komisaris PT Digi Asia Bios (2018 – sekarang)	- Senior Partner, PT Asta Konsultan Indonesia (2016 – present) - Chairman of the Executive Board, Perbanas Education Foundation (2019 – present) - Commissioner, PT Digi Asia Bios (2018 – present)
Hubungan Afiliasi	Affiliation
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	Does not have any affiliation with members of Board of Directors, members of Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.
Pendidikan dan/atau Pelatihan	Workshop and/or Training
Selama tahun 2024, beliau belum menjalani pelatihan	During 2024, he has not undergone any training

Yon Arsal

Anggota Dewan Direktur
Member of Board of Directors

Warga negara Indonesia
Indonesian Citizenship

Usia 53 tahun
53 years old

Jakarta
Jakarta



Dasar Hukum Pengangkatan	Appointment Basis
Menjabat sebagai anggota Dewan Direktur sejak 2 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 155 Tahun 2023	Served as a member of the Board of Directors since May 2, 2023 based on Decree of the Minister of Finance number 155 of 2023.
Riwayat Pendidikan	Educational Background
- Master of Commerce In Funds Management, The University of New Wales Sydney Australia (2001) - Sarjana Teknologi Pertanian dari Universitas Sam Ratulangi, Manado (1993).	- Master of Commerce In Funds Management, The University of New Wales Sydney Australia (2001) - Bachelor of Agricultural Technology University of Sam Ratulangi, Manado (1993).
Riwayat Karier	Career Background
- Anggota Dewan Komisaris, Indonesia Infrastructure Finance, 2020 - Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, Kementerian Keuangan RI (Mei 2026 – Januari 2020) - Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak, Kementerian Keuangan RI (Februari 2016 – Mei 2016) - Kepala Subdirektorat Potensi Perpajakan, Kementerian Keuangan RI (September 2013 – Februari 2016). - Kepala Subdirektorat Dampak Kebijakan, Kementerian Keuangan RI (Juni 2011 – September 2013)	- Member of Board of Commissioners, Indonesia Infrastructure Finance, 2020 - Director of Potential, Compliance and Revenue, Ministry of Finance (May 2026 - January 2020) - Tax Extensification and Intensification Analyst, Ministry of Finance (February 2016 - May 2016). - Head of Subdirectorate of Tax Potential, Ministry of Finance (September 2013 - February 2016). - Head of Policy Impact Sub-directorate, Ministry of Finance (June 2011 - September 2013)
Rangkap Jabatan	Concurrent Position
Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak, Kementerian Keuangan RI (Januari 2020 - sekarang)	Expert Staff for Tax Compliance, Ministry of Finance (January 2020 - present)
Hubungan Afiliasi	Affiliation
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	Does not have any affiliation with members of Board of Directors, members of Executive Directors or Controlling and Major Shareholders.
Pendidikan dan/atau Pelatihan	Workshop and/or Training
Power Talk: Best Practices of Good Corporate Governance (GCG) (Agustus 2024)	Power Talk: Best Practices of Good Corporate Governance (GCG) (August 2024)



Fajarini Puntodewi

Anggota Dewan Direktur
Member of Board of Directors

Warga negara Indonesia
Indonesian Citizenship

Usia 58 tahun
58 years old

Jakarta
Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan	Appointment Basis
Menjabat sebagai Anggota Dewan Direktur sejak tanggal 13 Februari 2025 berdasarkan KMK No.33 Tahun 2025	Member of the Board of Directors since February 13, 2025 based on KMK No.33 Year 2025
Riwayat Pendidikan	Educational Background
- S1 - Hukum Perdata, Universitas Islam Indonesia, 1990 - S2 - Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, 2003	- S1 - Civil Law, Islamic University of Indonesia, 1990 - Masters - Administrative Science, University of Indonesia, 2003
Riwayat Karier	Career Background
- Kepala Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan RI, 2017 - Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan RI, Januari-April 2018 - Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Perdagangan RI, 2018-2019 - Inspektur 1, Kementerian Perdagangan RI, 2019-2020 - Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kementerian Perdagangan RI, 2020-2021 - Kepala Pusat Penanganan Isu Strategis, Kementerian Perdagangan RI, 2021-2023 - Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Perdagangan RI, 2023-2024 - Kepala Badan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan RI, 2024 -2025 - Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan RI, 2025-saat ini	- Head of the Center for Foreign Trade Studies, Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, 2017 - Secretary of the Directorate General of National Export Development, Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, January-April 2018 - Head of Public Relations Bureau, Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, 2018-2019 - Inspector 1, Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, 2019-2020 - Secretary of the Inspectorate General, Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, 2020-2021 - Head of the Center for Handling Strategic Issues, Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, 2021-2023 - Expert Staff for Business Climate and Inter-Institutional Relations, Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, 2023-2024 - Head of the Trade Policy Agency, Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, 2024-2025 - Director General of National Export Development, Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, 2025-present
Rangkap Jabatan	Concurrent Position
Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan RI (2025 – saat ini)	Director General of National Export Development, Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, 2025-present
Hubungan Afiliasi	Affiliation
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	Does not have any affiliation with members of Board of Directors, members of Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.
Pendidikan dan/atau Pelatihan	Workshop and/or Training
Selama tahun 2024, beliau belum menjalani pelatihan	During 2024, he has not undergone any training

Dwi Teguh Wibowo

Anggota Dewan Direktur
Member of Board of Directors

Warga negara Indonesia
Indonesian Citizenship

Usia 55 tahun
55 years old

Bekasi
Bekasi



Dasar Hukum Pengangkatan	Appointment Basis
Menjabat sebagai anggota Dewan Direktur sejak 29 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 454 Tahun 2024	Member of Board of Directors since December 29, 2024 pursuant to KMK No. 454 of 2024
Riwayat Pendidikan	Educational Background
Sarjana Ekonomi di bidang manajemen Pembangunan dari Universitas Indonesia, Indonesia (2000)	Bachelor of Economics in Development Management from University of Indonesia (2000)
Riwayat Karier	Career Background
- Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok (2017 – 2023) - Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai (2016 – 2017) - Kepala Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai IV KPU Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok (2015 -2016) - Kepala Bidang Kepatuhan Internal KPU Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok (2012 – 2025) - Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Dumai (2011 – 2012)	- Head of Primary Customs and Excise Service Office Type A, Tanjung Priok (2017 – 2023) - Expert Staff in Supervision and Law Enforcement of Customs and Excise (2016 – 2017) - Head of Customs and Excise Services Division IV, Primary Customs and Excise Office Type A, Tanjung Priok (2015 – 2016) - Head of Internal Compliance Division, Primary Customs and Excise Office Type A, Tanjung Priok (2012 – 2025) - Head of the Customs and Excise Supervision and Service Office Type Madya Pabean, Dumai (2011 – 2012)
Rangkap Jabatan	Concurrent Position
- Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara, Kementerian Keuangan RI (2023 - sekarang) - Assistant of Minister for Revenue, Ministry of Finance (2023 - present)	- Expert Staff for State Revenue, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2023 - present) - Assistant of Minister for Revenue, Ministry of Finance (2023 - present)
Hubungan Afiliasi	Affiliation
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	Does not have any affiliation with members of Board of Directors, members of Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.
Pendidikan dan/atau Pelatihan	Workshop and/or Training
Selama tahun 2024, beliau belum menjalani pelatihan	During 2024, he has not undergone any training



Arus Gunawan

Anggota Dewan Direktur
Member of Board of Directors

Warga negara Indonesia
Indonesian Citizenship

Usia 60 tahun
60 years old

Jakarta
Jakarta



Dasar Hukum Pengangkatan	Appointment Basis
Menjabat sebagai Anggota Dewan Direktur sejak 25 November 2020 berdasarkan KMK No. 530/KMK.06/2020	Member of Board of Directors since November 25, 2020 pursuant to KMK No. 530/KMK.06/2020
Riwayat Pendidikan	Educational Background
Sarjana Teknik Elektro, Institut Sains dan Teknologi Nasional (1993)	Bachelor of Electrical Engineering, Institute of National Science and Technology (1993)
Riwayat Karier	Career Background
- Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Kementerian Perindustrian RI (Januari 2021-April 2023); - Inspektur Jenderal, Kementerian Perindustrian RI (Maret 2020-Januari 2021); - Inspektur Wilayah I, Inspektorat Jenderal, Kementerian Perindustrian RI (November 2018-Maret 2020); - Direktur Pengembangan Wilayah Industri I, Kementerian Perindustrian RI (Desember 2016-November 2018); - Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian, Kementerian Perindustrian RI (Januari 2016-Desember 2016); dan - Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian (2014-2016)	- Head of Industrial Human Resources Development Agency, Ministry of Industry RI (January 2021-April 2023); - Inspector General, Ministry of Industry of the Republic of Indonesia (March 2020-January 2021); - Inspector I, Inspectorate General, Ministry of Industry of the Republic of Indonesia (November 2018 – March 2020); - Director of Industrial Area Development I, Ministry of Industry of the Republic of Indonesia (December 2016-November 2018); - Director of Machinery and Agricultural Machinery Equipment Industry, Ministry of Industry of the Republic of Indonesia (January 2016-December 2016); and - Secretary to Inspectorate General, the Ministry of Industry of the Republic Indonesia (2014 - 2016).
Rangkap Jabatan	Concurrent Position
Staf Ahli Menteri Bidang Pendalaman, Penyebaran, dan Pemerataan Industri, Kementerian Perindustrian (April 2023 – sekarang)	Expert Staff to the Minister for Industrial Deepening, Deployment, and Equalisation, Ministry of Industry (April 2023 - present)
Hubungan Afiliasi	Affiliation
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	Does not have any affiliation with members of Board of Directors, members of Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.
Pendidikan dan/atau Pelatihan	Workshop and/or Training
- Komite Audit yang kompeten dan professional, Intipesan (Juni 2024) - Power Talk: Best Practices of Good Corporate Governance (GCG) (Agustus 2024)	- Competent and Professional Audit Committee, Intipesan (June 2024) - Power Talk: Best Practices of Good Corporate Governance (GCG) (August 2024)

Bambang Setyatmojo

Anggota Dewan Direktur
Member of Board of Directors

Warga negara Indonesia
Indonesian Citizenship

Usia 55 tahun
55 years old

Jakarta
Jakarta



Dasar Hukum Pengangkatan	Appointment Basis
Menjabat sebagai Anggota Dewan Direktur sejak tanggal 24 Januari 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 13 Tahun 2025	Member of Board of Directors since January 24, 2025 pursuant to KMK No. 13 of 2025
Riwayat Pendidikan	Educational Background
- Sarjana Teknik, Universitas Gajah Mada, Indonesia (1995) - Magister Manajemen, Universitas Gajah Mada, Indonesia (1997)	- Bachelor of Engineering, University of Gadjah Mada, Indonesia (1995) - Master of Management, University of Gadjah Mada, Indonesia (1997)
Riwayat Karier	Career Background
- Project Manager New Way of Working Distribution Network and Sales Division, PT BNI. Tbk (Januari 2024 – Januari 2025) - SVP ePP Business Banking Policy Governance Division, PT BNI. Tbk (Februari 2023 – Januari 2024) - Pemimpin Kantor Wilayah 05 Semarang, PT. BNI. Tbk (November 2021 – Februari 2023) - Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil, PT. BNI. Tbk (April 2018 – November 2021)	- Project Manager New Way of Working, Distribution Network and Sales Division, PT BNI Tbk (January 2024 – January 2025) - SVP ePP Business Banking Policy Governance Division, PT BNI Tbk (February 2023 – January 2024) - Regional Office Head 05 Semarang, PT BNI Tbk (November 2021 – February 2023) - Head of Small Business Division, PT BNI Tbk (April 2018 – November 2021)
Rangkap Jabatan	Concurrent Position
Tidak ada rangkap jabatan	Has no concurrent positions in Indonesia Eximbank or other companies.
Hubungan Afiliasi	Affiliation
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	Does not have any affiliation with members of Board of Directors, members of Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.
Pendidikan dan/atau Pelatihan	Workshop and/or Training
Selama tahun 2024, beliau belum menjalani pelatihan	Throughout 2024, has not undergone any training.

Perubahan Komposisi Anggota Dewan Direktur

Changes In the Composition of Board of Directors

Perubahan Komposisi Anggota Dewan Direktur di Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, telah terjadi perubahan pada komposisi Dewan Direktur LPEI dengan alasan masa jabatan beberapa anggota Dewan Direktur telah berakhir. Berikut kronologis perubahan komposisi Dewan Direktur LPEI:

Changes in Board of Director Composition in 2024

Throughout 2024, there have been changes in the composition of Indonesia Eximbank's Board of Directors due to the end of term of several members of Board of Directors. Below is the Chronology of these changes:

Periode 1 Januari 2024 – 31 Agustus 2024 Period of January 1, 2024 - August 31, 2024	Periode 1 September 2024 – 23 Desember 2024 Period of September 1, 2024 - December 23, 2024	Periode 24 Desember – 28 Desember 2024 Period of December 24 - December 28, 2024	Periode 29 Desember – 31 Desember 2024 Period of December 29 - December 31, 2024
Rijani Tirtoso Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of Board of Directors concurrently Executive Director	Rijani Tirtoso Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of Board of Directors concurrently Executive Director	Yon Aرسال Plt. Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Acting Chairman of Board of Directors concurrently Executive Director	Yon Aرسال Plt. Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Acting Chairman of Board of Directors concurrently Executive Director
Suminto Anggota Dewan Direktur Member of Board of Directors	Suminto Anggota Dewan Direktur Member of Board of Directors	Suminto Anggota Dewan Direktur Member of Board of Directors	Kasan Anggota Dewan Direktur Member of Board of Directors
Yon Aرسال Anggota Dewan Direktur Member of Board of Directors	Yon Aرسال Anggota Dewan Direktur Member of Board of Directors	Kasan Anggota Dewan Direktur Member of Board of Directors	Arus Gunawan Anggota Dewan Direktur Member of Board of Directors
Kasan Anggota Dewan Direktur Member of Board of Directors	Kasan Anggota Dewan Direktur Member of Board of Directors	Arus Gunawan Anggota Dewan Direktur Member of Board of Directors	Dwi Teguh Wibowo Anggota Dewan Direktur Member of Board of Directors
Arus Gunawan Anggota Dewan Direktur Member of Board of Directors	Arus Gunawan Anggota Dewan Direktur Member of Board of Directors		
D. James Rompas Anggota Dewan Direktur Member of Board of Directors			

Perubahan Komposisi Anggota Dewan Direktur Setelah Tahun Buku

Hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan terdapat perubahan susunan anggota Dewan Direktur sebagai berikut :

Changes in the Composition of the Board of Directors After the Financial Year

Until this Annual Report is published, there are changes in the composition of the Board of Directors as follows:

Periode 1 Januari 2025 – 23 Januari 2025 Period January 1, 2025 - January 23, 2025	Periode 24 Januari 2025 – 12 Februari 2025 Period January 24, 2025 - February 12, 2025	Periode 13 Februari 2025 – 19 Maret 2025 Period February 13, 2025 - March 19, 2025	Periode 20 Maret 2025 - Saat Ini Period March 20, 2025 - Present
Yon Aرسال Plt. Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Acting Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director	Yon Aرسال Plt. Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Acting Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director	Yon Aرسال Plt. Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Acting Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director	Sukatmo Padmosukarso Plt Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Acting Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director
Kasan Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	Kasan Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	Arus Gunawan Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	Yon Aرسال Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors
Arus Gunawan Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	Arus Gunawan Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	Dwi Teguh Wibowo Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	Arus Gunawan Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors
Dwi Teguh Wibowo Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	Dwi Teguh Wibowo Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	Sukatmo Padmosukarso Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	Dwi Teguh Wibowo Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors
	Sukatmo Padmosukarso Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	Bambang Setyatmojo Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	Bambang Setyatmojo Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors
	Bambang Setyatmojo Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	Fajarini Puntodewi Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	Fajarini Puntodewi Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors

Profil Direktur Pelaksana

Managing Directors Profile



Sam Malee

**Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit merangkap
Plt. Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan dan SDM**
Managing Director of Credit & Risk Management concurrently
Acting Managing Director of Corporate Secretary, Compliance & HC

Warga negara Indonesia
Indonesian Citizenship

Usia 59 tahun
59 years old

Jakarta
Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan	Appointment Basis
Menjabat sebagai Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit sejak 14 Maret 2024 berdasarkan KDD No. 0002/KDD/03/2024	Serving as Managing Director of Credit & Risk Management since March 14, 2024 pursuant to KDD No. 0002/KDD/03/2024
Riwayat Pendidikan	Educational Background
- Master of Commerce In Funds Management, The University of New Wales Sydney Australia (2001) - Sarjana Teknologi Pertanian dari Universitas Sam Ratulangi, Manado (1993).	- Master of Commerce In Funds Management, The University of New Wales Sydney Australia (2001) - Bachelor of Agricultural Technology University of Sam Ratulangi, Manado (1993).
Riwayat Karier	Career Background
- Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (14 Maret 2024 – 13 Maret 2029) - Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (14 Maret 2024 – 31 Agustus 2024) - Group Head Corporate Risk, PT Bank Mandiri (Persero),Tbk. (2020 - 2023) - Executive Credit Officer A-Wholesale Risk, PT Bank Mandiri (Persero),Tbk. (2019 - 2020) - Executive Credit Of Officer B-Corporate Risk, PT Bank Mandiri (Persero),Tbk. (2017 - 2019) - Department Head Corporate Risk 3 & 6, PT Bank Mandiri (Persero),Tbk. (2016 - 2017) - Department Head (Risk Model Validator, Credit Risk Analytics, Portfolio Credit Risk Management), PT Bank Mandiri (Persero),Tbk. (2008 - 2016)	- Managing Director of Risk & Credit Management, Indonesia Eximbank (March 14, 2024 - March 13, 2029) - Managing Director of Risk & Credit Management, Indonesia Eximbank (March 14, 2024 - August 31, 2024) - Group Head Corporate Risk, PT Bank Mandiri (Persero),Tbk. (2020 - 2023) - Executive Credit Officer A-Wholesale Risk, PT Bank Mandiri (Persero),Tbk. (2019 - 2020) - Executive Credit Officer B-Corporate Risk, PT Bank Mandiri (Persero),Tbk. (2017 - 2019) - Department Head Corporate Risk 3 & 6, PT Bank Mandiri (Persero),Tbk. (2016 - 2017) - Department Head (Risk Model Validator, Credit Risk Analytics, Portfolio Credit Risk Management), PT Bank Mandiri (Persero),Tbk. (2008 - 2016)
Rangkap Jabatan	Concurrent Position
Beliau memiliki rangkap jabatan sebagai Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan dan SDM di LPEI (2025 - saat ini)	He holds concurrent positions as Managing Director of Institutional Secretariat, Compliance and HC at LPEI (2025 - current).
Hubungan Afiliasi	Affiliation
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	Does not have any affiliation with members of Board of Directors, members of Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.
Pendidikan dan/atau Pelatihan	Workshop and/or Training
- Export Insurance - Sosialisasi "Budaya Anti Korupsi dan Pencegahan Gratifikasi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Lembaga SMV atau BUMN - Harmoni Eksekusi dan Kolaborasi Transformasi - Komoditas dan Industri : Perkembangan Industri Nikel - Komoditas dan Sektor Industri : Perkembangan dan Regulasi Perkebunan Kelapa Sawit - Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 - Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 - Senior Leader Workshop : Bisnis Execution Strategy	- Export Insurance - Socialization of Anti-Corruption Culture and Prevention of Gratification in the Procurement of Goods/Services within SMV (Special Mission Vehicle) or SOEs - Harmony in Execution and Transformation Collaboration - Commodities and Industry: Nickel Industry Development - Commodities and Industry Sector : Palm Oil Plantation Development and Regulation - Risk Management Recertification Training Level 6 - Risk Management Recertification Training Level 7 - Senior Leader Workshop: Business Execution Strategy



Anton Herdianto

Direktur Pelaksana Bisnis
Managing Director of Business

Warga negara Indonesia
Indonesian Citizenship
Usia 55 tahun
55 years old
Jakarta
Jakarta



Dasar Hukum Pengangkatan	Appointment Basis
Menjabat sebagai Direktur Pelaksana sejak 25 November 2024 berdasarkan KDD No. 0012/KDD/11/2024	Serving as Managing Director since November 25, 2024 pursuant to KDD No. 0012/KDD/11/2024
Riwayat Pendidikan	Educational Background
- S2, Keuangan & Akuntansi, Universitas Indonesia (2001) - S1, Akuntansi, Universitas Padjadjaran (1993).	- Master Degree, Finance and Accounting, University of Indonesia (2001) - Bachelor Degree, Accounting, University of Padjajaran (1993)
Riwayat Karier	Career Background
- Direktur Pelaksana Bisnis, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (November 2024 - sekarang) - Senior Executive Vice President / Head of Regions, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (April 2022 – November 2024) - Anggota Komisaris PT IEB Prima Aset - Direktur Keuangan dan Risk Management, PT Aneka Tambang Tbk (Desember 2019 – Desember 2021) - Senior Executive Vice President – Finance Operations, PT Inalum (Persero) (Oktober 2018 - Desember 2019) - Senior Vice President – SME Banking, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Januari 2017 – Oktober 2018) - Supervisory Board Member Bank Mandiri Pension Fund (November 2015 – November 2018) - Senior Vice President – Strategy & Performance , PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (November 2014 – 2017) - Direktur Keuangan, PT Mandiri Tunas Finance (2009 – Oktober 2014)	- Managing Director of Business, Indonesia Eximbank (November 2024 – Present) - Senior Executive Vice President / Head of Regions, Indonesia Eximbank (April 2022 – November 2024) - Member of Board of Commissioners of PT IEB Prima Aset - Director of Finance and Risk Management, PT Aneka Tambang Tbk (December 2019 – December 2021) - Senior Executive Vice President – Finance Operations, PT Inalum (Persero) (October 2018 - December 2019) - Senior Vice President – SME Banking, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (January 2017 – October 2018) - Supervisory Board Member Bank Mandiri Pension Fund (November 2015 – November 2018) - Senior Vice President – Strategy & Performance , PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (November 2014 – 2017) - Director of Finance, PT Mandiri Tunas Finance (2009 – October 2014).
Rangkap Jabatan	Concurrent Position
Beliau tidak memiliki rangkap jabatan di LPEI ataupun di perusahaan lain.	Has no concurrent positions in Indonesia Eximbank or other companies.
Hubungan Afiliasi	Affiliation
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	Does not have any affiliation with members of Board of Directors, members of Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.
Pendidikan dan/atau Pelatihan	Workshop and/or Training
- Export Insurance - Pelatihan Komoditas Nikel - Workshop Perkembangan dan Regulasi Perkebunan Kelapa Sawit - Sosialisasi "Budaya Anti Korupsi dan Pencegahan Gratifikasi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Lembaga SMV atau BUMN - Harmoni Eksekusi dan Kolaborasi Transformasi - Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 - Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 - Senior Leader Workshop : Bisnis Execution Strategy	- Export Insurance - Nickel Commodity Training - Workshop on the Development and Regulation of Palm Oil Plantations - Socialization of "Anti-Corruption Culture and Prevention of Gratuities in Procurement of Goods/Services within SMV Institutions or SOEs" - Harmony in Execution and Collaboration in Transformation - Risk Management Recertification Preparation Level 6 - Risk Management Recertification Preparation Level 7 - Senior Leader Workshop: Business Execution Strategy



Maqin U. Norhadi

Plt. Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis
Acting Managing Director of Business Development

Warga negara Indonesia
Indonesian Citizenship

Usia 54 tahun
54 years old

Jakarta
Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan	Appointment Basis
Menjabat sebagai Plt. Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis sejak 01 September 2024 berdasarkan KDD No. 0014/KDD/11/2024	Serving as Acting Managing Director of Business Development since September 1, 2024 pursuant to KDD No. 0014/KDD/11/2024
Riwayat Pendidikan	Educational Background
Master of Management, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1999)	Master of Management, University of Gadjah Mada, Yogyakarta (1999)
Riwayat Karier	Career Background
- Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (1 September 2024 – 31 Agustus 2025); - Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (1 Januari 2022 – 31 Agustus 2024); - Direktur Pelaksana II, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) (12 April 2021 – 31 Desember 2021); - Direktur Niaga PT Kereta Api Indonesia (Persero) (Mei 2020 – Februari 2021); - Ketua Komite Manajemen Risiko PT Kereta Commuter Indonesia (Juni 2020 – Februari 2021); - Presiden Komisaris PT Kereta Commuter Indonesia (Juni 2020 – Februari 2021); - Anggota Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Februari 2020 – Mei 2020); dan - Regional Chief Executive Officer PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (March 2016 – April 2020). - Senior Vice President Corporate Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2014 – 2015) - Senior Vice President Credit Risk Management PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2012– 2014) - Vice President Corporate Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2006– 2011)	- Acting Managing Director of Business Development, Indonesia Eximbank (September 1, 2024 – August 31, 2025) - Managing Director of Business Development, Indonesia Eximbank (January 1, 2022 – August 31, 2024) - Managing Director, Indonesia Eximbank (April 12, 2021 – 31 December 2021) - Managing Director of Commerce PT Kereta Api Indonesia (Persero) (May 2020 – February 2021) - Chairman of Risk Management Committee PT Kereta Commuter Indonesia (June 2020 – February 2021) - President Commissioner PT Kereta Commuter Indonesia (June 2020 – February 2021) - Member of Board of Commissioner PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (February 2020 – May 2020) - Regional Chief Executive Officer of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (March 2016 – April 2020) - Senior Vice President Corporate Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2014 – 2015) - Senior Vice President Credit Risk Management PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2012– 2014) - Vice President Corporate Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2006 – 2011)
Rangkap Jabatan	Concurrent Position
Beliau tidak memiliki rangkap jabatan di LPEI ataupun di perusahaan lain.	Has no concurrent positions in Indonesia Eximbank or other companies.
Hubungan Afiliasi	Affiliation
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	Does not have any affiliation with members of Board of Directors, members of Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.
Pendidikan dan/atau Pelatihan	Workshop and/or Training
- Export Insurance - Economic Outlook 2024 - The Indonesian Economic Impact - Sosialisasi "Budaya Anti Korupsi dan Pencegahan Gratifikasi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Lembaga SMV atau BUMN - Harmoni Eksekusi dan Kolaborasi Transformasi - Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 - Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 - Senior Leader Workshop : Bisnis Execution Strategy	- Export Insurance - Economic Outlook 2024 – The Indonesian Economic Impact - Socialization of "Anti-Corruption Culture and Prevention of Gratuities in Procurement of Goods/Services within SMV Institutions or SOEs" - Harmony in Execution and Collaboration in Transformation - Risk Management Recertification Preparation Level 6 - Risk Management Recertification Preparation Level 7 - Senior Leader Workshop: Business Execution Strategy

Anwar Harsono

Plt. Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional, & Teknologi Informasi
Acting Managing Director of Finance, Operations, & Information Technology

Warga negara Indonesia
Indonesian Citizenship

Usia 52 tahun
52 years old

Jakarta
Jakarta



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Plt. Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional, & Teknologi Informasi sejak 01 September 2024 berdasarkan KDD No.0013/KDD/11/2024.

Appointment Basis

Serving as Acting Managing Director of Finance, Operational, and Information Technology since September 1, 2024 pursuant to KDD No. 0013/KDD/11/2024.

Riwayat Pendidikan

- MBA Finance – Cleveland State University, USA – 2003;
- Sarjana Accounting – Universitas Trisakti, Jakarta (1997).

Educational Background

- MBA Finance – University of Cleveland State, USA – 2003;
- Bachelor of Accounting – University of Trisakti, Jakarta (1997).

Riwayat Karier

- Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pelaksana Bidang Keuangan, Operasional dan IT, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (1 September 2024 – 31 Agustus 2025);
- Chief of Finance, Treasury and Strategy, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank), (Juli 2020 – 31 Agustus 2024);
- Direktur Keuangan (CFO), Standard Chartered Indonesia (Juni 2017 – Juni 2020);
- EVP, Head of Finance & Strategy, Bank CIMB Niaga (Agustus 2004 – Juni 2017);
- Dewan Pengawas Dana Pensiun CIMB Niaga, (Januari 2015 – Juni 2017);
- Finance Accounting Officer, Astra Otopart, Tbk, (April 1997 – Februari 2000).

Career Background

- Acting Managing Director of Finance, Operational and IT, Indonesia Eximbank (September 1, 2024 – August 31, 2025);
- Chief of Finance, Treasury and Strategy, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank), (July 2020 – August 31, 2024);
- Director of Finance (CFO), Standard Chartered Indonesia (June 2017 – June 2020);
- EVP, Head of Finance & Strategy, Bank CIMB Niaga (August 2004 – June 2017);
- CIMB Niaga Pension Fund Supervisory Board, (January 2015 – June 2017);
- Finance Accounting Officer, Astra Otopart, Tbk, (April 1997 – February 2000).

Rangkap Jabatan

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan di LPEI ataupun di perusahaan lain.

Concurrent Position

Has no concurrent positions in Indonesia Eximbank or other companies.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Affiliation

Does not have any affiliation with members of Board of Directors, members of Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.

Pendidikan dan/atau Pelatihan

- Economic Outlook 2024 – The Indonesian Economic Impact;
- Harmoni Eksekusi dan Kolaborasi Transformasi;
- Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7;
- Senior Leader Workshop : Bisnis Execution Strategy.

Workshop and/or Training

- Economic Outlook 2024 – The Indonesian Economic Impact;
- Harmony of Execution and Collaboration of Transformation;
- Preparation of Risk Management Recertification Level 7;
- Senior Leader Workshop: Business Execution Strategy.

Perubahan Komposisi Anggota Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana

Changes In the Composition of Executive Directors and Managing Directors

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA DI TAHUN 2024

Sepanjang tahun 2024, telah terjadi perubahan pada komposisi Direktur Pelaksana LPEI. Perubahan dilakukan dengan alasan masa jabatan pejabat telah berakhir. Berikut kronologis perubahan komposisi Direktur Pelaksana LPEI:

CHANGES IN THE COMPOSITION OF EXECUTIVE DIRECTORS AND MANAGING DIRECTORS IN 2024

Throughout 2024, there have been changes in the composition of Managing Directors of Indonesia Eximbank. The changes were made for the following reasons: the official's term of office has ended. Below is the Chronology of changes in the composition of Indonesia Eximbank's Managing Directors:

Periode 1 Januari 2024 – 16 Juli 2024 Period of January 1, 2024 – July 16, 2024	Periode 17 Juli 2024 - 31 Agustus 2024 Period of July 17, 2024 – August 31, 2024	Periode 1 September 2024 – 24 November 2024 Period of September 1, 2024 – November 24, 2024	Periode 24 November 2024 – 28 Desember 2024 Period of November 24, 2024 – December 28, 2024	28 Desember 2024 – 31 Desember 2024 Period of December 28, 2024 – December 31, 2024
Rijani Tirtoso Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of Board of Directors and Executive Director	Rijani Tirtoso Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of Board of Directors and Executive Director	Rijani Tirtoso Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of Board of Directors and Executive Director	Rijani Tirtoso Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of Board of Directors and Executive Director	Yon Arsal Plt. Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Acting Chairman of Board of Directors and Executive Director
Dikdik Yustandi Direktur Pelaksana Bisnis Managing Director of Business	Maqin U. Norhadi Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis merangkap Direktur Pelaksana Bisnis Managing Director of Business Development and Managing Director of Business	Sam Malee Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit Managing Director of Risk Management & Credit	Sam Malee Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit Managing Director of Risk Management & Credit	Sam Malee Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit Merangkap Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan dan SDM Managing Director of Credit & Risk Management concurrently Acting Managing Director of Corporate Secretary, Compliance & HC
Maqin U. Norhadi Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis Managing Director of Business Development	Agus Windiarto Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional, & Teknologi Informasi Managing Director of Finance, Operations & Information Technology	Anton Herdianto Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pelaksana Bisnis Acting Managing Director of Business	Anton Herdianto Direktur Pelaksana Bisnis Managing Director of Business	Anton Herdianto Direktur Pelaksana Bisnis Managing Director of Business
Agus Windiarto Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional, & Teknologi Informasi Managing Director of Finance, Operations & Information Technology	Chesna F. Anwar Plt. Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan, & Sumber Daya Manusia Acting Managing Director of Corporate Secretary, Compliance, & HC	Maqin U. Norhadi Plt. Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis Acting Managing Director of Business Development	Maqin U. Norhadi Plt. Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis Acting Managing Director of Business Development	Maqin U. Norhadi Plt. Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis Acting Managing Director of Business Development

Periode 1 Januari 2024 – 16 Juli 2024 Period of January 1, 2024 – July 16, 2024	Periode 17 Juli 2024 - 31 Agustus 2024 Period of July 17, 2024 – August 31, 2024	Periode 1 September 2024 – 24 November 2024 Period of September 1, 2024 – November 24, 2024	Periode 24 November 2024 – 28 Desember 2024 Period of November 24, 2024 – December 28, 2024	28 Desember 2024 – 31 Desember 2024 Period of December 28, 2024 – December 31, 2024
Chesna F. Anwar Plt. Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan, & Sumber Daya Manusia Acting Managing Director of Corporate Secretary, Compliance, & HC	Sam Malee Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit Managing Director of Risk Management & Credit	Anwar Harsono Plt. Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional, & Teknologi Informasi Acting Managing Director of Finance, Operations & Information Technology	Anwar Harsono Plt. Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional, & Teknologi Informasi Acting Managing Director of Finance, Operations & Information Technology	Anwar Harsono Plt. Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional, & Teknologi Informasi Acting Managing Director of Finance, Operations & Information Technology
Sam Malee Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit Managing Director of Risk Management & Credit		T. Wahyu Prihadi Wibowo Plt. Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan, & Sumber Daya Manusia Acting Managing Director of Corporate Secretary, Compliance, & HC	T. Wahyu Prihadi Wibowo Plt. Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan, & Sumber Daya Manusia Acting Managing Director of Corporate Secretary, Compliance, & HC	

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA SETELAH TAHUN BUKU

Hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan terdapat perubahan susunan anggota Dewan Eksekutif dan Direktur Pelaksana sebagai berikut:

CHANGES IN COMPOSITION OF EXECUTIVE DIRECTORS AND EXECUTIVE DIRECTORS AFTER THE FOLLOWING YEAR

Until this Annual Report is published, there are changes in the composition of the Executive Board members and Executing Directors as follows:

Periode 1 Januari 2025 – 16 Februari 2025 Period January 1, 2025 - February 16, 2025	Periode 17 Februari 2025 - 19 Maret 2025 Period February 17, 2025 - March 19, 2025	20 Maret 2025 - Saat Ini March 20, 2025 - Present
Yon Arsal Plt. Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Acting. Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director	Yon Arsal Plt. Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Acting. Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director	Sukatmo Padmosukarso Plt. Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Acting. Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director
Sam Malee Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit Managing Director of Risk & Credit Management	Sam Malee Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit merangkap Plt. Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan, & Sumber Daya Manusia Managing Director of Credit & Risk Management concurrently Acting Managing Director of Corporate Secretary, Compliance & HC	Sam Malee Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit merangkap Plt. Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan, & Sumber Daya Manusia Managing Director of Credit & Risk Management concurrently Acting Managing Director of Corporate Secretary, Compliance & HC
Anton Herdianto Direktur Pelaksana Bisnis Business Managing Director	Anton Herdianto Direktur Pelaksana Bisnis Business Managing Director	Anton Herdianto Direktur Pelaksana Bisnis Business Managing Director
Maqin U. Norhadi Plt. Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis Acting. Managing Director of Business Development	Maqin U. Norhadi Plt. Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis Acting. Managing Director of Business Development	Maqin U. Norhadi Plt. Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis Acting. Managing Director of Business Development
Anwar Harsono Plt. Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional, & Teknologi Informasi Acting. Managing Director of Finance, Operations & Information Technology	Anwar Harsono Plt. Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional, & Teknologi Informasi Acting. Managing Director of Finance, Operations & Information Technology	Anwar Harsono Plt. Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional, & Teknologi Informasi Acting. Managing Director of Finance, Operations & Information Technology
T. Wahyu Prihadi Wibowo Plt. Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan, & Sumber Daya Manusia Acting. Managing Director of Institutional Secretariat, Compliance & Human Resources		

Profil Manajemen Senior

Senior Management Profile

Pj. Chief of HC, Procurement, & General Service



Nury Sriandajani

Pj. Chief of HC, Procurement, & General Service

Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	:	Warga Negara Indonesia Indonesian
Usia <i>Age</i>	:	58 tahun per 31 Desember 2024 58 years old, as of December 31, 2024
Domisili <i>Domiciled</i>	:	Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta South Jakarta, DKI Jakarta
Bergabung di Lembaga <i>Joined the Institution</i>	:	Beliau mulai bergabung di LPEI sejak tahun 2022 dan diangkat sebagai manajemen senior berdasarkan KDE No.: 0037.02/KDE/11/2024 sejak 25 November 2024. Joined Indonesia Eximbank since 2022 and was appointed as senior management based on KDE No.: 0037.02/KDE/11/2024 since November 25, 2024.
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	:	- S2, Manajemen Internasional, Universitas Indonesia (1997) - S1, Kedokteran Gigi, Universitas Airlangga (1989) - Master Degree, International Management, University of Indonesia (1997) - Bachelor Degree, Dentistry, University of Airlangga (1989)

Chief of Business Risk



Titiek Setiyowati

Chief of Business Risk

Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	:	Warga Negara Indonesia Indonesian
Usia <i>Age</i>	:	61 tahun per 31 Desember 2024 61 years old as of December 31, 2024
Domisili <i>Domiciled</i>	:	Kota Bekasi, Jawa Barat Bekasi, West Java
Bergabung di Lembaga <i>Joined the Institution</i>	:	Beliau mulai bergabung di LPEI sejak tahun 2022 dan diangkat sebagai manajemen senior berdasarkan KDE No.: 0017/KDE/06/2024 sejak 1 Februari 2024. Joined Indonesia Eximbank since 2022 and was appointed as senior management based on KDE No.: 0017/KDE/06/2024 since February 1, 2024
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	:	- Sarjana Sosial Ekonomi Pertanian dari Universitas Jember, Jawa Timur (1989) - Bachelor of Agricultural Social Economics from University of Jember, East Java (1989)

Chief of Internal Audit



I Nyoman Gede Suarja

Chief of Internal Audit

Kewarganegaraan Citizenship	: Warga Negara Indonesia Indonesian
Usia Age	: 62 tahun per 31 Desember 2024 62 years old as of December 31, 2024
Domisili Domiciled	: Kota Tangerang Selatan, Banten South Tangerang City, Banten
Bergabung di Lembaga Joined the Institution	: Beliau mulai bergabung di LPEI sejak tahun 2022 dan diangkat sebagai manajemen senior berdasarkan KDE No. 0017/KDE/06/2024 sejak 1 Februari 2024. He joined LPEI in 2022 and was appointed as senior management based on KDE No. 0017/KDE/06/2024 sejak 1 Februari 2024.
Riwayat Pendidikan Educational Background	: - S2, Manajemen, Universitas Gadjah Mada (1999); dan - S1, Economy, Universitas Brawijaya (1987). - Master Degree, Management, University of Gadjah Mada (1999) - Bachelor Degree, Economics, University of Brawijaya (1987)

Chief of Region



Damianus Ledjo Hufat

Chief of Region

Kewarganegaraan Citizenship	: Warga Negara Indonesia Indonesian
Usia Age	: 62 tahun per 31 Desember 2024 62 years old as of December 31, 2024
Domisili Domiciled	: Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta East Jakarta, DKI Jakarta
Bergabung di Lembaga Joined the Institution	: Beliau mulai bergabung di LPEI sejak tahun 2020 dan diangkat sebagai manajemen senior berdasarkan KDE No.: 0037.02/KDE/11/2024 sejak 25 November 2024. Joined Indonesia Eximbank since 2020 and was appointed as senior management based on KDE No. 0037.02/KDE/11/2024 since November 25, 2024.
Riwayat Pendidikan Educational Background	: S1, Akuntansi, Universitas Indonesia (1987) Bachelor Degree, Accounting, University of Indonesia (1987)

Komposisi Manajemen Senior

The Composition of Senior Management

No	Nama, Umur Name, Age	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Appointment Date	Jenjang Pendidikan Educational Level
1	Sumarno, 53	Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Human Capital Division Head	1 Februari 2024 February 1, 2024	S2, Ilmu Manajemen Master Degree, Management
2	Rudi Rinardi, 52	Kepala Divisi Penagihan & Penjualan Aset I Collections & Asset Sales I Division Head	1 Februari 2024 February 1, 2024	S1, Administrasi Niaga Bachelor Degree, Commerce Administration
3	T. Dyza Rovina Aziz Rochadi, 52	Kepala Divisi Sekretariat Lembaga & Hubungan Kelembagaan Corporate Secretary & Stakeholder Engagement Division Head	1 Februari 2024 February 1, 2024	S2, Keuangan dan Perbankan Master Degree, Finance and Banking
4	Alexander Halim, 48	Kepala Kantor Area Medan Medan Area Head Office	1 Februari 2024 February 1, 2024	S1, Akuntansi Bachelor degree, Accounting
5	Yoseph Tri Purnomosidi, 55	Kepala Divisi Hukum & Kepatuhan Legal and Compliance Division Head	1 Februari 2024 February 1, 2024	S2, Manajemen Master Degree, Management
6	Wahyu Bagus Yuliantok, 39	Kepala Divisi Bisnis II Business II Division Head	1 Februari 2024 February 1, 2024	S2, Master of Management (Finance)
7	Pretty Halim, 50	Kepala Divisi Pengadaan & Umum Procurement and General Affair Division Head	1 Februari 2024 February 1, 2024	S2, Applied Finance
8	Farid Maruf, 61	Eksekutif Analisa Risiko Executive Risk Officer	1 Februari 2024 February 1, 2024	S1, Pertanian Bachelor Degree, Agricultural
9	Rini Satriani, 41	Market Intelligence & Lead Management Head Specialist	1 Februari 2024 February 1, 2024	S2, Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Master Degree, Economics Planning and Development Policy
10	Komarruzaman, 54	Special Project Head Specialist	1 Februari 2024 February 1, 2024	S3, Ekonomi Doctorate Degree, Economics
11	Saeful Hendra, 45	Kepala Divisi Audit Khusus Audit Special Division Head	2 Juli 2021 July 2, 2021	S2, Bisnis Master Degree, Business
12	Yoda Ditria, 43	Kepala Divisi Perencanaan Strategi & Transformasi Strategic Planning & Transformation Division Head	1 Februari 2024 February 1, 2024	S2, Manajemen Master Degree, Management
13	Irwan Prasetyawan, 46	Kepala Kantor Wilayah II Region II Office Head	1 Februari 2024 February 1, 2024	S1, Manajemen Bachelor Degree, Management
14	Christiati E. Sianipar, 56	Kepala Divisi Operasional Operational Division Head	28 Mei 2021 May 28, 2021	S1, Akuntansi Bachelor Degree, Accounting
15	Sidik Mahanda, 43	Kepala Divisi Manajemen Risiko Risk Management Division Head	1 Februari 2024 February 1, 2024	S2, Manajemen Bachelor Degree, Management
16	Sofyan Irianto N., 60	Executive Business Head Specialist	1 Februari 2024 February 1, 2024	S2, Manajemen Master Degree, Management
17	Andre Sucahya, 42	Kepala Divisi Teknologi Informasi Information Technology Division Head	1 Oktober 2022 October 1, 2022	S1, Teknologi Informasi Bachelor Degree, Information Technology

No	Nama, Umur Name, Age	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Appointment Date	Jenjang Pendidikan Educational Level
18	Ninik Martini, 58	Executive Business Head Specialist	1 Februari 2024 February 1, 2024	S1, Akuntansi Bachelor Degree, Accounting
19	Saur Maria Sidabutar, 52	Kepala Divisi Jasa Konsultasi UMKM SME Advisory Service Division Head	1 Oktober 2024 October 1, 2024	S2, Public Relations Master Degree, Public Relations
20	Lianawaty Mihardja, 45	Kepala Divisi Finance Finance Division Head	26 Oktober 2021 October 26, 2021	S1, Akuntansi Bachelor Degree, Accounting
21	Suharyanto, 59	Business Ecosystem Head Specialist	1 Februari 2024 February 1, 2024	S2, Manajemen Master Degree, Management
22	Nurrohmanudin, 40	Kepala Divisi Bisnis III Business III Division Head	1 Februari 2024 February 1, 2024	S2, Ekonomi Master Degree, Economics
23	Titiek Litasari, 51	Kepala Divisi Audit Umum General Audit Division Head	1 Januari 2021 January 1, 2021	S2, Manajemen Keuangan Master Degree, Finance Management
24	R. Bambang Sadnur Cahyo, 57	Kepala Kantor Wilayah I Region I Office Head	1 Juli 2022 July 1, 2022	S2, Manajemen Master Degree, Management
25	Roza Rita Retta Hutabarat, 59	Eksekutif Analisa Risiko Executive Risk Officer	1 Februari 2024 February 1, 2024	S1, Peternakan Bachelor Degree, Animal Husbandry
26	Heru Budiyanto, 58	Eksekutif Analisa Risiko Executive Risk Officer	1 Februari 2024 February 1, 2024	S1, Manajemen Bachelor Degree, Management
27	Irvansyah Setiady, 37	Kepala Divisi Bisnis I Business I Division Head	1 Februari 2024 February 1, 2024	S2, Keuangan Master Degree, Finance
28	Fifin Yolanda E. Febrina Tan, 45	Kepala Divisi Bisnis IV Business IV Division Head	1 Februari 2024 February 1, 2024	S2, Manajemen & Finance Master Degree, Management & Finance
29	Ahmad Bambang Bintoro, 58	Kepala Kantor Wilayah III Region III Office Head	1 September 2023 September 1, 2023	S2 Manajemen Master Degree, Management
30	Ilham Mustafa, 40	Kepala Divisi Penjaminan & Asuransi Guarantee & Insurance Division Head	1 Februari 2024 February 1, 2024	S1 Hukum Bachelor Degree, Legal
31	Berlianto Wibowo, 39	Kepala Divisi PKE, Pembiayaan Perdagangan & Pembiayaan NIA Trade Finance, & Financing Division Head	1 Februari 2024 February 1, 2024	S1 Manajemen Bisnis Bachelor Degree, Business Management
32	Basa Nova Agustina Marpaung, 37	Collection & Asset Sales I Head Specialist	1 Februari 2024 February 1, 2024	S2 Manajemen Master Degree, Management
33	Onot Sujatmiko, 43	Investor Finding & Restructurization Head Specialist	1 Februari 2024 February 1, 2024	S1 Ekonomi Manajemen Bachelor Degree, Economy Management
34	Jugie Sugiarto, 60	Kepala Divisi Risiko Digital & Operasional Digital Risk & Operation Division Head	1 Juli 2024 July 1, 2024	S2 Pemasaran, Administrasi Bisnis dan Manajemen Master Degree, Business Administration and Management
35	Sumanggam Simanjuntak, 58	Eksekutif Analisa Risiko Executive Risk Officer	1 Agustus 2024 August 1, 2024	S2 Manajemen Risiko Master Degree, Risk Management
36	M. Sigit Yuniarso, 57	Kepala Divisi Hukum Legal Division Head	5 Agustus 2024 August 5, 2024	S1 Hukum Bachelor Degree, Law
37	Simson Johannes Manondang, 38	Credit Recovery Head Specialist	1 November 2024 November 1, 2024	S2 Infrastruktur Investasi dan Keuangan Master Degree Investment and Financial Infrastructure

Demografi Karyawan

Employees Demography

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi

Employee Composition Based on Organization Level

Level Organisasi Organization Level	2024			2023		
	L M	P F	Jumlah Total	L M	P F	Jumlah Total
Senior Executive Vice President	5	3	8	4	2	6
Kepala Divisi/Kepala Kantor Wilayah Division Head/Region Office Head	26	11	37	24	14	38
Kepala Departemen Department Head	67	35	102	76	34	110
Eksekutif Executive	144	99	243	145	99	243
Pelaksana Executors	60	71	131	73	80	144
Jumlah Total	302	219	521	322	241	563

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Employee Composition Based on Education

Tingkat Pendidikan Education	2024			2023		
	L M	P F	Jumlah Total	L M	P F	Jumlah Total
Doktor Doctorate	1	-	1	1	-	1
Magister	81	49	130	87	57	144
Sarjana Bachelor Degree	220	169	389	234	183	417
Diploma	-	1	1	-	1	1
Jumlah Total	302	219	521	322	241	563

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Ketenagakerjaan

Employee Composition Based on Employment Status

Status Ketenagakerjaan Employment Status	2024			2023		
	L M	P F	Jumlah Total	L M	P F	Jumlah Total
Tetap Permanent	267	197	464	296	219	515
Probation	11	3	14	4	2	6
PKWT Temporary	24	19	43	22	20	42
Jumlah Total	302	219	521	322	241	563

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia

Employee Composition Based on Age

Usia Age	2024			2023		
	L M	P F	Jumlah Total	L M	P F	Jumlah Total
X & Baby Boomers	57	34	91	70	45	115
Millenials & Gen Z	245	185	430	252	196	448
Jumlah Total	302	219	521	322	241	563

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Employee Composition Based on Gender

Jenis Kelamin Gender	2024	2023
Laki-laki Male	302	322
Perempuan Female	519	241
Jumlah Total	521	563

Komposisi Pemegang Saham

Shareholders Composition

Komposisi Pemegang Saham per 1 Januari 2024

Shareholders Composition as of January 1, 2024

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham Number of Shares	Kepemilikan Secara Langsung Direct Ownership	Kepemilikan Secara Tidak Langsung Indirect Ownership
Pemegang Saham yang Memiliki 5% atau Lebih Saham Shareholder Owns 5% or More Shares			
Pemerintah Republik Indonesia Government of RI	LPEI tidak terbagi atas Saham No shares allocation		100%
Kelompok Pemegang Saham Masyarakat yang Memiliki Kurang Dari 5% Saham Public Shareholders Who Have Less Than 5% Shares			
Masyarakat (di bawah 5%) Public (below 5%)	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang Memiliki Saham Members of Board of Directors and Board of Commissioners Owning Shares			
Dewan Direktur/fungsi Dewan Komisaris Board of Directors/Board of Commissioners Function	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Direktur Pelaksana/fungsi Direksi Managing Directors/ Board of Directors function	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Total			100%

Komposisi Pemegang Saham per 31 Desember 2024

Shareholder Composition as of December 31, 2024

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham Number of Shares	Kepemilikan Secara Langsung Direct Ownership	Kepemilikan Secara Tidak Langsung Indirect Ownership
Pemegang Saham yang Memiliki 5% atau Lebih Saham Shareholder Owns 5% or More Shares			
Pemerintah Republik Indonesia Government of RI	LPEI tidak terbagi atas Saham No shares allocation		100%
Kelompok Pemegang Saham Masyarakat yang Memiliki Kurang Dari 5% Saham Public Shareholders Who Have Less Than 5% Shares			
Masyarakat (di bawah 5%) Public (below 5%)	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang Memiliki Saham Members of Board of Directors and Board of Commissioners Owning Shares			
Dewan Direktur/fungsi Dewan Komisaris Board of Directors/Board of Commissioners Function	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Direktur Pelaksana/fungsi Direksi Managing Directors/ Board of Directors function	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Total			100%

Kepemilikan Saham Secara Langsung maupun Tidak Langsung oleh Anggota Dewan Direktur dan Anggota Direktur Pelaksana pada Posisi 1 Januari 2024 dan 31 Desember 2024

Tidak ada satupun anggota Direktur Pelaksana ataupun anggota Dewan Direktur LPEI yang tercatat sebagai pemegang saham LPEI baik secara langsung maupun tidak langsung per posisi 1 Januari 2024 dan 31 Desember 2024.

Direct or Indirect Shareholding by Members of Board of Directors and Members of Managing Director as of January 1, 2024 and December 31, 2024

None of the members of Managing Director or members of Board of Directors of Indonesia Eximbank are listed as shareholders of Indonesia Eximbank either directly or indirectly as of January 1, 2024 and December 31, 2024.

Komposisi Pemegang Saham berdasarkan Klasifikasi per 31 Desember 2024

Shareholders Composition by Classification as of December 31, 2024

Klasifikasi Classification	Jumlah Pemegang Saham Number of Shares	Persentase Percentage
Kepemilikan institusi lokal Local institutional ownership	-	-
Kepemilikan institusi asing Foreign institutional ownership	-	-
Kepemilikan individu lokal Local individual ownership	-	-
Kepemilikan individu asing Foreign individual ownership	-	-

Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali, Baik Langsung maupun tidak Langsung Sampai Kepada Pemilik Individu yang Disajikan Dalam Bentuk Skema/Bagan

Information On Major and/or Controlling Shareholders, Either Directly or Indirectly Up to Individual Owners, Presented In the Form of A Scheme/Chart

Pemegang saham mayoritas LPEI adalah Pemerintah Republik Indonesia 100% (seratus persen) yang modalnya tidak terbagi atas saham.

The major shareholder of Indonesia Eximbank is the Government of the Republic of Indonesia 100% (one hundred percent) whose capital is not divided into shares.



Daftar Entitas Anak, LPEI Asosiasi, dan Ventura Bersama

Subsidiaries, Associated Entities, and Joint Ventures of Indonesia Eximbank

Entitas Anak

Hingga akhir tahun pelaporan 2024, LPEI memiliki 1 (satu) entitas anak perusahaan bernama PT IEB Prima Aset yang didirikan pada tanggal 17 Desember 2021 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT IEB Prima Aset disingkat PT IEBPA No. 154 di Jakarta dan persetujuan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Ahu-0081370. Ah.01.01. Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT IEB Prima Aset pada tanggal 20 Desember 2021.

Penyertaan modal PT IEB Prima Aset telah disetujui oleh Menteri Keuangan RI pada tanggal 6 Desember 2021 melalui Surat Keputusan No. S-1097/MK.06/2021 dengan nilai Rp50 miliar. Dana tersebut rencananya digunakan untuk membiayai kegiatan operasional PT IEB Prima Aset.

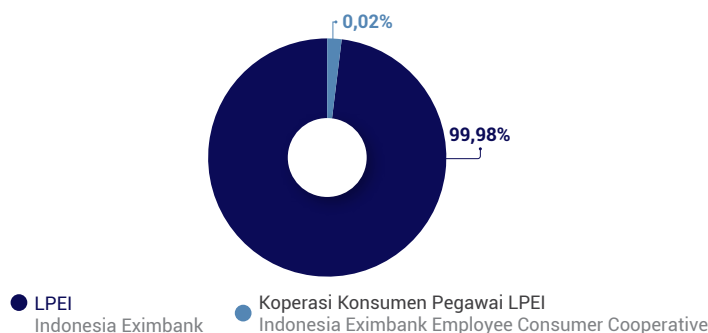
PT IEB Prima Aset bergerak di bidang jasa konsultasi, termasuk konsultasi atas kegiatan yang berorientasi ekspor. Kepemilikan LPEI pada PT IEB Prima Aset mencapai 99,98%, sementara sisa kepemilikan sebesar 0,02% dimiliki oleh Koperasi Konsumen Pegawai LPEI.

Subsidiaries

Until the end of reporting year 2024, Indonesia Eximbank has 1 (one) subsidiary named PT IEB Prima Aset, which was established on December 17, 2021 based on Deed of Establishment of Limited Liability Company PT IEB Prima Aset abbreviated as PT IEBPA No. 154 in Jakarta and approval of the Decree of Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number Ahu-0081370. Ah.01.01. of 2021 regarding Ratification of the Establishment of Limited Liability Company PT IEB Prima Aset on December 20, 2021.

PT IEB Prima Aset's capital injection has been approved by the Minister of Finance on December 6, 2021, No S-1097/MK.06/2021 amounted to Rp50 billion. This fund will be used to finance the operational activities PT IEB Prima Aset.

PT IEB Prima Aset is engaged in consulting services, including consulting on export-oriented activities. The ownership of Indonesia Eximbank in PT IEB Prima Aset is 99.98%. The remaining 0.02% ownership is owned by the Indonesia Eximbank Employee Consumer Cooperative.



Nama Perusahaan Company Name	PT IEB Prima Aset
Alamat Address	Gedung Prosperity lantai 33 District 8, SCBD Lot. 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190
Bidang Usaha Line of Business	Jasa konsultasi, termasuk konsultasi atas kegiatan yang berorientasi ekspor Consulting services, including consulting on export-oriented activities
Kepemilikan Saham Share Ownership	- LPEI (99,98%); - Koperasi Konsumen Pegawai LPEI (0,02%); - Indonesia Eximbank (99,98%) - Indonesia Eximbank Employee Consumer Cooperative (0,02%)
Jenis Badan Hukum Type of Legal Entity	Perseroan Terbatas (PT) Limited Liability Company



Total Aset per 31 Desember 2024 Total Assets as of December 31, 2024	Rp47.022.474.971.010,00
Status Operasi Operating Status	Beroperasi In Operation

Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Hingga akhir 2024, LPEI tidak memiliki entitas asosiasi dan ventura bersama.

Associated Entities and Joint Ventures

Until the end of 2024, Indonesia Eximbank does not have any associated entities and joint ventures.

Struktur Grup

Group Structure

Struktur Grup LPEI per 31 Desember 2024
Indonesia Eximbank Group Structure As of December 31, 2024



Hingga berakhirnya tahun 2024, LPEI memiliki 1 (satu) entitas anak yang menjadi bagian dari portofolio Lembaga.

Until the end of 2024, Indonesia Eximbank has 1 (one) subsidiary, which is part of corporate portfolio.

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Saham

Share Issuance and Listing Chronology

Hingga periode akhir tahun buku 2024, LPEI tidak pernah menerbitkan saham di bursa efek manapun sehingga informasi mengenai kronologis penerbitan dan pencatatan saham tidak relevan diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan 2024.

Until the end of the 2024 financial year, Indonesia Eximbank has never issued shares on any stock exchange, hence information regarding the chronology of issuance and listing of shares is not relevant to be disclosed in the 2024 Annual Report and Sustainability Report.

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya

Chronology of Issuance and Listing of Debt Securities

Selama tahun 2024, LPEI tidak melakukan penerbitan dan pencatatan efek lainnya. Adapun *outstanding* efek miliki LPEI per tahun buku 2024 adalah sebagai berikut:

Throughout 2024, Indonesia Eximbank did not issue and list any debt securities. The outstanding securities owned by Indonesia Eximbank as of financial year 2024 are as follows:

No	Nama Efek Securities Name	Seri Series	Jumlah yang Outstanding per 31 Desember 2024 (Rp Miliar) Total Outstanding as of 31 December 2024 (Rp Billion)	Tingkat Bunga per Tahun Interest Rate Per Annum	Tanggal Penerbitan Issued Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Bursa Exchange	Peringkat Rating
Obligasi dalam mata uang Rupiah Bonds denominated in Rupiah								
1	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV Tahun 2017 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds III Phase IV of 2017	E	1.266,00	9,40%	23 Februari 2017 February 23, 2017	23 Februari 2027 February 23, 2027	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
2	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI Tahun 2018 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds III Phase VI of 2018	C	206,00	6,90%	14 Februari 2018 February 14, 2018	14 Februari 2025 February 14, 2025	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
3	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I Tahun 2018 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase I of 2018	C	1.756,00	8,30%	6 Juni 2018 June 6, 2018	6 Juni 2025 June 6, 2025	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
4	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II Tahun 2018 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase II of 2018	D	1.324,00	8,75%	05 September 2018 September 5, 2018	05 September 2025 September 5, 2025	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)

No	Nama Efek Securities Name	Seri Series	Jumlah yang Outstanding per 31 Desember 2024 (Rp Miliar) Total Outstanding as of 31 December 2024 (Rp Billion)	Tingkat Bunga per Tahun Interest Rate Per Annum	Tanggal Penerbitan Issued Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Bursa Exchange	Peringkat Rating
5	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III Tahun 2018 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase III of 2018	D	380,00	9,75%	08 November 2018 November 8, 2018	08 November 2025 November 8, 2025	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
6	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase IV of 2019	D	278,00	9,25%	23 April 2019 April 23, 2019	23 April 2026 April 23, 2026	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		E	349,00	9,50%	23 April 2019 April 23, 2019	23 April 2029 April 23, 2029	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		F	625,00	9,80%	23 April 2019 April 23, 2019	23 April 2034 April 23, 2034	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
7	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase V of 2019	D	737,00	9,20%	09 Juli 2019 July 9, 2019	09 Juli 2026 July 09, 2026	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
8	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase VI of 2019	D	714,50	8,50%	03 September 2019 September 3, 2019	03 September 2026 September 3, 2026	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
9	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase VII of 2019	D	112,00	8,50%	29 Oktober 2019 October 29, 2019	29 Oktober 2026 October 29, 2026	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		E	219,75	8,75%	29 Oktober 2019 October 29, 2019	29 Oktober 2029 October 29, 2029	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
10	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase VIII of 2019	C	22,50	8,20%	06 Desember 2019 December 6, 2019	06 Desember 2026 December 6, 2026	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
Jumlah Obligasi Total Bonds			7.989,75					

No	Nama Efek Securities Name	Seri Series	Jumlah yang Outstanding per 31 Desember 2024 (Rp Miliar) Total Outstanding as of 31 December 2024 (Rp billion)	Tingkat Bunga per Tahun Interest Rate Per Annum	Tanggal Penerbitan Issued Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Bursa Exchange	Peringkat Rating
Sukuk dalam mata uang Rupiah Sukuk denominated in Rupiah								
1	Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank I Tahap II Tahun 2018 Indonesia Eximbank Sukuk Mudharabah I Phase II of 2018	D	155	9,75%	08 November 2018 November 08, 2018	08 November 2025 November 8, 2025	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
Jumlah Obligasi Total Bonds			155					

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Public Accountant and Public Accountant Firm

Kantor Akuntan Publik

Public Accountant Firm

Akuntan Publik Accountant Public	Bimo Iman Santoso, S.E., Ak, CPA, CA.
Kantor Akuntan Publik Public Accountant Firm	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners
Alamat Address	Jl. Jend. Sudirman, Kav 59, Plaza Asia Lt 10 Jakarta 12190 Tel.: (62 21) 51401340 https://www.rsm.global/
Periode Penugasan Assignment Period	12 September 2024 - 31 Mei 2025 September 12, 2024 – May 31, 2025
Jasa Audit yang Diberikan Services Provided	Jasa Audit: - Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 yang disusun dan disajikan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan penyajian wajar bertujuan khusus sebagai berikut: - Untuk unsur-unsur Laporan Keuangan Konsolidasian lainnya disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; - Sedangkan untuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas pembiayaan dalam rangka penugasan khusus yang direstrukturisasi dihitung menggunakan asumsi tingkat diskonto sebesar tingkat suku bunga setelah direstrukturisasi. Yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian, dan suatu informasi kebijakan akuntansi material dan informasi penjelasan lainnya. - Reviu atas penerbitan publikasi laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. - Memorandum Hasil Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian (<i>Management Letter</i>) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. - Audit atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. - Audit umum atas Laporan Keuangan PT IEB Prima Aset untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024. - Audit umum atas Laporan Keuangan Program Kemitraan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. Audit Services - General Audit of Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2024, prepared and presented in accordance with a special purpose fair presentation financial reporting framework as follows: - For other elements of Consolidated Financial Statements, prepared in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia; - Meanwhile, for Allowance for Impairment Losses (CKPN) on financing under special assignments that have been restructured, it is calculated using a discount rate assumption equal to the interest rate after restructuring. This consists of consolidated statement of financial position as of December 31, 2024, as well as the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows, along with material accounting policy information and other explanatory information. - Review of the publication of consolidated financial statements for the year ended December 31, 2024. - General Audit Memorandum on Consolidated Financial Statements (<i>Management Letter</i>) for the year ended December 31, 2024. - Audit of compliance with Laws and Regulations and Internal Control for the year ended December 31, 2024. - General Audit of the Financial Statements of PT IEB Prima Aset for the year ended December 31, 2024. - General Audit of the Partnership Financing Program Financial Statements for the year ended December 31, 2024.
Biaya Jasa Audit Audit Service Fee	Rp4.708.200.000,-

Jasa Non-Audit yang Diberikan Non-Audit Services	a. Perikatan Asurans Keyakinan Terbatas (reviu) atas Laporan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. b. Perikatan Asurans Keyakinan Terbatas (reviu) atas Program Pembiayaan Khusus Ekspor (PKE) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. c. Perikatan Asurans Keyakinan Terbatas (reviu) atas Laporan Keuangan Syariah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. d. Perikatan Asurans Keyakinan Terbatas (reviu) atas <i>Internal Control Operation and Information Technology</i> (IT) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. e. Penerapan prosedur yang disepakati untuk Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) triwulan IV tanggal 31 Desember 2024. f. Perikatan Prosedur Asurans Terbatas (reviu) atas Laporan Pinjaman <i>Industrial Efficiency and Pollution Control</i> (IEPC) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. g. Perikatan keyakinan memadai atas Laporan Pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. a. Limited Assurance Engagement (review) of the Report on Realization of Key Performance Indicators (KPIs) for the year ended December 31, 2024. b. Limited Assurance Engagement (review) of the Special Export Financing Program (PKE) for the year ended December 31, 2024. c. Limited Assurance Engagement (review) of the Sharia Financial Statements for the year ended December 31, 2024. d. Limited Assurance Engagement (review) of Internal Control Operation and Information Technology (IT) for the year ended December 31, 2024. e. Implementation of agreed-upon procedures for the Prudential Principles Implementation Report (KPPK) for the fourth quarter ended December 31, 2024. f. Limited Assurance Engagement (review) of the Industrial Efficiency and Pollution Control (IEPC) Loan Report for the year ended December 31, 2024. g. Reasonable Assurance Engagement of the Report on the Implementation of Government Investment for the National Economic Recovery (PEN) to PT Perkebunan Nusantara III (Persero) for the year ended December 31, 2024.

Lembaga dan/atau Profesi Penunjang

Supporting Institutions and/or Professions

Di tahun 2024, lembaga dan profesi penunjang pasar modal untuk penerbitan Obligasi dan Sukuk Berkelanjutan LPEI adalah sebagai berikut:

The following are capital market supporting professions and institutions for the issuance of Indonesia Eximbank Bonds and Sukuk in 2024:

No	Nama Pihak Name	Alamat Address	Peran Assignment	Periode Penugasan Assignment Period
1	PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)	Equity Tower 30th Floor SCBD, Lot.9 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190, Indonesia Tel. (021) 509 68469 Fax. (021) 509 68468	Lembaga Pemeringkat Efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank Rating Agency for Securities issued by Indonesia Eximbank	Sampai dengan efek yang dicatat jatuh tempo Until the recorded securities mature
2	PT. Bursa Efek Indonesia	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53, Jakarta 12190 Tel. (021) 515 0515 Fax. (021) 515 0330	Lembaga Pencatatan Emisi Efek Indonesia Eximbank Listing Agency for Securities issued by Indonesia Eximbank	Sampai dengan efek yang dicatat jatuh tempo Until the recorded securities mature
3	PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53, Jakarta 12190 Tel. (021) 515 2855 Fax. (021) 5299 1199	Lembaga Kustodi dan Penyelesaian di Pasar Modal atas efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank Custodian Agency and Settlement in the Capital Market for Securities issued by Indonesia Eximbank	Sampai dengan efek yang dicatat jatuh tempo Until the recorded securities mature
4	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	Plaza Mandiri, Lantai 22 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38. Jakarta 12190 Tel. (021) 527 5370 Fax. (021) 526 8201	Wali Amanat atas efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank Trustee for Securities issued by Indonesia Eximbank	Sampai dengan efek yang dicatat jatuh tempo Until the recorded securities mature

Di tahun 2024, lembaga dan profesi penunjang pasar modal untuk penerbitan EMTN LPEI adalah sebagai berikut:

The following are capital market supporting institutions and professions for the issuance of Indonesia Eximbank EMTN in 2024:

No	Nama Pihak Name	Alamat Address	Peran Assignment	Periode Penugasan Assignments Period
1	HSBC Corporate Trust and loan Agency	Level 30, HSBC Main Building 1 Queen's Road Central Hong Kong Tel. (852) 2822 4443	Wali Amanat dan Agen Pembayar atas efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank Trustee and Paying Agent for Securities issued by Indonesia Eximbank	Sepanjang program berlaku As long as the program is valid

Penghargaan

Awards

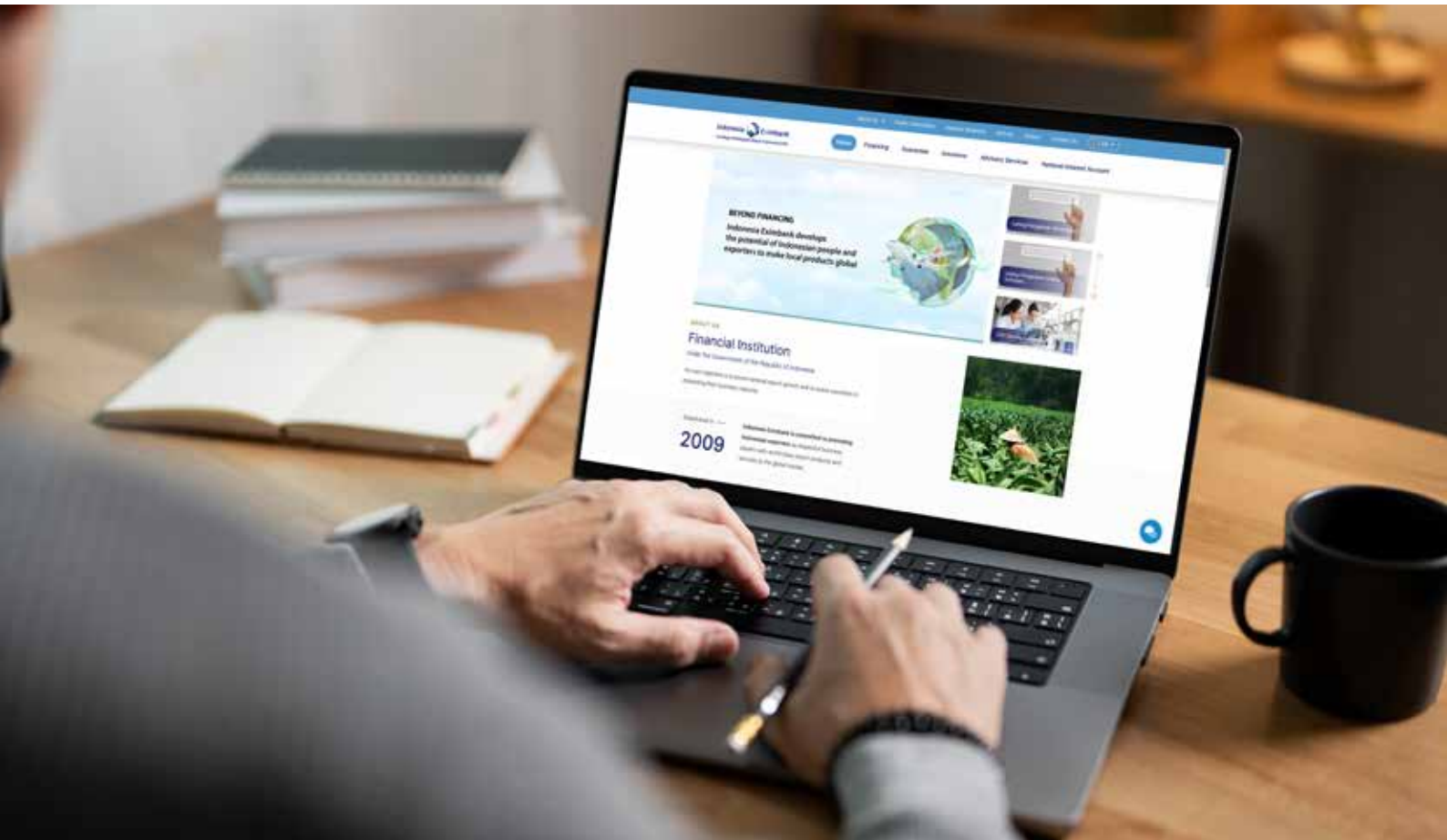
Penghargaan yang Diperoleh di Tahun 2024

Awards Earned in 2024

	Tanggal Date	Nama Penghargaan Awards Name	Diberikan Oleh Awarded by
	27 Mei 2024 May 27, 2024	Best Sukuk Syariah	B Universe Media Group.
	31 Oktober 2024 October 31, 2024	• Stellar Workplace Recognition in Commitment • Stellar Workplace Recognition	Stellar Award 2024

Informasi Pada Situs Web LPEI

Information On Company Website



LPEI memiliki situs web resmi sebagai salah satu sarana dalam memenuhi keterbukaan terhadap publik yang menyajikan informasi secara komunikatif dan terkini mengenai Lembaga sesuai dengan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi bagi publik, melalui situs web resmi LPEI dengan alamat www.indonesiaeximbank.go.id. Situs web ini merupakan portal resmi LPEI yang dapat diakses secara terbuka, kapan dan di mana saja, dengan mudah dan sederhana, dengan tujuan memberikan informasi yang komprehensif, akurat dan aktual tentang LPEI kepada khalayak luas.

Seluruh informasi yang dipublikasikan pada situs web LPEI tersedia dalam 2 (dua) pilihan bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris juga telah memenuhi berbagai ketentuan yang relevan baik eksternal, maupun internal, termasuk:

1. Undang-Undang RI No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang RI No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indonesia Eximbank has an official website as one of the tools to ensure transparency to the public by providing communicative and up-to-date information about the institution, in accordance with the principles of transparency and public information disclosure, through official Indonesia Eximbank website at www.indonesiaeximbank.go.id. This website serves as an official portal of Indonesia Eximbank, which can be accessed openly, anytime and anywhere, easily and simply, with the aim of providing comprehensive, accurate, and current information about Indonesia Eximbank to the general public.

All information published on Indonesia Eximbank website is available in two languages, namely Indonesian and English, and meets various relevant provisions, both external and internal, including:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 14/2008 on Public Information Transparency.
2. Law of the Republic of Indonesia No. 11/2008 on Electronic Information and Transactions.

Selain mengacu pada perundang-undangan terkait keterbukaan informasi yang berlaku, komponen situs web LPEI juga telah memenuhi cakupan informasi yang wajib dimuat dalam situs web Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015, terkecuali untuk item-item yang spesifik bagi Perusahaan Publik.

In addition to referring to the relevant laws on information disclosure, the components of Indonesia Eximbank website also meet the scope of information that must be included on the Company's website in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 8/POJK.04/2015, except for items specific to Public Companies.

Uraian Description	Ketersediaan Availability	Keterangan Remarks
Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu; Shareholder information up to the ultimate individual owner	✓	https://www.indonesiaeximbank.go.id/about
Isi Kode Etik; Content of Code of Conduct	✓	https://www.indonesiaeximbank.go.id/gcg/code_of_conduct
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); Information on the General Meeting of Shareholders (GMS)	✓	https://www.indonesiaeximbank.go.id/investor-relation/ratification-meeting *) LPEI tidak mengadakan RUPS, melainkan Rapat Pengesahan RKAT dan Rapat Kinerja Audited 2024. *) Indonesia Eximbank does not hold a GMS, but a RKAT Ratification Meeting and Audited 2024 Performance Meeting.
Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir); Separate annual financial statements (last 5 years);	✓	https://www.indonesiaeximbank.go.id/investor-relation/financial-report
Profil Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana; Profiles of Board of Directors and Managing Directors;	✓	https://www.indonesiaeximbank.go.id/message-from-chairman/bod https://www.indonesiaeximbank.go.id/message-from-chairman/managing-director
Piagam/Charter Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, Komite-komite, dan Unit Audit Internal. Charters of Board of Directors, Managing Directors, Committees, and Internal Audit Unit	✓	https://www.indonesiaeximbank.go.id/gcg/audit-committee-charter

LPEI senantiasa memperbarui informasi yang disajikan dalam website secara berkala untuk memberikan informasi terkini bagi segenap pemangku kepentingan maupun masyarakat umum. LPEI juga memiliki akun media sosial sebagai bagian dari keterbukaan informasi dan komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan, di antaranya Facebook, Instagram, X, Youtube, dan LinkedIn.

Indonesia Eximbank continuously updates the information presented on its website regularly to provide the latest information to all stakeholders and general public. Indonesia Eximbank also has social media accounts as part of its information disclosure and communication to all stakeholders, including Facebook, Instagram, X, YouTube, and LinkedIn.



04

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion
and Analysis



Tinjauan Perekonomian dan Industri

Economic and Industry Review

Analisis Perekonomian Global

Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Global

Ketidakpastian ekonomi global terus meningkat sepanjang 2024, dipicu oleh berbagai faktor, termasuk perlambatan pertumbuhan ekonomi, tekanan inflasi, serta dinamika geopolitik yang semakin kompleks. Berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI), pertumbuhan ekonomi global pada 2024 diperkirakan mencapai 3,2%, sedikit melambat dibandingkan dengan 3,3% pada 2023. Pelemahan ini terutama disebabkan oleh perlambatan ekonomi di negara-negara berkembang seperti Tiongkok dan India, sementara negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS) dan kawasan Euro menunjukkan pemulihan yang lebih stabil.

Dinamika pasar keuangan global juga mengalami tekanan akibat tingginya volatilitas indeks saham serta peningkatan imbal hasil obligasi di beberapa negara utama. Sepanjang 2024, indeks volatilitas pasar global menunjukkan peningkatan yang signifikan, sejalan dengan ketidakpastian kebijakan moneter AS yang mulai memasuki siklus penurunan suku bunga oleh *The Federal Reserve*. Inflasi global, meskipun menunjukkan tren menurun, masih berada di level tinggi di beberapa kawasan, terutama di AS dan Euro Area, dengan masing-masing tingkat inflasi 2,6% dan 2,7% pada Oktober 2024.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi perekonomian global adalah tensi geopolitik yang terus meningkat. Konflik di Timur Tengah serta perang Rusia-Ukraina memberikan dampak signifikan terhadap pasar energi dan rantai pasokan global. Harga minyak dunia mengalami fluktuasi tajam, mencapai rata-rata USD85 per barel pada akhir 2024, sementara harga komoditas ekspor utama Indonesia seperti batu bara dan minyak sawit juga mengalami tekanan. Hal ini berpengaruh terhadap neraca perdagangan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang sangat bergantung pada ekspor komoditas.

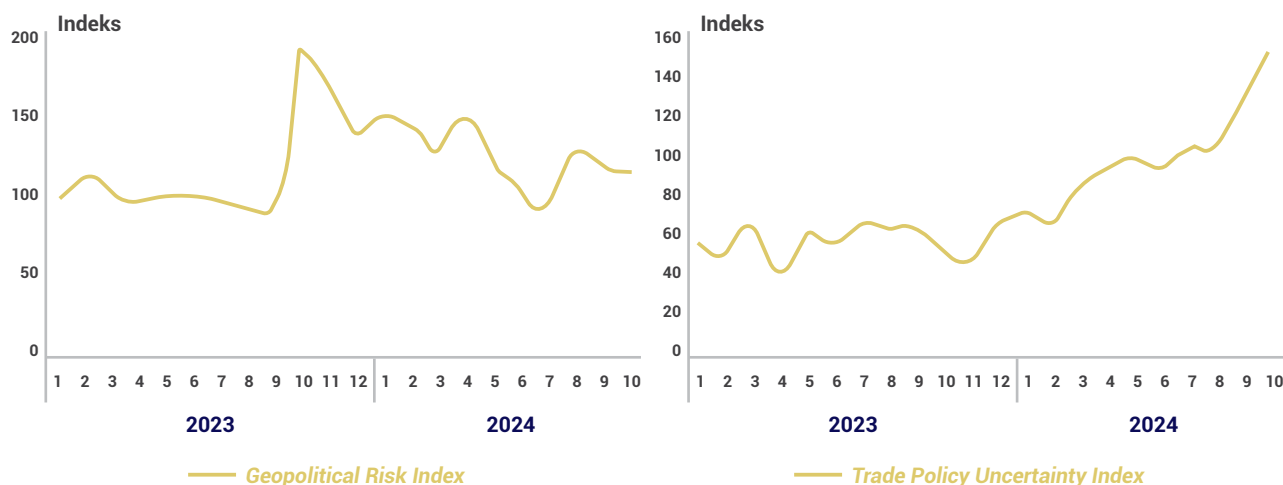
Global Economy Analysis

The Slowdown of Global Economic Growth

Global economic uncertainty has continued to escalate throughout 2024, driven by a confluence of factors, including slowing economic growth, inflationary pressures, and increasingly complex geopolitical dynamics. According to a report from Bank Indonesia (BI), global economic growth for 2024 is projected at 3.2%, reflecting a marginal decline from 3.3% in 2023. This deceleration is primarily attributed to economic slowdowns in key developing countries such as China and India, whereas developed countries, including the United States and the Eurozone, are exhibiting a more stable recovery trajectory.

The dynamics of the global financial market have also come under pressure due to heightened stock market volatility and rising bond yields in several major economies. Throughout 2024, global market volatility index has shown a significant increase, in line with the uncertainty surrounding United States monetary policy as the Federal Reserve begins its interest rate easing cycle. Although global inflation has shown a downward trend, it remains elevated in certain regions, particularly in the United States and the Euro Area, where inflation stood at 2.6% and 2.7%, respectively, in October 2024.

One of the main factors influencing the global economy is the continuously rising of geopolitical tensions. Conflicts in the Middle East and the Russia-Ukraine war have a significant impact on energy markets and global supply chains. Global oil prices have experienced sharp fluctuations, reaching an average of USD85 per barrel by the end of 2024, while the prices of Indonesia's main export commodities, such as coal and palm oil, are also under pressure. This affects the trade balance of developing countries, including Indonesia, which are highly dependent on commodity exports.



Sumber: Economic Policy Uncertainty
 Source: Economic Policy Uncertainty

Selain itu, dinamika kebijakan moneter di negara-negara utama turut menjadi faktor penentu dalam perekonomian global. *The Federal Reserve* mulai menurunkan suku bunga pada September 2024, mendorong negara-negara lain untuk mengambil langkah serupa. Bank Sentral Eropa (ECB) juga menurunkan suku bunga sebanyak tiga kali sepanjang tahun guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang masih lemah. Sebaliknya, Bank of Japan mengambil langkah sebaliknya dengan menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya sejak 2016, merespons tekanan nilai tukar yen yang terus melemah.

Ke depan, perekonomian global masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakpastian dalam perdagangan internasional, volatilitas harga energi, serta dampak dari kebijakan proteksionisme yang semakin meningkat di beberapa negara utama. Kemenangan Donald Trump dalam Pemilu AS 2024 menambah risiko meningkatnya tarif impor dan kebijakan "*America First*" yang dapat menghambat perdagangan global. Tren fragmentasi ekonomi dan perdagangan global dapat mempengaruhi stabilitas jangka panjang, dengan negara-negara berkembang yang menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri terhadap dinamika baru ini.

Untuk menghadapi tantangan ini, bank sentral dan pemerintah di berbagai negara terus memperkuat koordinasi kebijakan guna menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan global. Langkah-langkah strategis mencakup kerja sama internasional dalam kebijakan moneter dan fiskal, akselerasi inovasi keuangan digital, serta peningkatan transparansi dan regulasi pasar keuangan untuk mengurangi risiko sistemik yang dapat berimbas lebih luas.

Additionally, the dynamics of monetary policy in major countries also play a determining role in the global economy. The Federal Reserve initiated interest rate cuts in September 2024, prompting other countries to take similar steps. The European Central Bank (ECB) implemented three rate cuts throughout the year in an effort to stimulate the sluggish economic growth. In contrast, the Bank of Japan took the opposite approach by raising interest rates for the first time since 2016, responding to sustained depreciation pressures on Yen.

Looking ahead, the global economy continues to face multiple challenges, including uncertainty in international trade, energy price volatility, and the growing impact of protectionist policies in several major economies. The victory of Donald Trump in the 2024 U.S. presidential election has heightened risks of increased import tariffs and the reinforcement of the "*America First*" agenda, which could hinder global trade. The trend of economic and trade fragmentation could affect long-term stability, particularly for developing countries that may struggle to adapt to these evolving dynamics.

To address these challenges, central banks and governments in various countries continue to strengthen policy coordination to maintain global economic and financial stability. Strategic measures include international cooperation in monetary and fiscal policies, the acceleration of financial digitalization, and enhanced transparency and financial market regulations to mitigate systemic risks with broader economic implications.

Dengan semakin kompleksnya lanskap ekonomi global, sinergi kebijakan antara negara-negara utama dan organisasi internasional menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi global. Ketidakpastian yang masih tinggi memerlukan respons yang cepat dan tepat, agar perekonomian dunia tetap resilien dan mampu menghadapi tantangan yang ada di masa depan.

Sumber:

1. Laporan Perkembangan Ekonomi, Keuangan dan Kerja Sama Internasional Edisi 2024, Bank Indonesia.
2. *World Economic Outlook* (WEO) October 2024, International Monetary Fund (IMF).

Analisis Perekonomian Nasional

Ketahanan Ekonomi Nasional di Tengah Ketidakpastian Global

Perekonomian nasional Indonesia pada tahun 2024 tetap menunjukkan ketahanan di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Dalam laporan terbaru Bank Indonesia (BI), pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga dengan proyeksi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada kisaran 5,0% - 5,2% meskipun terdapat berbagai tantangan eksternal, seperti perlambatan ekonomi global dan tekanan geopolitik yang meningkat. Indonesia mampu mempertahankan stabilitas ekonomi melalui kebijakan bauran yang mencakup kebijakan moneter, makroprudensial, dan fiskal yang sinergis. Dalam menghadapi tantangan global, ketahanan ekonomi domestik menjadi kunci utama dalam menjaga momentum pertumbuhan.

Dinamika perekonomian global turut memengaruhi kondisi ekonomi nasional. Pada 2024, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melambat menjadi 3,2%, turun dari 3,3% pada tahun sebelumnya. Amerika Serikat, Tiongkok, dan Eropa mengalami tekanan ekonomi yang cukup signifikan akibat fragmentasi perdagangan dan perubahan kebijakan fiskal yang lebih restriktif. Inflasi global yang masih relatif tinggi, mencapai 5,2%, turut memberikan dampak pada biaya impor dan daya beli masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan latar belakang ini, Indonesia terus melakukan langkah-langkah mitigasi untuk menjaga daya saing ekspor dan stabilitas nilai tukar rupiah.

Sektor konsumsi domestik tetap menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh stabil dengan rata-rata 4,9% sepanjang 2024, didukung oleh tingkat inflasi yang terkendali pada kisaran 3,0% - 3,5%. Konsumsi pemerintah juga memberikan kontribusi positif melalui peningkatan belanja infrastruktur dan bantuan sosial. Sektor investasi menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan sekitar 5,15%, terutama didorong oleh investasi di bidang manufaktur dan infrastruktur yang terus berkembang.

As the global economic landscape becomes increasingly complex, policy synergy among major economies and international organizations is crucial to maintaining stability and sustaining global economic growth. Persistently high uncertainty demands swift and effective responses to ensure that the global economy remains resilient and well-positioned to navigate future challenges.

Sources:

1. 2024 Economic, Financial, and International Cooperation Developments Report, Bank Indonesia.
2. *World Economic Outlook* (WEO), October 2024, International Monetary Fund (IMF).

National Economy Analysis

National Economic Resilience Amidst Global Uncertainty

Indonesia's national economy in 2024 has demonstrated resilience amid rising global uncertainty. According to the latest report from Bank Indonesia (BI), the country's economic growth remains stable, with GDP growth projected in the range of 5.0% – 5.2%, despite external challenges such as global economic slowdown and escalating geopolitical tensions. Indonesia has successfully maintained economic stability through a mix policy that includes synergistic monetary, macroprudential, and fiscal policies. In facing global challenges, domestic economic resilience is the key to maintain growth momentum.

Global economic dynamics also influencing the national economic conditions. In 2024, global economic growth is projected to slow down to 3.2%, decrease from 3.3% in the previous year. The United States, China, and Europe are experiencing significant economic pressures due to trade fragmentation and more restrictive fiscal policy changes. Persistently high global inflation, reaching 5.2%, has further impacted import costs and consumer purchasing power across various countries, including Indonesia. Against this backdrop, Indonesia continues to take mitigation measures to maintain export competitiveness and the stability of the Rupiah exchange rate.

The domestic consumption sector remains the primary driver of Indonesia's economic growth. Household consumption maintained stable growth at an average of 4.9% throughout 2024, supported by controlled inflation within the 3.0% – 3.5% range. Government spending also contributed positively through increased infrastructure investment and social assistance programs. Meanwhile, the investment sector showed recovery with growth of around 5.15%, primarily driven by ongoing developments in the manufacturing and infrastructure sectors.

Sektor perdagangan internasional menghadapi tantangan akibat melambatnya permintaan global. Ekspor Indonesia mengalami tekanan dengan pertumbuhan hanya sebesar 9,09% pada kuartal III 2024, seiring dengan penurunan harga komoditas utama seperti batu bara dan minyak kelapa sawit. Namun, impor juga mengalami peningkatan sebesar 11,47%, yang mencerminkan pemulihan permintaan domestik. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah terus mendorong diversifikasi ekspor dan memperkuat daya saing industri manufaktur melalui kebijakan insentif fiskal dan peningkatan kapasitas produksi.

Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Suku bunga acuan BI-7DRR tetap berada pada level yang mendukung pertumbuhan ekonomi, yaitu 5,75%, dengan tetap memperhatikan dinamika inflasi dan stabilitas nilai tukar. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga volatilitas nilai tukar rupiah, yang bergerak stabil di kisaran Rp15.200 - Rp15.500 per dolar AS. Keberlanjutan kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan investor dalam melakukan ekspansi bisnis.

Sektor keuangan tetap berada dalam kondisi yang sehat dengan tingkat pertumbuhan kredit yang mencapai 10,2% pada akhir 2024. Kredit perbankan terus meningkat, terutama untuk sektor produktif seperti industri manufaktur, pertanian, dan perdagangan. Likuiditas perbankan yang terjaga dengan baik mencerminkan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun mendatang. Di sisi lain, sektor pasar modal juga menunjukkan peningkatan, dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang bergerak stabil di kisaran 7.200 - 7.500 poin sepanjang tahun.

Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Upaya reformasi struktural dalam memperbaiki iklim investasi, digitalisasi ekonomi, serta penguatan sektor keuangan menjadi prioritas utama dalam meningkatkan daya saing nasional. Dengan berbagai kebijakan yang telah ditempuh, Indonesia diharapkan dapat menghadapi tantangan global dengan lebih baik dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sumber:

1. Sinergi Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Nasional 2024, Bank Indonesia.
2. Tinjauan Kebijakan Moneter 2024, Bank Indonesia.

The international trade sector faces challenges due to the slowdown of global demand. Indonesia's exports experienced pressure with growth of only 9.09% in the third quarter of 2024, in line with the decline in prices of key commodities such as coal and palm oil. However, imports also increased by 11.47%, reflecting the recovery of domestic demand. To address these challenges, the government continues to encourage export diversification and strengthen the competitiveness of the manufacturing industry through fiscal incentive policies and increased production capacity.

The monetary policy implemented by Bank Indonesia plays a crucial role in maintaining economic stability. The BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI-7DRR) remains at a growth-supportive level of 5.75%, while carefully considering inflation dynamics and exchange rate stability. Additionally, Bank Indonesia has intervened in the foreign exchange market to manage Rupiah volatility, keeping it stable within the range of Rp15,200 – Rp15,500 per US Dollar. The continuation of these policies is expected to provide certainty for businesses and investors, facilitating further business expansion.

The financial sector remains in a healthy condition, with credit growth reaching 10.2% by the end of 2024. Banking credit continues to increase, particularly in productive sectors such as manufacturing, agriculture, and trade. Well-maintained banking liquidity reflects optimism towards economic growth in the coming years. Meanwhile, the capital market sector has also shown positive performance, with the Jakarta Composite Index (IHSG) remaining stable within the range of 7,200 – 7,500 poin throughout the year.

The government and Bank Indonesia continue to strengthen policy synergy to ensure stability and sustainable economic growth. Structural reform efforts in improving the investment climate, economic digitization, and strengthening the financial sector are the main priorities in increasing national competitiveness. With these policies in place, Indonesia is expected to navigate global challenges more effectively while maintaining sustainable economic growth.

Sources:

1. Strengthening Stability and National Economic Transformation 2024, Bank Indonesia.
2. Monetary Policy Review 2024, Bank Indonesia.

Analisis Industri dan Posisi LPEI dalam Industri

Perkembangan Ekonomi Global

Sepanjang tahun 2024, perekonomian global diwarnai ketidakpastian yang tetap tinggi. Perubahan dinamika geopolitik berlangsung dengan cepat. Setelah sempat mereda, perang di Ukraina yang dimulai sejak tahun 2022 terus berkecamuk. Di Kawasan Timur Tengah, serangan Israel ke Palestina telah meluas ke negara – negara sekitar seperti Lebanon hingga Iran. Sedangkan di Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang dikenal dengan kebijakan *America First* kembali terpilih sebagai Presiden AS untuk masa jabatan kedua (2025 – 2029).

Perkembangan tersebut berdampak pada pertumbuhan ekonomi global melalui divergensi pola pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut. Di kelompok negara maju, ekonomi AS masih tumbuh relatif kuat sebesar 2,8% yoy, meski melambat dari tahun 2023 yang tumbuh sebesar 2,9% yoy, didukung (a) aktivitas konsumsi yang solid seiring kenaikan upah riil dan (b) aktivitas investasi nonresidensial yang lebih tinggi. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi Uni Eropa cenderung mengalami stagnasi seiring melemahnya permintaan domestik. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Jerman melanjutkan kontraksi tipis. Di kelompok negara *emerging*, pertumbuhan ekonomi Tiongkok melambat dipicu sektor *real estate* yang terus mengalami pelemahan dan *consumer confidence* yang rendah. Sedangkan di India, melambatnya pertumbuhan ekonomi disebabkan mudarnya *pent – up demand* yang terakumulasi selama pandemi.

Sementara itu, tekanan inflasi di AS telah mereda secara bertahap dan mengarah ke target *Federal Reserve (Fed)* di kisaran sasaran 2,0%. Hal ini mendorong Fed memotong suku bunga acuannya sebanyak tiga (3) kali yaitu bulan September, November, dan Desember dengan total 100 bps. Sehingga, *Fed Funds Rate/FFR* turun dari 5,25% - 5,50% menjadi 4,25% - 4,50% pada akhir tahun 2024.

Mulanya, imbal hasil (*yield*) *US Treasury* (UST) diproyeksikan turun seiring dengan pemangkasan FFR. Pasca Pemilu AS, *yield* untuk tenor jangka pendek dan menengah – panjang justru cenderung naik. Pemilu AS menghasilkan *red sweep*, artinya baik Presiden, *House*, dan *Senate* diduduki oleh *Republican*. Sehingga, kebijakan Presiden Trump yang memiliki preferensi kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan perdagangan yang cenderung *inward looking* dan *inflationary* lebih mudah untuk diterapkan.

Industry Analysis and Indonesia Eximbank's Position Within the Industry

Global Economic Developments

Throughout 2024, the global economy has been marked by persistent high uncertainty. Geopolitical dynamics are shifting rapidly. After a brief period of calm, the war in Ukraine that began in 2022 continues to rage on. In the Middle East, Israel's attacks on Palestine have spread to neighboring countries such as Lebanon and Iran. Meanwhile, in the United States (US), Donald Trump, known for his "America First" policies, has been re-elected as US President for a second term (2025–2029).

These developments have impacted global economic growth through diverging growth patterns. Among developed countries, the US economy remains relatively strong with a 2.8% year-on-year (yoy) growth, slightly slowing from 2.9% yoy in 2023. This was supported by (a) solid consumer spending in line with real wage increases and (b) higher non-residential investment activity. In contrast, economic growth in the European Union has tended toward stagnation due to weakening domestic demand. Germany's economy, in particular, continued to experience slight contraction. Among emerging markets, China's economic growth slowed due to continued weakness in the real estate sector and low consumer confidence. In India, the slowdown was attributed to the fading of pent-up demand accumulated during the pandemic.

Meanwhile, inflationary pressures in the US have gradually eased, approaching the 2.0% target of the Federal Reserve (Fed). This encouraged the Fed to cut its benchmark interest rate three (3) times—in September, November, and December—with a total reduction of 100 basis points (bps), bringing the Fed Funds Rate (FFR) down from 5.25%–5.50% to 4.25%–4.50% by the end of 2024.

Initially, US Treasury (UST) yields were projected to fall in line with FFR cuts. However, following the US presidential election, yields on short- and medium-to-long-term tenors instead trended upward. The election resulted in a red sweep" with the Presidency, House, and Senate all controlled by Republicans. As a result, President Trump's policies, which is favoring fiscal expansion and protectionist trade measures, are now easier to implement, reflecting an inward-looking and inflationary approach.

Yield untuk UST dengan tenor pendek yang lebih sensitif terhadap kebijakan moneter tercatat meningkat di tengah prospek FFR untuk tahun 2025 yang berpotensi bertahan di level tinggi (*high for longer*). Sedangkan, *yield* untuk UST dengan tenor menengah - panjang yang lebih sensitif terhadap ekspektasi inflasi dan makroekonomi juga mengalami kenaikan, karena pelaku pasar sudah *pricing in* untuk tingkat inflasi yang lebih tinggi dan potensi pelebaran defisit fiskal di bawah Pemerintahan Presiden Trump.

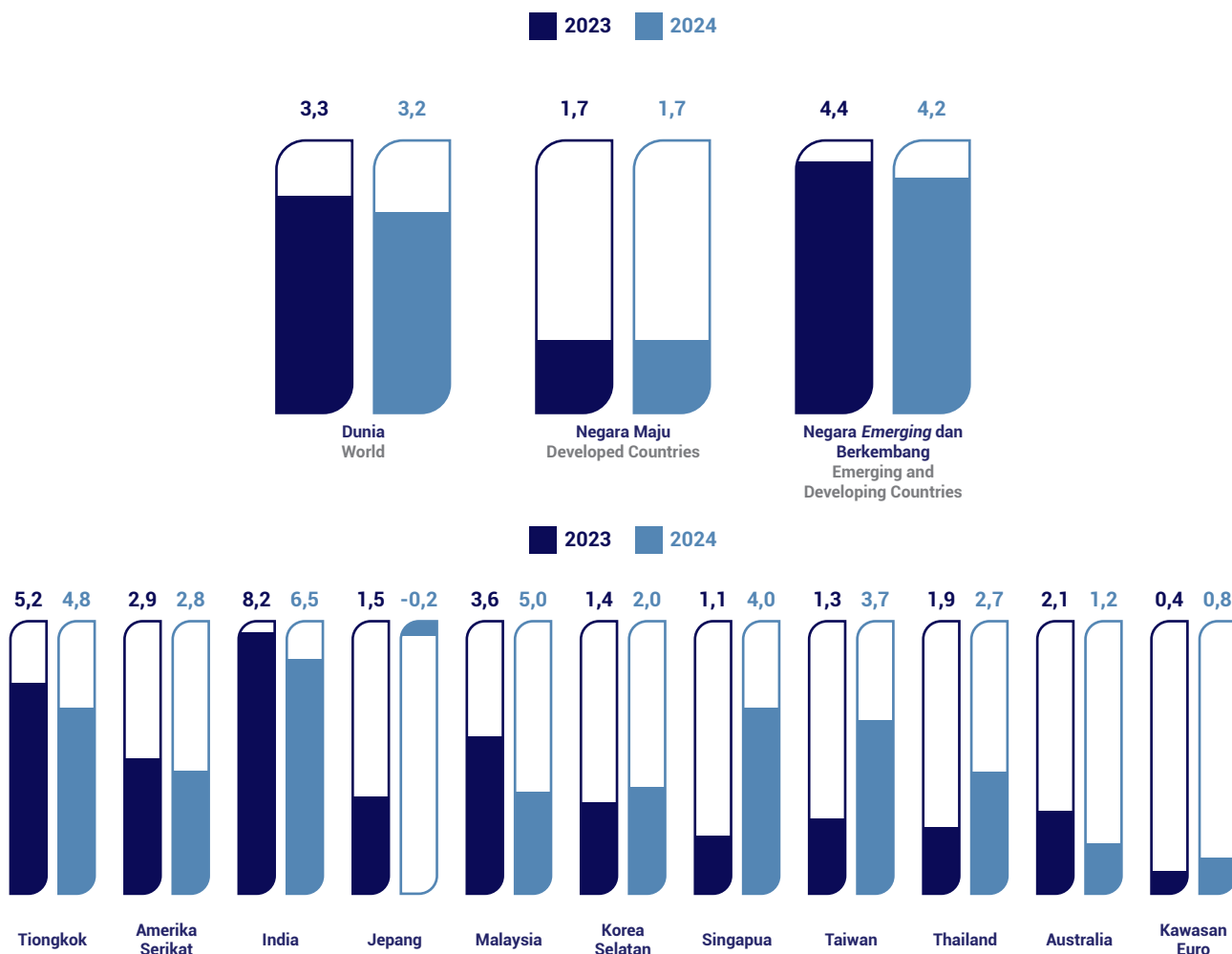
Akibatnya, terjadi pembalikan aliran portfolio asing yang besar dari pasar *emerging markets* ke AS seiring dengan tingginya *yield* UST, diikuti penguatan Dolar AS. Sehingga, *outflow* tersebut menyebabkan pelemahan nilai tukar secara luas, termasuk nilai tukar Rupiah.

Yields on short-term USTs, which are more sensitive to monetary policy, rose amid prospects that the FFR would remain high into 2025 ("high for longer"). Similarly, yields on medium-to-long-term USTs, which are more influenced by inflation and macroeconomic expectations, also increased as markets began to price in higher inflation and a potential widening fiscal deficit under President Trump's administration.

As a result, there has been a significant reversal of foreign portfolio flows from emerging markets back to the US, driven by the higher UST yields and a strengthening US dollar. This outflow has led to a broad depreciation of exchange rates, including the Indonesian Rupiah.

Pertumbuhan Ekonomi Dunia dan Negara – Negara Mitra Dagang Utama Indonesia

Global Economic Growth and Key Trading Partner Countries of Indonesia



Sumber: World Economic Outlook, IMF, Januari 2025
Source: World Economic Prospects, IMF, January 2025

Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, IMF mengestimasi ekonomi dunia tahun 2024 tumbuh 3,2% yoy, melambat dari tahun sebelumnya (2023: 3,3% yoy). Di sisi perdagangan internasional, pertumbuhan volume perdagangan tahun 2024 diestimasi meningkat menjadi 3,4% yoy dibandingkan tahun sebelumnya (2023: 0,7% yoy). Namun, masih lebih rendah dari rata – rata tahunan secara historis (2000 – 2019) yang sebesar 4,9%. Hal ini dipicu potensi meningkatnya ketidakpastian kebijakan perdagangan global seiring dimulainya perang dagang antara AS dan mitra dagang terutama yang memiliki surplus neraca perdagangan besar dengan AS, sehingga diprediksi akan merugikan perusahaan – perusahaan yang memiliki eksposur besar terhadap *trade – intensive business*. Untuk tahun 2025, pertumbuhan volume perdagangan barang dan jasa global akan lebih dipengaruhi faktor *front – loading* (kecenderungan untuk membeli barang – barang dalam jumlah besar lebih awal) sebagai antisipasi pembatasan perdagangan yang lebih ketat di masa depan.

Perkembangan Ekonomi Nasional

Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah bayang – bayang dampak rambatan global. Mengawali tahun 2024, aktivitas ekonomi tumbuh 5,11% yoy pada Triwulan I, kemudian melambat selama dua (2) kuartal beruntun pada Triwulan II (5,05% yoy) dan Triwulan III (4,95%), selanjutnya meningkat sebesar 5,02% yoy pada Triwulan IV tahun 2024. Secara *full year* (2024), aktivitas ekonomi Indonesia tumbuh 5,03% yoy terutama didorong oleh permintaan domestik dan investasi yang tetap baik, khususnya investasi bangunan seiring penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dari sisi eksternal, nilai ekspor Indonesia tahun 2024 mencapai USD264,70 miliar atau meningkat sebesar 2,29% ctc dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya (2023: USD258,77 miliar). Perkembangan tersebut didorong pertumbuhan ekspor nonmigas yang relatif tinggi seiring meningkatnya *demand* dari mitra dagang terbesar antara lain AS (+13,26% yoy), India (+0,22% yoy), Uni Eropa (+4,37% yoy), Korea Selatan (+5,89% yoy), serta Thailand (+2,24% yoy), diikuti naiknya penjualan produk ekspor utama seperti Mesin dan Perlengkapan Elektrik (+4,96% yoy), Logam Mulia dan Perhiasan/Permata (+18,30% yoy), Nikel dan Barang Daripadanya (+17,32% yoy), Alas Kaki (+10,07% yoy), Mesin dan Peralatan Mekanis (+7,50% yoy), dan Berbagai Produk Kimia (+4,23% yoy).

Considering these dynamics, the IMF estimated that the global economic growth of 3.2% year-on-year (yoy) in 2024, a slight slowdown from the previous year (2023: 3.3% yoy). In terms of international trade, global trade volume in 2024 is projected to increase by 3.4% yoy compared to the previous year (2023: 0.7% yoy). However, this is still below the historical annual average (2000–2019) of 4.9%. This is driven by the potential rise in uncertainty surrounding global trade policy as a new trade war between the US and major trading partners, especially those with large trade surpluses with the US, begins. This is expected to harm companies with significant exposure to trade-intensive businesses. For 2025, global trade in goods and services will be more heavily influenced by front-loading behavior (the tendency to purchase large quantities of goods earlier than usual) in anticipation of tighter future trade restrictions.

National Economic Developments

Domestically, Indonesia's economic growth remained strong despite global spillover risks. At the beginning of 2024, economic activity grew by 5.11% yoy in Q1, then slowed for two consecutive quarters in Q2 (5.05% yoy) and Q3 (4.95% yoy), before slightly increasing to 5.02% yoy in Q4 2024. For the full year 2024, Indonesia's economic activity grew by 5.03% yoy, primarily driven by strong domestic demand and sustained investment, especially in construction, in line with the completion of various National Strategic Projects (PSN).

From an external perspective, Indonesia's export value in 2024 reached USD 264.70 billion, an increase of 2.29% compared to the same period the previous year (2023: USD 258.77 billion). This growth was supported by relatively high non-oil and gas export growth, in line with rising demand from major trading partners including: United States (+13.26% yoy), India (+0.22% yoy), European Union (+4.37% yoy), South Korea (+5.89% yoy), and Thailand (+2.24% yoy). This was followed by increased sales of major export products such as Electrical machinery and equipment (+4.96% yoy), Precious metals and jewelry (+18.30% yoy), Nickel and its derivatives (+17.32% yoy), Footwear (+10.07% yoy), Mechanical machinery and equipment (+7.50% yoy), and Various chemical products (+4.23% yoy).

Perkembangan Ekspor Indonesia Tahun 2024

Indonesia Export Developments in 2024

Migas dan Nonmigas
Oil and Gas and Non-Oil and Gas

Keterangan Description	Nilai Ekspor (Juta USD) Export Value (Million USD)					Perubahan (%) Change (%)			Peran terhadap total nilai Ekspor Role towards Total Value Export
	Dec-23	Nov-24	Dec-24	Jan-Dec 2023	Jan-Dec 2024	Dec-24	Dec-24	Jan-Dec 2024	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	%mtm (f)=(c-b) (b)	%yoy (g)=(c-a)/ (a)	%ctc (h)=(e-d)/(d)	
Total Nilai Ekspor Total Export Value	22,391.3	23,998.2	23,461.10	258,774.4	264,703.1	-2,24%	4.78%	2.29%	100.00%
Migas Oil and gas	1,479.0	1,314.4	1,539.4	15,921.9	15,876.6	17.12%	4.09%	-0.28%	6.00%
Nonmigas Non-oil and gas	20,912.3	22,683.8	21,921.6	242,852.5	248,826.2	-3.36%	4.83%	2.46%	94.00%
Berdasarkan Sektor Non Migas Based on Non-Oil and Gas Sector									
Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Peternakan Agriculture, Fisheries, Forestry Farm	355.1	581.4	579.6	4,400.7	5,712.5	-0.31%	63.21%	29.81%	2.16%
Industri Pengolahan Processing Industry	15,691.7	18,259.8	17,612.3	186,596.4	196,545.8	-3.55%	12.24%	5.33%	74.25%
Pertambangan dan lainnya Mining and Other	4,865.5	3,842.6	3,729.7	51,855.4	51,855.4	-2.94%	-23.34%	-10.20%	17.59%

Nonmigas: Berdasarkan Produk HS Code 2 Digit

Non-oil and gas: Based on 2-digit HS Code Products

Keterangan Description	Nilai Ekspor (Juta USD) Export Value (Million USD)					Perubahan (%) Change (%)			Peran terhadap total nilai ekspor Jan-Dec Role of in total value of exports Jan-Dec
						Dec-24	Dec-24	Jan-Dec 2024	
	Dec-23	Nov-24	Dec-24	Jan-Dec 2023	Jan-Dec 2024	%yoy	%mtm	%ctc	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(c-a)/ (a)	(g)=(c-b)/ (b)	(h)=(e-d)/ (d)	
1. Bahan bakar mineral (27) Mineral fuels (27)	3,872.1	3,540.9	3,577.1	43,572.0	39,652.5	-7.62	1.02	-9.00	15.94
2. Lemak dan minyak hewani/nabati (15) Animal/vegetable fats and oils (15)	2,007.7	2,715.2	2,638.1	28,451.8	26,822.0	31.40	-2.84	-5.73	10.78
3. Besi dan baja (72) Iron and steel (72)	2,284.0	2,398.6	2,371.2	26,704.6	25,802.5	3.82	-1.14	-3.38	10.37
4. Mesin/perlengkapan elektrik serta bagiannya (85) Electrical machines/ equipment and parts (85)	1,085.1	1,340.5	1,325.0	14,343.5	15,054.4	22.11	-1.15	4.96	6.05

Nonmigas: Berdasarkan Produk HS Code 2 Digit

Non-oil and gas: Based on 2-digit HS Code Products

Keterangan Description	Nilai Ekspor (Juta USD) Export Value (Million USD)					Perubahan (%) Change (%)			Peran terhadap total nilai ekspor Jan-Dec Role of in total value of exports Jan-Dec
						Dec-24	Dec-24	Jan-Dec 2024	
	Dec-23	Nov-24	Dec-24	Jan-Dec 2023	Jan-Dec 2024	%yoy	%mtm	%ctc	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(c-a)/ (a)	(g)=(c-b)/ (b)	(h)=(e-d)/ (d)	(i)
5. Kendaraan dan bagiannya (87) Vehicles and parts (87)	829.3	919.9	921.7	11,152.7	11,010.7	11.14	0.20	-1.27	4.43
6. Logam mulia dan perhiasan/permata (71) Precious metals and jewelry/gems (71)	873.7	640.8	682.7	7,505.5	8,878.8	-21.86	6.54	18.30	3.57
7. Nikel dan barang daripadanya (75) Nickel and goods thereof (75)	521.8	1,003.4	797.9	6,815.6	7,996.2	52.91	-20.48	17.32	3.21
8. Alas kaki (64) Footwear (64)	519.4	691.7	627.8	6,436.4	7,084.5	20.87	-9.24	10.07	2.85
9. Mesin/peralatan mekanis serta bagiannya (84) Mechanical machinery/equipment and parts (84)	639.9	781.3	575.2	6,458.2	6,942.7	-10.10	-26.38	7.50	2.79
10. Berbagai produk kimia (38) Various chemical products (38)	500.7	646.1	684.7	6,252.7	6,517.4	36.75	5.97	4.23	2.62
Total 10 Golongan Barang Total 10 Classes Goods	13,133.7	14,678.4	14,201.4	157,693.0	155,761.7	8.13	-3.25	-1.22	62.61
Lainnya Others	7,778.6	8,005.4	7,720.2	85,159.5	93,064.5	-0.75	-3.56	9.28	37.39
Total Ekspor Nonmigas Total Non-oil and gas exports	20,912.3	22,683.8	21,921.6	242,852.5	248,826.2	4.83	-3.36	2.46	100.00

Nonmigas: Berdasarkan Negara

Non-oil and gas: Based on country

Keterangan Description	Nilai Ekspor (Juta USD) Export Value (Million USD)					Perubahan (%) Change (%)			Peran terhadap total nilai The role of total score
						Dec-24	Dec-24	Jan-Dec 2024	
	Dec-23	Nov-24	Dec-24	Jan-Dec2023	Jan-Dec 2024	%yoy	%mtm	%ctc	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(c-a)/ (a)	(g)=(c-b)/ (b)	(h)=(e-d)/ (d)	(i)
1. Tiongkok	5,764.8	6,241.5	5,787.5	62,329.5	60,220.8	0.39	-7.27	-3.38	24.20
2. Amerika Serikat	2,064.5	2,342.9	2,460.0	23,230.3	26,311.7	19.16	5.00	13.26	10.57
3. India	1,831.3	1,580.5	1,416.1	20,280.1	20,324.1	-22.67	-10.40	0.22	8.17
4. Jepang	1,608.5	1,483.4	1,445.2	18,884.4	18,579.1	-10.15	-2.58	-1.62	7.47

Nonmigas: Berdasarkan Negara

Non-oil and gas: Based on country

Keterangan Description	Nilai Ekspor (Juta USD) Export Value (Million USD)					Perubahan (%) Change (%)			Peran terhadap total nilai The role of total score
						Dec-24	Dec-24	Jan-Dec 2024	
	Dec-23	Nov-24	Dec-24	Jan-Dec2023	Jan-Dec 2024	%yoy	%mtm	%ctc	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(c-a)/ (a)	(g)=(c-b)/ (b)	(h)=(e-d)/ (d)	
5. Uni Eropa	1,297.5	1,370.9	1,354.5	16,470.1	17,189.5	4.39	-1.20	4.37	6.91
6. Malaysia	758.5	892.1	949.1	10,296.9	10,277.3	25.13	6.38	-0.19	4.13
7. Korea Selatan	866.7	655.1	784.3	8,601.0	9,107.2	-9.51	19.71	5.89	3.66
8. Singapura	645.7	649.7	719.7	8,347.7	7,508.2	11.47	10.77	-10.06	3.02
9. Taiwan	478.2	503.5	457.2	6,406.2	6,129.9	-4.39	-9.20	-4.31	2.46
10. Thailand	376.1	498.4	589.6	5,602.8	5,728.2	56.77	18.30	2.24	2.30
Total 10 Negara Tujuan Total 10 Destination Countries	15,691.8	16,218.0	15,963.2	180,449.0	181,376.0	-1.57	1.73	0.51	72.89
Lainnya Others	5,220.5	6,465.8	5,958.4	62,403.5	67,450.2	-7.85	14.13	8.09	27.11
Total Ekspor Nonmigas Total Non-oil and gas exports	20,912.3	22,683.8	21,921.6	242,852.5	248,826.2	-3.36	4.83	2.46	100.00

Sumber: Berita Resmi Statistik (BRS) Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Desember 2024, Badan Pusat Statistik (BPS), diolah
 Source: Official Statistics News (BRS) Development of Indonesian Exports and Imports December 2024, Central Statistics Agency (BPS), processed

Peningkatan nilai ekspor nonmigas juga didukung oleh faktor harga. Pada kelompok komoditas logam, rata – rata harga emas melanjutkan tren penguatan selama lima (5) tahun terakhir. Rata – rata harga emas tahun 2024 tercatat USD 2.390/t oz, naik 22,87% yoy, dipengaruhi faktor ketidakpastian global yaitu (a) konflik geopolitik, (b) perlambatan ekonomi global, dan (c) tahun politik 2024, di mana banyak negara memiliki Pemerintahan yang baru pasca Pemilu, sehingga berpotensi memiliki preferensi kebijakan fiskal dan kebijakan perdagangan yang berbeda dari Pemerintahan sebelumnya. Sejumlah ketidakpastian tersebut telah meningkatkan permintaan terhadap aset *safe haven*. Selain itu, lonjakan harga emas juga disebabkan permintaan emas yang signifikan oleh Bank Sentral pasca pembekuan aset Bank Sentral Rusia sebagai respon atas invasi Rusia ke Ukraina.

Pada kelompok komoditas pertanian, rata – rata harga minyak sawit, karet, dan kopi mulai mengalami *rebound* hingga *double - digit*. Kenaikan harga minyak sawit didorong terbatasnya pasokan dan level permintaan yang baik, terutama dari Tiongkok dan India. Sedangkan, kenaikan harga karet dan kopi terjadi karena penurunan produksi akibat gangguan cuaca ekstrem. Sementara itu, rata – rata harga biji kakao mengalami peningkatan hingga *triple - digit* seiring turunnya produksi dari produsen utama dunia yaitu Pantai Gading dan Ghana.

The increase in non-oil and gas export value was also supported by price factors. In the metals commodity group, the average gold price continued its upward trend for the past five (5) years. The average gold price in 2024 reached USD 2,390/t oz, an increase of 22.87% yoy, driven by global uncertainty factors including: (a) geopolitical conflict, (b) global economic slowdown, and (c) the political year of 2024, with many countries having new governments post-election, potentially bringing fiscal and trade policy preferences different from previous administrations. These uncertainties have increased demand for safe haven assets. Additionally, the spike in gold prices was also due to significant central bank demand following the freezing of the Russian Central Bank's assets in response to Russia's invasion of Ukraine.

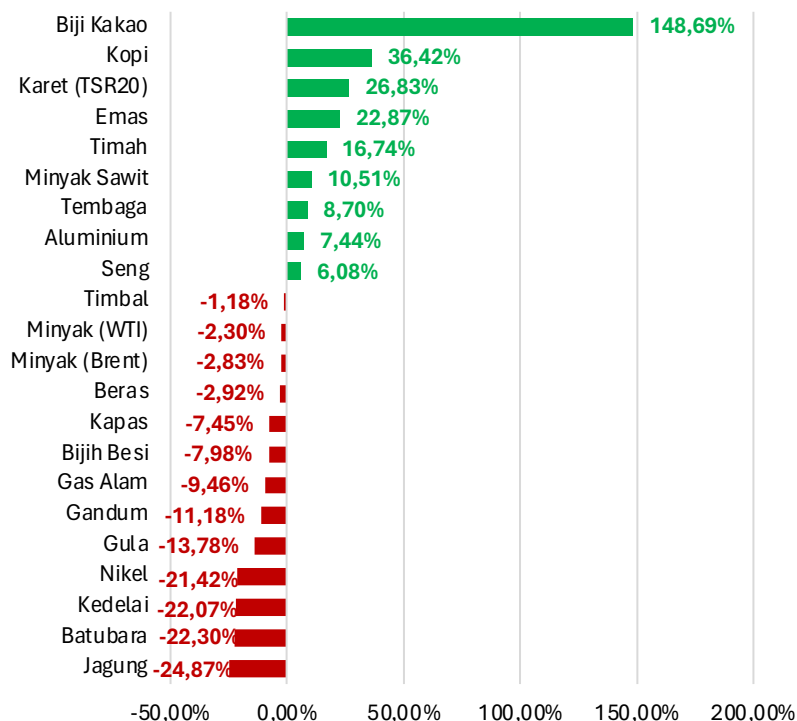
In the agricultural commodities group, average prices of palm oil, rubber, and coffee began to rebound with double-digit growth. The rise in palm oil prices was driven by limited supply and strong demand, especially from China and India. Meanwhile, rubber and coffee prices rose due to declining production caused by extreme weather disruptions. The average price of cocoa beans saw triple-digit growth, following a drop in production by the world's main producers, namely Ivory Coast and Ghana.

Untuk kelompok komoditas energi, rata-rata harga berada dalam tren yang menurun. Batubara menjadi komoditas yang mengalami kontraksi harga paling tajam dengan penurunan mencapai *double – digit* yaitu 22,30% yoy, disebabkan berlimpahnya pasokan. Konflik geopolitik yang masih berlangsung nampaknya juga belum memberikan dampak langsung terhadap kenaikan harga minyak dan gas alam dunia. Harga minyak jenis *Brent* dan *West Texas Intermediate* (WTI) terkoreksi sebesar -2,83% yoy dan -2,30% yoy seiring melemahnya permintaan global. Sementara itu, harga gas alam turun 9,46% yoy, dipicu turunnya konsumsi dan pasokan gas alam yang relatif stabil.

In the energy commodities group, average prices showed a declining trend. Coal experienced the steepest price contraction with a double-digit drop of 22.30% yoy due to abundant supply. The ongoing geopolitical conflicts have yet to directly impact global oil and gas prices. Brent and West Texas Intermediate (WTI) oil prices fell by -2.83% yoy and -2.30% yoy respectively, due to weakening global demand. Meanwhile, natural gas prices dropped by 9.46% yoy, triggered by lower consumption and relatively stable supply.

Perkembangan Harga Komoditas Tahun 2024

Total Non-oil and gas exports



Sumber: Bloomberg, World Bank, diolah
Source: Bloomberg, World Bank, processed

Di pasar keuangan domestik, Bank Indonesia (BI) telah menyesuaikan kebijakan moneter untuk merespon volatilitas yang terjadi di pasar keuangan global. BI sempat menaikkan BI Rate sebesar 25 bps dari 6,00% menjadi 6,25% pada Rapat Dewan Gubernur/RDG April 2024, seiring dengan dinamika pasar keuangan global, terutama dipengaruhi sinyal Fed. Saat itu, *Fed Officials* memberikan sinyal akan menunda penurunan FFR dari rencana awal, sehingga mendorong penguatan Dolar AS terhadap mata uang lainnya, termasuk Rupiah.

In the domestic financial market, Bank Indonesia (BI) has adjusted its monetary policy to respond to the volatility in global financial markets. BI raised the BI Rate by 25 bps from 6.00% to 6.25% in the April 2024 Board of Governors Meeting (RDG), driven by global market dynamics, particularly signals from the Federal Reserve. At the time, Fed officials indicated a delay in the planned rate cuts, which led to the strengthening of the US Dollar against other currencies, including the Rupiah.

Selanjutnya, BI kembali menurunkan *BI Rate* sebesar 25 bps dari 6,25% menjadi 6,00% pada RDG September 2024 dan menahannya di level yang sama hingga akhir tahun 2024. Fokus kebijakan moneter di sisa tahun 2024 ditujukan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak makin tingginya ketidakpastian perekonomian global akibat arah kebijakan AS dan eskalasi ketegangan geopolitik di berbagai wilayah.

Perkembangan Industri

Kinerja sektor perbankan di Indonesia tetap resilien dan stabil, tercermin dari tingkat profitabilitas *Return on Asset* (ROA) pada Desember 2024 sebesar 2,69%. Sedangkan dari sisi permodalan relatif tinggi, tercermin dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) di level 26,69%. Rasio – rasio tersebut menunjukkan bahwa bantalan mitigasi risiko tetap kuat di tengah dinamika ekonomi dunia yang berubah dengan cepat. Sementara itu, kinerja intermediasi perbankan tetap baik, tercermin dari penyaluran kredit/pembiayaan perbankan pada Desember 2024 yang tumbuh *double digit* mencapai 10,39% yoy, didukung pertumbuhan (a) Kredit Produktif sebesar 10,31% yoy, terdiri dari Kredit Modal Kerja (8,35% yoy) dan Kredit Investasi (13,62% yoy), serta (b) Kredit Konsumsi sebesar 10,61% yoy. Khusus untuk Kredit Ekspor, tercatat tumbuh 1,09% yoy.

Dari sisi penawaran, kinerja positif tersebut didorong penyaluran kredit dan likuiditas perbankan yang terjaga. Selain itu, BI juga memberikan insentif likuiditas melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang mencapai Rp251,32 triliun kepada sektor – sektor prioritas antara lain (a) Hilirisasi Minerba dan non-Minerba, (b) Otomotif, (c) Perdagangan, (d) Listrik, Gas, dan Air (LGA), (e) Jasa Sosial, (f) Perumahan, (g) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (h) Usaha Ultra Mikro, (i) Keuangan Inklusif dan Hijau.

Sedangkan dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit didorong terjaganya kinerja usaha pada segmen korporasi. Berdasarkan karakteristiknya, pertumbuhan kredit untuk sektor dengan karakteristik padat modal tercatat 14,13% yoy. Sedangkan, pertumbuhan kredit untuk sektor yang padat tenaga kerja tumbuh lebih rendah yaitu 7,90% yoy. Hal ini menunjukkan pemulihan ekonomi pasca Pandemi COVID-19 masih digerakkan oleh sektor padat modal.

Subsequently, BI lowered the *BI Rate* by 25 bps from 6.25% to 6.00% in the September 2024 RDG and maintained it at that level through the end of 2024. The focus of monetary policy for the remainder of 2024 was to strengthen the stability of the Rupiah exchange rate in response to heightened global economic uncertainty due to US policy direction and escalating geopolitical tensions in various regions.

Industry Developments

The banking sector in Indonesia remained resilient and stable, as reflected by the Return on Assets (ROA) of 2.69% as of December 2024. Meanwhile, the capital position remained relatively strong, indicated by a Capital Adequacy Ratio (CAR) of 26.69%. These ratios demonstrate that risk mitigation buffers remained solid amid rapidly changing global economic dynamics. Additionally, banking intermediation performance was strong, with credit/financing disbursement growing in double digits by 10.39% yoy in December 2024, supported by growth in productive credit (10.31% yoy), which includes working capital loans (8.35% yoy) and investment loans (13.62% yoy), and in consumption credit (10.61% yoy). Specifically, export credit recorded a growth of 1.09% yoy.

In terms of supply, this positive performance was driven by sustained credit disbursement and banking liquidity. BI also provided liquidity incentives through the Macroprudential Liquidity Incentive Policy (KLM), which amounted to IDR 251.32 trillion to priority sectors including mineral and non-mineral downstream industries, automotive, trade, electricity, gas, and water (LGA), social services, housing, tourism and creative economy, ultra-micro businesses, and inclusive and green finance.

In terms of demand, credit growth was driven by stable business performance in the corporate segment. Based on sectoral characteristics, credit growth for capital-intensive sectors was 14.13% yoy. Meanwhile, credit growth for labor-intensive sectors was lower at 7.90% yoy. This shows that post-COVID-19 economic recovery is still being driven by capital-intensive sectors.

Strategi dan Kebijakan Strategis 2024

Strategy and Strategic Policies In 2024

LPEI terus melakukan penguatan fondasi, dengan penguatan di berbagai aspek, untuk mencapai aspirasinya yaitu *"enabling export empowering nation"*, dimana LPEI sebagai Lembaga perpanjangan tangan Pemerintah yang unggul, mandiri serta kredibel, dengan memiliki kapasitas serta fundamental keuangan yang sehat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekspor nasional secara berkelanjutan melalui kolaborasi dengan ekosistem ekspor. Dalam mencapai aspirasinya, LPEI membagi tahapan transformasi menjadi tiga tahapan untuk memperkuat fondasi LPEI serta mempercepat pencapaian aspirasi *stakeholders* yang dilakukan antara lain:

1. *Fixing Fundamental* (2020-2023) "menyehatkan kondisi keuangan LPEI untuk menjadi *self sufficient*". Tahapan ini fokus untuk menyehatkan indikator keuangan LPEI seperti NPL, LAR, NIM dan sebagainya) serta perbaikan fundamental lainnya yang mendukung pelaksanaan mandat seperti HR, IT, GRC dan sebagainya.
2. *Rebalancing* (2024-2025) "Transisi menuju peran LPEI sebagai *National Export Backbone*". Pada tahapan ini kondisi keuangan LPEI mulai *self sufficient*, serta kinerja indikator-indikator *developmental impact* yang meningkat.
3. *Enabling Export, Empowering Nation* (2026 ke depan) "Menjadi pemain penting dalam ekosistem yang mendukung peningkatan ekspor Indonesia". Pada tahapan ini peran strategi sebagai penopang keberhasilan program ekspor nasional yang terefleksikan dari *developmental impact* yang signifikan dan mampu menjadi *top of mind* dari pihak di dalam ekosistem ekspor serta *financially self sufficient*.

Dalam melaksanakan tahapan *Rebalancing toward "Enabling Export Empowering Nation"*, LPEI telah menetapkan 9 (sembilan) prioritas utama Lembaga, seperti yang tergambar pada Gambar.

Indonesia Eximbank continues to strengthen its foundation through improvements in various aspects to achieve its aspiration of *"enabling export, empowering nation,"* in which Indonesia Eximbank acts as the government's extension arm that is excellent, independent, and credible, with strong financial capacity and fundamentals, thereby enables to support sustainable national export growth through collaboration with the export ecosystem. To achieve this aspiration, LPEI has divided its transformation journey into three phases to strengthen its foundation and accelerate the achievement of *stakeholders' aspirations*:

1. *Fixing Fundamental* (2020–2023): restoring Indonesia Eximbank's financial health to become self-sufficient. This phase focused on improving Indonesia Eximbank's financial indicators such as NPL, LAR, NIM, and other fundamentals supporting its mandate, such as HR, IT, GRC, etc.
2. *Rebalancing* (2024–2025): transitioning to Indonesia Eximbank's role as the National Export Backbone. In this phase, Indonesia Eximbank's financial condition becomes self-sufficient, and developmental impact indicators begin to improve.
3. *Enabling Export, Empowering Nation* (2026 onward): becoming a key player in the ecosystem supporting Indonesia's export growth. In this phase, Indonesia Eximbank's strategic role in supporting national export programs will be reflected through significant developmental impact and its position as a top-of-mind institution within the export ecosystem, while remaining financially self-sufficient.

In implementing the *Rebalancing stage towards "Enabling Export Empowering Nation"*, LPEI has set 9 (nine) main priorities of the Institution, as illustrated in the Figure.

Prioritas Utama Tahun 2024

Key Priorities for 2024



Sembilan prioritas utama Lembaga tahun 2024 di atas, diimplementasikan ke dalam inisiatif strategi Lembaga saat ini dan model bisnis ke depan sebagai berikut:

1. Pengembangan model bisnis baru melalui kolaborasi dengan ekosistem ekspor

Selain melakukan penguatan bisnis saat ini, LPEI juga memulai pengembangan model bisnis ke depan melalui kolaborasi dengan ekosistem ekspor. Strategi ini berfokus pada pengembangan *relationship* secara efektif dengan berbagai *economic actor ecosystem export* dengan menggunakan instrumen keuangan maupun non keuangan melalui berbagai jenis jaringan penyaluran.

Inisiasi *relationship* akan dibangun secara bertahap dengan melihat karakteristik dari *economic actor* dan perannya dalam mendukung ekosistem ekspor. Melalui ini diharapkan seluruh *economic actor* dapat terlibat dan terhubung sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekspor. Namun demikian LPEI juga terus memperkuat pengembangan bisnis saat ini dalam menjalankan mandatnya yang dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

The nine key priorities of the Corporate for 2024 above are implemented into the Corporate current strategic initiatives and future business models, describe as follows:

1. Development of new business models through collaboration with the Export ecosystem

In addition to strengthening the current business, Indonesia Eximbank is also starting to develop future business models through collaboration with the export ecosystem. This strategy focuses on developing effective relationships with various economic actors in the export ecosystem using financial and non-financial instruments through various types of distribution networks.

Initiation of relationships will be gradually built by considering the characteristics of economic actors and their roles in supporting the export ecosystem. Through this approach, all economic actors are expected to be involved and connected, thereby creating a greater impact on export growth. Nevertheless, Indonesia Eximbank continues to strengthen its current business development in carrying out its mandate more effectively and efficiently.

Pengembangan bisnis model baru ini masih terus dilakukan pendalaman, baik dalam proses pemetaan *economic actor*, instrumen yang tepat, serta *channel* yang dapat digunakan untuk menghubungkan seluruh *economic actor* dalam ekosistem ekspor.

Sampai dengan saat ini, terdapat 20 (dua puluh) *economic actor* yang memiliki peran masing-masing dalam mendukung ekosistem ekspor yang dapat diklasifikasikan ke dalam 7 (tujuh) kelompok, yaitu:

- a. Lembaga Keuangan, antara lain: Bank, ECA/Eximbank dan Non-Bank Financial Institution;
- b. Platform services, antara lain: Logistic provider dan market places & aggregator;
- c. Trade Organization, antara lain: National trade bodies dan international trade bodies;
- d. Pemerintah, antara lain: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Kedutaan;
- e. Overseas Buyers, antara lain: Korporasi, SME dan corporate value chain;
- f. Domestic Sellers, antara lain: Korporasi, SME dan corporate value chain;
- g. Institusi lainnya, antara lain: asosiasi/komunitas, training & professional organization, business builder dan media.

Seluruh *economic actor* tersebut akan terhubung dengan LPEI baik melalui instrumen keuangan dan non-keuangan melewati *channel physical, digital* ataupun *partnership*.

Penerapan bisnis model berbasis ekosistem ini diharapkan menjadi model bisnis baru LPEI ke depan yang dapat memperkuat bisnis model saat ini dalam menjalankan mandat baik itu dalam segmen korporasi, UKM dan UMBE serta mendorong peningkatan industri bernilai tambah.

2. Penguatan Teknologi dan Infrastruktur

Dalam memperkuat kapabilitas IT, LPEI melakukan modernisasi *core system* yang diikuti dengan integrasi *surrounding system*, pengembangan *digital channel*, dan persiapan teknologi untuk mendukung bisnis model berbasis ekosistem.

3. Penguatan Organisasi untuk mendukung bisnis model baru

Untuk menjalankan model bisnis baru berbasis ekosistem, LPEI memiliki 5 (lima) fokus yang akan dilakukan dalam rangka penguatan organisasi yaitu organization design, peningkatan kapabilitas SDM, peningkatan produktifitas, manajemen kinerja dan *reward*, serta budaya lembaga yang mendukung *high performance culture*. Melalui strategi di atas, diharapkan organisasi LPEI akan semakin kuat dan siap untuk mendukung bisnis model baru yang berbasis ekosistem ekspor.

The development of this new business model is still being refined, including the mapping of economic actors, identifying the appropriate instruments, and determining the channels that can be used to connect all economic actors within the export ecosystem.

Up to this moment, there are 20 (twenty) economic actors, each playing a distinct role in supporting the export ecosystem. These actors can be classified into 7 (seven) groups, namely:

- a. Financial Institutions, including banks, Export Credit Agencies (ECA)/Eximbank, and non-bank financial institutions.
- b. Platform Services, including logistics providers, marketplaces, and aggregators.
- c. Trade Organizations, including national and international trade bodies.
- d. Government, including central government, regional government, and embassies.
- e. Overseas Buyers, including corporations, SMEs, and corporate value chains.
- f. Domestic Sellers, including corporations, SMEs, and corporate value chains.
- g. Other Institutions, including associations/communities, training & professional organizations, business builders, and media.

All these economic actors will be connected with Indonesia Eximbank through both financial and non-financial instruments via physical, digital, or partnership channels.

The implementation of this ecosystem-based business model is expected to become Indonesia Eximbank's new business model in the future which can strengthen the current business model in carrying out its mandate in the corporate, SME and UMBE segments as well as encouraging the increase in value added industries.

2. Strengthening Technology and Infrastructure

In strengthening IT capabilities, LPEI modernized its core system followed by surrounding system integration, digital channel development, and technology preparation to support ecosystem-based business models.

3. Strengthening the Organization to support new business models

To run a new ecosystem-based business model, LPEI has 5 (five) focuses that will be carried out in the context of strengthening the organization, namely organization design, increasing HR capabilities, increasing productivity, performance management and rewards, and institutional culture that supports high performance culture. Through the above strategies, it is expected that the LPEI organization will be stronger and ready to support the new business model based on the export ecosystem.

4. Perbaikan Kualitas Aset

LPEI akan terus mengoptimalkan peran PT IEBPA yang dibentuk LPEI dalam mengelola portofolio aset yang kurang produktif (*badbank*). Perbaikan kualitas aset akan terus menjadi salah satu aspek penting utama dalam transformasi LPEI. Strategi perbaikan kualitas aset antara lain dengan percepatan *collection*, optimalisasi *recovery*, restrukturisasi, hapus buku, lelang dan upaya lainnya. Dengan usaha yang konsisten, diharapkan LPEI akan dapat meneruskan tren perbaikan kualitas aset ke depannya.

5. Efisiensi Biaya dan Pendanaan

LPEI akan terus menguatkan budaya efisiensi dalam seluruh aspek operasional, dengan menerapkan dan memperkuat budaya *smart spending*, maka LPEI akan menjadi lebih efisiensi secara biaya tanpa menghambat tujuan strategis yang ingin dicapai. Terkait dengan hal pendanaan, optimalisasi pendanaan dan likuiditas terus dipantau secara rutin melalui ALCO. Pendanaan LPEI ini saat ini akan fokus kepada pendanaan jangka pendek mengikuti dengan portofolio asetnya. Untuk menjaga kecukupan likuiditas, LPEI memiliki instrumen antara lain *treasury asset*, *funding line*, serta dukungan dari Pemerintah sehingga likuiditas dapat terjaga dengan baik.

6. Penguatan GRC

LPEI terus memperkuat aspek GRC dengan inisiatif antara lain penguatan manajemen risiko, respon terhadap risiko baru, *Risk maturity*, peningkatan indeks tata kelola dan kepatuhan. Dalam meningkatkan aspek GRC tersebut LPEI akan melakukan dengan berbagai *tools* seperti teknologi.

7. Komunikasi kepada *stakeholder*

Selama masa transformasi, aspek komunikasi menjadi salah satu aspek penting. LPEI akan terus melakukan komunikasi yang efektif dengan berbagai *stakeholder* terkait dengan kinerja dan transformasi yang dilakukan baik itu melalui media, bilateral, maupun kegiatan komunikasi lainnya.

Selain itu pada tahun 2024, LPEI akan meneruskan *branding campaign* dari tahun sebelumnya "lokal yang mendunia" yang berfokus pada profil mitra yang bertransformasi dari pelaku usaha lokal menjadi eksportir menjadi "berani mendunia" yang berfokus pada meningkatkan profil pelaku usaha dan mitra dengan mengangkat keberhasilan ekspor yang difasilitasi LPEI.

4. Improvement of Asset Quality

LPEI will continue to optimize the role of PT IEBPA established by LPEI in managing the portfolio of assets that are less productive (*badbank*). Asset quality improvement will continue to be one of the main important aspects in the transformation of LPEI. Strategies to improve asset quality include accelerating collection, optimizing recovery, restructuring, write-offs, auctions and other efforts. With consistent efforts, it is expected that LPEI will be able to continue the trend of improving asset quality in the future.

5. Cost and Funding

LPEI will continue to strengthen the culture of efficiency in all aspects of operations, by implementing and strengthening the culture of smart spending, LPEI will become more cost efficient without hampering the strategic objectives to be achieved. In terms of funding, funding optimization and liquidity continue to be monitored regularly through ALCO. LPEI's funding will currently focus on short-term funding following its asset portfolio. To maintain adequate liquidity, LPEI has instruments such as treasury assets, funding lines, and support from the Government so that liquidity can be well maintained.

6. Strengthened GRC

LPEI continues to strengthen GRC aspects with initiatives including strengthening risk management, response to new risks, risk maturity, improving governance and compliance index. In improving the GRC aspect, LPEI will do it with various tools such as technology.

7. Communication to stakeholders

During the transformation period, the communication aspect becomes one of the important aspects. LPEI will continue to communicate effectively with various stakeholders related to the performance and transformation carried out both through media, bilateral, and other communication activities.

In addition, in 2024, LPEI will continue the branding campaign from the previous year "local that goes global" which focuses on the profile of partners who transform from local business actors to exporters to "berani mendunia" which focuses on raising the profile of business actors and partners by lifting the export success facilitated by LPEI.

Tinjauan Kinerja per Segmen Usaha

Performance Overview Per Business Segment

Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing ekspor Indonesia, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mengoperasikan tujuh segmen usaha yang saling terintegrasi. Masing-masing segmen berikut ini berperan penting dalam memberikan solusi pembiayaan yang komprehensif, serta layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha, terutama dalam menghadapi tantangan di pasar global. Dengan pendekatan yang strategis dan inovatif, LPEI berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam mendorong ekspor dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.

To support national economic growth and enhance Indonesia's export competitiveness, Indonesia Eximbank operates seven integrated business segments. Each of these segments plays a crucial role in providing comprehensive financing solutions and services tailored to meet the needs of businesses, particularly in navigating global market challenges. Through a strategic and innovative approach, Indonesia Eximbank remains committed to driving exports and strengthening Indonesia's position on the international stage.



Tinjauan Operasional

Segmen Pembiayaan

LPEI berkomitmen untuk mendukung para eksportir nasional dalam memenuhi kebutuhan pendanaan yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk mereka di pasar internasional melalui program Pembiayaan. Dalam menjalankan mandat ini, lembaga ini menyalurkan pembiayaan kepada segmen korporasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), serta penerima manfaat yang berbasis syariah.

Untuk meningkatkan kualitas pembiayaannya, LPEI menerapkan berbagai strategi yang tepat sasaran sesuai dengan segmentasi penerima manfaat. Dengan mengikuti mandat yang diberikan, LPEI melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan yang inovatif dan dapat menjangkau seluruh segmen nasabah guna mendukung kegiatan ekspor nasional. LPEI menyediakan fasilitas pembiayaan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah kepada korporasi dan UKM.

Operational Overview

Financing Segment

Indonesia Eximbank is committed to assisting national exporters in meeting their funding needs to enhance the competitiveness of their products in international markets through Financing program. In fulfilling this mandate, the institution provides financing to corporate, Small and Medium Enterprises (SMEs), and Sharia-based beneficiaries.

To improve the quality of its financing, Indonesia Eximbank implements various targeted strategies according to beneficiary segmentation. In accordance with the mandate given, Indonesia Eximbank carries out innovative financing business activities and can reach all customer segments to support national export activities. Indonesia Eximbank provides conventional and sharia-based financing facilities to corporations and SMEs.

Dalam praktiknya, LPEI memberikan fasilitas pembiayaan ekspor dalam bentuk Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE), Kredit Investasi Ekspor (KIE), dan Trade Finance untuk segmen usaha Korporasi serta Usaha Kecil dan Menengah berorientasi Ekspor (UKME). Fasilitas ini mencakup baik badan hukum maupun perorangan yang terlibat dalam kegiatan ekspor atau kegiatan penunjang ekspor, baik yang berlokasi di dalam maupun di luar negeri.

Dengan memberikan akses pembiayaan yang setara dan luas kepada pelaku usaha yang berorientasi ekspor, LPEI berkontribusi langsung dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk peningkatan ekspor nasional. Lembaga ini juga berperan dalam mempercepat pertumbuhan ekspor, meningkatkan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi, serta mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan koperasi untuk menghasilkan produk yang siap ekspor.

Melalui kegiatan usaha pembiayaan yang dijalankan, LPEI berkomitmen untuk terus membantu para eksportir nasional dalam memenuhi kebutuhan pendanaan mereka. Di saat yang sama, LPEI juga fokus pada upaya untuk meningkatkan kualitas pembiayaan yang terus meningkat agar tetap terjaga dalam rentang yang sehat.

Pembiayaan Korporasi

Pembiayaan korporasi adalah jenis pembiayaan produktif yang diberikan oleh LPEI kepada perusahaan swasta yang terlibat dalam kegiatan ekspor, baik secara langsung (*direct export*) maupun tidak langsung (*indirect export*). Tujuan utama dari penyaluran pembiayaan untuk segmen korporasi adalah untuk meningkatkan kemampuan operasional debitur dalam melaksanakan aktivitas ekspor, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

LPEI menawarkan berbagai skema pembiayaan, termasuk Kredit Investasi Ekspor yang mencakup pembiayaan untuk CAPEX dan *project financing*, serta Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) dan transaksi *trade financing* (*pre dan post Shipment Financing*). Dengan produk-produk ini, LPEI berupaya memenuhi tingginya permintaan debitur perusahaan akan akses modal yang diperlukan untuk mendukung aktivitas ekspor dan impor mereka.

Keberadaan produk pembiayaan LPEI menjadi salah satu andalan yang memberikan manfaat besar dan berkelanjutan. Selain itu, produk ini berfungsi sebagai katalisator yang mendorong pertumbuhan perekonomian nasional, terutama dalam upaya meningkatkan pendapatan devisa negara secara optimal.

Strategi dan Tantangan Tahun 2024

Selama tahun 2024, LPEI telah berhasil menambah beberapa debitur baru baik dari pendekatan bilateral atau sindikasi. Dalam praktiknya, terdapat beberapa tantangan dalam menyalurkan kredit korporasi, seperti struktur kredit dan

In practice, Indonesia Eximbank provides export financing facilities by establishing Export Working Capital Credit (KMKE), Export Investment Credit (KIE), and Trade Finance for the Corporate business segment and Export-oriented Small and Medium Enterprises (UKME). These facilities cover both legal entities and individuals involved in export activities or export-supporting activities, whether located domestically or abroad.

By providing equal and broad access to financing for export-oriented businesses, Indonesia Eximbank directly contributes to creating a conducive business climate for increasing national exports. The institution also plays a role in accelerating export growth, enhancing the national production capacity with high competitiveness, and encouraging the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) as well as cooperatives to produce export-ready products.

Through the financing business activities, Indonesia Eximbank is committed to continuously assisting national exporters in meeting their funding needs. At the same time, Indonesia Eximbank remains focused on improving the quality of financing to ensure it remains within a healthy range.

Corporate Financing

Corporate financing is a type of productive financing and is provided by Indonesia Eximbank to private companies that carry out direct or indirect export activities. The primary objective of financing distribution for the corporate segment is to increase the debtor's operational capacity in carrying out export activities, whether directly or indirectly.

Indonesia Eximbank offers various financing schemes, including Export Investment Credit, which covers financing for CAPEX and project financing, as well as Export Working Capital Credit (KMKE) and trade financing transactions (pre- and post-shipment financing). Through these products, Indonesia Eximbank aims to meet the high demand from corporate debtors for access to capital needed to support their export and import activities.

Indonesia Eximbank's financing products serve as a key pillar that provides significant and sustainable benefits. Additionally, these products act as a catalyst to drive national economic growth, particularly in optimizing the country's foreign exchange earnings.

Strategy and Challenges in 2024

Throughout 2024, Indonesia Eximbank has successfully added several new debtors through both bilateral and syndication approaches. In practice, there are several challenges in disbursing corporate loans, such as credit

persaingan dari lembaga keuangan lainnya. Tentunya dengan bantuan dari pemerintah dalam bentuk Penyeretaan Modal Negara (PMN), LPEI memiliki nilai jual dan berhasil menyalurkan kredit dengan program PKE yang memiliki *pricing* yang kompetitif serta selaras dalam misi memajukan ekspor Indonesia.

Kinerja Pembiayaan Korporasi Tahun 2024

Pada akhir Desember 2024, *outstanding* nilai pembiayaan segmen pembiayaan korporasi tercatat sebesar Rp44,2 triliun, mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp56,4 triliun. Dari total pembiayaan tersebut, portofolio segmen Korporasi sebagian besar disalurkan untuk mendukung ekspor industri pertambangan, perkebunan, perdagangan sawit dan CPO serta *refinery* sawit.

Berdasarkan jenis fasilitas, pembiayaan korporasi yang disalurkan oleh LPEI pada tahun 2024 yakni fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE), Kredit Investasi Ekspor (KIE), dan *Trade Finance*. Penyaluran kredit berikut dilakukan baik melalui program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) dan Komersial.

Tahun 2024 menunjukkan perubahan dalam kualitas pembiayaan korporasi, yang tercermin dari penurunan NPL net menjadi 4,52% per tahun, dibandingkan dengan 4,54% di tahun 2023.

Dengan demikian, LPEI terus berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan sektor korporasi dan meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar global.

Rencana Strategis di Tahun 2025

Di tahun 2025, pertumbuhan bisnis korporasi adalah menuju bisnis yang sehat dan *sustained*. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan fokus memperdalam *existing client relationship* dan *expand* ke debitur baru. Kedua hal tersebut akan menciptakan sinergi antara tim bisnis korporasi dan UKM, dimana eksekusi akan dilakukan melalui ekosistem bisnis dengan pendekatan *Anchor* dan *Principal*. Selain itu, bisnis korporasi akan terus menjaga kualitas kredit yang salah satunya dengan menguatkan proses internal LPEI.

Pembiayaan UKM

LPEI melaksanakan penugasan khusus ekspor (PKE) yang diberikan oleh Pemerintah untuk menyediakan pembiayaan ekspor bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dalam hal ini, LPEI fokus pada segmentasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berorientasi ekspor, mengingat peran penting UKM sebagai motor penggerak ekonomi rakyat dan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Pembiayaan untuk UKM sangat berarti bagi LPEI, sejalan dengan mandat Pemerintah yang mengharuskan penyediaan porsi pembiayaan sebesar 30% untuk segmen UKM.

structuring and competition from other financial institutions. With government support in the form of State Capital Injection (PMN), Indonesia Eximbank has a competitive advantage and has successfully disbursed loans through the PKE program, which offers competitive pricing and aligns with the mission of advancing Indonesian exports.

Corporate Financing Performance in 2024

At the end of December 2024, the outstanding corporate financing segment stood at Rp44.2 trillion, reflecting a change from the previous year's Rp56.4 trillion. The majority of this financing portfolio was allocated to support exports in the mining industry, plantations, palm oil and CPO trade, as well as palm oil refining.

Based on the type of facility, corporate financing disbursed by Indonesia Eximbank in 2024 included Export Working Capital Credit (KMKE), Export Investment Credit (KIE), and Trade Finance. These loans were disbursed through both the National Interest Account (PKE) program and commercial financing schemes.

The year 2024 shown an improvement in the quality of corporate financing, as reflected in the decline of net NPL to 4.52% annually, compared to 4.54% in 2023.

Thus, Indonesia Eximbank remains committed to supporting the growth of the corporate sector and increasing the competitiveness of Indonesian export products in the global market.

Strategic Plan in 2025

In 2025, the corporate business growth will focus on building a healthy and sustained business. The approach is to focus on deepening existing client relationships and expanding to new debtors. These efforts will create synergy between the corporate and SME business teams, with execution carried out through a business ecosystem using the Anchor and Principal approach. Additionally, the corporate business will continue to maintain credit quality one of which is by strengthening Indonesia Eximbank's internal processes.

SME Financing

Indonesia Eximbank carries out the National Interest Account (NIA) mandated by the Government to provide export financing for Small and Medium Enterprises (SMEs). In this regard, Indonesia Eximbank focuses on the segmentation of export-oriented Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), recognizing their vital role as the driving force of the people's economy and one of the main pillars of Indonesia's economy. SME financing is highly significant for Indonesia Eximbank, in line with the Government's mandate that requiring a 30% allocation of financing for the SME segment.

Strategi dan Tantangan Tahun 2024

Selama tahun 2024, terdapat beberapa tantangan dalam penyaluran pembiayaan UKM mencakup potensi risiko kredit yang dapat timbul dan nama-nama baru eksportir pada masing-masing daerah. Dalam mengatasi tantangan tersebut, LPEI melakukan beberapa inisiatif yang salah satunya adalah pembuatan 1 (satu) unit internal yang berfokus pada analisa eksportir di Indonesia. Inisiatif tersebut menghasilkan satu proses dimana setiap calon debitur akan dianalisa posisi dan potensi ekspornya, sehingga setiap debitur sudah dilakukan pengecekan khususnya dari segi ekspor.

Kinerja Pembiayaan UKM Tahun 2024

Pada tahun 2024, kinerja *outstanding* pembiayaan untuk Usaha Kecil dan Menengah berorientasi Ekspor (UKME) tercatat mencapai Rp8,9 triliun, mengalami penurunan sebesar 30% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp12,86 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh strategi lembaga dalam meningkatkan kualitas kredit pada segmen pembiayaan UKM, sehingga ke depannya portofolio UKM dapat dipastikan dalam keadaan yang sehat dan *sustained*.

Namun, perkembangan pembiayaan LPEI di segmen UKME untuk sektor Perkebunan, Perdagangan Sawit & CPO menunjukkan peningkatan porsi pada tahun 2024, yang naik menjadi 17% dari sebelumnya 12%. Selain itu, sektor pembuatan komponen juga mengalami peningkatan, mencapai 8%.

Dari segi kualitas pembiayaan, NPL *net* untuk segmen UKME pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,81%, menunjukkan penurunan dibandingkan dengan 6,61% di tahun 2023. Hal ini mencerminkan upaya LPEI dalam menjaga kualitas portofolio pembiayaan dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan bagi pelaku usaha di sektor ini.

Rencana Strategis di Tahun 2025

Pada tahun 2025, LPEI akan berfokus ke beberapa hal dalam menumbuhkan portofolio UKM. Pertama adalah strategi *anchor/principal*, dimana LPEI akan memaksimalkan *relationship* dengan debitur korporasi untuk mendapatkan debitur UKM baru. Hal ini akan dilakukan dengan melibatkan peran aktif dari debitur korporasi tersebut dalam menjalankan peran sebagai *anchor* atau bertindak sebagai *referral/principal* atas perusahaan-perusahaan segmen UKM yang saat ini berperan sebagai *supplier*. Kedua, sejalan dengan mandat dari pemerintah dalam menjalankan program PKE UKM, maka LPEI akan menyalurkan fasilitas dengan program UKM. Dalam rangka memaksimalkan potensi penumbuhan segmen UKM di tahun 2025, LPEI bertekad untuk meningkatkan aspek-aspek yang terlibat dengan segmen UKM, termasuk proses internal penyaluran pembiayaan UKM.

Strategy and Challenges in 2024

Throughout 2024, there were several challenges in the disbursement of SME financing, including potential credit risks that may arise and new exporter names in each region. To address these challenges, Indonesia Eximbank implemented several initiatives, one of which was the establishment of a dedicated internal unit focused on analyzing exporters in Indonesia. This initiative led to a process where each prospective debtor undergoes an assessment of their position and export potential, ensuring that every debtor is thoroughly evaluated, particularly in terms of export capability.

SME Financing Performance in 2024

In 2024, the outstanding financing performance for Export-Oriented Small and Medium Enterprises (UKME) reached Rp8.9 trillion, reflecting a 30% decline compared to Rp12.86 trillion in 2023. This decrease was due to the corporate strategy to improve credit quality in the SME financing segment, ensuring that the SME portfolio remains healthy and sustained in the future.

However, Indonesia Eximbank's financing development in the UKME segment for the Plantation, Palm Oil & CPO Trade sector showed an increase in 2024, rising to 17% from the previous of 12%. Additionally, the component manufacturing sector also experienced growth, reaching of 8%.

In terms of financing quality, the net NPL for the UKME segment in 2024 was recorded at 5.81%, showing a decline from 6.61% in 2023. This reflects Indonesia Eximbank's efforts to maintain the quality of its financing portfolio and support sustainable growth for business actors in this sector.

2025 Strategic Plan

In 2025, Indonesia Eximbank will focus on several things to grow its SME portfolio. First is the anchor/principal strategy, where Indonesia Eximbank will maximize relationships with corporate debtors to acquire new SME debtors. This will involve actively engaging corporate debtors to act as anchors or serve as referrals/principals for SME companies that currently operate as suppliers. Second, in line with the government's mandate to implement the PKE UKM program, Indonesia Eximbank will distribute financing facilities with the SME program. In order to maximize the growth potential of the SME segment in 2025, Indonesia Eximbank is determined to improve various aspects related to SME segment, including the internal process of SME financing disbursement.

Pembiayaan Syariah

LPEI berkomitmen untuk mendukung pengembangan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia dengan menyediakan pembiayaan yang mengikuti prinsip syariah, terutama untuk sektor ekspor yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Kegiatan usaha pembiayaan syariah yang dilakukan oleh LPEI merupakan wujud dari mandat yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2009.

Target pasar utama untuk pembiayaan syariah LPEI meliputi produk halal, pembiayaan ekspor ke negara-negara OKI (Organisasi Kerjasama Islam), serta *co-financing* dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Produk pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh LPEI mencakup pembiayaan modal kerja dan investasi, yang dapat dilaksanakan melalui berbagai akad, seperti akad *Musyarakah* dan *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ). Selain itu, LPEI juga menyediakan layanan berbasis prinsip syariah untuk *Trade Finance*, Penjaminan, dan Asuransi.

Strategi dan Tantangan Tahun 2024

Dalam menyediakan pembiayaan syariah, LPEI menitikberatkan fokusnya pada perbaikan infrastruktur pembiayaan syariah, seperti sistem dan teknologi informasi, tata kelola, dan perbaikan struktur dokumentasi akad pembiayaan. Selain itu, LPEI juga terus berusaha memperbaiki dan memperkuat kualitas aset pembiayaan syariah melalui fokus penetrasi target pasar pada negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), eksportir produk halal, dan melanjutkan *joint financing* dengan Lembaga Keuangan Syariah lainnya, serta memperkuat permodalan Syariah di LPEI.

Pada tahun 2024, LPEI juga mencermati adanya sejumlah tantangan yang dihadapi pembiayaan syariah, di antaranya masih terus dilakukan perbaikan kualitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Sepanjang tahun 2024, LPEI telah menerapkan berbagai inisiatif strategis dan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, di antaranya:

1. Memetakan prioritas produk Syariah yang harus dipasarkan terlebih dahulu;
2. Menjaga fokus target pemasaran ke segmen produk halal, pembiayaan kepada eksportir ke negara OKI, dan *co-financing* dengan lembaga keuangan Syariah lain; dan
3. Menjalani kerjasama dengan lembaga keuangan syariah lainnya dalam pemasaran produk Syariah baik pembiayaan Syariah, penjaminan Syariah dan asuransi Syariah.

Kinerja Pembiayaan Syariah Tahun 2024

Kinerja pembiayaan LPEI di segmen Syariah pada tahun buku 2024 tercatat sebesar Rp7,2 triliun, mengalami penurunan 28% dibandingkan dengan tahun buku sebelumnya sebesar Rp9,9 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh *write-off* yang dilakukan sepanjang tahun 2024.

Sharia Financing

Indonesia Eximbank is committed to supporting the development of Indonesia's sharia economic ecosystem by providing financing that adheres to sharia principles, particularly for export sectors with comparative and competitive advantages. Indonesia Eximbank's financing business activities are a manifestation of the mandate outlined in Law No. 2 of 2009.

The main target markets for Indonesia Eximbank's sharia financing include halal products, export financing to OIC (Organization of Islamic Cooperation) countries, and co-financing with other sharia financial institutions. The sharia financing products offered by Indonesia Eximbank include working capital and investment financing, which can be implemented through various contracts, such as *Musyarakah* and *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ) contracts. In addition, Indonesia Eximbank also provides sharia-based services for *Trade Finance*, Guarantees, and Insurance.

Strategy and Challenges in 2024

In providing sharia financing, Indonesia Eximbank focuses on improving sharia financing infrastructure, such as information systems and technology, governance, improvement of documentation structure of sharia financing agreements. Furthermore, Indonesia Eximbank also continues to strive to improve and strengthen the quality of sharia financing assets by focusing on penetrating target markets in the Organization of Islamic Cooperation (OIC) member countries, halal product exporters, and continuing joint financing with other sharia financial institutions, as well as strengthening sharia capitalization at Indonesia Eximbank.

In 2024, Indonesia Eximbank also observed a number of challenges facing sharia financing, including the ongoing efforts to improve the quality of financing based on sharia principles. Throughout 2024, Indonesia Eximbank has implemented various strategic initiatives and mitigation measures needed to overcome the challenges faced, including:

1. Mapping Sharia product priorities that must be marketed first;
2. Maintaining financing focus on the halal product segment, financing for OIC countries, and co-financing with other financial institutions; and
3. Establish cooperation with other sharia financial institutions in marketing sharia products, including sharia financing, sharia guarantee and sharia insurance.

Sharia Financing Performance in 2024

Indonesia Eximbank's financing performance in the Sharia segment for the 2024 fiscal year was recorded at Rp7.2 trillion, a decrease of 28% compared to the previous fiscal year of Rp9.9 trillion. This decrease was primarily due to the write-offs that has been carried out throughout 2024.

Sementara itu, NPL net pada segmen pembiayaan Syariah di tahun buku 2024 tercatat sebesar 0%, tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun buku sebelumnya.

Rencana Strategis di Tahun 2025

Rencana strategis LPEI untuk pembiayaan syariah pada tahun 2025 mendatang adalah sebagai berikut:

1. Peran UUS menjadi lebih spesifik sebagai *product specialist* dan *advisory*;
2. Pemasaran produk Syariah dilakukan oleh Unit Bisnis LPEI;
3. Mengembangkan produk Syariah sesuai dengan strategi lembaga;
4. Terus menjalin hubungan dengan pihak eksternal baik lembaga keuangan maupun non lembaga keuangan; dan
5. Menjaga fokus pembiayaan ke segmen produk halal, pembiayaan untuk negara OKI, dan co-financing dengan lembaga keuangan lain.

Segmen Penjaminan

Penjaminan merupakan salah satu produk mandat yang diberikan oleh Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekspor nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 Pasal 7 dan 13. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2020, Pemerintah menetapkan LPEI dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sebagai *Special Mission Vehicle* (SMV) yang bertugas menjalankan program Penjaminan Pemerintah (JAMINAH). Program ini telah memasuki generasi kedua (Gen 2) sejak tahun 2022 sebagai kelanjutan dari Program JAMINAH Gen 1 (satu) yang berakhir pada 17 Desember 2021. Hingga akhir tahun 2023, tercatat lima bank telah memanfaatkan dan mengimplementasikan Program JAMINAH Gen 2 (dua), dengan potensi peningkatan yang diperkirakan akan terus berlanjut ke depannya. Saat ini masih terdapat *outstanding* PEN sebesar Rp1,56 triliun yang terdiri dari 4 (empat) nasabah aktif dengan masa laku terakhir pada Desember 2025.

Dalam bisnis segmen penjaminan, LPEI menjalankan berbagai kegiatan usaha, di antaranya memberikan penjaminan bagi eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang atau jasa di luar negeri. Selain itu, LPEI juga memberikan penjaminan bagi importir Indonesia atas pembayaran barang atau jasa yang telah diberikan. Para pelaku usaha lokal juga dapat memperoleh bank garansi yang diterbitkan oleh LPEI untuk menjalankan proyek-proyek dalam negeri yang berorientasi ekspor, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, bank garansi dari LPEI juga dimanfaatkan oleh pengusaha lokal untuk mengerjakan proyek-proyek di luar negeri, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan devisa negara.

Selain mendukung pengusaha lokal, fasilitas penjaminan dari LPEI juga dapat dimanfaatkan oleh sektor perbankan Indonesia dalam bentuk *credit enhancer*. Dengan adanya jaminan tersebut, bank memiliki tingkat keamanan lebih

Meanwhile, the net NPL in the Sharia financing segment for the 2024 fiscal year was recorded at 0%, unchanged from the previous fiscal year.

Strategic Plan for 2025

Indonesia Eximbank 's strategic plan for sharia financing in 2025 is as follows:

1. The role of the Sharia Business Unit (SBU) has become more specific as a product specialist and advisory;
2. Sharia product marketing is carried out by the Indonesia Eximbank Business Unit;
3. Develop Sharia products in accordance with the Institution's strategy;
4. Continue to build relationships with external parties, both financial institutions and non-financial institutions; and
5. Maintain financing focus on the halal product segment, financing for OIC countries, and co-financing with other financial institutions.

Guarantee Segment

Guarantee services are one of the mandated products assigned by the Government to encourage national export growth, as stipulated in Law No. 2 of 2009 Articles 7 and 13. Furthermore, based on Government Regulation No. 43 of 2020, the Government designated Indonesia Eximbank and PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) as Special Mission Vehicles (SMV) tasked with implementing the Government Guarantee Program (JAMINAH). This program entered its second generation (Gen 2) in 2022 as a continuation of the JAMINAH Gen 1 (one), which ended on December 17, 2021. As of the end of 2023, five banks had utilized and implemented JAMINAH Gen 2 (two), with the potential for continued growth in the future. Currently, there is still an outstanding PEN of Rp1.56 trillion consisting of 4 (four) active customers with a final validity period in December 2025.

In the guarantee segment business, Indonesia Eximbank carries out various business activities, including providing guarantees for Indonesian exporters on payments received from foreign buyers of goods or services. Additionally, Indonesia Eximbank also provides guarantees for Indonesian importers on payments for goods or services that have been provided. Local business actors can also obtain bank guarantees issued by Indonesia Eximbank to support export-oriented domestic projects, whether directly or indirectly. Furthermore, Indonesia Eximbank's bank guarantees are utilized by local entrepreneurs to undertake projects abroad, ultimately contributing to an increase in the country's foreign exchange earnings.

In addition to supporting local entrepreneurs, Indonesia Eximbank's guarantee facilities can also be utilized by the Indonesian banking sector as a credit enhancer. With these guarantees, banks have a higher level of security when



tinggi dalam menyalurkan pembiayaan kepada debitur eksportir. Penjaminan kredit yang diberikan oleh LPEI berperan penting dalam membantu perbankan memitigasi risiko gagal bayar debitur, baik untuk pembayaran bunga maupun utang pokoknya.

Strategi dan Tantangan Tahun 2024

Bisnis Penjaminan menempuh beragam strategi sepanjang tahun 2024:

- Optimalisasi: meningkatkan utilisasi *global line* dari perusahaan asuransi-asuransi yang bekerjasama.
- Ekspansi: menambah Terjamin baru serta menjalin kerja sama baru, baik dengan perbankan dan/atau asuransi.
- Perbaikan produk eksisting dengan merevisi SOP internal dan menyesuaikan *Risk Acceptance Criteria* (RAC) yang membatasi bisnis, serta menyesuaikan pricing agar semakin kompetitif.
- *Roadshow* reguler untuk melakukan sosialisasi produk-produk dan fitur produk LPEI yang telah diperbarui kepada mitra perbankan dan asuransi.
- Perbaikan proses bisnis dengan melakukan penyesuaian struktur organisasi dalam rangka perbaikan SLA.

Tantangan di tahun 2024 yang memengaruhi kinerja Penjaminan, antara lain:

- SKK Migas sebagai bowheer terbesar bisnis Kontra Bank Garansi (KBG) mulai menerima *Surety Bond* dari perusahaan Asuransi, sehingga bisnis kontra garansi LPEI mengalami penurunan.
- Bisnis Konstruksi turun dari 36% menjadi 26% dalam 5 (lima) tahun terakhir, sehingga permintaan Bank Garansi (Penjaminan Proyek) sebagai portofolio terbesar LPEI menurun.
- Rendahnya tingkat eksekusi PKS dengan perbankan karena *terms and conditions* yang belum sesuai kebutuhan pasar.

Produk Jaminan Kepabeanaan (*Customs Bond*) LPEI tidak diminati karena SLA yang lama dibandingkan dengan Bank Komersial/Perusahaan Asuransi yang mempunyai kantor representatif di pelabuhan.

Kinerja Penjaminan Tahun 2024

Pada tahun buku 2024, volume penjaminan importir atau luar negeri tercatat sebesar Rp667 miliar, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp669 miliar. Negara-negara yang menjadi tujuan utama transaksi pada tahun buku 2024 antara lain Filipina, Singapura, Korea Selatan, dan Thailand.

Sementara itu, volume penjaminan *Business As Usual* (BAU) atau non-PEN pada tahun buku 2024 dibukukan sebesar Rp6,58 triliun. Jika dikategorikan berdasarkan produk, penjaminan proyek tetap menjadi kontributor terbesar dengan porsi sekitar 78,1% atau setara dengan Rp5,14 triliun. Selanjutnya, penjaminan kredit menyumbang 11,8% atau senilai Rp777 miliar, diikuti oleh penjaminan importir dengan porsi 10,1% atau Rp667 miliar.

disbursing financing to exporter debtors. Credit guarantees provided by Indonesia Eximbank play a crucial role in helping banks mitigate the risk of debtor default, covering both payments of interest and principal debt.

Strategy and Challenges in 2024

The Guarantee Business pursued various strategies throughout 2024:

- Optimization: increasing the utilization of global lines from cooperating insurance companies.
- Expansion: adding new Guarantees and establishing new partnerships, both with banks and/or insurers.
- Improvement of existing products by revising internal SOPs and adjusting Risk Acceptance Criteria (RAC) that limit business, as well as adjusting pricing to be more competitive.
- Regular roadshows to socialize updated Indonesia Eximbank's products and product features to banking and insurance partners.
- Business process improvement by adjusting the organizational structure in order to improve SLA.

Challenges in 2024 that affect Guarantee performance include:

- SKK Migas as the largest bowheer of the Counter Bank Guarantee (KBG) business began to receive Surety Bonds from insurance companies, so that Indonesia Eximbank's counter-guarantee business decreased.
- Construction business decreased from 36% to 26% in the last 5 (five) years, so the demand for Bank Guarantee (Project Guarantee) as Indonesia Eximbank's largest portfolio decreased.
- The low level of PKS execution with banks due to terms and conditions that do not meet market needs.

Indonesia Eximbank's Customs Bond products are not in demand due to the long SLA compared to Commercial Banks/Insurance Companies that have representative offices at the port.

Guarantee Performance in 2024

In the 2024 fiscal year, the volume of importer or foreign guarantees was recorded at Rp667 billion, showing an decrease compared to the previous year of Rp669 billion. The primary destination countries for these transactions in 2024 included Philippines, Singapore, South Korea, and Thailand.

Meanwhile, the volume of Business as Usual (BAU) or non-PEN guarantees in the 2024 fiscal year was recorded at Rp6.58 trillion. When categorized by product, project guarantees remain the largest contributor with a portion of around 78.1% or equivalent to Rp5.14 trillion. Furthermore, credit guarantees contribute 11.8% or equivalent to Rp777 billion, followed by importer guarantees with a portion of 10.1% or Rp667 billion.

Adapun total volume penjaminan BAU pada tahun buku 2024 tercatat sebesar Rp8,14 triliun. Dari jumlah tersebut, porsi penjaminan PEN tercatat sebesar 19,2% atau Rp1,56 triliun, porsi penjaminan proyek mencapai 63,1% atau setara Rp5,14 triliun, sedangkan penjaminan importir berkontribusi sebesar 8,2% atau Rp667 miliar, serta penjaminan kredit dengan porsi 9,5% atau Rp777 miliar.

The total volume of BAU guarantees in the 2024 financial year was recorded at Rp8.14 trillion. Of this amount, the PEN guarantee portion was amounted to 19.2% or Rp1.56 trillion, the project guarantee portion reached 63.1% or equivalent to Rp5.14 trillion, while importer guarantees contributed 8.2% or Rp667 billion, and credit guarantees with a portion of 9.5% or Rp777 billion.

Jenis Penjaminan Type of Guarantee	2024 (Rp Triliun) (Rp Trillion)	2023 (Rp Triliun) (Rp Trillion)	Perubahan Change	
			Nominal (Rp Triliun) (Rp Trillion)	Persentase Percentage (%)
Proyek Project	5,14	7,05	1,91	27%
Kredit Credit	0,77	0,94	0,17	18%

Pada tahun buku 2024, nilai penjaminan proyek tetap menjadi kontributor terbesar dengan *outstanding* sebesar Rp5,14 triliun. Sementara itu, total Imbal Jasa Penjaminan (*fee*) gabungan yang dihasilkan selama tahun buku 2024 tercatat mencapai Rp67 miliar, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp94 miliar.

In the 2024 fiscal year, project guarantee values remained the largest contributor, with an outstanding amount of Rp5.14 trillion. Meanwhile, the total Guarantee Service Fee (*fee*) generated during the 2024 fiscal year was recorded at Rp67 billion, showing a decrease compared to the previous year that reached the amount of Rp94 billion.

Rencana Strategis di Tahun 2025

Bisnis Penjaminan memetakan beberapa strategi untuk tahun 2025 yang meliputi:

- Memaksimalkan utilisasi limit penjaminan debitur *existing*.
- Menjalinkan komunikasi intensif dan kerja sama dengan bowheer (termasuk SKK Migas) terkait dengan produk Penjaminan LPEI.
- Memfokuskan produk KBG dengan eksekusi PKS *existing* dan menambah PKS baru dengan perusahaan asuransi yang bonafid.
- Mereview PKS *existing* dengan Bank terkait dengan *terms and conditions* yang perlu diperbaiki sesuai dengan kebutuhan pasar.
- Memperluas kerja sama dengan bank BUKU III untuk produk Penjaminan Kredit.

Strategic Plan for 2025

The Guarantee Business has mapped out several strategies for 2025, including:

- Maximizing the utilization of existing debtor guarantee limits.
- Establishing intensive communication and cooperation with Bowheer (including SKK Migas) related to LPEI Guarantee products.
- Focusing KBG products with existing MoU execution and adding new MoU with bonafide insurance companies.
- Reviewing existing MoU with Banks related to terms and conditions that need to be improved according to market needs.
- Expanding cooperation with BUKU III banks for Credit Guarantee products.

Segmen Asuransi

Dalam upaya menjalankan mandat Pembiayaan Ekspor Nasional, LPEI tidak hanya menyediakan layanan Pembiayaan dan Penjaminan, tetapi juga menawarkan layanan Asuransi. Mengacu pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 Pasal 3, asuransi yang diberikan oleh LPEI bertujuan untuk melindungi dari berbagai risiko, termasuk kegagalan ekspor, risiko gagal bayar, investasi perusahaan Indonesia di luar negeri, serta risiko politik di negara tujuan ekspor.

Insurance Segment

In carrying out its National Export Financing mandate, Indonesia Eximbank does not only provide Financing and Guarantee services but also offers Insurance services. Referring to Law No. 2 of 2009, Article 3, the insurance provided by Indonesia Eximbank aims to protect against various risks, including export failure, payment default risks, Indonesian company investments abroad, and political risks in a country of export destination.

Layanan Asuransi yang disediakan LPEI dirancang untuk mendukung para eksportir, baik yang sudah menjadi tertanggung maupun tertanggung baru. Dalam rangka memperkuat bisnis asuransi, LPEI terus membangun ekosistem ekspor dengan menjalin kerja sama bersama Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank, Kementerian/Lembaga, asosiasi usaha, serta *Export Credit Agency* dari berbagai negara.

Indonesia Eximbank's Insurance Services are designed to support exporters, including both existing and new insureds. In order to strengthen its insurance business, Indonesia Eximbank continues to build an export ecosystem by collaborating with Bank and Non-Bank Financial Institutions, Ministries/Agencies, business associations, and Export Credit Agencies from various countries.

Hingga akhir tahun 2024, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menawarkan produk asuransi baik untuk segmen korporasi maupun UKM melalui produk asuransi *stand alone* maupun program *bundling* berupa Pembiayaan PKE UKM yang dikombinasikan dengan *Trade Credit Insurance* (TCI), serta paket Trade Finance dengan TCI. Produk TCI menjadi salah satu produk unggulan LPEI karena mendukung perluasan pasar eksportir Indonesia, memungkinkan mereka untuk menjangkau negara baru dan menjalin kerja sama dengan *buyer* baru.

Strategi dan Tantangan Tahun 2024

Dalam menjalankan bisnis Asuransi, LPEI kerap dihadapkan dengan sejumlah tantangan eksternal, seperti kondisi perekonomian dan politik dunia yang belum sepenuhnya stabil sehingga memberikan risiko ketidakpastian tinggi yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat sehingga pada gilirannya juga berimbas pada menurunnya volume transaksi asuransi.

Menyadari bahwa beberapa risiko dan tantangan bersifat melekat (*inherent*) dengan pengelolaan bisnis Asuransi, maka LPEI telah menempuh langkah-langkah strategis yang tepat di tahun 2024 untuk mendukung kelancaran pelaksanaan mandat penyediaan layanan Asuransi LPEI, antara lain:

1. Berkolaborasi dengan Bank dan L/K Partner untuk meningkatkan peran LPEI sebagai penyedia produk asuransi dalam rangka mitigasi risiko;
2. Sosialisasi berkala kepada calon bank partner untuk meningkatkan jumlah PKS;
3. Meningkatkan portofolio Trade Credit Insurance dengan cara kerja sama dengan Broker Asuransi;
4. Meningkatkan *product holding* debitur eksisting;
5. Aliansi strategis dengan Lembaga Keuangan/ Asuransi/ Penjaminan untuk referral potensi Asuransi;

Kinerja Asuransi Tahun 2024

Asuransi yang ditawarkan LPEI, khususnya Proteksi Piutang Dagang dan Asuransi *Marine Cargo Insurance*, berperan dalam mendukung kegiatan ekspor Indonesia dengan memberikan perlindungan atas transaksi yang dilakukan dengan *buyer* di luar negeri. Perlindungan ini mencakup seluruh proses, mulai dari pengangkutan hingga pembayaran diterima oleh eksportir Indonesia.

Hingga akhir tahun buku 2024, LPEI telah memberikan perlindungan transaksi eksportir Indonesia kepada *buyer* – *buyer* yang tersebar di 58 negara. Di tengah tantangan yang dihadapi serta persaingan ketat dalam ekspor Indonesia di pasar global, LPEI tetap mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung aktivitas ekspor nasional. Hal ini tercermin dari nilai transaksi asuransi yang dibukukan mencapai Rp10,86 triliun, menurun dibandingkan tahun buku sebelumnya yang tercatat sebesar Rp12,02 triliun. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa gejolak politik di luar negeri sehingga menyebabkan transaksinya tidak dapat

By the end of 2024, Indonesia Eximbank offers insurance products for both corporate and SME segments through standalone insurance products and bundled programs, such as PKE SME Financing combined with Trade Credit Insurance (TCI) and Trade Finance packages with TCI. The TCI product has become one of Indonesia Eximbank's flagship offerings, as it supports Indonesian exporters in expanding their markets, enabling them to reach new countries and establish partnerships with new buyers.

Guarantee Performance in 2024

In carrying out the Insurance business, Indonesia Eximbank is often faced with several external challenges, such as global economic and political which are not yet completely stable that leads to high uncertainty risks. These conditions can weaken consumer purchasing power, which ultimately affecting the decline in insurance transaction volumes.

Recognizing that some risks and challenges are inherent in managing the Insurance business, Indonesia Eximbank has taken appropriate strategic measures in 2024 to ensure the smooth implementation of Indonesia Eximbank's insurance service mandate. These measures include:

1. Collaborate with Banks and Ministries/Institutions Partners to upgrade Indonesia Eximbank's role as an insurance product provider in the context of risk mitigation;
2. Periodic dissemination to prospective partner banks to expand the number of Cooperation Agreement (MoU);
3. Expanding the Trade Credit Insurance portfolio by collaborating with Insurance Brokers;
4. Increase product holding of existing debtors;
5. Strategic alliance with Financial/Insurance/ Guarantee Institutions for potential referrals;

Insurance Performance in 2024

The insurance offered by Indonesia Eximbank, particularly Trade Receivables Protection and Marine Cargo Insurance, plays a crucial role in supporting Indonesia's export activities by providing protection for transactions with overseas buyers. This coverage spans the entire process, from transportation to the receipt of payment by Indonesian exporters.

By the end of fiscal year 2024, Indonesia Eximbank had provided transaction protection for Indonesian exporters dealing with buyers across 58 countries. Despite the challenges and intense competition in Indonesia's export sector on the global market, Indonesia Eximbank remained committed to supporting national export activities. This commitment is reflected in the total insured transaction value, which reached Rp10.86 trillion, a decline from the previous year's Rp12.02 trillion. The decrease was primarily due to political turmoil abroad, which disrupted transactions such as the Russia-Ukraine war and conflicts in the Red Sea

dilakukan, seperti halnya terjadinya perang antara Rusia-Ukraina, dan konflik di perairan Laut Merah. Dari sisi internal sendiri, LPEI melakukan perubahan kebijakan terkait *Risk Acceptance Criteria* karena dampak gejolak politik di atas. Berikut ini adalah realisasi pencapaian kinerja lini bisnis Asuransi tahun 2024.

waters. Internally, Indonesia Eximbank adjusted its policies regarding Risk Acceptance Criteria in response to these geopolitical instabilities. Below is the 2024 performance realization for Indonesia Eximbank's Insurance business line.

Jenis Layanan Asuransi Type of Insurance Services	2024 (Rp Triliun) (Rp Trillion)	2023 (Rp Triliun) (Rp Trillion)	Perubahan Change	
			Nominal (Rp Triliun) (Rp Trillion)	Persentase Percentage (%)
Proteksi Piutang Dagang Trade Credit Insurance	10,36	11,17	(0,81)	(0,93)
Marine Cargo	0,49	0,85	(0,36)	(0,54)

Berdasarkan data pada tabel di atas, layanan asuransi LPEI masih didominasi oleh Asuransi TCI, yang memberikan kontribusi sebesar Rp10,36 triliun dari total keseluruhan portofolio Asuransi. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun buku sebelumnya yang tercatat sebesar Rp11,17 triliun.

Based on the data in the table above, Indonesia Eximbank's insurance services continue to be dominated by Trade Credit Insurance (TCI) with contribution of Rp10.36 trillion to the total insurance portfolio. This amount represents a decline from the previous fiscal year, which recorded Rp11.17 trillion.

Sementara itu, layanan Asuransi Marine Cargo Insurance mencatatkan volume sebesar Rp0,49 triliun pada tahun buku 2024, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp0,85 triliun. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan internal LPEI terkait *Risk Acceptance Criteria*.

Meanwhile, Marine Cargo Insurance reported a transaction volume of Rp0.49 trillion in fiscal year 2024, a decrease from Rp0.85 trillion in the previous year. This decrease was primarily due to Indonesia Eximbank's internal policy adjustments related to Risk Acceptance Criteria.

Rencana Strategis di Tahun 2025

Dalam rangka meningkatkan *customer base* Asuransi, LPEI akan memperkuat kerjasamanya dengan Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank, Kementerian/Lembaga, asosiasi usaha dan *Export Credit Agency* negara lain. Khusus untuk kerjasama dengan Lembaga Keuangan Bank, Indonesia Eximbank memiliki program kerjasama Asuransi Proteksi Piutang Dagang baru dimana Lembaga Keuangan Bank yang bekerjasama bisa menjadi tertanggung produk asuransi tersebut. Selain itu Lembaga Keuangan yang bekerjasama dengan Indonesia Eximbank menggunakan program baru tersebut akan mendapatkan keuntungan lainnya yaitu waktu tunggu masa klaim yang lebih rendah dibandingkan jika Lembaga Keuangan tidak menggunakan skema kerjasama dengan Indonesia Eximbank.

Strategic Plan for 2025

In order to increase its insurance customer base, Indonesia Eximbank will strengthen its cooperation with Banking and Non-Banking Financial Institutions, Ministries/Agencies, business associations, and Export Credit Agencies of other countries. Specifically for cooperation with Banking Financial Institutions, Indonesia Eximbank has a new Trade Receivable Protection Insurance cooperation program where cooperating Banking Financial Institutions can become the insured of the insurance product. In addition, Financial Institutions cooperating with Indonesia Eximbank using this new program will obtain other benefits, namely a lower claim waiting period compared to if the Financial Institutions do not use a cooperation scheme with Indonesia Eximbank.

Peningkatan pemasaran *Product Holding* (asuransi) juga dilakukan kepada nasabah yang telah memperoleh fasilitas pembiayaan Indonesia Eximbank. Salah satunya adalah dengan adanya *bundling* produk asuransi proteksi piutang dagang dengan pembiayaan PKE UMKM. Selain itu penjualan produk Asuransi Indonesia Eximbank akan dilakukan secara bersama-sama dengan produk pembiayaan, sehingga selain pertumbuhan asuransi akan lebih optimal, kolaborasi internal antar unit bisnis Indonesia Eximbank akan semakin lebih baik.

The enhancement of Product Holding (insurance) marketing is also carried out for customers who have obtained financing facilities from Indonesia Eximbank. One of the strategies is bundling trade credit insurance products with PKE UMKM financing. In addition, the sale of Indonesia Eximbank insurance products will be conducted alongside financing products, ensuring that, in addition to optimizing insurance growth, internal collaboration between business units within Indonesia Eximbank will improve.

Segmen Trade Finance

Dengan menyediakan layanan *Trade Finance* yang terintegrasi, LPEI berupaya memberikan nilai tambah bagi para eksportir dan pemasok. Selain itu, layanan ini juga membuka peluang bagi perusahaan untuk berkembang, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi Indonesia, khususnya di sektor ekspor.

LPEI telah membentuk unit kerja khusus *Trade Finance* untuk menyediakan layanan yang bertujuan membantu para eksportir dalam meningkatkan penjualan serta kontribusi terhadap nilai ekspor nasional. *Trade Finance* sendiri merupakan solusi layanan terpadu (*one stop solution services*) yang menawarkan fasilitas pembiayaan, mencakup *pre-shipment* (termasuk *post-import*) hingga *post-shipment*, sesuai dengan kebutuhan nasabah maupun calon nasabah.

Dalam menjalankan layanan *Trade Finance*, LPEI selalu memperhatikan aspek pengelolaan risiko, termasuk risiko komersial, operasional, serta risiko yang muncul dalam transaksi lintas negara (*cross-border*). Selain itu, pemanfaatan jaringan yang luas digunakan untuk memitigasi risiko dan mengoptimalkan pendanaan berbasis *Trade Finance*, sehingga dapat menghasilkan biaya dan penetapan harga (*pricing*) yang lebih efisien.

Melalui layanan *Trade Finance* yang terintegrasi, LPEI berupaya menciptakan nilai tambah bagi eksportir dan pemasok, sekaligus membuka peluang ekspansi bagi perusahaan. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi Indonesia, khususnya di sektor ekspor.

Strategi dan Tantangan Tahun 2024

Ekstensifikasi:

1. Penambahan jumlah *customer base*.
2. Peningkatan volume.

Intensifikasi:

1. Pendekatan debitur berbasis ekosistem (*one stop solution*).
2. Peningkatan utilisasi fasilitas debitur eksisting.

Kinerja Trade Finance Tahun 2024

Sepanjang tahun buku 2024, TFC mencatatkan pendapatan bunga sebesar Rp237,9 miliar serta pendapatan *fee* senilai Rp10,9 miliar dari transaksi yang dilakukan. Jika dibandingkan dengan tahun buku 2023, total pendapatan mengalami peningkatan sebesar 21% secara *year-on-year* (YoY). Hal ini disebabkan oleh utilisasi yang optimal sejak awal tahun dan optimalisasi penggunaan fasilitas Penugasan Khusus Ekspor *Trade Finance*.

Trade Finance Segment

By providing integrated *Trade Finance* services, Indonesia Eximbank strives to deliver added value for exporters and suppliers. Additionally, this service creates opportunities for companies to grow which ultimately contributes to increasing economic activity in Indonesia, particularly in the export sector.

Indonesia Eximbank has established a dedicated *Trade Finance* work unit to provide services aimed at helping exporters to increase sales and contribution to national export value. *Trade Finance* itself is an integrated service solution (*one-stop solution service*) that offers financing facilities, covering *pre-shipment* (including *post-import*) to *post-shipment*, tailored to the needs of customers and potential customers.

In delivering *Trade Finance* services, Indonesia Eximbank consistently considers risk management aspects, including commercial, operational, and cross-border transaction risks. Additionally, the utilization of an extensive network helps mitigate risks and optimize *Trade Finance*-based funding, ensuring more efficient costs and pricing.

Through integrated *Trade Finance* services, Indonesia Eximbank aims to create added value for exporters and suppliers while opening expansion opportunities for companies. This initiative is expected to contribute to increased economic activity in Indonesia, particularly in the export sector.

Strategy and Challenges in 2024

Extensification:

1. Increasing the number of customers.
2. Expanding transaction volume.

Intensification:

1. Ecosystem-based debtor approach (*one-stop solution*).
2. Enhancing the utilization of existing debtor facilities.

Trade Finance Performance in 2024

Throughout the 2024 fiscal year, TFC recorded interest income of Rp237.9 billion and fee income of Rp10.9 billion from executed transactions. If compared to the 2023 fiscal year, total revenue increased by 21% of year-on-year (YoY). This growth was driven by optimal utilization from the beginning of the year and the maximization of the National Interest Account *Trade Finance* facility.

Trade Finance pada tahun buku 2024 menghasilkan volume transaksi sebesar Rp21,5 triliun, mengalami kenaikan sebesar 34% secara YoY dibandingkan dengan tahun buku sebelumnya yang mencapai Rp16,1 triliun. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan jumlah nasabah *Trade Finance* dan utilisasi fasilitas yang optimal.

Selain itu, nasabah pada tahun buku 2024 jumlahnya bertambah menjadi 93 nasabah. Dari total nasabah tersebut, sebanyak 81% berasal dari segmen UKM dan UMBE, sedangkan 19% merupakan nasabah korporasi. Penambahan jumlah nasabah tersebut disebabkan oleh upaya-upaya yang dilakukan oleh LPEI dalam menjangkau eksportir-eksportir melalui kontrol tower, LPEI Export Forum dan pendekatan-pendekatan lainnya.

Rencana Strategis di Tahun 2025

LPEI sudah menyiapkan rencana tepat sasaran untuk keberlangsungan dan perkembangan segmen *trade finance* dalam menghadapi tahun 2025, seperti berikut ini:

- Melakukan *maintain* dan monitoring fasilitas eksisting
- Menjalankan strategi ekekesi dimana *Trade Finance* akan fokus kepada debitur pembentuk *average balance* dengan utilisasi reguler dan penyumbang margin yang memberikan margin yang baik. Untuk melakukan hal tersebut, departemen *Trade Finance* melakukan fungsi antara lain melakukan perbaikan dan pengembangan produk, *advisory services* serta inisiatif seperti sosialisasi produk dan pengajuan program tematik *special pricing*.

Segmen Treasury

LPEI memiliki Divisi *Funding and Treasury* yang memegang peran strategis dalam operasional lembaga. Divisi ini bertanggung jawab atas berbagai fungsi penting yang terbagi ke dalam tiga departemen utama berikut:

1. **Treasury**
 - a. Mengelola likuiditas lembaga baik Rupiah dan valas dalam rangka optimalisasi dana yang belum digunakan.
 - b. Melakukan penempatan dana pada instrumen yang memiliki tingkat risiko terkendali serta bersifat likuid.
 - c. Melakukan pengelolaan portofolio *treasury*.
 - d. Mengelola Rasio Posisi Devisa Neto (PDN) dengan prinsip kehati-hatian.
2. **Financial Institution**
 - a. Berfokus pada hubungan dengan *Counterparty Bank* dan/atau Lembaga Keuangan Non-BUMN/BUMD.
 - b. Menjalani hubungan korespondensi, termasuk melakukan *Set Up & Annual Review RMA, KYC/AML Due Diligence*, serta pemeliharaan rekening Nostro.
 - c. Menetapkan dan melakukan tinjauan tahunan terhadap batasan limit Bank dan/atau Lembaga Keuangan Non-BUMN/BUMD.
 - d. Menggalang dana melalui *loan market bilateral*, termasuk term *loan, revolving loan, BA Financing*, dan melalui mekanisme sindikasi/*club deal* serta melalui pasar modal dengan mekanisme penerbitan obligasi valas.

In 2024, Trade Finance has generated a transaction volume of Rp21.5 trillion, marking a 34% by YoY increase compared to the previous year of Rp16.1 trillion. This growth resulted from an expanding customer base of Trade Finance and optimal facility utilization.

Additionally, the number of Trade Finance customers has increased to 93 in 2024 fiscal year. Of these number of customers, 81% came from the SME and UMBE segments, while 19% were corporate customers. This increase was driven by Indonesia Eximbank's efforts to reach more exporters through control towers, the Indonesia Eximbank Export Forum, and various other approaching strategies.

Strategic Plan for 2025

Indonesia Eximbank has prepared targeted plans for the sustainability and development of the trade finance segment in facing 2025, as follows:

- Maintaining and monitoring existing facilities
- Implementing an execution strategy where Trade Finance will focus on debtors who generate average balances with regular utilization and contribute good margins. To achieve this, the Trade Finance department performs functions including product improvement and development, advisory services, and initiatives such as product socialization and proposing special pricing thematic program.

Treasury Segment

Indonesia Eximbank has a Funding and Treasury Division that plays a strategic role in the institution's operations. This division is responsible for various important functions that are divided into the following three main departments:

1. **Treasury**
 - a. Manage the institution's liquidity both in Rupiah and foreign currency in order to optimize unused funds.
 - b. Placing funds in instruments that have a controlled level of risk and are liquid.
 - c. Manage the treasury portfolio.
 - d. Manage the Net Open Position Ratio (NOP) with prudent principles.
2. **Financial Institution**
 - a. Focuses on relationships with Counterparty Banks and/or Non-State Owned Financial Institutions.
 - b. Establish correspondence relationships, including conducting RMA Set Up & Annual Review, KYC/AML Due Diligence, and maintenance of Nostro accounts.
 - c. Establishing and conducting annual review of limit restrictions of Banks and/or Non-State Owned Financial Institutions.
 - d. Raising funds through bilateral loan markets, including term loans, revolving loans, BA Financing, and through syndication/*club deal* mechanisms as well as through the capital market by issuing foreign currency bonds.

3. **Non Bank Financial Institution**

- Berfokus pada hubungan dengan *Counterparty Bank* dan/atau Lembaga Keuangan BUMN/BUMD.
- Menjalin hubungan korespondensi, termasuk melakukan *Set Up & Annual Review RMA, KYC/AML Due Diligence*, serta pemeliharaan rekening Nostro.
- Menetapkan dan melakukan tinjauan tahunan terhadap batasan limit Bank dan/atau Lembaga Keuangan BUMN/BUMD.
- Melakukan penggalangan dana rupiah dari Pemerintah Republik Indonesia.
- Menggalang dana melalui *loan market bilateral*, termasuk term *loan, revolving loan, BA Financing*, dan melalui mekanisme sindikasi/*club deal* serta melalui pasar modal dengan mekanisme penerbitan obligasi rupiah.

Strategi dan Tantangan Tahun 2024

Strategi:

- Diversifikasi *funding line* - strategi ini dilakukan dalam rangka diversifikasi sumber dana yang lebih optimal. Strategi ini dilakukan dengan cara:
 - Meningkatkan hubungan koresponden dengan bank eksisting untuk mendapatkan peningkatan limit sumber dana.
 - Mengintensifkan pembukaan hubungan koresponden dengan bank baru untuk mendapatkan sumber dana baru.
- Optimalisasi suku bunga pinjaman – strategi ini dilakukan untuk mengelola biaya bunga yang lebih optimal. Hal ini dapat dilakukan melalui:
 - Mempertahankan fasilitas *revolving credit facilities* yang dapat ditarik dengan tingkat bunga sesuai kebutuhan.
 - Menggunakan suku bunga mengambang dengan mempertimbangkan tren penurunan suku bunga.
- Rebalancing Loan Profile* – strategi ini bertujuan untuk mengelola profil jatuh tempo yang lebih terukur sehingga menghindari penumpukan jatuh tempo kewajiban di waktu yang bersamaan. Adapun rencana yang telah dilakukan antara lain:
 - Melakukan negosiasi tingkat suku bunga atas pinjaman eksisting.
 - Masuk pasar dalam rangka penggalangan dana yaitu melalui instrument bilateral, *stand by facility*, dll.
 - Melakukan pelunasan dipercepat dalam rangka mengelola kecukupan sumber dana yang lebih optimal.

Tantangan :

- Kinerja LPEI yang masih menantang sehingga beberapa kreditur terkendala dengan *internal policy* kreditur untuk memberikan fasilitas pinjaman.
- Fluktuasi pasar akibat ketidakstabilan global, tahun politik yang menyebabkan Lembaga keuangan masih *wait and see* sehingga tren penurunan suku bunga cenderung melambat.

3. **Non Bank Financial Institution**

- Focuses on relationships with Counterparty Banks and/or SOEs/SOEs Financial Institutions.
- Establish correspondence relationships, including RMA Set Up & Annual Review, KYC/AML Due Diligence, and Nostro account maintenance.
- Establishing and conducting annual reviews of limit restrictions of Banks and/or SOEs/SOEs Financial Institutions.
- Raising rupiah funds from the Government of the Republic of Indonesia.
- Raising funds through bilateral loan markets, including term loans, revolving loans, BA Financing, and through syndication/*club deal* mechanisms as well as through the capital market by issuing rupiah bonds.

Strategy and Challenges in 2024

Strategy:

- Funding line diversification – this strategy is implemented to diversify funding sources more optimally. It is carried out by:
 - Strengthening correspondent relationships with existing banks to increase funding limits.
 - Intensifying the establishment of correspondent relationships with new banks to gain new funding sources.
- Loan interest rate optimization – this strategy is implemented to manage interest costs more efficiently. This can be done by:
 - Maintaining revolving credit facilities that can be drawn at interest rates aligned with funding needs.
 - Using floating interest rates, taking into account the trend of declining interest rates.
- Rebalancing loan profile – this strategy aims to manage loan maturity profiles more prudently to avoid bunching of obligations at the same time. Actions taken include:
 - Negotiating interest rates on existing loans.
 - Entering the market to raise funds through bilateral instruments, stand-by facilities, and others.
 - Conducting early repayments to manage the adequacy of funding sources more optimally.

Challenges:

- Indonesia Eximbank's performance remains challenging, causing some lenders to face internal policy constraints that prevent them from providing loan facilities.
- Market fluctuations due to global instability and political events have led financial institutions to adopt a wait-and-see stance, slowing the trend of interest rate cuts.

Kinerja Treasury Tahun 2024

Dengan strategi dan rencana yang telah dilakukan, maka pada tahun 2024 pencapaian Treasury antara lain:

1. Dengan trend suku bunga yang menurun pada tahun 2024, pertumbuhan beban bunga tetap di bawah laju trend pertumbuhan suku bunga di pasar.
2. Terpenuhinya seluruh kewajiban jatuh tempo (pinjaman dan obligasi) secara tepat waktu dan tepat jumlah di tahun 2024.
 - a. Terpenuhinya kewajiban hutang pinjaman jatuh tempo valas sebesar USD330 Juta, pinjaman rupiah jatuh tempo sebesar Rp1,5 Triliun, Obligasi Rupiah Jatuh Tempo sebesar Rp6,29 Triliun, Obligasi valas sebesar USD500 juta dengan:
 - b. Diperolehnya pinjaman bilateral dalam bentuk *multicurrency*.
3. Serta pengelolaan *Treasury Asset* yang optimal untuk menjaga likuiditas yang efisien.
4. Bertambahnya jumlah bank koresponden baik dalam negeri maupun luar negeri yang dapat menerima penempatan LPEI.
5. Melakukan *reprofiling* pendanaan melalui pelunasan dipercepat sebesar USD50 juta yang seharusnya jatuh tempo pada tahun 2025.
6. Pendapatan treasury atas pengelolaan portfolio tresuri mencapai Rp494 Miliar sd 31 Des 2023.

Rencana Strategis 2025

Rencana strategis *treasury* pada tahun buku 2025 adalah sebagai berikut:

1. *Available funding lines* dikelola secara memadai dalam pengelolaan risiko likuiditas dan mendukung ekspansi pembiayaan dengan biaya yang efisien.
2. Perluasan sumber pendanaan baru tidak hanya bertumpu pada *wholesale funding* namun juga menyasar *retail funding*.
3. *Interest Income* yang optimal dan *interest expense* yang efisien dari pengelolaan portofolio *treasury*.
4. Keragaman *counterparties* untuk mendukung operasional penyaluran pembiayaan, penetrasi pasar bagi *new exporter* dan perluasan bisnis asuransi dan penjaminan.

Segmen Jasa Konsultasi

LPEI menyediakan bimbingan serta layanan konsultasi bagi bank, lembaga keuangan, eksportir, dan produsen barang ekspor, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, sebagai bagian dari upaya mendukung program ekspor nasional.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional (KD PEN), LPEI memiliki wewenang untuk menyediakan Jasa Konsultasi bagi berbagai pihak guna membantu mengatasi kendala ekspor serta mendukung penyediaan Pembiayaan Ekspor Nasional. Layanan ini mencakup aktivitas konsultasi, pemberdayaan, pengembangan kapasitas, advokasi, serta pendampingan bagi calon eksportir baru.

Treasury Performance in 2024

Based on the strategies and plans implemented, Treasury achievements in 2024 include:

1. With the downward trend in interest rates throughout 2024, interest expense growth remained below the market interest rate trend.
2. All due obligations (loans and bonds) were settled on time and in full in 2024.
 - a. Settlement of maturing debt obligations in foreign currency totaling USD 330 million, maturing loans in Rupiah of R1.5 trillion, maturing Rupiah bonds of Rp6.29 trillion, and foreign currency bonds totaling USD 500 million, supported by:
 - b. Securing bilateral loans in multicurrency format
3. Optimal management of Treasury Assets to maintain efficient liquidity.
4. An increase in the number of correspondent banks, both domestic and international, able to receive Indonesia Eximbank placements.
5. Funding reprofiling through early repayment of USD 50 million, originally due in 2025.
6. Treasury income from portfolio management reached Rp494 billion as of December 31, 2023.

Strategic Plan for 2025

The strategic treasury plan for 2025 fiscal year includes:

1. Managing available funding lines adequately to support liquidity risk management and financing expansion with efficient costs
2. Expanding funding sources beyond wholesale funding to also include retail funding
3. Optimizing interest income and ensuring efficient interest expenses through treasury portfolio management
4. Diversifying counterparties to support financing operations, expand market penetration for new exporters, and grow insurance and guarantee businesses

Advisory Services Segment

Indonesia Eximbank provides guidance and consulting services for banks, financial institutions, exporters, and producers of export goods, especially micro, small, and medium-sized enterprises, as part of its efforts to support the national export program.

In accordance with the provisions of Act No. 2 of 2009 and Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 43 of 2019 on the fundamental principles of national export financing policy in Indonesia (KD PEN), Indonesia Eximbank has the authority to provide Advisory Services to various parties in order to help overcome export challenges and support the provision of National Export Financing. These advisory services include consulting activities, empowerment, capacity enhancement, advocacy, and mentoring for potential new exporters.

Dalam menjalankan fungsi Jasa Konsultasi, LPEI memberikan bimbingan dan konsultasi kepada bank, lembaga keuangan, eksportir, serta produsen barang ekspor, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sebagai upaya mendukung program ekspor nasional. LPEI juga memiliki program unggulan yang menjadi *Unique Value Proposition*, yaitu *Coaching Program for New Exporters* (CPNE) dan *Desa Devisa*.

Melalui CPNE, LPEI merancang program khusus bagi calon eksportir baru dengan menyediakan pelatihan, pendampingan, serta berbagai kegiatan lain seperti sosialisasi, pameran, dan bimbingan kepada komunitas pelaku usaha (*cluster*) maupun individu UMKM (*non-cluster*). Program ini bertujuan mencetak eksportir baru di berbagai daerah di Indonesia dengan memberikan pendampingan intensif hingga mereka berhasil menembus pasar internasional.

Selain itu, LPEI juga dapat memberikan fasilitas kepada pelaku usaha khususnya debitur/mitra binaan LPEI dalam melakukan perluasan akses pasar guna meningkatkan bisnis mereka agar mampu "*go international*." Dalam rangka meningkatkan hal tersebut, Jasa Konsultasi LPEI juga memiliki program *Marketing Handholding*, yang bertujuan untuk perluasan akses pasar bagi para pelaku usaha ekspor.

Di samping itu, LPEI juga aktif dalam kegiatan *community development* dengan membangun *Desa Devisa* di berbagai wilayah yang memiliki komoditas unggulan. Program ini bertujuan untuk mengembangkan potensi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui peningkatan daya saing produk mereka di pasar global.

Sebagai wujud kehadiran pemerintah bagi UMKM Indonesia dalam rangka menembus pasar global, LPEI saat ini mengembangkan platform digital yang mengintegrasikan seluruh ekosistem ekspor yang bertujuan untuk mempermudah UMKM melakukan ekspor.

Strategi dan Tantangan Tahun 2024

Fokus penyediaan layanan Jasa Konsultasi LPEI di tahun 2024 masih tertuju pada upaya pembentukan komunitas ekspor, penciptaan eksportir baru, peningkatan jumlah *Desa Devisa*, dan penguatan kolaborasi dengan K/L dan SMV lainnya. Secara khusus untuk dapat mewujudkan target peningkatan jumlah *Desa Devisa* dan eksportir baru, LPEI telah menerapkan 4 (empat) strategi utama dan sejumlah inisiatif strategis turunan lainnya di tahun 2024, antara lain:

1. Research Based

- Divisi Jasa Konsultasi UKM fokus terhadap 5 (lima) komoditas dan 3 (tiga) industri;
- Divisi Jasa Konsultasi UKM fokus terhadap 10 (sepuluh) provinsi pengembangan wilayah;
- Divisi Jasa Konsultasi UKM fokus terhadap 3 (tiga) negara prioritas dan 8 (delapan) negara tujuan ekspor.

In carrying out its Advisory Services function, Indonesia Eximbank provides guidance and consultation to banks, financial institutions, exporters, and export goods producers, particularly micro, small, and medium enterprises (MSMEs), as part of its efforts to support the national export program. Indonesia Eximbank also has superior programs which has become its Unique Value Proposition, namely the *Coaching Program for New Exporters* (CPNE) and *Go Export Village*.

Through CPNE, Indonesia Eximbank designs a specialized program for prospective new exporters by providing training, mentoring, and various activities such as socialization, exhibitions, and guidance for business communities (*clusters*) as well as individual MSMEs (*non-cluster*). This program aims to develop new exporters across different regions in Indonesia by offering intensive assistance until they successfully enter international markets.

In addition, Indonesia Eximbank can also provide facilities for business actors, especially Indonesia Eximbank debtors/partners, to expand market access and enhance their prospects of going global. To support this initiative, Indonesia Eximbank's Advisory Services also offer the *Marketing Handholding* program, which aims to expand market access for export-oriented businesses.

Additionally, Indonesia Eximbank is actively involved in community development activities by establishing *Go Export Villages* in various regions that have great commodities. This program aims to develop local potential and improve the welfare of local communities by enhancing the competitiveness of their products in the global market.

As part of the government's commitment to supporting Indonesian MSMEs in penetrating global markets, Indonesia Eximbank is currently developing a digital platform that integrates the entire export ecosystem to facilitate MSMEs in conducting exports.

Strategy and Challenges in 2024

The focus of Indonesia Eximbank Advisory Services in 2024 remains concentrating on efforts to form an export community, create new exporters, increase the number of *Go Export Village*, and strengthen collaboration with other Ministries/ Institutions and SMVs. Specifically, to be able to realize the target of increasing the number of *Go Export Village* and new exporters, Indonesia Eximbank has implemented 4 (four) main strategies and a number of other derivative strategic initiatives in 2024, including:

1. Research Based

- Advisory Services Division for SME focuses on 5 (five) commodities and 3 (three) industries;
- Advisory Services Division for SME focuses on 10 (ten) regional development provinces; and
- The Advisory Services Division for SME focuses on 3 (three) priority countries and 8 (eight) export destination countries.

2. Kolaborasi

- Kolaborasi pelaksanaan CPNE bersama Kemenkeu Satu, kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan asosiasi;
- Kolaborasi pelaksanaan Desa Devisa dengan Kemenkeu Satu, kementerian/lembaga dan Debitur LPEI;
- Kolaborasi pelaksanaan Marketing Handholding kementerian/lembaga, diaspora, dan agregator ekspor.

3. Digitalisasi

- Pengembangan platform digital sebagai marketplace, pusat informasi, edukasi, dan kebutuhan pembiayaan ekspor;
- Monitoring* dan *Database* mitra binaan LPEI;
- Helpdesk* Jasa Konsultasi.

4. Sustainability

- Optimalisasi Program Kemitraan untuk Divisi Jasa Konsultasi sebagai pengusul dan Divisi Bisnis & Risk sebagai pemutus;
- Pembinaan alumni CPNE untuk mendapatkan fasilitas LPEI;
- Perhitungan *Developmental Impact*.

Implementasi seluruh strategi di atas tentunya juga sudah memperhitungkan sejumlah tantangan utama yang dihadapi LPEI dalam menjalankan program-program unggulan pada layanan Jasa Konsultasi, di antaranya:

- Pemetaan pelaku UMKM dan Wilayah yang potensial untuk dilakukan pendampingan CPNE serta Desa Devisa**
LPEI memperluas koordinasi dengan *stakeholder* terkait serta melibatkan pihak swasta yang memiliki program serupa.
- Standarisasi implementasi yang belum sinkron dalam pelaksanaan pengembangan UMKM antara stakeholder daerah dengan LPEI**
LPEI melakukan pembahasan terlebih dahulu dengan *stakeholder* daerah dan menyampaikan pro dan kontra agar dapat tercapai kesepakatan bersama;
- Pemetaan Kolaborasi Kegiatan antar stakeholder dalam pelaksanaan perluasan akses pasar**
LPEI melakukan pembahasan terlebih dahulu dengan *stakeholder* yaitu Kementerian Perdagangan dan Agregator Ekspor dalam menyampaikan sinergi kegiatan *business matching* agar dapat tercapai kesepakatan bersama;
- Monitoring atas terlaksananya program**
LPEI melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait di daerah untuk melakukan *monitoring* bersama.

2. Collaboration

- Collaboration in implementing CPNE with the One Ministry of Finance, Ministries/Institutions, Regional Government and Associations;
- Collaboration in the implementation of the Go Export Village with the One Ministry of Finance, Ministries/Institutions and Indonesia Eximbank Debtors;
- Collaboration in the implementation of Ministries/Institutions Marketing Handholding, the diaspora and export aggregator

3. Digitalization

- Development of a digital platform as a marketplace, center for information, education and export financing needs;
- Monitoring and database of Indonesia Eximbank's fostered partners;
- Consultation Services Helpdesk.

4. Sustainability

- Optimization of the Partnership Financing Program for the Advisory Services Division as the proposer and the Business & Risk Division as the decision maker;
- Guiding CPNE alumni to obtain Indonesia Eximbank facilities;
- Developmental Impact Calculation.

The implementation of all the strategies above takes into account a number of main challenges faced by Indonesia Eximbank in implementing superior programs in Advisory Services, including:

- Mapping potential MSME actors and areas for assistance with CPNE and Go Export Village**
Indonesia Eximbank expands coordination with relevant stakeholders and involves private parties who have similar programs.
- Implementation standardization is not yet synchronized in the implementation of MSME development between regional stakeholders and Indonesia Eximbank**
Indonesia Eximbank conducts discussions first with regional stakeholders and conveys the pros and cons so that a mutual agreement can be reached.
- Mapping of Collaboration Activities among Stakeholders in Market Access Expansion**
Indonesia Eximbank conducts initial discussions with stakeholders, namely the Ministry of Trade and Export Aggregators, to align the synergy of business matching activities to reach a mutual agreement.
- Monitoring the implementation of the program**
Indonesia Eximbank coordinates with relevant stakeholders in the regions to carry out joint monitoring.

Kinerja Jasa Konsultasi Tahun 2024

Dengan penerapan strategi serta perencanaan bisnis yang terarah, Jasa Konsultasi LPEI berhasil mencatatkan berbagai pencapaian sepanjang tahun buku 2024. Beberapa capaian utama yang diraih antara lain:

- Program *Coaching Program for New Exporters* (CPNE) telah diselenggarakan di 14 kota, dengan total 92 sesi pelatihan yang dihadiri oleh 1.245 UKM, serta berhasil mencetak 484 eksportir baru. Sebagai perbandingan, pada tahun buku sebelumnya, CPNE telah dilaksanakan di 10 kota dengan total 78 kali pelatihan yang dihadiri oleh 1.307 UKM dan telah menghasilkan 389 eksportir baru.
- Program *Community Development* hingga 31 Desember 2024 telah menghasilkan total 928 Desa Devisa baru yang memberikan dampak langsung maupun tidak langsung kepada 179.205 penerima manfaat. Sementara itu, di tahun buku sebelumnya, jumlah Desa Devisa yang terbentuk mencapai 739 desa dengan 63.836 penerima manfaat. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan jumlah desa yang terlibat pada program Desa Devisa, peningkatan kolaborasi bersama dengan K/L terkait serta perluasan area pendampingan Desa Devisa.
- *Marketing Handholding* hingga akhir 2024 telah melaksanakan 33 kegiatan *Business Matching*, meningkat dari tahun sebelumnya yang mencatatkan 29 pertemuan bisnis (*business matching*). Serta berpartisipasi pada pameran internasional sebanyak 6 (enam) pameran di luar negeri dan 1 (satu) pameran di Indonesia yang bertaraf internasional. Keberhasilan ini dapat terjadi atas sinergi lintas Kementerian/Lembaga (K/L) diantaranya dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bank Indonesia, dan K/L lainnya selama tahun 2024.

Rencana Strategis 2025

Program prioritas Tahun 2025 dalam rangka pertumbuhan mandat yang berkelanjutan terdiri dari:

1. Peningkatan kualitas Desa Devisa eksisting dalam rangka keberlanjutan pendampingan.
2. Pertumbuhan jumlah eksportir baru dan/atau menjaga keberlanjutan usaha ekspor.
3. Meningkatkan kualitas produk UMKM melalui program kurasi ekspor.
4. Program Kemitraan diselaraskan dengan prioritas tujuan pembangunan berkelanjutan, terintegrasi dan bersinergi dengan program-program di Kementerian Keuangan, serta mendukung bisnis inti LPEI.
5. Menciptakan digitalisasi melalui pemanfaatan platform digital LPEI yang menghadirkan kemudahan untuk UMKM melakukan ekspor.

Selain itu, dalam pelaksanaan Jasa Konsultasi dilakukan peningkatan kolaborasi terdiri dari:

1. Mengoptimalkan peran Kedutaan Besar Indonesia di seluruh dunia, dalam rangka meningkatkan *export competitiveness*.

Advisory Services Performance in 2024

With the implementation of well-directed strategies and business planning, Indonesia Eximbank's Advisory Services successfully recorded various achievements throughout the 2024 fiscal year. Some of the key accomplishments include:

- The Coaching Program for New Exporters (CPNE) was held in 14 cities, with a total of 92 training sessions attended by 1,245 SMEs and successfully producing 484 new exporters. In comparison with the previous fiscal year, CPNE was conducted in 10 cities, with 78 training sessions, attended by 1,307 SMEs, and resulting in 389 new exporters.
- The Community Development Program had established a total of 928 new Go Export Villages by December 31, 2024 which directly and indirectly benefiting 179,205 recipients. In the previous fiscal year, 739 Go Export Villages were formed, benefiting 63,836 recipients. This increase was driven by the expansion of villages collaboration with relevant ministries/agencies, and the widening of Go Export Village assistance areas.
- Marketing Handholding successfully conducted 33 Business Matching activities by the end of 2024, an increase from 29 business meetings in the previous year. Additionally, it participated in 6 (six) international exhibitions abroad and one international-level exhibition in Indonesia. These achievements were made possible through cross-ministerial and inter-agency synergies, including cooperation with the Ministry of Trade, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Cooperatives and SMEs, Bank Indonesia, and other government bodies throughout 2024.

Strategic Plan for 2025

Priority programs for 2025 in order to achieve the sustainable mandate growth consist of:

1. Enhancing the quality of existing Go Export Villages to ensure sustainable assistance.
2. Increasing the number of new exporters and/or maintaining the sustainability of export businesses.
3. Improving the quality of MSME products through export curation programs.
4. Aligning Partnership Financing Programs with sustainable development goals priorities, integrating them with programs from the Ministry of Finance, and supporting Indonesia Eximbank's core business.
5. Creating digitalization through the utilization of Indonesia Eximbank's digital platforms to facilitate exports for MSMEs.

In addition, in the implementation of Advisory Services, collaboration enhancements were conducted that include:

1. Optimizing the role of Indonesian Embassies worldwide to enhance export competitiveness.

2. Meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan K/L, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan/atau *Special Mission Vehicle* (SMV), serta pihak swasta.
3. Menjangkau lebih banyak daerah di Indonesia dalam upaya mendorong Pertumbuhan Ekspor Nasional.

Untuk mendukung penguatan peran Jasa Konsultasi dibutuhkan pengembangan Platform Digital yang mumpuni mencakup pengembangan layanan berbayar (*subscription fee*) melalui *platform digital* untuk informasi pasar ekspor, *advance e learning*, dan display produk.

Dengan terlaksananya penguatan kolaborasi dan ketersediaan *platform digital* serta adanya dukungan yang diperlukan untuk pelaksanaan program prioritas dimaksud, maka kegiatan Jasa Konsultasi akan berlangsung dengan rincian sebagai berikut :

1. Coaching Program for New Exporter (CPNE)

Program ini akan didorong dengan:

- a. Perluasan kerjasama dengan Pemerintah, baik Pusat (Kementerian/Lembaga, BI, dan lainnya) maupun Provinsi/Daerah (Dinas-dinas terkait).
- b. Menjalani Kerjasama dengan BUMN, Perbankan dan sektor swasta yang mempunyai program serupa.
- c. Memperluas Kerjasama dengan penyedia jasa pelatihan ekspor baik untuk memperluas jangkauan binaan maupun income generator Lembaga.
- d. Pengembangan system digital yang dapat diakses lebih luas untuk program-program *coaching*.

2. Marketing Handholding

- a. Komunikasi dengan *stakeholder* seperti kedutaan besar RI dan ITPC/Perwadag di negara tujuan ekspor, diaspora, serta agregator ekspor;
- b. Menentukan fokus negara tujuan ekspor dan memperluas kerjasama dengan *stakeholder* terkait (kedutaan besar RI dan ITPC/Perwadag di negara tujuan ekspor, diaspora, serta agregator ekspor);
- c. Melakukan pemetaan daftar *buyer* nasabah *existing* baik pembiayaan maupun asuransi, untuk dapat direferensikan sebagai *list* buyer mitra binaan;
- d. Memanfaatkan *platform e-commerce* baik melalui Global Marketplace maupun Platform Digital LPEI yang sedang dikembangkan.

3. Desa Devisa

Strategi peningkatan kualitas Desa Devisa eksisting melalui intensifikasi dan ekstensifikasi kolaborasi program pendampingan lanjutan dengan beberapa stakeholders sebagai berikut:

- a. Program Desa Devisa dalam rangka Kemenkeu Satu (DJKN, DJBC, DJP, PKN STAN, LPEI, SMV, BLU, dan lain lain).

2. Strengthening collaboration and synergy with Ministries/Agencies, Local Governments, State-Owned Enterprises, and/or Special Mission Vehicles (SMV), as well as the private sector.
3. Expanding outreach to more regions in Indonesia to drive National Export Growth.

In order to support the strengthening of Advisory Services role, a robust Digital Platform development is needed, including the development of paid services (*subscription fee*) through the digital platform for export market information, advanced e-learning, and product display.

With the implementation of strengthened collaboration and the availability of digital platforms, as well as the necessary support for the implementation of the aforementioned priority programs, the Advisory Services activities will proceed with the following details:

1. Coaching Program for New Exporters (CPNE)

This program will be driven by:

- a. Expanding cooperation with the Government, both Central (Ministries/Institutions, BI, and others) and Provincial/Regional (Related Services).
- b. Establishing collaboration with SOEs, banking and the private sector which have similar programs.
- c. Expanding cooperation with export training service providers both to expand the reach of the Institution and the Institution's income generator.
- d. Development of a digital system that can be accessed more widely for coaching programs.

2. Marketing Handholding

- a. Communication with stakeholders such as the Indonesian embassy and ITPC/Perwadag in export destination countries, the Diaspora and export aggregator;
- b. Determine the focus of export destination countries and expand cooperation with relevant stakeholders (Indonesian embassies and ITPC/Perwadag in export destination countries, the Diaspora and export aggregator);
- c. Mapping existing customer buyer lists for both financing and insurance, so that they can be referenced as a list of buyers for fostered partners;
- d. Utilizing e-commerce platforms, both global marketplace as well as Indonesia Eximbank's digital platforms that currently under development.

3. Go Export Village

The strategy for improving the quality of existing Go Export Village through the intensification and extensification of collaboration in the follow-up mentoring program with stakeholders:

- a. Go Export Village Program within the framework of the One Ministry of Finance (DJKN, DJBC, DJP, PKN STAN, Indonesia Eximbank, SMV, BLU, and others)

- b. Program Desa Ekspor (LPEI, Kemenko Ekuin, Kemendes).
- c. Program OVOP/One Village One Product (LPEI dan Ditjen IKMA Kemenperin)
- d. Program dengan *Stakeholders* lainnya seperti BUMN, Perbankan dan Sektor swasta yang memiliki program serupa.
- e. Praktisi ekspor yang dapat menjembatani transaksi ekspor Desa Devisa dengan *buyer* di luar negeri.

4. Platform Digital LPEI

Inisiatif baru ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapabilitas pengusaha ekspor Indonesia serta menjadi media transaksi antara *supplier* Indonesia dan *buyer* di luar negeri. Kolaborasi bersama dengan ekosistem ekspor mulai dari K/L terkait, Buyer Luar Negeri, Perusahaan Logistik, Perusahaan Sertifikasi, Verifikasi serta Inspeksi, Perbankan, dan lainnya. Terdapat fitur utama dalam platform ini dengan rincian sebagai berikut :

- a. *Coaching Service*
Coaching Service merupakan serangkaian program pelatihan Ekspor secara digital yang memberikan informasi pengetahuan dan/atau pemahaman terkait proses Ekspor yang diakomodir dalam pembelajaran *Skill Export* dan produk Ekspor yang diakomodir dalam pembelajaran melalui *on-demand video*.
- b. Eksporpedia
Eksporpedia merupakan pusat informasi digital mengenai dunia Ekspor Indonesia. Eksporpedia bertujuan untuk menjadi sumber pengetahuan dan internal terkait Ekspor dari segi istilah dan potensi Ekspor.
- c. *Business Check-up*
Business Check Up merupakan program *self-assessment* UKME berdasarkan kelengkapan kepemilikan dokumen terkait proses Ekspor dan memberikan rekomendasi layanan yang perlu diambil oleh UKME selaku *user* Komodoin sehingga memenuhi kualifikasi untuk melakukan Ekspor.
- d. *Community Room*
Community Room adalah fitur media komunikasi antara UKME dan *Account Manager* di dalam Komodoin.
- e. *Virtual Assistant*
Virtual Assistant merupakan pihak rekanan LPEI yang bertanggung jawab dalam memberikan solusi dalam proses kegiatan Ekspor yang belum terdapat di dalam Komodoin.
- f. *Global Marketplace*
fitur media pemasaran dan transaksi luar negeri yang ditujukan kepada pelaku Ekspor khususnya untuk UKME.

- b. Export Village Program (Indonesia Eximbank, Coordinating Ministry for Economic Affairs, Ministry of Village).
- c. OVOP/One Village One Product Program (Indonesia Eximbank and Directorate General of IKMA, Ministry of Industry).
- d. Programs with other stakeholders such as State-Owned Enterprises (BUMN), Banking, and the Private Sector that have similar programs.
- e. Export practitioners who can facilitate export transactions between Go Export Village and buyers at abroad.

4. Indonesia Eximbank Digital Platform

This new initiative aims to increase the understanding and capabilities of Indonesian export entrepreneurs while serving as a transaction platform between Indonesian suppliers and overseas buyers. Collaboration with the export ecosystem, including relevant ministries/agencies, foreign buyers, logistics companies, certification, verification, and inspection firms, banking institutions, and others. The platform includes key features as follows:

- a. *Coaching Service*
Coaching Service is a series of digital export training programs that provide knowledge and understanding related to the export process. It includes Skill Export learning and Export Product learning through on-demand videos.
- b. Eksporpedia
Eksporpedia is a digital information center regarding Indonesia's export industry. It serves as a knowledge center on export-related terminology and potential export opportunities.
- c. *Business Check-up*
Business Check-up is a self-assessment program for MSMEs based on the completeness of their export-related documents. It provides recommendations on the necessary services MSMEs should take to qualify for export activities.
- d. *Community Room*
Community Room is a communication media feature that connects MSMEs with Account Managers within Komodoin.
- e. *Virtual Assistant*
The Virtual Assistant is an Indonesia Eximbank's partner that responsible for providing solutions for export activities that are not yet available within Komodoin.
- f. *Global Marketplace*
A digital marketing and transaction feature aimed at exporters, particularly MSMEs.

5. Program Kemitraan

Strategi pengembangan pelayanan berupa pemberian fasilitas Program Kemitraan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan target penyaluran kepada Mitra Binaan LPEI antara lain:

- Alumni CPNE;
- Lembaga Pendamping Desa Devisa; dan
- Digital Marketing.

Segmen Penugasan Khusus Ekspor

Penugasan Khusus Ekspor (PKE) atau *National Interest Account* (NIA) merupakan mandat dari Pemerintah kepada LPEI untuk memperkuat perannya dalam mendukung pelaku usaha ekspor melalui penyediaan fasilitas pembiayaan ekspor. Melalui program ini, LPEI berperan dalam membantu eksportir nasional memasarkan produk dan jasa mereka ke pasar non-tradisional serta negara dengan tingkat *country risk* yang tinggi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 183/PMK.08/2021 tanggal 14 Desember 2021 mengenai Penugasan Khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, ruang lingkup PKE yang dikelola oleh LPEI mencakup penyediaan pembiayaan ekspor dalam bentuk *Financing*, *Insurance*, dan *Guarantee*. Program ini ditujukan bagi pelaku ekspor yang mengalami kesulitan dalam memperoleh pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan komersial, terutama untuk transaksi atau proyek yang secara komersial memiliki tantangan tinggi namun dianggap strategis oleh Pemerintah dalam mendukung kebijakan ekspor nasional.

Sampai dengan 31 Desember 2024, terdapat 8 (delapan) program PKE yang masih berjalan dan memiliki *outstanding*, sebagai berikut:

- PKE Kawasan Afrika, Asia Selatan, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Eropa Timur (PKE Kawasan)**
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 460 tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023, Pemerintah memberikan mandat kepada LPEI untuk menyalurkan pembiayaan kepada Pelaku Usaha yang memiliki penjualan ekspor ke kawasan Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Dana yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp1.600 miliar dengan jangka waktu penugasan sampai dengan Desember 2028.
- PKE Pariwisata Mandalika (PKE Mandalika)**
Berdasarkan KMK No. 387/KMK.08/2022 tanggal 23 September 2022, Pemerintah memberikan mandat kepada LPEI untuk menyalurkan pembiayaan kepada Pelaku Usaha dalam rangka pengembangan pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Dana yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp1.600 miliar dengan jangka waktu penugasan sampai dengan Desember 2024. Hingga 31 Desember 2024, telah terdapat inisiasi usulan dari K/L terkait perihal perpanjangan jangka waktu penugasan PKE Mandalika dan dalam pembahasan di Komite PKE.

5. Partnership Financing Program

The service development strategy provides Partnership Financing Program facilities to Indonesia Eximbank's Foster Partners through channel partners, including:

- CPNE Alumni
- Go Export Village Assistance Institutions
- Digital Marketing

National Interest Account Segment

National Interest Account (NIA) is a mandate from the Government to Indonesia Eximbank to strengthen its role in supporting export businesses by providing export financing facilities. Through this program, Indonesia Eximbank assists national exporters in marketing their products and services to non-traditional markets and countries that include in the high-country risk levels.

Referring to Minister of Finance Regulation (PMK) No. 183/PMK.08/2021 dated December 14, 2021, regarding Special Assignments to Indonesia Eximbank, it is stated that the scope of NIA managed by Indonesia Eximbank includes the provision of export financing in the form of Financing, Insurance, and Guarantee. This program is intended for exporters facing difficulties in obtaining financing from banks or commercial financial institutions, particularly for transactions or projects that are commercially challenging but considered strategic by the Government in supporting national export policies.

As of 31 December 2023, there are 8 (eight) NIA programs that are ongoing or with an outstanding, as listed below:

- NIA Regions Africa, South Asia, Middle East, Latin America and Eastern Europe (NIA Region)**
The government mandated Indonesia Eximbank to disburse finance to enterprises with export sales to Africa, South Asia, and the Middle East under Minister of Finance Decree (KMK) No. 460 of 2023, issued 22 December 2023. The funding for this program are Rp1,600 billion, with an assignment period up to December 2028.
- NIA Mandalika Tourism (NIA Mandalika)**
Under KMK No. 387/KMK.08/2022, issued 23 September 2022, the Government mandated Indonesia Eximbank to disburse finance to businesses in the context of growing tourism in the Mandalika Special Economic Zone. The funds allotted for this initiative are Rp1,600 billion, with an assignment period up to December 2024. As of December 31, 2024, there has been an initiation of proposals from relevant ministries and institutions (K/L) regarding the extension of the assignment period for NIA Mandalika, which is currently under discussion in the NIA Committee.

3. **PKE Usaha Kecil dan Menengah (PKE UKM)**

Berdasarkan KMK No. 37 tahun 2025, Pemerintah memberikan mandat kepada LPEI untuk menyediakan fasilitas kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Program ini difokuskan untuk mendukung sektor usaha kecil dan menengah agar tetap tumbuh dan memiliki daya saing di tataran global. Dana yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp2,00 miliar dengan jangka waktu penugasan sampai dengan Desember 2029.

4. **PKE Trade Finance (PKE TFC)**

Berdasarkan KMK No. 50 tahun 2025, Pemerintah memberikan mandat kepada LPEI untuk menyediakan fasilitas Trade Finance. Program ini difokuskan untuk mendukung sektor industri atau komoditas unggulan ekspor agar tetap tumbuh dan memiliki daya saing di tataran global. Terdapat 18 (delapan belas) komoditas/produk unggulan, antara lain produk karet, produk kopi (termasuk kopi specialty), furnitur, produk alas kaki, makanan olahan (termasuk produk ikan, udang, seafood), tekstil dan produk tekstil, produk perhiasan/permata, produk teh dan rempah-rempah, produk kayu, produk kerajinan, produk elektronika, produk kimia, produk otomotif (termasuk suku cadang kendaraan bermotor), produk dari kulit samak, mesin dan peralatan listrik, besi dan baja, produk pertanian, dan produk kertas. Dana yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp2.500 miliar dengan jangka waktu penugasan sampai dengan Desember 2029.

5. **PKE Alat Transportasi (PKE ATP)**

Berdasarkan KMK No. 406/KMK.08/2021 tanggal 21 September 2021, Pemerintah memberikan mandat kepada LPEI untuk menyalurkan pembiayaan kepada Pelaku Usaha dalam rangka mendukung pengembangan industri manufaktur dengan produk/komoditas strategis, antara lain perkapalan, perkeretaapian, kedirgantaraan, alat transportasi khusus, komponen alat transportasi, dan/atau jasa pendukung alat transportasi. Dana yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp1.500 miliar dengan jangka waktu penugasan sampai dengan Desember 2026.

6. **PKE Destinasi Pariwisata Super Prioritas (PKE DPSP)**

Berdasarkan KMK No. 272/KMK.08/2022 tanggal 5 Juli 2022, Pemerintah memberikan mandat kepada LPEI untuk menyalurkan pembiayaan kepada Pelaku Usaha dalam rangka mendukung sektor pariwisata yang menjadi fokus pemerintah, termasuk pelaku usaha yang turut melakukan pengembangan infrastruktur marina & penunjang pariwisata pada destinasi pariwisata super prioritas. Dana yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp500 miliar dengan jangka waktu penugasan sampai dengan Desember 2024.

3. **NIA Small and Medium Enterprises (NIA)**

Based on KMK No. 37 of 2025, the government has mandated Indonesia Eximbank to provide facilities to small and medium-sized enterprises (SMEs). This program is focused on supporting the growth and global competitiveness of SMEs. A fund allocation of Rp2.00 billion has been designated for this program, with the assignment period running until December 2029.

4. **NIA Trade Finance (NIA TFC)**

Based on KMK No. 50 of 2025, the government has mandated Indonesia Eximbank to provide Trade Finance facilities. This program is focused on supporting the growth and global competitiveness of key export industries or commodities. There are 18 (eighteen) priority commodities/products, including rubber products, coffee products (including specialty coffee), furniture, footwear, processed food (including fish, shrimp, seafood products), textiles and textile products, jewellery/precious stones, tea and spices, wood products, handicrafts, electronics, chemicals, automotive products (including motor vehicle spare parts), tanned leather products, machinery and electrical equipment, iron and steel, agricultural products, and paper products. A fund allocation of Rp2,500 billion has been designated for this program, with the assignment period running until December 2029.

5. **NIA Transport Equipment (NIA ATP)**

Based on KMK No. 406/KMK.08/2021, dated 21 September 2021, the government mandated Indonesia Eximbank to channel financing to businesses in order to support the development of the manufacturing industry with strategic products/commodities such as shipping, railways, aerospace, special transportation equipment, transportation equipment components, and/or transportation support services. The funds allocated for this initiative are Rp1,500 billion, with an assignment period of up to December 2026.

6. **NIA Super Priority Tourism Destinations (NIA DPSP)**

Based on KMK No. 272/KMK.08/2022 dated 5 July 2022, the Government mandated Indonesia Eximbank to channel financing to businesses in order to support the tourism sector which is the government's focus, including enterprises who are involved in developing marina & tourism supporting infrastructure in the Super Priority Tourism Destinations. The funds allocated for this program are Rp500 billion with an assignment period of up to December 2024.

Sehubungan dengan telah berakhirnya jangka waktu fasilitas program PKE DPSP pada tanggal 31 Desember 2024, program PKE DPSP tidak dilakukan perpanjangan jangka waktu fasilitas dan akan disampaikan laporan penutupan program kepada Menteri Keuangan. Adapun hingga 31 Desember 2024 masih terdapat *outstanding*.

7. PKE Industri Farmasi & Alat Kesehatan (PKE IFA)

Berdasarkan KMK No. 145 Tahun 2023 tanggal 18 April 2023, Pemerintah memberikan mandat kepada LPEI untuk menyalurkan pembiayaan kepada Pelaku Usaha dalam rangka mendukung ketahanan dan kemandirian industri farmasi, khususnya bahan baku obat, dengan tujuan menghasilkan devisa, menghemat devisa dalam negeri, dan/atau meningkatkan kapasitas produksi nasional. Dana yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp500 miliar dengan jangka waktu penugasan sampai dengan Desember 2027.

8. PKE Industri Penerbangan (PKE Industri Penerbangan)

Berdasarkan KMK No. 428/KMK.08/2020 tanggal 23 September 2020, Pemerintah memberikan mandat kepada LPEI untuk menyalurkan pembiayaan kepada Pelaku Usaha dalam rangka mendukung penguatan sektor ekonomi transportasi dan pergudangan, khususnya jasa angkutan udara dengan kriteria pelaku ekspor sesuai dengan persyaratan yang tertuang dalam KMK. Dana yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp1.000 miliar dengan jangka waktu penugasan sampai dengan Desember 2021. Sesuai jangka waktu penugasannya, PKE Industri Penerbangan sudah selesai, namun hingga 31 Desember 2023 masih memiliki *outstanding*.

Sehubungan dengan telah berakhirnya jangka waktu fasilitas program PKE Industri Penerbangan pada tanggal 31 Desember 2023, program PKE Industri Penerbangan tidak dilakukan perpanjangan jangka waktu fasilitas dan telah dilaporkan penutupan program kepada Menteri Keuangan melalui Nota Dinas Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Nomor ND-246/PR/2022 tanggal 30 Juni 2021.

Strategi dan Tantangan Tahun 2024

Fokus strategi pelaksanaan Penugasan Khusus Ekspor (PKE) pada tahun 2024 terbagi menjadi 2 (dua) besaran strategi utama, yaitu ekstensifikasi dan Intensifikasi yang mana masing-masing fokus dan *action plan*-nya dapat dijelaskan sebagai berikut:

In relation to the expiration of the NIA DPSP program facilities on December 31, 2024, the NIA DPSP program will not have its facility period extended, and a program closure report will be submitted to the Minister of Finance. As of December 31, 2024, there are still outstanding amounts.

7. NIA Pharmaceutical & Medical Device Industry (NIA IFA)

Based on KMK No. 145 of 2023 dated 18 April 2023, the Government mandated Indonesia Eximbank to channel financing to enterprises in order to support the resilience and independence of the pharmaceutical industry, especially medicinal raw materials with the aim of generating foreign exchange, saving domestic foreign exchange, and/or increasing national production capacity. The funds allocated for this program are Rp500 billion with an assignment period of up to December 2027.

8. NIA Aviation Industry (NIA Aviation Industry)

Based on KMK No. 428 / KMK.08 / 2020 dated September 23, 2020, the Government mandates LPEI to channel financing to Business Actors in order to support the strengthening of the transportation and warehousing economic sector, especially air transportation services with the criteria of exporters in accordance with the requirements contained in KMK. The funds allocated for this program amounted to Rp1,000 billion with an assignment period until December 2021. According to the assignment period, the Aviation Industry PKE has been completed, but until December 31, 2023 it still has outstanding.

In relation to the expiration of the PKE Aviation Industry program facilities on December 31, 2023, the NIA Aviation Industry program will not have its facility period extended, and the program closure has been reported to the Minister of Finance through the Ministry of Finance's Directorate General of Debt Management and Risk (DJPPR) Official Memorandum Number ND-246/PR/2022 dated June 30, 2021.

2024 Strategies and Challenges

The strategic focus for the implementation of the National Interest Account (NIA) in 2024 is divided into two main strategies: Extensification and Intensification, its respective focus and action plan explained below:

Strategi Strategy	Fokus Focus	Action Plan 2024 2024 Action Plan
Ekstensifikasi Extensification	Penambahan jumlah <i>customer base</i> (pelaku usaha yang memanfaatkan fasilitas PKE) Increase number of customer base (business actors utilizing the NIA facility).	- Kolaborasi dengan unit MIL LPEI (<i>control tower</i>) untuk melakukan <i>leads mapping</i> sehubungan dengan rencana kegiatan Sosialisasi oleh Komite PKE di Q4. - Terus mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi PKE oleh Dinas atau K/L pembina sektor terkait, baik sebagai peserta, narasumber, dan/atau personel dari LPEI dalam <i>desk/sesi coaching</i>. - Terus mendorong pemanfaatan PKE Kawasan (PKE KWS) maupun PKE lainnya, demi mendorong penetrasi market baru non-tradisional (Amerika Latin & Eropa Timur) oleh eksportir. - Collaboration with the MIL Indonesia Eximbank unit (control tower) to conduct leads mapping in relation to the planned Socialization activities by the NIA Committee in Q4. - Continuously supporting the implementation of NIA socialization activities by relevant sectoral ministries or agencies, whether as participants, speakers, and/or Indonesia Eximbank personnel in desk/coaching sessions. - Continuously promoting the utilization of NIA Regions (NIA KWS) and other NIA programs to encourage market penetration into new non-traditional markets (Latin America & Eastern Europe) by exporters.
	Mengoptimalkan ekosistem ekspor sebagai upaya akselerasi penyaluran pemanfaatan Program PKE Optimizing the export ecosystem as an effort to accelerate the utilization of the NIA Program	Pendekatan kepada <i>supplier</i> atau sistem rantai pasok debitur LPEI segmen pembiayaan korporasi melalui skema <i>value chain financing</i> dilakukan dengan tetap selektif dan tertentu. Engagement with suppliers or the supply chain system of Indonesia Eximbank corporate financing segment debtors through a value chain financing scheme is carried out selectively and specifically.
Intensifikasi Intensification	Diversifikasi atas penyaluran fasilitas Pembiayaan Ekspor tidak hanya melalui dukungan pembiayaan, namun juga dalam bentuk penjaminan dan/atau asuransi Diversification of Export Financing facility disbursement is not limited to financial support but also includes guarantees and/or insurance	- Mendorong kerjasama dengan perbankan/ lembaga jasa keuangan melalui skema <i>blended financing</i> dan <i>co-financing</i>. - Bersama Komite PKE melakukan komunikasi pro-aktif dengan perbankan/ lembaga jasa keuangan bersama dengan regulator berdasarkan regulasi terkait penjaminan kredit dalam rangka <i>leverage</i> potensi pembiayaan ekspor yang disalurkan melalui pemanfaatan penjaminan dari LPEI dalam kerangka program PKE. - Encouraging collaboration with banks/financial institutions through blended financing and co-financing schemes. - Together with NIA Committee and regulators conduct proactive communication with banks/financial institutions, in accordance with credit guarantee regulations, to leverage export financing potential by utilizing Indonesia Eximbank guarantees under the NIA program framework.
	Penyesuaian relevansi fitur produk atas masing-masing Program PKE Adjustment of product feature relevance for each NIA Program	- Terlibat aktif dalam diskusi dan penyusunan usulan penyesuaian relevansi fitur program PKE (sesuai kebutuhan) - Penambahan sektor ekonomi yang dapat didukung oleh PKE ATP yaitu sektor jasa dan konstruksi terkait alat transportasi (misalnya untuk mengakomodir pekerjaan pembangunan infrastruktur di luar negeri) - Actively participate in discussions and the preparation of proposals for adjusting the relevance of NIA program features as needed. - Expansion of economic sectors eligible for NIA ATP support, including the services and construction sectors related to transportation equipment (e.g., to accommodate infrastructure development projects abroad).
	Pengembangan Program PKE sesuai fokus pemerintah Development of the NIA Program in line with government priorities	- Penyesuaian Program PKE dengan program yang dimiliki oleh K/L atau fokus pemerintah. - Mengoptimalkan fungsi Komite Harmonisasi. - Adjusting the NIA program to align with the programs owned by ministries/agencies (K/L) or government priorities. - Optimizing the function of the Harmonization Committee.

Kinerja Penugasan Khusus Ekspor (PKE) Tahun 2024

Sepanjang pelaksanaan berbagai program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) yang dijalankan oleh LPEI sejak diterbitkannya masing-masing Keputusan Menteri Keuangan (KMK), hingga tahun buku 2024, telah dilakukan *disbursement* dengan total akumulasi sebesar Rp20,58 triliun. Sementara itu, total *outstanding* per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp4,4 triliun. Adapun rincian untuk tahun buku 2024 adalah sebagai berikut:

Performance of National Interest Account (NIA) in 2024

Throughout the implementation of various National Interest Account (NIA) programs run by Indonesia Eximbank since the issuance of each Minister of Finance Decree (KMK), as of the 2024 fiscal year, a total disbursement of Rp20.58 trillion has been made. Meanwhile, the total outstanding as of December 31, 2024, is recorded at Rp4.4 trillion. The details for the 2024 fiscal year are as follows:

Program PKE Program NIA	Berlaku Hingga Program Period	Alokasi Dana (Rp Juta) Funds Allocation (Rp Million)	Limit (Rp Juta) Plafond (Rp Million)	Disbursement (Rp Juta) Disbursement (Rp Million)	Akumulasi Disbursement (Rp Juta) Accumulated Disbursement (Rp Million)	Oustanding (Rp Juta) Outstanding (Rp Million)
PKE Kawasan (KMK No.460/2023)	31 Desember 2028 December 31, 2028	1.600.000	1.018.869	2.468.174	5.869.599	470.052
PKE Pariwisata Mandalika (KMK No.387/2022)	31 Desember 2024 December 31, 2024	1.600.000	1.188.000	-	1.354.081	1.180.364
PKE UKM (KMK No.409/2021)	31 Desember 2025 December 31, 2025	1.000.000	559.693	161.258	1.129.103	311.339
PKE Trade Finance (TFC) (KMK No.494/2022)	31 Desember 2024 December 31, 2024	1.000.000	1.720.581	4.453.293	10.515.024	899.324
PKE Alat Transportasi (ATP) (KMK No.406/2021)	31 Desember 2026 December 31, 2026	1.500.000	1.123.242	72.501	429.637	295.956
PKE DP SUPERPRIORITAS (DPSP) (KMK No.272/2022)	31 Desember 2024 December 31, 2024	500.000	500.000	-	170.000	168.000
PKE INDUSTRI FARMASI & ALKES (IFA) (KMK No.145/2023)	31 Desember 2027 December 31, 2027	500.000	400.000	117.000	117.000	108.450
PKE Industri Penerbangan (KMK No.428/2020)	31 Desember 2021 December 31, 2021	1.000.000	994.404	-	994.404	994.404
Jumlah Total		8.700.000	7.504.789	7.272.226	20.578.848	4.427.889

Rencana Strategis 2025

Fokus penugasan khusus ekspor pada tahun 2025 yaitu meningkatkan peran program PKE terhadap perekonomian nasional melalui penciptaan/penghematan devisa, dengan cara:

1. Meningkatnya dukungan fasilitas PKE terhadap 3P (pelaku, produk, pasar).
2. Diversifikasi atas penyaluran fasilitas Pembiayaan (Pembiayaan, penjaminan, dan/atau asuransi).
3. Optimalisasi utilisasi/pemanfaatan PKE yang sudah ditetapkan.

Adapun strategi yang akan dilakukan untuk mendukung fokus tersebut, yaitu :

1. Akuisisi debitur program PKE
 - a. Penambahan Jumlah *Customer Based* (kategori *survive strong & survive moderate*).
 - b. Berfokus pada produk unggulan wilayah.
 - c. Mendorong pemanfaatan PKE Kawasan (dukungan ke negara non-tradisional).
2. Efektif alokasi dana PMN PKE
 - a. Realisasi PMN PKE sebagai tambahan kapasitas LPEI dalam rangka PKE.
 - b. Pengalokasian PMN PKE untuk PKE Eksisting maupun baru.

2025 Strategic Plan

The focus of the special export assignment in 2025 is to enhance the role of the NIA program in the national economy through the creation/savings of foreign exchange, by:

1. Increased support from PKE facilities for the 3P (actors, products, markets).
2. Diversification in the distribution of financing facilities (financing, guarantees, and/or insurance).
3. Optimization of the utilization/benefits of the PKE that has already been established.

The strategies to be implemented to support this focus are as follows:

1. Acquisition of NIA Debtors
 - a. Increase the number of customer base (strong and moderate survival categories).
 - b. Focus on regional superior products.
 - c. Encourage the use of NIA Region (support for non-traditional countries).
2. Effective Allocation of PMN NIA Funds
 - a. Realize the PMN NIA as an additional capacity for Indonesia Eximbank in supporting NIA.
 - b. Allocate PMN NIA for both existing and new NIA programs.

3. Diversifikasi dukungan bagi eksportir
Dukungan fasilitas tidak hanya melalui dukungan pembiayaan, namun juga dalam bentuk penjaminan dan/atau Asuransi.
4. Perluasan kolaborasi
Peningkatan kolaborasi yang telah terjalin dengan K/L, Asosiasi, ATDAG, LJK/Perbankan, dan institusi yang relevan terus didorong melalui dukungan Komite PKE dan Komite Harmonisasi Ekspor LPEI.
5. Pengembangan program PKE
 - a. Turut mendukung pengembangan program PKE yang sesuai fokus pemerintah atau program yang dimiliki oleh K/L.
 - b. Penyesuaian fitur program PKE eksisting yang relevan dengan target market PKE & kondisi terkini.
6. Penguatan teknik mitigasi risiko
Kolaborasi dengan institusi keuangan baik di dalam maupun luar negeri yang lebih berfokus sebagai upaya mitigasi risiko dalam penyaluran PKE (*risk spreading*).

3. Diversifying Support for Exporters
 - a. Provide support not only through financing, but also through guarantees and/or insurance.
4. Expanding Collaboration
Enhance existing collaborations with ministries/agencies, associations, ATDAG, financial institutions (LJK/Perbankan), and relevant organizations, driven through support from NIA Committee and Indonesia Eximbank Export Harmonization Committee.
5. Development of NIA Programs
 - a. Support the development of NIA programs that align with government priorities or programs from other ministries.
 - b. Adjust the features of existing NIA programs to remain relevant to the target market and current conditions.
6. Strengthening Risk Mitigation Techniques
Collaborate with financial institutions, both domestic and international that more focusing on risk mitigation in the distribution of NIA (*risk spreading*).

Tinjauan Keuangan

Financial Overview

Analisis dan pembahasan keuangan berikut disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian LPEI dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dan memperoleh opini wajar dalam semua hal yang material. Laporan keuangan konsolidasian LPEI dan entitas anaknya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 disusun dan disajikan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan penyajian wajar bertujuan khusus untuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas pembiayaan dalam rangka Penugasan Khusus yang direstrukturisasi mengacu pada Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-194/MK.08/2023 tentang Penetapan Penggunaan Asumsi Tingkat Diskonto Berdasarkan Tingkat Suku Bunga setelah Restrukturisasi dalam Perhitungan CKPN. Sementara itu, untuk unsur-unsur laporan keuangan konsolidasian lainnya disusun mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

The following financial analysis and discussion has been prepared based on the Consolidated Financial Statements of LPEI and Subsidiaries for the fiscal years ended December 31, 2024 and December 31, 2023. The financial statements have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partner and obtained a fair opinion in all material respects. The consolidated financial statements of LPEI and its subsidiaries for the years ended December 31, 2024 and 2023 have been prepared and presented in accordance with the fair presentation financial reporting framework with a special purpose for the Allowance for Impairment Losses (CKPN) on restructured Special Assignment financing referring to the Letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. S-194/MK.08/2023 on the Determination of the Use of Discount Rate Assumptions Based on Interest Rates after Restructuring in the Calculation of CKPN. Meanwhile, the other elements of the consolidated financial statements are prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK).

Posisi Keuangan

Financial Position

Tabel Laporan Posisi Keuangan
Statement of Financial Position

(Dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
(In Rp million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Perubahan Change	
			Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Kas Cash	49	85	(36)	(42,35)
Giro pada Bank Indonesia Current Account with Bank Indonesia	775	553	222	40,14
Giro pada Bank – Neto Current Account with Banks - Net	1.217.286	108.256	1.109.030	1024,45
Penempatan pada Bank – Neto Placements with Banks - Net	1.371.751	7.414.248	(6.042.497)	(81,50)
Efek-Efek Securities	1.173.253	1.433.923	(260.670)	(18,18)
Tagihan Derivatif Derivative Receivable	50.674	85	50.589	59516,47
Pembiayaan dan Piutang Financing and Receivables	56.108.451	73.823.211	(17.714.760)	(24,00)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) – Pembiayaan dan Piutang Allowance for Impairment Losses - Financing and Receivables	(17.132.639)	(32.633.997)	15.501.358	(47,50)

Tabel Laporan Posisi Keuangan
Statement of Financial Position

(Dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
(In Rp million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Perubahan Change	
			Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Pajak Dibayar Dimuka Prepaid Taxes	2.827	-	-	-
Biaya Dibayar Dimuka Prepaid Expenses	23.723	20.458	3.265	15,96
Piutang Asuransi dan Penjaminan - Neto Insurance and Guarantees Receivables - Net	3.192	75.059	(71.867)	(95,75)
Aset Reasuransi Reinsurance Assets	4.056	2.933	1.123	38,29
Tagihan Akseptasi – Neto Acceptances Receivables- Net	138.126	153.230	(15.104)	(9,86)
Aset Tetap – Neto Fixed Assets - Net	907.581	914.635	(7.054)	(0,77)
Aset Pajak Tangguhan – Neto Deferred Tax Assets - Net	150.993	-	-	-
Aset Lain-Lain Other Assets	23.421	36.600	(13.179)	(36,01)
Jumlah Aset Total Assets	49.112.997	51.349.279	(2.236.282)	(4,36)

Aset

Pada akhir Desember 2024, total aset LPEI tercatat sebesar Rp49,11 triliun, mengalami penurunan 4,36% dibandingkan tahun buku sebelumnya yang mencapai Rp51,35 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada pos pembiayaan dan piutang.

Assets

As of the end of December 2024, Indonesia Eximbank's total assets amounted to Rp49.11 trillion, a decrease of 4.36% compared to the previous fiscal year, which reached Rp51.35 trillion. This decline was primarily due to a decrease in financing and receivables.

Tabel Penempatan pada Bank
Placements at the Banks

(Dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
(In Rp million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Perubahan Change	
			Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Penempatan pada Bank Placements with Banks				
Penugasan Umum General Assignment	447.500	1.432.644	(985.144)	(68,76)

Tabel Penempatan pada Bank
 Placements at the Banks

 (Dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
 (In Rp million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Perubahan Change	
			Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Penugasan Khusus National Interest Account	924.333	5.982.000	(5.057.667)	(84,55)
Jumlah Total	1.371.833	7.414.644	(6.042.811)	(81,50)

LPEI mengalokasikan penempatan pada bank ke dalam dua jenis kegiatan usaha, yakni penugasan umum dan penugasan khusus. Sebelum dikurangi cadangan kerugian, penurunan masing-masing sebesar Rp985,14 miliar dan Rp5,06 triliun di tahun buku 2024, total penempatan pada bank untuk kedua kategori tersebut tercatat sebesar Rp447,50 miliar dan Rp924,33 miliar. Dibandingkan tahun sebelumnya, masing-masing mengalami penurunan sebesar 68,76% dan 84,55% dari posisi akhir Desember 2023 yang mencapai Rp1,43 triliun dan Rp5,98 triliun.

Indonesia Eximbank allocated its placements in banks into two types of business activities, namely general assignment and special assignment. Before deducting the provision for impairment losses, the decrease in each amounted to Rp985.14 billion and Rp5.06 trillion in the fiscal year 2024. The total bank placements for these two categories were recorded at Rp447.50 billion and Rp924.33 billion, respectively. Compared to the previous year, each experienced a decrease of 68.76% and 84.55% from the December 2023 year-end positions of Rp1.43 trillion and Rp5.98 trillion.

Tabel Penempatan di Bank
 Placements at the Banks

 (Dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
 (In Rp million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Perubahan Change	
			Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Deposito berjangka - Rupiah Time Deposits - Rupiah	1.315.500	6.614.000	(5.298.500)	(80,11)
Deposito berjangka - Dollar AS Time Deposits - US Dollar	56.333	-	56,333	100.00%
Call Money - Dollar AS Call Money - US Dollar	-	800.644	(800,644)	(100.00%)
Jumlah Total	1.371.833	7.414.644	(6.042.811)	(81,50)

Deposito berjangka dalam mata uang Rupiah mengalami penurunan sebesar 80,11% dari Rp6,61 triliun pada akhir Desember 2023 menjadi Rp1,32 triliun per 31 Desember 2024. Sementara itu, penempatan dalam Dollar AS, juga tercatat mengalami penurunan 92,96% dari Rp800,64 miliar di akhir tahun buku 2023 menjadi Rp56,33 miliar pada tahun buku 2024.

Time deposits in Rupiah Currency decreased by 80.11% from Rp6.61 trillion at the end of December 2023 to Rp1.32 trillion as of December 31, 2024. Meanwhile, the placement in US Dollars, was also recorded to have decreased by 92.96% from Rp800.64 billion at the end of fiscal year 2023 to Rp56.33 billion in fiscal year 2024.

LPEI mengevaluasi penempatan pada bank secara kolektif dengan mempertimbangkan analisis kuantitatif dan kualitatif, termasuk pengalaman historis serta penilaian kredit yang dilengkapi dengan informasi proyeksi ke depan.

Manajemen meyakini bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dibentuk mencukupi untuk mengantisipasi potensi kerugian akibat tidak tertagihnya penempatan pada bank lain.

Selain itu, terdapat penempatan pada bank yang dijadikan jaminan per 31 Desember 2024, maupun pada tahun buku sebelumnya, 2023.

Indonesia Eximbank evaluates placements in banks collectively by considering both quantitative and qualitative analyses, including historical experience and credit assessments supplemented by forward-looking information.

The management believes that the allowance for impairment losses that has been established is adequate to anticipate potential losses due to uncollectible placements in other banks.

In addition, there were bank placements used as collateral as of December 31, 2024, as well as in the previous fiscal year, 2023

Pembiayaan dan Piutang

Financing and Receivables

Tabel Pembiayaan dan Piutang Penugasan Umum
Financing and Receivables

(Dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
(In Rp million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Perubahan Change	
			Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Penugasan Umum General Assignment				
Pembiayaan dan piutang yang diberikan Financing and Receivables	44.851.097	59.935.321	(15.084.224)	(25,17)
Pembiayaan dan piutang syariah yang diberikan Financing and Shariah Receivables	7.152.949	9.937.139	(2.784.190)	(28,02)
Sub -Total Sub-Total	52.004.046	69.872.460	(17.868.414)	(25,57)
Penugasan Khusus National Interest Account				
Pembiayaan dan piutang yang diberikan Financing and Receivables	4.102.685	3.949.482	153.203	3,88
Pembiayaan dan piutang syariah yang diberikan Financing and Shariah Receivables	1.720	1.269	451	35,54
Sub -Total Sub-Total	4.104.405	3.950.751	153.654	3,89
Jumlah Total	56.108.451	73.823.211	(17.714.760)	(24,00)

Secara kumulatif, jumlah pembiayaan dan piutang LPEI sebelum cadangan kerugian penurunan (*gross*) mengalami penurunan sebesar 24% sehingga dibukukan menjadi Rp56,11 triliun di akhir tahun 2024 dibandingkan posisi yang sama pada periode sebelumnya senilai Rp73,82 triliun. Penurunan ini sejalan dengan berkurangnya porsi pembiayaan penugasan umum sebesar 25,57% di akhir Desember 2024 sehingga tercatat menjadi Rp52,00 triliun.

Di sisi lain, LPEI membukukan cadangan kerugian penurunan nilai untuk pembiayaan dan piutang mencapai Rp17,13 triliun per 31 Desember 2024 dan Rp32,63 triliun pada tahun sebelumnya.

Cumulatively, the total financing and receivables of Indonesia Eximbank before allowance for impairment losses (*gross*) decreased by 24%, recorded at Rp56.11 trillion at the end of 2024 compared to Rp73.82 trillion in the same period of the previous year. This decline is in line with the reduction in the portion of general mandate financing by 25.57% at the end of December 2024, resulting in a recorded amount of Rp52.00 trillion.

On the other hand, Indonesia Eximbank recorded an allowance for impairment losses on financing and receivables amounting to Rp17.13 trillion as of December 31, 2024, compared to Rp32.63 trillion in the previous year.

Tabel Non Performing Financing (NPF)
Non Performing Financing (NPF)

(Dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
(In Rp million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Perubahan Change	
			Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Lancar Current	32.886.012	33.990.912	(1.104.900)	(3,25)
Dalam perhatian khusus Special mention	6.912.467	7.734.501	(822.034)	(10,63)
Kurang lancar Substandard	3.934.897	7.068.091	(3.133.194)	(44,33)
Diragukan Doubtful	979.269	5.292.395	(4.313.126)	(81,50)
Macet Loss	11.395.806	19.737.312	(8.341.506)	(42,26)
Jumlah Total	56.108.451	73.823.211	(17.714.760)	(24,00)
Non Performing Finance (NPF)	16.309.972	32.097.798	(15.787.826)	(49,19)
NPF (%) - bruto NPF (%) - gross	29,07%	43,48%		

Dari aspek kolektabilitas, rasio pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*) bruto tercatat sebesar 29,07% di akhir tahun buku 2024, mengalami perbaikan dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yang sebelumnya berada di level 43,48%. Perbaikan ini terutama disebabkan oleh turunnya nilai pembiayaan bermasalah dan hapus buku di tahun 2024.

In terms of collectability, the gross Non-Performing Financing (NPF) ratio stood at 29.07% at the end of the 2024 fiscal year, showing a increase compared to the position as of December 31, 2023, which was previously at 43.48%. Was mainly due to a decrease in non-performing financing and write-offs in 2024.

Tabel Non Performing Financing (NPF) Neto
Non Performing Financing (NPF) Nett

(Dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
(In Rp million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Perubahan Change	
			Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Lancar Current	32.374.844	33.252.898	(878.054)	(2,64)
Dalam perhatian khusus Special mention	4.065.525	4.584.243	(518.718)	(11,32)
Kurang lancar Substandard	1.149.253	2.095.683	(946.430)	(45,16)
Diragukan Doubtful	186.843	1.256.390	(1.069.547)	(85,13)
Macet Loss	1.199.347	-	-	-
Jumlah Total	38.975.812	41.189.214	(2.2134,02)	(5,37)
NPF Neto	2.535.443	3.352.073	(816.630)	(24,36)
NPF (%) - neto NPF (%) - net	4,52%	4,54%		

Rasio NPF neto, yang telah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai, turut mengalami perbaikan. Total pembiayaan dan piutang bermasalah neto tercatat sebesar Rp2,54 triliun, turun 24,36% dibandingkan tahun buku sebelumnya yang mencapai Rp3,35 triliun. Penurunan ini berdampak pada rasio NPF neto yang membaik dari 4,54% di tahun buku 2023 menjadi 4,52% di akhir tahun buku 2024.

The net NPF (Non-Performing Financing) ratio, which is calculated after deducting the allowance for impairment losses, also showed an improvement. The total net non-performing financing and receivables amounted to Rp2.54 trillion, down 24.36% compared to the previous fiscal year's Rp3.35 trillion. This decrease contributed to the improvement in the net NPF ratio from 4.54% in the 2023 fiscal year to 4.52% at the end of 2024.

Tabel Penyaluran Pembiayaan dan Piutang ke Sektor Usaha
Distribution Of Financing And Receivables to Business Sectors

(Dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
(In Rp million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024		2023		Perubahan	
	Nominal	Persentase (%) Percentage (%)	Nominal	Persentase (%) Percentage (%)	Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Perindustrian Manufacturing	25.339.102	45,16	36.391.482	49,30	(11.052.380)	(30,37)
Pertanian, perburuan dan sarana pertanian Agriculture, hunting and agriculture services	11.676.803	20,81	13.240.963	17,94	(1.564.160)	(11,81)
Konstruksi Construction	2.062.908	3,68	2.056.641	2,79	6.267	0,30
Listrik, gas, dan air Electricity, gas, and water	613.955	1,09	1.181.055	1,60	(567.100)	(48,02)
Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi Transportation, warehousing and telecommunications	3.069.281	5,47	4.788.918	6,49	(1.719.637)	(35,91)

Tabel Penyaluran Pembiayaan dan Piutang ke Sektor Usaha

Distribution Of Financing And Receivables to Business Sectors

 (Dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
 (In Rp million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024		2023		Perubahan	
	Nominal	Persentase (%) Percentage (%)	Nominal	Persentase (%) Percentage (%)	Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Restoran dan hotel Restaurant and hotel	2.361.391	4,21	3.338.871	4,52	(977.480)	(29,28)
Jasa dunia usaha Business services	2.452.706	4,37	2.995.214	4,06	(542.508)	(18,11)
Pertambangan Mining	8.140.606	14,51	9.349.915	12,67	(1.209.309)	(12,93)
Jasa-jasa sosial/ masyarakat Social, services/society	15.823	0,03	34.074	0,05	(18.251)	(53,56)
Lain-lain Others	375.876	0,67	446.078	0,60	(70.202)	(15,74)
Jumlah Total	56.108.451	100,00%	73.823.211	100,00	(17.714.760)	(24,00)

LPEI menyalurkan pembiayaan dan piutang ke berbagai sektor usaha dengan porsi terbesar kepada sektor perindustrian manufaktur yang selama dua tahun terakhir masing-masing sebesar 45,16% dan 49,30% di tahun buku 2024 dan 2023. Sektor lain yang memiliki kontribusi terbesar adalah pertanian, perburuan, dan sarana pertanian dengan kontribusi 20,81%, serta sektor pertambangan 14,51% di tahun buku 2024. Dari kedua sektor tersebut, sektor perindustrian dan pertanian, perburuan dan sarana pertanian masing-masing mengalami penurunan 30,37% dan 11,81% menjadi Rp25,34 triliun dan Rp11,68 triliun.

Indonesia Eximbank disbursed financing and receivables across various business sectors, with the largest portion allocated to the manufacturing industry, which accounted for 45.16% and 49.30% in the 2024 and 2023 fiscal years, respectively. Other major contributing sectors included agriculture, hunting, and agricultural facilities with a contribution of 20.81%, and the mining sector with 14.51% in the 2024 fiscal year. Among these two sectors, the manufacturing industry and agriculture, hunting, and agricultural facilities sectors experienced a decline of 30.37% and 11.81%, respectively, to Rp25.34 trillion and Rp11.68 trillion.

Tabel Pembiayaan dan Piutang Bermasalah

Table of Financing and Non-Performing Receivables

 (Dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
 (In Rp million, unless otherwise stated)

Uraian Description	Gross		Perubahan Change	
	2024	2023	Nominal	Persentase (%) Percentage
Perindustrian Manufacturing	8.350.853	20.410.523	(12.059.670)	(59,09)
Pertanian, perburuan dan sarana pertanian Agriculture, hunting and agriculture services	3.057.654	4.719.281	(1.661.627)	(35,21)
Konstruksi Construction	35.203	68.175	(32.972)	(48,37)
Listrik, gas, dan air Electricity, gas, and water	416.619	429.295	(12.676)	(2,95)
Pengangkutan, pergudangan dan Telekomunikasi Transportation, warehousing and telecommunications	206.972	529.972	(323.000)	(60,95)

Tabel Pembiayaan dan Piutang Bermasalah
Table of Financing and Non-Performing Receivables

(Dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
(In Rp million, unless otherwise stated)

Uraian Description	Gross		Perubahan Change	
	2024	2023	Nominal	Persentase (%) Percentage
Perdagangan, Restoran dan hotel Trade, Restaurants, and Hotels	1.181.365	1.983.165	(801.800)	(40,43)
Jasa dunia usaha Business services	313.926	441.647	(127.721)	(28,92)
Pertambangan Mining	2.609.567	3.357.288	(747.721)	(22,27)
Jasa-jasa sosial/masyarakat Social, services/society	15.823	34.074	(18.251)	(53,56)
Lain-lain Others	121.990	124.378	(2.388)	(1,92)
Jumlah Pembiayaan Bermasalah Total Non Performing Financing	16.309.972	32.097.798	(15.787.826)	(49,19)
NPF (%) - Bruto	29,07%	43,48%		

Total pembiayaan dan piutang bermasalah yang tercatat berdasarkan sektor usaha mencapai Rp16,31 triliun per 31 Desember tahun buku 2024, mengalami penurunan 49,19% dibandingkan dengan tahun buku sebelumnya yang sebesar Rp32,10 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 29,07% dan 43,48% dari total pembiayaan dan piutang (*gross*) yang disalurkan oleh LPEI ke seluruh sektor usaha, yakni sebesar Rp56,11 triliun di tahun buku 2024 dan Rp73,82 triliun di tahun buku 2023.

The total recorded non-performing financing and receivables by business sector reached Rp16.31 trillion as of December 31 of the 2024 fiscal year, marking a 49.19% decrease compared to the previous fiscal year's figure of Rp32.10 trillion. This amount represents 29.07% and 43.48% of the total (*gross*) financing and loans disbursed by Indonesia Eximbank across all business sectors, amounting to Rp56.11 trillion in the 2024 fiscal year and Rp 73.82 trillion in the 2023 fiscal year, respectively.

Liabilitas

Liabilities

Tabel Liabilitas
Liabilities

(Dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
(In Rp million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Perubahan Change	
			Nominal	Persentase (%) Percentage
Liabilitas Segera Current Liabilities	17.283	69.131	(51.848)	(75,00)
Liabilitas Devisa Hasil Ekspor Foreign Exchange Export Proceeds Liabilities	245.116	120.928	124.188	102,70
Liabilitas Akseptasi Acceptances Payable	138.647	153.852	(15.205)	(9,88)
Utang Pajak Taxes Payable	8.728	16.279	(7.551)	(46,38)
Efek-Efek Utang yang Diterbitkan – Neto Debt Securities Issued - Net	8.140.064	21.981.313	(13.841.249)	(62,97)
Liabilitas Derivatif Derivatives Payable	49.939	1.477	48.462	3281,11

Tabel Liabilitas
 Liabilities

 (Dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
 (In Rp million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Perubahan Change	
			Nominal	Persentase (%) Percentage
Pinjaman yang Diterima Fund Borrowings	24.863.560	18.352.943	6.510.617	35,47
Utang Asuransi Insurance Payable	2.692	5.534	(2.842)	(51,36)
Utang Penjaminan Guarantee Payable	1.738	18.427	(16.689)	(90,57)
Liabilitas Asuransi Insurance Liabilities	9.507	6.672	2.835	42,49
Estimasi Klaim Penjaminan Estimated Guarantee Claim	444.847	448.911	(4.064)	(0,91)
Liabilitas Imbalan Kerja Liability for Employee Benefits	139.268	142.522	(3.254)	(2,28)
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	2.949	5.337	(2.388)	(44,74)
Liabilitas Lain-Lain Other Liabilities	1.056.029	1.264.486	(208.457)	(16,49)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	35.120.367	42.587.812	(7.467.445)	(17,53)

Per 31 Desember 2024, liabilitas LPEI tercatat sebesar Rp35,12 triliun, mengalami penurunan 17,53% dibandingkan tahun buku sebelumnya yang mencapai Rp42,59 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan nilai efek-efek utang yang diterbitkan.

As of December 31, 2024, Indonesia Eximbank's liabilities were recorded at Rp35.12 trillion, reflecting a 17.53% decrease compared to the previous fiscal year, which stood at Rp42.59 trillion. This decline was primarily due to a decrease in the value of issued debt securities.

Ekuitas

Equity

Tabel Ekuitas
 Equity

 (Dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
 (In Rp million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Perubahan Change	
			Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Kontribusi modal Pemerintah Government Capital Contribution				
Penugasan Umum General Assignment	23.589.123	23.589.123	-	-
Penugasan Khusus National Interest Account	19.013.308	14.013.308	5.000.000	35,68
	42.602.431	37.602.431	5.000.000	13,30

Tabel Ekuitas
Equity

(Dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
(In Rp million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Perubahan Change	
			Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Kontribusi modal Pemerintah Government Capital Contribution				
Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah pajak tangguhan Unrealized loss of financial assets at fair value through other comprehensive income net of deferred tax	(22.953)	(23.492)	539	(2,29)
Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Pasti - Setelah Pajak Tangguhan Remeasurement of defined benefit obligation. net of deferred tax	148.347	150.248	(1.901)	(1,27)
Saldo Laba Retained earnings				
Telah Ditentukan Penggunaannya Appropriated				
Cadangan Umum General reserve	322.161	322.161	-	-
Cadangan Tujuan Specific reserve	758.235	758.235	-	-
	1.080.396	1.080.396	-	-
Belum ditentukan penggunaannya Unappropriated	(29.815.592)	(30.048.117)	232.525	(0,77)
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interest	1	1	-	-
Jumlah Ekuitas Total Equity	13.992.630	8.761.467	5.231.163	59,71

Pada akhir tahun buku 2024, jumlah ekuitas LPEI tercatat sebesar Rp13,99 triliun, mengalami kenaikan 59,71% dibandingkan tahun buku sebelumnya yang sebesar Rp8,76 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh tambahan kontribusi modal pemerintah sebesar Rp5 Triliun.

At the end of the 2024 fiscal year, Indonesia Eximbank's total equity was recorded at Rp13.99 trillion, representing a 59.71% increase compared to the previous fiscal year's figure of Rp8.76 trillion. This increase was primarily driven by an additional capital contribution from the government amounting to Rp5 trillion.

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Profit Loss and Other Comprehensive Income

Tabel Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Consolidated Statements of Profit Loss and Other Comprehensive Income

 (Dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
 (In Rp million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Perubahan Change	
			Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Pendapatan dan Beban Operasional Income and Expenses from Operations				
Pendapatan Bunga dan Usaha Syariah Interest Income and Income from Sharia	3.376.912	4.052.033	(675.121)	(16,66)
Pendapatan Usaha dari Ujrah Income from Ujrah	6.904	64	6.840	10687,50
Beban Bunga Interest Expense	(2.656.651)	(3.128.893)	472.242	15,09
Pendapatan Bunga dan Usaha Syariah – Neto Interest Income and Income from Sharia - Net	727.165	923.204	(196.039)	(21,23)
Pendapatan Operasional Lainnya Other Operating Income				
Pendapatan dari Asuransi Income from Insurance	16.469	21.675	(5.206)	(24,02)
Premi Reasuransi Reinsurance Premiums	(7.498)	(9.089)	1.591	17,50
Kenaikan (Penurunan) pada Liabilitas Asuransi increase (Decrease) in Insurance Liabilities	(2.551)	1.059	(3.610)	(340,89)
(Kenaikan) Penurunan pada Aset Reasuransi (increase) Decrease In Reinsurance Assets	998	(494)	1.492	302,02
Beban Klaim Asuransi dan Lainnya Claim Expense from Insurance and Other	(5.626)	(933)	(4.693)	(503,00)
Pendapatan Dari Penjaminan Income from Guarantee	65.792	90.527	(24.735)	(27,32)
Keuntungan Transaksi Mata uang asing – Neto Profit on Foreign Exchange transactions - net	4.865	6.828	(1.963)	(28,75)
Provisi dan Komisi Selain dari Pembiayaan dan Piutang Non financing and receivables related fees and commission	36.938	52.779	(15.841)	(30,01)
Keuntungan penjualan efek-efek profit on sale of marketable securities	500	12.139	(11.639)	(95,88)
Lain-lain Others	143.122	84.586	58.536	69,20
Pendapatan Operasional Lainnya - Neto Total Other Operating Income - Net	253.009	259.077	(6.068)	(2,34)
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan Provision for Impairment Losses on Financial Assets	(277.774)	(16.932.394)	16.654.620	98,36

Tabel Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Consolidated Statements of Profit Loss and Other Comprehensive Income

(Dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
(In Rp million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Perubahan Change	
			Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Penyisihan Kerugian Estimasi Klaim Penjaminan Provision for Impairment Losses on Estimated Guarantee Claim	1.185	2.994	(1.809)	(60,42)
Beban Operasional Lainnya Other Operating Expenses				
Gaji dan Tunjangan Salaries and benefits	(437.532)	(482.289)	44.757	9,28
Umum dan Administrasi General and administrative	(233.520)	(299.239)	65.719	21,96
Lain-Lain Others	(14.037)	(12.505)	(1.532)	(12,25)
Jumlah Beban Operasional Lainnya Total Other Expenses	(685.089)	(794.033)	108.944	13,72
Lab a (Rugi) Operasional Profit (Loss) from Operations	18.496	(16.541.152)	16.559.648	100,11
Pendapatan Bukan Operasional - Neto Non-Operating Income – Net	63.420	10.488	52.932	504,69
Lab a (Rugi) Sebelum Beban Pajak Profit (Loss) Before Tax Expense	81.916	(16.530.664)	16.612.580	100,50
Manfaat (Beban) Pajak Tax Benefit (Expense)	150.609	(1.583.663)	1.734.272	109,51
Lab a (Rugi) Tahun Berjalan Profit (Loss) for the Year	232.525	(18.114.327)	18.346.852	101,28
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain – Neto Setelah Pajak Other Comprehensive Income (Loss) - Net of Tax	(1.362)	7.549	(8.911)	(118,04)
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Profit (Loss) for the Year	231.163	(18.106.778)	18.337.941	101.28
Total penghasilan (rugi) Tahun Berjalan yang diatribusikan kepada: Total income (loss) for the Year Attributable to:				
Pemilik entitas induk Equity holder of the parent entity	232.525	(18.114.327)	18.346.852	101,28
Kepentingan non-pengendali Non controlling interest	-	-	-	-
Jumlah penghasilan (rugi) Komprehensif yang diatribusikan kepada: Total Comprehensive income (loss) Attributed to:				
Pemilik entitas induk Equity holder of the parent entity	231.163	(18.106.778)	18.337.941	101,28
Kepentingan non-pengendali Non controlling interest	-	-	-	-

Pada tahun buku 2024, LPEI mencatatkan penurunan pendapatan bunga dan usaha syariah sebesar 16,66%, mencapai Rp3,38 triliun, dibandingkan dengan Rp4,05 triliun pada tahun buku sebelumnya, 2023.

In the 2024 fiscal year, Indonesia Eximbank recorded a 16.66% decrease in interest income and income from sharia, reaching Rp3.38 trillion, compared to Rp4.05 trillion in the previous fiscal year, 2023.

Pendapatan Bunga dan Usaha Syariah

Interest Income and Income From Sharia

Tabel Pendapatan Bunga dan Usaha Syariah
Interest Income and Income From Sharia

(Dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
(In Rp million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Perubahan Change	
			Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Penugasan Umum General Assignment				
Pembiayaan dan piutang Financing and receivables	2.417.052	2.966.022	(548.970)	(18,51)
Pendapatan Usaha Syariah Income from sharia	390.492	488.450	(97.958)	(20,05)
Penempatan pada bank Placements with banks	164.139	168.267	(4.128)	(2,45)
Efek-efek Securities	10.394	18.860	(8.466)	(44,89)
Giro pada bank Current accounts with banks	82.525	2.117	80.408	3798,21
Sub-total Sub-total	3.064.602	3.643.716	(579.114)	(15,89)
Penugasan Khusus National Interest Account				
Deposito berjangka Time deposit	94.833	212.983	(118.150)	(55,47)
Pembiayaan dan piutang Financing and receivables	155.706	108.621	47.085	43,35
Pendapatan Usaha Syariah Income from sharia	47	141	(94)	(66,67)
Efek-efek Securities	60.226	83.971	(23.745)	(28,28)
Giro pada bank Current accounts with banks	1.498	2.601	(1.103)	(42,41)
Sub-total Sub-total	312.310	408.317	(96.007)	(23,51)
Jumlah Total	3.376.912	4.052.033	(675.121)	(16,66)

Pada tahun buku 2024, kontribusi pendapatan bunga dan usaha syariah berasal dari penugasan umum, yang menyumbang sebesar 90,75% atau senilai Rp3,06 triliun, mengalami penurunan 15,89% dari tahun buku sebelumnya yang mencapai Rp3,64 triliun. Sementara itu, pendapatan dari penugasan khusus memberikan kontribusi sekitar 9,25%, dengan nilai mencapai Rp312,31 miliar, mengalami penurunan 23,51% dibandingkan tahun buku 2023 yang sebesar Rp408,32 miliar. Selain itu, pendapatan dari pembiayaan dan piutang juga mencatatkan penurunan 16,32% menjadi Rp2,57 triliun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp3,07 triliun. Faktor-faktor tersebut menjadi salah satu pendorong penurunan pendapatan bunga dan usaha syariah LPEI di tahun buku 2024.

Beban Bunga

In fiscal year 2024, the contribution of interest income and sharia business came from general assignments, which contributed 90.75% or Rp3.06 trillion, a decrease of 15.89% from the previous fiscal year which reached Rp3.64 trillion. Meanwhile, income from special assignments contributed around 9.25%, with a value of Rp312.31 billion, experiencing a 23.51% decrease compared to the 2023 financial year which amounted to Rp408.32 billion. In addition, revenue from financing and receivables also recorded a decrease of 16.32% to Rp2.57 trillion compared to the previous year of Rp3.07 trillion. These factors are one of the drivers of the decline in interest income and LPEI's sharia business in the 2024 financial year.

Interest Expense

Tabel Beban Bunga
Interest Expense

(Dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
(In Rp million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Perubahan Change	
			Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Efek-efek utang yang diterbitkan Debt securities issued	1.078.628	1.690.105	(611.477)	(36,18)
Pinjaman yang diterima Fund borrowing	1.578.023	1.438.788	139.235	9,68
Jumlah Total	2.656.651	3.128.893	(472.242)	(15,09)

Beban bunga LPEI pada tahun buku 2024 juga mengalami penurunan sebesar 15,09% atau mencapai Rp2,66 triliun, menurun dari Rp3,13 triliun pada tahun buku sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya beban efek-efek utang yang diterbitkan.

Indonesia Eximbank's operating expenses in the 2024 fiscal year also decreased by 15.09%, amounting to Rp2.66 trillion, down from Rp3.13 trillion in the previous fiscal year. This decrease was mainly due to the decline in expenses related to issued debt securities.

Pendapatan Operasional Lainnya

Pada tahun buku 2024, pendapatan operasional lainnya tercatat sebesar Rp253,01 miliar, menurun 2,34% dibandingkan tahun buku sebelumnya yang sebesar Rp259,08 miliar. Penurunan ini terutama didorong oleh penurunan pendapatan dari penjaminan.

Other Operating Income

In the 2024 fiscal year, other operating income was recorded at Rp253.01 billion, a decrease of 2.34% compared to Rp259.08 billion in the previous fiscal year. This decline was primarily driven by a decrease in income from guarantee services.

Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

LPEI mencatat pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan pada tahun buku 2024 mencapai Rp277,77 miliar atau menurun 98,36% dari Rp16,93 triliun di tahun buku sebelumnya. Penurunan CKPN ini dipengaruhi oleh turunnya pembiayaan bermasalah di tahun 2024.

Provision for Impairment Losses on Financial Assets

Indonesia Eximbank recorded the establishment of Allowance for Impairment Losses (CKPN) on financial assets amounting to Rp277.77 billion in the 2024 fiscal year, a significant decrease of 98.36% from Rp16.93 trillion in the previous fiscal year. This decline in CKPN was influenced by the reduction in non-performing loans in 2024.

Beban Operasional Lainnya

Sepanjang tahun buku 2024, beban operasional lainnya mengalami penurunan 13,72% menjadi Rp685,09 miliar dari Rp794,03 miliar pada tahun buku sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan biaya umum dan administrasi.

Laba (Rugi) Operasional

Laba operasional tercatat sebesar Rp18,50 miliar, jauh lebih baik dibandingkan kerugian Rp16,54 triliun pada tahun sebelumnya. Meningkatnya laba operasional utamanya disebabkan penurunan pembentukan beban CKPN.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

LPEI membukukan peningkatan laba tahun berjalan yang signifikan pada tahun buku 2024, mencapai Rp232,53 miliar atau naik 101,28% dari kerugian Rp18,11 triliun pada tahun buku sebelumnya. Faktor utama yang berkontribusi terhadap kenaikan ini adalah manfaat pajak dan peningkatan pendapatan non operasional.

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Dengan mempertimbangkan rugi komprehensif lain – neto setelah pajak yang tercatat sebesar Rp1,36 miliar, total penghasilan komprehensif tahun berjalan LPEI pada tahun buku 2024 mencapai Rp231,16 miliar. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan rugi tahun buku sebelumnya yang sebesar Rp18,11 triliun.

Arus Kas

Other Operating Expenses

Throughout the 2024 fiscal year, other operating expenses decreased by 13.72% to Rp685.09 billion, down from Rp794.03 billion in the previous fiscal year. This decline was due to a reduction in general and administrative expenses.

Profit (Loss) From Operations

Profit from operations was recorded at Rp18.50 billion, a significant improvement compared to a loss of Rp16.54 trillion in the previous year. This increase in profit from operations was driven by decrease in the allowance for impairment losses.

Profit (Loss) for the Year

Indonesia Eximbank recorded a significant increase in profit for the year in the 2024 fiscal year, reaching Rp232.53 billion an increase of 101.28% from a loss of Rp18.11 trillion in the previous fiscal year. The main factors contributing to this increase were tax benefits and higher non-operating income.

Comprehensive Income (Loss) for the Year

Taking into account other comprehensive loss – net of tax, which was recorded at Rp1.36 billion, Indonesia Eximbank's total comprehensive income for the 2024 fiscal year reached Rp231.16 billion. This marks an improvement compared to the comprehensive loss of Rp18.11 trillion in the previous fiscal year.

Cash Flow

Tabel Arus Kas Konsolidasian
Consolidated Statement of Cash Flow

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Perubahan Change	
			Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Arus Kas dari atau (untuk) Aktivitas Operasi Cash Flows from (or for) Operating Activities	2.983.234	8.547.359	(5.564.125)	(65,10)
Arus Kas dari atau (untuk) Aktivitas Investasi Cash Flows from (or for) Investing Activities	188.283	494.494	(306.211)	(61,92)
Arus Kas dari atau (untuk) Aktivitas Pendanaan Cash Flows from (or for) Financing Activities	(8.109.975)	(14.267.016)	6.157.041	(43,16)
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada kas dan setara kas Effect of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents	4.865	6.828	(1,963)	(28,75)
Penurunan Neto Kas dan Setara Kas Nett decrease in Cash and Cash Equivalents	(4.933.593)	(5.218.335)	284.742	5,46
Kas dan Setara Kas awal Tahun Cash and Cash Equivalent at Beginning of Year	7.523.540	12.741.875	(5.218.335)	(40,95)
Kas dan Setara Kas akhir Tahun Cash and Cash Equivalent at End of Year	2.589.947	7.523.540	(4.933.593)	(65,58)

Arus Kas dari atau (untuk) Kegiatan Operasi

Pada akhir Desember 2024, LPEI mencatat kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp2,98 triliun, menurun (65,10%) dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp8,55 triliun. Penyebab penurunan ini adalah penurunan pelunasan pembiayaan dan piutang syariah.

Arus Kas dari atau (untuk) Aktivitas Pendanaan

Per 31 Desember 2024, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan mengalami penurunan sebesar 43,16%, mencapai Rp8,11 triliun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp14,27 triliun. Penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan pembayaran pinjaman yang diterima di tahun 2024.

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun

Per 31 Desember 2024, LPEI mencatatkan kas dan setara kas sebesar Rp2,59 triliun, mengalami penurunan sebesar 65,58% dibandingkan dengan posisi tahun sebelumnya yang mencapai Rp7,52 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan penempatan pada bank di tahun 2024.

Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang

Kemampuan Membayar Utang

Dalam mengelola risiko likuiditas, LPEI menerapkan pendekatan yang cermat dan terukur dengan memantau profil jatuh tempo utang, memastikan saldo kas yang memadai, serta menyiapkan sumber pendanaan untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo. Tingkat kesehatan keuangan serta kemampuan LPEI dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat tercermin melalui berbagai rasio likuiditas dan solvabilitas yang digunakan dalam pengukuran keuangan Lembaga.

Dari perspektif eksternal, kemampuan LPEI dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang juga dievaluasi oleh lembaga pemeringkat PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Berdasarkan penilaian yang dilakukan, Pefindo memberikan peringkat idAAA peringkat tertinggi untuk seluruh efek utang yang diterbitkan LPEI, baik dalam bentuk obligasi korporasi maupun sukuk.

Menurut klasifikasi Pefindo, peringkat idAAA mencerminkan kemampuan luar biasa LPEI dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Peringkat ini didukung oleh status LPEI sebagai lembaga pemerintah, struktur permodalan yang kuat, serta perannya yang strategis dalam menyediakan pembiayaan ekspor. Meskipun menghadapi tantangan dalam kualitas aset dan profitabilitas, LPEI tetap mempertahankan posisinya yang solid di sektor pembiayaan. Informasi lebih lanjut mengenai peringkat efek utang LPEI dapat ditemukan dalam bagian Ikhtisar Obligasi pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Cash Flows from (or for) Operating Activities

At the end of December 2024, LPEI recorded net cash provided by operating activities of Rp2.98 trillion, a decrease of (65.10)% compared to the previous year of Rp8.55 trillion. The cause of this decline was a decrease in repayment of sharia financing and receivables.

Cash Flows from (or for) Financing Activities

As of December 31, 2024, net cash used in financing activities decreased by 43.16%, amounting to Rp8.11 trillion, compared to Rp14.27 trillion in the previous year. This decrease was influenced by the reduction in loan repayments made in 2024.

Cash and Cash Equivalents at End of Year

As of December 31, 2024, Indonesia Eximbank recorded cash and cash equivalents of Rp2.59 trillion, a decrease of 65.58% compared to the previous year's position of Rp7.52 trillion. This decline was primarily due to a reduction in placements with banks in 2024.

Solvency and Receivables Collectability

Solvency

In managing liquidity risk, Indonesia Eximbank adopts a prudent and measured approach by monitoring the debt maturity profile, ensuring adequate cash balances, and preparing funding sources to meet upcoming obligations. The institution's financial soundness and ability to meet these obligations are reflected through various liquidity and solvency ratios used in the organization's financial assessments.

From an external perspective, Indonesia Eximbank's ability to meet both short-term and long-term obligations is also evaluated by the rating agency PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Based on its assessment, Pefindo assigned an idAAA rating—the highest rating—for all debt securities issued by Indonesia Eximbank, including both corporate bonds and sukuk.

According to Pefindo's classification, an idAAA rating reflects Indonesia Eximbank's exceptional ability to meet all of its financial obligations. This rating is supported by the institution's status as a government entity, its strong capital structure, and its strategic role in providing export financing. Despite challenges related to asset quality and profitability, Indonesia Eximbank continues to maintain a solid position in the financing sector. Further information on the institution's debt securities ratings can be found in the Bond Overview section of the Company Profile chapter in this Annual Report.

Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan

Financing Collectability Level

Tabel Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan
Financing Collectability Level

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Perubahan Change	
			Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Pembiayaan Lancar Performing Financing	39.798.479	41.725.413	(1.926.934)	(4,62)
Lancar Current	32.886.012	33.990.912	(1.104.900)	(3,25)
Dalam perhatian khusus Special Mention	6.912.467	7.734.501	(822.034)	(10,63)
Pembiayaan Bermasalah Non Performing Financing	16.309.972	32.097.798	(15.787.826)	(49,19)
Kurang lancar Substandard	3.934.897	7.068.091	(3.133.194)	(44,33)
Diragukan Doubtful	979.269	5.292.395	(4.313.126)	(81,50)
Macet Loss	11.395.806	19.737.312	(8.341.506)	(42,26)
Total Pembiayaan dan Piutang Total Financing and Receivable	56.108.451	73.823.211	(17.714.760)	(24,00)
CKPN NPF CKPN NPF	(13.774.529)	(28.745.725)	14.971.196	52,08
NPF gross NPF gross	29,07%	43,48%		(14,41)
NPF neto NPF neto	4,52%	4,54%		(0,02)

Pada tahun 2024, nilai pembiayaan lancar LPEI tercatat sebesar Rp39,80 triliun, mengalami penurunan sebesar 4,62% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, pembiayaan bermasalah mengalami penurunan sebesar 49,19%, mencapai Rp16,31 triliun pada akhir Desember 2024. Hal ini disebabkan oleh turunnya nilai pembiayaan bermasalah dan hapus buku di tahun 2024.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Ayat 3 POJK No. 9 Tahun 2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang menggantikan POJK No. 40 Tahun 2015, LPEI memiliki kewajiban untuk menilai, memantau, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan perbaikan kualitas aset secara berkelanjutan. Dalam hal ini, LPEI juga berupaya menjaga agar nilai pembiayaan bermasalah tetap berada dalam batas yang terkendali.

In 2024, Indonesia Eximbank's performing loans were recorded at Rp39.80 trillion, a decrease of 4.62% compared to the previous year. In addition, non-performing loans declined by 49.19%, reaching Rp16.31 trillion as of the end of December 2024. This was attributed to a reduction in non-performing financing and write-offs carried out during the year.

In accordance with the provisions set out in Article 55 Paragraph 3 of POJK No. 9 of 2022 concerning the Supervision of Indonesian Export Financing Institutions, which replaces POJK No. 40 of 2015, Indonesia Eximbank is obliged to assess, monitor, and take necessary measures to ensure the continuous improvement of asset quality. In this regard, the institution also strives to keep the level of non-performing loans within controlled level.

Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF)

Pada tahun 2024, rasio NPF *gross* LPEI mengalami penurunan menjadi 29,07%, dibandingkan dengan 43,48% pada tahun 2023. Selain itu, rasio NPF *neto* LPEI menjadi 4,52% di tahun 2024, turun dibandingkan dari 4,54% pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh turunnya nilai pembiayaan bermasalah di tahun 2024.

Non-Performing Financing (NPF) Ratio

In 2024, Indonesia Eximbank's gross NPF ratio declined to 29.07%, compared to 43.48% in 2023. Additionally, the net NPF ratio decreased to 4.52% in 2024, down from 4.54% in the previous year. This improvement was driven by the reduction in non-performing financing during the year.

Rasio Kecukupan Permodalan

Capital Adequacy Ratio

Tabel Kecukupan Permodalan
Capital Adequacy Ratio

(Dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)
(In percentage, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023
Kecukupan Permodalan Capital Adequacy		
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Capital to Adequacy Ratio (CAR)	34,35	17,88
Kualitas Aset Asset Quality		
Pembiayaan Bermasalah Terhadap Total Pembiayaan – gross Non-Performing Loans to Total Financing - gross (Gross NPL)	29,07	43,48
Pembiayaan Bermasalah Terhadap Total Pembiayaan – net Non-Performing Loans to Total Financing - net (Net NPL)	4,52	4,54
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun (Rp juta) Cash and Cash Equivalent at End of Year (Rp million)	2.589.947	7.523.540
Rentabilitas Earnings		
Tingkat Pengembalian Atas Aset Return on Assets (ROA)	0,17	(22,74)
Tingkat Pengembalian Atas Ekuitas Return on Equity (ROE)	2,51	(71,71)
Marjin Bunga Bersih Net Interest Margin (NIM)	0,86	1,04
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Operating Expense to Operating Income (BOPO)	99,85	483,24
Rasio Kepatuhan Compliance Ratio		
Posisi Devisa Neto (PDN) Net Open Position (NOP)	0,40	12,09
Utang terhadap Ekuitas (DER) (kali) Debt to Equity Ratio - x	2,51 kali	4,86 kali

Pada 31 Desember 2024, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) LPEI secara konsolidasian, dengan mempertimbangkan risiko kredit, pasar, dan operasional, tercatat sebesar 34,35%. Angka ini menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 17,88%. Dengan demikian, posisi permodalan tersebut tetap memberikan dukungan bagi pengembangan portofolio pembiayaan LPEI di masa depan.

As of December 31, 2024, Indonesia Eximbank's consolidated Capital Adequacy Ratio (CAR) which takes into account credit, market, and operational risks, was recorded at 34.35%. This represents an increase compared to the previous year's figure of 17.88%. This strong capital position continues to provide solid support for the future development of Indonesia Eximbank's financing portfolio.

Rentabilitas

Di tahun 2024, LPEI mencatat laba bersih tahun berjalan yang meningkat menjadi Rp232,53 miliar, dibandingkan dengan rugi tahun berjalan di 2023 sebesar Rp18,11 triliun. Faktor yang menyebabkan laba tahun berjalan yang berada di zona positif ini yakni manfaat pajak, penurunan pembentukan beban CKPN dan peningkatan pendapatan non operasional.

Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Rincian Struktur Permodalan

Pada tahun 2024, rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) LPEI mengalami kenaikan, tercatat sebesar 34,35% dari sebelumnya 17,88% pada tahun 2023. Kenaikan/Penurunan ini dipengaruhi oleh tambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp5 Triliun di tahun 2024.

Pada tahun 2024, rasio KPMM yang mempertimbangkan risiko kredit tercatat sebesar 35,05%, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 18,43%.

Profitability

In 2024, Indonesia Eximbank recorded a net profit for the year of Rp232.53 billion, a significant turnaround from a net loss of Rp18.11 trillion in 2023. This positive shift was primarily driven by tax benefits, a decrease in the allowance for impairment losses (CKPN), and increases in non operational income.

Capital Structure and Management Policy on Capital Structure

Details of Capital Structure

In 2024, Indonesia Eximbank's minimum capital adequacy ratio (CAR) increased, recorded at 34.35% from 17.88% in 2023. This increase/decrease was influenced by additional State Capital Injection (PMN) of IDR 5 trillion in 2024.

In 2024, the CAR considering credit risk recorded at 35.05%, an improvement from 18.43% in 2023.

Tabel Struktur Modal
Capital Structure

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023
Modal Capital		
Modal Inti Core Capital	13.728.020	8.611.218
Modal Pelengkap Supplementary Capital	328.567	343.385
Modal Inti dan Pelengkap Core and Supplementary Capital	14.056.587	8.954.603
Total Modal untuk Risiko Kredit, Pasar, dan Operasional Total Capital for Credit, Market, and Operational Risk		
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Kredit Risk Weighted Assets (RWA) Credit Risk	40.104.121	48.578.757
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Pasar Risk Weighted Assets (RWA) Market Risk	56.062	1.078.982
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Operasional Risk Weighted Assets (RWA) Operational Risk	759.546	431.871
Rasio Kecukupan Modal yang Tersedia untuk Risiko Kredit (%) CAR with Credit Risk (%)	35,05%	18,43%
Rasio Kecukupan Modal yang Tersedia untuk Risiko Kredit, Pasar, dan Operasional (%) CAR With Credit, Market, and Operational Risk	34,35%	17,88%
Rasio Kecukupan Modal yang Diwajibkan (%) Required CAR	10%-<11%	10%-<11%

Pada tahun 2024, LPEI memperoleh tambahan PMN dari Pemerintah. Dengan demikian, hingga 31 Desember 2024 dan 2023, kontribusi modal yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada LPEI masing-masing sebesar Rp42,60 triliun dan Rp37,60 triliun.

Dasar Penetapan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2009 tentang LPEI yang disahkan pada 12 Januari 2009, modal awal LPEI ditetapkan paling sedikit sebesar Rp4 triliun. Jika modal tersebut mengalami penurunan di bawah batas minimum, Pemerintah akan menutup kekurangannya melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Penambahan modal untuk menutupi kekurangan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Sebagai bentuk dukungan yang kuat terhadap LPEI, Pemerintah Republik Indonesia telah beberapa kali memberikan kontribusi modal dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN). Beberapa di antaranya yaitu Rp2 triliun pada 2010, Rp1 triliun pada 2014, Rp1 triliun pada 2015, Rp4 triliun pada 2016, Rp3,2 triliun pada 2017, Rp2,5 triliun pada 2019, Rp10 triliun pada 2020, Rp5 triliun pada 2021 dan Rp5 triliun pada 2024.

In 2024, LPEI obtained additional PMN from the Government. Thus, until December 31, 2024 and 2023, the capital contribution provided by the Government of the Republic of Indonesia to LPEI amounted to Rp42.60 trillion and Rp37.60 trillion, respectively.

Basis for Determining Management Policy on Capital Structure

In accordance with Law No. 2 of 2009 concerning Indonesia Eximbank, enacted on January 12, 2009, the initial capital of Indonesia Eximbank was set at a minimum of Rp4 trillion. Should the capital fall below this minimum threshold, the Government is obligated to cover the shortfall through the State Budget (APBN), following the applicable mechanisms. Any additional capital to cover the deficiency must be stipulated through a Government Regulation (PP).

As a demonstration of strong support for Indonesia Eximbank, the Government of the Republic of Indonesia has provided capital contributions in the form of State Capital Injection (PMN) on several occasions. These include Rp2 trillion in 2010, Rp1 trillion in 2014, Rp1 trillion in 2015, Rp4 trillion in 2016, Rp3.2 trillion in 2017, Rp2.5 trillion in 2019, Rp10 trillion in 2020, Rp5 trillion in 2021 and Rp5 trillion in 2024.

Tabel Penyertaan Modal Negara (PMN)

State Capital Injection

(Dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(In billions of Rupiah, unless otherwise stated)

Tahun Year	PMN Peningkatan Kapasitas Usaha Business Capacity Enhancement	PMN Penugasan Khusus Special Assignment	PMN dalam Rangka PEN PMN for PEN	Total PMN	Dasar Hukum Legal Basis
2010	2.000	-	-	2.000	Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 2010 Government Regulation No. 73 Year 2010
2014	1.000	-	-	1.000	Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2014 Government Regulation No. 86 Year 2014
2015	1.000	-	-	1.000	Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 2015 Government Regulation No. 67 Year 2015
2016	2.000	2.000	-	4.000	Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2016 Government Regulation No. 81 Year 2016
2017	1.000	2.200	-	3.200	Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2017 Government Regulation No. 55 Year 2017
2019	1.500	1.000	-	2.500	Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2019 Government Regulation No. 44 Year 2019

Tabel Penyertaan Modal Negara (PMN)
State Capital Injection

(Dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(In billions of Rupiah, unless otherwise stated)

Tahun Year	PMN Peningkatan Kapasitas Usaha Business Capacity Enhancement	PMN Penugasan Khusus Special Assignment	PMN dalam Rangka PEN PMN for PEN	Total PMN	Dasar Hukum Legal Basis
2020	4.000	1.000	-	5.000	Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2020 Government Regulation No. 40 Year 2020
2020	-	-	5.000	5.000	Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2020 Government Regulation No. 78 Year 2020
2021	2.500	2.500	-	5.000	Peraturan Pemerintah No.117 tahun 2021 Government Regulation No. 117 Year 2021
2024	-	5.000	-	5.000	Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2024 Government Regulation No.50 Year 2024
Jumlah Total	15.000	13.700	5.000	33.700	

Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal

Sepanjang tahun 2024, LPEI menjalin perjanjian material terkait investasi barang modal dengan pihak mana pun. Seperti berikut:

- Tujuan Investasi Barang Modal.**
Investasi barang modal Bank dilakukan dengan tujuan untuk membeli sejumlah aset tetap atau menambah nilai aset tetap yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa depan, serta dapat memenuhi kebutuhan kegiatan operasional dan sejalan dengan ekspansi bisnis yang berkelanjutan. Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat pekerjaan aset tersebut telah selesai dan siap untuk digunakan.
- Sumber Dana untuk Investasi Barang Modal.**
LPEI melakukan investasi yang sebagian besar terkait dengan teknologi informasi dan pengembangan jaringan dengan sumber pendanaan berasal dari hasil usaha.
- Mata uang yang menjadi denominasi.**
LPEI melakukan investasi barang modal yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Tagihan dan pembayaran investasi barang modal tersebut sebagian besar menggunakan mata uang Rupiah untuk meminimalisasi risiko nilai tukar.

Material Commitment for Capital Goods Investment

Throughout 2024, Indonesia Eximbank engage into material commitments for capital goods investment with the following parties:

- Purpose of Capital Goods Investment**
The Bank's capital goods investments are intended for the acquisition of fixed assets or to enhance the value of existing fixed assets, which are expected to generate future benefits and support operational needs in line with sustainable business expansion. Assets under construction are recorded at acquisition cost. The accumulated cost will be reclassified to the corresponding fixed assets upon completion and readiness for use.
- Source of Funds for Capital Goods Investment**
Indonesia Eximbank undertakes investments primarily related to information technology and network development. The funding source for these investments is predominantly derived from business operations.
- Currency Denomination**
Indonesia Eximbank carries out capital goods investments sourced from both domestic and international parties. The receivables and payments for such investments are predominantly denominated in Rupiah, in order to minimize foreign exchange risk.

Realisasi Investasi Barang Modal

Untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari, LPEI menggunakan kas internal sebagai sumber pendanaan untuk belanja modal, dengan mata uang yang digunakan adalah Rupiah.

Berikut ini adalah rincian informasi investasi belanja barang modal LPEI:

Realization of Capital Goods Investment

To support its daily operational activities, Indonesia Eximbank utilizes internal cash as the source of funding for capital expenditures, with Rupiah as the currency of transaction.

Below is the detailed information on Indonesia Eximbank's capital goods expenditures:

Tabel Investasi Barang Modal
Capital Goods Investment

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp million)	2023 (Rp-juta) (Rp million)
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Office Equipment and Supplies	188	993
Aset Dalam Penyelesaian Assets Under Construction	72.546	17.732
Aset Hak Guna Right-of-Use Assets	1.827	3.834
Realisasi Investasi Barang Modal Realization of Capital Goods Investment	74.561	22.559

	2024 (Rp-juta) (Rp million)	2023 (Rp-juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) (Rp million)	(%)
Realisasi Investasi Barang Modal Realization of Capital Goods Investment	74.561	22.559	52.002	230,52

Pada tahun 2024, LPEI mencatatkan peningkatan pada realisasi belanja modal sebesar 231% yang mencapai Rp74,56 miliar, dibandingkan dengan belanja modal sebesar Rp22,56 miliar pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pada Aset Dalam Penyelesaian.

In 2024, Indonesia Eximbank recorded a 231% increase in realized capital expenditure, reaching Rp74,56 billion, compared to Rp22,56 billion in the previous year. This increase was primarily driven by the rise in Assets Under Construction.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi setelah Tanggal Laporan Akuntan

Material Information and Facts Occurring after the Accountant's Report Date

Berikut disampaikan informasi dan fakta material yang terjadi antara akhir periode 31 Desember 2024 hingga tanggal laporan akuntan tanggal 10 Februari 2025.

The following presents material information and facts that occurred between the end of reporting period on December 31, 2024, and the date of accountant's report on February 10, 2025.

- Kontribusi Modal Pemerintah**
Pada tanggal 2 Januari 2025, LPEI menerima dana sebesar Rp5 Triliun sebagai bagian dari Penyertaan Modal Negara, yang selanjutnya disebut PMN. Dana tersebut berasal dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan pada 31 Desember 2024, yang baru masuk ke rekening LPEI pada 2 Januari 2025.

- Government Capital Contribution**
On January 2, 2025, Indonesia Eximbank received funds amounting to Rp5 Trillion as part of the State Capital Injection (PMN). These funds originated from a Fund Disbursement Order (SP2D) issued on December 31, 2024, which were credited to Indonesia Eximbank's account on January 2, 2025.

PMN ini telah diajukan berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (TA) 2024 sebagaimana ditetapkan kembali dalam Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2024. Setelah dilaksanakan Rapat Kerja ke-11 Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan dengan agenda Pengambilan Keputusan Penyertaan Modal Negara (PMN) APBN TA 2024 pada tanggal 3 Juli 2024, diperoleh keputusan bahwa Komisi XI DPR RI menyetujui PMN Tunai TA 2024 untuk LPEI sebesar Rp5 Triliun.

Pada tanggal 5 Februari 2025, LPEI telah menerima salinan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2024 atas Penyertaan Modal Negara (PMN).

Pada tanggal 31 Desember 2024, LPEI telah mengakui PMN tersebut sebagai piutang setoran modal dan tambahan ekuitas.

2. Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21)

Pada tahun 2025, LPEI telah sepenuhnya mengompensasi saldo pajak penghasilan Pasal 21 yang dibayar di muka terhadap perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 untuk periode pajak selama tahun 2025.

3. Dewan Direktur dan Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 24 Januari 2025, mengangkat Sukatmo Padmosukarso dan Bambang Setyatmojo sebagai anggota dewan direktur sejak 24 Januari 2025 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun.

Susunan anggota dewan direktur LPEI sampai dengan laporan keuangan konsolidasi diterbitkan adalah sebagai berikut:

The PMN was proposed in accordance with Law No. 19 of 2023 concerning the State Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2024, as reaffirmed in Presidential Regulation No. 76 of 2023 on the Details of the State Budget for Fiscal Year 2024. Following the 11th Working Meeting of Commission XI of DPR RI with the Minister of Finance on July 3, 2024—held to decide on the 2024 PMN allocation—a resolution was passed to approve a cash PMN for Indonesia Eximbank in the amount of Rp5 Trillion.

On February 5, 2025, Indonesia Eximbank received an official copy of Government Regulation No. 50 of 2024 regarding this State Capital Injection.

As of December 31, 2024, Indonesia Eximbank had recognized the PMN as a capital contribution receivable and an increase in equity.

2. Overpayment of Article 21 Income Tax (PPH 21)

In 2025, Indonesia Eximbank fully offset the prepaid balance of Article 21 income tax against the Article 21 income tax calculation for the 2025 tax period.

3. Board of Directors and Audit Committee

Based on the Decree of the Minister of Finance Number 13 of 2025 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of Indonesia Eximbank dated January 24, 2025, Sukatmo Padmosukarso and Bambang Setyatmojo were appointed as members of the Board of Directors effective from January 24, 2025, for a five-year term.

The composition of the Board of Directors of Indonesia Eximbank up to the issuance of the consolidated financial statements is as follows:

31 Januari 2025

January 31, 2025

Plt Ketua Dewan Direktur Merangkap Direktur Eksekutif Act Chairman of Board of Directors concurrently Executive Director	Yon Aarsal
Anggota Dewan Direktur Member of Board of Directors	Kasan
Anggota Dewan Direktur Member of Board of Directors	Arus Gunawan
Anggota Dewan Direktur Member of Board of Directors	Dwi Teguh Wibowo
Anggota Dewan Direktur Member of Board of Directors	Sukatmo Padmosukarso
Anggota Dewan Direktur Member of Board of Directors	Bambang Setyatmojo

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Eksekutif No.0004/KDE/01/2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, menetapkan Bambang Setyatmojo sebagai Ketua Komite Audit menggantikan Arus Gunawan.

Kontribusi kepada Negara

Sepanjang tahun 2024, LPEI tidak merealisasikan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Pemerintah. Kondisi ini terjadi karena dikarenakan LPEI membukukan rugi di tahun 2023.

Perbandingan antara Target dan Realisasi

Dalam mengevaluasi kinerja tahun 2024, LPEI membandingkan pencapaian realisasi dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Analisis ini bertujuan untuk mengukur efektivitas strategi yang telah dijalankan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian target. Perbandingan ini juga menjadi dasar bagi LPEI dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang.

Asumsi yang Digunakan untuk Menyusun Target 2024

Asumsi ekonomi makro dalam RKAT Tahun 2024 merujuk asumsi pada APBN dan sumber lainnya sebagaimana tabel berikut ini.

Based on Executive Director Decree No. 0004/KDE/01/2025 dated January 31, 2025, regarding the Appointment of Members of the Board of Directors' Committees of Indonesia Eximbank, Bambang Setyatmojo was appointed as Chairman of the Audit Committee, replacing Arus Gunawan.

Contribution to the State

Throughout 2024, Indonesia Eximbank did not make any Non-Tax State Revenue (PNBP) payments to the Government. This condition occurred because Indonesia Eximbank recorded a loss in 2023.

Comparison between Target & Realization

In evaluating its 2024 performance, Indonesia Eximbank compared the actual achievements with the previously established targets. This analysis aims to assess the effectiveness of implemented strategies and to identify factors that influenced the achievement of these targets. The comparison also serves as a basis for Indonesia Eximbank to formulate strategic actions to enhance its performance in the coming year.

Assumptions Used in Setting the 2024 Targets

The macroeconomic assumptions in the 2024 Annual Work and Budget Plan (RKAT) refer to the assumptions outlined in the State Budget (APBN) and other relevant sources, as presented in the following table.

Ekonomi Global World Economy		2024E	2025F	Sumber Source
1	Pertumbuhan PDB (%) GDP growth (% yoy)	3,2	3,3	WEO Januari 2025 January 2025 WEO
2	Volume Perdagangan Global (% yoy) World Trade Volume (% yoy)	3,4	3,2	WEO Januari 2025 January 2025 WEO
3	Fed Funds Rate (%)	4.50	4.25	Bloomberg dan Economist (LPEI)
Ekonomi Indonesia Indonesian Economy		2024E	2025F	Sumber
4	Pertumbuhan PDB (%) GDP growth (%)	5,03	5,20	BPS dan APBN 2025 BPS and the 2025 State Budget
5	Inflasi (% yoy) Inflation (% yoy)	1,57	2,50	BPS dan APBN 2025 BPS and the 2025 State Budget
6	Suku Bunga SBN 10 Tahun (% rata - rata) 10-Year SBN Interest Rate (% average)	6,83	7,00	Bloomberg dan APBN 2025 Bloomberg and the 2025 State Budget
7	Nilai Tukar (Rp/USD, rata - rata) Rp/USD exchange rate (average)	15.845	16,000	Bloomberg dan APBN 2025 Bloomberg and the 2025 State Budget
8	BI Rate (%)	6,00	5,25	Bloomberg dan Economist (LPEI) Bloomberg and Economist (LPEI)
9	Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang (% yoy) Growth in Export Value of Goods (% yoy)	2,5	5,8	Bloomberg dan Economist (LPEI) Bloomberg and Economist (LPEI)

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Keuangan 2024

Comparison Between Target & Realization of 2024 Financial Performance

(Dalam juta Rupiah)
(In million Rupiah)

Uraian Description	Target 2024 2024 Target	Realisasi 2024 2024 Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)
Pendapatan Bunga & Bagi Hasil Bersih Interest Income & Net Profit Sharing	1.034.703	726.045	70,17%
Laba Rugi Sebelum Beban Pajak Profit or Loss Before Tax Expense	243.918	81.916	33,58
Laba Rugi Tahun Berjalan Profit or Loss for the Year	243.918	232.525	95,33
Struktur Modal Capital Structure			
Aset Asset	57.635.196	49.112.997	85,21
Liabilitas Liabilities	38.629.798	35.120.367	90,92
Ekuitas Equity	19.005.398	13.992.630	73,62
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity	57.635.196	49.112.997	85,21

Pendapatan Bunga & Bagi Hasil Bersih

Adapun di tahun 2024, LPEI mencatatkan Pendapatan Bunga & Bagi Hasil Bersih yang terealisasi sebesar Rp726,05 miliar atau mencapai 70,17% terhadap target 2024 sebesar Rp1.034 miliar. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pada rata – rata pembiayaan di tahun 2024.

Net Interest & Profit Sharing Income

As for 2024, LPEI recorded a realized Net Interest & Profit Sharing Income of Rp726.05 billion or reached 70.17% of the 2024 target of Rp1,034 billion. This was mainly due to a decrease in the average financing in 2024.

Laba Sebelum Beban Pajak

Sepanjang tahun 2024, LPEI membukukan Laba Sebelum Beban Pajak sebesar Rp81,92 miliar atau 33,58% dibandingkan dengan target laba sebelum pajak tahun 2024 sebesar Rp243,92 miliar. Capaian ini dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan bukan operasional dan penurunan pembentukan CKPN aset keuangan di tahun 2024.

Profit Before Tax Expense

Throughout 2024, Indonesia Eximbank's posted a Profit Before Tax Expense of Rp81.92 billion or 33.58% compared to the 2024 profit before tax target of Rp243.92 billion. This achievement was influenced by an increase in non-operating income and a decrease in the formation of CKPN on financial assets in 2024.

Laba Tahun Berjalan

LPEI mencatatkan Rugi Tahun Berjalan di tahun 2024 sebesar Rp232,53 miliar, atau mencapai 95,33% dari target laba tahun berjalan sebesar Rp243,92 miliar. Faktor utama yang berkontribusi terhadap angka ini adalah manfaat pajak di tahun 2024.

Profit for the Year

Indonesia Eximbank's recorded a loss for the year of Rp232.53 billion, or 95.33% of its target profit for the year of Rp243.92 billion. The main factor contributing to this figure was the tax benefit in 2024.

Aset

Per 31 Desember 2024, total Aset LPEI tercatat sebesar Rp49,11 triliun, atau mencapai 85,21% dari target aset tahun 2024 yang ditetapkan sebesar Rp57,64 triliun. Pencapaian ini terutama didukung oleh pencapaian target pembiayaan di tahun 2024.

Assets

As of December 31, 2024, total assets of Indonesia Eximbank were recorded at Rp49.11 trillion, or 85.21% of the 2024 asset target set at Rp57.64 trillion. This achievement was primarily supported by the realization of financing target in 2024.

Liabilitas

Sampai akhir tahun 2024, total Liabilitas LPEI tercatat sebesar Rp35,12 triliun atau 90,92% dari target liabilitas tahun 2024 sebesar Rp38,63 triliun. Perkembangan ini dipengaruhi oleh lunasnya efek-efek utang yang diterbitkan di tahun 2024.

Ekuitas

Ekuitas LPEI per 31 Desember 2024 mencapai Rp13,99 triliun, atau setara dengan 73,62% dari target ekuitas tahun 2024 sebesar Rp19,01 triliun. Faktor yang memengaruhi capaian ini di antaranya adalah laba bersih dan tambahan PMN di tahun 2024.

Liabilitas dan Ekuitas

Total Liabilitas dan Ekuitas LPEI pada akhir tahun 2024 tercatat sebesar Rp49,11 triliun, atau 85,21% dari target tahun 2024 yang ditetapkan sebesar Rp57,64 triliun. Pencapaian ini terutama disebabkan oleh tambahan PMN di tahun 2024 dan lunasnya efek-efek utang yang diterbitkan selama tahun 2024.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Operasional 2024

(Dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	Target 2024	Realisasi 2024 Realization 2024	Pencapaian (%) Achievement (%)
Jumlah Pembiayaan Total Financing	58.600.074	56.108.451	95,75
Jumlah Penjaminan (termasuk PEN) Total Guarantees (including PEN)	11.963.049	8.146.399	68,10
Jumlah Asuransi (volume) Total Insurance (Volume)	13.186.873	10.859.032	82,35

LPEI mencatatkan Jumlah Pembiayaan di tahun 2024 sebesar Rp56,11 triliun, atau 95,75% dari target 2024 yang tercatat sebesar Rp58,600 triliun. Hal ini disebabkan oleh penurunan pembiayaan bermasalah dan hapus buku di tahun 2024. Pada tahun 2024, LPEI merealisasikan Jumlah Penjaminan sebesar Rp11,96 triliun, atau 68,10% dari target yang ditetapkan sebesar Rp8,15 triliun. Faktor utama yang mempengaruhi pencapaian ini adalah jatuh tempo penjaminan PEN yang mencapai Rp1,6 triliun. LPEI mencatatkan realisasi jumlah volume Asuransi pada tahun 2024 sebesar Rp10,86 Triliun, atau 82,35% dari target 2024 yang sebesar Rp13,19 triliun. Perubahan ini terutama dipengaruhi oleh penurunan asuransi marine cargo di tahun 2024.

Liabilities

By the end of 2024, total liabilities of Indonesia Eximbank were recorded at Rp35.12 trillion, or 90.92% of the 2024 liability target of Rp38.63 trillion. This development was influenced by the settlement of debt securities issued in 2024.

Equity

As of December 31, 2024, equity of Indonesia Eximbank reached Rp13.99 trillion, equivalent to 73.62% of the 2024 equity target of Rp19.01 trillion. This achievement was influenced by net profit and additional State Capital Injection (PMN) received in 2024.

Liabilities and Equity

As of the end of 2024, total liabilities and equity of Indonesia Eximbank amounted to Rp49.11 trillion, or 85.21% of the 2024 target of Rp57.64 trillion. This achievement was primarily driven by the additional State Capital Injection (PMN) received in 2024 and the settlement of debt securities issued during the year.

Comparison Between Target and Realization of Operational Performance 2024

Indonesia Eximbank's recorded total financing in 2024 of Rp56.11 trillion, or 95.75% of the 2024 target of Rp58.600 trillion. This was due to a decrease in non-performing financing and write-offs in 2024. In 2024, LPEI realized Total Guarantee of IDR11.96 trillion, or 68.10% of the target set at IDR8.15 trillion. The main factor affecting this achievement was the maturity of the PEN guarantee which reached Rp1.6 trillion. Indonesia Eximbank's recorded the realization of total insurance volume in 2024 of Rp10.86 trillion, or 82.35% of the 2024 target of Rp13.19 trillion. This change was mainly influenced by a decrease in marine cargo insurance in 2024.

Proyeksi untuk 1 (Satu) Tahun ke Depan

Kinerja keuangan dan operasional yang dicapai LPEI sepanjang tahun 2024 dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi serta acuan bagi Manajemen untuk merumuskan prospek usaha dan menetapkan target-target bisnis yang lebih optimis di tahun 2025 mendatang. Proyeksi ini mendukung LPEI untuk terus menjalankan peran dan fungsinya secara optimal sebagai SMV Kementerian Keuangan RI.

Projection for the Next Year

The financial and operational performance achieved by Indonesia Eximbank throughout 2024 serves as the basis for evaluation and a reference for the Management in formulating business prospects and setting more optimistic business targets for 2025. This projection supports Indonesia Eximbank in continuing to carry out its roles and functions optimally as a Special Mission Vehicle (SMV) under the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

Asumsi yang Digunakan untuk Menyusun Target 2025

Berdasarkan berbagai tantangan dan peluang perekonomian global dan domestik, berikut asumsi indikator makroekonomi yang akan digunakan sampai dengan tahun 2025:

2025 Financial Performance Projections

Based on various challenges and opportunities for the global and domestic economy, the following are the assumptions for macroeconomic indicators that will be used until 2025:

Keterangan Description	2023	2024E	2025F	2026F	2027F	2028F	2029F	Sumber Source
Ekonomi Dunia World Economy								
Pertumbuhan PDB (% yoy) GDP Growth (% yoy)	3,3*	3,2*	3,3*	3,3*	3,2**	3,1**	3,1**	*IMF, WEO Jan 2025, **IMF, WEO Okt 2024
Volume Perdagangan Dunia (% yoy) World Trade Volume (% yoy)	0,7*	3,4*	3,2*	3,3*	3,3**	3,3**	3,3**	*IMF, WEO Jan 2025, **IMF, WEO Okt 2024
Fed Funds Rate/FFR (%)	5,50*	4,50*	4,00*	3,50*	3,25**	3,25**	3,25**	*Bloomberg **Oxford Economics (Feb 2025)
Ekonomi Indonesia Indonesian Economy								
Pertumbuhan PDB (% yoy) GDP Growth (% yoy)	5,05*	5,03*	5,20**	5,10***	5,07****	5,06****	5,07****	*Berita Resmi Statistik, BPS **Asumsi Makro APBN 2025 ***IMF, WEO Jan 2025 ****IMF, WEO Okt 2024
Inflasi (%) Inflation (%)	2,81*	1,57*	2,50**	2,53***	2,52***	2,52***	2,52***	*Berita Resmi Statistik, BPS **Asumsi Makro APBN 2025 ***IMF, WEO Okt 2024
Pertumbuhan Nilai Ekspor NonMigas (% yoy) Non-Oil and Gas Export Value Growth (% yoy)	-11,96*	2,46*	6,00**	8,00**	8,00**	6,50**	6,00**	*Berita Resmi Statistik, BPS **Oxford Economics, Economist (LPEI)
Pertumbuhan Kredit Perbankan (%) Bank Credit Growth (%)	10,38%*	10,39%*	10,59%**	9,95%**	9,51%**	9,35%**	9,19%**	*Statistik Perbankan Indonesia, OJK **Oxford Economics, Feb 2025

Keterangan Description	2023	2024E	2025F	2026F	2027F	2028F	2029F	Sumber Source
Nilai tukar Rupiah/USD (rata-rata) Rupiah/USD Exchange Rate (average)	15.232*	15.845*	16.000**	16.400***	16.388***	16.350***	16.315***	*Bloomberg **Asumsi Makro APBN 2025 ***Oxford Economics (Feb 2025)
BI Rate (%)	6,00*	6,00*	5,25*	5,25*	4,75**	4,75**	4,75**	*Bloomberg **Oxford Economics (Feb 2025)

Proyeksi Kinerja Keuangan 2025

2025 Financial Performance Projections

Indikator Indicators	Realisasi 2024 Realization 2024	Target 2025 Target 2025	Pertumbuhan (%) Growth (%)
Jumlah Aset Total Assets	49,110,491	45,683,845	-7,0%
Jumlah Pembiayaan Total Financing	56,177,258	51,681,651	-8,0%
Jumlah Penjaminan (Termasuk PEN) Total Guarantee (Including PEN)	8,146,399	9,545,794	17,2%
Jumlah Asuransi (Volume) Total Insurance (Volume)	10,859,032	8,517,638	-21,6%
Jumlah Ekuitas Total Equity	13,992,953	18,929,397	35,3%
Laba (Rugi) Bersih tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	232,847	132,148	-43,2%

Laba Tahun Berjalan

LPEI memproyeksikan Rugi Tahun Berjalan pada tahun 2025 sebesar Rp132 miliar, yang menurun (43%) dari realisasi 2024 yang tercatat sebesar Rp233 miliar. Hal ini terjadi seiring dengan optimalisasi pembentukan CKPN dalam rangka hapus buku debitur NPL.

Profit for the Year

Indonesia Eximbank projects a Profit for the Year in 2025 of Rp132 billion, which decreased by -43% from the realization of 2024 which was recorded at Rp233 billion. This is in line with the optimization of CKPN formation in the context of writing off NPL debtors.

Aset

Pada tahun 2025, LPEI menargetkan total Aset mencapai Rp45,7 triliun, atau menurun 7% dibandingkan realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp49,1 triliun. Penurunan ini didorong oleh penurunan portofolio badbank utamanya dari kegiatan hapus buku dan penagihan (*collection*) dari debitur kelolaan PT. IEBPA.

Assets

In 2025, Indonesia Eximbank targets total assets to reach Rp45.7 trillion, or a 7% decrease compared to the realization in 2024 which amounted to Rp49.1 trillion. This decrease was driven by a decrease in the badbank portfolio, mainly from write-offs and collection activities from PT IEBPA managed debtors.

Liabilitas

LPEI menargetkan Liabilitas pada tahun 2025 sebesar Rp26,8 triliun, atau menurun 24% dari realisasi 2024 yang sebesar Rp35,1 triliun. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh penurunan kebutuhan pendanaan (*market funding*).

Liabilities

LPEI targets liabilities in 2025 of Rp26.8 trillion, or a 24% decrease from the 2024 realization of Rp35.1 trillion. This decrease is partly due to a decrease in funding needs (*market funding*).

Ekuitas

Ekuitas LPEI pada tahun 2025 di level yang cukup kuat untuk menopang pertumbuhan dan tantangan kedepan.

Equity

LPEI equity in 2025 is at a level strong enough to sustain future growth and challenges.

Adapun strategi dan rencana strategis yang akan diterapkan di tahun 2025 guna mencapai target kinerja keuangan sesuai RKAT 2025, antara lain:

The strategies and strategic plans that will be implemented in 2025 to achieve the financial performance targets in accordance with the 2025 RKAT, among others:

Tahun 2025, LPEI melanjutkan tema strategis yang diusung pada tahun 2024, yaitu *"Rebalancing toward enabling export empowering nation"*. Tema strategis ini diturunkan ke dalam 9 (sembilan) prioritas utama Lembaga, sebagai berikut:

1. Peningkatan kolaborasi dengan Ekosistem Ekspor.
2. Pertumbuhan segmen Korporasi beserta *Value Chain*-nya.
3. Peningkatan layanan digital UKM.
4. Percepatan *collection* dan optimalisasi *recovery*.
5. Efisiensi biaya operasional dan pendanaan.
6. Penguatan *Governance, Risk Management & Compliance*.
7. Penguatan infrastruktur IT dan MIS.
8. Penguatan *human capital*.
9. Penguatan komunikasi dan *stakeholder engagement*.

In 2025, Indonesia Eximbank continues the strategic theme carried out in 2024, namely *"Rebalancing towards enabling export empowering nation"*. This strategic theme is derived into 9 (nine) main priorities of the Institution, as follows:

1. Increased collaboration with the Export Ecosystem.
2. Growth of the Corporate segment and its Value Chain.
3. Improved SME digital services.
4. Acceleration of collection and optimization of recovery.
5. Operational and funding cost efficiency.
6. Strengthening Governance, Risk Management & Compliance.
7. Strengthening IT and MIS infrastructure.
8. Strengthening human capital.
9. Strengthening communication and stakeholder engagement.

Klasifikasi Classification	Rebalancing toward "Enabling Export Empowering Nation"	
Mandat Mandates	P1	Peningkatan kolaborasi dengan ekosistem ekspor Increased collaboration with the export ecosystem
	P2	Pertumbuhan segmen korporasi beserta <i>value chain</i> -nya Growth of the corporate segment and its value chain
	P3	Peningkatan layanan digital UKM Improved SME digital services
Perbaikan Kualitas Aset Asset Quality Improvement	P4	Percepatan <i>collection</i> dan optimalisasi <i>recovery</i> Accelerate collection and optimize recovery
Proses Bisnis Business Process	P5	Efisiensi biaya operasional dan pendanaan Operational and funding cost efficiency
	P6	Penguatan <i>governance, risk management & compliance</i> Strengthening governance, risk management & compliance
Penguatan Proses Internal Internal Process Strengthening	P7	Penguatan IT infrastruktur dan MIS Strengthening IT infrastructure and MIS
	P8	Penguatan <i>human capital</i> Strengthening human capital
	P9	Penguatan komunikasi dan <i>stakeholder engagement</i> Strengthening communication and stakeholder engagement

Proyeksi Kinerja Operasional 2025

Projection of Operational Performance for 2025

(Dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	Realisasi 2024 Realization 2024	Target 2025	Pertumbuhan (%) Growth (%)
Jumlah Pembiayaan Total Financing	56.177.258	51.681.651	92,00
Jumlah Penjaminan (termasuk PEN) Total Guarantee (including PEN)	8.146.399	9.545.794	117,18
Jumlah Asuransi (volume) Total Insurance (volume)	10.859.032	8.517.638	78,44

LPEI menargetkan Jumlah Pembiayaan yang akan dicatat pada tahun 2025 sebesar Rp51,7 triliun, atau 8,0% lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp56,2 triliun. penurunan ini terutama dipengaruhi oleh penagihan debitur kelolaan PT. IEBPA serta hapus buku debitur NPL. Pada tahun 2025, LPEI memproyeksikan Jumlah Penjaminan sebesar Rp9,5 triliun, atau mengalami peningkatan sebesar 17,2% dibandingkan realisasi tahun 2024 yang mencapai Rp8,1 triliun. Perubahan ini terutama disebabkan oleh

Indonesia Eximbank targets the amount of financing to be recorded in 2025 at Rp51.7 trillion, or 8.0% lower than the realization in 2024 which was recorded at Rp56.2 trillion. This decrease was mainly influenced by the collection of PT IEBPA managed debtors as well as the write-off of NPL debtors. In 2025, LPEI projects a Guarantee Amount of Rp9.5 trillion, or an increase of 17.2% compared to the realization in 2024 which reached Rp8.1 trillion. This change is mainly due to the growth of guarantee business, especially PKE guarantee. LPEI targets the volume of Insurance to

pertumbuhan bisnis penjaminan khususnya penjaminan PKE. LPEI menargetkan Jumlah Asuransi yang akan tercatat pada tahun 2025 sebanyak Rp8,5 triliun, atau 21,6% lebih rendah dibandingkan dengan jumlah Asuransi yang tercatat di tahun 2024, yang mencapai Rp10,9 triliun. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan bisnis asuransi secara konservatif.

Kebijakan dan Pembagian Dividen

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 tentang LPEI serta PMK No. 260/PMK.06/2015, surplus yang dihasilkan LPEI dalam satu tahun kegiatan pada 2024 dialokasikan untuk cadangan umum, cadangan tujuan, jasa produksi dan tantiem, serta bagian laba Pemerintah. Alokasi surplus ini diatur dengan persentase sebesar 90% untuk cadangan umum dan cadangan tujuan, sementara 10% sisanya dialokasikan untuk jasa produksi, tantiem, serta bagian laba Pemerintah. Penetapan persentase tersebut dilakukan oleh Menteri Keuangan RI.

Pembagian Dividen dalam Dua Tahun Terakhir

Tahun 2024

Tidak terdapat pembagian dividen pada tahun 2024.

Tahun 2023

Tidak terdapat pembagian dividen pada tahun 2023.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

LPEI tidak menyampaikan informasi terkait penggunaan dana dari hasil penawaran umum karena sepanjang tahun 2024, LPEI tidak melakukan penerbitan efek bersifat utang.

Informasi Material mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang/Modal

LPEI melakukan aktivitas investasi terkait pembelian efek-efek. Efek-efek terdiri atas efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal, berupa surat berharga yang diterbitkan pemerintah dan surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi.

Penilaian efek-efek didasarkan atas klasifikasi nya sebagai berikut:

1. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

be recorded in 2025 as much as Rp8.5 trillion, or 21.6% lower compared to the volume of Insurance recorded in 2024, which reached Rp10.9 trillion. This decrease is mainly influenced by the conservative growth of insurance business.

Dividend Policy and Distribution

Referring to Article 21 of Act No. 2 of 2009 on Indonesia Eximbank, as well as the Minister of Finance Regulation No. 260/PMK.06/2015, the surplus generated by Indonesia Eximbank in the 2024 fiscal year is allocated to general reserves, special purpose reserves, production services and bonuses (tantiem), and the Government's share of profit. The surplus allocation is regulated with a percentage of 90% for general and special purpose reserves, while the remaining 10% is allocated to production services, bonuses (tantiem), and the Government's share of profit. The determination of this percentage is made by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia.

Dividend Distribution in the Last Two Years

2024

There is no dividend payment in 2024.

2023

There is no dividend payment in 2023.

Realization of Use of Funds Proceeding from Public Offering

Indonesia Eximbank did not disclose any information regarding the use of proceeds from a public offering because throughout 2024, Indonesia Eximbank did not conduct any debt securities issuance.

Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Merger/ Consolation of Businesses, Acquisitions, and Debt/Capital Restructuring

Indonesia Eximbank conducts investment activities related to the purchase of securities. Securities consist of securities traded in the capital market, in the form of securities issued by the government and securities issued by corporations.

Securities valuation is based on its classification as follows:

1. Gains and losses arising from changes in fair value are recognized in other comprehensive income.

2. Pendapatan diakui dalam laba rugi menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi selisih kurs diakui pada laba rugi.

LPEI melakukan investasi berupa efek utang yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam mata uang Rupiah senilai Rp1,19 triliun termasuk di dalamnya *Green Bond* yang diterbitkan oleh PT Bank Negara Indonesia Tbk dan efek utang yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam mata uang asing sebesar Rp273,62 miliar.

LPEI tidak melakukan ekspansi, divestasi, akuisisi dan restrukturisasi di sepanjang tahun 2024. Oleh karena itu, Indonesia Eximbank tidak menyajikan informasi terkait hal tersebut seperti tanggal, nilai, dan objek transaksi; nama pihak yang melakukan transaksi; sifat hubungan afiliasi (jika ada); penjelasan mengenai kewajaran transaksi; dan pemenuhan ketentuan terkait

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan

Pada tahun 2024, LPEI menyatakan bahwa tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dilakukan selama periode pelaporan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Tujuan Transaksi dengan Pihak Afiliasi atau Berelasi

Selama tahun 2024, LPEI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagai bagian dari kegiatan usaha normal, yang didasarkan pada hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak berelasi tersebut dilakukan dengan mengikuti kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama, dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan, baik yang bersifat berulang maupun tidak berulang. Penjelasan rinci mengenai transaksi material dengan pihak berelasi pada tahun 2024 dapat ditemukan pada Catatan No. 39 dalam Laporan Keuangan Tahunan *Audited* LPEI untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.

Pihak-pihak Berelasi dan Sifat Transaksi

Berikut adalah penjelasan mengenai nama pihak berelasi, sifat hubungan, dan sifat transaksi dengan pihak berelasi sampai dengan 31 Desember 2024:

2. Income is recognized in profit or loss using the effective interest method. Foreign exchange gain or loss is recognized in profit or loss.

Indonesia Eximbank made investments in debt securities issued by the Government in Rupiah currency amounting to Rp1.19 trillion, which includes Green Bonds issued by PT Bank Negara Indonesia Tbk, as well as Government-issued debt securities in foreign currencies totaling Rp273.62 billion.

Indonesia Eximbank did not conduct any expansion, divestment, acquisition and restructuring throughout 2024. Therefore, Indonesia Eximbank does not present information related to this such as the date, value, and object of transaction; the name of party conducting the transaction; the nature of affiliate relationship (if any); an explanation of the fairness of transaction; and fulfillment of related provisions. Information on Material Transaction Involving Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated/Related Parties

Information on Material Transaction Involving Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated/Related Parties

Material Transactions Containing Conflicts of Interest

In 2024, Indonesia Eximbank stated that there were no transactions involving conflicts of interest conducted during the reporting period ending on December 31, 2024.

Purpose of Transactions with Affiliated or Related Parties

Throughout 2024, Indonesia Eximbank conducted transactions with related parties as part of its normal business activities, based on ownership and/or management relationships. All related party transactions were carried out in accordance with mutually agreed policies and terms, with the aim of generating income, whether recurring or non-recurring. A detailed explanation of material transactions with related parties in 2024 can be found in Note No. 39 of Indonesia Eximbank's Audited Annual Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2024.

Related Parties and Nature of Transactions

The following is an explanation of the names of related parties, the nature of the relationship, and the nature of transactions with related parties as of December 31, 2024:

Pihak Berelasi Related Parties	Sifat dari Hubungan Nature of the Relationship	Sifat dari Transaksi Nature of Transactions
Personel manajemen kunci Key management personnel	Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah dan Kepala Divisi Board of Directors, Managing Directors, Audit Committee, Sharia Supervisory Board, and Division Heads	Pembiayaan dan piutang dan penyisihan imbalan kerja Financing and receivables, and employee benefits provision
Kementerian Keuangan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Ministry of Finance on behalf of the Government of the Republic of Indonesia	Pemilik Owner	Efek-efek dan pinjaman yang diterima Securities and loans received
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI) Controlled through the Government of the Republic of Indonesia (RI)	Giro pada bank dan penempatan pada bank Demand deposits and placements with banks
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI) Controlled through the Government of the Republic of Indonesia (RI)	Giro pada bank, penempatan pada bank dan efek Demand deposits, placements with banks, and securities
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI) Controlled through the Government of the Republic of Indonesia (RI)	Giro pada bank, penempatan pada bank dan pinjaman yang diterima Demand deposits, placements with banks, and loans received
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI) Controlled through the Government of the Republic of Indonesia (RI)	Giro pada bank, penempatan pada bank dan pinjaman yang diterima Demand deposits, placements with banks, and loans received
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI) Controlled through the Government of the Republic of Indonesia (RI)	Giro pada bank, pinjaman yang diterima Demand deposits and loans received
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI) Controlled through the Government of the Republic of Indonesia (RI)	Pembiayaan dan piutang Financing and receivables
PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI) Controlled through the Government of the Republic of Indonesia (RI)	Pembiayaan dan piutang Financing and receivables
PT PAL Indonesia (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI) Controlled through the Government of the Republic of Indonesia (RI)	Pembiayaan dan piutang Financing and receivables
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI) Controlled through the Government of the Republic of Indonesia (RI)	Pembiayaan dan piutang Financing and receivables
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI) Controlled through the Government of the Republic of Indonesia (RI)	Pembiayaan dan piutang Financing and receivables
Pengembangan Pariwisata Indonesia Indonesian Tourism Development	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI) Controlled through the Government of the Republic of Indonesia (RI)	Pembiayaan dan piutang Financing and receivables
INKA Multi Solusi	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI) Controlled through the Government of the Republic of Indonesia (RI)	Pembiayaan dan piutang Financing and receivables
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI) Controlled through the Government of the Republic of Indonesia (RI)	Pembiayaan dan piutang Financing and receivables

Pihak Berelasi Related Parties	Sifat dari Hubungan Nature of the Relationship	Sifat dari Transaksi Nature of Transactions
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI) Controlled through the Government of the Republic of Indonesia (RI)	Pembiayaan dan piutang Financing and receivables
PT Angkasa Pura II (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI) Controlled through the Government of the Republic of Indonesia (RI)	Pembiayaan dan piutang Financing and receivables
PT Pembangunan Perumahan (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI) Controlled through the Government of the Republic of Indonesia (RI)	Pembiayaan dan piutang Financing and receivables
PT Jasamarga Manado Bitung	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI) Controlled through the Government of the Republic of Indonesia (RI)	Pembiayaan dan piutang Financing and receivables
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI) Controlled through the Government of the Republic of Indonesia (RI)	Pembiayaan dan piutang Financing and receivables
PT Perkebunan Nusantara I (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI) Controlled through the Government of the Republic of Indonesia (RI)	Pembiayaan dan piutang Financing and receivables
PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI) Controlled through the Government of the Republic of Indonesia (RI)	Pembiayaan dan piutang Financing and receivables
Mineral Industri Indonesia Indonesian Mineral Industry	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI) Controlled through the Government of the Republic of Indonesia (RI)	Pembiayaan dan piutang Financing and receivables
PT Pembangunan Perumahan Presisi, Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI) Controlled through the Government of the Republic of Indonesia (RI)	Pembiayaan dan piutang Financing and receivables
PT Sinergi Gula Nusantara	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI) Controlled through the Government of the Republic of Indonesia (RI)	Pembiayaan dan piutang Financing and receivables
PT Biofarma (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI) Controlled through the Government of the Republic of Indonesia (RI)	Pembiayaan dan piutang Financing and receivables

Realisasi Transaksi Pihak Berelasi

Realisasi saldo dan transaksi Pihak-pihak Berelasi terhadap kinerja keuangan LPEI dapat disampaikan sebagai berikut:

Realization of Related Party Transactions

The realization of balances and transactions with related parties and their impact on Indonesia Eximbank's financial performance can be presented as follows:

Aset

1. Giro pada Bank

(Dalam juta Rupiah)
(In million Rupiah)

Uraian Description	2024	2023
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	17.275	26.430
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	21.628	32.929
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.195	8.986
PT Bank Syariah Indonesia PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk	2.943	1.993
PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	35.720	21
Total	81.761	70.359

Assets

1. Current Accounts at Banks

2. Penempatan pada Bank

(Dalam juta Rupiah)
(In million Rupiah)

Uraian Description	2024	2023
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	1.007.000
PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	30.000
Total	-	1.037.000

2. Placements at Banks

3. Efek-efek

(Dalam juta Rupiah)
(In million Rupiah)

Uraian Description	2024	2023
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia	555.175	720.979
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	618.078	712.944
Total	1.173.253	1.433.923

3. Securities

4. Pembiayaan dan Piutang

(Dalam juta Rupiah)
(In million Rupiah)

Uraian Description	2024	2023
PT Perkebunan Nusantara I (Persero)	1.397.070	-
Pengembangan Pariwisata Indonesia	1.180.481	1.349.246
PT Garuda Indonesia (Persero)	994.418	994.418
PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)	989.156	1.115.087
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	977.144	965.632
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	733.543	734.000
Mineral Industri Indonesia Indonesia Mineral Industry	536.392	-

4. Financing and Receivables

(Dalam juta Rupiah)
(In million Rupiah)

Uraian Description	2024	2023
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (Persero) Tbk	468.347	475.410
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	434.262	201.683
PT Angkasa Pura II (Persero)	328.840	998.478
PT PAL Indonesia (Persero)	313.826	255.450
PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk	300.543	303.359
PT Sinergi Gula Nusantara	249.523	296.026
PT Jasamarga Manado Bitung	231.440	238.722
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	197.336	375.663
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	65.189	141.171
PT Biofarma (Persero) Tbk	16.987	-
PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	-	1.472.422
PT Pembangunan Perumahan	-	315.760
Personel manajemen kunci	-	11,487
Total	9.414.497	10.512.231
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai Less allowance for impairment losses	(1.241.022)	(1.301.009)
Neto	8.173.475	9.211.222

Liabilitas

1. Pinjaman yang Diterima

Liabilities

1. Loans Received

(Dalam juta Rupiah)
(In million Rupiah)

Uraian Description	2024	2023
PT Bank Tabungan Negara (Persero)	2.000.000	-
Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Melalui Kementerian keuangan Controlled through Government of the Republic of Indonesia Through the Ministry of Finance	48.313	51.626
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	-	1.478.280
Total	2.048.313	1.529.906

2. Penyisihan Imbalan Kerja

2. Employee Benefits Reserve

(Dalam juta Rupiah)
(In million Rupiah)

Uraian Description	2024	2023
Personel manajemen kunci Key management personnel	28.311	33.837

3. Fasilitas Pinjaman kepada Debitur yang Belum Digunakan

3. Unused Loan Facilities to Debtors

(Dalam juta Rupiah)
(In million Rupiah)

Uraian Description	2024	2023
Entitas dan Lembaga Pemerintah Government Entities and Institutions	745.926	1.373.836

4. Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan

4. Issuance of Irrevocable L/C

(Dalam juta Rupiah)
(In million Rupiah)

Uraian Description	2024	2023
Entitas dan lembaga Pemerintah Government entities and institutions	223.382	89.504

5. Pendapatan Bunga Kredit Bermasalah

5. Interest Income from Non-Performing Loans

(Dalam juta Rupiah)
(In million Rupiah)

Uraian Description	2024	2023
Entitas dan lembaga Pemerintah Government entities and institutions	574.927	327.592

6. Bank garansi

6. Bank Guarantee

(Dalam juta Rupiah)
(In million Rupiah)

Uraian Description	2024	2023
Entitas dan lembaga Pemerintah Government entities and institutions	27.216	1.783.965

7. Proteksi Piutang Dagang

7. Trade Receivables Protection

(Dalam juta Rupiah)
(In million Rupiah)

Uraian Description	2024	2023
Entitas dan lembaga Pemerintah Government entities and institutions	-	44.189

8. Efek-efek utang yang diterbitkan

8. Debt securities issued

(Dalam juta Rupiah)
(In million Rupiah)

Uraian Description	2024	2023
Entitas dan lembaga Pemerintah Government entities and institutions	2.405.000	4.065.000

Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Mengawasi Jalannya Prosedur Transaksi Afiliasi

Untuk memastikan transparansi dan mencegah risiko potensial, Dewan Komisaris, dengan dukungan dari Komite Audit, mengawasi pelaksanaan transaksi material dengan nominal tertentu yang dilakukan LPEI dengan pihak-pihak berelasi pada tahun 2024. Pengawasan ini merupakan bagian dari upaya mitigasi risiko untuk menghindari kemungkinan terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan LPEI di masa depan.

Informasi Mengenai Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Dalam menjalankan usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 224 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

1. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut: memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor; memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau merupakan personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan sesama entitas anak saling berelasi dengan entitas anak lainnya);
 - b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
 - g. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau

The Role of Board of Commissioners and Audit Committee in Supervising the Implementation of Affiliate Transaction Procedures

To ensure transparency and prevent potential risks, Board of Commissioners, supported by Audit Committee, supervised the execution of material transactions of a certain value carried out by Indonesia Eximbank with related parties in 2024. This supervision is part of a risk mitigation effort to avoid potential conflicts of interest that could harm Indonesia Eximbank in the future.

Information on Transactions with Affiliated Parties

In conducting its business, the Bank enters into transactions with related parties as defined in PSAK 224 on "Disclosure of Related Parties". A related party is a person or entity related to the reporting entity.

1. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person: has control or joint control over the reporting entity; has significant influence over the reporting entity; or is a member of the key management personnel of the reporting entity or a parent of the reporting entity.
2. An entity is related to the reporting entity if meets any of the following:
 - a. The entity and the reporting entity are members of the same group (meaning that the parent entity, subsidiaries, and fellow subsidiaries are related to each other);
 - b. One entity is an associate or joint venture of another entity (or an associate or joint venture that is a member of a group of which the other entity is a member);
 - c. Both entities are joint ventures of the same third party;
 - d. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of a third entity;
 - e. The entity is a post-employment benefit plan for employee benefits of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is the entity that administers the plan, then the sponsoring entity is also related to the reporting entity;
 - f. The entity is controlled or jointly controlled by the reporting entity. Entities controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
 - g. A person identified in (a)(i) has significant influence over the entity or is a key management personnel of the entity (or is a parent of the entity); or

- h. Entitas atau anggota dari kelompok dimana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi, kecuali dengan personel manajemen kunci, dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Transaksi yang dilakukan LPEI akan memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.42/POJK.04/2020 tentang "Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan", pada saat transaksi-transaksi tersebut dilakukan.

Kebijakan LPEI terkait Mekanisme Reviu atas Transaksi dan Pemenuhan Peraturan serta Ketentuan Terkait

LPEI menerapkan mekanisme reviu internal yang melibatkan organ-organ pengawas, seperti Komite Audit dan Dewan Komisaris, dalam menganalisis dan meninjau transaksi dengan pihak-pihak berelasi pada tahun 2024. Selain itu, transaksi-transaksi tersebut juga diaudit oleh Akuntan Publik yang independen melalui proses audit eksternal. Mekanisme ini sejalan dengan ketentuan PSAK 7 (revisi 2014) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi." Seluruh transaksi dengan pihak berelasi dipastikan telah memenuhi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

Prospek Usaha

Makro Ekonomi Global dan Domestik 2025

Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan hanya akan naik tipis pada tahun 2025. Prospek tersebut dipengaruhi sejumlah faktor risiko pemburukan (*downside risk*) yang lebih dominan, antara lain: (i) pemerintahan yang baru terpilih pada Pemilu 2024 dapat membuat perubahan kebijakan perdagangan dan fiskal yang signifikan, termasuk *trade protectionism*, (ii) dampak pemberlakuan tarif baru dari AS melalui transmisi prospek inflasi yang lebih tinggi akan mendorong suku bunga acuan AS diperkirakan tetap *high for longer*, sehingga berpotensi memicu fenomena *Strong Dollar*, (iii) fragmentasi geopolitik menjadi semakin intens, sehingga membebani aktivitas perdagangan dan investasi, (iv) volatilitas di pasar keuangan meningkat, karena Bank Sentral di seluruh dunia mulai menyesuaikan kebijakan moneter, terutama negara – negara dengan laju inflasi yang masih persisten, diikuti perlambatan ekonomi yang mulai muncul, sehingga menciptakan *trade off* sulit bagi Bank Sentral di negara – negara tersebut, (v) prospek pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang masih lemah, dan (vi) bencana alam terkait perubahan iklim yang menjadi semakin frekuen.

- h. The entity or a member of a group of which the entity is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to a parent of the reporting entity.

Transactions with related parties, except with key management personnel, are conducted on the same terms and conditions as transactions with third parties. Transactions conducted by LPEI will comply with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.42/POJK.04/2020 on "Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions", at the time the transactions are conducted.

Indonesia Eximbank Policy on Review Mechanisms for Transactions and fulfilment of Related Regulations and Provisions

Indonesia Eximbank applied an internal review mechanism involving supervisory organs such as Audit Committee and Board of Commissioners in analyzing and reviewing related party transactions in 2024. In addition, these transactions were audited by an independent Public Accountant through an external audit process. This mechanism is in accordance with PSAK 7 (2014 revision) on "Related Party Disclosures." All transactions with related parties were ensured to comply with the applicable Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia.

Business Prospects

Global and Domestic Macroeconomics 2025

World economic growth is expected to only rise slightly in 2025. The outlook is influenced by a number of downside risk factors that are more dominant, including: (i) the newly elected government in the 2024 General Election may make significant changes to trade and fiscal policies, including trade protectionism, (ii) the impact of new tariffs from the US through the transmission of higher inflation prospects will push the US benchmark interest rate is expected to remain high for longer, potentially triggering the Strong Dollar phenomenon, (iii) geopolitical fragmentation becomes more intense, weighing on trade and investment activities, (iv) volatility in financial markets increases, as Central Banks around the world begin to adjust their monetary policies, especially countries with persistent inflation rates, followed by an emerging economic slowdown, thus creating a difficult trade off for Central Banks in these countries, (v) China's weak economic growth prospects, and (vi) climate change-related natural disasters that become more frequent.

Di sisi lain, faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi dunia dapat menjadi lebih tinggi dari yang diestimasikan sebelumnya (*upside risks*), antara lain: (i) disinflasi global dan pelonggaran kebijakan moneter dapat berlangsung lebih cepat dari yang diantisipasi, (ii) investasi publik di negara – negara maju dipercepat untuk memenuhi *policy objectives* yang mendesak seperti transisi hijau hingga peningkatan infrastruktur, sehingga mendorong sektor swasta meningkatkan investasinya, pada gilirannya akan mendorong meningkatnya aktivitas perdagangan dunia, dan (iii) negara maju serta negara emerging dan berkembang mempercepat upaya reformasi struktural untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja, mengurangi misalokasi di pasar tenaga kerja, dan membantu merangsang inovasi bisnis, sehingga diharapkan dapat menghasilkan pertumbuhan jangka menengah yang lebih tinggi.

Dengan demikian, International Monetary Fund (IMF) melalui World Economic Outlook (WEO) yang dirilis bulan Januari 2025 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global hanya akan sedikit mengalami perbaikan dari 3,2% yoy pada tahun 2024 menjadi 3,3% pada tahun 2025.

Di tengah prospek pertumbuhan ekonomi global yang akan cenderung melambat, ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh sebesar 5,20%, meningkat dari estimasi tahun ini (2024: 5,03%). Dari sisi konsumsi (*demand*), ekspektasi daya beli masyarakat yang lebih baik dan laju inflasi yang terjaga diperkirakan dapat mendorong aktivitas konsumsi rumah tangga. Sementara itu, belanja Pemerintah akan diarahkan untuk program – program yang produktif, sehingga diharapkan dapat meningkatkan permintaan domestik dan mendorong aktivitas sektor swasta. Aktivitas investasi juga diproyeksikan meningkat, seiring upaya – upaya penguatan reformasi struktural dalam rangka meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing. Selain itu, Proyek Strategis Nasional (PSN) akan dilanjutkan, sehingga diperkirakan berkontribusi pada pertumbuhan investasi di masa depan. Di sektor eksternal, Pemerintah berupaya melakukan diversifikasi produk dan pasar ekspor, seperti pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan dan pengembangan ekspor jasa, termasuk *digitally delivered services export*, sehingga kinerja ekspor nasional diharapkan dapat menguat.

Dari sisi produksi (*supply*), komponen PDB menurut lapangan usaha diproyeksikan tumbuh positif. Sektor manufaktur diperkirakan meningkat pada tahun 2025, didukung mulai beroperasinya beberapa proyek, seperti proyek investasi petrokimia di Banten, pabrik sel baterai kendaraan listrik di Jawa Barat, dan proyek hilirisasi tembaga di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, sektor perdagangan diproyeksikan tumbuh kuat, seiring meningkatnya aktivitas *e-commerce*.

On the other hand, factors that support economic growth The world could be higher than estimated Previous (*upside risks*), including: (i) Global disinflation and monetary policy easing could take place more faster than anticipated, (ii) public investment in the country – Developed countries are accelerated to meet policy objectives such as green transition to upswing. infrastructure, thereby encouraging the private sector increasing its investment, which in turn will encourage increased world trade activity, and (iii) countries developed and emerging and developing countries accelerating Structural reform efforts to increase participation workforce, reducing misallocation in the labor market work, and help stimulate business innovation, so that expected to produce long-term growth higher intermediate.

Thus, the International Monetary Fund (IMF) through The World Economic Outlook (WEO) released in January 2025 projects global economic growth only will see a slight improvement from 3.2% yoy in 2019 2024 to 3.3% in 2025.

Amid prospects for global economic growth that will tend to slow down, Indonesia's economy in 2025 is estimated to grow by 5.20%, an increase from this year's estimate (2024: 5.03%). In terms of consumption (demand), expectations of better purchasing power and a manageable inflation rate are expected to boost household consumption activity. Meanwhile, government spending will be directed to productive programs, which is expected to increase domestic demand and boost private sector activity. Investment activity is also projected to increase, in line with efforts to strengthen structural reforms in order to improve ease of doing business and competitiveness. In addition, the National Strategic Project (PSN) will be continued, so it is expected to contribute to the growth of investment in the future. In the external sector, the Government seeks to diversify export products and markets, such as the development of advanced downstream products and the development of service exports, including digitally delivered service exports, so that national export performance is expected to strengthen.

In terms of production (supply), the GDP component by business field is projected to grow positively. The manufacturing sector is expected to increase in 2025, supported by the start of the operation of several projects, such as the petrochemical investment project in Banten, the electric vehicle battery cell factory in West Java, and copper downstream projects in East Java and West Nusa Tenggara. Furthermore, the trade sector is projected to grow strongly, as e-commerce activities increase.

Khusus ekspor barang Indonesia, nilai ekspor tahun 2025 diproyeksikan meningkat ke level 5,8% yoy dari tahun sebelumnya (tahun 2024: 2,5% yoy). Dari sisi demand, prospek peningkatan nilai ekspor barang dipengaruhi proyeksi pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang utama Indonesia yang masih positif tahun 2025, seperti Tiongkok (4,6%), Amerika Serikat (2,7%), India (6,5%), Jepang (1,1%), Korea Selatan (2,0%), dan ASEAN – 5 (4,6%). Sedangkan dari sisi *supply*, perbaikan kinerja ekspor barang akan dipengaruhi harga sejumlah komoditas unggulan Indonesia yang diproyeksikan meningkat pada tahun 2025, antara lain emas (+24,08% yoy), tembaga (+2,47% yoy), timah (+2,96% yoy), aluminium (+8,36% yoy), seng (+1,66% yoy), minyak sawit (+4,70% yoy), kopi (+72,26% yoy), dan biji kakao (+13,56% yoy).

Adapun, strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja ekspor Indonesia ke depan antara lain: (i) mendukung hilirisasi agar tercipta lebih banyak produk ekspor bernilai tambah, (ii) meningkatkan jumlah dan kapasitas pelaku usaha berorientasi ekspor, (iii) mendukung diversifikasi pasar ke non tradisional dengan memperhatikan risiko negara tujuan dan kesiapan eksportir, dan (iv) mengoptimalkan partisipasi Indonesia dalam *Global Value Chain*, baik dari sisi *backward* maupun *forward trade participation*.

Untuk tahun 2025, Bank Indonesia berpeluang menurunkan BI Rate sebanyak tiga (3) kali dengan total pemangkasan mencapai 75 bps menjadi 5,25%, seiring dengan penyesuaian *stance* kebijakan moneter dari *pro – stability* menjadi *pro – growth*. Rilis data pertumbuhan ekonomi tahun 2024 menunjukkan berlanjutnya tren pelemahan, sekaligus menjadi yang paling rendah dalam tiga (3) tahun terakhir (2022: 5,31% yoy | 2023: 5,05% yoy | 2024: 5,03% yoy).

Hal tersebut dipengaruhi pertumbuhan konsumsi rumah tangga (sisi *demand*) dan industri pengolahan (sisi *supply*) sebagai kontributor utama yang melandai di bawah potensinya (di bawah 5,00%). Dalam proyeksi terbarunya, BI juga melakukan revisi ke bawah terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dari kisaran 4,8% - 5,6% menjadi kisaran 4,7% - 5,5%. Di sisi lain, BI memang memiliki room untuk memangkas BI Rate, didukung (a) tingkat inflasi tahun 2024 yang rendah sepanjang sejarah (terendah sejak tahun 1958 ketika Badan Pusat Statistik pertama kali menghitung inflasi) dan (b) posisi cadangan devisa bulan Desember 2024 yang mencapai USD155,7 miliar, tertinggi sepanjang masa.

Di sisi nilai tukar, APBN tahun 2025 mengasumsikan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS secara rata – rata akan berada di level Rp16.000 per USD. Ketidakpastian di pasar keuangan global diperkirakan terus berlanjut, dipengaruhi (i) Pemilu AS yang menghasilkan *red sweep*, artinya baik Presiden, *House*, dan *Senate* diduduki oleh Republican, sehingga berpeluang membuat kebijakan Donald Trump

Specifically for Indonesia's goods exports, the value of exports in 2025 is projected to increase to a level of 5.8% yoy from the previous year (2024: 2.5% yoy). From the demand side, the prospect of an increase in the value of goods exports is influenced by the projected economic growth of Indonesia's main trading partners which is still positive in 2025, such as China (4.6%), the United States (2.7%), India (6.5%), Japan (1.1%), South Korea (2.0%), and ASEAN-5 (4.6%). Meanwhile, from the supply side, the improvement in goods export performance will be influenced by the price of a number of Indonesia's leading commodities which are projected to increase in 2025, including gold (+24.08% yoy), copper (+2.47% yoy), tin (+2.96% yoy), aluminum (+8.36% yoy), zinc (+1.66% yoy), palm oil (+4.70% yoy), coffee (+72.26% yoy), and cocoa beans (+13.56% yoy).

Meanwhile, strategies that need to be carried out to improve Indonesia's export performance going forward include: (i) supporting downstreaming in order to create more value-added export products, (ii) increasing the number and capacity of export-oriented businesses, (iii) supporting market diversification to non-traditional markets by taking into account the risks of destination countries and the readiness of exporters, and (iv) optimizing Indonesia's participation in the *Global Value Chain*, both from the backward and forward trade participation sides.

For 2025, Bank Indonesia has the opportunity to reduce the BI Rate three (3) times with a total cut of 75 bps to 5.25%, along with adjusting the stance of monetary policy from pro-stability to pro - growth. The release of economic growth data for 2024 shows a continued weakening trend, as well as being the lowest in the last three (3) years (2022: 5.31% yoy | 2023: 5.05% yoy | 2024: 5.03% yoy).

This was influenced by the growth of household consumption (demand side) and manufacturing industry (supply side) as the main contributors which slid below their potential (below 5.00%). In its latest projection, BI also made a downward revision to the prospect of Indonesia's economic growth in 2025 from a range of 4.8% - 5.6% to a range of 4.7% - 5.5%. On the other hand, BI does have room to cut the BI Rate, supported by (a) an all-time low 2024 inflation rate (the lowest since 1958 when Statistics Indonesia first calculated inflation) and (b) a December 2024 foreign exchange reserves position that reached USD155.7 billion, an all-time high.

On the exchange rate side, the 2025 State Budget assumes that the average exchange rate of the Rupiah against the US Dollar will be at the level of Rp16,000 per USD. Uncertainty in the global financial market is expected to continue, influenced by (i) US elections that resulted in a red sweep, meaning that both the President, House, and Senate are occupied by Republicans, so that it is likely to make Donald

yang cenderung *inflationary* lebih mudah untuk diterapkan, (ii) terbatasnya ruang penurunan suku bunga acuan oleh Fed seiring meningkatnya prospek pertumbuhan dan inflasi AS, (iii) meski Indonesia tidak mengalami dampak secara langsung dari penerapan kebijakan tarif baru Pemerintahan Trump, namun *risk off sentiment* dan potensi terjadinya *currency war* di Kawasan Asia mulai muncul apabila nilai tukar mata uang Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan terdepresiasi secara terus menerus, sehingga berpeluang menekan pergerakan Rupiah. Mencermati perkembangan tersebut, Economist (LPEI) memperkirakan nilai tukar Rupiah secara rata – rata akan berada di kisaran Rp16.225 – Rp16.425 per USD pada tahun 2025. Adapun, upaya penguatan ekspor yang bernilai tambah juga terus didorong, sehingga dapat menopang sumber valas yang lebih sustain.

Rencana dan Strategi 2025

Melihat dan memahami berbagai proyeksi kondisi pertumbuhan ekonomi dan kondisi makro sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, LPEI tetap optimis namun waspada diiringi dengan berbagai prioritas dan strategi yang menjadi acuan dalam mengembangkan bisnis di tahun 2025.

Dalam mencapai tujuan yang LPEI harapkan di masa depan yaitu "*Enabling Export, Empowering Nation*", LPEI terus melakukan transformasi secara berkelanjutan.

Adapun dalam menyusun strategi ke depan, LPEI berpedoman pada lima *key guiding principles* yang menjadi landasan LPEI dalam menyusun strategi ke depan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan bisnis yang progresif melalui ekosistem ekspor.
2. Menyelesaikan isu terkait LAR dan meningkatkan kualitas aset.
3. Berinvestasi pada Keterampilan dan Kemampuan di masa depan.
4. Memperkuat peran LPEI sebagai SMV (perpanjangan tangan pemerintah untuk alat fiskal).
5. Terus memperkuat *Balance Sheet*.

Sedangkan kegiatan Jasa Konsultasi akan terus dilanjutkan melalui program *Coaching Program for New Exporter* (CPNE) untuk melatih dan mempersiapkan pelaku UKM untuk menjadi eksportir baru melalui sosialisasi, pelatihan, bimbingan dan kegiatan lainnya *non cluster* (individu UKM), LPEI berupaya mencetak eksportir-eksportir baru di seluruh Indonesia dengan memberikan pendampingan secara intensif kepada pelaku UMKM berorientasi ekspor hingga dapat menjual produknya ke pasar luar negeri.

Selanjutnya, dalam upaya untuk memasarkan produk UKM yang telah dilakukan pendampingan pelatihan, Jasa Konsultasi memiliki program *Marketing Handholding* yang bertujuan untuk dukungan percepatan ekspor dalam rangka membuka akses pasar ekspor bagi produk debitur dan/atau mitra binaan LPEI. LPEI juga melakukan kegiatan

Trump's policy which tends to be inflationary is easier to implement, (ii) limited room for rate cuts by the Fed in line with the improving prospects for US growth and inflation , (iii) although Indonesia does not experience a direct impact from the implementation of the new tariff policy of the Trump Administration, risk off sentiment and the potential for a currency war in the Asian Region began to emerge if the exchange rates of China, Japan, and South Korea depreciated continuously, thus having the opportunity to suppress the movement of the Rupiah. Observing these developments, the Economist (LPEI) estimates that the Rupiah exchange rate on average will be in the range of Rp16,225 - Rp16,425 per USD in 2025. Meanwhile, efforts to strengthen value-added exports also continue to be encouraged, so as to support a more sustainable source of forex.

Plan and Strategy 2025

Seeing and understanding the various projections of economic growth conditions and macro conditions as described above, LPEI remains optimistic but vigilant accompanied by various priorities and strategies that become references in developing business in 2025.

In achieving the goals that LPEI expects in the future namely "Enabling Export, Empowering Nation", LPEI continues to transform continuously.

In preparing the future strategy, LPEI is guided by five key guiding principles which become the foundation of LPEI in preparing the future strategy described as follows:

1. Progressive business growth through the export ecosystem.
2. Resolve LAR-related issues and improve asset quality.
3. Invest in Skills and Capabilities for the future.
4. Strengthen LPEI's role as an SMV (an extension of the government's hand for fiscal tools).
5. Continue to strengthen Balance Sheet.

While Advisory Services activities will continue through the Coaching Program for New Exporter (CPNE) program to train and prepare SMEs to become new exporters through socialization, training, guidance and other non-cluster activities (individual SMEs), LPEI seeks to produce new exporters throughout Indonesia by providing intensive assistance to export-oriented SMEs so that they can sell their products to foreign markets.

Furthermore, in an effort to market the products of SMEs that have undergone training Consulting Services has a Marketing Handholding program that program aims to support the acceleration of exports in order to open access to export markets for debtor products and /or LPEI fostered partners. LPEI also conducts Community Development

Community Development berupa pendampingan desa devisa di daerah yang memiliki komoditas unggulan dan berpotensi dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Selain menghubungkan dengan calon pembeli internasional, LPEI juga akan terus berusaha memberikan pemahaman dan wawasan kepada pelaku UKM tentang identifikasi peluang bisnis baru serta pembentukan kerja sama yang berkelanjutan. LPEI akan terus berusaha menyalurkan pembiayaan kepada sektor yang memiliki daya ungkit dan *developmental impact* terhadap ekspor, pendapatan dan penambahan lapangan kerja, serta konsisten melaksanakan mandat yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk dan mendorong ekspor nasional.

Aspek Pemasaran

Sebagai salah satu *Special Mission Vehicle* (SMV) di bawah Kementerian Keuangan RI, LPEI diberikan mandat langsung oleh Pemerintah untuk menyediakan pembiayaan, penjaminan, dan/atau asuransi bagi transaksi atau proyek yang memiliki tingkat kesulitan komersial tinggi namun dianggap sangat penting dalam mendukung kebijakan atau program ekspor nasional. Selain itu, LPEI turut memainkan peran penting dalam membantu pelaku UMKM berorientasi ekspor agar produk-produk mereka menjadi lebih kompetitif dan mampu menembus pasar internasional.

Strategi Pemasaran

Berdasarkan mandat yang tersebut, LPEI telah menerapkan serangkaian strategi pemasaran yang tepat sasaran, diantaranya seperti:

1. Meningkatkan Penyaluran Pembiayaan Ekspor
Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, LPEI menerapkan skema pembiayaan konvensional dan syariah baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Penyaluran pembiayaan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan nasabah terutama untuk mendukung kegiatan ekspor serta membiayai segmen UKME dan pembiayaan korporasi dengan memperhatikan pengelolaan risiko secara sehat.
2. Meningkatkan Penyaluran Penjaminan
Dalam upaya meningkatkan penyaluran penjaminan ekspor, LPEI berkoordinasi dengan regulator terutama dalam hal penyesuaian beberapa ketentuan peraturan untuk memperluas ruang gerak penjaminan yang diberikan dan juga menyediakan penjaminan bagi UKME agar mudah memperoleh akses pembiayaan.

Beberapa jenis penjaminan yang diberikan LPEI, meliputi penjaminan bagi eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang/jasa di luar negeri, penjaminan bagi importir barang/jasa Indonesia di luar negeri atas pembayaran yang telah diberikan, penjaminan bagi bank yang menyediakan pembiayaan

activities in the form of foreign exchange village assistance in areas that have superior commodities and have the potential to be developed to improve the welfare of the surrounding community.

In addition to connecting with potential international buyers, LPEI will also continue to provide SMEs with insights into identifying new business opportunities and establishing sustainable partnerships. LPEI will continue to strive to channel financing to sectors that have leverage and developmental impact on exports, income and additional employment, and consistently carry out the mandate given by the government to increase exports, mandate given by the government to improve product competitiveness and boost national exports.

Marketing Aspect

As one of the Special Mission Vehicles (SMVs) under the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, Indonesia Eximbank has been directly mandated by the Government to provide financing, guarantees, and/or insurance for transactions or projects with a high level of commercial difficulty but are deemed critical in supporting national export policies or programs. In addition, Indonesia Eximbank plays a significant role in assisting export-oriented MSMEs so that their products become more competitive and able to penetrate international markets.

Marketing Strategy

Based on the aforementioned mandate, Indonesia Eximbank has implemented a series of targeted marketing strategies, including:

1. Increasing Export Financing Distribution
By prioritizing prudential principles, Indonesia Eximbank applies both conventional and sharia financing schemes domestically and internationally. The distribution of this financing is adjusted to customer needs, primarily to support export activities, finance the UKME segment, and provide corporate financing while ensuring sound risk management.
2. Increasing Guarantee Distribution
In an effort to increase the distribution of export guarantees, LPEI coordinates with regulators, especially in terms of adjusting several regulatory provisions to expand the space for guarantees provided and also provides guarantees for UKME to easily obtain access to financing.

Some types of guarantees provided by LPEI include guarantees for Indonesian exporters for payments received from overseas buyers of goods/services, guarantees for overseas importers of Indonesian goods/services for payments that have been made, guarantees for banks that provide export transaction financing to

transaksi ekspor kepada eksportir Indonesia, serta penjaminan dalam rangka tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang seluruhnya atau sebagian merupakan kegiatan yang menunjang ekspor. Selain itu, LPEI juga menyalurkan Penjaminan Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional melalui program penjaminan korporasi padat karya (JAMINAH) untuk perbankan agar pemberian kredit dapat terus berjalan sehingga pemulihan ekonomi dapat lebih cepat.

3. **Meningkatkan Penyaluran Asuransi**
 Aktivitas peningkatan penyaluran asuransi ekspor dilakukan dengan berkoordinasi dengan regulator terutama dalam hal penyesuaian beberapa ketentuan peraturan untuk memperluas ruang gerak asuransi disamping penyediaan asuransi bagi UKM agar mudah memperoleh akses pembiayaan. Asuransi ekspor LPEI, meliputi asuransi atas risiko kegagalan ekspor, asuransi atas risiko kegagalan bayar, asuransi atas investasi yang dilakukan perusahaan Indonesia di luar negeri, dan/atau asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor.
4. **Peningkatan Peran Jasa Konsultasi**
 Pelaksanaan Jasa Konsultasi difokuskan pada peningkatan kapasitas *business advisory* serta perluasan akses pasar baik secara konvensional maupun *digital commerce*. Dalam menjalankan mandat kegiatan usaha ini, LPEI memberikan bimbingan dan jasa konsultasi kepada bank, lembaga keuangan, eksportir, produsen barang ekspor, khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank/lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial dan/atau penting bagi perkembangan ekonomi Indonesia.

Pangsa Pasar

Sebagai lembaga pembiayaan ekspor, pangsa pasar LPEI dapat diukur dengan parameter kredit ekspor. Adapun data untuk tahun buku 2024 dijelaskan pada tabel berikut ini:

(dalam miliar Rupiah)
(in billion Rupiah)

Parameter Parameters	2024
Pembiayaan LPEI Indonesia Eximbank Financing	56.177
Kredit ekspor industri Industry export financing	186.123

Sumber data: Statistik Perbankan Indonesia (SPI)
Data source: Indonesian Banking Statistics (IBS)

Indonesian exporters, and guarantees in the context of tenders related to the implementation of projects that are wholly or partly export-supporting activities. In addition, LPEI also distributes Government Guarantees in the context of National Economic Recovery through the labor-intensive corporate guarantee program (JAMINAH) for banks so that lending can continue so that economic recovery can be faster.

3. **Increasing Insurance Distribution**
 Activities to increase export insurance distribution are carried out in coordination with regulators, especially in terms of adjusting several regulatory provisions to expand insurance space in addition to providing insurance for SMEs to easily obtain access to financing. LPEI's export insurance includes insurance for the risk of export failure, insurance for the risk of default, insurance for investments made by Indonesian companies abroad, and/or insurance for political risks in a country that is an export destination.
4. **Increasing the Role of Advisory Services**
 The implementation of Advisory Services is focused on increasing the capacity of business advisory and expanding market access both conventionally and digitally commerce. In carrying out the mandate of this business activity, LPEI provides guidance and consulting services to banks, financial institutions, exporters, export goods producers, especially micro, small, medium and cooperative businesses to help overcome obstacles faced by banks/financial institutions in providing financing for exporters who are commercially quite potential and/or important for Indonesia's economic development.

Market Share

As an export financing institution, the market share of LPEI can be measured by the export credit parameter. The data for the financial year 2024 is described in the following table:

Perubahan Peraturan Perundang-undangan terhadap LPEI pada Tahun Buku Terakhir

LPEI secara konsisten melakukan evaluasi terhadap peraturan baru maupun perubahan pada peraturan yang telah ada sebelumnya guna mengidentifikasi potensi dampak yang mungkin timbul serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan tersebut. Perubahan atau peraturan baru yang secara langsung memengaruhi LPEI pada tahun 2024 meliputi:

Changes in Legal Regulations Affecting Indonesia Eximbank in the Last Fiscal Year

Indonesia Eximbank consistently evaluates new regulations as well as changes to existing ones in order to identify potential impacts and ensure compliance. Regulatory changes or new regulations that directly affected Indonesia Eximbank in 2024 include:

No	Peraturan Perundang-undangan Legal Regulations	Pokok Peraturan Key Changes	Dampak Bagi Perseroan Impact for Indonesia Eximbank	Upaya Mitigasi Mitigation Efforts
1	POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan (POJK "12/2024") POJK Number 12 of 2024 regarding the Implementation of Anti Fraud Strategy for Financial Services Institutions Financial Services Institutions (POJK "12/2024")	- LJK wajib menyusun dan menerapkan Strategi Anti Fraud. - Direksi dan Dewan Komisaris (dhi. di LPEI disebut Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, Direktur Pelaksana) wajib memastikan penerapan Strategi Anti Fraud di "Lembaga Jasa Keuangan (LJK)" berjalan secara efektif. - Lembaga Jasa Keuangan (LJK) wajib memiliki unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan Strategi Anti Fraud dalam organisasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK). - Lembaga Jasa Keuangan (LJK) wajib menyampaikan kepada OJK: a) strategi <i>anti fraud</i> mengacu pada pedoman penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i> bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), b) laporan atau koreksi laporan penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i> mengacu pada Pedoman Pengisian Laporan Penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i>. - Dalam hal terdapat kejadian Fraud berdampak signifikan, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) wajib menyampaikan Laporan Kejadian Fraud Berdampak Signifikan kepada OJK dengan mengacu pada Pedoman sebagaimana terlampir dalam Lampiran III POJK 12/2024. - Dalam hal terdapat perubahan terhadap Strategi Anti Fraud yang telah disampaikan kepada OJK, LJK wajib menyampaikan perubahan yang dimaksud kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak perubahan dilakukan. - Financial Institutions shall develop and implement an AntiFraud Strategy. - The Board of Directors and Board of Commissioners (dhi. in LPEI called Executive Director, Board of Directors, Managing Director) shall ensure the effective implementation of the Anti Fraud Strategy in the Financial Services Institution runs effectively. - The Financial Services Institution shall have a work unit or function in charge of handling the implementation of the Anti-Fraud Strategy Strategy within the FSI organization. - The Financial Services Institution shall submit to the OJK: a) the anti fraud strategy refers to the guidelines for the implementation of Anti Fraud Strategy for Financial Services Institutions, b) report or report or correction to the report on the implementation of the Anti Fraud Strategy referring to the Guidelines for Completing the Report Implementation of the Anti Fraud Strategy. - In the event that there is a Fraud incident with a significant impact, the Financial Services Institution must submit a Report of Fraud Event with Significant Impact to OJK with reference to the Guidelines as attached in Appendix III of POJK 12/2024. - In the event of any changes to the Anti-Fraud Strategy that has been submitted to the OJK, LJK are required to submit the said changes to OJK no later than 7 (seven) working days from the date the changes are made.	Peraturan berdampak secara signifikan kepada LPEI Regulation has an impact significantly to LPEI	Berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait dan untuk penyesuaian terhadap peraturan Internal yang terdampak. Melakukan sosialisasi atas peraturan eksternal kepada Unit Kerja dan seluruh pegawai LPEI terkait. Coordinate with related Work Units related work units and for adjustments to Internal regulations that are affected. Conduct socialization of external regulations to Work Units and all relevant related LPEI employees.

No	Peraturan Perundang-undangan Legal Regulations	Pokok Peraturan Key Changes	Dampak Bagi Perseroan Impact for Indonesia Eximbank	Upaya Mitigasi Mitigation Efforts
2	PADG Nomor 18 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan PADG Number 18 Year 2024 concerning Regulations Implementation of the Alternative Dispute Resolution Institution in the Finance	- Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan (LAPS-SK) harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia; - Penyelenggara yang telah memperoleh izin dari BI dan telah menjadi anggota asosiasi serta masih beroperasi menjalani kegiatan usahanya wajib menjadi anggota LAPS-SK; - Permohonan penyelesaian sengketa ke LAPS-SK dapat melalui: a) media yang disediakan oleh BI atau, b) langsung mengunjungi kantor LAPS-SK. - Penyelesaian Sengketa melalui LAPS-SK dapat dilakukan melalui: a) tatap muka langsung di hadapan mediator/arbitrer, b) media elektronik, dan/ atau c) pemeriksaan dokumen.	Peraturan berdampak secara signifikan kepada LPEI Regulation has an impact significantly to LPEI	Berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait untuk penyesuaian peraturan internal yang berdampak terhadap LPEI. Dikarenakan LPEI telah menjadi anggota LAPS-SK berdasarkan POJK 61/ POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, maka secara otomatis LPEI akan menjadi anggota LAPS-SK dan tidak diperlukan pendaftaran kepada LAPS-SK. Namun LAPS-SK tersebut wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari BI. Coordinate with related Work Units for adjustment of internal regulations that affect to LPEI. Since LPEI has become a member of LAPS-SK based on POJK 61/ POJK.07/2020 concerning Alternative Institution Dispute Resolution Institution Financial Services Sector, then automatically LPEI will automatically become a member of LAPS-SK and no registration is not required to the LAPS-SK. However However, the LAPS-SK must first obtain approval from BI.
3	SEOJK Nomor 11/ SEOJK.01/2024 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) SEOJK Number 11/ SEOJK.01/2024 regarding Reporting and Request Debtor Information through Information Service System Financial Information Service System (SLIK)	- Untuk melaksanakan kegiatan pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK, pelapor melakukan penyampaian: - Laporan debitur kepada OJK secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu. - Koreksi laporan debitur kepada OJK dalam hal laporan debitur yang telah disampaikan tidak memenuhi ketentuan, baik atas dasar temuan pelapor maupun temuan OJK. - Format dan isi Laporan Debitur yang disampaikan kepada OJK disusun sesuai dengan format Laporan sebagaimana dengan Lampiran I SEOJK Nomor 11/ SEOJK.01/2024.	Peraturan berdampak secara signifikan kepada LPEI Regulation has an impact significantly to LPEI	Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja terkait penyesuaian Laporan Debitur dan mekanisme Pelaporan dalam SLIK. Coordinate with Work Units related to Debtor Report adjustment and Reporting mechanism in SLIK.

No	Peraturan Perundang-undangan Legal Regulations	Pokok Peraturan Key Changes	Dampak Bagi Perseroan Impact for Indonesia Eximbank	Upaya Mitigasi Mitigation Efforts
4.	POJK 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan POJK 22 Year 2023 on Consumer and Community Protection Consumers and Society in the Financial Services Sector	1. Laporan Literasi dan Inklusi Keuangan terdiri dari Laporan Rencana dan Laporan Realisasi Literasi dan Inklusi Keuangan. 2. PUJK wajib Menyusun dan menyampaikan Laporan Layanan Pengaduan secara semesteran kepada OJK yang disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah periode semesteran berakhir. 3. PUJK wajib menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Sendiri/<i>Self Assessment</i> terhadap pemenuhan ketentuan perlindungan Konsumen dan Masyarakat kepada OJK setiap 1 (satu) tahun sekali, paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan. 1. Financial Literacy and Inclusion Report consists of Plan Report and Literacy and Financial Inclusion Realization Report. 2. PUJK are required to prepare and submit a semiannual Complaint Services Report to the OJK, no later than the 10th of the following month after the end of the reporting period. 3. PUJK is required to submit a Self-Assessment Report fulfillment of consumer and community protection provisions to OJK every 1 (one) year, no later than September 30 of the current year.	Peraturan berdampak secara signifikan terhadap LPEI. Regulation has an impact significantly on LPEI.	Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja terkait mengenai penyesuaian ketentuan internal terkait perlindungan konsumen termasuk pelaporan Realisasi Literasi dan Inklusi Keuangan. Coordinating with related Work Units regarding adjustments to internal provisions related to consumer protection including reporting Realization of Financial Literacy and Inclusion Realization.
5	PADG Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PADG Nomor 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor PADG Number 6 of 2024 on the Amendment to PADG Number 4 of 2023 on Foreign Export Proceeds and Foreign Import Payment	1. Perubahan terkait kewajiban penempatan DHE SDA yang diterima pada rekening khusus DHE SDA valuta asing. 2. Perubahan terkait pemanfaatan untuk kepentingan eksportir atas penempatan DHE SDA. 3. LPEI wajib memastikan pelaksanaan pemanfaatan DHE SDA oleh eksportir sesuai dengan Pasal 25 sampai dengan Pasal 36. 4. Untuk memastikan pemanfaatan sebagaimana dimaksud, LPEI wajib menatausahakan pemanfaatan instrumen penempatan DHE SDA kepada BI. 1. Changes related to the obligation to place DHE SDA received in the DHE SDA special account foreign currency. 2. Changes related to utilization for the benefit of exporters on the placement of DHE SDA. 3. LPEI must ensure the implementation of the utilization of DHE SDA utilization by exporters in accordance with Article 25 up to Article 36. 4. To ensure the utilization as referred to, LPEI is obliged to administer the utilization of DHE SDA placement instruments to BI.	Peraturan berdampak secara signifikan terhadap LPEI. Regulation has an impact significantly on LPEI.	Berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait atas penyesuaian ketentuan internal yang terdampak. Coordinate with related Work Units on adjustment of the affected internal that are affected.

No	Peraturan Perundang-undangan Legal Regulations	Pokok Peraturan Key Changes	Dampak Bagi Perseroan Impact for Indonesia Eximbank	Upaya Mitigasi Mitigation Efforts
6	POJK 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK POJK 11 Year 2024 regarding the Second Amendment on POJK Number 18/ POJK.03/2017 concerning Reporting and Request for Debtor Information through SLIK	- Penyesuaian definisi debitur dan informasi debitur dengan penambahan cakupan fasilitas yang diterima debitur, yaitu: - pertanggungjawaban/pengelolaan risiko; - penjaminan; dan/atau - layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. - Adanya tambahan pelapor wajib pada SLIK yaitu, perusahaan asuransi yang memasarkan produk asuransi kredit dan/atau <i>suretyship</i>, perusahaan asuransi syariah yang memasarkan produk asuransi pembiayaan syariah dan/atau <i>suretyship</i> syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, dan penyelenggara LPBBTI atau <i>fintech lending</i>. - Adjustment of debtor definition and debtor information with the addition of the scope of facilities received by the debtor, namely: - risk coverage/management; - guarantee; and/or - joint funding services based on information technology. - There are additional mandatory reporters in SLIK, namely, insurance companies that market credit and/or <i>suretyship</i> insurance products, sharia insurance companies that market sharia financing insurance products and/or <i>suretyship</i> sharia, guarantee companies, and LPBBTI organizers or <i>fintech lending</i> providers.	Peraturan berdampak secara signifikan terhadap LPEI.	Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja mengenai ketentuan pelaporan dan penyesuaian pelaporan dalam SLIK, khususnya terkait Penjaminan Kredit.

Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan LPEI pada Tahun Buku Terakhir

Per 1 Januari 2024, LPEI telah mengadopsi standar akuntansi yang berlaku efektif dan relevan untuk laporan keuangan konsolidasian, yakni dengan rincian seperti berikut:

- Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia ("KSPKI") dan perubahan nomor PSAK dan ISAK dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (sebelumnya Standar Akuntansi Keuangan), berlaku efektif tanggal 1 Januari 2024. KSPKI mengatur pilar SAK yang berlaku di Indonesia, kriteria, dan perpindahan antar pilar SAK, sedangkan perubahan nomor mengatur ketentuan penomoran PSAK dan ISAK yang mengacu pada IFRS *Accounting Standards*, standar akuntansi lokal, dan standar akuntansi syariah.
- Amendemen PSAK 201: "Penyajian Laporan Keuangan" terkait klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang.
- Amendemen PSAK 116: "Sewa" terkait liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik.
- Amendemen PSAK 207: Laporan Arus Kas dan PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang pengaturan pembiayaan pemasok.
- Revisi PSAK 401: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
- Revisi PSAK 409: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah.

Changes in Accounting Policies Applied by Indonesia Eximbank in the Last Fiscal Year

As of January 1, 2024, Indonesia Eximbank has adopted the accounting standards that are effective and relevant for consolidated financial statements, with the following details:

- The Indonesian Financial Reporting Standards Framework ("KSPKI") and changes to PSAK and ISAK numbers in the Indonesian Financial Accounting Standards (formerly known as the Financial Accounting Standards), effective January 1, 2024. KSPKI regulates the pillars of SAK applicable in Indonesia, the criteria, and the transition between SAK pillars, while the changes in numbering regulate the provisions for PSAK and ISAK numbering referring to IFRS *Accounting Standards*, local accounting standards, and Islamic accounting standards.
- Amendments to PSAK 201: "Presentation of Financial Statements" related to the classification of liabilities as current or non-current.
- Amendments to PSAK 116: "Leases" related to lease liabilities in sale and leaseback transactions.
- Amendments to PSAK 207: Statement of Cash Flows and PSAK 107: Financial Instruments: Disclosures about supplier financing arrangements.
- Revision of PSAK 401: Presentation of Islamic Financial Statements.
- Revision of PSAK 409: Accounting for Zakat, Infaq, and Sadaqah.

Dampak Terhadap LPEI

Penerapan standar akuntansi baru ini tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Tingkat Kesehatan LPEI

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) wajib melakukan penilaian mandiri atas Tingkat Kesehatan dengan mengacu pada POJK 9/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Penilaian ini menggunakan pendekatan berbasis risiko, yang mencakup evaluasi terhadap empat faktor utama:

1. Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
2. Profil Risiko;
3. Rentabilitas; dan
4. Permodalan.

Tingkat Kesehatan LPEI Triwulan IV 2024 berada pada Peringkat Komposit 3 (PK-3). Peringkat ini mencerminkan kondisi yang cukup sehat, dengan kapabilitas yang memadai untuk menghadapi dinamika bisnis dan berbagai faktor eksternal. Meskipun masih terdapat beberapa area yang perlu diperkuat, kelemahan yang ada bersifat terkendali dan dapat diatasi dengan strategi yang tepat. Oleh karena itu, LPEI tetap berada dalam posisi yang cukup *solid* untuk menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Peringkat Tingkat Kesehatan tersebut konsisten dengan hasil penilaian periode sebelumnya, yaitu Triwulan IV 2023 yang juga memperoleh Peringkat Komposit 3 (PK-3) berdasarkan hasil *self-assessment* sesuai dengan ketentuan POJK 9/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Konsistensi peringkat ini menunjukkan bahwa LPEI mampu mempertahankan stabilitas operasional dan keuangan, serta terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan.

LPEI senantiasa berkomitmen untuk memperkuat manajemen risiko, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengoptimalkan strategi bisnis guna memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung ekspor nasional.

Sesuai karakteristik dan profil risiko LPEI, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang dipersyaratkan wajib berada pada kisaran 10%–11%. Atas kewajiban ini LPEI telah melampaui batas minimum yang ditetapkan, yang mencerminkan struktur permodalan yang kuat serta kesiapan menghadapi potensi risiko di masa mendatang.

Impact on Indonesia Eximbank

The application of these new accounting standards has no material impact on the consolidated financial statements.

Soundness Level of Indonesia Eximbank

Indonesia Eximbank is required to conduct a self-assessment of its Soundness Level in accordance with POJK 9/POJK.05/2022 on the Supervision of Indonesia Eximbank. This assessment uses a risk-based approach, which includes the evaluation of four main factors:

1. Good Corporate Governance;
2. Risk Profile;
3. Profitability; and
4. Capital.

The Soundness Level of Indonesia Eximbank for the fourth quarter of 2024 is rated at Composite Rank 3 (PK-3). This rating reflects a sufficiently healthy condition, with adequate capabilities to face business dynamics and various external factors. While there are still areas that need strengthening, the existing weaknesses are manageable and can be addressed with the right strategies. Therefore, Indonesia Eximbank remains in a solid position to perform its role as the Indonesian Export Financing Agency.

This soundness rating is consistent with the assessment results from the previous period, which was the fourth quarter of 2023, also achieving Composite Rank 3 (PK-3) based on the self-assessment results in accordance with POJK 9/POJK.05/2022 on the Supervision of Indonesia Eximbank. The consistency of this rating shows that Indonesia Eximbank has been able to maintain operational and financial stability, while continuing to improve its risk management and corporate governance.

Indonesia Eximbank remains committed to strengthening risk management, improving operational efficiency, and optimizing business strategies to ensure sustainable growth and a greater contribution in supporting national exports.

In line with the characteristics and risk profile of Indonesia Eximbank, the required Capital Adequacy Ratio (CAR) must be within the range of 10%–11%. Indonesia Eximbank has exceeded the minimum threshold, reflecting a strong capital structure and preparedness to face potential risks in the future.

Rencana Jangka Panjang LPEI

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 sebagai lembaga keuangan khusus milik Pemerintah Republik Indonesia yang berfungsi mendukung program ekspor nasional melalui Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) dalam bentuk penyediaan Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi serta Jasa konsultasi. Berdasarkan Undang-Undanganya, LPEI memiliki sifat *sui-generis* dan *lex specialist* dan hanya dapat dibubarkan melalui undang-undang khusus, sehingga LPEI memiliki *sovereign status*. Status tersebut diperlukan agar LPEI mempunyai akses yang lebih luas pada sumber-sumber pendanaan yang lebih kompetitif.

Rencana Jangka Panjang LPEI (RJP LPEI) disusun sebagai pemenuhan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.06/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Fokus utama pada RJP-III (2020–2024) adalah penguatan fondasi LPEI, dimana kondisi kualitas aset yang mulai memburuk sejak tahun 2019 menjadi tantangan utama bagi LPEI. Selain itu juga, di tengah kondisi tersebut, LPEI dihadapkan juga pada kondisi pandemi COVID-19 yang berdampak pada perekonomian global dan domestik serta perdagangan dunia yang berpengaruh pada kinerja eksportir. Upaya-upaya penguatan fondasi selama RJP-III dilakukan baik secara penguatan neraca maupun penguatan dalam hal *policy* dan operasional. Terobosan-terobosan dalam hal penyelesaian permasalahan kualitas aset terus dilakukan dengan berbagai pihak untuk mempercepat perbaikan kualitas aset baik secara organik maupun inorganik. Untuk dapat memperkuat fondasi agar LPEI dapat tumbuh sesuai dengan yang diharapkan dalam perannya mendorong ekspor, diperlukan berbagai keputusan yang diambil selama pelaksanaan RJP-III (2020–2024), dimana salah satunya adalah penguatan *coverage* yang menyebabkan LPEI membukukan kerugian di beberapa periode selama pelaksanaan RJP-III. Namun demikian, penguatan fondasi tidak hanya dilakukan dalam kualitas aset, namun juga dilakukan pada berbagai dimensi operasional LPEI antara lain: melakukan *review* strategi LPEI ke depan, penguatan organisasi dan sumber daya manusia, modernisasi infrastruktur, penguatan dan pengembangan model bisnis *existing* serta penguatan risk manajemen dan kepatuhan.

Dalam perjalanannya, memasuki tahun 2022 LPEI merasa perlu untuk melakukan penyesuaian strategi ke depan dengan mempertimbangkan kondisi terkini dan *positioning* LPEI dalam ekosistem ekspor. Dalam merumuskan strategi baru ke depan tersebut, LPEI telah menetapkan *value proposition* dalam mencapai tujuan LPEI yang diharapkan di masa depan (*future state*) yaitu "*Enabling Export, Empowering*

Long-Term Plan of Indonesia Eximbank

Indonesia Export Financing Institution (Indonesia Eximbank) was established under Law No. 2 of 2009 as a special financial institution owned by the Government of the Republic of Indonesia, which functions to support the national export program through the National Export Financing (PEN), by providing financing, guarantees, insurance, and consulting services. According to the law, Indonesia Eximbank has a *sui-generis* and *lex specialist* status, and can only be dissolved through a specific law, giving Indonesia Eximbank sovereign status. This status enables Indonesia Eximbank to access more competitive sources of funding.

The Long-Term Plan (RJP) of Indonesia Eximbank is prepared in accordance with the Minister of Finance Regulation No. 231/PMK.06/2016 dated December 30, 2016, concerning the Procedures for Preparing, Submitting, and Amending the Long-Term Plan and Annual Work and Budget Plan of Indonesia Eximbank.

The main focus of the RJP-III (2020–2024) is to strengthen the foundation of Indonesia Eximbank, where declining asset quality since 2019 has become a key challenge. In addition, Indonesia Eximbank faced the COVID-19 pandemic, which significantly affected both global and domestic economic conditions, as well as global trade—ultimately impacting exporter performance. Efforts to strengthen the foundation during RJP-III include improvements to the balance sheet, policy enhancement, and operational improvements. Continuous breakthroughs have been made in resolving asset quality issues, both organically and inorganically, in collaboration with multiple parties. In order to ensure Indonesia Eximbank's foundation grows in line with its intended role in supporting exports, various strategic decisions were taken during the implementation of RJP-III (2020–2024), including efforts to improve credit coverage, which led to losses in some periods. However, foundation strengthening was not limited to asset quality, but also included various operational dimensions such as strategic reviews, strengthening human resources and organizational capacity, infrastructure modernization, development of existing business model, and enhanced risk management and compliance.

In its journey, by 2022, Indonesia Eximbank recognized the need to adjust its strategy to align with current conditions and its positioning within the export ecosystem. In shaping its new forward-looking strategy, Indonesia Eximbank defined its value proposition to achieve its desired future state: "*Enabling Export, Empowering Nation*." This value proposition serves as a guiding reference for Indonesia

Nation". LPEI memiliki *value proposition* yang dijadikan pedoman LPEI dalam mengimplementasikan strategi dalam mendorong ekspor Nasional. *Value proposition* yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. *Beyond Financing*, yaitu:
 - a. Menjadi pusat informasi ekspor,
 - b. Berkolaborasi dengan ekosistem ekspor, dan
 - c. Berorientasi pada solusi.
2. *Developmental Impact*, yaitu:
 - a. Fokus pemberian fasilitas pada sektor bernilai tambah tinggi,
 - b. Menggali potensi komoditas ekspor,
 - c. Mencetak eksportir baru yang tinggi, dan
 - d. Mengembangkan bisnis melalui *value chain* eksportir.
3. *Sustainability*, yaitu:
 - a. Mengintegrasikan aspek ESG ke dalam lini bisnis,
 - b. *Encourage renewable projects*,
 - c. Mendorong *green certification*, dan
 - d. Menerapkan *green office environment*.

Selain *value proposition* tersebut, LPEI telah menetapkan 5 pedoman utama (*key guiding principles*) sebagai landasan dalam menyusun strategi. *Key guiding principles* tersebut adalah:

1. Pertumbuhan bisnis yang progresif melalui ekosistem ekspor.
2. Menyelesaikan isu terkait LAR dan meningkatkan kualitas aset.
3. Berinvestasi pada keterampilan dan kemampuan di masa depan.
4. Memperkuat peran LPEI sebagai SMV (perpanjangan tangan pemerintah untuk alat fiskal).
5. Terus memperkuat *Balance Sheet*.

Rumah Strategi LPEI

LPEI telah memiliki lima (5) *key guiding principles* yang menjadi pedoman dan landasan dalam menyusun strategi LPEI ke depan sebagai berikut:

Eximbank's strategic implementation in supporting national exports. The defined *value proposition* includes:

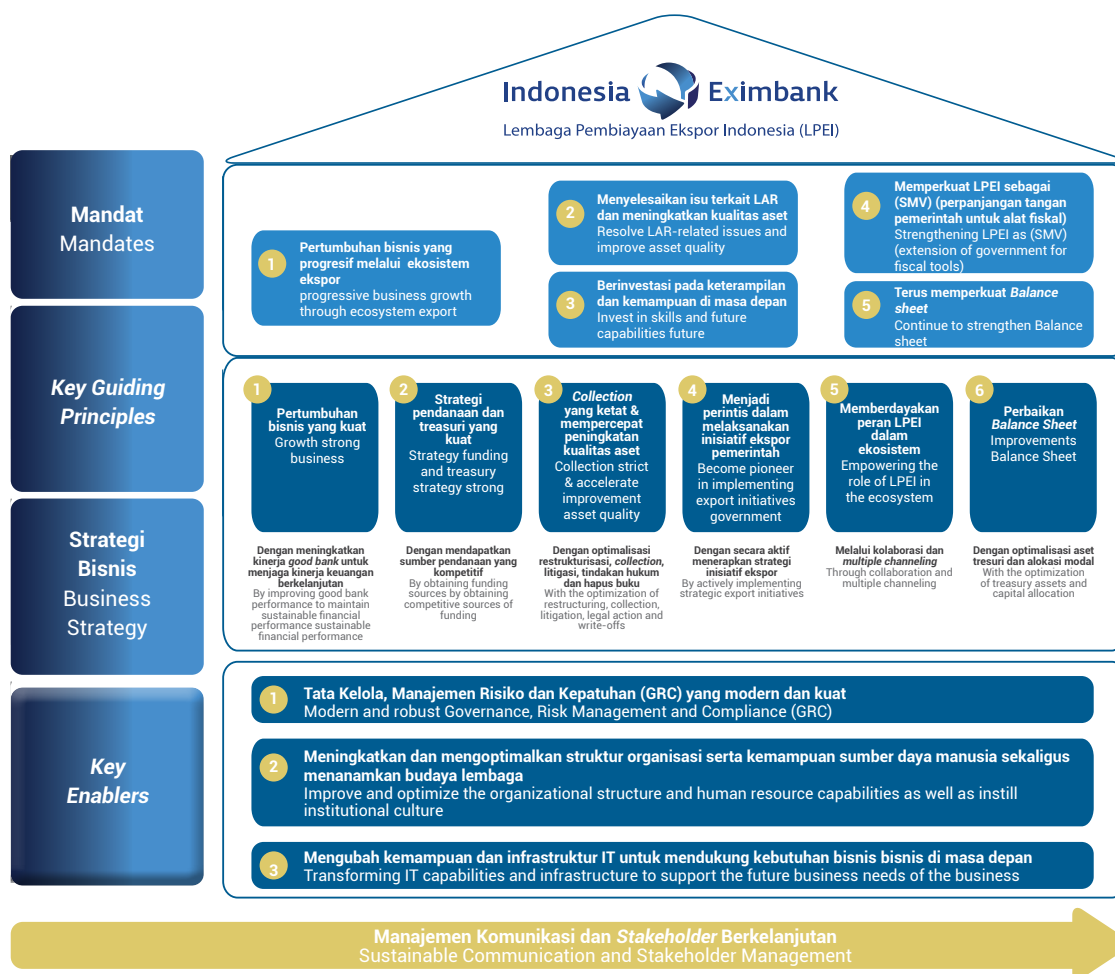
1. *Beyond Financing*:
 - a. Acting as a center for export information
 - b. Collaborating within the export ecosystem
 - c. Being solution-oriented
2. *Developmental Impact*:
 - a. Focusing on facilities for high value-added sectors
 - b. Unlocking the potential of export commodities
 - c. Generating a high number of new exporters
 - d. Expanding business through exporter value chains
3. *Sustainability*:
 - a. Integrating ESG aspects into all business lines
 - b. Encouraging renewable projects
 - c. Promoting green certifications
 - d. Implementing a green office environment

In addition to the *value proposition*, Indonesia Eximbank established five *key guiding principles* as the foundation for its strategy development:

1. Progressive business growth through the export ecosystem.
2. Resolving issues related to non-performing loans (LAR) and improving asset quality.
3. Investing in future skills and capabilities.
4. Strengthening LPEI's role as a Special Mission Vehicle (SMV) or fiscal tool of the government.
5. Continuously strengthening the balance sheet.

Indonesia Eximbank Strategy House

Indonesia Eximbank has five (5) *key guiding principles* which serve as guidelines and foundations in developing Indonesia Eximbank's future strategies as follows:



Adapun strategi LPEI ke depan dengan berlandaskan key guiding principles di atas sebagai berikut:

- Pertumbuhan Bisnis sesuai mandat**
Strategi pertumbuhan bisnis ke depan akan dilakukan melalui *hybrid approach* dengan mulai membesarkan portofolio yang berfokus pada *developmental impact*.
- Pendanaan dan treasury yang optimal**
Strategi untuk mengoptimalkan sumber pendanaan yang ada maupun diversifikasi sumber pendanaan yang lebih murah.
- Percepatan perbaikan dan peningkatan kualitas aset**
Optimalisasi anak perusahaan (PT. IPA) dalam mempercepat perbaikan kualitas aset, *collection* yang ketat, restrukturisasi, *recovery* dan melaksanakan hapus buku.
- Menjadi perintis dalam melaksanakan inisiatif ekspor pemerintah**
Menjadi perintis (*pioneer*) dalam melaksanakan inisiatif ekspor Pemerintah dengan memprioritaskan sektor industri dan menyelaraskan strategi ESG sesuai dengan rencana strategis Kementerian dan Lembaga.
- Kolaborasi dengan ekosistem ekspor**
Berperan dan berkolaborasi dengan ekosistem ekspor untuk LPEI dapat lebih *outreach* mendekati pasar.

Indonesia Eximbank's strategy going forward based on the key guiding principles above is as follows:

- Business Growth as mandated**
The future business growth strategy will be carried out through a hybrid approach by starting to grow a portfolio that focuses on developmental impact.
- Optimized funding and treasury**
Strategy to optimize existing funding sources and diversify cheaper funding sources.
- Acceleration of repair and improvement of asset quality**
Optimization of subsidiaries (PT. IPA) in accelerating asset quality improvement, strict collection, restructuring, recovery and carrying out write-offs.
- Become a pioneer in implementing government export initiatives**
Become a pioneer in implementing the Government's export initiative by prioritizing the industrial sector and aligning ESG strategies with the strategic plans of Ministries and Institutions.
- Collaboration with export ecosystem**
Play a role and collaborate with the export ecosystem for Indonesia Eximbank to outreach to the market.

6. Perbaikan *Balance Sheet*
Memperkuat fungsi treasuri serta penerapan ALMA yang menjadi salah satu langkah dalam perbaikan kualitas neraca.
7. Tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan (GRC) yang kuat dan modern
Penyusunan kebijakan dan manajemen risiko sesuai dengan perundangan dan *leading practices*, dan memiliki *risk capacity* sesuai dengan selera risiko.
8. Meningkatkan dan mengoptimalkan struktur organisasi serta kemampuan sumber daya manusia sekaligus menanamkan budaya Lembaga.
9. Memperbaiki kemampuan dan infrastruktur IT untuk mendukung kebutuhan bisnis di masa depan.
10. Manajemen komunikasi dan *stakeholder* berkelanjutan

Evaluasi RJP III tahun 2020- 2024

Kinerja keuangan LPEI tahun 2020 sampai dengan 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan opini "Wajar dalam Semua Hal yang Material". Evaluasi pelaksanaan RJP III tahun 2020-2024 dilakukan dengan membandingkan antara RJP dengan RKAT dan realisasi setiap tahunnya. Selama periode pelaksanaan RJP III periode 2020-2024, LPEI telah melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana target dan sasaran yang telah ditetapkan yang tercermin dalam pencapaian kinerja secara umum sebagai berikut:

1. Aset
Total aset tahun 2020 sebesar Rp92,02 Triliun mengalami penurunan sebesar 3,31% menjadi Rp89,04 Triliun per 31 Desember 2021. Selanjutnya total aset pada tahun 2024 mengalami penurunan sehingga menjadi Rp49,11 Triliun.

Target aset di tahun tahun 2024 yang sebesar Rp57,64 Triliun belum dapat tercapai dan memiliki pencapaian sebesar 85,21% dari target RKAT.

6. Balance Sheet Improvement
Strengthen treasury function and ALMA implementation as one of the steps in improving balance sheet quality.
7. Strong and modern governance, risk management and compliance (GRC).
Establishment of policies and risk management in accordance with legislation and leading practices, and have risk capacity in accordance with risk appetite.
8. Improving and optimizing the organizational structure and capabilities of human resources while instilling the culture of the Institution.
9. Improving IT capabilities and infrastructure to support future business needs.
10. Continuous communication and stakeholder management

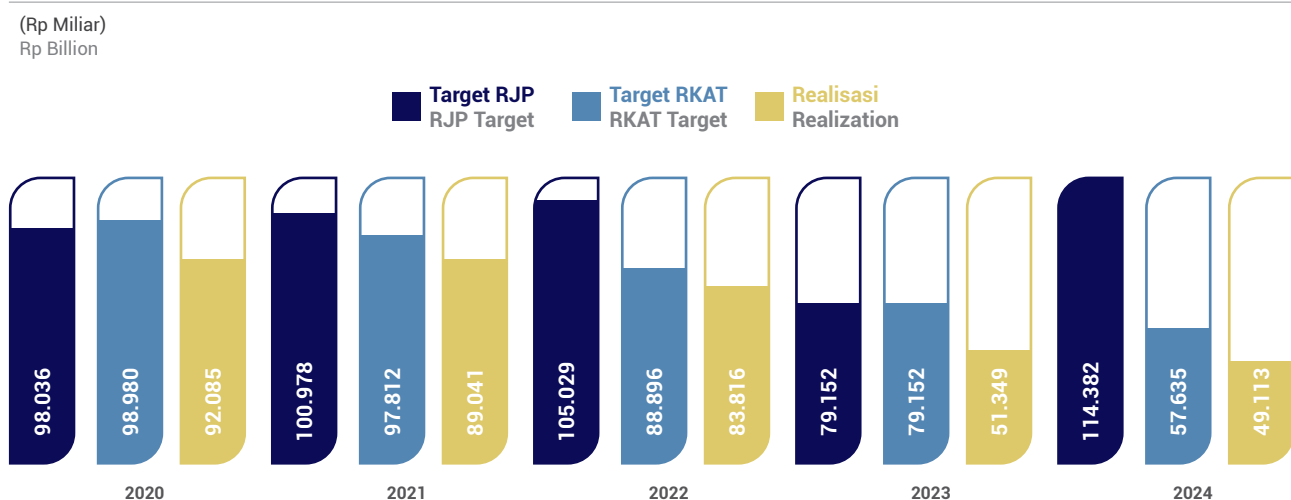
Evaluation of RJP III 2020-2024

Indonesia Eximbank's financial performance from 2020 to 2024 has been audited by the Public Accounting Firm with "unqualified" opinion. The implementation of RJP III 2020-2024 is evaluated by comparing RJP with RKAT and realization of each year. During the implementation period of of RJP III 2020-2024, LPEI has carried out its business activities as the targets and objectives that have been set which are reflected in the general performance achievements as follows:

1. Assets
Total assets in 2020 of Rp92.02 Trillion decreased by 3.31% to Rp89.04 Trillion as of December 31, 2021. Furthermore, total assets in 2024 decreased to Rp49.11 Trillion.

The asset target in 2024 of Rp57.64 Trillion has not been achieved and achieved 85.21% of the RKAT target.

Total Aset
Total Asset



2. Pembiayaan

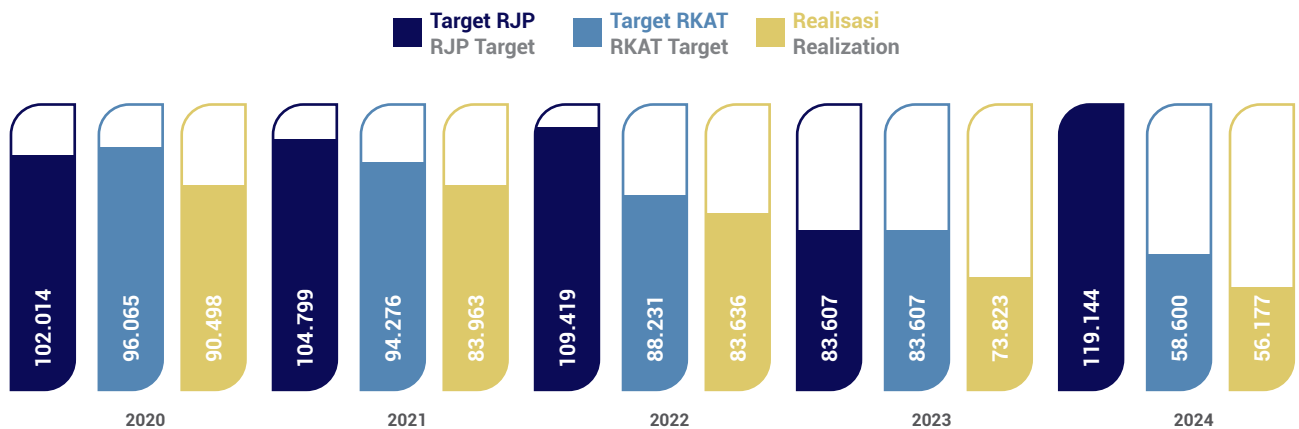
Pembiayaan yang disalurkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp56,18 Triliun atau mengalami penurunan sebesar 23,9% dari tahun 2023. Pencapaian pembiayaan pada tahun 2024 sebesar 95,9% dari target RKAT. Laju pertumbuhan majemuk tahunan (CAGR) dari tahun 2020 – 2024 rata-rata sebesar -11,24%.

2. Financing

Financing disbursed as of December 31, 2024 amounted to Rp56.18 Trillion or decreased by 23.9% from 2023. The achievement of financing in 2024 amounted to 95.9% of the RKAT target. The compound annual growth rate (CAGR) from 2020 – 2024 averaged -11.24%.

Total Pembiayaan Total Financing

(Rp Miliar)
Rp Billion



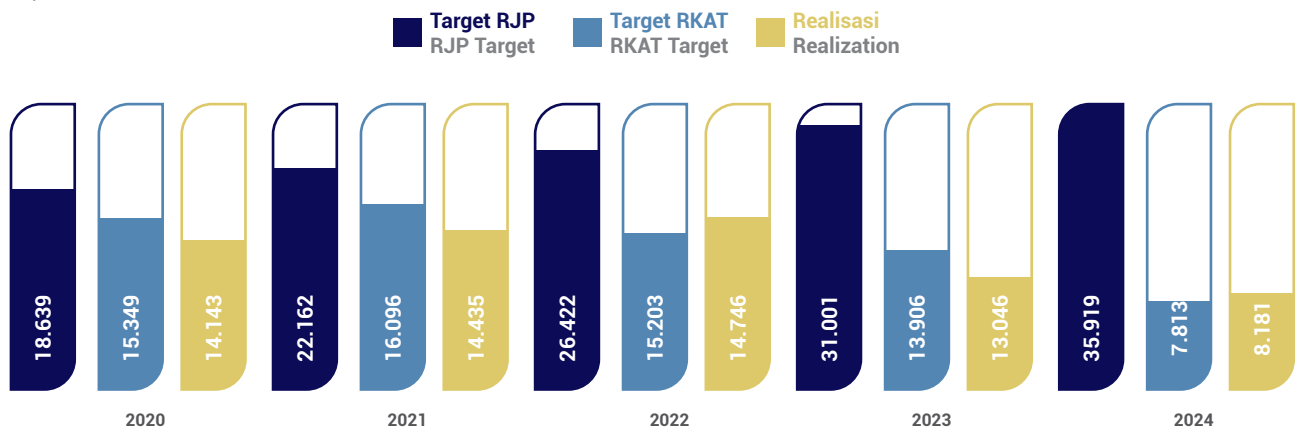
Gambar 2. 2 Grafik Total Pembiayaan 2020-2024
Figure 2.2 Graph of Total Financing 2020-2024

Share pembiayaan segmen UKM mengalami peningkatan selama 4 periode terakhir dimana pada 2020, *share* pembiayaan sebesar 15,63% dan pada akhir Desember 2023 mencapai 17,67%, namun pada tahun 2024 *share* pembiayaan segmen UKM mengalami penurunan menjadi 14,56%. Di sini terlihat bahwa LPEI mendukung pertumbuhan ekspor Indonesia di segmen UKM.

The financing share of SME segment has increased over the last 4 periods where in 2020, the financing share was 15.63% and at the end of December 2023 reached 17.67%, but in 2024 the financing share of SME segment decreased to 14.56%. This demonstrates Indonesia Eximbank's support for the growth of Indonesian exports in the SME segment

Total Pembiayaan UKM Total SME Financing

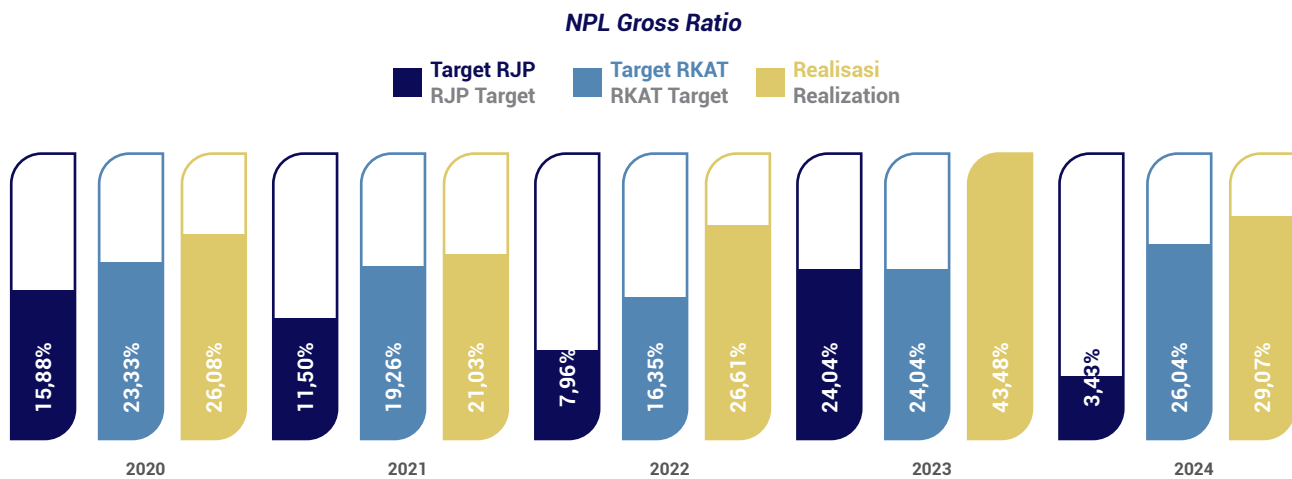
(Rp Miliar)
Rp Billion



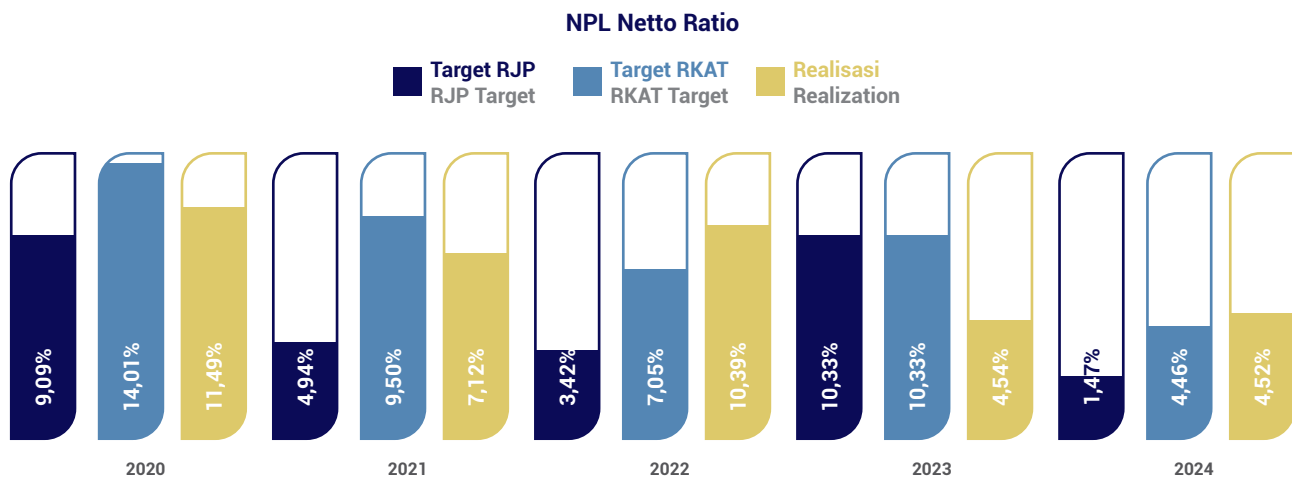
Gambar 2. 3 Grafik Pembiayaan UKM 2020-2024
Figure 2.3 Graph of SME Financing 2020-2024

NPL Gross Ratio selama 5 periode terakhir 2020 – 2024 mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2020 sebesar 26,08% meningkat menjadi 43,48% di tahun 2023 utamanya disebabkan dampak dari pandemi COVID-19 sehingga terjadi perburukan kolektibilitas debitur yang tidak diproyeksikan pada penyusunan RJP tahun 2020 -2024. *NPL Gross ratio* pada tahun 2024 menurun menjadi 29,07% yang sebagian besar disebabkan oleh hapus buku. Sementara itu, *NPL Netto Ratio* mengalami penurunan dari 11,49% di tahun 2020 menjadi 4,52% pada tahun 2024.

The NPL Gross Ratio for the last 5 periods of 2020 - 2024 has increased, at 26.08% in 2020 and increasing to 43.48% in 2023, mainly due to the impact of the Covid-19 pandemic resulting in a worsening of debtor collectibility that was not projected in the preparation of 2020-2024 RJP. The NPL Gross ratio in 2024 decreased to 29.07%, which was mostly due to write-offs. Meanwhile, the NPL Netto Ratio decreased from 11.49% in 2020 to 4.52% in 2024



Gambar 2. 4 Grafik NPL Gross Ratio 2020-2024
Figure 2.4 Graph of NPL Gross Ratio 2020-2024



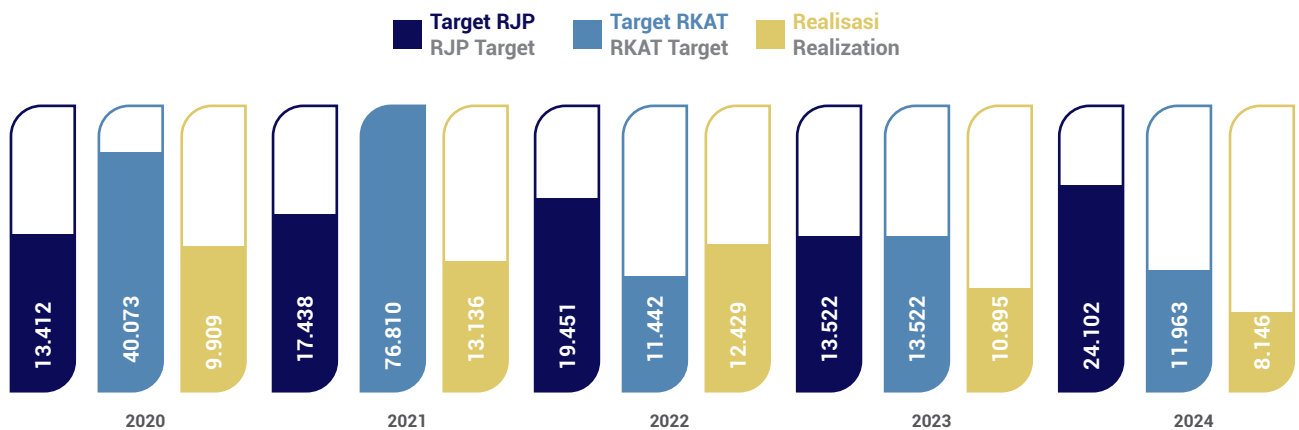
Gambar 2. 5 Grafik NPL netto ratio 2020-2024
Figure 2.5 Graph of NPL net ratio 2020-2024

3. Penjaminan

Penjaminan selama periode 2020 – 2024 memiliki laju pertumbuhan majemuk tahunan (CAGR) sebesar -4,78%. Volume penjaminan pada tahun 2020 sebesar Rp9,9 Triliun meningkat menjadi Rp10,89 Triliun di tahun 2023. Namun menurun pada tahun 2024 menjadi Rp8,15 Triliun. Pencapaian penjaminan pada tahun 2024 sebesar 68,10% dari target RKAT.

3. Guarantee

Guarantee during the period of 2020 - 2024 has an annual compound growth rate (CAGR) of -4.78%. The volume of guarantees in 2020 amounted to Rp9.9 Trillion, increasing to Rp10.89 Trillion in 2023. However, it decreased in 2024 to Rp8.15 Trillion. The guarantee achievement in 2024 amounted to 68.10% of the RKAT target.



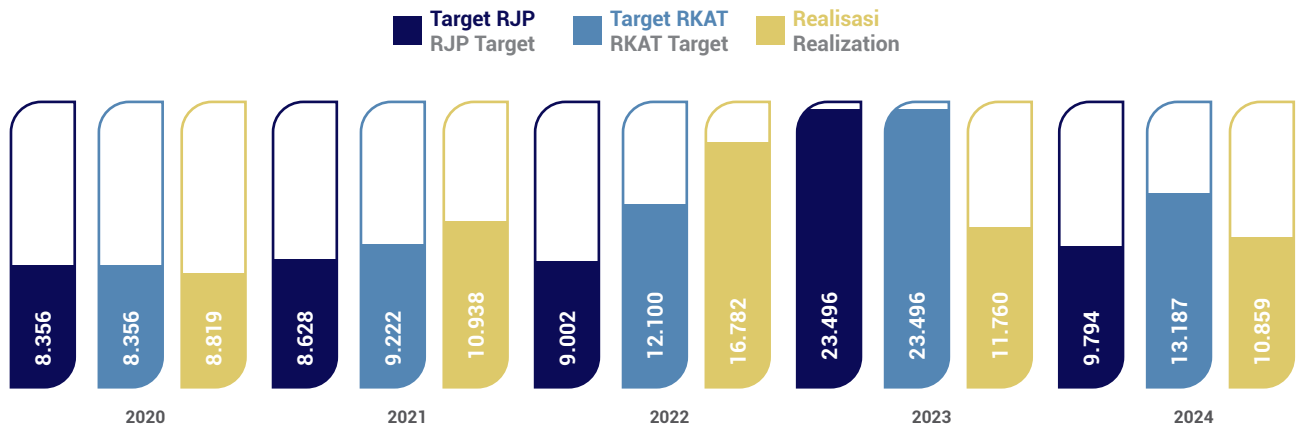
Gambar 2. 6 Grafik *outstanding* penjaminan 2020-2024
 Figure 2.6 Graph of outstanding guarantees 2020-2024

4. Asuransi

Nilai total asuransi memiliki laju pertumbuhan majemuk tahunan (CAGR) dari tahun 2020 – 2024 sebesar 7,57%. Realisasi asuransi menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dari Rp8,1 Triliun di tahun 2020 meningkat menjadi Rp10,86 Triliun pada tahun 2024. Realisasi asuransi pada tahun 2020 dan 2021 di atas target RJP dan RKAT sedangkan realisasi di tahun 2024 sebesar 82,35% dari target RKAT.

4. Insurance

The total value of insurance has a compound annual growth rate (CAGR) from 2020 - 2024 of 7.57%. Insurance realization showed significant growth from Rp8.1 Trillion in 2020 increasing to Rp10.86 Trillion in 2024. Insurance realization in 2020 and 2021 was above the RJP and RKAT targets while realization in 2024 was 82.35% of the RKAT target.



Gambar 2. 7 Grafik Total Nilai Asuransi 2020-2024
 Figure 2.7 Graph of Total Insurance Value 2020-2024

5. Laba Bersih

LPEI dapat mencatatkan perolehan laba bersih di tahun 2020 dan 2021. Akan tetapi, pada tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan yang signifikan menjadi rugi sebesar Rp18,11 Triliun dan kembali membukukan laba sebesar Rp233 miliar pada tahun 2024. Perolehan laba bersih selama 2020 – 2024 di bawah target RJP dan RKAT yang telah ditetapkan.

5. Net Profit

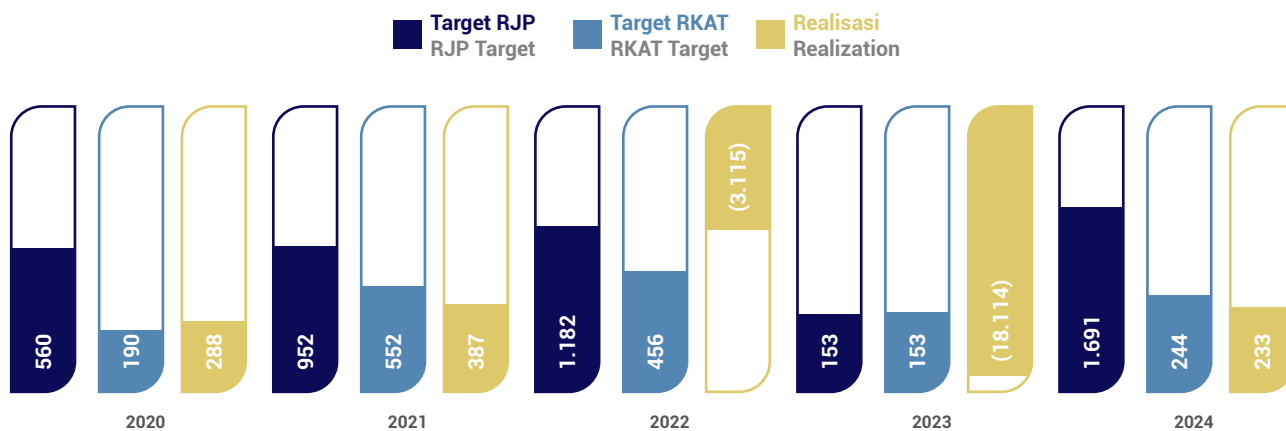
Indonesia Eximbank managed to record net profit in 2020 and 2021. However, in 2022 and 2023, it experienced a significant decline to a loss of Rp18.11 Trillion and then once again posted a profit of Rp233 billion in 2024. The net profit acquisition during 2020 - 2024 was below the RJP and RKAT targets that had been set.



Laba Bersih

Net Profit

(Rp Miliar)
Rp Billion



Gambar 2. 8 Grafik Laba Bersih 2020-2024
Figure 2.8 Graph of Net Profit 2020-2024



05

Fungsi Penunjang Bisnis

Business Support Function



Teknologi Informasi

Information Technology

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) terus memperkuat perannya dalam mendukung ekspor nasional melalui penerapan teknologi informasi (TI) yang inovatif dan terstruktur. Sebagai salah satu pilar utama transformasi digital, LPEI telah mengadopsi berbagai sistem dan solusi TI untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat keandalan data dan keamanan informasi. Strategi ini sejalan dengan visi LPEI untuk menjadi mitra strategis eksportir nasional dalam menghadapi tantangan global.

Salah satu fokus utama LPEI di bidang TI yaitu investasi pada *hardware* dan *software* untuk mendukung pengelolaan pembiayaan ekspor secara lebih cepat dan akurat. Investasi tersebut dilakukan untuk memberikan pengalaman nasabah yang lebih baik melalui proses otomatisasi dan analitik data yang efisien. Selain itu, LPEI juga terus mengembangkan infrastruktur yang dimulai dari fondasi utamanya, yaitu *core system*. Modernisasi *core system* ini kemudian diikuti dengan integrasi *surrounding system*, pengembangan *digital channel*, dan persiapan teknologi untuk mendukung bisnis model berbasis ekosistem. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem bisnis yang lebih sehat dan berdaya saing.

LPEI juga berkomitmen untuk memberdayakan sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi era digital. Penguatan SDM di bidang TI dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas karyawan dalam mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi terbaru, untuk mendukung penguatan organisasi seiring dengan penerapan bisnis model baru. Langkah-langkah strategis tersebut memperkuat optimisme LPEI bahwa pemanfaatan teknologi informasi akan terus menjadi penggerak utama dalam memperkuat daya saing ekspor nasional, sekaligus mendukung misi LPEI untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mendunia.

Fokus dan Inisiatif Strategis Divisi Teknologi Informasi Tahun 2024

Sebagai upaya mewujudkan visi "Menjadi Eximbank yang unggul dan kredibel dalam mendorong ekspor nasional yang berdaya saing tinggi pada tataran global", LPEI telah menyusun *IT Strategic Plan* untuk mendorong keunggulan operasional melalui sistem teknologi informasi yang andal. Pada tahun 2024, Divisi Teknologi Informasi LPEI menitikberatkan fokusnya pada perbaikan kapabilitas fundamental TI dalam rangka transformasi digital untuk dapat mendukung model bisnis baru LPEI melalui dua

The Indonesian Export Financing Agency (LPEI) continues to strengthen its role in supporting national exports through the implementation of innovative and structured information technology (IT). As one of the main pillars of digital transformation, LPEI has adopted various IT systems and solutions to enhance operational efficiency, improve service quality, and strengthen data reliability and information security. This strategy is in line with the vision of LPEI to become a strategic partner for national exporters in facing global challenges.

One of LPEI's main focuses in the IT sector is investing in hardware and software to support faster and more accurate management of export financing. These investments are made to provide a better customer experience through efficient data automation and analytics. In addition, LPEI also continues to develop infrastructure starting from its main foundation, the core system. The modernization of this core system is then followed by the integration of surrounding systems, the development of digital channels, and the preparation of technology to support ecosystem-based business models. These efforts do not only increase stakeholder confidence, but also encourage the creation of a healthier and more competitive business ecosystem.

LPEI is also committed to empowering human capital in the face of this digital era. The strengthening of human capital in the IT sector is carried out to improve the capabilities of employees in operating and utilizing the latest technology, to support the strengthening of the organization along with the implementation of new business models. These strategic steps reinforce LPEI's optimism that the utilization of information technology will continue to be the main driver in strengthening the competitiveness of national exports, while supporting LPEI's mission to contribute to the growth of Indonesia's global economy.

Focus and Strategic Initiatives of the Information Technology Division in 2024

In an effort to realize the vision of "Becoming a superior and credible Eximbank in encouraging highly competitive national exports at the global level", LPEI has compiled an IT Strategic Plan to encourage operational excellence through a reliable information technology system. In 2024, the Information Technology Division of LPEI focused on improving IT fundamental capabilities in the context of digital transformation to support LPEI's new business model through two main initiatives, namely the modernization of

inisiatif utama, yaitu modernisasi *core system* dan sistem pembiayaan terintegrasi serta *surrounding* dan *downstream system* yang terdampak termasuk infrastruktur dan *IT Security*-nya.

Realisasi *IT Strategic Plan* Tahun 2024

Sesuai dengan fokus utama pelaksanaan inisiatif pelaksanaan *IT Strategic Plan* yaitu Modernisasi *Core System* dan Sistem Pembiayaan Terintegrasi, maka tahun 2024 telah dilakukan pelaksanaan proyek-proyek yang bersifat *multi year* untuk mendukung inisiatif tersebut. Adapun proyek-proyek yang dimaksud, antara lain:

1. Implementasi Modernisasi *Core System* dalam rangka modernisasi kapabilitas, fungsional dan *refresh technology* atas aplikasi yang digunakan, sehingga dapat mendukung kebutuhan bisnis terkini;
2. Pembangunan aplikasi *Integrated Originating System* (IOS) yang merupakan digitalisasi proses pengelolaan Pembiayaan secara komprehensif, dimulai dari inisiasi, *credit approval*, *signing*, *Loan Booking*, *Monitor & Reporting*, dan Restrukturisasi & *Recovery*, sehingga governansi TI dapat terjaga dan proses dapat dilakukan secara efisien.
3. Implementasi aplikasi *Integrated Regulation Reporting System* (IRRS), yaitu aplikasi yang digunakan untuk konsolidasi proses penyusunan laporan kepada regulator antara lain Laporan kepada OJK (SLIK, LLD-DHE, dll)
4. Implementasi *Middleware System* yang merupakan *backbone* untuk proses integrasi antar sistem di LPEI termasuk juga integrasi dengan sistem eksternal sehingga proses transfer data dan komunikasi dapat dilakukan secara otomatis dan ter-*monitor* dengan baik.
5. Implementasi *Digital Export Platform* yang diberi nama aplikasi Komodoin sebagai media *customer touchpoint* yang dapat diakses langsung oleh pelaku eksportir dan calon *buyer* yang memiliki fitur utama antara lain Edukasi, Kurasi, Inkubasi, dan Transaksi.

Selain pembangunan dan implementasi sistem dan platform aplikasi tersebut, pada tahun 2024 juga telah dilakukan inisiasi penguatan infrastruktur, yaitu peremajaan dan *technology refreshment* atas infrastruktur *Disaster Recovery Center* (DRC) LPEI sehingga dapat mendukung *Business Continuity Plan* (BCP) LPEI pada saat terjadi kondisi bencana sehingga operasional dan bisnis LPEI tidak terganggu. Bersamaan dengan proses modernisasi *core system*, dilakukan pula peremajaan atas seluruh infrastruktur (Server, Storage dan

core systems and integrated financing systems as well as surrounding and downstream systems affected including infrastructure and IT Security.

Realization of the 2024 *IT Strategic Plan*

In accordance with the main focus of the IT Strategic Plan initiative, namely the Core System Modernization and Integrated Financing System, multi-year projects have been implemented in 2024 to support this initiative. The projects in question include:

1. Implementation of Core System Modernization in the context of capability modernization, functional and refresh technology of the applications used, so that it can support current business needs;
2. Development of the Integrated Originating System (IOS) application, which is a comprehensive digitization of the financing management process, starting from initiation, credit approval, signing, loan booking, monitoring & reporting, and restructuring & recovery, thus maintaining IT governance and enabling processes to be carried out efficiently.
3. Implementation of the Integrated Regulation Reporting System (IRRS) application, which is an application used to consolidate the process of preparing reports to regulators, including reports to the OJK (SLIK, LLD-DHE, etc.).
4. Implementation of the Middleware System, which is the backbone for the integration process between systems at LPEI, including integration with external systems allowing for automatic and well-monitored data transfer and communication processes.
5. Implementation of the Digital Export Platform, named the Komodoin application, as a customer touchpoint medium that can be directly accessed by exporters and prospective buyers, with the main features including Education, Curation, Incubation, and Transactions.

In addition to the development and implementation of systems and application platforms, in 2024, infrastructure strengthening has also been initiated, namely rejuvenation and technology refreshment of the LPEI Disaster Recovery Center (DRC) infrastructure in order to support the LPEI Business Continuity Plan (BCP) in the event of a disaster. Therefore, LPEI operations and business will not be disrupted. Along with the modernization process of the core system, the entire infrastructure (Server, Storage and

Network) yang digunakan untuk operasional *core system* sehingga dapat mengakomodir pengembangan *core system* 5 (lima) tahun kedepan pada aspek *performance* dan kapasitas.

Pada aspek *IT Security*, LPEI telah didukung oleh *Dedicated IT Security Officer*, yang merupakan Tim Tanggap Insiden Siber dan implementasi *Security Operation Center (SOC)* untuk *me-monitor* dan memberikan respon cepat ketika terjadi serangan *Cyber Security*. Keberadaan *Dedicated IT Security Officer* tersebut memungkinkan mitigasi risiko secara komprehensif demi menghindari terjadinya *cyber incident* yang menyebabkan kerugian bagi LPEI.

Tata Kelola Teknologi Informasi

Tata kelola teknologi informasi (TI) LPEI menjadi salah satu fondasi utama dalam memastikan penggunaan TI yang terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Maka dari itu, LPEI memastikan bahwa teknologi informasi berkontribusi secara optimal terhadap kinerja operasional dan pengembangan layanan. Komitmen ini senantiasa diterapkan LPEI untuk tetap adaptif terhadap perubahan teknologi dan dinamika pasar global, sekaligus memperkuat posisinya sebagai lembaga pembiayaan ekspor yang tangguh dan kompetitif.

Tata kelola terkait pelaksanaan teknologi informasi telah menetapkan *baseline building block* yang berfungsi untuk memisahkan proses-proses strategi, perencanaan, pengembangan, operasional, serta pemantauan, dengan mengacu pada Tata Kelola TI yang diterapkan LPEI. Kemudian, Tata Kelola TI akan merepresentasikan *baseline* tersebut dalam struktur organisasi untuk menerapkan proses yang diadopsi menjadi aktivitas-aktivitas TI, manajemen Risiko TI, Kepatuhan dan Audit TI dan Manajemen Layanan & Infrastruktur TI.

Program Ketahanan dan Keamanan Siber

Ketahanan dan keamanan siber merupakan salah satu hal paling penting dalam era digital saat ini, dilakukan dengan mengimplementasikan *Integrated IT Security Access & monitoring* sebagai *final state roadmap* pengembangan Keamanan TI yang akan dicapai dengan implementasi *Cyber Security Framework (identity-protect-detect-respond-recover)* dan penguatan atas 4 pilar pengamanan TI, yaitu dari aspek *Governance, People, Process* dan *Infrastructure*. Sehingga prinsip-prinsip *IT Cyber Security*, yaitu *Confidentiality-Integrity-Availability* dapat dijaga dengan baik. *Roadmap* terkait dengan ketahanan dan keamanan siber di LPEI yang telah dilakukan pada keempat pilar tersebut, antara lain:

Network) used for core system operations is also being rejuvenated to accommodate the development of the core system over the next 5 (five) years in terms of performance and capacity.

In the aspect of *IT Security*, LPEI has been supported by a *Dedicated IT Security Officer*, which is the *Cyber Incident Response Team* and a *Security Operation Center (SOC)* to monitor and provide a quick response when a *Cyber Security* attack occurs. The existence of the *Dedicated IT Security Officer* enables comprehensive risk mitigation to avoid cyber incidents that cause losses to LPEI.

Information Technology Governance

The governance of LPEI information technology (IT) is one of the main foundations in ensuring a directed, effective utilization of IT that is in line with business needs. Therefore, LPEI ensures that information technology contributes optimally to operational performance and service development. LPEI constantly applies this commitment to remain adaptive to technological changes and global market dynamics, while strengthening its position as a resilient and competitive export financing institution.

Governance related to the implementation of information technology has established a *baseline building block* that functions to separate the strategy, planning, development, operational, and monitoring processes, with reference to the IT Governance implemented by LPEI. Then, IT Governance will represent this baseline in the organizational structure to apply the adopted processes to IT activities, IT Risk Management, IT Compliance and Audit, and IT Service & Infrastructure Management.

Cyber Security and Resilience Program

Cyber security and resilience are among the most important issues in today's digital era. This is done by implementing *Integrated IT Security Access & Monitoring* as the final state roadmap for IT Security development, which will be achieved with the implementation of the *Cyber Security Framework (identity-protect-detect-respond-recover)* and the strengthening of the 4 pillars of IT security, namely *Governance, People, Process* and *Infrastructure*. In this way, the principles of *IT Cyber Security*, i.e. *Confidentiality-Integrity-Availability*, can be properly maintained. The roadmap related to cyber resilience and security at LPEI that has been carried out on the four pillars includes:

1. *Governance: Regular review dan Update IT Policy, Penyusunan Standard/baseline konfigurasi aplikasi/ sistem, Password Management, Change Management, Penyusunan IT Risk Register dan RCSA;*
2. *People: Peningkatan security awareness berupa sosialisasi, training, campaign, cyber security drill, penguatan skill dan kompetensi serta Dedicated IT Security Officer;*
3. *Process: Implementasi SOC, Periodic Vulnerability Assessment dan Hardening, Penerapan Standar konfigurasi PC/Laptop); dan*
4. *Infrastruktur: Implementasi Multi factor Authentication, Backup System, Pemisahan infrastruktur production dan development.*

Ketahanan dan keamanan siber LPEI dilakukan dengan penggunaan konsep *multi-layer defence* secara konsisten yang terdiri dari 5 (lima) *layer*, yaitu *layer 1* Pengamanan pada area Server, *layer 2* pengamanan pada *endpoint devices*, *layer 3* pengamanan pada perangkat perimeter, *layer 4* pengamanan pada *Trusted Zone Local Area Network (LAN)*, dan *layer 5* pengamanan pada aplikasi.

Sedangkan untuk pengembangan ke depan dalam aspek keamanan siber, LPEI berencana untuk menerapkan *Anti Fraud Detection System, DSN Security Tools, Data Access Governance, Enhancement patch management, Data Loss Prevention Tools, Code Reviewer Tools, Micro Segmentation, Privilege Access Management, Database Activity Monitoring dan Database Firewall.*

LPEI juga telah membentuk Tim Tanggap Insiden Siber yang ditugaskan untuk mewujudkan pengelolaan keamanan informasi sesuai dengan prinsip keamanan informasi secara efektif, yaitu untuk menjamin ketersediaan (*availability*), keutuhan (*integrity*), dan kerahasiaan (*confidentiality*) aset Lembaga. Dengan demikian, LPEI dapat menyediakan dukungan TIK yang aman, serta meningkatkan kesadaran (*awareness*) dan kapabilitas dalam sektor keamanan informasi pada sumber daya manusia Lembaga.

Rencana pengembangan ketahanan dan keamanan siber LPEI juga selaras dengan pengesahan undang-undang perlindungan data pribadi (PDP) yang sangat relevan dengan era digital saat ini.

Rencana Strategis Tahun 2025

Fokus utama untuk program kerja TI di tahun 2025 adalah untuk melakukan penyelesaian Implementasi Modernisasi *Core System*, termasuk dengan *enhancement* seluruh

1. Governance: Regular review and Update of IT Policy, Preparation of Standard/baseline of application/ system configuration, Password Management, Change Management, Preparation of IT Risk Register and RCSA;
2. People: Increasing security awareness in the form of socialization, training, campaigns, cyber security drills, strengthening skills and competencies, and Dedicated IT Security Officers;
3. Process: SOC implementation, Periodic Vulnerability Assessment and Hardening, application of PC/Laptop configuration standards); and
4. Infrastructure: Implementation of Multi-factor Authentication, Backup System, Separation of production and development infrastructure.

LPEI's cyber security and resilience is conducted by consistently using the multi-layer defense concept comprising 5 (five) layers, namely layer 1 Security on Server areas, layer 2 security on endpoint devices, layer 3 security on perimeter devices, layer 4 security on Trusted Zone Local Area Network (LAN), and layer 5 security on applications.

As for future development in the aspect of cybersecurity, LPEI plans to implement Anti-Fraud Detection System, DSN Security Tools, Data Access Governance, Enhancement patch management, Data Loss Prevention Tools, Code Reviewer Tools, Micro Segmentation, Privilege Access Management, Database Activity Monitoring and Database Firewall.

LPEI has also formed a Cyber Incident Response Team that is tasked with realizing information security management in accordance with the principles of effective information security, namely to guarantee the availability, integrity, and confidentiality of the organization's assets. Thus, LPEI can provide secure ICT support, as well as increase awareness and capabilities in the information security sector among its human capital.

The LPEI's cybersecurity resilience and security development plan is also in line with the ratification of the personal data protection (PDP) law, which is highly relevant to the current digital era.

Strategic Plan for 2025

The main focus for IT work programs in 2025 is to complete the implementation of the Core System Modernization, including the enhancement of all affected Surrounding



Surrounding dan *Downstream system* yang terdampak (33 sistem/aplikasi). Rencana strategis tersebut telah disesuaikan dengan *timeline* implementasi yang akan selesai pada Semester-II tahun 2025, serta *Integrated Originating System* (IOS) pada Semester-I tahun 2025. Selain itu LPEI juga berencana untuk mengimplementasikan sistem baru, antara lain:

1. *New GL System* untuk meningkatkan integritas, akurasi dan keteraturan pencatatan keuangan LPEI;
2. Implementasi *Anti Money Laundering* (AML) yang dapat mendukung proses analisis dan pemantauan transaksi keuangan nasabah menjadi lebih cepat dan efektif.

Sedangkan, atas sistem yang ada akan dilakukan *enhancement* pada *expense system* untuk memenuhi kebutuhan operasional terkait dengan proses *travel* dan *advance*, sistem asuransi terkait dengan *improvement* pada proses penerbitan *billing* premi asuransi, *enhancement* beberapa *dashboard* MIS, dan pengembangan lanjutan pada sistem IOS dan IRRS.

Pada area infrastruktur akan dilakukan peremajaan dan *technology refreshment* atas infrastruktur server, *storage*, *network* dan *firewall non-core* sebagai bagian dari *capacity plan* dan *life cycle management*. Peremajaan infrastruktur TI LPEI dilakukan untuk mendukung rencana pengembangan sistem/aplikasi selama 5 (lima) tahun mendatang, serta sebagai mitigasi risiko atas penggunaan perangkat yang telah mencapai masa *end of support*.

Pelaksanaan *project* pengembangan sistem dan infrastruktur IT pada tahun 2025 diharapkan menjadi salah satu aspek yang mendukung tema RJP LPEI, yaitu *Fixing Fundamental* khususnya kapabilitas fundamental TI.

and *Downstream systems* (33 systems/applications). The strategic plan has been adjusted to an implementation timeline that will be completed in the second semester of 2025, as well as the *Integrated Originating System* (IOS) in the first semester of 2025. In addition, LPEI also plans to implement new systems, including:

1. *New GL System* to improve the integrity, accuracy and regularity of LPEI's financial records;
2. Implementation of *Anti Money Laundering* (AML) which can support the analysis and monitoring of customer financial transactions to be faster and more effective.

Meanwhile, for the existing system, the expense system will be enhanced to meet operational needs related to the travel and advance processes, the insurance system related to the process improvement for issuing insurance premium billing, enhancement of several MIS dashboards, and further development of the IOS and IRRS systems.

In the infrastructure area, the server, storage, network and non-core firewall infrastructure will be rejuvenated and technology refreshed as part of the capacity plan and life cycle management. The rejuvenation of LPEI's IT infrastructure is carried out to support system/application development plans for the next 5 (five) years, as well as to mitigate the risk of using devices that have reached their end of support period.

The implementation of IT system and infrastructure development projects in 2025 is expected to be one of the aspects that support the theme of LPEI's RJP, namely *Fixing Fundamentals*, especially IT fundamental capabilities.







06

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance



Pencapaian Terbaik Dalam Penerapan Tata Kelola Yang Baik

Best Achievement In the Implementation of Good Corporate Governance



LPEI menegakkan standar tata kelola yang tinggi untuk memastikan operasional yang transparan dan bertanggung jawab. Dengan berpegang pada prinsip integritas, akuntabilitas, dan independensi, setiap kebijakan dirancang guna mendukung keberlanjutan dan daya saing institusi. Penerapan tata kelola yang kuat tidak hanya meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, tetapi juga memperkuat manajemen risiko serta efektivitas bisnis. Melalui komitmen ini, LPEI terus berkontribusi dalam memperkuat ekspor nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Indonesia Eximbank upholds high governance standards to ensure transparent and responsible operations. By adhering to the principles of integrity, accountability, and independence, each policy is designed to support the sustainability and competitiveness of institutions. The implementation of strong governance not only increases stakeholder trust, but also strengthens risk management and business effectiveness. Through this commitment, Indonesia Eximbank continues to contribute to strengthening national exports and encouraging sustainable economic growth.

Komitmen dan Kebijakan Penerapan Tata Kelola pada LPEI

Commitment and Policy to Governance Implementation At Indonesia Eximbank

LPEI berkomitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas dalam seluruh proses bisnisnya. Sebagai lembaga yang mendukung ekspor Indonesia, LPEI menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan dengan kebijakan yang tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan berorientasi pada keberlanjutan. Setiap kebijakan dan keputusan yang diambil mencerminkan komitmen untuk menjaga kestabilan operasional serta mendukung pencapaian visi pembangunan yang lebih luas.

Penerapan tata kelola di LPEI bertujuan untuk memastikan pengelolaan lembaga yang transparan dan akuntabel, melindungi hak-hak pemangku kepentingan, serta memperkuat kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan pendekatan ini, LPEI berupaya menjadi entitas yang adaptif, berdaya saing, dan terus berkembang secara berkesinambungan.

LPEI tidak hanya memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga secara sungguh-sungguh menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang dalam setiap kegiatan operasionalnya, memastikan bahwa seluruh kegiatan dijalankan dengan integritas dan transparansi.

Indonesia Eximbank is committed to upholding the principles of transparent, accountable, and ethical governance in all its business processes. As an institution that supports Indonesian exports, Indonesia Eximbank maintains the trust of all stakeholders with policies that not only comply with regulations, but also create a professional and sustainability-oriented work environment. Every policy and decision made reflects a commitment to maintaining operational stability and supporting the achievement of a broader development vision.

The implementation of corporate governance at Indonesia Eximbank aims to ensure transparent and accountable management of the institution, protect the rights of stakeholders, and strengthen compliance with applicable regulations. With this approach, Indonesia Eximbank strives to be an adaptive, competitive, and continuously developing entity.

Indonesia Eximbank does not only comply with laws and regulations, but also earnestly applies governance principles in all of its operational activities, ensuring that all activities are carried out with integrity and transparency.

Dasar Penerapan Tata Kelola LPEI

Basis for Indonesia Eximbank Governance Implementation



Implementasi Tata Kelola di LPEI dilaksanakan berdasarkan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 ("UU No. 2/2009") tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), pasal 17 yang menyatakan bahwa:
 - a. Dalam menjalankan tugasnya, LPEI wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, prinsip penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah.
 - b. Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran.
2. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 208/ PMK.06/2021 ("PMK No. 208/2021") tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI, pasal 3 yang menyatakan bahwa:
 - a. LPEI wajib menerapkan prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap menjalankan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara efektif.
 - b. Pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam:
 - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana;

Governance implementation at Indonesia Eximbank is carried out based on the prevailing laws and regulations, among others:

1. Act No. 2 of 2009 on the Indonesia Eximbank, Article 17 states that:
 - a. In carrying out its duties, Indonesia Eximbank is obliged to implement the principles of good corporate governance, risk management, and know your customer.
 - b. The implementation of good corporate governance principles as referred to in paragraph (1) includes the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.
2. The Minister of Finance Regulation No. 208/PMK.06/2021 ("PMK No. 208/2021") on Principles of Governance, Risk Management Principles, and Know Your Customer of Indonesia Eximbank in Article 3 which emphasizes that:
 - a. Indonesia Eximbank must apply the principles of good corporate governance in every business activity at all levels or organization effectively.
 - b. The implementation of risk management principles as referred to in paragraph (1) shall include:
 - Implementation of duties and responsibilities of Board of Directors, Executive Director, Managing Director;

- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dan komite-komite serta satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal;
 - Penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal;
 - Penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian internal;
 - Pengadaan barang dan jasa;
 - Penyusunan rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan; dan
 - Pelaporan internal dan benturan kepentingan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI No. 9/POJK.05/2022 ("POJK No. 9/2022") tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, pasal 9 yang menyatakan bahwa:
- a. LPEI wajib melaksanakan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 - b. Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - keterbukaan;
 - akuntabilitas;
 - tanggung jawab;
 - kemandirian; dan
 - kewajaran.
 - c. Pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus diwujudkan dalam:
 - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan Dewan Pengawas Syariah;
 - Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal;
 - Penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal;
 - Penerapan Manajemen Risiko, termasuk sistem pengendalian internal;
 - Rencana bisnis LPEI;
 - Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan; dan
 - Pelaporan internal dan benturan kepentingan.

- Completeness and implementation of duties of Sharia Supervisory Board and committees and work units that carry out internal control functions;
- Implementation of compliance, internal audit, and external audit functions;
- Implementation of Risk Management including internal control system;
- Procurement of goods and services;
- Preparation of long-term plans and annual work plans and budgets;
- Transparency of financial and non-financial conditions; and
- Internal reporting and conflicts of interest.

3. The Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Regulation No. 9/POJK.05/2022 ("POJK No. 9/2022") on Supervision of Indonesia Eximbank, Article 9 which states that:

- a. Indonesia Eximbank is obliged to implement the principles of Good Corporate Governance in every business activity at all levels of the organization.
- b. The principles of Good Corporate Governance as referred to in paragraph (1) include:
 - Transparency;
 - Accountability
 - Responsibility
 - Independence; and
 - Fairness.
- c. The implementation of Good Corporate Governance principles as referred to in paragraph (1) must at least be realized in:
 - Implementation of duties and responsibilities of Board of Directors, Executive Director, Managing Director, and Sharia Supervisory Board;
 - Completeness and implementation of duties of committees and work units that carry out the internal control function;
 - Implementation of compliance, internal audit, and external audit functions;
 - Implementation of Risk Management, including internal control system;
 - Indonesia Eximbank business plan;
 - Transparency of financial and non-financial conditions; and
 - Internal reporting and conflict of interest

Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola LPEI

Implementation of Indonesia Eximbank Governance Principles

LPEI senantiasa mengedepankan penerapan prinsip-prinsip tata kelola sebagai landasan utama dalam menjalankan bisnis dan operasionalnya. Seluruh jajaran, mulai dari Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, hingga seluruh pegawai, berperan aktif dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan.

Indonesia Eximbank always prioritizes the implementation of governance principles as the main foundation in running its business and operations. All levels, from Board of Directors, Executive Director, Managing Director, to all employees, play an active role in ensuring that governance principles are implemented consistently and continuously.

Sebagai *Special Mission Vehicle* (SMV) milik Pemerintah Republik Indonesia yang juga terdaftar di pasar modal, LPEI memahami bahwa penerapan tata kelola yang berkualitas tidak hanya memperkuat transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga meningkatkan kepercayaan *stakeholder* serta mendukung keberlanjutan bisnis. Dengan berlandaskan pada prinsip Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, dan Kewajaran, LPEI terus memperkuat budaya tata kelola yang berintegritas di setiap tingkatan organisasi. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

As a *Special Mission Vehicle* (SMV) owned by the Indonesian Government that is also listed on the capital market, Indonesia Eximbank understands that the implementation of quality governance not only strengthens transparency and accountability, but also increases stakeholder confidence and supports business sustainability. Based on the principles of Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness, Indonesia Eximbank continues to strengthen a culture of governance with integrity at every level of the organization. The application of these principles can be described as follows:

Prinsip Tata Kelola yang Baik:
Keterbukaan
GCG Principle
Transparency

Penjelasan:
Suatu keadaan penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI yang menjamin keterbukaan dalam proses pembuatan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik yang berlaku umum.

Explanation:
A state of implementation of Indonesia Eximbank's business activities that ensures transparency in the decisionmaking process regarding the implementation of Indonesia Eximbank's business activities in accordance with the provisions of laws and regulations and generally accepted practices.

Penerapan di LPEI:

1. LPEI menyediakan informasi terkini yang relevan bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat luas melalui situs web yang mudah diakses, yaitu: <https://www.indonesiaeximbank.go.id/>. Publikasi seluruh informasi tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait transparansi informasi dan peraturan perusahaan;
2. LPEI menerbitkan laporan yang dipublikasikan secara berkala dan tepat waktu, antara lain Laporan Keuangan Triwulan, Laporan Keuangan Semester, Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit, dan Laporan Tahunan;
3. LPEI mengadakan kegiatan paparan publik dengan media cetak dan elektronik, serta forum investor.

Implementation at Indonesia Eximbank:

1. Indonesia Eximbank provides up-to-date relevant information for stakeholders and the general public through an easily accessible website, namely: <https://www.indonesiaeximbank.go.id/>. The publication of all information remains in compliance with applicable laws and regulations regarding information transparency and Company regulations.
2. Indonesia Eximbank issues reports published regularly and timely, including Quarterly Financial Reports, Semi-Annual Financial Reports, audited Annual Financial Reports, and Annual Reports.
3. Indonesia Eximbank conducts public presentations through print and electronic media, as well as investor forums.

Prinsip Tata Kelola yang Baik:

Akuntabilitas
GCG Principle
Accountability

Penjelasan:

Suatu keadaan penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI yang dapat menjelaskan fungsi dari setiap pihak yang terkait dengan LPEI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik yang berlaku umum.

Explanation:

A state of implementation of Indonesia Eximbank's business activities that can explain the functions of each party related to Indonesia Eximbank in accordance with the provisions of laws and regulations and generally accepted practices.

Penerapan di LPEI:

1. LPEI memiliki sistem pengelolaan yang mendukung terciptanya kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kinerja dari masing-masing organ Lembaga;
2. LPEI menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders*;
3. Direktur Eksekutif secara berkala menyampaikan sejumlah laporan kepada Dewan Direktur, seperti pelaporan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) dan evaluasi kinerja keuangan Lembaga, penyampaian laporan keuangan pada RUPS Tahunan, pembentukan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan penunjukan auditor eksternal, serta pemberlakuan Pedoman Kode Etik bagi semua pegawai LPEI.

Implementation at Indonesia Eximbank:

1. Indonesia Eximbank has a management system that supports the clarity of functions, implementation, and performance accountability of each organ of the Institution.
2. Indonesia Eximbank sets business objectives and strategies to be accountable to stakeholders;
3. The Executive Director periodically submits a number of reports to the Board of Directors, such as reporting the Annual Budget Plan (RKAT) and financial performance evaluations of the Institution, presenting financial reports at the Annual General Meeting of Shareholders, establishing the Internal Audit Unit (SKAI) and appointing external auditors, as well as enforcing the Code of Conduct Guidelines for all Indonesia Eximbank employees.

Prinsip Tata Kelola yang Baik:

Pertanggungjawaban
GCG Principle
Responsibility

Penjelasan:

Suatu keadaan penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI yang dapat menegaskan dan menjelaskan peranan dan status dari setiap pihak yang terkait dengan LPEI untuk setiap proses pembuatan dan penerapan kebijakan di LPEI.

Explanation:

A state of implementation of Indonesia Eximbank's business activities that can affirm and explain the role and status of each party related to Indonesia Eximbank for each policy making and implementation process at Indonesia Eximbank.

Penerapan di LPEI:

4. Dalam rangka menjaga kelangsungan atau keberlanjutan usaha pada jangka panjang, LPEI memastikan kepatuhan penyelenggaraan operasional dan bisnisnya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. LPEI menyalurkan dampak ekonomi yang berkelanjutan melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan (TJSL) terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Implementation at Indonesia Eximbank:

1. In order to maintain the long-term viability or sustainability of the business, Indonesia Eximbank ensures that its operations and business comply with applicable laws and regulations;
2. Indonesia Eximbank channels sustainable economic impact through Corporate Social and Environmental Responsibility (SER) activities to the surrounding community and environment.

Prinsip Tata Kelola yang Baik:

Kemandirian
GCG Principle
Independence

Penjelasan:

Suatu keadaan di mana LPEI dikelola secara profesional yang bebas dari benturan kepentingan dan/atau pengaruh atau tekanan dari setiap pihak mana pun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik yang berlaku umum.

Explanation:

A state where Indonesia Eximbank is managed professionally that is free from conflicts of interest and/or influence or pressure from any party that is not in accordance with the provisions of laws and regulations and generally accepted practices.

Penerapan di LPEI:

1. LPEI memastikan bahwa pengelolaan Lembaga dilakukan secara independen sehingga masing-masing organ tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain;
2. Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur memiliki pendapat yang independen dalam setiap keputusan yang diambil, meski demikian kedua organ tersebut dimungkinkan untuk mendapatkan saran dari komite-komite yang berada di bawah supervisinya dan/atau konsultan eksternal yang independen.

Implementation at Indonesia Eximbank:

1. Indonesia Eximbank ensures that the management of the Institution is conducted independently so that each organ does not dominate each other and cannot be intervened by other parties.
2. The Executive Director and Board of Directors have independent opinions in every decision made, although both organs are allowed to receive advice from committees under their supervision and/or independent external consultants.

Prinsip Tata Kelola yang Baik:

Kewajaran
GCG Principle
Fairness

Penjelasan:

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak setiap pihak yang timbul berdasarkan perjanjian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Explanation:

Fairness and equality in fulfilling the rights of each party arising under the agreement and in accordance with the provisions of laws and regulations.

Penerapan di LPEI:

1. LPEI senantiasa melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya;
2. LPEI terus berupaya membangun hubungan industrial yang harmonis dengan seluruh karyawan secara adil dan wajar;
3. LPEI memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat untuk kepentingan LPEI serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Implementation at Indonesia Eximbank:

1. Indonesia Eximbank always protects the interests of shareholders and other stakeholders.
2. Indonesia Eximbank continues to strive to build harmonious industrial relations with all employees fairly and reasonably.
3. Indonesia Eximbank provides opportunities for all stakeholders to provide input and express opinions for the benefit of Indonesia Eximbank and opens access to information in accordance with the principle of openness.

LPEI berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam setiap aspek operasionalnya. Sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, Dewan Direktur telah menyusun *Board Manual* yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran manajemen, termasuk Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana. Selain itu, LPEI mengacu pada prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik untuk memastikan praktik bisnis yang selaras dengan kepentingan para pemangku kepentingan.

Keterpaduan antara tata kelola yang baik yang dijalankan secara komprehensif dan konsisten dengan kepentingan pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan serta menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan produktif. Dengan dukungan seluruh insan LPEI, penerapan prinsip-prinsip tata kelola ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan dan pertumbuhan berkelanjutan LPEI dalam mendukung perekonomian nasional.

Indonesia Eximbank is committed to implementing the principles of good corporate governance in every aspect of its operations. As a basis for carrying out its duties and responsibilities, Board of Directors has compiled a Board Manual which serves as a guideline for all levels of management, including the Executive Director and Managing Director. In addition, Indonesia Eximbank refers to the principles of Good Corporate Governance to ensure business practices that are in line with the stakeholders' interests.

The integration of good corporate governance, which is carried out in a comprehensive and consistent manner with the stakeholders' interests, is an important factor in building trust and creating a professional and productive work environment. With the support of all Indonesia Eximbank personnel, it is hoped that the implementation of these governance principles will strengthen the resilience and sustainable growth of Indonesia Eximbank in supporting the national economy.

Perkembangan Penerapan Tata Kelola LPEI yang Baik di Lingkup LPEI

Development of Implementation of Indonesia Eximbank Good Corporate Governance Within Indonesia Eximbank

Penetapan Standar Kualitas Tata Kelola LPEI yang Baik di Lingkup LPEI

Untuk memastikan tercapainya tujuan dan keberlanjutan LPEI, penetapan standar kualitas tata kelola yang baik menjadi dasar yang sangat penting dalam setiap aspek operasional dan pengambilan keputusan. LPEI berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, Dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Dengan penerapan standar-standar ini, LPEI berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola yang berorientasi pada keberlanjutan dan transparansi tinggi, guna mencapai hasil optimal bagi semua pemangku kepentingan.

Penanggung Jawab Penerapan Tata Kelola LPEI

Dalam rangka memastikan penerapan prinsip Tata Kelola yang baik di LPEI, Direktur Eksekutif berperan sebagai penanggung jawab utama. Tugas ini mencakup pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan tata kelola yang sejalan dengan ketentuan yang berlaku, guna mendukung keberlanjutan serta efektivitas operasional LPEI.

Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola LPEI pada Tahun Buku

LPEI terus mengedepankan penerapan tata kelola yang kuat dengan memastikan setiap kebijakan dipahami dan dijalankan secara optimal. Untuk itu, sosialisasi kebijakan tata kelola menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran dan kepatuhan di seluruh organisasi.

Sepanjang tahun 2024, LPEI telah melakukan beberapa kali sosialisasi terkait tata kelola yang baik antara lain sebagai berikut:

- Sosialisasi berkelanjutan terkait Pengendalian Gratifikasi, *Whistleblowing System* (WBS), dan APU, PPT dan PPPSPM kepada pegawai LPEI;
- Sosialisasi dan diseminasi regulasi baru yang berdampak kepada LPEI

Establishment of Indonesia Eximbank Good Corporate Governance Quality Standards within Indonesia Eximbank

To ensure the achievement of Indonesia Eximbank's objectives and sustainability, establishing good corporate governance quality standards is a very important basis in every aspect of operations and decision making. Indonesia Eximbank is committed to implementing transparent, accountable, and professional governance practices, in accordance with the provisions set forth in Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2009 concerning the Governance Principles of Indonesia Eximbank, and the Minister of Finance Regulation Number 208/PMK.06/2021 concerning Principles of Governance, Risk Management Principles, and Know Your Customer of Indonesia Eximbank. By implementing these standards, Indonesia Eximbank is committed to continuously improving its governance, which is oriented towards sustainability and high transparency, in order to achieve optimal results for all stakeholders.

Person in Charge of Indonesia Eximbank Governance Implementation

In order to ensure the implementation of good corporate governance principles at Indonesia Eximbank, Executive Director acts as the main person in charge. This task includes supervision and monitoring of implementation of governance in line with applicable regulations, in order to support the sustainability and effectiveness of Indonesia Eximbank's operations.

Socialization of Indonesia Eximbank Governance Policy in the Fiscal Year

Indonesia Eximbank continues to prioritize the implementation of strong governance by ensuring that every policy is understood and optimally implemented. To that end, socialization of governance policies is an important part of building awareness and compliance throughout the organization.

Throughout 2024, Indonesia Eximbank has conducted several socializations related to good governance, including the following:

- Continuous socialization of Gratification Control, Whistleblowing System (WBS), and AML, CFT and PPPSPM to LPEI employees;
- Socialization and dissemination of new regulations affecting LPEI.

- Sosialisasi RCSA dan Action Plan
- Sosialisasi terkait Pengendalian Gratifikasi, *Whistleblowing System* (WBS), dan APU, PPT dan PPPSPM kepada pegawai LPEI
- Sosialisasi dan diseminasi regulasi baru yang berdampak kepada LPEI
- Sosialisasi Penguatan Bisnis LPEI melalui Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) kepada KAP Rekanan LPEI
- Sosialisasi terkait Pengendalian Gratifikasi, *Whistleblowing System* (WBS), dan APU PPT kepada pegawai LPEI
- Sosialisasi dan diseminasi regulasi baru yang berdampak kepada LPEI
- Sosialisasi Penerapan Strategi Anti Fraud di LPEI.
- Sosialisasi melalui media intranet LPEI.
- Sosialisasi Manajemen Risiko Operasional dan *Kick-off DCOR Officer* secara *offline*.
- Sosialisasi *Portfolio Guideline*.
- Sosialisasi penggunaan *tools Spreadsheet*.
- Sosialisasi manajemen risiko enterprise dan risk maturity melalui *email*.
- Sosialisasi/pelatihan dalam forum *New hire Orientation* (NHO) terkait Fungsi Kepatuhan, Pengendalian Gratifikasi, *Whistleblowing System* (WBS) dan APU, PPT, & PPPSPM

Pemantauan dan Penilaian/*Assessment* atas Penerapan Tata Kelola LPEI yang Baik Tahun 2023-2024

Penilaian penerapan Tata Kelola yang Baik di LPEI dilakukan secara berkala, minimal sekali dalam setahun, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penilaian ini berpedoman pada PMK 208/PMK.06/2021, yang mencakup prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah di LPEI. Untuk periode penilaian tahun 2024 atas implementasi tahun buku 2023, evaluasi Tata Kelola yang Baik dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan penunjukan melalui Surat No. BS. 0053/DHK/11/2023, tanggal 28 November 2023 perihal *Assessment GCG LPEI Tahun Buku 2023*.

Penilaian Penerapan Tata Kelola yang Baik Tahun Buku 2023: Hasil, Rekomendasi, dan Tindak Lanjutnya di Tahun 2024

Berdasarkan laporan hasil asesmen No. PE.05.03/SP-354/D4/03/2024 tanggal 05 April 2024, LPEI telah melaksanakan penilaian terhadap penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik untuk tahun buku 2023. Penilaian ini menggunakan 10 aspek utama dengan 151 indikator faktor uji kesesuaian, menghasilkan skor 80,004 dengan Predikat Komposit "Baik".

Dari hasil penilaian Tata Kelola yang Baik tahun buku 2023, LPEI mengidentifikasi 62 *Area of Improvement* (AoI). Hingga tahun 2024, sebanyak 59 AoI telah ditindaklanjuti

- Socialization of RCSA and Action Plan
- Socialization related to Gratification Control, *Whistleblowing System* (WBS), and AML, CFT and PPPSPM to the LPEI employees
- Socialization and dissemination of new regulations that affect to LPEI
- Socialization of LPEI Business Strengthening through *Good Corporate Governance* (GCG) Implementation to KPEI Corporate Governance (GCG) to KAP Partners of LPEI
- Socialization related to Gratification Control, *Whistleblowing System* (WBS), and APU System (WBS), and AML/CFT to LPEI employees.
- Socialization and dissemination of new regulations that affect to LPEI
- Socialization of Anti Fraud Strategy Implementation at LPEI.
- Socialization through LPEI intranet media.
- Socialization of Operational Risk Management and *Kick-off DCOR Officer Kick-off offline*.
- Socialization of *Portfolio Guideline*.
- Socialization on the use of *Spreadsheet tools*.
- Socialization of enterprise risk management and risk maturity through *email*.
- Socialization/training in the *New Hire Orientation* forum (NHO) forum related to Compliance Function, Gratification Control, *Whistleblowing System* (WBS) and AML, CFT, & PPPSPM.

Monitoring and Assessment of Indonesia Eximbank Good Corporate Governance in 2023-2024

The Good Corporate Governance assessment at Indonesia Eximbank is conducted periodically, at least once a year, in accordance with applicable regulations. This assessment is guided by MoF Regulation 208/PMK.06/2021, which covers the principles of governance, risk management, and know your customer at Indonesia Eximbank. For the assessment period of 2024 on the implementation of financial year 2023, the evaluation of Good Governance is carried out by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) based on the appointment through Letter No. BS. 0053/DHK/11/2023, dated November 28, 2023 regarding *Assessment GCG LPEI Fiscal Year 2023*.

Good Corporate Governance Assessment for 2023 Fiscal Year: Results, Recommendations, and Follow-Up for 2024

Based on the No. PE.05.03/SP-354/D4/03/2024 date April 5, 2024, Indonesia Eximbank has carried out an assessment of Good Corporate Governance principles for 2023 fiscal year. This assessment uses 10 main aspects with 151 indicators of suitability test factors, resulting in a score of 80,004 with a Composite Predicate of "Good"

From the results of the Good Governance assessment for the fiscal year of 2023, LPEI identified 62 Areas of Improvement (AoI). As of 2024, 59 AoIs have been followed up and

dan diselesaikan, sementara 3 Aol lainnya masih dalam proses penyelesaian. Langkah ini menunjukkan keseriusan LPEI dalam mengimplementasikan tata kelola yang baik secara menyeluruh dan berkelanjutan di seluruh aspek bisnis dan organisasi.

Penilaian Penerapan Tata Kelola yang Baik Tahun Buku 2023

Penilaian tata kelola LPEI tahun sebelumnya (penilaian atas pelaksanaan Tata Kelola yang Baik di tahun 2023 yang dinilai pada tahun 2024), penilaian penerapan Tata Kelola yang Baik di LPEI oleh BPKP mengalami peningkatan pada sebagian besar aspek penilaian. Pada tahun 2023, hasil penilaian tata Kelola LPEI sebesar 80,004.

Penerapan Tata Kelola yang Baik Tahun 2024

Mengacu pada PMK Nomor 208/PMK.06/2021, LPEI menerapkan prinsip Tata Kelola yang Baik melalui:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana;
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dan komite-komite serta satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal;
3. Penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal;
4. Penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian internal;
5. Pengadaan barang dan jasa;
6. Penyusunan rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan;
7. Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan; dan
8. Pelaporan internal dan benturan kepentingan.

Sepanjang tahun 2024, LPEI telah melaksanakan berbagai inisiatif untuk mengoptimalkan penerapan Tata Kelola yang Baik, di antaranya:

1. Triwulan I - 2024
 - a. Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI posisi Triwulan IV 2023
 - b. Penilaian Profil Risiko LPEI posisi Triwulan IV 2023
 - c. Penyusunan dan publikasi *Annual Report* LPEI tahun 2023
 - d. Pembentukan dan pengukuhan DCOR Officer LPEI
 - e. Pelaksanaan penilaian terhadap penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik LPEI periode tahun 2023 oleh BPKP
 - f. Pemenuhan pelaporan LHKPN periode tahun 2023 secara tepat waktu dan terpenuhi 100%
 - g. Sosialisasi terkait Pengendalian Gratifikasi, *Whistleblowing System* (WBS), dan APU PPT kepada pegawai LPEI

resolved, while the remaining 3 Aols are still in progress. and completed, while 3 other Aols are still in the process of completion. This step shows the seriousness of LPEI's seriousness in implementing good governance thoroughly and sustainably in all aspects of thoroughly and sustainably in all aspects of business and organization.

Good Corporate Governance Assessment for 2023 Fiscal Year

Assessment of LPEI governance in the previous year (assessment of the implementation of Good Governance in 2023 which was assessed in 2024), the assessment of the implementation of Good Governance at LPEI by BPKP has increased in most aspects of the assessment. In 2023, the results of the LPEI governance assessment amounted to 80.004.

Good Corporate Governance Implementation in 2024

In accordance with the Minister of Finance Regulation Number 208/PMK.06/2021, Indonesia Eximbank implements the principles of Good Corporate Governance through:

1. Implementation of duties and responsibilities of Board of Directors, Executive Director, Managing Director;
2. Completeness and implementation of duties of Sharia Supervisory Board and committees and work units that carry out internal control functions;
3. Implementation of compliance, internal audit, and external audit functions;
4. Implementation of Risk Management including internal control system;
5. Procurement of goods and services;
6. Preparation of long-term plans as well as annual work plans and budgets;
7. Transparency of financial and non-financial conditions; and
8. Internal reporting and conflicts of interest.

Throughout 2024, Indonesia Eximbank has implemented various initiatives to optimize the implementation of Good Corporate Governance, including:

1. Quarter I - 2024
 - a. Assessment of the Health Level of LPEI as of the fourth quarter of 2023
 - b. Risk Profile Assessment of LPEI as of Q4 2023
 - c. Preparation and publication of LPEI Annual Report in 2023
 - d. Establishment and inauguration of LPEI's DCOR Officer
 - e. Implementation of assessment of the implementation of LPEI Good Governance principles for the period of 2023 by BPKP
 - f. Fulfillment of LHKPN reporting for the period of 2023 in a timely manner and 100% fulfilled
 - g. Socialization related to Gratification Control, Whistleblowing System (WBS), and AML/CFT to LPEI employees

- h. Sosialisasi dan diseminasi regulasi baru yang berdampak kepada LPEI
 - i. Pelaksanaan program Pengendalian Gratifikasi LPEI tahun 2024
 - j. Penyampaian Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan APU, PPT dan PPPSPM semester II 2023
 - k. Pelatihan Tata Cara Pengisian LHKPN dengan pembicara langsung dari KPK
 - l. Penyampaian laporan gratifikasi kepada KPK melalui sistem pelaporan Gratifikasi *Online* (GOL) KPK
 - m. Penyusunan rencana kerja atas Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) LPEI tahun 2023
 - n. Pembuatan Standar Pedoman Operasional untuk kegiatan usaha Asuransi dan Jasa Konsultasi
 - o. Penyempurnaan Kebijakan terkait Tata Kerja Dewan Direktur
 - p. Penyempurnaan SPO Limit Kewenangan Persetujuan Penggunaan
 - q. Pembuatan Standar Pedoman Operasional Layanan Pengaduan Nasabah
 - r. Penambahan ketentuan SPP Penugasan Khusus terkait produk Penugasan Khusus *Trade Finance* (Skema Imbal Dagang)
 - s. Pengkinian kriteria dan informasi risiko tinggi dalam penilaian Nasabah berdasarkan RBA (*Risk Based Approach*) – Program APU, PPT dan PPPSPM tahun 2024.
 - t. Penyusunan dan penyampaian Laporan Realisasi Pengkinian Data Nasabah tahun 2023 kepada OJK.
2. Triwulan II – 2024
- a. Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI posisi Triwulan I 2024
 - b. Penilaian Profil Risiko LPEI posisi Triwulan I 2024
 - c. Pengkinian Portofolio Guideline LPEI
 - d. Pengkinian *Country Limit* dan *Industry Financing Reference* 2023
 - e. Pelaksanaan RCSA Pembiayaan (Sindikasi & UUS)
 - f. Sosialisasi terkait Pengendalian Gratifikasi, *Whistleblowing System* (WBS), dan APU, PPT dan PPPSPM kepada pegawai LPEI
 - g. Sosialisasi dan diseminasi regulasi baru yang berdampak kepada LPEI
 - h. Pelaksanaan program Pengendalian Gratifikasi LPEI tahun 2024
 - i. Penyampaian laporan gratifikasi kepada KPK melalui sistem pelaporan Gratifikasi *Online* (GOL) KPK
 - j. Penyempurnaan pengaturan terkait Standar Pedoman Operasional Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Standar Pedoman Operasional Komite Dibawah Direktur Eksekutif, dan Standar Pedoman Operasional NBFi *Line*
 - k. Pembuatan Standar Pedoman Operasional Tata Kelola Penyedia Jasa Rekanan
 - l. Pembuatan Standar Pedoman Operasional *Risk Control Self-Assessment*

- h. Socialization and dissemination of new regulations that affect LPEI
 - i. Implementation of LPEI Gratification Control program in 2024
 - j. Submission of Compliance and AML, CFT and PPPSPM Function Implementation Report for the second semester of 2023
 - k. Training on LHKPN Filling Procedures with speakers directly from KPK
 - l. Submission of gratification reports to KPK through KPK's Gratification Online (GOL) reporting system
 - m. Preparation of work plan on LPEI Gratification Control Program (PPG) in 2023
 - n. Development of Standard Operational Guidelines for Insurance and Consulting Services business activities
 - o. Improvement of Policy related to Board of Director Work Procedure
 - p. Refinement of SPO Limit of Authorization for Use Approval
 - q. Standardization of Operational Guidelines for Customer Complaint Services
 - r. Addition of Special Assignment SPP provisions related to Trade Finance Special Assignment products (Trade Fee Scheme)
 - s. Updating high risk criteria and information in customer assessment based on RBA (Risk Based Approach) - AML, CFT and PPPSPM Program in 2024.
 - t. Preparation and submission of Customer Data Update Realization Report in 2023 to OJK.
2. Quarter II - 2024
- a. Assessment of LPEI's Health Level as of the first quarter of 2024
 - b. Risk Profile Assessment of LPEI as of the first quarter of 2024
 - c. Update of LPEI Portfolio Guideline
 - d. Updating Country Limit and Industry Financing Reference 2023
 - e. Implementation of RCSA Financing (Syndication & UUS)
 - f. Socialization related to Gratification Control, Whistleblowing System (WBS), and AML, CFT and PPPSPM to LPEI employees
 - g. Socialization and dissemination of new regulations affecting LPEI
 - h. Implementation of LPEI Gratification Control program in 2024
 - i. Submission of gratification reports to KPK through KPK's Gratification Online (GOL) reporting system
 - j. Completion of arrangements related to Standard Operational Guidelines for the Implementation of the Compliance Function, Standard Operational Guidelines for Committees Under the Executive Director, and Standard Operational Guidelines for the NBFi Line
 - k. Establishment of Operational Guideline Standards for Governance of Associate Service Providers
 - l. Development of Standard Operational Guidelines for Risk Control Self-Assessment

m. Pembuatan PTO Arranger dan Keagenan Pembiayaan Sindikasi n. Update Buku Tarif terkait <i>Fee Arranger</i> dan Keagenan o. Pengkinian Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Terorisme, dan/atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal tahun 2024. 3. Triwulan III – 2024 a. Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI posisi Triwulan II 2024 b. Penilaian Profil Risiko LPEI posisi Triwulan II 2024 c. Penyempurnaan Standar Pedoman Operasional Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI d. Pelaksanaan sosialisasi RCSA dan <i>Action Plan</i> e. Sosialisasi terkait Pengendalian Gratifikasi, <i>Whistleblowing System</i> (WBS), dan APU, PPT dan PPPSPM kepada pegawai LPEI f. Sosialisasi dan diseminasi regulasi baru yang berdampak kepada LPEI g. Pelaksanaan program Pengendalian Gratifikasi LPEI tahun 2024 h. Sosialisasi Penguatan Bisnis LPEI melalui Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) kepada KAP Rekanan LPEI i. Penetapan peraturan internal/PDE Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan LPEI j. Penyampaian Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan APU, PPT dan PPPSPM semester I 2024 k. Penyampaian dan pemenuhan rencana kerja atas Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) LPEI tahun 2024 kepada KPK l. Penyempurnaan peraturan terkait LPEI dengan Perusahaan Anak yang mencakup SPO Tim Pembina Perusahaan Anak, Piagam Komite Integrasi, SPO Komite Perusahaan Anak m. Penyusunan Peraturan Tata Naskah Dinas, Manual Operasional TSI n. Pembuatan PDD Kebijakan Tata Kelola yang Baik o. Pembuatan Standar Pedoman Operasional Penilaian Tingkat Kesehatan p. Pembuatan Standar Pedoman Operasional Tata Cara Penanganan Kerugian Negara q. Pembuatan SPO Pemanfaatan dan Optimalisasi Sarana Prasarana r. Penambahan SPP Penugasan Khusus terkait produk Penugasan Khusus Industri Farmasi dan Alat Kesehatan s. Pembuatan SPP Tata Kelola DHE dan Revisinya t. Penambahan SPP <i>Trade Finance</i> terkait produk <i>Approved Payable Financing</i> 4. Triwulan IV – 2024 a. Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI posisi Triwulan III 2024 b. Penilaian Profil Risiko LPEI posisi Triwulan III 2024 c. Penyusunan Standar Pedoman Operasional Manajemen Risiko Operasional	m. Creation of PTO Arranger and Syndicated Financing Agency n. Update of Tariff Book related to Arranger and Agency Fee o. Update of Risk Assessment of Money Laundering, Terrorism and/or Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction in 2024. 3. Quarter III - 2024 a. Assessment of the Health Level of LPEI in the second quarter of 2024 b. Assessment of LPEI's Risk Profile as of Quarter II 2024 c. Improvement of Operational Guideline Standard for LPEI Health Level Assessment d. Implementation of RCSA socialization and Action Plan e. Socialization related to Gratification Control, Whistleblowing System (WBS), and AML, CFT and PPPSPM to LPEI employees f. Socialization and dissemination of new regulations affecting LPEI g. Implementation of LPEI Gratification Control Program in 2024 h. Socialization of LPEI Business Strengthening through the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) to KAP Partners of LPEI i. Establishment of internal regulations /DE Implementation of LPEI Compliance Function j. Submission of Compliance Function Implementation Report and AML, PPT and PPPSPM for the first semester of 2024 k. Submission and fulfillment of work plan on LPEI Gratification Control Program (PPG) in 2024 to KPK l. Completion of regulations related to LPEI with Subsidiaries which include SPO of Subsidiary Company Supervisory Team, Charter of Integration Committee, SPO of Subsidiary Company Committee. m. Preparation of Office Manuscript Regulations, TSI Operational Manual n. PDD Development of Good Governance Policy o. Development of Standard Operational Guidelines for Health Level Assessment p. Development of Standard Operational Guidelines for State Loss Handling Procedures q. Preparation of SPO for Utilization and Optimization of Infrastructure Facilities r. Addition of Special Assignment SPP related to Special Assignment products for the Pharmaceutical and Medical Device Industry s. Creation of SPP on DHE Management and its Revision t. Addition of Trade Finance SPP related to Approved Payable Financing product 4. Quarter IV - 2024 a. Assessment of the Health Level of LPEI in the third quarter of 2024 b. Risk Profile Assessment of LPEI as of the third quarter of 2024 c. Standardization of Operational Risk Management Operational Guidelines

- d. Pengkinian Standar Pedoman Operasional Manajemen Risiko *Enterprise*
- e. Pengkinian Keputusan Direktur Eksekutif tentang Tim Monitoring Tingkat Kesehatan LPEI
- f. Pelaksanaan penilaian *Risk Maturity Survey*
- g. Pengkinian *Risk Appetite Statement* LPEI untuk tahun 2024
- h. Pengkinian *Portfolio Guideline* 2024
- i. Pelaksanaan Analisa *Stress-Test & EWD Tools*
- j. Pelaksanaan RCSA Aktivitas IT
- k. Pelaksanaan RCSA Aktivitas Operasional
- l. Pelaksanaan RCSA Aktivitas Pembiayaan (BUMN, Kanwil, Bisnis Korporasi I dan II, serta *Supply Chain & Linkage*)
- m. Pelaksanaan *self assessment* faktor Tata Kelola yang Baik LPEI tahun 2023 menggunakan parameter SEOJK No. 15/SEOJK.05/2022 sebagai bagian dari Laporan Tingkat Kesehatan LPEI tahun 2023
- n. Sosialisasi terkait Pengendalian Gratifikasi, *Whistleblowing System* (WBS), dan APU PPT kepada pegawai LPEI
- o. Pelaksanaan survey WBS dan Gratifikasi kepada seluruh Manajemen dan pegawai LPEI
- p. Sosialisasi dan diseminasi regulasi baru yang berdampak kepada LPEI
- q. Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi LPEI tahun 2023
- r. Pengkinian peraturan internal dan penguatan *framework* Strategi *Anti-Fraud* LPEI
- s. Penetapan Kebijakan/PDD Tata Kelola yang Baik LPEI
- t. Penetapan peraturan internal/PDE Strategi Anti-Fraud LPEI
- u. Penyampaian laporan gratifikasi kepada KPK melalui sistem pelaporan Gratifikasi *Online* (GOL) KPK
- v. Penyempurnaan peraturan terkait Manajemen Risiko LPEI yang mencakup SPO Manajemen Risiko *Enterprise*, SPO *Operational Risk Management*
- w. Penyempurnaan peraturan terkait Hukum LPEI yang mencakup SPO Pemberian Jasa Hukum LPEI SPO Pencatatan dan Penggunaan Jasa Konsultan Hukum
- x. Penyempurnaan peraturan terkait Kepatuhan LPEI yang mencakup SPO *Strategic Anti-Fraud*, SPO Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM.
- y. Pembuatan Standar Pedoman Operasional Komunikasi
- z. Penyempurnaan SPO Pelaksanaan Standar Akuntansi, SPO Pembiayaan, SPO Penyusunan RKAT, RenBis, dan RJP
- aa. Pembuatan SPP Program Kemitraan

Fokus dan Penerapan Tata Kelola yang Baik di Tahun 2024

Di tahun 2024, LPEI akan terus memperkuat implementasi Tata Kelola yang Baik dengan menitikberatkan pada penguatan Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*) serta optimalisasi Proses Tata Kelola (*Governance Process*).

- d. Update of Enterprise Risk Management Operational Guideline Standard
- e. Update of Executive Director's Decree on LPEI Health Level Monitoring Team
- f. Implementation of Risk Maturity Survey assessment
- g. Updating LPEI's Risk Appetite Statement for 2024
- h. Updating of Portfolio Guideline 2024
- i. Implementation of Stress-Test Analysis & EWD Tools
- j. Implementation of RCSA for IT Activities
- k. RCSA Implementation of Operational Activities
- l. Implementation of RCSA on Financing Activities (BUMN, Regional Office, Corporate Business I and II, and Supply Chain & Linkage)
- m. Implementation of self-assessment of LPEI Good Governance factors in 2023 using SEOJK No. 15/SEOJK.05/2022 parameters as part of the LPEI Health Level Report in 2023
- n. Socialization related to Gratification Control, Whistleblowing System (WBS), and AML/CFT to LPEI employees
- o. Implementation of WBS and Gratification survey to all LPEI Management and employees
- p. Socialization and dissemination of new regulations affecting LPEI
- q. Implementation of LPEI Gratification Control Program in 2023
- r. Updating internal regulations and strengthening the LPEI Anti-Fraud Strategy framework
- s. Establishment of LPEI Good Governance Policy/PDD
- t. Establishment of internal regulations/PDE of LPEI Anti-Fraud Strategy
- u. Submission of gratification reports to KPK through KPK's Gratification Online (GOL) reporting system
- v. Completion of regulations related to LPEI Risk Management which includes SPO Enterprise Risk Management, SPO Operational Risk Management
- w. Completion of regulations related to LPEI Law which includes SPO Provision of LPEI Legal Services SPO Recording and Use of Legal Consultant Services
- x. Completion of regulations related to LPEI Compliance which includes SPO Strategic Anti-Fraud, SPO Implementation of AML, CFT and PPPSPM Program.
- y. Standardization of Communication Operational Guidelines
- z. Improvement of SPO Implementation of Accounting Standards, SPO Financing, SPO Preparation of RKAT, RenBis, and RJP
- aa. aa. Preparation of SPP for Partnership Program

Focus and Implementation of Good Corporate Governance in 2024

In 2024, Indonesia Eximbank continues to strengthen the implementation of Good Corporate Governance by focusing on strengthening the Governance Structure and optimizing the Governance Process.

LPEI akan meningkatkan Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*) dengan menyederhanakan dan menyelaraskan seluruh peraturan internal. Sebagai langkah pendukung, akan disusun Peraturan Penyusunan Peraturan yang mencakup Kebijakan, Standar Pedoman Operasional, dan Petunjuk Teknis sebagai panduan dalam pembentukan regulasi internal. Selain itu, optimalisasi struktur organisasi juga akan dilakukan agar lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan Lembaga.

Indonesia Eximbank is improving its Governance Structure by simplifying and harmonizing all internal regulations. As a supporting measure, a Regulation Drafting Regulation will be formulated which includes Policies, Operational Guidelines Standards, and Technical Instructions as a guide in the formation of internal regulations. In addition, optimization of the organizational structure will also be carried out to be more efficient and in accordance with the Institution's needs.

Sementara itu, peningkatan Proses Tata Kelola (*Governance Process*) akan difokuskan pada optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi setiap organ serta unit kerja di Lembaga, terutama unit-unit yang berperan dalam pengendalian internal, seperti Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, dan SKAI. Selain itu, upaya ini juga mencakup perbaikan dalam pengelolaan data dan pelaporan, yang memerlukan dukungan sistem informasi yang andal dan memadai.

Meanwhile, improving the Governance Process will focus on optimizing the implementation of duties and functions of each organ and work unit in the Institution, especially units that play a role in internal control, such as the Risk Management Work Unit, Compliance Work Unit, and Internal Audit Unit. In addition, this effort also includes improvements in data management and reporting, which require reliable and adequate information system support.

Peta Jalan Pengembangan Tata Kelola yang Baik dan Pencapaiannya

Good Corporate Governance Development Roadmap and Its Achievement

Tata Kelola yang Baik Roadmap Good Corporate Governance Roadmap

Tahun Year	Kegiatan Activities
2009	- Pembentukan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia melalui UU No. 2/2009. - Penetapan Peraturan Menteri Keuangan RI tentang: Pembinaan dan Pengawasan; Prinsip Tata Kelola; Manajemen Risiko; dan Prinsip Mengenal Nasabah di LPEI. - Diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan RI tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Direktur Pelaksana LPEI. - Establishment of Indonesia Eximbank through Act No. 2/2009. - Stipulation of the Minister of Finance Regulation concerning: Guidance and Supervision; Governance Principles; Risk management; and Know Your Customer Principles at Indonesia Eximbank. - Issuance of Regulation of the Minister of Finance concerning Procedures for Proposal, Appointment, and Dismissal of Indonesia Eximbank Managing Director.
2010	- Terbitnya regulasi tentang Kebijakan Akuntansi LPEI. - Ditetapkannya regulasi internal mengenai Pedoman Kerja Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif (PDD). - Issuance of regulations concerning the Indonesia Eximbank Accounting Policies - Stipulation of internal regulations regarding Work Guidelines for Board of Directors and Executive Directors (PDD).
2011	- Pengembangan regulasi internal mengenai Pedoman Kerja Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif. - Penetapan tentang SOP Pengadaan Barang dan Jasa LPEI. - Development of internal regulations regarding Work Guidelines for Board of Directors and Executive Directors. - Determination of Indonesia Eximbank Goods and Services Procurement SOP.
2012	- Diterbitkannya peraturan internal mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>) LPEI. - Evaluasi terhadap implementasi Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan. - Pelaksanaan Pelaporan Keuangan LPEI yang telah sesuai dengan standardisasi. - Issuance of internal regulations regarding the Whistleblowing System - Evaluation of the implementation of Procedure for Submission of Suspicious Financial Transaction Reports and Cash Financial Transaction Reports for Financial Service Providers. - Implementation of standardized Financial Reporting.
2013	- Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat LPEI sesuai dengan regulasi, dan ditetapkannya pedoman internal penyusunan LHKPN. - Penyempurnaan Peraturan Internal tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Direktur Pelaksana LPEI. - Compilation of State Administrators Wealth Reports (LHKPN) for Indonesia Eximbank Officials in accordance with regulations, and the establishment of internal guidelines for LHKPN preparation - Improvement of Internal Regulations concerning Procedures for Proposal, Appointment, and Dismissal of Managing Director.



Tata Kelola yang Baik Roadmap

Good Corporate Governance Roadmap

Tahun Year	Kegiatan Activities
2014	• Penyempurnaan Ketentuan dan Prosedur Pelaksanaan atas Pembagian Tugas dan Wewenang Kewajiban Pelaporan kepada Pihak Eksternal LPEI. • Implementasi Pengendalian Internal Verifikasi Audit Pembiayaan Bermasalah LPEI. • Ditetapkannya Ketentuan Internal Perihal Penilaian Efektivitas Sistem Pengendalian Internal LPEI. • Completion of Provisions and Implementation Procedures on the Division of Duties and Authorities of Reporting Obligations to External Parties. • Implementation of Internal Control Verification of Troubled Financing Audit. • Stipulation of Internal Provisions Regarding Assessment of Internal Control System Effectiveness.
2015	• Review Kebijakan Regulator (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Perihal Pembinaan dan Pengawasan LPEI. • Program Pelatihan dan Pengembangan Pegawai LPEI. • Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan LPEI berdasarkan Surat Himbauan dari KPK • Regulatory Policy Review (Financial Services Authority Regulations) Regarding Guidance and Supervision of Indonesia Eximbank. • Indonesia Eximbank Employee Training and Development Program. • Gratuitification Control within the Indonesia Eximbank Environment based on an Appeal Letter from KPK.
2016	• Penetapan Regulasi Internal Perihal Disiplin Pegawai LPEI. • Penyempurnaan tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. • Sosialisasi teknis Penyampaian dan Pengelolaan LHKPN. • Stipulation of Internal Regulations Regarding Discipline for Indonesia Eximbank Employees • Improvements on Procedures for Registration, Announcement, and Examination of State Administrators' Assets • Technical socialization of LHKPN Submission and Management.
2017	• Penyempurnaan regulasi Kewajiban Penyampaian LHKPN bagi Pejabat LPEI. • Pengisian peraturan internal tentang Program Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan Terorisme (APU & PPT) LPEI. • Ditetapkannya regulasi mengenai Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan • Refinement of regulations on the Obligation to Submit LHKPN for Indonesia Eximbank Officials. • Completion of internal regulations regarding Implementation of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML & CTF) of Indonesia Eximbank. • Stipulation of regulations regarding the Board of Directors' Responsibilities for Financial Statements.
2018	• Diterbitkannya peraturan internal mengenai <i>Know Your Employee</i> di LPEI. • Ditetapkannya Limit Kewenangan Persetujuan Penggunaan Anggaran LPEI. • Penyempurnaan peraturan mengenai Komite Manajemen Risiko LPEI; Komite Pengembangan Produk LPEI; Komite Personalialia LPEI. • Penyempurnaan Manual Operasional Pengadaan Barang atau Jasa LPEI. • Penyempurnaan Regulasi Internal perihal Disiplin Pegawai LPEI. • Implementasi Program sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pegawai LPEI. • Issuance of internal regulations regarding Know Your Employee at Indonesia Eximbank. • Stipulation of Limit of Authority for Approval for Use of Indonesia Eximbank Budget. • Improvement of regulations regarding Risk Management Committee; Product Development Committee; Personnel Committee. • Improvement of the Goods/Services Procurement Operational Manual. • Improvement of Internal Regulations regarding Employee Discipline. • Implementation of Risk Management Certification Program for Employees.
2019	• Penyempurnaan peraturan mengenai Komite Pembiayaan LPEI; Komite Pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor LPEI; Komite Teknologi Sistem Informasi; Komite Asset dan Liability LPEI; Komite Kebijakan Bisnis LPEI; & Komite Manajemen Risiko LPEI. • Penyempurnaan mengenai peraturan internal Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan LPEI. • Sosialisasi dari Unsur <i>Top Management (Tone of The Top)</i> dengan tema Budaya Kerja; Kode Etik dan Anti Gratifikasi. • Pengisian peraturan internal tentang Program Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan Terorisme (APU & PPT) LPEI. • Penyempurnaan Ketentuan dan Prosedur Pelaksanaan atas Pembagian Tugas dan Wewenang Kewajiban Pelaporan kepada Pihak Eksternal LPEI. • Ditetapkannya Peraturan Internal mengenai Strategi <i>Anti-Fraud</i> LPEI • Melanjutkan Program sertifikasi Manajemen Risiko bagi seluruh Pegawai di LPEI. • Diterbitkannya Piagam Audit Internal dan <i>updating</i> peraturan internal mengenai Penerapan Fungsi Audit Internal LPEI. • Diterbitkannya Piagam Kepatuhan mengenai penerapan Fungsi Kepatuhan di LPEI. • Completion of regulations regarding Financing Committee; Export Special Assignment Financing Committee; Information System Technology Committee; Asset and Liability Committee; Business Policy Committee; & Risk Management Committee. • Improvement internal regulations for Gratification Control within Indonesia Eximbank. • Socialization of Top Management Elements (Tone of The Top) with the theme of Work Culture; Code of Conduct and Anti Gratification. • Completion of internal regulations regarding Implementation of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML & CTF) Program. • Completion of Provisions and Implementation Procedures on the Division of Duties and Authorities of Reporting Obligations to External Parties. • Stipulation of Internal Regulations regarding Anti-Fraud Strategy. • Continuing the Risk Management certification program for all Employees at Indonesia Eximbank. • Issuance of the Internal Audit Charter and Updating of internal regulations regarding the Implementation of Internal Audit Function. • Issuance of the Compliance Charter regarding implementation of Compliance Function at Indonesia Eximbank.

Tata Kelola yang Baik Roadmap

Good Corporate Governance Roadmap

Tahun Year	Kegiatan Activities
2020	• Penerbitan Peraturan Tata Tertib Kerja Dewan Direktur (<i>Board Manual</i>). • Penyempurnaan dan/atau Perubahan Peraturan mengenai proses bisnis di antaranya Komite Manual Produk Penugasan Khusus LPEI; Komite Assets & Liabilities Management LPEI; Manual Operasional Pembiayaan LPEI; <i>Standard Operating Procedure Credit File</i>; Komite Pembiayaan LPEI; Komite Pembiayaan Khusus LPEI; Limit Kewenangan Persetujuan Penggunaan Anggaran LPEI; • Perpanjangan Sementara Fasilitas Pembiayaan; Tata Cara Pelaksanaan AYDA; Adendum Perpanjangan Fasilitas Sementara Global Line; Pencairan Fasilitas Debitur; Tindak Lanjut Pengelolaan Debitur terdampak COVID-19. • Penerbitan Kebijakan dan Prosedur mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan • Terorisme dan dilakukan sosialisasi kepada seluruh Unit Bisnis dan <i>Support</i>. • Penyempurnaan Peraturan mengenai Pedoman dan Tata Kerja Organisasi LPEI. • Penggunaan <i>New Employee Self Service System</i>. • Perubahan susunan Dewan Direktur, dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Direktur LPEI. • Penerbitan Kebijakan Pengelolaan Dana Program Kemitraan Eks PT Bank Ekspor Indonesia (Persero). • Penerapan dan penyempurnaan <i>Digital Signature</i>. • Implementasi POJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan <i>Countercyclical</i> Dampak Penyebaran COVID-19 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. • Implementasi PMK No. 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI. • Sosialisasi mengenai Tata Kelola Pembiayaan kepada seluruh pegawai Unit Bisnis dan Support di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah. • Penyempurnaan Piagam Dewan Pengawas Syariah LPEI. • Penerbitan Kebijakan Kegiatan Ekspor, Penunjang Ekspor dan Kegiatan Lain terkait Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional LPEI. • Penerbitan Manual Produk Penjaminan Kredit Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi dalam Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. • Penerbitan Manual Produk Penugasan Khusus dalam Rangka Mendukung Sektor Usaha Kecil dan Menengah Berorientasi Ekspor LPEI. • Penerbitan Manual Produk Penugasan Khusus <i>Trade Finance</i> dalam Rangka Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional LPEI. • Penerbitan Manual Produk Investasi Pemerintah dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional LPEI • Penerbitan Peraturan Mengenai Penerapan <i>Know Your Employee</i> (KYE) LPEI. • Penerbitan Peraturan mengenai Penegakan Disiplin dan Penentuan Sanksi atas Pelanggaran LPEI. • Penerbitan Keputusan Direktur Eksekutif Perihal Komite Etik dan Disiplin Pegawai. • Pengembangan <i>Computer Based Training</i> (CBT) Kode Etik dan Budaya Kerja Lembaga. • Issuance of Work Rules for Board of Directors (<i>Board Manual</i>) • Improvements/Changes to Regulations regarding business processes including the Special Assignment Product Manual Committee; Assets & Liabilities Management Committee; Financing Operational Manual; Standard Operating Procedures for Credit Files; Financing Committee; Special Financing Committee; Limit Authority to Approve the Use of Budget; • Temporary Extension of Financing Facilities; AYDA Implementation Procedures; Global Line Temporary Facility Extension Addendum; Disbursement of Debtor Facilities; Follow-up on the Management of Debtors Affected by COVID-19 • Issuance of Policies and Procedures regarding Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs and socialization to all Business and Support Units • Completion of Regulations regarding Guidelines and Work Procedures of the Organization • Use of the New Employee Self Service System • Changes in the Board of Directors composition, with the dismissal and appointment of members of Board of Directors • Issuance of Policy on Fund Management of the Ex-PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) Partnership Program • Digital Signature implementation and enhancement • Implementation of POJK Number 14/POJK.05/2020 concerning Countercyclical Policies on the Impact of COVID-19 Spread for Non-Bank Financial Services Institutions • Implementation of PMK Number 58/PMK.06/2020 concerning Indonesia Eximbank Guidance and Supervision • Dissemination of Financing Governance to all Business and Support Unit employees at the Head Office and Regional Offices • Completion of the Indonesia Eximbank Sharia Supervisory Board Charter • Issuance of Policy on Export Activities, Export Support and Other Activities related to Government Guarantees for Corporate Business Actors in the Framework of Implementing the Indonesia Eximbank National Economic Recovery Program • Issuance of Government Credit Guarantee Product Manual for Corporate Business Actors in the Implementation of the National Economic Recovery Program • Issuance of Special Assignment Product Manuals to Support the Export-Oriented Small and Medium Enterprises Sector Indonesia Eximbank • Issuance of a Trade Finance Special Assignment Product Manual to Support National Economic Recovery • Issuance of Government Investment Product Manual in the Context of National Economic Recovery • Issuance of Regulations Regarding the Implementation of Indonesia Eximbank's Know Your Employee (KYE). • Issuance of Regulations regarding Discipline Enforcement and Determination of Sanctions for Violations • Issuance of the Executive Director's Decree Regarding the Committee on Ethics and Employee Discipline • Development of Computer Based Training (CBT) Code of Conduct and Institutional Work Culture

Tata Kelola yang Baik Roadmap

Good Corporate Governance Roadmap

Tahun Year	Kegiatan Activities
2021	- Penyempurnaan peraturan tentang Pedoman dan Tata Kerja Organisasi LPEI. - Penerbitan peraturan tentang Penyesuaian Organisasi LPEI. - Penetapan Anggota Komite Penjaminan Bagi Pelaku Usaha Korporasi Dalam Rangka Pelaksanaan PEN. - Penerbitan manual Produk Program Penugasan Khusus dalam Rangka Mendukung Sektor Usaha Kecil dan Menengah - Berorientasi Ekspor LPEI. - Penerbitan manual produk terkait Program Kemitraan LPEI. - Pembentukan dan peresmian <i>Governance, Risk, Compliance</i> (GRC) <i>Champion</i> LPEI. - Penguatan sistem pengendalian internal dengan peluncuran <i>Whistleblowing System</i> (WBS) dan Pengendalian Gratifikasi bekerja sama dengan Kementerian Keuangan. - Sosialisasi berkelanjutan terkait WBS dan Gratifikasi kepada seluruh pegawai LPEI bersama Itjen Kemenkeu dan Pusintek Kemenkeu. - Pelatihan Tata Cara Pengisian LHKPN dan Perubahan Peraturan KPK tentang LHKPN. - Pelatihan <i>Computer Based Training</i> (CBT) Kode Etik dan Budaya Kerja Lembaga kepada seluruh pegawai LPEI. - Penerbitan Standar Pedoman Operasional Penyusunan Peraturan Edisi 1. - Penetapan anggota Komite Pembiayaan Program Penugasan Khusus Ekspor dalam Rangka Mendukung Sektor Usaha Kecil dan Menengah Berorientasi Ekspor. - Penetapan anggota Komite Pembiayaan <i>Supplier Chain Financing</i>. - Implementasi dan penunjukan <i>Person in Charge</i> (PIC) pada Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) OJK. - Penunjukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) sistem pelaporan Gratifikasi <i>Online</i> (GOL) KPK. - Pelaksanaan dan penyampaian laporan gratifikasi kepada KPK melalui sistem pelaporan Gratifikasi <i>Online</i> (GOL). - Pelaksanaan penilaian independen prinsip-prinsip tata kelola yang baik oleh pihak eksternal. - Sosialisasi Tata Kelola yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) oleh konsultan independen kepada seluruh pegawai LPEI. - Diseminasi Surat Edaran kepada Pegawai LPEI, Mitra/Rekanan, dan Nasabah/Debitur perihal larangan permintaan, penerimaan dan pemberian gratifikasi untuk/dari Pegawai LPEI serta kepada Rekanan, Penyedia Barang/Jasa (Vendor), Mitra, dan Nasabah. - Sosialisasi melalui <i>flyer</i> terkait larangan praktik Gratifikasi kepada seluruh pegawai LPEI. - Pembentukan dan Peresmian <i>Special Purpose Vehicle</i> (SPV) LPEI. - Penerapan Manajemen Risiko melalui sertifikasi kompetensi Manajemen Risiko dan sertifikasi kompetensi kerja pegawai LPEI. - Penerbitan peraturan tentang Komite Pengadaan LPEI. - Penerbitan Manual Operasional Teknologi Sistem Informasi LPEI. - Penetapan struktur dan keanggotaan Komite Manajemen Risiko LPEI. - Completion of regulations regarding Organizational Guidelines and Work Procedures. - Publication of regulations regarding Organization Adjustments. - Determination of Guarantee Committee Members for Corporate Business Actors for the Implementation of PEN. - Publication of a manual for the Special Assignment Program Product in Supporting the Export-Oriented Small and Medium Enterprises Sector of Indonesia Eximbank. - Publication of product manuals related to the Partnership Program. - Establishment and inauguration of the Indonesia Eximbank Governance, Risk, Compliance (GRC) Champion. - Strengthening the internal control system by launching a Whistleblowing System (WBS) and Gratification Control in collaboration with the Ministry of Finance. - Ongoing dissemination regarding WBS and Gratification to all employees together with the Inspector General of the Ministry of Finance and the Ministry of Finance's Pusintek. - Training on Procedures for Filling in LHKPN and Amendment to KPK Regulations on LHKPN. - Computer Based Training (CBT) Code of Conduct and Institutional Work Culture for all employees. - Publication of Operational Guidelines Standards for Regulatory Preparation Edition 1. - Appointment of members of Financing Committee for the Special Export Assignment Program in the Framework of Supporting the Export-Oriented Small and Medium Enterprises Sector. - Appointment of members of Supplier Chain Financing Committee. - Implementation and appointment of Person in Charge (PIC) on the OJK Consumer Protection Portal Application (APPK). - Appointment of Gratification Control Unit (UPG) for the KPK's Online Gratification Reporting System (GOL) - Implementation and submission of gratification reports to the KPK through the Online Gratification reporting system (GOL). - Implementation of an independent assessment of the principles of good corporate governance by external parties. - Dissemination of Good Corporate Governance by independent consultants to all employees. - Dissemination of Circular Letters to Employees, Partners/Partners, and Customers/Debtors regarding the prohibition of requesting, receiving and granting gratuities to/from Employees as well as to Partners, Goods/Services Providers (Vendors), Partners, and Customers. - Socialization through flyers regarding the prohibition of gratification practices to all employees - Establishment and Inauguration of the Special Purpose Vehicle (SPV). - Implementation of Risk Management through Risk Management competency certification and employee competency certification. - Issuance of regulations regarding Procurement Committee. - Issuance of the Information System Technology Operational Manual. - Determination of structure and membership of Risk Management Committee.

Tata Kelola yang Baik Roadmap

Good Corporate Governance Roadmap

Tahun Year	Kegiatan Activities
2022	• Pelaksanaan <i>self-assessment</i> GCG LPEI posisi tahun 2021. • Pelaksanaan penilaian independen prinsip-prinsip tata kelola yang baik oleh pihak eksternal. • Pemenuhan Pelaporan LHKPN. • Penyempurnaan Struktur Organisasi LPEI. • Pembentukan jabatan Head of Manajemen Risiko & Kredit LPEI. • Pengukuhan nilai-nilai Budaya LPEI yang baru yakni <i>Agile</i>, Profesionalisme, Integritas, dan Kreatif yang diformulasikan dalam sebuah kata "APIK." • Penyusunan Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di Bawah Direktur Eksekutif. • Pemutakhiran Piagam Dewan Pengawas Syariah LPEI, Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi LPEI, Piagam Komite Pemantau Risiko LPEI, Piagam Komite Audit LPEI, dan Piagam Audit Internal LPEI. • Penyusunan Piagam Komite Penugasan Khusus LPEI. • Pemutakhiran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai LPEI. • Pemutakhiran peraturan internal tentang Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat LPEI Wajib Laporan. • Pemutakhiran peraturan internal tentang pengendalian Gratifikasi LPEI. • Pemutakhiran peraturan internal tentang Pengadaan Barang/Jasa LPEI. • Penyampaian Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan APU-PPT semester I 2022. • Sosialisasi Tata Kelola yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) oleh konsultan independen kepada seluruh pegawai LPEI. • Pelatihan Tata Cara Pengisian LHKPN dengan pembicara langsung dari KPK. • Pelatihan <i>Computer Based Training</i> (CBT) Kode Etik dan Budaya Kerja Lembaga kepada seluruh pegawai LPEI. • Sosialisasi berkelanjutan terkait WBS dan Gratifikasi kepada seluruh pegawai LPEI, termasuk sosialisasi larangan praktik Gratifikasi melalui <i>email blast</i>, <i>flyer</i>, dan <i>screensaver</i> kepada seluruh pegawai LPEI. • Keikutsertaan dalam <i>e-learning</i> Peningkatan Pemahaman Gratifikasi dari KPK oleh seluruh pegawai Satuan Kerja Kepatuhan. • Pelaksanaan dan penyampaian laporan gratifikasi kepada KPK melalui sistem pelaporan Gratifikasi <i>Online</i> (GOL) KPK. • Penyampaian pemenuhan rencana kerja dan realisasi atas Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) LPEI tahun 2022 kepada KPK. • Diseminasi Surat Edaran kepada Pegawai LPEI, Mitra/Rekanan, dan Nasabah/Debitur perihal larangan permintaan, penerimaan dan pemberian gratifikasi untuk/dari Pegawai LPEI serta kepada Rekanan, Penyedia Barang/Jasa (Vendor), Mitra, dan Nasabah. • Persiapan pencatatan Unit Usaha Syariah berdasarkan POJK, dilengkapi dengan audiensi dengan OJK Bagian Pengawas Syariah. • <i>Focus Group Discussion</i> beserta sosialisasi PMK 208/2021 antara LPEI, BPKP, dan Kementerian Keuangan yang diwakili oleh DJKN. • Penyusunan <i>roadmap</i> dan <i>framework Governance, Risk dan Compliance</i> (GRC) LPEI. • Pelaksanaan Webinar: Cara APIK Melawan <i>Fraud</i> dan <i>Anti Money Laundering</i>, dengan Pembicara dari PPATK dan Transparansi Internasional Indonesia. • The implementation of GCG self-assessment of Indonesia Eximbank's position in 2021. • Implementation of independent assessment of good corporate governance principles by external parties. • Fulfillment of LHKPN Reporting. • Improvement of Indonesia Eximbank's organizational structure. • Establishment of Head of Risk & Credit Management of Indonesia Eximbank. • Strengthening the new Indonesia Eximbank Cultural values of Agile, Professionalism, Integrity, and Creative formulated in a word "APIK." • Preparation of Operational Guidelines Standards of nine committees under the Executive Director. • Updating the Charter of Indonesia Eximbank Sharia Supervisory Board, Remuneration and Nomination Committee, Risk Monitoring Committee, the Audit Committee and Internal Audit. • Drafting of the Special Assignment Committee Charter of Indonesia Eximbank. • Update of Indonesia Eximbank Employee Code of Conduct. • Updating internal regulations on the Obligation of State Administration Property Report (LHKPN) for Indonesia Eximbank Officials Must Report. • Updating internal regulations on Indonesia Eximbank Gratification control. • Update of internal regulations on Procurement of Goods/Services of Indonesia Eximbank. • Submission of Report on the Implementation of Compliance Function and AML-CFT in the first semester of 2022. • Socialization of Good Corporate Governance by independent consultants to all Indonesia Eximbank employees. • Training on LHKPN Filling Procedures with direct speakers from KPK. • Computer Based Training (CBT) Code of Conduct and Work Culture of the Institution to all Indonesia Eximbank employees. • Continuous socialization related to WBS and Gratification to all Indonesia Eximbank employees, including socialization of the prohibition of Gratification practices through email blasts, flyers, and screensavers to all Indonesia Eximbank employees. • Participation in e-learning Increasing Gratification Understanding from the KPK by all employees of Compliance Unit. • Implementation and submission of gratification reports to KPK through the KPK's Online Gratification reporting system (GOL). • Submission of fulfillment of work plan and realization of the 2022 Indonesia Eximbank Gratification Control Program (PPG) to KPK. • Dissemination of Circular Letter to Indonesia Eximbank Employees, Partners/Partners, and Customers/Debtors regarding the prohibition of requesting, receiving and granting gratuities to/from Indonesia Eximbank Employees as well as to Partners, Goods/Services Providers (Vendors), Partners, and Customers. • Preparation for the recording of Sharia Business Units based on POJK, complemented by hearings with the OJK Sharia Supervisory Section. • Focus Group Discussion along with socialization of PMK 208/2021 between Indonesia Eximbank, BPKP, and the Ministry of Finance represented by DJKN. • Preparation of Indonesia Eximbank's Governance, Risk and Compliance (GRC) roadmap and framework. • Webinar: How APIK Fights Fraud and Anti Money Laundering, with Speakers from PPATK and Transparency International Indonesia.



Tata Kelola yang Baik Roadmap

Good Corporate Governance Roadmap

Tahun Year	Kegiatan Activities
2023	• Pembentukan dan pengukuhan DCOR Officer LPEI; • Pelaksanaan penilaian terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik LPEI periode tahun 2022 oleh BPKP; • Pelaksanaan <i>self assessment</i> faktor tata kelola yang baik LPEI tahun 2023 menggunakan parameter SEOJK No. 15/SEOJK.05/2022 sebagai bagian dari Laporan Tingkat Kesehatan LPEI tahun 2023; • Pemenuhan pelaporan LHKPN periode tahun 2023 secara tepat waktu dan terpenuhi 100%; • Penyusunan piagam komite <i>Governance, Risk dan Compliance</i> (GRC) LPEI; • Sosialisasi berkelanjutan terkait pengendalian gratifikasi, <i>Whistleblowing System</i> (WBS), dan APU PPT kepada pegawai LPEI; • Pelaksanaan survei WBS dan Gratifikasi kepada seluruh Manajemen dan pegawai LPEI; • Pelaksanaan program pengendalian Gratifikasi LPEI tahun 2023. • Sosialisasi Penguatan Bisnis LPEI melalui Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) kepada KAP Rekanan LPEI; • Pengkinian peraturan internal dan penguatan <i>framework</i> Strategi Anti Fraud LPEI; • Pembentukan Komite GRC LPEI yang diatur dalam peraturan internal Komite Governance, Risk & Compliance (GRC Committee) LPEI; • Pengkinian peraturan internal atas penerapan program Anti Pencucian uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, & Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT & PPPSPM); • Penyusunan kebijakan/peraturan internal Tata Kelola yang Baik LPEI; • Penyusunan kebijakan/peraturan internal Operasional Manajemen Risiko Enterprise LPEI; • Penyusunan kebijakan/peraturan internal Pengelola Rekanan Pengadaan Barang/Jasa LPEI; • Penyusunan kebijakan/peraturan internal Penyusunan RKAT, Rencana Bisnis dan RJP LPEI; • Penyusunan kebijakan/peraturan internal Tata Naskah Dinas LPEI; • Penyusunan kebijakan/peraturan internal Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI; • Penyusunan kebijakan/peraturan internal Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan LPEI; • Penyusunan kebijakan/peraturan internal Komite Perusahaan Anak LPEI; • Penyusunan kebijakan/peraturan internal Layanan Pengaduan Nasabah LPEI; • Penyusunan kebijakan/peraturan internal Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur LPEI. • Penyusunan dan pengkinian peraturan internal terkait penerapan PMK 208/PMK.06/2021. • Establishment and inauguration of Indonesia Eximbank DCOR Officer; • Implementation of an assessment for Indonesia Eximbank's good corporate governance principles for 2022 by BPKP; • Implementation of self-assessment of Indonesia Eximbank good corporate governance factors in 2023 using SEOJK No. 15/SEOJK.05/2022 parameters as part of the Indonesia Eximbank Health Level Report in 2023; • Fulfillment of LHKPN reporting for 2023 period in a timely manner and 100% fulfilled; • Preparation of Indonesia Eximbank Governance, Risk and Compliance (GRC) committee charter; • Continuous socialization related to gratification control, Whistleblowing System (WBS), and AML/CFT to Indonesia Eximbank employees; • Implementation of WBS and Gratification survey to all Indonesia Eximbank Management and employees; • Implementation of Indonesia Eximbank Gratification control program in 2023. • Socialization of Strengthening Indonesia Eximbank Business through Implementation of Good Corporate Governance (GCG) to KAP Partners of Indonesia Eximbank; • Updating internal regulations and strengthening the Indonesia Eximbank Anti Fraud Strategy framework; • Establishment of Indonesia Eximbank GRC committee which is regulated in the internal regulation of Indonesia Eximbank Governance, Risk & Compliance Committee (GRC Committee); • Updating of internal regulations on Implementation of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing & Prevention of Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (AML PPT & PPFWMD) program; • Preparation of Indonesia Eximbank's internal Good corporate governance policy/regulation; • Preparation of internal policy/regulation of Indonesia Eximbank Enterprise Risk Management Operations; • Preparation of internal policies/regulations of Indonesia Eximbank Goods/Services Procurement Partner Management; • Preparation of internal policies/regulations for the preparation of RKAT, Business Plan and RJP Indonesia Eximbank; • Preparation of internal policies/regulations of Indonesia Eximbank Office Manuscripts; • Preparation of internal policy/regulation on Health Level Assessment of Indonesia Eximbank; • Preparation of internal policy/regulation on Implementation of Compliance Function of Indonesia Eximbank; • Formulation of internal policy/regulation of Indonesia Eximbank Subsidiary Committee; • Preparation of internal policy/regulation on Indonesia Eximbank Customer Complaint Service; • Formulation of internal policies/regulations of the Indonesia Eximbank Board of Directors Work Procedure Guidelines. • Preparation and updating of internal regulations related to implementation of PMK 208/PMK.06/2021.

Tata Kelola yang Baik Roadmap

Good Corporate Governance Roadmap

Tahun Year	Kegiatan Activities
2024	• Pelaksanaan penilaian terhadap penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik LPEI periode tahun 2023 oleh BPKP; • Pelaksanaan self assessment faktor Tata Kelola yang Baik LPEI tahun 2024 menggunakan parameter SEOJK No. 15/SEOJK.05/2022 sebagai bagian dari Laporan Tingkat Kesehatan LPEI tahun 2023; • Pemenuhan pelaporan LHKPN periode tahun 2023 secara tepat waktu dan terpenuhi 100%; • Sosialisasi berkelanjutan terkait Pengendalian Gratifikasi, <i>Whistleblowing System</i> (WBS), dan APU, PPT dan PPPSPM kepada pegawai LPEI; • Pelaksanaan survey WBS dan Gratifikasi kepada seluruh Manajemen dan pegawai LPEI; • Pelaksanaan program pengendalian Gratifikasi LPEI tahun 2024. • Pengkinian peraturan internal dan penguatan <i>framework</i> Strategi Anti-Fraud LPEI; • Pengkinian peraturan internal atas penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, & Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM); • Penyusunan kebijakan/peraturan internal Tata Kelola yang Baik LPEI; • Penyusunan dan pengkinian regulasi-regulasi internal LPEI dalam rangka pengkinian ketentuan internal dan sejalan dengan tindak lanjut rekomendasi BPKP. • Implementation of the assessment of the implementation of the principles of Good Governance of LPEI for the period of 2023 by BPKP; • Implementation of self-assessment of LPEI Good Governance factors in 2024 using SEOJK No. 15/SEOJK.05/2022 parameters as part of the LPEI Health Level Report in 2023; • Fulfillment of LHKPN reporting for the period of 2023 in a timely manner and 100% fulfilled; • Continuous socialization related to Gratification Control, Whistleblowing System (WBS), and AML, CFT and PPPSPM to LPEI employees; • Implementation of WBS and Gratification survey to all LPEI Management and employees; • Implementation of LPEI's Gratification control program in 2024. • Updating internal regulations and strengthening the LPEI Anti-Fraud Strategy framework; • Updating internal regulations on the implementation of Anti-Money Laundering, Prevention of Financing of Terrorism, & Prevention of Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction (AML PPT and PPPSPM) program; • Preparation of internal policies/regulations of LPEI Good Governance; • Preparation and updating of LPEI's internal regulations in order to update internal provisions and in line with the follow-up of BPKP recommendations.

Struktur Tata Kelola LPEI

Indonesia Eximbank Governance Structure

Sistem Tata Kelola

Sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2009, LPEI menerapkan sistem tata kelola *One Board System* (Dewan Tunggal), di mana Dewan Direktur berfungsi sebagai satu-satunya organ dalam organisasi yang bertanggung jawab atas perumusan, penetapan kebijakan, serta pengawasan operasional LPEI. Sistem ini dianggap sesuai dengan kebutuhan LPEI. Namun, untuk menghindari dominasi pengaruh yang berlebihan dari salah satu anggota Dewan Direktur yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif berdasarkan penunjukan Menteri, Ketua Dewan Direktur tidak memiliki hak suara dalam rapat Dewan Direktur.

Struktur Tata Kelola yang Baik

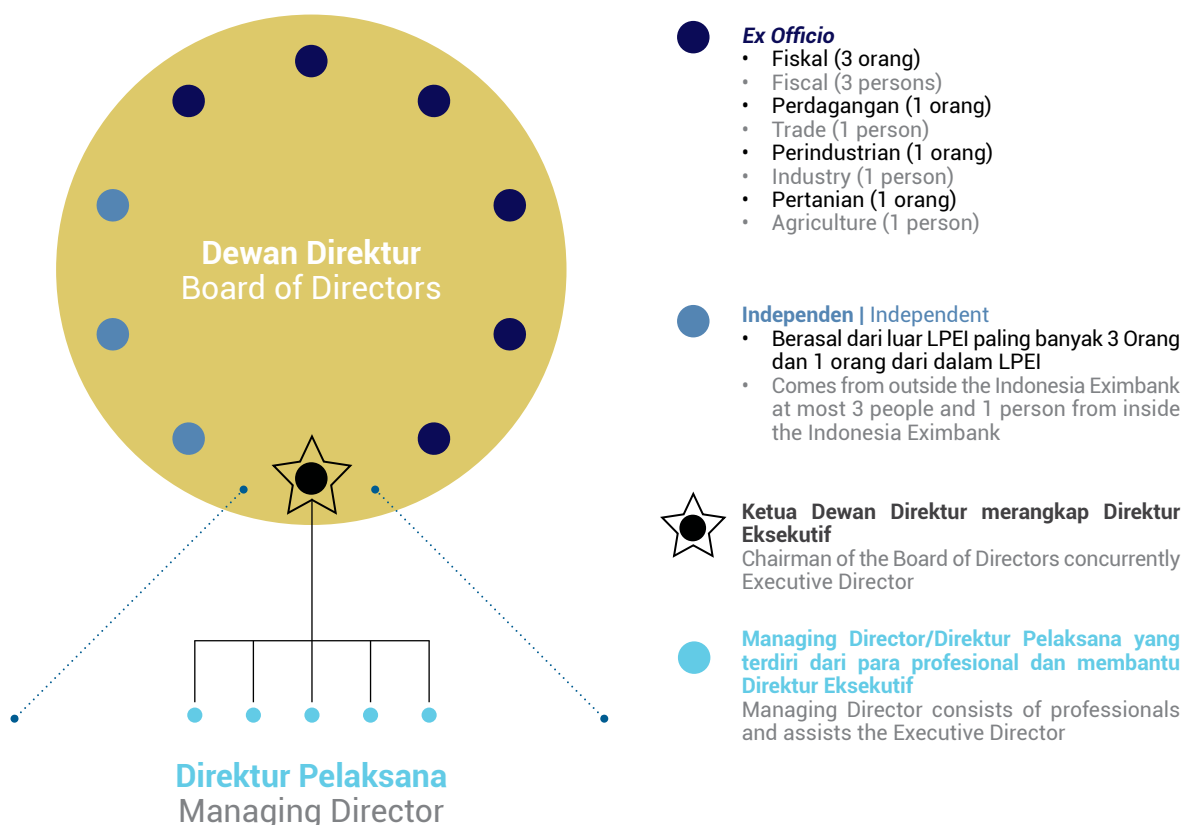
LPEI memiliki struktur tata kelola yang dirancang untuk memastikan efektivitas organisasi. Dewan Direktur berperan sebagai satu-satunya organ yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, menetapkan arah strategis, dan mengawasi operasional LPEI. Struktur Tata Kelola yang Baik LPEI dapat diilustrasikan dalam bagan berikut:

Governance System

In accordance Act No. 2/2009, Indonesia Eximbank adopts the One Board System, where the Board of Directors acts as the sole organ within the organization responsible for formulating policies, making decisions, and overseeing Indonesia Eximbank operational activities. The One Board System is deemed appropriate for Indonesia Eximbank needs. However, to prevent excessive influence domination by one member of Board of Directors who also serves as Chairman of Board of Directors and Executive Director as appointed by the Minister, the Chairman of Board of Directors does not have voting rights in the Board of Directors meetings.

Good Corporate Governance

Indonesia Eximbank has a governance structure designed to ensure organizational effectiveness. Board of Directors acts as the sole organ responsible for formulating policies, setting strategic directions, and supervising the operations of Indonesia Eximbank. Indonesia Eximbank Good Corporate Governance structure can be illustrated in the following chart:



Mengacu pada ketentuan tersebut, komposisi Dewan Direktur berjumlah paling banyak adalah 10 (sepuluh) orang, yang terdiri dari:

1. 3 (tiga) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi fiskal.
2. 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi perdagangan.
3. 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi perindustrian.
4. 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi pertanian.
5. Paling banyak 3 (tiga) orang yang berasal dari luar LPEI dan 1 (satu) orang dari dalam LPEI.

Salah satu anggota Dewan Direktur yang ditunjuk oleh Menteri menjabat sebagai Ketua Dewan Direktur dan merangkap jabatan sebagai Direktur Eksekutif. Dalam menjalankan tugasnya, Direktur Eksekutif didukung oleh maksimal 5 (lima) orang Direktur Pelaksana, di mana paling banyak 4 (empat) di antaranya berasal dari internal LPEI. Pengangkatan dan pemberhentian Direktur Pelaksana dilakukan oleh Dewan Direktur berdasarkan usulan dari Direktur Eksekutif.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut, Dewan Direktur membentuk komite-komite pendukung di bawahnya, antara lain: 1) Komite Audit; 2) Komite Pemantau Risiko; dan 2) Komite Remunerasi dan Nominasi. Setiap komite menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan lingkup kerja yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Eksekutif (KDE). Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenai Nasabah LPEI.

Arsitektur Tata Kelola yang Baik

Penerapan tata kelola yang baik menjadi fondasi utama dalam mengelola organisasi secara transparan dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, arsitektur Tata Kelola yang Baik berperan sebagai pedoman yang memastikan seluruh kebijakan dan prosedur dirancang sesuai prinsip-prinsip tata kelola yang berlaku. Dengan struktur yang kuat, LPEI dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi pertumbuhan berkelanjutan, meningkatkan nilai bagi *stakeholder*, serta memperkuat kepercayaan dari berbagai pihak. Penyusunan kebijakan dan prosedur berbasis Tata Kelola yang Baik menekankan pentingnya adanya dokumen tertulis yang jelas, sebagaimana ditunjukkan dalam skema berikut:

Referring to the provisions above, Board of Directors composition is no more than 10 (ten) persons, consisting of:

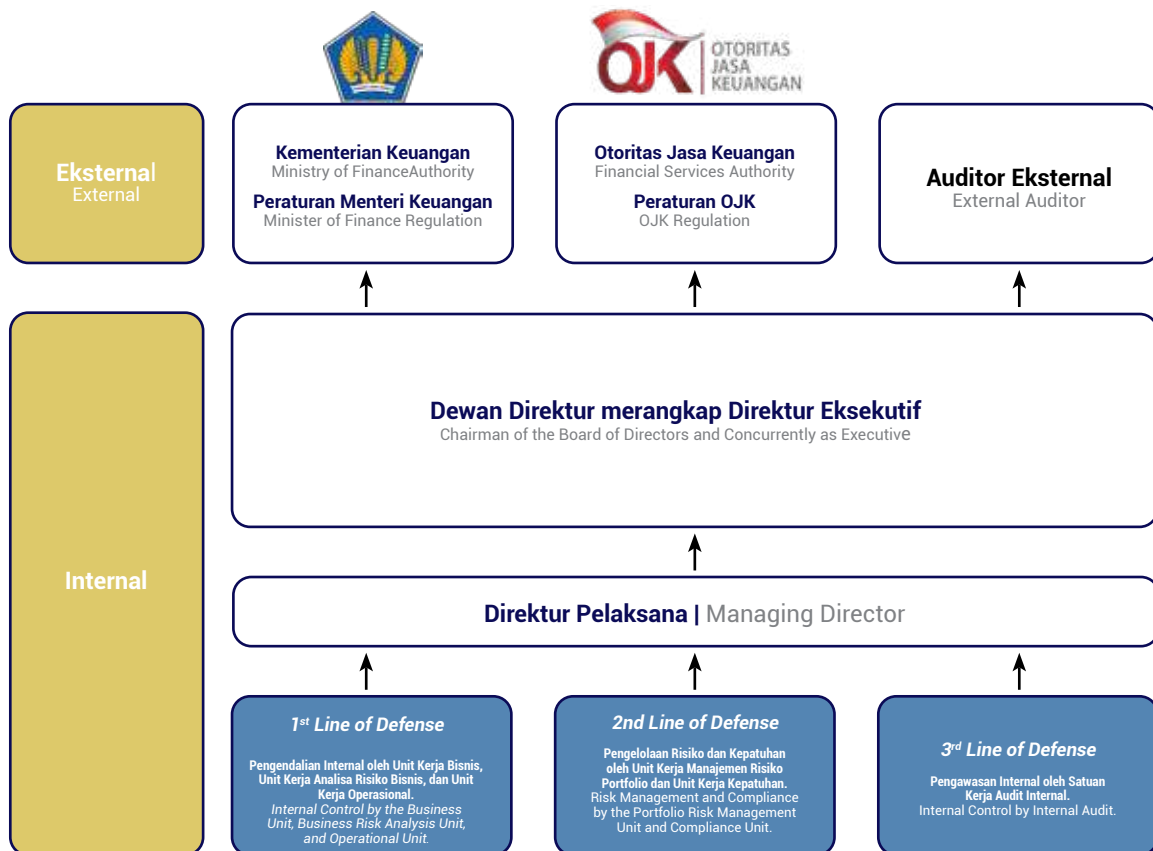
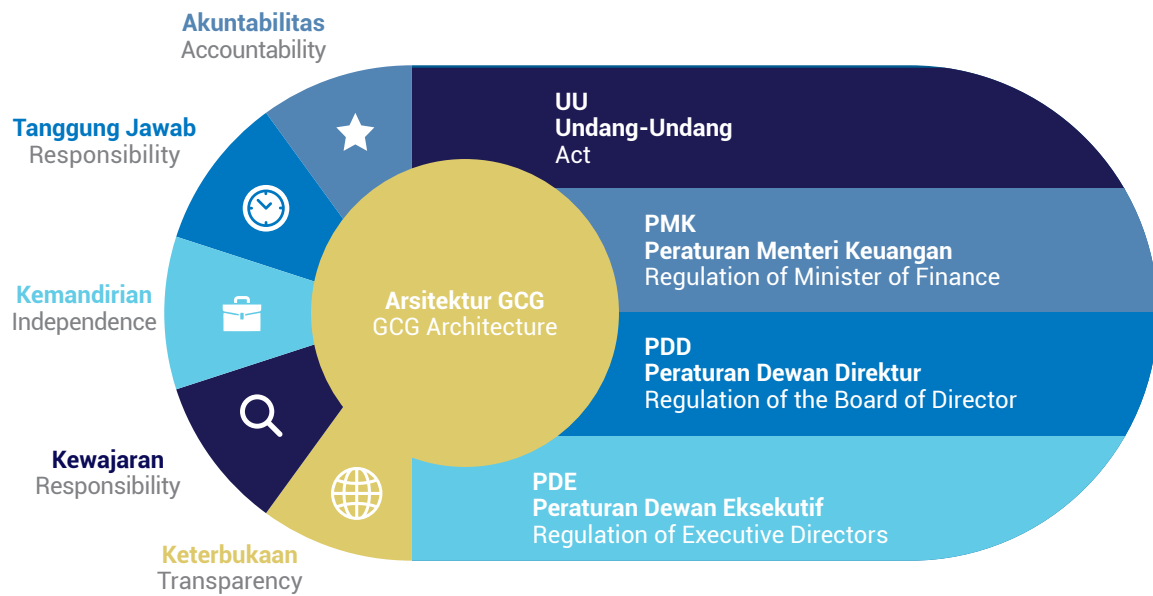
1. 3 (three) government officials from the institution or department in charge of fiscal.
2. 1 (one) government officials from the institution or department in charge of trade.
3. 1 (one) government officials from the institution or department in charge of industry.
4. 1 (one) government officials from the institution or department in charge of agriculture.
5. A maximum of 3 (three) persons from external Indonesia Eximbank and 1 (one) person from within Indonesia Eximbank.

The Minister appoints one of Board of Directors members to serve as Chairman of Board of Directors and Executive Director. The Executive Director is assisted in carrying out its duties by a maximum of 5 (five) Managing Directors, with a maximum of 4 (four) persons coming from within the Indonesia Eximbank. Board of Directors appoints and dismisses the Managing Director based on the Executive Director's recommendation.

To enhance the effectiveness of implementation of these duties and responsibilities, Board of Directors establishes supporting committees, among others: 1) Audit Committee; 2) Risk Monitoring Committee; and 3) Remuneration and Nomination Committee. Each committee operates in accordance with the scope of duties and responsibilities as stipulated by the Executive Directors' Decree (KDE). This is in accordance with the rules set out in Article 8 of the Minister of Finance Regulation No. 208/2021 concerning the Principles of Governance, Risk Management, and Know Your Customer of Indonesia Eximbank.

Good Corporate Governance Architecture

The implementation of good corporate governance is the main foundation for managing an organization in a transparent and responsible manner. In this case, Good Corporate Governance architecture acts as a guideline that ensures all policies and procedures are designed in accordance with applicable governance principles. With a strong structure, Indonesia Eximbank can create a work environment that is conducive to sustainable growth, increase value for stakeholders, and strengthen trust from various parties. The formulation of Good corporate governance-based policies and procedures emphasizes the importance of clear written documents, as shown in the following diagram:



Kerangka Tata Kelola (Struktur, Proses, dan Hasil Tata Kelola)

LPEI terus memperkuat penerapan Tata Kelola yang Baik di seluruh lini organisasi. Komitmen ini diwujudkan melalui peran aktif Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, serta seluruh unit kerja dalam menegakkan prinsip-prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel. Keberhasilan implementasi Tata Kelola yang Baik tercermin dalam konsistensi penerapan tiga pilar utama, yaitu Struktur Tata Kelola, Proses Tata Kelola, dan Hasil Tata Kelola. Penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan ketiga aspek tersebut disampaikan dalam bagian berikut.

1. **Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*)**
Governance Structure yaitu terkait dengan kecukupan Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola Perusahaan agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Lembaga. Struktur organ Tata Kelola meliputi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, Komite-Komite, dan Satuan Kerja. Sedangkan yang termasuk dalam infrastruktur Tata Kelola antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.
2. **Proses Tata Kelola (*Governance Process*)**
Governance Process merupakan efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Lembaga sehingga dapat menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan seluruh pemangku kepentingan. LPEI memastikan proses Tata Kelola telah dilakukan melalui prosedur dan mekanisme yang terstruktur dan sistematis guna menghasilkan *outcome* yang memenuhi prinsip Tata Kelola.
3. **Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*)**
Governance Outcome yang memenuhi harapan pemangku kepentingan dapat dicapai melalui proses penerapan prinsip Tata Kelola yang efektif serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang memadai sesuai kebutuhan dan kompleksitas bisnis Lembaga. Dengan demikian, *Governance Outcome* merupakan hasil akhir atas penerapan *Governance Process* dan dukungan yang memadai dari *Governance Structure*. Adanya permasalahan yang muncul pada *Governance Structure* akan menimbulkan kelemahan pada *Governance Process*. Di lain pihak, adanya kelemahan pada *Governance Process* akan berdampak pada *Governance Outcome*.

GCG Framework (Governance Structure, Process, and Outcome)

Indonesia Eximbank continues to strengthen the implementation of Good Corporate Governance across all lines of the organization. This commitment is realized through the active role of Board of Directors, Executive Director, Managing Director, and all work units in upholding the principles of transparent and accountable governance. The successful implementation of Good Corporate Governance is reflected in the consistent application of three main pillars, namely Governance Structure, Governance Process, and Governance Outcome. Further explanation regarding the implementation of these three aspects is provided in the following section.

1. **Governance Structure**
 Governance Structure is related to the adequacy of Corporate Governance Structure and Infrastructure, so that the process of implementing Good Corporate Governance Principles produces outcomes that meet the expectations of the Institution's Stakeholders. The governance organs are organized into the Board of Directors, Executive Directors, Managing Directors, Committees, and Work Units. Meanwhile, policies and procedures, management information systems, and the primary tasks and functions of each organizational structure are all part of the Governance infrastructure.
2. **Governance Process**
 Governance Process is the process effectiveness of implementing good corporate governance principles, which is supported by the adequacy of Corporate Governance structure and infrastructure to produce outcomes that meet the expectations of all stakeholders. Indonesia Eximbank always ensures that the governance process is carried out using structured and systematic procedures and mechanisms to produce outcomes that meet the Governance principles.
3. **Governance Outcome**
 Governance outcomes that meet stakeholder expectations are achieved through the process of implementing Good Corporate Governance principles, which is supported by adequate Governance structures and infrastructure. Thus, the Governance Outcome is the end result of putting the Governance Process into action and receiving adequate support from the Governance Structure. The presence of flaws in the Governance Structure leads to flaws in the Governance Process. On the other hand, the presence of flaws in the Governance Process affects the Governance Outcome.



Penerapan Pedoman Tata Kelola yang Baik

Implementation of Good Corporate Governance Guidelines

No.	Penerapan Prinsip Tata Kelola Implementation of Governance Principles	Telah Diatur dalam Peraturan Internal Regulated in Internal Regulations	Peraturan Eksternal Terkait Related External Regulations
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana Implementation of duties and responsibilities of Board of Directors, Executive Director, and Managing Director	- Peraturan Dewan Direktur No. 0003/PDD/04/2023 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. - Peraturan Direktur Eksekutif No. 0041/PDE/11/2011 tentang Pedoman Tata Kerja Direktur Pelaksana. - Board of Directors Regulation No. 0003/PDD/04/2023 concerning Work Procedures Guidelines for Board of Directors of Indonesia Eximbank. - Executive Director Regulation No. 0041/PDE/11/2011 concerning Work Procedures Guidelines for Managing Director.	- UU No. 2/2009 tentang LPEI. - PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. - POJK No. 9/2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia - Act No. 2/2009 concerning the Indonesia Eximbank. - Minister of Finance Regulation No. 208/2021 concerning Principles of Governance, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank - Financial Services Authority Regulation No. 9/2022 concerning Supervision of Indonesia Eximbank.

No.	Penerapan Prinsip Tata Kelola Implementation of Governance Principles	Telah Diatur dalam Peraturan Internal Regulated in Internal Regulations	Peraturan Eksternal Terkait Related External Regulations
2.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas DPS dan komite-komite serta satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal Completeness and implementation of duties of DPS (Internal Control System) and committees as well as units carrying out internal control functions:	- Peraturan Dewan Direktur No. 0003/PDD/12/2021 tentang Kebijakan Sistem Pengendalian Internal LPEI. - Peraturan Dewan Direktur No. 0013/PDD/10/2022 tentang Piagam Dewan Pengawas Syariah LPEI. - Peraturan Dewan Direktur No. 0005/PDD/12/2023 tentang Piagam Komite Harmonisasi Ekspor LPEI. - Peraturan Dewan Direktur No. 0005/PDD/09/2022 tentang Piagam Komite Audit LPEI. - Peraturan Dewan Direktur No. 0007/PDD/09/2022 tentang Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi LPEI. - Peraturan Dewan Direktur No. 0008/PDD/09/2022 tentang Piagam Komite Penugasan Khusus LPEI. - Peraturan Dewan Direktur No. 0006/PDD/09/2022 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko. - Peraturan Direktur Eksekutif No. No. 0021/PDE/09/2023 tentang Sembilan Komite di bawah Direktur Eksekutif. - Peraturan Direktur Eksekutif No. 0008/PDE/07/2023 tentang Standar Pedoman Operasional Komite Governance, Risk & Compliance (GRC Committee). - Keputusan Direktur Eksekutif No. 0089/KDE/10/2021 tentang komite Pembiayaan Program PKE dalam rangka Mendukung Sektor Usaha UKM Berorientasi Ekspor. - Keputusan Direktur Eksekutif No. 0090/KDE/10/2021 tentang Komite Pembiayaan <i>Supply Chain Financing</i>. - Keputusan Direktur Eksekutif No. 0100/KDE/11/2021 tentang Komite Penjaminan Program Penjaminan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Korporasi Dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN. - Keputusan Direktur Eksekutif No. 0078/KDE/08/2021 tentang Anggota Komite Pembiayaan Program Penugasan Khusus Ekspor dalam Rangka Mendukung Sektor UKM Berorientasi Ekspor. - Keputusan Direktur Eksekutif No. 0086/KDE/12/2020 tentang Komite Etik dan Disiplin Pegawai LPEI. - Board of Directors Regulation No. 0003/PDD/12/2021 concerning Policy on the Internal Control System of Indonesia Eximbank. - Board of Directors Regulation No. 0013/PDD/10/2022 concerning the Sharia Supervisory Board Charter of Indonesia Eximbank. - Board of Directors Regulation No. 0005/PDD/12/2023 concerning the Export Harmonization Committee Charter of Indonesia Eximbank. - Board of Directors Regulation No. 0005/PDD/09/2022 concerning the Audit Committee Charter of Indonesia Eximbank. - Board of Directors Regulation No. 0007/PDD/09/2022 concerning the Remuneration and Nomination Committee Charter of Indonesia Eximbank. - Board of Directors Regulation No. 0008/PDD/09/2022 concerning the Special Assignment Committee Charter of Indonesia Eximbank. - Board of Directors Regulation No. 0006/PDD/09/2022 concerning the Risk Monitoring Committee Charter. - Executive Director Regulation No. 0021/PDE/09/2023 concerning Nine Committees under Executive Director. - Executive Director Regulation No. 0008/PDE/07/2023 concerning Operational Guidelines Standard for Governance, Risk & Compliance (GRC Committee). - Executive Director Decree No. 0089/KDE/10/2021 concerning Financing Program Committee for Supporting Export-Oriented SME Sectors. - Executive Director Decree No. 0090/KDE/10/2021 concerning Supply Chain Financing Committee. - Executive Director Decree No. 0100/KDE/11/2021 concerning Government Guarantee Program Committee for Corporate Businesses in the Implementation of PEN Program. - Executive Director Decree No. 0078/KDE/08/2021 concerning Members of Special Assignment Export Sector Financing Committee to Support Export-Oriented SME Sectors. - Executive Director Decree No. 0086/KDE/12/2020 concerning Ethics and Employee Discipline Committee of Indonesia Eximbank.	- UU No. 2/2009 tentang LPEI. - PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. - POJK No. 9/2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia - Act No. 2/2009 concerning the Indonesia Eximbank. - Minister of Finance Regulation No. 208/2021 concerning Principles of Governance, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank - Financial Services Authority Regulation No. 9/2022 concerning Supervision of Indonesia Eximbank.



No.	Penerapan Prinsip Tata Kelola Implementation of Governance Principles	Telah Diatur dalam Peraturan Internal Regulated in Internal Regulations	Peraturan Eksternal Terkait Related External Regulations
3.	Fungsi Kepatuhan Compliance Function	- Peraturan Dewan Direktur No. 0015/PDD/12/2022 tentang Kebijakan Fungsi Kepatuhan dan Penerapan Program APU PPT LPEI. - Peraturan Direktur Eksekutif No. 0007/PDE/07/2023 tentang Standar Pedoman Operasional Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan LPEI. - Board of Directors Regulation No. 0015/PDD/12/2022 concerning the Compliance Function Policy and Implementation of APU PPT Program of Indonesia Eximbank. - Executive Director Regulation No. 0007/PDE/07/2023 concerning the Operational Guidelines Standard for the Implementation of the Compliance Function of Compliance Function.	- UU No. 2/2009 tentang LPEI. - PMK No. 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. - PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. - POJK No. 9/2022 tentang Pengawasan LPEI. - Act No. 2/2009 concerning Indonesia Eximbank. - Minister of Finance Regulation No. 58/PMK.06/2020 concerning Supervision and Guidance of Indonesia Eximbank. - Minister of Finance Regulation No. 208/2021 concerning Principles of Governance, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Compliance Function. - Financial Services Authority Regulation No. 9/2022 concerning Supervision of Compliance Function.
3.1	LHKPN LHKPN (Wealth Report of State Officials):	Peraturan Direktur Eksekutif No. 0008/PDE/06/2022 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat LPEI Wajib Lapor LHKPN. Executive Director Regulation No. 0008/PDE/06/2022 concerning the Obligation to Submit Mandatory Wealth Report of State Officials (LHKPN) for Indonesia Eximbank Officials.	- UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. - UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - UU No. 2 Tahun 2009 tentang LPEI. - PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. - Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. - Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. - Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. - Law No. 28 of 1999 concerning Clean and Free from Corruption State Officials. - Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. - Act No. 2/2009 concerning Indonesia Eximbank. - Minister of Finance Regulation No. 208/2021 concerning Principles of Governance, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank. - Corruption Eradication Commission Regulation No. 7 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement, and Examination of Wealth of State Officials. - Corruption Eradication Commission Regulation No. 2 of 2020 concerning Amendments to Corruption Eradication Commission Regulation No. 07 of 2016 dated May 31, 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement, and Examination of Wealth of State Officials.

No.	Penerapan Prinsip Tata Kelola Implementation of Governance Principles	Telah Diatur dalam Peraturan Internal Regulated in Internal Regulations	Peraturan Eksternal Terkait Related External Regulations
3.2	Gratifikasi Gratification	Peraturan Direktur Eksekutif No. 0013/PDE/08/2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan LPEI. Executive Director Regulation No. 0013/PDE/08/2022 concerning Gratification Control within Indonesia Eximbank.	• UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. • UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, beserta perubahannya. • UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan perubahannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. d. UU No.2 Tahun 2009 tentang LPEI. • PMK No. 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. • PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. • Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. • POJK No. 9/2022 tentang Pengawasan LPEI. • Law No. 11 of 1980 concerning Criminal Acts of Bribery. • Law No. 28 of 1999 concerning Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism State Officials, along with its amendments. • Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption, along with its amendments Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. • Act No. 2 of 2009 concerning Indonesia Eximbank. • Minister of Finance Regulation No. 58/PMK.06/2020 concerning Supervision and Guidance of Indonesia Eximbank. • Minister of Finance Regulation No. 208/2021 concerning Principles of Governance, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles. • Corruption Eradication Commission Regulation No. 2 of 2019 concerning Gratification Reporting. • Financial Services Authority Regulation No. 9/2022 concerning Indonesia Eximbank Supervision.
3.3	Whistleblowing System	• Peraturan Direktur Eksekutif No. 0018/PDE/03/2012 tentang Manual Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing system</i>) LPEI. • Peraturan Direktur Eksekutif No. 0029/PDE/12/2023 tentang Standar Pedoman Operasional Penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i> LPEI. • Executive Director Regulation No. 0018/PDE/03/2012 concerning Manual of Violation Reporting System (Whistleblowing System) of Indonesia Eximbank. • Executive Director Regulation No. 0029/PDE/12/2023 concerning Operational Guidelines Standards for Implementation of Indonesia Eximbank Anti-Fraud Strategy.	• UU No. 2/2009 tentang LPEI. • PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. • POJK No. 9/2022 tentang Pengawasan LPEI. • Act No. 2 of 2009 concerning Indonesia Eximbank. • Minister of Finance Regulation No. 208/2021 concerning Principles of Governance, Risk Management Principles, and Know Your Customer. • Financial Services Authority Regulation No. 9/2022 concerning Indonesia Eximbank Supervision.

No.	Penerapan Prinsip Tata Kelola Implementation of Governance Principles	Telah Diatur dalam Peraturan Internal Regulated in Internal Regulations	Peraturan Eksternal Terkait Related External Regulations
3.4	Prinsip Mengenal Nasabah dalam rangka Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) Know Your Customer Principle in the Context of Implementing the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Program (APU PPT)	- Peraturan Dewan Direktur No. 0015/PDD/12/2022 tentang Kebijakan Fungsi Kepatuhan dan Penerapan Program APU PPT LPEI. - Peraturan Direktur Eksekutif No. 0028/PDE/12/2024 tentang Standar Pedoman Operasional Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT & PPPSPM). - Peraturan Direktur Eksekutif No. 0027/PDE/11/2020 Tentang Manual Operasional Penerapan Know Your Employee (KYE) LPEI. - Board of Directors Regulation No. 0015/PDD/12/2022 concerning Compliance Function Policy and Implementation of Anti-Money Laundering, Terrorism Financing Prevention, and Prevention of Proliferation of Weapons of Mass Destruction Programs (APU PPT) of Indonesia Eximbank. - Executive Director Regulation No. 0028/PDE/12/2023 concerning the Operational Guidelines Standard for Implementation of Anti-Money Laundering, Terrorism Financing Prevention, and Prevention of Proliferation of Weapons of Mass Destruction Programs (APU PPT & PPPSPM). - Executive Director Regulation No. 0027/PDE/11/2020 concerning the Operational Manual for Implementation of Know Your Employee (KYE).	- UU No. 2 Tahun 2009 tentang LPEI. - PMK No. 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan & Pengawasan LPEI. - PMK No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. - POJK No. 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 37/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non Bank - Peraturan Kepala PPATK No. PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. - Act No. 2 of 2009 concerning Indonesia Eximbank. - Minister of Finance Regulation No. 208/2021 concerning Principles of Governance, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles. - Financial Transaction Reports and Analysis Center Regulation No. 02/1.02/PPATK/02/15 concerning Categories of Service Users Potentially Committing Money Laundering Crimes. - Financial Services Authority Regulation No. 8 of 2023 concerning the Implementation of Anti-Money Laundering, Terrorism Financing Prevention, and Prevention of Proliferation of Weapons of Mass Destruction Programs in the Financial Services Sector. - Financial Services Authority Circular Letter No. 37/SEOJK.05/2017 concerning Guidelines for Implementation of Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Prevention Programs in the Non-Bank Financial Industry. - Financial Transaction Reports and Analysis Center Regulation No. PER-02/1.02/PPATK/02/15 concerning Categories of Service Users Potentially Committing Money Laundering Crimes.
3.4.1	Internal: Know Your Employee		
3.4.2	Eksternal: Nasabah dan Rekanan External: Customers and Partners		

No.	Penerapan Prinsip Tata Kelola Implementation of Governance Principles	Telah Diatur dalam Peraturan Internal Regulated in Internal Regulations	Peraturan Eksternal Terkait Related External Regulations
3.5	Laporan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan Suspicious Financial Transaction Reports	- Peraturan Dewan Direktur No. 0015/PDD/12/2022 tentang Kebijakan Fungsi Kepatuhan dan Penerapan Program APU PPT LPEI. - Peraturan Dewan Direktur No. 0017/PDD/12/2022 tentang Kebijakan Manajemen Risiko Enterprise Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. - Peraturan Direktur Eksekutif No. 0028/PDE/12/2023 tentang Standar Pedoman Operasional Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT & PPPSPM). - Peraturan Dewan Direktur No. 0003/PDD/03/2024 tentang Kebijakan Sistem Pengendalian Internal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. a. UU No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. - Board of Directors Regulation 0015/PDD/12/2022 concerning Compliance Function Policy and Implementation of Anti-Money Laundering Program, Counter-Terrorism Financing, and Prevention of Proliferation of Weapons of Mass Destruction (AML, CT, and PPWMD) Program of Indonesia Eximbank. - Executive Director Regulation No. 0028/PDE/12/2023 concerning Operational Guidelines Standard for Implementation of Anti-Money Laundering Program, Counter-Terrorism Financing, and Prevention of Proliferation of Weapons of Mass Destruction (AML, CT, and PPWMD) Program.	- Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri Melalui Aplikasi GoAML Bagi Penyedia Jasa Keuangan. - POJK No. 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. - PMK No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. - Financial Transaction Reports and Analysis Center Regulation No. 1 of 2021 concerning Procedures for Submitting Suspicious Financial Transaction Reports, Cash Financial Transactions, and Fund Transfer Financial Transactions from and to Abroad through the GoAML Application for Financial Service Providers. - Financial Services Authority Regulation No. 8 of 2023 concerning Implementation of Anti-Money Laundering Program, Counter-Terrorism Financing, and Prevention of Proliferation of Weapons of Mass Destruction Program in the Financial Services Sector. - Minister of Finance Regulation No. 208/2021 concerning Principles of Governance, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank.
3.6	Kepatuhan pemenuhan pelaporan kepada eksternal termasuk kepada regulator Compliance with external reporting requirements, including to regulators	Peraturan Direktur Eksekutif No. 0067/PDE/12/2019 tentang Manual Operasional Penetapan Unit Kerja Penanggung Jawab Pelaporan LPEI. Executive Director Regulation No. 0067/PDE/12/2019 concerning Operational Manual for Determination of Reporting Responsibility Units of Indonesia Eximbank.	- PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. - PMK No. 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/2022 tentang Pengawasan LPEI. - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.05.2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI. - Minister of Finance Regulation No. 208/2021 concerning Principles of Governance, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank. - Minister of Finance Regulation No. 58/PMK.06/2020 concerning Supervision and Guidance of Indonesia Eximbank. - Financial Services Authority Regulation No. 9/2022 concerning Indonesia Eximbank Supervision. - Financial Services Authority Circular Letter No. 15/SEOJK.05.2022 concerning Health Level Assessment of Indonesia Eximbank.

No.	Penerapan Prinsip Tata Kelola Implementation of Governance Principles	Telah Diatur dalam Peraturan Internal Regulated in Internal Regulations	Peraturan Eksternal Terkait Related External Regulations
3.7	Kepatuhan penyelesaian advance pegawai Compliance with employee advance settlement	Peraturan Direktur Eksekutif No. 0004/PDE/04/2023 tentang Standar Pedoman Operasional Limit Kewenangan Persetujuan Penggunaan Anggaran LPEI Executive Director Regulation No. 0004/PDE/04/2023 concerning the Operational Guidelines Standard for Authorization Limitation of Indonesia Eximbank Budget Utilization.	- PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. - PMK No. 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. - POJK No. 9/2022 tentang Pengawasan LPEI. - Minister of Finance Regulation No. 208/2021 concerning Principles of Governance, Risk Management, and Know Your Customer of Indonesia Eximbank. - Minister of Finance Regulation No. 58/PMK.06/2020 concerning Supervision and Guidance of Indonesia Eximbank. - Financial Services Authority Regulation No. 9/2022 concerning Indonesia Eximbank Supervision.
3.8	Anti Fraud	Peraturan Direktur Eksekutif No. 0029/PDE/12/2023 tentang Standar Pedoman Operasional Penerapan Strategi Anti Fraud LPEI. Executive Director Regulation No. 0029/PDE/12/2023 concerning Operational Guidelines Standard for Implementation of the Indonesia Eximbank Anti-Fraud Strategy.	PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. Minister of Finance Regulation No. 208/2021 concerning Principles of Governance, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles.
4.	Audit Internal dan Audit Eksternal Internal Audit and External Audit	- Peraturan Dewan Direktur No. 0016/PDD/12/2022 tentang Kebijakan Penerapan Fungsi Audit Internal LPEI. - Peraturan Direktur Eksekutif No. 0027/PDE/12/2022 tentang Standar Pedoman Operasional Audit Internal. - Peraturan Direktur Eksekutif No. 0014/PDE/08/2022 tentang Piagam Audit Internal. - Board of Directors Regulation No. 0016/PDD/12/2022 concerning Policy for Implementation of Indonesia Eximbank Internal Audit Unit Function. - Executive Director Regulation No. 0027/PDE/12/2022 concerning the Operational Guidelines Standard for Internal Audit. - Executive Director Regulation No. 0014/PDE/08/2022 concerning the Internal Audit Charter.	- UU No. 2/2009 tentang LPEI. - PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. - PMK No. 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. - POJK No. 9/2022 tentang Pengawasan LPEI. - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.05.2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI. - Act No. 2 of 2009 concerning Indonesia Eximbank. - Minister of Finance Regulation No. 208/2021 concerning Principles of Governance, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles. - Minister of Finance Regulation No. 58/PMK.06/2020 concerning Supervision and Guidance of Indonesia Eximbank. - Financial Services Authority Regulation No. 9/2022 concerning Indonesia Eximbank Supervision. - Financial Services Authority Circular Letter No. 15/SEOJK.05.2022 concerning Indonesia Eximbank Health Level Assessment.

No.	Penerapan Prinsip Tata Kelola Implementation of Governance Principles	Telah Diatur dalam Peraturan Internal Regulated in Internal Regulations	Peraturan Eksternal Terkait Related External Regulations
5.	Penerapan manajemen risiko termasuk Sistem Pengendalian Internal. Implementation of risk management including Internal Control Systems:	- Peraturan Dewan Direktur No. 0017/PDD/12/2022 tentang Kebijakan Manajemen Risiko Enterprise LPEI. - Peraturan Direktur Eksekutif No. 0032/PDE/09/2018 tentang Manual Operasional Manajemen Risiko (<i>Enterprise Risk Management Manual</i>) LPEI. - Peraturan Dewan Direktur No. 0003/PDD/12/2021 tentang Kebijakan Sistem Pengendalian Internal LPEI. - Board of Directors Regulation No. 0017/PDD/12/2022 concerning the Enterprise Risk Management Policy of Indonesia Eximbank. - Executive Director Regulation No. 0032/PDE/09/2018 concerning the Operational Manual of Risk Management (<i>Enterprise Risk Management Manual</i>) of Indonesia Eximbank. - Board of Directors Regulation No. 0003/PDD/12/2021 concerning the Internal Control System Policy of Indonesia Eximbank.	- PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. - PMK No. 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. - POJK No. 9/2022 tentang Pengawasan LPEI. - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.05.2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI. - Minister of Finance Regulation No. 208/2021 concerning Principles of Governance, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank. - Minister of Finance Regulation No. 58/PMK.06/2020 concerning Supervision and Guidance of Indonesia Eximbank. - Financial Services Authority Regulation No. 9/2022 concerning Indonesia Eximbank Supervision. - Financial Services Authority Circular Letter No. 15/SEOJK.05.2022 concerning Indonesia Eximbank Health Level Assessment.
6.	Pengadaan barang dan jasa Procurement of goods and services	- Peraturan Dewan Direktur No. 0002/PDD/06/2022 tentang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa LPEI. - Peraturan Direktur Eksekutif No. 0005.02/PDE/06/2023 tentang Standar Pedoman Operasional Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. - Peraturan Direktur Pelaksana No. 0009/MDI/11/2023 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengelola Rekanan Pengadaan Barang/Jasa. - Board of Directors Regulation No. 0002/PDD/06/2022 concerning the Procurement Policy of Goods/Services of Indonesia Eximbank. - Executive Director Regulation No. 0005.02/PDE/06/2023 concerning the Operational Guidelines Standard for Procurement of Goods/Services of Indonesia Eximbank. - Executive Director Regulation No. 0009/MDI/11/2023 concerning the Operational Technical Instructions for Managing Procurement Contractors of Goods/Services.	- PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. - POJK No. 9/2022 tentang Pengawasan LPEI - Minister of Finance Regulation No. 208/2021 concerning Principles of Governance, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles. - Financial Services Authority Regulation No. 9/2022 concerning Indonesia Eximbank Supervision.
7.	Penyusunan rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan Development of long-term plans as well as annual work plans and budgets	Peraturan Direktur Eksekutif No. 0026/PDE/11/2023 tentang Standar Pedoman Operasional Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Bisnis dan Rencana Jangka Panjang (RJP) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Executive Director Regulation No. 0026/PDE/11/2023 concerning the Operational Guidelines Standard for Preparation of Annual Work Plan and Budget (RKAT), Business Plan, and Long-Term Plan (RJP) of the Indonesia Eximbank.	- PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. - POJK No. 9/2022 tentang Pengawasan LPEI. - Minister of Finance Regulation No. 208/2021 concerning Principles of Governance, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles. - Financial Services Authority Regulation No. 9/2022 concerning Indonesia Eximbank Supervision.
8.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Transparency of financial and non-financial conditions	- Peraturan Dewan Direktur No. 0004/PDD/09/2022 tentang Kebijakan Akuntansi LPEI. - Peraturan Direktur Eksekutif No. 0018/PDE/09/2022 tentang Standar Pedoman Operasional Pelaksanaan Standar Akuntansi LPEI. - Board of Directors Regulation No. 0004/PDD/09/2022 concerning the Accounting Policy of Indonesia Eximbank. - Executive Director Regulation No. 0018/PDE/09/2022 concerning the Operational Guidelines Standard for Implementation of Accounting Standards of Indonesia Eximbank.	POJK No. 75/POJK.04/2017 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan. Financial Services Authority Regulation No. 75/POJK.04/2017 concerning Responsibilities of Board of Directors for Financial Reports.

No.	Penerapan Prinsip Tata Kelola Implementation of Governance Principles	Telah Diatur dalam Peraturan Internal Regulated in Internal Regulations	Peraturan Eksternal Terkait Related External Regulations
9.	Pelaporan internal dan benturan kepentingan Internal reporting and conflict of interest	• Peraturan Direktur Eksekutif No. 0067/PDE/12/2019 tentang Manual Operasional Penetapan Unit Kerja Penanggung Jawab Pelaporan LPEI. • Peraturan Direktur Eksekutif No. 0042/PDE/09/2019 tentang Manual Pakta Integritas LPEI. • Executive Director Regulation No. 0067/PDE/12/2019 concerning the Operational Manual for Determining the Responsible Reporting Unit of Indonesia Eximbank. • Executive Director Regulation No. 0042/PDE/09/2019 concerning the Integrity Pact Manual of Indonesia Eximbank.	• PMK No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. • POJK No. 9/2022 tentang Pengawasan LPEI. • Minister of Finance Regulation No. 208/2021 concerning Principles of Governance, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles. • Financial Services Authority Regulation No. 9/2022 concerning Indonesia Eximbank Supervision.

Rapat Pengesahan

Ratification Meeting

LPEI menjalankan mandat sebagai lembaga keuangan negara yang mendukung ekspor nasional dengan tata kelola yang berada di bawah kewenangan Menteri Keuangan RI. Dalam menjalankan fungsinya, LPEI wajib menyusun dan mengajukan Rencana Jangka Panjang (RJP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) sebagai landasan operasional. Mekanisme Rapat Pengesahan digunakan sebagai forum untuk mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan melalui mekanisme Rapat Pengesahan (Fungsi RUPS), yang mencakup evaluasi terhadap rencana kerja serta capaian kinerja LPEI dalam satu tahun buku.

Landasan Hukum dan Tahapan Pelaksanaan

Rapat Pengesahan Berdasarkan UU No. 2/2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Bagian Keempat RKAT:

1. Pasal 36: Tahun Buku dan Tahun Anggaran LPEI dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
2. Pasal 37:
 - a. Direktur Eksekutif menyiapkan Rencana Jangka Panjang sebagai rencana strategis yang memuat sasaran yang hendak dicapai oleh LPEI dalam periode 5 (lima) tahunan.
 - b. Direktur Eksekutif menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang.
 - c. Tata cara penyusunan, penyampaian, dan perubahan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Hak-hak Pemegang Saham

Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI tidak memiliki pembagian saham dan sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Kesetaraan Perlakuan terhadap Pemegang Saham

LPEI tetap menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi pemegang saham, meskipun tidak memiliki pemegang saham minoritas. Hal ini dikarenakan seluruh saham LPEI (100%) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Indonesia Eximbank carries out its mandate as a state financial institution that supports national exports with governance under the Indonesian Minister of Finance's authority. In performing its functions, Indonesia Eximbank is required to prepare and submit a Long-Term Plan (RJP) and an Annual Work Plan and Budget (RKAT) as the basis for its operations. The Ratification Meeting mechanism is used as a forum to obtain the Minister of Finance's approval through the Ratification Meeting mechanism (GMS Function), which includes an evaluation of the work plan and performance achievements of Indonesia Eximbank in a fiscal year.

Legal Basis and Implementation Stages

Pursuant to Act No. 2 of 2009 concerning Indonesia Eximbank's Fourth Part Work Plan and Annual Budget:

1. Article 36: Indonesia Eximbank's Fiscal Year and Fiscal Year starts from January 1 to December 31 Annual Work Plan and Budget.
2. Article 37:
 - a. Executive Director prepares a Long-Term Plan as a strategic plan that contains the objectives to be achieved by the Company within a 5 (five) year period.
 - b. Executive Director prepares an Annual Work Plan and Budget as an annual translation of the Long-Term Plan.
 - c. The procedures for preparation, submission, and amendment of Long-Term Plan and Work Plan and Annual Budget are stipulated in a Ministerial Regulation.

Shareholders Rights

In accordance with Article 19 of Law Number 2 of 2009 concerning Indonesia Eximbank, Indonesia Eximbank does not have any share distribution and is fully owned by the Indonesian Government.

Equal Treatment for Shareholders

Indonesia Eximbank continues to uphold the principle of equality for shareholders, even though it has no minority shareholders. This is because all of Indonesia Eximbank's shares (100%) are owned by the Indonesian Government.



Pelaksanaan dan Kehadiran Peserta Rapat Pengesahan Tahun 2024

LPEI telah mengadakan Rapat Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT), Tahun 2024 pada tanggal 20 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tempat/Tanggal Place/Date	:	Jakarta, 20 Desember 2023 Jakarta, December 20, 2023
Waktu Time	:	15.00 sd 16.00
Kehadiran Attendance	:	Kementerian Keuangan ministry of finance 1. Rional Silaban, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Directorate General of State Assets 2. Meirijal Nur, Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Director of Separate State Assets, Directorate General of State Assets 3. Heri Setiawan, Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Director of State Financial Risk Management, Directorate General of Financing and Risk Management 4. Sri Yuwono Hari Sarjito, Kasubdit KND 3B Head of Sub-Directorate KND 3B 5. Toni Prianto, Kasubdit Mitigasi Risiko Head of Sub-Directorate of Risk Mitigation 6. Marsiati, Kepala Seksi KND 3B Section Head of KND 3B LPEI : 1. Rijani Tirtoso, Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Board of Directors concurrently Executive Director 2. Yon Arsal, Anggota Dewan Direktur Board of Directors 3. Kasan, Anggota Dewan Direktur Board of Directors 4. Arus Gunawan, Anggota Dewan Direktur Board of Directors 5. D. James Rompas, Anggota Dewan Direktur Board of Directors 6. Dikdik Yustandi, Direktur Pelaksana Managing Director 7. Agus Windiarto, Direktur Pelaksana Managing Director 8. Chesna F. Anwar, Direktur Pelaksana Managing Director 9. Anwar Harsono, Head of Finance & Strategy

Implementation and Attendance of Ratification Meeting in 2024

In 2024, Indonesia Eximbank has held a Ratification Meeting Year 2024 on December 20, 2023 with the following details:

Laporan Rapat Pengesahan RKAT 2024 telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan melalui surat S-119/MK.06/2024 tanggal 11 Februari 2024 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, Kontrak Manajemen dan Program Kemitraan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Tahun 2024 dan surat S-565/MK.06/2024 tanggal 8 Juli 2024 tentang Pengesahan Perubahan RKAT LPEI Tahun 2024, dengan pembahasan yang mencakup hal-hal berikut:

The Meeting Report on the Ratification of the 2024 RKAT has been approved by the Minister of Finance through letter S-119 / MK.06 / 2024 dated February 11, 2024 concerning Ratification of the Annual Work Plan and Budget, Management Contract and Partnership Program of the Indonesia Export Financing Agency for 2024 and letter S-565 / MK.06 / 2024 dated July 8, 2024 concerning Ratification of Changes to the LPEI RKAT for 2024, with discussions covering the following matters:

Hasil Keputusan Rapat Pengesahan Tahun 2024

Ratification Meetings Resolutions in 2024

No.	Hasil Keputusan Resolution	Realisasi Realization	Status	
1.	Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), Kontrak Manajemen, dan Program Kemitraan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Tahun 2025, dengan pokok-pokok sebagaimana terlampir Dalam melakukan kegiatan operasional LPEI Tahun 2025, Direktur Eksekutif agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. RKAT Tahun 2025 menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan operasional dengan tetap melaksanakan disiplin anggaran dan memperhatikan pelaksanaan mandat LPEI berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019. 2. Perbaikan kondisi LPEI, khususnya kondisi keuangan agar menjadi prioritas utama. 3. Sejalan dengan transformasi lembaga yang tengah dilakukan, produktivitas harus menjadi concern LPEI dan memastikan Sumber Daya Manusia memiliki kapasitas yang cukup untuk mendukung transformasi dan bisnis LPEI. 4. Mengingat kondisi LPEI yang belum sepenuhnya membaik, diminta agar setiap pengurus dan pegawai LPEI memiliki "sense of vigilance" terhadap berbagai skenario kondisi yang mungkin terjadi sehingga dapat dilakukan tindakan preventif dalam rangka pencegahan. 5. Mempertimbangkan kondisi perekonomian yang belum stabil dan kondisi LPEI yang masih dalam proses perbaikan kinerja, diminta agar pada tahun 2025 LPEI fokus pada peningkatan peran dalam ekosistem ekspor nasional. Dalam pengembangan Desa Devisa, LPEI agar memprioritaskan komunitas/ pelaku usaha potensial dalam rangka akselerasi upaya peningkatan ekspor Indonesia. 6. Sejalan dengan prioritas Pemerintah pada sektor ketahanan pangan, agar dijabari potensi ekspor dan upaya penghematan devisa untuk produk pertanian dan perkebunan. 7. Rencana hapus buku yang telah disetujui dalam RKAT Tahun 2025, agar segera ditindaklanjuti sesuai batas kewenangan. 8. Prioritas, strategi dan program kerja yang telah tercantum dalam RKAT Tahun 2025 harus dilaksanakan sesuai dengan timeline yang telah direncanakan dan dimonitor serta dievaluasi secara berkala. 9. Efisiensi dalam pelaksanaan anggaran agar terus dilakukan, baik pada penugasan umum maupun penugasan khusus. 10. Memastikan kegiatan operasional dilaksanakan dengan berdasarkan tata kelola yang baik, tanpa konflik kepentingan dan unsur korupsi.	Ratify the Annual Work Plan and Budget (RKAT), Management Contract, and Partnership Program of the Indonesian Export Financing Agency (LPEI) Year 2025, with the points as attached In conducting LPEI's operational activities in 2025, the Executive Director should pay attention to the following matters. 1. RKAT Year 2025 becomes a guideline in conducting operational activities while still implementing budget discipline and paying attention to the implementation of LPEI's mandate based on Law Number 2 of 2009 and Government Regulation Number 43 of 2019. 2. Improving LPEI's condition, especially its financial condition, should be a top priority. 3. In line with the transformation of the institution that is being carried out, productivity must be a concern of LPEI and ensure that Human Resources have sufficient capacity to support the transformation and business of LPEI. 4. Given the condition of LPEI which has not fully improved, it is requested that each LPEI management and employee have a "sense of vigilance" against various scenarios of conditions that may occur so that preventive action can be taken in the context of prevention. 5. Considering the unstable economic conditions and the condition of LPEI which is still in the process of improving performance, it is requested that in 2025 LPEI focus on increasing its role in the national export ecosystem. In developing the Foreign Exchange Village, LPEI should prioritize potential communities/business actors in order to accelerate efforts to increase Indonesian exports. 6. In line with the Government's priorities in the food security sector, to explore export potential and efforts to save foreign exchange for agricultural and plantation products. 7. Book deletion plans that have been approved in the 2025 RKAT, to be followed up immediately according to the limits of authority. 8. Priorities, strategies and work programs that have been listed in the 2025 RKAT must be implemented in accordance with the planned timeline and monitored and evaluated regularly. 9. Efficiency in budget implementation should continue to be carried out, both on general assignments and special assignments. 10. Ensure that operational activities are carried out based on good governance, without conflicts of interest and elements of corruption.	Pelaksanaan poin-poin di atas telah disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui surat: BS.0062/CEO/02/2025 The implementation of the above points has been submitted to the Minister of Finance by letter: BS.0062/CEO/02/2025	Selesai Done

Hasil Keputusan Rapat Pengesahan Tahun 2024

Ratification Meetings Resolutions in 2024

No.	Hasil Keputusan Resolution	Realisasi Realization	Status
	Dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional LPEI, Dewan Direktur agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut. 1. Memastikan pengawasan terhadap LPEI, khususnya terkait pelaksanaan tata kelola, kesehatan keuangan, pemenuhan tindak lanjut temuan audit serta kinerja lembaga berjalan secara efektif. 2. Meningkatkan pengawasan terhadap kinerja operasional LPEI, khususnya pelaksanaan tugas oleh Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana serta pejabat struktural lainnya melalui komunikasi yang lebih intensif untuk membahas isu-isu signifikan, guna memitigasi risiko yang berdampak pada kinerja dan citra LPEI. 3. Anggota Dewan Direktur yang berasal dari instansi/lembaga agar aktif membantu LPEI dalam mewujudkan kolaborasi dengan ekosistem ekspor melalui sinergi antara instansi/lembaga dan LPEI serta mengharmonisasikan program di setiap instansi/lembaga dengan program LPEI.	In formulating and establishing policies and supervising LPEI's operational activities, the Board of Directors should carry out the following matters. 1. Ensure the supervision of LPEI, especially related to the implementation of governance, financial health, fulfillment of follow-up audit findings and institutional performance runs effectively. 2. Enhance supervision of LPEI's operational performance, especially the implementation of duties by the Executive Director and Managing Director and other structural officials through more intensive communication to discuss significant issues, in order to mitigate risks that have an impact on LPEI's performance and image. 3. Members of the Board of Directors from agencies/institutions to actively assist LPEI in realizing collaboration with the export ecosystem through synergies between agencies/institutions and LPEI and harmonize programs in each agency/institution with LPEI programs.	

Rapat Pengesahan Tahun 2023

Pada tahun 2023, LPEI menyelenggarakan Rapat Pengesahan RKAT pada tanggal 4 Mei 2023. Laporan Rapat Pengesahan RKAT telah disetujui oleh Menteri Keuangan melalui surat S-507/ MK.06/2023 tanggal 18 Juni 2023 Perihal Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, Kontrak Manajemen dan Program Kemitraan LPEI Tahun 2023. Seluruh keputusan yang ditetapkan dalam Rapat Pengesahan Tahun 2023 telah direalisasikan sepenuhnya.

Ratification Meeting in 2023

In 2023, Indonesia Exim Bank held a Meeting to Ratify the Annual Work Plan and Budget on May 4, 2023. The Report of Annual Work Plan and Budget Ratification Meeting was approved by the Minister of Finance through letter S-507/ MK.06/2023 dated June 18, 2023, regarding the Ratification of 2023 Annual Work Plan and Budget, Management Contract, and Partnership Program of Indonesia Eximbank. All resolutions stipulated in the 2023 Ratification Meeting have been fully realized.

Dewan Direktur

BOARD OF DIRECTORS

LPEI memiliki struktur tata kelola yang mencerminkan perannya sebagai lembaga pembiayaan ekspor nasional. Dewan Direktur menjalankan fungsi yang setara dengan Dewan Komisaris pada entitas lain, dengan tugas merumuskan kebijakan serta mengawasi pelaksanaan kegiatan operasional. Tanggung jawab ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 2/2009.

Dasar Hukum

Dewan Direktur LPEI dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam peraturan-peraturan berikut:

1. Peraturan Internal Peraturan Dewan Direktur (PDD) No. 0003/ PDD/04/2023 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur LPEI.
2. Peraturan Eksternal
 - a. UU No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
 - b. PMK No. 58/PMK.06/2020 Tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI.
 - c. PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
 - d. POJK No. 9/2022 Tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Kriteria Dewan Direktur

Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang No 2 Tahun 2009, untuk dapat diangkat menjadi Dewan Direktur, paling sedikit harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Warga negara Indonesia;
2. Mampu melakukan perbuatan hukum;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Memiliki integritas, kepemimpinan, perilaku yang baik,
5. Serta dedikasi yang tinggi;
6. Tidak termasuk daftar tidak lulus, baik yang disusun oleh Otoritas perbankan maupun otoritas pasar modal dan Lembaga keuangan;
7. Tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang Perbankan dan perekonomian;
8. Memiliki keahlian dan pengalaman di salah satu bidang yang menjadi ruang lingkup kegiatan LPEI; dan
9. Tidak pernah dinyatakan paili.

Indonesia Eximbank has a governance structure that reflects its role as a national export financing institution. Board of Directors performs functions equivalent to Board of Commissioners in other entities, with the duty of formulating policies and supervising the implementation of operational activities. This responsibility is in line with the provisions of Article 26 paragraph (1) of Act No. 2/2009.

Legal Basis

Indonesia Eximbank Board of Directors is formed in accordance with the provisions of following regulations:

1. Internal Regulations Board of Directors Decree No. 0003/PDD/04/2023 on the Indonesia Eximbank Board of Directors Charter (Board Manual).
2. External Regulations
 - a. Act No. 2 of 2009 on Indonesia Eximbank.
 - b. Minister of Finance Regulation (PMK) No. 58/PMK.06/2020 concerning Guidance and Supervision of Indonesia Eximbank.
 - c. PMK No. 208/PMK.06/2021 on Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank.
 - d. POJK No. 9/POJK.05/2022 concerning Supervision of Indonesia Eximbank.

Board of Directors Criteria

Based on Article 27 of Law No. 2 of 2009, to be appointed to the Board of Directors, at least must meet the following requirements:

1. Indonesian citizen;
2. Able to perform legal acts;
3. Physically and mentally healthy;
4. Having integrity, leadership, good behavior,
5. As well as high dedication;
6. Not included in the list of not passed, either compiled by Banking authorities or capital market authorities and financial institutions
7. Has never committed a criminal offense in the field of Banking and economy;
8. Has expertise and experience in one of the fields which becomes the scope of LPEI activities; and
9. Never been declared bankrupt.

Ketentuan Masa Jabatan

Berdasarkan Pasal 25 UU No. 2 tahun 2009, Anggota Dewan Direktur diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Dewan Direktur

Berdasarkan Pasal 28 UU No. 2 tahun 2009, Anggota Dewan Direktur dapat diberhentikan oleh Menteri apabila:

1. Berhalangan tetap;
2. Masa jabatannya berakhir;
3. Mengundurkan diri;
4. Kinerja anggota Dewan Direktur tidak memenuhi kriteria kinerja yang ditetapkan oleh Menteri;
5. Memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau besan dengan anggota Dewan Direktur yang lain dan tidak ada satu pun yang mengundurkan diri;
6. Melakukan kejahatan korporasi, tindak pidana korupsi, tindak pidana lainnya, atau pelanggaran moral; dan/atau
7. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 UU No. 2 Tahun 2009.
8. Pemberhentian Anggota Dewan Direktur ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur

Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur (*Board Manual*) diatur dalam PDD No. 0003/PDD/04/2023 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang merupakan penyempurnaan dari PDD No. 0007/PDD/12/2020.

Pedoman ini mengatur berbagai aspek, termasuk tugas, wewenang, tanggung jawab, hak, dan kewajiban Dewan Direktur. Selain itu, dokumen ini mencakup etika kerja, waktu kerja, mekanisme rapat, peran sekretariat komite-komite, serta staf ahli Dewan Direktur. Pedoman ini juga mengatur hubungan kerja antara Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana, termasuk prosedur kerja Direktur Eksekutif.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Anggota Dewan Direktur

Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) UU No. 2/2009, Dewan Direktur LPEI beranggotakan unsur:

1. 3 (tiga) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi fiskal, 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi perdagangan, 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi perindustrian, dan 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi pertanian.

Term of Office

Based on Article 25 of Law No. 2 of 2009, Members of the Board of Directors are appointed for a term of 5 (five) years and can only be reappointed for 1 (one) subsequent term.

Resignation and Dismissal Mechanisms for Board of Directors

Based on Article 28 of Law No. 2 of 2009, members of the Board of Directors can be dismissed by the Minister if:

1. Is permanently absent;
2. His/her term of office ends;
3. Resigns;
4. The performance of the member of the Board of Directors does not meet the performance criteria set by the Minister;
5. Has a family relationship up to the second degree or in-laws with other members of the Board of Directors and none of them resigns;
6. Commits a corporate crime, corruption crime, other criminal offense, or moral offense; and/or
7. No longer meets the requirements as referred to in Article 27 of Law No. 2 of 2009.
8. The dismissal of a member of the Board of Directors is stipulated in a Ministerial Decree.

Board of Directors Manual

The Board of Directors Manual is regulated in PDD No. 0003/PDD/04/2023 concerning the Board of Directors Manual of Indonesia Eximbank, which is an improvement on PDD No. 0007/PDD/12/2020.

These guidelines govern various aspects, including the duties, authorities, responsibilities, rights, and obligations of Board of Directors. In addition, this document covers work ethics, working hours, meeting mechanisms, committee secretariat roles, and Board of Directors expert staff. These guidelines also govern the working relationship between Board of Directors, Executive Director, and Managing Director, including the Executive Director's work procedures.

Structure, Number, Composition and Appointment Basis of Board of Directors

Based on Article 25 paragraph (2) of Act No. 2/2009, Indonesia Eximbank's Board of Directors consists of the following elements:

1. 3 (three) officials from departments or institutions in charge of fiscal, 1 (one) official from a department or institution in charge of trade, 1 (one) official from a department or institution in charge of industry, and 1 (one) official from a department or institution in charge of agriculture.

2. Paling banyak 3 (tiga) orang yang berasal dari luar LPEI dan 1 (satu) orang dari dalam LPEI.

Sepanjang tahun 2024, komposisi Dewan Direktur LPEI mengalami perubahan sebagaimana dijelaskan dalam bab Profil Perusahaan dalam pembahasan Perubahan Komposisi Anggota Dewan Direktur. Adapun komposisi Dewan Direktur LPEI sebagai berikut:

2. A maximum of 3 (three) persons from outside the Indonesia Eximbank and 1 (one) person from the internal Indonesia Eximbank.

Throughout 2024, Indonesia Eximbank's Board of Directors composition experienced changes as described in the Company Profile chapter in the discussion of Changes in Board of Directors Composition. The composition of Indonesia Eximbank's Board of Directors is as follows:

Komposisi Dewan Direktur per 31 Desember 2024

Board of Directors Composition as of December 31, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment
Yon Aarsal	Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of Board of Directors and Executive Director	24 Desember 2024 - Sekarang December 24, 2024 - Present	Keputusan Menteri Keuangan No. PRIN-3/ MK.06/2024 Minister of Finance Decree No. PRIN-3/ MK.06/2024
Kasan	Anggota Dewan Direktur Member of Board of Directors	8 Juni 2020 – Sekarang June 8, 2020 - Present	Keputusan Menteri Keuangan No. 332 Tahun 2023 Minister of Finance Decree No. 332 of 2023
Arus Gunawan	Anggota Dewan Direktur Member of Board of Directors	25 November 2020 – Sekarang November 25, 2020 - Present	Keputusan Menteri Keuangan No. 530/ KMK.06/2020 Minister of Finance Decree No. 530/ KMK.06/2020
Dwi Teguh Wibowo	Anggota Dewan Direktur Member of Board of Directors	29 Desember 2024 – 18 Oktober 2028 December 29, 2024 - October 18, 2028	Keputusan Menteri Keuangan No. 454 Tahun 2024 Minister of Finance Decree No. 454 of 2024

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direktur

Berdasarkan PMK No. 208/PMK.06/2021 yang mengatur Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, tugas serta tanggung jawab Dewan Direktur dijelaskan sebagai berikut:

1. Dewan Direktur wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang baik.
2. Dewan Direktur wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Eksekutif, serta memberikan nasihat kepada Direktur Eksekutif.
3. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Direktur wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dasar dan strategis.
4. Dewan Direktur wajib memastikan bahwa Direktur Eksekutif telah menindaklanjuti:
 - a. Rekomendasi satuan kerja audit internal LPEI;
 - b. Hasil pengawasan Menteri;
 - c. Hasil pengawasan lembaga atau otoritas lain; dan
 - d. Hasil auditor eksternal.

Board of Directors Duties and Responsibilities

Based on Minister of Finance Regulation No. 208/PMK.06/2021 which regulates the Principles of Governance, Risk Management Principles, and Know Your Customer in the Indonesia Eximbank, Board of Directors duties and responsibilities are described as follows:

1. Board of Directors is required to ensure the implementation of good corporate governance principles.
2. Board of Directors must supervise the implementation of duties and responsibilities of Executive Director and provide advice to Executive Director.
3. In conducting supervision, Board of Directors must direct, monitor, and evaluate the implementation of basic and strategic policies.
4. Board of Directors shall ensure that Executive Director has followed up:
 - a. Indonesia Eximbank Internal Audit Unit recommendations;
 - b. The Minister's supervision results;
 - c. Supervision results from other institutions or authorities; and
 - d. The external auditor results.

Independensi Dewan Direktur

Dewan Direktur bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya secara independen. Setiap anggota diwajibkan mengungkapkan kepemilikan saham di perusahaan lain, baik di dalam maupun luar negeri, serta menjelaskan keterkaitan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Direktur lainnya. Untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip tersebut, seluruh anggota Dewan Direktur LPEI telah menandatangani surat pernyataan independensi dan pakta integritas, yang terdokumentasi dengan baik oleh LPEI. Ketentuan ini telah sesuai dengan PMK No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Pembagian Tugas Antar Dewan Direktur

Pembagian tugas antar anggota Dewan Direktur dilakukan dengan mempertimbangkan disiplin keilmuan, pengalaman, serta keterkaitan dengan fungsi instansi asalnya bagi anggota yang berasal dari Kementerian/Lembaga, termasuk arahan dari Menteri jika ada. Tugas yang diberikan mencakup seluruh bidang kerja Dewan Direktur dan ditetapkan melalui mekanisme rapat yang hasilnya dituangkan dalam risalah rapat. Selain itu, penugasan anggota Dewan Direktur sebagai ketua atau anggota dalam komite-komite di bawah Dewan Direktur juga ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Direktur.

Pembagian tugas Dewan Direktur ditetapkan sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Scope of Duties	Surat Keputusan Decision Letter
Yon Aرسال	Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of Board of Directors and Executive Director	Melakukan kegiatan operasional LPEI Conduct operational activities of LPEI	PRIN-3/MK.06/2024
Kasan	Anggota Dewan Direktur Member of Board of Directors	- Ketua Pemantau Risiko - Ketua Komite Harmonisasi Ekspor - Head of Risk Monitoring - Head of Export Harmonization Committee	- KDE 0029/10/2024 - KDE 0028/10/2024
Arus Gunawan	Anggota Dewan Direktur Member of Board of Directors	Ketua Komite Audit Head of Audit Committee	KDE 0034/11/2024
Dwi Teguh Wibowo	Anggota Dewan Direktur Member of Board of Directors	-	-

Board of Directors Independence

Board of Directors is responsible for carrying out its duties and obligations independently. Each member is required to disclose share ownership in other companies, both domestic and abroad, as well as to explain financial and family relationships with other members of Board of Directors. To ensure the implementation of these principles, all members of Indonesia Eximbank's Board of Directors have signed a statement of independence and a pact of integrity, which is properly documented by Indonesia Eximbank. This provision is in accordance with the Minister of Finance Regulation No. 208/PMK.06/2021 concerning Principles of Governance, Risk Management, and Know Your Customer of Indonesia Eximbank.

Division of Duties Among Board of Directors

The division of duties among members of Board of Directors is carried out by considering scientific discipline, experience, and relevance to the functions of their original agencies for members from Ministries/Institutions, including directions from the Minister if any. The duties assigned cover all work areas of Board of Directors and are determined through a meeting mechanism, the results of which are recorded in meeting minutes. In addition, assignments of Board of Directors members as chairman or members of committees under the Board of Directors are also determined based on the Board of Directors meeting decision.

The division of duties of the Board of Directors is stipulated as follows:

Program Pengenalan Dewan Direktur Baru

LPEI menyelenggarakan program orientasi (*Induction Program*) bagi anggota Dewan Direktur yang baru diangkat. Program ini bertujuan untuk mempererat hubungan antar anggota serta menumbuhkan semangat yang selaras dalam menjalankan fungsi pengawasan secara solid dan efektif. Selain itu, program ini memberikan wawasan kepada anggota baru mengenai aktivitas bisnis, rencana strategis Lembaga, pedoman kerja, serta tanggung jawab Dewan Direktur. Dengan adanya program orientasi ini, anggota Dewan Direktur yang baru diharapkan dapat berkontribusi secara selaras dengan organ Tata Kelola LPEI lainnya.

Sehubungan dengan adanya perubahan komposisi Dewan Direktur di tahun 2024, maka LPEI menyelenggarakan Program Orientasi pada tanggal 15 Januari 2024. Adapun materi pembelajaran yang disampaikan kepada Dewan Direktur baru mencakup, antara lain:

1. Profil umum Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direktur.
3. Kinerja LPEI tahun 2024.

Program Pengembangan Kompetensi Dewan Direktur

Sepanjang 2024, Dewan Direktur terus memperkuat kapasitasnya melalui berbagai program pelatihan. Program ini dirancang untuk mendukung efektivitas pengawasan terhadap kegiatan usaha Lembaga, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Nama Dewan Direktur Board of Directors Name	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Judul Pelatihan Training Title	Tempat Pelaksanaan Venue	Penyelenggara Organizer
Yon Arsal	12 Agustus 2024 August 12, 2024	<i>Best Practice of Good Corporate Governance</i>	Kantor Pusat LPEI LPEI Head Office	Indonesian Institute for Corporate Directorship
Kasan	12 Agustus 2024 August 12, 2024	<i>Best Practice of Good Corporate Governance</i>	Kantor Pusat LPEI LPEI Head Office	Indonesian Institute for Corporate Directorship
Arus Gunawan	12 Agustus 2024 August 12, 2024	<i>Best Practice of Good Corporate Governance</i>	Kantor Pusat LPEI LPEI Head Office	Indonesian Institute for Corporate Directorship
	26 s.d 27 Juni 2024 June 26-27, 2024	Komite Audit Audit Committee	Jakarta	Inti Pesan
Dwi Teguh Wibowo	-	-	-	-
Suminto*	2 s.d 6 Oktober 2023 October 2-6, 2023	<i>Climate Change Policy: Economics and Politics</i>	Video Conference	Harvard Kennedy School
D. James Rompas**	12 Agustus 2024 August 12, 2024	<i>Best Practice of Good Corporate Governance</i>	Kantor Pusat LPEI LPEI Head Office	Indonesian Institute for Corporate Directorship

*) Beliau menyelesaikan masa jabatan sebagai Anggota Dewan Direktur tanggal 29 Desember 2024

**) Beliau menyelesaikan masa jabatan sebagai Anggota Dewan Direktur sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024

*) Has no longer served as a Member of Board of Directors since December 29, 2024

**) Has no longer served as a Member of Board of Directors since August 31, 2024

Introduction Program for New Board of Directors

Indonesia Eximbank organizes an introduction program for newly appointed members of Board of Directors. This program aims to strengthen relationships between members and foster a spirit of harmony in carrying out supervisory functions in a solid and effective manner. In addition, the program provides new members with insights into the business activities, institution's strategic plans, work guidelines, and responsibilities of Board of Directors. With this introduction program, new members of Board of Directors are expected to contribute in harmony with other Indonesia Eximbank Governance organs.

In connection with the changes in the Board of Directors composition in 2024, Indonesia Eximbank held an Introduction Program on January 15, 2024. The learning materials presented to the new Board of Directors included, among others:

1. General profile of Indonesia Export Financing Agency.
2. Duties and Responsibilities of the Board of Directors.
3. LPEI performance in 2024.

Board of Directors Competency Development Program

Throughout 2024, Board of Directors continues to strengthen its capacity through various training programs. This program is designed to support the effectiveness of supervision of the Institution's business activities, as outlined in the following table:

Program Kerja Dewan Direktur

Dewan Direktur menetapkan program kerja tahun 2024 yang berfokus pada penguatan tata kelola, peningkatan kinerja operasional, serta pengembangan strategi pertumbuhan berkelanjutan, meliputi:

1. Remunerasi dan nominasi
2. Teknologi Informasi, Pengadaan dan Stakeholder
3. Sistem Pengendalian Internal, Audit Internal dan Eksternal
4. Manajemen Risiko, Keuangan dan Tata Kelola yang Baik
5. Rencana Kerja Anggaran Tahunan, Rencana Jangka Panjang dan Pemantauan Kinerja

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direktur Tahun 2024

Dewan Direktur bertanggung jawab merumuskan dan menetapkan serta melakukan pengawasan terhadap operasional LPEI. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan melalui pelaksanaan rapat Dewan Direktur yang diwajibkan dilaksanakan minimal satu kali dalam satu bulan. Rapat Dewan Direktur menjadi wadah untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan strategis manajemen di LPEI sekaligus memastikan ditindaklanjutnya hasil temuan audit. Adapun selama tahun 2024, Rapat Dewan Direktur telah diselenggarakan 32 kali atau secara rata-rata sekitar dua kali per bulan. Rapat Dewan Direktur diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan/atau pengambilan keputusan. Arah dan keputusan Dewan Direktur didokumentasikan dalam Risalah Rapat Dewan Direktur. Pelaksanaan rapat dengan pencapaian rata-rata lebih dari 89% menunjukkan keseriusan Dewan Direktur dalam melakukan tugas pengawasan kepada LPEI.

Penilaian Kinerja Komite-komite yang Berada di Bawah Dewan Direktur

Prosedur Penilaian

Untuk mendukung efektivitas pengawasan, Dewan Direktur telah membentuk beberapa komite pendukung, yaitu:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pengangkatan anggota komite dilakukan oleh Direktur Eksekutif berdasarkan keputusan rapat Dewan Direktur. Dewan Direktur bertanggung jawab memastikan bahwa setiap komite yang dibentuk dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Penilaian kinerja komite dilakukan berdasarkan kontribusi serta pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Dewan Direktur. Evaluasi ini dilakukan sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan dalam pedoman serta tata tertib kerja masing-masing komite.

Board of Directors Work Program

Board of Directors has stipulated a 2024 work program that focuses on strengthening governance, improving operational performance, and developing a sustainable growth strategy, including:

1. Remuneration and nomination
2. Information Technology, Procurement and Stakeholders
3. Internal Control System, Internal and External Audit
4. Risk Management, Finance and Good Governance
5. Annual Budget Work Plan, Long Term Plan and Performance Monitoring

Implementation of Board of Directors Duties and Responsibilities in 2024

The Board of Directors is responsible for formulating and determining and supervising the operations of LPEI. One form of supervision is carried out through the implementation of Board of Director meetings which are required to be held at least once a month. The Board of Directors meeting is a forum for monitoring and evaluating strategic management policies at LPEI as well as ensuring follow-up of audit findings. During 2024, the Board of Director Meetings have been held 32 times or on average about twice per month. Board of Director meetings are held in the context of supervision and/or decision-making. The directives and decisions of the Board of Directors are documented in the Minutes of the Board of Directors Meeting. The implementation of meetings with an average achievement of more than 89% shows the seriousness of the Board of Directors in carrying out its supervisory duties to LPEI.

Performance Assessment of Committees under Board of Directors

Assessment Procedure

To support the effectiveness of supervision, Board of Directors has formed several supporting committees, namely:

1. Audit Committee
2. Risk Monitoring Committee
3. Nomination and Remuneration Committee.

The appointment of committee members is carried out by Executive Director based on the Board of Directors meeting decision. Board of Directors is responsible for ensuring that each committee formed can carry out its duties effectively. Committee performance assessment is carried out based on the contribution and implementation of duties given by the Board of Directors. This assessment is carried out in accordance with the procedures and standards set out in the guidelines and work rules of each committee.

Kriteria Penilaian

Penilaian kinerja komite-komite didasarkan pada beberapa indikator, termasuk kontribusi komite serta pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Dewan Direktur, seperti penyelenggaraan rapat internal masing-masing komite.

Hasil Penilaian

Berikut merupakan hasil evaluasi kinerja komite-komite di bawah Dewan Direktur sepanjang tahun 2024:

1. Komite Audit
Komite Audit memiliki peran penting dalam memastikan sistem pengendalian internal berjalan efektif. Selain menjalankan fungsi pengawasan, komite ini juga memberikan supervisi serta masukan strategis dalam menindaklanjuti hasil audit eksternal. Komite Audit turut berperan dalam penguatan kapabilitas Internal Audit serta menjalin sinergi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu). Sepanjang tahun 2024, Komite Audit mengadakan 43 (empat puluh tiga) kali rapat dengan tingkat kehadiran anggota mencapai rata-rata 100%.
2. Komite Pemantau Risiko
Dalam memastikan pengelolaan risiko yang optimal, Komite Pemantau Risiko berperan aktif dalam mendukung Dewan Direktur sepanjang tahun 2024. Pengawasan difokuskan pada penerapan prinsip Tata Kelola yang baik serta efektivitas sistem pengendalian risiko. Komite Pemantau Risiko juga meninjau kecukupan kebijakan dan prosedur dalam mengelola risiko pembiayaan dan operasional, termasuk evaluasi proses kredit, validitas data, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Pemantau Risiko mengadakan 22 (dua puluh dua) kali rapat dengan tingkat kehadiran anggota mencapai 100%.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi
Dalam rangka memastikan kebijakan remunerasi dan nominasi yang efektif, Komite Remunerasi dan Nominasi turut berkontribusi dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur. Selain itu, komite juga mendukung penguatan organisasi melalui penyempurnaan kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM). Sepanjang tahun 2024, komite telah mengadakan 9 (sembilan) kali rapat dengan tingkat kehadiran anggota mencapai 100%.

Komisaris Independen

LPEI adalah lembaga keuangan dengan status khusus (*sui generis*) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2009. Berdasarkan undang-undang tersebut, LPEI hanya memiliki satu organ kepemimpinan, yaitu Dewan Direktur. Dalam struktur kepemimpinannya, tidak terdapat konsep Komisaris Independen seperti yang umum ditemukan pada lembaga keuangan lainnya.

Assessment Criteria

The performance assessment of committees is based on several indicators, including the committee's contribution and implementation of duties assigned by the Board of Directors, such as organizing internal meetings of each committee.

Assessment Results

Following are the performance assessments results of committees under Board of Directors throughout 2024:

1. Audit Committee
Audit Committee has an important role in ensuring that the internal control system is effective. In addition to exercising supervisory functions, this committee also provides supervision and strategic input in following up on external audit results. Audit Committee also plays a role in strengthening the Internal Audit capability and establishing synergy with the Inspectorate General of the Ministry of Finance. Throughout 2024, Audit Committee held 43 (forty three) meetings with an average member attendance rate of 100%.
2. Risk Monitoring Committee
In ensuring optimal risk management, Risk Monitoring Committee plays an active role in supporting Board of Directors throughout 2024. Supervision is focused on the implementation of good corporate governance principles and the effectiveness of risk control systems. Risk Monitoring Committee also reviews the adequacy of policies and procedures in managing financing and operational risks, including evaluation of credit processes, data validity, and efficiency of resource utilization. In carrying out its duties, Risk Monitoring Committee held 22 (twenty two) meetings with a member attendance rate of 100%.
3. Remuneration and Nomination Committee
In order to ensure an effective remuneration and nomination policy, Remuneration and Nomination Committee contributes in providing recommendations to Board of Directors. In addition, the committee also supports organizational strengthening through the improvement of Human Capital (HC) policies. Throughout 2024, the committee has held 9 (nine) meetings with a member attendance rate of 100%.

Independent Commissioner

Indonesia Eximbank is a financial institution with special status (*sui generis*) established under Act No. 2 of 2009. Under this law, Indonesia Eximbank has only one leadership organ, namely the Board of Directors. In its leadership structure, there is no concept of an Independent Commissioner as is commonly found in other financial institutions.

Anggota Dewan Direktur LPEI dapat berasal dari pejabat instansi atau lembaga terkait, serta dari kalangan internal maupun eksternal LPEI. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang LPEI, seseorang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Direktur apabila memenuhi persyaratan tertentu, antara lain:

1. Warga negara Indonesia;
2. Mampu melakukan perbuatan hukum;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Memiliki integritas, kepemimpinan, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi;
5. Tidak termasuk daftar tidak lulus, baik yang disusun oleh otoritas perbankan maupun otoritas pasar modal dan lembaga keuangan;
6. Tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan perekonomian;
7. Memiliki keahlian dan pengalaman di salah satu bidang yang menjadi ruang lingkup kegiatan LPEI; dan
8. Tidak pernah dinyatakan pailit.

Members of Indonesia Eximbank's Board of Directors can come from related agencies or institutions, as well as from within and outside Indonesia Eximbank. In accordance with the provisions of Indonesia Eximbank Act, a person can be appointed as a member of Board of Directors if they meet certain requirements, including:

1. Indonesian citizen;
2. Able to perform legal acts;
3. Physically and mentally healthy;
4. Has integrity, leadership, good behaviour, and high dedication;
5. Not included in the list of failures, either compiled by the banking authority or the capital market authority and financial institutions;
6. Never committed a criminal act in the banking and economic sector;
7. Having expertise and experience in one of the fields under the Company's activities scope; and
8. Have never been declared bankrupt.

Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana

Executive Director and Managing Directors

Sebagai lembaga yang beroperasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, LPEI menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan mandat yang telah ditetapkan. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2009, tanggung jawab penuh atas pelaksanaan operasional LPEI berada pada Direktur Eksekutif. Selain itu, Direktur Eksekutif memiliki wewenang untuk mewakili LPEI, baik dalam lingkup peradilan maupun di luar pengadilan. Sesuai Pasal 25 ayat (5) UU yang sama, Direktur Eksekutif merupakan anggota Dewan Direktur yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan RI untuk merangkap jabatan sebagai Ketua Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif.

Dasar Hukum

Penunjukan Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana LPEI merujuk pada beberapa peraturan, di antaranya:

1. Peraturan Internal
 - a. Peraturan Dewan Direktur (PDD) No. 0003/PDD/04/2023 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur LPEI.
 - b. PDE No.0004/PDE/02/2024 tentang Pedoman tata Tertib Kerja Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana LPEI.
2. Peraturan Eksternal
 - a. UU No. 2/2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
 - b. PMK No. 58/PMK.06/2020 Tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI.
 - c. PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
 - d. POJK No. 9/2022 Tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Pedoman Tata Kerja Direktur Eksekutif

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Ketua Dewan Direktur, yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif LPEI, berpedoman pada Peraturan Dewan Direktur (PDD) No. 0003/PDD/04/2023 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur. Pedoman ini mengatur berbagai aspek, termasuk tugas, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, pembagian kerja, jam kerja, etika kerja, ketentuan pelaksanaan rapat, serta prosedur terkait rapat pengesahan.

As an institution that operates based on statutory provisions, Indonesia Eximbank carries out its operational activities in accordance with its established mandate. Based on Article 29 paragraph (1) of Act No. 2 of 2009, full responsibility for Indonesia Eximbank's operational implementation rests with the Executive Director. In addition, Executive Director has the authority to represent Indonesia Eximbank, both in and out of court. In accordance with Article 25 paragraph (5) of the same Act, Executive Director is a member of Board of Directors appointed by the Indonesian Minister of Finance to concurrently serve as Chairman of Board of Directors and Executive Director.

Legal Basis

The appointment of Executive Director and Managing Directors of Indonesia Eximbank refers to several regulations, including:

1. Internal Regulations
 - a. Board of Directors Regulation (PDD) No. 0003/PDD/04/2023 concerning Work Guidelines for Board of Directors of Indonesia Eximbank.
 - b. PDE No. 0041/PDE/11/2011 concerning Work Guidelines for Managing Directors.
2. External Regulations
 - a. Act No. 2 of 2009 on Indonesia Eximbank.
 - b. PMK No. 58/PMK.06/2020 on Guidance and Supervision of Indonesia Eximbank.
 - c. PMK No. 208/PMK.06/2021 on Principles of Governance, Risk Management, and Know Your Customer of Indonesia Eximbank.
 - d. POJK No. 9/POJK.05/2022 concerning Indonesia Eximbank Supervision.

Executive Director Work Guidelines

In carrying out his/her duties and responsibilities, Chairman of Board of Directors, who also serves as Executive Director of Indonesia Eximbank, is guided by the Board of Directors Regulation (PDD) No. 0003/PDD/04/2023 concerning Board of Directors Work Guidelines. These guidelines regulate various aspects, including duties, authorities, obligations, responsibilities, division of work, working hours, work ethics, provisions for conducting meetings, and procedures related to ratification meetings.

Kriteria Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana

Berdasarkan Pasal 25 UU No 2 Tahun 2009, salah seorang dari Anggota Dewan Direktur ditetapkan sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif, sehingga kriteria Direktur Eksekutif adalah mengikuti kriteria Anggota Dewan Direktur.

Berdasarkan Peraturan Dewan Direktur nomor 0005/PDD/07/2024 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Pelaksana LPEI, syarat Direktur Pelaksana terdiri atas: (i) syarat umum, (ii) syarat khusus, dan (iii) syarat lain, sebagai berikut:

1. Syarat umum menjadi Direktur Pelaksana yaitu orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali sebelum pengangkatan pernah:
 - a. Dinyatakan pailit;
 - b. Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
 - c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan bidang perbankan dan perekonomian.
2. Syarat khusus menjadi Direktur Pelaksana, yaitu memiliki:
 - a. Kesehatan jasmani dan rohani;
 - b. Integritas, moral, dan perilaku yang baik;
 - c. Keahlian;
 - d. Kepemimpinan;
 - e. Pengalaman; dan
 - f. Kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
3. Syarat lain menjadi Direktur Pelaksana, yaitu:
 - a. bukan anggota partai politik, pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif;
 - b. bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah;
 - c. tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah, anggota dewan komisaris/pengawas pada Perseroan, anggota direksi pada perseroan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Direktur Pelaksana;
 - d. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur Pelaksana, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Direktur Pelaksana; dan

Memiliki sertifikasi di bidang Manajemen Risiko pada tingkat yang dipersyaratkan sebagaimana diputuskan dalam Rapat Dewan Direktur dengan memperhatikan Kerangka Kualifikasi

Criteria for Executive Director and Managing Directors

Based on Article 25 of Law No. 2/2009, one of the members of the Board of Directors is appointed as Chairman of the Board of Directors concurrently as Executive Director, so that the criteria for Executive Director are following the criteria for Board of Directors.

Based on the Board of Directors Regulation number 0005/PDD/07/2024 concerning Procedures for Proposing, Appointing and Dismissing the Managing Director of LPEI, the requirements for the Managing Director consist of: (i) general requirements, (ii) special requirements, and (iii) other requirements, as follows:

1. The general requirement to become a Managing Director is an individual Indonesian citizen who is capable of performing legal acts, unless before the appointment has:
 - a. Been declared bankrupt;
 - b. Been a member of the board of directors or a member of the board of commissioners who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt; or
 - c. Been convicted of a criminal offense that is detrimental to state finances and/or related to the banking and economic fields.
2. The special requirements to become Managing Director are:
 - a. Physical and spiritual health;
 - b. Integrity, morals, and good behavior;
 - c. Expertise;
 - d. Leadership;
 - e. Experience; and
 - f. Strong will and high dedication.
3. Other requirements to become Managing Director, namely:
 - a. not a member of a political party, political party manager, legislative member and/or not currently running for legislative member;
 - b. not a head/deputy regional head and/or not currently running as a candidate for head/deputy regional head;
 - c. not currently serving as an official at central and/or regional government agencies/institutions, member of the board of commissioners/supervisors at a company, member of the board of directors at a company, unless signing a statement letter willing to resign from the position if elected as Managing Director;
 - d. not currently occupying a position that based on central and/or regional government regulations, member of the board of commissioners/supervisors at a company, member of the board of directors at a company, unless signing a statement letter willing to resign from the position if elected as Managing Director; and

Have certification in the field of Risk Management at the required level as decided in the Board of Directors Meeting with due regard to the Indonesian National Qualifications

Nasional Indonesia (KKNI) dan/atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan/atau lembaga lain yang berwenang.

Ketentuan Masa Jabatan

Berdasarkan Pasal 25 UU No. 2 tahun 2009, salah seorang Anggota Dewan Direktur ditetapkan oleh Menteri sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif. Sebagaimana halnya Anggota Dewan Direktur, Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Dewan Direktur nomor 0005/PDD/07/2024 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Pelaksana LPEI, Direktur Pelaksana diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun untuk satu periode. Direktur Pelaksana yang berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan total masa jabatan tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana

Berdasarkan Pasal 28 UU. No.2 Tahun 2009, Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif diberhentikan oleh Menteri Keuangan apabila :

1. Berhalangan tetap;
2. Masa jabatannya berakhir;
3. Mengundurkan diri;
4. Kinerja anggota Dewan Direktur tidak memenuhi kriteria kinerja yang ditetapkan oleh Menteri;
5. Memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau besan dengan anggota Dewan Direktur yang lain dan tidak ada satu pun yang mengundurkan diri;
6. Melakukan kejahatan korporasi, tindak pidana korupsi, tindak pidana lainnya, atau pelanggaran moral; dan/atau
7. Tidak lagi memenuhi syarat yang telah ditentukan

Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri kepada Menteri. Pemberhentian dimaksud ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Dewan Direktur Nomor 0005/PDD/07/2024 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Pelaksana LPEI, Dalam hal jabatan Direktur Pelaksana berakhir maka Direktur Eksekutif menyampaikan informasi dan mengusulkan kepada Dewan Direktur dengan disertai dengan penjelasan mengenai alasan pemberhentian. Keputusan persetujuan atau penolakan atas usulan pemberhentian dilakukan berdasarkan hasil penelaahan Dewan Direktur yang dituangkan dalam isalah Rapat Dewan Direktur.

Framework (KKNI) and / or Indonesian National Work Competency Standards (SKKNI) and / or other authorized institutions.

Term of Office

Based on Article 25 of Law No. 2/2009, one of the members of the Board of Directors is appointed by the Minister as Chairman of the Board of Directors concurrently as Executive Director. As in the case of Members of the Board of Directors, the Chairman of the Board of Directors concurrently the Executive Director is appointed for a term of office of 5 (five) years and can only be reappointed for 1 (one) subsequent term of office.

Based on Article 2 of the Board of Directors Regulation number 0005/ PDD/07/2024 concerning Procedures for Proposing, Appointing and Dismissing the Managing Director of LPEI, the Managing Director is appointed for a maximum term of 5 (five) years for one period. The Managing Director whose term of office expires may be reappointed with a total term of office not exceeding 10 (ten) years.

Resignation and Dismissal Mechanism of Executive Directors and Managing Directors

Based on Article 28 of Law. No.2 of 2009, the Chairman of the Board of Directors concurrently with the Executive Director shall be dismissed by the Minister of Finance if:

1. Is permanently absent;
2. His/her term of office ends;
3. Resigns;
4. The performance of a member of the Board of Directors does not meet the performance criteria set by the Minister;
5. Has a family relationship up to the second degree or in-laws with other members of the Board of Directors and none of them resigns;
6. Commits a corporate crime, corruption crime, other criminal offense, or moral offense; and/or
7. no longer meets the requirements that have been determined.

The Chairman of the Board of Directors and the Executive Director shall be given the opportunity to defend themselves to the Minister. The dismissal is stipulated in the Decree of the Minister of Finance.

Based on the Board of Directors Regulation Number 0005/PDD/07/2024 concerning Procedures for Proposing, Appointing and Dismissing the Managing Director of LPEI, in the event that the position of Managing Director ends, the Executive Director submits information and proposes to the Board of Directors accompanied by an explanation of the reasons for dismissal. The decision of approval or rejection of the dismissal proposal is made based on the results of the Board of Directors review as outlined in the minutes of the Board of Directors Meeting.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Anggota

Dalam menjalankan fungsi operasional, LPEI memiliki struktur kepemimpinan yang terdiri dari Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 dan Pasal 17 PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah, Direktur Eksekutif dibantu oleh maksimal 5 (lima) Direktur Pelaksana. Para Direktur Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan operasional harian LPEI serta memastikan keberlangsungan pengelolaan organisasi secara efektif.

Sebagai bagian dari struktur eksekutif, Direktur Pelaksana memiliki peran dalam mengoordinasikan serta mengawasi jalannya kegiatan operasional. Tanggung jawab utamanya meliputi penerapan kebijakan strategis, optimalisasi sumber daya, pencapaian target kinerja, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Sepanjang tahun 2024, terdapat perubahan dalam susunan Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana LPEI sebagaimana dijelaskan dalam bab Profil Perusahaan dalam pembahasan Perubahan Komposisi Anggota Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana, dengan demikian komposisi Direktur Pelaksana per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Structure, Number, Composition and Basis of Appointment of Members

In carrying out its operational functions, Indonesia Eximbank has a leadership structure consisting of an Executive Director and Managing Directors. In accordance with the provisions of Articles 16 and 17 of Finance Ministerial Regulation No. 208/2021 concerning the Principles of Governance, Risk Management Principles, and Know Your Customer, Executive Directors are assisted by a maximum of 5 (five) Managing Directors. Managing Directors are responsible for carrying out Indonesia Eximbank's daily operational policies and ensuring effective continuity of organizational management.

As part of the executive structure, Managing Directors have a role in coordinating and supervising the course of operational activities. Their main responsibilities include implementing strategic policies, optimizing resources, achieving performance targets, and ensuring compliance with applicable regulations.

Throughout 2024, there were changes in the Executive Director and Managing Directors of Indonesia Eximbank composition as explained in the Company Profile chapter in the discussion of Composition Changes of Executive Director and Managing Director Members, thus the composition of Managing Directors as of December 31, 2024, is as follows:

Komposisi Direktur Pelaksana per 31 Desember 2024

Managing Directors Composition as of December 31, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Position Period	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Anton Herdianto	Direktur Pelaksana Bisnis Managing Director of Financing	25 November 2024 – 24 November 2029 November 25, 2024 – November 24, 2029	Ke - 1 1 st	Keputusan Dewan Direktur No. 0012/ KDD/11/2024 Board of Directors Decree No. 0012/ KDD/11/2024
Maqin U. Norhadi	Plt. Direktur Pelaksana Acting Managing Director	01 September 2024 – 31 Agustus 2025 September 1, 2024 – August 31, 2025	Ke - 1 1 st	Keputusan Dewan Direktur No. 0014/ KDD/11/2024 Board of Directors Decree No. 0014/ KDD/11/2024
Anwar Harsono	Plt. Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional, & Teknologi Informasi Acting Managing Director of Finance, Operations, & Information Technology	01 September 2024 – 31 Agustus 2025 September 1, 2024 – August 31, 2025	Ke - 1 1 st	Keputusan Dewan Direktur No. 0013/ KDD/11/2024 Board of Directors Decree No. 0013/ KDD/11/2024
T. Wahyu Prihadi Wibowo	Plt. Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan, & Sumber Daya Manusia Acting Managing Director of Institution Secretariat, Compliance, & Human Capital	01 September 2024 – 28 Februari 2025 September 1, 2024 – February 28, 2025	Ke - 1 1 st	Keputusan Dewan Direktur No. 0015/ KDD/11/2024 Board of Directors Decree No. 0015/ KDD/11/2024
Sam Malee	Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit Managing Director of Credit & Risk Management	14 Maret 2024 – 31 Maret 2029 March 14, 2024 – Present	Ke - 1 1 st	Keputusan Dewan Direktur No. 0007/ KDD/07/2024. Board of Directors Decree No. 0007/ KDD/07/2024.

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Direktur pelaksana dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada:

1. Itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan LPEI.
2. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Menteri dan memastikan seluruh aktivitas LPEI telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Menteri.
3. Membantu Direktur Eksekutif dalam menjalankan pengurusan LPEI untuk kepentingan LPEI dan sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian LPEI.
4. Melaksanakan kebijakan dan strategi, serta menerapkan Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif (diatur lebih lanjut pada Butir G)
5. Menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah secara konsisten (diatur lebih lanjut pada Butir H).
6. Membantu Direktur Eksekutif menyusun RJP dan RKAT LPEI untuk disampaikan kepada Dewan Direktur guna mendapat persetujuan (diatur lebih lanjut pada Butir I)
7. Memelihara dan mengurus kekayaan LPEI, antara lain melalui pencatatan dengan sistem akuntansi dan pembukuan (diatur lebih lanjut pada Butir J).
8. Berperan aktif dalam turut serta pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan pada otoritas yang berwenang (diatur lebih lanjut pada Butir K).
9. Dengan kuasa Direktur Eksekutif, 2 (dua) orang Direktur Pelaksana dapat mewakili LPEI baik di dalam maupun di luar pengadilan.
10. Direktur Pelaksana dapat menjalankan fungsinya tanpa didampingi oleh Direktur Pelaksana lainnya dalam hal:
 - a. Menjalankan fungsi/tugas dan tanggung jawab organisasi sesuai masing-masing bidang teknisnya sesuai dengan batas kewenangan dan kebijakan yang berlaku.
 - b. Menjalankan fungsi/tugas protokoler, menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) yang belum mempunyai kekuatan mengikat LPEI, membangun komunikasi/relationship dengan pihak-pihak eksternal, dan fungsi-fungsi lain yang sejenis.
11. Memperhatikan masukan-masukan yang diberikan oleh Direktur Eksekutif.
12. Melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan LPEI serta mengikat LPEI dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan LPEI Sesuai dengan batas kewenangan.
13. Menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten.
14. Wajib menyampaikan informasi atau keterangan mengenai kepemilikan saham Direktur Pelaksana beserta keluarganya dalam perusahaan yang mempunyai hubungan bisnis dengan LPEI serta tanggal saham itu diperoleh.
15. Menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas aktiva senantiasa baik.

Duties, Authorities and Responsibilities

In carrying out their duties, Managing Directors are guided by:

1. Good faith and responsibility in carrying out duties for Indonesia Eximbank's benefit.
2. Submit to the provisions of applicable laws and regulations and Ministerial decrees and ensure that all of Indonesia Eximbank's activities comply with the provisions of applicable laws and regulations and Ministerial decrees.
3. Assist the Executive Director in managing the Indonesia Eximbank for the benefit of Indonesia Eximbank and in accordance with the aims and objectives of its establishment.
4. Implement policies and strategies, and apply Risk Management in writing and comprehensively (further regulated in Item G).
5. Implement the Know Your Customer Principle consistently (further regulated in Item H).
6. Assist the Executive Director in preparing the Indonesia Eximbank's RJP and RKAT to be submitted to Board of Directors for approval (further regulated in Item I)
7. Maintain and manage the assets of Indonesia Eximbank, including through recording with accounting and bookkeeping systems (further regulated in Item J).
8. Actively participate in the eradication of Money Laundering and report suspicious financial transactions to the competent authorities (further regulated in Item K).
9. With the power of Executive Director, 2 (two) Managing Directors can represent Indonesia Eximbank both in and out of court.
10. Managing Director can carry out its function without being accompanied by other Managing Directors in the case of:
 - a. Carrying out the functions/duties and responsibilities of the organization according to each technical field in accordance with the limits of authority and applicable policies.
 - b. Performing protocol functions/duties, signing a Memorandum of Understanding (MoU) that does not yet have binding force on Indonesia Eximbank, building communication/relationships with external parties, and other similar functions.
11. Paying attention to the input provided by Executive Director.
12. Take all actions and deeds, both regarding the management and ownership of Indonesia Eximbank's assets and binding Indonesia Eximbank to other parties and/or other parties to Indonesia Eximbank in accordance with authority limits.
13. Implement Good Corporate Governance consistently.
14. Must submit information or details regarding the share ownership of Managing Directors and their families in companies that have business relations with Indonesia Eximbank and the date the shares were acquired.
15. Assess, monitor and take the necessary steps to ensure that the quality of assets is always good.

16. Menyampaikan laporan kualitas aktiva kepada Direktur Eksekutif.
17. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern LPEI, auditor ekstern, hasil pengawasan Menteri, dan atau hasil pengawasan tertentu oleh otoritas lain.
18. Memperhatikan rekomendasi Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi.
19. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha LPEI pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
20. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direktur Pelaksana sesuai batas kewenangan yang diberikan.
21. Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Eksekutif berdasarkan kebijakan yang berlaku.
22. Bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian pribadi yang merugikan kepentingan LPEI.

Pembagian Tugas Direktur Eksekutif & Direktur Pelaksana

Struktur kepemimpinan LPEI dirancang dengan pembagian tugas yang terperinci untuk memastikan efektivitas organisasi. Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana memiliki tugas serta tanggung jawab yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Dewan Direktur No.0001/PDD/01/2024 tentang Kebijakan Struktur Organisasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

16. Submit an asset quality report to Executive Director.
17. Follow up on audit findings and recommendations from the Indonesia Eximbank Internal Audit Unit work unit, external auditors, results of the Minister's supervision, and/or certain results of supervision by other authorities.
18. Paying attention to the recommendations of Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee.
19. Implementing good corporate governance principles in every business activity of Indonesia Eximbank at all levels of the organization.
20. Evaluating and deciding on transactions that require the Managing Director's approval within the authority limits granted.
21. Perform other obligations in accordance with the provisions stipulated by Executive Director based on applicable policies.
22. Personally responsible for personal negligence that is detrimental to the Indonesia Eximbank's interests.

Division of Duties between Executive Director & Managing Director

Indonesia Eximbank's leadership structure is designed with a detailed division of duties to ensure organizational effectiveness. Each member of Executive Director and Managing Director has duties and responsibilities that have been established based on Decree No. 0001/PDD/01/2024, with the following details:

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Scope of Duties
Anton Herdianto	Direktur Pelaksana Bisnis Managing Director of Financing	- Chief of Region - Divisi Bisnis I - Divisi Bisnis II - Divisi Bisnis III - Divisi Bisnis IV - Executive Business Officer - Business Ecosystem - Trade Service Center - DCOR
Maqin U. Norhadi	Plt. Direktur Pelaksana Acting Managing Director	- NIA, Trade Finance & Finance Division - Guarantee & Insurance Division - Advisory Service Division - Sharia Unit - Special Projects - Market Intelligent & Lead Mgt
Anwar Harsono	Plt. Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional, & Teknologi Informasi Acting Managing Director of Finance, Operations, & Information Technology	- Chief of Finance Treasury & Strategy - Operation Division - Information Technology Division - Economist
T. Wahyu Prihadi Wibowo	Plt. Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan, & Sumber Daya Manusia Acting Managing Director of Institution Secretariat, Compliance, & Human Capital	- Chief of HC, Legal & Compliance - Corporate Secretary & Stakeholder Engagement Division - Procurement & GA Division - Special Assignment
Sam Malee	Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit Managing Director of Credit & Risk Management	- Chief of Business Risk - Risk Management Division - Policy, Procedure & Product Division

Independensi Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana

Direktur Eksekutif dan seluruh Direktur Pelaksana LPEI telah dipastikan memenuhi aspek independensi, sebagaimana dibuktikan melalui penandatanganan Surat Pernyataan Independensi yang mencakup aspek-aspek berikut:

1. Tidak mempunyai kepemilikan saham pada perusahaan lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (untuk Dewan Direktur) dan berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri (untuk Direktur Pelaksana).
2. Tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Tidak akan memanfaatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia selain remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau ketentuan lainnya yang berlaku.
5. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan dan/atau lembaga lain (untuk Direktur Pelaksana).

Independence of Executive Director and Managing Directors

Executive Director and all members of Managing Directors of Indonesia Eximbank have fulfilled the aspect of independence, as evidenced by signing the Independence Statement Letter, which includes the following aspects:

1. =Do not have share ownership in other companies that have the potential to cause a conflict of interest (for Board of Directors) and are domiciled both at home and abroad (for Managing Director).
2. =Has non financial relationship and family relationship with Board of Directors and Managing Director, either directly or indirectly.
3. =Will not use the Indonesia Eximbank for personal, family or party interests that can harm or reduce the profits of Indonesia Eximbank, either directly or indirectly.
4. Not taking and/or receiving personal benefits from the Indonesia Eximbank other than remuneration and other facilities that have been determined by the Minister of Finance or other applicable provisions.
5. Not holding concurrent positions as members of Board of Commissioners, Directors or Executive Officers in other companies and/or institutions (for Managing Director).



Program Pengenalan Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana Baru

LPEI menyelenggarakan program orientasi (*Induction Program*) bagi Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana yang baru diangkat. Program ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman bersama dalam memimpin operasional Lembaga serta membangun hubungan yang lebih erat antaranggota.

Selain itu, program ini memberikan wawasan kepada Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana baru mengenai aktivitas bisnis, rencana strategis Lembaga, pedoman kerja, serta tanggung jawab yang harus dijalankan. Dengan adanya program orientasi ini, diharapkan mereka dapat berkolaborasi secara selaras dengan organ Tata Kelola LPEI lainnya.

Introduction Program for New Executive Director and Managing Directors

Indonesia Eximbank organizes an Induction Program for newly appointed Executive Directors and Managing Directors. This program aims to strengthen a shared understanding of leading the Institute's operations and build closer relationships between members.

In addition, the program provides insights to the new Executive Director and Managing Directors regarding business activities, the Institute's strategic plans, work guidelines, and responsibilities that must be carried out. With this orientation program, it is hoped that they can collaborate in harmony with other Indonesia Eximbank Governance organs.

Sehubungan dengan adanya perubahan komposisi Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana di tahun 2024, maka LPEI menyelenggarakan Program Orientasi diselenggarakan oleh Divisi Sekretariat Lembaga dan Hubungan Kelembagaan pada tanggal 3 Juni 2024 untuk Sam Malee dan tanggal 20 Desember 2024 untuk Anton Herdianto. Adapun materi pembelajaran yang disampaikan kepada Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana baru mencakup, antara lain:

1. Pelaksanaan prinsip Tata Kelola Lembaga;
2. Gambaran mengenai LPEI berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategis, rencana usaha, posisi kompetitif, risiko, dan masalah-masalah strategis lainnya;
3. Kewenangan yang didelegasikan;
4. Tugas dan tanggung jawab serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Program Pengembangan Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana

Sepanjang tahun 2024, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana telah berkomitmen untuk memperkuat kepemimpinan melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi. Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana secara aktif mengikuti kegiatan tersebut guna meningkatkan kapasitas mereka dalam menjalankan peran strategis, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

In connection with the composition changes of Executive Director and Managing Directors in 2024, LPEI held an Orientation Program organized by the Institutional Secretariat and Institutional Relations Division on June 3, 2024 for Sam Malee and on December 20, 2024 for Anton Herdianto. The learning materials delivered to the new Executive Director and Managing Director include, among others:

1. Implementation of Institutional Governance principles;
2. Overview of LPEI with regard to its objectives, nature, scope of activities, financial and operating performance, strategic, business plans, competitive position, risks, and other strategic issues;
3. Delegated authority;
4. Duties and responsibilities and matters not permitted.

Development Program for Executive Director and Managing Directors

Throughout 2024, Executive Director and Managing Directors have committed to strengthening leadership through various training and competency development programs. Executive Director and Managing Directors actively participated in these activities to increase their capacity to carry out their strategic roles, as outlined in the following table:

Nama Dewan Direktur Board of Directors Name	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Judul Pelatihan Training Title	Penyelenggara Organizer
Anton Herdianto	16 Ags '24	• <i>Export Insurance</i>	• Antara
	25 Mar '24	• Pelatihan Komoditas Nikel	• LPEI
	8 Mei '24	• <i>Workshop</i> Perkembangan dan Regulasi Perkebunan Kelapa Sawit	• LPEI
	4 Apr '24	• Sosialisasi "Budaya Anti Korupsi dan Pencegahan Gratifikasi Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Lembaga SMV atau BUMN	• LPEI
	16 - 17 Feb '24	• Harmoni Eksekusi dan Kolaborasi Transformasi	• Peopletech
	10 Jun '24	• Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	• LSPP
	12 Jun '24	• Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	• LSPP
	5 - 6 Jul '24	• <i>Senior Leader Workshop : Business Execution Strategy</i>	• LPEI
	Aug 16, '24	• Export Insurance	
	Mar 25, '24	• Nickel Commodity Training	
	May 8, '24	• Workshop on Palm Oil Plantation Developments and Regulations	
	Apr 4, '24	• Socialization of "Anti-Corruption Culture and Prevention of Gratuities in Goods/ Services Procurement within SMV Institutions or SOEs	
	Feb 16-17, '24	• Harmony of Execution and Transformation Collaboration	
	Jun 10, '24	• Level 6 Risk Management Recertification Briefing	
	Jun 12, '24	• Level 7 Risk Management Recertification Briefing	
	Jul 5-6, '24	• Senior Leader Workshop : Business Execution Strategy	
Maqin U. Norhadi	16-Aug-'24	• <i>Export Insurance</i>	• Antara
	17 Jul '24	• <i>Economic Outlook 2024 - The Indonesian Economist Impact</i>	• Moody's Analytics
	4-Apr-'24	• Sosialisasi "Budaya Anti Korupsi dan Pencegahan Gratifikasi Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Lembaga SMV atau BUMN	• LPEI
	23 - 24 Feb '24	• Harmoni Eksekusi dan Kolaborasi Transformasi	• Peopletech
	21 Jun '24	• Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	• LSPP
	01 Jul '24	• Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	• LSPP
	5 - 6 Jul '24	• <i>Senior Leader Workshop : Bisnis Execution Strategy</i>	• LPEI
	Aug 16, '24	• Export Insurance	
	Jul 17, '24	• Economic Outlook 2024 - The Indonesian Economist Impact	
	Apr 4, '24	• Socialization of "Anti-Corruption Culture and Prevention of Gratuities in Goods/ Services Procurement in SMV Institutions or SOEs	
	Feb 23-24, '24	• Harmony of Execution and Transformation Collaboration	
	Jun 21, '24	• Level 6 Risk Management Recertification Debriefing	
	Jul 1, '24	• Level 7 Risk Management Recertification Debriefing	
	Jul 5-6, '24	• Senior Leader Workshop : Bisnis Execution Strategy	

Nama Dewan Direktur Board of Directors Name	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Judul Pelatihan Training Title	Penyelenggara Organizer
Anwar Harsono	17 Jul '24 1 - 2 Mar '24 26 Mei '24 5 - 6 Jul '24 Jul 17, '24 Mar 1-2, '24 May 26, '24 Jul 5-6, '24	- Economic Outlook 2024 - The Indonesian Economist Impact - Harmoni Eksekusi dan Kolaborasi Transformasi - Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 - Senior Leader Workshop : Bisnis Execution Strategy - Economic Outlook 2024 - The Indonesian Economist Impact - Harmony of Execution and Transformation Collaboration - Level 7 Risk Management Recertification Debriefing - Senior Leader Workshop : Bisnis Execution Strategy	- Moody's Analytics - Peopletech - Arfaidhams - LPEI
	17 Jul '24 4-Apr-'24 1 - 2 Mar '24 06 - 07 Jun '24 10 Jun '24 12 Jun '24 5 - 6 Jul '24 Jul 17, '24 Apr 4, '24 Mar 1-2, '24 Jun 6-7, '24 Jun 10, '24 Jun 12, '24 Jun 5-6, '24	- Economic Outlook 2024 - The Indonesian Economist Impact - Sosialisasi "Budaya Anti Korupsi dan Pencegahan Gratifikasi Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Lembaga SMV atau BUMN - Harmoni Eksekusi dan Kolaborasi Transformasi - Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 - Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 - Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 - Senior Leader Workshop : Bisnis Execution Strategy - Economic Outlook 2024 - The Indonesian Economist Impact - Socialization of "Anti-Corruption Culture and Prevention of Gratuities in Goods/ Services Procurement in SMV Institutions or SOEs - Harmony of Execution and Transformation Collaboration - Level 5 Risk Management Recertification Debriefing - Level 6 Risk Management Recertification Debriefing - Level 7 Risk Management Recertification Debriefing - Senior Leader Workshop : Bisnis Execution Strategy	- Moody's Analytics - LPEI - Peopletech - Arfaidhams - Garda - Garda - LPEI
Sam Malee	16 Aug '24 4 Apr '24 23 - 24 Feb '24 25 Mar '24 8 May '24 10 Jun '24 12 Jun '24 5 - 6 Jul '24 Aug 16, '24 Apr 4, '24 Feb 23-24, '24 Mar 25, '24 May 8, '24 Jun 10, '24 Jun 12, '24 Jul 5-6, '24	- Export Insurance - Sosialisasi "Budaya Anti Korupsi dan Pencegahan Gratifikasi Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Lembaga SMV atau BUMN - Harmoni Eksekusi dan Kolaborasi Transformasi - Komoditas dan Industri : Perkembangan Industri Nikel - Komoditas dan Sektor Industri : Perkembangan dan Regulasi Perkebunan Kelapa Sawit - Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 - Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 - Senior Leader Workshop : Bisnis Execution Strategy - Export Insurance - Socialization of "Anti-Corruption Culture and Prevention of Gratuities in Goods/ Services Procurement in SMV Institutions or SOEs - Harmony of Execution and Transformation Collaboration - Commodities and Industry: Nickel Industry Development - Commodities and Industry Sector: Palm Oil Plantation Development and Regulation - Level 6 Risk Management Recertification Debriefing - Level 7 Risk Management Recertification Debriefing - Senior Leader Workshop : Bisnis Execution Strategy	- Antara - LPEI - Peopletech - LPEI - LPEI - Garda - Garda - LPEI
Agus Windiartha*	1 - 2 Mar '24 17 Jul '24 10 Jun '24 12 Jun '24 5 - 6 Jul '24 Mar 1-2, '24 Jul 17, '24 Jun 10, '24 Jun 12, '24 Jul 5-6, '24	- Harmoni Eksekusi dan Kolaborasi Transformasi - Komoditas dan Sektor Industri : Economic Outlook 2024 - The Indonesian Economist Impact - Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 - Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 - Senior Leader Workshop : Bisnis Execution Strategy - Harmony of Execution and Transformation Collaboration - Commodities and Industry Sector: Economic Outlook 2024 - The Indonesian Economist Impact - Level 6 Risk Management Recertification Debriefing - Level 7 Risk Management Recertification Debriefing - Senior Leader Workshop : Bisnis Execution Strategy	- Peopletech - Moody's Analytics - Garda - Garda - LPEI
	1 - 2 Mar '24 4 Apr '24 17 Jul '24 12 Jun '24 5 - 6 Jul '24 Mar 1-2, '24 Apr 4, '24 Jul 17, '24 Jun 12, '24 Jul 5-6, '24	- Harmoni Eksekusi dan Kolaborasi Transformasi - Sosialisasi Budaya Anti Korupsi dan Pencegahan Gratifikasi Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Lembaga SMV (Special Mission Vehicle) atau BUMN - Komoditas dan Sektor Industri : Economic Outlook 2024 - The Indonesian Economist Impact - Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 - Senior Leader Workshop : Bisnis Execution Strategy - Harmony of Execution and Collaboration of Transformation - Socialization of Anti-Corruption Culture and Prevention of Gratuities in Procurement of Goods / Services within SMV (Special Mission Vehicle) Institutions or SOEs - Commodities and Industrial Sectors: Economic Outlook 2024 - The Indonesian Economist Impact - Risk Management Recertification Briefing Level 7 - Senior Leader Workshop : Bisnis Execution Strategy	- Peopletech - LPEI - Moody's Analytics - Garda - LPEI

*) Beliau sudah tidak menjabat sebagai Direktur Bidang Keuangan & Operasional sejak 31 Agustus 2024

*) Has no longer served as Director of Finance & Operations since August 31, 2024

Pelaksanaan Tugas Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana Tahun 2024

Di tahun 2024, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana berperan aktif dalam memastikan kelancaran operasional dan pencapaian target LPEI. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana telah melaksanakan koordinasi antar-organ yang dilakukan secara intens dan sistematis melalui pelaksanaan sejumlah rapat rutin, di antaranya rapat Manajemen, yang diselenggarakan setidaknya satu kali dalam satu minggu, rapat ALCO satu kali dalam satu bulan, dan rapat bulanan kinerja satu kali dalam satu bulan. Selain wajib menyelenggarakan rapat dengan Direktur Pelaksana, Direktur Eksekutif juga mengadakan rapat koordinasi dengan Dewan Direktur untuk memastikan operasional LPEI berjalan dengan baik

Selama tahun 2024, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana telah menyelenggarakan sebanyak 68 (Enam puluh delapan) kali rapat dalam rangka pengambilan keputusan kebijakan dan isu-isu strategis, Direktur Eksekutif aktif melakukan komunikasi dengan Dewan Direktur sebagai organ pengawas di LPEI. Keputusan strategis diambil melalui mekanisme rapat dan didokumentasikan secara baik. Dalam pelaksanaan operasional, dibentuk pula komite di bawah Direktur Eksekutif

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana atau Unit Kerja yang Berada di Bawah Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana

Prosedur Penilaian

Direktur Eksekutif didukung oleh berbagai komite yang bertugas membantu pengelolaan Lembaga, di antaranya Komite Manajemen Risiko, Komite Pengembangan Produk, Komite Kebijakan dan Pedoman, Komite Assets & Liabilities Management, Komite Teknologi Sistem Informasi, Komite Pengadaan, Komite Jasa Konsultasi, Komite Pembiayaan, dan Komite Sumber Daya Manusia.

Kinerja setiap komite di bawah Direktur Eksekutif dievaluasi setiap tahun berdasarkan target yang telah ditetapkan. Proses evaluasi ini dipimpin oleh Direktur Eksekutif dengan melibatkan anggota komite serta pihak terkait lainnya. Hasil penilaian tersebut digunakan sebagai dasar untuk memberikan arahan, rekomendasi perbaikan, dan menentukan remunerasi bagi anggota komite. Evaluasi ini bertujuan memastikan setiap komite berkontribusi optimal dalam mendukung pencapaian tujuan LPEI.

Implementation of Executive Director and Managing Directors' Duties in 2024

In 2024, both Executive Director and Managing Directors take an active role in ensuring the smooth operation and achievement of Indonesia Eximbank's targets. In carrying out their duties and responsibilities, Executive Director and Managing Directors has carried out intense and systematic inter-organ coordination through the implementation of a number of regular meetings, including Management meetings, which are held at least once a week, ALCO meetings once a month, and monthly performance meetings once a month. In addition to organizing meetings with the Managing Director, the Executive Director also holds coordination meetings with the Board of Directors to ensure that LPEI's operations are running well.

During the year, the Executive Director and the Managing Director have held 68 (Sixty-eight) meetings in order to make policy decisions and strategic issues, the Executive Director actively communicates with the Board of Directors as the supervisory organ in LPEI. Strategic decisions are made through meeting mechanisms and are well documented. In operational implementation, a committee under the Executive Director is also formed.

Performance Assessment of Committees or Work Units under Executive Director and Managing Directors

Assessment Procedures

Executive Director is supported by various committees tasked with assisting in the institution's management, including the Risk Management Committee, Product Development Committee, Policy and Guidelines Committee, Assets & Liabilities Management Committee, Information Systems Technology Committee, Procurement Committee, Consulting Services Committee, Financing Committee, and Human Capital Committee.

The performance of each committee under Executive Director is evaluated annually based on predetermined targets. This assessment process is led by Executive Director with the involvement of committee members and other related parties. The assessment results are used as a basis for providing direction, recommendations for improvement, and determining remuneration for committee members. This assessment aims to ensure that each committee contributes optimally in supporting the achievement of Indonesia Eximbank's objectives.

Kriteria Penilaian

Penilaian efektivitas kinerja komite-komite di bawah Direktur Eksekutif didasarkan pada beberapa indikator, termasuk pencapaian target kinerja, efektivitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, serta kontribusi terhadap kinerja LPEI secara keseluruhan. Kriteria penilaian ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing komite.

Hasil Penilaian

Berikut adalah hasil evaluasi kinerja komite-komite di bawah Direktur Eksekutif sepanjang tahun 2024:

1. **Komite Manajemen Risiko**
 Komite Manajemen Risiko memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan risiko yang optimal di LPEI. Sepanjang tahun 2024, Komite Manajemen Risiko aktif memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif terkait kebijakan dan implementasi Manajemen Risiko, termasuk perubahannya. Selain itu, Komite Manajemen Risiko juga mengevaluasi serta mengusulkan perbaikan terhadap Komite Kebijakan Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan Manajemen Risiko. Berbagai keputusan bisnis yang belum tercakup dalam prosedur juga menjadi perhatian dalam rekomendasi yang diberikan. Dengan keterlibatan aktifnya, Komite Manajemen Risiko berkontribusi signifikan dalam memperkuat kepatuhan terhadap regulasi dan efektivitas mitigasi risiko. Di tahun 2024, Komite Manajemen Risiko mengadakan 24 (dua puluh empat) kali rapat dengan tingkat kehadiran rata-rata anggota mencapai 92%.
2. **Komite Pengembangan Produk**
 Sepanjang tahun 2024, LPEI terus berupaya mengoptimalkan pengembangan produk dan layanan guna mendukung pertumbuhan ekspor nasional. Dalam hal ini, Komite Pengembangan Produk memainkan peran strategis dalam merumuskan rekomendasi yang relevan dengan dinamika industri dan kebutuhan pemangku kepentingan. Berbagai rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya berkontribusi pada peluncuran produk baru, tetapi juga penyempurnaan prosedur dan ketentuan internal. Sepanjang tahun, Komite Pengembangan Produk mengadakan 10 (sepuluh) kali rapat dengan tingkat kehadiran rata-rata anggota mencapai 99,3%.
3. **Komite Kebijakan dan Pedoman**
 Sepanjang tahun 2024, Komite Kebijakan dan Pedoman terus berperan aktif dalam memperkuat tata kelola internal LPEI. Komite Kebijakan dan Pedoman tidak hanya memberikan rekomendasi strategis kepada Direktur Eksekutif terkait penyusunan dan implementasi peraturan internal, tetapi juga memastikan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan yang diterapkan. Dengan pendekatan yang sistematis, Komite Kebijakan dan Pedoman berkontribusi dalam mengatasi berbagai tantangan yang muncul serta menjaga keseimbangan antara kepatuhan regulasi dan efisiensi operasional. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Kebijakan dan Pedoman mengadakan 20 (dua puluh) kali rapat dengan tingkat kehadiran rata-rata anggota mencapai 100%.

Assessment Criteria

The effectiveness of performance assessment of committees under Executive Director is based on several indicators, including achievement of performance targets, effectiveness in carrying out duties and responsibilities, and contribution to the overall performance of Indonesia Eximbank. These assessment criteria can be adjusted to the needs and characteristics of each committee.

Assessment Results

Following are the performance assessment results of committees under Executive Director throughout 2024:

1. **Risk Management Committee**
 Risk Management Committee has a strategic role in ensuring optimal risk management at Indonesia Eximbank. Throughout 2024, Risk Management Committee actively provided recommendations to Executive Directors regarding Risk Management policies and implementation, including changes. In addition, Risk Management Committee also evaluates and proposes improvements to the Financing, Guarantee, and Insurance Policy Committee to increase the effectiveness of Risk Management implementation. Various business decisions that are not yet covered in the procedures are also a concern in the recommendations provided. With its active involvement, Risk Management Committee contributes significantly to strengthening regulatory compliance and risk mitigation effectiveness. In 2024, Risk Management Committee held 24 (twenty four) meetings with an average member attendance rate of 92%.
2. **Product Development Committee**
 Throughout 2024, Indonesia Eximbank continued to optimize the development of products and services to support national export growth. In this regard, Product Development Committee played a strategic role in formulating recommendations relevant to industry dynamics and stakeholder needs. The various recommendations produced not only contribute to the launch of new products, but also to the refinement of internal procedures and provisions. Throughout the year, Product Development Committee held 10 (ten) meetings with an average member attendance rate of 99,3%.
3. **Policy and Guidelines Committee**
 Throughout 2024, Policy and Guidelines Committee continued to play an active role in strengthening the internal governance of Indonesia Eximbank. Policy and Guidelines Committee not only provides strategic recommendations to Executive Director regarding the formulation and implementation of internal regulations, but also ensures the effectiveness of supervision of compliance implemented. With a systematic approach, Policy and Guidelines Committee contributes in overcoming various challenges that arise and maintaining a balance between regulatory compliance and operational efficiency. In carrying out its duties, Policy and Guidelines Committee held 20 (twenty) meetings with an average attendance rate of members reaching 100%.

4. Komite Assets & Liabilities Management

Sepanjang tahun 2024, Komite Assets dan Liabilities Management menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung stabilitas keuangan LPEI. Melalui evaluasi menyeluruh, Direktur Eksekutif menilai bahwa Komite Assets dan Liabilities Management telah beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Komite Assets dan Liabilities Management memberikan rekomendasi strategis terkait kebijakan manajemen risiko, batasan, serta pedoman pengelolaan aset dan liabilitas dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang relevan. Keputusan yang dihasilkan bertujuan untuk menjaga keseimbangan finansial dan memastikan keberlanjutan operasional LPEI. Sepanjang tahun, Komite Assets & Liabilities Management mengadakan 16 (enam belas) kali rapat dengan tingkat kehadiran rata-rata anggota mencapai 81%.

5. Komite Teknologi Sistem Informasi

Sepanjang tahun 2024, penguatan infrastruktur teknologi sistem informasi menjadi salah satu fokus utama dalam mendukung operasional LPEI. Komite Teknologi Sistem Informasi berperan dalam memberikan rekomendasi strategis kepada Direktur Eksekutif, mencakup perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pengembangan sistem informasi. Selain itu, Komite Teknologi Sistem Informasi turut menetapkan arah kebijakan untuk pengembangan jangka menengah dan panjang, termasuk rencana investasi teknologi yang selaras dengan kebutuhan LPEI. Keberadaan Komite Teknologi Sistem Informasi memastikan implementasi teknologi dilakukan secara optimal sesuai dengan strategi dan tantangan yang dihadapi. Sepanjang tahun, komite telah mengadakan 5 (lima) kali rapat dengan tingkat kehadiran rata-rata anggota mencapai 79%.

6. Komite Pengadaan

Komite Pengadaan memiliki peran strategis dalam memastikan proses pengadaan di LPEI berjalan efektif dan sesuai aturan. Sepanjang tahun 2024, Komite Pengadaan aktif memberikan rekomendasi yang mendukung optimalisasi pengadaan, dengan fokus pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Rekomendasi tersebut mencakup perbaikan dalam pelaksanaan pengadaan agar lebih tepat guna tanpa mengabaikan prinsip kepatuhan dan kualitas. Selain itu, Komite Pengadaan berkontribusi dalam merumuskan langkah-langkah peningkatan yang sejalan dengan kebijakan yang berlaku. Komitmen ini tercermin dalam 68 (enam puluh delapan) kali rapat dengan tingkat kehadiran rata-rata anggota mencapai 80%.

7. Komite Jasa Konsultasi

Sepanjang tahun 2024, Komite Jasa Konsultasi berperan aktif dalam mendukung efektivitas program jasa konsultasi melalui berbagai rekomendasi strategis kepada Direktur Eksekutif. Setiap keputusan yang diusulkan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, mitigasi risiko, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

4. Assets & Liabilities Management Committee

Throughout 2024, Assets and Liabilities Management Committee optimally carried out its role in supporting the financial stability of Indonesia Eximbank. Through a comprehensive evaluation, Executive Director assessed the Assets and Liabilities Management Committee as operating in accordance with applicable regulations. Assets and Liabilities Management Committee provides strategic recommendations related to risk management policies, limitations, and guidelines for managing assets and liabilities by considering relevant internal and external factors. The resulting decisions aim to maintain financial balance and ensure the operational sustainability of Indonesia Eximbank. Throughout the year, Assets & Liabilities Management Committee held 16 (enam belas) meetings with an average member attendance rate of 81%.

5. Information Systems Technology Committee

Throughout 2024, strengthening the information system technology infrastructure has been one of the main focuses in supporting the Indonesia Eximbank's operations. Information System Technology Committee plays a role in providing strategic recommendations to Executive Director, including planning, supervision, and evaluation of information system development. In addition, Information System Technology Committee also determines policy directions for medium and long-term development, including technology investment plans in line with Indonesia Eximbank's needs. The existence of Information System Technology Committee ensures that the implementation of technology is carried out optimally in accordance with the strategies and challenges faced. Throughout the year, the committee has held 5 (five) meetings with an average attendance rate of members reaching 79%.

6. Procurement Committee

Procurement Committee has a strategic role in ensuring that the procurement process at Indonesia Eximbank runs effectively and according to the rules. Throughout 2024, Procurement Committee actively provided recommendations that supported procurement optimization, with a focus on efficiency, transparency, and accountability. These recommendations included improvements in the implementation of procurement to be more effective without neglecting the principles of compliance and quality. In addition, Procurement Committee contributed to formulating improvement measures in line with applicable policies. This commitment is reflected in 68 (sixty eight) meetings with an average member attendance rate of 80%.

7. Consulting Services Committee

Throughout 2024, Consulting Services Committee plays an active role in supporting the effectiveness of consulting services programs through various strategic recommendations to Executive Director. Each proposed decision considers the principles of prudence, risk mitigation, and compliance with applicable regulations.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Jasa Konsultasi memberikan arahan terkait persetujuan prinsip atas program jasa konsultasi, sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam RKAT. Dengan kontribusi tersebut, Direktur Eksekutif menilai bahwa peran Komite Jasa Konsultasi berpengaruh positif terhadap kelancaran perencanaan dan implementasi program. Sepanjang tahun 2024, Komite Jasa Konsultasi menggelar 3 (tiga) kali rapat dengan tingkat kehadiran rata-rata anggota mencapai 95%.

8. Komite Pembiayaan

Sepanjang tahun 2024, Komite Pembiayaan berperan penting dalam memastikan proses pengambilan keputusan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan regulasi yang berlaku. Berbagai keputusan strategis telah ditetapkan, termasuk persetujuan proposal pembiayaan, penjaminan, asuransi, serta kebijakan treasury. Selain itu, Komite Pembiayaan turut berkontribusi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dan penetapan kualitas aktiva produk berdasarkan batasan yang telah ditetapkan. Dengan perannya yang krusial, Komite Pembiayaan menjadi bagian integral dalam menjaga stabilitas operasional dan manajemen risiko di LPEI. Selama tahun 2024, Komite Pembiayaan telah mengadakan 275 (dua ratus tujuh puluh lima) rapat untuk segmen UKM dan 288 (dua ratus delapan puluh delapan) rapat untuk segmen Non-UKM, dengan tingkat kehadiran anggota mencapai 100%.

9. Komite Sumber Daya Manusia

Sepanjang tahun 2024, Komite Sumber Daya Manusia berperan aktif dalam memberikan arahan strategis terkait kebijakan SDM. Komite Sumber Daya Manusia tidak hanya mengusulkan penyempurnaan kebijakan, tetapi juga memastikan implementasinya selaras dengan sasaran dan strategi Lembaga. Selain itu, pengembangan nilai-nilai Lembaga tetap menjadi perhatian utama untuk memperkuat budaya organisasi. Dengan konsistensi dalam memberikan masukan yang konstruktif, komite mendukung efektivitas pengelolaan SDM sekaligus memperkuat identitas dan tujuan strategis LPEI. Sepanjang tahun, Komite Sumber Daya Manusia telah mengadakan 12 (dua belas) kali rapat dengan tingkat kehadiran rata-rata anggota mencapai 100%.

In carrying out its duties, Consulting Services Committee provides direction related to the approval of consulting services programs' principles, in line with the provisions set forth in the Annual Work Plan and Budget. With this contribution, Executive Director assesses the Consulting Services Committee's role positively influences the smooth planning and implementation of the program. Throughout 2024, Consulting Services Committee held 3 (tiga) meetings with an average member attendance rate of 95%.

8. Financing Committee

Throughout 2024, Financing Committee plays an important role in ensuring the decision-making process is in accordance with the principles of prudence and applicable regulations. Various strategic decisions have been made, including approval of financing proposals, underwriting, insurance, and treasury policies. In addition, Financing Committee also contributes to the resolution of problem financing and the determination of product asset quality based on established limits. With its crucial role, Financing Committee is an integral part of maintaining operational stability and risk management at Indonesia Eximbank. During 2024, Financing Committee has held 275 (two hundred seventy five) meetings for the SME segment and 288 (two hundred eighty eight) meetings for the Non-SME segment, with a member attendance rate of 100%.

9. Human Capital Committee

Throughout 2024, Human Capital Committee played an active role in providing strategic direction related to HC policy. Human Capital Committee not only proposed policy improvements, but also ensured their implementation in line with the Institution's objectives and strategies. In addition, the Institution's values development remained a key concern to strengthen the organizational culture. By consistently providing constructive input, the committee supported the effectiveness of HC management while strengthening the Indonesia Eximbank's identity and strategic objectives. Throughout the year, Human Capital Committee has held 12 (twelve) meetings with an average member attendance rate of 100%.

Dewan Pengawas Syariah

Sharia Supervisory Board

Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara aktif melakukan pengawasan terhadap semua aspek, termasuk produk, kebijakan, dan kegiatan usaha Syariah di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Fungsi utama DPS adalah memastikan bahwa semua aspek tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diatur oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi LPEI. Dengan melakukan pengawasan ini, DPS berupaya untuk menjaga kesesuaian dan kepatuhan LPEI terhadap prinsip-prinsip syariah dalam segala aktivitasnya.

Menurut UU No. 2/2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI diberi wewenang untuk menjalankan kegiatan usaha dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Untuk memastikan implementasi prinsip-prinsip syariah ini, LPEI berkewajiban untuk menunjuk DPS. Peran DPS sangat penting, karena memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi penerapan prinsip-prinsip syariah yang konsisten di setiap tahap pengambilan keputusan oleh LPEI. Sebagai bagian dari mekanisme pengawasan, DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil oleh LPEI selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.

Tugas dan Tanggung Jawab DPS

Dalam Piagam DPS Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, sebagaimana tertera dalam PDD No. 0013/PDD/10/2022, ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab DPS telah diatur pada Pasal 10 dan 11. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah dalam operasional Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. DPS memiliki tugas memberikan nasihat dan saran (*advisory*) kepada Direktur Eksekutif serta mengawasi seluruh kegiatan usaha syariah LPEI agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
2. DPS mempunyai tugas tanggung jawab antara lain:
 - a. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah;
 - b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direktur Eksekutif atas pelaksanaan kebijakan Manajemen;
 - c. Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - d. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direktur Eksekutif dan/atau Direktur Pelaksana, pelaksana fungsi audit internal dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan

The Sharia Supervisory Board (DPS) actively supervises all aspects, including Sharia products, policies, and business activities at the Indonesian Export Financing Agency (LPEI). The main function of the DPS is to ensure that all aspects are in accordance with sharia principles as regulated by fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) and comply with laws and regulations applicable to LPEI. By conducting this supervision, DPS seeks to maintain LPEI's suitability and compliance with sharia principles in all its activities.

The existence of DPS at Indonesia Eximbank is mandated by Act No. 2/2009, which stipulates that every sharia-based activity must be supervised by a competent party. DPS is responsible for assessing and ensuring compliance with the fatwas of Indonesian Ulema Council's National Sharia Board (DSN-MUI) and the regulations governing Indonesia Eximbank. Thus, every decision made by Indonesia Eximbank remains in line with sharia principles, reflecting integrity and commitment to regulatory compliance.

DPS Duties and Responsibilities

The provisions regarding the duties and responsibilities of DPS in carrying out the function of supervising sharia principles in the Indonesia Eximbank operations are regulated in the DPS Charter, as stated in PDD No. 0013/PDD/10/2022. These provisions are contained in Articles 10 and 11, which elaborate on DPS's role in ensuring compliance with sharia principles, as explained below:

1. DPS has the task of providing advice and suggestions (*advisory*) to Executive Directors and supervising all Indonesia Eximbank sharia business activities to ensure they comply with Sharia Principles.
2. DPS has responsibilities, among others:
 - a. Evaluate the Risk Management policy related to fulfillment of Sharia Principles;
 - b. Evaluating the accountability of Executive Director for implementation of the Management policy.
 - c. Risks related to the fulfillment of Sharia Principles as referred to in letter a;
 - d. Analyzing reports submitted by and/or requested from Executive Director and/or Managing Director, internal audit function and/or compliance function to determine the quality of implementation of fulfillment

- memenuhkan Prinsip Syariah atas pelaksanaan bisnis yang menggunakan Prinsip Syariah;
- e. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas seluruh kebijakan, pedoman operasional, produk, transaksi dan laporan keuangan syariah yang dikeluarkan LPEI;
 - f. Mengawasi, memberikan masukan dan nasihat atas pengembangan produk syariah baru agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI;
 - g. Merekomendasikan kepada LPEI untuk mengajukan fatwa kepada DSN-MUI untuk produk syariah baru LPEI yang belum ada fatwanya;
 - h. Melakukan review secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap pelaksanaan kegiatan usaha syariah LPEI;
 - i. Melakukan edukasi dan pembinaan kepada staf-staf LPEI dan nasabah-nasabah yang direkomendasikan oleh LPEI;
 - j. Menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS kepada Direktur Eksekutif dengan tembusan kepada Dewan Direktur secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah akhir periode pelaporan.
3. DPS melaporkan kegiatan dan hasil penugasan yang diterimanya kepada Direktur Eksekutif dengan tembusan kepada Dewan Direktur.
- of Sharia Principles on the implementation of business using Sharia Principles;
- e. Assessing and ensuring the fulfillment of Sharia Principles on all policies, operational guidelines, products, transactions and sharia financial statements issued by Indonesia Eximbank;
 - f. Supervise, provide input and advice on the development of new sharia products so that they are in accordance with the DSN-MUI fatwa;
 - g. Recommending to Indonesia Eximbank to submit fatwa to DSNMUI for Indonesia Eximbank new sharia products for which there is no fatwa;
 - h. Conducting periodic review at least 1 (one) time in 3 (three) months on fulfillment of Sharia Principles on the implementation of Indonesia Eximbank sharia business activities;
 - i. Conducting education and guidance to Indonesia Eximbank staff and customers recommended by Indonesia Eximbank;
 - j. Prepare and submit the DPS Supervisory Report to Executive Director with a copy to Board of Directors periodically at least once every 3 (three) months and submitted no later than 7 (seven) working days after the end of reporting period.
3. DPS reports the activities and results of the assignments it receives to Executive Director with a copy to Board of Directors.

Mekanisme Pemberian Saran DPS

DPS LPEI menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mencakup fungsi pemberian nasihat dan pengawasan. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, DPS memberikan nasihat serta saran, sekaligus mengawasi kepatuhan terhadap prinsip syariah di LPEI. Proses pemberian nasihat, saran, dan pengawasan ini dilakukan secara terstruktur melalui Rapat DPS, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Direktur (PDD) No. 0013/PDD/10/2022 tentang Piagam DPS Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, khususnya Pasal 15. Adapun mekanisme pelaksanaan Rapat DPS dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rapat DPS dilaksanakan secara berkala paling kurang 1 (satu) bulan sekali atau dalam hal dianggap perlu, rapat dapat dilakukan lebih cepat sesuai kebutuhan.
2. Pemanggilan rapat disampaikan oleh Departemen Konsultasi Syariah kepada setiap DPS maksimal 2 (dua) hari sebelum rapat dilaksanakan.
3. Rapat dapat dilakukan secara fisik, telekonferensi, dan/atau media elektronik lainnya.

Sharia Supervisory Board Advisory Mechanism

DPS of Indonesia Eximbank carries out its role in accordance with applicable regulations, including the functions of providing advice and supervision. To carry out this function, DPS provides advice and suggestions, as well as supervising compliance with sharia principles at Indonesia Eximbank. The process of providing advice and supervision is carried out in a structured manner through the Sharia Supervisory Board Meeting, as regulated in the Board of Directors Regulation (PDD) No. 0013/PDD/10/2022 concerning the Sharia Supervisory Board Charter of Indonesia Eximbank, specifically Article 15. The mechanism for implementing the Sharia Supervisory Board Meeting can be explained as follows:

1. DPS meetings are held periodically at least once a month or if deemed necessary, meetings can be held more quickly as needed.
2. Meeting invitations are submitted by the Sharia Consultation Department to each DPS a maximum of 2 (two) days before the meeting is held.
3. Meetings can be conducted physically, teleconference, and/or other electronic media.

- Rapat yang tidak dihadiri secara fisik dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- Rapat dipimpin oleh Ketua DPS, dalam hal Ketua DPS tidak hadir maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota DPS lain.
- Pengambilan keputusan dalam Rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dianggap sah serta mengikat apabila dihadiri dan disetujui minimal 2 (dua) DPS yang sedang menjabat.
- Keputusan rapat DPS dituangkan ke dalam lembar opini DPS/Risalah Rapat/dokumen lain yang dapat dipersamakan dengan itu, sebagai bukti sah keputusan yang diambil.
- Lembar opini DPS/Risalah Rapat dibuat oleh Departemen Konsultasi Syariah dan kemudian ditandatangani oleh ketua DPS dan seluruh anggota DPS yang hadir.
- Lembar opini DPS/Risalah Rapat diadministrasikan dengan baik oleh Departemen Konsultasi Syariah.

- Meetings that are not physically attended can be conducted through teleconference, video conference or other electronic media facilities that allow all meeting participants to see and hear each other directly and participate in the meeting.
- The meeting is chaired by the DPS Chairman, If the DPS Chairman is not present, the meeting is chaired by another DPS member.
- Decision making in the DPS Meeting is carried out based on deliberation for consensus and is considered valid and binding if attended and approved by at least 2 (two) incumbent DPS.
- DPS meeting decision is poured into the DPS opinion sheet/Minutes of Meeting/other documents that can be equated with it, as valid evidence of the decisions taken.
- The DPS opinion sheet/Minutes of Meeting is prepared by the Sharia Consultation Department and then signed by the DPS chairman and all DPS members present.
- The DPS opinion sheet/Minutes of Meeting is properly administered by Syariah Advisory.

Keanggotaan dan Profil DPS

Hingga 31 Desember 2024, DPS LPEI terdiri dari seorang Ketua Dewan dan seorang anggota. Rincian profil DPS dapat dilihat berikut ini:

DPS Membership and Profile

Until December 31, 2024, DPS of Indonesia Eximbank consists of a Chairman of Board and one member. Details of the DPS profile can be seen below:

Kanny Hidayat, SE., MA Ketua Dewan Pengawas Syariah Chairman of Sharia Supervisory Board	
Usia Age	58 tahun 58 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0024.02/KDE/08/2023 Executive Director Decree No. 0024.02/KDE/08/2023
Periode Jabatan Term of Office	1 Agustus 2023 – 31 Juli 2026 August 1, 2023 - July 31, 2026
Riwayat Pendidikan Educational Background	- Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Indonesia (1993). - Magister Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta (2004) - Bachelor of Economics in Accounting, University of Indonesia (1993) - Master of Islamic Economics at Syarif Hidayatullah State Islamic University (UIN), Jakarta (2004)
Riwayat Karier Career Background	- Anggota Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional (2000 – sekarang) - Ketua Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (2012 – Sekarang) - Ketua Dewan Pengawas Syariah di PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (2020 – Sekarang) - Dewan Pengawas Syariah di PT Asuransi Mega Umum (2006 – Sekarang) - Anggota Dewan Pengawas Syariah di PT AXA Mandiri Financial Services (2012 – 2023) - Member of Daily Executive Board – National Sharia Council (2000 – present) - Chairman of Sharia Supervisory Board – Indonesia Eximbank (2012 – Present) - Chairman of Sharia Supervisory Board - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (2020 – Present) - Sharia Supervisory Board – PT Asuransi Mega Umum (2006 – Present) - Member of Sharia Supervisory Board – PT AXA Mandiri Financial Services (2012 – 2023)
Sertifikasi Certification	Tidak Ada None

Dr. Yulizar D. Sanrego Mec Anggota DPS Member of Sharia Supervisory Board		
Usia Age	51 tahun 51 years old	
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia Indonesian	
Domisili Domicile	Jakarta	
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0024.02/KDE/08/2023 Executive Director Decree No. 0024.02/KDE/08/2023	
Periode Jabatan Term of Office	1 Agustus 2023 – 31 Juli 2026 August 1, 2023 – July 31, 2026	
Riwayat Pendidikan Educational Background	- Sarjana Ekonomi Islam (Muamalah) dari Universitas Djuanda, Indonesia (tahun lulus) - Magister Ekonomi dan Pembiayaan Islam dari International Islamic University Malaysia (tahun lulus) - Doktor Ekonomi Islam dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta (tahun lulus) - Bachelor Degree in Islamic Economy (Muamalah) from Universitas Djuanda, Indonesia (graduation year) - Master's Degree in Islamic Economy & Finance from International Islamic University Malaysia (graduation year) - Doctorate degree in Islamic Economy from Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta (graduation year)	
Riwayat Karier Career Background	- Head Department of Islamic Economics di Tazkia Islamic Business School, Bogor - Indonesia (2005 – 2007) - Vice Chairman, Academic & Student Affairs di Tazkia Islamic Business School, Bogor-Indonesia (2006-2008) - Invited Researcher (Fellow Researcher) di Center for Central Banking Education and Studies, Bank Indonesia (PPSK-BI) (2006 – 2008) - Kepala Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) di STEI Tazkia (2009 – 2017) - Anggota Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional di Majelis Ulama Indonesia (2011 – sekarang) - Anggota Dewan Pengawas Syariah di Panin Asset Management (2011 – 2016) - Anggota Dewan Pengawas Syariah di Bank CIMB Niaga Syariah (2013 – sekarang) - Ketua Dewan Pengawas Syariah di BPRS Bogor Tegar Beriman (2016 – sekarang) - Penasehat/Peneliti Ekonomi dan Keuangan Islam di Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA), Kerajaan Arab Saudi (2017-2019) - Ketua Dewan Pengawas Syariah di PBMT Ventura (2019-sekarang) - Dosen di Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo (2019 – sekarang) - Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (2012 – Sekarang) - Ketua Dewan Pengawas Syariah di Bank Jago (2021 – sekarang) - Head Department of Islamic Economics-Tazkia Islamic Business School, Bogor -Indonesia (2005-2007) - Vice Chairman, Academic & Student Affairs - Tazkia Islamic Business School, Bogor-Indonesia (2006-2008) - Invited Researcher (Fellow Researcher) at Centre for Central banking Education and Studies, Central Bank of Indonesia (PPSK-BI) (2006- 2008) - Head of Institute for Research and Community Empowerment (LPPM) STEI Tazkia (2009-2017) - Member of Executive Board of the National Sharia Council - Indonesian Ulema Council (2011 - present) - Member of Sharia Supervisory Board of Panin Asset Management (2011- 2016) - Member of Sharia Supervisory Board of Bank CIMB Niaga Syariah (2013 - present) - Chairman of Sharia Supervisory Board of BPRS Bogor Tegar Beriman (2016-present) - Advisor/Researcher on Islamic Economics and Finance, Saudi Arabian Monetary Authority - SAMA, Kingdom of Saudi Arabia (2017-2019) - Chairman of Sharia Supervisory Board of PBMT Ventura (2019-present) - Lecturer at Darussalam Gontor University - Ponorogo (2019 - present) - Sharia Supervisory Board of Indonesia Eximbank (2012 – Present) - Chairman of Sharia Supervisory Board of Bank Jago (2021 – Present)	
Sertifikasi Certification	Dewan Pengawas Syariah (DPS) – BPRS, DSN-MUI & Bank Indonesia, Jakarta (2010)	

Rapat DPS

Sepanjang tahun 2024, DPS LPEI telah melaksanakan rapat sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan membahas sebanyak 41 (empat puluh satu) agenda, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

DPS Meeting

Throughout 2024, DPS of Indonesia Eximbank has held as many as 22 (twenty two) meetings by discussing 41 (fourty one) agendas, with the following attendance rates:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Kanny Hidayat	Ketua Chairman	22	22	100%
Dr. Yulizar D. Sanrego	Anggota Member	22	22	100%

Dalam rapat-rapat tersebut, DPS membahas berbagai agenda yang dirinci dalam tabel berikut:

In these meetings, DPS discussed the agendas as described in the following table:

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	3 Januari 2024 January 3, 2024	Penyampaian Usulan <i>Sample</i> Uji Petik Kepatuhan Syariah Periode Q1 2024 Submission of Sharia Compliance Sample Proposal for Q1 2024
2	19 Januari 2024 January 19, 2024	Penyampaian Pembahasan Lanjutan DHE Syariah Submission of Further Discussion on Sharia DHE
3	13 Februari 2024 February 13, 2024	Penyampaian Hasil Uji Petik Kepatuhan Syariah Periode Q1 2024 Submission of Sharia Compliance Sample Results for Q1 2024
4	13 Februari 2024 February 13, 2024	Ratifikasi Opini DPS tentang <i>Refinancing</i> Pembiayaan Dengan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dengan objek berupa Aset Nasabah yang Sedang Disewa Pihak Lain Ratification of DPS Opinion on Refinancing of Financing with Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) with the object being Customer Assets Being Leased by Other Parties
5	13 Februari 2024 February 13, 2024	Konfirmasi Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) LPEI Confirmation of Concurrent Positions of Indonesia Eximbank Sharia Supervisory Board (DPS)
6	20 Maret 2024 March 20, 2024	Update rencana pengembangan skema akad Salam menjadi rangkaian fasilitas <i>pre & post financing</i> Update on the development plan for Salam contract scheme into a series of pre & post financing facilities
7	20 Maret 2024 March 20, 2024	Rencana Sosialisasi Gebyar Ramadhan Keuangan Syariah 2024 OJK Plan for the Socialization of 2024 OJK Sharia Finance Celebration
8	20 Maret 2024 March 20, 2024	Penyampaian Informasi <i>Assessment</i> GCG BPKP – khusus bagian DPS Submission of BPKP GCG Assessment Information – specifically for the DPS section
9	20 Maret 2024 March 20, 2024	Informasi Profil Risiko Syariah Q4 2023 Sharia Risk Profile Information Q4 2023
10	19 April 2024 April 19, 2024	<i>Update</i> Informasi <i>Treaty</i> Reasuransi Syariah <i>The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit</i> (ICIEC) Update on Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC) Sharia Reinsurance Treaty Information
11	19 April 2024 April 19, 2024	Draft Skema Asuransi Pembiayaan Syariah <i>The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit</i> (ICIEC) Draft of Sharia Financing Insurance Scheme Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC)
12	19 April 2024 April 19, 2024	Pengajuan Sampel Uji Petik Kepatuhan Syariah Q2 2024 Submission of Sharia Compliance Sample Test Q2 2024
13	19 April 2024 April 19, 2024	Draft Struktur Fasilitas Pembiayaan Syariah PT. XXX Draft of Sharia Financing Facility Structure of PT. XXX
14	3 Mei 2024 May 3, 2024	Pembahasan Materi Laporan Hasil Pengawasan DPS Periode Q1 2024 Discussion of Supervisory Report Materials of DPS Period Q1 2024
15	3 Mei 2024 May 3, 2024	Pendanaan UUS LPEI dari <i>The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector</i> (ICD)/ <i>The Islamic Development Bank</i> (IsDB) dengan Skema Commodity Murabahah Funding of UUS LPEI from Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD)/The Islamic Development Bank (IsDB) with the Commodity Murabahah Scheme
16	20 Juni 2024 June 20, 2024	Pengajuan Sampel Uji Petik Kepatuhan Syariah Q2 2024 Submission of Samples of Sharia Compliance Random Test Q2 2024
17	20 Juni 2024 June 20, 2024	Usulan Penyesuaian Komponen Biaya Riil untuk Menentukan Biaya Administrasi Pembiayaan Syariah Proposal of Adjustment of Real Cost Components to Determine Sharia Financing Administration Costs
18	20 Juni 2024 June 20, 2024	Biaya Pembukaan LC Syariah dalam Bentuk Persentase atau Rumus tertentu Sharia LC Opening Fee in the Form of a Percentage or Certain Formula
19	16 Juli 2024 July 16, 2024	Pengajuan Sampel Uji Petik Kepatuhan Syariah Q3 2024 Submission of Samples of Sharia Compliance Random Test Q3 2024
20	16 Juli 2024 July 16, 2024	Penyesuaian Komponen Biaya Administrasi Syariah (<i>mandatory</i> setiap 2 tahun) Adjustment of Sharia Administration Cost Components (<i>mandatory</i> every 2 years)
21	16 Juli 2024 July 16, 2024	Pembahasan Biaya Pembukaan <i>Letter of Credit</i> (LC) Syariah Discussion of Sharia Letter of Credit (LC) Opening Fees

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
22	16 Juli 2024 July 16, 2024	Ratifikasi Pakta Integritas DPS LPEI 2024 Ratification of the Integrity Pact of DPS Indonesia Eximbank 2024
23	29 Juli 2024 July 29, 2024	Penyampaian Tingkat Profil Risiko Unit Syariah Periode Semester I 2024 (pemenuhan POJK 9/2022) Submission of the Risk Profile Level of Sharia Unit for Semester I 2024 (compliance with POJK 9/2022)
24	29 Juli 2024 July 29, 2024	Ratifikasi Opini DPS tentang Biaya Administrasi Pembiayaan Syariah Periode 2024 – 2026 Ratification of DPS Opinion on Sharia Financing Administration Expenses for Period 2024 – 2026
25	29 Juli 2024 July 29, 2024	Pemberian Potongan Piutang Murabahah an PT. XXX (SIP) (pemenuhan temuan audit OJK) Granting of Murabahah Receivable Discount in the name of PT. XXX (SIP) (fulfillment of OJK audit findings)
26	02 Agustus 2024 August 02, 2024	Pengakuan Pencatatan Dana Hibah Bersyarat (dalam rangka pengembangan <i>core system</i>) Recognition of Recording of Conditional Grant Funds (in the context of developing the core system)
27	02 Agustus 2024 August 02, 2024	Update Klausula Pada Template Dokumen Pembiayaan Akad MMQ (pemenuhan temuan OJK) Update Clauses in the MMQ Contract Financing Document Template (fulfillment of OJK findings)
28	02 Agustus 2024 August 02, 2024	Penyampaian Hasil Temuan Audit OJK terkait Syariah & Rencana Tindak Lanjut Submission of OJK Audit Findings related to Sharia & Follow-up Action Plan
29	19 Agustus 2024 August 19, 2024	Pengakuan Dana Ta'widh & Ta'zir Recognition of Ta'widh & Ta'zir Funds
30	19 Agustus 2024 August 19, 2024	Konversi Dana Sosial dari US Dollar ke Rupiah Conversion of Social Funds from US Dollar to Rupiah
31	19 Agustus 2024 August 19, 2024	Ratifikasi Persetujuan Akta Pengakuan Utang a.n PT. XXX sebagai skema penyelesaian pembiayaan bermasalah Ratification of Approval of Debt Acknowledgement Deed in the name of PT. XXX as a problematic financing settlement scheme
32	09 September 2024 September 09, 2024	Penyampaian Hasil Uji Petik Kepatuhan Syariah Periode Q3 2024 Submission of Sharia Compliance Scatter Test Results for Q3 2024 Period
33	09 September 2024 September 09, 2024	Pengakuan Imbal Hasil setelah Masa Perjanjian Pembiayaan Musyarakah dan/atau Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Berakhir Recognition of Returns after Musyarakah Financing Agreement Period and/or Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Ends
34	18 September 2024 September 18, 2024	Pengakuan Imbal Hasil Setelah Masa Perjanjian Pembiayaan Berakhir (dalam rangka pengembangan <i>core system</i>) Recognition of Returns after the Financing Agreement Period Ends (in the context of developing the core system)
35	23 Oktober 2024 October 23, 2024	Penyaluran dana Sosial (Dana Ta'zir) Melalui Program LPEI Peduli dan/atau CSR LPEI Distribution of Social Funds (Ta'zir Funds) Through Indonesia Eximbank Peduli Program and/or Indonesia Eximbank CSR
36	23 Oktober 2024 October 23, 2024	Penyampaian Strategi Bisnis Syariah LPEI Submission of LPEI Sharia Business Strategy
37	12 November 2024 November 12, 2024	Usulan <i>Sample</i> Uji Petik Q4 2024 Proposed Sample Scatter Test Q4 2024
38	12 November 2024 November 12, 2024	Pencatatan akuntansi dalam restrukturisasi IMBT Accounting Recording in IMBT Restructuring
39	18 Desember 2024 December 18, 2024	Penyampaian profil Risiko UUS Q3 2024 Submission of UUS Risk Profile Q3 2024
40	18 Desember 2024 December 18, 2024	Penyampaian hasil uji petik Q4 2024 Submission of Scatter Test Results Q4 2024
41	18 Desember 2024 December 18, 2024	Rencana Kerja DPS 2025 DPS Work Plan 2025

Program Pengembangan Kompetensi Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, DPS terus meningkatkan kapabilitasnya melalui berbagai pelatihan dan program pengembangan kompetensi. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Dewan Direktur Board of Directors Name	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Judul Pelatihan Training Title	Penyelenggara Organizer
Kanny Hidayat	11-13 September 2024 September 11-13, 2024	Workshop Pra-Ijtima' Sanawi dan Ijtima' (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah (DPS) IX Tahun 2024 Pre-Ijtima' Sanawi Workshop and Ijtima' (Annual Meeting) of the Sharia Supervisory Board (DPS) IX in 2024	DSN-MUI
Dr. Yulizar D. Sanrego	11-13 September 2024 September 11-13, 2024	Workshop Pra-Ijtima' Sanawi dan Ijtima' (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah (DPS) IX Tahun 2024 Pre-Ijtima' Sanawi Workshop and Ijtima' (Annual Meeting) of the Sharia Supervisory Board (DPS) IX in 2024	DSN-MUI

Competency Development Program in 2024

Throughout 2024, DPS continues to improve its capabilities through various training and competency development programs. This effort aims to strengthen effectiveness in carrying out duties and responsibilities, with the following details:

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS 2024

DPS melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap berbagai aspek operasional yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Setelah menyelesaikan proses pengawasan, DPS menyusun Laporan Hasil Pengawasan per Kuartal yang berisi pembahasan hasil rapat, opini Syariah, hasil uji petik, rekomendasi, dan penilaian terhadap ketaatan terhadap prinsip syariah. Laporan tersebut kemudian disampaikan secara resmi kepada Direktur Eksekutif sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi, serta untuk memberikan informasi yang dapat digunakan dalam meningkatkan kualitas implementasi prinsip syariah di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Proses ini berfungsi sebagai alat penting untuk memastikan kesesuaian dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas operasional LPEI. Pada tahun 2024, DPS telah empat kali menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan per kuartal kepada Direktur Eksekutif ditembuskan kepada Dewan Direktur, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

Report on Implementation of DPS Duties and Responsibilities in 2024

DPS evaluates and supervises various operational aspects related to sharia principles at the Indonesian Export Financing Agency. After completing the supervision process, DPS prepares a Quarterly Supervision Report containing discussion of meeting results, Sharia opinion, results of the sharia test, recommendations, and assessment of compliance with sharia principles. The report is then officially submitted to the Executive Director as a form of accountability and transparency, as well as to provide information that can be used to improve the quality of the implementation of sharia principles in the Indonesia Export Financing Agency. This process serves as an important tool to ensure suitability and compliance with sharia principles in LPEI's operational activities. In 2024, the DPS has submitted four quarterly Supervisory Reports to the Executive Director, copied to the Board of Directors, as described in the following table:

No	Tanggal Laporan Report Date	Judul Laporan Report Title
1	5 April 2024 April 5, 2024	Laporan Hasil Pengawasan DPS periode Kuartal I Tahun 2024 Report on DPS Supervision Results for Quarter I of 2024
2	5 Juli 2024 July 5, 2024	Laporan Hasil Pengawasan DPS periode Kuartal II Tahun 2024 Report on DPS Supervision Results for Quarter II of 2024
3	1 Oktober 2024 October 1, 2024	Laporan Hasil Pengawasan DPS periode Kuartal II Tahun 2024 Report on DPS Supervision Results for Quarter II of 2024
4	6 Januari 2025 January 6, 2025	Laporan Hasil Pengawasan DPS periode Kuartal IV Tahun 2024 Report on DPS Supervision Results for Quarter IV of 2024

Sepanjang tahun 2024, DPS telah melakukan realisasi program kerja antara lain:

1. Melakukan 22 (dua puluh dua) kali rapat yang mayoritas dilakukan secara daring untuk membahas mengenai fitur produk syariah, Dana Ta'widh & Ta'zir, uji petik nasabah Syariah eksisting, *Letter of Credit* (LC) Syariah, restrukturisasi pembiayaan syariah, profil risiko Syariah, Rencana Kerja DPS dan lain sebagainya .
2. Menghadiri Pra-Ijtima' Sanawi dan Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) DPS Lembaga Keuangan Syariah yang diselenggarakan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia.
3. Melakukan review kepatuhan syariah melalui metode uji petik sampel pembiayaan syariah sebanyak 8 (delapan) sampel nasabah.
4. Menyampaikan Laporan Pengawasan DPS kepada Direktur Eksekutif periode:
5. Laporan Hasil Pengawasan DPS periode Kuartal I Tahun 2024.
 - a. Laporan Hasil Pengawasan DPS periode Kuartal II Tahun 2024.
 - b. Laporan Hasil Pengawasan DPS periode Kuartal III Tahun 2024.
 - c. Laporan Hasil Pengawasan DPS periode Kuartal IV Tahun 2024.

Throughout 2024, DPS has realized work programs including :

1. Holding 22 (twenty-two) meetings, the majority of which were conducted online to discuss sharia product features, Ta'widh & Ta'zir Funds, spot checks on existing sharia customers, Sharia Letter of Credit (LC), sharia financing restructuring, sharia risk profiles, DPS Work Plans and so on.
2. Attending the Pre-Ijtima' Sanawi and Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) of the Sharia Financial Institution DPS organized by the National Sharia Council, Indonesian Ulema Council.
3. Conducting a sharia compliance review through the spot check method of sharia financing samples of 8 (eight) customer samples.
4. Submitting DPS Supervision Report to the Executive Director for the period:
5. DPS Supervision Results Report for Quarter I of 2024.
 - a. DPS Supervision Result Report for Quarter II of 2024.
 - b. DPS Supervision Result Report for Quarter III of 2024.
 - c. DPS Supervision Result Report for Quarter IV of 2024.

Transparansi Informasi Tentang Dewan Direktur, Direktur Eksekutif Dan Direktur Pelaksana, Dan Dewan Pengawas Syariah

Transparency of Information About Board of Directors, Executive Director, and Managing Directors

Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana, dan Dewan Pengawas Syariah

Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Direktur tertuang dalam Pasal 25 UU no 2 Tahun 2009, komposisi Dewan Direktur sebagai berikut:

1. 3 (tiga) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi fiskal, 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi perdagangan, 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi perindustrian, dan 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi pertanian.
2. Paling banyak 3 (tiga) orang yang berasal dari luar LPEI dan 1 (satu) orang dari dalam LPEI

Kebijakan keberagaman komposisi Direktur Pelaksana tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Dewan Direktur nomor 0005/PDD/07/2024 sebagai berikut:

1. Direktur Pelaksana berjumlah paling banyak 5 (lima) orang.
2. Direktur Pelaksana paling banyak 4 (empat) orang berasal dari dalam LPEI.

Penilaian Kepada Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana, dan Dewan Pengawas Syariah

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif – Direktur Pelaksana didasarkan pada mandat LPEI sebagaimana diatur dalam UU No. 2/2009. Setiap tahun, Menteri Keuangan RI menetapkan Kontrak Manajemen yang berisi Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target yang harus dicapai oleh Dewan Direktur, termasuk Direktur Eksekutif – Direktur Pelaksana. IKU tersebut disusun dengan mempertimbangkan mandat LPEI serta berbagai faktor strategis lainnya.

Diversity Policy Composition of Board of Directors, Executive Director and Managing Directors

The policy of diversity in the composition of the Board of Directors is contained in Article 25 of Law no 2 of 2009, the composition of the Board of Directors is as follows:

1. 3 (three) officials from agencies or institutions in charge of fiscal affairs, 1 (one) official from agencies or institutions in charge of trade, 1 (one) official from agencies or institutions in charge of industry, and 1 (one) official from agencies or institutions in charge of agriculture.
2. At most 3 (three) persons from outside LPEI and 1 (one) person from within LPEI

The policy on the diversity of the composition of the Managing Director is contained in Article 2 of the Board of Directors Regulation number 0005/PDD/07/2024 as follows:

1. Managing Director is at most 5 (five) people.
2. The Managing Director of at most 4 (four) people comes from within LPEI.

Assessment of Board of Directors, Executive Director and Managing Directors

Performance Assessment Procedure

The performance assessment of Board of Directors and Executive Director is based on the Indonesia Eximbank mandate as stipulated in Act No. 2/2009. The Minister of Finance of the Republic of Indonesia annually establishes a Management Contract containing Key Performance Indicators (KPIs) and targets to be achieved by Board of Directors, including Executive Director. The KPIs are formulated by considering the Indonesia Eximbank mandate and various other strategic factors.

Pelaksanaan Penilaian dan Pihak yang Melakukan Penilaian

Kinerja Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana, dan Dewan Pengawas Syariah LPEI dinilai oleh tim penilai independen yang dibentuk oleh Menteri Keuangan RI saat pelaksanaan RKAT. Penilaian tersebut didasarkan pada pencapaian target dalam IKU sebagai tolok ukur kinerja Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI.

Kriteria Penilaian Kinerja

Kinerja Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana, dan Dewan Pengawas Syariah LPEI dinilai berdasarkan 4 (empat) perspektif utama, yaitu:

1. **Perspektif Mandat dan Keuangan**
Mengukur pencapaian pelaksanaan mandat dan kinerja keuangan LPEI. Pada sisi mandat di antaranya adalah pertumbuhan pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan *trade finance*. Selain itu, mengukur pencapaian efektivitas pelaksanaan penugasan khusus LPEI. Pada sisi keuangan diantaranya adalah laba bersih dan rasio *Net Interest Margin* (NIM) LPEI. Kriteria ini penting untuk memastikan bahwa LPEI mampu menjalankan mandatnya dengan baik, yaitu mendukung pengembangan ekspor Indonesia.
2. **Perspektif Stakeholder dan Customer**
Mengukur pencapaian LPEI dalam peningkatan peran LPEI dalam mengembangkan UMKM, kegiatan *joint program*, peningkatan peran LPEI sebagai daya ungkit ekspor nasional, dan peningkatan penyaluran fasilitas melalui kolaborasi ekosistem ekspor. Kriteria ini penting untuk memastikan bahwa LPEI dapat memberikan layanan yang berkualitas kepada nasabah dan dapat mencapai target-target strategisnya.
3. **Perspektif Proses Bisnis Internal**
Mengukur pencapaian LPEI dalam memperbaiki proses bisnis internalnya, seperti perbaikan kualitas aset, penyempurnaan *risk awareness*, pemenuhan tindak lanjut temuan audit, penyelesaian aset bermasalah secara inorganik, dan penguatan teknologi, operasional, dan *Management Information System* (MIS). Kriteria ini penting untuk memastikan bahwa LPEI dapat memperbaiki proses bisnis internalnya sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia.
4. **Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan**
Mengukur pencapaian LPEI dalam pemenuhan sumber daya manusia yang berkompeten dan berkinerja tinggi serta penguatan budaya kerja LPEI. Kriteria ini penting untuk memastikan bahwa LPEI memiliki sumber daya yang berkualitas sehingga dapat memberikan kontribusi yang baik bagi kemajuan ekspor Indonesia.

Assessment and Assessor

The performance of the LPEI Board of Directors and Managing Director is assessed by an independent assessment team formed by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia during the implementation of the RKAT. The assessment is based on the achievement of targets in the KPI as a benchmark for the performance of the LPEI Board of Directors and Managing Director.

Performance Assessment Criteria

The performance of Board of Directors, Executive Director, and Managing Directors of Indonesia Eximbank is assessed based on 4 (four) main perspectives, namely:

1. **Mandate and Financial Perspective**
Measuring the achievement of Indonesia Eximbank's mandate implementation and financial performance. On the mandate side, it includes measuring the growth of financing, guarantees, insurance, and trade finance. Additionally, it measures the effectiveness of Indonesia Eximbank's special assignments implementation. On the financial side, it includes net profit and Indonesia Eximbank's Net Interest Margin (NIM) ratio. This criterion is important to ensure that Indonesia Eximbank can fulfill its mandate effectively, supporting the development of Indonesia's exports.
2. **Stakeholder and Customer Perspective**
Measuring Indonesia Eximbank's achievements in enhancing its role in developing MSMEs, joint program activities, enhancing Indonesia Eximbank's role as a lever for national exports, and increasing facility distribution through export ecosystem collaborations. This criterion is essential to ensure that Indonesia Eximbank can provide quality services to its customers and achieve its strategic targets.
3. **Internal Business Process Perspective**
Measuring Indonesia Eximbank's achievements in improving its internal business processes, such as improving asset quality, enhancing risk awareness, fulfilling follow-up actions from audit findings, resolving problematic assets inorganically, and strengthening technology, operations, and Management Information System (MIS). This criterion is important to ensure that Indonesia Eximbank can enhance its internal business processes to significantly contribute to Indonesia's economy.
4. **Learning and Growth Perspective**
Measuring Indonesia Eximbank's achievements in fulfilling competent and high-performing Human Capital and strengthening Indonesia Eximbank's work culture. This criterion is crucial to ensure that Indonesia Eximbank has high-quality Human Capital to make a significant contribution to the progress of Indonesia's exports.



Capaian Kinerja Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif Tahun 2024

Evaluasi pencapaian Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif tahun 2024 berdasarkan IKU disajikan dalam tabel berikut:

Performance Achievements of Board of Directors and Executive Director in 2024

The assessment achievement of Board of Directors and Executive Director in 2024 based on Key Performance Indicators (KPI) is presented in the following table:

Tabel Hasil Capaian Kinerja Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif Tahun 2024
2024 Board of Directors and Executive Director Performance Result Table

Sasaran Strategis Strategic Goals	No	Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicators	Bobot weight	Realisasi Realization 2024	Target Target 2024	Capaian Achievement 2024		
Perspektif Mandat dan Keuangan Mandate and Financial Perspective			37,5%			93%		
IEB-1	Penugasan Umum General Assignment	1	Pelaksanaan Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) berupa: Implementation of National Export Financing (PEN) in the form of:		20,0%	90%		
			a.	Pembiayaan <i>Good Bank</i> Kol 1 <i>Current</i> Col 1 Current Good Bank Financing	5,0%	29.163	31.745	92%
			b.	<i>Outstanding</i> Penjaminan Komersial Outstanding Commercial Guarantee	5,0%	6.585	10.175	65%
			c.	Volume Asuransi Insurance Volume	5,0%	10.859	13.187	82%
			d.	<i>Volume Trade Finance</i>	2,5%	21.554	16.344	120%
			e.	Persentase Pembiayaan UKME dan UMBE atas Pembiayaan <i>Good Bank</i> (Kol 1 Current) Percentage of UKME and UMBE Financing on Good Bank Financing (Col 1 Current)	2,5%	17,4%	12,1%	120%
IEB-2	Penugasan Khusus National Interest Account	2	Efektivitas Pelaksanaan Penugasan Khusus berupa: Effectiveness of National Interest Account in the form of:		12,5%	113%		
			a.	<i>New Disbursement</i> Penugasan Khusus (PKE) New Disbursement of National Interest Account (NIA)	2,5%	7.272	5.500	120%
			b.	Penciptaan atau penghematan devisa Foreign exchange creation or savings	5,0%	1,18	0,70	120%
			c.	Jumlah nasabah PKE kategori UKM Number of NIA customers in SME segment	2,5%	216	200	108%
			d.	Utilisasi program PKE Utilization of PKE program	2,5%	86%	90%	96%
IEB-3	Perbaikan kinerja keuangan yang berkelanjutan Continued improvement in financial performance	3	Optimalisasi kinerja keuangan: Optimization of financial performance:		5,0%	59%		
			a.	<i>Pre-Provisioning Operating Profit</i> (PPoP)	2,5%	296	599	49%
			b.	<i>Net Interest Margin</i> (NIM)	2,5%	0,9%	1,3%	68%
Perspektif Stakeholder dan Customer Stakeholder and Customer Perspective			17,5%			106%		
IEB-4	Penguatan Jasa Konsultasi Strengthening Advisory Services	4	Peningkatan peran LPEI dalam mengembangkan UMKM melalui: Increasing the role of Indonesia Eximbank in developing MSMEs through:		7,5%	113%		
			a.	Peningkatan jumlah eksportir baru Increased number of new exporters	2,5%	484	400	120%
			b.	Peningkatan jumlah Desa Devisa Increased number of Go Export Villages	2,5%	928	750	120%
			c.	Indeks Efektifitas Expo/Pameran Internasional International Expo/Exhibition Effectiveness Index	2,5%	4,3	3,5	100%

Tabel Hasil Capaian Kinerja Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif Tahun 2024

2024 Board of Directors and Executive Director Performance Result Table

Sasaran Strategis Strategic Goals	No	Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicators	Bobot weight	Realisasi Realization 2024	Target Target 2024	Capaian Achievement 2024
Optimalisasi Sinergi BUMN/ Lembaga Kementerian Keuangan Optimization of SOE/Agency Synergy Ministry of Finance	5	Kegiatan <i>Joint Program</i> yang melibatkan seluruh BUMN/ Lembaga di bawah Kementerian Keuangan Joint Program activities involving all SOEs / Institutions under the Ministry of Finance	2,5%	1	1	100%
Peningkatan daya ungkit kepada ekspor nasional Increased leverage to national exports	6	Peningkatan peran LPEI sebagai daya ungkit ekspor nasional: Increased role of Indonesia Eximbank as national export leverage:	5,0%			100%
		a. <i>Developmental Impact</i> LPEI terhadap Ekspor barang Developmental Impact of Indonesia Eximbank on Exports of goods	2,5%	4,2	4,2	100%
		b. <i>Developmental Impact</i> LPEI terhadap kegiatan jasa konsultasi Indonesia Eximbank Developmental Impact on advisory services activities	2,5%	1,40	1,40	100%
Kolaborasi dengan Ekosistem Ekspor Collaboration with Export Ecosystem	7	Peningkatan penyaluran fasilitas melalui kerja sama kolaborasi ekosistem ekspor Increased facility disbursement through export ecosystem collaboration	2,5%	100%	100%	100%
Perspektif Proses Bisnis Internal Internal Business Process Perspective			35,0%			96%
Perbaikan Kualitas Aset Asset Quality Improvement			22,5%			93%
Perbaikan kualitas aset Asset quality improvement	8	Terlaksananya perbaikan kualitas aset Lembaga berupa: Implementation of improvements in asset quality:	22,5%			93%
	a.	Rasio NPL Netto Net NPL Ratio	7,5%	4,52%	4,46%	99%
	b.	Rasio NPL Gross Gross NPL Ratio	7,5%	29,07%	26,04%	88%
	c.	Optimalisasi perbaikan kualitas aset Optimization of asset quality improvement	7,5%	92%	100%	92%
		• <i>Collection</i> Pokok Collection	2,5%	892	588	120%
		• <i>Recovery</i> dari <i>write off</i> Recovery from write off	2,5%	135	227	60%
		• Hapus Buku Write Off	2,5%	15.892	16.249	98%
Proses Bisnis Internal Internal Business Process			12,5%			102%
Penyempurnaan <i>risk awareness</i> dan <i>compliance</i> Enhancement of risk awareness and compliance	9	Tingkat <i>maturity</i> penerapan manajemen risiko Maturity level of risk management implementation	2,5%	4,04	4,0	120%
Pemenuhan tindak lanjut temuan audit Fulfillment of audit findings	10	Pemenuhan tindak lanjut temuan audit internal, eksternal, dan arahan Kementerian Keuangan Fulfillment of follow-up on internal and external audit findings and Ministry of Finance directions	2,5%	100%	100%	100%

Tabel Hasil Capaian Kinerja Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif Tahun 2024

2024 Board of Directors and Executive Director Performance Result Table

Sasaran Strategis Strategic Goals	No	Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicators	Bobot weight	Realisasi Realization 2024	Target Target 2024	Capaian Achievement 2024
IEB-11 Proses operasional yang efisien dan efektif Efficient and effective operational processes	11	Pemenuhan ketercapaian <i>Project Management Initiative</i> Fulfillment of Project Management Initiative achievement	2,5%	91%	100%	91%
	12	Penguatan infrastruktur dan arsitektur Teknologi Informasi Strengthening IT Infrastructure and Architecture	5,0%	100%	100%	100%
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Learning and Growth Perspective			10,0%			117%
IEB-12 Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dan berkinerja tinggi High Performing and Competent Human Resources	13	Pemenuhan kapabilitas dan <i>succession plan</i> untuk posisi kunci Fulfillment of capabilities and succession plan for key positions	5,0%	113%	100%	113%
IEB-13 Penguatan budaya kerja Lembaga Strengthening Corporate Culture	14	Pengukuran kesesuaian perilaku pegawai terhadap budaya lembaga Measurement of employee behavior to corporate culture	5,0%	120%	100%	120%
Total			100%			99%

Berdasarkan ketentuan PMK No. 157/PMK.06/2018, realisasi capaian setiap IKU ditetapkan dengan rentang antara 0% hingga maksimal 120%. Total bobot kontrak kinerja (IKU) adalah 100%, yang terdiri dari perspektif mandat dan keuangan dengan bobot 35%; perspektif *stakeholder* dan *customer* 20%; perspektif proses bisnis internal 35% dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 10%.

Berikut ini adalah pencapaian kinerja manajemen tahun 2024, yaitu:

Based on the Minister of Finance Regulation No. 157/PMK.06/2018, realization of achievement of each KPI is set at a range between 0% to a maximum of 120%. Total weight of performance contracts (IKU) is 100%, consisting of a mandate and financial perspective with a weighting of 35%; a stakeholder and customer perspective of 20%; an internal business process perspective of 35% and a learning and growth perspective of 10%.

The following are the management performance achievements in 2024:

Perspektif Perspective	Bobot (%) Weight	Skor (%) Score
Perspektif Mandat dan Keuangan Mandate and Financial Perspective	35%	93%
Perspektif <i>Stakeholder</i> dan <i>Customer</i> Stakeholder and Customer Perspective	20%	106%
Perspektif Proses Bisnis Internal Internal Business Process Perspective	35%	96%
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Learning and Growth Perspective	10%	117%
Total	100%	99%

Kebijakan Nominasi bagi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana, dan Dewan Pengawas Syariah

Kebijakan Nominasi

Kebijakan nominasi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana, dan Dewan Pengawas Syariah LPEI dirancang untuk memastikan bahwa proses nominasi anggota dilakukan secara transparan, akuntabel, dan adil. Selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk menjamin bahwa individu yang terpilih sebagai Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI memiliki kompetensi, pengalaman, serta integritas yang tinggi.

Prosedur Nominasi

Nominasi Dewan Direktur dilakukan berdasarkan penunjukan Menteri Keuangan (KMK). Prosedur nominasi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI terdiri dari beberapa tahap. Informasi tentang tahapan nominasi tersebut dijelaskan secara lebih rinci dalam pembahasan tentang suksesi Direktur Pelaksana pada Bab Tata Kelola Perusahaan Subbab Komite Remunerasi dan Nominasi.

Nominasi Dewan Pengawas Syariah dilakukan melalui Keputusan Direktur Eksekutif berdasarkan keputusan rapat Dewan Direktur.

Kebijakan Remunerasi Dewan Direktur, Dewan Pengawas Syariah, serta Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana

Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi bagi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI didasarkan pada Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Ketentuan ini menyatakan bahwa gaji, penghasilan, dan tunjangan lainnya bagi Dewan Direktur serta Direktur Pelaksana LPEI ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI.

Lebih lanjut, besaran gaji pokok bagi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 396/KMK.06/2021 tentang Penetapan Gaji Pokok, Penghasilan, dan Tunjangan Lainnya bagi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI.

Pada kuartal 1 tahun 2025 ditetapkan ketentuan remunerasi bagi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penetapan Gaji Pokok, Penghasilan, dan Tunjangan Lainnya untuk Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 24 Februari 2025 yang berlaku retroaktif sejak tanggal 1 Januari 2024. Di dalam KMK tersebut ditetapkan penyesuaian besaran gaji pokok serta tunjangan dan penghasilan lainnya bagi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana.

Nomination Policy for Board of Directors and Executive Director and Managing Director

Nomination Policy

Nomination Policy for Board of Directors and Executive Director of Indonesia Eximbank is designed to ensure that the member nomination process is conducted in a transparent, accountable, and fair manner. In addition, this policy aims to ensure that individuals selected as Board of Directors and Executive Director of Indonesia Eximbank have high competence, experience, and integrity.

Nomination Procedure

The nomination of Board of Directors is based on appointment by the Minister of Finance (KMK). The nomination procedure for Board of Directors and Managing Director of Indonesia Eximbank consists of several stages. Information about the nomination stages is explained in more detail in the discussion about the succession of Managing Director in the Corporate Governance Chapter, Remuneration and Nomination Committee subchapter.

The nomination of Sharia Supervisory Board is carried out through a Decree of Executive Director based on the decision of Board of Directors meeting.

Remuneration Policy for the Board of Directors, Sharia Supervisory Board, and Executive Director and Managing Director

Remuneration Policy

The remuneration policy for Board of Directors and Managing Directors of Indonesia Eximbank is based on Article 26 paragraph (3) of Act No. 2 of 2009 concerning Indonesia Eximbank. This provision states that the salaries, incomes, and other benefits for Board of Directors and Managing Directors of Indonesia Eximbank are determined by the Indonesian Minister of Finance.

Furthermore, the basic salary amount for Board of Directors and Managing Director has been regulated in the Minister of Finance Decree No. 396/KMK.06/2021 concerning the Determination of Basic Salary, Income, and Other Allowances for Board of Directors and Managing Director of Indonesia Eximbank.

In the first quarter of 2025, the remuneration for Board of Directors, Executive Director and Managing Directors were stipulated through the Decree of Minister of Finance Number 40 of 2025 concerning the Determination of Basic Salary, Income, and Other Allowances for Board of Directors and Managing Directors of Indonesian Export Financing Institution dated February 24, 2025 which is retroactive since January 1, 2024. The KMK stipulates adjustments to the amount of basic salary and allowances and other income for Board of Directors and Managing Directors.

Sebagaimana dijelaskan dalam bagian Direktur Eksekutif pada laporan tahunan ini, Direktur Eksekutif LPEI merupakan salah satu anggota Dewan Direktur yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai Ketua Dewan Direktur. Oleh karena itu, prosedur penetapan remunerasi bagi Direktur Eksekutif mengikuti ketentuan yang berlaku untuk Dewan Direktur.

Sementara itu, penetapan remunerasi bagi Dewan Pengawas Syariah LPEI mengacu pada Risalah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Nomor MR.0002/KRN/02/2022 tanggal 24 Februari 2022.

Prosedur Penetapan Remunerasi

Proses penetapan remunerasi bagi Dewan Direktur, Dewan Pengawas Syariah, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana, dan LPEI dimulai dengan pengajuan usulan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi yang berada di bawah Dewan Direktur. Komite ini bertanggung jawab menyusun rancangan remunerasi bagi kedua pihak tersebut dengan berkoordinasi bersama unit kerja Sumber Daya Manusia.

Dalam tahap penyusunan, unit kerja Sumber Daya Manusia melakukan *benchmarking* terhadap penghasilan *Top Management* di industri perbankan dan lembaga keuangan non-bank. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa usulan remunerasi ditetapkan secara adil dan wajar, selaras dengan kinerja LPEI serta sesuai dengan standar yang berlaku di industri sejenis.

Benchmarking dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber. Hasil analisis tersebut menjadi dasar bagi Komite Remunerasi dan Nominasi dalam merancang skema remunerasi. Setelah disusun, rancangan tersebut diajukan ke Dewan Direktur untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan. Setelahnya, Dewan Direktur mengusulkan rancangan yang telah disetujui kepada Menteri Keuangan RI untuk penetapan akhir.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Direktur, Dewan Pengawas Syariah, dan Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana

Komite Remunerasi dan Nominasi Remuneration & Nomination Committee	→	Dewan Direktur Board of Directors	→	Komite Remunerasi dan Nominasi Remuneration & Nomination Committee
Memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur Provide recommendation to Board of Directors		Mengajukan usulan remunerasi kepada Menteri Keuangan Submit the Remuneration proposal to the Minister of Finance		- Melakukan evaluasi atas usulan remunerasi - Melakukan proses persetujuan - Menerbitkan putusan melalui Keputusan Menteri Keuangan - Evaluate the remuneration proposal - Perform the approval process - Issued the decision through the Minister of Finance Decree

As explained in the Executive Director section of this annual report, the Executive Director of LPEI is a member of the Board of Directors appointed by the Minister of Finance as Chairman of the Board of Directors. Therefore, the procedure for determining remuneration for the Executive Director follows the provisions applicable to the Board of Directors.

Meanwhile, the determination of remuneration for the LPEI Sharia Supervisory Board refers to the Minutes of the Remuneration and Nomination Committee Meeting Number MR.0002/KRN/02/2022 dated February 24, 2022.

Remuneration Determination Procedure

The procedure for determining remuneration for Indonesia Eximbank Board of Directors and Managing Directors begins with the remuneration proposal submitted by Remuneration and Nomination Committee. The Remuneration and Nomination Committee is one of the committees under Board of Directors responsible for drafting the remuneration for Board of Directors and Managing Directors of Indonesia Eximbank.

In preparing the draft remuneration, Human Capital held benchmarking of Top Management's income from the banking industry and non-bank financial institutions. This step aims to ensure that the proposed remuneration is set fairly and reasonably, in line with the Indonesia Eximbank's performance and in accordance with applicable standards in similar industries.

Benchmarking is done by collecting and analyzing data from various sources. The results of this analysis form the basis for Remuneration and Nomination Committee in designing a remuneration scheme. Once compiled, the draft is submitted to Board of Directors for discussion and approval. Afterwards, Board of Directors proposes the approved draft to the Indonesian Minister of Finance for final determination.

Remuneration Determination Procedure of Board of Directors and Managing Directors

Penetapan Remunerasi dalam Kaitannya dengan Penilaian Kinerja

Berdasarkan pencapaian kinerja pada tahun berjalan, Dewan Direktur, Dewan Pengawas Syariah, dan Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana menerima tantiem. Pemberian ini sejalan dengan Pasal 21 UU No. 2 Tahun 2009. Surplus yang diperoleh LPEI dalam satu tahun kegiatan digunakan untuk:

1. Cadangan umum;
2. Cadangan tujuan;
3. Jasa produksi dan tantiem; dan
4. Bagian laba pemerintah.

Penetapan remunerasi bagi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana, termasuk pemberian tantiem, didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 396/KMK.06/2021 tentang Penetapan Gaji Pokok, Penghasilan, dan Tunjangan Lainnya untuk Dewan Direktur serta Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Penetapan Jasa Produksi dan Tantiem dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. *Surplus*;
2. Capaian IKU;
3. Pelaksanaan penugasan Pemerintah; dan
4. Faktor-faktor lain yang relevan.

Pada kuartal 1 tahun 2025 ditetapkan ketentuan remunerasi bagi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penetapan Gaji Pokok, Penghasilan, dan Tunjangan Lainnya untuk Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 24 Februari 2025 yang berlaku retroaktif sejak tanggal 1 Januari 2024. Di dalam KMK tersebut ditetapkan komponen remunerasi yang mengacu kepada penilaian kinerja yaitu:

1. Tantiem, diberikan dari surplus LPEI dalam kurun waktu 1 tahun kegiatan;
2. Insentif, diberikan dalam rangka transformasi organisasi.

Sementara itu, penetapan remunerasi kepada Dewan Pengawas Syariah, dilakukan dengan usulan Komite Remunerasi dan Nominasi dan diputuskan oleh Dewan Direktur LPEI. Remunerasi yang diberikan kepada Dewan Pengawas Syariah adalah komponen *fix income* berupa honorarium bulanan dan tidak mencakup komponen terkait penilaian kinerja. Remunerasi kepada Dewan Pegawai Syariah yang saat ini berlaku ditetapkan di dalam Risalah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Nomor MR.0002/ KRN/02/2022 tanggal 24 Februari 2022.

Determination of Remuneration in Relation to Performance Assessment

Based on the performance achievements in the current year, Board of Directors, Executive Director, and Managing Directors receive tantiem. This provision is in line with Article 21 of Act No. 2 of 2009. The surplus obtained by Indonesia Eximbank in one year of activities is used for:

1. General reserve;
2. Purpose reserve;
3. Production services and tantiem; and
4. Government profit share.

The determination of remuneration for Board of Directors, Executive Director, and Managing Directors, including the granting of tantiem, is based on the Minister of Finance Decree Number 396/KMK.06/2021 concerning the Determination of Basic Salary, Income, and Other Allowances for Board of Directors and Managing Directors of Indonesia Eximbank.

The determination of Production Services and Tantiem is carried out by considering:

1. Surplus;
2. Achievement of KPIs;
3. Implementation of Government assignments; and
4. Other relevant factors.

In the first quarter of 2025, the remuneration provisions for the Board of Directors, Executive Director and Managing Director were stipulated through the Decree of the Minister of Finance Number 40 of 2025 concerning the Determination of Basic Salary, Income, and Other Allowances for the Board of Directors and Managing Director of the Indonesian Export Financing Agency dated February 24, 2025 which applies retroactively from January 1, 2024. The KMK stipulates the remuneration components that refer to performance assessment, namely:

1. Tantiem, given from LPEI surplus within 1 year of activity;
2. Incentives, given in the context of organizational transformation.

Meanwhile, the determination of remuneration to the Sharia Supervisory Board is carried out with the proposal of the Remuneration and Nomination Committee and decided by the LPEI Board of Directors. Remuneration given to the Sharia Supervisory Board is a fixed income component in the form of a monthly honorarium and does not include components related to performance appraisal. The current remuneration for the Sharia Supervisory Board is stipulated in the Minutes of the Remuneration and Nomination Committee Meeting Number MR.0002/ KRN/02/2022 dated February 24, 2022.

Struktur Remunerasi

Struktur mencakup jenis serta jumlah imbalan jangka pendek, jangka panjang, atau pasca-kerja yang diterima oleh masing-masing anggota. Ketentuan ini didasarkan pada KMK No. 396/KMK.06/2021 tentang Penetapan Gaji Pokok, Penghasilan, dan Tunjangan Lainnya bagi Dewan Direktur serta Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Rincian struktur remunerasi tersebut adalah sebagai berikut:

Remuneration Structure

The remuneration structure of Board of Directors and Managing Directors includes the type and amount of short-term, long-term, or post-employment benefits received by each member. This provision is based on the Minister of Finance Regulation No. 396/KMK.06/2021 concerning Determination of Basic Salaries, Income, and Other Allowances for Board of Directors and Managing Directors of Indonesia Eximbank. The details of remuneration structure are as follows:

Struktur Remunerasi dan Fasilitas bagi Direktur Eksekutif Merangkap Ketua Dewan Direktur Remuneration Structure and Facilities for Executive Director concurrently Chairman of Board of Directors

No.	Jenis Remunerasi Type of Remuneration	Keterangan Description
1.	Gaji Salary	Direktur Eksekutif merangkap Ketua Dewan Direktur 100% Executive Director concurrently as Chairman of Board of Directors 100%
	Tunjangan Allowances	
	Tunjangan Jabatan Position Allowance	Diberikan dengan jumlah tertentu Given in a certain amount
	Tunjangan Hari Raya Holiday Allowance	Maksimal 1x gaji Maximum 1x salary
2.	Asuransi Purna jabatan Post-Service Insurance	Skema asuransi dengan premi maksimal 25% dari gaji/honorarium tahunan Insurance scheme with a maximum premium of 25% of annual salary/honorarium
	Tunjangan Komunikasi Communication Allowance	Diberikan sebesar biaya pemakaian (<i>at cost</i>) Given at cost
	Tunjangan Perumahan Housing Allowance	Diberikan lumpsum, maksimal 30% dari gaji per bulan. Diberikan apabila tidak diberikan fasilitas rumah jabatan Given in a lump sum, maximum 30% of monthly salary. Given if no official residence facility is provided
	Fasilitas Facilities	
	Kendaraan Dinas Transportation Allowance	Disediakan 1 (satu) unit kendaraan, volume maksimal 2.500 cc dengan biaya operasional dan pemeliharaan ditanggung LPEI Provided 1 (one) unit of vehicle, maximum volume 2500 cc with operational lease and maintenance to be borne by Indonesia Eximbank
	Kesehatan Health	Diberikan dalam bentuk penggantian biaya pengobatan dengan skema asuransi, penggantianacamata, pemeriksaan kesehatan untuk pasangan dan maksimal 3 anak Provided in the form of reimbursement of medical expenses with insurance schemes, optician replacement, medical examination for couples and a maximum of 3 children
3.	Perkumpulan Profesi Professional Club	Maksimal 3 (tiga) perkumpulan Maximum of 3 (three) associations
	Bantuan Hukum Legal Aid	Dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan LPEI In the event of any acts/actions for and on behalf of his/her occupation relating to the intent and purpose of Indonesia Eximbank activities
	Club Membership	Maksimal pada 2 (dua) club Maximum at 2 (two) clubs
	Biaya Representasi Representation Cost Facility	Diberikan dalam bentuk <i>Corporate Credit Card</i> Provided in the form of Corporate Credit Card
4.	Ketentuan Perjalanan Dinas Business Trip Policy	Diberikan fasilitas uang saku, transportasi dan akomodasi untuk perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri Provided pocket money, transportation and accommodation facilities for domestic and overseas official travel

Struktur Remunerasi dan Fasilitas bagi Direktur Eksekutif Merangkap Ketua Dewan Direktur

Remuneration Structure and Facilities for Executive Director concurrently Chairman of Board of Directors

No.	Jenis Remunerasi Type of Remuneration	Keterangan Description
5.	Pajak PPh atas Gaji/ Honorarium dan Tunjangan Income Tax on Salary/Honorarium and Allowances	Pajak Penghasilan (PPh 21) atas Gaji dan Tunjangan yang diterima oleh Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana dan Anggota Dewan Direktur ditanggung seluruhnya oleh LPEI Income Tax (PPh 21) on Salaries and Allowances received by the Executive Director, Managing Director and Member of Board of Directors are borne entirely by Indonesia Eximbank
6.	Tantiem	Ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Determined through a Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia
7.	Insentif Incentives	Berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan RI Based on the approval of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia

Struktur Remunerasi dan Fasilitas bagi Dewan Direktur

Remuneration Structure and Facilities for Board of Directors

No.	Jenis Remunerasi Type of Remuneration	Keterangan Description
1.	Honorarium Salary	Anggota Dewan Direktur 50%. (50% dari Direktur Eksekutif merangkap Ketua Dewan Direktur). Members of Board of Directors of 50% (50% from Executive Director concurrently Chairman of Board of Directors).
2.	Tunjangan, terdiri dari: Allowances, consisting of:	
	Tunjangan Hari Raya Holiday allowance	Maksimal 1 (satu) kali honorarium. Maximum 1 (one) time honorarium.
	Asuransi Purna jabatan Post-Service Insurance	Skema asuransi dengan premi maksimal 25% dari gaji/honorarium tahunan Insurance scheme with a maximum premium of 25% of annual salary/honorarium
	Tunjangan Komunikasi Communication Allowance	Diberikan sebesar biaya pemakaian (at cost) Given at cost
	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	20% dari honorarium per bulan 20% of honorarium per month
3.	Fasilitas, terdiri dari: Facilities, consisting of:	
	Kesehatan Health	Diberikan dalam bentuk penggantian biaya pengobatan dengan skema asuransi, penggantian kacamata, pemeriksaan tindakan untuk pasangan dan maksimal 3 (tiga) anak. Provided in the form of reimbursement for medical costs under the insurance scheme, replacement glasses, medical examinations for spouses and a maximum of 3 (three) children
	Perkumpulan Profesi Professional Club	Maksimal 3 (tiga) perkumpulan Maximum of 3 (three) associations
	Bantuan Hukum Legal Aid	Dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan LPEI. In the event of any acts/actions for and on behalf of his/her occupation relating to the intent and purpose of Indonesia Eximbank activities.
4.	Ketentuan Perjalanan Dinas Business Trip Policy	Diberikan fasilitas uang saku, transportasi dan akomodasi untuk perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri. Provided pocket money, transportation and accommodation facilities for domestic and overseas official travel.
5.	Pajak PPh atas Gaji/ Honorarium dan Tunjangan Income Tax on Salary/Honorarium and Allowances	Pajak Penghasilan (PPh 21) atas Gaji dan Tunjangan yang diterima oleh Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana dan Anggota Dewan Direktur ditanggung seluruhnya oleh LPEI. Income Tax (PPh 21) on Salaries and Allowances received by the Executive Director, Managing Director and Member of Board of Directors are borne entirely by Indonesia Eximbank.
6.	Tantiem	Ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan RI. Stipulated through the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Decree
7.	Insentif Incentives	Berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan RI Based on the approval of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia

Tabel Struktur Remunerasi dan Fasilitas bagi Dewan Pengawas Syariah
Remuneration Structure and Facilities for Sharia Supervisory Board

No.	Jenis Remunerasi Type of Remuneration	Keterangan Description
1.	Honorarium Salary	Diberikan melalui persetujuan Komite Remunerasi dan Nominasi Given through the approval of the Remuneration and Nomination Committee
2.	Pajak PPh atas Honorarium Income Tax on Salary/Honorarium and Allowances	Pajak Penghasilan (PPh 21) atas Honorarium yang diterima oleh Dewan Pengawas Syariah ditanggung seluruhnya oleh LPEI Income Tax (PPh 21) on Salaries and Allowances received by the Executive Director, Managing Director and Member of the Board of Directors are borne entirely by Indonesia Eximbank

Tabel Struktur Remunerasi dan Fasilitas bagi Direktur Pelaksana
Remuneration Structure and Facilities for Managing Directors

No.	Jenis Remunerasi Type of Remuneration	Keterangan Description
1.	Gaji Salary	Direktur Pelaksana 90%. (90% dari Direktur Eksekutif merangkap Ketua Dewan Direktur) Managing Director 90%. (90% of Executive Director concurrently Chairman of Board of Directors)
2.	Tunjangan, terdiri dari: Allowances, consisting of:	
	Tunjangan Hari Raya Holiday Allowance	Maksimal 1 (satu) kali gaji Maximum 1 (one) time salary.
	Santunan Purna jabatan Post-Service Insurance	Skema asuransi dengan premi maksimal 25% dari gaji/honorarium tahunan Insurance scheme with a maximum premium of 25% of the annual salary/honorarium
	Tunjangan Komunikasi Communication Allowance	Diberikan sebesar biaya pemakaian (at cost). Diberikan sebesar biaya pemakaian (at cost) Given at cost
	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	20% dari honorarium per bulan 20% of the salary per month
3.	Fasilitas, terdiri dari: Facilities, consisting of:	
	Kendaraan Dinas Official Vehicles	Disediakan 1 (satu) unit kendaraan, volume maksimal 2.500 cc dengan biaya operasional dan pemeliharaan ditanggung LPEI. 1 (one) unit vehicle is provided, maximum volume 2,500 cc with operational and maintenance costs borne by Indonesia Eximbank.
	Kesehatan Health	Diberikan dalam bentuk penggantian biaya pengobatan dengan skema asuransi, penggantian kacamata, pemeriksaan kesehatan untuk pasangan dan maksimal 3 (tiga) anak Given in the form of reimbursement of medical expenses with an insurance scheme, replacement of glasses, examination of actions for spouses and a maximum of 3 (three) children.
	Bantuan Hukum Legal Assistance	Dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan LPEI. In the event of an action/deed for and on behalf of his/her position related to the purposes, objectives, and activities of Indonesia Eximbank.
4.	Ketentuan Perjalanan Dinas Official Travel Provisions	Diberikan fasilitas uang saku, transportasi dan akomodasi untuk perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri. Provided with pocket money, transportation and accommodation facilities for domestic and overseas business trips.
5.	Pajak PPh atas Gaji/Honorarium dan Tunjangan Income Tax on Salary/Honorarium and Allowances	Pajak Penghasilan (PPh 21) atas Gaji dan Tunjangan yang diterima oleh Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana dan Anggota Dewan Direktur ditanggung seluruhnya oleh LPEI. Income Tax (PPh 21) on Salaries and Allowances received by the Executive Director, Managing Director and Members of Board of Directors is borne entirely by Indonesia Eximbank.
6.	Tantiem	Ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan RI. Determined through a Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia.
7.	Insentif Incentives	Berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan RI Based on the approval of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia

Besaran Remunerasi Tahun 2024

Pada tahun 2024, Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana, dan Dewan Pengawas Syariah menerima remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rincian mengenai besaran remunerasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Remuneration Amount in 2024

In 2024, Board of Directors and Managing Directors received remuneration in accordance with applicable regulations. Details regarding the remuneration amount can be seen in the following table:

Struktur Remunerasi dan Fasilitas bagi Dewan Direktur

Remuneration Structure and Facilities for Board of Directors

Jenis Remunerasi Type of Remuneration	Jumlah Dewan Direktur Total of Board of Directors	Jumlah yang Diterima Dewan Direktur dalam 1 Tahun Amount Received by Board of Directors in 1 year
Gaji dan Tunjangan Salary and Allowances	5 orang 5 person	Rp6,524,658,254
Tantiem	5 orang 5 person	Rp-
Fasilitas lain dalam bentuk natura Other facilities in kind	5 orang 5 person	Rp1,477,884,000
Total	5 orang 5 person	Rp8,002,542,254

Struktur Remunerasi dan Fasilitas bagi Dewan Pengawas Syariah

Remuneration Structure and Facilities for Sharia Supervisory Board

Jenis Remunerasi Type of Remuneration	Jumlah Direktur Pelaksana Total of Managing Directors	Total Remunerasi Total Remuneration
Gaji dan Tunjangan Salary and Allowances	2 orang 2 person	Rp693,000,000
Tantiem	2 orang 2 person	Rp-
Fasilitas lain dalam bentuk natura Other facilities in kind	2 orang 2 person	Rp-
Total	2 orang 2 person	Rp693,000,000

Struktur Remunerasi dan Fasilitas bagi Direktur Pelaksana

Remuneration Structure and Facilities for Managing Directors

Jenis Remunerasi Type of Remuneration	Jumlah Direktur Pelaksana Total of Managing Directors	Total Remunerasi Total Remuneration
Gaji dan Tunjangan Salary and Allowances	6 orang 6 person	Rp10,276,166,106
Tantiem	6 orang 6 person	Rp-
Fasilitas lain dalam bentuk natura Other facilities in kind	6 orang 6 person	Rp1,711,577,440
Total	6 orang 6 person	Rp11,987,743,546



Kelompok Jumlah Remunerasi Anggota Dewan Direktur

Grouping of Remuneration Amount for Board of Directors

Total Remunerasi Tahun 2024 Total Remuneration in 2024	Jumlah Orang Total Persons
Di atas Rp2 miliar Above Rp2 billion	0
Di atas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar Between Rp1 billion to Rp2 billion	5
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 miliar Between Rp500 million to Rp1 billion	0
Rp500 juta ke bawah Below Rp500 million	0

Kelompok Jumlah Remunerasi Anggota Dewan Pengawas Syariah

Grouping of Remuneration Amount for Sharia Supervisory Board

Total Remunerasi Tahun 2024 Total Remuneration in 2024	Jumlah Orang Total Persons
Di atas Rp2 miliar Above Rp2 billion	0
Di atas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar Between Rp1 billion to Rp2 billion	0
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 miliar Between Rp500 million to Rp1 billion	0
Rp500 juta ke bawah Below Rp500 million	2

Kelompok Jumlah Remunerasi Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana

Grouping of Remuneration Amounts for Executive Director and Managing Directors

Total Remunerasi Tahun 2024 Total Remuneration in 2024	Jumlah Orang Total Persons
Di atas Rp2 miliar Above Rp2 billion	6
Di atas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar Between Rp1 billion to Rp2 billion	0
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 miliar Between Rp500 million to Rp1 billion	0
Rp500 juta ke bawah Below Rp500 million	0

Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

LPEI menerapkan prinsip keadilan dalam struktur penggajian guna memastikan kesejahteraan karyawan tetap terjaga. Sebagai bagian dari transparansi remunerasi, berikut rincian rasio gaji tertinggi dan terendah di LPEI sepanjang 2024:

Highest Salary and Lowest Salary Ratio

Indonesia Eximbank applies the principle of fairness in its remuneration structure to ensure the welfare of its employees is maintained. As part of its remuneration transparency, the following are details of the highest and lowest salary ratios at Indonesia Eximbank throughout 2024:

No.	Uraian Description	Rasio Ratio	
		Gaji Pokok Basic Salary	Take Home Pay (THP)
1.	Gaji karyawan terendah dibanding tertinggi Lowest employee salary compared to highest	20.61070816	20.61070816
2.	Gaji Direktur Pelaksana terendah dibanding tertinggi Lowest Managing Director salaries compared to highest	1	1

No.	Uraian Description	Rasio Ratio	
		Gaji Pokok Basic Salary	Take Home Pay (THP)
3.	Gaji Dewan Direktur terendah dibanding tertinggi Lowest Board of Directors salary compared to highest	1	1
4.	Gaji Direktur Pelaksana terhadap pegawai tertinggi Managing Directors salary to highest employee	1.17	1.330825831

Indikator Kinerja Dewan Direktur, Dewan Pengawas Syariah, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana untuk Penetapan Remunerasi

Penetapan IKU bagi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana, dan Dewan Pengawas Syariah dilakukan setiap awal tahun melalui rapat pengesahan RKAT. Proses ini terdokumentasi dalam Kontrak Manajemen antara Dewan Direktur dan Menteri Keuangan RI, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Kontrak Manajemen tersebut kemudian diterapkan secara berjenjang (*cascading*), di mana Direktur Pelaksana menurunkannya kepada Ketua Dewan Direktur yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif.

Penilaian kinerja Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana didasarkan pada pencapaian aktual terhadap indikator kinerja yang tercantum dalam Kontrak Manajemen. Kontrak ini merupakan bagian integral dari sasaran yang ditetapkan dalam RKAT. Rincian mengenai capaian IKU dapat ditemukan pada subbab Penilaian Kinerja Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana.

Rapat Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana

Rapat Dewan Direktur

Kebijakan Pelaksanaan Rapat

Rapat Dewan Direktur LPEI diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 PMK No. 208/2021. Berdasarkan regulasi tersebut, rapat dilaksanakan secara berkala minimal satu kali setiap bulan.

Terdapat dua jenis rapat Dewan Direktur, yaitu:

1. Rapat untuk pengambilan keputusan kebijakan dan isu strategis, yang berfokus pada pengambilan keputusan kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta pembahasan isu-isu strategis LPEI.
2. Rapat untuk pengawasan operasional, yang difokuskan pada pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional LPEI.

Rapat-rapat ini dipimpin oleh Ketua Dewan Direktur dan dapat dilakukan secara tatap muka, telekonferensi, atau melalui media elektronik lainnya. Seluruh anggota Dewan Direktur diharapkan hadir dalam setiap rapat.

Performance Indicators of Executive Director and Managing Directors for Determining Remuneration

The determination of KPIs for Executive Director and Managing Directors is carried out at the beginning of each year through the RKAT ratification meeting. This process is documented in the Management Contract between Board of Directors and the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, which in this case is represented by the Director General of State Assets (DJKN).

The Management Contract is then applied in a cascading manner, where the Managing Directors pass it down to the Chairman of Board of Directors who also serves as Executive Director.

The performance assessment of Executive Director and Managing Directors is based on actual achievements against the performance indicators listed in the Management Contract. This contract is an integral part of targets set in the RKAT. Details on KPI achievements can be found in the Performance Assessment of Board of Directors and Managing Directors subchapter.

Meetings of Board of Directors, Executive Director and Managing Directors

Board of Directors Meeting

Meeting Policy

Indonesia Eximbank's Board of Directors Meeting is held in accordance with the provisions of Article 12 of Finance Ministerial Regulation No. 208/2021. Based on these regulations, meetings are held periodically at least once a month.

There are two types of Board of Directors meetings, namely:

1. Meetings for policy decision making and strategic issues, which focus on policy decision making, evaluation of policy implementation, and discussion of strategic issues of Indonesia Eximbank.
2. Meetings for operational supervision, which focus on monitoring and supervising the operational activities of Indonesia Eximbank.

These meetings are chaired by the Chairman of Board of Directors and can be held in physical meetings, by teleconference, or through other electronic media. All members of Board of Directors are expected to attend each meeting.



Jika Ketua Dewan Direktur atau penggantinya tidak dapat memimpin rapat, maka ia dapat menunjuk anggota lain untuk menjalankan tugas tersebut. Apabila tidak ada penunjukan, pimpinan rapat akan dipilih melalui musyawarah mufakat di antara anggota Dewan Direktur.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota

Di tahun 2024, Dewan Direktur telah mengadakan 32 (tiga puluh dua) rapat sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan, dengan tingkat kehadiran setiap anggota yang tercantum dalam tabel berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Yon Aرسال*	Plt. Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Acting Chairman of Board of Directors concurrently Executive Director	32	26	81%
Kasan	Anggota Dewan Direktur Member of Board of Directors	32	32	100%
Arus Gunawan	Anggota Dewan Direktur Member of Board of Directors	32	32	100%
Dwi Teguh Wibowo	Anggota Dewan Direktur Member of Board of Directors	-	-	-
Suminto**	Anggota Dewan Direktur Member of Board of Directors	32	23	72%
D. James Rompas***	Anggota Dewan Direktur Member of Board of Directors	24	22	92%

*) Anggota Dewan Direktur yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Ketua Dewan Direktur sejak tanggal 24 Desember 2024

**) Beliau menyelesaikan masa jabata sebagai Anggota Dewan Direktur sejak 29 Desember 2024

***) Beliau menyelesaikan masa jabatan sebagai Anggota Dewan Direktur tanggal 31 Agustus 2024

*) Member of the Board of Directors appointed as Acting Chairman of the Board of Directors since December 24, 2024.

**) He completed his term as a member of the Board of Directors on December 29, 2024.

***) He completes his term of office as a Member of the Board of Directors on August 31, 2024.

If the Chairman of Board of Directors or his/her replacement is unable to chair the meeting, he/she may appoint another member to carry out this task. If no appointment is made, chairman of the meeting will be selected by consensus among members of Board of Directors.

Meeting Frequency and Member Attendance Rate

In 2024, Board of Directors has held 32 (thirty two) meetings as part of the implementation of supervisory functions, with the attendance rate of each member listed in the following table:

Agenda Rapat

Arahan dan keputusan Dewan Direktur dicatat dalam Risalah Rapat, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Meeting Agenda

The directions and decisions of Board of Directors are documented in the Board of Directors' Meeting Minutes, as outlined in the following table:

No	Tanggal Date	Nomor Risalah Minutes Number	Agenda Agenda	Peserta Participants
1	9-Jan-24	MR.0001/ BOD/01/2024	1. Persetujuan Rancangan Struktur Organisasi 2. Persetujuan Laporan Keuangan Inhouse 31 Des 2023 3. Progres Audit Laporan Keuangan tahun 2023 1. Approval of the Draft of Organizational Structure 2. Approval of the Inhouse Financial Report Dec 31, 2023 3. Progress of the Audit of Financial Report for 2023	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Yon Aرسال 4. Kasan 5. Arus Gunawan 6. D. James Rompas
2	16-Jan-24	MR.0002/ BOD/01/2024	1. Persetujuan <i>Job Grading</i> PT IEB Prima Aset 2. Usulan Inisiatif LPEI untuk Diajukan dalam LOM 3. Usulan Penetapan Kolektibilitas dan CKPN 1. Approval of PT IEB Prima Aset Job Grading 2. Proposal of Indonesia Eximbank's Initiative to be Submitted in LOM 3. Proposal of Collectibility and CKPN Determination	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Yon Aرسال 4. Kasan 5. Arus Gunawan

No	Tanggal Date	Nomor Risalah Minutes Number	Agenda Agenda	Peserta Participants
3	23-Jan-24	MR.0003/ BOD/01/2024	1. Persetujuan Rancangan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis dan RKAT LPEI Semester II 2023 2. Persetujuan Rancangan PDD: a. Kebijakan Sistem Pengendalian Internal b. Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa c. Kebijakan Pengelolaan Dana Program Kemitraan Eks PT Bank Ekspor Indonesia 3. RKAT PT IPA Tahun 2024 dan Persiapan RUPS PT IPA 4. Agenda tertutup dan terbatas 1. Approval of the Draft of Supervision Report of Indonesia Eximbank Business Plan and RKAT Semester II 2023 2. Approval of the Draft of PDD: a. Internal Control System Policy b. Procurement of Goods and Services Policy c. Management Policy for Partnership Program Funds of Ex PT Bank Ekspor Indonesia 3. RKAT of PT IPA 2024 and Preparation of PT IPA GMS 4. Closed and limited agendas	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Yon Arsal 4. Kasan 5. Arus Gunawan 6. D. James Rompas
4	30-Jan-24	MR.0004/ BOD/01/2024	1. Permohonan persetujuan Rancangan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis dan RKAT Semester II 2023 2. Permohonan persetujuan Rancangan Laporan Pengawasan NPL Desember 2023 3. Laporan Sanksi OJK 4. Laporan Tingkat Kesehatan Triwulan IV 2023 1. Request for approval of the Draft of Supervision Report of Business Plan and RKAT Semester II 2023 2. Request for approval of the Draft of Supervision Report of NPL December 2023 3. OJK Sanctions Report 4. Health Level Report Quarter IV 2023	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Yon Arsal 4. Kasan 5. Arus Gunawan 6. D. James Rompas
5	11-Feb-24	MR.0005/ BOD/02/2024	1. Persetujuan Keuangan per 31 Januari 2024 2. Laporan Realisasi Rencana Kerja Dewan Direktur tahun 2023 dan Usulan Rencana Kerja Dewan Direktur 2024 3. Laporan Progres Laporan Keuangan <i>Audited</i> 2023 1. Financial Approval as of January 31, 2024 2. Report on the Realization of the Board of Directors' Work Plan for 2023 and the Proposed Board of Directors' Work Plan for 2024 3. Progress Report on the Audited Financial Statements for 2023	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Yon Arsal 4. Kasan 5. Arus Gunawan 6. D. James Rompas
6	13-Feb-24	MR.0006/ BOD/02/2024	Persetujuan Penetapan Kolektibilitas dan CKPN Hasil Audit Laporan Keuangan LPEI 2023 Approval of Determination of Collectibility and CKPN for Audit Results of Indonesia Eximbank's Financial Report 2023	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. D. James Rompas
7	17-Mar-24	MR.0007/ BOD/03/2024	1. Laporan Kinerja Keuangan Februari 2024 2. Laporan Hasil F&P DMR 3. Penilaian Kinerja Direktur Pelaksana 2023 4. Pemaparan Strategi Remunerasi DD, DE, DP dan Pegawai 1. Financial Performance Report February 2024 2. F&P DMR Results Report 3. Performance Assessment of Managing Director 2023 4. Presentation of DD, DE, DP and Employee Remuneration Strategy	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Yon Arsal 4. Kasan 5. Arus Gunawan 6. D. James Rompas
8	27-Mar-24	MR.0008/ BOD/03/2024	Permohonan persetujuan hasil audit Laporan Keuangan LPEI Tahun 2023 Request for approval of the audit results of Indonesia Eximbank's Financial Report for 2023	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. D. James Rompas

No	Tanggal Date	Nomor Risalah Minutes Number	Agenda Agenda	Peserta Participants
9	5-Apr-24	MR.0009/ BOD/04/2024	1. Kinerja Keuangan Maret 2024 2. Usulan Hapus Buku Tambahan 3. Usulan Perubahan RKAT 2024 1. Financial Performance March 2024 2. Proposal to Write Off Additional Books 3. Proposal to Change RKAT 2024	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Yon Arsal 4. Kasan 5. Arus Gunawan 6. D. James Rompas
10	19-Apr-24	MR.0010/ BOD/04/2024	1. Pemaparan Prinsip Pengembangan <i>Platform Digital Export</i> 2. Laporan Pertanggungjawaban Kinerja LPEI Tahun 2023 3. Laporan <i>Monitoring</i> Pembiayaan Bermasalah Triwulan I 2024 1. Presentation of Principles for Developing Digital Export Platforms 2. Indonesia Eximbank's Performance Accountability Report 2023 3. Report on Monitoring of Problematic Financing for Quarter I 2024	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Yon Arsal 4. Kasan 5. Arus Gunawan 6. D. James Rompas
11	26-Apr-24	MR.0011/ BOD/04/2024	1. Persetujuan usulan Remunerasi DD dan Manajemen 2. Persetujuan Pembentukan Panitia Seleksi untuk Menghadapi Akhir Masa Tugas DD dan DP bulan Agustus 2024 3. Laporan Pemaparan DE atas Penyelenggaraan FGD agar tercapai proses yang positif dan produktif 4. Perubahan RAKT 2024 dan penyusunan RJP 1. Approval of proposal for DD and Management Remuneration 2. Approval of Formation of Selection Committee to Face the End of DD and DP Term in August 2024 3. Report on DE Presentation on the Implementation of FGD to achieve a positive and productive process 4. Changes to RAKT 2024 and preparation of RJP	1. Rijani Tirtoso 2. Kasan 3. Arus Gunawan 4. D. James Rompas
12	14-May-24	MR.0012/ BOD/05/2024	1. Laporan dan Persetujuan Manajemen <i>Letter</i> 2024 2. Laporan Kinerja Keuangan posisi April 2024 3. Penyampaian CKPN Tahun 2023 4. Pembahasan Rancangan Materi Rapat Pertanggungjawaban Kinerja LPEI tahun 2023 5. Laporan Surat OJK a. Daftar <i>Monitoring</i> Tindak Lanjut b. Tingkat Kesehatan 6. Laporan Hasil Penilaian Tata Kelola Yang Baik Tahun 2023 1. Report and Approval of Management Letter 2024 2. Financial Performance Report for April 2024 3. Submission of CKPN for 2023 4. Discussion of the Draft of Material for Indonesia Eximbank's Performance Accountability Meeting 2023 5. OJK Letter Report a. Follow-up Monitoring List b. Health Level 6. Good Governance Assessment Report 2023	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Yon Arsal 4. Kasan 5. Arus Gunawan 6. D. James Rompas
13	22-May-24	MR.0013/ BOD/05/2024	Perubahan PDD Pengangkatan dan Pemberhentian DP Changes to the PDD Appointment and Dismissal of DP	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Yon Arsal 4. Kasan 5. Arus Gunawan 6. D. James Rompas

No	Tanggal Date	Nomor Risalah Minutes Number	Agenda Agenda	Peserta Participants
14	7-Jun-24	MR.0014/ BOD/06/2024	1. Persetujuan Kinerja Keuangan posisi Mei 2024 2. Laporan Hasil Evaluasi KAP Penyedia Jasa Audit Laporan Keuangan 2023 dan Persetujuan Prinsip Pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan Tahun 2024 3. Laporan Surat Peringatan OJK terkait Rencana Tindak atas Tingkat Kesehatan - DMR 4. Agenda Terbatas 1. Approval of Financial Performance in May 2024 2. Report on the Evaluation Results of KAP Providing Audit Services for 2023 Financial Statements and Approval in Principle for the Procurement of Audit Services for 2024 Financial Statements 3. Report on OJK Warning Letter regarding the Action Plan for the Health Level - DMR 4. Limited Agenda	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. D. James Rompas
15	28-Jun-24	MR.0015/ BOD/06/2024	1. Persetujuan Tindak Lanjut Rekomendasi BPKP terkait Rencana Kerja Dewan Direktur 2. Laporan Kepuasan Pemangku Kepentingan 3. Laporan Persetujuan Penghapusbukuan Piutang 2024 dan Tindak Lanjutnya 4. Agenda Lembaga: a. RDP b. <i>Leaders Offsite Workshop</i> 1. Approval of the Follow-up to BPKP Recommendations regarding the Board of Directors' Work Plan 2. Stakeholder Satisfaction Report 3. Report on the Approval of the Write-off of Receivables in 2024 and its Follow-up 4. Institutional Agenda: a. RDP b. <i>Leaders Offsite Workshop</i>	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Yon Arsal 4. Kasan 5. Arus Gunawan
16	8-Jul-24	MR.0016/ BOD/07/2024	1. Persetujuan kinerja keuangan per 30 Juni 2024 2. Persetujuan Lap. Pelaksanaan Rencana Tindak Tingkat Kesehatan Faktor Rentabilitas posisi Juni 2024 3. Persetujuan Rancangan Perubahan Rencana Bisnis dan RKAT 2024 4. Agenda Lain-lain 1. Approval of financial performance as of June 30, 2024 2. Approval of the Implementation Report of the Health Level Action Plan for Rentability Factor as of June 2024 3. Approval of the Draft of Changes to the Business Plan and RKAT 2024 4. Other Agendas	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Yon Arsal 4. Arus Gunawan 5. D. James Rompas
17	19-Jul-24	MR.0017/ BOD/07/2024	Susunan Pengurus LPEI 1. Pengunduran Diri Direktur Pelaksana 2. Penetapan Plt. Direktur Pelaksana Bisnis Composition of Indonesia Eximbank Management 1. Resignation of Managing Director 2. Appointment of Acting Managing Director of Business	1. Rijani Tirtoso 2. Yon Arsal 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. D. James Rompas
18	21-Jul-24	MR.0018/ BOD/07/2024	1. Hasil <i>Fit & Proper</i> Calon Direktur Pelaksana 2. Seleksi Calon Senior <i>Executive Vice President</i> sebagai <i>chief of HR, Procurement & General Affair</i> 3. Revisi Tupoksi Dirpel Sekretaris Lembaga, Kepatuhan dan SDM 1. Fit & Proper Results of Candidates for Managing Director 2. Selection of Candidates for Senior Executive Vice President as Chief of HC, Procurement & General Affairs 3. Revision of the Duties and Functions of the Directorate of Institutional Secretary, Compliance and HC	1. Rijani Tirtoso 2. Yon Arsal 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. D. James Rompas
19	22-Jul-24	MR.0019/ BOD/07/2024	1. Susunan Pengurus LPEI 2. Agenda Lain-lain 1. Composition of Indonesia Eximbank's Management 2. Other Agendas	1. Rijani Tirtoso 2. Yon Arsal 3. Arus Gunawan 4. D. James Rompas

No	Tanggal Date	Nomor Risalah Minutes Number	Agenda Agenda	Peserta Participants
20	30-Jul-24	MR.0020/ BOD/07/2024	1. Persetujuan Rancangan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis & RKAT Semester I 2024 2. Laporan Pembiayaan Bermasalah Triwulan II 2024 3. Laporan Hapus Buku Triwulan II 2024 4. Laporan Tingkat Kesehatan Triwulan II 2024 1. Approval of the Draft of Report on Supervision of the Business Plan & RKAT Semester I 2024 2. Report on Problematic Financing for Quarter II 2024 3. Report on Write-Offs for Quarter II 2024 4. Report on Health Level for Quarter II 2024	1. Rijani Tirtoso 2. Yon Arsal 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. D. James Rompas
21	1-Aug-24	MR.0021/ BOD/08/2024	Persiapan <i>Exit Meeting</i> OJK Preparation for OJK Exit Meeting	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Yon Arsal 4. Kasan 5. Arus Gunawan 6. D. James Rompas
22	9-Aug-24	MR.0022/ BOD/08/2024	1. Laporan Kinerja Keuangan per Juli 2024 2. Persetujuan Penunjukkan KAP tahun 2024 3. Persetujuan Rencana Kerja Komite DD 4. Laporan Fungsi Kepatuhan dan APU PPT Semester I 2024 5. Persetujuan Keanggotaan Komite Audit 6. Persetujuan Program Pelatihan DD dan Manajemen 1. Financial Performance Report as of July 2024 2. Approval of the Appointment of KAP in 2024 3. Approval of DD Committee Work Plan 4. Report on Compliance and APU PPT Functions for Semester I 2024 5. Approval of Audit Committee Membership 6. Approval of DD and Management Training Program	1. Rijani Tirtoso 2. Kasan 3. Arus Gunawan 4. D. James Rompas
23	15-Aug-24	MR.0023/ BOD/08/2024	1. Pembahasan BAP OJK 2. Penetapan Perpanjangan Masa Jabatan Plt. DBR dan Penetapan Plt. DP 1. Discussion of OJK BAP 2. Determination of Extension of Term of Office of Plt. DBR and Determination of Plt. DP	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. D. James Rompas
24	29-Aug-24	MR.0024/ BOD/08/2024	1. Persetujuan Hapus Buku Kewenangan DE dengan Persetujuan DD 2. RPDD TJSL Non Kemitraan, DMR 3. Laporan <i>Security Drill</i>, DFO 4. Laporan-laporan: a. DMTL dan Surat Peringatan OJK b. Audit BPK 1. Approval of DE Authorization Write-Off with DD Approval 2. RPDD CSR Non-Partnership, DMR 3. Security Drill Report, DFO 4. Reports: a. DMTL and OJK Warning Letter b. BPK Audit	1. Rijani Tirtoso 2. Yon Arsal 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. D. James Rompas
25	10-Sep-24	MR.0025/ BOD/09/2024	1. Laporan Kinerja Keuangan 31 Agustus 2024 2. Laporan Hasil Penilaian OJK atas Tingkat Kesehatan LPEI 1. Financial Performance Report August 31, 2024 2. Report on OJK Assessment Results on Indonesia Eximbank's Health Level	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Yon Arsal 4. Kasan 5. Arus Gunawan

No	Tanggal Date	Nomor Risalah Minutes Number	Agenda Agenda	Peserta Participants
26	27-Sep-24	MR.0026/ BOD/09/2024	1. Perpanjangan Masa Jabatan Pelaksana Tugas Direktur Pelaksana 2. Laporan RUPSLB PT IEB Prima Aset 3. Susunan Keanggotaan Komite DD 4. Persetujuan Pembukuan Hapus Buku Kewenangan Menteri Keuangan 5. Persetujuan RKAT 2025 dan RJP 2025 - 2029 6. Pembahasan <i>Action Plan</i> OJK 7. Rapat DD Terbatas 1. Extension of Term of Office of Acting Managing Director 2. Report of PT IEB Prima Aset EGMS 3. Composition of DD Committee Membership 4. Approval of Bookkeeping Write-Off with the Authority of the Minister of Finance 5. Approval of RKAT 2025 and RJP 2025 - 2029 6. Discussion of OJK Action Plan 7. Limited DD Meeting	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Yon Arsal 4. Kasan 5. Arus Gunawan
27	9-Oct-24	MR.0027/ BOD/10/2024	1. Kinerja Keuangan September 2. Persetujuan RKAT 2025 dan Tambahan Hapus Buku 2025 3. Pembahasan Hasil Proses Uji Kemampuan dan Kepatuhan Calon Dirpel 1. September Financial Performance 2. Approval of RKAT 2025 and Additional Write-Off 2025 3. Discussion of Results Process of Testing the Ability and Compliance of Prospective Managing Director	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Yon Arsal 4. Kasan 5. Arus Gunawan
28	23-Oct-24	MR.0028/ BOD/10/2024	1. Kick off Audit KAP RSM 2. Laporan Rencana Aksi DMTL OJK posisi Jatuh Tempo 31 Oktober 2024 3. Laporan Realisasi RKAT TW III 4. Laporan Monitoring Pembiayaan Bermasalah Triwulan III 5. Persetujuan Pembukuan Hapus Buku 34 Debitur 6. Persetujuan RKA Program Kemitraan Tahun 2025 7. Persetujuan Rancangan <i>Risk Appetite Statement</i> 2025 8. Persetujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2025 9. Persetujuan Perubahan PDD Pedoman Tata Kerja DD dan Penetapan Staf DD 10. Laporan Masa Jabatan Anggota KPR dan Usulan 11. Persetujuan Usulan perubahan penghapusbukuan dan Tagihan Piutang LPEI 1. KAP RSM Audit Kick Off 2. OJK DMTL Action Plan Report due on October 31, 2024 3. Q3 RKAT Realization Report 4. Q3 Troubled Financing Monitoring Report 5. Approval of Write-Off Bookkeeping for 34 Debtors 6. Approval of Partnership Program RKA for 2025 7. Approval of the Draft of Risk Appetite Statement for 2025 8. Approval of Sustainable Finance Action Plan for 2025 9. Approval of Changes to PDD Guidelines for DD Work Procedures and Appointment of DD Staff 10. Report on Term of Office of KPR Members and Proposals 11. Approval of Proposals for changes to Indonesia Eximbank's Write-Off and Receivables	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Yon Arsal 4. Kasan 5. Arus Gunawan
29	8-Nov-24	MR.0029/ BOD/11/2024	1. Laporan Surat Peringatan OJK 2. Laporan Kinerja Keuangan posisi Oktober 2024 3. Laporan Tingkat Kesehatan Triwulan III 2024 4. Usulan Keanggotaan Staf dan Komite Dewan Direktur 1. OJK Warning Letter Report 2. Financial Performance Report for October 2024 3. Q3 2024 Health Level Report 4. Proposals for Membership of Staff and Committees of Board of Directors	1. Rijani Tirtoso 2. Yon Arsal 3. Kasan 4. Arus Gunawan
30	22-Nov-24	MR.0030/ BOD/11/2024	1. Laporan GRC 2. Laporan Implementasi RAKB dan Kesiapan Adopsi IFRS 3. Penghapusbukuan Piutang LPEI 4. Penetapan Direktur Pelaksana 5. Laporan Surat teguran OJK 1. GRC Report 2. Report RAKB Implementation and Readiness for IFRS Adoption 3. Write-off of Indonesia Eximbank's Receivables 4. Appointment of Managing Director 5. OJK Warning Letter Report	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Yon Arsal 4. Kasan 5. Arus Gunawan

No	Tanggal Date	Nomor Risalah Minutes Number	Agenda Agenda	Peserta Participants
31	10-Dec-24	MR.0031/ BOD/12/2024	1. Laporan Komite Audit 2. Laporan Komite Harmonisasi Ekspor 3. Laporan Kinerja Keuangan posisi 30 Nov 2024 4. Laporan Modernisasi Core System 5. Laporan Penjaminan an Indrilco 6. Agenda Penyempurnaan Struktur Organisasi	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Yon Aarsal 4. Kasan 5. Arus Gunawan
32	20-Dec-24	MR.0032/ BOD/12/2024	1. Laporan Progres DMTL audit eksternal 2. Laporan Pengawasan Pengadaan 2024 3. Laporan Pengawasan Kinerja Syaria 2024 4. Laporan Pelaksanaan Security Drill 5. Agenda Lain-lain	1. Rijani Tirtoso 2. Yon Aarsal 3. Kasan 4. Arus Gunawan

Rapat Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana

Kebijakan Pelaksanaan Rapat

Rapat Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana atau disebut juga Rapat *Board of Management* (Rabom) adalah rapat yang diselenggarakan di lingkungan LPEI yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif dan dihadiri Direktur Pelaksana serta dapat mengundang pejabat lainnya dan pihak- pihak lainnya sesuai kebutuhan rapat dan wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau setiap waktu bilamana dipandang perlu. Selain rapat bersama Direktur Pelaksana, Direktur Eksekutif juga mengadakan rapat koordinasi dengan Dewan Direktur untuk memastikan kelancaran operasional LPEI.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota

Sepanjang tahun 2024, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana telah mengadakan 68 (enam puluh delapan) rapat untuk membahas pengambilan keputusan kebijakan serta berbagai isu strategis. Tingkat kehadiran masing-masing anggota dapat dilihat pada tabel berikut:

Meeting of Executive Director and Managing Directors

Meeting Policy

Executive Director and Managing Director Meeting, also known as also known as Board of Management Meeting (Rabom) is a meeting held within LPEI which is chaired by the Executive Director and attended by the Managing Director and may invite other officials and other parties according to the needs of the meeting and must be held at least 1 (one) time in every month or every time if deemed necessary. deemed necessary. In addition to meetings with the Managing Director, Executive Director also holds coordination meetings with Board of Directors to ensure the smooth operation of LPEI.

Meeting Frequency and Member Attendance Rate

Throughout 2024, the Executive Director and Managing Director have held 68 (sixty-eight) meetings to discuss policy decision-making as well as strategic issues. The attendance rate of each member can be seen in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Riyani Tirtoso	Direktur Eksekutif Executive Director	68	68	100%
Anton Herdianto	Direktur Pelaksana Bisnis Managing Director of Financing	68	65	96%
Maqin U. Norhadi	Plt. Direktur Pelaksana Acting Managing Director	68	65	96%
Anwar Harsono	Plt. Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional, & Teknologi Informasi Acting Managing Director of Finance, Operations, & Information Technology	68	67	99%

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
T. Wahyu Prihadi Wibowo	Plt. Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan, & Sumber Daya Manusia Acting Managing Director of Institution Secretariat, Compliance, & Human Capital	68	67	99%
Sam Malee	Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit Managing Director of Credit & Risk Management	68	52	76%
Agus Windiarto*	Direktur Bidang Keuangan & Operasional Managing Director of Finance, Operations, and IT	19	11	58%
Chesna F. Anwar*	Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan Managing Director of Institutional Relations	19	14	74%

*) Beliau sudah tidak menjabat sebagai Direktur Bidang Keuangan & Operasional sejak 31 Agustus 2024

**) Beliau sudah tidak menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan sejak 31 Agustus 2024

*) He has not served as Director of Finance & Operations since August 31, 2024

**) He has not served as Managing Director of Institutional Relations since August 31, 2024

Agenda Rapat

Arahan dan keputusan yang dihasilkan dalam rapat *Board of Management* telah dicatat dalam risalah rapat dengan rincian sebagai berikut.

Meeting Agenda

The directions and decisions established in Board of Management meeting have been documented in the meeting minutes with the following description:

No	No Risalah No. Minutes	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
1	MR.0001/ MDI/01/2024	2 Jan 2024	- Laporan status tindak lanjut rekomendasi Audit OJK - Komite Pengadaan I : Persetujuan Pemenang Pengadaan <i>Downsizing & Reinstatement</i> Kantor Cabang Makassar - Pemaparan Penerapan <i>Office 365</i> dan MS Teams - Kinerja Keuangan per 31 Desember 2023 - Perpanjangan Masa Penugasan Perangkapan Jabatan Plt Direktur Pelaksana Manajemen Risiko dan Kredit - Report on the status of follow-up to OJK Audit recommendations - Procurement Committee I: Approval of the Winner of Procurement of Downsizing & Reinstatement of Makassar Branch Office - Presentation of the Implementation of Office 365 and MS Teams - Financial Performance as of December 31, 2023 - Extension of the Assignment Period for Concurrent Position of Acting Managing Director of Risk Management and Credit	- Riyani Tirtoso - Dikdik Yustandi - Maqin U. Norhadi – Cuti / On leave - Agus Windiarto - Chesna F. Anwar – Cuti / On leave - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati
2	MR.0002/ MDI/01/2024	9 Jan 2024	- Persetujuan Penyedia Jasa Pemeringkat dan <i>Annual Fee</i> - Laporan Persiapan dan Persetujuan Anggaran Penilaian GCG oleh BPKP - Laporan Proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) OJK atas Calon Direktur Pelaksana LPEI - Usulan Kebijakan Penggunaan Anggaran <i>Food Stuff</i> - Persetujuan Laporan Keuangan <i>In-house</i> Desember 2023 - Laporan Penanganan NPL Bulan Desember 2023 - Lain- lain: Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 - Approval of Rating Service Provider and Annual Fee - Report on Preparation and Approval of GCG Assessment Budget by BPKP - Report on OJK's Fit and Proper Assessment (PKK) Process for Candidates for Indonesia Eximbank's Managing Director - Proposed Policy on Use of Food Stuff Budget - Approval of In-house Financial Report December 2023 - Report on Handling of NPL in December 2023 - Others: National Holidays and Joint Leave in 2024	- Riyani Tirtoso - Dikdik Yustandi - Maqin U. Norhadi – Cuti / On leave - Agus Windiarto - Chesna F. Anwar – Cuti / On leave - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati

No	No Risalah No. Minutes	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
3	MR.0003/MD/01/2024	12 Jan 2024	Laporan Tindak Lanjut Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Follow-up Report on Audit with Specific Purposes (PDTT) of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP)	• Riyani Tirtoso • Dikdik Yustandi • Maqin U. Norhadi - Cutu / On leave • Agus Windiarto • Chesna F. Anwar - Cutu / On leave • I Nyoman Gede Suarja • Anwar Harsono • Wahyu Wibowo • Anton Herdianto • Titiek Setiyowati
4	MR.0004/ MDI/01/2024	16 Jan 2024	• Laporan <i>Digital Initiatives</i> Nawasena • Laporan Pertemuan Tindak Lanjut Aset Inbreng • Usulan Materi <i>Leaders Offsite Meeting</i> Kementerian Keuangan • Cascading Indikator Kinerja Utama • Laporan Progres Tindak Lanjut <i>Past Due Obligation</i> (PDO) • Penetapan Kolektibilitas • Laporan Progres Implementasi <i>Early Warning Detection</i> (EWD) • Pengelolaan <i>Loan At Risk</i> • Laporan Status Pemenuhan <i>Covenant</i> • Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi BPKP untuk Penilaian Tata Kelola Lembaga • Strategi Komunikasi dalam rangka Publikasi Laporan Keuangan • Ketetapan Mekanisme Kerja • Laporan Keputusan Komite SAM • Persetujuan Prinsip Digital Initiatives Nawasena: Indonesia <i>Ecosystem Export Platform</i> • Agenda lain-lain: Penugasan Menghadiri Agenda OECD. • Report of Digital Initiatives Nawasena • Report of Inbreng Asset Follow-up Meeting • Proposal of Material for Leaders Offsite Meeting of Ministry of Finance • Cascading of Main Performance Indicators • Report of Progress of Past Due Obligation (PDO) Follow-up • Determination of Collectibility • Report of Progress of Early Warning Detection (EWD) Implementation • Management of Loan At Risk • Report of Covenant Fulfillment Status • Report of Follow-up of BPKP Recommendation for Assessment of Institutional Governance • Communication Strategy for Publication of Financial Report • Determination of Working Mechanism • . Report of Decision of SAM Committee • Approval of Principle of Digital Initiatives Nawasena: Indonesia <i>Ecosystem Export Platform</i> • Other Agenda: Assignment to Attend OECD Agenda.	• Riyani Tirtoso • Dikdik Yustandi • Maqin U. Norhadi • Agus Windiarto • Chesna F. Anwar • I Nyoman Gede Suarja • Anwar Harsono • Wahyu Wibowo • Anton Herdianto • Titiek Setiyowati
5	MR.0005/ MDI/01/2024	18 Jan 2024	Izin prinsip modernisasi pengadaan solusi implementasi modernisasi <i>core system</i> Principle permit of procurement of solution of implementation of modernization of core system	• Riyani Tirtoso • Dikdik Yustandi • Maqin U. Norhadi • Agus Windiarto • Chesna F. Anwar • I Nyoman Gede Suarja • Anwar Harsono • Wahyu Wibowo • Anton Herdianto • Titiek Setiyowati

No	No Risalah No. Minutes	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
6	MR.0006/ MDI/01/2024	23 Jan 2024	- Persetujuan Rancangan Laporan Realisasi dan Pengawasan Rencana Bisnis - Laporan Hasil <i>Feedback Internal Survey Supporting Unit</i> - Laporan Progres Implementasi <i>Spreadsheet</i> Pembiayaan - Persetujuan Laporan Tingkat Kesehatan TW-IV/2023 - Laporan Persiapan Pelaksanaan Aktivitas Kerja WFO 100% - Persetujuan Prinsip Pengadaan Konsultan Penyusun Kajian Aspek Komersial dan Hukum rencana Penjualan Kantor - Laporan Media <i>Monitoring</i> - Strategi Komunikasi Publikasi Laporan Keuangan - Persetujuan Kebijakan Representasi - Laporan Hasil Sementara Evaluasi KAP - Persetujuan Sosialisasi Struktur Organisasi Baru - Approval of the Draft of Report on Realization and Supervision of Business Plan - Report on Internal Feedback Results of Supporting Unit Survey - Report on Progress of Financing Spreadsheet Implementation - Approval of Health Level Report for Q4/2023 - Report on Preparation for Implementation of 100% WFO Work Activities - Approval of Principles for Procurement of Consultants for Compiling Commercial and Legal Aspects of Office Sales Plan - Media Monitoring Report - Communication Strategy for Publication of Financial Reports - Approval of Representation Policy - Report on Interim Results of KAP Evaluation - Approval of Socialization of New Organizational Structure	- Riyani Tirtoso - Dikdik Yustandi - Maqin U. Norhadi - Agus Windiarto - Chesna F. Anwar - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati
7	MR.0007/ MDI/01/2024	26 Jan 2024	Implementasi Indonesia <i>Export Ecosystem Platform</i> Implementation of Indonesia Export Ecosystem Platform	- Riyani Tirtoso - Dikdik Yustandi - Maqin U. Norhadi - Agus Windiarto - Chesna F. Anwar - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati
8	MR.0008/ MDI/01/2024	30 Jan 2024	- Laporan Keputusan Komite Kebijakan atas Rancangan PDE Tata Kerja DE dan DP - Laporan Progres Keputusan Komite Kebijakan atas SPO Pembiayaan - Laporan Keputusan Komite GRC atas Rencana Tindak Lanjut GRC - Persetujuan Penyesuaian Laporan Profil Risiko berdasarkan Rekomendasi KPR - Persetujuan Iuran Keanggotaan LPEI dalam Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) tahun 2024 - Pemaparan Penerapan Tata Kerja Baru - Laporan Progres Audit Laporan Keuangan oleh KAP <i>Market Intelligence, Leads & Control Tower</i> - Persetujuan Sosialisasi Struktur Organisasi Baru - Laporan Tindak Lanjut Ratifikasi Rabom 2023 - Policy Committee Decision Report on the Draft of DE and DP Work Procedures PDE - Policy Committee Decision Progress Report on Financing SPO - GRC Committee Decision Report on GRC Follow-up Plan - Approval of Risk Profile Report Adjustment based on KPR Recommendation - Approval of Indonesia Eximbank's Membership Contribution in the Indonesian Payment System Association (ASPI) in 2024 - Explanation of New Work Procedure Implementation - Financial Statement Audit Progress Report by KAP - Market Intelligence, Leads & Control Tower - Approval of Socialization of New Organizational Structure - Follow-up Report on Ratification of Rabom 2023	- Riyani Tirtoso - Dikdik Yustandi - Maqin U. Norhadi - Agus Windiarto - Chesna F. Anwar - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati



No	No Risalah No. Minutes	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
9	MR.0009/ MDI/02/2024	6 Feb 2024	- Laporan Komite Kebijakan terhadap usulan Memorandum Prosedur tentang Penyesuaian Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab berdasarkan perubahan Struktur Organisasi - Persetujuan Penyempurnaan Pengaturan <i>End User Computing</i> (EUC) - Laporan Komite Pengadaan I : Persetujuan Pemenang Pengadaan Sewa Komputer - Laporan Hasil <i>Focus Group Discussion</i> BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Jamdatun - Pemaparan Kinerja Bisnis: - Realisasi dan Prognosa Posisi Bulan Februari dan Maret 2024 <i>Success Rate Name Clearance</i> 2023 - Laporan Progress <i>Platform Digital Export</i> (DigiEx) - Laporan Kinerja Keuangan posisi 31 Januari 2024 - Laporan Progres Audit Laporan Keuangan Tahun 2023 - Policy Committee Report on the proposed Memorandum of Procedure on Adjustment of Duties, Functions, and Responsibilities based on changes in Organizational Structure - Approval of Improvement of End User Computing (EUC) Regulations - Procurement Committee Report I: Approval of Computer Rental Procurement Winners - Report on the Results of Focus Group Discussion of BPKP, Inspectorate General of the Ministry of Finance and Jamdatun - Business Performance Presentation: - Realization and Prognosis of February and March 2024 Position <i>Success Rate Name Clearance</i> 2023 - Digital Export Platform (DigiEx) Progress Report - Financial Performance Report as of January 31, 2024 - Audit Progress Report of Financial Report 2023	- Riyani Tirtoso - Dikdik Yustandi - Perdin / Business Trip - Maqin U. Norhadi - Agus Windiarto - Chesna F. Anwar - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati
10	MR.0010/ MDI/02/2024	13 Feb 2024	- Persetujuan Izin Prinsip Waiver terkait Indonesia <i>Export Ecosystem Platform</i> - Persetujuan Izin Prinsip Pengadaan Perpanjangan Sewa Sistem Asuransi - Persetujuan Sewa Ruang Kerja LPEI Lantai 27 oleh Indonesia Investment Authority (INA) - Laporan Progres Penyesuaian <i>Dashboard & Reporting</i> sebagai Tindak Lanjut Struktur Organisasi Baru - Persetujuan Timeline Penyertaan Modal Negara dan Pinjaman Pemerintah kepada LPEI - Persetujuan Struktur Organisasi <i>Change Management Team</i> - Laporan Tindak Lanjut Pengesahan RKAT 2024 - Laporan Desain <i>Annual Report</i> 2023 - Laporan Agenda Lembaga di bulan Februari - Maret 2024 - Persetujuan Draft Audit DG dan CKPN. - Approval of Waiver Principle Permit related to Indonesia Export Ecosystem Platform - Approval of Principle Permit for Procurement of Insurance System Lease Extension - Approval of Indonesia Eximbank Office Space Lease on 27th Floor by Indonesia Investment Authority (INA) - Dashboard & Reporting Adjustment Progress Report as Follow-up to New Organizational Structure - Approval of State Capital Participation Timeline and Government Loan to Indonesia Eximbank - Approval of Change Management Team Organizational Structure - Follow-up Report on Ratification of RKAT 2024 2023 Annual Report Design Report - Report on Institutional Agenda in February - March 2024 - Approval of DG and CKPN Audit Draft.	- Riyani Tirtoso - Dikdik Yustandi - Perdin / Business Trip - Maqin U. Norhadi - Agus Windiarto - Chesna F. Anwar - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Cuti / On leave - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati

No	No Risalah No. Minutes	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
11	MR.0012/ MDI/02/2024	20 Feb 2024	• Persetujuan Prinsip Perpanjangan <i>Support Firms SLIK</i> 2024-2025 • Persetujuan Prinsip Perpanjangan <i>ATS UBS Konvensional</i> • Persetujuan Prinsip Perpanjangan <i>Tenaga Alih Daya TI</i> • Persetujuan Prinsip Pengadaan <i>Renewal Subscription Sophos</i> • Keputusan Komite Pengadaan 1: <i>Renewal CARE</i> • Persetujuan Prinsip Pengadaan <i>Jasa Konsultan Pengawas Program IP PEN</i> • Persetujuan Prinsip <i>Media Placement</i> • Persetujuan Rancangan Laporan Rencana Kerja penanganan Pembiayaan Bermasalah (<i>Action Plan</i> Laporan Keuangan Kepada OJK) • Persetujuan Rancangan Laporan Perkembangan Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah kepada DJKN • Usulan Penambahan Hapus Buku 2024 • Laporan Progres Bisnis dan Strategi Pengelolaan Akun pada Struktur Organisasi Baru • Persetujuan Prinsip <i>Digital Platform Ecosystem Export (Digi-Ex)</i> • Approval in Principle of Extension of <i>Firms SLIK Support</i> 2024-2025 • Approval in Principle of Extension of <i>Conventional UBS ATS</i> • Approval in Principle of Extension of <i>IT Outsourcing</i> • Approval in Principle of Procurement of <i>Sophos Renewal Subscription</i> • Decision of Procurement Committee 1: <i>Renewal CARE</i> • Approval in Principle of Procurement of <i>IP PEN Program Supervisory Consultant Services</i> • Approval in Principle of <i>Media Placement</i> • Approval of the Draft of Report of Work Plan for Handling Problematic Financing (<i>Action Plan Financial Report</i> to OJK) • Approval of the Draft of Progress Report of Problematic Financing Management to DJKN • Proposal for Addition of <i>Write-Off</i> 2024 • Report on Business Progress and Account Management Strategy in New Organizational Structure • Approval in Principle of <i>Digital Platform Ecosystem Export (Digi-Ex)</i>	• Riyani Tirtoso • Dikdik Yustandi • Maqin U. Norhadi • Agus Windiarto • Chesna F. Anwar • I Nyoman Gede Suarja • Anwar Harsono • Wahyu Wibowo • Anton Herdianto • Titiek Setiyowati
12	MR.0013/MDI/02/202	26 Feb 2024	• Inisiatif Strategis dalam rangka Publikasi Laporan Keuangan Audit LPEI 2023 • Laporan Progres Audit Laporan Keuangan LPEI 2023 • Strategic Initiatives for the Publication of Indonesia Eximbank's 2023 Audited Financial Report • Audit Progress Report of Indonesia Eximbank's 2023 Financial Report	• Riyani Tirtoso • Dikdik Yustandi • Maqin U. Norhadi • Agus Windiarto • Chesna F. Anwar • I Nyoman Gede Suarja • Anwar Harsono • Wahyu Wibowo • Anton Herdianto • Titiek Setiyowati

No	No Risalah No. Minutes	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
13	MR.0014/ MDI/02/2024	27 Feb 2024	- Komite Pengadaan : I Persetujuan Pemenang <i>Annual Maintenance</i> dan <i>Support Treasury Dealing System</i> (TDS) - Komite Pengadaan I : Persetujuan HPS, Metode, Bobot Evaluasi, Panitia Pengadaan <i>Annual Technical Support</i> (ATS) <i>Core System Oracle UBS Konvensional</i> 2024 -2026 - Komite Pengadaan I : Persetujuan HPS, Metode, Bobot Evaluasi, Panitia Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Investasi Pemerintah PEN (IP PEN) PT Perkebunan Nusantara I (Persero) - Komite Pengembangan Produk: Persetujuan Revisi SPP Pembiayaan (Penambahan Ketentuan/Fitur General Purpose Financing) - Laporan Progres Report Penyusunan Annual Report tahun 2023 - Ratifikasi Rabom, Agenda Lembaga dan Laporan Pelaksanaan Komite - Laporan Pemaparan <i>Coding</i> - Komite Sumber Daya Manusia: Persetujuan Rancangan PDD tentang Kebijakan Struktur Organisasi LPEI. - Procurement Committee: I Approval of Annual Maintenance Winners and Treasury Dealing System (TDS) Support - Procurement Committee I: Approval of HPS, Method, Evaluation Weight, Procurement Committee for Annual Technical Support (ATS) Core System Oracle UBS Conventional 2024-2026 - Procurement Committee I: Approval of HPS, Method, Evaluation Weight, Procurement Committee for Government Investment Supervisory Consultant Services PEN (IP PEN) PT Perkebunan Nusantara I (Persero) - Product Development Committee: Approval of Revision of Financing SPP (Addition of General Purpose Financing Provisions/ Features) - Progress Report on the Preparation of the 2023 Annual Report - Ratification of Rabom, Institutional Agenda and Committee Implementation Report - Coding Exposure Report - Human Capital Committee: Approval of the Draft of on Indonesia Eximbank's Organizational Structure Policy.	- Riyani Tirtoso - Dikdik Yustandi - Maqin U. Norhadi - Agus Windiarto - Chesna F. Anwar - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati
14	MR.0015/ MDI/03/2024	5 Mar 2024	- Laporan Keputusan Komite Kebijakan dan Pedoman: Persetujuan Revisi Peraturan Direktur Eksekutif (PDE) tentang Standar Pedoman Operasional (SPO) Asuransi - Laporan Keputusan Komite Manajemen Risiko: Persetujuan Penetapan <i>Country Limit</i> - Laporan Kajian Risiko dan Portofolio Nikel - Persetujuan Laporan Hasil Z-Score DJPPR - Laporan Kinerja Keuangan posisi 29 Februari 2024 - Laporan Proses Pengadaan Penunjukkan Langsung Multi Winner - Ratifikasi Rapat <i>Board of Management</i>, Agenda Lembaga dan Laporan Pelaksanaan Komite - Policy and Guidelines Committee Decision Report: Approval of the Revision of Executive Director Regulation (PDE) on the Insurance Standard Operational Guidelines (SOP) - Risk Management Committee Decision Report: Approval of Country Limit Determination - Nickel Portfolio and Risk Study Report - Approval of DJPPR Z-Score Results Report - Financial Performance Report as of February 29, 2024 - Direct Multi Winner Appointment Procurement Process Report - Ratification of the Board of Management Meeting, Institutional Agenda and Committee Implementation Report	- Riyani Tirtoso - Dikdik Yustandi - Maqin U. Norhadi - Agus Windiarto - Chesna F. Anwar - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati
15	MR.0015.01/ MDI/03/2024	8 Mar 2024	Persetujuan Prinsip Pengadaan <i>Enhancement Surrounding System</i> Terdampak Perubahan <i>Core System Batch-1</i> Approval of the Principles of Procurement of Enhancement Surrounding System Impacted by Changes to the Core System Batch-1	- Riyani Tirtoso - Dikdik Yustandi - Maqin U. Norhadi - Agus Windiarto - Chesna F. Anwar - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati

No	No Risalah No. Minutes	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
16	MR.0016/ MDI/03/2024	13 Mar 2024	- Laporan Hasil Audit Laporan Keuangan Tahun 2023 - Persetujuan Materi Rapat Dewan Direktur - Laporan Progres Inisiatif Strategis dalam rangka Publikasi Laporan Keuangan - PMN - Pinjaman Pemerintah - Pengelolaan Media dan Publik Pasca Penerbitan Laporan Keuangan - Persetujuan Media Partnership Tahun 2024 - Persetujuan Prinsip Renewal <i>Subscription Bankers Almanac</i> - Persetujuan Izin Prinsip Renewal <i>Subscription Financial Spread</i> - Laporan Pengadaan Tahun 2023 dan Rencana Pengadaan Tahun 2024 - Persetujuan Izin Prinsip Pengadaan <i>Integrated Originating System</i> (IOS) Fase1 - Komite Pengadaan I: Persetujuan Pemenang Pengadaan Perpanjangan Sewa Sistem Asuransi - Audit Results Report of 2023 Financial Report - Approval of the Board of Directors Meeting Materials - Progress Report on Strategic Initiatives in the Framework of Publication of Financial Reports - PMN - Government Loans - Management of Media and Public Post-Issue of Financial Reports - Approval of the 2024 Media Partnership - Approval of the Principles of Renewal Subscription Bankers Almanac - Approval of Principle Permit for Renewal Subscription Financial Spread - Procurement Report for 2023 and Procurement Plan for 2024 - Approval of Principle Permit for Integrated Originating System (IOS) Phase 1 Procurement - Procurement Committee I: Approval of Winner of Insurance System Lease Extension Procurement	- Riyani Tirtoso - Dikdik Yustandi - Maqin U. Norhadi - Agus Windiarto - Chesna F. Anwar - I Nyoman Gede Suarja - Cuti / On leave - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati
17	MR.0017/ MDI/03/2024	18 Mar 2024	Tindak Lanjut <i>Press Conference</i> Jaksa Agung dan Menteri Keuangan Follow-up Press Conference of the Attorney General and Minister of Finance	- Riyani Tirtoso - Dikdik Yustandi - Maqin U. Norhadi - Agus Windiarto - Chesna F. Anwar - Sam Malee - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati



No	No Risalah No. Minutes	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
18	MR.0018/ MDI/03/2024	19 Mar 2024	- Komite Kebijakan dan Pedoman: Persetujuan Peraturan Direktur Eksekutif Sekretaris Lembaga - Laporan Sekretariat Lembaga Tahun 2023 - Persetujuan Izin Prinsip Perpanjangan Penyedia Jasa <i>Medical Check Up</i> 2024 - Persetujuan Izin Prinsip Perpanjangan Asuransi Kesehatan Pegawai 2024 - Laporan Hasil Audit Persepsi Media Tahun 2023 - Laporan Akhir <i>Assessment</i> Pegawai oleh GML - Persetujuan Prinsip Perpanjangan Sewa Ruang Kantor Cabang Semarang - Ratifikasi Rapat <i>Board of Management</i>, Agenda Lembaga dan Laporan Pelaksanaan Komite - Laporan Progres Strategi Komunikasi - Persetujuan Kajian Pemberian Fasilitas <i>Account Receivable Financing</i> dan Asuransi Proteksi Piutang Dagang Pada Satu Debitur yang Sama - Diskusi Laporan Hapus Buku Tahun 2024 - Policy and Guidelines Committee: Approval of the Regulation of the Executive Director of Secretary of Institution - Report of the Secretariat of Institution in 2023 - Approval of the Extension of Principle Permit for Medical Check Up Service Provider in 2024 - Approval of the Extension of Principle Permit for Employee Health Insurance in 2024 - Report on the Results of Media Perception Audit in 2023 - Final Report of Employee Assessment by GML - Approval of Lease Extension of Semarang Branch Office Space - Ratification of the Board of Management Meeting, Institutional Agenda and Committee Implementation Report - Report on the Progress of Communication Strategy - Approval of the Study on Account Receivable Financing Facilities and Trade Receivables Protection Insurance for the Same Debtor - Discussion of the Write-Off Report in 2024	- Riyani Tirtoso - Dikdik Yustandi - Maqin U. Norhadi - Agus Windiarto - Chesna F. Anwar - Sam Malee - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati
19	MR.0019/ MDI/03/2024	26 Mar 2024	- Laporan Perkembangan Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah - Persetujuan Penambahan Penghapusbukuan Piutang Tahun 2024 - Persetujuan Iuran Anggota LAPS SJK - Persetujuan Prinsip Perpanjangan Sewa Kendaraan Operasional - Persetujuan Prinsip Penambahan Sewa Multi Fungsi Printer - Komite Pengadaan I: Permohonan Persetujuan Pemenang Pengadaan <i>Annual Technical Support</i> UBS Konvensional - Komite Pengadaan I: Permohonan Persetujuan Pengadaan <i>Optical Character Recognition</i> (OCR) - Komite Pengadaan I: Permohonan Persetujuan Pekerjaan Tambahan Pengadaan Jasa Konsultan Verifikasi Debitur Hapus Buku - Laporan Pembukuan KMK <i>Revolving</i> di <i>Core Banking</i> - Laporan Pembentukan Cadangan Piutang Tak Tertagih - Laporan <i>Creditors Meeting</i> - Laporan Foto <i>Annual Report</i> - Report on the Progress of Problematic Financing Management - Approval of Additional Write-off of Receivables in 2024 - Approval of LAPS SJK Membership Contributions - Approval in Principle of Extension of Operational Vehicle Rental - Approval in Principle of Additional Multi-Function Printer Rental - Procurement Committee I: Request for Approval of Winner of Conventional UBS Annual Technical Support Procurement - Procurement Committee I: Request for Approval of Optical Character Recognition (OCR) Procurement - Procurement Committee I: Request for Approval of Additional Work for Procurement of Debtor Verification Consultant Services Write-Off - Report on Revolving KMK Bookkeeping in Core Banking - Report on Formation of Reserves for Doubtful Receivables - Report on Creditors Meeting - Photo Report of Annual Report	- Riyani Tirtoso - Dikdik Yustandi - Maqin U. Norhadi - Agus Windiarto - Chesna F. Anwar - Sam Malee - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati

No	No Risalah No. Minutes	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
20	MR.0020/ MDI/03/2024	27 Mar 2024	- Laporan Hasil Audit Laporan Keuangan 2023 - Laporan Potensi Pelampauan BMPP Debitur - Audit Report of Financial Statement 2023 - Report on Potential Exceedance of Debtor BMPP	- Riyani Tirtoso - Dikdik Yustandi - Maqin U. Norhadi - Agus Windiarto - Chesna F. Anwar - Sam Malee - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati
21	MR.0021/ MDI/04/2024	2 Apr 2024	- Komite Kebijakan dan Pedoman :Persetujuan Perubahan PDE Teknologi Sistem Informasi - Komite Pengadaan I : Persetujuan Perpanjangan Sewa Kantor LPEI Cabang Semarang - Persetujuan Prinsip Pengadaan <i>Subscription</i> 20 Lisensi Tableau Tahun 2024 – 2025 - Komite Pengadaan I : Usulan HPS, Ruang Lingkup, Metode, Evaluasi dan Panitia Pengadaan <i>Integrated Originating System</i> (IOS) Fase 1 (<i>Loan Originating System</i> Pembiayaan) - Persetujuan Perubahan <i>Timeline</i> GRC dan Pakta GRC - Ratifikasi, Agenda Lembaga dan Laporan Pelaksanaan Komite - Laporan Tindak Lanjut Pemeriksaan OJK - BMPP Salim group - Pemaparan Arah Pertumbuhan Sektor Nikel dan Persetujuan terhadap Portfolio <i>Guideline</i> dan <i>Industry Financing Reference</i> (IFR) Nikel - Policy and Guidelines Committee: Approval of Changes to Information System Technology PDE - Procurement Committee I: Approval of Extension of Lease of Semarang Branch LPEI Office - Approval of Procurement Principles for Subscription of 20 Tableau Licenses for 2024 – 2025 - Procurement Committee I: HPS Proposal, Scope, Method, Evaluation and Integrated Originating System (IOS) Procurement Committee Phase 1 (<i>Loan Originating System</i> Financing) - Approval of Changes to GRC Timeline and GRC Pact - Ratification, Institutional Agenda and Committee Implementation Report - OJK Audit Follow-up Report - Salim Group BMPP - Presentation of Nickel Sector Growth Direction and Approval of Nickel Portfolio Guidelines and Industry Financing Reference (IFR)	- Riyani Tirtoso - Dikdik Yustandi - Maqin U. Norhadi - Agus Windiarto - Chesna F. Anwar - Sam Malee - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati
22	MR.0022/ MDI/04/2024	16 Apr 2024	- Laporan Tim Task Force Pasca Publikasi Laporan Keuangan: - Kreditur - Media - Hukum - Lain-Lain - Rencana <i>Sharing Digital Platform</i> dengan Bank Mandiri - Pemberitaan <i>Good Bank</i> LPEI - Agenda Forum Internasional - Task Force Team Report Post Publication of Financial Report: - Creditors - Media - Law - Others - Digital Platform Sharing Plan with Bank Mandiri - Indonesia Eximbank Good Bank News - International Forum Agenda	- Riyani Tirtoso - Dikdik Yustandi - Maqin U. Norhadi - Agus Windiarto - Cuti / On leave - Chesna F. Anwar - Sam Malee - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Cuti / On leave - Titiek Setiyowati



No	No Risalah No. Minutes	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
23	MR.0023/ MDI/03/3034	19 Apr 2024	- Laporan Progres DigiEx Komodoln - Laporan <i>Monitoring</i> Pembiayaan Bermasalah Triwulan I Tahun 2024 - Pertanggungjawaban Kinerja Tahun 2023 - DigiEx Komodoln Progress Report - Problematic Financing Monitoring Report for Quarter I of 2024 - Performance Accountability for 2023	- Riyani Tirtoso - Dikdik Yustandi - Maqin U. Norhadi - Agus Windiarso - Cuti / On leave - Chesna F. Anwar - Sam Malee - I Nyoman Gede Suarja – Izin / Request for Permission - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto – Cuti / On leave - Titiek Setiyowati
24	MR.0024/ MDI/04/2024	23 Apr 2024	- Persetujuan Komite Pengadaan I terhadap HPS, Metode, Bobot Evaluasi & Panitia Pengadaan <i>Renewal Subscription Bankers Almanac</i> - Persetujuan Komite Pengadaan I terhadap HPS, Metode, Bobot Evaluasi & Panitia Pengadaan <i>Integrated Originating System</i> (IOS) untuk Sistem Pembiayaan Fase I (<i>loan Originating System</i> Pembiayaan) - Persetujuan Komite Pengadaan I terhadap HPS, Metode, Bobot Evaluasi & Panitia Pengadaan Perpanjangan Asuransi Kesehatan Pegawai - Persetujuan Prinsip Pengadaan <i>Renewal Warranty & Local Support</i> UBS - Persetujuan Komite Manajemen Risiko terhadap Laporan Tingkat Kesehatan dan Profil Risiko TW I tahun 2024 - Persetujuan Komite Pengembangan Produk terhadap Persetujuan Perubahan Standar Pedoman Produk Penugasan Khusus LPEI - Persetujuan Komite Kebijakan dan Pedoman terhadap Persetujuan Perubahan PDE terkait Pengaturan PTO mengenai SKAI - Persetujuan Laporan Realisasi RKAT TW I Tahun 2024 - Laporan <i>Update Annual Report</i> Tahun 2023 - Laporan <i>Update Tindak Lanjut Pemeriksaan</i> OJK Tahun 2023 - Approval of Procurement Committee I on HPS, Method, Evaluation Weight & Procurement Committee <i>Renewal Subscription Bankers Almanac</i> - Approval of Procurement Committee I on HPS, Method, Evaluation Weight & Procurement Committee <i>Integrated Originating System</i> (IOS) for Phase I Financing System (<i>loan Originating System</i> Pembiayaan) - Approval of Procurement Committee I on HPS, Method, Evaluation Weight & Procurement Committee <i>Employee Health Insurance Extension</i> - Approval of Procurement Principles <i>Renewal Warranty & Local Support</i> UBS - Approval of Risk Management Committee on Health Level and Risk Profile Report Q1 2024 - Approval of Product Development Committee on Approval of Changes to Indonesia Eximbank Special Assignment Product Guidelines Standards - Approval of Policy and Guidelines Committee on Approval of Changes to PDE related to PTO Regulations regarding SKAI - Approval of RKAT Realization Report Q1 2024 - Annual Report Update Report 2023 - Audit Follow-up Update Report OJK 2023	- Riyani Tirtoso - Dikdik Yustandi - Maqin U. Norhadi - Agus Windiarso - Chesna F. Anwar - Sam Malee - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati

No	No Risalah No. Minutes	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
25	MR.0025/ MDI/04/2024	24 Apr 2024	- Pembahasan Mengenai Implementasi BMPP bagi Penjaminan dan Asuransi - Pembahasan Mengenai Utilisasi Salim Group - Discussion on the Implementation of BMPP for Guarantee and Insurance - Discussion on the Utilization of Salim Group	- Riyani Tirtoso - Dikdik Yustandi - Maqin U. Norhad – Tidak ikut / Not Joining - Agus Windiarto – Tidak ikut / Not Joining - Chesna F. Anwar – Tidak ikut / Not Joining - Sam Malee - I Nyoman Gede Suarja – Tidak ikut / Not Joining - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto – Tidak ikut / Not Joining - Titiek Setiyowati
26	MR.0026/ MDI/04/2024	26 Apr 2024	FGD Penyusunan Rencana Jangka Panjang LPEI Periode 2025 – 2029 FGD on Preparation of LPEI Long-Term Plan for the Period 2025 – 2029	- Riyani Tirtoso - Dikdik Yustandi - Maqin U. Norhadi - Agus Windiarto - Chesna F. Anwar - Sam Malee - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati
27	MR.0027/ MDI/04/2024	30 Apr 2024	- Persetujuan Komite Kebijakan dan Pedoman terhadap Revisi SPO Penjaminan - Persetujuan Komite Kebijakan dan Pedoman terhadap Revisi SPO Asuransi - Persetujuan Komite Pengadaan I terhadap Perpanjangan Asuransi Kesehatan - Laporan Progres <i>Management Letter Audit</i> Tahun Buku 2023 - Pemberitahuan Hasil Keputusan Komite Personalia - Persetujuan Prinsip <i>Renewal Support</i> BI RTGS 2024 – 2027 - Persetujuan Prinsip Perbaikan dan Penggantian <i>Door Access</i> - Persetujuan Komite Pengadaan I terhadap HPS, Metode dan Panitia Pengadaan, Bobot Evaluasi dan Panitia Pengadaan Perpanjangan sewa Kendaraan Operasional - Approval of the Policy and Guidelines Committee on the Revision of Guarantee SOP - Approval of the Policy and Guidelines Committee on the Revision of Insurance SOP - Approval of Procurement Committee I on the Extension of Health Insurance - Report on the Progress of Management Letter Audit for 2023 Fiscal Year - Notification of the Results of Personnel Committee Decision - Approval of the Principle of Renewal Support BI RTGS 2024 – 2027 - Approval of the Principle of Repair and Replacement of Door Access - Approval of Procurement Committee I on HPS, Methods and Procurement Committee, Evaluation Weight and Procurement Committee for Extension of Operational Vehicle Lease	- Riyani Tirtoso - Dikdik Yustandi - Maqin U. Norhadi - Agus Windiarto - Chesna F. Anwar - Sam Malee - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati
28	MR.0028/ MDI/05/2024	7 May 2024	- Persetujuan Finalisasi <i>Management Letter</i> - Laporan Kinerja Keuangan Posisi 30 April 2024 - Laporan Finalisasi IKU <i>Board of Management</i> - Management Letter Finalization Approval - Financial Performance Report Position 30 April 2024 - Board of Management IKU Finalization Report	- Riyani Tirtoso - Dikdik Yustandi - Maqin U. Norhadi - Agus Windiarto - Chesna F. Anwar - Sam Malee - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati

No	No Risalah No. Minutes	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
29	MR.0029/ MDI/05/2024	14 May 2024	- Persetujuan Komite Pengadaan I terhadap Rekomendasi Penambahan Jangka Waktu Penyampaian dan Revisi Jaminan Penawaran pada Pengadaan Jasa Implementasi Modernisasi Core System - Persetujuan Penambahan Jangka Waktu Penyampaian dan Revisi Jaminan Penawaran pada Pengadaan Jasa Implementasi Modernisasi Core System - Persetujuan Komite Manajemen Risiko terhadap Tindak Lanjut Laporan Tingkat Kesehatan LPEI Tahun 2023 - Persetujuan Prinsip Pengadaan Bulan Mei s.d. Desember 2024 - Laporan Tindak Lanjut Ratifikasi - Laporan Progres Pengajuan Usulan Skema Pinjaman Pemerintah - Materi Rapat Pertanggungjawaban Kinerja LPEI tahun 2023 - Procurement Committee I Approval of the Recommendation for the Extension of Submission Period and Revision of Bid Guarantee in the Procurement of Core System Modernization Implementation Services - Approval of the Extension of Submission Period and Revision of Bid Guarantee in the Procurement of Core System Modernization Implementation Services - Risk Management Committee Approval of the Follow-up to Indonesia Eximbank Health Level Report for 2023 - Approval of the Procurement Principles for May to December 2024 - Ratification Follow-up Report - Progress Report on Submission of Government Loan Scheme Proposals - Materials for Indonesia Eximbank Performance Accountability Meeting for 2023	- Riyani Tirtoso - Dikdik Yustandi - Maqin U. Norhadi - Agus Windiarso - Chesna F. Anwar - Sam Malee - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati
30	MR.0030/ MDI/05/2024	21 May 2024	- Usulan SPP Program Kemitraan - Persetujuan Prinsip <i>Renewal Support Exchange & Active Directory</i> - Laporan Persiapan <i>Soft Launching</i> Komodoin - Laporan Perkembangan Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah - Ratifikasi, Agenda Lembaga dan Laporan Pelaksanaan Komite - Agenda Lain-Lain – HUT LPEI - Persetujuan Komite Kebijakan dan Pedoman terhadap Rancangan Perubahan Peraturan Dewan Direktur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Pelaksana I - Proposal of Partnership Program SPP - Approval in Principle of Renewal Support Exchange & Active Directory - Report on Preparation of Komodoin Soft Launching - Report on Progress of Problematic Financing Management - Ratification, Institutional Agenda and Committee Implementation Report - Other Agenda – Indonesia Eximbank Anniversary - Approval of Policy and Guidelines Committee on Draft Amendment to Board of Directors Regulation on Appointment and Dismissal of Managing Director I	- Riyani Tirtoso - Dikdik Yustandi - Maqin U. Norhadi - Agus Windiarso - Chesna F. Anwar - Sam Malee - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati

No	No Risalah No. Minutes	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
31	MR.0031/ MDI/05/2024	28 May 2024	- Laporan Evaluasi KAP RSM tahun 2023 - Persetujuan Prinsip Pengadaan KAP Tahun 2024 - Persetujuan Izin Prinsip Pengadaan Jasa Konsultan Akuntansi dan Aktuaria Implementasi PSAK 74/117 - Komite Pengadaan I : Persetujuan Pemenang Pengadaan Jasa Implementasi Modernisasi <i>Core System</i> - Komite Pengadaan I : Persetujuan Pemenang Pengadaan Sewa Kendaraan Operasional Kantor Pusat dan Kantor Jaringan Indonesia Eximbank - Laporan Progres <i>Soft/Pilot Launching</i> Komodoln - Laporan Produk Syariah - Laporan Produk PKE UKM - Laporan Status <i>Website</i> LPEI - Ratifikasi, Agenda Lembaga dan Laporan Pelaksanaan Komite - Evaluation Report of RSM Public Accounting Firm in 2023 - Approval in Principle of Public Accounting Firm Procurement in 2024 - Approval of Principle Permit for Procurement of Accounting and Actuarial Consulting Services for Implementation of PSAK 74/117 - Procurement Committee I: Approval of Winner of Core System Modernization Implementation Services Procurement - Procurement Committee I: Approval of Winner of Operational Vehicle Rental Procurement for Head Office and Indonesia Eximbank Network Office - Progress Report of Komodoln <i>Soft/Pilot Launching</i> - Sharia Product Report - UKM PKE Product Report - LPEI Website Status Report - Ratification, Institutional Agenda and Committee Implementation Report	- Riyani Tirtoso - Dikdik Yustandi - Maqin U. Norhadi - Agus Windiarto - Chesna F. Anwar - Sam Malee - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Cuti / On leave - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati
32	MR.0032/ MDI/06/2024	4 Jun 2024	<i>Hearing Retention Guarantee</i> - Revisi SPO Pembiayaan dan SPP Pembiayaan - Revisi PDD Kebijakan Pembiayaan dan SPO Sembilan Komite Dibawah DE - Komite Pengadaan I : Permohonan Persetujuan HPS, Metode dan Panitia Pengadaan Jasa Konsultan Akuntansi Implementasi PSAK 74/117 - Komite Pengadaan I : Permohonan Persetujuan HPS, Metode dan Panitia Pengadaan Jasa Aktuaria Implementasi PSAK 74/117 - Permohonan Persetujuan Izin Prinsip Pemeliharaan AC untuk Kantor Pusat Jakarta - Laporan Progres Jasa Konsultan Pembuatan Kajian Komersial Penjualan Lantai Kantor dan Relokasi Kantor - Persetujuan Perhitungan <i>Developmental Impact</i> LPEI - Persetujuan Perubahan <i>Timeline</i> GRC, <i>Action Plan</i> dan Konsultan GRC dan Pakta GRC - Laporan Hasil Pelaksanaan <i>Soft Launching</i> EWD Tools - Hearing Retention Guarantee - Revision of Financing SOP and Financing SPP - Revision of Financing Policy PDD and SOP of Nine Committees Under DE - Committee for Duplication I: Request for Approval of HPS, Method and Committee for Procurement of Accounting Consultant Services for Implementation of PSAK 74/117 - Committee for Procurement I: Request for Approval of HPS, Method and Committee for Procurement of Actuarial Services for Implementation of PSAK 74/117 - Request for Approval of Principle Permit for AC Maintenance for Jakarta Head Office - Report on Progress of Consultant Services for Making Commercial Study of Office Floor Sales and Office Relocation - Approval of Indonesia Eximbank Developmental Impact Calculation - Approval of Changes to GRC Timeline, Action Plan and GRC Consultant and GRC Pact - Report on the Results of the Implementation of Soft Launching of EWD Tools	- Riyani Tirtoso - Dikdik Yustandi - Maqin U. Norhadi - Agus Windiarto - Chesna F. Anwar - Sam Malee - I Nyoman Gede Suarja – Cuti / On leave - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati



No	No Risalah No. Minutes	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
33	MR.0033/ MDI/06/2024	7 Jun 2024	Kinerja Keuangan Mei 2024 Financial Performance May 2024	• Riyani Tirtoso • Dikdik Yustandi • Maqin U. Norhadi • Agus Windiarto • Chesna F. Anwar • Sam Malee • I Nyoman Gede Suarja – Cuti / On leave • Anwar Harsono • Wahyu Wibowo • Anton Herdianto • Titiek Setiyowati
34	MR.0034/ MDI/06/2024	11 Jun 2024	• Laporan Keputusan Komite Manajemen Risiko: Usulan Pelaksanaan Rencana Tindak Tingkat Kesehatan Faktor Rentabilitas Posisi Mei 2024 • Laporan Keputusan Komite Manajemen Risiko: Usulan <i>Liquidity Reserve Limit</i> dan <i>Securities Loss Limit</i> • Laporan Keputusan Komite Manajemen Risiko: Hasil <i>Review</i> Cadangan Klaim Penjaminan dan Asuransi • Persetujuan Prinsip Pengadaan Penambahan dan Implementasi Perangkat <i>Access Point</i> WiFi dan Optimalisasi <i>Link</i> Internet LPEI • Persetujuan Prinsip Pengadaan <i>Maintenance</i> dan <i>Warranty Data Center Facility Equipment</i> Tahun 2024-2027 dan Pembelian Perangkat HSSD • Persetujuan Prinsip Pengadaan Jasa Konsultan <i>Change Management</i> Implementasi Modernisasi <i>Core System</i> • Persetujuan Prinsip Topik Proposal Duta Transformasi Kementerian Keuangan Tahun 2024 • Persetujuan Penugasan Pegawai Sebagai Fasilitator Kemenkeu Satu Negeri 2024 • Laporan Keputusan Komite Pengadaan I: HPS, Metode, Bobot Evaluasi dan Panitia Pengadaan <i>Enhancement Data Warehouse</i> dan <i>MIS Reporting System</i> • Risk Management Committee Decision Report: Proposed Implementation of the Health Level Action Plan for the Profitability Factor Position in May 2024 • Risk Management Committee Decision Report: Proposed Liquidity Reserve Limit and Securities Loss Limit • Risk Management Committee Decision Report: Results of the Guarantee and Insurance Claim Reserve Review • Approval in Principle for Procurement of Additional and Implementation of WiFi Access Point Devices and Optimization of Indonesia Eximbank Internet Links • Approval in Principle for Procurement of Maintenance and Warranty Data Center Facility Equipment for 2024-2027 and Purchase of HSSD Devices • Approval in Principle for Procurement of Change Management Consultant Services for Implementation of Core System Modernization • Approval in Principle for Proposal Topic for Transformation Ambassador of the Ministry of Finance in 2024 • Approval of Assignment of Employees as Facilitators of the Ministry of Finance One Country 2024 • Procurement Committee Decision Report I: HPS, Methods, Evaluation Weights and Procurement Committee for Enhancement Data Warehouse and MIS Reporting System	• Riyani Tirtoso • Dikdik Yustandi • Maqin U. Norhadi • Agus Windiarto • Chesna F. Anwar • Sam Malee • I Nyoman Gede Suarja • Anwar Harsono • Wahyu Wibowo • Anton Herdianto • Titiek Setiyowati
35	MR.0035/ MDI/06/2024	14 Jun 2024	Ijin Prinsip Pengadaan <i>Enhancement Surrounding System</i> Terdampak Perubahan <i>Core System Batch-2</i> Principle Permit Enhancement Surrounding System Procurement Impacted by Core System Changes Batch-2	• Riyani Tirtoso • Dikdik Yustandi • Maqin U. Norhadi • Agus Windiarto • Chesna F. Anwar • Sam Malee • I Nyoman Gede Suarja • Anwar Harsono • Wahyu Wibowo • Anton Herdianto • Titiek Setiyowati

No	No Risalah No. Minutes	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
36	MR.0036/ MDI/06/2024	19 Jun 2024	- Laporan Keputusan Komite Kebijakan dan Pedoman: Usulan Revisi SPO Asuransi terkait Kewenangan dan <i>Flow Process</i> - Laporan Potensi Klaim Asuransi - Laporan Keputusan Komite Manajemen Risiko: Progres Pengembangan Operational Risk Management (ORM) LPEI - Agenda Lembaga - Policy and Guidelines Committee Decision Report: Proposed Revision of Insurance SOP related to Authority and Flow Process - Potential Insurance Claims Report - Risk Management Committee Decision Report: Indonesia Eximbank Operational Risk Management (ORM) Development Progress - Institutional Agenda	- Riyani Tirtoso - Dikdik Yustandi - Maqin U. Norhadi - Agus Windiarto - Chesna F. Anwar - Sam Malee - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati
37	MR.0037/ MDI/06/2024	25 Jun 2024	- Laporan Keputusan Komite Manajemen Risiko: Laporan Analisa <i>Stress Test</i> - Persetujuan Materi RUPS PT IEB Prima Aset - Persetujuan Prinsip Penyedia Jasa <i>Assessment</i> Calon Direktur Pelaksana - Persetujuan Prinsip Perpanjangan Asuransi Personal <i>Accident</i> - Laporan Keputusan Komite Pengadaan I: HPS, Ruang Lingkup, Metode, Bobot Evaluasi, dan Panitia Pengadaan <i>Maintenance & Warranty Data Center Facility Equipment</i> dan Pembelian Perangkat HSSD - Laporan Rapat Koordinasi Internal tentang Penguatan Peran Kementerian Keuangan dalam Proses Aksesi Indonesia menjadi Anggota OECD & Proses Penyusunan Dokumen Initial Memorandum - Laporan FGD tentang Stocktaking Tantangan Penerapan Sanksi Multilateral dan Unilateral bagi Diplomasi Ekonomi - Laporan Keputusan Komite Kebijakan dan Pedoman: Tindak Lanjut Catatan DMTL OJK berdasarkan Hasil <i>Meeting</i> dengan OJK tanggal 24 Juni 2024 - Laporan Keputusan Komite Pengembangan Produk: Rancangan MPO SME <i>Credit Process</i> (BSA, QCA & Proposal) - Laporan Kepuasan Pemangku Kepentingan LPEI - Permohonan Persetujuan Rencana Kerja RDD - Senior <i>Leader Workshop</i> (SLW) - Laporan Hasil RAPIMTAS bersama Menteri Keuangan - Agenda Lembaga - Laporan Perkembangan Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah Mei 2024 - Risk Management Committee Decision Report: Stress Test Analysis Report - Approval of PT IEB Prima Aset GMS Material - Approval in Principle of Assessment Service Provider for Candidate for Managing Director - Approval in Principle of Extension of Personal Accident Insurance - Procurement Committee Decision Report I: HPS, Scope, Method, Evaluation Weight, and Procurement Committee for Maintenance & Warranty Data Center Facility Equipment and HSSD Device Purchase - Report of Internal Coordination Meeting on Strengthening the Role of the Ministry of Finance in Indonesia's Accession Process to Become an OECD Member & the Process of Preparing Initial Memorandum Documents - FGD Report on Stocktaking Challenges of Implementing Multilateral and Unilateral Sanctions for Economic Diplomacy - Policy and Guidelines Committee Decision Report: Follow-up to OJK DMTL Notes based on the Results of the Meeting with OJK on June 24, 2024 - Product Development Committee Decision Report: Draft of MPO SME Credit Process (BSA, QCA & Proposal) - Indonesia Eximbank Stakeholder Satisfaction Report - Request for Approval of RDD Work Plan - Senior Leader Workshop (SLW) - Report on the Results of RAPIMTAS with the Minister of Finance - Institutional Agenda - Report on the Progress of Problematic Financing Management May 2024	- Riyani Tirtoso - Dikdik Yustandi - Maqin U. Norhadi - Agus Windiarto - Chesna F. Anwar - Sam Malee - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati

No	No Risalah No. Minutes	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
38	MR.0038/ MDI/07/2024	2 Jul 24	- Permohonan Persetujuan <i>Partner Payment Gateway & Logistics</i> Komodoin - Laporan Hasil Media <i>Monitoring</i> Pasca RDP - Laporan Tindak Lanjut Arahan MK untuk IT <i>Security</i> - Agenda Lembaga: - Senior <i>Leader Workshop</i> - Study Visit: <i>Association of Development Finance Institutions of Malaysia (ADFIM)</i> - Laporan Komite Pengadaan I tentang Keputusan atas Persetujuan HPS, Metode, Bobot Evaluasi dan Panitia Pengadaan Kantor Akuntan Publik Tahun 2024 - Laporan Keuangan 1st cut Juni 2024 - Application for Approval of Komodoin Payment Gateway & Logistics Partner - Media Monitoring Results Report Post-RDP - Follow-up Report of MK's Direction for IT Security - Institutional Agenda: - Senior Leader Workshop - Study Visit: Association of Development Finance Institutions of Malaysia (ADFIM) - Report of Procurement Committee I on the Decision on Approval of HPS, Method, Evaluation Weight and Public Accounting Firm Procurement Committee for 2024 - Financial Report 1st cut June 2024	- Riyani Tirtoso - Dikdik Yustandi - Maqin U. Norhadi - Agus Windiarso - Chesna F. Anwar - Sam Malee - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati
39	MR.0039/ MDI/07/2024	8 Jul 24	- Persetujuan Rancangan Perubahan Rencana Bisnis dan RKAT 2024 - Persetujuan Kinerja Keuangan per 30 Juni 2024 - Persetujuan Laporan Pelaksanaan Rencana Tindak Tingkat Kesehatan Faktor Rentabilitas posisi Juni 2024 - Approval of Draft Changes to Business Plan and RKAT 2024 - Approval of Financial Performance as of June 30, 2024 - Approval of Report on Implementation of Action Plan for Health Level of Rentability Factor position June 2024	- Riyani Tirtoso - Dikdik Yustandi - Maqin U. Norhadi - Agus Windiarso - Chesna F. Anwar - Sam Malee - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati
40	MR.0040/ MDI/07/2024	9 Jul 24	- Laporan Komite Pengadaan I tentang Keputusan atas Usulan Perubahan HPS Pengadaan Infrastruktur Pendukung Implementasi Solusi Modernisasi <i>Core System</i> yang Terpilih - Agenda Lembaga - Report of Procurement Committee I on the Decision on Proposed Changes to HPS for Procurement of Supporting Infrastructure for Implementation of Selected Core System Modernization Solutions - Institutional Agenda	- Riyani Tirtoso - Dikdik Yustandi - Maqin U. Norhadi - Agus Windiarso - Chesna F. Anwar - Sam Malee - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati

No	No Risalah No. Minutes	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
41	MR.0041/ MDI/07/2024	16 Jul 24	- Laporan Progres Audit BPKP Tahap II - Laporan Tindak Lanjut Surat DJKN terkait Audit OJK 2023 - Laporan Perkembangan Phising IT - Laporan Tindak Lanjut Temuan terkait FPR - Laporan Strategi dan Kinerja Bisnis Asuransi - Laporan Progres Task Force Pertumbuhan Pembiayaan - Persetujuan Prinsip Pengadaan <i>Warranty dan Support Firewall Palo Alto Network</i> - Persetujuan Prinsip Pengadaan <i>Local Support Operating System (OS) dan Database (DB) Server Oracle</i> - Laporan Keputusan Komite Pengadaan I: Persetujuan Ruang Lingkup Pekerjaan, HPS, Metode, Bobot Evaluasi, dan Panitia Pengadaan <i>Middleware Enterprise Service Bus (ESB) dan Aplikasi Middleware Payment System (MPS)</i> - Laporan Keputusan Komite Pengadaan I: Persetujuan Ruang Lingkup Pekerjaan, HPS, Metode, Bobot Evaluasi, dan Panitia Pengadaan Infrastruktur Pendukung Modernisasi <i>Core System</i> - Persetujuan Prinsip Perubahan Anggaran Pengadaan Infrastruktur Pendukung Modernisasi <i>Core System</i> sesuai Rekomendasi Komite Pengadaan - BPKP Audit Progress Report Phase II - Follow-up Report on DJKN Letter regarding OJK Audit 2023 - IT Phishing Development Report - Follow-up Report on Findings related to FPR - Insurance Business Strategy and Performance Report - Financing Growth Task Force Progress Report - Approval in Principle for Procurement of Warranty and Support Firewall Palo Alto Network - Approval in Principle for Procurement of Local Support Operating System (OS) and Database (DB) Oracle Server - Report on Decision of Procurement Committee I: Approval of Scope of Work, HPS, Method, Evaluation Weight, and Committee for Procurement of Middleware Enterprise Service Bus (ESB) and Middleware Payment System (MPS) Applications - Report on Decision of Procurement Committee I: Approval of Scope of Work, HPS, Method, Evaluation Weight, and Committee for Procurement of Supporting Infrastructure for Core System Modernization - Approval in Principle for Changes in Budget for Procurement of Supporting Infrastructure for Core System Modernization according to Recommendation of Procurement Committee	- Riyani Tirtoso - Dikdik Yustandi - Maqin U. Norhadi - Agus Windiarto - Chesna F. Anwar - Sam Malee - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati
42	MR.0042/ MDI/07/2024	23 Jul 24	- Laporan Komite Pengadaan I : Persetujuan Ruang Lingkup, Metode, Bobot Evaluasi, HPS, dan Panitia Pengadaan <i>Warranty & Support Perangkat Firewall Palo Alto Network Tahun 2024-2027</i> - Laporan Insiden <i>CrowdStrike Falcon</i> - Permohonan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi - Laporan Surat Peringatan Tertulis dari OJK - Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan & Penerapan Program APU, PPT & PPPSPM - Laporan Hasil Pembinaan Arsip - Laporan <i>Exit Meeting</i> BPKP - Laporan RKAT dan Rencana Bisnis Semester I Tahun 2024 - Laporan Komite Manajemen Risiko: Persetujuan Laporan Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan TWII Tahun 2024 - Persetujuan Laporan Perkembangan Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah TW II Tahun 2024 - Penyampaian Hasil RDD tanggal 22 Juli 2024 - Procurement Committee Report I: Approval of Scope, Method, Evaluation Weight, HPS, and Warranty & Support Procurement Committee for Palo Alto Network Firewall Devices for 2024-2027 - CrowdStrike Falcon Incident Report - Request for Submission of Cassation Legal Efforts - Written Warning Letter Report from OJK - Report on Implementation of Compliance Function & Implementation of APU, PPT & PPPSPM Programs - Report on Archive Improvement Results - BPKP Exit Meeting Report - Report on RKAT and Business Plan for Semester I of 2024 - Risk Management Committee Report: Approval of Risk Profile and Health Level Report for Q2 2024 - Approval of Progress Report on Management of Problematic Financing for Q2 2024 - Submission of RDD Results on July 22, 2024	- Riyani Tirtoso - Maqin U. Norhadi - Agus Windiarto - Chesna F. Anwar - Sam Malee - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati

No	No Risalah No. Minutes	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
43	MR.0043/ MDI/07/2024	30 Jul 24	- Persetujuan Tanggapan LPEI atas RPOJK tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi PVML - Laporan Surat OJK: Penjadwalan Ulang <i>Exit Meeting</i> Audit OJK menjadi tgl 5 Agustus 2024 - Laporan Hasil Pembahasan Terkait Komite dan Masa Tunggu Direktur Pelaksana - Persetujuan Pendaftaran Website LPEI pada PSE Lingkup Publik - Laporan Komite Pengadaan I: Persetujuan Pengadaan Gagal <i>Renewal Warranty</i> dan <i>Support Server Sparc Based</i> Tahun 2024 – 2025 - Laporan Komite Pengadaan I: Persetujuan Pemenang KAP untuk Audit Keuangan Tahun 2024 - Persetujuan Prinsip Pengadaan <i>Warranty & Support Server Sparc Based</i> dan <i>Pengadaan Warranty & Support Server Intel Based</i> - Approval of Indonesia Eximbank's Response to RPOJK on the Implementation of Risk Management for PVML - OJK Letter Report: Rescheduling of OJK Audit Exit Meeting to August 5, 2024 - Report on the Results of Discussions Regarding the Committee and Waiting Period for Managing Director - Approval of Indonesia Eximbank's Website Registration on the Public Scope PSE - Procurement Committee Report I: Approval of Failed Procurement of <i>Renewal Warranty</i> and <i>Support Server Sparc Based</i> in 2024 – 2025 - Procurement Committee Report I: Approval of the Winner of KAP for the Financial Audit in 2024 - Approval of the Principle of Procurement of <i>Warranty & Support Server Sparc Based</i> and Procurement of <i>Warranty & Support Server Intel Based</i>	- Riyani Tirtoso - Maqin U. Norhadi - Agus Windiarto – Perdin / Business Trip - Chesna F. Anwar - Sam Malee - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati
44	MR.0044/ MDI/08/2024	6 Aug 24	- Laporan Komite Pengadaan I: Persetujuan Pengadaan <i>Maintenance & Warranty Data Center Facility Equipment</i> Tahun 2024 – 2027 dan Pembelian Perangkat HSSD - Laporan Komite Pengadaan I: Persetujuan Pemenang Pengadaan Jasa Konsultan Akuntansi Implementasi PSAK 74/117 - Laporan Komite Pengadaan I: Persetujuan Pemenang Pengadaan Jasa Konsultan Aktuaria Implementasi PSAK 74/117 - Kinerja Keuangan posisi 31 Juli 2024 - Persetujuan Pembayaran Klaim Asuransi Proteksi Piutang Dagang / <i>Trade Kredit Insurance</i> - Persetujuan Metode Pemilihan <i>Partnership Logistic & Payment Gateway</i> - Persetujuan Tanggapan atas Kuesioner BPKP terkait Pemetaan Implementasi Manajemen Risiko pada BUMN - Penyampaian Agenda Hubungan Internasional - Laporan Komite Pengembangan Produk: Persetujuan Usulan SPP Pembiayaan (Revisi) - Laporan Progres atas Pembahasan Draft Perjanjian antara LPEI dengan Oracle dan Midas - Laporan Komite Pengadaan II: Persetujuan Pemenang Pengadaan <i>Local Warranty & Support Server Intel Based</i> - Procurement Committee Report I: Approval of Procurement of <i>Maintenance & Warranty Data Center Facility Equipment</i> in 2024 – 2027 and Purchase of HSSD Devices - Procurement Committee Report I: Approval of the Winner of the Procurement of Accounting Consultant Services for the Implementation of PSAK 74/117 - Procurement Committee Report I: Approval of the Winner of the Procurement of Actuarial Consultant Services for the Implementation of PSAK 74/117 - Financial Performance as of July 31, 2024 - Approval of Payment of Trade Credit Insurance Claims - Approval of the Partnership Logistic & Payment Gateway Selection Method - Approval of Responses to BPKP Questionnaire regarding the Mapping of Risk Management Implementation in SOE - Submission of the International Relations Agenda - Product Development Committee Report: Approval of the Financing SPP Proposal (Revision) - Progress Report on the Discussion of the Draft Agreement between Indonesia Eximbank and Oracle and Midas - Procurement Committee Report II: Approval of Winner of Intel Based <i>Local Warranty & Support Server Procurement</i>	- Riyani Tirtoso - Maqin U. Norhadi - Agus Windiarto – Izin / Request for Permission - Chesna F. Anwar – Izin / Request for Permission - Sam Malee - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati

No	No Risalah No. Minutes	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
45	MR.0045/ MDI/08/2024	13 Aug 24	• Persetujuan Usulan Strategi dan Fitur Transaksi Syariah • Laporan Komite Manajemen Risiko: Pelaksanaan Rencana Tindak Faktor Rentabilitas Posisi Juli 2024 • Persetujuan Prinsip Pengadaan Jasa Remediasi Pentest Sistem <i>Corporate Website</i> • Persetujuan Prinsip Pengadaan dan Penggunaan Anggaran Jasa <i>Penetration Testing Platform Digital</i> Komodoin Tahun 2024 • Persetujuan Prinsip Pengadaan dan Penggunaan Anggaran Renewal Lisensi Microsoft 365 periode Tahun 2024-2025 • RKAT 2025 dan RJP Tahap IV Tahun 2025-2029 • Laporan Komite Pengadaan I: Ketentuan Kuorum Komite Pengadaan • Laporan Komite Pengadaan I: Persetujuan Penghapusan Klausul Denda Jasa Implementasi Modernisasi <i>Core System</i> • Laporan Berita Acara Pemeriksaan KPK • Laporan Komite Pengadaan I: Persetujuan Ruang Lingkup Metode, HPS, dan Panitia Pengadaan untuk <i>Enhancement System</i> SAS PSAK dan <i>Credit Rating Management System</i> (CRMS) • Laporan Komite Pengadaan I: Persetujuan Pemenang Pengadaan <i>Renewal Warranty & Support Server UBS (Sparc Based)</i> Tahun 2024 – 2025 • Agenda Lembaga • Approval of Sharia Transaction Strategy and Feature Proposal • Risk Management Committee Report: Implementation of Profitability Factor Action Plan for July 2024 Position • Approval in Principle of Procurement of Corporate Website System Pentest Remediation Services • Approval in Principle of Procurement and Budget Use for Komodoin Digital Platform Penetration Testing Services in 2024 • Approval in Principle of Procurement and Budget Use for Microsoft 365 License Renewal for the 2024-2025 Period • RKAT 2025 and RJP Phase IV for 2025-2029 • Procurement Committee Report I: Procurement Committee Quorum Provisions • Procurement Committee Report I: Approval of Elimination of Fine Clause for Core System Modernization Implementation Services • Report of KPK Examination Minutes • Procurement Committee Report I: Approval of Scope of Method, HPS, and Procurement Committee for SAS PSAK Enhancement System and Credit Rating Management System (CRMS) • Procurement Committee Report I: Approval of Winner of UBS Renewal Warranty & Support Server Procurement (Sparc Based) 2024-2025 • Institutional Agenda	• Riyani Tirtoso • Maqin U. Norhadi • Agus Windiarto – Izin / Request for Permission • Chesna F. Anwar – Izin / Request for Permission • Sam Malee • I Nyoman Gede Suarja • Anwar Harsono • Wahyu Wibowo • Anton Herdianto • Titiek Setiyowati
46	MR.0046/ MDI/08/2024	19 Aug 24	Audit Pengadaan BPK (Data Pengadaan Tahun 2020 – 2024) BPK Procurement Audit (Procurement Data 2020-2024)	• Riyani Tirtoso • Maqin U. Norhadi • Agus Windiarto – Cuti / On leave • Chesna F. Anwar • Sam Malee • I Nyoman Gede Suarja • Anwar Harsono • Wahyu Wibowo • Anton Herdianto • Titiek Setiyowati

No	No Risalah No. Minutes	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
47	MR.0047/ MDI/08/2024	20 Aug 24	- Laporan Komite Pengadaan I: Persetujuan Pemenang Pengadaan <i>Warranty & Support</i> Perangkat Palo Alto <i>Network</i> - Laporan Komite Pengadaan I: Persetujuan Ruang Lingkup, Metode, Bobot Evaluasi, HPS, dan Panitia Pengadaan <i>Renewal</i> Lisensi Microsoft 365 (2024-2025) - Laporan Hasil Pelaksanaan IT <i>CyberSecurity Drill</i> - Laporan Komite Kebijakan dan Pedoman: Persetujuan PDD Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Non Program Kemitraan - Laporan Komite Kebijakan dan Pedoman: Persetujuan Usulan PDE tentang SPO Penggunaan Akad Wakalah Bi Al-Istitsmar dalam Skema Pendanaan Unit Kerja yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dari Unit Kerja yang Membidangi/ Melaksanakan Transaksi <i>Treasury</i> - Laporan Komite Pengembangan Produk: Persetujuan Usulan SPP Pembiayaan (Revisi) - Produk <i>Overseas Financing, Buyers Credit</i> dan Penetapan RAC PMA - Persetujuan Pembayaran Klaim Asuransi Proteksi Piutang Dagang / <i>Trade Kredit Insurance</i> - Procurement Committee Report I: Approval of Winner of Palo Alto Network Warranty & Support Device Procurement - Procurement Committee Report I: Approval of Scope, Method, Evaluation Weight, HPS, and Microsoft 365 License Renewal Procurement Committee (2024-2025) - Report on the Results of IT CyberSecurity Drill Implementation - Report of the Policy and Guidelines Committee: Approval of PDD of Non-Partnership Program Social and Environmental Responsibility (TJCSRSL) Policy - Policy and Guidelines Committee Report: Approval of PDE Proposal on SOP on Use of Wakalah Bi Al-Istitsmar Contract in Funding Scheme of Work Units Conducting Business Activities Based on Sharia Principles from Work Units in Charge of/ Implementing Treasury Transactions - Product Development Committee Report: Approval of Financing SPP Proposal (Revision) - Overseas Financing Products, Buyers Credit and Determination of RAC PMA - Approval of Trade Credit Insurance Claim Payment	- Riyani Tirtoso - Maqin U. Norhadi - Agus Windiarito - Chesna F. Anwar - Sam Malee - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati
48	MR.0049/ MDI/08/2024	27 Aug 24	- Persetujuan Laporan Perkembangan Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah Bulan Juli 2024 dan Hapus Buku Tahun 2024 - Persetujuan Prinsip Pengadaan <i>Warranty & Support</i> Perangkat <i>Web Application Firewall</i> (WAF) ADC Big-IP F5i4600 & i5800 Tahun 2024 – 2027 - Progres DMTL OJK Jatuh Waktu Agustus & September 2024 - Pembahasan Terkait Komite - Kuasa Tanda Tangan kepada Pegawai PT IEB Prima Aset (IPA) - Persetujuan Relokasi Kantor Cabang Batam ke Gedung Kantor Kementerian Keuangan - Persetujuan Hapus Buku Tahun 2025 - Approval of the Progress Report on Problematic Financing Management in July 2024 and Write-Off in 2024 - Approval in Principle of Procurement of Warranty & Support for Web Application Firewall (WAF) ADC Big-IP F5i4600 & i5800 Devices in 2024 – 2027 - Progress of OJK DMTL Due in August & September 2024 - Discussion Related to the Committee - Power of Attorney to Sign for PT IEB Prima Aset (IPA) Employees - Approval of Relocation of Batam Branch Office to the Ministry of Finance Office Building - Approval of Write-Off in 2025	- Riyani Tirtoso - Maqin U. Norhadi - Sam Malee - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati - Mengundang / Inviting: - Damianus Ledjo Hufat - Nury Sriandajani
49	MR.0050/ MDI/08/2024	30 Aug 24	Persetujuan Perubahan Sekretaris Lembaga (<i>Corporate Secretary</i>) Approval of Changes to the Institution's Secretariat (<i>Corporate Secretary</i>)	- Riyani Tirtoso - Maqin U. Norhadi - Sam Malee - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati - Mengundang / Inviting: - Damianus Ledjo Hufat - Nury Sriandajani

No	No Risalah No. Minutes	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
50	MR.0051/ MDI/09/2024	3 Sep 24	- Arahan Rabom - Laporan Bisnis Asuransi 2024 - Laporan Komite Kebijakan dan Pedoman: Persetujuan Perubahan SPO Asuransi - Laporan Komite Pengadaan I: Persetujuan Ruang Lingkup, Metode, Bobot Evaluasi, HPS dan Panitia Pengadaan <i>Warranty & Support</i> Perangkat Web <i>Application Firewall</i> ADC F5 - Laporan Rencana Audit Tahun Buku 2024 oleh KAP RSM - Laporan Komite Kebijakan dan Pedoman: Persetujuan Perubahan SPO tentang Pelaksanaan Standar Akuntansi - Laporan Komite Pengadaan I: Persetujuan Rekomendasi Waiver atas Jaminan Penawaran Pengadaan <i>Enhancement Data Warehouse & MIS Reporting System</i> - Rabom Direction - Insurance Business Report 2024 - Report of the Policy and Guidelines Committee: Approval of Changes to Insurance SPO - Procurement Committee Report I: Approval of Scope, Method, Evaluation Weight, HPS and Procurement Committee <i>Warranty & Support</i> for Web Application Firewall ADC F5 Devices - Audit Plan Report for Fiscal Year 2024 by KAP RSM - Policy and Guideline Committee Report: Approval of Changes to SOP on Implementation of Accounting Standards - Procurement Committee Report I: Approval of Recommendation Waiver on Bid Guarantee for Enhancement Data Warehouse & MIS Reporting System Procurement	- Riyani Tirtoso - Maqin U. Norhadi - Sam Malee - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati - Mengundang / Inviting: - Damianus Ledjo Hufat - Nury Sriandajani
51	MR.0052/ MDI/09/2024	10 Sep 24	- Persetujuan Prinsip Pelaksanaan Survei Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Tahun 2024 - Laporan Ratifikasi, Agenda Lembaga dan Laporan Pelaksanaan Komite - Persetujuan Komite Manajemen Risiko terhadap Laporan Hasil Penilaian OJK terhadap Tingkat Kesehatan - Persetujuan Komite Manajemen Risiko terhadap Laporan Pelaksanaan Rencana Tindak Tingkat Kesehatan Faktor Rentabilitas Posisi Agustus 2024 - Keputusan Komite Kebijakan dan Pedoman terhadap Revisi PDE tentang SPO Pembiayaan (DMTL OJK 2024, Rekomendasi BPKP dan Update Proses Bisnis) - Laporan Progres DMTL OJK Jatuh Waktu September 2024 - Laporan Finalisasi RKAT 2025 dan RJP Tahap IV 2025 – 2029 - Persetujuan Prinsip Pengadaan <i>Subscription Refinitiv</i> (d/h <i>Reuters</i>) periode Juli 2024 – Juni 2027 dan <i>Bloomberg</i> periode September 2024 – Agustus 2027 - Approval of Principles for Implementation of Stakeholder Satisfaction Survey in 2024 - Ratification Report, Institutional Agenda and Committee Implementation Report - Approval of Risk Management Committee on OJK Assessment Results Report on Health Level - Approval of Risk Management Committee on Implementation Report on Health Level Action Plan for Rentability Factor Position August 2024 - Decision of Policy and Guideline Committee on Revision of PDE on Financing SOP (OJK DMTL 2024, BPKP Recommendation and Business Process Update) - OJK DMTL Progress Report Due in September 2024 - Finalization Report of RKAT 2025 and RJP Phase IV 2025 – 2029 - Approval in Principle of Procurement of Subscription Refinitiv (formerly Reuters) for the period July 2024 – June 2027 and Bloomberg for the period September 2024 – August 2027	- Riyani Tirtoso - Maqin U. Norhadi - Sam Malee - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati - Mengundang / Inviting: - Damianus Ledjo Hufat - Nury Sriandajani



No	No Risalah No. Minutes	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
52	MR.0053/ MDI/09/2024	17 Sep 24	• Persetujuan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara LPEI dan UK Export Finance (UKEF) • Persetujuan Prinsip dan Penggunaan Anggaran Pengadaan Survei Tingkat Kepuasan Stakeholder 2024 • Persetujuan Prinsip Pelaksanaan dan Penggunaan Anggaran untuk Pengadaan Jasa Mandays <i>Penetration Testing</i> Tahun 2024 – 2025 • Persetujuan Komite Kebijakan dan Pedoman terhadap Perubahan SPO NBFI Line • Persetujuan Komite Pengadaan I terhadap Pemenang Pengadaan <i>Integrated Originating System Fase 1 (Loan Originating System Pembiayaan)</i> • Persetujuan Komite Pengadaan I terhadap Pemenang Pengadaan <i>Enhancement Datawarehouse & MIS Reporting System</i> • Persetujuan Rancangan Tanggapan & Action Plan atas Hasil Penilaian OJK terhadap Tingkat Kesehatan LPEI • Persetujuan Prinsip dan Penggunaan Anggaran Pengadaan Layanan <i>Software Defined Wide Area Network (SD-WAN) BI-RTGS</i> di DRC LPEI • Persetujuan Prinsip dan Penggunaan Anggaran Pengadaan <i>Renewal Lisensi Manage Engine AD Manager, AD Audit Plus, dan Service Desk Plus (Helpdesk System)</i> • Persetujuan Prinsip dan Penggunaan Anggaran Pengadaan <i>Local Warranty dan Support Storage Netapp</i> Periode Tahun 2024 – 2025 • Approval of the Signing of Memorandum of Understanding between Indonesia Eximbank and UK Export Finance (UKEF) • Approval in Principle and Use of Budget for Procurement of Stakeholder Satisfaction Survey 2024 • Approval in Principle of Implementation and Use of Budget for Procurement of Mandays <i>Penetration Testing</i> Services for 2024 – 2025 • Approval of the Policy and Guidelines Committee on Changes to NBFI Line SPO • Approval of Procurement Committee I on the Winner of the Integrated Originating System Phase 1 Procurement (Loan Originating System Financing) • Approval of Procurement Committee I on the Winner of Enhancement Datawarehouse & MIS Reporting System Procurement • Approval of the Draft Response & Action Plan for the Results of OJK Assessment of Indonesia Eximbank's Health Level • Approval in Principle and Use of Budget for Procurement of Software Defined Wide Area Network (SD-WAN) BI-RTGS Services at DRC LPEI • Approval in Principle and Use of Budget for Procurement of License Renewal for Manage Engine AD Manager, AD Audit Plus, and Service Desk Plus (Helpdesk System) • Approval in Principle and Use of Budget for Procurement of Local Warranty and Support Storage Netapp for the Period of 2024 – 2025	• Riyani Tirtoso • Maqin U. Norhadi • Sam Malee • I Nyoman Gede Suarja (Cutti) / On leave • Anwar Harsono • Wahyu Wibowo • Anton Herdianto • Titiek Setiyowati • Mengundang / Inviting: • Damianus Ledjo Hufat • Nury Sriandajani

No	No Risalah No. Minutes	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
53	MR.0054/ MDI/09/2024	24 Sep 24	• Persetujuan Komite Manajemen Risiko terhadap Usulan Pelaksanaan Penilaian <i>Risk Maturity</i> 2024 • Persetujuan Prinsip Pengadaan Annual Maintenance HCL BigFix 2024-2027 • Persetujuan Prinsip dan Penggunaan Anggaran (FPR) Pengadaan Warranty dan Support Perangkat WAN <i>Firewall Fortigate</i> Tahun 2024-2027 • Laporan Persetujuan Komite Pengadaan I terhadap Pemenang Pengadaan <i>Renewal</i> Lisensi Microsoft 365 • Laporan Persetujuan Komite Pengadaan I terhadap Pemenang Pengadaan Infrastruktur Pendukung Modernisasi <i>Core System</i> • Persetujuan Prinsip Pengadaan Penyedia Jasa IT <i>Outsourcing</i> untuk Implementasi Modernisasi <i>Core System</i> • Laporan Persetujuan Komite Pengadaan I terhadap HPS, Metode, Bobot Evaluasi, dan Panitia Pengadaan Penyedia Jasa IT <i>Outsourcing</i> untuk Implementasi Modernisasi <i>Core System</i> • Laporan Persetujuan Komite Pengadaan I terhadap HPS, Metode, Bobot Evaluasi, dan Panitia Pengadaan <i>Renewal Subscription Refinitiv (dh Reuters)</i> dan Bloomberg • Laporan Progres DMTL OJK Jatuh Tempo 30 September 2024 • Laporan Tanggapan Surat Peringatan OJK No. S-410 dan S-435 • Laporan Progres <i>Organization for Economic Co-operation and Development</i> (OECD) • Laporan Hasil Pertemuan dengan OJK Pasar Modal • Persetujuan Prinsip Pengadaan Jasa Konsultan PMO People • Persetujuan Laporan Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah Bulan Agustus 2024 • Persetujuan Finalisasi RKAT 2025 dan RJP Tahap IV 2025 – 2029 • Persetujuan Penyesuaian Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, Tahapan Pembayaran, dan Perhitungan Denda Keterlambatan pada Pengadaan <i>Integrated Digital Platform for Export Ecosystem</i> Indonesia (DigiEx) • Laporan Persetujuan Komite Pengadaan I terhadap Penambahan Ruang Lingkup Pekerjaan pada Pengadaan <i>Integrated Digital Platform for Export Ecosystem</i> Indonesia (DigiEx)	• Riyani Tirtoso • Maqin U. Norhadi • Sam Malee • I Nyoman Gede Suarja • Anwar Harsono • Wahyu Wibowo • Anton Herdianto • Titiek Setiyowati • Mengundang / Inviting: • Damianus Ledjo Hufat • Nury Sriandajani
			• Risk Management Committee Approval of the Proposal for the Implementation of 2024 Risk Maturity Assessment • Approval in Principle for the Procurement of Annual Maintenance HCL BigFix 2024-2027 • Approval in Principle and Budget Use (FPR) for the Procurement of Warranty and Support for WAN Firewall Fortigate Devices in 2024-2027 • Approval Report of Procurement Committee I on the Winner of the Microsoft 365 License Renewal Procurement • Approval Report of Procurement Committee I on the Winner of the Procurement of Supporting Infrastructure for Core System Modernization • Approval in Principle for the Procurement of IT Outsourcing Service Providers for the Implementation of Core System Modernization • Approval Report of Procurement Committee I on the HPS, Method, Evaluation Weight, and Procurement Committee for IT Outsourcing Service Providers for the Implementation of Core System Modernization • Approval Report of Procurement Committee I on HPS, Method, Evaluation Weight, and Procurement Committee for Refinitiv (dh Reuters) and Bloomberg Subscription Renewal • OJK DMTL Progress Report Due September 30, 2024 • Response Report to OJK Warning Letter No. S-410 and S-435 • Progress Report of the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) • Report on the Results of Meeting with OJK Capital Market • Approval in Principle for Procurement of PMO People Consultant Services • Approval of the Report on Management of Problematic Financing in August 2024 • Approval of Finalization of RKAT 2025 and RJP Phase IV 2025 – 2029 • Approval of Adjustment of Work Implementation Period, Payment Stages, and Calculation of Late Fines in the Procurement of <i>Integrated Digital Platform for Export Ecosystem</i> Indonesia (DigiEx) • Approval Report of Procurement Committee I on the Addition of Scope of Work in the Procurement of <i>Integrated Digital Platform for Export Ecosystem</i> Indonesia (DigiEx)	



No	No Risalah No. Minutes	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
54	MR.0055/ MDI/10/2024	1 Oct 24	- Persetujuan Komite Pengadaan I terhadap HPS, Metode, Bobot dan Panitia Pengadaan Warranty & Support Perangkat WAN Firewall Fortigate Tahun 2024 – 2027 - Persetujuan Komite Pengadaan I terhadap HPS, Metode, Bobot dan Panitia Pengadaan Implementasi Integrated Regulatory Reporting System (IRRS) Sebagai Bagian dari Aplikasi Terdampak Modernisasi Core System - Laporan Pembahasan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) LPEI - Laporan Progres Bisnis Asuransi - Laporan Monitoring Isu-Isu Terkini - Approval of Procurement Committee I on HPS, Method, Weight and Procurement Committee for Warranty & Support for WAN Firewall Fortigate Devices for 2024 – 2027 - Approval of Procurement Committee I on HPS, Method, Weight and Procurement Committee for Implementation of Integrated Regulatory Reporting System (IRRS) as Part of Applications Affected by Core System Modernization - Report on Discussion of Indonesia Eximbank Business Identification Number (NIB) and Electronic System Organizer (PSE) - Insurance Business Progress Report - Report on Monitoring Current Issues	- Riyani Tirtoso - Maqin U. Norhadi - Sam Malee - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati - Mengundang / Inviting: - Damianus Ledjo Hufat - Nury Sriandajani
55	MR.0056/ MDI/10/2024	7 Oct 24	- Perubahan Rancangan RKAT 2024 dan RJP - Laporan Keuangan September 2024 - Rencana PKS antara LPEI dan Jamdatun - Rancangan Perubahan PDD Tata Cara Oengangkatan dan Pemberhentian Direktur Pelaksana - Changes to Draft RKAT 2024 and RJP - September 2024 Financial Report - PKS Plan between Indonesia Eximbank and Jamdatun - Draft Changes to PDD Procedures for Appointment and Dismissal of Managing Directors	- Riyani Tirtoso - Maqin U. Norhadi - Sam Malee - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati - Mengundang / Inviting: - Damianus Ledjo Hufat - Nury Sriandajani
56	MR.0057/ MDI/10/2024	10 Oct 24	<i>Rabom Offsite Meeting</i> Rabom Offsite Meeting	- Riyani Tirtoso - Maqin U. Norhadi - Sam Malee - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati - Mengundang / Inviting: - Damianus Ledjo Hufat - Nury Sriandajani

No	No Risalah No. Minutes	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
57	MR.0058/ MDI/10/2024	15 Oct 24	- Laporan Progres Bisnis Asuransi - Persetujuan Progres Hapus Buku Tahun 2025 - Ratifikasi Quality Assurance Pengadaan - Persetujuan Prinsip Pengadaan Periode Bulan Oktober – Desember 2024 - Closing Nawasena Project - Laporan Komite Pengadaan I: Persetujuan Pemenang Pengadaan Enhancement SAS PSAK & Credit Rating Management System - Laporan Komite Pengadaan I: Persetujuan Pemenang Pengadaan Pekerjaan Tambah Implementasi Indonesia Ekspor Ecosystem Platform (Komodoln) - Laporan Komite Manajemen Risiko: Laporan Early Warning Detection dan Review CKPN Q3-2024 - Rencana Study Visit Ghana Export-Import Bank - Insurance Business Progress Report - Approval of 2025 Write-off Progress - Ratification of Procurement Quality Assurance - Approval of Procurement Principles for the October – December 2024 Period - Closing of Nawasena Project - Report of Procurement Committee I: Approval of Winner of Enhancement SAS PSAK & Credit Rating Management System Procurement - Report of Procurement Committee I: Approval of Winner of Additional Work Procurement for Implementation of Indonesia Export Ecosystem Platform (Komodoln) - Report of Risk Management Committee: Early Warning Detection and CKPN Review Report Q3-2024 - Ghana Export-Import Bank Study Visit Plan	- Riyani Tirtoso - Maqin U. Norhadi - Sam Malee - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati Mengundang / Inviting: - Damianus Ledjo Hufat - Nury Sriandajani
58	MR.0059/ MDI/10/2024	22 Oct 24	- Arahan Direktur Eksekutif : Protokol Komunikasi Internal - Percepatan Transformasi - Persetujuan Laporan Realisasi RKAT Tahun 2024 Triwulan III - Laporan Rencana Tindak OJK - Laporan Komite Kebijakan dan Pedoman: Persetujuan Perubahan PDE tentang SPO Pengukuran atas Penurunan Nilai Instrumen Keuangan dan Kontrak Asuransi LPEI - Laporan Komite Kebijakan dan Pedoman: Rancangan Perubahan PDD Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur dan KDE tentang Staff Dewan Direktur - Laporan Komite Pengembangan Produk: Persetujuan Prinsip SPP Kewenangan Penetapan Konten Digital Platform Ekspor (Komodoln) - Laporan Komite Pengembangan Produk: New Product Mapping LPEI - Persetujuan Rencana Kerja & Anggaran Program Kemitraan - Persetujuan Prinsip Pengadaan Jasa Asuransi Aktiva Tetap - Laporan Komite Pengadaan I: Persetujuan Pemenang Pengadaan Middleware ESB & Aplikasi MPS - Laporan Komite Pengadaan I: Persetujuan HPS, Metode, Bobot Evaluasi & Panitia Pengadaan Renewal Managed Service Core System - Executive Director's Direction: Internal Communication Protocol - Acceleration of Transformation - Approval of RKAT Realization Report for 2024 Quarter III - OJK Action Plan Report - Report of Policy and Guidelines Committee: Approval of Changes to PDE on SOP for Measurement of Impairment of Financial Instruments and Indonesia Eximbank Insurance Contracts - Report of Policy and Guidelines Committee: Draft Changes to PDD Guidelines for Work Procedures of Board of Directors and KDE regarding the Staff of Board of Directors - Report of Product Development Committee: Approval in Principle of SPP Authority for Determining Digital Content of the Export Platform (Komodoln) - Report of Product Development Committee: New Product Mapping LPEI - Approval of Partnership Program Work Plan & Budget - Approval in Principle of Procurement of Fixed Asset Insurance Services - Report of Procurement Committee I: Approval of Winner of Procurement of ESB Middleware & MPS Application - Report of Procurement Committee I: Approval of HPS, Method, Evaluation Weight & Procurement Committee for Renewal Managed Service Core System	- Riyani Tirtoso - Maqin U. Norhadi - Sam Malee - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati Mengundang / Inviting: - Damianus Ledjo Hufat - Nury Sriandajani



No	No Risalah No. Minutes	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
59	MR.0060/ MDI/10/2024	29 Oct 24	- Persetujuan Perubahan Nama dan Pengelolaan Whistleblowing System - Laporan Realisasi Performance Management Meeting Posisi TW III/2024 - Update Kinerja dan Transformasi LPEI kepada OJK - Persetujuan MPO Perubahan Proses Pengadaan Barang/Jasa - Komite Kebijakan dan Pedoman : Persetujuan Usulan Perubahan PDE terkait Komite Pengadaan Barang Jasa LPEI dan Usulan Susunan Panitia Pengadaan - Komite Pengadaan I : Persetujuan Pemenang Pengadaan Warranty & Support Perangkat Web Application Firewall (WAF) ADC Big IP F5 i4600 & i5800 - Persetujuan Prinsip Perpanjangan Sewa Kantor Cabang Makassar - Ratifikasi, Agenda Lembaga dan Laporan Pelaksanaan Komite - Approval of Name Change and Management of the Whistleblowing System - Report on Realization of Performance Management Meeting Position Q3/2024 - Update on Indonesia Eximbank Performance and Transformation to OJK - Approval of MPO Changes in the Procurement Process of Goods/ Services - Policy and Guideline Committee: Approval of Proposed Changes to PDE related to Indonesia Eximbank Goods and Services Procurement Committee and Proposed Composition of Procurement Committee - Procurement Committee I: Approval of Winner of Warranty & Support Procurement of Web Application Firewall (WAF) ADC Big IP F5 i4600 & i5800 Devices - Approval in Principle of Extension of Makassar Branch Office Lease - Ratification, Institutional Agenda and Committee Implementation Report	- Riyani Tirtoso - Maqin U. Norhadi - Sam Malee - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati Mengundang / Inviting: - Damianus Ledjo Hufat - Nury Sriandajani

No	No Risalah No. Minutes	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
60	MR.0061/ MDI/11/2024	5 Nov 24	- Laporan Komite Kebijakan dan Pedoman: Persetujuan Rancangan Perubahan PDE SPO Pelayanan Pengaduan Nasabah - Persetujuan Prinsip Pengadaan Perpanjangan Sewa Multi Function Printer (MFP) - Persetujuan Prinsip Usulan Addendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pekerjaan Konsultan PMO Modernisasi Core System - Laporan Komite Pengadaan I: Persetujuan HPS, Metode, Bobot Evaluasi & Panitia Pengadaan Warranty dan Support Perangkat Cisco Network Access Control (NAC) - Laporan Komite Pengadaan I: Persetujuan HPS, Metode, Bobot Evaluasi & Panitia Pengadaan Backup Storage System - Persetujuan Pengadaan Penyedia Jasa IT Outsourcing untuk Implementasi Modernisasi Core System - Persetujuan Hasil Survei Kesiapan Adopsi Standar Pengungkapan Berkelanjutan IFRS S1 dan S2 - Laporan Entry Meeting Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan - Laporan Kinerja Bisnis Asuransi - Ratifikasi, Laporan Pelaksanaan Komite & Agenda Lembaga - Laporan Kinerja Keuangan Posisi 31 Oktober 2024 - Laporan Kinerja per Direktorat per Juni 2024 - Report of Policy and Guidelines Committee: Approval of Draft Changes to PDE SPO Customer Complaint Service - Approval in Principle of Procurement of Extension of Multi Function Printer (MFP) Lease - Approval in Principle of Addendum Proposal of Cooperation Agreement (PKS) for PMO Consultant Work for Core System Modernization - Report of Procurement Committee I: Approval of HPS, Method, Evaluation Weight & Procurement Committee for Warranty and Support for Cisco Network Access Control (NAC) Devices - Report of Procurement Committee I: Approval of HPS, Method, Evaluation Weight & Procurement Committee for Backup Storage System - Approval of Procurement of IT Outsourcing Service Provider for Core System Modernization Implementation - Approval of the Results of Survey on Readiness for Adoption of IFRS S1 and S2 Sustainable Disclosure Standards - Report on the Entry Meeting of Inspectorate General of the Ministry of Finance - Report on Insurance Business Performance - Ratification, Report on Committee Implementation & Institutional Agenda - Report on Financial Performance Position October 31, 2024 - Performance Report per Directorate as of June 2024	- Riyani Tirtoso - Maqin U. Norhadi - Sam Malee - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati Mengundang / Inviting: - Damianus Ledjo Hufat - Nury Sriandajani
61	MR.0062/ MDI/11/2024	12 Nov 24	- Laporan Komite Manajemen Risiko: Persetujuan Laporan Pelaksanaan Rencana Tindak Faktor Rentabilitas Oktober 2024 - Laporan Komite Manajemen Risiko: Persetujuan Laporan Implementasi Proposal Pembiayaan UKME dan Bank Statement Analyzer (BSA) Tools - Laporan Komite Governance, Risk, dan Compliance (GRC): Persetujuan Laporan Progres Pengembangan Operational Risk Management (ORM) dan Progres Implementasi Program GRC - Laporan Progres Pemeriksaan BPK - Ratifikasi, Agenda Lembaga dan laporan Pelaksanaan Komite - Report of Risk Management Committee: Approval of Report on the Implementation of Rentability Factor Action Plan October 2024 - Report of Risk Management Committee: Approval of Report on the Implementation of SME Financing Proposal and Bank Statement Analyzer (BSA) Tools - Report of Governance, Risk, and Compliance (GRC) Committee: Approval of Report on Progress of the Development of Operational Risk Management (ORM) and the Progress of the Implementation of GRC Program - Report on the Progress of BPK Audit - Ratification, Institutional Agenda and Report on the Implementation of the Committee	- Riyani Tirtoso - Maqin U. Norhadi - Sam Malee - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati Mengundang / Inviting: - Damianus Ledjo Hufat - Nury Sriandajani



No	No Risalah No. Minutes	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
62	MR.0063/ MDI/11/2024	19 Nov 24	- Laporan 4DX: Bisnis, Transformation and Culture - Persetujuan Pembukuan Hapus Buku 25 Debitur - Persetujuan Laporan Perkembangan Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah Bulan Oktober 2024 - Permohonan Ijin Prinsip Pengadaan Jasa Travel - Laporan Komite Pengadaan I: Usulan Addendum Perjanjian Kerjasama (PKS) Pekerjaan Konsultan PMO Modernisasi Core System - Laporan Komite Pengadaan I: Persetujuan Pemenang Pengadaan Managed Service Core System UBS - Laporan Komite Pengadaan I: Persetujuan Pemenang Pengadaan Warranty dan Support Perangkat WAN Firewall Fortigate - Laporan Komite Pengadaan I: Persetujuan HPS, Metode, Bobot Evaluasi dan Panitia Pengadaan Aplikasi Document Management System - Laporan Komite Pengadaan I: Persetujuan HPS, Metode, Bobot Evaluasi dan Panitia Pengadaan Warranty dan Support Perangkat Cisco Network Access Control - Laporan Komite Pengadaan I: Persetujuan Persetujuan HPS, Metode, bobot Evaluasi dan Panitia Pengadaan License Application Performance Monitoring - Laporan Komite Pengadaan I: Persetujuan HPS, Metode, Bobot Evaluasi & Panitia Pengadaan Aplikasi Secure Web Gateway - Laporan Komite Pengadaan I: Persetujuan Permohonan Persetujuan HPS, Metode, Bobot Evaluasi dan Panitia Pengadaan Lisensi Software (Microsoft, Adobe, Citrix) - Evaluasi dan Perencanaan Strategis IPA - Laporan Perkembangan Makroekonomi Global, Domestik dan Pasar Keuangan - Persetujuan Pricing Cross-Currency Swap - Persetujuan Prinsip Salary Survey Report Tahun 2024 4DX Report: Business, Transformation and Culture - Approval of Write-off Bookkeeping of 25 Debtors - Approval of the Progress Report on Management of Problematic Financing in October 2024 - Application for Principle Permit for Procurement of Travel Services - Report of Procurement Committee I: Proposal for Addendum to Cooperation Agreement (PKS) for PMO Consultant Work for Modernization of Core System - Report of Procurement Committee I: Approval of Winner of Procurement of Managed Service Core System UBS - Report of Procurement Committee I: Approval of Winner of Procurement of Warranty and Support for WAN Firewall Fortigate Devices - Report of Procurement Committee I: Approval of HPS, Method, Evaluation Weight and Procurement Committee for Document Management System Application - Report of Procurement Committee I: Approval of HPS, Method, Evaluation Weight and Procurement Committee for Warranty and Support for Cisco Network Access Control Devices - Report of Procurement Committee I: Approval of Approval of HPS, Method, Evaluation Weight and Procurement Committee for License Application Performance Monitoring - Procurement Committee Report I: Approval of HPS, Method, Evaluation Weight & Procurement Committee for Secure Web Gateway Application - Procurement Committee Report I: Approval of Application for Approval of HPS, Method, Evaluation Weight and Procurement Committee for Software License (Microsoft, Adobe, Citrix) - IPA Strategic Planning and Evaluation - Global, Domestic and Financial Market Macroeconomic Development Report - Approval of Cross-Currency Swap Pricing - Approval of the 2024 Salary Survey Report Principle	- Riyani Tirtoso - Maqin U. Norhadi - Sam Malee - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati Mengundang / Inviting: - Damianus Ledjo Hufat - Nury Sriandajani

No	No Risalah No. Minutes	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
63	MR.0064/ MDI/11/2024	26 Nov 24	- Laporan Komite Pengadaan I: Permohonan Persetujuan Pemenang Pengadaan Subscription Refinitiv (d/h Reuters) - Laporan Komite Pengadaan I: Permohonan Persetujuan Pemenang Pengadaan Subscription Bloomberg - Update Status dan Progres Proyek Modernisasi Core System - Laporan Hearing: Klaim Penjaminan - Usulan Crash Program - Procurement Committee Report I: Application for Approval of Winner of Refinitiv Subscription Procurement (formerly Reuters) - Procurement Committee Report I: Application for Approval of Winner of Bloomberg Subscription Procurement - Update on Status and Progress of Core System Modernization Project - Hearing Report: Guarantee Claims - Crash Program Proposal	- Riyani Tirtoso - Maqin U. Norhadi - Sam Malee - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati - Damianus Ledjo Hufat - Nury Sriandajani
64	MR.0065/ MDI/12/2024	4 Dec 24	- Laporan Komite Manajemen Risiko: Persetujuan Hasil Review Komponen CKPN Kolektif 2024 - Permohonan Persetujuan Pembentukan dan Pendaftaran Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) - Persetujuan Prinsip PMO Change Management - Persetujuan Usulan Stakeholder Engagement: Building Collaboration for Sustainable Engagement - Laporan Keputusan Komite Pembiayaan atas Penjaminan - Update Bisnis Asuransi LPEI - Laporan Komite Pengadaan I: Keputusan Persetujuan HPS, Metode, Bobot Evaluasi & Panitia Pengadaan Identity Access Management - Laporan Komite Pengadaan I: Keputusan Persetujuan Sewa Gedung Kantor Cabang Makassar - Laporan Kinerja Keuangan 30 November 2024 - Risk Management Committee Report: Approval of Collective CKPN Component Review Results 2024 - Application for Approval of the Establishment and Registration of the Cyber Incident Response Team (TTIS) - Approval of the Principles of PMO Change Management - Approval of the Stakeholder Engagement Proposal: Building Collaboration for Sustainable Engagement - Report of Financing Committee Decision on Guarantees - Indonesia Eximbank Insurance Business Update - Report of Procurement Committee I: Decision on Approval of HPS, Method, Evaluation Weight & Identity Access Management Procurement Committee - Report of Procurement Committee I: Decision on Approval of Makassar Branch Office Building Rental - Financial Performance Report November 30, 2024	- Riyani Tirtoso - Maqin U. Norhadi - Sam Malee - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati - Damianus Ledjo Hufat - Nury Sriandajani
65	MR.0066/ MDI/12/2024	10 Dec 24	- Laporan Komite Manajemen Risiko: Persetujuan Laporan Pelaksanaan Rencana Tindak Faktor Rentabilitas November 2024 - Laporan Komite Manajemen Risiko : Persetujuan Portofolio Guideline 2025 - Laporan Komite Kebijakan dan Pedoman: Permohonan Persetujuan Revisi PDE tentang SPO Tata Kelola Penyedia Jasa Rekanan - Laporan Komite Kebijakan dan Pedoman: Permohonan Persetujuan Revisi PDE tentang SPO Penerimaan Pinjaman - Risk Management Committee Report: Approval of the Implementation Report of the Rentability Factor Action Plan November 2024 - Risk Management Committee Report: Approval of the 2025 Portfolio Guideline - Policy and Guideline Committee Report: Request for Approval of PDE Revision on SOP for Governance of Partner Service Providers - Policy and Guideline Committee Report: Request for Approval of PDE Revision on SOP for Loan Receipts	- Riyani Tirtoso - Maqin U. Norhadi - Sam Malee - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati - Damianus Ledjo Hufat - Nury Sriandajani

No	No Risalah No. Minutes	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda	Kehadiran Attendance
66	MR.0067/ MDI/12/2024	17 Dec 24	- Progres DMTL OJK Jatuh Waktu 31 Desember 2024 - Laporan Komite Kebijakan dan Pedoman: Persetujuan Perubahan PDE tentang Tata Tertib Kerja DE dan DP LPEI - Laporan Komite Kebijakan dan Pedoman: Persetujuan Perubahan PDE terkait Strategi <i>Anti Fraud</i> (SAF) - Laporan Komite Kebijakan dan Pedoman: Persetujuan Perubahan PDE APU PPT - Persetujuan Rencana Penyusunan Kajian atas Efektivitas Implementasi <i>One Tier Board System</i> - Laporan Hasil Pelaksanaan IT <i>CyberSecurity Drill</i> - Pengembangan <i>Risk DataMart</i> <i>Trade Checking</i> <i>Forecast</i> Capaian IKU Lembaga 2024 - Laporan Progres RKAT Tahun 2025 - Laporan Komite Pengadaan I: Persetujuan Pemenang Pengadaan Relokasi dan <i>Reinstatement</i> Gedung Kantor Jaringan Makassar - Laporan Komite Pengadaan I: Persetujuan Pemenang Pengadaan Renovasi Gedung Kantor Jaringan Makassar <i>Media Briefing Special Mission Vehicle</i> (SMV) Kemenkeu - OJK DMTL Progress Due December 31, 2024 - Policy and Guideline Committee Report: Approval of Changes to PDE on DE and DP Indonesia Eximbank Work Procedures - Policy and Guideline Committee Report: Approval of Changes to the PDE related to the Anti-Fraud Strategy (SAF) - Policy and Guideline Committee Report: Approval of Changes to APU PPT PDE - Approval of the Plan for Preparing a Study on the Effectiveness of the Implementation of One Tier Board System - Report on the Results of the Implementation of IT <i>CyberSecurity Drill</i> - Development of <i>Risk DataMart</i> <i>Trade Checking</i> <i>Forecast</i> of Institutional IKU Achievement 2024 - RKAT Progress Report 2025 - Procurement Committee Report I: Approval of Winner of Procurement of Relocation and Reinstatement of Makassar Network Office Building - Procurement Committee Report I: Approval of Winner of Procurement of Makassar Network Office Building Renovation <i>Media Briefing</i> of Special Mission Vehicle (SMV) of Ministry of Finance	- Riyani Tirtoso - Maqin U. Norhadi - Sam Malee - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati - Damianus Ledjo Hufat - Nury Sriandajani
67	MR.0068/ MDI/12/2024	30 Dec 24	- Progres Kinerja Keuangan 31 Desember 2024 - Progres DMTL Eksternal Jatuh Tempo Waktu 31 Desember 2024 - Perkembangan Penanganan Kasus Hukum LPEI - Laporan Pembiayaan Kredit Bermasalah November 2024 - Financial Performance Progress as of December 31, 2024 - External DMTL Progress Due on December 31, 2024 - Development of Indonesia Eximbank Legal Case Handling - Report on Problematic Credit Financing November 2024	- Riyani Tirtoso - Maqin U. Norhadi - Sam Malee - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati - Damianus Ledjo Hufat - Nury Sriandajani
68	MR.0069/ MDI/12/2024	31 Dec 24	- Laporan Komite <i>Governance Risk & Compliance</i> - Laporan Komite Jasa Konsultasi: Laporan Update Pencapaian IKU SME per Desember 2024 - Persetujuan Prinsip Pengadaan Data <i>Buyer</i> Asuransi Tahun 2025 - Laporan Komite Manajemen Risiko: Persetujuan Hasil Penilaian Risk Maturity 2024 - Laporan Komite Manajemen Risiko: Laporan <i>Stress Testing</i> - Persetujuan Perpanjangan PKS LPEI dan IEB IPA - Laporan Progres Audit Laporan Keuangan <i>Governance Risk & Compliance</i> Committee Report .Consulting Services Committee Report: Update Report on SME IKU Achievement as of December 2024 - Approval in Principle of Procurement of Insurance Buyer Data in 2025 - Risk Management Committee Report: Approval of Risk Maturity Assessment Results 2024 - Risk Management Committee Report: <i>Stress Testing</i> Report - Approval of Extension of Indonesia Eximbank and IEB IPA PKS - Financial Statement Audit Progress Report	- Riyani Tirtoso - Maqin U. Norhadi - Sam Malee - I Nyoman Gede Suarja - Anwar Harsono - Wahyu Wibowo - Anton Herdianto - Titiek Setiyowati - Damianus Ledjo Hufat - Nury Sriandajani

Pengungkapan Hubungan Afiliasi antara Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana, Dewan Direktur, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Berdasarkan kondisi terkini di LPEI, Dewan Direktur, termasuk Anggota Dewan Direktur lainnya dan Direktur Pelaksana, tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga hingga derajat kedua atau besan dengan sesama Anggota Dewan Direktur maupun Direktur Pelaksana.

Disclosure of Affiliation between Executive Director and Managing Directors, Board of Directors, and Major and/or Controlling Shareholders

Based on the current conditions at Indonesia Eximbank, Board of Directors, including other Board Members and Managing Directors, have no financial relationship or family relationship up to the second degree or in-law with fellow Board Members or Managing Directors.

Nama Name	Hubungan Afiliasi dengan: Affiliate Relationship with:							
	Dewan Direktur Board of Directors		Direktur Eksekutif Executive Director		Pelaksana Managing		Pemegang Saham Utama Major Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Dewan Direktur Board of Directors								
Yon Aرسال (Plt. Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif) (Acting Chairman of Board of Directors concurrently Executive Director)		✓		✓		✓		✓
Kasan (Anggota Dewan Direktur) (Member of Board of Directors)		✓		✓		✓		✓
Arus Gunawan (Anggota Dewan Direktur) Member of Board of Directors)		✓		✓		✓		✓
Dwi Teguh Wibowo (Anggota Dewan Direktur) (Member of Board of Directors)		✓		✓		✓		✓
Suminto (Anggota Dewan Direktur)* (Member of Board of Directors)*		✓		✓		✓		✓
D. James Rompas (Anggota Dewan Direktur)** (Member of Board of Directors)**		✓		✓		✓		✓
Direktur Pelaksana Managing Directors								
Anton Herdianto (Direktur Pelaksana Bisnis) (Managing Director of Financing)		✓		✓		✓		✓
Maqin U. Norhadi (Plt. Direktur Pelaksana) (Acting Managing Director)		✓		✓		✓		✓
Anwar Harsono (Plt. Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional, & Teknologi Informasi) (Acting Managing Director of Finance, Operations, & Information Technology)		✓		✓		✓		✓
T. Wahyu Prihadi Wibowo (Plt. Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan, & Sumber Daya Manusia) (Acting Managing Director of Institution Secretariat, Compliance, & Human Capital)		✓		✓		✓		✓
Sam Malee (Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit) (Managing Director of Credit & Risk Management)		✓		✓		✓		✓

Nama Name	Hubungan Afiliasi dengan: Affiliate Relationship with:							
	Dewan Direktur Board of Directors		Direktur Eksekutif Executive Director		Pelaksana Managing		Pemegang Saham Utama Major Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Agus Windiarto (Direktur Bidang Keuangan & Operasional)*** (Managing Director of Finance, Operations, and IT)***		✓		✓		✓		✓
Chesna F. Anwar (Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan)*** (Managing Director of Institutional Relations)***		✓		✓		✓		✓

*) Beliau menyelesaikan masa jabata sebagai Anggota Dewan Direktur sejak 29 Desember 2024
 **) Beliau menyelesaikan masa jabatan sebagai Anggota Dewan Direktur tanggal 31 Agustus 2024
 ***) Beliau menyelesaikan masa jabatan sebagai Direktur Pelaksana LPEI tanggal 31 Agustus 2024
 *) Has no longer served as a Member of Board of Directors since
 **) Has no longer served as a Member of Board of Directors since August 31, 2024
 ***) Has no longer served as Director of Finance & Operations since August 31, 2024

Pengungkapan Rangkap Jabatan Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana

Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana melakukan tugas secara penuh waktu dan tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris, direksi atau pejabat eksekutif pada perusahaan dan/atau lembaga lain.

Disclosure of Concurrent Positions of Board of Directors, Executive Director and Managing Directors

The Executive Director and Managing Director perform their duties on a full-time basis and are not allowed to hold concurrent positions as members of the board of commissioners, directors or executive officers at other companies and/or institutions.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana
 Concurrent Positions of Board of Directors, Executive Director and Managing Directors

Nama dan Jabatan Name and Position	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain Position in Other Institutions/Company	Nama Perusahaan/Instansi Lain Name of Other Institution/Company
Dewan Direktur Board of Directors		
Yon Arsial (Plt. Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif) (Acting Chairman of Board of Directors concurrently Executive Director)	Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Expert Staff in Tax Compliance	Kementerian Keuangan RI Ministry of Finance of the Republic of Indonesia
Kasan (Anggota Dewan Direktur) (Member of Board of Directors)	Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Head of Commodity Futures Trading Supervisory Body	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
Arus Gunawan (Anggota Dewan Direktur) (Member of Board of Directors)	Staf Ahli Menteri Bidang Pendalaman, Penyebaran, dan Pemerataan Industri Expert Staff to the Minister for Deepening, Dissemination, and Equalization of Industry	Kementerian Perindustrian Ministry of Industry
Dwi Teguh Wibowo (Anggota Dewan Direktur) (Member of Board of Directors)	Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Expert Staff in State Revenue	Kementerian Keuangan RI Ministry of Finance of the Republic of Indonesia
	Assistant of Minister for Revenue	Kementerian Keuangan RI Ministry of Finance of the Republic of Indonesia
Suminto (Anggota Dewan Direktur)* (Member of Board of Directors)*	Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Director General of Financing and Risk Management	Kementerian Keuangan RI Ministry of Finance of the Republic of Indonesia
D. James Rompas (Anggota Dewan Direktur)** (Member of Board of Directors)**	Tidak Ada None	Tidak Ada None

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana

Concurrent Positions of Board of Directors, Executive Director and Managing Directors

Nama dan Jabatan Name and Position	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain Position in Other Institutions/Company	Nama Perusahaan/Instansi Lain Name of Other Institution/Company
Direktur Pelaksana Managing Directors		
Anton Herdianto (Direktur Pelaksana Bisnis) (Managing Director of Financing)	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Maqin U. Norhadi (Plt. Direktur Pelaksana) (Acting Managing Director)	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Anwar Harsono (Plt. Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional, & Teknologi Informasi) (Acting Managing Director of Finance, Operations, & Information Technology)	Tidak Ada None	Tidak Ada None
T. Wahyu Prihadi Wibowo (Plt. Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan, & Sumber Daya Manusia) (Acting Managing Director of Institution Secretariat, Compliance, & Human Capital)	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Sam Malee (Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit) (Managing Director of Credit & Risk Management)	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Agus Windiarto (Direktur Bidang Keuangan & Operasional)*** (Managing Director of Finance, Operations, and IT)***	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Chesna F. Anwar (Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan)*** (Managing Director of Institutional Relations)***	Sekretaris Lembaga Corporate Secretary	Tidak Ada None

*) Beliau menyelesaikan masa jabata sebagai Anggota Dewan Direktur sejak 29 Desember 2024

**) Beliau sudah tidak menjabat sebagai Anggota Dewan Direktur sejak 31 Agustus 2024

***) Beliau sudah tidak menjabat sebagai Direktur Bidang Keuangan & Operasional sejak 31 Agustus 2024

*) He completed his term as a member of the Board of Directors on December 29, 2024.

**) Has no longer served as a Member of Board of Directors since August 31, 2024

***) Has no longer served as Director of Finance & Operations since August 31, 2024

Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana dan Anggota Dewan Direktur

PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, pasal 14 dan pasal 29 telah mengamanatkan bahwa Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana wajib mengungkapkan kepemilikan sahamnya pada perusahaan lain, baik yang berkedudukan di dalam dan/atau di luar negeri. Ketentuan ini juga telah diatur dalam POJK No. 9/2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, pasal 17 dan pasal 22.

Selain itu, pasal 27 PMK 208/2021 juga telah mengatur bahwa Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Disclosure of Share Ownership of Executive Director, Managing Directors and Members of Board of Directors

PMK No. 208/2021 concerning Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of the Indonesian Export Financing Agency, article 14 and article 29 have mandated that the Board of Directors, Executive Director and Managing Director must disclose their share ownership in other companies, whether domiciled at home and/or abroad. This provision has also been regulated in POJK No. 9/2022 concerning Supervision of Indonesian Export Financing Institutions, articles 17 and 22.

In addition, article 27 of PMK 208/2021 has also regulated that Executive Directors and Managing Directors are prohibited from owning shares exceeding 25% (twenty-five percent) of the paid-up capital in other companies either individually or jointly.

Terkait dengan pelaksanaan Kebijakan Kepemilikan Saham Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana, LPEI mewajibkan kepada seluruh anggota Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana untuk menyampaikan saham perusahaan terbuka yang dimilikinya, baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham perusahaan terbuka tersebut. Kebijakan ini mengadopsi ketentuan yang diatur pada pasal 2 POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka. LPEI menilai bahwa kebijakan tersebut baik untuk diterapkan walaupun LPEI bukan sebuah Perusahaan Terbuka. LPEI merupakan sebuah lembaga negara yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Regarding the implementation of the Share Ownership Policy of the Board of Directors, Executive Director and Managing Director, LPEI requires all members of the Board of Directors and Managing Director to submit the shares of public companies owned, both domestically and abroad, no later than 10 (ten) days from the occurrence of ownership or change in ownership of the shares of the public company. This policy adopts the provisions stipulated in article 2 of POJK No. 11/POJK.04/2017 concerning Ownership Reports or Any Changes in Share Ownership of Public Companies. LPEI considers that the policy is good to be implemented even though LPEI is not a Public Company. LPEI is a state institution supervised by the Financial Services Authority.

Tabel Kepemilikan Saham Anggota Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana dan Anggota Dewan Direktur
Share Ownership of Executive Director, Managing Directors and Members of Board of Directors

Nama Name	Kepemilikan Saham Share Ownership	
	LPEI Indonesia Eximbank	Perusahaan Lain Other Company
Dewan Direktur Board of Directors		
Yon Arsal (Plt. Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif) (Acting Chairman of Board of Directors concurrently Executive Director)	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Kasan (Anggota Dewan Direktur) (Member of Board of Directors)	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Arus Gunawan (Anggota Dewan Direktur) (Member of Board of Directors)	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Dwi Teguh Wibowo (Anggota Dewan Direktur) (Member of Board of Directors)	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Suminto (Anggota Dewan Direktur)* (Member of Board of Directors)*	Tidak Ada None	Tidak Ada None
D. James Rompas (Anggota Dewan Direktur)** (Member of Board of Directors)**	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Direktur Pelaksana Managing Directors		
Anton Herdianto (Direktur Pelaksana Bisnis) (Managing Director of Financing)	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Maqin U. Norhadi (Plt. Direktur Pelaksana) (Acting Managing Director)	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Anwar Harsono (Plt. Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional, & Teknologi Informasi) (Acting Managing Director of Finance, Operations, & Information Technology)	Tidak Ada None	Tidak Ada None
T. Wahyu Prihadi Wibowo (Plt. Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan, & Sumber Daya Manusia) (Acting Managing Director of Institution Secretariat, Compliance, & Human Capital)	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Sam Malee (Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit) (Managing Director of Credit & Risk Management)	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Agus Windiarto (Direktur Bidang Keuangan & Operasional)*** (Managing Director of Finance, Operations, and IT)***	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Chesna F. Anwar (Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan)*** (Managing Director of Institutional Relations)***	Tidak Ada None	Tidak Ada None

Organ Pendukung Dewan Direktur

Board of Directors Supporting Organs

Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Direktur didukung oleh sejumlah komite yang memiliki peran strategis. Komite-komite tersebut meliputi:

1. Komite Audit;
2. Komite Pemantau Risiko; dan
3. Komite Remunerasi dan Nominasi.

Pembentukan komite ini sejalan dengan Pasal 8 ayat (1) PMK No. 208/2021 yang mengatur prinsip tata kelola, manajemen risiko, serta prinsip mengenal nasabah bagi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Penjelasan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing komite disajikan dalam subbab berikutnya.

KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Direktur untuk membantu memastikan efektivitas sistem pengendalian internal serta pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal. Komite Audit menjalankan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, serta tindak lanjut hasil audit. Tugas dan fungsinya diatur dalam Piagam Komite Audit.

Dasar Hukum

Komite Audit dibentuk dan berperan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembentukan Komite Audit didasarkan pada beberapa regulasi, antara lain:

1. PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
2. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
3. POJK No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017, tentang Penggunaan Jasa Akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Piagam Komite Audit

Piagam Komite Audit disusun dan disahkan berdasarkan Peraturan Dewan Direktur No. 0005/PDD/09/2022 yang diterbitkan pada 6 September 2022. Piagam ini menjadi pedoman bagi anggota Komite dalam menjalankan peran, tugas, dan tanggung jawabnya untuk mendukung Dewan Direktur.

Kriteria Komite Audit

Berdasarkan Pasal 37 PMK 208 th 2021, keanggotaan Komite Audit terdiri atas 1 (satu) orang anggota Dewan Direktur sebagai ketua; 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi sebagai anggota; dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan sebagai anggota.

In carrying out its supervisory duties, Board of Directors is supported by a number of committees that have strategic roles. These committees include:

1. Audit Committee;
2. Risk Monitoring Committee; and
3. Remuneration and Nomination Committee.

The establishment of these committees is in line with Article 8 paragraph (1) of PMK No. 208/2021 which regulates the principles of governance, risk management, and know-your-customer for Indonesia Eximbank. Further explanation of the duties and responsibilities of each committee is presented in the next subsection.

AUDIT COMMITTEE

Audit Committee is established by the Board of Directors to help ensure the effectiveness of internal control systems and the implementation of external and internal auditors' duties. Audit Committee carries out monitoring and evaluation of planning, implementation, and follow-up of audit results. Its duties and functions are regulated in the Audit Committee Charter.

Legal Basis

Audit Committee is established and functions in accordance with applicable regulations. The establishment of Audit Committee is based on several regulations, including:

1. PMK No. 208/2021 on Principles of Governance, Risk Management, and Know Your Customer of Indonesia Eximbank.
2. POJK No. 55/POJK.04/2015 regarding Establishment and Implementation Guidelines for Audit Committee.
3. POJK No. 13/POJK.03/2017 dated March 27, 2017, regarding the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.

Audit Committee Charter

The Audit Committee Charter was prepared and formalized based on the Board of Directors Regulation No. 0005/PDD/09/2022 issued on September 6, 2022. This charter serves as a guideline for Committee members in carrying out their roles, duties, and responsibilities to support the Board of Directors.

Criteria for Audit Committee

Based on Article 37 of PMK 208 of 2021, the Audit Committee membership consists of 1 (one) member of the Board of Directors as chairman; 1 (one) Independent Party with expertise in finance or accounting as member; and 1 (one) Independent Party with expertise in law or banking as member.



Periode dan Masa Jabatan

Masa jabatan Komite Audit diatur sesuai dengan POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Panduan Pelaksanaan Kerja Komite Audit serta Piagam Komite Audit. Peraturan tersebut menyatakan bahwa masa tugas Komite Audit tidak boleh melampaui masa tugas Dewan Direktur. Selain itu, Komite Audit hanya dapat diperpanjang untuk satu periode berikutnya.

Anggota Komite Audit yang bukan merupakan bagian dari Dewan Direktur dapat diberhentikan oleh Dewan Direktur tanpa pemberitahuan sebelumnya jika dianggap tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keputusan Pengangkatan. Jika dianggap perlu, Dewan Direktur berhak untuk mengangkat kembali anggota Komite Audit yang bukan bagian dari Dewan Direktur setelah berakhirnya masa jabatannya.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komite Audit

Struktur Komite Audit diatur dalam PMK 208/2021 pasal 37 ayat (1), yang menetapkan bahwa Komite Audit terdiri dari satu anggota Dewan Direktur sebagai ketua, serta dua anggota Pihak Independen dengan keahlian di bidang keuangan atau akuntansi, dan hukum atau perbankan.

Di tahun 2024 hingga saat ini, terjadi perubahan dalam komposisi Komite Audit. Rincian perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Period and Term of Office

The term of office of Audit Committee is regulated in accordance with POJK No. 55/POJK.04/2015 concerning Establishment and Implementation Guidelines for Audit Committee and Audit Committee Charter. The regulation states that the term of office of Audit Committee may not exceed the term of office of Board of Directors. In addition, Audit Committee can only be extended for one subsequent period.

Members of Audit Committee who are not part of the Board of Directors may be dismissed by the Board of Directors without prior notice if they are deemed not to have fulfilled their obligations as described in the Letter of Appointment. If deemed necessary, Board of Directors has the right to reappoint Audit Committee members who are not part of the Board of Directors after the expiration of their term of office.

Structure, Number, Composition and Appointment Basis of Audit

The structure of Audit Committee is regulated in PMK 208/2021 article 37 paragraph (1), which stipulates that the Audit Committee consists of one member of Board of Directors as chairman, and two members of Independent Parties with expertise in finance or accounting, and law or banking.

In 2024, there were changes in the composition of Audit Committee. Details of these changes can be seen in the following table.

Komposisi Komite Audit LPEI per 1 Januari – 8 Agustus 2024

Composition of Indonesia Eximbank Audit Committee as of January 1 January – 8 August 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment
Arus Gunawan	Ketua Komite Chairman of Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0044/KDE/10/2023 Executive Director Decree No. 0004/KDE/10/2023
Peter Umar Abdila	Anggota Komite Member of Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0044/KDE/10/2023 Executive Director Decree No. 0004/KDE/10/2023
Yulida S. Marbun	Anggota Komite Member of Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0044/KDE/10/2023 Executive Director Decree No. 0004/KDE/10/2023
Kasan	Anggota Komite Member of Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0044/KDE/10/2023 Executive Director Decree No. 0004/KDE/10/2023

Komposisi Komite Audit LPEI per 9 Agustus – 3 Oktober 2024

Composition of Indonesia Eximbank Audit Committee as of August 9 – October 3, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment
Arus Gunawan	Ketua Komite Chairman of Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0022/KDE/08/2024 Executive Director Decree No. 0004/KDE/10/2023
Yulida S. Marbun	Anggota Komite Member of Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0022/KDE/08/2024 Executive Director Decree No. 0004/KDE/10/2023

Komposisi Komite Audit LPEI per 4 Oktober – 10 November 2024

Komposisi Komite Audit LPEI per 4 Oktober – 10 November 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment
Arus Gunawan	Ketua Komite Chairman of Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0030/KDE/10/2024 Executive Director Decree No. 0030/KDE/10/20243
Yulida S. Marbun	Anggota Komite Member of Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0030/KDE/10/2024 Executive Director Decree No. 0030/KDE/10/2024
Kasan	Anggota Komite Member of Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0030/KDE/10/2024 Executive Director Decree No. 0030/KDE/10/2024

Komposisi Komite Audit LPEI per 11 November – 31 Desember 2024

Komposisi Komite Audit LPEI per 11 November – 31 Desember 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment
Arus Gunawan	Ketua Komite Chairman of Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0034/KDE/11/2024 Executive Director Decree No. 0034/KDE/11/2024
Yulida S. Marbun	Anggota Komite Member of Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0034/KDE/11/2024 Executive Director Decree No. 0034/KDE/11/2024
L. Sensi Wondabio	Anggota Komite Member of Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0034/KDE/11/2024 Executive Director Decree No. 0034/KDE/11/2024

Profil Komite Audit

Berdasarkan Keputusan Direktur Eksekutif No. 0034/KDE/11/2024, berikut adalah profil anggota Komite Audit LPEI yang menjabat hingga akhir tahun buku 2024:

Audit Committee Profile

Based on the Executive Director's Decree No. 0034/KDE/11/2024, following is the profile of Indonesia Eximbank's Audit Committee members who served through the end of 2024 fiscal year:

Arus Gunawan Ketua Komite Audit Chairman of Audit Committee

Profil beliau dapat dilihat pada bagian profil Dewan Direktur dalam Laporan Tahunan ini

Dasar Hukum Pengangkatan
Keputusan Direktur Eksekutif No. 0034/KDE/11/20234

The profile can be seen in the profile section of Board of Directors in this Annual Report

Legal Basis of Appointment
Executive Director Decree No. 0044/KDE/10/2023

Yulida S. Marbun Anggota Komite Audit Member of Audit Committee

Usia
Age 59 tahun
52 years old

Warga Negara
Nationality Indonesia
Indonesian

Domisili
Domicile Jakarta

Riwayat Pendidikan
Educational Background

- Sarjana Pertanian dari Institute Pertanian Bogor (1987)
- Magister Ekonomi Manajemen dari STIE IBK (2000)
- Bachelor of Agriculture from Bogor Agricultural Institute (1987)
- Master of Management Economics from STIE IBK (2000)

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis of Appointment

Keputusan Direktur Eksekutif No. 0034/KDE/11/2024
Executive Director Decree No. 0044/KDE/10/2023

Yulida S. Marbun Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	
Riwayat Karier Career Background	- Audit Manager/Department Head di KP Direktorat Internal Audit 2008 - 2014 (Vice President) - LF Risk Management di Mandiri University - Bank Mandiri 2014-2015 (Vice President) - Regional Business Control Head - Region III Jakarta 1 Bank Mandiri 2015-2019 (Vice President) - Audit Manager/Department Head at KP Directorate of Internal Audit 2008 - 2014 (Vice President) - LF Risk Management at Mandiri University - Bank Mandiri 2014-2015 (Vice President) - Regional Business Control Head - Region III Jakarta 1 Bank Mandiri 2015-2019 (Vice President)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak ada rangkap
Sertifikasi Certification	Sertifikat Risk Management Level 3, BSMR

Ludovicus Sensi Wondabio Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	
Usia Age	60 tahun 60 years old
Warga Negara Nationality	Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	- Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1987) - Magister Akuntansi Manajemen dari Universitas Indonesia (1994) - Doktor Sains Akuntansi dari Universitas Indonesia (2010) - Bachelor of Economics from University of Indonesia (1987) - Master of Management Accounting from University of Indonesia (1994) - Doctor of Science in Accounting from University of Indonesia (2010)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0034/KDE/11/2024 Executive Director Decree No. 0034/KDE/11/2024
Riwayat Karier Career Background	- Expert Consultant for Oil and Gas to the Finance Director of Pertamina, PT (Persero), (2006 – August 2019) - Audit Partner for Public Accounting Firm Osman Ramli & Satrio (ORS), member firm of Deloitte Touche & Tohmatsu (1999 - March 2006) - Expert Insurance Accounting Specialist at GIZ (German) for helping Government of Indonesia in Social Insurance Program (BPJS of Health) (2017 – 2018) - Expert Insurance Accounting Specialist at World Bank for helping Government of Indonesia in Social Insurance Program (BPJS), (2012 – 2018) - Expert consultant and accounting specialist in PSAK 24 (Employee Benefit) in helping Company related to understand accounting policy issues and procedures. - Oil and Gas Expert Consultant to the Finance Director of Pertamina, PT (Persero), (2006 - August 2019) - Audit Partner for Public Accounting Firm Osman Ramli & Satrio (ORS), a member firm of Deloitte Touche & Tohmatsu (1999 - March 2006) - Insurance Accounting Expert at GIZ (Germany) to assist the Government of Indonesia in the Social Insurance Program Social Insurance Program (BPJS Kesehatan) (2017 - 2018) - Insurance Accounting Specialist at the World Bank to assist the Government of Indonesia in the Social Insurance Program (BPJS), (2012 - 2018) - Expert consultant and accounting specialist in the field of PSAK 24 (Employee Benefits) in assisting the Company related to in understanding accounting policies and procedures issues.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	- Managing Audit Partner dor Public Accounting Firm (KAP) Mirawati Sensi Idris (MSId), Member of Moore Global International (April 2006 - Sekarang) - Independent Commissioner of PT. Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) member of Saratoga Group (Juli 2019- Sekarang) - Audit Committee Member of Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk (Juli 2019- Sekarang) - Senior Lecturer, Bachelor Program, Master Program and Doctoral Program of Faculty of Economic and Business, University of Indonesia (Sep 1987 - Sekarang) - Managing Audit Partner dor Public Accounting Firm (KAP) Mirawati Sensi Idris (MSId), Member of Moore Global International (April 2006 - Sekarang) - Independent Commissioner of PT. Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) member of Saratoga Group (Juli 2019- Sekarang) - Audit Committee Member of Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk (Juli 2019- Sekarang) - Senior Lecturer, Bachelor Program, Master Program and Doctoral Program of Faculty of Economic and Business, University of Indonesia (Sep 1987 - Sekarang)
Sertifikasi Certification	Insurance Risk Management Level 5, Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia Insurance Risk Management Level 5, Indonesian Insurance Management Expert Association

Independensi Komite Audit

LPEI memastikan bahwa setiap anggota Komite Audit memenuhi kriteria independensi dan memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan tugas secara independen. Dalam pelaksanaannya, Komite Audit tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun.. Selain itu, seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk apa pun, termasuk keterkaitan dengan keuangan, kepengurusan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan/atau Pemegang Saham.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit menjalankan peran penting dalam memastikan tata kelola perusahaan yang baik. Pedoman pelaksanaan tugasnya tertuang dalam Piagam Komite Audit, yang disusun dengan mengacu pada Pasal 39 PMK 208/2021. Sesuai dengan regulasi tersebut, Komite Audit memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Direktur dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal melalui pemantauan dan evaluasi atas perencanaan, pelaksanaan, serta tindak lanjut hasil audit.
2. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud termasuk
 - a. memberikan rekomendasi mengenai penunjukan kantor akuntan publik kepada Dewan Direktur;
 - b. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal serta pelaksanaannya.
3. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud, paling kurang dilakukan terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal;
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit yang berlaku;
 - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku;
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Internal dan auditor eksternal dalam rangka pengawasan pada LPEI.
 - e. Pelaksanaan tugas Komite Audit dilaporkan kepada Dewan Direktur paling kurang 3 (tiga) bulan sekali.

Tanggung Jawab Komite Audit dalam Pemberian Rekomendasi atas Penunjukan dan Pemberhentian Auditor Eksternal

Berdasarkan PMK 208 Tahun 2021, Dewan Direktur melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana dalam proses penunjukannya. Jika penunjukkan kembali, dilakukan berdasarkan evaluasi atas kinerja auditor eksternal sesuai dengan kriteria yang berlaku.

Independence of Audit Committee

Indonesia Eximbank ensures that each member of Audit Committee meets the independence criteria and has sufficient capacity to carry out duties independently. In practice, Audit Committee cannot be influenced by any party. In addition, all members of Audit Committee have no affiliations of any kind, including financial, shareholding and/or family relationships with the Board of Directors, Executive Directors, Managing Directors, and/or Shareholders.

Duties and Responsibilities

Audit Committee plays an important role in ensuring good corporate governance. The guidelines for implementing its duties are set out in the Audit Committee Charter, which was prepared with reference to Article 39 of PMK 208/2021. In accordance with these regulations, Audit Committee has the following responsibilities:

1. Assisting the Board of Directors in ensuring the effectiveness of internal control system and the effectiveness of implementation of duties of external auditors and internal auditors through monitoring and evaluating the planning, implementation, and follow-up of audit results.
2. The implementation of duties as referred to includes:
 - a. Providing recommendations regarding the appointment of a public accounting firm to the Board of Directors;
 - b. Providing recommendations regarding the improvement of internal control system and its implementation.
3. Monitoring and evaluation as intended, at least carried out on:
 - a. The implementation of duties of Internal Audit Work Unit;
 - b. Conformity of audit implementation by the public accounting firm with applicable audit standards;
 - c. Conformity of financial statements with applicable financial accounting standards;
 - d. Implementation of follow-up on the results of the examination of Internal Audit Work Unit and external auditors in the context of supervision at Indonesia Eximbank.
 - e. The implementation of Audit Committee's duties is reported to the Board of Directors at least once every 3 (three) months.

Responsibility of Audit Committee in Providing Recommendations on Appointment and Dismissal of External Auditors

Based on PMK 208 of 2021, the Board of Directors through the Audit Committee conducts the appointment process of prospective external auditors in accordance with the provisions on the procurement of goods and services and if necessary may request the assistance of the Executive Director and Managing Director in the appointment process. If re-appointment, it is carried out based on an evaluation of the performance of the external auditor in accordance with the applicable criteria.



Rapat Komite Audit

Kebijakan Rapat

Piagam Komite Audit menetapkan bahwa rapat Komite Audit harus diadakan setidaknya dengan frekuensi yang sama seperti rapat minimum Dewan Direktur, yaitu minimal 1 (satu) kali setiap bulan.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota

Sepanjang tahun 2024, Komite Audit mengadakan 43 (empat puluh tiga) kali rapat, yang mencakup rapat internal serta rapat gabungan dengan internal audit dan eksternal audit. Rincian tingkat kehadiran setiap anggota dapat dilihat pada tabel berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Arus Gunawan	Ketua Komite Chairman of Committee	43	43	100%
Kasan*	Anggota Komite Member of Committee	34	34	100%
Peter Umar Abdila	Anggota Komite Member of Committee	24	24	100%
Yulida S. Marbun	Anggota Komite Member of Committee	43	43	100%
Ludovicus Sensi Wondabio*	Anggota Komite Member of Committee	10	10	100%

*) Menyelesaikan masa jabatan tanggal 8 Agustus 2024

**) Menjabat sejak 11 November 2024

*) No longer served since date/month/year

**) Has served since November 11, 2024

Agenda Rapat

Sepanjang tahun 2024, Komite Audit mengadakan rapat untuk meninjau dan membahas berbagai agenda sebagai berikut:

Audit Committee Meetings

Meeting Policy

The Audit Committee Charter stipulates that Audit Committee meetings must be held at least as frequently as the minimum of Board of Directors meetings, which is at least once a month.

Meeting Frequency and Member Attendance Rate

Throughout 2024, Audit Committee held 43 (forty-three) meetings, which included internal meetings as well as joint meetings with internal and external audits. Details of each member's attendance rate can be seen in the following table:

Meeting Agenda

Throughout 2024, Audit Committee held meetings to review and discuss the following agendas:

No	Tanggal Surat Meeting Date	Perihal Subject	Peserta Participants
1	31-Jan-24	Progress SKAI bulan Januari 2024 SKAI Progress in January 2024	- Arus Gunawan - Kasan - Peter Umar - Yulida S. Marbun
2	31-Jan-24	Update Divisi Kepatuhan bulan Januari 2024 Compliance Division Update January 2024	- Arus Gunawan - Kasan - Peter Umar - Yulida S. Marbun
3	7-Feb-24	Pembahasan Progress Laporan Keuangan Audited 2023 Discussion on the Progress of Audited Financial Statements 2023	- Arus Gunawan - Kasan - Peter Umar - Yulida S. Marbun
4	7-Feb-24	Pembahasan Laporan Keuangan LPEI Januari 2024 Discussion of LPEI Financial Report January 2024	- Arus Gunawan - Kasan - Peter Umar - Yulida S. Marbun

No	Tanggal Surat Meeting Date	Perihal Subject	Peserta Participants
5	26-Feb-24	- Update Progres LK Audited 2023 - Persetujuan Revisi RKAT 2024 - Pembahasan Debitur Hapus Buku 2024 - Update on the Progress of Audited LK 2023 - Approval of 2024 RKAT Revision - Discussion of Debtors Delete Book 2024	- Arus Gunawan - Kasan - Peter Umar - Yulida S. Marbun
6	28-Feb-24	Progress SKAI bulan Februari 2024 SKAI Progress in February 2024	- Arus Gunawan - Kasan - Peter Umar - Yulida S. Marbun
7	28-Feb-24	Update Divisi Kepatuhan bulan Februari 2024 Compliance Division Update February 2024	- Arus Gunawan - Kasan - Peter Umar - Yulida S. Marbun
8	6-Mar-24	Pembahasan Kinerja Keuangan posisi Februari 2024 Discussion on Financial Performance of February 2024 position	- Arus Gunawan - Kasan - Peter Umar - Yulida S. Marbun
9	27-Mar-24	Pembahasan Laporan Keuangan Audited 2023 Discussion of 2023 Audited Financial Statements	- Arus Gunawan - Kasan - Peter Umar - Yulida S. Marbun
10	28-Mar-24	Progress SKAI bulan Maret 2024 SKAI Progress in March 2024	- Arus Gunawan - Kasan - Peter Umar - Yulida S. Marbun
11	4-Apr-24	Pembahasan Akun Tambahan Hapus Buku Discussion of Additional Accounts Delete Books	1.Arus Gunawan 2.Kasan 3.Peter Umar 4.Yulida S. Marbun
12	5-Apr-24	Update Divisi Kepatuhan bulan Maret 2024 Compliance Division Update March 2024	- Arus Gunawan - Kasan - Peter Umar - Yulida S. Marbun
13	25-Apr-24	Pembahasan Akun Tambahan Hapus Buku Discussion of Additional Accounts Delete Books	1.Arus Gunawan 2.Kasan 3.Peter Umar 4.Yulida S. Marbun
14	30-Apr-24	Progress SKAI bulan April 2024 SKAI Progress in April 2024	- Arus Gunawan - Kasan - Peter Umar - Yulida S. Marbun
15	30-Apr-24	Update Divisi Hukum & Kepatuhan bulan April 2024 Legal & Compliance Division Update April 2024	- Arus Gunawan - Kasan - Peter Umar - Yulida S. Marbun
16	10-May-24	- Management Letter - Kinerja Keuangan April 2024 - Pemaparan Pinjaman Pemerintah - Management Letter - Financial Performance April 2024 - Government Loan Exposure	- Arus Gunawan - Kasan - Peter Umar - Yulida S. Marbun
17	29-May-24	Progress SKAI bulan Mei 2024 SKAI Progress in May 2024	- Arus Gunawan - Kasan - Peter Umar - Yulida S. Marbun
18	31-May-24	Update Divisi Hukum & Kepatuhan bulan Mei 2024 Legal & Compliance Division Update May 2024	- Arus Gunawan - Peter Umar - Yulida S. Marbun
19	7-Jun-24	- Evaluasi KAP RSM atas Audit 2023. - Rencana Pengadaan KAP 2024. - Evaluation of KAP RSM for the 2023 Audit. - KAP Procurement Plan 2024	- Arus Gunawan - Kasan - Peter Umar - Yulida S. Marbun

No	Tanggal Surat Meeting Date	Perihal Subject	Peserta Participants
20	26-Jun-24	Update Divisi Hukum & Kepatuhan bulan Juni 2024 Legal & Compliance Division Update June 2024	- Arus Gunawan - Peter Umar - Yulida S. Marbun
21	29-Jul-24	- Pembahasan Laporan Perkembangan Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah Juni 2024 - Pembahasan Laporan Pengawasan Renbis dan RKAT Semester I 2024 - Discussion of Progress Report on Financing Management Problematic Financing Management June 2024 - Discussion of Renbis and RKAT Supervision Report for the first semester of 2024	- Arus Gunawan - Peter Umar - Yulida S. Marbun
22	31-Jul-24	Progress SKAI sampai dengan bulan Juli 2024 SKAI progress until July 2024	- Arus Gunawan - Kasan - Peter Umar - Yulida S. Marbun
23	31-Jul-24	Update Divisi Hukum & Kepatuhan bulan Juli 2024 Legal & Compliance Division Update July 2024	- Arus Gunawan - Kasan - Peter Umar - Yulida S. Marbun
24	7-Aug-24	Persetujuan Penunjukkan KAP RSM 2024 Approval of the appointment of KAP RSM 2024	- Arus Gunawan - Kasan - Peter Umar - Yulida S. Marbun
25	21-Aug-24	Tindak Lanjut catatan DE atas adanya SP - OJK Follow-up of ED notes on SP - OJK	- Arus Gunawan - Yulida S. Marbun
26	30-Aug-24	Update Divisi Hukum & Kepatuhan bulan Agustus 2024 : - Kajian & Evaluasi Perhitungan dan Implementasi BMPP Asuransi. - Sosialisasi Penerapan Strategi Anti Fraud di LPEI. - Update APU, PPT, dan PPPSPM terhadap KOMODOIN Agustus 2024. August 2024 Legal & Compliance Division Update: - Review & Evaluation of Insurance BMPP Calculation and Implementation. - Socialization of Anti Fraud Strategy Implementation in LPEI. - AML, CFT and PPPSPM Update on KOMODOIN August 2024.	- Arus Gunawan - Yulida S. Marbun
27	18-Sep-24	Kick off meeting audit KAP RSM Kick off meeting audit KAP RSM	- Arus Gunawan - Yulida S. Marbun
28	27-Sep-24	Progress SKAI sampai dengan bulan September 2024 (DMTL) SKAI Progress until September 2024 (DMTL)	- Arus Gunawan - Yulida S. Marbun
29	30-Sep-24	Update Divisi Hukum & Kepatuhan bulan September 2024 Legal & Compliance Division Update September 2024	- Arus Gunawan - Yulida S. Marbun
30	23-Oct-24	Pelaporan progress pemenuhan DMTL OJK jatuh waktu 31 Oktober 2024 DMTL OJK compliance progress reporting due October 31, 2024	- Arus Gunawan - Yulida S. Marbun
31	31-Oct-24	Update Divisi Hukum & Kepatuhan bulan Oktober 2024 Legal & Compliance Division Update October 2024	- Arus Gunawan - Kasan - Yulida S. Marbun
32	31-Oct-24	Progress SKAI sampai dengan bulan Oktober 2024 SKAI progress until October 2024	- Arus Gunawan - Kasan - Yulida S. Marbun
33	31-Oct-24	Review Piagam Komite Audit LPEI 2022 Review of LPEI Audit Committee Charter 2022	- Arus Gunawan - Kasan - Yulida S. Marbun
34	21-Nov-24	- Pembahasan RAKB dan Kesiapan Survey IFRS - Pembahasan GRC - Discussion of RAKB and IFRS Survey Readiness - GRC Discussion	- Arus Gunawan - Yulida S. Marbun L. Sensi Wondabio*
35	28-Nov-24	Update dari Divisi IT Update from IT Division	- Arus Gunawan - Yulida S. Marbun L. Sensi Wondabio
36	29-Nov-24	Progress SKAI bulan November 2024 SKAI Progress in November 2024	- Arus Gunawan - Yulida S. Marbun L. Sensi Wondabio

No	Tanggal Surat Meeting Date	Perihal Subject	Peserta Participants
37	29-Nov-24	Progress Kepatuhan bulan November 2024 November 2024 Compliance Progress	- Arus Gunawan - Yulida S. Marbun L. Sensi Wondabio
38	5-Dec-24	- Kinerja Keuangan posisi November 2024 - Update Project Modernisasi Core System - Agenda lain-lain: Laporan PT Indrilco Bakti - Financial Performance as of November 2024 - Update on Core System Modernization Project - Other agenda: PT Indrilco Bakti Report	- Arus Gunawan - Yulida S. Marbun L. Sensi Wondabio
39	20-Dec-24	Pembahasan IT Security Drill IT Security Drill Discussion	- Arus Gunawan - Yulida S. Marbun L. Sensi Wondabio
40	20-Dec-24	Update Kinerja Syariah Sharia Performance Update	- Arus Gunawan - Yulida S. Marbun L. Sensi Wondabio
41	30-Dec-24	Progress SKAI bulan Desember 2024 SKAI Progress in December 2024	- Arus Gunawan - Yulida S. Marbun L. Sensi Wondabio
42	30-Dec-24	Progress Kepatuhan bulan Desember 2024 December 2024 Compliance Progress	- Arus Gunawan - Yulida S. Marbun L. Sensi Wondabio
43	31-Dec-24	Update Progress Audit KAP RSM RSM KAP Audit Progress Update	- Arus Gunawan - Yulida S. Marbun L. Sensi Wondabio

Rapat Gabungan dengan Komite-komite di Bawah Dewan Direktur (Joint Committee)

Komite Audit tidak hanya mengadakan rapat internal secara rutin, tetapi juga berperan aktif dalam rapat gabungan antar-Komite Dewan Direktur (*joint committee*) untuk membahas berbagai isu strategis yang memerlukan koordinasi lintas komite. Sepanjang tahun 2024, rapat gabungan ini telah diselenggarakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:

Joint Meeting with Committees under the Board of Directors (Joint Committee)

The Audit Committee not only holds regular internal meetings, but also plays an active role in joint meetings between Board of Directors Board of Directors Committee (*joint committee*) to discuss strategic issues that require cross-committee coordination. committee. Throughout 2024, this joint meeting has been held 3 (three) times with details as follows:

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants
1	7 Februari 2024	Pembahasan Progress Laporan Keuangan Audited 2023 Discussion of Financial Report Progress Audited 2023	- Arus Gunawan D. James Rompas - Kasan - Agus Windiarto - Titiek Setiyowati - Anwar Harsono - Peter Umar - Yulida S. Marbun - Benny K. Yudiatmaja - Putu R - Bimo Iman Santoso – RSM - Rai Syam – RSM - Franky – RSM - Jaka Mulya – RSM

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants
2	Februari 2024	- Update Progres LK Audited 2023 - Persetujuan Revisi RKAT 2024 - Pembahasan Debitur Hapus Buku 2024 - Update on the Progress of Audited LK 2023 - Approval of 2024 RKAT Revision - Discussion of Debtors written off 2024	- Arus Gunawan D. James Rompas - Kasan Muhri - Agus Windiarso - Chesna F. Anwar - Titiek Setiyowati - Anwar Harsono - Wahyu P. Wibowo - I Nyoman Suarja - Peter Umar - Yulida S. Marbun - Putu Rahwidhiyasa - Benny K. Yudiatmaja
3	10 Mei 2024	- Management Letter - Kinerja Keuangan April 2024 - Pemaparan Pinjaman Pemerintah - Management Letter - April 2024 Financial Performance - Government Loan Exposure	- Arus Gunawan D. James Rompas - Kasan - Agus Windiarso - Sam Malee - Titiek Setiyowati - Anwar Harsono - I Nyoman Suarja - Putu Rahwidhiyasa - Benny K. Yudiatmaja - Peter Umar - Yulida S. Marbun - KAP RSM

Program Pengembangan Kompetensi Tahun 2024

Sepanjang 2024, Komite Audit terus meningkatkan kapasitasnya melalui berbagai pelatihan dan program pengembangan kompetensi. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dengan rincian sebagai berikut:

Competency Development Program 2024

Throughout 2024, Audit Committee continues to improve its capacity through various training and competency development programs. This step aims to strengthen the effectiveness in carrying out its duties and responsibilities, with the following details:

Nama Name	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Judul Pelatihan Training Title	Tempat Pelaksanaan Venue	Penyelenggara Organizer
Arus Gunawan	26 – 27 Juni 2024	Seminar Komite Audit Audit Committee Seminar	Jakarta	Inti Pesan
Peter Umar Abdila	26 – 27 Juni 2024	Seminar Komite Audit Audit Committee Seminar	Jakarta	Inti Pesan
Ludovicus Sensi Wondabio	26 – 27 Juni 2024	Seminar Komite Audit Audit Committee Seminar	Jakarta	Inti Pesan

Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2024

Komite Audit telah menetapkan program kerja untuk tahun 2024 dengan fokus pada objek dan sasaran yang telah dirancang secara strategis. Pelaksanaan tugas Komite Audit dilaporkan kepada Dewan Direktur paling kurang 3 (tiga) bulan sekali

Implementation of Audit Committee Duties in 2024

The Audit Committee has established a work program for the year 2024 with a focus on objects and targets that have been strategically designed. The implementation of the Audit Committee's duties is reported to the Board of Directors at least once every 3 (three) months.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

LPEI terus memperkuat tata kelola perusahaan dengan memastikan proses Remunerasi dan Nominasi bagi Dewan Direktur serta Direktur Pelaksana berjalan secara transparan. Untuk mendukung hal ini, LPEI memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi yang berperan dalam merumuskan kebijakan serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur terkait aspek tersebut.

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

Indonesia Eximbank continues to strengthen corporate governance by ensuring that the Remuneration and Nomination process for Board of Directors and Managing Directors is transparent. To support this, Indonesia Eximbank has a Remuneration and Nomination Committee that plays a role in formulating policies and providing recommendations to Board of Directors related to this aspect.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi LPEI didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) PMK 208/2021, Dewan Direktur diwajibkan membentuk komite-komite pendukung, termasuk Komite Remunerasi dan Nominasi. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat oleh Direktur Eksekutif berdasarkan keputusan rapat Dewan Direktur. Selain itu, Dewan Direktur bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap komite yang telah dibentuk dapat menjalankan tugasnya secara efektif.

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi LPEI merupakan regulasi internal yang berfungsi sebagai pedoman serta tata tertib kerja bagi Komite. Dokumen ini ditetapkan melalui Peraturan Dewan Direktur No. 0007/PDD/12/2022 tentang Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Komite Remunerasi dan Nominasi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan pedoman serta tata tertib kerja yang mencakup struktur dan keanggotaan, tugas serta wewenang, mekanisme dan ketentuan kerja, termasuk tata tertib rapat, mekanisme pengambilan keputusan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Selain itu, pedoman ini juga mengatur kode etik, waktu kerja, serta evaluasi kinerja. Seluruh ketentuan tersebut disusun sejalan dengan Pasal 38 PMK 208/2021.

Kriteria Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan Pasal 37 PMK 208 th 2021, keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri atas:

- 1 (satu) orang anggota Dewan Direktur sebagai ketua;
- 1 (satu) orang anggota Dewan Direktur sebagai anggota; dan
- 1 (satu) orang pejabat LPEI yang membawahi bidang sumber daya manusia sebagai anggota.

Periode dan Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang juga menjabat sebagai Dewan Direktur mengikuti Keputusan Menteri Keuangan tentang Pengangkatan Dewan Direktur, yaitu selama 5 (lima) tahun, dan tidak dapat melebihi masa jabatannya sebagai anggota Dewan Direktur. Sementara itu, anggota komite yang berasal dari pejabat LPEI yang membawahi bidang sumber daya manusia adalah sesuai masa tugasnya sebagai pejabat yang membidangi tersebut.

Legal Basis

Establishment of the Indonesia Eximbank Remuneration and Nomination Committee is based on Minister of Finance Regulation (PMK) No. 208/PMK.06/2021 concerning Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles at the Indonesia Eximbank.

In accordance with Article 8 paragraph (1) of PMK 208/2021, Board of Directors is required to form supporting committees, including the Remuneration and Nomination Committee. Members of Remuneration and Nomination Committee are appointed by the Executive Director based on the decision of Board of Directors meeting. In addition, Board of Directors is responsible for ensuring that each committee that has been formed can carry out its duties effectively.

Remuneration and Nomination Committee Charter

The Indonesia Eximbank Remuneration and Nomination Committee Charter is an internal regulation that serves as a guideline and code of conduct for the Committee. This document was established through Board of Directors Regulation No. 0007/PDD/12/2022 concerning Guidelines for Remuneration and Nomination Committee of Indonesia Eximbank.

Remuneration and Nomination Committee carries out its duties and responsibilities based on guidelines and work rules that include structure and membership, duties and authorities, mechanisms and work provisions, including meeting rules, decision-making mechanisms, accountability, and reporting. In addition, these guidelines also regulate the code of conduct, working hours, and performance evaluations. All of these provisions are formulated in line with Article 38 of PMK 208/2021.

Criteria for Remuneration and Nomination Committee

Based on Article 37 of PMK 208 of 2021, the Remuneration and Nomination Committee membership consists of:

- 1 (one) member of the Board of Directors as chairman;
- 1 (one) member of the Board of Directors as member; and
- 1 (one) LPEI official in charge of human resources as member.

Period and Term of Office

The term of office of members of Remuneration and Nomination Committee who also serve as Board of Directors is in accordance with the Minister of Finance Decree on the Appointment of Board of Directors, which is for 5 (five) years, and cannot exceed their term of office as members of Board of Directors. Meanwhile, committee members who are not members of Board of Directors have a maximum term of 3 (three) years and can be extended once for the same duration. However, the Executive Director retains the authority to dismiss them at any time. This provision is regulated in PMK 208/2021 article 8 paragraph (4).



Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komite Remunerasi dan Nominasi

Struktur Komite Remunerasi dan Nominasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 208/2021 Pasal 37 Ayat (3). Regulasi ini menetapkan bahwa komite terdiri dari 1 (satu) orang anggota Dewan Direktur sebagai ketua, 1 (satu) orang anggota Dewan Direktur sebagai anggota, dan 1 (satu) orang pejabat LPEI yang membawahi bidang sumber daya manusia sebagai anggota.

Di tahun 2024, terdapat perubahan dalam susunan Komite Remunerasi dan Nominasi dengan kronologis sebagai berikut:

Structure, Number, Composition and Basis of Appointment of Remuneration and Nomination Committee

The structure of Remuneration and Nomination Committee is regulated in the Minister of Finance Regulation (PMK) 208/2021 Article 37 Paragraph (3). This regulation stipulates that the committee consists of 1 (one) member of Board of Directors as chairman, 1 (one) member of Board of Directors as member, and 1 (one) Indonesia Eximbank official who is in charge of human capital as member.

In 2024, there were changes in the composition of Remuneration and Nomination Committee with the following chronology:

Periode 1 Januari – 31 Agustus 2024

Period January 1 - August 3, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment
Yon Aarsal	Ketua Komite Chairman of Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0039/KDE/09/2023 Executive Director's Decree No. 0039/KDE/09/2023
D. James Rompas	Anggota Komite Member of Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0039/KDE/09/2023 Executive Director's Decree No. 0039/KDE/09/2023
Wahyu P. Wibowo	Anggota Komite Member of Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0039/KDE/09/2023 Executive Director's Decree No. 0039/KDE/09/2023

1 September 2024 – 31 Desember 2024

Period September 1 - December 31, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment
Yon Aarsal	Ketua Komite Chairman of Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0027/KDE/10/2024 Executive Director's Decree No. 0039/KDE/09/2023
Arus Gunawan	Anggota Komite Member of Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0027/KDE/10/2024 Executive Director's Decree No. 0027/KDE/10/2024

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil anggota Komite Remunerasi dan Nominasi LPEI adalah sebagai berikut:

Profile of Remuneration and Nomination Committee

The profile of Indonesia Eximbank's Remuneration and Nomination Committee members is as follows:

Yon Aarsal
Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi
Chairman of Remuneration and Nomination Committee

Profil beliau dapat dilihat pada bagian profil Dewan Direktur dalam Laporan Tahunan ini

Dasar Hukum Pengangkatan
Keputusan Direktur Eksekutif No. 0039/KDE/09/2023
The profile can be seen in the Board of Directors profile section of this Annual Report

Legal Basis for Appointment
Executive Director Decree No. 0039/KDE/09/2023

T. Wahyu P. Wibowo
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
 Chairman of Remuneration and Nomination Committee

Profil beliau dapat dilihat pada bagian profil Dewan Direktur dalam Laporan Tahunan ini

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Direktur Eksekutif No. 0027/KDE/10/2024

The profile can be seen in the Board of Directors profile section of this Annual Report

Legal Basis for Appointment

Executive Director Decree No. 0027/KDE/10/2024

Independensi Anggota Komite

Komite Remunerasi dan Nominasi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan prinsip independensi yang diatur dalam piagamnya, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

1. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan/ atau jasa konsultan lain kepada LPEI dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara *horizontal* maupun vertikal dengan Dewan Direktur LPEI.
3. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha LPEI.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi diatur dalam Piagam Komite, yang mengacu pada ketentuan Pasal 41 PMK 208/2021. Sesuai dengan peraturan tersebut, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Direktur terkait kebijakan remunerasi dan nominasi.
2. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajiban, sasaran, dan strategi jangka panjang LPEI.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan remunerasi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana untuk disampaikan kepada Menteri.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan remunerasi pegawai untuk disampaikan kepada Direktur Eksekutif.
5. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.
6. Merekomendasikan kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan nominasi pegawai untuk disampaikan kepada Direktur Eksekutif, antara lain memberikan usulan kriteria seleksi dan prosedur nominasi, serta menyusun sistem penilaian.
7. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Direktur Pelaksana untuk disampaikan kepada Dewan Direktur.

Independence of Committee Members

Remuneration and Nomination Committee carries out its duties and responsibilities with the principle of independence as stipulated in its charter, as explained below:

1. Not an insider of a public accounting firm, legal consulting firm or other party that provides audit services, non-audit services and/or other consulting services to Indonesia Eximbank within the last 6 (six) months before being appointed as a member of Remuneration and Nomination Committee.
2. Has no family relationship by marriage and descent to the second degree, either horizontally or vertically with the Indonesia Eximbank Board of Directors.
3. Has no business relationship either directly or indirectly related to the business activities of Indonesia Eximbank.

Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of Remuneration and Nomination Committee are set out in the Committee Charter, which refers to the provisions of Article 41 of PMK 208/2021. In accordance with these regulations, Remuneration and Nomination Committee has the following duties and responsibilities:

1. Assist the Board of Directors regarding remuneration and nomination policies.
2. Evaluate the remuneration policy based on the Indonesia Eximbank performance, risk, fairness, objectives, and long-term strategy.
3. Provide recommendations to Board of Directors regarding the remuneration policy for Board of Directors, Executive Director, and Managing Director to be submitted to the Minister.
4. Provide recommendations to Board of Directors regarding employee remuneration policies to be submitted to Executive Director.
5. Conduct periodic evaluations of remuneration policy implementation.
6. Recommend to Board of Directors regarding employee nomination policies to be submitted to Executive Director, including providing proposals for selection criteria and nomination procedures, as well as developing an assessment system.
7. Prepare and provide recommendations regarding the system and procedures for the selection and/or replacement of Managing Director to be submitted to Board of Directors.



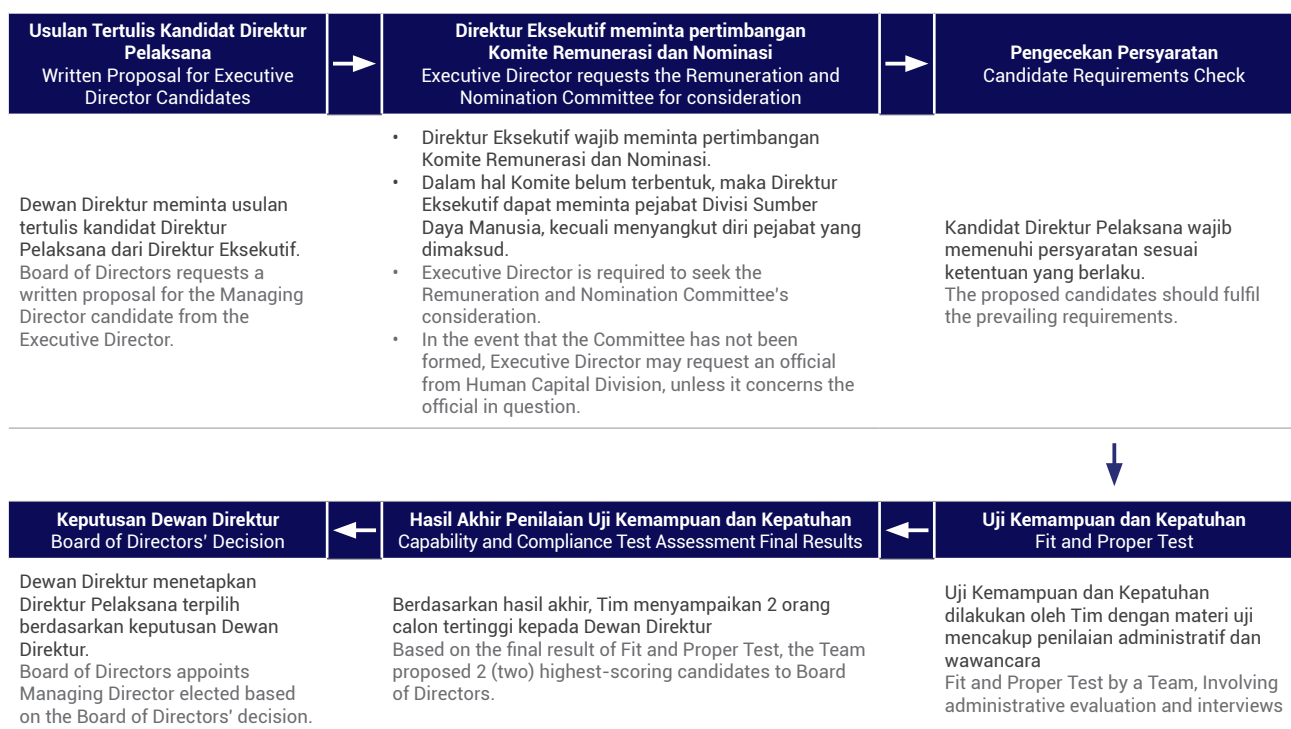
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai anggota DPS dan Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite.
- Melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan kebijakan nominasi.

Suksesi Direktur Pelaksana

Untuk memastikan keberlanjutan bisnis melalui proses regenerasi, LPEI menerapkan kebijakan suksesi Direktur Pelaksana yang diatur dalam Peraturan Dewan Direktur No. 0005/PDD/07/2024 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Kebijakan ini juga disesuaikan dengan ketentuan Pasal 29 UU No. 2/2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Dalam kebijakan tersebut, jumlah Direktur Pelaksana ditetapkan maksimal 5 (lima) orang, dengan paling banyak 4 (empat) di antaranya berasal dari internal LPEI. Selain itu, pengangkatan dan pemberhentian Direktur Pelaksana dilakukan oleh Dewan Direktur berdasarkan usulan Direktur Eksekutif.

Bagan berikut memberikan gambaran lebih jelas mengenai alur suksesi Direktur Pelaksana.



Rapat Komite

Kebijakan Rapat

Sesuai dengan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi No. PDD 0007/PDD/09/2022, Komite Remunerasi dan Nominasi harus mengadakan rapat setidaknya dua kali dalam setahun. Rapat hanya dapat berlangsung jika dihadiri

- Provide recommendations to Board of Directors regarding DPS members and Independent Parties who will become members of the Committee.
- Conduct periodic evaluations of the nomination policy implementation.

Managing Directors Succession

To ensure business continuity through the regeneration process, Indonesia Eximbank implements a Managing Director succession policy as regulated in the Board of Directors Regulation No. 0008/PDD/12/2018 concerning Procedures for Nomination, Appointment, and Dismissal of Managing Directors of Indonesia Eximbank. This policy is also adjusted to the provisions of Article 29 of Act No. 2/2009 concerning Indonesia Eximbank.

In this policy, the number of Managing Directors is stipulated at a maximum of 5 (five) persons, with a maximum of 4 (four) of them coming from within Indonesia Eximbank. In addition, appointments and dismissals of Managing Directors are made by the Board of Directors based on the Executive Director's proposal.

Following chart provides a more detailed illustration of the Managing Directors succession flow.

Committee Meetings

Meeting Policy

In accordance with the Remuneration and Nomination Committee Charter No. PDD 0007/PDD/09/2022, Remuneration and Nomination Committee must hold meetings at least twice a year. Meetings can only take place

oleh minimal ketua dan satu anggota. Hasil rapat dicatat dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

if attended by at least the chairperson and one member. The meeting results are recorded in the meeting minutes and are well documented.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota

Sepanjang tahun 2024, Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan 9 (sembilan) kali rapat, dengan tingkat kehadiran setiap anggota yang sebagai berikut:

Meeting Frequency and Member Attendance Rate

During the year, the Remuneration and Nomination Committee held 9 (nine) meetings, with the attendance rate of each member as follows

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Yon Arsal	Ketua Komite Chairman of Committee	9	9	100%
D. James Rompas*	Anggota Komite Member of Committee	7	7	100%
Wahyu P. Wibowo**	Anggota Komite Member of Committee	9	9	100%

*) Beliau menyelesaikan masa jabatan sebagai Anggota Dewan Direktur sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024

**) Beliau menyelesaikan masa jabatan sebagai Anggota Dewan Direktur sampai dengan tanggal 16 Februari 2025

*) He completed his term as a Member of the Board of Directors until August 31, 2024

**) He completed his term as a Member of the Board of Directors until February 16, 2025

Agenda Rapat

Sepanjang tahun 2024, Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat untuk meninjau dan membahas berbagai agenda sebagai berikut:

Meeting Agenda

Throughout 2024, Remuneration and Nomination Committee held meetings to review and discuss the following agendas:

List Rapat KRN Tahun 2024

List Rapat KRN Tahun 2024

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Participants
1	3-Jan-24	1. Tindak Lanjut meeting dg Dirjen KN terkait Aset Inbreng 2. Struktur Organisasi 1. Follow-up meeting with Director General of KN regarding Inbreng Assets 2. Organizational Structure	1. Yon Arsal 2. D. James Rompas 3. Wahyu P Wibowo
2	23-Jan-24	Wawancara Bapak Sulaeman - Kandidat Direktur PT IEB Prima Aset dengan KRN Interview of Mr. Sulaeman - Candidate Director of PT IEB Prima Aset with KRN	1. Yon Arsal 2. D. James Rompas 3. Wahyu P Wibowo
3	19-Feb-24	1. Update Reorganisasi 2. Review Remunerasi Pegawai 1. Reorganization Update 2. Employee Remuneration Review	1. Yon Arsal 2. D. James Rompas 3. Wahyu P Wibowo
4	24-Apr-24	1. Pembahasan Remunerasi DD 2. Pembentukan Tim Fit & Proper Seleksi Direktur Pelaksana 2024 1. Discussion on DD Remuneration 2. Establishment of Fit & Proper Team for Managing Director Selection 2024	1. Yon Arsal 2. D. James Rompas 3. Wahyu P Wibowo
5	22-May-24	Usulan Perubahan PDD Pengangkatan dan Pemberhentian DP Proposed Amendments to PDD Appointment and Dismissal of DPs	1. Yon Arsal 2. D. James Rompas 3. Wahyu P Wibowo
6	21-Jul-25	Pembahasan hasil uji kemampuan dan kepatutan calon Direktur Pelaksana LPEI oleh Panitia Seleksi DP Discussion of the fit and proper test results of LPEI Managing Director candidates by DP Selection Committee	1. Yon Arsal 2. D. James Rompas
7	21-Aug-24	Penunjukkan Pelaksana Tugas Direktur Pelaksana Appointment of Acting Managing Director	1. Yon Arsal 2. D. James Rompas 3. Wahyu P Wibowo

List Rapat KRN Tahun 2024

List Rapat KRN Tahun 2024

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Participants
8	1-Nov-24	Wawancara Kandidat Anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko Interview of Candidates for Audit Committee Members and Risk Monitoring Committee Members	1. Yon Arsal 2. Wahyu P Wibowo
9	1-Nov-24	Rapat Evaluasi Kandidat Komite DD DD Committee Candidate Evaluation Meeting	1. Yon Arsal 2. Wahyu P Wibowo

Program Pengembangan Kompetensi Tahun 2024

Sepanjang 2024, Komite Remunerasi dan Nominasi terus meningkatkan kapasitasnya melalui berbagai pelatihan dan program pengembangan kompetensi. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dengan rincian sebagai berikut:

Competency Development Program in 2024

Throughout 2024, Remuneration and Nomination Committee continues to improve its capacity through various training and competency development programs. This step aims to strengthen the effectiveness in carrying out its duties and responsibilities, with the following details:

Nama Name	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Judul Pelatihan Training Title	Tempat Pelaksanaan Venue	Penyelenggara Organizer
Yon Arsal	12 Agustus 2024 August 12, 2024	Best Practice of GCG	Jakarta	Indonesia Institute of Corporate Directorship
D. James Rompas	12 Agustus 2024 August 12, 2024	Best Practice of GCG	Jakarta	Indonesia Institute of Corporate Directorship
T. Wahyu P. Wibowo	1 – 2 Maret 2024 6 – 7 Juni 2024 10 Juni 2024 - March 1 - 2, 2024 - June 6 - 7, 2024 - June 10, 2024	- Harmoni Eksekusi dan Kolaborasi Transformasi - Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 - Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 - Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 - Harmony of Execution and Collaboration Transformation - Recertification Debriefing Risk Management Level 5 - Recertification Debriefing Risk Management Level 6 - Recertification Debriefing Risk Management Level 7	Jakarta	- Peopletech - Arfaidhams - Garda

Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Komite Remunerasi dan Nominasi berperan aktif dalam mendukung proses pengambilan keputusan terkait nominasi dan remunerasi di LPEI. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, komite telah memberikan rekomendasi strategis kepada Dewan Direktur untuk memastikan kebijakan yang ditetapkan sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik.

Implementation of Remuneration and Nomination Committee Duties in 2024

Throughout 2024, Remuneration and Nomination Committee played an active role in supporting the decision-making process related to nominations and remuneration at Indonesia Eximbank. In accordance with its duties and functions, the committee has provided strategic recommendations to Board of Directors to ensure that the established policies are in line with the principles of good corporate governance.

Sebagai bagian dari komitmennya, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyelesaikan berbagai program kerja berikut:

1. Melakukan *review* dan memberikan rekomendasi dalam penyusunan struktur organisasi LPEI sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan sesuai dengan bisnis LPEI ke depan.
2. Membahas dan memberikan rekomendasi dalam penyusunan remunerasi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana dan pegawai.

As part of its commitment, Remuneration and Nomination Committee has completed the following work programs:

1. To review and provide recommendations in the preparation of LPEI's organizational structure in accordance with good governance principles and in accordance with LPEI's future business.
2. Discussed and provided recommendations in the preparation of remuneration for the Board of Directors, Executive Director, Managing Director and employees.

3. Telah membentuk Tim Penilai Uji Kepatutan dan Kelayakan (*Fit and Proper Test*) seleksi Direktur Pelaksana terhadap calon Direktur Pelaksana berkenaan telah berakhirnya masa jabatan Direktur Pelaksana saat ini.
4. Membahas dan memberikan rekomendasi dalam penyusunan Peraturan Dewan Direktur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Pelaksana.
5. Melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap Calon Direktur Pelaksana LPEI.
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur atas Calon Direktur Pelaksana LPEI.
7. Melaksanakan pelatihan kepada Dewan Direktur tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
8. Melakukan uji dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur atas Calon Anggota Independen untuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Direktur LPEI untuk membantu dalam penilaian dan mitigasi risiko terkait pembiayaan ekspor nasional. Komite ini memberikan rekomendasi berdasarkan evaluasi berkala, sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko.

Dasar Hukum

Komite Pemantau Risiko LPEI dibentuk berdasarkan PMK No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) dalam PMK tersebut, Dewan Direktur diwajibkan membentuk komite-komite pendukung, termasuk Komite Pemantau Risiko.

Pengangkatan anggota komite dilakukan oleh Direktur Eksekutif berdasarkan keputusan rapat Dewan Direktur. Selain itu, Dewan Direktur bertanggung jawab memastikan bahwa komite yang dibentuk dapat menjalankan tugasnya dengan efektif.

Komite Pemantau Risiko berperan dalam membantu Dewan Direktur memastikan efektivitas penerapan Manajemen Risiko melalui pemantauan, evaluasi, dan pemberian rekomendasi terkait risiko dalam kegiatan usaha dan operasional LPEI. Peran ini sejalan dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) PMK 208/2021.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Piagam Komite Pemantau Risiko LPEI merupakan regulasi internal yang berfungsi sebagai pedoman dan tata tertib kerja Komite. Dokumen ini ditetapkan melalui Peraturan Dewan Direktur No. 0006/PDD/09/2022 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

3. Has formed a Fit and Proper Test Assessment Team for the selection of the Managing Director for the Managing Director candidate regarding the expiration of the current Managing Director's term of office.
4. Discussed and provided recommendations in the preparation of the Board of Directors Regulation on Appointment and Dismissal of the Managing Director.
5. Conducting fit and proper test on LPEI Managing Director Candidates.
6. Provide recommendations to the Board of Directors on the candidates for Managing Director of LPEI.
7. Conducting training to the Board of Directors on the implementation of Good Corporate Governance.
8. Conduct tests and provide recommendations to the Board of Directors on the Independent Member Candidates for the Audit Committee and Risk Monitoring Committee.

RISK MONITORING COMMITTEE

Risk Monitoring Committee was established by the Indonesia Eximbank Board of Directors to assist in the assessment and mitigation of risks related to national export financing. This committee provides recommendations based on periodic evaluations, in accordance with the duties and functions stipulated in the Risk Monitoring Committee Charter.

Legal Basis

The Indonesia Eximbank Risk Monitoring Committee was established based on the Minister of Finance Regulation No. 208/PMK.06/2021 concerning Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank. In accordance with Article 8 paragraph (1) of the Regulation, Board of Directors is required to form supporting committees, including the Risk Monitoring Committee.

The appointment of committee members is carried out by Executive Director based on the Board of Directors' meeting decision. In addition, Board of Directors is responsible for ensuring that the established committee can carry out its duties effectively.

Risk Monitoring Committee plays a role in assisting the Board of Directors in ensuring the effectiveness of Risk Management implementation through monitoring, evaluation, and providing recommendations related to risks in the Indonesia Eximbank's business and operational activities. This role is in line with the provisions regulated in PMK 28/2021 Article 40 paragraph (1).

Risk Monitoring Committee Charter

The Indonesia Eximbank Risk Monitoring Committee Charter is an internal regulation that serves as a guideline and code of conduct for the Committee. This document was established through Board of Directors Regulation No. 0006/PDD/09/2022 concerning the Indonesia Eximbank Risk Monitoring Committee Charter.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko berpedoman pada tata tertib kerja yang mencakup struktur dan keanggotaan, tugas serta wewenang, mekanisme dan ketentuan kerja termasuk tata tertib rapat, mekanisme pengambilan keputusan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Selain itu, piagam ini juga mengatur kode etik dan waktu kerja serta evaluasi kinerja. Ketentuan dalam piagam ini sejalan dengan Pasal 38 PMK 208/2021.

Kriteria Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan PMK 208 tahun 2021, susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko terdiri atas :

- 1 (satu) orang anggota Dewan Direktur sebagai ketua;
- 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko sebagai anggota; dan
- 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan sebagai anggota.

Periode dan Masa Jabatan

Masa jabatan Komite Pemantau Risiko diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko No. 0006/PDD/09/2022. Ketua Komite Pemantau Risiko, yang berasal dari Anggota Dewan Direktur, menjabat sesuai dengan masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Direktur atau berdasarkan keputusan Rapat Dewan Direktur. Sementara itu, anggota Komite Pemantau Risiko memiliki masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali jika menunjukkan kinerja yang baik.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap manajemen risiko, Komite Pemantau Risiko dibentuk dengan mengacu pada PMK 208/2021 pasal 37 ayat (2). Susunan Komite Pemantau Risiko terdiri dari seorang anggota Dewan Direktur sebagai ketua, serta dua anggota Pihak Independen dengan keahlian masing-masing di bidang Manajemen Risiko dan Keuangan.

Di tahun 2024, terjadi perubahan dalam komposisi Komite Pemantau Risiko, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut.

In carrying out its duties and responsibilities, Risk Monitoring Committee is guided by work rules that include structure and membership, duties and authorities, mechanisms and work provisions including meeting rules, decision-making mechanisms, accountability, and reporting. In addition, the charter also regulates the code of conduct, working hours, and performance evaluation. The provisions in this charter are in line with Article 38 of PMK 208/2021.

Criteria for Audit Committee

Based on PMK 208 of 2021, the membership composition of Risk Monitoring Committee consists of:

- 1 (one) member of the Board of Directors as chairman;
- 1 (one) Independent Party with expertise in Risk Management as member; and
- 1 (one) Independent Party with expertise in finance as member.

Period and Term of Office

The term of office of Risk Monitoring Committee is regulated in the Risk Monitoring Committee Charter No. 0006/PDD/09/2022. The Chairman of Risk Monitoring Committee, who is a member of Board of Directors, serves according to his term of office as a member of Board of Directors or based on the Board of Directors Meeting decision. Meanwhile, members of Risk Monitoring Committee have a term of office of 3 (three) years and can be extended once if they show good performance.

Structure, Number, Composition and Basis of Appointment of Risk Monitoring Committee

In carrying out the function of supervising risk management, Risk Monitoring Committee was formed with reference to PMK 208/2021 article 37 paragraph (2). The composition of Risk Monitoring Committee consists of a member of Board of Directors as chairman, as well as two members of Independent Parties with their respective expertise in the fields of Risk Management and Finance.

In 2024, there was a change in the composition of Risk Monitoring Committee, as detailed in the following table.

Komposisi Komite Pemantau Risiko LPEI per 1 Januari– 31 Agustus 2024

Composition of Indonesia Eximbank's Risk Monitoring Committee as of January 1st– date/month 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment
D. James Rompas	Ketua Komite Chairman of Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0031/KDE/08/2023 Executive Director's Decree No. 0031/KDE/08/2023
Putu Rahwidhiyasa	Anggota Komite Member of Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0031/KDE/08/2023 Executive Director's Decree No. 0031/KDE/08/2023
Kastawa Yudiaatmaja	Anggota Komite Member of Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0031/KDE/08/2023 Executive Director's Decree No. 0031/KDE/08/2023

Komposisi Komite Pemantau Risiko LPEI per 4 Oktober - 10 November 2024

Composition of Indonesia Eximbank's Risk Monitoring Committee as of date/month - December 31st, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment
Kasan	Ketua Komite Chairman of Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0029/KDE/10/2024 Executive Director's Decree No. 0029/KDE/10/2024
Putu Rahmawidhiyasa	Anggota Komite Member of Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0029/KDE/10/2024 Executive Director's Decree No. 0029/KDE/10/2024
Kastawa Yudiatmaja	Anggota Komite Member of Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0029/KDE/10/2024 Executive Director's Decree No. 0029/KDE/10/2024

Komposisi Komite Pemantau Risiko LPEI per 10 November – 31 Desember 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment
Kasan	Ketua Komite Chief of Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0035/KDE/11/2024 Executive Director Decision No. 0035/KDE/11/2024
Kastawa Yudiatmaja	Anggota Komite Member of Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0035/KDE/11/2024 Executive Director Decision No. 0035/KDE/11/2024
Lista Irna	Anggota Komite Member of Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0035/KDE/11/2024 Executive Director Decision No. 0035/KDE/11/2024

Profil Komite Pemantau Risiko

Profil anggota Komite Pemantau Risiko LPEI per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Profile of Risk Monitoring Committee

The profile of Indonesia Eximbank's Risk Monitoring Committee members as of December 31, 2024, is as follows:

Kasan Ketua Pemantau Risiko Member of Risk Monitoring Committee

Profil beliau dapat dilihat pada bagian profil Dewan Direktur dalam Laporan Tahunan ini

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Direktur Eksekutif No. 0035/KDE/11/2024

His profile can be found in the Board of Director profile section of this Annual Report

Legal Basis for Appointment

Executive Director Decision No. 0035/KDE/11/2024

Kastawa Yudiatmaja Anggota Komite Pemantau Risiko Member of Risk Monitoring Committee

Usia Age	56 tahun 56 years old
Warga Negara Nationality	Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung (1991) Magister dari Universitas Indonesia (2012)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0035/KDE/11/2024 Executive Director's Decree No. 0035/KDE/11/2024
Riwayat Karier Career Background	• Anggota Komite Pemantau Risiko Bank Mayapada (2013 – 2022) • Treasury Manager, PT Austindo Nusantara Jaya Jakarta (1999 – 2002) • Market Risk Manager, Rabobank International Indonesia (1998 – 1999) • Head of Derivatives & Marketing Desk Treasury, Bank Niaga (1997 – 1998) • Head of Risk Management Department, Bank Niaga (1994 – 1997)



Kastawa Yudiantmaja Anggota Komite Pemantau Risiko Member of Risk Monitoring Committee		
Rangkap Jabatan Concurrent Position	- Subject Matter Expert, Inti Copora Teknologi untuk implementasi NTCS Treasury Bank Mandiri (2022 – sekarang) - Risk Modelling Lecturer at Masters in Applied Economics Atma Jaya University (2017 – sekarang) - Software Architect, Bank DKI (2020 – sekarang) Anggota Komite Audit Bank Mayapada (2013 – sekarang)	
Sertifikasi Certification	- Manajemen Risiko Tingkat II, BSMR - Financial Risk Manager, GARP	
Lista Irna Anggota Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Pemantau Risiko		
Usia Age	57 tahun 57 years old	
Warga Negara Citizen	Indonesia	
Domisili Domicile	Jakarta	
Riwayat Pendidikan Education History	- Sarjana Teknik dari Universitas Sriwijaya, Palembang (1990) - Magister Administrasi Bisnis dari Swiss German University, Jakarta (2004) - Bachelor of Engineering from Sriwijaya University, Palembang (1990) - Master of Business Administration from Swiss German University, Jakarta (2004)	
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0035/KDE/11/2024	
Riwayat Karier Career History	- Anggota Komite Pemantau Risiko PT. Bank Mandiri Tbk (Agustus 2016 - Juli 2021) - Anggota Komite Pemantau Risiko dan Audit PT. Bank Rabo International Indonesia (Feb 2016 - Juli 2016) - Chief Credit Officer (CCO) Consumer and Mass Market Bank Danamon Indonesia (EVP) (Mar 2014 - Jan 2016) - Entreprise Risk & Policy Integrated Risk Bank Danamon Indonesia Policy and Portofolio Head (SVP) (Nov 2010 - Mar 2014) - Head of Consumer Risk Credit Operation (VP) Bank Internation Indonesia (Sep 2007 - Nov 2010) - Credit Planning, MIS Reporting & QA Head, Credit Consumer Banking (AVP) Standard Chartered Bank (Feb 2007 - August 2007) - National Head of Telemarketing, Shared Distribution, Consumer Banking Standard Chartered Bank (Jan 2006 - Feb 2007) - Head of Upcountry & Jakarta Direct Sales, Credit Card & Personal Loan, Consumer Banking Standard Chartered Bank (Jan 2005 - Jan 2006) - Head of Telesales, Credit Card & Personal Loan, Consumer Banking Standard Chartered Bank (Jan 2004 - Jan 2005) - Sales Support Head ,Credit Card & Personal Loan, Consumer Banking Standard Chartered Bank (Jan 2003- Jan 2004) - Credit Policy Manager, Consumer Banking Standard Chartered Bank (Juli 2002- Jan 2003) dan lainnya - Member of Risk Monitoring Committee of PT. Bank Mandiri Tbk (August 2016 - July 2021) - Member of Risk Monitoring and Audit Committee PT. Bank Rabo International Indonesia (Feb 2016 - July 2016) - Chief Credit Officer (CCO) Consumer and Mass Market Bank Danamon Indonesia (EVP) (Mar 2014 - Jan 2016) - Entreprise Risk & Policy Integrated Risk Bank Danamon Indonesia Policy and Portfolio Head (SVP) (Nov 2010 - Mar 2014) - Head of Consumer Risk Credit Operation (VP) Bank Internation Indonesia (Sep 2007 - Nov 2010) - Credit Planning, MIS Reporting & QA Head, Credit Consumer Banking (AVP) Standard Chartered Bank (Feb 2007 - August 2007) - National Head of Telemarketing, Shared Distribution, Consumer Banking Standard Chartered Bank (Jan 2006 - Feb 2007) - Head of Upcountry & Jakarta Direct Sales, Credit Card & Personal Loan, Consumer Banking Standard Chartered Bank (Jan 2005 - Jan 2006) - Head of Telesales, Credit Card & Personal Loan, Consumer Banking Standard Chartered Bank (Jan 2004 - Jan 2005) - Sales Support Head, Credit Card & Personal Loan, Consumer Banking Standard Chartered Bank (Jan 2003- Jan 2004) - Credit Policy Manager, Consumer Banking Standard Chartered Bank (July 2002- Jan 2003) - and others.	
Rangkap Jabatan Dual Position	Anggota Komite Pemantau Risiko PT. Allo Bank Tbk (2013 - Sekarang) Member of Risk Monitoring Committee of PT Allo Bank Tbk (2013 - Present)	
Sertifikasi Certification	- Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7, LSPP - Sertifikasi Asesor Manajemen Risiko, BNSP - Level 7 Risk Management Certification, LSPP - Risk Management Assessor Certification, BNSP	

Independensi Anggota Komite

Sesuai dengan aturan yang berlaku, anggota Komite Pemantau Risiko harus berasal dari Pihak Independen yang tidak memiliki afiliasi dengan LPE, Dewan Direktur, Dewan Pengawas Syariah, Direktur Eksekutif, atau Direktur Pelaksana. Ketentuan ini diterapkan untuk memastikan

Independence of Committee Members

In accordance with applicable regulations, members of Risk Monitoring Committee must be from Independent Parties that have no affiliation with Indonesia Eximbank, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, Executive Director, or Managing Director. This provision is applied to ensure that

bahwa Komite Pemantau Risiko dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara objektif dan independen, tanpa benturan kepentingan atau pengaruh dari pihak mana pun.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko diatur dalam Piagam Komite Audit, yang disusun berdasarkan Pasal 40 PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Sesuai dengan ketentuan tersebut, berikut adalah tugas dan tanggung jawab yang dijalankan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi:

1. Membantu Dewan Direktur, dalam memastikan efektivitas penerapan Manajemen Risiko melalui pemantauan, evaluasi, dan pemberian rekomendasi tentang Risiko kegiatan usaha dan operasional LPEI.
2. Pelaksanaan tugas tersebut paling kurang dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko; dan
 - b. Kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
3. Membuat Laporan Pelaksanaan Tugas yang disampaikan kepada Dewan Direktur secara berkala paling kurang 3 (tiga) bulan sekali.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Kebijakan Rapat

Rapat Komite Pemantau Risiko harus diselenggarakan setidaknya sesuai dengan jumlah minimum rapat Dewan Direktur, yaitu paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan. Rapat komite hanya dapat berlangsung jika dihadiri oleh ketua dan minimal satu anggota. Hasil rapat dicatat dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota

Sepanjang tahun 2024, Komite Pemantau Risiko mengadakan 22 (dua puluh dua) kali rapat, dengan tingkat kehadiran setiap anggota yang sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
D. James Rompas*	Ketua Komite Chairman of Committee	17	17	100%
Putu Rahwidhiyasa	Anggota Komite Member of Committee	18	18	100%
Kastawa Yudiatmaja	Anggota Komite Member of Committee	22	22	100%
Lista Irna	Anggota Komite Member of Committee	4	4	100%

*) Beliau menyelesaikan masa jabatan sebagai Anggota Dewan Direktur sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024

*) He completes his term of office as a Member of the Board of Directors until August 31, 2024

Risk Monitoring Committee can carry out its duties and responsibilities objectively and independently, without any conflict of interest or influence from any party.

Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of Risk Monitoring Committee are regulated in the Audit Committee Charter, which is prepared based on Article 40 of PMK No. 208/2021 concerning Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles at Indonesia Eximbank. In accordance with these provisions, the following are the duties and responsibilities carried out by the Remuneration and Nomination Committee:

1. Assist the Board of Directors in ensuring the effectiveness of implementation of Risk Management through monitoring, evaluating and providing recommendations regarding the risks of Indonesia Eximbank business and operational activities.
2. Implementation of these duties involves at least monitoring and evaluating:
 - a. Duties implementation of Risk Management Work Unit; and
 - b. Conformity between the Risk Management policy and its implementation.
3. Prepare a Duties Implementation Report which is submitted to the Board of Directors periodically at least once every 3 (three) months.

Risk Monitoring Committee Meeting

Meeting Policy

Risk Monitoring Committee meetings must be held at least in accordance with the minimum number of Board of Directors meetings, which is at least once a month. Committee meetings can only take place if they are attended by the chairman and at least one member. The meeting results are recorded in the meeting minutes and are well documented.

Meeting Frequency and Member Attendance Rate

Throughout 2024, Risk Monitoring Committee held 22 (twenty-two) meetings, with the attendance rate of each member as follows:



Agenda Rapat

Sepanjang tahun 2024, Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat untuk meninjau dan membahas berbagai agenda sebagai berikut:

Meeting Agenda

Throughout 2024, Risk Monitoring Committee held meetings to review and discuss the following agendas:

List Rapat KPR Tahun 2024

List Rapat KPR Tahun 2024

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Participants
1	10-Jan-24	Pembahasan Laporan Pengawasan KPR Discussion of mortgage supervision report	1. D. James Rompas 2. Putu Rahwidhiyasa 3. Kastawa Yudiatmaja
2	29-Jan-24	• Ratifikasi • Laporan Tingkat Kesehatan Triwulan IV 2023 • Ratification • Health Level Report 4th Quarter 2023	1. D. James Rompas 2. Putu Rahwidhiyasa 3. Kastawa Yudiatmaja
3	7-Feb-24	Pembahasan Progress Laporan Keuangan Audited 2023 Discussion on the Progress of Audited Financial Statements 2023	1. D. James Rompas 2. Putu Rahwidhiyasa 3. Kastawa Yudiatmaja
4	26-Feb-24	• Update Progress Laporan Keuangan Audited 2023 • Rencana Revisi RKAT 2024 • Kondisi 4 debitur yang akan dilakukan upaya hukum • Update on the Progress of Audited Financial Statements 2023 • RKAT Revision Plan 2024 • Condition of 4 debtors that will be subject to legal action	1. D. James Rompas 2. Putu Rahwidhiyasa 3. Kastawa Yudiatmaja
5	29-Feb-24	• Rencana Kerja KPR 2024 • Pembahasan Laporan Penanganan NPL • KPR Work Plan 2024 • Discussion of NPL Handling Report	1. D. James Rompas 2. Putu Rahwidhiyasa 3. Kastawa Yudiatmaja
6	6-Mar-24	Pembahasan Kinerja Keuangan posisi Februari 2024 Discussion on Financial Performance of February 2024 position	1. D. James Rompas 2. Putu Rahwidhiyasa 3. Kastawa Yudiatmaja
7	27-Mar-24	Join Komite Pembahasan Laporan Keuangan audited Join Committee to discuss audited financial statements	1. D. James Rompas 2. Putu Rahwidhiyasa 3. Kastawa Yudiatmaja
8	4-Apr-24	Join Komite Pembahasan Hapus buku Tambahan Tahun 2024 Join Committee to Discuss the Removal of the 2024 Supplementary Book	1. D. James Rompas 2. Putu Rahwidhiyasa 3. Kastawa Yudiatmaja
9	24-Apr-24	• Laporan Tingkat Kesehatan dan Profil Risiko • Laporan Pembiayaan Bermasalah Triwulan I 2024 • Health Level and Risk Profile Report • Non-Performing Financing Report 1st Quarter 2024	1. D. James Rompas 2. Putu Rahwidhiyasa 3. Kastawa Yudiatmaja
10	25-Apr-24	Pembahasan Account Tambahan Hapus buku Discussion of Additional Accounts written off	1. D. James Rompas 2. Putu Rahwidhiyasa 3. Kastawa Yudiatmaja
11	10-May-24	• Manajemen Letter - KAP RSM • Kinerja Keuangan periode April • Management Letter - KAP RSM • Financial Performance for April period	1. D. James Rompas 2. Putu Rahwidhiyasa 3. Kastawa Yudiatmaja
12	12-Jun-24	• Laporan Rencana Tindak atas Tingkat Kesehatan • Laporan Progress Implementasi Operational Risk Management • Action Plan Report on Health Level • Operational Risk Management Implementation Progress Report	1. D. James Rompas 2. Putu Rahwidhiyasa 3. Kastawa Yudiatmaja
13	10-Jul-24	• Update kinerja keuangan Juni 2024 • Update rencana tindak faktor rentabilitas laporan tingkat kesehatan • Arahan penyusunan Laporan KPR Triwulan I dan II 2024 • Update on June 2024 financial performance • Update on the action plan for the profitability factor of the health level report • Direction for the preparation of the first and second quarter 2024 mortgage report	1. D. James Rompas 2. Putu Rahwidhiyasa 3. Kastawa Yudiatmaja
14	29-Jul-24	• Laporan Tingkat Kesehatan dan Profil Risiko Triwulan II 2024 • Update Hasil Stress Testing • Health Level and Risk Profile Report Q2 2024 • Stress Testing Results Update	1. D. James Rompas 2. Putu Rahwidhiyasa 3. Kastawa Yudiatmaja

List Rapat KPR Tahun 2024

List Rapat KPR Tahun 2024

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Participants
15	29-Jul-24	- Pembahasan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis dan RKAT Semester I 2024 - Pembahasan Laporan Pembiayaan Bermasalah Triwulan II 2024 - Discussion of Business Plan and RKAT Supervision Report for Semester I 2024 - Discussion of Troubled Financing Report for Quarter II 2024	1. D. James Rompas 2. Putu Rahwidhiyasa 3. Kastawa Yudiatmaja
16	14-Aug-24	- Laporan Rencana Tindak Faktor Rentabilitas posisi Juli 2024 - Laporan Progress Transformasi - Profitability Factor Action Plan Report July 2024 position - Transformation Progress Report	1. D. James Rompas 2. Putu Rahwidhiyasa 3. Kastawa Yudiatmaja
17	28-Aug-24	- Pemaparan Mitigasi Risiko Keamanan Siber IT - Pemaparan Strategi dan Realisasi Pembiayaan Syariah - Exposure of IT Cyber Security Risk Mitigation - Exposure of Sharia Financing Strategy and Realization	1. D. James Rompas 2. Putu Rahwidhiyasa 3. Kastawa Yudiatmaja
18	23-Oct-24	- Laporan Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Triwulan III 2024 - Risk Appetite Statement LPEI 2025 - Laporan Pembiayaan Bermasalah Triwulan III 2024 - Risk Profile and Health Level Report for the Third Quarter 2024 - Risk Appetite Statement LPEI 2025 - Non-performing Financing Report for the third quarter of 2024	1. Kasan 2. Putu Rahwidhiyasa 3. Kastawa Yudiatmaja
19	21-Nov-24	- Pembahasan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan Kesiapan Survey IFRS - Pembahasan Governance, Risk dan Compliance (GRC) - Discussion of Sustainable Finance Action Plan and IFRS Survey Readiness - Discussion of Governance, Risk and Compliance (GRC)	1. Kasan 2. Kastawa Yudiatmaja 3. Lista Irna
20	5-Dec-24	- Pembahasan Kinerja Keuangan posisi November 2024 - Progress Update Proyek Modernisasi Core System - Laporan PT Indrilco Bakti - Discussion of Financial Performance as of November 2024 - Progress Update on Core System Modernization Project - PT Indrilco Bakti Report	1. Kasan 2. Kastawa Yudiatmaja 3. Lista Irna
21	20-Dec-24	Laporan IT Security Drill IT Security Drill Report	1. Kasan 2. Kastawa Yudiatmaja 3. Lista Irna
22	31-Dec-24	Update Progress Audit oleh KAP RSM Update on Audit Progress by KAP RSM	1. Kasan 2. Kastawa Yudiatmaja 3. Lista Irna

Program Pengembangan Kompetensi Tahun 2024

Sepanjang 2024, Komite Pemantau Risiko terus meningkatkan kapasitasnya melalui berbagai pelatihan dan program pengembangan kompetensi. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dengan rincian sebagai berikut:

Competency Development Program in 2024

Throughout 2024, Risk Monitoring Committee continues to improve its capacity through various training and competency development programs. This step aims to strengthen the effectiveness in carrying out its duties and responsibilities, with the following details:

Nama Name	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Judul Pelatihan Training Title	Tempat Pelaksanaan Venue	Penyelenggara Organizer
D. James Rompas	12 Agustus 2-24	Best Practice of GCG	Jakarta	Indonesia Institute of Corporate Directorship
Kasan	12 Agustus 2-24	Best Practice of GCG	Jakarta	Indonesia Institute of Corporate Directorship

Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko Tahun 2024

Program Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2024

Komite Pemantau Risiko telah menetapkan rencana kerja untuk tahun 2024 sebagai berikut:

1. Memastikan kebijakan manajemen risiko telah dilaksanakan sesuai kebijakan
2. Efektivitas pelaksanaan tugas satuan kerja manajemen risiko
3. Pengawasan terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan serta penerapan kebijakan tersebut
4. Pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko LPEI
5. Pemantauan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik
6. *Self-assessment* kinerja Komite Manajemen Risiko

Kerangka Kerja Komite Pemantau Risiko

Dalam rangka pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko tahun 2024, Komite Pemantau Risiko telah merancang kerangka kerja berikut:

Implementation of Risk Monitoring Committee Duties in 2024

Risk Monitoring Committee Work Program in 2024

The Risk Monitoring Committee has established a work plan for 2024 as follows:

1. Ensuring the risk management policy has been implemented in accordance with the policy
2. Effectiveness of the implementation of the duties of the risk management working unit
3. Supervision of accounting policies and the preparation of financial statements and the application of these policies
4. Monitoring and advising on LPEI's risk management policies and implementation
5. Monitoring the implementation of good governance principles
6. Self-assessment of the Risk Management Committee's performance

Risk Monitoring Committee Framework

In order to carry out the Risk Monitoring Committee's duties in 2024, Risk Monitoring Committee has designed the following framework:

Tabel Kerangka Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2024

Tabel Kerangka Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2024

No	Agenda	Klasifikasi Rencana Kerja DD"	Klasifikasi Proker KPR**	Jenis	Jenis Risiko	Bulan												Tujuan
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A. Rapat dengan Tim SKMR																		
1	Pembahasan Laporan Tingkat Kesehatan & Laporan Profil Risiko	RK 4 – 3	a	Review & Monitoring	Enterprise	-		-		-		-						Memantau hasil penilaian untuk pelaporan kepada regulator
2	Pemantauan Enterprise Risk Management Report (ERMR)	RK 4 - 1	a	Review & Monitoring	Enterprise			-		-		-						Memantau secara internal untuk pelaporan kepada Dewan Direktur
3	Pembahasan Review Berkala Kebijakan ERM	RK 4 – 2	a	Supervisi Consulting Review	Enterprise							-						Melakukan kajian berkala tahunan sesuai ketentuan internal dan pemenuhan GCG
4	Pembahasan Hasil Review Parameter dan Threshold Profil Risiko	RK 4 – 2	b	Supervisi Consulting Review	Enterprise			-		-		-					-	Menindaklanjuti concern manajemen dan KPR terkait kesesuaian penilaian profil risiko dengan kondisi aktual
5	Penyusunan Risk Appetite Statement	RK 4 - 2	b	Supervisi Consulting Review	Enterprise									-				Memberikan rekomendasi untuk selanjutnya diputuskan dalam RDD dan dilampirkan dalam RKAT
6	Pembahasan Risk Maturity	RK 4 – 2	b	Supervisi Consulting Review	Enterprise								-				-	Memberikan rekomendasi metodologi dan pelaporan hasil penilaian <i>risk maturity</i>
7	Monitoring Watchlist / EWD	RK 4 – 2	b	Review & Monitoring	Kredit					-		-					-	Melaporkan pelaksanaan monitoring watchlist / EWD
8	Pembahasan Hasil Validasi Model Internal Rating	RK 4 – 2	b	Supervisi Consulting Review	Kredit												-	Memberikan update atas hasil kalibrasi model credit rating internal

Tabel Kerangka Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2024

Tabel Kerangka Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2024

No	Agenda	Klasifikasi Rencana Kerja DD"	Klasifikasi Proker KPR**	Jenis	Jenis Risiko	Bulan												Tujuan
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9	Pembahasan Portofolio Guideline	RK 4 – 2	b	Supervisi Consulting Review	Kredit									-				Memberikan update atas penyusunan Portofolio Guideline
10	Progress Update Operational Risk Management (ORM)	RK 4 – 2	a	Review & Monitoring	Operasional				-					-			-	Memberikan update berkala progress implementasi ORM
11	Pembahasan Stress Test	RK 4 – 2	b	Supervisi Consulting Review	Kredit Pasar, Likuiditas				-								-	Melaporkan mengenai simulasi kondisi yang menyebabkan pada kecukupan pemodal

No	Agenda	Klasifikasi Rencana Kerja DD*	Klasifikasi Proker KPR**	Jenis	Jenis Risiko	Bulan												Tujuan
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
B. Rapat Internal KPR																		
1	Ratifikasi KPR dan Agenda od hoc internal lainnya		b	Review & Monitoring	Enterprise	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Melakukan monitoring terhadap rekomendasi / arahan KPR
2	Self assessment kinerja Komite Pemantau Risiko		c	Review & Monitoring	Enterprise												-	Menilai kinerja KPR tahunan untuk disusun dalam suatu Laporan
C. Rapat dengan Tim Finance (Joint Committee Setiap bulan)																		
1	Pemantauan Kinerja Keuangan LPEI	RK 4 – 1	a	Review & Monitoring	Enterprise	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Melakukan pemantauan kinerja keuangan LPEI termasuk review atas CKPN
D. Rapat dengan Tim ALM & Lainnya																		
1	Pembahasan Kajian Framework Manajemen Risiko Likuiditas dan Pasar	RK 4 – 2	b	Supervisi Consulting Review	Pasar & Likuiditas									-			-	Memberikan rekomendasi metodologi dan pelaporan hasil penilaian risk maturity
E	Diskusi dengan Pihak Eksternal																	
1	Diskusi dengan Pihak Eksternal, antara lain OJK dan KAP	RK 4 – 3	-	Koordinasi	Enterprise													Melakukan diskusi dengan pihak eksternal jika diperlukan
F	Ad-hoc Meeting lainnya																	
1	Pembahasan Tematik Triwulanan	RK 4 – 2	-	Supervisi Consulting Review	Enterprise			-					-				-	Membahas isu-isu yang menjadi perhatian KPR

Organ Pendukung Direktur Eksekutif

Executive Director Supporting Organs

LPEI terus memperkuat tata kelola dengan memastikan adanya mekanisme yang mendukung efektivitas pengambilan keputusan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pembentukan komite-komite sesuai dengan amanat Pasal 19 PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah.

Sebagai tindak lanjut dari regulasi tersebut, Direktur Eksekutif LPEI menetapkan Peraturan Direktur Eksekutif yang mengatur struktur, keanggotaan, tugas, serta prosedur pengambilan keputusan dalam komite-komite tersebut. Keanggotaan komite bersifat ex-officio, sehingga kewenangan keputusan melekat pada jabatan yang bersangkutan.

Berdasarkan peraturan tersebut, terdapat sembilan komite di LPEI yang berperan dalam mendukung pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, yaitu:

1. Komite Manajemen Risiko.
2. Komite Pengembangan Produk.
3. Komite Kebijakan dan Pedoman.
4. Komite *Assets dan Liabilities Management*.
5. Komite Teknologi Sistem Informasi.
6. Komite Pengadaan.
7. Komite Jasa Konsultasi.
8. Komite Pembiayaan.
9. Komite Sumber Daya Manusia.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Dalam menjalankan perannya, Komite Manajemen Risiko berfungsi sebagai pendukung Direktur Eksekutif dalam pengelolaan risiko lembaga. Komite ini bertugas memberikan rekomendasi yang dituangkan ke dalam kebijakan, strategi, dan pedoman guna memastikan manajemen risiko berjalan efektif.

Pedoman Komite

Komite Manajemen Risiko melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif No. 0025/PDE/12/2024 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di bawah Direktur Eksekutif, Edisi 1 Revisi 4, yang ditetapkan pada 18 Desember 2024.

Status Keanggotaan dan Status Hak Suara

Komposisi dan struktur keanggotaan Komite Manajemen Risiko di LPEI mengacu pada Peraturan Direktur Eksekutif No. 0025/PDE/12/2024 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di bawah Direktur Eksekutif, dengan rincian sebagai berikut:

Indonesia Eximbank continues to strengthen governance by ensuring that mechanisms are in place to support effective decision-making. One of the strategic steps taken is the formation of committees in accordance with the mandate of Article 19 of Finance Ministerial Regulation No. 208/2021 concerning Principles of Governance, Risk Management, and Know Your Customer.

As a follow-up to this regulation, Indonesia Eximbank's Executive Director issued an Executive Director Regulation governing the structure, membership, duties, and decision-making procedures of these committees. Committee membership is ex-officio, so decision-making authority is attached to the position concerned.

Based on this regulation, there are nine committees at Indonesia Eximbank that play a role in supporting the implementation of the Executive Director's duties, namely:

1. Risk Management Committee.
2. Product Development Committee.
3. Policy and Guidelines Committee.
4. Assets and Liabilities Management Committee.
5. Information Systems Technology Committee.
6. Procurement Committee.
7. Advisory Services Committee.
8. Financing Committee.
9. Human Capital Committee.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

In carrying out its role, Risk Management Committee functions as a support to the Executive Director in managing the institution's risk. This committee is tasked with providing recommendations that are translated into policies, strategies, and guidelines to ensure effective risk management.

Committee Guidelines

Risk Management Committee carries out its duties and responsibilities based on the Executive Director Regulation No. 0021/PDE/09/2023 concerning Operational Guidelines Standards for Nine Committees under the Executive Director, Edition 1 Revision 2, which was stipulated on September 26, 2023.

Membership Status and Voting Rights Status

The composition and membership structure of Indonesia Eximbank's Risk Management Committee refers to Executive Director Regulation No. 0021/PDE/09/2023 concerning the Operational Guidelines Standards for Nine Committees under the Executive Director, with the following details:

Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Eksekutif Executive Director
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi Manajemen Risiko dan/atau Chief of yang membidangi Manajemen Risiko Managing Director of Risk Management and/or Head of Risk Management
Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary concurrently Permanent Member	Kepala Divisi yang membidangi Manajemen Risiko Head Division in charge of Risk Management
Anggota Tetap Permanent Members	1. Seluruh Direktur Pelaksana 2. Chief of yang membidangi keuangan dan perencanaan strategis 1. All Managing Director 2. Chief of finance and strategic planning
Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Members	1. Chief of selain anggota tetap 2. Kepala Divisi/pejabat setingkat Kepala Divisi selain anggota tetap yang terkait dengan materi pembahasan 1. Chief of other than permanent members 2. Chief of Division/Division Head-level officials other than permanent members related to the discussion material
Narasumber Sources	1. Chief of/Kepala Divisi yang membidangi Internal Audit 2. Chief of/Kepala Divisi yang membidangi kepatuhan 1. Chief of/Head of Division in charge of Internal Audit 2. Chief of/Head of Division in charge of Compliance
Alternate Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Alternate Membership of Risk Management Committee	
Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Sesuai PMK No. 208/PMK.06/2021 - Pasal 11 In accordance with PMK No. 208/PMK.06/2021 - Article 11
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi hubungan kelembagaan Managing Director in charge of institutional relations
Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary and Permanent Member	Kepala Divisi yang membidangi Kebijakan, Pedoman, dan Produk Head of Division in charge of product development

Profil Komite

Profil ketua dan anggota komite, yang juga merangkap jabatan lain di LPEI, telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan.

Tugas dan Wewenang

Komite Manajemen Risiko bertugas memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif, termasuk dalam hal:

1. Penyusunan strategi, program, dan perangkat penerapan Manajemen Risiko;
2. Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan;
3. Penetapan (*justification*) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*);
4. Melakukan evaluasi atas penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Anak sesuai ketentuan yang berlaku.

Committee Profile

The profiles of chairman and members of committee, who also hold other positions at Indonesia Eximbank, are described in the Company Profile section.

Duties and Authorities

Risk Management Committee is responsible for providing recommendations to the Executive Director, including in terms of:

1. Preparation of Risk Management implementation strategies and programs;
2. Improvement or refinement of Risk Management implementation based on the evaluation results;
3. Determination (*justification*) of matters related to business decisions that deviate from normal procedures (*irregularities*);
4. Evaluate the Subsidiary Entity's Health Level assessment.

Rapat Komite

Kebijakan Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Komite Manajemen Risiko wajib menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 tahun atau setiap saat apabila dipandang perlu. Tata cara pengambilan keputusan dalam Komite diatur dalam Peraturan Direktur Eksekutif No. 0021/PDE/09/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di Bawah Direktur Eksekutif, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau daring (*online*).
2. Syarat kuorum pengambilan keputusan Komite adalah minimum setengah dari anggota tetap terdiri dari:
 - a. Ketua dan/atau Wakil Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota tetap.
3. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Seluruh keputusan Komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan ditatausahakan secara lengkap dan tertib oleh sekretaris komite.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Sepanjang tahun 2024, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan 24 (dua puluh empat) kali rapat, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Committee Meetings

Policy on Decision Making in Meetings

Risk Management Committee is required to hold meetings at least 4 (four) times a year or at any time if deemed necessary. The decision-making procedures in the Committee are regulated in the Executive Director Regulation No. 0021/PDE/09/2023 dated September 26, 2023 concerning Operational Guidelines Standards of Nine Committees Under the Executive Director, as explained below:

1. Committee decisions can be made through face to face or online meetings.
2. requirement for a quorum for Committee decision making is a minimum of half of permanent members consisting of:
 - a. Chairman and/or Vice Chairman;
 - b. Secretary; and
 - c. Permanent member.
3. Meeting decisions must be taken based on deliberation to reach consensus.
4. All Committee decisions must be stated in the Minutes of Meeting and administered completely and orderly by Committee Secretary.

Meeting Frequency and Attendance Rate

Throughout 2024, Risk Management Committee held 24 (twenty four) meetings, with the following attendance levels:

Peserta Rapat Meeting Participants	Posisi di Komite Position on Committee	Frekuensi Rapat Frequency of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Direktur Eksekutif Executive Director	Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	24	23	96%
Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit Managing Director of Risk Management & Credit	Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	24	24	100%
Chief of Business Risk Chief of Business Risk	Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	24	24	100%
Kepala Divisi Manajemen Risiko Head of Risk Management Division	Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary concurrently Permanent Member	24	23	96%
Direktur Pelaksana Bisnis Managing Director of Business	Anggota Tetap Permanent Member	24	19	79%
Plt. Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis Acting Managing Director of Business Development	Anggota Tetap Permanent Member	24	23	96%
Plt. Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional & Teknologi Informasi Acting Managing Director of Finance, Operations & Information Technology	Anggota Tetap Permanent Member	24	21	88%

Peserta Rapat Meeting Participants	Posisi di Komite Position on Committee	Frekuensi Rapat Frequency of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Plt. Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan & Sumber Daya Manusia Acting Managing Director of Institutional Secretariat, Compliance & Human Capital	Anggota Tetap Permanent Member	24	21	88%

Agenda Rapat

Sepanjang tahun 2024, Rapat Komite Manajemen Risiko membahas berbagai agenda berikut:

Meeting Agenda

Throughout 2024, Risk Management Committee meetings discussed various agendas as follows:

No.	Tanggal Date	Agenda
1.	16 Januari 2024 January 16, 2024	Laporan Uji Coba (Trial) EWD Tools posisi Triwulan III - Tahun 2024 EWD Tools Trial Report 3rd Quarter position - Year 2024
2.	23 Januari 2024 January 23, 2024	1. Laporan Implementasi Spreadsheet Spreadsheet Implementation Report 2. Laporan Tingkat Kesehatan Triwulan IV 2023 Health Level Report 4th Quarter 2023
3.	30 Januari 2024 January 30, 2024	Usulan Penyesuaian Laporan Profil Risiko berdasarkan Rekomendasi Komite Pemantau Risiko (KPR) Proposed Adjustment of Risk Profile Report based on Recommendation of Risk Monitoring Committee (RMC)
4.	05 Maret 2024 March 05, 2024	1. Persetujuan Pengkinian <i>Country Limit</i> Country Limit Update Approval 2. Laporan Kajian Nikel Nickel Study Report 3. Persetujuan Laporan Hasil Z-Score DJPPR Approval of DJPPR Z-Score Result Report
5.	19 Maret 2024 March 19, 2024	Persetujuan Kajian Pemberian Fasilitas <i>Account Receivable (AR) Financing</i> dan Asuransi Proteksi Piutang Dagang pada Satu Debitur yang Sama Approval of the Study on the Provision of Account Receivable (AR) Financing Facilities and Accounts Receivable Protection Insurance Trade at the Same Debtor
6.	02 April 2024 April 02, 2024	Persetujuan Arah Pertumbuhan Sektor Nikel pada <i>Portfolio Guideline</i> dan <i>Industry Financing Reference (IFR)</i> Sektor Nikel Approval of Nickel Sector Growth Direction in Portfolio Guideline and Industry Financing Reference (IFR) Nickel Sector
7.	23 April 2024 April 23, 2024	Laporan Tingkat Kesehatan dan Profil Risiko LPEI Triwulan I 2024 LPEI Health Level and Risk Profile Report 1st Quarter 2024
8.	14 Mei 2024 May 14, 2024	1. Rencana Tindak Tingkat Kesehatan LPEI LPEI Health Level Action Plan 2. Persetujuan Strategi Pertumbuhan - <i>Alignment Portfolio Guideline dan Leads Control Tower</i> Growth Strategy Approval - Alignment Portfolio Guideline and Leads Control Tower
9.	04 Juni 2024 June 04, 2024	Laporan Pelaksanaan <i>Soft Launching EWD Tools</i> EWD Tools Soft Launching Report
10.	11 Juni 2024 June 11, 2024	1. Laporan Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Tingkat Kesehatan Faktor Rentabilitas Posisi Mei 2024; Report on the Implementation of the Follow-up Plan for the Health Level of the Profitability Factor Position May 2024; 2. Persetujuan <i>Liquidity Reserve Limit</i> dan <i>Securities Loss Limit</i> ; Approval of Liquidity Reserve Limit and Securities Loss Limit; 3. Laporan Hasil <i>Review Cadangan Klaim Penjaminan dan Asuransi</i> . Guarantee and Insurance Claims Reserve Review Report.
11.	19 Juni 2024 June 19, 2024	Laporan Pengembangan <i>Operational Risk Management (ORM)</i> Operational Risk Management (ORM) Development Report
12.	25 Juni 2024 June 25, 2024	Laporan Analisa <i>Stress Testing</i> Stress Testing Analysis Report

No.	Tanggal Date	Agenda
13.	23 Juli 2024 July 23, 2024	Laporan Tingkat Kesehatan & Profil Risiko Triwulan II 2024 Second Quarter Health & Risk Profile Report 2024
14.	30 Juli 2024 July 30, 2024	Laporan Tingkat Kesehatan & Profil Risiko Triwulan II 2024 Second Quarter Health & Risk Profile Report 2024
15.	13 Agustus 2024 August 13, 2024	Laporan Pelaksanaan Rencana Tindak Faktor Rentabilitas posisi Juli 2024 Report on the Implementation of the Action Plan for the Rentability Factor position July 2024
16.	10 September 2024 September 10, 2024	1. Laporan Hasil Penilaian OJK terhadap Tingkat Kesehatan OJK Assessment Report on Health Level 2. Persetujuan Laporan Pelaksanaan Rencana Tindak Tingkat Kesehatan Faktor Rentabilitas posisi Agustus 2024 Approval of the Implementation Report of the Action Plan for the Health Level of the Profitability Factor position August 2024
17.	24 September 2024 September 24, 2024	Usulan Penilaian <i>Risk Maturity</i> 2024 Proposed Risk Maturity Assessment 2024
18.	07 Oktober 2024 October 07, 2024	Laporan Pelaksanaan Rencana Tindak Faktor Rentabilitas posisi September 2024 Report on the Implementation of the Action Plan for the Rentability Factor position September 2024
19.	15 Oktober 2024 October 15, 2024	Laporan Pelaksanaan Monitoring Debitur melalui <i>Early Warning Detection</i> (EWD) Tools periode Q3 2024 Report on the Implementation of Debtor Monitoring through Early Warning Detection (EWD) Tools for the period Q3 2024
20.	23 Oktober 2024 October 23, 2024	1. Persetujuan <i>Risk Appetite Statement</i> LPEI 2025 Approval of Indonesia Eximbank 2025 Risk Appetite Statement 2. Persetujuan Laporan Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Triwulan III 2024 Approval of Risk Profile Report and Health Level for Quarter III 2024
21.	12 November 2024 November 12, 2024	1. Laporan Pelaksanaan Rencana Tindak Faktor Rentabilitas Oktober 2024 Report on the Implementation of Profitability Factor Action Plan October 2024 2. Laporan Implementasi Proposal Pembiayaan UKME dan <i>Bank Statement Analyzer</i> (BSA) Tools Report on the Implementation of UKM Financing Proposal and Bank Statement Analyzer (BSA) Tools
22.	04 Desember 2024 December 04, 2024	Pengkinian Komponen Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kolektif tahun 2024 Possible Components of Calculation of Collective Impairment Loss Reserves (CKPN) in 2024
23.	10 Desember 2024 December 10, 2024	1. Laporan Pelaksanaan Rencana Tindak Faktor Rentabilitas November 2024 Report on the Implementation of Rentability Factor Action Plan November 2024 2. Pengkinian Portofolio <i>Guideline</i> 2025 Update of the 2025 Portfolio Guideline
24.	31 Desember 2024 December 31, 2024	1. Persetujuan Hasil Penilaian <i>Risk Maturity</i> 2024 Approval of Risk Maturity Assessment Results 2024 2. Pelaporan <i>Stress Testing</i> Stress Testing Reporting

Sepanjang 2024, penguatan kompetensi anggota Komite Manajemen Risiko dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pengembangan keahlian. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko, dengan rincian sebagai berikut:

Throughout 2024, strengthening the competencies of Risk Management Committee members has been carried out through various training and skills development activities. These activities aim to improve the effectiveness of Risk Management Committee members in carrying out their duties and responsibilities, with the following details:

Nama Name	Tanggal Pelaksanaan Date	Judul Program Program Title	Penyelenggara Organizer
Rijani Tirtoso	1 - 2 Maret 2024 March 1-2, 2024	Harmoni Eksekusi dan Kolaborasi Transformasi (DE, DFO DAN DSL) Harmony of Execution and Transformation Collaboration (DE, DFO AND DSL)	Peopletch
	10 Juni 2024 June 10, 2024	Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 Briefing of Risk Management Recertification Level 6	Garda
	12 Juni 2024 June 12, 2024	Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Briefing of Risk Management Recertification Level 7	Garda
	21 Juni 2024 June 21, 2024	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 Risk Management Certification Exam Level 6	LSPP
	01 Juli 2024 July 01, 2024	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Risk Management Certification Exam Level 7	LSPP
	5 - 6 Juli 2024 July 5-6, 2024	<i>Senior Leader Workshop : Business Execution Strategy</i>	LPEI
Arus Gunawan	04 April 2024 April 04, 2024	Sosialisasi Budaya Anti Korupsi dan Pencegahan Gratifikasi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Lembaga SMV (<i>Special Mission Vehicle</i>) atau BUMN Sosialisasi Budaya Anti Korupsi dan Pencegahan Gratifikasi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Lembaga SMV (<i>Special Mission Vehicle</i>) atau BUMN	LPEI
	26 - 27 Juni 2024 June 26-27, 2024	Komite Audit Audit Committee	Inti Pesan
	12 Agustus 2024 August 12, 2024	<i>Best Practice of GCG</i>	PT Cita Negeri Amanah
Kasan	5 - 6 Juli 2024 July 5-6, 2024	<i>Senior Leader Workshop : Business Execution Strategy</i>	LPEI
	12 Agustus 2024 August 12, 2024	<i>Best Practice of GCG</i>	PT Cita Negeri Amanah
Daniel James Rompas	12 Agustus 2024 August 12, 2024	<i>Best Practice of GCG</i>	PT Cita Negeri Amanah
Yon Arsal	12 Agustus 2024 August 12, 2024	<i>Best Practice of GCG</i>	PT Cita Negeri Amanah
Agus Windiarto	1 - 2 Maret 2024 March 1 - 2, 2024	Harmoni Eksekusi dan Kolaborasi Transformasi (DE, DFO dan DSL) Harmony of Execution and Transformation Collaboration (DE, DFO and DSL)	Peopletch
	17 Juli 2024 July 17, 2024	Komoditas dan Sektor Industri : Economic Outlook 2024 - The Indonesian Economic Impact Commodities and Industrial Sectors: Economic Outlook 2024 - The Indonesian Economic Impact	Moodys Analytics
	12 Juni 2024 June 12, 2024	Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Risk Management Recertification Briefing Level 7	Garda
	06 - 07 Juni 24 June 06 - 07, 2024	Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 Risk Management Recertification Briefing Level 5	Arfaidhams
	10 Juni 2024 June 10, 2024	Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 Risk Management Recertification Briefing Level 6	Garda
	5 - 6 Juli 2024 July 5 -6, 2024	<i>Senior Leader Workshop : Business Execution Strategy</i>	LPEI

Nama Name	Tanggal Pelaksanaan Date	Judul Program Program Title	Penyelenggara Organizer
	21 Juni 2024 June 21, 2024	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Risk Management Certification Exam Level 4	LSPP
	1 Juli 2024 July 1, 2024	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 Risk Management Certification Exam Level 5	LSPP
	10 Juli 2024 July 10, 2024	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 Risk Management Certification Exam Level 6	LSPP
	19 Juli 2024 July 19, 2024	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Risk Management Certification Exam Level 7	LSPP
	14 Agustus 2024 August 14, 2024	Webinar Strategi Anti Fraud LPEI Indonesia Eximbank Anti-Fraud Strategy Webinar	LPEI
	04 April 2024 April 04, 2024	Sosialisasi Budaya Anti Korupsi dan Pencegahan Gratifikasi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Lembaga SMV (<i>Special Mission Vehicle</i>) atau BUMN Sosialisasi Budaya Anti Korupsi dan Pencegahan Gratifikasi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Lembaga SMV (<i>Special Mission Vehicle</i>) atau BUMN	LPEI
	16 Agustus 2024 August 16, 2024	<i>Export Insurance</i>	Antara
	16 - 17 Februari 2024 February 16 - 17, 2024	Harmoni Eksekusi dan Kolaborasi Transformasi (DRB) Harmony of Execution and Transformation Collaboration (DRB)	Peopletech
	25 Maret 2024 March 25, 2024	Komoditas dan Industri : Perkembangan Industri Nikel Commodities and Industries: Development of the Nickel Industry	LPEI
	08 Mei 2024 May 08, 2024	Komoditas dan Sektor Industri : Perkembangan dan Regulasi Perkebunan Kelapa Sawit Commodities and Industrial Sectors: Development and Regulation of Palm Oil Plantations	LPEI
Anton Herdianto	12 Juni 2024 June 12, 2024	Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Briefing of Risk Management Recertification Level 7	Garda
	10 Juni 2024 June 10, 2024	Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 Briefing of Risk Management Recertification Level 6	Garda
	5 - 6 Juli 2024 July 5 - 6, 2024	<i>Senior Leader Workshop : Business Execution Strategy</i>	LPEI
	21 Juni 2024 June 21, 2024	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 Risk Management Certification Exam Level 6	LSPP
	10 Juli 2024 July 10, 2024	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Risk Management Certification Exam Level 7	LSPP

Nama Name	Tanggal Pelaksanaan Date	Judul Program Program Title	Penyelenggara Organizer
Anwar Harsono	1 - 2 Maret 2024 March 1 - 2, 2024	Harmoni Eksekusi dan Kolaborasi Transformasi (DE, DFO DAN DSL) Harmony of Execution and Transformation Collaboration (DE, DFO AND DSL)	Peopletech
	17 Juli 2024 July 17, 2024	Komoditas dan Sektor Industri : Economic Outlook 2024 - The Indonesian Economic Impact Commodities and Industrial Sectors: Economic Outlook 2024 - The Indonesian Economic Impact	Moodys Analytics
	26 Mei 2024 May 26, 2024	Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Risk Management Recertification Briefing Level 7	Arfaidhams
	5 - 6 Juli 2024 July 5 - 6, 2024	<i>Senior Leader Workshop : Business Execution Strategy</i>	LPEI
	07 Juni 2024 June 07, 2024	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Risk Management Recertification Exam Level 7	LSPP
Chesna F. Anwar	1 - 2 Maret 2024 March 1 - 2, 2024	Harmoni Eksekusi dan Kolaborasi Transformasi (DE, DFO DAN DSL) Harmony of Execution and Transformation Collaboration (DE, DFO AND DSL)	Peopletech
	17 Juli 2024 July 17, 2024	Komoditas dan Sektor Industri : Economic Outlook 2024 - The Indonesian Economic Impact Commodities and Industrial Sectors: Economic Outlook 2024 - The Indonesian Economic Impact	Moodys Analytics
	12 Juni 2024 June 12, 2024	Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Risk Management Recertification Briefing Level 7	Garda
	5 - 6 Juli 2024 July 5 - 6, 2024	<i>Senior Leader Workshop : Business Execution Strategy</i>	LPEI
	21 Juni 2024 June 21, 2024	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Risk Management Certification Exam Level 7	LSPP
	14 Agustus 2024 August 14, 2024	Webinar Strategi <i>Anti Fraud</i> LPEI LPEI Anti-Fraud Strategy Webinar	LPEI
	04 April 2024 April 04, 2024	Sosialisasi Budaya Anti Korupsi dan Pencegahan Gratifikasi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Lembaga SMV (<i>Special Mission Vehicle</i>) atau BUMN Socialization of Anti-Corruption Culture and Prevention of Gratification in Procurement of Goods/Services in the SMV (Special Mission Vehicle) or SOE Institution Environment	LPEI

Nama Name	Tanggal Pelaksanaan Date	Judul Program Program Title	Penyelenggara Organizer
Dikdik Yustandi	04 April 2024 April 04, 2024	Sosialisasi Budaya Anti Korupsi dan Pencegahan Gratifikasi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Lembaga SMV (<i>Special Mission Vehicle</i>) atau BUMN Socialization of Anti-Corruption Culture and Prevention of Gratification in Procurement of Goods/Services in the SMV (Special Mission Vehicle) or SOE Institution Environment	LPEI
	16 - 17 Februari 2024 February 16 - 17, 2024	Harmoni Eksekusi dan Kolaborasi Transformasi (DRB) Harmony of Execution and Transformation Collaboration (DRB)	Peopletch
	25 Maret 2024 March 25, 2024	Komoditas dan Industri : Perkembangan Industri Nikel Commodities and Industries: Nickel Industry Development	LPEI
	08 Mei 2024 May 08, 2024	Komoditas dan Sektor Industri : Perkembangan dan Regulasi Perkebunan Kelapa Sawit Commodities and Industrial Sectors: Palm Oil Plantation Development and Regulation	LPEI
	12 Juni 2024 June 12, 2024	Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Risk Management Recertification Briefing Level 7	Garda
	5 - 6 Juli 2024 July 5 - 6, 2024	<i>Senior Leader Workshop : Business Execution Strategy</i>	LPEI
	21 Juni 2024 June 21, 2024	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Risk Management Recertification Exam Level 7	LSPP
Maqin U. Norhadi	16 Agustus 2024 August 16, 2024	<i>Export Insurance</i>	Antara
	23 - 24 Februari 2024 February 23 - 24, 2024	Harmoni Eksekusi dan Kolaborasi Transformasi (IPA, DPP dan DMR) Harmony of Execution and Transformation Collaboration (IPA, DPP and DMR)	Peopletch
	17 Juli 2024 July 17, 2024	Komoditas dan Sektor Industri : Economic Outlook 2024 - The Indonesian Economic Impact Commodity and Industrial Sector: Economic Outlook 2024 - The Indonesian Economic Impact	Moodys Analytics
	12 Juni 2024 June 12, 2024	Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Risk Management Recertification Briefing Level 7	Garda
	10 Juni 2024 June 10, 2024	Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 Risk Management Recertification Briefing Level 6	Garda
	5 - 6 Juli 2024 July 5 - 6, 2024	<i>Senior Leader Workshop : Business Execution Strategy</i>	LPEI
	21 Juni 2024 June 21, 2024	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 Risk Management Certification Exam Level 6	LSPP
	01 Juli 2024 July 01, 2024	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Risk Management Certification Exam Level 7	LSPP
	14 Agustus 2024 August 14, 2024	Webinar Strategi Anti Fraud LPEI LPEI Anti-Fraud Strategy Webinar	LPEI
	04 April 2024 April 04, 2024	Sosialisasi Budaya Anti Korupsi dan Pencegahan Gratifikasi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Lembaga SMV (<i>Special Mission Vehicle</i>) atau BUMN Socialization of Anti-Corruption Culture and Prevention of Gratification in Procurement of Goods/Services in the SMV (Special Mission Vehicle) Institution or SOE Environment	LPEI

Nama Name	Tanggal Pelaksanaan Date	Judul Program Program Title	Penyelenggara Organizer
Sam Malee	04 April 2024 April 04, 2024	Sosialisasi Budaya Anti Korupsi dan Pencegahan Gratifikasi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Lembaga SMV (<i>Special Mission Vehicle</i>) atau BUMN Socialization of Anti-Corruption Culture and Prevention of Gratification in Procurement of Goods/Services in the SMV (Special Mission Vehicle) Institution or SOE Environment	LPEI
	16 Agustus 2024 August 16, 2024	<i>Export Insurance</i>	Antara
	23 - 24 Februari 2024 February 23 - 24, 2024	Harmoni Eksekusi dan Kolaborasi Transformasi (IPA, DPP dan DMR) Harmony of Execution and Transformation Collaboration (IPA, DPP and DMR)	Peopletch
	25 Maret 2024 March 25, 2024	Komoditas dan Industri : Perkembangan Industri Nikel Commodities and Industries: Development of Nickel Industry	LPEI
	08 Mei 2024 May 08, 2024	Komoditas dan Sektor Industri : Perkembangan dan Regulasi Perkebunan Kelapa Sawit Commodities and Industrial Sectors: Development and Regulation of Palm Oil Plantations	LPEI
	12 Juni 2024 June 12, 2024	Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Briefing of Risk Management Recertification Level 7	Garda
	10 Juni 2024 June 10, 2024	Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 Briefing of Risk Management Recertification Level 6	Garda
	5 - 6 Juli 2024 July 5 - 6, 2024	<i>Senior Leader Workshop : Business Execution Strategy</i>	LPEI
T. Wahyu Prihadi Wibowo	21 Juni 2024 June 21, 2024	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 Risk Management Certification Exam Level 6	LSPP
	01 Juli 2024 July 01, 2024	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Risk Management Certification Exam Level 7	LSPP
	1 - 2 Maret 2024 March 1 - 2, 2024	Harmoni Eksekusi dan Kolaborasi Transformasi (DE, DFO DAN DSL) Harmony of Execution and Collaboration of Transformation (DE, DFO AND DSL)	Peopletch
	04 April 2024 April 04, 2024	Sosialisasi Budaya Anti Korupsi dan Pencegahan Gratifikasi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Lembaga SMV (<i>Special Mission Vehicle</i>) atau BUMN Socialization of Anti-Corruption Culture and Prevention of Gratification in Procurement of Goods/Services in SMV (Special Mission Vehicle) Institutions or SOE	LPEI
	17 Juli 2024 July 17, 2024	Komoditas dan Sektor Industri : Economic Outlook 2024 - The Indonesian Economic Impact Commodities and Industrial Sectors: Economic Outlook 2024 - The Indonesian Economic Impact	Moodys Analytics
	6 - 7 Juni 2024 June 6 - 7, 2024	Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 Risk Management Recertification Briefing Level 5	Arfaidhams
	12 Juni 2024 June 12, 2024	Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Risk Management Recertification Briefing Level 7	Garda
	10 Juni 2024 June 10, 2024	Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 Risk Management Recertification Briefing Level 6	Garda
	5 - 6 Juli 2024 July 5 - 6, 2024	<i>Senior Leader Workshop : Business Execution Strategy</i>	LPEI

Nama Name	Tanggal Pelaksanaan Date	Judul Program Program Title	Penyelenggara Organizer
Titiek Setiyowati	21 Juni 2024 June 21, 2024	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Risk Management Certification Exam Level 4	LSPP
	01 Juli 2024 July 01, 2024	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 Risk Management Certification Exam Level 5	LSPP
	10 Juli 2024 July 10, 2024	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 Risk Management Certification Exam Level 6	LSPP
	19 Juli 2024 July 19, 2024	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Risk Management Certification Exam Level 7	LSPP
	14 Agustus 2024 August 14, 2024	Webinar Strategi Anti Fraud LPEI LPEI Anti-Fraud Strategy Webinar	LPEI
	23 - 24 Februari 2024 February 23 - 24, 2024	Harmoni Eksekusi dan Kolaborasi Transformasi (IPA, DPP dan DMR) Harmony of Execution and Transformation Collaboration (IPA, DPP and DMR)	Peopletech
	25 Maret 2024 March 25, 2024	Komoditas dan Industri : Perkembangan Industri Nikel Commodities and Industries: Development of the Nickel Industry	LPEI
	04 April 2024 April 04, 2024	Sosialisasi Budaya Anti Korupsi dan Pencegahan Gratifikasi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Lembaga SMV (<i>Special Mission Vehicle</i>) atau BUMN Socialization of Anti-Corruption Culture and Prevention of Gratification in Procurement of Goods/Services in the SMV (<i>Special Mission Vehicle</i>) Institution or SOE	LPEI
	08 Mei 2024 May 08, 2024	Komoditas dan Sektor Industri : Perkembangan dan Regulasi Perkebunan Kelapa Sawit Commodities and Industrial Sectors: Development and Regulation of Oil Palm Plantations	LPEI
	10 Juni 2024 June 10, 2024	Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 Briefing of Risk Management Recertification Level 6	Garda
	12 Juni 2024 June 12, 2024	Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Briefing of Risk Management Recertification Level 7	Garda
	21 Juni 2024 June 21, 2024	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 Risk Management Certification Exam Level 6	LSPP
	10 Juli 2024 July 10, 2024	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Risk Management Certification Exam Level 7	LSPP
	5 - 6 Juli 2024 July 5 -6, 2024	<i>Senior Leader Workshop : Business Execution Strategy</i>	LPEI
	14 Agustus 2024 August 14, 2024	Strategi <i>Anti-Fraud</i> LPEI - Batch I LPEI Anti-Fraud Strategy - Batch I	LPEI
	16 Agustus 2024 August 16, 2024	<i>Export Insurance</i>	Antara

Nama Name	Tanggal Pelaksanaan Date	Judul Program Program Title	Penyelenggara Organizer
Sidik Mahanda	17 Januari 2024 January 17, 2024	<i>Benchmarking dan sharing session Operational Risk Management (ORM)</i> Benchmarking and sharing session Operational Risk Management (ORM)	Bank Mandiri
	23 - 24 Februari 2024 February 23 - 24, 2024	Harmoni Eksekusi dan Kolaborasi Transformasi (IPA, DPB dan DMR) Harmony of Execution and Collaboration of Transformation (IPA, DPB and DMR)	Peopletch
	27 Februari 2024 February 23 - 24, 2024	Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 Briefing of Risk Management Recertification Level 6	Arfaidhams Secret
	18 Maret 2024 March 18, 2024	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko <i>Batch 3</i> Risk Management Certification Exam Batch 3	LSPP
	25 Maret 2024 March 25, 2024	<i>User Training Aplikasi Operational Risk Management</i> User Training of Operational Risk Management Application	LPEI
	25 Maret 2024 March 25, 2024	Perkembangan Industri Nikel Development of Nickel Industry	LPEI
	04 April 2024 April 04, 2024	Sosialisasi Budaya Anti Korupsi dan Pencegahan Gratifikasi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Lembaga SMV (<i>Special Mission Vehicle</i>) atau BUMN Socialization of Anti-Corruption Culture and Prevention of Gratification in Procurement of Goods/Services in the SMV (Special Mission Vehicle) Institution or SOE	LPEI
	25 - 26 April 2024 April 25 - 26, 2024	<i>Global Mindset for Developing Leaders</i>	Thunderbird
	12 Juli 2024 July 12, 2024	<i>Mini Workshop dalam Rangka Penguatan Fungsi Pilar ke III</i> Mini Workshop in the Framework of Strengthening the Function of Pillar III	Arfaidhams Secret
	17 Juli 2024 July 17, 2024	Sosialisasi Buku Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia Socialization of Taxonomy Book for Sustainable Finance in Indonesia	OJK
	17 Juli 2024 July 17, 2024	<i>Economic Outlook 2024</i>	Moody's
	07 Agustus 2024 August 07, 2024	<i>IT Security Awareness "Reduce Risk & Protect Business"</i>	LPEI
	16 Agustus 2024 August 16, 2024	<i>Export Insurance</i>	LPEI
	22 - 23 Agustus 2024 August 22 - 23, 2024	<i>GRC Summit 2024</i>	CRMS
	16 - 17 Oktober 2024 October 16 - 17, 2024	<i>Excel Dashboard Reporting with Simple Macros</i>	Alam Cipta Anugerah
	20 November 2024 November 20, 2024	<i>Indonesia Risk Management Outlook 2025 "Pursuing Sustainable Growth Amidst Uncertainty and Volatility"</i>	LPEI

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Komite Manajemen Risiko telah menjalankan perannya sesuai dengan mandat yang ditetapkan, mencakup hal-hal berikut:

1. Melakukan penyesuaian, pembaharuan dan penyempurnaan strategi dan metodologi manajemen risiko agar sejalan dengan proses bisnis LPEI. Khususnya terkait risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, dan risiko likuiditas.

Report on Implementation of Committee's Duties in 2024

Throughout 2024, Risk Management Committee has carried out its role in accordance with its mandate, including the following:

1. Adjust, update and refine risk management strategies and methodologies to align with LPEI's business processes. Especially related to credit risk, operational risk, market risk, and liquidity risk.

2. Melakukan evaluasi terkait pengembangan dan penyempurnaan perangkat manajemen risiko.
3. Menyetujui penetapan limit risiko Lembaga yang dipandang material, mencakup kelengkapan limit-limit terkait risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas.
4. Melakukan evaluasi atas Laporan Tingkat Kesehatan LPEI.
5. Melakukan evaluasi atas hasil penilaian *Risk Maturity* LPEI tahun 2024.
6. Menyusun *Risk Appetite Statement* LPEI untuk tahun 2025.

KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK

Komite Pengembangan Produk (KPP) dibentuk untuk mendukung Direktur Eksekutif dalam menyusun peraturan terkait produk, program bisnis, dan kegiatan LPEI. Tugasnya mencakup pengembangan dan penyempurnaan produk, program bisnis, serta penyusunan Standar Pedoman Produk (SPP) dan peraturan lain yang relevan. Selain itu, KPP juga bertanggung jawab dalam membahas mekanisme pemutusan pembiayaan dengan mempertimbangkan sasaran pasar dan/atau karakteristik khusus produk.

Pedoman Komite

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Pengembangan Produk (KPP) periode 2024 berlandaskan pada Peraturan Direktur Eksekutif No. 0025/PDE/12/2024, yang diterbitkan pada 18 Desember 2024, mengenai Standar Pedoman Operasional untuk sembilan komite di bawah Direktur Eksekutif, Edisi 1 Revisi 2.

Struktur dan Komposisi Keanggotaan Komite

Komite Pengembangan Produk memiliki struktur dan komposisi keanggotaan yang diatur dalam Peraturan Direktur Eksekutif No. 0025/PDE/12/2024. Komite ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu Komite A dan Komite B, dengan rincian sebagai berikut:

1. Struktur dan Komposisi Keanggotaan Komite

Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Eksekutif Executive Director
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi pengembangan produk dan/atau Chief of yang membidangi pengembangan produk Managing Director in charge of product development and/or Head of in charge of product development
Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary concurrently Permanent Member	Kepala Divisi yang membidangi Kebijakan, Pedoman dan Produk Head of Division in charge of product development
Anggota Tetap Permanent Members	• Direktur Pelaksana yang membidangi pengembangan bisnis. • Direktur Pelaksana yang membidangi Bisnis dan/atau Chief of yang membidangi wilayah. • Managing Director in charge of business development. • Managing Director in charge of Business and/or Chief of in charge of region.
Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Members	• Direktur Pelaksana dan Chief of selain anggota tetap; • Kepala Divisi/pejabat setingkat Kepala Divisi bidang bisnis; • Kepala Divisi/pejabat setingkat Kepala Divisi lain yang terkait dengan materi pembahasan. • Managing Director and Head of other than permanent members; • Head of Division/Division Head level official for business; • Head of Division/official level of another Division Head related to the subject matter.
Alternate Keanggotaan Komite A Alternate Committee A Membership	

2. To evaluate the development and improvement of risk management tools.
3. To approve the determination of the Institution's risk limits deemed material, including the completeness of limits related to credit risk, market risk and liquidity risk.
4. Evaluate the LPEI Health Level Report.
5. Evaluate the results of the LPEI Risk Maturity assessment in 2024.
6. Prepare the LPEI Risk Appetite Statement for the year 2025.

PRODUCT DEVELOPMENT COMMITTEE

Product Development Committee (KPP) was formed to support the Executive Director in drafting regulations related to products, business programs, and activities of Indonesia Eximbank. Its duties include developing and refining products, business programs, and drafting Product Guidelines Standards (SPP) and other relevant regulations. In addition, KPP is also responsible for discussing financing termination mechanisms by considering market targets and/or specific product characteristics.

Committee Guidelines

In carrying out its duties, Product Development Committee (KPP) in 2023 period is based on Executive Director Regulation No. 0021/PDE/09/2023, issued on September 26, 2023, regarding the Operational Guidelines Standards for nine committees under the Executive Director, Edition 1 Revision 2.

Structure and Composition of Committee Membership

Product Development Committee has a structure and composition of membership as stipulated in the Executive Director Regulation No. 0021/PDE/09/2023. This committee is divided into two parts, namely Committee A and Committee B, with the following details:

1. Structure and Composition of Committee A Membership

Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Sesuai PMK No. 208/PMK.06/2021 – Pasal 11 In accordance with PMK 208/PMK.06/2021 – Article 11
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi hubungan kelembagaan Managing Director in charge of institutional relations
Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary concurrently Permanent Member	Kepala Divisi yang membidangi Manajemen Risiko Head of Division in charge of policies and guidelines

2. Struktur Keanggotaan Kategori Komite B

2. Structure of Committee B Category Membership

Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi pengembangan produk dan/atau Chief of yang membidangi pengembangan produk Managing Director in charge of product development and/or Head of in charge of product development
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	-
Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary concurrently Permanent Member	Kepala Divisi yang membidangi pengembangan produk Head of Division in charge of product development
Anggota Tetap Permanent Members	- Kepala Divisi yang membidangi pengembangan bisnis - Kepala Divisi yang membidangi manajemen risiko - Head of Division in charge of policies and guidelines - Head of Division in charge of risk management
Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Members	Kepala Divisi/pejabat setingkat Kepala Divisi selain anggota tetap yang terkait dengan materi pembahasan Head of Division/Division Head level officer other than permanent members related to the discussion material
Narasumber Sources	- Chief of/Kepala Divisi yang membidangi internal audit - Chief of/Kepala Divisi yang membidangi kepatuhan - Kepala Divisi yang membidangi hukum - Head of/Head of Division in charge of internal audit - Head of/Head of Division in charge of compliance - Head of Division in charge of law
Alternate Keanggotaan Komite B Alternate Committee B Membership	
Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi kelembagaan Managing Director in charge of institutions
Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary concurrently Permanent Member	Kepala Divisi yang membidangi Manajemen Risiko Head of Division in charge of Risk Management

Profil Komite

Profil ketua dan anggota Komite Pengembangan Produk, yang juga merangkap jabatan lain di LPEI, telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan.

Committee Profile

The profiles of chairman and members of Product Development Committee, who also hold other positions at Indonesia Eximbank, have been described in the Company Profile Chapter.

Tugas dan Wewenang

Komite Pengembangan Produk bertugas memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif, termasuk dalam hal:

- Rancangan peraturan terkait produk atau program bisnis, termasuk namun tidak terbatas pada Pembiayaan, Penjaminan, Asuransi, dan Jasa Konsultasi serta aktivitas atau kegiatan LPEI.
- Penyempurnaan produk atau program bisnis dan aktivitas atau kegiatan LPEI.
- Penyusunan Standar Pedoman Produk (SPP) dan ketentuan lain yang terkait dengan produk atau program bisnis secara *end to end*, termasuk jika diperlukan adanya mekanisme pemutusan pembiayaan dengan memperhatikan target *market* dan/atau fitur produk tertentu.

Duties and Authorities

Product Development Committee is tasked with providing recommendations to the Executive Director, including in terms of:

- Draft regulations related to products or business programs, including but not limited to Financing, Guarantee, Insurance, and Consulting Services as well as activities or programs of LPEI.
- Improvement of products or business programs and activities or programs of LPEI.
- Preparation of Product Guidelines (SPP) and other provisions related to products or business programs in an end-to-end manner, including if necessary the existence of a Financing Termination mechanism while considering Target market and/or specific product features.

- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan internal LPEI serta merumuskan solusi atas kendala yang dihadapi dalam bentuk periodik ataupun pembahasan temuan audit terkait peraturan.
- Melakukan evaluasi atas strategi, *marketing*, profitabilitas dan kualitas program *marketing* terhadap produk yang diluncurkan dalam pasar.

Rapat Komite

Kebijakan Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Komite Pengembangan Produk diwajibkan untuk mengadakan rapat secara rutin. Ketentuan mengenai tata cara pengambilan keputusan dalam Komite telah diatur dalam Peraturan Direktur Eksekutif No. 0025/PDE/12/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di Bawah Direktur Eksekutif, Edisi 1 Revisi 2, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

- Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau daring (*online*).
- Syarat kuorum pengambilan keputusan Komite adalah dihadiri minimum, oleh:
 - Setengah dari anggota tetap, yang terdiri dari:
 - Ketua dan/atau Wakil Ketua (untuk Komite A); Ketua (untuk Komite B)
 - Sekretaris; dan
 - Anggota tetap.
 - Satu anggota tidak tetap.
- Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Seluruh keputusan Komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan ditatausahakan secara lengkap dan tertib oleh sekretaris komite.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Sepanjang tahun 2024, Komite Pengembangan Produk telah mengadakan 10 (sepuluh) kali rapat, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

- Monitoring the implementation of internal regulations of LPEI and formulating solutions to obstacles encountered in periodic forms or discussions of audit findings related to regulations.
- Evaluating strategies, marketing, profitability, and the quality of marketing programs for products launched in the market.

Committee Meeting

Policy on Decision Making in Meetings

Product Development Committee is required to hold regular meetings. The provisions regarding the decision-making procedures in the Committee have been stipulated in the Executive Director Regulation No. 0021/PDE/09/2023 dated September 26, 2023, concerning Standards for Operational Guidelines for Nine Committees Under the Executive Director, Edition 1 Revision 2, as explained below:

- Committee decisions can be made through faceto-face or online meetings.
- The requirement for a quorum for Committee decision making is to be attended at a minimum by:
 - Half of the permanent members, consisting of:
 - Chairman and/or Vice Chairman (for Committee A); Chairman (for Committee B)
 - Secretary; and
 - Permanent members.
 - One non-permanent member.
- Meeting decisions must be taken based on deliberation to reach consensus.
- All Committee decisions must be stated in the Minutes of Meeting and administered completely and orderly by the committee secretary.

Meeting Frequency And Attendance Rate

Throughout 2024, the Product Development Committee held 10 (ten) meetings, with the following attendance as follows:

Peserta Rapat Meeting Participants	Posisi di Komite Position on Committee	Frekuensi Rapat Frequency of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Riyani Tirtoso	Ketua Chairman	10	10	100%
Agus Windiarto	Wakil Ketua* Vice Chairman*	1	1	100%
Sam Malee	Wakil Ketua Vice Chairman	9	9	89%
Maqin U. Norhadi	Anggota Tetap Permanent Member	10	10	100%
Dikdik Yustandi	Anggota Tetap Permanent Member	2	2	100%
Anton Herdianto	Anggota Tetap Permanent Member	10	9	90%
Nury Sriandajani	Sekretaris Secretary	9	9	100%

Peserta Rapat Meeting Participants	Posisi di Komite Position on Committee	Frekuensi Rapat Frequency of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Sidik Mahanda	Sekretaris** Secretary**	1	1	100%
Agus Windiarto	Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	3	3	100%
Chesna F. Anwar	Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	3	3	100%
Titiek Setyowati	Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	8	8	100%
I Nyoman Gede Suarja	Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	7	7	100%
Anwar Harsono	Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	4	4	100%
Wahyu P. Wibowo	Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	3	3	100%
Berlianto Wibowo	Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	8	8	100%

Agenda Rapat

Sepanjang tahun 2024, Rapat Komite Pengembangan Produk membahas berbagai agenda berikut:

Meeting Agenda

Throughout 2024, Product Development Committee Meetings will address the following agendas:

No.	Tanggal Date	Agenda	Agenda
1	27 Februari 2024 February 27, 2024	Persetujuan SPP Pembiayaan (Revisi) – Penambahan Fitur Produk <i>General Purpose Financing</i> . Approval of Financing SPP (Revision) – Addition of General Purpose Financing Product Features.	
2	23 April 2024 April 23, 2024	Persetujuan Standar Pedoman Produk Penugasan Khusus LPEI (Revisi). Approval of Indonesia Eximbank Special Assignment Product Guidelines Standard (Revision).	
3	25 Juni 2024 June 25, 2024	Persetujuan Usulan Memorandum Prosedur Proposal UKME. Approval of Proposed Memorandum of UKME Proposal Procedure.	
4	6 Agustus 2024 August 6, 2024	Persetujuan Usulan Revisi SPP Pembiayaan. Approval of Proposed Revision of Financing SPP.	
5	20 Agustus 2024 August 20, 2024	Persetujuan Usulan SPP Pembiayaan (Revisi) terkait Pengembangan Produk <i>Overseas Financing</i> , Penyempurnaan Produk <i>Buyer's Credit</i> dan Penetapan RAC bagi Penanaman Modal Asin (PMA) sebagai calon Nasabah. Approval of Proposed Financing SPP (Revision) related to Development of Overseas Financing Products, Improvement of Buyer's Credit Products and Determination of RAC for Foreign Investment (PMA) as Prospective Customers.	
6	28 Agustus 2024 August 28, 2024	Pembahasan Lanjutan atas Usulan SPP Pembiayaan (Revisi) terkait Pengembangan <i>Overseas Financing</i> , <i>Buyers's Credit</i> , <i>General Purpose Financing</i> dan Penetapan RAC bagi Penanaman Modal Asin (PMA) sebagai calon Nasabah. Further Discussion on Proposed Financing SPP (Revision) related to Development of Overseas Financing, Buyers' Credit, General Purpose Financing and Determination of RAC for Foreign Investment (PMA) as Prospective Customers.	
7	22 Oktober 2024 October 22, 2024	Persetujuan Prinsip Rancangan Standar Pedoman Produk (SPP) <i>Ecosystem Export Platform</i> . Approval in Principle of Draft Product Guidelines Standard (SPP) Ecosystem Export Platform.	
8	22 Oktober 2024 October 22, 2024	Usulan <i>Mapping</i> Produk LPEI dalam Rangka Pengembangan <i>New Core System</i> LPEI. Proposed Indonesia Eximbank Product Mapping in the Framework of Developing Indonesia Eximbank's New Core System.	

No.	Tanggal Date	Agenda	Agenda
9	23 Oktober 2024 October 23, 2024	Penyampaian Kembali Usulan <i>Mapping</i> Produk LPEI dalam Rangka Pengembangan <i>New Core System</i> LPEI. Resubmission of Indonesia Eximbank Product Mapping Proposal in the Framework of Indonesia Eximbank New Core System Development.	
10	22 November 2024 November 22, 2024	Pembahasan Usulan Penghapusan Produk Salam dan Penghentian Rencana Pengembangan <i>Joint Financing</i> dalam Rangka Pengembangan <i>New Core System</i> . Discussion of Salam Product Elimination Proposal and Termination of Joint Financing Development Plan in the Framework of New Core System Development.	

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Tahun 2024

Di tahun 2024, Komite Pengembangan Produk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi yang diemban. Komite Pengembangan Produk telah menyampaikan rekomendasi terkait pengembangan produk dan bisnis LPEI yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan yang diperlukan.

KOMITE KEBIJAKAN DAN PEDOMAN

Komite Kebijakan dan Pedoman (KKP) dibentuk untuk mendukung Direktur Eksekutif terkait dengan penyusunan, perubahan/pemutakhiran, pemberian rekomendasi dan persetujuan rancangan peraturan bisnis dan non bisnis sesuai dengan kewenangannya baik berupa Peraturan Dewan Direktur, Peraturan Direktur Eksekutif dan Peraturan Direktur Pelaksana.

Pedoman Komite

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Kebijakan dan Pedoman periode 2023 mengacu pada Peraturan Direktur Eksekutif No. 0021/PDE/09/2023 tanggal 26 September 2023, yang mengatur Standar Pedoman Operasional untuk sembilan komite di bawah Direktur Eksekutif, Edisi 1 Revisi 2.

Status Keanggotaan dan Status Hak Suara

Mengacu pada Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0021/PDE/09/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di Bawah Direktur Eksekutif Edisi 1 Revisi 2, struktur keanggotaan Komite Kebijakan dan Pedoman ditetapkan sebagai berikut:

1. Struktur Keanggotaan Komite A
 - a. Kebijakan dan Pedoman terkait Bisnis:

Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Eksekutif Executive Director
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi Kebijakan dan Pedoman dan/atau Head of yang membidangi Kebijakan dan Pedoman Managing Director in charge of Policy and Guidelines and/or Head of Policy in charge of Policy and Guidelines
Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary concurrently Permanent Member	Divisi yang membidangi Manajemen Risiko Head of Division in charge of Policy and Guidelines

Report on Implementation of Committee's Duties in 2024

Throughout 2024, Product Development Committee has played an active role in ensuring that each strategy is running according to its objectives. In its implementation, Product Development Committee carries out a mandate that includes:

POLICY AND GUIDELINES COMMITTEE

The Policy and Guidelines Committee (KKP) was established to support the Executive Director in relation to the preparation, amendment/update, recommendation and approval of draft business and non-business regulations in accordance with its authority in the form of Board of Director's Regulations, Executive Director's Regulations and Managing Director's Regulations.

Committee Guidelines

In carrying out its duties, Policy and Guidelines Committee in 2023 period refers to the Executive Director Regulation No. 0021/PDE/09/2023 dated September 26, 2023, which regulates Operational Guidelines Standards for nine committees under the Executive Director, Edition 1 Revision 2.

Membership Status and Voting Rights Status

Referring to the Executive Director Regulation Number 0021/PDE/09/2023 dated September 26, 2023 concerning Operational Guidelines Standards for Nine Committees Under the Executive Director Edition 1 Revision 2, membership structure of Policy and Guidelines Committee is stipulated as follows:

1. Structure of Committee A Membership
 - a. Business-related Policies and Guidelines:

Anggota Tetap Permanent Members	- Direktur Pelaksana yang membidangi pembiayaan - Direktur Pelaksana yang membidangi pengembangan bisnis - Direktur Pelaksana yang membidangi hubungan kelembagaan - Head of yang membidangi penjaminan dan asuransi - Head of yang membidangi keuangan dan perencanaan strategis - Managing Director in charge of Financing - Managing Director in charge of business development - Managing Director in charge of institutional relations - Head of underwriting & insurance - Head of Finance & strategic planning
Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Members	- Direktur Pelaksana dan Head of selain anggota tetap - Kepala Divisi/pejabat setingkat Kepala Divisi selain anggota tetap yang terkait dengan materi pembahasan - Managing Director and Head of other than permanent members - Division Head/Division Head level officer other than permanent members related to the subject matter
Narasumber Sources	- Head of/Kepala Divisi yang membidangi internal audit - Head of/Kepala Divisi yang membidangi kepatuhan - Kepala Divisi yang membidangi hukum - Kepala Divisi yang membidangi manajemen risiko - Head of/Head of Division in charge of internal audit - Head of/Head of Division in charge of compliance - Head of the Division in charge of law - Head of Division in charge of risk management
Alternate Komite A - Kebijakan dan Pedoman terkait Bisnis Alternate Committee A – Business related Policies and Guidelines	
Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Sesuai dengan PMK No. 208/PMK.06/2021 – Pasal 11 In accordance with PMK 208/PMK.06/2021 – Article 11
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi hubungan kelembagaan Managing Director in charge of institutional relations
Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary concurrently Permanent Member	Kepala Divisi yang membidangi pengembangan produk Head of Division in charge of product development

b. Kebijakan dan Pedoman terkait Non-Bisnis:

b. Non-Business Policies and Guidelines:

Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Eksekutif Executive Directors
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi Kebijakan dan Pedoman dan/atau Head of yang membidangi Kebijakan dan Pedoman Managing Director in charge of Policy and Guidelines and/or Head of Policy in charge of Policy and Guidelines
Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary concurrently Permanent Member	Kepala Divisi yang membidangi Kebijakan dan Pedoman Head of Division in charge of Policy and Guidelines
Anggota Tetap Permanent Members	- Direktur Pelaksana yang membidangi keuangan dan operasional - Direktur Pelaksana Bidang dan Head of yang terkait aturan yang diajukan - Head of yang membidangi keuangan dan perencanaan strategis - Managing Director in charge of Finance and operations - Managing Director of Fields and head of related rules submitted - Head of Finance & strategic planning
Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Members	- Direktur Pelaksana dan Head of selain anggota tetap - Kepala Divisi/pejabat setingkat Kepala Divisi selain anggota tetap yang terkait dengan materi pembahasan - Managing Director and Head of non-permanent members - Division Head/Division Head level officer other than permanent members related to the subject matter.
Narasumber Sources	- Head of/Kepala Divisi yang membidangi Internal Audit - Head of/Kepala Divisi yang membidangi Kepatuhan - Kepala Divisi yang membidangi hukum - Kepala Divisi yang membidangi manajemen risiko - Head of/Head of Division in charge of internal audit - Head of/Head of Division in charge of compliance - Head of Legal Division - Head of Division in charge of risk management
Alternate Komite A - Kebijakan dan Pedoman terkait Bisnis Alternate Committee A - Non-Business Policies and Guidelines	
Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Sesuai dengan PMK No. 208/PMK.06/2021 – Pasal 11 In accordance with PMK 208/PMK.06/2021 – Article 11

Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi hubungan kelembagaan Managing Director in charge of institutional relations
Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary concurrently Permanent Member	Divisi yang membidangi Manajemen Risiko Head of Division in charge of product development

2. Struktur Keanggotaan Komite B Kebijakan dan Pedoman

Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi Kebijakan dan Pedoman dan/atau Head of yang membidangi Kebijakan dan Pedoman Managing Director in charge of Policy and Guidelines and/or Head of Policy in charge of Policy and Guidelines
Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary concurrently Permanent Member	Kepala Divisi yang membidangi Kebijakan dan Pedoman Head of Division in charge of Policy and Guidelines
Anggota Tetap Permanent Members	• Kepala Divisi yang membidangi manajemen risiko • Kepala Divisi yang membidangi kepatuhan • Kepala Divisi yang membidangi hukum • Kepala Divisi yang membidangi internal audit • Head of Division in charge of risk management • Head of Division in charge of compliance • Head of Legal Division • Head of Division in charge of internal audit
Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Members	Kepala Divisi/pejabat setingkat Kepala Divisi selain anggota tetap yang terkait dengan materi pembahasan Division Head/Division Head level officer other than permanent members related to the discussion material
Alternate Keanggotaan Komite B Kebijakan dan Pedoman Alternate Membership Committee B Policies and Guidelines	
Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi hubungan kelembagaan Managing Director in charge of institutional relations
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Kepala Divisi yang membidangi pengembangan produk Head of Division in charge of product development

Profil Komite

Profil ketua dan anggota Komite Kebijakan dan Pedoman, yang juga merangkap jabatan lain di LPEI, telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan.

Tugas dan Wewenang

Berikut adalah tugas dan wewenang Komite Kebijakan dan Pedoman:

1. Menyetujui rancangan peraturan internal LPEI dan disampaikan kepada Direktur Eksekutif untuk dilakukan penetapannya oleh Direktur Eksekutif atau Dewan Direktur.
2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan internal LPEI serta merumuskan solusi atas kendala yang dihadapi dalam bentuk *periodic meeting* ataupun pembahasan temuan audit terkait peraturan.

Rapat Komite Kebijakan dan Pedoman

Kebijakan Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Komite Kebijakan dan Pedoman diwajibkan untuk mengadakan rapat secara rutin. Ketentuan mengenai tata cara pengambilan keputusan dalam Komite telah diatur dalam Peraturan Direktur Eksekutif No. 0021/PDE/09/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di Bawah Direktur Eksekutif, Edisi 1 Revisi 2, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau daring (*online*).

2. Structure of Committee B Membership Policies and Guidelines

Committee Profile

The profiles of the chairman and members of the Policy and Guidelines Committee, who also hold other positions at Indonesia Eximbank, have been described in the Company Profile Chapter.

Duties And Authorities

The duties and authorities of the Policy and Guidelines Committee are as follows:

1. Approve the draft Indonesia Eximbank internal regulations and submit them to Executive Director for determination by the Executive Director or Board of Directors.
2. Supervise the implementation of Indonesia Eximbank internal regulations and formulate solutions to obstacles faced in the form of periodic meetings or discussion of audit findings related to regulations.

Committee Meeting

Policy on Decision Making in Meetings

Policy and Guidelines Committee is required to hold meetings on a regular basis. The provisions regarding the decision-making procedures in the Committee have been stipulated in the Executive Director Regulation No. 0021/PDE/09/2023 dated September 26, 2023 concerning Operational Guidelines Standards of Nine Committees Under the Executive Director, Edition 1 Revision 2, as explained below:

1. Committee decisions can be made through face-to-face or online meetings.

2. Syarat kuorum pengambilan keputusan Komite adalah dihadiri minimum, oleh:
 - a. Setengah dari anggota tetap, yang terdiri dari:
 - Ketua dan/atau Wakil Ketua (untuk Komite A); Ketua (untuk Komite B)
 - Sekretaris; dan
 - Anggota tetap.
 - b. Satu anggota tidak tetap.
3. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Seluruh keputusan Komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan ditatausahakan secara lengkap dan tertib oleh sekretaris komite.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Sepanjang tahun 2024, Komite Kebijakan dan Pedoman (KKP) telah mengadakan aturan 5 (lima) terkait bisnis dan 15 (lima belas) aturan terkait non bisnis kali rapat, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

a. Rapat Komite Kebijakan dan Prosedur Bisnis:

Peserta Rapat Meeting Participants	Posisi di Komite Position on Committee	Frekuensi Rapat Frequency of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Riyani Tirtoso	Ketua Chairman	5	5	100%
Sam Malee	Wakil Ketua Vice Chairman	5	5	100%
Maqin U. Norhadi	Anggota Tetap Permanent Member	5	5	100%
Dikdik Yustandi	Anggota Tetap Permanent Member	1	1	100%
Chesna F. Anwar	Anggota Tetap Permanent Member	1	1	100%
Nury Sriandajani	Sekretaris Secretary	4	4	100%
Sidik Mahanda*	Sekretaris Secretary	1	1	100%
Agus Windiarso	Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	1	1	100%
Anton Herdianto**	Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap Permanent Member and Non-Permanent Member	5	5	100%
Anwar Harsono***	Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap Permanent Member and Non-Permanent Member	5	5	100%
Titiek Setyowati	Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	5	5	100%
Wahyu P. Wibowo****	Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap Permanent Member and Non-Permanent Member	5	5	100%
Damianus Ledjo Hufat	Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	2	2	100%
Fifin Yolanda Tan	Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	1	1	100%

2. The requirement for a quorum for Committee decision making is to be attended at a minimum by:
 - a. Half of the permanent members, consisting of:
 - Chairman and/or Vice Chairman (for Committee A); Chairman (for Committee B)
 - Secretary; and
 - Permanent members.
 - b. One non-permanent member.
3. Meeting decisions must be taken based on deliberation to reach consensus.
4. All Committee decisions must be stated in the Minutes of Meeting and administered completely and orderly by the committee secretary.

Meeting Frequency and Attendance Rate

Throughout 2024, the Policy and Guidelines Committee (KKP) held 5 (five) business-related rules and 15 (fifteen) non-business-related rules meetings, with the following attendance rates:

a. Business Policy and Procedures Committee Meeting:

Peserta Rapat Meeting Participants	Posisi di Komite Position on Committee	Frekuensi Rapat Frequency of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Ilham Mustafa	Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	2	2	100%
Christiati E. Sianipar	Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	1	1	100%
Farid Maruf	Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	1	1	100%
Sumanggam Simanjuntak	Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	1	1	100%
I Nyoman Gede Suarja	Narasumber Source person	3	3	100%

*) Sdr. Sidik Mahanda selaku *Alternate* Sekretaris Komite A – Kebijakan dan Pedoman terkait Bisnis

**) Sdr. Anton Herdianto Anggota Tetap khusus KKP terkait PDE SPO Asuransi, PDE SPO NBFI Line, PDE SPO Pembiayaan dan PDE SPO Tata Kelola Penyedia Jasa Rekanan

***) Sdr. Anwar Harsono Anggota Tetap khusus KKP terkait PDE SPO Penjaminan

****) Sdr. Wahyu Wibowo Anggota Tetap khusus KKP terkait PDE SPO Asuransi, PDE SPO NBFI Line, PDE SPO Pembiayaan dan PDE SPO Tata Kelola Penyedia Jasa Rekanan

*) Sidik Mahanda as Alternate Secretary of Committee A – Policies and Guidelines related to Business

**) Anton Herdianto Permanent Member specifically for KKP related to PDE SPO Insurance, PDE SPO NBFI Line, PDE SPO Financing and PDE SPO Governance of Partner Service Providers

***) Anwar Harsono Permanent Member specifically for KKP related to PDE SPO Guarantee

****) Wahyu Wibowo Permanent Member specifically for KKP related to PDE SPO Insurance, PDE SPO NBFI Line, PDE SPO Financing and PDE SPO Governance of Partner Service Providers

b. Rapat Komite Kebijakan dan Prosedur Aturan Non Bisnis:

b. Non-Business Rules Policy and Procedure Committee Meeting:

Peserta Rapat Meeting Participants	Posisi di Komite Position on Committee	Frekuensi Rapat Frequency of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Riyani Tirtoso	Ketua Chairman	15	15	100%
Agus Windiarto*	Wakil Ketua Vice Chairman	4	4	100%
Sam Malee	Wakil Ketua Vice Chairman	13	13	100%
Maqin U. Norhadi	Anggota Tetap Permanent Member	14	14	100%
Dikdik Yustandi	Anggota Tetap Permanent Member	4	4	100%
Anton Herdianto	Anggota Tetap Permanent Member	8	8	100%
Nury Sriandajani	Sekretaris Secretary	15	15	100%
Jugie Sugiharto**	Sekretaris** Secretary	1	1	100%
Agus Windiarto	Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	4	4	100%
Chesna F. Anwar***	Anggota Tidak Tetap dan Anggota Tetap Permanent Member and Non-Permanent Member	4	4	100%
Titiek Setyowati	Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	15	15	100%
Anwar Harsono****	Anggota Tidak Tetap dan Anggota Tetap Permanent Member and Non-Permanent Member	14	14	100%
Wahyu P. Wibowo*****	Anggota Tidak Tetap dan Anggota Tetap Permanent Member and Non-Permanent Member	10	10	100%
Sidik Mahanda	Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	1	1	100%

Peserta Rapat Meeting Participants	Posisi di Komite Position on Committee	Frekuensi Rapat Frequency of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Dyza A Rochadi	Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	7	7	100%
Andre Sucahya	Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	1	1	100%
Khalid Yugo Dusanto	Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	1	1	100%
Lianawaty Mihadja	Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	1	1	100%
Pretty Halim	Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	2	2	100%
Yoseph T Purmomosidi	Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	1	1	100%
I Nyoman Gede Suarja	Narasumber Source person	14	14	100%

*) Sdr. Agus Windiarto menjabat sebagai Plt. Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit;
 **) Sdr. Jugie Sugiharto selaku Alt. Kepala Divisi Kebijakan, Prosedur & Produk;
 ***) Sdr. Chesna F Anwar Anggota Tetap khusus KKP terkait PDE SPO Tata Tertib DE & DP, PDE SPO Sekretaris Lembaga dan PDE-SPO Tata Naskah Dinas-Revisi 1;
 ****) Sdr Anwar Harsono Anggota Tetap khusus KKP terkait PDE SPO Akuntansi revisi 2, PDE SPO Pengukuran atas Penurunan Nilai Instrumen Keuangan dan Kontrak Asuransi LPEI, MPO Perubahan atas Beberapa PDE terkait penggunaan Form Purchase Request dan alur proses Pengadaan Barang/Jasa LPEI;
 *****) Sdr Wahyu Wibowo Anggota Tetap khusus KKP terkait PDD tentang Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Non Program Kemitraan LPEI, PDD tentang Perubahan Peraturan Dewan Direktur Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur LPEI, PDE SPO Layanan Pengaduan Nasabah, PDE Terkait Komite Pengadaan Barang Jasa (PDE SPO 9 Komite), MPO Perubahan atas Beberapa PDE terkait penggunaan Form Purchase Request dan alur proses Pengadaan Barang/Jasa LPEI, PDE-SPO Tata Tertib Kerja DE dan DP-revisi 1 (mekanisme Keputusan Rabom), PDE SPO Strategi Anti Fraud dan PDE SPO APUPPT PPSM
 *) Agus Windiarto serves as Acting. Managing Director of Risk & Credit Management;
 **) Jugie Sugiharto as Alternate Head of Policy, Procedure & Product Division;
 ***) Chesna F Anwar Permanent Member specifically for KKP related to PDE SPO DE & DP Rules of Procedure, PDE SPO Secretary of Institution and PDE-SPO Official Manuscripts-Revision 1;
 *****) Anwar Harsono Permanent Member specifically for KKP related to PDE SPO Accounting revision 2, PDE SPO Measurement of Impairment of Financial Instruments and Insurance Contracts Indonesia Eximbank, MPO Changes to Several PDEs related to the use of Purchase Request Form and Indonesia Eximbank Goods/Services Procurement process flow;
 *****) Wahyu Wibowo, Permanent Member of KKP related to PDD on Social and Environmental Responsibility Policy for Non-Partnership Programs of Indonesia Eximbank, PDD on Changes to the Regulations of Board of Directors of Indonesia Eximbank Board of Directors Work Guidelines, PDE SPO Customer Complaints Service, PDE Related to the Committee for Procurement of Goods and Services (PDE SPO 9 Committees), MPO Changes to Several PDEs related to the use of Purchase Request Forms and Indonesia Eximbank Goods/Services Procurement process flow, PDE-SPO DE and DP Work Procedures-revision 1 (Rabom Decision Mechanism), PDE SPO Anti-Fraud Strategy and PDE SPO APUPPT PPSM

Agenda Rapat

Sepanjang tahun 2024, Rapat Komite Kebijakan dan Pedoman membahas berbagai agenda berikut:

Meeting Agenda

Throughout 2024, Policy and Guidelines Committee Meetings discussed the following agendas:

a. Kebijakan dan Pedoman terkait Bisnis:

a. Business Policies and Guidelines:

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda
1	30 April 2024 April 30, 2024	- Pengajuan revisi PDE SPO Penjaminan dan SPO NBFI Line - Pelaporan proses bisnis asuransi sebagai tindak lanjut catatan Rapat <i>Board of Management</i> tanggal 5 Maret 2024 - Submission of revision of PDE SPO Guarantee and SPO NBFI Line - Reporting of insurance business processes as a follow-up to the notes of Board of Management Meeting on March 5, 2024
2	03 September 2024 September 03, 2024	Pemaparan atas Bisnis Asuransi tahun 2024 dan Pembahasan Revisi PDE SPO Asuransi dalam rangka <i>review</i> terhadap SPO Asuransi Exposure on Insurance Business in 2024 and Discussion of Revised PDE SPO Insurance in the context of reviewing Insurance SPO
3	10 September 2024 September 10, 2024	Pengajuan revisi PDE SPO Pembiayaan terkait dengan DTML OJK, DMTL BPKP, dan Penyempurnaan Proses Bisnis Pembiayaan Submission of revised PDE SPO Financing related to OJK DTML, BPKP DMTL, and Improvement of Financing Business Process
4	17 September 2024 September 17, 2024	Pembahasan Revisi PDE SPO NBFI Line dalam rangka <i>review</i> terhadap opsi atas instrumen penyimpanan margin deposit Wetting Revised PDE SPO NBFI Line in the context of reviewing options for margin deposit storage instruments
5	10 Desember 2024 December 10, 2024	Pembahasan Revisi PDE SPO Tata Kelola Penyedia Jasa Rekanan dalam rangka <i>review</i> implementasi ketentuan rekanan pada pelaksanaan perpanjangan Rekanan periode 2024-2025 Discussion of Revised PDE SPO Governance of Partner Service Providers in the context of reviewing the implementation of partner provisions in the implementation of extension of Partners for 2024-2025 period



b. Kebijakan dan Pedoman terkait Non Bisnis:

b. Non-Business Policies and Guidelines:

No.	Tanggal Date	Agenda	Agenda
1	20 Agustus 2024 August 20, 2024	Pengajuan atas Usulan PDD tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan non Program Kemitraan LPEI. Submission of PDD Proposal on Social and Environmental Responsibility non Partnership Program of Indonesia Eximbank.	
2	22 Oktober 2024 October 22, 2024	Usulan Peraturan Dewan Direktur (PDD) tentang Tata Kerja DD dan KDE Satuan Kerja Staf DD. Proposed Regulation of Board of Directors (PDD) on Work Procedures of DD and KDE of DD Staff Work Unit.	
3	30 Januari 2024 January 30, 2024	Pengajuan Persetujuan atas Usulan PDE tentang Standar Pedoman Operasional Tata Tertib Kerja DE dan DP. Submission of Approval of PDE Proposal on Standard Operational Guidelines for DE and DP Work Rules.	
4	02 April 2024 April 02, 2024	Pengajuan atas Usulan Perubahan PDE Tentang Manual Operasional TSI LPEI. Submission of PDE Proposal on Changes to PDE on Indonesia Eximbank TSI Operational Manual.	
5	19 Maret 2024 March 19, 2024	Pengajuan atas Usulan PDE Tentang Standar Pedoman Operasional Sekretaris Lembaga LPEI. Submission of PDE Proposal on Standard Operational Guidelines for Indonesia Eximbank Institutional Secretary.	
6	23 April 2024 April 23, 2024	Pengajuan atas Usulan Perubahan PDE tentang Standar Pedoman Operasional Tata Naskah Dinas LPEI terkait pengaturan PTO Mengenai SKAI. Submission of PDE Proposal on Changes to PDE on Standard Operational Guidelines for Indonesia Eximbank Official Documents related to PTO Regulation Regarding SKAI.	
7	20 Agustus 2024 August 20, 2024	Pengajuan atas Usulan PDE tentang SPO Penggunaan Akad Wakalah Bi Al-Istitsmar dalam Skema Pendanaan Unit Kerja yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dari Unit Kerja yang Membidangi/Melaksanakan Transaksi <i>Treasury</i> . Submission of PDE Proposal on SOP on Use of Wakalah Bi Al-Istitsmar Contract in Funding Scheme of Work Units Conducting Business Activities Based on Sharia Principles from Work Units in Charge of/Implementing Treasury Transactions.	
8	05 November 2024 November 05, 2024	Usulan Perubahan PDE tentang SPO Layanan Pengaduan Nasabah LPEI. Proposed Changes to PDE on SOP for Indonesia Eximbank Customer Complaints Service.	
9	3 September 2024 September 3, 2024	Pengajuan atas usulan perubahan PDE tentang SPO tentang Pelaksanaan Standar Akuntansi. Submission of PDE Proposal on SOP on Implementation of Accounting Standards.	
10	22 Oktober 2024 October 22, 2024	Usulan Standar Pedoman Operasional (SPO) tentang Pengukuran atas Penurunan Nilai Instrumen Keuangan dan Kontrak Asuransi LPEI. Proposed Standard Operating Guidelines (SOP) on Measurement of Impairment of Financial Instruments and Insurance Contracts of Indonesia Eximbank.	
11	29 Oktober 2024 October 29, 2024	Usulan Perubahan PDE terkait Komite Pengadaan Barang Jasa LPEI dan Usulan Susunan Panitia Pengadaan. Proposed Changes to PDE Related to Indonesia Eximbank Goods and Services Procurement Committee and Proposed Composition of Procurement Committee.	
12	29 Oktober 2024 October 29, 2024	Pengajuan atas usulan MPO Perubahan proses Pengadaan Barang/Jasa atas PDE: • PDE 0023/PDE/06/2018 – Manual Operasional Pengendalian Biaya dan Keuangan; • PDE 0005.02/PDE/06/2023 – SPO Pengadaan Barang dan Jasa; • PDE 0004/PDE/04/2023 – PDE Limit Kewenangan Persetujuan Penggunaan Anggaran; dan • PDE 0023/PDE/10/2023 – SPO Pencatatan dan Penggunaan Jasa Konsultan Hukum LPEI. Submission of MPO proposals for Changes to the Procurement of Goods/Services process for PDE: • PDE 0023/PDE/06/2018 – Cost and Financial Control Operational Manual; • PDE 0005.02/PDE/06/2023 – SOP for Procurement of Goods and Services; • PDE 0004/PDE/04/2023 – PDE Limit of Authority for Approval of Budget Use; and • PDE 0023/PDE/10/2023 – SOP for Recording and Use of Indonesia Eximbank Legal Consultant Services.	
13	17 Desember 2024 December 17, 2024	Usulan perubahan PDE Tata Tertib Kerja DE dan DP. Proposed changes to the PDE of DE and DP Work Procedures.	
14	17 Desember 2024 December 17, 2024	Usulan Perubahan PDE tentang SPO Penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i> LPEI. Proposed Changes to the PDE on the SOP for Implementing Indonesia Eximbank Anti-Fraud Strategy.	
15	17 Desember 2024 December 17, 2024	Usulan Perubahan PDE tentang SPO Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT & PPPSPM). Proposed Changes to PDE on the SOP for Implementing Anti-Money Laundering, Prevention of Terrorism Funding and Prevention of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction (APU PPT & PPPSPM) Program.	

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Tahun 2024

Pelaksanaan program kerja Komite Kebijakan dan Pedoman pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Di tahun 2024, Komite Kebijakan dan Pedoman melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi yang diemban. Komite Kebijakan dan Pedoman telah menyampaikan rekomendasi terkait pengembangan Kebijakan dan Pedoman LPEI yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan serta pedoman yang diperlukan.

KOMITE ASSETS AND LIABILITIES MANAGEMENT

Komite Assets and Liabilities Management merupakan komite yang memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif dalam hal penetapan kebijakan pengelolaan risiko, penetapan kebijakan, batasan-batasan dan pedoman strategi pengelolaan *asset* dan *liabilities* dengan mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.

Pedoman Komite

Komite Assets and Liabilities Management LPEI dibentuk berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif No. 0026/PDE/05/2019 tanggal 23 Mei 2019 tentang Komite Assets and Liabilities Management Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya pada tahun 2023, komite ini berpedoman pada Peraturan Direktur Eksekutif No. 0019/PDE/09/2024 tanggal 27 September 2024 mengenai Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di Bawah Direktur Eksekutif, Edisi 1 Revisi 2.

Struktur dan Komposisi Keanggotaan Komite

Mengacu pada Peraturan Direktur Eksekutif No. 0019/PDE/09/2024 mengenai Standar Pedoman Operasional untuk sembilan komite di bawah Direktur Eksekutif, berikut adalah struktur dan komposisi keanggotaan Komite Assets and Liabilities Management:

Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Eksekutif Executive Director
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi keuangan Managing Director in charge of Finance
Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary concurrently Permanent Member	Kepala Divisi yang membidangi pengelolaan Aset dan Kewajiban/Asset and Liabilities Management (ALMA) Head of Division in charge of Asset & Liabilities Management (ALMA)

Report on Implementation of Committees' Duties in 2024

The implementation of Policy and Guidelines Committee's work program in 2024 is as follows:

In 2024, the Policy and Guidelines Committee carried out tasks in accordance with the responsibilities and functions assumed. The Policy and Guidelines Committee has submitted recommendations related to the development of LPEI Policies and Guidelines that can be used as the basis for making decisions and preparing policies and guidelines that are needed.

ASSETS AND LIABILITY MANAGEMENT COMMITTEE

The Assets and Liabilities Management Committee is a committee that provides recommendations to the Executive Director in terms of establishing risk management policies, establishing policies, limits and guidelines for strategic management of assets and liabilities by considering external and internal conditions.

Committee Guidelines

The Indonesia Eximbank Assets and Liabilities Management Committee was formed based on Executive Director Regulation No. 0026/PDE/05/2019 dated May 23, 2019 concerning the Assets and Liabilities Management Committee of Indonesia Eximbank.

In carrying out its duties in 2024, this committee is guided by Executive Director Regulation No. 0021/PDE/09/2023 dated September 26, 2023, regarding Operational Guidelines Standards for Nine Committees Under the Executive Director, Edition 1 Revision 2.

Structure and Composition of Committee Membership

Referring to the Executive Director Regulation No. 0021/PDE/09/2023 concerning Operational Guidelines Standards for nine committees under the Executive Director, following is the structure and composition of the Assets and Liabilities Management Committee membership:

Anggota Tetap Permanent Members	• Direktur Pelaksana yang membidangi pembiayaan. • Direktur Pelaksana yang membidangi pengembangan bisnis. • Direktur Pelaksana yang membidangi hubungan kelembagaan. • Direktur Pelaksana yang membidangi manajemen risiko dan/atau Head of yang membidangi manajemen risiko. • Head of yang membidangi keuangan dan perencanaan strategis. • Managing Director in charge of Financing • Managing Director in charge of business development • Managing Director in charge of institutional relations • Managing Director in charge of risk management and/or Head of in charge of risk management • Head of Finance and strategic planning.
Narasumber Source	• Head of yang membidangi penjaminan dan asuransi. • Head of/Kepala Divisi yang membidangi internal audit. • Head of/Kepala Divisi yang membidangi kepatuhan. • Head of/Kepala Divisi yang membidangi Operation & IT. • Kepala Divisi yang membidangi Financial Institution & Treasury. • Kepala Divisi/Pejabat setingkat Kepala Divisi dari unit kerja yang terundang. • Head of underwriting and insurance • Head of/Head of Division in charge of internal audit. • Head of/Head of Division in charge of compliance. • Head of/Head of Division in charge of operation & IT • Head of Division in charge of Financial Institution & Treasury • Head of Division/Division Head level Officer of the invited work unit.
Alternate Keanggotaan Komite Assets and Liabilities Management Alternate Membership of Assets & Liabilities Management Committee	
Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Sesuai PMK No. 208/PMK.06/2021 – Pasal 11 In accordance with PMK No. 208/PMK.06/2021 – Article 11
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi Manajemen Risiko Managing Director in charge of Risk Management
Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary concurrently Permanent Member	Kepala Divisi yang membidangi Financial Institution and Treasury Head of Division in charge of Financial Institution & Treasury

Profil Komite

Profil ketua dan anggota Komite Kebijakan dan Pedoman, yang juga merangkap jabatan lain di LPEI, telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan.

Tugas dan Wewenang

Tugas Komite Assets dan Liabilities Management (ALMA) adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan pengelolaan risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan, mengkaji ulang serta memodifikasi strategi ALMA;
 - b. Mengkaji ulang penetapan suku bunga (*pricing*) aktiva dan pasiva untuk memastikan bahwa *pricing* tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana, dan memelihara struktur neraca sesuai dengan strategi ALMA;
 - c. Menyampaikan informasi mengenai setiap perkembangan ketentuan dan peraturan terkait yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA;
 - d. Memutuskan strategi pendanaan dan penempatan dana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; dan
 - e. Menetapkan pemberian suku bunga (*pricing*) kepada debitur yang besarnya di bawah *Base Lending Rate* (BLR).
2. Menetapkan kebijakan, batasan-batasan dan pedoman strategi pengelolaan *assets* dan *liabilities* dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal meliputi:

Committee Profile

The profiles of the chairman and members of the Policy and Guidelines Committee, who also hold other positions at Indonesia Eximbank, are described in the Company Profile section.

Duties and Authorities

The duties of the Assets and Liabilities Management Committee (ALMA) are as follows:

1. Determine risk management policy of Indonesia Eximbank, as follows:
 - a. Develop, review and modify ALMA strategies;
 - b. Review the determination of interest rates (*pricing*) for assets and liabilities to ensure that the *pricing* can optimize the results of investment of funds, minimize the cost of funds, and maintain the balance sheet structure in accordance with the ALMA strategy;
 - c. Convey information regarding any developments in related provisions and regulations that influence ALMA's strategy and policies;
 - d. Decide on the funding strategy and placement of funds from the Indonesia Eximbank; and
 - e. Determine the provision of interest rates (*pricing*) to debtors whose amount is below the Base Lending Rate (BLR).
2. Determine policies, boundaries and strategic guidelines for managing assets and liabilities by considering internal and external conditions including:

- a. Manajemen Likuiditas Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan manajemen likuiditas dan limit sesuai dengan kebijakan dan strategi ALMA meliputi:
 - Pengelolaan sumber dana yang likuid dengan tujuan untuk dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo (*cash flow*) dan kebutuhan dana tidak terduga lainnya;
 - Meminimalkan *idle funds* serta menjaga posisi likuiditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Manajemen *Gap* Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan kesenjangan posisi (*mismatch*) antara *assets* dan *liabilities* pada neraca khususnya pos-pos pada neraca yang sensitif terhadap tingkat bunga dengan tujuan mengoptimalkan pendapatan bunga bersih (*net interest income*) sesuai dengan antisipasi arah perubahan tingkat bunga dengan tingkat risiko yang ditetapkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- c. Manajemen *Pricing* Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan portofolio antara lain melalui kebijakan *pricing assets* dan *liabilities* dengan tujuan mengoptimalkan interest margin (*spread*) dengan mempertimbangkan biaya modal, *overhead cost* dan risiko.
- d. Manajemen *Forex* Menetapkan kebijakan dan pengelolaan kesenjangan posisi (*forex gap*) antara *assets* dan *liabilities* dengan tujuan untuk menjaga tingkat risiko *forex* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- a. Liquidity Management Determine and evaluate liquidity and limit management policies in accordance with ALMA policies and strategies including:
 - Management of liquid funding sources with the aim of being able to meet maturing obligations (cash flow) and other unexpected funding needs;
 - Minimize idle funds and maintain liquidity position in accordance with applicable regulations.
- b. Gap Management Determine and evaluate policies and strategies for managing the mismatch between assets and liabilities on the balance sheet, especially those items on the balance sheet that are sensitive to interest rates with the aim of optimizing net interest income in accordance with the anticipated direction of changes in interest rates and risk levels determined by the Indonesia Eximbank.
- c. Pricing Management Determine and evaluate portfolio management policies, including through asset and liabilities pricing policies with the aim of optimizing interest margin (spread) by considering capital costs, overhead costs and risks.
- d. Forex Management Determine policies and manage the forex gap between assets and liabilities with the aim of maintaining the level of forex risk in accordance with applicable regulations.

Rapat Komite

Kebijakan Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Komite Assets and Liabilities Management menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap saat apabila dipandang perlu. Prosedur pelaksanaan rapat Komite Assets and Liabilities Management untuk pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau daring (*online*).
2. Syarat kuorum pengambilan keputusan Komite adalah minimum setengah dari anggota tetap terdiri dari:
 - a. Ketua dan/atau Wakil Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota tetap.
3. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Seluruh keputusan Komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan ditatausahakan secara lengkap dan tertib oleh sekretaris komite.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Sepanjang tahun 2024, Komite Assets and Liabilities Management telah mengadakan 16 (enam belas) kali rapat, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Committee Meeting

Decision Making Policy in Meetings

Assets and Liabilities Management Committee holds at least 12 (twelve) meetings in 1 (one) year or at any time if deemed necessary. The procedures for holding Assets and Liabilities Management Committee meetings for decision making are as follows:

1. Committee decisions can be made through face-to-face or online meetings.
2. The requirement for a quorum for Committee decision making is a minimum of half of the permanent members consisting of:
 - a. Chairman and/or Vice Chairman;
 - b. Secretary; and
 - c. Permanent member.
3. Meeting decisions must be taken based on deliberation to reach consensus.
4. All Committee decisions must be stated in the Minutes of Meeting and administered completely and orderly by the committee secretary.

Meeting Frequency and Attendance Rate

Throughout 2024, Assets and Liabilities Management Committee held 16 (sixteen) meetings, with attendance levels as follows:

Peserta Rapat Meeting Participants	Posisi di Komite Position on Committee	Frekuensi Rapat Meeting Frequen	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Direktur Eksekutif	Ketua merangkap Anggota Tetap Ketua merangkap Anggota Tetap	16	16	100%
Direktur Pelaksana Bidang Keuangan & Operasional Direktur Pelaksana Bidang Keuangan & Operasional	Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap	16	14	88%
Kepala Divisi Funding Institution & Treasury (Alternate) Kepala Divisi Funding Institution & Treasury (Alternate)	Sekretaris merangkap Anggota Tetap	16	16	100%
Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Resiko & Kredit Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Resiko & Kredit	Anggota Tetap	16	15	94%
Direktur Pelaksana Bidang Pembiayaan Direktur Pelaksana Bidang Pembiayaan	Anggota Tetap	16	16	100%
Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis	Anggota Tetap	16	10	63%
Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan	Anggota Tetap	16	9	56%
Chief of Keuangan & Perencanaan Strategis Chief of Keuangan & Perencanaan Strategis	Anggota Tetap	16	8	50%

Keterangan:

Pada ALCO 23 Januari 2024 – 4 Maret 2024, Direktur Bidang Keuangan & Operasional merangkap Plt. Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Resiko & Kredit.
 Pada ALCO 21 Agustus 2024 – 30 Agustus 2024, Direktur Bidang Pengembangan Bisnis merangkap Plt. Direktur Pelaksana Bidang Pembiayaan.
 Pada ALCO 27 September 2024 – 12 Desember 2024, Posisi Head of Keuangan & Perencanaan Strategis vacant karena menggantikan sebagai Plt. Direktur Pelaksana Bidang Keuangan & Operasional.

Description:

In ALCO January 23, 2024 - March 4, 2024, Director of Finance & Operations concurrently Acting. Managing Director of Risk Management & Credit
 At ALCO August 21, 2024 - August 30, 2024, the Director of Business Development concurrently serves as Acting Managing Director of Financing. Managing Director of Financing.
 At ALCO September 27, 2024 - December 12, 2024, the Head of Finance & Strategic Planning position is vacant because it replaces the Acting. Managing Director of Finance & Operations.

Agenda Rapat

Sepanjang tahun 2024, Rapat Komite Assets and Liabilities Management membahas berbagai agenda berikut:

1. Strategi Optimalisasi Likuiditas
2. Strategi Suku Bunga Pembiayaan
3. Strategi Pendanaan

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Tahun 2024

Di tahun 2024, Komite Assets and Liabilities Management melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi yang telah ditetapkan.

Meeting Agenda

Throughout 2024, the Assets and Liabilities Management Committee Meeting discussed the following agendas:

1. Liquidity Optimization Strategy
2. Financing Interest Rate Strategy
3. Funding Strategy

Report on the Implementation of Committee Duties in 2024

In 2024, the Assets and Liabilities Management Committee carried out its duties in accordance with its assigned responsibilities and functions.

KOMITE TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI

Dalam melakukan penerapan teknologi sistem informasi, LPEI memiliki Komite TSI yang dalam pelaksanaan Komite TSI diatur dalam Peraturan Direktur Eksekutif terkait Komite TSI, semua isu kritical terkait dengan penerapan TSI wajib dipresentasikan dan dilaporkan ke Komite TSI baik yang bersifat informasi maupun yang membutuhkan persetujuan Komite, dan dalam melaksanakan tugas secara efektif dan efisien Komite TSI melakukan pertemuan secara berkala untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan strategi TSI dan didokumentasikan dalam bentuk risalah rapat.

Pedoman

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Teknologi Sistem Informasi periode 2024 berlandaskan pada Peraturan Direktur Eksekutif No. 0021/PDE/09/2023 yang diterbitkan pada 26 September 2023 mengenai Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di bawah Direktur Eksekutif, Edisi 1 Revisi 2.

Struktur dan Komposisi Keanggotaan Komite

Komposisi keanggotaan Komite Teknologi Sistem Informasi disusun berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif No. 0021/PDE/09/2023 yang diterbitkan pada 26 September 2023 mengenai Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di bawah Direktur Eksekutif, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Eksekutif Executive Director
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Head of yang membidangi teknologi sistem informasi Head of information system technology
Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary concurrently Permanent Member	Kepala Divisi yang membidangi teknologi sistem informasi Head of Division in charge of information system technology
Anggota Tetap Permanent Members	- Direktur Pelaksana yang membidangi manajemen risiko dan/atau Head of yang membidangi manajemen risiko - Direktur Pelaksana yang membidangi teknologi sistem informasi - Head of yang membidangi keuangan dan perencanaan strategis - The Managing Director in charge of risk management and/or the Head of in charge of risk management - Managing Director in charge of information system technology - Head of finance and strategic planning
Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Members	Direktur Pelaksana dan/atau Head of yang terkait dengan materi Managing Director and/or Head of related material
Narasumber Source	- Head of/kepala divisi yang membidangi internal audit - Head of/kepala divisi yang membidangi kepatuhan - Ketua Komite Audit - Ketua Komite Pemantau Risiko - Kepala Divisi/Pejabat setingkat Kepala Divisi dari Unit Kerja terkait - Head of division in charge of internal audit - Head of/head of division in charge of compliance - Head of Audit Committee - Head of Risk Monitoring Committee - Head of Division/Head of Division level officials from related Work Units
Alternate Keanggotaan Komite Teknologi Sistem Informasi Alternate Membership of Information Systems Technology Committee	
Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Sesuai PMK No. 208/PMK.06/2021 – Pasal 11 In accordance with PMK No. 208/PMK.06/2021 – Article 11

INFORMATION SYSTEM TECHNOLOGY COMMITTEE

In implementing information system technology, LPEI has a TSI Committee which in the implementation of the TSI Committee is regulated in the Executive Director Regulation related to the TSI Committee, all critical issues related to the application of TSI must be presented and reported to the TSI Committee both those that are informational and those that require the approval of the Committee, and in carrying out its duties effectively and efficiently the TSI Committee meets regularly to discuss matters related to the TSI strategy and is documented in the form of meeting minutes...

Guidelines

In carrying out its duties, the Information Systems Technology Committee for the 2024 period is based on Executive Director Regulation No. 0021/PDE/09/2023 issued on September 26, 2023 regarding Standard Operational Guidelines for Nine Committees under the Executive Director, Edition 1 Revision 2.

Committee Membership Structure and Composition

The membership composition of the Information Systems Technology Committee is prepared based on Executive Director Regulation No. 0021/PDE/09/2023 issued on September 26, 2023 regarding Standard Operational Guidelines for Nine Committees under the Executive Director, with the following composition:

Wakil ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi keuangan dan operasional Managing Director in charge of finance and operations
Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary concurrently Permanent Member	Kepala Divisi yang membidangi operasional Head of Division in charge of operations

Profil Komite

Komite TSI dibentuk dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif terkait dengan rencana pengembangan TSI, kesesuaian proyek TSI baik dalam rencana, pelaksanaannya, serta melakukan pemantauan yang efektif atas investasi pada sektor TSI guna sejalan dengan bisnis Lembaga.

Tugas dan Wewenang

Komite Teknologi Sistem Informasi (TSI) bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif, yang setidaknya mencakup:

1. Rencana pengembangan TSI yang sejalan dengan kegiatan usaha LPEI.
2. Perumusan peraturan terkait TSI.
3. Kesesuaian proyek TSI yang disetujui dengan rencana pengembangan TSI.
4. Kesesuaian atas pelaksanaan proyek TSI dengan rencana proyek TSI yang disetujui.
5. Kesesuaian TSI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha LPEI.
6. Efektivitas mitigasi risiko atas investasi LPEI pada sektor TSI terhadap pencapaian tujuan bisnis LPEI.
7. Pemantauan atas kinerja TSI dan upaya peningkatan TSI.
8. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TSI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara TSI secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
9. Kecukupan dan alokasi sumber daya TSI yang dimiliki LPEI.

Rapat Komite

Kebijakan Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Komite Teknologi Sistem Informasi menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun, yang terdiri dari:

1. Rapat pertama dengan agenda pembahasan Rencana Strategis Teknologi Sistem Informasi untuk satu tahun mendatang termasuk alokasi anggarannya sesuai RKAT;
2. Rapat kedua dengan agenda monitoring terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Teknologi Sistem Informasi yang disetujui pada rapat pertama beserta realisasi penggunaan anggaran;
3. Rapat ketiga dengan agenda laporan hasil realisasi pelaksanaan Rencana Strategis Teknologi Sistem Informasi selama tahun berjalan dan realisasi penggunaan anggaran.

Committee Profile

The TSI Committee was established and provides recommendations to the Executive Director in relation to the TSI development plan, the appropriateness of TSI projects both in plan, execution, as well as conducting effective monitoring of investments in the TSI sector to align with the business of the Institution.

Duties and Authority

The Information Systems Technology (TSI) Committee is tasked and responsible for providing recommendations to the Executive Director, which at least include:

1. TSI development plan in line with LPEI's business activities.
2. Formulation of TSI related regulations.
3. Conformity of approved TSI projects with the TSI development plan.
4. Conformity of TSI project implementation with the approved TSI project plan.
5. Conformity of TSI with the needs of management information system and the needs of LPEI's business activities.
6. Effectiveness of risk mitigation on LPEI's investment in the TSI sector towards the achievement of LPEI's business objectives.
7. Monitoring of TSI performance and efforts to improve TSI.
8. Efforts to resolve various TSI-related issues that cannot be resolved by the user work unit and the TSI organizer effectively, efficiently, and in a timely manner.
9. Adequacy and allocation of TSI resources owned by LPEI.

Committee Meetings

Decision Making Policy in Meetings

The Information Systems Technology Committee organizes meetings at least 3 (three) times a year, consisting of:

1. The first meeting with the agenda of discussing the Information Systems Technology Strategic Plan for the coming year including its budget allocation according to the RKAT;
2. The second meeting with the agenda of monitoring the implementation of the Information Systems Technology Strategic Plan approved at the first meeting along with the realization of budget use;
3. The third meeting with the agenda of reporting the results of the realization of the implementation of the Information Systems Technology Strategic Plan during the current year and the realization of the use of the budget.

Selain rapat sebagaimana tersebut di atas, rapat dapat juga dilakukan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite, atau atas permintaan manajemen atau atas usulan unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Tata cara pelaksanaan rapat Komite Teknologi Sistem Informasi dalam rangka pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau daring (*online*).
2. Syarat kuorum pengambilan keputusan Komite adalah dihadiri minimum:
 - a. setengah dari anggota tetap terdiri dari:
 - Ketua dan/atau Wakil Ketua;
 - Sekretaris;
 - Anggota tetap; dan
 - b. satu anggota tidak tetap.
3. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Seluruh keputusan Komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan ditatausahakan secara lengkap dan tertib oleh sekretaris komite.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Sepanjang tahun 2024, Komite Teknologi Sistem Informasi telah mengadakan 5 (lima) kali rapat, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

In addition to the meetings as mentioned above, meetings can also be held at any time if deemed necessary at the request of one or more committee members, or at the request of management or at the proposal of the relevant work unit by submitting the material to be discussed and coordinating with the Secretary of the Committee.

The procedures for the implementation of the Information Systems Technology Committee meetings in the context of decision making are as follows:

1. Committee decision-making can be conducted through face-to-face or online meetings.
2. The quorum requirement for Committee decision making is attended by at least:
 - a. half of the permanent members consisting of:
 - Chairman and/or Vice Chairman;
 - Secretary;
 - Regular member; and
 - b. one non-permanent member.
3. Meeting decisions must be made based on deliberation for consensus.
4. All decisions of the Committee shall be set forth in the Minutes of Meeting and maintained in a complete and orderly manner by the secretary of the committee.

Frequency of Meetings and Level of Attendance

Throughout 2024, the Information System Technology Committee held 5 (five) meetings, with the level of attendance as follows:

Peserta Rapat Meeting Participants	Posisi di Komite Position on Committee	Frekuensi Rapat Frequency of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Direktur Eksekutif Executive Director	Ketua Merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	5	5	100%
Kepala Divisi Teknologi Informasi Head of Information Technology Division	Sekretaris Merangkap Anggota Tetap Secretary Concurrently Permanent Member	5	5	100%
Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional & Teknologi Informasi Managing Director of Risk & Credit Management	Anggota Tetap Permanent Member	5	5	100%
Head of Keuangan & Perencanaan Strategis Head of Finance & Strategic Planning	Anggota Tetap Permanent Member	5	4	80%
Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit Managing Director of Risk & Credit Management	Anggota Tetap Permanent Member	5	2	40%
Direktur Pelaksana Bisnis Managing Director of Business	Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	5	4	80%



Peserta Rapat Meeting Participants	Posisi di Komite Position on Committee	Frekuensi Rapat Frequency of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis Managing Director of Business Development	Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	5	5	100%
Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan & Sumber Daya Manusia Managing Director of Institutional Secretariat, Compliance & Human Capital	Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	5	5	100%
Head of SDM, Hukum & Kepatuhan Head of HC, Legal & Compliance	Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	5	4	80%
Head of Risiko Bisnis Head of Business Risk	Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	5	5	100%
Head of Internal Audit	Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	5	4	80%
Kepala Divisi PDU Head of PDU Division	Narasumber Resource Person	5	5	100%
Kepala Departemen Pengadaan Head of Procurement Department	Narasumber Resource Person	5	5	100%
Kepala Departemen Perencanaan & Pengendalian TI Head of IT Planning & Control Department	Narasumber Resource Person	5	5	100%
Kepala Departemen Pengembangan Office Automation TI Head of IT Office Automation Development Department	Narasumber Resource Person	5	2	40%
Kepala Departemen Pengembangan Core System Head of Core System Development Department	Narasumber Resource Person	5	2	40%
Kepala Departemen Support & Maintenance IT Head of IT Support & Maintenance Department	Narasumber Resource Person	5	3	60%
Officer Pengendalian & Perencanaan TI Officer of IT Control & Planning	Narasumber Resource Person	5	1	20%

Agenda Rapat

Sepanjang tahun 2024, Rapat Komite Teknologi Sistem Informasi membahas berbagai agenda berikut:

Meeting Agenda

Throughout 2024, Information System Technology Committee Meetings discussed the following agenda items:

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda
1.	18 Januari 2024 January 18, 2024	Rekapitulasi Komite Teknologi Informasi, Rencana Project IT 2024, dan Pengadaan Solusi Modernisasi Core System Recapitulation of Information Technology Committee, 2024 IT Project Plan, and Procurement of Core System Modernization Solutions
2.	26 Januari 2024 January 26, 2024	Implementasi Indonesia Export Ecosystem Platform (EXIM-HUB) Implementation of Indonesia Export Ecosystem Platform (EXIM-HUB)
3.	26 Januari 2024 January 26, 2024	Pembahasan Support Aplikasi <i>Treasury Dealing System</i> (TDS) Discussion of Treasury Dealing System (TDS) Application Support
4.	9 Juli 2024 July 9, 2024	Pembahasan Spesifikasi dan <i>Design</i> Infrastruktur Pendukung Solusi Modernisasi <i>Core System</i> Discussion of Specifications and Design of Supporting Infrastructure for Core System Modernization Solutions
5.	17 September 2024 September 17, 2024	Pembahasan Implementasi Layanan <i>Software Defined Wide Area Network</i> (SDWAN) BI-RTGS di DRC LPEI dan Laporan Penyelenggaraan IT Tahun 2024 dan Rencana Kerja IT 2025. Discussion of BI-RTGS Software Defined Wide Area Network (SDWAN) Service Implementation in DRC LPEI and 2024 IT Implementation Report and 2025 IT Work Plan.

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Tahun 2024

Program kerja Komite Teknologi Sistem Informasi tahun 2024 dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Melakukan pembahasan terkait rencana project TI tahun 2024 pada tanggal 18 Januari 2024 dimana bahasan mencakup pemaparan tentang roadmap pengembangan TI dengan memperhatikan anggaran CAPEX dan OPEX tahun 2024.
2. Melakukan pembahasan terkait dengan rencana implementasi EXIM-HUB, dimana terdapat hal-hal yang diperhatikan mencakup Dasar Hukum, Latar Belakang, serta infrastruktur guna mendapatkan strategis atas rencana pembangunan serta anggarannya.
3. Melakukan pembahasan tentang opsi-opsi atas renewal aplikasi *Core System* untuk Tresuri, dimana terdapat *concern* atas *support* aplikasi dan juga historikal *support* atas vendor pelaksana.
4. Melakukan pembahasan terkait analisa infrastruktur pendukung modernisasi *core system* guna mendapatkan spesifikasi infrastruktur sesuai dengan solusi *core system* yang dipilih.
5. Melakukan pembahasan mengenai rencana implementasi jaringan komunikasi SDWAN sesuai dengan peraturan Regulator untuk aplikasi BI-RTGS di DRC, serta melakukan pembahasan mengenai penyelenggaraan TI tahun 2024 dan rencana kerja TI tahun 2025 agar sesuai dengan roadmap pengembangan TI.

KOMITE PENGADAAN

Dalam melakukan proses pengadaan, LPEI memiliki Komite Pengadaan yang dalam pelaksanaan Komite Pengadaan diatur dalam Peraturan Direktur Eksekutif terkait Komite Pengadaan. Pengambilan Keputusan Komite Pengadaan dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau daring (*online*). Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal Komite Pengadaan

Report on Implementation of Committees' Duties in 2024

The Information Systems Technology Committee's work program for 2024 was carried out with the following details:

1. Conducting discussions related to the IT project plan for 2024 on January 18, 2024 where the discussion includes an explanation of the IT development roadmap with regard to the CAPEX and OPEX budget for 2024.
2. Conducting discussions related to the plan for the implementation of EXIM-HUB, where there are things that are considered including Legal Basis, Background, and infrastructure in order to obtain a strategic development plan and budget.
3. Discussed the options for renewal of Core System application for Treasury, where there are concerns over application support and also historical support for the implementing vendor.
4. Discussing the infrastructure analysis supporting core system modernization in order to obtain infrastructure specifications in accordance with the selected core system solution.
5. Discussed the implementation plan of SDWAN communication network in accordance with Regulator's regulation for BI-RTGS application in DRC, and conducted discussion on IT organizing in 2024 and IT work plan in 2025 to be in accordance with IT development roadmap.

PROCUREMENT COMMITTEE

In conducting the procurement process, LPEI has a Procurement Committee which in the implementation of the Procurement Committee is regulated in the Executive Director Regulation related to the Procurement Committee. Decision Making of the Procurement Committee can be done through face-to-face meetings or online (*online*). Meeting decisions must be made based on deliberation

belum dapat mencapai Keputusan maka dapat diajukan ke Rapat Board of Management (RABOM) untuk dimintakan Keputusan. Bertindak sebagai Sekretaris Komite adalah Kepala Unit Kerja yang membidangi Pengadaan. Seluruh Keputusan Komite Pengadaan ditatausahakan secara lengkap dan tertib oleh sekretaris Komite.

Pedoman

Komite Teknologi Pengadaan dibentuk berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif No. PDE.0015/PDE/08/2022 tanggal 9 Agustus 2022, yang mengatur Standar Pedoman Operasional bagi sembilan komite di bawah Direktur Eksekutif. Komite ini memiliki tugas utama memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif dalam menetapkan strategi teknologi dan sistem informasi untuk mendukung perkembangan usaha dan bisnis LPEI.

Dalam menjalankan tugasnya pada tahun 2023 dan 2024, Komite Kebijakan dan Pedoman mengacu pada Peraturan Direktur Eksekutif No. 0021/PDE/09/2023 tanggal 26 September 2023 dan No. 0025/PDE/12/2024 Tanggal 18 Desember 2024, yang menetapkan Standar Pedoman Operasional bagi sembilan komite di bawah Direktur Eksekutif, Edisi 1, Revisi 2 dan Revisi 4.

Struktur dan Komposisi Keanggotaan Komite

Berikut adalah struktur dan komposisi keanggotaan Komite Pengadaan sesuai dengan Peraturan Direktur Eksekutif No. 0021/PDE/09/2023 dan No. 0025/PDE/12/2024:

- A. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0021/PDE/09/2023:
1. Struktur Keanggotaan Komite I Pengadaan (limit > Rp1.000.000.000)*
*) Akumulasi limit pengadaan termasuk pekerjaan eksisting > Rp1.000.000.000

for consensus, in the event that the Procurement Committee has not been able to reach a decision, it can be submitted to the Meeting of the Board of Management (RABOM) to request a decision. Acting as Secretary of the Committee is the Head of the Work Unit in charge of Procurement. All decisions of the Procurement Committee are organized in a complete and orderly by the secretary of the Committee.

Committee Guidelines

Procurement Technology Committee was formed based on Executive Director Regulation No. PDE.0015/PDE/08/2022 dated August 9, 2022, which regulates Operational Guidelines for nine committees under the Executive Director. This committee has the main task of providing recommendations to the Executive Director in determining technology and information system strategies to support the development of Indonesia Eximbank's business and operations.

In carrying out its duties in 2023, Procurement Technology Committee refers to Executive Director Regulation No. 0021/PDE/09/2023 dated September 26, 2023, which establishes Operational Guidelines for nine committees under the Executive Director, Edition 1, Revision 2.

Structure and Membership Committee

The structure and membership composition of the Procurement Committee, based on Executive Director Regulation No. 0021/PDE/09/2023 and No. 0025/PDE/12/2024, are as follows:

- A. Executive Director Regulation No. 0021/PDE/09/2023:
1. Membership Structure of Committee I Procurement (limit >Rp1,000,000,000)*
*) Accumulated procurement limit including existing work > Rp1,000,000,000

Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Eksekutif Executive Director
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi pengadaan Managing Director in charge of procurement
Sekretaris Komite (Non Anggota) Secretary concurrently Permanent Member	Kepala Divisi yang membidangi Pengadaan Head of Division in charge of procurement
Anggota Tetap Permanent Members	• Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Risiko dan/atau Head of Manajemen Risiko dan Kredit • Head of yang membidangi keuangan dan perencanaan strategis • Head of yang membidangi Operation and IT • Direktur Pelaksana dan/atau Head of Pengusul (diutamakan Direktur Pelaksana dari unit pengusul untuk hadir jika unit pengusul memiliki Head of dan Direktur Pelaksana • Managing Director of Risk Management and/or Head of Risk and Credit Management • Head of Finance & Strategic Planning • Head of operation & IT • Managing Director and/or Head of Proposer (preferably the Managing Director of the proposing unit to attend if the proposing unit has a head of and Managing Director)

Narasumber Sources	• Head of/kepala divisi yang membidangi internal audit • Head of/kepala divisi yang membidangi Internal kepatuhan • Kepala Divisi yang membidangi hukum • Kepala Divisi yang mengusulkan mengenai pengadaan • Head of/head of division in charge of internal audit • Head of/Head of Division in charge of Internal Compliance • Head of Legal Division • Head of Division who proposes procurement
Alternate Keanggotaan Komite I Pengadaan (limit > Rp1.000.000.000) Alternate Committee I Procurement Membership (limit > Rp1,000,000,000)	
Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Sesuai PMK No. 208/PMK.06/2021 – Pasal 11 In accordance with PMK No. 208/PMK.06/2021 - Article 11
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi hubungan kelembagaan Managing Director of institutional relations
Sekretaris Komite Committee Secretary	Kepala Divisi yang membidangi <i>strategic planning</i> Head of Division in charge of strategic planning
Anggota Tetap Permanent Members	• Direktur Pelaksana yang membidangi keuangan dan operasional. • Dua Kepala Divisi yang berada di bawah Head of finance and strategic planning. • Dua Kepala Divisi yang berada di bawah Head of Operation and IT. • Managing Director of Finance and operations. • Two Division Heads under the Head of Finance and strategic planning. • Two Division Heads under the Head of Operation and IT.
Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Members	Tidak ada alternate karena sebagai <i>owner</i> pengusul There is no alternate because as owner proposer

2. Struktur Keanggotaan Komite II Pengadaan (limit > Rp500.000.000 – ≤ Rp1.000.000.000) * *) Akumulasi limit pengadaan termasuk pekerjaan eksisting > Rp500.000.000 – ≤ Rp1.000.000.000	2. Membership Structure of Committee II Procurement (limit > Rp500,000,000 – ≤ Rp1,000,000,000)* *) Accumulated procurement limit including existing > Rp500,000,000 – ≤ Rp1,000,000,000

Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	1. Direktur Pelaksana yang membidangi pengadaan (dalam hal pengadaan barang/jasa di luar direktoratnya); atau 2. Direktur Pelaksana yang membidangi manajemen risiko dan/atau Head of yang membidangi manajemen risiko (dalam hal pengadaan barang/jasa di bawah direktorat Direktur Pelaksana yang membidangi pengadaan).
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	1. Managing Director of procurement (in the case of procurement of goods/services outside his/her directorate); or 2. Managing Director of risk management and/or the Head of risk management (in the case of procurement of goods/services under the directorate of Managing Director of Procurement).
Sekretaris Komite (Non Anggota) Secretary concurrently Permanent Member	1. Direktur Pelaksana yang membidangi manajemen risiko dan/atau Head of yang membidangi manajemen risiko (dalam hal Direktur yang membidangi pengadaan adalah ketua); atau 2. Direktur Pelaksana yang membidangi pengadaan (dalam hal direktur yang membidangi manajemen risiko adalah ketua).
	1. Managing Director of risk management and/or Head of risk management (in the event that the Director in charge of procurement is the chairman); or 2. Managing Director of procurement (in the case where the director in charge of risk management is the chairman).
	Kepala Divisi yang membidangi Pengadaan Head of Division in charge of Procurement

Anggota Tetap Permanent Member	- Head of yang membidangi keuangan dan perencanaan strategis - Head of yang membidangi Operation and IT - Direktur Pelaksana dan/atau Head of Pengusul (diutamakan Direktur Pelaksana dari unit pengusul untuk hadir jika unit pengusul memiliki head of dan Direktur Pelaksana) - Head of Finance and strategic planning - Head of operations and IT - Managing Director and/or Head of Proposer (preferably the Managing Director of proposing unit to attend if the proposing unit has a head of and Managing Director)
Narasumber Sources	- Head of/Kepala Divisi yang membidangi internal audit. - Head of/Kepala Divisi yang membidangi Internal kepatuhan. - Head of Division in charge of internal audit. - Head of/Head of Division in charge of Internal compliance.
Alternate Keanggotaan Komite II Pengadaan (> Rp500.000.000 – ≤ Rp1.000.000.000) Alternate Membership of Committee II Procurement (> Rp500,000,000 - ≤ Rp1,000,000,000)	
Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	- Direktur Pelaksana yang membidangi manajemen risiko dan/atau Head of yang membidangi manajemen risiko; atau - Direktur Pelaksana yang membidangi hubungan kelembagaan. - Managing Director in charge of risk management and/or Head of risk management; or - Managing Director in charge of institutional relations.
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	-
Sekretaris Komite (Non Anggota) Committee Secretary (Non-Member)	Divisi yang membidangi strategic planning Division in charge of strategic planning
Anggota Tetap Permanent Member	- Dua Kepala divisi yang berada di bawah Head of keuangan dan perencanaan strategis. - Dua Kepala divisi yang berada di bawah Head of Operation and IT. - Two Heads of divisions under the Head of Finance and strategic planning. - Two Heads of divisions under the Head of Operation and IT.
Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	Tidak ada alternate karena sebagai owner pengusul There is no alternate because as owner proposer

3. Struktur Keanggotaan Komite III Pengadaan (limit >Rp20.000.000 – ≤ Rp500.000.000)*
*) Akumulasi limit pengadaan termasuk pekerjaan eksiting > Rp20.000.000 – ≤ Rp500.000.000

3. Membership Structure of Committee III Procurement (limit >Rp20,000,000 – ≤ Rp500,000,000)*
*) Accumulated procurement limit including existing work > Rp20,000,000 – ≤ Rp500,000,000

Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Head of yang membidangi keuangan dan perencanaan strategis Head of Finance and strategic planning
Sekretaris Komite (Non Anggota) Committee Secretary (Non-Member)	Kepala Divisi yang membidangi pengadaan. Head of Division in charge of procurement.
Anggota Tetap Permanent Member	- Head of yang membidangi Operation and IT. - Direktur Pelaksana dan/atau Head of Pengusul (diutamakan Direktur Pelaksana dari unit pengusul untuk hadir jika unit pengusul memiliki Head of dan Direktur Pelaksana). - Head of Operations and IT. - Managing Director and/or Head of Proposer (preferably the Managing Director of proposing unit to attend if the proposing unit has a Head of and Managing Director).
Alternate Keanggotaan Komite III Pengadaan (>Rp20.000.000 – ≤ Rp500.000.000) Alternate Membership of Committee III Procurement (>Rp20,000,000 - ≤ Rp500,000,000)	
Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Dua Kepala Divisi berada di bawah Head of yang sama (di luar kepala divisi pengusul). Two Division Heads under the same Head of Division (other than the proposing division head).
Sekretaris Komite (Non Anggota) Committee Secretary (Non-Member)	Divisi yang membidangi <i>strategic planning</i> Division in charge of strategic planning
Anggota Tetap Permanent Member	- Dua Kepala Divisi berada di bawah Head of yang sama (di luar kepala divisi pengusul). - Tidak ada alternate karena sebagai owner pengusul. - Two Division Heads under the same Head of Division (other than the proposing division head). - There is no alternate because it is the owner of the proposal.

4. Pengadaan ≤ Rp20.000.000 Untuk Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp20.000.000 tidak termasuk ke dalam kewenangan Komite Pengadaan dan merupakan kewenangan Kepala Divisi/Kepala Kantor Wilayah/pejabat setingkat Kepala Divisi dari unit pengusul.	4. Procurement ≤ Rp20.000.000 Procurements with a value of up to Rp20,000,000 are not within the authority of the Procurement Committee and fall under the jurisdiction of the Division Head/Regional Office Head/official equivalent to the Division Head level of proposing unit.
B. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0025/PDE/12/2024 1. Struktur Keanggotaan Komite I Pengadaan (limit > Rp1.000.000.000)* *) Akumulasi limit pengadaan termasuk pekerjaan eksisting > Rp1.000.000.000	B. Executive Director Regulation No. 0025/PDE/12/2024 1. Membership Structure of Committee I Procurement (limit > Rp1,000,000,000)* *) Accumulated procurement limit including existing work > Rp1,000,000,000

Anggota Member	Fungsi Pengadaan: Procurement Function: - Direktur Pelaksana (DP) dan/atau <i>Chief of</i> pengusul pengadaan (diutamakan DP dari unit pengusul untuk hadir jika unit pengusul memiliki <i>Chief of</i> dan DP); - DP yang membidangi pengadaan Barang/Jasa; <i>Chief of</i> yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa; <i>Chief of</i> yang membidangi TSI/Keuangan. - Managing Director (MD) and/or Chief of the procurement proposer (preferably DP from the proposing unit to attend if the proposing unit has a Chief of and MD); - MD in charge of procurement of Goods/Services; - Chief of in charge of Procurement of Goods/Services; - Chief of in charge of TSI/Finance. Fungsi Risiko: Risk Function: - Direktur Eksekutif (DE); - DP yang membidangi manajemen risiko; - DP yang membidangi keuangan dan perencanaan strategis; <i>Chief of</i> yang membidangi manajemen risiko. - Executive Director (DE); - MD in charge of risk management; - MD in charge of finance and strategic planning; - Chief of in charge of risk management.
Sekretaris Komite (Non Anggota) Committee Secretary (Non-Member)	Kepala Divisi yang membidangi Pengadaan dengan alternate Kepala Divisi yang membidangi perencanaan strategi & transformasi. Division Head in charge of Procurement with alternate Division Head in charge of strategic planning & transformation.
Narasumber Resource Person	<i>Chief of</i>/kepala divisi yang membidangi internal audit (kecuali jika <i>Chief of</i> membidangi internal audit/kepala divisi/unit kerja dibawahnya menjadi pengusul pengadaan); - Kepala Divisi yang membidangi hukum dan Kepatuhan; - Kepala Divisi yang mengusulkan mengenai pengadaan; - Kepala Divisi/pejabat setara dari Unit Kerja terkait lainnya. - Chief of/division head in charge of internal audit (except if the Chief of in charge of internal audit/division head/work unit below him/her becomes the procurement proposer); - Division Head in charge of legal and compliance; - Head of Division who proposes procurement; - Head of Division/equivalent official from other related Work Units.
Ketentuan Kuorum Komite I Pengadaan (limit > Rp1.000.000.000) Quorum Provisions for Committee I Procurement (limit > Rp1,000,000,000) 2 (dua) orang anggota yang mewakili Fungsi Pengadaan; dan 2 (dua) orang anggota yang mewakili Fungsi Risiko, dimana salah satu anggotanya merupakan Direktur Eksekutif, jika Direktur Eksekutif berhalangan maka seluruh anggota dari Fungsi Pengadaan dan Fungsi Risiko harus hadir; 2 (two) members representing the Procurement Function; and 2 (two) members representing the Risk Function, where one of the members is Executive Director, if the Executive Director is absent then all members of Procurement Function and Risk Function must be present;	

2. Struktur Keanggotaan Komite II Pengadaan (limit > Rp500.000.000 – ≤ Rp1.000.000.000)* *) Akumulasi limit pengadaan termasuk pekerjaan eksisting > Rp500.000.000 – ≤ Rp1.000.000.000	2. Membership Structure of Committee II Procurement (limit > Rp500,000,000 – ≤ Rp1,000,000,000)* *) Accumulated procurement limit including existing work > Rp500,000,000 – ≤ Rp1,000,000,000

Anggota Member	Fungsi Pengadaan: Procurement Function: • DP dan/atau <i>Chief of</i> pengusul pengadaan (diutamakan DP dari unit pengusul untuk hadir jika unit pengusul memiliki <i>Chief of</i> dan DP); • DP yang membidangi pengadaan Barang/Jasa; • <i>Chief of</i> yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa; • <i>Chief of</i> yang membidangi TSI/Keuangan. • MD and/or <i>Chief of</i> the procurement proposer (preferably MD from the proposing unit to attend if the proposing unit has a <i>Chief of</i> and MD); • MD in charge of procurement of Goods/Services; • <i>Chief of</i> in charge of Procurement of Goods/Services • <i>Chief of</i> in charge of TSI/Finance. Fungsi Risiko: Risk Function: • DP yang membidangi manajemen risiko; • DP yang membidangi keuangan dan perencanaan strategis; • <i>Chief of</i> yang membidangi manajemen risiko. • MD in charge of risk management; • MD in charge of finance and strategic planning; • <i>Chief of</i> in charge of risk management.
Sekretaris Komite (Non Anggota) Committee Secretary (Non-Member)	Kepala Divisi yang membidangi Pengadaan dengan alternate Kepala Divisi yang membidangi perencanaan strategi & transformasi. Division Head in charge of Procurement with alternate Division Head in charge of strategic planning & transformation
Narasumber Resource Person	• <i>Chief of</i>/kepala divisi yang membidangi internal audit (kecuali jika <i>Chief of</i> membidangi internal audit/kepala divisi/unit kerja dibawahnya menjadi pengusul pengadaan); • Kepala Divisi yang membidangi hukum dan Kepatuhan; • Kepala Divisi yang mengusulkan mengenai pengadaan; • Kepala Divisi/pejabat setara dari Unit Kerja terkait lainnya. • <i>Chief of</i>/division head in charge of internal audit (except if the <i>Chief of</i> in charge of internal audit/division head/work unit below him/her becomes the procurement proposer); • Division Head in charge of law and Compliance; • Division Head proposing procurement; • Head of Division/equivalent official from other related Work Units.
Ketentuan Kuorum Komite II Pengadaan (limit > Rp500.000.000 – ≤ Rp1.000.000.000) Quorum Provisions of Committee II Procurement (limit > Rp500,000,000 – ≤ Rp1,000,000,000)	
• 1 (satu) orang anggota yang mewakili Fungsi Pengadaan; dan • 2 (dua) orang anggota yang mewakili Fungsi Risiko. • 1 (one) member representing the Procurement Function; and • 2 (two) members representing the Risk Function.	

3. Struktur Keanggotaan Komite III Pengadaan (limit >Rp20.000.000 – ≤ Rp500.000.000)*
*) Akumulasi limit pengadaan termasuk pekerjaan eksisting > Rp20.000.000 – ≤ Rp500.000.000

3. Membership Structure of Committee III Procurement (limit >Rp20,000,000 – ≤ Rp500,000,000)*
*) Accumulated procurement limit including existing work >Rp20,000,000 – ≤ Rp500,000,000

Anggota Member	Fungsi Pengadaan: Procurement Function: • DP dan/atau <i>Chief of</i> pengusul pengadaan (diutamakan DP dari unit pengusul untuk hadir jika unit pengusul memiliki <i>Chief of</i> dan DP); • <i>Chief of</i> yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa/<i>Chief of</i> yang membidangi TSI/<i>Chief of</i> yang membidangi Keuangan. • MD and/or <i>Chief of</i> the procurement proposer (preferably MD from the proposing unit to attend if the proposing unit has a <i>Chief of</i> and MD); • <i>Chief of</i> in charge of Procurement of Goods/Services/<i>Chief of</i> in charge of TSI/<i>Chief of</i> in charge of Finance. Fungsi Risiko: Risk Function: • DP yang membidangi manajemen risiko; • DP yang membidangi keuangan dan perencanaan strategis; • <i>Chief of</i> yang membidangi manajemen risiko; • DP in charge of risk management; • DP in charge of finance and strategic planning; • <i>Chief of</i> in charge of risk management;

Sekretaris Komite (Non Anggota) Committee Secretary (Non-Member)	Kepala Divisi yang membidangi Pengadaan dengan alternate Kepala Divisi yang membidangi perencanaan strategi & transformasi. Division Head in charge of Procurement with alternate Division Head in charge of strategic planning & transformation.
Ketentuan Kuorum Komite III Pengadaan (limit >Rp20.000.000 – ≤ Rp500.000.000) Quorum Provisions for Committee III Procurement (limit >Rp20,000,000 – ≤ Rp500,000,000)	
• 1 (satu) orang anggota yang mewakili Fungsi Pengadaan; dan • 1 (satu) orang anggota yang mewakili Fungsi Risiko • (one) member representing the Procurement Function; and • (one) member representing the Risk Function	
4. Pengadaan ≤ Rp20.000.000 Untuk Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp20.000.000 tidak termasuk ke dalam kewenangan Komite Pengadaan dan merupakan kewenangan Kepala Divisi/Kepala Kantor Wilayah/pejabat setingkat Kepala Divisi dari unit mengusul.	4. Procurement ≤ Rp20,000,000 For Procurement with a value of up to Rp20,000,000 is not included in the authority of Procurement Committee and is the authority of Division Head/Regional Office Head/official at Division Head level of the proposing unit.
Profil Komite Profil ketua dan anggota Komite Kebijakan dan Pedoman, yang juga merangkap jabatan lain di LPEI, telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan.	Committee Profile The profiles of the chairman and members of the Policy and Guidelines Committee, who also hold other positions in LPEI, are described in the Company Profile Chapter.
Tugas dan Wewenang Tugas dan wewenang Komite Pengadaan adalah sebagai berikut: 1. Memberikan persetujuan prinsip untuk Pengadaan Barang/Jasa pada tahun berjalan sesuai yang telah ditetapkan dalam RKAT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan mempertimbangkan biaya dan anggaran. 2. Menyetujui Pengadaan Barang/Jasa pada tahun berjalan yang belum dianggarkan dalam RKAT LPEI, termasuk untuk Pengadaan Mendesak dan/atau Pengadaan Keadaan Darurat, yang mana Komite Pengadaan harus dihadiri oleh Direktur Eksekutif. 3. Menetapkan susunan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa melalui Keputusan Komite Pengadaan. 4. Menyetujui dan menetapkan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp250.000.000 berikut perubahannya dan nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui metode Swakelola. 5. Menyetujui dan menetapkan pemenang Pengadaan Barang/Jasa yang diusulkan oleh Unit Kerja Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa LPEI atau Panitia Pengadaan Barang/Jasa LPEI. 6. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif terkait hal-hal yang belum diatur atau terkait deviasi dari Standar Pedoman Operasional pengadaan dan jasa LPEI, sebagai salah satu bahan Direktur Eksekutif untuk mengambil keputusan dengan tetap memperhatikan good judgment, mitigasi risiko, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Duties and Authorities Duties and Authorities of Procurement Committee are as follows: 1. Provide principle approval for Procurement of Goods/ Services in the current year as stipulated in the Indonesia Eximbank (LPEI) Annual Budget Plan (RKAT), considering costs and budgets. 2. Approve Procurement of Goods/Services in the current year that are not budgeted in the LPEI RKAT, including for Urgent Procurements and/or Emergency Procurements, which must be attended by the Executive Director. 3. Determine the composition of Procurement Committee through Procurement Committee Decisions. 4. Approve and determine the value of Estimated Self-Price (HPS) for Procurement of Goods/Services with a value exceeding Rp250,000,000, including any changes, and the Budget Cost Plan (RAB) for Goods/Services Procurement carried out through the Self-Implementation method. 5. Approve and determine the winner of Procurement of Goods/Services proposed by the Indonesia Eximbank Procurement Implementing Work Unit or the Indonesia Eximbank Procurement Committee. 6. Provide recommendations to the Executive Director regarding matters that are not regulated or related to deviations from the Operational Guidelines standards for Indonesia Eximbank procurement and services, as one of the materials for Executive Director to make decisions while considering good judgment, risk mitigation, and compliance with applicable regulations.

Rapat Komite

Kebijakan Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Komite Pengadaan wajib menyelenggarakan rapat secara rutin atau saat dipandang perlu. Pengambilan Keputusan dalam rapat Komite Pengadaan dilaksanakan melalui mekanisme dan tata cara sebagai berikut:

- A. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0021/PDE/09/2023
 1. Bertindak sebagai Sekretaris Komite adalah Kepala Unit Kerja yang membidangi Pengadaan. Fungsi Sekretaris Komite tersebut berlaku efektif pada saat proses pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa telah dimulai.
 2. Persetujuan izin prinsip Pengadaan Barang/ Jasa dapat diajukan oleh unit kerja pengusul Pengadaan Barang/Jasa.
 3. Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau daring (*online*).
 4. Rapat tatap muka dapat dilakukan secara fisik atau melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
 5. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal Komite Pengadaan belum dapat mencapai keputusan maka dapat diajukan ke Rapat Board of Management (RABOM) untuk dimintakan keputusan.
 6. Ketentuan kuorum dalam pengambilan keputusan pada Komite Pengadaan adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk Komite I dan II, dihadiri oleh setengah dari anggota tetap terdiri dari:
 - » Ketua dan/atau Wakil Ketua;
 - » Anggota tetap.
 - b. Untuk Komite III, dihadiri oleh seluruh anggota Komite III.
 7. Seluruh keputusan Komite ditatausahakan secara lengkap dan tertib oleh sekretaris komite.
- B. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0025/PDE/12/2024
 1. Bertindak sebagai Sekretaris Komite adalah Kepala Unit Kerja yang membidangi Pengadaan. Fungsi Sekretaris Komite tersebut berlaku efektif pada saat proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa telah dimulai.
 2. Persetujuan untuk memulai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada tahun berjalan dapat diajukan oleh unit kerja pengusul Pengadaan Barang/Jasa bersama dengan Unit Kerja Pelaksana Pengadaan.
 3. Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau daring (*online*).
 4. Rapat tatap muka dapat dilakukan secara fisik atau melalui media telekonferensi, *video* konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Committee Meeting

Policy on Decision Making in Meetings

The Procurement Committee is obligated to hold meetings regularly or as deemed necessary. Decisionmaking in the Procurement Committee meetings is conducted through the following mechanisms and procedures:

1. Head of Procurement Work Unit acts as the Committee Secretary. The Secretary's function becomes effective when the procurement process for Goods/Services has commenced.
 2. Approval for the principle permit of Goods/Services Procurement may be proposed by the proposing procurement work unit.
 3. Committee decisions can be made through physical or online meetings.
 4. Physical meetings can be conducted in person or through teleconferencing, video conferencing, or other electronic means that allow all meeting participants to see, hear, and participate directly.
 5. Decisions in the meeting must be based on consensus. If the Procurement Committee cannot reach a decision, it may be referred to the Board of Management Meeting (RABOM) for a decision.
 6. The quorum requirement for decision-making in the Procurement Committee is as follows:
 - a. For Committee I and II, attended by half of the permanent members, including:
 - » Chairman and/or Vice Chairman;
 - » Permanent members.
 - b. For Committee III, attended by all Committee III members.
 7. All Committee decisions must be completely and orderly documented by the committee secretary.
- B. Executive Director Regulation No. 0025/PDE/12/2024
1. Acting as Secretary of the Committee is the Head of the Working Unit in charge of Procurement. The function of Secretary of the Committee shall be effective when the process of Goods/Services Procurement has commenced.
 2. Approval to start the implementation of Procurement of Goods/Services in the current year can be submitted by the work unit proposing the Procurement of Goods/Services together with the Procurement Implementing Work Unit.
 3. Committee decision-making can be conducted through face-to-face or online meetings.
 4. Face-to-face meetings can be conducted physically or through teleconferencing media, video conferencing or other electronic media facilities that allow all meeting participants to see and hear each other directly and participate in the meeting.

5. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal Komite Pengadaan belum dapat mencapai keputusan maka dapat diajukan ke Rapat Board of Management (RABOM) untuk dimintakan keputusan.
6. Ketentuan kuorum dalam pengambilan keputusan pada Komite Pengadaan adalah sebagai berikut:
 - a. Kuorum Komite Pengadaan I (keputusan musyawarah mufakat):
Pengambilan keputusan dianggap kuorum apabila sedikitnya dihadiri oleh:
 - 2 (dua) orang anggota yang mewakili Fungsi Pengadaan; dan
 - 2 (dua) orang anggota yang mewakili Fungsi Risiko, dimana salah satu anggotanya merupakan Direktur Eksekutif, jika Direktur Eksekutif berhalangan maka seluruh anggota dari Fungsi Pengadaan dan Fungsi Risiko harus hadir;
 - b. Kuorum Komite Pengadaan II (keputusan musyawarah mufakat):
Pengambilan keputusan dianggap kuorum apabila sedikitnya dihadiri oleh:
 - 1 (satu) orang anggota yang mewakili Fungsi Pengadaan; dan
 - 2 (dua) orang anggota yang mewakili Fungsi Risiko;
 - c. Kuorum Komite Pengadaan III (keputusan musyawarah mufakat):
Pengambilan keputusan dianggap kuorum apabila sedikitnya dihadiri oleh:
 - 1 (satu) orang anggota yang mewakili Fungsi Pengadaan; dan
 - 1 (satu) orang anggota yang mewakili Fungsi Risiko;

5. Meeting decisions must be made based on deliberation to reach a consensus, in the event that the Procurement Committee cannot reach a decision then it can be submitted to the Board of Management Meeting (RABOM) for a decision.
6. The quorum requirements for decision making in the Procurement Committee are as follows:
 - a. Procurement Committee Quorum I (consensus decision):
Decision making is considered a quorum if at least attended by:
 - 2 (two) members representing the Procurement Function; and
 - 2 (two) members representing the Risk Function, where one of the members is the Executive Director, if the Executive Director is absent then all members of the Procurement Function and Risk Function must be present;
 - b. Quorum of Procurement Committee II (decision by consensus):
Decision making is considered a quorum if at least attended by:
 - 1 (one) member representing the Procurement Function; and
 - 2 (two) members representing the Risk Function;
 - c. Quorum of Procurement Committee III (decision by consensus):
Decision making is considered a quorum if at least attended by:
 - 1 (one) member representing the Procurement Function; and
 - 1 (one) member representing the Risk Function;

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Sepanjang tahun 2024, Komite Pengadaan telah mengadakan 68 (Enam Puluh Delapan) kali rapat, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Meeting Frequency and Attendance Rate

Throughout 2024, the Procurement Committee has held 68 (Sixty Eight) meetings, with attendance rates as follows:

Komite Committee	Jumlah Rapat Number of Meetings
Komite I Committee I	41
(Periode Januari – September) (January – September period)	29
(Periode September – Desember) (September – December period)	12
Komite II Committee II	27
(Periode Januari – September) (January – September period)	18
(Periode September – Desember) (September – December period)	9

Seluruh rapat tersebut dilaksanakan dengan tingkatan kehadiran anggota memenuhi ketentuan kuorum Rapat, dengan rincian sebagai berikut:

All meetings were held with the level of attendance of members meeting the quorum requirements of the Meeting, with the following details:

Rapat Komite I (Periode Januari-Agustus 2024)

Committee I Meeting (January-August 2024 Period)

Peserta Rapat Meeting Participants	Posisi di Komite Position on Committee	Frekuensi Rapat Frequency of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Riyani Tirtoso (Direktur Eksekutif) (Executive Director)	Ketua merangkap anggota tetap Chairman concurrently permanent member	29	26	90%
Sam Malee (Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit) (Managing Director of Risk Management & Credit)	Anggota Member	29	19	66%
Agus Windiarto (Direktur Pelaksana Bidang Keuangan, Operasional & Teknologi Informasi) (Managing Director of Finance, Operations & Information Technology)	Anggota Member	29	24	83%
Chesna F Anwar (Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan, & SDM) (Managing Director of Institutional Secretariat, Compliance, & HC)	Anggota Member	29	21	72%
Titiek Setiyowati (Head of Credit & Risk Management) (Head of Credit & Risk Management)	Anggota Member	29	26	90%
Anwar Harsono (Head of Finance & Strategic Planning) (Head of Finance & Strategic Planning)	Anggota Member	29	29	100%
T. Wahyu P. Wibowo (Chief of HC, Legal & Compliance) (Chief of HC, Legal & Compliance)	Anggota Member	29	4	14%
Pretty Halim (Kepala Divisi Pengadaan dan Umum) (Head of Procurement and General Division)	Sekretaris Komite Secretary of Committee	29	29	100%

Rapat Komite II (Periode Januari-Agustus 2024)

Committee II Meeting (January-August 2024 Period)

Peserta Rapat Meeting Participants	Posisi di Komite Position on Committee	Frekuensi Rapat Frequency of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Sam Malee (Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit) (Managing Director of Risk Management & Credit)	Anggota Member	18	11	61%
Agus Windiarto (Direktur Pelaksana Bidang Keuangan, Operasional & Teknologi Informasi) (Managing Director of Finance, Operations & Information Technology)	Ketua (1) Anggota (12) Chairman (1) Member (12)	18	14	78%

Rapat Komite II (Periode Januari-Agustus 2024)

Committee II Meeting (January-August 2024 Period)

Peserta Rapat Meeting Participants	Posisi di Komite Position on Committee	Frekuensi Rapat Frequency of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Chesna F Anwar (Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan, & SDM) (Managing Director of Institutional Secretariat, Compliance, & HC)	Ketua (10) Anggota (3) Chairman (10) Member (3)	18	13	72%
Titiek Setiyowati (Head of Credit & Risk Management) (Head of Credit & Risk Management)	Anggota Member	18	15	83%
Anwar Harsono (Head of Finance & Strategic Planning) (Head of Finance & Strategic Planning)	Anggota Member	18	15	83%
T. Wahyu P. Wibowo (Chief of HC, Legal & Compliance) (Chief of HC, Legal & Compliance)	Anggota Member	18	3	17%
Pretty Halim (Kepala Divisi Pengadaan dan Umum) (Head of Procurement and General Division)	Sekretaris Komite Secretary of Committee	18	18	100%

Rapat Komite I (Periode September-Desember 2024)

Committee I Meeting (September-December 2024 Period)

Peserta Rapat Meeting Participants	Posisi di Komite Position on Committee	Frekuensi Rapat Frequency of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Riyani Tirtoso (Direktur Eksekutif) (Executive Director)	Ketua merangkap anggota tetap Chairman concurrently permanent member	12	12	100%
Sam Malee (Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit) (Managing Director of Risk Management & Credit)	Anggota Member	12	12	100%
Titiek Setiyowati (Head of Credit & Risk Management) (Head of Credit & Risk Management)	Anggota Member	12	12	100%
Anwar Harsono (Head of Finance & Strategic Planning) (Head of Finance & Strategic Planning)	Anggota Member	12	12	100%
T. Wahyu P. Wibowo (Chief of HC, Legal & Compliance) (Chief of HC, Legal & Compliance)	Anggota Member	12	12	100%
Nury Sriandajani (Pj. Chief of Human capital, Procurement & General Services) (Acting Chief of Human capital, Procurement & General Services)	Anggota Member	12	1	8%
Pretty Halim (Kepala Divisi Pengadaan dan Umum) (Head of Procurement and General Division)	Sekretaris Komite Secretary of Committee	12	11	92%

Rapat Komite II (Periode September-Desember 2024)

Rapat Komite II (Periode September-Desember 2024)

Peserta Rapat Peserta Rapat	Posisi di Komite Posisi di Komite	Frekuensi Rapat Frekuensi Rapat	Jumlah Kehadiran Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran Persentase Kehadiran
Sam Malee (Head of Credit & Risk Management) (Head of Credit & Risk Management)	Anggota Member	9	9	100%
Anwar Harsono (Plt. Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional & Teknologi Informasi) (Acting Managing Director of Finance, Operations & Information Technology)	Anggota Member	9	9	100%
Titiek Setiyowati (Head of Credit & Risk Management) (Head of Credit & Risk Management)	Anggota Member	9	9	100%
T. Wahyu P. Wibowo (Chief of HC, Legal & Compliance) (Chief of HC, Legal & Compliance)	Anggota Member	9	9	100%
Nury Sriandajani (Pj. Chief of Human capital, Procurement & General Services) (Acting Chief of Human Capital, Procurement & General Services)	Anggota Member	9	2	22%
Pretty Halim (Kepala Divisi Pengadaan dan Umum) (Head of Procurement and General Division)	Sekretaris Komite Secretary of Committee	9	9	100%

Agenda Rapat

Sepanjang tahun 2024, Rapat Komite Pengadaan membahas berbagai agenda berikut:

Meeting Agenda

Throughout 2024, Procurement Committee Meetings discussed the following agenda items:

No.	Tanggal Tanggal	Agenda	Agenda
1.	02/01/24	1. Permohonan persetujuan perpanjangan sewa kantor cabang makasar 2. Permohonan persetujuan pemenang pengadaan <i>downsizing dan Re-instatement</i> Kantor Cabang Makasar	1. Application for approval of extension of lease of Makassar branch office 2. Application for approval of winner of procurement of <i>downsizing and Re-instatement</i> of Makassar Branch Office
2.	10/01/24	Permohonan Persetujuan Pemenang Pengadaan Implementasi <i>Multi Factor Authentication</i>	Application for Approval of Winner of Procurement Implementation of Multi Factor Authentication
3.	26/01/24	Permohonan Persetujuan Pemenang Pengadaan: 1. <i>Subscription Oxford Economics</i> 2. <i>Renewal Subscription 11 Lisensi Acronis Backup Software Tahun 2024-2027</i> 3. Audit Persepsi Media Pembuatan Loker dan Kunci Sensor RFID Seluruh lantai kerja LPEI	Request for Approval of Procurement Winner: 1. Oxford Economics Subscription 2. Renewal Subscription of 11 Acronis Backup Software Licenses for 2024-2027 3. Media Perception Audit Creation of RFID Sensor Lockers and Keys for all LPEI work floors
4.	26/01/24	Permohonan Persetujuan HPS, Bobot Evaluasi, Metode, dan Panitia Pengadaan: 1. <i>Jasa Implementasi Modernisasi Core System</i> 2. <i>Infrastruktur Pendukung Modernisasi Core System Annual Maintenance & Support OPICS Treasury Dealing System</i>	Request for HPS Approval, Evaluation Weight, Method, and Procurement Committee: 1. Core System Modernization Implementation Services 2. Core System Modernization Supporting Infrastructure Annual Maintenance & Support OPICS Treasury Dealing System
5.	26/01/24	Permohonan Persetujuan HPS, Bobot Evaluasi, Metode, dan Panitia Pengadaan Implementasi Indonesia Export Ecosystem Platform	Application for Approval of HPS, Evaluation Weight, Method, and Procurement Committee for Implementation of Indonesia Export Ecosystem Platform
6.	06/02/24	Permohonan Persetujuan Pemenang Pengadaan Sewa Komputer	Application for Approval of Winner of Computer Rental Procurement
7.	13/02/24	Laporan Panitia Pengadaan Implementasi Indonesia Export	Report of Procurement Committee for Implementation of Indonesia Export

No.	Tanggal Tanggal	Agenda	Agenda
8.	20/02/24	Permohonan Persetujuan HPS, Bobot Evaluasi, Metode, dan Panitia Pengadaan Perpanjangan Sewa Sistem Asuransi	Application for Approval of HPS, Evaluation Weight, Method, and Procurement Committee for Insurance System Rental Extension
9.	23/02/24	Persetujuan Pemenang Pengadaan Implementasi Indonesia Export Ecosystem Platform	Application for Approval of Winner of Procurement for Implementation of Indonesia Export Ecosystem Platform
10.	26/02/24	Permohonan Persetujuan HPS, Bobot Evaluasi, Metode, dan Panitia Pengadaan Jasa Konsultan Verifikasi Debitur Hapus Buku	Application for Approval of HPS, Evaluation Weight, Method, and Procurement Committee for Debtor Verification Consultant Services Write-Off
11	29/02/24	- Permohonan Persetujuan Pemenang Pengadaan Fund Transfer (FTP) System - Permohonan Persetujuan HPS, Bobot Evaluasi, dan Metode Pengadaan: - Pengadaan Perpanjangan Support FIRMS SLIK 2024-2025 - Pengadaan Renewal Subscription Sophos Server 2024- 2025 - Pengadaan Perpanjangan Media Placement - Permohonan Persetujuan HPS, Bobot Evaluasi, Metode, dan Panitia Pengadaan Perpanjangan IT Outsourcing Core System UBS Tahun 2024-2025 - Permohonan Persetujuan Addendum Surat Perintah Kerja <i>Enhancement</i> Expense System	- Request for Approval of Winner of Fund Transfer (FTP) System Procurement - Request for Approval of HPS, Evaluation Weight, and Procurement Method: - Procurement of FIRMS SLIK Support Extension 2024-2025 - Procurement of Sophos Server Renewal Subscription 2024- 2025 - Procurement of Media Placement Extension - Request for Approval of HPS, Evaluation Weight, Method, and Committee for Procurement of Extension of IT Outsourcing Core System UBS 2024-2025 - Request for Approval of Addendum to Work Order for <i>Enhancement</i> Expense System
12	07/03/24	Permohonan Persetujuan Pemenang Pengadaan Jasa Konsultan Verifikasi Debitur Hapus Buku	Application for Approval of Winner of Debtor Verification Consultant Services Procurement Write-Off
13	07/03/24	Permohonan Persetujuan HPS, Bobot Evaluasi, Metode, dan Panitia Pengadaan: Implementasi <i>Video E-Learning Production Social Media Handling & Promotion</i>	Request for HPS Approval, Evaluation Weight, Method, and Procurement Committee: Implementation of E-Learning Production Video Social Media Handling & Promotion
14.	13/03/24	Permohonan Persetujuan Pemenang Pengadaan: Perpanjangan Sewa Sistem Asuransi	Request for Approval of Procurement Winner: Insurance System Lease Extension
15.	20/03/24	Permohonan Persetujuan Pemenang Pengadaan: - Perpanjangan <i>Media Placement</i> - Perpanjangan Local Support Aplikasi penunjang SLIK (FIRMS) tahun 2024-2025 <i>Renewal subscription sophos malware protection server</i> tahun 2024-2025	Request for Approval of Procurement Winner: - Extension of Media Placement - Extension of Local Support for SLIK supporting applications (FIRMS) in 2024-2025 - Renewal of subscription for Sophos malware protection server in 2024-2025
16.	26/03/24	Permohonan Persetujuan Pemenang Pengadaan: <i>Annual technical support (ATS)</i> UBS Konvensional - Penunjukkan Langsung (<i>Repeat order</i>) konsultan verifikasi debitur hapus buku LPEI	Request for Approval of Procurement Winner: <i>Annual technical support (ATS)</i> UBS Conventional - Direct appointment (<i>Repeat order</i>) of LPEI write-off audit consultant
17.	02/04/24	- Permohonan Persetujuan Pemenang Pengadaan Perpanjangan sewa kantor <i>Co Working space</i> semarang - Permohonan Persetujuan HPS, Bobot Evaluasi, Metode, dan Panitia Pengadaan <i>Integrated Originating System (IOS) Loan Originating system</i> pembiayaan	- Application for Approval of the Winner of the Procurement of the Extension of the Co Working Space Semarang Office Lease - Application for Approval of HPS, Evaluation Weight, Method, and Procurement Committee Integrated Originating System (IOS) Loan Originating System financing
18.	03/04/24	- Permohonan Persetujuan Pemenang Perpanjangan IT Outsourcing Core System UBS tahun 2024-2025 - Permohonan Persetujuan HPS, Bobot Evaluasi, dan Metode Pengadaan: - Pekerjaan tambah <i>multifunction printer (MFP)</i> warna <i>Subscription</i> 20 lisensi tableau Tahun 2024-2025	- Application for Approval of Winner of Extension of IT Outsourcing Core System UBS 2024-2025 - Application for Approval of HPS, Evaluation Weight, and Procurement Method: - Additional work of color multifunction printer (MFP) - Subscription of 20 tableau licenses 2024-2025
19.	23/04/24	Permohonan Persetujuan HPS, Bobot Evaluasi, Metode, dan Panitia Pengadaan: <i>Subscription bankers almanac</i> <i>Integrated Originating System (IOS) Fase 1 (Loan Originating System)</i> Pembiayaan) - Perpanjangan asuransi kesehatan pegawai	Application for Approval of HPS, Evaluation Weight, Method, and Procurement Committee: - Subscription of bankers almanac - Integrated Originating System (IOS) Phase 1 (Loan Originating System Pembiayaan) - Extension of employee health insurance
20.	30/04/24	- Permohonan Persetujuan Pemenang Pengadaan Perpanjangan sewa kendaraan operasional - Permohonan Persetujuan Perubahan HPS premi <i>inpatient</i> pengadaan perpanjangan asuransi kesehatan pegawai tahun 2024	- Application for Approval of Winner of Procurement Extension of operational vehicle lease - Application for Approval of Change of HPS of inpatient premium for procurement of employee health insurance extension in 2024

No.	Tanggal Tanggal	Agenda	Agenda
21.	30/04/24	- Persetujuan Pemenang Pengadaan: <i>Social media handling & promotion</i> <i>Implementasi video e-learning production</i> - Penambahan sewa mesin multi fungsi printer <i>Subscription 20 lisensi tableau</i> - Permohonan Persetujuan HPS, Bobot Evaluasi, Metode, dan Panitia Pengadaan: <i>Renewal financial spread</i> <i>Renewal warranty & Support sparc base</i>	- Approval of Procurement Winner: - Social media handling & promotion - Implementation of e-learning production video - Additional rental of multi-function printer machines - Subscription of 20 tableau licenses - Request for Approval of HPS, Evaluation Weight, Method, and Procurement Committee: - Renewal financial spread - Renewal warranty & Support sparc base
22.	30/04/24	Permohonan Persetujuan Pemenang Pengadaan Perpanjangan asuransi kesehatan pegawai tahun 2024	Request for Approval of Winner of Procurement of Renewal of Employee Health Insurance in 2024
23.	07/05/24	Permohonan Persetujuan Pemenang Pengadaan <i>Renewal bankers almanac subscription</i>	Request for Approval of Winner of Procurement of Renewal of Bankers Almanac Subscription
24.	08/05/24	- Permohonan Persetujuan HPS, Bobot Evaluasi, Metode, dan Panitia Pengadaan: <i>Support BI RTGS 2024-2027</i> <i>Access door LPEI</i> - Permohonan Persetujuan kenaikan harga <i>medical checkup</i> PT Prodia	- Request for Approval of HPS, Evaluation Weight, Method, and Procurement Committee: <i>Support BI RTGS 2024-2027</i> <i>Access door LPEI</i> - Request for Approval of increase in medical checkup price of PT Prodia
25.	14/05/24	Permohonan persetujuan penambahan jangka waktu penyampaian & revisi jaminan penawaran pada pengadaan jasa implementasi modernisasi <i>core system</i>	Request for approval to extend the delivery period & revision of the bid guarantee for the procurement of core system modernization implementation services
26.	14/05/24	Permohonan Persetujuan HPS, Bobot Evaluasi, Metode, dan Panitia Pengadaan <i>Renewal support</i> BI RTGS tahun 2024-2027	Request for Approval of HPS, Evaluation Weight, Method, and Procurement Committee for BI RTGS Renewal Support for 2024-2027
27.	28/05/24	Persetujuan Pemenang Pengadaan: - Jasa implementasi modernisasi <i>core system</i> - Perpanjangan sewa kendaraan operasional kantor pusat dan kantor jaringan	Procurement Winner Approval: - Core system modernization implementation services - Extension of operational vehicle rental for head office and network office
28.	29/05/24	Permohonan Persetujuan HPS, Bobot Evaluasi, dan Metode Pengadaan <i>Renewal jasa local support & maintenance Microsoft Exchange Server & Active Directory</i>	HPS Approval Request, Evaluation Weight, and Procurement Method for Renewal of Local Support & Maintenance Services for Microsoft Exchange Server & Active Directory
29.	04/06/24	Permohonan Persetujuan HPS, Bobot Evaluasi, Metode, dan Panitia Pengadaan - Jasa konsultan aktuaria implementasi PSAK 74/117 - Jasa konsultan akuntansi implementasi PSAK 74/117	Request for HPS Approval, Evaluation Weight, Method, and Procurement Committee - Actuarial consultant services for PSAK 74/117 implementation - Accounting consultant services for PSAK 74/117 implementation
30.	05/06/24	Persetujuan Pemenang Pengadaan: <i>Renewal support</i> aplikasi BI RTGS <i>Renewal subscription financial spread</i>	Procurement Winner Approval: - Renewal support for BI RTGS application - Renewal subscription financial spread
31.	11/05/24	Permohonan Persetujuan HPS, Bobot Evaluasi, Metode, dan Panitia Pengadaan <i>Enhancement Datawarehouse & MIS reporting system</i>	Request for HPS Approval, Evaluation Weight, Method, and Procurement Committee Enhancement Datawarehouse & MIS reporting system
32.	25/05/24	Permohonan Persetujuan HPS, Bobot Evaluasi, Metode, dan Panitia Pengadaan <i>Maintenance & warranty data center facility equipment & pembelian perangkat HSSD</i>	Request for HPS Approval, Evaluation Weight, Method, and Procurement Committee Maintenance & warranty data center facility equipment & purchase of HSSD devices
33.	24/05/24	Permohonan Persetujuan HPS, Bobot Evaluasi, Metode, dan Panitia Pengadaan <i>Jasa Assessment</i> calon direktur pelaksana	Request for Approval of HPS, Evaluation Weight, Method, and Procurement Committee for Assessment Services for prospective executive directors
34.	27/05/24	- Permohonan Persetujuan HPS, Bobot Evaluasi, Metode, dan Panitia Pengadaan: - Penambahan & implementasi perangkat <i>access point</i> WIFI - Optimalisasi link internet - Persetujuan Pemenang Pengadaan: - Penyedia jasa <i>addeddment</i> calon direktur pelaksana <i>Renewal jasa local support & maintenance ms. Exchange server dan active directory</i> tahun 24-25	- Request for Approval of HPS, Evaluation Weight, Method, and Procurement Committee: - Addition & implementation of WIFI access point devices - Optimization of internet links - Approval of Procurement Winner: - Provider of additionaldment services for prospective executive directors - Renewal of local support & maintenance services for ms. Exchange server and active directory in the years 24-25

No.	Tanggal Tanggal	Agenda	Agenda
35.	02/06/24	Permohonan Persetujuan HPS, Bobot Evaluasi, Metode, dan Panitia Pengadaan Jasa konsultan akuntan publik untuk audit keuangan tahun buku 2024	Request for Approval of HPS, Evaluation Weight, Method, and Procurement Committee for Public Accountant Consultant Services for Financial Audit for Fiscal Year 2024
36.	16/06/24	Permohonan Persetujuan HPS, Bobot Evaluasi, Metode, dan Panitia Pengadaan a. Infrastruktur pendukung modernisasi <i>core system</i> b. <i>Middleware enterprise service bus</i> (ESB) dan aplikasi <i>middleware payment system</i> (MPS)	Request for Approval of HPS, Evaluation Weight, Method, and Procurement Committee a. Supporting infrastructure for core system modernization b. Middleware enterprise service bus (ESB) and middleware payment system (MPS) applications
37.	23/06/24	Permohonan Persetujuan HPS, Bobot Evaluasi, Metode, dan Panitia Pengadaan <i>warranty & support</i> perangkat <i>firewall palo alto network</i> tahun 2024-2027	Request for HPS Approval, Evaluation Weight, Method, and Procurement Committee for Palo Alto Network Firewall Device Warranty & Support in 2024-2027
38.	26/06/24	Permohonan Persetujuan HPS, Bobot Evaluasi, Metode, dan Panitia Pengadaan 1. Asuransi <i>personal accident</i> 2. OSDB server <i>oracle</i> tahun 2024-2026 3. <i>Enhancement</i> HRIS sebagai bagian dari aplikasi terdampak modernisasi <i>core system</i> 4. <i>Enhancement GL Engine Financial studio</i>	Request for HPS Approval, Evaluation Weight, Method, and Procurement Committee 1. Personal accident insurance 2. Oracle OSDB server in 2024-2026 3. HRIS Enhancement as part of the application affected by core system modernization 4. GL Engine Financial Studio Enhancement
39.	30/06/24	1. Permohonan Persetujuan HPS, Bobot Evaluasi, Metode, dan Panitia Pengadaan <i>Renewal warranty & support server UBS (sparc based)</i> tahun 2024-2025 2. Permohonan Persetujuan Pemenang Pengadaan Jasa konsultan akuntan publik untuk audit keuangan tahun buku 2024 3. Permohonan Persetujuan Pengadaan gagal atas pengadaan <i>renewal warranty & support server UBS (sparc based)</i> tahun 2024-2025	1. Request for HPS Approval, Evaluation Weight, Method, and Procurement Committee for UBS Renewal Warranty & Support Server (Sparc Based) in 2024-2025 2. Request for Approval of Winner of Public Accountant Consultant Services Procurement for Financial Audit in 2024 3. Request for Procurement Approval failed for UBS Renewal Warranty & Support Server (Sparc Based) in 2024-2025
40.	30/06/24	Permohonan Persetujuan HPS, Bobot Evaluasi, Metode, dan Panitia Pengadaan <i>Local Warranty & support server intel based</i>	Request for Approval of HPS, Evaluation Weight, Method, and Procurement Committee for Local Warranty & support server intel based
41.	06/08/24	Permohonan Persetujuan Pemenang Pengadaan: 1. <i>Maintenance & warranty data center facility equipment</i> tahun 24-27 dan pembelian perangkat HSSD 2. Jasa konsultan akuntansi implementasi PSAK 74/117 3. Jasa konsultan aktuaris implementasi PSAK 74/117	Request for Approval of Procurement Winner: 1. Maintenance & warranty data center facility equipment for years 24-27 and purchase of HSSD devices 2. Accounting consultant services for implementation of PSAK 74/117 3. Actuarial consultant services for implementation of PSAK 74/117
42.	06/08/24	Permohonan Persetujuan Pemenang Pengadaan <i>Local warranty & support server intel based</i>	Request for Approval of Procurement Winner for Local warranty & support server intel based
43.	13/08/24	1. Permohonan Persetujuan HPS, Bobot Evaluasi, Metode, dan Panitia Pengadaan <i>Enhancement sistem SAS psak & credit rating management system</i> (CRMS) 2. Permohonan Persetujuan Pemenang Pengadaan <i>Renewal warranty & support server UBS (sparc based)</i> tahun 2024-2025	1. Request for Approval of HPS, Evaluation Weight, Method, and Procurement Committee Enhancement of SAS psak system & credit rating management system (CRMS) 2. Request for Approval of Procurement Winner for Renewal warranty & support server UBS (sparc based) for years 2024-2025
44.	14/08/24	1. Permohonan Persetujuan HPS, Bobot Evaluasi, Metode, dan Panitia Pengadaan <i>Enhancement expense system</i> sebagai bagian dari aplikasi terdampak modernisasi <i>core system</i> 2. Permohonan Persetujuan Pemenang Pengadaan: a. <i>Access door</i> b. <i>Enhancement HRIS</i> terkait perubahan <i>Core syetem</i>	1. Request for Approval of HPS, Evaluation Weight, Method, and Procurement Committee Enhancement expense system as part of the application affected by core system modernization 2. Request for Approval of Winner Procurement: a. Access door b. HRIS enhancement related to Core system changes
45.	20/08/24	1. Permohonan Persetujuan HPS, Bobot Evaluasi, Metode, dan Panitia Pengadaan <i>Renewal</i> lisensi MS 365 2. Permohonan Persetujuan Pemenang Pengadaan <i>warranty & support</i> perangkat <i>palo alto network</i> tahun 2024-2027	1. Request for HPS Approval, Evaluation Weight, Method, and Procurement Committee Renewal license MS 365 2. Request for Approval of Winner of Palo Alto Network Warranty & Support Device Procurement in 2024-2027

No.	Tanggal Tanggal	Agenda	Agenda
46.	21/08/24	- Permohonan Persetujuan HPS, Bobot Evaluasi, Metode, dan Panitia Pengadaan: - Enhancement sistem asuransi CARE - Jasa remediasi <i>penetration testing</i> sistem corporate website - Jasa <i>penetration testing platform digital</i> komodoln - Permohonan Persetujuan Pemenang Pengadaan optimalisasi link internet	- Request for HPS Approval, Evaluation Weight, Method, and Procurement Committee: - CARE insurance system enhancement - Corporate website system penetration testing remediation services - Komodoln digital platform penetration testing services - Request for Approval of Winner of Internet link optimization procurement
47.	30/08/24	- Persetujuan Addendum Perjanjian Pengadaan: - Implementasi Indonesia Export Ecosystem Platform - Renewal Lisensi dan TAS Trade Finance System – FTI (Perubahan Termin Pembayaran) - Persetujuan perpanjangan sewa kantor jaringan batam	- Approval of Procurement Agreement Addendum: - Implementation of Indonesia Export Ecosystem Platform - License Renewal and TAS Trade Finance System – FTI (Changes in Payment Terms) - Approval of Batam network office lease extension
48.	03/09/24	- Permohonan Persetujuan HPS, Bobot Evaluasi, Metode, dan Panitia Pengadaan <i>Warranty & support</i> perangkat web <i>application firewall</i> ADC Big IP F5 i4600 & i5800 - Permohonan persetujuan revisi jaminan penawaran dan pengadaan <i>enhancement datawarehouse & MIS reporting system</i>	- Application for Approval of HPS, Evaluation Weight, Method, and Procurement Committee <i>Warranty & support</i> for ADC Big IP F5 i4600 & i5800 web application firewall devices - Application for approval of revision of bid guarantee and procurement of enhancement datawarehouse & MIS reporting system
49.	04/09/24	Permohonan Persetujuan Pemenang Pengadaan: - Local support operating system & database server oracle - Enhancement GL Engine financial studio	Request for Approval of Procurement Winner: - Local support operating system & oracle database server - Enhancement GL Engine financial studio
50.	17/09/24	- Permohonan Persetujuan Pemenang Pengadaan: - Integrated Originating System Fase 1 (Loan Originating System Pembiayaan) - Enhancement Datawarehouse & MIS reporting system - Permohonan Persetujuan Susunan panitia pengadaan	- Application for Approval of Procurement Winner: - Integrated Originating System Phase 1 (Loan Originating System Financing) - Enhancement Datawarehouse & MIS reporting system - Request for Approval of Procurement Committee Composition
51.	24/09/24	- Permohonan Persetujuan HPS, Bobot Evaluasi, Metode, dan Panitia Pengadaan: - Penyedia jasa IT <i>Outsourcing</i> untuk implementasi modernisasi core system dengan 4 paket pekerjaan. - Renewal subscription efinitiv (d/h/ reuters) - Renewal subscription bloomberg - Permohonan Persetujuan Pemenang Pengadaan: - Renewal lisensi MS 365 - Infrastruktur pendukung modernisasi core system - Permohonan persetujuan pekerjaan tambah pengadaan implementasi Indonesia export ecosystem platform	- Request for Approval of HPS, Evaluation Weight, Method, and Procurement Committee: - IT Outsourcing service provider for core system modernization implementation with 4 work packages. - Renewal subscription efinitiv (formerly reuters) - Renewal subscription bloomberg - Request for Approval of Procurement Winner: - Renewal of MS 365 license - Supporting infrastructure for core system modernization - Request for approval of additional procurement work for implementation of Indonesia Export Ecosystem Platform
52.	27/09/24	- Permohonan Persetujuan HPS, Bobot Evaluasi, Metode, dan Panitia Pengadaan: - Annual report dan sustainability report 2024 - Renewal lisensi manage engine AD manager, Audaudit plus, dan servicedesk plus (helpdesk system) - Local warranty & support storage netapp periode tahun 2024-2025 - Jasa mandays <i>penetration testing</i> tahun 2024-2025 - Enhancement surrounding system terdampak modernisasi core system - Layanan SD-WAN BI-RTGS di DRC LPEI - Enhancemenet e-proc - Surrounding system - Permohonan Persetujuan Pemenang Pengadaan: - Asuransi personal accident - Penambahan dan implementasi perangkat access pount wifi indonesia eximbank	- Request for Approval of HPS, Evaluation Weight, Method, and Procurement Committee: - Annual report and sustainability report 2024 - Renewal of licenses for managing engineAD manager, Audaudit plus, and servicedesk plus (helpdesk system) - Local warranty & support storage netapp for the period 2024-2025 - Mandays penetration testing services in 2024-2025 - Enhancement of surrounding systems affected by core system modernization - SD-WAN BI-RTGS services in DRC LPEI - Enhancement of e-proc - Surrounding system - Request for Approval of Procurement Winners: - Personal accident insurance - Addition and implementation of access point devices wifi indonesia eximbank

No.	Tanggal Tanggal	Agenda	Agenda
53.	01/10/24	Permohonan Persetujuan HPS, Bobot Evaluasi, Metode, dan Panitia Pengadaan: 1. <i>Warranty & support</i> perangkat WAN firewall fortigate tahun 2024-2027 2. System (IRRS) sebagai bagian dari aplikasi terdampak modern <i>core system</i>	Request for HPS Approval, Evaluation Weight, Method, and Procurement Committee: 1. <i>Warranty & support</i> for WAN firewall fortigate devices in 2024-2027 2. System (IRRS) as part of the modern <i>core system</i> impacted application
54.	15/10/24	1. Permohonan Persetujuan Pemenang Pengadaan <i>Enhancement</i> SAS PSAK & credit rating management system 2. Permohonan persetujuan atas hasil nego pekerjaan tambah implementasi indonesia export ecosystem platform	1. Request for Approval of Procurement Winner <i>Enhancement</i> SAS PSAK & credit rating management system 2. Request for approval of the results of the negotiation of work to add to the implementation of the Indonesia export ecosystem platform
55.	16/20/24	Permohonan Persetujuan HPS, Bobot Evaluasi, Metode, dan Panitia Pengadaan: 1. <i>Annual maintenance</i> Big Fix Tahun 24-27 2. <i>Enhancement</i> SMIFA & SIKAP 3. <i>Enhancement</i> E-Billing, Fund Req, & intranet	Request for HPS Approval, Evaluation Weight, Method, and Procurement Committee: 1. <i>Annual maintenance</i> Big Fix Year 24-27 2. <i>Enhancement</i> SMIFA & SIKAP 3. <i>Enhancement</i> E-Billing, Fund Req, & intranet
56.	22/10/24	1. Permohonan Persetujuan HPS, Bobot Evaluasi, Metode, dan Panitia Pengadaan <i>Manage service sore system</i> UBS 2. Permohonan Persetujuan Pemenang Pengadaan Middleware ESB & Aplikasi Middleware Payment System	1. Request for HPS Approval, Evaluation Weight, Method, and Procurement Committee <i>Manage service</i> afternoon system UBS 2. Request for Approval of Procurement Winner Middleware ESB & Middleware Payment System Application
57.	25/10/24	Permohonan Persetujuan Pemenang Pengadaan: 1. <i>Enhancement</i> sistem asuransi CARE 2. <i>Enhancement expense system</i> terkait perubahan <i>core system</i> 3. Jasa remediasi <i>pentest</i> dan <i>maintenance corporate website</i> 4. Jasa <i>penetration testing</i> platform komodoln	Request for Approval of Procurement Winner: 1. <i>Enhancement</i> CARE insurance system 2. <i>Enhancement</i> expense system related to <i>core system</i> changes 3. <i>Pentest</i> remediation services and corporate website maintenance 4. Komodoln platform penetration testing services
58.	29/10/24	Permohonan Persetujuan Pemenang Pengadaan <i>Warranty & support</i> perangkat web application firewall (WAF) ADC BIG IP F5 i4600 & i5800	Request for Approval of Procurement Winner <i>Warranty & support</i> for web application firewall (WAF) ADC BIG IP F5 i4600 & i5800 devices
59.	05/11/24	1. Permohonan Persetujuan HPS, Bobot Evaluasi, Metode, dan Panitia Pengadaan: a. <i>Backup storage system</i> b. <i>Warranty & support</i> perangkat cisco Network Access Control (NAC) 2. Permohonan Persetujuan addendum Perjanjian kerja Sama (PKS) pekerjaan konsultan PMO Modernisasi <i>core system</i>	1. Request for Approval of HPS, Evaluation Weight, Method, and Procurement Committee: a. <i>Backup storage system</i> b. <i>Warranty & support</i> for cisco Network Access Control (NAC) devices 2. Request for Approval of addendum to Cooperation Agreement (PKS) for PMO consultant work Modernization of <i>core system</i>
60.	08/11/24	1. Permohonan Persetujuan HPS, Bobot Evaluasi, Metode, dan Panitia Pengadaan Jasa screening system calon nasabah/nasabah periode 2025-2027 2. Permohonan Persetujuan Pemenang Pengadaan: a. <i>Annual maintenance</i> HCL Big fix tahun 2024-2027 b. <i>Renewal</i> lisensi manage engine Admanager, Aaudit plus & servicedesk plus (helpdesk system) c. Mandays untuk <i>enhancement</i> aplikasi otomatisasi SLIK dan End of Day (EOD) monitoring d. <i>Enhancement</i> sistem e-procurement sebagai bagian dari aplikasi terdampak modernisasi <i>core system</i>	1. Request for Approval of HPS, Evaluation Weight, Method, and Procurement Committee Screening system services for prospective customers/customers for the period 2025-2027 2. Request for Approval of Procurement Winner: a. <i>Annual maintenance</i> HCL Big fix for 2024-2027 b. <i>Renewal</i> of Admanager, Aaudit plus & servicedesk plus (helpdesk system) manage engine licenses c. Mandays for <i>enhancement</i> of SLIK automation application and End of Day (EOD) monitoring d. <i>Enhancement</i> e-procurement system as part of the application affected by <i>core system</i> modernization

No.	Tanggal Tanggal	Agenda	Agenda
61.	19/11/24	- Permohonan Persetujuan HPS, Bobot Evaluasi, Metode, dan Panitia Pengadaan: - Warranty dan support perangkat Cisco Network Access Control (NAC) - Aplikasi Document Management system - Pekerjaan tambah konsultan PMO Modernisasi Core system - License application performance monitoring - Aplikasi secure web gateway - Lisensi software (microsoft, adobe, citrix) - Permohonan Persetujuan Pemenang Pengadaan: - Managed service core system UBS - Warranty & support perangkat WAN Firewall fortigate tahun 2024-2027	- Request for HPS Approval, Evaluation Weight, Method, and Procurement Committee: - Warranty and support for Cisco Network Access Control (NAC) devices - Document Management system application - Additional work for PMO consultants for Core System Modernization - License application performance monitoring - Secure web gateway application - Software license (microsoft, adobe, citrix) - Request for Procurement Winner Approval: - UBS managed service core system - Warranty & support for WAN Firewall fortigate devices in 2024-2027
62.	20/11/24	Permohonan Persetujuan HPS, Bobot Evaluasi, Metode, dan Panitia Pengadaan: <i>Renewal Learning Management System (LMS)</i> - Broker Asuransi aset LPEI dengan menggunakan broker asuransi - Permohonan Persetujuan HPS, Bobot Evaluasi, dan Metode Pengadaan: - Jasa <i>screening system</i> calon nasabah/nasabah periode tahun 2025 - Jasa layanan penyimpanan <i>Media tape Drive</i> <i>Support Operation Risk Management (ORM) System</i>	Request for HPS Approval, Evaluation Weight, Method, and Procurement Committee: - Renewal Learning Management System (LMS) - LPEI asset insurance broker using insurance broker - Request for HPS Approval, Evaluation Weight, and Procurement Method: - Screening system services for prospective customers/ customers for the 2025 period - Media tape drive storage services - Support Operation Risk Management (ORM) System
63.	26/11/24	Permohonan Persetujuan Pemenang Pengadaan: <i>Subscription</i> revinitiv (d/h reuters) <i>Subscription</i> bloomberg	Request for Procurement Winner Approval: - Revinitiv Subscription (formerly Reuters) - Bloomberg Subscription
64.	28/11/24	- Permohonan Persetujuan HPS, Bobot Evaluasi, Metode, dan Panitia Pengadaan: - Perpanjangan sewa & <i>click change</i> multi fungsi printer untuk kantor pusat & kantor jaringan LPEI - Survei kepuasan pemangku kepentingan - Permohonan Persetujuan pemenang Pengadaan: <i>Surrounding System</i> (7 aplikasi) terdampak modernisasi <i>core system</i> <i>Enhancement</i> aplikasi E-billing, fund Request, & intranet <i>Enhancement</i> SMIFA & SIKAP	- Request for HPS Approval, Evaluation Weight, Method, and Procurement Committee: - Lease extension & click change multi-function printer for LPEI head office & network offices - Stakeholder satisfaction survey - Request for Procurement Winner Approval: - Surrounding System (7 applications) affected by core system modernization - Enhancement of E-billing, Fund Request, & Intranet applications - Enhancement of SMIFA & SIKAP
65.	04/12/24	- Permohonan Persetujuan HPS, Bobot Evaluasi, Metode, dan Panitia Pengadaan: - Renovasi kantor jaringan Makassar - Relokasi & <i>reinstatement</i> jaringan Makassar <i>Identify access management</i> - Permohonan persetujuan sewa kantor jaringan makassar	- Request for Approval of HPS, Evaluation Weight, Method, and Procurement Committee: - Renovation of Makassar network office - Relocation & reinstatement of Makassar network - Identify access management - Request for approval of Makassar network office rental
66.	13/12/24	Permohonan Persetujuan HPS, Bobot Evaluasi, Metode, dan Panitia Pengadaan <i>Salary report</i> tahun 2024	Request for Approval of HPS, Evaluation Weight, Method, and Procurement Committee Salary report for 2024
67.	17/12/24	Permohonan Persetujuan Pemenang Pengadaan: - Renovasi kantor jaringan Makassar - Relokasi & <i>reinstatement</i> jaringan Makassar	Request for Approval of Procurement Winner: - Renovation of Makassar network office - Relocation & reinstatement of Makassar network
68.	18/12/24	- Permohonan Persetujuan HPS, Bobot Evaluasi, Metode, dan Panitia Pengadaan <i>Fund Transfer Pricing System</i> - Permohonan Persetujuan pemenang Pengadaan: - Layanan <i>Software Defined Wide Area Network (SD-WAN)</i> BI-RTGS di DRC <i>Local Warranty & Support Storage Netapp Learning Management System (LMS)</i>	- Request for Approval of HPS, Evaluation Weight, Method, and Procurement Committee Fund Transfer Pricing System - Request for Approval of Procurement Winner: - BI-RTGS Software Defined Wide Area Network (SD-WAN) service in DRC - Netapp Local Warranty & Support Storage - Learning Management System (LMS)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Tahun 2024

Di tahun 2024, Komite Pengadaan melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi yang telah ditetapkan

KOMITE JASA KONSULTASI

Komite Jasa Konsultasi merupakan komite yang memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif terkait hal-hal yang belum diatur atau terkait deviasi dari Standar Pedoman Operasional Jasa Konsultasi LPEI, sebagai salah satu bahan Direktur Eksekutif untuk mengambil keputusan dengan tetap memperhatikan *good judgment*, mitigasi risiko, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman

Komite Jasa Konsultasi LPEI melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif No. 0025/PDE/12/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Standar Pedoman Operasional untuk sembilan komite di bawah Direktur Eksekutif, Edisi 1 Revisi 4.

Struktur dan Komposisi Keanggotaan Komite

Struktur dan susunan keanggotaan Komite Jasa Konsultasi ditetapkan berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif No. 0021/PDE/09/2023 tanggal 26 September 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Eksekutif Executive Director
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi Jasa Konsultasi Managing Director of Institutional Relations
Sekretaris Komite (Non Anggota) Committee Secretary (Non-Member)	Kepala Divisi Jasa Konsultasi Head of Advisory Services Division
Anggota Tetap Permanent Member	• Direktur Pelaksana yang membidangi Manajemen Risiko dan/atau Chief of yang membidangi Manajemen Risiko • Chief of Keuangan dan Perencanaan Strategis • Chief of yang membidangi Transformasi Lembaga • Managing Director of Risk Management and/or Head of the Risk Management Division • Head of Finance and Strategic Planning • Head of in charge of Institutional Transformation
Narasumber Sources	• Direktur Pelaksana yang membidangi Pembiayaan • Direktur Pelaksana yang membidangi Hubungan Kelembagaan • Chief of yang membidangi Region • Chief of yang membidangi Internal Audit • Executive Risk Officer • Kepala Divisi dari Unit Kerja terkait • Managing Director of Financing • Managing Director of Business Development • Head of Region • Head of Internal Audit • Head of Reviewer Division • Head of Division of the relevant Work Unit
Alternate Keanggotaan Komite Jasa Konsultasi Alternate Membership of Advisory Services Committee	

Report on Implementation of Committees' Duties in 2024

Following is the implementation of Procurement Committees' work programs in 2024:

ADVISORY SERVICES COMMITTEE

The Advisory Services Committee is a committee that provides recommendations to the Executive Director regarding matters that have not been regulated or related to deviations from the Standard Guidelines for LPEI Advisory Services Operations, as one of the materials for the Executive Director to make decisions while still paying attention to good judgment, risk mitigation, and not contrary to applicable laws and regulations.

Committee Guidelines

Indonesia Eximbank's Advisory Services Committee performs its duties based on Executive Director Regulation No. 0021/PDE/09/2023 dated September 26, 2023, concerning Operational Guidelines Standards for nine committees under the Executive Director, Edition 1 Revision 2.

Structure and Composition of Committee Membership

The structure and membership composition of Advisory Services Committee are based on Executive Director Regulation No. 0021/PDE/09/2023 dated September 26, 2023, as follows:

Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Sesuai PMK No. 208/PMK.06/2021 – Pasal 11 In accordance with PMK No. 208/PMK.06/2021 - Article 11
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang Membidangi Keuangan dan Operasional. Managing Director of Finance and Operations.
Sekretaris Komite (Non Anggota) Committee Secretary (Non-Member)	1 (satu) Kepala Divisi dalam 1 (satu) Direktorat yang sama. 1 (one) Head of Division in the same Directorate.

Profil Komite

Profil ketua dan anggota komite, yang juga merangkap jabatan lain di LPEI, telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan

Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang Komite Jasa Konsultasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan persetujuan prinsip untuk Program Jasa Konsultasi pada tahun berjalan sesuai yang telah ditetapkan dalam RKAT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan mempertimbangkan biaya dan anggaran.
2. Menyetujui Program Jasa Konsultasi pada tahun berjalan yang belum dianggarkan dalam RKAT LPEI.
3. Menetapkan susunan Pelaksana Jasa Konsultasi melalui Keputusan Komite Jasa Konsultasi.
4. Menyetujui nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Program Jasa Konsultasi yang dilaksanakan.
5. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif terkait hal-hal yang belum diatur atau terkait deviasi dari Standar Pedoman Operasional Jasa Konsultasi LPEI, sebagai salah satu bahan Direktur Eksekutif untuk mengambil keputusan dengan tetap memperhatikan *good judgment*, mitigasi risiko, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Memberi keputusan untuk program Jasa Konsultasi, antara lain:
 - a. Desa Devisa;
 - b. *Coaching Program for New Exporters* (CPNE);
 - c. Program Kemitraan;
 - d. *Marketing Handholding*; atau
 - e. Kegiatan Rumah Ekspor (Fisik dan Digital).
7. Menentukan besaran Imbal Jasa Konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultasi.

Rapat Komite

Kebijakan Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Rapat Komite yang wajib dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua serta Direktur Pelaksana yang Membidangi Manajemen Risiko diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun dengan rincian pembahasan sebagai berikut:

1. Rapat pertama dengan agenda pembahasan Rencana Strategis Jasa Konsultasi untuk satu tahun mendatang termasuk alokasi anggarannya sesuai RKAT;
2. Rapat kedua dengan agenda monitoring terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Jasa Konsultasi yang disetujui pada rapat pertama beserta realisasi penggunaan anggaran;

Committee Profile

The profiles of the chairman and members of the committee, who also hold other positions in LPEI, are described in the Company's Profile Chapter.

Duties and Authorities

The duties and authorities of Advisory Services Committee are as follows:

1. Provide principle approval for Advisory Services Program in the current year as stipulated in Indonesia Eximbank Annual Budget Plan (RKAT), considering costs and budgets.
2. Approve the Advisory Services Program in the current year that is not budgeted in Indonesia Eximbank RKAT.
3. Determine the composition of Advisory Services Implementing Team through Advisory Services Committee Decisions.
4. Approve the Budget Cost Plan (RAB) for the implemented Consulting Services Program.
5. Provide recommendations to the Executive Director regarding matters that are not regulated or related to deviations from the Operational Guidelines for Indonesia Eximbank Advisory Services, as one of the materials for Executive Director to make decisions while considering good judgment, risk mitigation, and compliance with applicable regulations.
6. Make decisions for Advisory Services programs, including but not limited to:
 - a. Go Export Village;
 - b. Coaching Program for New Exporters (CPNE);
 - c. Partnership Program;
 - d. Marketing Handholding; or
 - e. Export House Activities (Physical and Digital).
7. Determining the amount of Consulting Fees in implementation of Consulting Services activities.

Meeting Committee

Policy on Decision Making in Meetings

Committee meetings that must be attended by the Chairman and Vice Chairman and Managing Director in Charge of Risk Management is organized at least 3 (three) times in one year with details of the discussion as follows:

1. The first meeting to discuss the Strategic Plan of Consultation Services for the upcoming year, including budget allocation according to the RKAT.
2. The second meeting to monitor the implementation of the approved Strategic Plan of Advisory Services from the first meeting along with the realization of budget utilization.

3. Rapat ketiga dengan agenda laporan hasil realisasi pelaksanaan Rencana Jasa Konsultasi selama tahun berjalan dan realisasi penggunaan anggaran.

Selain rapat-rapat yang telah disebutkan, rapat juga dapat diselenggarakan kapan saja jika dianggap perlu. Rapat ini dapat diadakan atas permintaan satu atau lebih anggota Komite, permintaan manajemen, atau usulan unit kerja terkait. Permintaan tersebut harus disertai dengan materi yang akan dibahas dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Komite.

Keputusan Komite Jasa Konsultasi diambil melalui mekanisme dan prosedur sebagai berikut:

1. Bertindak sebagai Sekretaris Komite adalah Kepala Unit Kerja yang membidangi Jasa Konsultasi. Fungsi Sekretaris Komite tersebut berlaku efektif pada saat proses Program Jasa Konsultasi.
2. Persetujuan izin prinsip Program Jasa Konsultasi dapat diajukan oleh unit kerja pengusul Jasa Konsultasi.
3. Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau daring (*online*).
4. Rapat tatap muka dapat dilakukan secara fisik atau melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
5. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
6. Syarat kuorum pengambilan keputusan Komite adalah dihadiri minimum setengah dari anggota tetap, terdiri dari:
 - a. Ketua dan/atau Wakil Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota tetap;
7. Seluruh keputusan Komite ditatausahakan dalam bentuk Risalah Rapat secara lengkap dan tertib oleh Sekretaris Komite.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Sepanjang tahun 2024, Komite Jasa Konsultasi telah mengadakan 3 (tiga) kali rapat, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

3. The third meeting to report on the realization results of implementation of the Advisory Services Plan during the current year and the realization of budget utilization.

In addition to the meetings mentioned above, meetings may also be held at any time if deemed necessary. These meetings may be held at the request of one or more members of Committee, at the request of management, or at the suggestion of relevant work units. Such requests must be accompanied by the materials to be discussed and coordinated with the Committee Secretary.

Decisions of Advisory Committee shall be made through the following mechanisms and procedures:

1. Acting as the Committee Secretary is the Head of Unit in charge of Advisory Services. The Committee Secretary function is effective during the Advisory Services Program process.
2. Approval of the principle permit for Advisory Services Program may be proposed by the proposing unit of Advisory Services.
3. Committee decision-making can be done through face-to-face or online meetings.
4. Face-to-face meetings can be conducted physically or through teleconference, video conference, or other electronic media facilities that allow all meeting participants to see and hear each other directly and participate in the meeting.
5. Decisions of the meeting must be made based on deliberation for consensus.
6. The quorum requirement for decision-making by the Committee is attended by a minimum of half of the permanent members, consisting of:
 - a. Chairman and/or Vice Chairman;
 - b. Secretary; and
 - c. Permanent members.
7. All decisions of the Committee are documented in the form of Meeting Minutes comprehensively and orderly by the Committee Secretary.

Meeting Frequency and Attendance Rate

Throughout 2024, the Advisory Services Committee has held 3 (three) meetings, with the attendance rate as follows:

Peserta Rapat Meeting Participants	Posisi di Komite Position on Committee	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Direktur Eksekutif Executive Director	Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	3	2	67%
Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis Managing Director of Business Development	Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Deputy Chairman concurrently Permanent Member	3	3	100%
Direktur Pelaksana Manajemen Risiko dan/ atau Chief of Risiko Bisnis Managing Director of Risk Management and/ or Chief of Business Risk	Anggota Tetap Permanent Member	3	3	100%
Chief of Keuangan, Tresuri, & Strategi Chief of Finance, Treasury, & Strategy	Anggota Tetap Permanent Member	3	3	100%
Chief of SDM, Hukum & Kepatuhan Chief of HC, Legal & Compliance	Anggota Tetap Permanent Member	3	3	100%
Kepala Divisi Jasa Konsultasi Head of Advisory Services Division	Sekretaris Komite (Non Anggota) Committee Secretary (Non-Member)	3	3	100%

Agenda Rapat

Sepanjang tahun 2024, Rapat Komite Jasa Konsultasi membahas berbagai agenda berikut:

Meeting Agenda

Throughout 2024, Advisory Services Committee meetings discussed the following agenda items:

No.	Tanggal Date	Agenda
1.	06 Maret 2024 March 06, 2024	Persetujuan pelaksanaan Desa Devisa Kerajinan Ketak Lombok Tengah, Desa Devisa Klaster Gula Aren Maros, Desa Devisa Gula Kelapa Banyumas, Pelaksanaan Program <i>Marketing Handholding</i> melalui Pameran Global Sourcing Expo (GSE) Sydney 2024, Pameran Achema Frankfurt 2024, dan <i>Business Matching</i> Periode bulan April – Juni 2024., dan Penambahan Jumlah Desa Devisa Charcoal IKN Nusantara Kalimantan Timur Persetujuan pelaksanaan Desa Devisa Kerajinan Ketak Lombok Tengah, Desa Devisa Klaster Gula Aren Maros, Desa Devisa Gula Kelapa Banyumas, Pelaksanaan Program <i>Marketing Handholding</i> melalui Pameran Global Sourcing Expo (GSE) Sydney 2024, Pameran Achema Frankfurt 2024, dan <i>Business Matching</i> Periode bulan April – Juni 2024., dan Penambahan Jumlah Desa Devisa Charcoal IKN Nusantara Kalimantan Timur
2.	16 Mei 2024 May 16, 2024	Persetujuan Pelaksanaan Program <i>Marketing Handholding</i> Tahun 2024, Pelaksanaan CPNE Sumatera Utara, Riau, DI Yogyakarta, Bali, NTB, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan, dan Program Desa Devisa Tahun 2024 Persetujuan Pelaksanaan Program <i>Marketing Handholding</i> Tahun 2024, Pelaksanaan CPNE Sumatera Utara, Riau, DI Yogyakarta, Bali, NTB, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan, dan Program Desa Devisa Tahun 2024
3.	31 Desember 2024 December 31, 2024	Penyampaian Laporan Hasil Realisasi Pelaksanaan Rencana Jasa Konsultasi dan Persetujuan Reklasifikasi dan Penggunaan GL Consultation Service untuk Aktivitas Operasional Pengembangan Digital Platform. Penyampaian Laporan Hasil Realisasi Pelaksanaan Rencana Jasa Konsultasi dan Persetujuan Reklasifikasi dan Penggunaan GL Consultation Service untuk Aktivitas Operasional Pengembangan Digital Platform.

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Tahun 2024

Komite Jasa Konsultasi melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Peraturan Direktur Eksekutif No. 0025/PDE/12/2024. Selama tahun 2024 Komite Jasa Konsultasi telah mengadakan rapat sebanyak tiga (3) kali dimana setiap keputusan rapat dituangkan dalam Risalah Rapat Komite Jasa Konsultasi yang ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir. Risalah Rapat didokumentasikan dan dikelola oleh Sekretaris Komite.

KOMITE PEMBIAYAAN

Komite Pembiayaan adalah komite yang memiliki wewenang untuk memutus fasilitas nasabah yang terdiri dari Komite Pembiayaan – Bisnis dan Komite Pembiayaan – *Special Asset Management* (SAM).

Pedoman Komite

Pembentukan serta pelaksanaan tugas Komite Pembiayaan LPEI pada periode ini mengacu pada sejumlah regulasi yang berlaku, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

1. Komite Pembiayaan Bisnis dan Komite Spesial Aset Management segmen Komersial merujuk pada:
 - a. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0025/PDE/12/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di bawah Direktur Eksekutif 2024.
2. Komite Pembiayaan segmen Penugasan Khusus Ekspor UKM berorientasi ekspor merujuk pada:
 - a. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0015/PDE/08/2022 tanggal 9 Agustus 2022 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di bawah Direktur Eksekutif Edisi 1
 - b. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0021/PDE/09/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di bawah Direktur Eksekutif Edisi 1 Revisi 2.
 - c. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0030/PDE/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di bawah Direktur Eksekutif Revisi 1.
3. Komite Pembiayaan segmen *Supply Chain Financing* merujuk pada:
 - a. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0015/PDE/08/2022 tanggal 9 Agustus 2022 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di bawah Direktur Eksekutif Edisi 1
 - b. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0021/PDE/09/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di bawah Direktur Eksekutif Edisi 1 Revisi 2.

Unit Kerja dalam Pengambilan Keputusan Komite Pembiayaan

Peraturan Direktur Eksekutif No. 0025/PDE/12/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Standar Pedoman Operasional

Report on Implementation of Committees' Duties in 2024

The Advisory Services Committee performs its duties and responsibilities in accordance with the Regulation of Executive Director No. 0025/PDE/12/2024. During 2024 the Advisory Services Committee has held three (3) meetings where each meeting decision is set out in the Minutes of the Advisory Services Committee Meeting signed by all participants present. The Meeting Minutes are documented on and managed by the Secretary of the Committee.

FINANCING COMMITTEE

The Financing Committee is a committee that has the authority to decide on customer facilities consisting of the Financing Committee - Business and the Financing Committee - Special Asset Management (SAM).

Committee Guidelines

The formation and implementation of Indonesia Eximbank Financing Committee's duties during this period refer to a number of applicable regulations, as explained below:

1. The Business Financing Committee and Special Asset Management Committee for the Commercial segment refer to:
 - a. Executive Director Regulation No. 0025/PDE/12/2024 dated December 18, 2024, regarding the Operational Guidelines Standards for Nine Committees under the Executive Director 2024.
2. The Financing Committee for the Special Assignment Export SMEs segment oriented towards exports refers to:
 - a. Executive Director Decision No. 0089/KDE/10/2021 dated October 26, 2021, regarding Members of Financing Committee for Special Assignment Export Programs in Support of the Export-oriented SME Sector.
 - b. MPO 0002/CEO/03/2022 dated March 24, 2022, regarding the Financing Committee.
 - c. Executive Director Regulation No. 0015/PDE/08/2022 dated August 9, 2022, regarding the Operational Guidelines Standards for Nine Committees under the Executive Director.
3. Supply Chain Financing Committee refers to:
 - a. Executive Director Regulation No. 0015/PDE/08/2022 dated August 9, 2022 on Standard Operational Guidelines of Nine Committees under the Executive Director 1st Edition
 - b. Executive Director Regulation No. 0021/PDE/09/2023 dated September 26, 2023 on Standard Operational Guidelines of Nine Committees under the Executive Director 1st Edition Revision 2.

Work Unit Decision Making In Financing Committee

The Executive Director Regulation No. 0025/PDE/12/2024 dated December 18, 2024, regarding the Operational

untuk sembilan komite di bawah Direktur Eksekutif, menetapkan unit kerja yang berperan dalam pengambilan keputusan Komite Pembiayaan sebagai berikut:

1. Unit Kerja Pengusul/Pengelola, terdiri dari:
 - a. Unit Kerja yang memiliki fungsi mengelola Fasilitas (Konvensional dan Syariah) Fasilitas yang dicakup meliputi Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi.
 - b. Unit Kerja yang memiliki fungsi mengelola fasilitas untuk Bank Line dan NBFI Line.
 - c. Unit Kerja yang memiliki fungsi mengelola klaim.
 - d. Penyedia Jasa Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah (*Loan at Risk*) yang ditunjuk oleh LPEI.
2. Unit Kerja yang membidangi Fungsi Analisa Risiko (*Reviewer*) adalah unit yang melakukan fungsi *Review*, sekaligus sebagai Sekretaris Komite Pembiayaan.

Struktur dan Komposisi Keanggotaan Komite

Struktur keanggotaan Komite Pembiayaan merujuk pada Peraturan Direktur Eksekutif No. 0025/PDE/12/2024 adalah sebagai berikut:

Komite Pembiayaan – Bisnis (KP Bisnis)

Struktur dan Keanggotaan Komite Pembiayaan Bisnis (termasuk Komite Pembiayaan untuk Penugasan Khusus Ekspor segmen UKM berorientasi ekspor dan Komite Pembiayaan segmen *Supply Chain Financing*).

1. KP Bisnis I (Limit > Rp500 Miliar)

Fungsi Bisnis Business Function
1. Direktur Pelaksana yang membidangi Bisnis. Managing Director in charge of Business 2. Direktur Pelaksana yang membidangi Pengembangan Bisnis. Managing Director in charge of Business Development 3. Direktur Pelaksana yang membidangi Keuangan, Operasional dan IT (khusus untuk proposal Bank Line/NBFI Line). Managing Director in charge of Finance, Operations and IT (specifically for Bank Line/NBFI Line proposals) 4. Chief of yang membidangi Wilayah. Chief of Regions. 5. Eksekutif Business Officer Executive Business Officer

2. KP Bisnis II (Limit > Rp15 Miliar dan ≤ Rp500 Miliar)

Fungsi Bisnis Business Function
1. Direktur Pelaksana yang membidangi Bisnis. Managing Director in charge of Business 2. Direktur Pelaksana yang membidangi Pengembangan Bisnis. Managing Director in charge of Business Development 3. Direktur Pelaksana yang membidangi Keuangan, Operasional dan IT (khusus untuk proposal Bank Line/NBFI Line). Managing Director in charge of Finance, Operations and IT (specifically for Bank Line/NBFI Line proposals) 4. Chief of yang membidangi Wilayah. Chief of Regions. 5. Eksekutif Business Officer Executive Business Officer

Guidelines Standards for Nine Committees under the Executive Director, has stipulated the units involved in the decision-making of Financing Committee as follows:

1. Proposer/Managing Work Unit, consisting of:
 - a. Working Unit that has the function of managing Facilities (Conventional and Sharia) Facilities covered include Financing, Guarantee, and Insurance.
 - b. Working Unit that has the function of managing facilities for Bank Line and NBFI Line.
 - c. Working Unit that has the function of managing claims.
 - d. Service Provider of Troubled Financing Management (*Loan at Risk*) appointed by Indonesia Eximbank.
2. The Work Unit in charge of Risk Analysis Function (*Reviewer*) is the unit that performs the Review function, as well as the Secretary of the Financing Committee.

Structure and Composition of Committee Membership

The structure and membership of Financing Committee, as stipulated in Executive Director Regulation No. 0025/PDE/12/2024 are as follows:

Financing Committee Structure - Business (FC Business)

Structure and Membership of Business Financing Committee (including the Financing Committee for Special Export Assignment for Export-Oriented SMEs segment and the Supply Chain Financing segment)

1. FC Business I (Limit > Rp500 Billion)

Fungsi Risiko Risk Function
1. Direktur Eksekutif. Executive Director. 2. Direktur Pelaksana yang membidangi Manajemen Risiko dan Kredit. Managing Director in charge of Risk and Credit Management. 3. Direktur Pelaksana yang membidangi Keuangan, Operasional dan IT (khusus untuk proposal Bank Line/NBFI Line). Managing Director in charge of Finance, Operations and IT (specifically for Bank Line/NBFI Line proposals) 4. Chief of yang membidangi Manajemen Risiko dan Kredit. Chief of Risk and Credit Management. 5. Eksekutif Business Officer Executive Business Officer

2. FC Business II (Limit > Rp15 Billion and ≤ Rp500 Billion)

Fungsi Risiko Risk Function
1. Direktur Pelaksana yang membidangi Manajemen Risiko dan Kredit. Managing Director in charge of Risk and Credit Management. 2. Direktur Pelaksana yang membidangi Keuangan, Operasional dan IT (khusus untuk proposal Bank Line/NBFI Line). Managing Director in charge of Finance, Operations and IT (specifically for Bank Line/NBFI Line proposals) 3. Chief of yang membidangi Manajemen Risiko dan Kredit. Chief of Risk and Credit Management. 4. Eksekutif Business Officer Executive Business Officer

3. KP Bisnis III (Limit ≤ Rp15 Miliar)

Fungsi Bisnis Business Function
- Chief of yang membidangi Wilayah. Chief of Regions. - Kepala Divisi unit kerja pengusul atau pengelola Division Head of Proposing or Managing Unit. - Kepala Divisi unit kerja bisnis selain pengusul atau pengelola Division Head of Business Unit other than Proposing or Managing Unit. - Kepala Divisi yang membidangi produk atau asuransi Division Head of Product or Insurance. - Eksekutif Business Officer Executive Business Officer

3. FC Business III (Limit ≤ Rp15 Billion)

Fungsi Risiko Risk Function
- Chief of yang membidangi Manajemen Risiko dan Kredit. Chief of Risk and Credit Management. - Eksekutif Business Officer Executive Business Officer

4. KP SAM I (Limit > Rp500 Miliar)

Fungsi Bisnis Business Function
- Direktur Pelaksana yang membidangi Bisnis. Managing Director in charge of Business - Direktur Pelaksana yang membidangi Pengembangan Bisnis. Managing Director in charge of Business Development - Direktur Pelaksana yang membidangi Keuangan, Operasional dan IT (khusus untuk proposal Bank Line/NBFI Line). Managing Director in charge of Finance, Operations and IT (specifically for Bank Line/NBFI Line proposals) - Chief of yang membidangi Wilayah. Chief of Regions. - Eksekutif Business Officer Executive Business Officer

4. FC Business I (Limit > Rp500 Billion)

Fungsi Risiko Risk Function
- Direktur Eksekutif. Executive Director. - Direktur Pelaksana yang membidangi Manajemen Risiko dan Kredit. Managing Director in charge of Risk and Credit Management. - Direktur Pelaksana yang membidangi Keuangan, Operasional dan IT (khusus untuk proposal Bank Line/NBFI Line). Managing Director in charge of Finance, Operations and IT (specifically for Bank Line/NBFI Line proposals) - Chief of yang membidangi Manajemen Risiko dan Kredit. Chief of Risk and Credit Management. - Eksekutif Business Officer Executive Business Officer

5. KP SAM II (Limit ≤ Rp500 Miliar)

Fungsi Bisnis Business Function
- Direktur Pelaksana yang membidangi Bisnis. Managing Director in charge of Business - Direktur Pelaksana yang membidangi Pengembangan Bisnis. Managing Director in charge of Business Development - Direktur Pelaksana yang membidangi Keuangan, Operasional dan IT (khusus untuk proposal Bank Line/NBFI Line). Managing Director in charge of Finance, Operations and IT (specifically for Bank Line/NBFI Line proposals) - Chief of yang membidangi Wilayah. Chief of Regions. - Eksekutif Business Officer Executive Business Officer

5. FC Business I (Limit < Rp500 Billion)

Fungsi Risiko Risk Function
- Direktur Pelaksana yang membidangi Manajemen Risiko dan Kredit. Managing Director in charge of Risk and Credit Management. - Direktur Pelaksana yang membidangi Keuangan, Operasional dan IT (khusus untuk proposal Bank Line/NBFI Line). Managing Director in charge of Finance, Operations and IT (specifically for Bank Line/NBFI Line proposals) - Chief of yang membidangi Manajemen Risiko dan Kredit. Chief of Risk and Credit Management. - Eksekutif Business Officer Executive Business Officer

Profil Komite

Profil ketua dan anggota komite pembiayaan, yang juga merangkap jabatan lain di LPEI, telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan.

Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- Melakukan pengambilan keputusan atas proposal:
 - Pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan treasuri serta NBFI Line, Bank Line, Treasury Line dan Penugasan Khusus termasuk di dalamnya penetapan *account strategy* dan/atau mengubah struktur fasilitas;

Committee Profile

The profiles of the chairman and members of the financing committee, who also hold other positions at LPEI, are described in other positions in LPEI, have been described in the Company Profile chapter.

Duties and Authorities

The duties and authorities of the Financing Committee are as follows:

- Making decisions on proposals related to:
 - Financing, guarantees, insurance, treasury, as well as Non-Bank Financial Institution lines, Bank Lines, Treasury Lines, and Special Assignments including the determination of account strategy and/or changing the facility structure;

- b. Upaya penyelamatan dan/atau penyelesaian aset bermasalah pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan tresuri serta Non Bank Financial Institution line, Bank Line, Treasury Line dan Penugasan Khusus;
 - c. Pembiayaan nasabah *performing financing* yang mengalami kesulitan pembayaran kewajiban;
 - d. Pengurangan dan/atau penghapusan tunggakan bunga/imbal hasil pembiayaan, denda/*ta'widh*, dan/atau biaya lain dalam penyelamatan/penyelesaian pembiayaan bermasalah;
 - e. Permohonan penghentian perhitungan bunga/ imbal hasil pembiayaan, denda/*ta'widh*, dan/atau biaya lain dalam penyelesaian Pembiayaan Bermasalah; dan/atau
 - f. Pembayaran klaim.
2. Melakukan pengambilan keputusan atas proposal penetapan tingkat kualitas aktiva produktif (kolektabilitas), dalam hal penetapan dilakukan secara manual.
 3. Melakukan pengambilan keputusan atas imbalan Pembiayaan terkait Fasilitas Penugasan Khusus apabila tidak ditetapkan melalui Keputusan Menteri.
 4. Menentukan Global Account Manager (GAM).
 5. Dalam hal menghindari terjadinya *concentration risk*, maka GAM akan mengusulkan penentuan grup limit kepada KP-Bisnis I dalam bentuk free format dan akan di-review oleh unit kerja fungsi reviewer.
 6. Melakukan pengambilan keputusan atas pembebanan biaya-biaya (dana talangan/ tagihan lain-lain) yang tidak dapat dipenuhi Nasabah pada waktunya, seperti biaya penutupan asuransi barang agunan, biaya Notaris/ PPAT dan/atau Konsultan Hukum, biaya penilaian agunan, dan biaya-biaya terkait lainnya; yang akan dibebankan pada rekening pinjaman Nasabah (dalam rangka pengamanan LPEI). Biaya-biaya tersebut dapat dibebankan sepihak oleh LPEI pada pos biaya dan ongkos dan selanjutnya Unit Kerja Pengusul/Pengelola dimaksud harus melakukan penagihan dan penyelesaian kewajiban tersebut kepada Nasabah.
 7. Penetapan penggunaan KAP, KJPP, Notaris/PPAT, konsultan hukum, konsultan manajemen, balai lelang apabila diperlukan.
 8. Komite Pembiayaan dapat menetapkan strategi penggunaan konsultan hukum. Penentuan nama konsultan hukum yang digunakan ditentukan oleh Unit Kerja yang membidangi hukum.

Rapat Komite

Kebijakan Pengambilan Keputusan dalam Rapat Tata Kerja Pengambilan Keputusan Komite Pembiayaan Bisnis dan Komite Special Asset Management segmen Komersial

- b. Efforts to rescue and/or to settle nonperforming assets of Financing, guarantees, insurance, treasury, as well as Non-Bank Financial Institution lines, Bank Lines, Treasury Lines, and Special Assignments;
 - c. Performing financing for performing financing customers experiencing difficulty in meeting obligations;
 - d. Reduction and/or elimination of arrears of interest/ profit-sharing of Financing, fines/ *ta'widh*, and/or other costs in rescuing/resolving troubled financing;
 - e. Requests for the cessation of interest/profit sharing calculations of Financing, fines/*ta'widh*, and/or other costs in settling Troubled Financing; and/or
 - f. Payment of claims.
2. Making decisions on the determination of the level of quality of productive assets (collectability), in case the determination is done manually.
 3. Making decisions on the remuneration of Financing related to Special Assignment Facilities if not determined through a Ministerial Decree.
 4. Determining the Global Account Manager (GAM)
 5. In terms of avoiding concentration risk, then GAM will propose the determination of group limit to KP-Business I in a free format and will be reviewed by the reviewer function work unit.
 6. Making decisions on the imposition of costs (bailout funds / other bills) that cannot be fulfilled by the Customer on time, such as can not be fulfilled by the Customer on time, such as the cost of cost of closing collateral insurance, Notary / PPAT fees, and/or Legal Consultants, collateral valuation fees. and/or Legal Consultant fees, collateral valuation fees, and other related costs; which will be charged to the Customer's Customer's loan account (in order to secure LPEI). Such costs may be charged unilaterally by LPEI in the by LPEI in the post of fees and charges and then the Work Unit of the said The Proposer/Manager's Work Unit must carry out billing and settlement of such obligation to Customer.
 7. Determination of the use of KAP, KJPP, Notary/PPAT, legal consultant, management consultant, auction house if necessary.
 8. The Financing Committee may determine the strategy for strategy for the use of legal counsel. Determination of the name of the legal consultant used is determined by the Work Unit in charge of legal in charge of law.

Committee Meeting

Policy on Decision Making in Meetings

The Financing Committee holds meetings regularly or as needed. The mechanism for conducting meetings to make decisions is as follows:

Recommending Committee

Recommending Committee adalah suatu forum yang dilakukan untuk membahas proposal pembiayaan dan/atau proposal penjaminan dan/atau proposal asuransi yang akan diusulkan kepada Komite Pembiayaan yang beranggotakan dan dihadiri oleh Unit Kerja Pengusul/Pengelola, Unit Kerja Analisa Risiko Pembiayaan, serta dapat mengundang Unit Kerja Hukum (terkait aspek hukum), Unit Kerja Operation (terkait aspek operasional), dan Unit Kerja Kepatuhan (terkait aspek kepatuhan) apabila diperlukan.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Sepanjang tahun 2024, Komite Pembiayaan telah mengadakan 275 (dua ratus tujuh puluh lima) rapat untuk segmen UKM dan 288 (dua ratus delapan puluh delapan) rapat untuk segmen Non-UKM, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Recommending Committee

Recommending Committee is a forum conducted to discuss financing proposals and/or guarantee proposals and/or insurance proposals that will be proposed to the Financing Committee consisting of and attended by the Proposer/ Manager Work Unit, the Financing Risk Analysis Work Unit, and may invite the Legal Work Unit (related to legal aspects), the Operations Work Unit (related to operational aspects), and the Compliance Work Unit (related to compliance aspects) if necessary.

Meeting Frequency and Attendance Rate

Throughout 2024, the Financing Committee has held 275 (two hundred seventy-five) meetings for the SME segment and 288 (two hundred and eighty eight) meetings for the Non-SME segment, with the following attendance rates as follows:

Tabel Frekuensi Rapat Komite Pembiayaan - Segmen Korporasi
 Table Frequency of Financing Committee Meetings - Corporate Segment

Keterangan Description	KP Bisnis I KP Business I	KP Bisnis II KP Business II	KP Bisnis III KP Business III	KP SAM I KP SAM I	KP SAM II KP SAM II
Pembiayaan Financing					
Korporasi Corporate					
Umum General	36	61	1	12	13
PKE PKE	6	7	-	-	-
Total	42	68	1	12	13

Total Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Pembiayaan - Segmen Korporasi
 Total Frequency and Attendance of Financing Committee Meetings - Corporate Segment

Komite Pembiayaan Korporasi Corporate Financing Committee	Jabatan Position	Total Total	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	%
Riyani T Direktur Eksekutif Executive Director	Fungsi Risiko Risk Function	52	52	100%
Dikdik Yustandi Direktur Pelaksana Bisnis Managing Director of Business	Fungsi Bisnis Business Function	57	57	100%
Anton Herdianto Direktur Pelaksana Bisnis Managing Director of Business	Fungsi Bisnis Business Function	17	17	100%
Anton Herdianto Plt Direktur Pelaksana Bisnis Acting Managing Director of Business	Fungsi Bisnis Business Function	40	40	100%
Anton Herdianto Chief of Wilayah Chief of Region	Fungsi Bisnis Business Function	38	38	100%
Maqin Norhadi Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis Managing Director of Business Development	Fungsi Bisnis Business Function	54	54	100%

Total Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Pembiayaan - Segmen Korporasi

Total Frequency and Attendance of Financing Committee Meetings - Corporate Segment

Komite Pembiayaan Korporasi Corporate Financing Committee	Jabatan Position	Total Total	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	%
Maqin Norhadi Plt Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis Acting Managing Director of Business Development	Fungsi Bisnis Business Function	56	56	100%
Agus Windiarto Direktur Pelaksana yang membidangi Hubungan Kelembagaan (DHK) (Khusus untuk proposal Bank Line/NBFI Line) Managing Director in charge of Institutional Relations (DHK) (Specifically for Bank Line/NBFI Line proposals)	Fungsi Bisnis Business Function	3	3	100%
Damianus L Hufat Executive Business Officer Executive Business Officer	Fungsi Bisnis Business Function	9	9	100%
Agus Windiarto Direktur Pelaksana yang membidangi Hubungan Kelembagaan (DHK) (Khusus untuk proposal Bank Line/NBFI Line) Managing Director in charge of Institutional Relations (DHK) (Specifically for Bank Line/NBFI Line proposals)	Fungsi Risiko Risk Function	11	11	100%
Anwar Harsono Plt. Direktur Pelaksana yang membidangi Hubungan Kelembagaan (DHK) (Khusus untuk proposal Bank Line/NBFI Line) Acting. Managing Director in charge of Institutional Relations (DHK) (Specifically for Bank Line/NBFI Line proposals)	Fungsi Risiko Risk Function	6	6	100%
Chesna F Anwar Direktur Pelaksana yang membidangi Hubungan Kelembagaan Managing Director in charge of Institutional Relations	Fungsi Risiko Risk Function	1	1	100%
Sam Malee Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit Managing Director of Risk & Credit Management	Fungsi Risiko Risk Function	88	88	100%
Titik Setiyowati Chief of Business Risk Chief of Business Risk	Fungsi Risiko Risk Function	112	112	100%
Farid Maruf Executive Risk Officer Executive Risk Officer	Fungsi Risiko Risk Function	11	11	100%
Firdaus Effendi Executive Risk Officer Executive Risk Officer	Fungsi Risiko Risk Function	1	1	100%
Sumanggam Simanjuntak Executive Risk Officer Executive Risk Officer	Fungsi Risiko Risk Function	4	4	100%
Roza Rita Retta Hutabarat Executive Risk Officer Executive Risk Officer	Fungsi Risiko Risk Function	2	2	100%
Heru Budiyanto Executive Risk Officer Executive Risk Officer	Fungsi Risiko Risk Function	3	3	100%
Irvansyah Setiady Kadiv Divisi Bisnis I Head of Business Division I	Fungsi Bisnis Business Function	3	3	100%

Tabel Frekuensi Rapat Komite Pembiayaan - Segmen UMBE & UMKM

Frequency of Financing Committee Meetings - UMBE & UMKM Segment

Keterangan Description	KP Bisnis I KP Business I	KP Bisnis II KP Business II	KP Bisnis III KP Business III	KP SAM I KP SAM I	KP SAM II KP SAM II	KP Klaim Asuransi I Insurance Claim I	KP Klaim Asuransi II Insurance Claim II
Pembiayaan Financing							
UMBE & UMKM							
Umum General	5	64	8	11	45	-	1
PKE	1	43	64	-	7	-	-
Total	6	107	72	11	52	0	1

Total Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Pembiayaan - Segmen UMBE & UMKM

Total Frequency and Attendance of Financing Committee Meetings - UMBE & UMKM Segment

Komite Pembiayaan UMBE & UMKM UMBE & UMKM Financing Committee	Jabatan Position	Total Total	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	%
Riyani T Direktur Eksekutif Executive Director	Fungsi Risiko Risk Function	12	12	100%
Dikdik Yustandi Direktur Pelaksana Bisnis Managing Director of Business	Fungsi Bisnis Business Function	62	62	100%
Anton Herdianto Direktur Pelaksana Bisnis Managing Director of Business	Fungsi Bisnis Business Function	19	19	100%
Anton Herdianto Plt Direktur Pelaksana Bisnis Acting Managing Director of Business	Fungsi Bisnis Business Function	39	39	100%
Anton Herdianto Chief of Wilayah Chief of Region	Fungsi Bisnis Business Function	80	80	100%
Maqin Norhadi Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis Managing Director of Business Development	Fungsi Bisnis Business Function	53	53	100%
Maqin Norhadi Plt Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis Acting Managing Director of Business Development	Fungsi Bisnis Business Function	43	43	100%
Agus Windiarso Direktur Pelaksana yang membidangi Hubungan Kelembagaan (DHK) (Khusus untuk proposal Bank Line/ NBFI Line) Managing Director in charge of Institutional Relations (DHK) (Specifically for Bank Line/NBFI Line proposals)	Fungsi Bisnis Business Function	9	9	100%
Anwar Harsono Plt. Direktur Pelaksana yang membidangi Hubungan Kelembagaan (DHK) (Khusus untuk proposal Bank Line/ NBFI Line) Acting Managing Director in charge of Institutional Relations (DHK) (Specifically for Bank Line/NBFI Line proposals)	Fungsi Bisnis Business Function	1	1	100%
Damianus L Hufat Executive Business Officer Executive Business Officer	Fungsi Bisnis Business Function	8	8	100%
Ninik Martini Executive Business Officer Executive Business Officer	Fungsi Bisnis Business Function	5	5	100%

Total Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Pembiayaan - Segmen UMBE & UMKM

Total Frequency and Attendance of Financing Committee Meetings - UMBE & UMKM Segment

Komite Pembiayaan UMBE & UMKM UMB & UMKM Financing Committee	Jabatan Position	Total Total	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	%
Agus Windiarto Direktur Pelaksana yang membidangi Hubungan Kelembagaan (DHK) (Khusus untuk proposal Bank Line/ NBFI Line) Managing Director in charge of Institutional Relations (DHK) (Specifically for Bank Line/NBFI Line proposals)	Fungsi Risiko Risk Function	16	16	100%
Anwar Harsono Plt. Direktur Pelaksana yang membidangi Hubungan Kelembagaan (DHK) (Khusus untuk proposal Bank Line/ NBFI Line) Acting Managing Director in charge of Institutional Relations (DHK) (Specifically for Bank Line/NBFI Line proposals)	Fungsi Risiko Risk Function	3	3	100%
Sam Malee Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit Managing Director of Risk & Credit Management	Fungsi Risiko Risk Function	141	141	100%
Titik Setiyowati Chief of Business Risk Chief of Business Risk	Fungsi Risiko Risk Function	112	112	100%
Farid Maruf Kepala Divisi Credit Reviewer II Head of Credit Reviewer II Division	Fungsi Risiko Risk Function	1	1	100%
Farid Maruf Executive Risk Officer Executive Risk Officer	Fungsi Risiko Risk Function	17	17	100%
Firdaus Effendi Executive Risk Officer Executive Risk Officer	Fungsi Risiko Risk Function	1	1	100%
Sumanggam Simanjuntak Executive Risk Officer Executive Risk Officer	Fungsi Risiko Risk Function	21	21	100%
Roza Rita Retta Hutabarat Executive Risk Officer Executive Risk Officer	Fungsi Risiko Risk Function	47	47	100%
Heru Budiyanto Executive Risk Officer Executive Risk Officer	Fungsi Risiko Risk Function	27	27	100%
Roza Rita Retta Hutabarat Pemegang Limit Individu Individual Limit Holder	Fungsi Risiko Risk Function	1	1	100%
Heru Budiyanto Pemegang Limit Individu Individual Limit Holder	Fungsi Risiko Risk Function	6	6	100%
Irvansyah Setiady Kadi Divisi Bisnis I Head of Business Division I	Fungsi Bisnis Business Function	4	4	100%
Bambang Sadnur Kepala Kantor Wilayah I Head of Regional Office I	Fungsi Bisnis Business Function	13	13	100%
Alexander Halim Kepala Kantor Area Medan Jakarta Head of Medan Jakarta Area Office	Fungsi Bisnis Business Function	9	9	100%
Ninik Martini Kepala Kantor Wilayah II Head of Regional Office II	Fungsi Bisnis Business Function	12	12	100%

Total Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Pembiayaan - Segmen UMBE & UMKM

Total Frequency and Attendance of Financing Committee Meetings - UMBE & UMKM Segment

Komite Pembiayaan UMBE & UMKM UMB & UMKM Financing Committee	Jabatan Position	Total Total	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	%
Irwan Prasetyawan Kepala Kantor Wilayah II Head of Regional Office II	Fungsi Bisnis Business Function	7	7	100%
Ahmad Bambang B Kepala Kantor Wilayah III Head of Regional Office III	Fungsi Bisnis Business Function	17	17	100%

Tabel Frekuensi Rapat Komite Penjaminan

Guarantee Committee Meetings Frequency

Keterangan Description	KP Bisnis I KP Business I	KP Bisnis II KP Business II	KP Bisnis III KP Business III	KP SAM I KP SAM I	KP SAM II KP SAM II
Penjaminan Guarantee					
Komersial Commercial	-	5	-	-	3
PEN	1	4	-	-	-
Total	1	9	-	-	3

Total Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Penjaminan

Frequency and Attendance of Guarantee Committee Meetings

Komite Penjaminan Guarantee Committee	Jabatan Position	Total Total	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	%
Riyani T Direktur Eksekutif Executive Director	Fungsi Risiko Risk Function	4	4	100%
Dikdik Yustandi Direktur Pelaksana Bisnis Managing Director of Business	Fungsi Bisnis Business Function	8	8	100%
Anton Herdianto Direktur Pelaksana Bisnis Managing Director of Business	Fungsi Bisnis Business Function	6	6	100%
Anton Herdianto Plt Direktur Pelaksana Bisnis Acting Managing Director of Business	Fungsi Bisnis Business Function	4	4	100%
Anton Herdianto Chief of Wilayah Chief of Region	Fungsi Bisnis Business Function	4	4	100%
Maqin Norhadi Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis Managing Director of Business Development	Fungsi Bisnis Business Function	13	13	100%
Maqin Norhadi Plt Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis Acting Managing Director of Business Development	Fungsi Bisnis Business Function	8	8	100%
Agus Windiarso Direktur Pelaksana yang membidangi Hubungan Kelembagaan (DHK) (Khusus untuk proposal Bank Line/NBFI Line) Managing Director in charge of Institutional Relations (DHK) (Specifically for Bank Line/NBFI Line proposals)	Fungsi Bisnis Business Function	1	1	100%
Damianus L Hufat Executive Business Officer Executive Business Officer	Fungsi Bisnis Business Function	1	1	100%



Total Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Penjaminan

Frequency and Attendance of Guarantee Committee Meetings

Komite Penjaminan Guarantee Committee	Jabatan Position	Total	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	%
Agus Windiarto Direktur Pelaksana yang membidangi Hubungan Kelembagaan (DHK) (Khusus untuk proposal Bank Line/NBFI Line) Managing Director in charge of Institutional Relations (DHK) (Specifically for Bank Line/NBFI Line proposals)	Fungsi Risiko Risk Function	2	2	100%
Sam Malee Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit Chief of Business Risk	Fungsi Risiko Risk Function	19	19	100%
Titik Setiyowati Chief of Business Risk Executive Risk Officer	Fungsi Risiko Risk Function	22	22	100%
Farid Maruf Executive Risk Officer Executive Risk Officer	Fungsi Risiko Risk Function	1	1	100%
Roza Rita Retta Hutabarat Executive Risk Officer Executive Risk Officer	Fungsi Risiko Risk Function	4	4	100%
Heru Budiyanto Executive Risk Officer Executive Risk Officer	Fungsi Risiko Risk Function	5	5	100%

Tabel Frekuensi Rapat Komite Asuransi

Insurance Committee Meeting Frequency

Keterangan Description	KP Bisnis I KP Business I	KP Bisnis II KP Business II	KP Bisnis III KP Business III	KP SAM I KP SAM I	KP SAM II KP SAM II	KP Klaim Asuransi I KP Insurance Claim I	KP Klaim Asuransi II KP Insurance Claim II
Asuransi Insurance							
Umum General	4	8	7	1	1	1	-
PKE	-	3	3	-	-	-	-
Total	4	11	10	1	1	1	0

Total Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Asuransi

Total Frequency and Attendance of Insurance Committee Meetings

Komite Asuransi Insurance Committee	Jabatan Position	Total Total	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	%
Riyani T Direktur Eksekutif Executive Director	Fungsi Bisnis Business Function	33	33	100%
Dikdik Yustandi Direktur Pelaksana Bisnis Managing Director of Business	Fungsi Bisnis Business Function	87	87	100%
Anton Herdianto Direktur Pelaksana Bisnis Managing Director of Business	Fungsi Bisnis Business Function	36	36	100%
Anton Herdianto Plt Direktur Pelaksana Bisnis Acting Managing Director of Business	Fungsi Bisnis Business Function	60	60	100%

Total Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Asuransi
 Total Frequency and Attendance of Insurance Committee Meetings

Komite Asuransi Insurance Committee	Jabatan Position	Total Total	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	%
Anton Herdianto Chief of Wilayah Chief of Region	Fungsi Bisnis Business Function	108	108	100%
Maqin Norhadi Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis Managing Director of Business Development	Fungsi Bisnis Business Function	84	84	100%
Maqin Norhadi Plt Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis Acting Managing Director of Business Development	Fungsi Bisnis Business Function	78	78	100%
Agus Windiarto Direktur Pelaksana yang membidangi Hubungan Kelembagaan (DHK) (Khusus untuk proposal Bank Line/NBFI Line) Managing Director in charge of Institutional Relations (DHK) (Specifically for Bank Line/ NBFI Line proposals)	Fungsi Bisnis Business Function	13	13	100%
Anwar Harsono Plt. Direktur Pelaksana yang membidangi Hubungan Kelembagaan (DHK) (Khusus untuk proposal Bank Line/NBFI Line) Acting Managing Director in charge of Institutional Relations (DHK) (Specifically for Bank Line/NBFI Line proposals)	Fungsi Bisnis Business Function	1	1	100%
Damianus L Hufat Executive Business Officer Executive Business Officer	Fungsi Bisnis Business Function	15	15	100%
Ninik Martini Executive Business Officer Executive Business Officer	Fungsi Bisnis Business Function	5	5	100%
Agus Windiarto Direktur Pelaksana yang membidangi Hubungan Kelembagaan (DHK) (Khusus untuk proposal Bank Line/NBFI Line) Managing Director in charge of Institutional Relations (DHK) (Specifically for Bank Line/ NBFI Line proposals)	Fungsi Risiko Risk Function	16	16	100%
Anwar Harsono Plt. Direktur Pelaksana yang membidangi Hubungan Kelembagaan (DHK) (Khusus untuk proposal Bank Line/NBFI Line) Acting Managing Director in charge of Institutional Relations (DHK) (Specifically for Bank Line/NBFI Line proposals) Line)	Fungsi Risiko Risk Function	6	6	100%
Sam Malee Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit Managing Director of Risk & Credit Management	Fungsi Risiko Risk Function	204	204	100%
Titik Setiyowati Chief of Business Risk Chief of Business Risk	Fungsi Risiko Risk Function	186	186	100%
Farid Maruf Kepala Divisi Credit Reviewer II Head of Credit Reviewer II Division	Fungsi Risiko Risk Function	1	1	100%
Farid Maruf Executive Risk Officer Executive Risk Officer	Fungsi Risiko Risk Function	22	22	100%
Firdaus Effendi Executive Risk Officer Executive Risk Officer	Fungsi Risiko Risk Function	1	1	100%
Sumanggam Simanjuntak Executive Risk Officer Executive Risk Officer	Fungsi Risiko Risk Function	25	25	100%
Roza Rita Retta Hutabarat Executive Risk Officer Executive Risk Officer	Fungsi Risiko Risk Function	52	52	100%



Total Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Asuransi

Total Frequency and Attendance of Insurance Committee Meetings

Komite Asuransi Insurance Committee	Jabatan Position	Total Total	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	%
Heru Budiyanto Executive Risk Officer Executive Risk Officer	Fungsi Risiko Risk Function	41	41	100%
Roza Rita Retta Hutabarat Pemegang Limit Individu Individual Limit Holder	Fungsi Risiko Risk Function	1	1	100%
Heru Budiyanto Pemegang Limit Individu Individual Limit Holder	Fungsi Risiko Risk Function	6	6	100%
Irvansyah Setiady Kadiv Divisi Bisnis I Head of Business Division I	Fungsi Bisnis Business Function	6	6	100%
Bambang Sadnur Kepala Kantor Wilayah I Head of Regional Office I	Fungsi Bisnis Business Function	7	7	100%
Ilham Mustafa Kepala Divisi Asuransi Head of Insurance Division	Fungsi Bisnis Business Function	7	7	100%

Tabel Frekuensi Rapat Komite Bank Line dan NBFI Line

Bank Line and NBFI Line Committee Meeting Frequency

Keterangan Description	KP Bisnis I KP Business I	KP Bisnis II KP Business II	KP Bisnis III KP Business III
Bank Line		25	36
NBFI Line		19	
Total	-	44	36

Total Frekuensi dan Kehadiran Rapat Bank Line

Total Frequency and Attendance of Bank Line Meetings

Komite Bank Line Bank Line Committee	Jabatan Position	Total Total	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	%
Riyani T Direktur Eksekutif Executive Director	Fungsi Risiko Risk Function	1	1	100%
Dikdik Yustandi Direktur Pelaksana Bisnis Managing Director of Business	Fungsi Bisnis Business Function	20	20	100%
Anton Herdianto Direktur Pelaksana Bisnis Managing Director of Business	Fungsi Bisnis Business Function	3	3	100%
Anton Herdianto Chief of Wilayah Chief of Region	Fungsi Bisnis Business Function	2	2	100%
Maqin Norhadi Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis Managing Director of Business Development	Fungsi Bisnis Business Function	2	2	100%
Agus Windiarto Direktur Pelaksana yang membidangi Hubungan Kelembagaan (DHK) (Khusus untuk proposal Bank Line/NBFI Line) Managing Director in charge of Institutional Relations (DHK) (Specifically for Bank Line/NBFI Line proposals)	Fungsi Bisnis Business Function	20	20	100%

Total Frekuensi dan Kehadiran Rapat Bank Line

Total Frequency and Attendance of Bank Line Meetings

Komite Bank Line Bank Line Committee	Jabatan Position	Total Total	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	%
Anwar Harsono Plt. Direktur Pelaksana yang membidangi Hubungan Kelembagaan (DHK) (Khusus untuk proposal Bank Line/NBFI Line) Acting Managing Director in charge of Institutional Relations (DHK) (Specifically for Bank Line/NBFI Line proposals)	Fungsi Bisnis Business Function	3	3	100%
Sam Malee Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit Managing Director of Risk & Credit Management	Fungsi Risiko Risk Function	24	24	100%
Titik Setiyowati Chief of Business Risk Chief of Business Risk	Fungsi Risiko Risk Function	25	25	100%
Firdaus Effendi Executive Risk Officer Executive Risk Officer	Fungsi Risiko Risk Function	16	16	100%
Sumanggam Simanjuntak Executive Risk Officer Executive Risk Officer	Fungsi Risiko Risk Function	20	20	100%
Emalia Tisnamisastra Kadiv FUT Head of FUT Division	Fungsi Bisnis Business Function	25	25	100%
Yoda Ditria Alt. Kadiv FUT Alt. Head of FUT Division	Fungsi Bisnis Business Function	11	11	100%

Total Frekuensi dan Kehadiran Rapat NBFI Line

Total Frequency and Attendance of NBFI Line Meetings

Komite NBFI Line NBFI Line Committee	Jabatan Position	Total Total	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	%
Dikdik Yustandi Direktur Pelaksana Bisnis Managing Director of Business	Fungsi Bisnis Business Function	7	7	100%
Anton Herdianto Direktur Pelaksana Bisnis Managing Director of Business	Fungsi Bisnis Business Function	6	6	100%
Anton Herdianto Plt. Direktur Pelaksana Bisnis Acting Managing Director of Business	Fungsi Bisnis Business Function	1	1	100%
Anton Herdianto Chief of Wilayah Chief of Region	Fungsi Bisnis Business Function	3	3	100%
Maqin Norhadi Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis Managing Director of Business Development	Fungsi Bisnis Business Function	4	4	100%
Maqin Norhadi Plt. Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis Acting Managing Director of Business Development	Fungsi Bisnis Business Function	2	2	100%
Agus Windiarto Direktur Pelaksana yang membidangi Hubungan Kelembagaan (DHK) (Khusus untuk proposal Bank Line/NBFI Line) Managing Director of Institutional Relations (DHK) (Specifically for Bank Line/NBFI Line proposals)	Fungsi Bisnis Business Function	8	8	100%



Total Frekuensi dan Kehadiran Rapat NBFi Line

Total Frequency and Attendance of NBFi Line Meetings

Komite NBFi Line NBFi Line Committee	Jabatan Position	Total Total	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	%
Anwar Harsono Plt. Direktur Pelaksana yang membidangi Hubungan Kelembagaan (DHK) (Khusus untuk proposal Bank Line/NBFi Line) Acting Managing Director of Institutional Relations (DHK) (Specifically for Bank Line/NBFi Line proposals)	Fungsi Bisnis Business Function	7	7	100%
Sam Malee Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit Managing Director of Risk & Credit Management	Fungsi Risiko Risk Function	18	18	100%
Setiyowati Chief of Business Risk Chief of Business Risk	Fungsi Risiko Risk Function	19	19	100%

Agenda Rapat

Sepanjang tahun 2024, Rapat Komite Pembiayaan membahas berbagai agenda berikut:

Meeting Agenda

Throughout 2024, Financing Committee Meetings discussed the following agenda items:

Keterangan NBFi Line Committee	KP Bisnis I KP Business I	KP Bisnis II KP Business II	KP Bisnis III KP Business III	KP SAM I KP SAM I	KP SAM II KP SAM II	KP Klaim Asuransi I KP Insurance Claim I	KP Klaim Asuransi II KP Insurance Claim II
Pembiayaan Financing							
A. Korporasi Corporation							
Umum General	36	61	1	12	13	-	-
PKE	6	7	-	-	-	-	-
B. UMBE & UMKM							
Umum General	5	64	8	11	45	-	1
PKE	1	43	64	-	7	-	-
Penjaminan Guarantee	-	-	-	-	-	-	-
Komersial Commercial	-	5	-	-	3	-	-
PEN	1	4	-	-	-	-	-
Asuransi Insurance							
Umum General	4	8	7	1	1	1	-
PKE	-	3	3	-	-	-	-
Bank Line	-	25	36	-	-	-	-
NBFi Line	-	19	-	-	-	-	-
Total	53	220	119	24	69	1	1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Tahun 2024

Di tahun 2024, Komite Pembiayaan telah melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi yang diemban. Komite Pembiayaan juga telah menyampaikan rekomendasi terkait pembiayaan di LPEI yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan yang diperlukan.

KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menetapkan kebijakan dan keputusan terkait kepegawaian LPEI, maka perlu mendapatkan persetujuan dari Komite Sumber Daya Manusia.

Pedoman Komite

Komite Sumber Daya Manusia, yang sebelumnya dikenal sebagai Komite Personalia, dibentuk berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif No. 0008/PDE/02/2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Komite Personalia. Komite ini bertugas memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif dalam merumuskan serta menyempurnakan kebijakan terkait pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM), termasuk strategi penerapan kebijakan SDM yang sejalan dengan sasaran dan arah strategis LPEI.

Dalam menjalankan tugasnya pada periode berjalan, Komite Sumber Daya Manusia berpedoman pada Peraturan Direktur Eksekutif No. 0021/PDE/09/2023 tanggal 26 September 2023 mengenai Standar Pedoman Operasional sembilan komite di bawah Direktur Eksekutif, Edisi 1 Revisi 2.

Struktur dan Komposisi Keanggotaan Komite

Struktur dan komposisi keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia ditetapkan berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif No. 0021/PDE/09/2023 sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Eksekutif Executive Director
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Head of yang membidangi Sumber Daya Manusia Head of Human Capital
Sekretaris Komite (Non Anggota) Committee Secretary (Non-Member)	Kepala Divisi Sumber Daya Manusia yang membidangi Rekrutmen dan Pengembangan Organisasi Head of Human Capital Division in charge of Recruitment and Organization Development
Anggota Tetap Permanent Member	Seluruh Direktur Pelaksana All Managing Directors
Narasumber Sources	Head of yang terkait dengan materi pembahasan Head of related to the subject matter
Alternate Keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia Alternate Membership of Human Capital Committee	
Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Sesuai PMK No. 208/PMK.06/2021 – Pasal 11 In accordance with PMK No. 208/PMK.06/2021 - Article 11
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Kepala Divisi di bawah naungan Head of yang membidangi Sumber Daya Manusia Head of Division in charge of Human Capital
Sekretaris Komite (non anggota) Committee Secretary (Non-Member)	Kepala Divisi di bawah naungan Head of yang membidangi Sumber Daya Manusia Head of Division in charge of Human Capital

Report on Implementation of Committees' Duties in 2024

In 2024, the Financing Committee has carried out duties in accordance with its responsibilities and functions in accordance with its responsibilities and functions. The Financing Committee has also submitted recommendations related to financing at LPEI that can be used as the basis for decision making and decision-making as well as the preparation of necessary policies.

HUMAN CAPITAL COMMITTEE

In determining policies and decisions related to LPEI's employment, it is necessary to obtain approval from the Human Resources Committee. from the Human Resources Committee.

Committee Guidelines

Human Capital Committee, formerly known as Personnel Committee, was established based on Executive Director Regulation No. 0008/PDE/02/2018 dated February 7, 2018, concerning Personnel Committee. This Committee is responsible for providing recommendations to the Executive Director in formulating and improving policies related to human capital development and management, including strategies for implementing human capital policies that align with the objectives and strategic direction of Indonesia Eximbank.

In carrying out its duties during the current period, Human Capital Committee is guided by Executive Director Regulation No. 0021/PDE/09/2023 dated September 26, 2023, regarding Operational Guidelines Standards for nine committees under the Executive Director, Edition 1 Revision 2.

Structure and Composition of Committee Membership

The structure and membership composition of Human Capital Committee based on Executive Director Regulation No. 0021/PDE/09/2023 are as follows:

Profil Komite

Profil ketua dan anggota komite pembiayaan, yang juga merangkap jabatan lain di LPEI, telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan.

Tugas dan Wewenang

Komite Sumber Daya Manusia dibentuk untuk mendukung Direktur Eksekutif dalam mengelola Sumber Daya Manusia, yang mencakup:

1. Penetapan strategi untuk mempertahankan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas;
2. Menjalankan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan Sumber Daya Manusia dan memantau serta melaporkan pelaksanaan atas program-program terkait Sumber Daya Manusia yang dijalankan;
3. Memastikan kebijakan Sumber Daya Manusia dilaksanakan dengan memperhatikan antara lain:
 - a. Kondisi keuangan dan anggaran sebagaimana diatur di dalam ketentuan yang berlaku;
 - b. Kewajaran dengan *peers group*;
 - c. Sasaran dan strategi jangka panjang Lembaga.
4. Menentukan pengembangan nilai-nilai Lembaga (*corporate values*) sebagai pedoman dalam membentuk budaya Lembaga (*corporate culture*) untuk mencapai visi dan misi LPEI.

Rapat Komite

Kebijakan Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Komite Sumber Daya Manusia menyelenggarakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 tahun atau setiap saat apabila dipandang perlu.

Berikut adalah tata cara pelaksanaan rapat Komite Sumber Daya Manusia untuk pengambilan keputusan:

1. Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau daring (*online*).
2. Rapat tatap muka dapat dilakukan secara fisik atau melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
3. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Syarat kuorum pengambilan keputusan Komite adalah dihadiri minimum anggota tetap yang terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua; dan
 - c. Lebih dari 50 (lima puluh) persen Anggota tetap.
5. Seluruh keputusan Komite ditatausahakan dalam bentuk Risalah Rapat secara lengkap dan tertib oleh sekretaris komite.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Sepanjang tahun 2024, Komite Sumber Daya Manusia telah mengadakan 12 (Dua Belas) kali rapat, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Committee Profile

The profile of chairman and members of human capital committee, who also hold other positions at Indonesia Eximbank, has been described in the Company Profile Chapter.

Duties and Authorities

Human Capital Committee was formed to support the Executive Director in managing human capital, which includes:

1. Establishing strategies to maintain and develop high-quality Human Capital.
2. Implementing matters related to Human Capital policies and monitoring and reporting on the implementation of Human Capital-related programs.
3. Ensuring that Human Human Capital policies are implemented, taking into account:
 - a. Financial conditions and budgets as regulated in applicable provisions.
 - b. Comparability with peer groups.
 - c. Long-term objectives and strategies of the institution.
4. Determining the development of institutional values (*corporate values*) as guidelines in shaping the institution's culture (*corporate culture*) to achieve the Indonesia Eximbank vision and mission.

Committee Meeting

Policy on Decision Making in Meetings

Human Capital Committee holds regular meetings at least 3 (three) times a year or whenever deemed necessary.

The procedures for conducting Human Capital Committee meetings for decision-making are as follows:

1. Committee decisions can be made through face-to-face or online meetings.
2. Face-to-face meetings can be conducted physically or through teleconferencing, video conferencing, or other electronic media that allow all meeting participants to see and hear each other directly and participate in the meeting.
3. Meeting decisions must be made based on consensus.
4. The quorum requirement for decision-making by the Committee is the attendance of a minimum of permanent members, consisting of:
 - a. Chairman;
 - b. Vice Chairman; and
 - c. More than 50 (fifty) percent of permanent members.
5. Meeting decisions must be made based on consensus.

Meeting Frequency and Attendance Rate

Throughout 2024, Human Capital Committee held 12 (twelve) meetings, with the following attendance rates:

Peserta Rapat Meeting Participants	Posisi di Komite Position on Committee	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Rijani Tirtoso	Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	12	12	100%
Yon Aarsal	Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	0	0	0%
T. Wahyu P. Wibowo	Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	6	6	100%
	Anggota Tetap Permanent Member	5	5	100%
Nury Sriandajani	Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	1	1	100%
Dikdik Yustandi	Anggota Tetap Permanent Member	6	6	100%
Agus Windiarso	Anggota Tetap Permanent Member	6	6	100%
Chesna F. Anwar	Anggota Tetap Permanent Member	6	6	100%
Maqin U. Norhadi	Anggota Tetap Permanent Member	11	11	100%
Sam Malee	Anggota Tetap Permanent Member	11	11	100%
Anwar Harsono	Anggota Tetap Permanent Member	5	5	100%
Anton Herdianto	Anggota Tetap Permanent Member	5	5	100%

Agenda Rapat

Sepanjang tahun 2024, Rapat Komite Sumber Daya Manusia membahas berbagai agenda berikut:

Meeting Agenda

Throughout 2024, Human Capital Committee meetings discussed the following agenda items:

No.	Tanggal Date	Agenda
1	13/03/2024	Persetujuan Prinsip Kinerja Pegawai LPEI Approval of Indonesia Eximbank Employee Performance Principles
2	23/04/2024	Presentasi Asuransi Kesehatan 2024 Health Insurance Presentation 2024
3	15/05/2024	- Pembahasan <i>Salary Review</i> 2024 - Pembahasan <i>Employee Loan</i> - Discussion of Salary Review 2024 - Discussion of Employee Loan
4	4/06/2024	- Pembahasan Paket Retention a.n Suharyanto - Pembahasan Insentif Kinerja a.n Rana Rezeki Najeges - Pembahasan Paket Pesangon a.n Marsinta Mutiara Marpaung - Pembahasan Tambahan Paket Pesangon Pensiun Dini a.n Nur Hira Windira - Discussion of Retention Package of Suharyanto - Discussion of Performance Incentive of Rana Rezeki Najeges - Discussion of Severance Pay Package of Marsinta Mutiara Marpaung - Discussion of Additional Early Retirement Severance Package of Nur Hira Windira
5	19/06/2024	- Pengajuan Usulan Penyesuaian Golongan Jabatan - Penerapan Struktur Remunerasi Pegawai yang baru - Submission of Job Class Adjustment Proposal - Implementation of the new Employee Remuneration Structure

No.	Tanggal Date	Agenda
6	09/07/2024	- Pengajuan Usulan Remunerasi <i>Credit Reviewer Development Program</i> (CRDP) - Usulan Talent Tahun 2024 - Penyempurnaan <i>Job Grading</i> Juni 2024 (Agenda lain-lain) - Submission of Credit Reviewer Development Program (CRDP) Remuneration Proposal - Talent Proposal for 2024 - Improvement of Job Grading June 2024 (Other Agenda)
7	15/10/2024	Pengajuan Usulan PDE Mutasi Submission of Mutation PDE Proposal
8	29/10/2024	- Pengisian posisi Kepala Divisi Funding & Treasury <i>Employee Exit</i> Report - Strategi Pelatihan Tahun 2025 - Pelaksanaan 4DX - Persetujuan Pemberian Insentif Kinerja Semester I/2024 (Agenda lain-lain) - Filling the position of Head of Funding & Treasury Division - Employee Exit Report - Training Strategy for 2025 - Implementation of 4DX - Approval of Provision of Performance Incentives for Semester I/2024 (Other Agenda)
9	5/11/2024	Penetapan Alokasi Anggaran Insentif Kinerja Semester I/2024 Determination of Budget Allocation for Performance Incentives for Semester I/2024
10	26/11/2024	- Metode dan Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Semester I/2024 - Persetujuan Pembayaran Insentif Kinerja Semester I/2024 - Method and Determination of Results of Employee Performance Assessment for Semester I/2024 - Approval of Payment of Performance Incentives for Semester I/2024
11	4/12/2024	Persetujuan Pemberian Insentif Kinerja Semester I/2024 – <i>Chief of LPEI & Direksi PT IEB PA</i> Approval of Provision of Performance Incentives for Semester I/2024 – Chief of Indonesia Eximbank & Board of Directors of PT IEB PA
12	10/12/2024	- Permohonan Persetujuan Usulan <i>Carry Over Block Leave</i> dan Cuti Tahunan Pegawai 2024 - Laporan Monitoring Kepegawaian (Pegawai Jatuh Tempo) - Pengisian Posisi <i>Vacant LPEI</i> - Request for Approval of Proposal for Carry Over Block Leave and Annual Leave for Employees in 2024 - Employee Monitoring Report (Employees Due) - Filling of Vacant Positions for Indonesia Eximbank

Sepanjang 2024, penguatan kompetensi anggota Komite Sumber Daya Manusia dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pengembangan keahlian. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Komite Sumber Daya Manusia, dengan rincian sebagai berikut:

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Tahun 2024

Di tahun 2024, Komite Sumber Daya Manusia telah melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi yang diemban. Komite Sumber Daya Manusia juga telah menyampaikan rekomendasi terkait sumber daya manusia di LPEI yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan yang diperlukan.

Throughout 2024, strengthening the competence of Committee members Human Resources Committee members through various training and and skill development. This activity aims to improve effectiveness in carrying out the duties and responsibilities of the Human Resources Committee, with details as follows:

Competency Development Program in 2024

Throughout 2024, strengthening the competencies of Human Capital Committee members has been carried out through various training and skill development programs. These activities aim to improve the effectiveness of Human Capital Committee members in carrying out their duties and responsibilities, with the following details:

SEKRETARIS DEWAN DIREKTUR

Dalam menjalankan fungsinya, Sekretaris Dewan Direktur berperan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi anggota Dewan Direktur, yang meliputi penyusunan kebijakan, penetapan keputusan strategis, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif dan anggota Manajemen.

Profil Sekretaris Dewan Direktur



T. Dyza R. A. Rochadi

Sekretaris Dewan Direktur
Secretary of Board of Directors

Usia Age	51 tahun 51 years old
Warga Negara Nationality	Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Magister Keuangan dan Perbankan, Universitas Indonesia, Jakarta – Indonesia (1999) • Sarjana Manajemen Keuangan, Universitas Trisakti, Jakarta – Indonesia (1995) • Master of Finance and Banking, University of Indonesia, Jakarta - Indonesia (1999) • Bachelor of Financial Management, Trisakti University, Jakarta - Indonesia (1995)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Peraturan Dewan Direktur No. 007/PDD/12/2020 Board of Director Decree No. 007/PDD/12/2020

SECRETARY OF BOARD OF DIRECTORS

In carrying out its functions, the Secretary of the Board of Directors plays a role in ensuring the smooth implementation of the main duties and functions of the members of the Board of Directors, which includes policy formulation, strategic decision making, and supervision of the implementation of the duties of the Executive Director and members of Management.

Secretary of Board of Directors Profile

Riwayat Karier Career Background	Karier di LPEI: - Corporate Secretary & Stakeholder Engagement Division Head (Feb 2024 - sekarang) - Kepala Divisi Sekretariat Lembaga (Jan 2022 - Jan 2024) - Kepala Divisi Office of the Board (Juli 2020 - Des 2021) - Kepala Divisi Trade Finance (April 2019 - Juni 2020) - Kepala Divisi Executive Office (Januari 2018 - April 2019) - Kepala Divisi Internasional (Agustus 2014 - Januari 2018) - Pj. Kepala Divisi Manajemen Risiko & Perencanaan Strategis (Agustus 2013 - Juli 2014) - Kepala Departemen MSDM (Januari 2011 - Juli 2013) - Kepala Departemen SDM (September 2009 - Desember 2011)	Carrier at Indonesia Eximbank: - Corporate Secretary & Stakeholder Engagement Division Head (Feb 2024 - present) - Head of Corporate Secretary Division (Jan 2022 - Jan 2024) - Head of Office of the Board Division (July 2020 - Dec 2021) - Head of Trade Finance Division (April 2019 - June 2020) - Head of Executive Office Division (January 2018 - April 2019) - Head of International Division (August 2014 - January 2018) - Acting Head of Risk Management & Strategic Planning Division (August 2013 - July 2014) - Head of Human Capital Department (January 2011 - July 2013) - Head of HC Department (September 2009 - December 2011)
	Karier di PT Bank Ekspor Indonesia (Persero): - Sr. Manager SDM dan Umum (September 2006 - Agustus 2009) - Kepala Departemen Hubungan Kelembagaan (November 2003 - September 2006) - RM Koresponden Bank - International (Juni 2000 - November 2003) - RM Koresponden Bank (September 1999 - Juni 2000)	Carrier at PT Bank Ekspor Indonesia (Persero): - Sr. Manager HC and General (September 2006 - August 2009) - Head of Corporate Secretary Department (November 2003 - September 2006) - RM Correspondent Bank - International (June 2000 - November 2003) - RM Correspondent Bank (September 1999 - June 2000)
	Karier di PT Bank Nusa International: - Unit Head of Business Development Unit (April 1999 - Agustus 1999) - Dept. Head Overseas Correspondent Banking (Januari 1999 - April 1999) - RM of Overseas Correspondent Banking Dept (Mei 1998 - Januari 1999) - Unit Head of International Banking Unit (Desember 1997 - Mei 1998) - Asst. Manager of International Banking Unit (September 1996 - Desember 1997) - Chief Assistant of Overseas Correspondent Banking & Trade Finance Unit (September 1995 - September 1996)	Carrier at PT Bank Nusa International: - Unit Head of Business Development Unit (April 1999 - August 1999) - Dept. Head Overseas Correspondent Banking (January 1999 - April 1999) - RM of Overseas Correspondent Banking Dept (May 1998 - January 1999) - Unit Head of International Banking Unit (December 1997 - May 1998) - Asst. Manager of International Banking Unit (September 1996 - December 1997) - Chief Assistant of Overseas Correspondent Banking & Trade Finance Unit (September 1995 - September 1996)
	Rangkap Jabatan Concurrent Positions Kepala Divisi Communication and Stakeholders Engagement LPEI Head of Communication and Stakeholder Engagement Division, Indonesia Eximbank	
Sertifikasi Certification	-	

Tugas dan Tanggung Jawab

Sekretaris Dewan Direktur menjadi kepala Unit Kerja Office of the Board yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi sekretariat Dewan Direktur, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung fungsi dan kegiatan Dewan Direktur;
- Mencatat dan mengadministrasikan rapat Dewan Direktur;
- Mengadministrasikan korespondensi dan laporan laporan Dewan Direktur serta komite-komite yang berada di bawah Dewan Direktur;
- Menjalankan fungsi penghubung (*liaison*) antara Dewan Direktur dengan fungsi-fungsi eksekutif LPEI;
- Memastikan tata kelola Dewan Direktur sesuai dengan prinsip tata kelola kelembagaan dan memenuhi aturan perundang-undangan; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Direktur.

Program Pengembangan Kompetensi Tahun 2024

Sepanjang 2024, Sekretaris Dewan Direktur secara aktif mengikuti berbagai program pengembangan yang dirancang untuk memperkuat kapasitas dan efektivitas dalam

Duties and Responsibilities

Secretary of Board of Directors serves as the Head of the Board Office Unit responsible for carrying out the secretariat functions of Board of Directors, with the following tasks and responsibilities:

- Conducting activities to support the functions and activities of Board of Directors.
- Recording and administering the Board of Directors meetings.
- Administering correspondence and reports of Board of Directors and committees under the Board of Directors.
- Acting as a liaison between Board of Directors and the executive functions of Indonesia Eximbank.
- Ensuring the governance of Board of Directors in accordance with institutional governance principles and compliance with statutory regulations.
- Performing other tasks assigned by the Board of Directors.

Competency Development Program in 2024

Throughout 2024, Secretary of Board of Directors actively participated in various development programs designed to strengthen capacity and effectiveness in performing his

menjalankan tugasnya. Rincian program yang telah diikuti dapat dilihat pada tabel berikut:

duties. Details of the programs attended can be seen in the following table:

Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Judul Program Title of Program	Penyelenggaraan Organization
1 - 2 Maret 2024 March 1 - 2, 2024	Harmoni Eksekusi dan Kolaborasi Transformasi (DE, DFO DAN DSL) Harmony of Execution and Transformation Collaboration (DE, DFO AND DSL)	Peopletech
29 Februari 2024 February 29, 2024	IHT Keprotokolan dan Kesekretariatan di Lingkungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia IHT Protocol and Secretariat in the Indonesian Export Financing Agency Environment	LPEI
4 April 2024 April 4, 2024	Sosialisasi Budaya Anti Korupsi dan Pencegahan Gratifikasi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Lembaga SMV (<i>Special Mission Vehicle</i>) atau BUMN Socialization of Anti-Corruption Culture and Prevention of Gratuities in Goods/Services Procurement within SMV (Special Mission Vehicle) Institutions or SOEs	LPEI
14 Agustus 2024 August 14, 2024	Strategi Anti-Fraud LPEI - Batch I Strategies Anti-Fraud LPEI - Batch I	LPEI
22 - 23 Agustus 2024 August 22 - 23, 2024	GRC Summit 2024	CRMS
28 Agustus 2024 28 August 2024	Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 Batch 5 Risk Management Recertification Briefing Level 6 Batch 5	Arfaidhams Secret
20 September 2024 September 20, 2024	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Batch 24 Risk Management Certification Exam Batch 24	LSPP

Pelaksanaan Tugas Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Sekretaris Dewan Direktur berperan aktif dalam mendukung kelancaran fungsi kepengurusan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta menjalankan tanggung jawabnya secara strategis, yang mencakup:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Direktur;
2. Menyelenggarakan rapat Dewan Direktur dan rapat/pertemuan antara Dewan Direktur dengan Menteri, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana maupun pihak-pihak terkait lainnya;
3. Mencatat dan mengadministrasikan rapat Dewan Direktur;
4. Mengadministrasikan korespondensi dan laporan-laporan Dewan Direktur serta komite-komite yang berada di bawah Dewan Direktur;
5. Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari komite-komite di bawah Dewan Direktur untuk keperluan Dewan Direktur;
6. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Direktur dan komite-komite yang berada di bawah Dewan Direktur;
7. Menjalankan fungsi penghubung (*liaison*) antara Dewan Direktur dengan fungsi-fungsi eksekutif LPEI; dan
8. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Direktur.

Implementation of Duties in 2024

Throughout 2024, the Secretary of the Board of Directors plays an active role in supporting the smooth functioning of the management, ensuring compliance with regulations, and carrying out its responsibilities strategically, which include:

1. Organizing secretarial administration activities within the Board of Directors;
2. Organizing Board of Directors meetings and meetings between the Board of Directors and the Minister, Executive Director, Managing Director and other related parties;
3. Recording and administering Board of Directors meetings;
4. Administering correspondence and reports of the Board of Directors and committees under the Board of Directors;
5. Collecting technical data from committees under the Board of Directors for the purposes of the Board of Directors;
6. Providing data/information required by the Board of Directors and committees under the Board of Directors;
7. Carrying out the function of liaison (*liaison*) between the Board of Directors and the executive functions of LPEI; and
8. Carrying out other duties determined by the Board of Directors.



SEKRETARIS LEMBAGA

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola, Sekretaris Lembaga (*Corporate Secretary*) memiliki peran strategis dalam memastikan komunikasi yang efektif antara Manajemen dan pemangku kepentingan. Selain menjalankan fungsi kepatuhan terhadap regulasi dan hukum, Sekretaris Lembaga LPEI juga bertugas menjaga transparansi serta kelancaran koordinasi dengan lembaga pemerintah, nonpemerintah, pemegang saham, dan pelaku pasar modal. Dengan perannya ini, Sekretaris Lembaga berkontribusi dalam memastikan keputusan Manajemen dapat diimplementasikan dengan baik serta mendukung keberlanjutan tata kelola yang bertanggung jawab.

Profil Sekretaris Lembaga



T. Wahyu Prihadi Wibowo

Sekretaris Lembaga
Corporate Secretary

Usia Age	59 tahun 59 years old
Warga Negara Nationality	Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	• MBA - Konstanz University of Applied Science Switzerland (2004) • Magister Management - SwissGerman University (2004) • S1 Social Philosophy - STF Driyarkara Jakarta (1991)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0024/KDE/08/2024 Executive Director's Decree No. 0024/KDE/08/2024

CORPORATE SECRETARY

As part of strengthening governance, Corporate Secretary plays a strategic role in ensuring effective communication between Management and stakeholders. In addition to performing regulatory and legal compliance functions, Indonesia Eximbank's Corporate Secretary is also responsible for maintaining transparency and smooth coordination with government and non-government institutions, shareholders, and capital market players. Through this role, Corporate Secretary contributes to ensuring that Management's decisions are properly implemented and supports the sustainability of responsible governance.

Corporate Secretary Profile

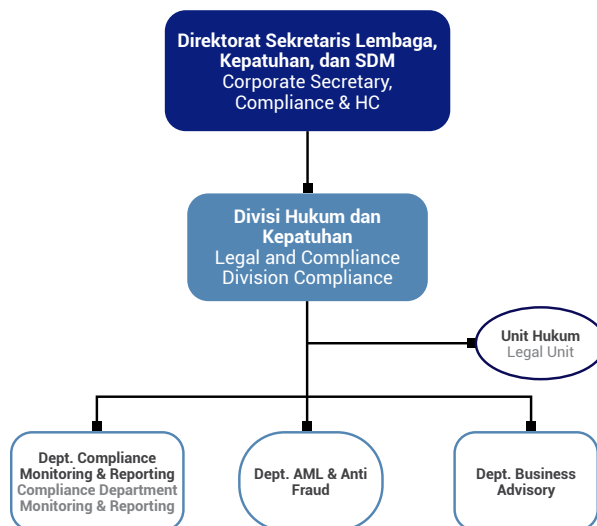
Riwayat Karier Career Background	• Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pelaksana Bidang Sekretariat Lembaga, Kepatuhan dan SDM, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (1 September 2024 – 28 Februari 2025); • Chief of Legal, Compliance and Human Resources, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank), (February 2020 – 31 Agustus 2024) • MD - Chief Learning and Development Officer, PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (2017 – 2020) • Executive Vice President, Head of Human Resources Business Partner and Employee Engagement, CIMB NIAGA (2011 -2017) • Human Capital Director, SINARMAS LAND (2010 – Des 2010) • Corporate Affairs Director, PAM LYONNAISE JAYA (member of Astra Infrastructure) (2004 – 2010) • Legal and Human Resources Director, ALLIANZ LIFE INDONESIA (2001 – 2004) • Human Resources General Manager, ALLIANZ LIFE INDONESIA (2001 – 2002) • Human Resources Manager, ASURANSI AXA INDONESIA (2000 – 2001) • Human Resources and International Service Personnel Administrator, GENERAL MOTORS INDONESIA (1997 – 2000) • Industrial Relations Officer, EXCELCOMINDO PRATAMA (1996 – 1997) • Acting Managing Director of Corporate Secretary, Compliance & HC, Indonesia Eximbank (September 1, 2024 – February 28, 2025); • Chief of Legal, Compliance and Human Resources, Indonesia Eximbank, (February 2020 – August 31, 2024) • MD - Chief Learning and Development Officer, PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (2017 – 2020) • Executive Vice President, Head of Human Resources Business Partner and Employee Engagement, CIMB NIAGA (2011 -2017) • Human Capital Director, SINARMAS LAND (2010 – Des 2010) • Corporate Affairs Director, PAM LYONNAISE JAYA (member of Astra Infrastructure) (2004 – 2010) • Legal and Human Resources Director, ALLIANZ LIFE INDONESIA (2001 – 2004) • Human Resources General Manager, ALLIANZ LIFE INDONESIA (2001 – 2002) • Human Resources Manager, ASURANSI AXA INDONESIA (2000 – 2001) • Human Resources and International Service Personnel Administrator, GENERAL MOTORS INDONESIA (1997 – 2000) • Industrial Relations Officer, EXCELCOMINDO PRATAMA (1996 – 1997)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pelaksana Bidang Sekretariat Lembaga, Kepatuhan dan SDM, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Acting Managing Director of Corporate Secretary, Compliance & HC, Indonesia Eximbank
Sertifikasi Certification	-

Struktur Organisasi Sekretaris Lembaga

Dalam struktur organisasi LPEI, Sekretaris Lembaga berperan langsung di bawah Direktur Eksekutif. Pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Direktur Eksekutif, yang menegaskan hubungan pelaporan secara langsung. Rincian posisi Sekretaris Lembaga dalam organisasi dapat dilihat pada bagan berikut:

Corporate Secretary Organizational Structure

In Indonesia Eximbank's organizational structure, Corporate Secretary reports directly to the Executive Director. Appointment and dismissal are carried out by the Executive Director, which confirms the direct reporting relationship. Details of Corporate Secretary position in the organization can be seen in the following chart:



Tugas dan Tanggung Jawab

Sekretaris Lembaga melaksanakan tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Memberikan informasi yang material dan relevan kepada Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur.
 - a. Sekretaris Lembaga mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur yang akurat dan dapat diandalkan;

Duties and Responsibilities

The Secretary of the Institute carries out duties and responsibilities responsibilities include:

1. Providing material and relevant information to Executive Director and Board of Directors.
 - a. The Secretary of the Institute coordinates the preparation and submission of accurate and reliable reports to the Executive Director and Board of Directors that are accurate and reliable;

- b. Laporan keuangan triwulanan, realisasi RKAT triwulanan, dan laporan keuangan tahunan disampaikan kepada Direktur Eksekutif tepat waktu. Sekretaris Lembaga mengoordinasikan penyampaian keuangan triwulanan, realisasi RKAT triwulanan, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah triwulan tersebut kepada Direktur Pelaksana. Sekretaris Lembaga mengoordinasikan penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan untuk disampaikan paling lambat 30 April tahun berikutnya;
 - c. Sekretaris Lembaga mengoordinasikan penyusunan laporan triwulanan dan tahunan yang akurat dan dapat diandalkan;
 - d. Sekretaris Lembaga mengoordinasikan penyampaian laporan manajemen bulanan, triwulanan dan tahunan sesuai jatuh tempo laporan yang berlaku;
 - e. Memutakhirkan materi informasi yang disajikan dalam laman I situs web LPEI dan media komunikasi daring LPEI secara berkala;
 - f. mengoordinasikan penyiapan dan penyediaan bahan-bahan untuk press release atas pernyataan dalam tingkatan Direksi sesuai kebutuhan LPEI;
 - g. Memberikan informasi yang dibutuhkan atas data atau *performance* dari LPEI dalam batas-batas yang terdapat dalam protokol penyampaian informasi;
 - h. Menyampaikan laporan dan informasi relevan lainnya kepada Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif secara tepat waktu.
2. Membantu Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur dalam pelaksanaan tata kelola lembaga yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs LPEI;
 - b. Penyampaian laporan kepada Kementerian Keuangan, Otoritas dan regulator secara tepat waktu.
 3. Menjalankan Tugas Sebagai Pejabat Penghubung.
 - a. Sekretaris Lembaga menyusun jadwal, mengorganisasikan dan/ atau mengoordinasikan rapat Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana, rapat Dewan Direktur, dan Rapat Pengesahan RKAT/ RJP;
 - b. Sekretaris Lembaga bertindak sebagai narahubung antara Lembaga dengan publik dan pemangku kepentingan LPEI.
 4. Sekretaris Lembaga menjalankan fungsi pelaksanaan dan pendokumentasian dokumen rapat Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif serta dokumen pelaporan Dewan Direktur:
 - a. Sekretaris Lembaga membuat, memelihara dan menyimpan risalah Rapat pengesahan RKAT dan RJP.
 - Risalah Rapat Pengesahan RKAT dan RJP paling sedikit memuat waktu, agenda, peserta, pendapat yang berkembang dalam rapat, dan keputusan rapat.
- b. Quarterly financial reports, quarterly RKAT realization, and annual financial reports are submitted to the Executive Director on time. The Secretary of the Institute coordinates the submission of quarterly finances, realization of quarterly RKAT, no later than 30 (thirty) days after the quarter to the Executive Director. The Secretary of the Institute coordinates the submission of annual financial statements that have been audited by the Public Accounting Firm and to be submitted no later than April 30 of the following year;
 - c. The Institute Secretary coordinates the preparation of accurate and reliable quarterly and annual reports;
 - d. The Secretary of the Institute coordinates the submission of monthly, quarterly and annual management reports in accordance with the applicable according to the applicable report due date;
 - e. Updating the information material presented LPEI website and online communication media; e. Updating the information material presented in the online communication media periodically;
 - f. Coordinating the preparation and provision of materials for press release on statement statements at the Board of Directors level as needed by LPEI;
 - g. Providing necessary information on data or performance of LPEI within the limits contained in the information delivery protocol. contained in the information delivery protocol;
 - h. Submitting reports and other relevant information to the Board of Directors and Executive Director in a timely.
2. Assist the Executive Director and Board of Directors in the implementation of institutional governance which includes:
 - a. Information disclosure to the public, including availability of information on the LPEI Website;
 - b. Submission of reports to the Ministry of Finance, Authority and regulators in a timely manner.
 3. Performing Duties as Liaison Officer.
 - a. The Secretary of the Institution prepares the schedule, organize and/or coordinate Executive Director and Managing Director meetings, Board of Board of Directors, and the RKAT / RJP Ratification Meeting;
 - b. The Secretary of the Institution acts as a contact person between the Institution and the public and stakeholders of stakeholders of LPEI.
 4. The Secretary of the Institution performs the function of implementing and documentation of Board of Director and Executive Director as well as Board of Director reporting documents Director:
 - a. The Secretary of the Institute makes, maintains and stores the minutes of the RKAT and RJP ratification meetings.
 - The minutes of the RKAT and RJP Ratification Meeting at least contain the time, agenda, participants, opinions developed in the meeting, and meeting decisions.

- Risalah Rapat Pengesahan RKAT dan RJP dimaksud ditandatangani oleh Ketua Dewan Direktur.
 - b. Sekretaris Lembaga mengoordinasikan penyusunan, pemeliharaan dan penyimpanan risalah rapat Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif:
 - Memastikan tersedianya Risalah Rapat Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif;
 - Mencantumkan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif pada risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut (bila ada)
 - Risalah rapat memuat hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya;
 - Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana menerima salinan risalah rapat Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif;
 - Validasi risalah rapat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah rapat dilaksanakan;
 - Risalah dari setiap rapat Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif disimpan di -oleh unit kerja yang membidangi kesekretariatan;
 - Risalah dari setiap rapat Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif dapat diakses oleh setiap anggota Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif.
5. Sekretaris Lembaga menyelenggarakan Program Pengenalan bagi anggota Dewan Direktur dan/atau Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana yang baru diangkat.

Program pengenalan meliputi :

- a. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola oleh LPEI;
- b. Gambaran mengenai LPEI yang berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
- c. Keterangan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk komite audit;
- d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan Program Pengembangan Kompetensi Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Sekretaris Lembaga terus meningkatkan kompetensi melalui berbagai program pengembangan. Beragam pelatihan dan kegiatan yang diikuti bertujuan untuk mengoptimalkan peran dan efektivitas dalam menjalankan tanggung jawab. Rincian program yang telah diikuti tercantum dalam tabel berikut:

- The minutes of the RKAT and RJP Ratification Meeting are signed by the Chairman of the Board of Directors.
 - b. The Secretary of the Institute coordinates the preparation, maintenance and storage of minutes of Board meetings Directors and Executive Directors:
 - Ensure the availability of Minutes of Board Meetings Directors and Executive Directors;
 - Include dissenting opinions (*dissenting opinions*) occurring in the meetings of the Board of Directors and Executive Director meetings in the minutes of the meeting along with reasons for such dissent (if any)
 - The minutes of the meeting shall contain the results of the evaluation of implementation of the previous meeting decisions;
 - The Board of Directors and Executive Director receive copy of the minutes of the meeting of the Board of Directors and Executive Director;
 - Validation of meeting minutes no later than 7 (seven) days after the meeting is held;
 - Minutes of each meeting of the Board of Directors and Executive Director are kept in -by the work unit in charge of secretarial affairs;
 - Minutes of each meeting of the Board of Directors and Executive Director meetings can be accessed by any member of the Board of Directors and Executive Director.
5. The Secretary of the Institution organizes an Introduction Program Program for newly appointed members of the Board of Directors and/or Executive Director and the newly appointed Managing Director.

The introduction program includes:

- a. Implementation of governance principles by LPEI;
- b. An overview of LPEI relating to objectives, nature and scope of activities, financial and operations, strategy, short-term and long-term business plans, competitive position, risks and and long-term business plans, competitive position, risks and other strategic issues;
- c. Information relating to delegated authority, internal and delegated authority, internal and external audits, system and internal control policies, including audit committee;
- d. Information regarding the duties and responsibilities of duties and responsibilities of the Board of Directors and Directors as well as matters that are not allowed.

Throughout 2024, the Secretary of the Institution continues to competencies through various development programs. The various trainings and activities participated in aimed at optimizing the role and effectiveness in carrying out responsibilities. carrying out responsibilities. Details of the programs that have been participated in are listed in the following table:

Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Judul Program Program Title	Penyelenggara Organizer
4 April 2024 April 4, 2024	Sosialisasi Budaya Anti Korupsi dan Pencegahan Gratifikasi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Lembaga SMV (<i>Special Mission Vehicle</i>) atau BUMN Socialization of "Anti-Corruption Culture and Prevention of Gratification in Procurement of Goods/Services in SMV Institutions or SOE	LPEI
1 - 2 Maret 2024 March 1 - 2, 2024	Harmoni Eksekusi dan Kolaborasi Transformasi (DE, DFO DAN DSL) Harmony of Execution and Collaboration of Transformation	Peopletch
17 Juli 2024 July 17, 2024	Komoditas dan Sektor Industri : Economic Outlook 2024 - The Indonesian Economic Impact Economic Outlook 2024 - The Indonesian Economic Impact	Moodys Analytics
6 - 7 Juni 2024 Juni 6 - 7, 2024	Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 Briefing of Risk Management Recertification Level 5	Arfaidhams
12 Juni 2024 Juni 12, 2024	Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Briefing of Risk Management Recertification Level 7	Garda
10 Juni 2024 Juni 10, 2024	Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 Briefing of Risk Management Recertification Level 6	Garda
5 - 6 Juli 2024 July 5 - 6, 2024	Senior Leader Workshop: Business Execution Strategy	LPEI

Pelaksanaan Tugas Tahun 2024

Di tahun 2024, Sekretaris Lembaga telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:

- Kegiatan Lembaga**, Berkolaborasi dengan mitra strategis dan berpartisipasi aktif dalam forum serta masyarakat melalui 74 kegiatan, sekaligus memperoleh wawasan berharga, dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.
- Keterbukaan Informasi**
 - Website LPEI**
 - Memperbaharui *website* LPEI dengan melengkapi fitur terbaru yaitu *chatbot* interaktif, yang memungkinkan kemudahan dalam mendapatkan informasi terkini seputar produk dan layanan LPEI.
 - Melengkapi fitur dengan menghadirkan webmail, dan telah menerima sebanyak 281 webmail yang telah diteruskan kepada unit kerja terkait.
 - Mendaftarkan *website* resmi LPEI (www.indonesiaeximbank.go.id) sebagai PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) dan telah tercatat sebagai PSE Lingkup Publik oleh Kementerian KOMINFO (Komunikasi dan Informatika).
 - Siaparan Pers**
 - Meningkatkan *engagement* dengan media nasional dan *homeless media* dengan melakukan kolaborasi dan *partnership* untuk meningkatkan jangkauan dan dampak komunikasi Lembaga.
 - Menerbitkan 36 siaran pers.
 - Media Sosial**
Mempublikasikan sebanyak 151 konten media sosial melalui *platform* Instagram akun resmi LPEI yang dirancang sebagai sarana penyampaian informasi Lembaga dan literasi ekspor

Implementation of Duties in 2024

In 2024, Corporate Secretary has carried out its duties and responsibilities in accordance with applicable regulations, including:

- Institutional Activities**, Collaborate with strategic partners and actively participated in forums and communities through 74 activities, while gaining and fulfill stakeholder expectations.
- Information Disclosure**
 - LPEI Website**
 - Updating the LPEI website by completing latest feature, an interactive chatbot, which , which makes it easy to obtain the latest information about LPEI products and services.
 - Completed the feature by presenting webmail, and received 281 webmails that have been forwarded to the relevant work units. have been forwarded to the relevant work units.
 - Registering LPEI's official website (www.indonesiaeximbank.go.id) as PSE (Electronic System Operator) and has received 281 webmails that have been forwarded to related work units. (Electronic System Operator) and has been registered as Public Scope PSE by the Ministry of KOMINFO (Communication and Information Technology).
 - Press Readiness**
 - Increase engagement with national media and homeless media by conducting collaborations and partnerships to increase the reach and impact of the Agency's communications.
 - Issued 36 press releases.
 - Social Media**
Published 151 social media contents through the Instagram platform of the official Instagram platform which is designed as a means of delivering information and export literacy

- d. Email Sekretaris Lembaga
 - Meneruskan 277 email yang masuk melalui email resmi LPEI kepada unit kerja terkait pada hari yang sama.
 - Mengirimkan 225 surat keluar LPEI melalui email resmi yang ditujukan kepada pemangku kepentingan
- e. Pelaporan Lembaga
 - Mengirimkan 115 laporan kepada regulator baik yang dikirimkan melalui email maupun yang dilakukan melalui SPE OJK/IDXNet
 - Penyampaian laporan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. **Pelaksanaan Rapat**
 - a. Rapat Dewan Direktur
 - Memenuhi tingkat kehadiran dalam rapat sekurang-kurangnya 75% dari total pelaksanaan rapat Dewan Direktur selama setahun berjalan.
 - Menyelenggarakan 32 kali RDD selama tahun 2024
 - b. Rapat Board of Management (RABOM)
 - Menyelenggarakan 68 kali RABOM selama tahun 2024
 - Pembahasan agenda RABOM mencakup hal-hal crucial yang menyangkut operasional dan strategi Lembaga
4. **Tindak Lanjut Rapat**
 - a. Tindak Lanjut Rapat Dewan Direktur (RDD), terdapat 71 arahan RDD yang ditindak lanjuti
 - b. Tindak Lanjut Rapat Board of Management (RABOM), Terdapat 88 arahan RABOM di tahun 2024 dan telah diselesaikan
5. **Assessment GCG**
 - a. Melakukan pemenuhan data dan informasi yang tercantum dalam pilar 2, pilar 3, pilar 5 dan pilar 9 pada PMK 208/2021.
 - b. Hasil assessment BPKP atas pelaksanaan tata kelola LPEI di tahun 2023 mendapatkan nilai sebesar 80,00% dengan klasifikasi baik.
6. **Pelaksanaan CSR**
 - a. Ikut serta dalam TJSL SMV dan Kemenkeu untuk Pembangunan DAS Serayu yang di prakarsai oleh PT Geo Dipa Energy di bulan Mei 2024.
 - b. Pelaksanaan TJSL/CSR Pembangunan solar panel pada Desa Devisa Kerajinan Peti Mati di Bantul Yogyakarta pada bulan Juni 2024.
 - c. Pelaksanaan TJSL/CSR MCU gratis dan sosialisasi terkait literasi keuangan digital bagi warga Kelurahan Cilincing pada bulan Desember 2024.
- d. Institution Secretary Email
 - Forwarded 277 incoming emails via LPEI's official email to relevant work units on the day of official LPEI email to the relevant work units on the same day. the same day.
 - Sent 225 LPEI outgoing letters through official email addressed to stakeholders stakeholders
- e. Institutional Reporting
 - Submitted 115 reports to regulators both sent via email or through through SPE OJK/IDXNet
 - On-time report submission
3. **Conduct of the Meeting**
 - a. Board of Director Meeting
 - Meeting attendance rate of at least 75% of the total Board of Director meetings during the year. Director meetings during the year.
 - Organized 32 Board of Director meetings during 2024.
 - b. Board of Management Meeting (RABOM)
 - Organized 68 RABOM meetings during the year 2024
 - Discussion of the RABOM agenda includes matters concerning operations and strategy of the Institution
4. **Follow-up Meeting**
 - a. Follow-up of the Board of Directors Meeting (RDD), there were 71 RDD directives that were followed up
 - b. Follow-up of Board of Management Meeting (RABOM), There are 88 RABOM directives in 2024 and have been completed
5. **GCG Assessment**
 - a. Fulfillment of data and information listed in pillar 2, pillar 3, pillar 5 and pillar 9 pillar 2, pillar 3, pillar 5 and pillar 9 of PMK 208/2021. in PMK 208/2021.
 - b. The results of the BPKP assessment of the implementation of LPEI governance in 2023 received a score of implementation of LPEI governance in 2023 received a score of 80.00% with good classification.
6. **Implementation of CSR**
 - a. Participation in TJSL SMV and Ministry of Finance for Serayu Watershed Development initiated by PT Geo Dipa Energy in May 2024.
 - b. Implementation of TJSL/CSR for the construction of solar panels at the Coffin Craft Foreign Exchange Village in Bantul, Yogyakarta in June 2024.
 - c. Implementation of TJSL/CSR MCU free of charge and socialization socialization related to digital financial literacy for residents of Kelurahan Cilincing in December 2024.

UNIT AUDIT INTERNAL

Audit Internal memegang peran krusial dalam menjaga efektivitas dan keberlanjutan operasional di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) melakukan

INTERNAL AUDIT UNIT

Internal audit plays a crucial role in maintaining the effectiveness and sustainability of operations at the Indonesia Eximbank (LPEI). As part of internal control, this

penilaian independen yang berbasis risiko (*risk based audit*) atas efektivitas pengendalian internal, penerapan manajemen risiko dan proses tata kelola.

Audit Internal di LPEI berperan aktif dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mitigasi risiko, yang menjadi dasar bagi pengelolaan lembaga yang lebih tangguh. Melalui evaluasi yang sistematis, unit ini secara independen memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang diterapkan selaras dengan standar kepatuhan serta mendukung tujuan strategis lembaga.

Fungsi utama SKAI di LPEI sebagaimana tercantum pada Peraturan Dewan Direktur (PDD) Nomor 0016/PDD/12/2022 tentang Penerapan Fungsi Audit Internal (PFAI) yaitu memberikan *assurance* dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional LPEI, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen Risiko, pengendalian internal dan proses tata kelola LPEI.

Dalam melaksanakan fungsinya, SKAI memiliki Divisi Regular Audit yang menjalankan fungsi *assurance* dan konsultasi, serta Divisi Special Audit, yang melakukan penugasan khusus dari manajemen seperti investigasi atau verifikasi dalam rangka penghapusbukuan piutang pembiayaan. Selain itu, SKAI juga didukung oleh Manajemen Mutu dan Metodologi Specialist yang bertugas memastikan kualitas pelaksanaan SKAI telah memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.

Dengan sistem audit yang terstruktur, LPEI dapat secara proaktif mengidentifikasi kelemahan operasional dan rekomendasi perbaikan secara efektif dan efisien. Hal ini memungkinkan lembaga untuk lebih siap dalam menghadapi tantangan serta terus meningkatkan kinerja, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh pemangku kepentingan. Peran audit internal bukan sekadar alat pengawasan, melainkan pilar utama dalam memperkuat fondasi tata kelola dan pertumbuhan berkelanjutan LPEI.

function not only plays a supervisory role, but also ensures that every process is carried out in accordance with the principles of good corporate governance.

Indonesia Eximbank's Internal Audit Unit plays an active role in improving transparency, accountability, and risk mitigation, which are the foundation for more resilient institutional management. Through systematic evaluation, this unit ensures that the policies and procedures implemented are in line with compliance standards and support the institution's strategic objectives.

The internal audit structure at Indonesia Eximbank consists of the Internal Audit Unit (SKAI), which is under the coordination of Head of SKAI and reports directly to the Executive Director. SKAI supervises the Regular Audit & Methodology Division, which performs *assurance* functions, and the Special Audit Division, which handles investigations and verification of write-offs. In addition, Quality Management and Follow-up Department ensures the quality of audits and the fulfillment of recommendations made by internal and external auditors.

With a structured audit system, Indonesia Eximbank can proactively identify potential improvements in its operations. This enables the institution to be better prepared to face challenges and continue to improve its performance, thereby providing greater benefits to all stakeholders. The role of internal audit is not merely a supervisory tool, but a key pillar in strengthening the foundation of Indonesia Eximbank's governance and sustainable growth.

With a structured audit system, LPEI can proactively identify operational weaknesses and proactively identify operational weaknesses and recommendations for improvement effectively and efficiently. This allows the institution to be better prepared to face challenges and continuously improve performance, thereby provide greater benefits for all stakeholders. The role of internal audit is not just a monitoring tool, but rather a key pillar in strengthening the foundation of LPEI's governance and sustainable growth.

Profil Kepala Audit Internal

Head of Internal Audit Profile

I Nyoman Gede Suarja Kepala Audit Internal Head of Internal Audit	
Usia Age	63 tahun 63 years old
Warga Negara Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada (1999) • Sarjana Ekonomi dari Universitas Brawijaya (1987) • Master of Management – University of Gadjah Mada (1999) • Bachelor of Economics – University of Brawijaya (1987)

I Nyoman Gede Suarja Kepala Audit Internal Head of Internal Audit	
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Addendum ketiga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.PJ.0165/HCD/12/2024 tanggal 31 Desember 2024. Specified Time Work Agreement (PKWT) No. PJ.0094/HCH/12/2021 dated December 29, 2021.
Riwayat Karier Career Background	- Chief of Internal Audit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 2022 – sekarang - Managing Director di Mandiri Sekuritas (September 2013 – September 2016) - Chief Executive di PT Bank Mandiri Europe Ltd. (April 2016 – Desember 2021) - Managing Director of Mandiri Sekuritas (September 2013 – September 2016) - Chief of Internal Audit of Indonesia Export Financing Agency 2022 - present. - Managing Director at Mandiri Sekuritas (September 2013 - September 2016) - Chief Executive of PT Bank Mandiri Europe Ltd. (April 2016 - December 2021) - Managing Director of Mandiri Sekuritas (September 2013 - September 2016)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak Ada None
Sertifikasi Certification	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 7 Level 5 Risk Management Certification – Arfaidhams Secret.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Audit Internal

Sesuai dengan Pasal 31 UU No. 2/2009 tentang LPEI, penunjukan dan pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal merupakan tanggung jawab Direktur Eksekutif. Ketentuan ini memberikan Direktur Eksekutif kewenangan penuh dalam menentukan siapa yang akan menjabat posisi tersebut. Kewenangan ini merupakan bagian dari struktur organisasi yang mencerminkan hierarki serta tata kelola di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Dengan demikian, proses penunjukan dan pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan keputusan strategis yang berpengaruh pada kelancaran fungsi Audit Internal serta penerapan tata kelola yang baik di dalam lembaga.

Unit In Charge of Appointment and Dismissal of Head of Internal Audit

In accordance with Article 31 of Act No. 2/2009 on Indonesia Eximbank, appointment and dismissal of Head of Internal Audit Unit is the responsibility of Executive Director. This provision gives Executive Director full authority in determining who will hold the position. This authority is part of the organizational structure that reflects the hierarchy and governance of Indonesia Eximbank. As such, process of appointing and dismissing the Head of Internal Audit is not merely administrative in nature, but also a strategic decision that affects the smooth functioning of Internal Audit and implementation of good corporate governance within the institution.

Bagan Pengangkatan dan Pemberhentian Appointment and Dismissal Chart

Direktur Eksekutif Executive Director	Komite Audit Audit Committee	Dewan Direktur Board of Directors
- Melakukan <i>Fit and Proper</i> - Menyampaikan ke Anggota Dewan Direktur melalui Komite Audit - Conduct Fit and Proper - Submit to Board of Directors through Audit Committee	Melaporkan kepada Dewan Direktur atas usulan pengangkatan, pergantian, pemberhentian Kepala Audit Internal yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif. Report to Board of Directors on the proposal for appointment, replacement, dismissal of Head of Internal Audit submitted by the Executive Director.	Menerima laporan dan memberikan persetujuan atas pengangkatan, perubahan, pergantian Ketua Audit. Receive reports and approve the appointment, change, and replacement of Chairman of Audit.

Persyaratan Auditor Internal (Baik Secara Individu maupun Kelompok)

LPEI menetapkan kualifikasi dan persyaratan Auditor Internal, seperti yang tertuang dalam PDE Nomor 0014/PDE/08/2022 tentang Piagam Audit Internal LPEI, sebagai berikut:

- Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya.
- Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu yang relevan dengan bidang dan tugasnya.
- Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Internal Auditor Requirements (Both Individual and Group)

LPEI determines the qualifications and requirements of the Internal Auditor Internal Auditor qualifications and requirements, as stated in PDE Number 0014/PDE/08/2022 on LPEI Internal Audit Charter, as follows as follows:

- Have integrity and professional behavior, independent, honest, and objective in carrying out their duties.
- Have knowledge and experience regarding technical auditing and disciplines relevant to the field and duties.
- Have knowledge of laws and regulations in the financial sector and other related laws and other related laws and regulations.

4. Memiliki kecakapan dalam berinteraksi dan berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis secara efektif.
5. Mematuhi Standar Profesi Audit Internal.
6. Mematuhi kode etik.
7. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data lembaga terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/peraturan yang berlaku.
8. Memahami prinsip tata kelola lembaga yang baik dan prinsip Manajemen Risiko.
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalisme secara terus menerus.

Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal serta Jumlah Pegawai

Struktur dan kedudukan SKAI dalam organisasi berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif sesuai Peraturan Direktur Eksekutif (PDE) Nomor 0001/PDE/01/2024 tentang Pedoman dan Tata Kerja Organisasi LPEI, serta memiliki akses komunikasi langsung dengan Dewan Direktur dan Komite Audit.

Dengan demikian, SKAI beroperasi di bawah pengawasan langsung Direktur Eksekutif, yang menjamin pelaksanaan fungsi audit secara independen sebagaimana diatur dalam PDE Nomor 0014/PDE/08/2022 tentang Piagam Audit Internal LPEI. Independensi ini memberikan keleluasaan bagi SKAI dalam menjalankan tugasnya secara obyektif, serta memastikan tidak adanya benturan kepentingan yang dapat memengaruhi integritas dan efektivitas pelaksanaan audit.

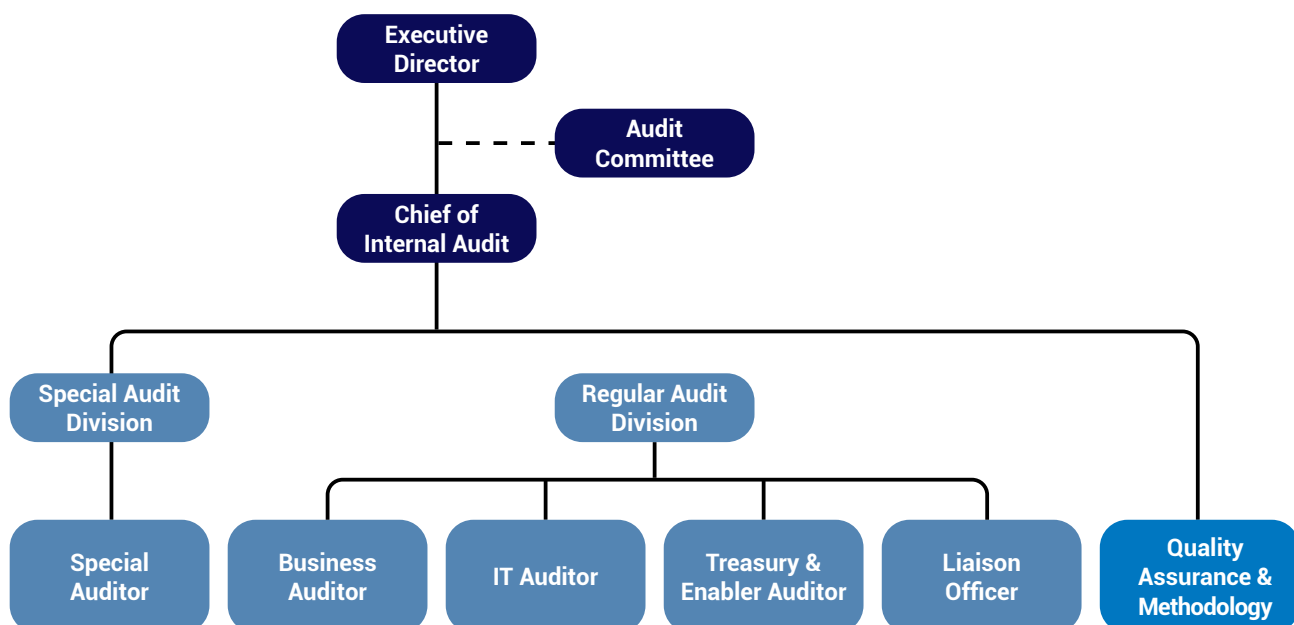
4. Have skills in interacting and communicating both orally and in writing effectively.
5. Comply with Internal Audit Professional Standards.
6. Comply with the code of ethics.
7. Maintain the confidentiality of information and / or institutional data related to the implementation of duties and responsibilities, unless required by laws and regulations or applicable stipulations/regulations.
8. Understand the principles of good institutional governance and principles of Risk Management.
9. Willing to improve knowledge, skills and professionalism continuously.

Structure and Position of Internal Audit Unit and Number of Employees

The structure and position of SKAI in the organization is directly under and responsible to the Executive Director Executive Director in accordance with Executive Director Regulation (PDE) Number 0001/PDE/01/2024 on Guidelines and Work Procedures LPEI organization, and has direct access to communication with the Board of Directors and the Audit Committee.

As such, Internal Audit operates under the direct supervision of Executive Director, which guarantees the independent implementation of audit functions as stipulated in the Indonesia Eximbank's Internal Audit Charter. This independence provides Internal Audit with the flexibility to carry out its duties objectively and ensures that there are no conflicts of interest that could affect of the audit integrity and effectiveness.

Bagan Struktur Organisasi Direktorat Internal Audit per 31 Desember 2024
Internal Audit Directorate Organizational Structure Chart as of December 31, 2024



Per 31 Desember 2024, personel Satuan Kerja Internal Audit terdiri dari:

As of December 31, 2024, Internal Audit Unit personnel consisted of:

Jabatan Position	Jumlah Personel (orang) Number of Personnel (persons)
Kepala SKAI Chief of Internal Audit	1
Kepala Divisi Division Head	2
Kepala Departemen Department Head	5
Auditor* Auditor*	10
Total Personel SKAI Total Internal Audit Personnel	18

*)Termasuk 1 orang auditor sedang *unpaid leave* sejak november 2024
 *)Include 1 unpaid leave auditor since november 2024

Kualifikasi atau Sertifikasi sebagai Profesi Audit Internal

Personel SKAI per 31 Desember 2024 telah memperoleh berbagai sertifikasi profesi di bidang Internal Audit, antara lain:

Qualifications or Certification as an Internal Audit Profession

As of December 31, 2024, Internal Audit Unit personnel have obtained various professional certifications in the field of Internal Audit, including:

Sertifikasi Profesi Certification	Jumlah Personel Number of Personnel
<i>Certified in Governance Enterprised IT (CGEIT)</i> - ISACA	1
<i>Certified Information System Auditor (CISA)</i> - ISACA	2
<i>Certified Information Security Manager (CISM)</i> - ISACA	1
<i>Certified Internal Auditor (CIA)</i>	1
<i>Certified Fraud Examiner (CFE)</i>	1
<i>Certified Forensic Auditor (CFrA)</i>	1
<i>Certified Risk Professional (CRP)</i>	1
<i>Certified Bank Internal Audit (CBIA)</i>	1
<i>Certified ISO 37001:2016 Lead Auditor (ABMS)</i>	1
<i>Certified Internal Controls Auditor (CICA)</i>	1
Manajemen Risiko Jenjang 4 Level 4 Risk Management	7
Manajemen Risiko Jenjang 5 Level 5 Risk Management	7
Manajemen Risiko Jenjang 6 Level 6 Risk Management	1
Manajemen Risiko Jenjang 7 Level 7 Risk Management	1
<i>Qualified Internal Auditor (QIA)</i> – Tingkat Dasar Qualified Internal Auditor (QIA) - Basic Level	3
<i>Qualified Internal Auditor (QIA)</i> – Tingkat Lanjutan Qualified Internal Auditor (QIA) - Advanced Level	1
<i>Qualified Internal Audit</i> – Tingkat Manajerial Qualified Internal Auditor (QIA) - Managerial Level	6

Sertifikasi Profesi Certification	Jumlah Personel Number of Personnel
COBIT 2019 Foundation Certificate - ISACA	2
GIAC Critical Controls Certification (GCCC) - GIAC	1
Offensive Security Certified Expert (OSCE) - Offensive Security	1
Offensive Security Certified Professional (OSCP) - Offensive Security	1
Certified Information Systems Security Professional (CISSP) -ISC2	1
Certified Associate in Project Management (CAPM) - Project Management Institute (PMI)	1
IT Auditor - Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) IT Auditor - National Professional Certification Board (BNSP)	1
Certified ISO 27001:2013 Lead Auditor (Information Security Management Systems) - British Standards Institution (BSI)	1
Kepatuhan Perbankan Level 1 (Compliance & AML Officer) Banking Compliance Level 1 (Compliance & AML Officer)	1
Certified Risk Management Professional (CRMP)	1

Piagam Audit Internal

Sebagai bagian dari upaya memastikan pelaksanaan pengawasan internal yang efektif, SKAI LPEI berpegang pada berbagai pedoman, salah satunya adalah Piagam Audit Internal. Dokumen ini menetapkan visi dan misi Audit Internal, kedudukan SKAI dalam organisasi, ruang lingkup, kewenangan, dan tanggung jawabnya. Selain itu, Piagam Audit Internal juga mengatur prinsip independensi, objektivitas, profesionalisme, serta kode etik Auditor. Saat ini, SKAI mengacu pada PDE Nomor PDE 0014/PDE/08/2022 tentang Piagam Audit yang dievaluasi minimal setiap tiga tahun untuk memastikan relevansi dan kecukupannya.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tanggung jawab SKAI sebagaimana tertuang pada PDE Nomor 0014/PDE/08/2022 tentang Piagam Audit Internal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagai berikut:

1. Merencanakan dan melaksanakan assurance dengan penekanan pada bidang/aktivitas berisiko tinggi serta mengevaluasi *control system* untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran LPEI dapat dicapai secara optimal dan berkesinambungan;
2. Melaksanakan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (audit khusus), melaporkan dan menyampaikan rekomendasi/kesimpulan atas hasil investigasi kepada manajemen LPEI;
3. Mengembangkan dan menjalankan program untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas aktivitas Audit Internal;
4. Memberikan rekomendasi atas hasil aktivitas Audit Internal dan memonitor tindak lanjutnya;
5. Bekerja sama dengan Komite Audit dalam melaksanakan fungsi pengawasan; dan

Internal Audit Charter

As part of its efforts to ensure the effectiveness of internal control, Indonesia Eximbank Internal Audit Unit adheres to various guidelines, one of which is Internal Audit Charter. This document sets out the vision and mission of Internal Audit, position of Internal Audit Unit within the organization, as well as its scope, authority, and responsibilities. In addition, Internal Audit Charter also regulates the principles of independence, objectivity, professionalism, and code of conduct of Internal Auditors. Currently, Internal Audit Unit refers to Executive Director Regulation (PDE) number PDE 0014/PDE/08/2022, which is an update of the 2019 Audit Charter. To ensure its relevance and adequacy, this charter is evaluated at least every three years.

Duties and Responsibilities

The responsibilities of SKAI as stated in PDE Number 0014/PDE/08/2022 concerning Internal Audit Charter Indonesia Export Financing Agency as follows:

1. Planning and carrying out assurance with emphasis on high-risk areas/activities as well as evaluate the control system to obtain assurance that LPEI's goals and objectives can be achieved optimally and sustainably, optimized and sustainable;
2. Carry out steps in order to explore information (special audit), report and submit recommendations/conclusions on the results of the investigation to LPEI management;
3. Develop and implement programs to evaluate and improve the quality of Internal Audit activities;
4. Provide recommendations on the results of Internal Audit activities activities and monitor the follow-up;
5. Cooperate with the Audit Committee in carrying out supervisory function; and

6. Melakukan koordinasi kegiatan dengan eksternal audit dan unit/fungsi penyedia *assurance* lainnya, agar dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal.

6. Coordinating activities with external audit and other assurance provider units/functions, in order to achieve comprehensive and optimal audit results. achieve comprehensive and optimal audit results.

Program Pengembangan Kompetensi Tahun 2024

SKAI terus meningkatkan kapabilitasnya melalui berbagai program pendidikan dan pengembangan kompetensi yang dirancang untuk mendukung efektivitas pengawasan dan tata kelola perusahaan. Berikut pelaksanaan program yang diikuti di tahun 2024:

Competency Development Program in 2024

Internal Audit Unit continues to improve its capabilities through various education and competency development programs designed to support the effectiveness of corporate supervision and governance. The following programs have been implemented in 2024:

Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Judul Program Program Title	Penyelenggara Organizer
18 Januari 2024 January 18, 2024	<i>Great Leader Create Great Leader.</i>	Riza Perdana Kusuma
21 - 22 Februari 2024 February 21 - 22, 2024	Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4. Risk Management Recertification Briefing Level 4	Arfaidhams Secret
1 - 2 Maret 2024 March 1 - 2, 2024	Harmoni Eksekusi dan Kolaborasi Transformasi (DE, DFO DAN DSL). Harmony of Execution and Transformation Collaboration (DE, DFO AND DSL).	Peopletech
19 Maret 2024 March 19, 2024	<i>Energize Your Career Journey (Finding New Spirit and Purpose).</i>	Riza Perdana Kusuma
4 April 2024 April 4, 2024	Sosialisasi Budaya Anti Korupsi dan Pencegahan Gratifikasi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Lembaga SMV (<i>Special Mission Vehicle</i>) atau BUMN. Socialization of Anti-Corruption Culture and Prevention of Gratification in Procurement of Goods/Services in the SMV (Special Mission Vehicle) Institutions or SOE.	LPEI
8 Mei 2024 May 8, 2024	Perkembangan dan Regulasi Perkebunan Kelapa Sawit. Development and Regulation of Oil Palm Plantations.	LPEI
10 - 11 Juni 2024 June 10 - 11, 2024	Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5. Risk Management Recertification Briefing Level 5.	Arfaidhams Secret
12 Juni 2024 June 12, 2024	Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 dan 7. Risk Management Recertification Briefing Level 6 and 7.	Garda
20 - 21 Juni 2024 June 20 - 21, 2024	<i>Impactful Communication - Think On Your Feet.</i>	Business First
28 Juni 2024 June 28, 2024	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko. Risk Management Certification Exam.	LSPP
12 Juli 2024 July 12, 2024	<i>Mini Workshop</i> dalam rangka Penguatan Fungsi Pilar ke-III. Mini Workshop in the Framework of Strengthening the Function of Pillar III.	Arfaidhams Secret
26 Juli 2024 July 26, 2024	Webinar Program Pemeliharaan Kompetensi Analis - Tenaga Ahli Penjaminan. Webinar on the Competency Maintenance Program for Analysts - Assurance Experts.	Bintang Cahaya Gempita
5 - 14 Agustus 2024 August 5 - 14, 2024	<i>Certified Risk Management Professional (CRMP)</i>	RAP Learning Center
26 Juli 2024 July 26, 2024	IT Security Awareness " <i>Reduce Risk & Protect Business</i> ".	LPEI
8 - 9 Agustus 2024 August 8 - 9, 2024	<i>Digital Payment System and Cyber Risk Management.</i>	Infobank Institute
12 Agustus 2024 August 12, 2024	Grafonomy & Analisa Pemalsuan Dokumen <i>Batch V</i> . Grafonomy & Document Forgery Analysis Batch V.	Business First

Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Judul Program Program Title	Penyelenggara Organizer
14 Agustus 2024 August 14, 2024	Strategi <i>Anti-Fraud</i> LPEI - <i>Batch</i> I Indonesia Eximbank Anti-Fraud Strategy - Batch I	LPEI
15 - 16 Agustus 2024 August 15 - 16, 2024	<i>Leadership Series - Coaching Skill for Manager.</i>	Loop Consulting
16 Agustus 2024 August 16, 2024	<i>Export Insurance.</i>	LPEI
28 Agustus 2024 August 28, 2024	Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 Risk Management Recertification Briefing Level 6	Arfaidhams Secret
28 - 29 Agustus 2024 August 28 - 29, 2024	ACIIA <i>Regional Conference</i> 2024.	ACIIA
23 September 2024 September 23, 2024	<i>Functional Training New Core System.</i>	LPEI
9 Oktober 2024 October 9, 2024	Penerapan Sistem Pengendalian Internal di Lingkungan Kementerian Keuangan. Implementation of Internal Control System in the Ministry of Finance Environment.	LPEI
14 - 16 Oktober 2024 October 14 - 16, 2024	<i>Cobit Foundation Exam Guide.</i>	Multimatic
21 - 23 Oktober 2024 October 21 - 23, 2024	Pelatihan Awareness ISO 37001-2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. ISO 37001-2016 Awareness Training of Anti-Bribery Management System.	Sucofindo
10 Desember 2024 December 10, 2024	LPEI sebagai SMV Kementerian Keuangan. Indonesia Eximbank as SMV of the Ministry of Finance.	LPEI

Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Audit Internal Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, SKAI telah menyelesaikan penugasan audit sesuai dengan Rencana Audit Tahunan (RAT) 2024 antara lain:

1. Pelaksanaan fungsi *assurance* yang bersifat *mandatory* yaitu Audit SWIFT, BI RTGS, IT, SLIK, dan *Review* PMN serta audit yang bersifat *non mandatory* atas Kantor Wilayah, Jasa Konsultasi, IT *Project Management*, Fungsi Kepatuhan, Aktivitas Pengadaan serta *Review* Penempatan Internal.
2. Pelaksanaan investigasi selama tahun 2024 sebanyak 3 audit khusus dan 1 tindak lanjut pelaporan WBS.
3. Pelaksanaan verifikasi dalam rangka hapus buku sesuai revisi RKAT 2024 sebanyak 91 Debitur (Eq Rp12,12 T) dan sesuai RKAT tahun 2025 sebanyak 50 debitur (Eq Rp6,6 T).
4. Pelaksanan aktivitas lainnya, antara lain penerapan audit rating, pelaksanaan *liaison* atas *counterpart* (BPK, BPKP, ITJEN, dan OJK), monitoring pemenuhan rekomendasi internal dan eksternal, *review* peraturan lembaga, review atas profil risiko, pengkinian peraturan Internal Audit, serta pendampingan proses hukum (KPK dan Bareskrim).

Implementation of Internal Audit Unit Activities in 2024

Throughout 2024, Internal Audit Unit has performed its role optimally. The responsibilities that have been carried out include:

1. Implementation of mandatory assurance functions namely SWIFT Audit, BI RTGS, IT, SLIK, and Review of PMN as well as non-mandatory audits of Regional Offices, Consulting Services, IT Project Management, Compliance Functions, Procurement Activities and Review of Internal Placement.
2. Implementation of investigations during 2024 as many as 3 special audits and 1 follow-up of WBS reporting.
3. Implementation of verification in order to write off books according to the revised 2024 RKAT as many as 91 debtors (Eq Rp12.12 T) and according to the 2025 RKAT as many as 50 debtors (Eq Rp6.6 T).
4. Implementation of other activities, including the implementation of audit rating, implementation of liaison to counterpart (BPK, BPKP, ITJEN, and OJK), monitoring the fulfillment of internal and external recommendations, review of institution regulations, review of risk profiles, updating of Internal Audit regulations, and assistance in legal processes (KPK and Bareskrim).

Rencana Kerja Tahun 2025

Penyusunan RAT 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan key inputs yang meliputi Profil Risiko, Sasaran Strategis, Regulasi Eksternal, Arahan Manajemen, Hasil Audit Internal dan Eksternal, dan Rencana Kerja *Second Lines*. Selain key inputs tersebut, RAT 2025 juga mempertimbangkan hasil penyusunan roadmap penerapan GRC 2022-2025, realisasi kinerja lembaga, dan pertimbangan lainnya. Berdasarkan hal-hal tersebut, pada 2025 SKAI akan melakukan penugasan Audit antara lain atas: Pemberian pembiayaan Syariah, IT Project Management, Audit Human Capital, Audit Koperasi dan beberapa audit mandatory. Selain itu SKAI akan melaksanakan aktivitas audit khusus yang meliputi investigasi dan verifikasi berdasarkan arahan manajemen dan hasil pemeriksaan audit internal. Adapun kegiatan rutin meliputi monitoring rekomendasi hasil pemeriksaan Auditor Eksternal dan Internal; liaison Auditor Eksternal; pengembangan SDM, sosialisasi *lesson learned*; review terhadap ketentuan internal; dan quality assurance review akan dilaksanakan secara konsisten. SKAI juga akan melakukan review atas kesesuaian kebijakan/peraturan terkait audit internal dengan Standar Audit Internal terbaru.

Penerapan Fungsi Pendampingan Audit Eksternal

SKAI melakukan pendampingan atas pelaksanaan pengawasan oleh regulator sepanjang tahun 2024 yang dilakukan oleh:

1. Pemeriksaan tahunan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan fokus pemeriksaan operasional pada pengelolaan pembiayaan, tingkat kesehatan dan APU PPT.
2. Pemeriksaan khusus oleh OJK dengan fokus pemeriksaan pengelolaan pembiayaan beberapa debitur bermasalah.
3. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait tata kelola proses pembiayaan.
4. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait tata kelola operasional, pengadaan dan proses pembiayaan.
5. Pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait dengan Penugasan Khusus.

Kebijakan dan Pelaksanaan Frekuensi Rapat Audit Internal dengan Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana, Dewan Direktur, dan/atau Komite Audit di Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, SKAI telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Manajemen (Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana), Dewan Direktur, dan/atau Komite Audit, dengan uraian sebagai berikut:

Work Plan for 2025

The preparation of the RAT 2025 was carried out by considering key inputs which include Risk Profile, Strategic Goals, External Regulations, Management Directives, Internal and External Audit Results, and Second Lines Work Plan. In addition to these key inputs, the 2025 RAT also considers the results of the preparation of the 2022-2025 GRC implementation roadmap, the realization of institutional performance, and other considerations. Based on these matters, in 2025 SKAI will conduct audit assignments, among others, on: Sharia financing, IT Project Management, Human Capital Audit, Cooperative Audit and several mandatory audits. In addition, SKAI will carry out special audit activities which include investigation and verification based on management direction and the results of internal audit checks. The routine activities include monitoring the recommendations of the examination results of External and Internal Auditors; External Auditor liaison; human resource development, socialization of lessons learned; review of internal provisions; and quality assurance review will be implemented consistently. SKAI will also review the suitability of policies/regulations related to internal audit with the latest Internal Audit Standards.

Audit External Assistance Function

The regulator has conducted inspections and monitoring, which are followed up by external audits as part of transparent and accountable supervision, namely:

1. Annual inspection by the Financial Services Authority (OJK) with the focus of operational inspection on financing management, health level and AML/CFT.
2. Special inspection by OJK with the focus of inspection financing management of several problematic debtors.
3. Examination of the Development Finance and Examination Agency (BPKP) related to the governance of the financing process.
4. Audit of the Supreme Audit Agency (BPK) related to operational governance, procurement and financing processes.
5. Inspection by the Inspectorate General of the Ministry of Finance related to Special Assignments.

Policy and Frequency of Internal Audit Meetings with Executive Director, Managing Director, Board of Directors, and/or Audit Committee in 2024

Throughout 2024, Internal Audit Unit has conducted coordination meetings with Executive Director and Managing Directors, Board of Directors, and/or Audit Committee, with the following details:

Bulan Month	Tanggal Date	Meeting dengan Meeting with	Agenda Rapat Meeting Agenda
Januari 2024 January 2024	31/01/2024	Komite Audit Audit Committee	Progress SKAI bulan Januari 2024, Realisasi DMTL Januari 2024, Rencana Audit Tahunan 2024. SKAI Progress in January 2024, DMTL Realization in January 2024, Annual Audit Plan 2024.
Februari 2024 February 2024	28/02/2024	Komite Audit Audit Committee	Progress SKAI bulan Februari 2024, Struktur Organisasi SKAI Februari 2024, dan Realisasi DMTL Februari 2024. SKAI Progress in February 2024, SKAI Organizational Structure in February 2024, and DMTL Realization in February 2024.
Maret 2024 March 2024	28/03/2024	Komite Audit Audit Committee	Progress SKAI bulan Maret 2024, dan Realisasi DMTL Maret 2024. SKAI Progress in March 2024, and DMTL Realization in March 2024.
April 2024 April 2024	02/04/2024	Manajemen Management	Update Pemeriksaan OJK. OJK Inspection Update.
	23/04/2024	Manajemen Management	Update Pemeriksaan OJK. OJK Inspection Update.
	30/04/2024	Komite Audit Audit Committee	Progress SKAI bulan April 2024, dan realisasi DMTL April 2024. SKAI Progress in April 2024, and DMTL realization in April 2024.
Mei 2024 May 2024	15/05/2024	Dewan Direktur Board of Directors	Progress audit eksternal (OJK). External audit progress (OJK).
	29/05/2024	Komite Audit Audit Committee	Progress SKAI bulan Mei 2024, progress audit eksternal (OJK), dan realisasi DMTL Mei 2024. SKAI Progress in May 2024, external audit progress (OJK), and DMTL realization in May 2024.
Juli 2024 July 2024	16/07/2024	Manajemen Management	Update pemeriksaan BPKP tahap II, update Pemenuhan DMTL OJK, dan update Pemeriksaan Internal. BPKP Phase II inspection update, OJK DMTL Fulfillment update, and Internal Audit update.
	23/07/2024	Manajemen Management	Update Surat Peringatan tertulis OJK, dan pelaksanaan exit meeting BPKP. OJK Written Warning Letter Update, and BPKP exit meeting implementation.
Agustus 2024 August 2024	19/08/2024	Direktur Eksekutif Executive Director	Informasi kompetensi auditor. Auditor competency information.
	21/08/2024	Direktur Eksekutif Executive Director	Informasi kompetensi auditor, dan rating hasil audit (2022 – 2024). Auditor competency information, and audit result rating (2022 – 2024).
	21/08/2024	Komite Audit Audit Committee	Progress SKAI bulan Agustus 2024, progress audit eksternal - tindak lanjut surat sanksi OJK kepada LPEI, realisasi DMTL Agustus 2024, dan pemenuhan DMTL OJK. SKAI progress in August 2024, external audit progress - follow-up to OJK's sanction letter to LPEI, realization of DMTL in August 2024, and fulfillment of OJK DMTL.
September 2024 September 2024	27/09/2024	Komite Audit Audit Committee	Progress SKAI bulan September 2024, progress audit eksternal, hasil audiensi dengan OJK, dan realisasi DMTL September 2024. SKAI progress in September 2024, external audit progress, results of audience with OJK, and realization of DMTL in September 2024.
Oktober 2024 October 2024	22/10/2024	Manajemen Management	Pemenuhan DMTL OJK. Fulfillment of OJK DMTL.
	31/10/2024	Komite Audit Audit Committee	Progress SKAI bulan Oktober 2024, progress audit eksternal OJK, dan realisasi DMTL Oktober 2024. SKAI progress in October 2024, OJK external audit progress, and realization of DMTL in October 2024.
November 2024 November 2024	05/11/2024	Manajemen Management	Pelaksanaan entry meeting ITJEN. Implementation of ITJEN entry meeting.
	12/11/2024	Manajemen Management	Update pemeriksaan BPK. BPK audit update.
	29/11/2024	Komite Audit Audit Committee	Progress SKAI bulan November 2024, dan penjelasan Infrastruktur SKAI. SKAI progress in November 2024, and explanation of SKAI Infrastructure.
Desember 2024 December 2024	17/12/2024	Manajemen Management	Progress DMTL OJK periode Desember 2024. OJK DMTL progress for the period of December 2024.
	30/12/2024	Komite Audit Audit Committee	Progress SKAI bulan Desember 2024, dan Realisasi DMTL Desember 2024. SKAI progress in December 2024, and DMTL realization in December 2024.

Akuntan Publik

Public Accountant

Prosedur Penunjukan Kantor Akuntan Publik

Sebagai bagian dari upaya memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan, LPEI menjalankan proses audit tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengacu pada PMK No. 208/2021 yang mengatur prinsip tata kelola, manajemen risiko, serta prinsip mengenal nasabah, penunjukan auditor eksternal dilakukan oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Dewan Direktur.

Untuk pelaksanaan audit laporan keuangan tahun 2024, LPEI menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan. KAP ini bertugas melakukan audit komprehensif yang mencakup evaluasi laporan keuangan, analisis transaksi, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, guna memastikan keandalan informasi keuangan LPEI.

Tanggung Jawab Komite Audit dalam Pemberian Rekomendasi atas Penunjukan dan Pemberhentian Auditor Eksternal

Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai penunjukan dan/atau penggantian Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang didasarkan pada dan tidak terbatas pada :

1. Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
2. Ruang lingkup audit;
3. Imbalan jasa audit;
4. Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan tim audit dari KAP;
5. Metodologi, teknik dan sarana audit yang digunakan KAP;
6. Manfaat sudut pandang baru yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan tim audit dari KAP;
7. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan
8. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, jika ada.

Public Accounting Firm Appointment Procedures

As part of its efforts to ensure financial transparency and accountability, Indonesia Eximbank conducts an annual audit process in accordance with applicable regulations. Referring to PMK No. 208/2021, which regulates governance principles, risk management, and customer due diligence principles, appointment of an external auditor is carried out by the Executive Director with the Board of Directors' approval.

For the audit of 2024 financial statements, Indonesia Eximbank has appointed the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partner. This KAP is entrusted with conducting a comprehensive audit, including an evaluation of financial statements, transaction analysis, and compliance with applicable regulations, to ensure the reliability of Indonesia Eximbank's financial information.

Audit Committee's Responsibility in Providing Recommendations on Appointment and Dismissal of External Auditors

The Audit Committee provides recommendations to the Board of Directors regarding the appointment and/or replacement of Public Accountants (AP) and Public Accounting Firms (KAP) which is based on and not limited to:

1. Independence of AP, KAP, and KAP insiders;
2. Audit scope;
3. Audit fees;
4. Expertise and experience of AP, KAP, and audit team from KAP;
5. Audit methodologies, techniques and tools used by KAP;
6. Benefits of new perspectives that will be obtained through replacement of AP, KAP, and audit team from KAP;
7. The potential risk of using audit services by the same KAP consecutively for a long period; and
8. The results of the evaluation of the implementation of the provision of audit services on annual historical financial information by AP and KAP in the previous period, if any.

KAP dan Nama Akuntan Publik yang Melakukan Audit Laporan Keuangan Tahunan Selama 5 Tahun Terakhir

KAP and Name of Public Accountant who Audited Annual Financial Statements for the Last 5 Years

No.	Tahun Penugasan Years of Assignment	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Nama Akuntan Publik Name of Public Accountant	Biaya Jasa (Juta Rp) Service Fee (Rp Million)
1.	2020	Amir Abadi, Jusuf Aryanto, Mawar dan Rekan Amir Abadi, Jusuf Aryanto, Mawar and Partners	Dedy Sukrisnadi	3.588
2.	2021	Amir Abadi, Jusuf Aryanto, Mawar dan Rekan Amir Abadi, Jusuf Aryanto, Mawar and Partners	Bimo Iman Santoso	4.452
3.	2022	Amir Abadi, Jusuf Aryanto, Mawar dan Rekan Amir Abadi, Jusuf Aryanto, Mawar and Partners	Bimo Iman Santoso	4.579
4.	2023	Amir Abadi, Jusuf Aryanto, Mawar dan Rekan Amir Abadi, Jusuf Aryanto, Mawar and Partners	Bimo Iman Santoso	4.484
5.	2024	Amir Abadi, Jusuf Aryanto, Mawar dan Rekan Amir Abadi, Jusuf Aryanto, Mawar and Partners	Bimo Iman Santoso	4.708

Jasa Lain yang Diberikan KAP dan Akuntan Publik Selain Jasa Audit Laporan Keuangan Tahunan pada Tahun Buku Terakhir

Other Services Provided by KAP and Public Accountants Other than Annual Financial Statement Audit Services in the Last Fiscal Year

Pada tahun buku 2024, KAP dan Akuntan Publik juga memberikan layanan selain Jasa Audit Laporan Keuangan Tahunan, yang mencakup:

1. Memorandum Hasil Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian (*Management Letter*) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024.
2. Audit atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024.
3. Perikatan Asurans Keyakinan Terbatas (reviu) atas Laporan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024.
4. Perikatan Asurans Keyakinan Terbatas (reviu) atas Program Pembiayaan Khusus Ekspor (PKE) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024.
5. Perikatan Asurans Keyakinan Terbatas (reviu) atas Laporan Keuangan Syariah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024.
6. Perikatan Asurans Keyakinan Terbatas (reviu) atas *Internal Control Operation and Information Technology* (IT) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024.
7. Penerapan prosedur yang disepakati untuk Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) triwulan IV tanggal 31 Desember 2024.
8. Perikatan Prosedur Asurans Terbatas (reviu) atas Laporan Pinjaman *Industrial Efficiency and Pollution Control* (IEPC) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024.

In 2024 fiscal year, KAP and Public Accountants provide services other than the Annual Financial Statement Audit Services, which include:

1. General Audit Memorandum on Consolidated Financial Statements (*Management Letter*) for the year ending December 31, 2024.
2. Audit of compliance with Laws and Regulations and Internal Control for the year ended December 31, 2024.
3. Limited Assurance Engagement (review) of Key Performance Indicators (KPI) Realization Report for year ending 31 December 2024.
4. Limited Assurance Engagement (review) on Special Export Financing Program (PKE) for the year ending on December 31, 2024.
5. Limited Assurance Engagement (review) on Sharia Financial Statements for the year ending on December 31, 2024.
6. Limited Assurance Engagement (review) on Internal Control Operation and Information Technology (IT) for the year ending December 31, 2024.
7. Implementation of the agreed procedures for the Prudential Principles Implementation Activities (KPPK) Report for the fourth quarter by December 31, 2024.
8. Limited Assurance Procedure Engagement (review) of Industrial Efficiency and Pollution Control (IEPC) Loan Report for the year ending December 31, 2024.

9. Perikatan keyakinan memadai atas Laporan Pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) oleh PIHAK PERTAMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. 10. Audit umum atas Laporan Keuangan PT IEB Prima Aset untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024. 11. Audit umum atas Laporan Keuangan Program Kemitraan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. 12. Reviu atas Penerbitan Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024. 13. Perikatan Asurans keyakinan terbatas (Reviu) atas Laporan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024.	9. A reasonable assurance engagement on the Implementation Report of Government Investment in PT Perkebunan Nusantara III (Persero) by the FIRST PARTY for the year ending December 31, 2024. 10. General audit of the Financial Statements of PT IEB Prima Aset for the year ending December 31, 2024. 11. General audit of the Partnership Program Financial Statements for the year ending December 31, 2024. 12. Review of the publication of consolidated financial statements for the year ended December 31, 2024. 13. Limited Assurance Engagement (review) of the Report on Realization of Key Performance Indicators (KPIs) for the year ended December 31, 2024

Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan

Pelaksanaan audit atas informasi keuangan tahunan oleh AP dan/atau KAP dievaluasi dengan mempertimbangkan beberapa aspek utama, antara lain:

1. Kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit yang berlaku;
2. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
3. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
4. Rekomendasi perbaikan yang diberikan.

Effectiveness of External Audit Implementation and Compliance with Provisions

The audit of annual financial information by AP and/or KAP is evaluated by considering several key aspects, including:

1. Conformity of audit implementation with applicable audit standards;
2. Adequacy of fieldwork time;
3. Assessment of services provided and adequacy of sampling; and
4. Recommendations for improvement.

Fungsi Kepatuhan

Compliance Function

Kepatuhan dalam operasional LPEI menjadi landasan utama untuk menjalankan bisnis yang sesuai dengan regulasi. Fungsi Kepatuhan bertugas memastikan bahwa seluruh kebijakan, prosedur, dan aktivitas usaha, termasuk yang berbasis syariah, telah selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, fungsi ini juga menjamin bahwa LPEI memenuhi komitmennya terhadap regulator dan otoritas pengawas yang berwenang.

Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan beroperasi secara independen dan berada dalam Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan. Unit ini tidak terafiliasi dengan fungsi bisnis, operasional, maupun penunjang lainnya, sehingga memastikan pengawasan yang objektif terhadap seluruh aktivitas usaha dan operasional LPEI. Dalam menjalankan tugasnya, Fungsi Kepatuhan memiliki peran strategis, antara lain:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha LPEI;
2. Mengelola Risiko Kepatuhan dan mendukung semua tingkatan organisasi dalam memenuhi Fungsi Kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memastikan agar kebijakan, prosedur, ketentuan dan sistem, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh LPEI telah sesuai dengan kepatuhan terhadap Undang-Undang tentang LPEI dan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memastikan kepatuhan LPEI terhadap komitmen yang dibuat oleh LPEI kepada regulator dan/atau otoritas lain yang berwenang; dan
5. Bertanggung jawab dalam melaksanakan dan memastikan penerapan program APU PPT & PPPSPM di LPEI.

Compliance in Indonesia Eximbank operations is the main foundation for conducting business in accordance with regulations. The Compliance function is responsible for ensuring that all policies, procedures, and business activities, including those based on sharia, are in line with applicable laws and regulations. In addition, this function also ensures that Indonesia Eximbank fulfills its commitments to regulators and competent supervisory authorities.

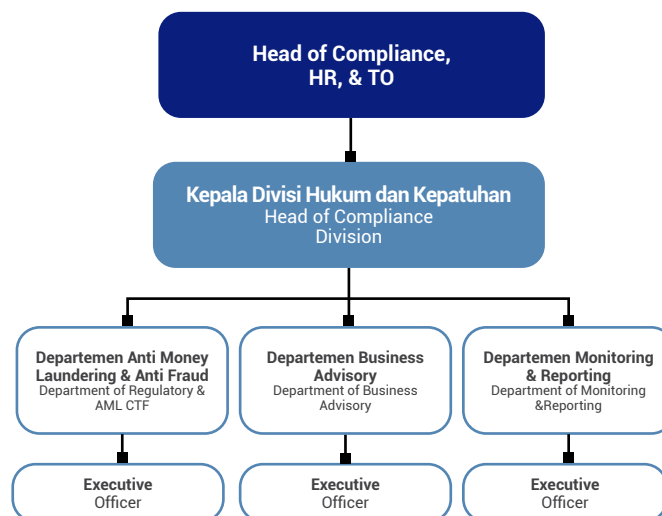
Compliance Unit

Indonesia Eximbank carries out its compliance function through an independent Compliance Unit. This unit is not affiliated with any business, operational, or other supporting functions, thereby ensuring objective oversight of all of Indonesia Eximbank's business and operational activities. In carrying out its duties, Compliance Unit plays a strategic role, including:

1. Helping to improve the Compliance Culture at all levels of the organization and business activities of Indonesia Eximbank;
2. Managing Compliance Risk in coordination with all levels of the organization in fulfilling the Compliance Function with the applicable laws and regulations;
3. Ensure that policies, procedures, provisions and systems, as well as business activities carried out by Indonesia Eximbank are in accordance with compliance with the Law on Indonesia Eximbank and applicable legislation;
4. Ensuring Indonesia Eximbank compliance with commitments made by Indonesia Eximbank to regulators and/or other authorized authorities; and
5. Responsible for implementing and ensuring the implementation of the AML/CFT & PPPSPM programs at Indonesia Eximbank.

Struktur Organisasi

Organizational Structure



1. Departemen Anti Money Laundering & Anti Fraud Melakukan pengkajian dan pengujian kepatuhan lembaga terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku maupun yang akan diberlakukan untuk memastikan pemenuhannya kepada regulator serta koordinasi dalam pengelolaan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam aktivitas operasional dan bisnis. 2. Departemen Pendampingan Bisnis Melakukan pendampingan terhadap unit kerja untuk memastikan kepatuhan aktivitas operasional dan bisnis dalam pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi. Termasuk di dalamnya melakukan evaluasi terhadap draft peraturan internal maupun pengkinian peraturan internal. Melakukan pendampingan di dalam pemenuhan penilaian tata Kelola yang Baik (oleh BPKP maupun secara <i>self assessment</i>) Bersama Departemen lainnya. 3. Departemen Compliance Monitoring & Reporting Melakukan pengelolaan risiko kepatuhan, budaya kepatuhan dan evaluasi kepatuhan atas aktivitas operasional dan bisnis lembaga terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berlandaskan pada prinsip Tata Kelola yang Baik, serta melakukan penyusunan dan pelaporan atas pelaksanaan fungsi Kepatuhan.	1. Regulatory & AML/CFT Department To assess and test the institution's compliance with prevailing and future laws and regulations to ensure compliance with regulators and coordination in managing the implementation of anti-money laundering and terrorism financing prevention programs in operational and business activities. 2. Business Advisory Department Provide assistance to work units to ensure compliance of operational and business activities with laws and regulations. This includes evaluating draft internal regulations and updating internal regulations. Assisting in the fulfillment of good corporate governance assessments (by BPKP or self-assessment) with other departments. 3. Monitoring & Reporting Department Performing compliance risk management, compliance culture and evaluation of compliance of operational and business activities of the institution with applicable laws and regulations based on the GCG principles, as well as preparing and reporting on the implementation of Compliance function.

Profil Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan

Head of Compliance Unit Profile

Yoseph T. Purnomosidi Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan Head of Compliance Division	
Usia Age	55 tahun 56 years old
Warga Negara Nationality	Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Tangerang Selatan
Riwayat Pendidikan Educational Background	- S2 Manajemen – Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2010 - S1 Hukum – Universitas Atma Jaya Yogyakarta - Master of Management – Atma Jaya Catholic University of Indonesia, 2010 - Bachelor of Law – Atma Jaya University Yogyakarta, 1991
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	KDE No. 0017/KDE/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 KDE No. 0017/KDE/06/2024 dated June 26, 2024
Riwayat Karier Career Background	- Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan – LPEI, Februari 2024 – sekarang - Kepala Divisi – PT IEB Prima Aset, Januari 2022 – Januari 2024 - Kepala Divisi Restrukturisasi Aset – LPEI, Juli 2020 – Desember 2021 - Kepala Divisi Internal Audit – LPEI, April 2015 – Juni 2020 - Head of Legal and Compliance Division – LPEI, February 2024 – present - Head of Division – PT IEB Prima Aset, January 2022 – January 2024 - Head of Asset Restructuring Division – LPEI, July 2020 – December 2021 - Head of Internal Audit Division – LPEI, April 2015 – June 20200
Sertifikasi Certification	- Certificate of Competence of Bank Risk Management Level 6 from Banking Professional Certification Body (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan-LSPP) - Telah mengikuti Program Penerapan APU PPT dan PPSPM yang diselenggarakan oleh LMS - Certificate of Competence of Bank Risk Management Level 6 from Banking Professional Certification Body (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan-LSPP) - Has participated in APU PPT and PPSPM Implementation Program organized by LMSS

Program Kerja dan Fokus Aktivitas Fungsi Kepatuhan Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Fungsi Kepatuhan menjalankan berbagai program dan aktivitas utama, di antaranya:

1. Melakukan pengembangan Sistem Informasi Manajemen APU, PPT, dan PPPSPM;
2. Melakukan uji Kepatuhan untuk meningkatkan aspek mitigasi atas risiko kepatuhan dalam kegiatan aktivitas bisnis dari sisi BMPP, APU PPT, laporan keuangan *audited*, dan indikator pemenuhan justifikasi ekspor;
3. Melakukan Uji Petik (Pembiayaan dan Pengadaan Barang/Jasa) untuk memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa LPEI sesuai dengan regulasi eksternal dan perundang-undangan;
4. Penyusunan kajian regulasi baru yang dikeluarkan;
5. Penyesuaian regulasi internal (aspek kepatuhan);
6. Pelaporan Anti Gratifikasi dan *Whistle Blowing System* (WBS);
7. Pemenuhan permintaan Otoritas Jasa Keuangan;
8. Melakukan koordinasi penilaian Tata Kelola yang Baik LPEI sesuai PMK No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Melakukan Self-Assessment Penilaian Tata Kelola sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/SEOJK.05/2022 Tentang

Work Program and Activity Focus of Compliance Unit in 2024

Throughout 2024, Compliance Unit carried out various programs and main activities, including:

1. Developing APU, PPT, and PPPSPM Management Information System;
2. Conducting Compliance tests to improve mitigation aspects of compliance risks in business activities from BMPP, APU PPT, audited financial reports, and export justification fulfillment indicators;
3. Conducting Spot Checks (Financing and Procurement of Goods/Services) to ensure that the implementation of Indonesia Eximbank's procurement of goods/services is in accordance with external regulations and laws;
4. Preparation of studies of new regulations issued;
5. Adjustment of internal regulations (compliance aspects);
6. Anti-Gratification Reporting and Whistle Blowing System (WBS);
7. Fulfillment of requests from the Financial Services Authority;
8. Coordinating the assessment of Indonesia Eximbank's Good Governance in accordance with PMK No. 208/PMK.06/2021 concerning Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles Conducting Self-Assessment of Governance Assessment in accordance with Circular Letter of the

Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; dan

9. Melakukan monitoring Tindak Lanjut Penilaian BPKP atas Tata Kelola yang Baik sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah.

Tantangan Fungsi Kepatuhan

Untuk menjalankan program kerja tahun 2024 dan mencapai target yang ditetapkan, Fungsi Kepatuhan menghadapi berbagai tantangan, termasuk:

1. Proses transformasi lembaga yang sedang berlangsung di mana akan terus dilakukan penyesuaian baik dari segi struktur organisasi, penyempurnaan alur kerja, maupun pengembangan sistem teknologi pendukung serta peningkatan keterampilan (*skill set*) pegawai yang akan terus ditingkatkan seiring dengan perbaikan dalam mendukung proses transformasi lembaga.
2. Peningkatan kesadaran (*awareness*) akan pentingnya penerapan manajemen risiko dan budaya kepatuhan dalam setiap aktivitas, proses, dan bisnis di LPEI akan terus dilakukan secara berkesinambungan.
3. Terbitnya beberapa regulasi baru yang berdampak dan harus segera diterapkan oleh LPEI pada kesempatan pertama

Strategi Fungsi Kepatuhan

Pada tahun 2024, penerapan kepatuhan difokuskan pada berbagai langkah strategis, antara lain:

1. Berperan Aktif dalam Komunikasi Dua Arah: Fungsi kepatuhan akan berperan aktif dalam menjalankan komunikasi dua arah secara berkesinambungan dan memberikan nilai tambah, baik dalam konteks internal maupun eksternal, dengan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*).
2. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan sebagai Bagian dari Model 3 Lini: Fungsi kepatuhan akan diintegrasikan sebagai bagian dari model 3 lini, di mana pelaksanaannya sebagai fungsi lini 2 turut serta melakukan koordinasi dengan pelaksanaan fungsi *assurance* lini 2. Hal ini bertujuan untuk memastikan keselarasan dan efektivitas operasional.
3. Peningkatan Budaya dan Fungsi Kepatuhan:
4. Upaya akan difokuskan pada peningkatan budaya dan fungsi kepatuhan. Dalam hal ini mencakup pengelolaan dan pelaksanaan yang berkelanjutan terhadap Penerapan Strategi *Anti Fraud* dan Pengendalian Gratifikasi. Langkah ini diambil untuk memastikan integritas dan kepatuhan yang tinggi dalam semua aspek operasional.

Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 15/SEOJK.05/2022 concerning Assessment of the Health Level of Indonesian Export Financing Institutions; and

9. Monitoring the Follow-up of BPKP Assessment of Good Governance in accordance with Regulation of the Minister of Finance No. 208/PMK.06/2021 concerning Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles.

Compliance Function Challenges

To implement the 2024 work program and achieve the set targets, Compliance Division faces various challenges, including:

1. The ongoing institutional transformation process where adjustments will continue to be made in terms of organizational structure, workflow refinement, and development of supporting technology systems as well as improving employee skills (*skill sets*) which will continue to be improved along with improvements in supporting the institutional transformation process.
2. Increasing awareness of the importance of implementing risk management and compliance culture in every activity, process, and business at Indonesia Eximbank will continue to be carried out continuously.
3. The issuance of several new regulations that have an impact and must be implemented immediately by Indonesia Eximbank at the first opportunity

Compliance Function Strategy

In 2024, compliance implementation focused on various strategic measures, including:

1. Active Role in Two-Way Communication: The compliance function will play an active role in implementing continuous two-way communication and providing added value, both in internal and external contexts, with all stakeholders.
2. Implementation of Compliance Function as Part of the 3-Line Model: The compliance function will be integrated as part of the 3-line model, where its implementation as a line 2 function also coordinates with the implementation of line 2 assurance function. This aims to ensure operational alignment and effectiveness.
3. Improving Compliance Culture and Function:
4. Efforts will be focused on improving the compliance culture and function. This includes the management and ongoing implementation of Anti-Fraud Strategy and Gratification Control. This step is taken to ensure high integrity and compliance in all operational aspects.

Rencana Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2024

1. Mengelola Risiko Kepatuhan dan mendukung pemenuhan Fungsi Kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain melalui pemantauan terhadap pemenuhan komitmen dan pelaporan kepada regulator, serta terlibat aktif dalam penilaian profil risiko Kepatuhan LPEI.
2. Memantau kebijakan, prosedur, ketentuan dan sistem, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh LPEI untuk memastikan kesesuaiannya dengan Undang-Undang tentang LPEI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melakukan pemantauan, kajian dan diseminasi atas regulasi eksternal baru yang berdampak kepada LPEI, serta penyampaian kajian kepatuhan atas rancangan dan/atau regulasi internal eksisting.
4. Melaksanakan fungsi koordinasi dan pendamping atas pelaksanaan penilaian tata kelola Lembaga, baik yang dilakukan secara *self-assessment* maupun oleh regulator dan/atau otoritas lain yang berwenang;
5. Pelaksanaan Uji Kepatuhan dan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah/APU PPT dan PPPSPM atas proposal bisnis untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pemenuhan implementasi *Governance, Risk & Compliance* (GRC) terhadap fungsi Kepatuhan sesuai dengan *road map* yang telah ditetapkan antara lain: i. Pengembangan dan pemberdayaan peran, tugas dan tanggung jawab fungsi Designated Compliance & Operational Risk (DCOR) Officer; dan ii. Efektivitas penerapan strategi dan budaya Anti Fraud melalui kolaborasi dan koordinasi secara aktif dan berkelanjutan dengan unit kerja terkait.
7. Mewujudkan budaya sadar risiko dan kepatuhan pada tingkatan organisasi dan kegiatan usaha LPEI antara lain melalui penerapan prinsip Tata Kelola yang baik, 144 implementasi GRC, pengendalian Gratifikasi, pengelolaan WBS dan sosialisasi berkala kepada seluruh jajaran LPEI;
8. Melakukan edukasi dan pembinaan kepada staf-staf LPEI dan nasabah-nasabah yang direkomendasikan oleh LPEI.

Kegiatan dan Realisasi (Pencapaian) Kepatuhan Tahun 2024

1. Asesmen terhadap penerapan Tata Kelola yang Baik Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tahun 2023 telah dilaksanakan dan laporan hasil asesmen tertanggal 28 Maret 2024 telah disampaikan kepada LPEI oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memberikan gambaran mengenai kondisi penerapan Tata Kelola yang Baik di tahun 2023. Asesmen Tata Kelola yang Baik dilakukan menggunakan acuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.06/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Prinsip Tata Kelola,

Compliance Function Work Plan in 2024

1. Manage Compliance Risk and support the fulfillment of Compliance Functions to the provisions and regulations in force, including through monitoring the fulfillment of commitments and reporting to regulators, as well as being actively involved in assessing Indonesia Eximbank's Compliance risk profile.
2. Monitor policies, procedures, provisions and systems, as well as business activities carried out by Indonesia Eximbank to ensure compliance with the Law on Indonesia Eximbank and applicable laws and regulations;
3. Conduct monitoring, review and dissemination of new external regulations that impact Indonesia Eximbank, as well as submitting compliance studies on existing internal drafts and/or regulations.
4. Carry out coordination and assistance functions for the implementation of the Institution's governance assessment, both through self-assessment and by regulators and/or other authorized authorities;
5. Implementation of Compliance Tests and Application of Know Your Customer Principles/APU PPT and PPPSPM for business proposals to ensure compliance with applicable laws and regulations.
6. Fulfillment of the implementation of Governance, Risk & Compliance (GRC) for the Compliance function in accordance with the established road map, including: i. Development and empowerment of the role, duties and responsibilities of the Designated Compliance & Operational Risk (DCOR) Officer function; and ii. Effectiveness of the implementation of Anti-Fraud strategies and culture through active and continuous collaboration and coordination with related work units.
7. Realizing a culture of risk awareness and compliance at the organizational level and Indonesia Eximbank business activities, including through the application of good governance principles, 144 GRC implementation, Gratification control, WBS management and periodic socialization to all levels of Indonesia Eximbank;
8. Conducting education and coaching to Indonesia Eximbank staff and customers recommended by Indonesia Eximbank.

Compliance Unit Activities and Realization (Achievement) in 2024

1. Assessment of Good Governance of Indonesian Export Financing Institution (Indonesia Eximbank) in 2023 has been carried out and the assessment result report dated March 28, 2024 has been submitted to Indonesia Eximbank by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) which provides an overview of the condition of the implementation of Good Governance in 2023. The Good Governance Assessment was carried out using the reference of the Minister of Finance Regulation Number 208/PMK.06/2021 dated December 29, 2021 concerning

Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. Fungsi Kepatuhan telah berpartisipasi aktif sebagai lead coordinator, melakukan koordinasi dengan seluruh Divisi LPEI mulai dari persiapan hingga pelaksanaan asesmen. Hasil asesmen menyimpulkan bahwa penerapan Tata Kelola yang Baik LPEI pada tahun 2023 mencapai kategori predikat 'Baik' dengan skor 80,004 dari skor maksimal 100.

2. Semua kata "Satuan Kerja Kepatuhan" dirubah menjadi "Fungsi Kepatuhan" juga terlibat aktif dalam pemberian sebanyak 100 opini/rekomendasi/kajian terkait produk/jasa dan proses atas kesesuaian penerapannya dengan regulasi eksternal yang berlaku untuk membantu pengambilan keputusan di LPEI yang sesuai dengan koridor kajian.
3. Secara berkelanjutan, Satuan Kerja Kepatuhan berperan aktif melakukan komunikasi berkesinambungan, pendampingan, dan menjembatani komunikasi antara unit kerja di LPEI dengan OJK, serta memastikan pemenuhan terhadap permintaan informasi/data oleh regulator dan otoritas.
4. Melakukan pemantauan atas pemenuhan 169 jenis pelaporan wajib secara berkala dan tepat waktu kepada regulator dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Koordinator dalam pemenuhan 100% atas pelaporan LHKPN periode tahun 2023 dengan total 36 orang wajib lapor dan batas waktu pelaporan 31 Maret 2024.
6. Pelaksanaan identifikasi risiko melalui Uji Kepatuhan atas 208 proposal, dengan ruang lingkup kesesuaian regulasi, penerapan APU, PPT, & PPPSPM, kesesuaian monitoring fasilitas, pemenuhan laporan keuangan audited, perijinan, asuransi dan penilaian agunan serta pemenuhan *reviu/screening* terhadap 511 Nasabah, Calon Nasabah, Calon Buyer dari Penjaminan/Asuransi dengan menggunakan aplikasi Refinitiv.
7. Merujuk Pasal 74 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, Satuan Kerja Kepatuhan melakukan penilaian secara individual (*self assessment*) atas risiko Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Terorisme, dan/atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal LPEI Tahun 2024 dengan hasil penilaian akhir adalah *Low to Moderate*.
8. Pelaksanaan Uji Petik untuk menilai efektivitas pelaksanaan self-assessment uji kepatuhan dan penerapan program APU, PPT, & PPPSPM dengan sampel nasabah aktif segmen Pembiayaan dengan CIF yang dibentuk pada periode 01 Januari - 31 Maret 2024 dan total fasilitas sampai dengan Rp10 Miliar.
9. Pelaksanaan Uji Petik atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan sampel sebanyak 7 aktivitas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan selama tahun 2023.

the Principles of Governance, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank. The Compliance Work Unit has actively participated as the lead coordinator, coordinating with all Indonesia Eximbank Divisions from preparation to implementation of the assessment. The assessment results concluded that the implementation of Good Governance of Indonesia Eximbank in 2023 reached 'Good' category with a score of 80.004 out of a maximum score of 100.

2. The Compliance Work Unit is also actively involved in providing 100 opinions/recommendations/studies related to products/services and processes on the suitability of their implementation with applicable external regulations to assist decision-making at Indonesia Eximbank in accordance with the study corridor.
3. On an ongoing basis, the Compliance Work Unit plays an active role in carrying out continuous communication, assistance, and bridging communication between work units at Indonesia Eximbank and OJK, as well as ensuring fulfillment of requests for information/data by regulators and authorities.
4. Monitoring the fulfillment of 169 types of mandatory reporting periodically and on time to regulators and in accordance with applicable provisions.
5. Coordinator in fulfilling 100% of LHKPN reporting for the 2023 period with a total of 36 mandatory reporting persons and a reporting deadline of March 31, 2024.
6. Implementation of risk identification through Compliance Testing of 208 proposals, with the scope of regulatory compliance, implementation of APU, PPT, & PPPSPM, compliance with facility monitoring, fulfillment of audited financial reports, licensing, insurance and collateral assessment and fulfillment of review/screening of 511 Customers, Prospective Customers, Prospective Buyers of Guarantees/Insurance using the Refinitiv application.
7. Referring to Article 74 paragraph (1) letter a of the Financial Services Authority Regulation Number 8 of 2023 concerning the Implementation of the Anti-Money Laundering Program, Prevention of Terrorism Financing, and Prevention of Proliferation Funding of Weapons of Mass Destruction in the Financial Services Sector, the Compliance Work Unit conducted an individual assessment (self-assessment) of the risk of Money Laundering, Terrorism, and/or Proliferation Funding of Weapons of Mass Destruction Indonesia Eximbank in 2024 with the final assessment result being Low to Moderate.
8. Implementation of Spot Test to assess the effectiveness of the implementation of self-assessment compliance test and implementation of APU, PPT, & PPPSPM programs with samples of active customers in the Financing segment with CIF formed in the period of January 1 - March 31, 2024 and total facilities of up to Rp10 billion.
9. Implementation of Spot Test on the procurement of goods/services with a sample of 7 procurement activities of goods/services carried out during 2023.

10. Melakukan verifikasi dan menyampaikan sebanyak 1 (satu) laporan penerimaan gratifikasi kategori Wajib Laporkan kepada KPK dan mencatat sebanyak 11 (sebelas) laporan penerimaan gratifikasi kategori Tidak Wajib Laporkan dan/atau yang tidak disampaikan melalui aplikasi GOL KPK ke dalam register internal yang dikelola UPG.
11. Penerapan prinsip kepatuhan terhadap prinsip Syariah di LPEI juga dilakukan dengan penerbitan 3 opini Syariah, pelaksanaan Uji Petik terhadap 8 nasabah Syariah atas transaksi yang dijalankan berdasarkan prinsip Syariah dan penyelenggaraan Rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara rutin.
12. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian risiko Kepatuhan melalui penerapan Program APU, PPT, & PPPSPM, Pengendalian Gratifikasi dan *Whistleblowing System* (WBS).
13. Peningkatan budaya kepatuhan secara berkelanjutan melalui pelaksanaan sebanyak 3 kali sosialisasi/pelatihan dalam forum *New Hire Orientation* (NHO) terkait Fungsi Kepatuhan, Pengendalian Gratifikasi, *Whistleblowing System* (WBS) dan APU, PPT, & PPPSPM.
14. Pengkinian Peraturan Internal LPEI yang terkait dengan fungsi kepatuhan, yaitu Standar Pedoman Operasional Pelaksanaan Penerapan APU-PPT PPPSPM LPEI dan Standar Pedoman Operasional Penerapan Strategi Anti Fraud LPEI.

Rencana Kerja Tahun 2025

1. Mengelola Risiko Kepatuhan dan mendukung pemenuhan Fungsi Kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain melalui pemantauan terhadap pemenuhan komitmen dan pelaporan kepada regulator, serta terlibat aktif dalam penilaian profil risiko Kepatuhan LPEI.
2. Memantau kebijakan, prosedur, ketentuan dan sistem, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh LPEI untuk memastikan kesesuaiannya dengan Undang-Undang tentang LPEI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melakukan pemantauan, kajian dan diseminasi atas regulasi eksternal baru yang berdampak kepada LPEI, serta penyampaian kajian kepatuhan atas rancangan dan/atau regulasi internal eksisting.
4. Melaksanakan fungsi koordinasi dan pendamping atas pelaksanaan penilaian tata kelola Lembaga, baik yang dilakukan secara *self-assessment* maupun oleh regulator dan/atau otoritas lain yang berwenang.
5. Pelaksanaan Uji Kepatuhan dan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah/APU PPT dan PPPSPM atas proposal bisnis untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pemenuhan implementasi *Governance, Risk & Compliance* (GRC) terhadap fungsi Kepatuhan sesuai dengan *road map* yang telah ditetapkan antara lain:

10. Conduct verification and submit 1 (one) report on receipt of gratuities in the Mandatory Report category to KPK and record 11 (eleven) reports of receipt of gratuities in the Non-Mandatory Report category and/or which are not submitted through GOL application into the internal register managed by UPG.
11. Implementation of compliance principles with Sharia principles at Indonesia Eximbank is also carried out by issuing 3 Sharia opinions, implementing Spot Tests on 8 Sharia customers for transactions carried out based on Sharia principles and holding regular Sharia Supervisory Board (DPS) Meetings.
12. Implementation of monitoring and control of Compliance risks through the implementation of APU, PPT, & PPPSPM Program, Gratification Control and Whistleblowing System (WBS).
13. Continuous improvement of compliance culture through the implementation of 3 socialization/training in the New Hire Orientation (NHO) forum related to the Compliance Function, Gratification Control, Whistleblowing System (WBS) and APU, PPT, & PPPSPM.
14. Updating of Indonesia Eximbank Internal Regulations related to the compliance function, namely the Standard Operational Guidelines for the Implementation of APU-PPT PPPSPM Indonesia Eximbank and the Standard Operational Guidelines for the Implementation of Indonesia Eximbank Anti-Fraud Strategy.

Work Plan for 2025

1. Manage Compliance Risk and support the fulfillment of Compliance Functions to the provisions and regulations in force, including through monitoring the fulfillment of commitments and reporting to regulators, as well as being actively involved in assessing Indonesia Eximbank's Compliance risk profile.
2. Monitor policies, procedures, provisions and systems, as well as business activities carried out by Indonesia Eximbank to ensure compliance with the Law on Indonesia Eximbank and applicable laws and regulations.
3. Conduct monitoring, review and dissemination of new external regulations that impact Indonesia Eximbank, as well as submitting compliance studies on existing internal drafts and/or regulations.
4. Carry out coordination and assistance functions for the implementation of the Institution's governance assessment, both through self-assessment and by regulators and/or other authorized authorities.
5. Implementation of Compliance Tests and Application of Know Your Customer Principles/APU PPT and PPPSPM for business proposals to ensure compliance with applicable laws and regulations.
6. Fulfillment of the implementation of Governance, Risk & Compliance (GRC) for the Compliance function in accordance with the established road map, including:

a. Pengembangan dan pemberdayaan peran, tugas dan tanggung jawab fungsi <i>Designated Compliance & Operational Risk (DCOR) Officer</i>; b. Efektivitas penerapan strategi dan budaya Anti <i>Fraud</i> melalui kolaborasi dan koordinasi secara aktif dan berkelanjutan dengan unit kerja terkait; dan c. Penerapan/Implementasi Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan; dan d. Mewujudkan budaya sadar risiko dan kepatuhan pada tingkatan organisasi dan kegiatan usaha LPEI antara lain melalui penerapan prinsip Tata Kelola yang baik, 144 implementasi GRC, pengendalian Gratifikasi, pengelolaan WBS dan sosialisasi berkala kepada seluruh jajaran LPEI.	a. Development and empowerment of the role, duties and responsibilities of the Designated Compliance & Operational Risk (DCOR) Officer function; b. Effectiveness of the implementation of Anti-Fraud strategies and culture through active and continuous collaboration and coordination with related work units; and c. Implementation of ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System Certification; and d. Realizing a culture of risk awareness and compliance at the organizational level and Indonesia Eximbank business activities, including through the application of good governance principles, 144 GRC implementation, Gratification control, WBS management and periodic socialization to all levels of Indonesia Eximbank.



Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Lembaga Penjaminan Ekspor Indonesia (LPEI) menerapkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) sebagai bagian dari upaya memastikan tata kelola yang baik. SPI dirancang untuk menjaga efektivitas dan efisiensi operasional, sekaligus memperkuat keandalan laporan keuangan serta validitas kontrol internal. Dengan penerapan yang terstruktur, SPI mendukung kepatuhan terhadap regulasi, memastikan pengelolaan risiko yang optimal, serta meningkatkan transparansi dalam setiap proses bisnis. Sebagai landasan utama dalam pengendalian dan evaluasi, SPI berperan penting dalam memperkuat integritas LPEI dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.

Kerangka Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal yang efektif diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pada seluruh jenjang kegiatan organisasi LPEI yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. LPEI mengimplementasikan Sistem Pengendalian Internal berdasarkan COSO *Framework* 2013, yang mencakup komponen-komponen Sistem Pengendalian Internal yang efektif, antara lain:

1. Lingkungan Pengendalian internal yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, yang terdiri atas:
 - a. Integritas nilai etika dan kompetensi karyawan;
 - b. Filosofi dan gaya manajemen;
 - c. Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya;
 - d. Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - e. Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana;
2. Pengkajian pengelolaan risiko usaha.
3. Aktivitas pengendalian.
4. Sistem informasi dan komunikasi, serta
5. Monitoring.

Untuk memastikan Sistem Pengendalian Internal berjalan secara efektif, dilakukan penilaian dengan mempertimbangkan risiko dan dilengkapi dengan melakukan evaluasi yang dilakukan melalui penyusunan kuesioner untuk mendapatkan gambaran menyeluruh atas implementasi Sistem Pengendalian Internal. Hasil penilaian tersebut juga menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun langkah perbaikan.

Indonesia Eximbank implements an Internal Control System (ICS) as part of its efforts to ensure good corporate governance. The ICS is designed to maintain operational effectiveness and efficiency, while strengthening the reliability of financial reports and the validity of internal controls. With structured implementation, ICS supports regulatory compliance, ensures optimal risk management, and enhances transparency in every business process. As the main foundation for control and evaluation, ICS plays an important role in strengthening Indonesia Eximbank's integrity and increasing stakeholder confidence.

Internal Control System Framework

An effective Internal Control System is needed in the implementation of business activities at all levels of Indonesia Eximbank's organizational activities, the implementation of which is in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. Indonesia Eximbank's implements an Internal Control System based on the COSO *Framework* 2013, which includes the components of an effective Internal Control System:

1. Internal Control Environment implemented with discipline and structure, consisting of:
 - a. integrity of ethical values and employee competencies;
 - b. management philosophy and style;
 - c. the method used by management in carrying out its authority and responsibilities;
 - d. organization and development of human capital; and
 - e. attention and direction carried out by the Executive Director and Managing Director;
2. Assessment of business risk management,
3. Control activities,
4. Information and communication systems, and
5. Monitoring.

To ensure that the Internal Control System runs effectively, an assessment is carried out by considering the risks and is complemented by an evaluation carried out through the preparation of a questionnaire to obtain a comprehensive picture of the implementation of Internal Control System. The assessment results are also used as considerations in preparing improvement actions.

Pengendalian Keuangan dan Operasional

Kegiatan Pengendalian Internal yang menyeluruh, efektif, dan efisien diperlukan untuk memastikan pencapaian tujuan LPEI. Penerapannya dilakukan pada semua tingkatan fungsional antara lain mencakup:

1. Evaluasi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana dan Chief of;
2. Pengaturan terkait kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi dan/atau pembagian tugas;
3. Evaluasi kinerja operasional;
4. Pengendalian sistem informasi;
5. Pengendalian aset fisik; dan
6. Dokumentasi.

Dalam hal keuangan, LPEI telah memiliki ketentuan dan kebijakan yang mengatur pembukuan dilakukan dengan cermat serta pelaporan keuangan disusun sesuai prinsip akuntansi yang berlaku.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi bagian penting dalam memastikan keberlangsungan bisnis yang sehat dan berintegritas. Untuk itu, LPEI menerapkan Sistem Pengendalian Internal yang tidak hanya berfungsi meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dijalankan selaras dengan ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, kepatuhan LPEI terhadap regulasi mencakup berbagai aspek, di antaranya:

1. Kebijakan Internal
LPEI memastikan bahwa kegiatannya telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal yang berlaku. Hal ini mencakup penyesuaian dengan standar dan pedoman yang diterapkan oleh LPEI untuk memastikan konsistensi dan ketaatan internal.
2. Regulasi Pemerintah
LPEI mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait operasional dan kebijakan pengendalian ekspor dan impor, termasuk aturan yang ditetapkan oleh otoritas pengawas dan pemerintah terkait lainnya.
3. Standar Akuntansi
LPEI juga mematuhi regulasi terkait keuangan, termasuk pengungkapan informasi keuangan yang akurat dan benar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Financial and Operational Controls

Comprehensive, effective and efficient Internal Control activities are needed to ensure the achievement of Indonesia Eximbank's objectives. Its implementation is carried out at all functional levels, including:

1. Evaluation of Board of Directors, Executive Directors, Managing Directors and Chief of;
2. Regulations related to authority, authorization, verification, reconciliation and/or division of tasks;
3. Evaluation of operational performance;
4. Information system control;
5. Control of physical assets; and
6. Documentation.

In terms of finance, Indonesia Eximbank has provisions and policies that regulate bookkeeping to be carried out carefully and financial reporting to be prepared in accordance with applicable accounting principles.

Compliance with Laws and Regulations

Indonesia Eximbank always prioritizes good corporate governance principles in every aspect of its operations. Compliance with laws and regulations is an integral part of ensuring healthy and ethical business continuity. To that end, Indonesia Eximbank implements an Internal Control System that not only serves to improve operational efficiency and effectiveness, but also ensures that all activities are carried out in accordance with applicable laws and regulations. In practice, Indonesia Eximbank's compliance with regulations covers various aspects, including:

1. Internal Policies of Indonesia Eximbank
Indonesia Eximbank Internal Audit Unit must ensure that all activities carried out by Indonesia Eximbank comply with internal policies and procedures that have been established. This includes alignment with the standards and guidelines applied by Indonesia Eximbank to ensure internal consistency and compliance.
2. Government Regulations
Indonesia Eximbank must comply with all regulations issued by the government related to export and import operations and policies. This includes rules established by supervisory authorities and other relevant government agencies that affect Indonesia Eximbank activities.
3. Financial Accounting Standards
Indonesia Eximbank Internal Audit Unit must also ensure that Indonesia Eximbank complies with all financial regulations, including accurate and proper financial information disclosure, in accordance with applicable Financial Accounting Standards.

4. **Perlindungan Terhadap Risiko Hukum**
LPEI juga mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan dan penerapan langkah-langkah untuk meminimalkan potensi risiko hukum yang mungkin timbul.
5. **Audit dan Pemantauan Kepatuhan**
Proses ini mencakup evaluasi terhadap efektivitas pengendalian internal serta pemantauan atas tindakan perbaikan yang dilakukan.

Sistem Pengendalian Internal tidak hanya berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam melindungi lembaga dari risiko hukum serta membangun integritas dan kepercayaan pemangku kepentingan maupun otoritas pengawas.

Hal ini menjadi faktor penting dalam menjaga reputasi LPEI sebagai lembaga keuangan yang kredibel dan profesional, serta mencerminkan komitmen LPEI dalam mendukung pertumbuhan ekspor nasional yang berkelanjutan.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Penerapan Sistem Pengendalian Internal merupakan tanggung jawab seluruh pihak di LPEI. Untuk meyakini hal tersebut, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) melakukan penilaian melalui pelaksanaan audit berdasarkan perencanaan audit tahunan yang disusun dengan mempertimbangan risiko atau *risk based audit* dan dilengkapi dengan evaluasi melalui penyusunan kuesioner untuk mendapatkan gambaran menyeluruh atas implementasi Sistem Pengendalian Internal.

Atas kinerja operasional, dilakukan evaluasi terhadap penilaian Risiko (laporan profil Risiko), yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko, analisis data operasional dan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran. Selain itu, juga dilakukan aktivitas pemantauan atau monitoring atas kegiatan operasional sehari-hari. Pemantauan atau monitoring dimaksud merupakan kegiatan evaluasi, baik oleh satuan kerja operasional (*risk taking unit*), fungsi *risk management* dan fungsi kepatuhan maupun oleh SKAI secara berkala.

Sebagai pihak yang bertugas melakukan pengawasan, Dewan Direktur meninjau pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal dengan melakukan telaah atas:

1. Kebijakan/rancangan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal;
2. Hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian internal pada tingkat entitas (Laporan tingkat Kesehatan Lembaga);

4. **Legal Risk Protection**
Internal Audit Unit should be designed to identify and manage legal risks that may impact Indonesia Eximbank. This process includes a deep understanding of relevant laws and regulations and the implementation of measures to minimize potential legal risks.
5. **Compliance Audit and Monitoring**
A robust internal audit system needs to be implemented to regularly check and monitor Indonesia Eximbank compliance with laws and regulations. This process includes evaluating the effectiveness of internal controls and implementing necessary corrective actions.

Indonesia Eximbank Internal Audit Unit plays a role not only in ensuring compliance with laws and regulations, but also in protecting the institution from legal risks and building integrity and trust among stakeholders and supervisory authorities.

This compliance is a crucial factor in maintaining Indonesia Eximbank's reputation as a credible and professional financial institution. Additionally, compliance with regulations reflects Indonesia Eximbank's commitment to supporting sustainable growth in national exports.

Review of Internal Control Effectiveness

The implementation of Internal Control System is the responsibility of all parties in Indonesia Eximbank. To ensure this, the Internal Audit Work Unit (SKAI) conducts an assessment through an audit based on the annual audit plan prepared by considering risks or risk-based audits and is equipped with an evaluation through the preparation of a questionnaire to obtain a comprehensive picture of the implementation of Internal Control System.

For operational performance, an evaluation is carried out on the Risk assessment (Risk profile report) by the Risk Management Work Unit, operational data analysis and evaluation of the realization of work plan and budget implementation. In addition, monitoring activities are also carried out on daily operational activities. The monitoring referred to is an evaluation activity, both by the operational work unit (risk taking unit), risk management function and compliance function as well as by SKAI periodically.

As the party tasked with carrying out supervision, the Board of Directors reviews the implementation of Internal Control System by conducting a review of:

1. Policies/designs and implementation of Internal Control System;
2. Results of evaluation of the effectiveness of internal control at the entity level (Institutional Health Level Report);

3. Hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian internal pada tingkat operasional/aktivitas (*risk and control self assessment*); dan
4. *Internal control report* yang merupakan evaluasi pengendalian internal berdasarkan hasil audit selama 1 (satu) tahun sesuai dengan rencana audit yang telah ditetapkan pada tahun bersangkutan. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai salah satu masukan dalam rencana audit tahun berikutnya;

Pernyataan Dewan Direktur atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

LPEI terus memperkuat tata kelola yang baik dengan memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Internal di seluruh kegiatan operasional. Dewan Direktur menilai bahwa pada tahun 2024, sistem ini telah diterapkan secara optimal dan mendukung kelancaran kegiatan usaha di setiap tingkatan organisasi yang tercermin dari:

1. LPEI melakukan kegiatan usaha secara efisien dan efektif dalam penggunaan aset, maupun sumber daya lainnya dalam rangka melindungi LPEI dari risiko kerugian.
2. LPEI selalu mengupayakan informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap, tepat waktu, dan relevan, yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat.
3. LPEI juga memastikan kesesuaian pelaksanaan atas seluruh kegiatan usaha LPEI dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, otoritas pengawas, maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur internal; dan
4. Menerapkan budaya risiko yang efektif pada organisasi secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di LPEI secara berkesinambungan.

Berdasarkan hasil *self-assessment* penerapan Sistem Pengendalian Internal pada tahun 2024, secara keseluruhan SPI LPEI 2024 mendapatkan skor sebesar 4,36 atau tergolong baik. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,09 dari 4,27 pada 2023.

Sistem pengendalian internal merupakan bagian penting dalam menjaga tata kelola yang baik di LPEI. Dewan Direktur memahami bahwa meskipun langkah-langkah pengendalian telah diterapkan, potensi risiko tetap ada. Oleh karena itu, LPEI senantiasa berupaya memastikan efektivitas dan peningkatan Sistem Pengendalian Internal secara berkelanjutan.

3. Results of evaluation of the effectiveness of internal control at the operational/activity level (*risk and control self-assessment*); and
4. Internal control report which is an evaluation of internal control based on audit results for 1 (one) year in accordance with the audit plan that has been set in the relevant year. The evaluation results are used as one of the inputs in the following year's audit plan;

Statement of Board of Directors on Adequacy of Internal Control System

Indonesia Eximbank continues to strengthen good corporate governance by ensuring the effectiveness of its Internal Control System in all aspects of its operations. Board of Directors assesses that in 2023, this system has been optimally implemented and supports the smooth running of business activities at every level of the organization. This success is reflected in Indonesia Eximbank's measures to ensure:

1. Efficient and effective business activities at Indonesia Eximbank in the use of assets and other resources to protect Indonesia Eximbank from the risk of loss.
2. Financial and management information that is accurate, complete, timely, and relevant, necessary for making appropriate and accountable decisions.
3. Compliance with all Indonesia Eximbank business activities with applicable laws and regulations, both those issued by the Government, supervisory authorities, and internal policies, regulations, and procedures; and
4. An effective risk culture throughout the organization to identify weaknesses and assess deviations early and continuously reassess the reasonableness of policies and procedures existing at Indonesia Eximbank.

Based on the results of the self-assessment of the implementation of the Internal Control System in 2024, overall SPI LPEI 2024 received a score of 4.36 or classified as good. This value has increased by 0.09 from 4.27 in 2023.

The internal control system is an important part of maintaining good corporate governance at Indonesia Eximbank. Board of Directors understands that although control measures have been implemented, potential risks remain. Therefore, Indonesia Eximbank continuously strives to ensure the effectiveness and improvement of internal control systems on an ongoing basis.

Manajemen Risiko

RISK MANAGEMENT

Dasar Hukum

1. UU No. 2/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4/2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43/2019 tanggal 18 Juni 2019 tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional.
3. PMK No. 58/PMK.06/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
4. PMK No. 208/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
5. POJK No. 9/2022 tanggal 23 Juni 2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
6. POJK No. 42/2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.05/2022 tanggal 7 September 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
8. Peraturan Dewan Direktur No. 0017/PDD/12/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Kebijakan Manajemen Risiko Enterprise Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
9. Peraturan Direktur Eksekutif No.0009/PDE/07/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI;
10. Peraturan Direktur Eksekutif No.0027/PDE/12/2023 tanggal 7 Desember 2023 tentang Manajemen Risiko Enterprise Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Gambaran Umum Manajemen Risiko LPEI

Manajemen Risiko merupakan rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan LPEI untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko yang muncul dari seluruh aktivitas usaha. Sistem ini dirancang untuk membantu LPEI menghadapi ketidakpastian dan dinamika perubahan di lingkungan bisnis. Sebagai bagian dari upaya pengelolaan risiko yang optimal, LPEI berkomitmen untuk menetapkan langkah mitigasi yang tepat, serta secara aktif melakukan tindak lanjut guna mengurangi potensi risiko dan dampak kerugian. Dalam operasional sehari-hari, sistem manajemen risiko berperan sebagai elemen krusial yang terintegrasi dalam sistem pengendalian internal.

Legal Basis

1. Law No. 2/2009 dated January 12, 2009 concerning Indonesian Export Financing Institution as amended by Law No. 4/2023 dated January 12, 2023 concerning the Development and Strengthening of Financial Sector.
2. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 43/2019 dated June 18, 2019 concerning the Basic Policy for National Export Financing.
3. PMK No. 58/PMK.06/2020 dated May 29, 2020 concerning the Development and Supervision of Indonesian Export Financing Institution.
4. PMK No. 208/2021 dated December 30, 2021 concerning the Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesian Export Financing Institution.
5. POJK No. 9/2022 dated June 23, 2022 concerning the Supervision of Indonesian Export Financing Institution.
6. POJK No. 42/2024 dated December 27, 2024 concerning the Implementation of Risk Management for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institution.
7. Circular Letter of the Financial Services Authority No. 15/SEOJK.05/2022 dated September 7, 2022 concerning the Assessment of Health Level of Indonesian Export Financing Institution.
8. Regulation of the Board of Directors No. 0017/PDD/12/2022 dated December 2, 2022 concerning the Enterprise Risk Management Policy of Indonesian Export Financing Institution.
9. Regulation of the Executive Director No.0009/PDE/07/2023 dated July 11, 2023 concerning the Assessment of Health Level of Indonesia Eximbank.
10. Regulation of the Executive Director No.0027/PDE/12/2023 dated December 7, 2023 concerning the Enterprise Risk Management of Indonesian Export Financing Institution.

Overview of Indonesia Eximbank Risk Management

Risk Management is a set of procedures and methodologies used by Indonesia Eximbank to identify, measure, control, and monitor risks arising from all business activities. This system is designed to help Indonesia Eximbank deal with uncertainty and dynamic changes in the business environment. As part of its efforts to optimize risk management, Indonesia Eximbank is committed to establishing appropriate mitigation measures and actively following up to reduce potential risks and losses. In day-to-day operations, risk management plays a crucial role as an integral part of internal control systems.

Pengelolaan risiko yang efektif dan terukur menjadi strategi penting dalam memastikan kelangsungan usaha. LPEI percaya bahwa penerapan sistem manajemen risiko yang komprehensif dalam perencanaan, pengendalian, dan pengawasan dapat meminimalkan potensi risiko yang dapat memengaruhi kondisi bisnis. Untuk memastikan pengelolaan risiko berjalan optimal, LPEI membangun budaya sadar risiko (*risk culture*) di seluruh jajaran pegawai. Dengan budaya ini, setiap pegawai yang berperan dalam pengambilan keputusan diharapkan mampu melakukan analisis mendalam terhadap eksposur risiko yang mungkin timbul dan menerapkan manajemen risiko di semua tingkatan organisasi.

LPEI juga menyadari bahwa beberapa risiko merupakan bagian tak terpisahkan dari aktivitas bisnis sehari-hari. Oleh karena itu, kebijakan manajemen risiko yang komprehensif serta pembangunan budaya risiko yang berkelanjutan menjadi kebutuhan mendasar. Dalam implementasinya, LPEI melakukan kajian mendalam terhadap risiko-risiko yang relevan dengan bisnisnya untuk memastikan pengelolaan dan mitigasi risiko yang lebih efektif, sehingga mendukung pencapaian kinerja yang lebih solid.

Fungsi Manajemen Risiko di LPEI mencakup pengelolaan risiko secara kelembagaan (*enterprise risk management*) dan terintegrasi (*integrated risk management*) di seluruh jaringan kantor. Pengelolaan ini diterapkan pada kegiatan usaha konvensional maupun berbasis prinsip syariah dengan melibatkan seluruh pejabat dan pegawai. Selain itu, fungsi manajemen risiko harus bersifat independen dari fungsi bisnis, operasional, serta pengendalian internal guna memastikan efektivitas penerapannya.

Penanggung Jawab Manajemen Risiko

LPEI senantiasa memastikan keberlanjutan operasional yang sehat melalui penguatan sistem pengendalian internal. Dalam mendukung hal ini, LPEI membentuk Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Manajemen Risiko. Kedua entitas ini berperan dalam penerapan manajemen risiko secara menyeluruh, memastikan setiap aktivitas operasional LPEI berjalan dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan yang optimal.

Effective and measurable risk management is an important strategy in ensuring business continuity. Indonesia Eximbank believes that the implementation of a comprehensive risk management system in planning, control, and supervision can minimize potential risks that may affect business conditions. To ensure optimal risk management, Indonesia Eximbank fosters a risk culture among all employees. With this culture, every employee involved in decision-making is expected to be able to conduct in-depth analysis of potential risk exposures and implement risk management at all levels of the organization.

Indonesia Eximbank also recognizes that some risks are an integral part of daily business activities. Therefore, comprehensive risk management policies and the development of a sustainable risk culture are fundamental requirements. In its implementation, Indonesia Eximbank conducts in-depth studies of risks relevant to its business to ensure more effective risk management and mitigation, thereby supporting the achievement of more solid performance.

The Risk Management function at Indonesia Eximbank covers enterprise risk management and integrated risk management across the entire office network. This management is applied to conventional and sharia-based business activities, involving all officers and employees. In addition, risk management function must be independent from business, operational, and internal control functions to ensure its effectiveness.

Unit in Charge for Risk Management

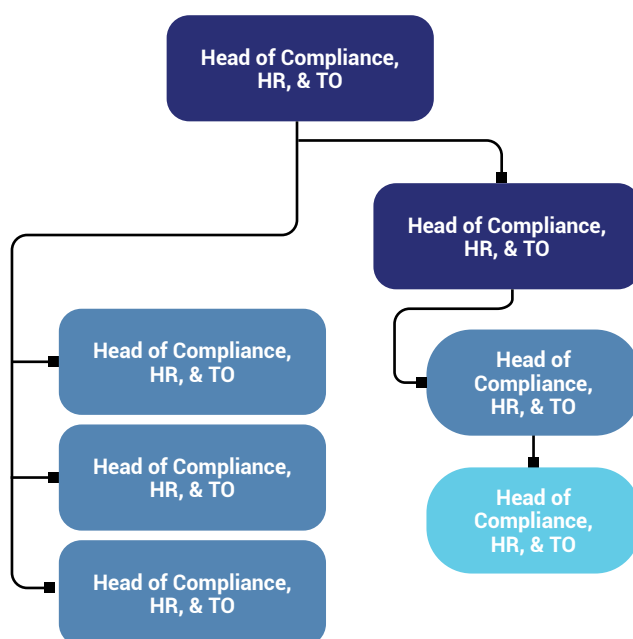
Indonesia Eximbank always makes sure its operations are healthy by strengthening its internal control system. To support this, Indonesia Eximbank has formed a Risk Management Committee and a Risk Management Unit. These two entities play a role in implementing comprehensive risk management, making sure all of Indonesia Eximbank's operations run with the best principles of prudence and compliance.

Wewenang dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko

Wewenang dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko adalah:

1. Mengidentifikasi risiko termasuk risiko yang melekat pada kegiatan usaha LPEI.
2. Menyusun metode pengukuran risiko.
3. Memantau pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disusun oleh Dewan Direktur.
4. Memantau posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional, serta melakukan pengujian dengan menggunakan skenario/asumsi kondisi tidak normal (*stress testing*) dan pengujian dengan menggunakan data historis.
5. Mengkaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko.
6. Mengkaji usulan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha.
7. Mengevaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko, jika LPEI menggunakan model untuk keperluan internal.
8. Memberikan rekomendasi kepada fungsi bisnis dan operasional dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki.
9. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Direktur Eksekutif secara berkala.

Struktur Organisasi Fungsi Manajemen Risiko Tahun 2024



Risk Management Unit Authorities and Responsibilities

The authorities and responsibilities of Risk Management Unit are:

1. Identify risks including risks inherent in Indonesia Eximbank business activities.
2. Developing risk measurement methods.
3. Monitoring the implementation of risk management strategies that have been prepared by the Board of Directors.
4. Monitoring the overall risk position, per type of risk, and per type of functional activity, as well as testing using scenarios/assumptions of abnormal conditions (*stress testing*) and testing using historical data.
5. Periodically review the Risk Management process.
6. Review the proposed development or expansion of business activities.
7. Evaluate the accuracy of the model and the validity of the data used to measure Risk, if Indonesia Eximbank uses the model for internal purposes.
8. Provide recommendations to the business and operational functions and/or to the Risk Management committee, in accordance with their authority.
9. Prepare and submit risk profile reports to the Executive Director on a regular basis.

Organizational Structure of Risk Management Function in 2024

Fungsi Manajemen Risiko di Lembaga Penjaminan Ekspor dan Impor Indonesia (LPEI) berada di bawah kepemimpinan Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Risiko dan Kredit serta Head Chief of Manajemen Risiko dan *Credit Business Risk*. Struktur ini mencakup beberapa divisi/unit kerja, yaitu Executive Risk Officer, Divisi Analisa Risiko Kredit I, Divisi Analisa Risiko Kredit II, Divisi Kebijakan, dan Prosedur dan Produk, Divisi Pengembangan Produk, Divisi Manajemen Risiko dan Portofolio, serta Pemegang Limit Individu Divisi Digital Risk and Operations. Setiap divisi memiliki tugas dan tanggung jawab spesifik untuk memastikan pengelolaan risiko yang efektif dan menyeluruh.

Divisi Analisa Risiko Kredit I dan Divisi Analisa Risiko Kredit II Executive Risk Officer merupakan unit risiko yang bertanggung jawab melakukan *review* dan analisis pengendalian risiko terhadap portofolio aktivitas bisnis Lembaga Penjaminan Ekspor dan Impor Indonesia (LPEI), yang mencakup bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. Unit ini juga melakukan pemantauan aktivitas bisnis untuk menciptakan pertumbuhan aset yang berkualitas dan melaksanakan upaya penanganan pembiayaan bermasalah secara optimal. Unit risiko kredit berperan dalam optimalisasi implementasi prinsip *four eyes* untuk pengambilan keputusan.

Divisi Kebijakan, dan Prosedur dan Produk merupakan unit kerja yang secara teratur meninjau dan menyusun kembali kebijakan dan prosedur seiring dengan perkembangan ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta.

Divisi Pengembangan Produk adalah unit kerja yang merancang peraturan terkait produk/program bisnis dan aktivitas/kegiatan LPEI serta melakukan pengembangan atau penyempurnaan produk/ program bisnis dan aktivitas/kegiatan baru.

Divisi Digital Risk and Operations merupakan unit kerja yang Mengevaluasi, mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang dapat mempengaruhi keamanan data dan operasional transaksi digital serta memastikan kecukupan tata kelola dan kebijakan yang diperlukan dalam mengatur dan mengelola proses operasional tetap aman terhadap berbagai ancaman digital.

Divisi Manajemen Risiko menjalankan fungsi sebagai dan Portofolio adalah Satuan Kerja Manajemen Risiko yang didirikan untuk mendukung implementasi proses dan sistem manajemen risiko yang efektif di LPEI.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko

LPEI senantiasa memastikan sistem pengendalian internal berjalan efektif dalam mendukung tata kelola yang baik. Sebagai bagian dari upaya ini, Manajemen Risiko diterapkan melalui pendekatan *Enterprise Risk Management (ERM)* yang dirancang untuk memperkuat kesadaran dan budaya risiko (*risk culture*) di seluruh lini organisasi. Kerangka kerja ERM yang diterapkan oleh LPEI mencakup aspek berikut:

The Risk Management function at Indonesia Eximbank is under the leadership of Managing Director of Credit and Risk Management and Head of Credit and Risk Management. This structure includes several divisions, namely Credit Risk Analysis Division I, Credit Risk Analysis Division II, Policy and Procedures Division, Product Development Division, Risk and Portfolio Management Division, and Individual Limit Holders. Each division has specific duties and responsibilities to ensure effective and comprehensive risk management.

Credit Risk Analysis Division I and Credit Risk Analysis Division II are risk units responsible for reviewing and analyzing risk control against the portfolio of business activities of Indonesia Eximbank, which includes financing, guarantees, and insurance. These units also monitor business activities to create quality asset growth and implement optimal handling of troubled financing. The credit risk unit plays a role in optimizing the implementation of the *four-eyes* principle for decision-making.

The Policy and Procedure Division is a working unit that regularly reviews and revises policies and procedures in line with applicable regulations and regulations.

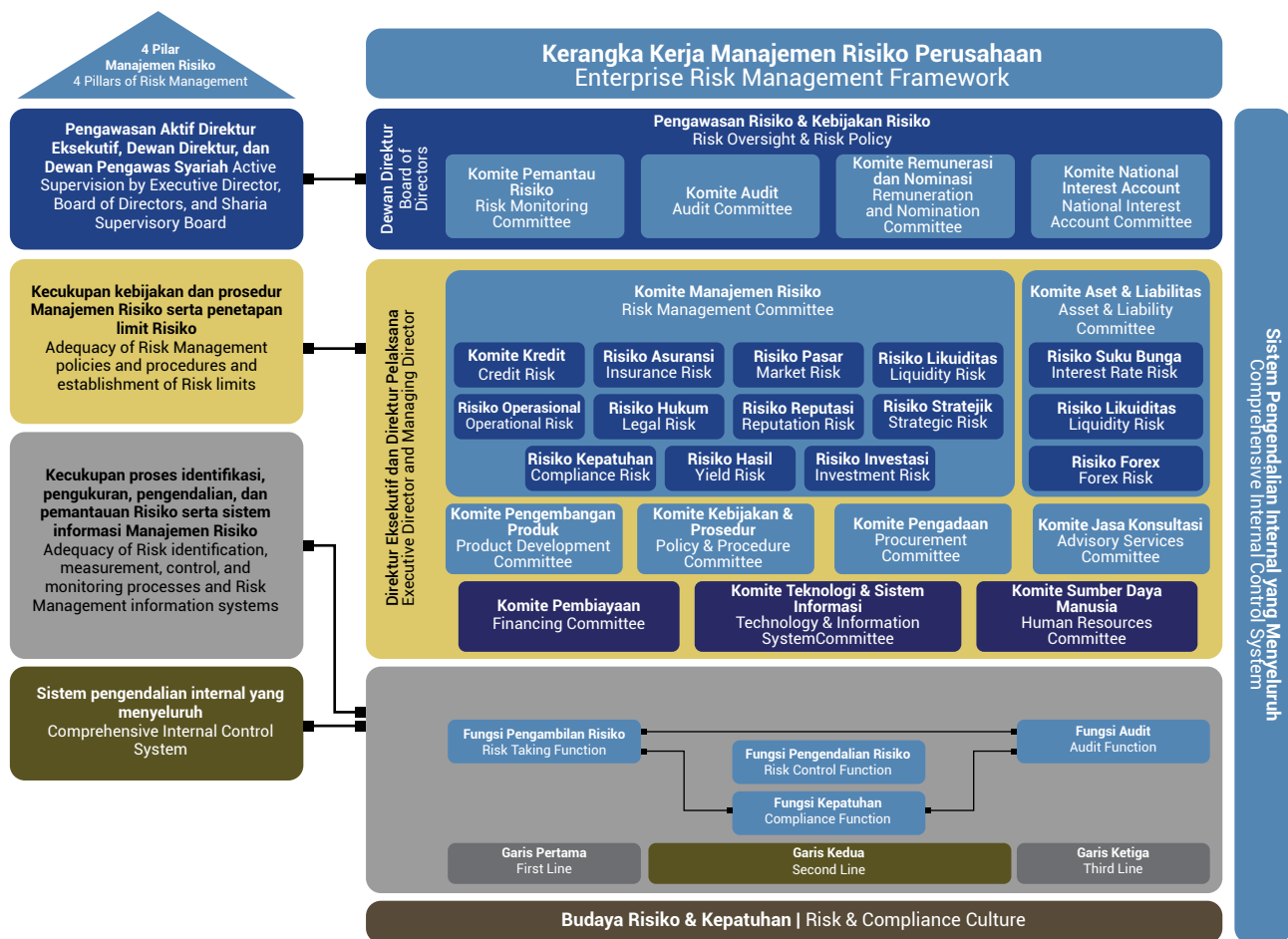
The Product Development Division is a working unit that designs regulations related to Indonesia Eximbank business products/programs and activities, as well as developing or improving new business products/programs and activities.

The Digital Risk and Operations Division is a work unit that evaluates, identifies and mitigates risks that may affect data security and digital transaction operations as well as ensuring the adequacy of governance and policies required in organizing and managing operational processes to remain secure against various digital threats.

The Risk Management and Portfolio Division is a Risk Management Work Unit established to support the implementation of effective risk management processes and systems at Indonesia Eximbank.

Risk Management Framework

Indonesia Eximbank always makes sure that the internal control system works well to support good corporate governance. As part of this effort, Risk Management is implemented through an *Enterprise Risk Management (ERM)* approach designed to strengthen risk awareness and culture across the organization. The ERM framework implemented by Indonesia Eximbank covers the following aspects:



Sistem Pengendalian Internal yang efektif memerlukan pendekatan komprehensif untuk mengelola risiko. Dalam hal ini, Kerangka ERM terdiri dari empat pilar utama, yaitu:

Pilar 1: Pengawasan aktif Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan Dewan Pengawas Syariah

Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko di LPEI.

Pengawasan aktif Direktur Eksekutif dilakukan paling kurang meliputi:

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Enterprise dan eksposur Risiko yang diambil oleh LPEI secara keseluruhan;
2. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Direktur Eksekutif;
3. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
4. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
5. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan
6. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:

An effective internal control system requires a comprehensive approach to managing risk. In this regard, the ERM framework consists of four main pillars, namely:

Pillar 1: Active supervision of Executive Director, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board

The Executive Director, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board are responsible for the effectiveness of Risk Management implementation in Indonesia Eximbank.

Active supervision by Executive Director includes at least:

1. Responsible for the implementation of Enterprise Risk Management policies and the risk exposure taken by Indonesia Eximbank as a whole;
2. Evaluating and deciding on transactions and Risk limits requiring Executive Director approval;
3. Developing a Risk Management culture throughout the organization;
4. Ensuring the improvement of human resource competencies related to Risk Management;
5. Ensuring that the Risk Management function operates independently; and
6. Conducting periodic reviews to ensure:

- a. Keakuratan metodologi penilaian Risiko;
- b. Kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- c. Ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko.

Pengawasan aktif Dewan Direktur paling sedikit meliputi:

1. Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif.
2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direktur Eksekutif atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
3. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direktur Eksekutif yang berkaitan dengan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Direktur.

Dewan Direktur secara rutin mengadakan Rapat Dewan Direktur setiap bulan sebagai bagian dari tugas pengawasannya. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam memastikan penerapan Manajemen Risiko, Dewan Direktur membentuk Komite Pemantau Risiko. Komite ini bertugas melakukan pemantauan, evaluasi, serta memberikan rekomendasi terkait risiko dalam kegiatan usaha dan operasional LPEI. Selain itu, Komite Pemantau Risiko juga bertanggung jawab melakukan penilaian berkala dan memberikan rekomendasi mengenai risiko usaha dalam kaitannya dengan pembiayaan ekspor nasional yang diberikan oleh LPEI.

Pengawasan aktif Dewan Pengawas Syariah paling sedikit meliputi:

1. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip Syariah, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan setiap saat apabila terdapat faktor yang memengaruhi kegiatan usaha LPEI secara signifikan dan;
1. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direktur Eksekutif atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip Syariah, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pilar 2: Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

Prinsip-prinsip pengelolaan risiko yang terpadu dan sistematis dituangkan dalam berbagai kebijakan, prosedur dan limit risiko. Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit risiko disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil terhadap Risiko LPEI.

Untuk mengevaluasi kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko, Direktur Eksekutif membentuk 9 komite, diantaranya Komite Manajemen Risiko, Komite Pengembangan Produk, Komite Kebijakan dan Pedoman, Komite Assets & Liabilities Management, Komite Teknologi Sistem Informasi, Komite Pengadaan, Komite Jasa Konsultasi, Komite Pembiayaan, dan Komite Sumber Daya Manusia.

- a. The accuracy of Risk assessment methodologies;
- b. Adequacy of Risk Management information system implementation; and
- c. Compliance with Risk Management policies and procedures, as well as Risk limit setting.

Active supervision by Board of Directors includes at least:

1. Formulating written and comprehensive Risk Management policies and strategies.
2. Evaluating the Executive Director's accountability for the implementation of Enterprise Risk Management policies.
3. Evaluating and deciding on Executive Director requests related to transactions and Risk limits requiring Board of Directors approval.

Board of Directors regularly holds Board of Directors Meetings every month as part of its supervisory duties. To support the implementation of its duties and functions in ensuring the application of Risk Management, Board of Directors has formed a Risk Monitoring Committee. This committee is tasked with monitoring, evaluating, and providing recommendations related to risks in Indonesia Eximbank's business and operational activities. In addition, Risk Monitoring Committee is also responsible for conducting periodic assessments and providing recommendations on business risks in relation to national export financing provided by Indonesia Eximbank.

Active supervision by Sharia Supervisory Board at least includes:

1. Evaluating Enterprise Risk Management policies related to Sharia compliance.
2. Evaluating the Executive Director's accountability for implementing Enterprise Risk Management policies related to Sharia compliance.

Pillar 2: Adequacy of Risk Management Policies and Procedures and Establishment of Risk Limits

The principles of integrated and systematic risk management are set forth in various policies, procedures and risk limits. Risk Management procedures and the establishment of risk limits are adjusted to the level of risk that will be taken against Indonesia Eximbank's Risks.

To evaluate the adequacy of Risk Management policies, procedures, and risk limit setting, the Executive Director forms nine committees, including the Risk Management Committee, Product Development Committee, Policy and Guideline Committee, Assets and Liabilities Management Committee, Information System Technology Committee, Procurement Committee, Advisory Services Committee, Financing Committee, and Human Capital Committee.

Pilar 3: Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

LPEI menjalankan proses yang komprehensif dalam mengelola risiko dengan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko yang terintegrasi dalam setiap kegiatan bisnisnya. Sistem Informasi Manajemen Risiko yang dimiliki LPEI memainkan peran penting dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi risiko secara efektif. Pendekatan ini memberikan jaminan kecukupan dalam menjaga keberlanjutan operasional dan optimalisasi nilai bagi semua pemangku kepentingan.

LPEI wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko terhadap faktor Risiko yang bersifat material. Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan didukung oleh:

1. Sistem informasi manajemen yang tepat waktu;
2. Laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja, dan eksposur Risiko LPEI; dan
3. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang Manajemen Risiko.

Identifikasi Risiko dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh. Identifikasi Risiko dilakukan untuk mengetahui seluruh jenis Risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan LPEI. Proses identifikasi Risiko harus dilaksanakan secara proaktif (*anticipative*) dan bukan bersifat reaktif. Proses identifikasi Risiko dilakukan oleh LPEI melalui analisis paling sedikit terhadap karakteristik Risiko yang melekat pada LPEI dan Risiko dari kegiatan usaha LPEI.

Pengukuran Risiko dilakukan secara akurat dan tepat waktu. Pengukuran risiko bertujuan untuk mengetahui besaran Risiko yang melekat pada aktivitas LPEI dan dibandingkan dengan risk appetite yang ditetapkan sehingga dapat diambil tindakan mitigasi Risiko untuk menutupi Risiko residualnya. Pengukuran risiko dilakukan secara individual maupun secara gabungan, keseluruhan, maupun portofolio. Untuk melaksanakan pengukuran Risiko, LPEI dapat menggunakan berbagai pendekatan, baik kualitatif maupun kuantitatif, disesuaikan dengan tujuan usaha, dan kompleksitas usaha LPEI. Kecukupan pengukuran Risiko wajib dilakukan oleh LPEI melalui paling sedikit:

Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko; dan Penyesuaian terhadap proses pengukuran Risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha LPEI dan faktor Risiko yang bersifat material.

Pengendalian Risiko dilakukan secara efektif dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik potensi Risiko yang teridentifikasi dan terukur. Strategi pengendalian Risiko dilakukan untuk meminimalisasi Tingkat Risiko

Pillar 3: Adequacy of Risk Identification, Measurement, Control and Monitoring Process and Risk Management Information System

Indonesia Eximbank conducts a comprehensive process in managing risks through integrated risk identification, measurement, control, and monitoring in all its business activities. The Risk Management Information System owned by Indonesia Eximbank plays a crucial role in effectively collecting and analyzing risk information. This approach provides assurance of adequacy in maintaining operational sustainability and optimizing value for all stakeholders.

Indonesia Eximbank is required to carry out the process of identifying, measuring, controlling, and monitoring Risks against material Risk factors. The implementation of identification, measurement, controlling, and monitoring processes is supported by:

1. Timely management information system;
2. Accurate and informative reports on Indonesia Eximbank's financial condition, performance, and Risk exposure; and
3. Human capital who have competence in the field of Risk Management.

Risk identification is carried out comprehensively and thoroughly. Risk identification is carried out to determine all types of Risks inherent in each functional activity that has the potential to harm Indonesia Eximbank. The Risk identification process must be carried out proactively (*anticipatory*) and not reactive. The Risk identification process is carried out by Indonesia Eximbank through an analysis of at least the characteristics of the Risks inherent in Indonesia Eximbank and the Risks from Indonesia Eximbank's business activities.

Risk measurement is carried out accurately and timely. Risk measurement aims to determine the amount of Risk inherent in Indonesia Eximbank's activities and compared with the established risk appetite so that Risk mitigation actions can be taken to cover the residual Risk. Risk measurement is carried out individually or in combination, as a whole, or in a portfolio. To implement Risk measurement, Indonesia Eximbank can use various approaches, both qualitative and quantitative, adjusted to the business objectives and complexity of Indonesia Eximbank's business. Adequacy of Risk measurement must be carried out by Indonesia Eximbank through at least:

Periodic evaluation of the suitability of assumptions, data sources, and procedures used to measure Risk; and Adjustment to the Risk measurement process in the event of changes in Indonesia Eximbank's business activities and material Risk factors.

Risk control is carried out effectively and implemented in accordance with the characteristics of the identified and measurable potential Risks. Risk control strategies are carried out to minimize the Risk Level faced by Indonesia

yang dihadapi LPEI. Strategi pengendalian Risiko dilakukan terhadap potensi terjadinya pelampauan atas limit Risiko yang telah ditetapkan dan dapat diterima oleh LPEI. Kecukupan proses pengendalian Risiko dilakukan oleh LPEI untuk mengelola Risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha LPEI.

Pemantauan Risiko dilakukan secara berkala dan menyeluruh. Pemantauan Risiko dilakukan dengan membandingkan limit Risiko yang telah ditetapkan dengan besaran Risiko yang sedang dikelola. Hasil pemantauan Risiko yang dilakukan dicantumkan dalam bentuk laporan profil Risiko LPEI. Pemantauan laporan profil risiko dilakukan secara berkala sesuai dengan karakter masing-masing jenis faktor Risiko yang digunakan. Proses pemantauan Risiko harus dapat memastikan bahwa posisi yang melampaui limit mendapatkan perhatian unit kerja yang terkait dalam proses Manajemen Risiko. Kecukupan pemantauan Risiko wajib dilakukan oleh LPEI melalui paling sedikit:

1. Evaluasi terhadap eksposur Risiko; dan
2. Penyesuaian terhadap proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan:
 - a. Kegiatan usaha;
 - b. Faktor Risiko;
 - c. Teknologi informasi; dan
 - d. Sistem informasi Manajemen Risiko LPEI, yang bersifat material.

LPEI menyusun sistem informasi Manajemen Risiko secara lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu, serta terintegrasi untuk seluruh jenis risiko. Sistem Informasi Manajemen Risiko LPEI dapat menyajikan Risiko yang diukur, baik dalam format kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat dipahami oleh Dewan Direktur, Dewan Pengawas Syariah, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, termasuk regulator/pengawas LPEI.

Pilar 4: Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

LPEI menerapkan strategi model 3 (tiga) lini (*Three Line Model*) dalam sistem pengendalian internal yaitu:

1. Lini pertama (*1st line*), merupakan unit kerja yang berada pada setiap *Risk Taking Function* yang mana merupakan unit kerja pemilik risiko (*risk owners*) yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pencapaian kegiatan usaha dan pelaksanaan mandat LPEI serta unit kerja yang merupakan pendukung langsung dari unit kerja pemilik risiko (*risk owner*) tersebut.
2. Lini kedua (*2nd line*), merupakan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan yang terdiri atas:
 - a. Fungsi Manajemen Risiko yang fokus pada pengembangan metodologi terkait manajemen risiko. Termasuk di dalamnya Fungsi Analisa Risiko Bisnis sebagai *four eye principles* pada level transaksi; dan
 - b. Fungsi Kepatuhan
 Lini kedua memiliki peran antara lain pemantauan,

Eximbank. Risk control strategies are carried out against the potential for exceeding the Risk limits that have been set and are acceptable to Indonesia Eximbank. Adequacy of the Risk control process is carried out by Indonesia Eximbank to manage certain Risks that can endanger Indonesia Eximbank's business continuity.

Risk monitoring is carried out periodically and comprehensively. Risk monitoring is carried out by comparing the Risk limits that have been set with the amount of Risk being managed. The results of the Risk monitoring carried out are included in the form of an Indonesia Eximbank Risk profile report. Monitoring of the risk profile report is carried out periodically in accordance with the character of each type of Risk factor used. The Risk monitoring process must be able to ensure that positions that exceed the limit receive the attention of the related work unit in the Risk Management process. Adequate Risk monitoring must be carried out by Indonesia Eximbank through at least:

1. Evaluation of Risk exposure; and
2. Adjustments to the reporting process in the event of changes in:
 - a. Business activities;
 - b. Risk factors;
 - c. Information technology; and
 - d. Indonesia Eximbank's Risk Management information system, which is material.

Indonesia Eximbank prepares a complete, accurate, appropriate, and timely Risk Management information system, and is integrated for all types of risks. Indonesia Eximbank's Risk Management Information System can present measured Risks, both in qualitative and quantitative formats, so that they can be understood by the Board of Directors, Sharia Supervisory Board, Executive Director, Managing Director, including Indonesia Eximbank's regulator/supervisor.

Pillar 4: Comprehensive Internal Control System

Indonesia Eximbank implements the Three Line Model strategy in its internal control system, which consists of:

1. 1st line, is a work unit located in each Risk Taking Function which is the work unit of risk owners who are directly responsible for the achievement of business activities and the implementation of LPEI's mandate and the work unit which is a direct supporter of the work unit of the risk owner.
2. Second Line (2nd line): This comprises the Risk Management and Compliance functions, which include:
 - a. The Risk Management function focuses on developing methodologies related to risk management. This includes the Business Risk Analysis Function as the four-eye principle at the transaction level; and
 - b. The Compliance function.
 The second line has roles including monitoring,

pemberian advis, pengujian, analisis, pengaturan dan pelaporan tentang hal-hal yang berkaitan dengan manajemen risiko dan kepatuhan.

3. Lini ketiga (*3rd line*), merupakan Audit Function sebagai lini terakhir yang berfungsi untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan kegiatan di seluruh unit kerja termasuk berfungsi untuk melakukan penilaian secara independen atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan pengendalian internal di LPEI.

Lini ketiga memiliki peran antara lain memberikan assurance dan melakukan evaluasi yang independen dan obyektif terhadap pengendalian internal, penerapan tata kelola dan manajemen risiko.

providing advice, testing, analysis, regulation and reporting on matters relating to risk management and compliance.

3. Third Line (3rd line): This is the Audit Function, serving as the final line responsible for auditing the implementation of activities across all units. It also conducts independent assessments of the effectiveness of Risk Management and internal control implementation at Indonesia Eximbank.

The third line has a role including providing assurance and conducting independent and objective evaluations of internal control, implementation of governance and risk management.

Jenis Risiko dan Upaya Mitigasi Tahun 2024

1. Risiko Kredit

Risiko Kredit terjadi akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan/atau area geografis tertentu (*concentration risk*), kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), dan kegagalan *settlement* (*settlement risk*). Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko kredit, mitigasi risiko yang dikembangkan dan dilaksanakan LPEI antara lain:

- a. Pengelolaan kredit dilakukan secara 3 Pilar independen (bisnis unit, *credit risk reviewer*, dan *credit operation*)
- b. *Pre-Credit Process/Pipeline Management*
Pemilihan target pasar telah melalui manajemen *pipeline* dengan menggunakan *pre-screening tools* melalui *Portfolio / Sector Guideline* dan *Industry Financing Reference* (IFR).
- c. *Credit Process/Inisiasi*
Proses analisis kredit dilakukan secara *4 eyes principle* dengan menggunakan *Credit Rating* dan *Scoring System* untuk melakukan pengukuran terhadap risiko kredit. Potensi risiko secara individual dapat diindikasikan melalui hasil peringkat (*rating*) yang digunakan sebagai alat bantu dalam mengukur kinerja keuangan debitur serta sebagai peringatan dini (*early warning*) terhadap penurunan kinerja keuangan debitur. Kemudian Pembiayaan dan piutang LPEI dijamin dengan agunan (misalnya piutang, persediaan, mesin, dan lain-lain). LPEI menggunakan nilai wajar agunan sebagai dasar arus kas masa depan untuk tujuan penurunan jika pembiayaan dan piutang bersifat *collateral dependent* dan penyitaan agunan kemungkinan besar terjadi berdasarkan perjanjian. Selain itu, proses Keputusan Kredit dilakukan dalam Komite kredit yang melibatkan fungsi bisnis dan risiko yang dilakukan secara independen oleh masing-masing anggota komite

Types of Risks and Mitigation in 2024

1. Credit Risk

Credit risk arises from the concentration of funds provided to one party or a group of parties, industries, sectors, and/or specific geographical areas (*concentration risk*), counterparty default (*counterparty credit risk*), and settlement failure (*settlement risk*). To anticipate and control credit risk, Indonesia Eximbank has developed and implemented risk mitigation measures, including:

- a. Credit management is carried out independently by 3 Pillars (business unit, credit risk reviewer, and credit operation)
- b. *Pre-Credit Process/Pipeline Management*
The selection of target markets has gone through pipeline management using pre-screening tools through Portfolio/Sector Guideline and Industry Financing Reference (IFR).
- c. *Credit Process/Initiation*
The credit analysis process is carried out using the 4-eyes principle with a Credit Rating and Scoring System to measure credit risk. Individual risk potential can be indicated through ratings used as a tool to measure the financial performance of debtors and as an early warning of a decline in the financial performance of debtors. Indonesia Eximbank financing and receivables are secured by collateral (e.g., receivables, inventory, machinery, etc.). Indonesia Eximbank uses the fair value of collateral as the basis for future cash flows for the purpose of write-downs if financing and receivables are collateral dependent and foreclosure is likely to occur based on the agreement. In addition, the Credit Decision process is carried out in a Credit Committee involving business and risk functions, which are performed independently by each committee member.

- d. *On Disbursement*
Keputusan Komite dilaksanakan melalui verifikasi dan implementasi/ pencairan pembiayaan oleh Unit Kerja yang independen dari bisnis dan risiko (*Credit Operation*) serta pengelolaan dokumen terpisah oleh *Credit Admin*.
- e. *Post Disbursement*
Setelah pencairan, *monitoring* portofolio pembiayaan melalui Laporan *Enterprise Risk Management Report* (ERMR) bulanan oleh Divisi ERM, melakukan EWD (*Early Warning Detection*) untuk debitur yang berpotensi mengalami pemburukan serta *monitoring* PDO secara intensif serta pemutakhiran MIS dengan *update data core* dan *dashboard*. *Monitoring* juga dilakukan terhadap debitur yang mengalami penurunan rating menjadi *non-investment grade*, agar tidak mengarah menjadi *Non Performing Loan*.
- f. *Credit Recovery*
Untuk penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan oleh unit terpisah dan diputuskan dalam Komite Restrukturisasi, diperkuat dengan terbitnya PMK 144 terkait hapus buku pada tahun 2021.

Dengan proses yang dilakukan sejak pemilihan calon debitur hingga penyelesaian kredit bermasalah, KPMR dalam risiko kredit dinilai cukup memadai.

- g. Secara operasional peraturan/ kebijakan terkait kredit telah dilengkapi dengan ketentuan internal tentang Kebijakan Pembiayaan, Peraturan Direktur Eksekutif tentang Manual Pembiayaan, Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan, dan Komite Pembiayaan. Kebijakan, Manual dan Petunjuk Teknis merupakan penyempurnaan dari Kebijakan dan Manual sebelumnya sebagai salah satu upaya untuk terus meningkatkan kualitas *Portfolio* LPEI.
- h. Sebagai *tools* tambahan dalam memitigasi risiko kredit ditetapkan Batas Minimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) yang merupakan batas maksimum pembiayaan untuk setiap individu dan grup, disamping itu BMPP digunakan sebagai salah satu upaya mengelola risiko konsentrasi pembiayaan.
- i. LPEI juga memiliki batas limit *inhouse* sebagai salah satu strategi pengendalian risiko konsentrasi dan menjaga tingkat konsentrasi pembiayaan yang selama ini telah terdiversifikasi cukup baik. Perhitungan *inhouse* limit merupakan gabungan pembiayaan, retensi sendiri penjaminan, dan retensi sendiri asuransi. Pemberian fasilitas pembiayaan dilarang melebihi *inhouse* limit (pelanggaran), namun pelampauan *inhouse* limit akibat perubahan kurs dan/atau perubahan modal LPEI akan dilakukan penurunan *outstanding* secara bertahap.
- j. Terkait pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), LPEI telah mengimplementasikan PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan yang merupakan

- d. *On Disbursement*
The Committee's decision is implemented through verification and implementation/disbursement of financing by a business and risk independent unit (*Credit Operation*) and separate document management by *Credit Admin*.
- e. *Post Disbursement*
After disbursement, the financing portfolio is monitored through the monthly *Enterprise Risk Management Report* (ERMR) by the ERM Division, which conducts EWD (*Early Warning Detection*) for debtors with potential deterioration and intensive PDO monitoring and MIS updates with core data and dashboard updates. Monitoring is also carried out on debtors whose ratings have been downgraded to non-investment grade to prevent them from becoming Non-Performing Loans.
- f. *Credit Recovery*
Problem financing is handled by a separate unit and decided by the Restructuring Committee, reinforced by the issuance of PMK 144 regarding write-offs in 2021.

With the processes carried out from the selection of prospective debtors to the settlement of problem loans, KPMR's credit risk is considered adequate.

- g. Operationally, regulations/policies related to credit have been supplemented with internal provisions on Financing Policy, Executive Director Regulations on Financing Manuals, Technical Operational Guidelines for Financing, and the Financing Committee. The policies, manuals, and technical guidelines are improvements on previous policies and manuals as part of efforts to continuously improve the quality of LPEI's portfolio.
- h. As an additional tool in mitigating credit risk, a Minimum Financing Limit (BMPP) has been set as the maximum financing limit for each individual and group. In addition, BMPP is used as one of the efforts to manage financing concentration risk.
- i. Indonesia Eximbank also has an in-house limit as one of its strategies to control concentration risk and maintain a level of financing concentration that has been well diversified. The calculation of the in-house limit is a combination of financing, self-retention guarantees, and self-retention insurance. The provision of financing facilities is prohibited from exceeding the in-house limit (violation), but any excess of the in-house limit due to exchange rate changes and/or changes in Indonesia Eximbank's capital will be gradually reduced.
- j. Regarding the establishment of the Allowance for Impairment Losses (AIL), Indonesia Eximbank has implemented PSAK 71 on Financial Instruments,

adopsi dari IFRS 9 yang dikeluarkan oleh *International Accounting Standard Board* (IASB). PSAK 71 mengatur perubahan persyaratan terkait instrumen keuangan seperti klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai dan akuntansi lindung nilai. LPEI secara berkala melakukan evaluasi penurunan nilai atas seluruh aset keuangan kecuali aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok yang nilai wajarnya diukur melalui laporan laba rugi (*fair value through profit and loss*).

- k. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, LPEI wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola tagihan dan/atau kewajiban yang timbul dari transaksi derivatif. Transaksi derivatif yang dilakukan hanya dapat dilaksanakan dalam rangka lindung nilai (*hedging*). Bentuk transaksi derivatif yang dilakukan LPEI umumnya dalam bentuk transaksi *spot*, *forward*, *futures*, dan *swap*. Dalam melakukan transaksi derivatif, LPEI ditetapkan memiliki maksimum transaksi untuk setiap pihak lawan sebesar 10% dari modal.
- l. Pengembangan sistem *Core Banking* baru dan serta *Integrated Origination System* (IOS) untuk mendukung manajemen risiko kredit secara menyeluruh.

2. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi Aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk Transaksi Derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Eksposur Risiko Pasar LPEI saat ini hanya pada *banking book*. Hal ini dikarenakan LPEI tidak melakukan transaksional pada *trading book*, sedangkan trading hanya dilaksanakan dalam rangka lindung nilai (*hedging*) dan bersifat *natural hedge*. Sehingga dalam Risiko Pasar, IEB hanya memiliki eksposur pada risiko suku bunga dan nilai tukar. Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko pasar antara lain dilakukan melalui:

- a. Memitigasi eksposur Risiko Pasar dilakukan dengan pemantauan Posisi Devisa Neto (PDN) secara harian sesuai limit dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu maksimum sebesar 20%.
- b. Melakukan pengelolaan dan pemantauan risiko suku bunga pada *Banking Book* atau *Interest Rate Risk in the Banking Book* (IRRBB), yang mencakup analisa *interest rate gap* dan *sensitivity analysis*, serta melakukan pengembangan metode pengukuran IRRBB.
- c. Menetapkan limit khusus untuk transaksi *banking book*, mencakup limit *counterparty* dan limit *dealer*.
- d. Memiliki *Treasury Dealing System* (TDS) yang didukung sumber data pasar dari *Reuters*, *Bloomberg*, dan sumber independen lainnya, dalam rangka mendukung infrastruktur pengelolaan Risiko Pasar.
- e. Melakukan *gap management* dan analisa sensitivitas dengan tujuan mengelola risiko pasar sebagai akibat perubahan tingkat bunga dan nilai tukar untuk melengkapi pemantauan Risiko Pasar.

which is an adoption of IFRS 9 issued by the International Accounting Standards Board (IASB). PSAK 71 regulates changes in requirements related to financial instruments such as classification and measurement, impairment, and hedge accounting. LPEI periodically evaluates the impairment of all financial assets except financial assets classified in a group whose fair value is measured through profit or loss (*fair value through profit and loss*).

- k. As stipulated in the Minister of Finance Regulation, Indonesia Eximbank is required to apply the principle of prudence in managing receivables and/or liabilities arising from derivative transactions. Derivative transactions may only be carried out for hedging purposes. The forms of derivative transactions carried out by Indonesia Eximbank are generally in the form of *spot*, *forward*, *futures*, and *swap* transactions. In conducting derivative transactions, LPEI is required to have a maximum transaction limit for each counterparty of 10% of its capital.
- l. Development of a new *Core Banking* system and an *Integrated Origination System* (IOS) to support comprehensive credit risk management.

2. Market Risk

Market Risk is the risk on asset positions, liabilities, equity, and/or administrative accounts, including derivative transactions, due to overall changes in market conditions. Indonesia Eximbank's current market risk exposure is only in the *banking book*. This is because Indonesia Eximbank does not conduct transactions in the *trading book*, while trading is only carried out for hedging purposes and is of a *natural hedge* nature. Therefore, in Market Risk, IEB only has exposure to interest rate and exchange rate risks. To anticipate and control market risk, the following measures are taken:

- a. Mitigating Market Risk exposure is done by monitoring the Net Foreign Exchange Position (NFEP) daily in accordance with the limits set by the Financial Services Authority (OJK) and the Minister of Finance, which is a maximum of 20%.
- b. Managing and monitoring interest rate risk in the *Banking Book* or *Interest Rate Risk in the Banking Book* (IRRBB), which includes analyzing interest rate gaps and sensitivity analysis, as well as developing IRRBB measurement methods.
- c. Setting specific limits for *banking book* transactions, including *counterparty* limits and *dealer* limits.
- d. Have a *Treasury Dealing System* (TDS) supported by market data sources from *Reuters*, *Bloomberg*, and other independent sources, in order to support the Market Risk management infrastructure.
- e. Conduct *gap management* and sensitivity analysis with the aim of managing market risk as a result of changes in interest rates and exchange rates to complement Market Risk monitoring.

- f. Mengembangkan *Core System* baru untuk mengakomodasi pengelolaan dan pemantauan risiko pasar.
- g. Melengkapi kebijakan dan peraturan internal terkait dengan pengelolaan Risiko Pasar.
- h. Memisah unit-unit pengelola risiko pasar yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu *front office*, *middle office*, dan *back office*.

3. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan LPEI untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari Aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan LPEI. LPEI mengelola risiko likuiditas agar dapat memenuhi setiap kewajiban *financial* yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, serta dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal. Fungsi pengelolaan Risiko Likuiditas dilakukan oleh *Assets and Liabilities Committee* (ALCO) dan secara operasional oleh Unit Kerja Tresuri.

Dalam mengelola Risiko Likuiditas, hal yang dilakukan antara lain:

- a. Mengelola dan memantau Pengelolaan Risiko Likuiditas melalui *Assets and Liabilities Committee* (ALCO) untuk ketersediaan atas keseluruhan *reserves* yang dipantau secara harian, mingguan, dan bulanan.
- b. Menetapkan dan memantau limit-limit Risiko Likuiditas secara berkala oleh Unit Kerja Tresuri.
- c. Melakukan pengelolaan aset yang aman, likuid, dan menguntungkan dalam jumlah yang cukup dan dalam komposisi yang disesuaikan dengan karakteristik bisnis dan Profil Risiko Likuiditas.
- d. Menyusun skenario Likuiditas berdasarkan kondisi yang berbeda (normal, tidak normal, ekstrim) dan proyeksi arus kas harian serta profil maturitas bulanan sehingga dapat ditetapkan *contingency funding plan* untuk mengantisipasi terjadinya kondisi ekstrim dan menetapkan strategi yang sesuai dan akurat dalam mengantisipasi kondisi likuiditas di masa mendatang.
- e. LPEI dapat melakukan penempatan dana dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan Pemerintah; Sertifikat Bank Indonesia; surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah negara donor; surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan multilateral; simpanan dalam bentuk rupiah atau valuta asing pada Bank Indonesia; simpanan pada bank dalam negeri dan/atau bank luar negeri; dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara dengan predikat AAA.
- f. Dalam rangka optimalisasi Dana Penugasan Khusus, dana yang belum dapat digunakan dapat dilakukan penempatan pada instrumen keuangan yang memiliki risiko terkendali dan likuid termasuk penempatan internal pada penugasan umum.

- f. Develop a new *Core System* to accommodate market risk management and monitoring.
- g. Complete internal policies and regulations related to Market Risk management.
- h. Separate market risk management units into 3 parts, namely front office, middle office, and back office.

3. Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk arising from Indonesia Eximbank's inability to meet its maturing liabilities from cash flow funding sources and/or from liquid assets that can be easily converted into cash, without disrupting Indonesia Eximbank's activities and financial condition. Indonesia Eximbank manages liquidity risk in order to meet all agreed financial obligations in a timely manner and to maintain an adequate and optimal level of liquidity. Liquidity risk management is carried out by the Assets and Liabilities Committee (ALCO) and operationally by the Treasury Unit.

In managing liquidity risk, the followings are carried out:

- a. Managing and monitoring liquidity risk management through the Assets and Liabilities Committee (ALCO) for the availability of overall reserves monitored on a daily, weekly, and monthly basis.
- b. Setting and monitoring liquidity risk limits on a regular basis by the Treasury Unit.
- c. Managing assets that are safe, liquid, and profitable in sufficient amounts and in a composition that is tailored to the characteristics of the business and the Liquidity Risk Profile.
- d. Preparing liquidity scenarios based on different conditions (normal, abnormal, extreme) and daily cash flow projections and monthly maturity profiles so that a contingency funding plan can be established to anticipate extreme conditions and determine appropriate and accurate strategies in anticipation of future liquidity conditions.
- e. Indonesia Eximbank may place funds in the form of government securities; Bank of Indonesia certificates; securities issued by donor country governments; securities issued by multilateral financial institutions; deposits in rupiah or foreign currency at the Bank of Indonesia; deposits at domestic and/or foreign banks; and/or securities issued by state-owned enterprises with an AAA rating.
- f. In order to optimize the Special Assignment Fund, funds that cannot be used may be placed in financial instruments with controlled risk and liquidity, including internal placement in general assignments.



- g. Selain mitigasi risiko likuiditas yang dilakukan, LPEI juga memiliki *sovereign* status yang membuat risiko inheren LPEI lebih rendah dibandingkan perbankan umumnya.

Pengembangan metodologi *liquidity reserve limit* untuk menjaga tingkat likuiditas LPEI secara efektif dan efisien.

4. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/ atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional LPEI. Risiko operasional sangat berhubungan dengan kelengkapan dan tingkat efektivitas dari sistem, prosedur dan kontrol dalam lingkungan kegiatan usaha serta kemampuan sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi kinerja usaha LPEI. Penerapan manajemen risiko operasional dilakukan terhadap setiap aktivitas yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam suatu sistem dan proses pengelolaan risiko yang akurat serta komprehensif. Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko operasional antara lain dilakukan melalui:

- Pengelolaan Risiko Operasional LPEI dituangkan dalam Standar Pedoman Operasional (SPO) *Operational Risk Management* (ORM) dan SPO *Risk & Control Self-Assessment* (RCSA).
- LPEI menetapkan *Designated Compliance and Operational Risk (DCOR) Officer* untuk melakukan pengawasan terhadap risiko operasional.
- Penerapan RCSA telah dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengukur Risiko Operasional yang bersifat kualitatif dan prediktif.
- Penyusunan Risk Register untuk seluruh Unit Kerja di LPEI.
- Pada tahun 2024, telah dilakukan proses implementasi sistem ORM tahap awal untuk menunjang pengelolaan Risiko Operasional yang lebih terintegrasi.
- Identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko Operasional secara *enterprise* dilakukan secara berkala dalam Profil Risiko Operasional.
- Salah satu tools dalam meminimalisir risiko operasional dalam kondisi darurat atau bencana yang diakibatkan oleh faktor alam atau perbuatan manusia yang mengganggu kegiatan usaha yaitu dengan implementasi *Business Continuity Plan/BCP*.
- Melakukan *pilot control testing* untuk kegiatan pembiayaan.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum. Risiko ini timbul antara lain karena adanya ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai. Proses manajemen Risiko Hukum yang diterapkan adalah sebagai berikut:

- g. In addition to liquidity risk mitigation measures, Indonesia Eximbank also has *sovereign* status, which makes Indonesia Eximbank's inherent risk lower than that of commercial banks in general.

Development of a liquidity reserve limit methodology to maintain Indonesia Eximbank's liquidity level effectively and efficiently.

4. Operational Risk

Operational risk is the risk resulting from the inadequacy and/or malfunction of internal processes, human error, system failure, and/or external events that affect Indonesia Eximbank's operations. Operational risk is closely related to the completeness and effectiveness of systems, procedures, and controls within the business environment, as well as the capabilities of human resources that can affect Indonesia Eximbank's business performance. Operational risk management is implemented for every activity carried out in an integrated manner within an accurate and comprehensive risk management system and process. To anticipate and control operational risk, the following measures are taken, among others:

- Indonesia Eximbank's Operational Risk Management is outlined in the Operational Risk Management (ORM) Standard Operating Procedures (SOP) and the Risk & Control Self-Assessment (RCSA) SOP.
- Indonesia Eximbank has appointed a Designated Compliance and Operational Risk (DCOR) Officer to supervise operational risks.
- The implementation of RCSA has been carried out to identify and measure qualitative and predictive operational risks.
- The preparation of a Risk Register for all work units within Indonesia Eximbank.
- In 2024, the initial phase of the ORM system implementation process was conducted to support more integrated operational risk management.
- Identification, measurement, control, and monitoring of operational risks on an enterprise basis are carried out periodically in the Operational Risk Profile.
- One of the tools to minimize operational risks in emergency or disaster conditions caused by natural factors or human actions that disrupt business activities is the implementation of a Business Continuity Plan (BCP).
- Conducting pilot control testing for financing activities.

5. Legal Risk

Legal risk is the risk arising from legal claims and/or weaknesses in legal aspects. This risk arises, among other things, due to the absence of supporting legislation or weaknesses in contracts, such as failure to fulfill the validity requirements of a contract or inadequate collateral. The legal risk management process applied is as follows:

- a. Identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Hukum, antara lain melalui:
 - Kajian hukum;
 - Pemberian pendapat hukum (*legal opinion*); dan
 - Pembuatan rancangan dokumentasi hukum (*legal drafting*) termasuk melakukan standarisasi perjanjian.
 - b. Dalam mengukur/menilai Risiko Hukum, dapat menggunakan parameter atau indikator:
 - Ketidadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan;
 - Kelemahan dalam perikatan atau kerja sama; dan
 - Proses penyelesaian sengketa.
 - c. Dalam rangka melakukan langkah-langkah pengendalian Risiko Hukum, maka dapat dilakukan beberapa hal, antara lain:
 - Unit Kerja yang membidangi Hukum melakukan kaji ulang terhadap dokumentasi hukum dan format standar perjanjian LPEI, kontrak perjanjian antara LPEI dengan nasabah, serta kontrak dan perjanjian antara LPEI dengan pihak lain, untuk menilai relevansi serta efektivitas guna mengecek validitas ketentuan dalam kontrak dan perjanjian tersebut.
 - Unit Kerja yang membidangi hukum dapat melakukan pendampingan hukum.
 - Dalam melaksanakan fungsi pengendalian Risiko Hukum, LPEI dapat dibantu oleh pihak eksternal yang ahli di bidang Hukum.
 - d. Dalam rangka melakukan langkah-langkah pemantauan Risiko Hukum, maka dapat dilakukan beberapa hal, antara lain:
 - Unit kerja yang membidangi Hukum secara berkala melakukan pemantauan terhadap proses penyelesaian sengketa dan menilai potensi kerugian yang dapat dialami LPEI.
 - Melakukan *review* secara berkala terhadap syarat dan ketentuan perjanjian yang berlaku agar tetap sah dan relevan.
 - Melakukan rekapitulasi atas penanganan perkara yang dihadapi LPEI dan telah dilaporkan secara berkala.
6. Risiko Strategis
- Risiko Strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Proses manajemen Risiko Strategis yang diterapkan adalah sebagai berikut:
- a. Identifikasi Risiko Strategis mencakup identifikasi dan penatausahaan deviasi atau penyimpangan sebagai akibat tidak terealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan terutama yang berdampak signifikan terhadap permodalan LPEI.
- a. Identify and analyze several factors that can increase exposure to Legal Risk, including through:
 - Legal review;
 - Provision of legal opinions; and
 - Preparation of legal documentation (*legal drafting*), including standardization of agreements.
 - b. In measuring/assessing Legal Risk, the following parameters or indicators can be used:
 - Absence or change of laws and regulations;
 - Weaknesses in contracts or cooperation; and
 - Dispute resolution processes.
 - c. In order to take steps to control Legal Risk, several things can be done, including:
 - The Legal Unit reviews legal documentation and standard agreement formats of Indonesia Eximbank, contracts between Indonesia Eximbank and customers, as well as contracts and agreements between Indonesia Eximbank and other parties, to assess their relevance and effectiveness in order to verify the validity of the provisions in such contracts and agreements.
 - The Legal Unit may provide legal assistance.
 - In carrying out its legal risk control functions, Indonesia Eximbank may be assisted by external parties with expertise in the field of law.
 - d. In order to monitor legal risk, several measures can be taken, including:
 - The legal department shall periodically monitor the dispute resolution process and assess the potential losses that may be incurred by Indonesia Eximbank.
 - Conducting periodic reviews of the terms and conditions of applicable agreements to ensure they remain valid and relevant.
 - Recapitulating cases handled by Indonesia Eximbank and reported periodically.
6. Strategic Risk
- Strategic risk is the risk resulting from inaccuracy in the decision-making and/or implementation of a strategic decision and failure to anticipate changes in the business environment. The strategic risk management process implemented is as follows:
- a. Strategic risk identification includes identifying and managing deviations or irregularities resulting from the non-realization or ineffective implementation of business strategies or business plans that have been established, especially those that have a significant impact on Indonesia Eximbank's capital.

LPEI melakukan analisa Risiko terutama terhadap strategi yang membutuhkan banyak sumber daya dan/atau berisiko tinggi, seperti strategi masuk ke pangsa pasar yang baru, strategi akuisisi, strategi diversifikasi dalam bentuk produk dan jasa, dan strategi pelaksanaan aktivitas baru.

- b. Dalam mengukur/menilai Risiko Strategis, dapat menggunakan parameter atau indikator:
 - Kesesuaian strategi bisnis dengan kondisi lingkungan usaha.
 - Pilihan tingkat strategi bisnis, yaitu strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah.
 - Posisi strategis LPEI dibandingkan dengan kompetitornya.
 - Pencapaian realisasi bisnis LPEI.
- c. Pengendalian Risiko Strategis dilakukan melalui pemantauan kinerja termasuk kinerja keuangan dengan cara membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diharapkan untuk memastikan bahwa Risiko yang diambil masih dalam batas toleransi antara lain dengan menggunakan pendekatan *Balance Score Card* (SSC) dan melaporkan deviasi yang signifikan terkait pencapaian rencana strategis kepada Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur.
- d. Pemantauan Risiko Strategis dilakukan secara berkala yang antara lain memperhatikan pengalaman kerugian pada masa lalu yang disebabkan oleh Risiko Strategis atau deviasi rencana strategis.

Isu-isu strategis yang timbul akibat perubahan operasional dan lingkungan bisnis yang memiliki dampak negatif terhadap kondisi bisnis atau kondisi keuangan Lembaga dilaporkan kepada Direktur Eksekutif secara tepat waktu disertai analisa dampak terhadap Risiko Strategis dan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Pemantauan Risiko Strategis dilakukan oleh Unit Kerja yang membidangi Perencanaan secara triwulanan atau sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku melalui laporan kepada manajemen, pemilik, dan regulator terkait.

7. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap LPEI. Proses manajemen Risiko Reputasi yang diterapkan adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi Risiko Reputasi dilakukan antara lain: LPEI dapat menggunakan beberapa sumber informasi untuk mengidentifikasi Risiko Reputasi antara lain pemberitaan media massa, situs web LPEI dan hasil analisis jejaring sosial, pengaduan nasabah melalui layanan nasabah, serta kuesioner kepuasan nasabah. Setiap kejadian yang

Indonesia Eximbank conducts risk analysis, particularly on strategies that require significant resources and/or are high-risk, such as entering new market segments, acquisition strategies, diversification strategies in terms of products and services, and implementing new business activities.

- b. In measuring and assessing strategic risk, the following parameters or indicators can be used:
 - Alignment of business strategies with the business environment.
 - The choice of business strategy level, namely high-risk and low-risk strategies.
 - Indonesia Eximbank's strategic position compared to its competitors.
 - Indonesia Eximbank's business realization achievements.
- c. Strategic Risk Control is carried out through performance monitoring, including financial performance, by comparing actual results with expected results to ensure that the risks taken are still within tolerance limits, among others by using the *Balance Score Card* (SSC) approach and reporting significant deviations related to the achievement of strategic plans to the Executive Director and Board of Directors.
- d. Strategic Risk Monitoring is conducted on a regular basis, taking into account past loss experiences caused by Strategic Risks or deviations from strategic plans.

Strategic issues arising from operational changes and business environment changes that have a negative impact on the business conditions or financial condition of the Institution are reported to the Executive Director in a timely manner, accompanied by an analysis of the impact on Strategic Risks and necessary corrective actions.

Strategic Risk Monitoring is carried out by the Work Unit in charge of Planning on a quarterly basis or in accordance with the applicable Minister of Finance Regulations and Financial Services Authority Regulations through reports to management, owners, and relevant regulators.

7. Reputation Risk

Reputation Risk is the risk of a decline in the level of stakeholder trust arising from negative perceptions of Indonesia Eximbank. The Reputation Risk management process applied is as follows:

- a. Identification of Reputation Risk is carried out, among others: Indonesia Eximbank can use several sources of information to identify Reputation Risk, including mass media reports, Indonesia Eximbank website and social media analysis results, customer complaints through customer service, and customer

berpengaruh terhadap reputasi Lembaga dicatat dan diadministrasikan dengan tertib.

- b. Dalam mengukur/menilai Risiko Reputasi, dapat menggunakan parameter atau indikator:
 - Pengaruh reputasi Direktur Eksekutif, anggota Dewan Direktur, Direktur Pelaksana dan DPS.
 - Pelanggaran etika bisnis.
 - Kompleksitas produk dan kerja sama bisnis.
 - Frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif.
 - Frekuensi dan materialitas keluhan debitur atau konsumen.
- c. Pengendalian Risiko Reputasi dilakukan antara lain:
 - Unit kerja yang menangani keluhan nasabah harus segera menindaklanjuti dan mengatasi adanya keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Reputasi.
 - Unit kerja yang menangani keluhan nasabah harus segera menindaklanjuti dan mengatasi adanya keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Reputasi.
 - Mitigasi Risiko Reputasi maupun kejadian yang menimbulkan Risiko Reputasi dilakukan dengan mempertimbangkan materialitas permasalahan dan biaya. Meskipun demikian, Risiko Reputasi dapat diterima sepanjang masih sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil.
 - Dalam rangka pengendalian Risiko Reputasi yang lebih besar pada masa depan, tindakan pencegahan dan pemulihan Risiko Reputasi yang telah dilakukan perlu diikuti dengan perbaikan pada kelemahan pengendalian dan prosedur yang memicu terjadinya Risiko Reputasi.
- d. Pemantauan Risiko Reputasi dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan materialitas permasalahan dan biaya. Pemantauan untuk risiko-risiko yang dinilai signifikan, disampaikan kepada Direktur Eksekutif atau Direktur Pelaksana yang membidangi Komunikasi Lembaga.
- e. LPEI memiliki kebijakan mengenai penanganan keluhan nasabah untuk mengelola risiko reputasi akibat keluhan nasabah.
- f. LPEI bekerja sama dengan media baik cetak dan elektronik untuk menginformasikan kepada masyarakat sebagai sosialisasi akan kegiatan usaha LPEI serta melakukan media *monitoring* sebagai bentuk *early warning system* terhadap pemberitaan dengan tonasi negatif, netral dan positif dengan menggunakan kata kunci tertentu. Semua pemberitaan mengenai LPEI diinventarisasi dan disampaikan kepada pimpinan secara harian. *Monitoring* dilakukan dengan Analisa Pemberitaan Media, yaitu dengan merangkum secara statistik pemberitaan mengenai LPEI yang bersumber dari media cetak maupun portal berita *online*.

satisfaction questionnaires. Every incident that affects the reputation of the Institution is recorded and administered in an orderly manner.

- b. In measuring assessing Reputation Risk, the following parameters or indicators can be used:
 - The influence of the reputation of Executive Director, members of Board of Directors, Managing Directors, and DPS.
 - Business ethics violations.
 - Product complexity and business cooperation.
 - Frequency, materiality, and exposure of negative news coverage.
 - Frequency and materiality of debtor or consumer complaints.
- c. Reputation Risk Control is carried out, among other things, by:
 - The work unit handling customer complaints must immediately follow up and resolve any customer complaints and legal claims that could increase Reputation Risk exposure.
 - The work unit handling customer complaints must immediately follow up and resolve any customer complaints and legal claims that could increase Reputation Risk exposure.
 - Mitigation of Reputation Risk and events that give rise to Reputation Risk is carried out by considering the materiality of the issue and the costs involved. However, Reputation Risk may be accepted as long as it is still in line with the level of risk to be taken.
 - In order to control greater Reputation Risk in the future, preventive and remedial measures for Reputation Risk that have been taken need to be followed by improvements in control weaknesses and procedures that trigger Reputation Risk.
- d. Reputation Risk monitoring is conducted periodically, taking into account the materiality of the issue and the costs involved. Monitoring of significant risks is reported to the Executive Director or Managing Director in charge of Institutional Communication.
- e. Indonesia Eximbank has a policy on handling customer complaints to manage reputation risks arising from customer complaints.
- f. Indonesia Eximbank collaborates with both print and electronic media to inform the public about Indonesia Eximbank's business activities and conducts media monitoring as an early warning system for negative, neutral, and positive news reports using specific keywords. All news reports about Indonesia Eximbank are inventoried and submitted to management on a daily basis. Monitoring is carried out through Media Coverage Analysis, which summarizes statistics on news coverage about Indonesia Eximbank sourced from print media and online news portals.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat LPEI tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi LPEI. Proses manajemen Risiko Kepatuhan yang diterapkan adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Kepatuhan, antara lain:
 - Melakukan penerapan *Customer Due Diligence* melalui proses identifikasi dan verifikasi nasabah, serta melakukan penilaian profil risiko nasabah/calon nasabah;
 - Melakukan kajian dan pemberian *advice* yang independen, antara lain:
 - » Kajian terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berdampak pada LPEI;
 - » Kajian terhadap peraturan internal *existing* dalam hal kesesuaian dan relevansinya dengan kondisi saat ini dan/atau dengan perubahan regulasi eksternal terkait;
 - » Kajian terhadap penyusunan/perubahan ketentuan internal di LPEI atas kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - » Kajian dan pemberian *advis* yang independen atas risiko kepatuhan yang melekat pada kegiatan usaha/produk/aktivitas baru maupun *existing*.
 - Melakukan Uji Kepatuhan terhadap proposal bisnis;
 - Melakukan penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT PPPSPM);
 - Melakukan uji petik kepatuhan syariah atas pemenuhan prinsip Syariah atas transaksi berdasarkan prinsip Syariah yang. Uji petik ini dilakukan oleh Unit Kerja yang membidangi kepatuhan Syariah – Unit Usaha Syariah.
 - Melakukan uji petik atas kecukupan dan efektivitas pelaksanaan *self-assessment* uji kepatuhan dan penerapan APU PPT PPPSPM yang dilaksanakan oleh Unit Bisnis.
 - Melakukan pemetaan dan identifikasi risiko terhadap unit kerja/aktivitas/area yang memiliki tingkat kemungkinan dan/atau dampak praktik gratifikasi.
 - Melakukan analisis transaksi keuangan nasabah untuk mengidentifikasi transaksi yang menyimpang dari profil/karakteristik/pola transaksi nasabah termasuk transaksi keuangan mencurigakan.
 - Menerapkan fungsi deteksi atas dugaan pelanggaran secara berkelanjutan melalui pengelolaan sarana *Whistleblowing System* (WBS) dan pelaporan Gratifikasi.

8. Compliance Risk

Compliance risk is the risk arising from Indonesia Eximbank's failure to comply with and/or implement laws and regulations applicable to Indonesia Eximbank. The compliance risk management process implemented is as follows:

- a. Identification and analysis of several factors that may increase exposure to Compliance Risk, including:
 - Implementing Customer Due Diligence through customer identification and verification processes, as well as assessing the risk profile of customers/prospective customers;
 - Conducting independent reviews and providing advice, including:
 - » Reviewing all laws and regulations that have an impact on Indonesia Eximbank;
 - » Reviewing existing internal regulations in terms of their suitability and relevance to current conditions and/or changes in external regulations;
 - » Reviewing the formulation/amendment of internal provisions at Indonesia Eximbank for compliance with applicable laws and regulations; and
 - » Independent studies and advice on compliance risks inherent in new and existing business activities/products/activities.
 - Conducting compliance tests on business proposals;
 - Implementing Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter-Proliferation of Weapons of Mass Destruction Financing (AML/CFT/CPWMD);
 - Conducting sharia compliance sampling tests on the fulfillment of sharia principles in transactions based on sharia principles. These sampling tests are conducted by the work unit in charge of sharia compliance – the Sharia Business Unit.
 - Conducting sampling tests on the adequacy and effectiveness of the implementation of self-assessment compliance tests and the implementation of APU PPT PPPSPM carried out by the Business Unit.
 - Mapping and identifying risks to work units/activities/areas that have a high probability and/or impact of gratification practices.
 - Analyzing customer financial transactions to identify transactions that deviate from customer profiles/characteristics/transaction patterns, including suspicious financial transactions.
 - Implementing a continuous detection function for suspected violations through the management of a Whistleblowing System (WBS) and reporting of gratuities.

- b. Dalam mengukur/menilai Risiko Kepatuhan, dapat menggunakan parameter atau indikator:
- Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan oleh LPEI.
 - Frekuensi pelanggaran (termasuk sanksi) atau rekam jejak (*track record*) ketidakpatuhan LPEI.
 - Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku bagi LPEI, atau standar bisnis yang berlaku umum. Pengukuran atas parameter ini mencakup antara lain pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan, standar akuntansi, kode etik, ataupun standar lainnya yang berlaku secara umum pada sektor jasa keuangan.
 - Tindak lanjut atas pelanggaran termasuk pemenuhan atas rencana tindak (*action plan*) yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau regulator lainnya.
- c. Dalam rangka melakukan langkah-langkah pengendalian Risiko Kepatuhan, maka dapat dilakukan beberapa hal, antara lain:
- Menyediakan mekanisme dan sarana pengaduan melalui sarana *Whistleblowing System* (WBS).
 - Menyediakan mekanisme dan sarana pelaporan Gratifikasi.
 - Menunjuk petugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) LPEI sebagai perpanjangan tangan KPK dalam melaksanakan fungsi Pengendalian Gratifikasi di lingkungan LPEI.
 - Membentuk unit kerja yang membidangi kepatuhan Syariah di Unit Usaha Syariah sebagai perpanjangan tangan DPS dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemenuhan prinsip Syariah atas produk dan aktivitas berdasarkan prinsip Syariah di lingkungan LPEI.
 - Menyusun peraturan internal terkait dengan fungsi kepatuhan, termasuk kegiatan reviu dan pengkinian secara berkala.
 - Menyediakan media pembelajaran terkait budaya kepatuhan termasuk prinsip Syariah, antara lain dapat berupa materi budaya kepatuhan dalam *Learning Management System* maupun media lainnya;
 - Melakukan kegiatan uji kepatuhan, uji petik (termasuk uji petik kepatuhan Syariah yang dilakukan oleh unit kerja yang membidangi kepatuhan Syariah), dan pemantauan transaksi.
 - Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pemenuhan komitmen dan pelaporan wajib kepada regulator.
 - Mengelola register risiko Kepatuhan dan register temuan temuan audit (internal & eksternal) Divisi Kepatuhan.
- b. In measuring/assessing Compliance Risk, the following parameters or indicators may be used:
- The type and significance of violations committed by Indonesia Eximbank.
 - Frequency of violations (including sanctions) or Indonesia Eximbank's track record of non-compliance.
 - Violations of laws and regulations, provisions applicable to Indonesia Eximbank, or generally accepted business standards. Measurement of this parameter includes, among others, violations of tax provisions, accounting standards, codes of conduct, or other standards generally applicable in the financial services sector.
 - Follow-up on violations, including fulfillment of the action plan submitted to the Financial Services Authority and/or other regulators.
- c. In order to implement Compliance Risk control measures, several things can be done, including:
- Providing a complaint mechanism and facility through a Whistleblowing System (WBS).
 - Providing a mechanism and facility for reporting gratuities.
 - Appointing officers from the Gratification Control Unit (UPG) of Indonesia Eximbank as an extension of the Corruption Eradication Commission (KPK) in carrying out the function of Gratification Control within Indonesia Eximbank.
 - Establishing a work unit responsible for Sharia compliance in the Sharia Business Unit as an extension of the DPS in carrying out the function of supervision and compliance with Sharia principles for products and activities based on Sharia principles within Indonesia Eximbank.
 - Formulating internal regulations related to compliance functions, including periodic review and updating activities.
 - Providing learning media related to compliance culture, including Sharia principles, which may include compliance culture materials in the Learning Management System or other media;
 - Conducting compliance tests, spot checks (including Sharia compliance spot checks conducted by the unit in charge of Sharia compliance), and transaction monitoring.
 - Carrying out monitoring and evaluation of commitment fulfillment and mandatory reporting to regulators.
 - Managing the Compliance Risk Register and the Audit Findings Register (internal & external) of the Compliance Division.

- Mengkomunikasikan kebijakan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi.
- d. Pemantauan terhadap Risiko Kepatuhan dilakukan antara lain dengan:
 - Melakukan *reminder* dan pemantauan secara berkelanjutan atas kewajiban pelaporan dan komitmen LPEI kepada regulator ataupun *stakeholders* lainnya, termasuk melakukan *follow up* untuk memastikan kesesuaian dan ketepatan waktu pelaporan.
 - Memantau peraturan internal yang terdampak oleh diberlakukannya peraturan eksternal baru.
 - Memantau pemenuhan permintaan regulator, termasuk berkoordinasi dan melakukan tindak lanjut dengan pihak terkait.
 - Memantau pengelolaan *database* regulasi eksternal secara berkala.
 - Memantau pemenuhan catatan dan tindak lanjut hasil uji kepatuhan secara berkala.
 - Memantau realisasi pengkinian data nasabah untuk memastikan ketepatan waktu pemenuhan laporan kepada regulator sesuai komitmen yang telah disampaikan.
 - Memantau sanksi/denda atas pelanggaran yang dilakukan oleh LPEI, termasuk menjalin komunikasi aktif dengan regulator dan otoritas pengawas terkait.
 - Memantau transaksi keuangan nasabah untuk mengidentifikasi transaksi yang menyimpang dari profil/karakteristik/pola transaksi nasabah termasuk Transaksi Keuangan Mencurigakan.
 - Pemantauan secara berkelanjutan terhadap register risiko Kepatuhan dan register temuan temuan audit (internal & eksternal) yang terdapat pada Satuan Kerja Kepatuhan.
 - Pemantauan secara berkala atas laporan dugaan pelanggaran melalui pengelolaan sarana *Whistleblowing System* (WBS) LPEI dan pelaporan Gratifikasi.
- 9. Risiko Asuransi

Risiko Asuransi adalah risiko kegagalan LPEI untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi Risiko (*underwriting*), penetapan premi atau kontribusi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim. Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko asuransi antara lain dilakukan melalui:

 - a. Risiko Asuransi yang dihadapi oleh LPEI dapat bersumber dari berbagai kegiatan usaha LPEI, antara lain jenis produk yang dimiliki, jangka waktu produk, risiko yang dijamin, dan manfaat yang diberikan perusahaan bagi pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
 - b. Pada tataran eksposur risiko secara portofolio, eksposur risiko asuransi senantiasa dipantau dan dilaporkan secara berkala kepada Manajemen antara
- Communicating policies to all employees at all levels of the organization.
- d. Monitoring of Compliance Risks is carried out, among other things, by:
 - Providing reminders and ongoing monitoring of Indonesia Eximbank's reporting obligations and commitments to regulators or other stakeholders, including follow-up to ensure the accuracy and timeliness of reporting.
 - Monitoring internal regulations affected by the implementation of new external regulations.
 - Monitoring the fulfillment of regulator requests, including coordinating and following up with relevant parties.
 - Monitoring the management of the external regulation database on a regular basis.
 - Monitoring the fulfillment of records and follow-up on compliance test results on a regular basis.
 - Monitoring the realization of customer data updates to ensure the timely fulfillment of reports to regulators in accordance with the commitments that have been made.
 - Monitoring sanctions/fines for violations committed by Indonesia Eximbank, including establishing active communication with regulators and relevant supervisory authorities.
 - Monitoring customer financial transactions to identify transactions that deviate from customer profiles/characteristics/transaction patterns, including Suspicious Financial Transactions.
 - Continuously monitor the Compliance Risk Register and the Audit Findings Register (internal & external) maintained by the Compliance Unit.
 - Periodically monitor reports of alleged violations through the management of Indonesia Eximbank's Whistleblowing System (WBS) and Gratuity Reporting.
- 9. Insurance Risk

Insurance risk is the risk of Indonesia Eximbank's failure to fulfill its obligations to policyholders, insured parties, and/or participants as a result of inadequate risk selection processes (*underwriting*), premium or contribution determination (*pricing*), use of reinsurance, and/or claim handling. To anticipate and control insurance risks, the following measures are taken, among others:

 - a. Insurance risks faced by Indonesia Eximbank may arise from various business activities of Indonesia Eximbank, including the types of products offered, product terms, risks covered, and benefits provided by the company to policyholders, insured parties, or participants.
 - b. At the portfolio risk exposure level, insurance risk exposure is continuously monitored and reported periodically to Management, including through the

lain melalui penyampaian laporan manajemen atas eksposur risiko utama, *Enterprise Risk Management Report* (ERMR) dan pembahasan melalui forum secara berkala.

- c. LPEI telah memiliki Sistem Internal pengelolaan risiko asuransi seperti *CARE System*.
- d. Secara operasional peraturan/kebijakan terkait risiko asuransi telah memiliki ketentuan internal tentang Kebijakan Asuransi, Peraturan Direktur Eksekutif tentang Standar Pedoman Produk dan Operasional Asuransi, serta Standar Pedoman tentang Komite.
- e. Sebagai tambahan dalam pengendalian risiko asuransi yaitu dengan menjaga komposisi tingkat konsentrasi pertanggungan asuransi pada level sesuai limit yang telah ditentukan dan Kecukupan pencadangan klaim kegiatan asuransi sesuai dengan pembentukan Retensi Sendiri tidak melebihi 2x modal disetor. Selain itu LPEI juga mengalihkan risiko asuransi kepada perusahaan reasuransi.

10. Risiko Investasi

Risiko Investasi adalah risiko akibat LPEI ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Investasi, antara lain melalui identifikasi pembiayaan yang disalurkan dalam akad imbal hasil, melalui penilaian yang komprehensif terhadap antara lain karakter nasabah, kemampuan mengelola usaha nasabah, kondisi keuangan nasabah, kolateral/jaminan nasabah, dan kondisi ekonomi yang terkait dengan usaha nasabah.

11. Risiko Imbal Hasil

Risiko Imbal Hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan LPEI kepada pihak pemberi pendanaan karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima LPEI dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku pihak pemberi pendanaan kepada LPEI. Identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Imbal Hasil, antara lain dengan:

- a. Mengkategorikan sumber pendanaan dan pembiayaan yang memiliki akad bagi hasil dan utang piutang;
- b. Mengkategorikan diversifikasi eksposur pendanaan dan pembiayaan yang disalurkan dalam akad Imbal Hasil;
- c. Mengidentifikasi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tingkat imbal hasil yang dibayarkan dan/atau diterima.

Aktivitas Manajemen Risiko tahun 2024

Di tahun 2024, penerapan Manajemen Risiko diarahkan pada beberapa aspek utama, yaitu:

- 1. Meningkatkan efektifitas deteksi dini pada debitur yang berpotensi bermasalah melalui mekanisme *Early Warning Detection* (EWD).

submission of management reports on major risk exposures, the Enterprise Risk Management Report (ERMR), and discussions through regular forums.

- c. Indonesia Eximbank has an internal insurance risk management system such as the CARE System.
- d. Operationally, regulations/policies related to insurance risk have internal provisions on Insurance Policy, Executive Director Regulations on Insurance Product and Operational Standards, and Standards on Committees.
- e. As an additional measure in insurance risk control, Indonesia Eximbank maintains the composition of insurance coverage concentration at a level in accordance with the predetermined limit and the adequacy of insurance claim reserves in accordance with the formation of Retention in Excess not exceeding 2x paid-up capital. In addition, Indonesia Eximbank also transfers insurance risk to reinsurance companies.

10. Investment Risk

Investment Risk is the risk arising from Indonesia Eximbank sharing in the losses of customers' businesses financed through profit-sharing financing. Identification and analysis of several factors that can increase exposure to Investment Risk, including through the identification of financing disbursed in profit-sharing agreements, through a comprehensive assessment of, among others, customer characteristics, customer's ability to manage their business, customer's financial condition, collateral/guarantees provided by customers, and economic conditions related to the customer's business.

11. Profit/Loss Risk

Profit Sharing Risk is the risk arising from changes in the profit sharing rate paid by Indonesia Eximbank to the funding provider due to changes in the profit sharing rate received by Indonesia Eximbank from the disbursement of funds, which may affect the behavior of the funding provider toward Indonesia Eximbank. Identification and analysis of several factors that may increase exposure to Profit Sharing Risk, including:

- a. Categorizing funding and financing sources with profit-sharing agreements and accounts receivable;
- b. Categorizing the diversification of funding and financing exposure disbursed under profit-sharing agreements;
- c. Identifying external factors that may affect the interest rates paid and/or received.

Risk Management Activities in 2024

In 2024, the implementation of Risk Management is directed at several main aspects, namely:

- 1. Increasing the effectiveness of early detection of potentially problematic debtors through the Early Warning Detection (EWD) mechanism.

2. Perbaikan tata kelola kebijakan, prosedur, dan proses secara berkelanjutan atas:
 - a. Pengelolaan risiko operasional
 - b. Pengelolaan risiko likuiditas dan pasar
 - c. Model bisnis ekosistem
3. Meningkatkan *Governance, Risk & Compliance* (GRC) di tingkat lembaga dan budaya peduli risiko (*risk awareness*) seluruh pegawai LPEI melalui:
 - a. Melakukan pengukuran *Risk Maturity* lembaga
 - b. Pemberdayaan fungsi Designated Compliance and Operational Risk Officer (DCORO)
 - c. Menjalankan proses implementasi *Operational Risk Management* (ORM), termasuk *control testing*
 - d. Peningkatan kompetensi pegawai terkait dengan kualitas analisa pembiayaan
4. Melakukan pengembangan dan penyempurnaan perangkat manajemen risiko, antara lain melalui:
 - a. Implementasi *system* aplikasi ORM.
 - b. Validasi dan penyempurnaan internal *credit risk rating*.
 - c. Integrasi *tools* manajemen risiko kredit.
 - d. Pengembangan metodologi pengukuran risiko pasar dan likuiditas.

Tantangan Manajemen Risiko di Tahun 2024

Pada tahun 2024, perkembangan aktivitas ekonomi dunia, termasuk mitra dagang utama ekspor Indonesia sudah menunjukkan tren yang membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Namun peningkatan aktivitas ekonomi dunia ini masih dibayang-bayangi oleh beberapa tantangan yaitu ancaman perang tarif lanjutan pasca terpilihnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump, masih berjalannya perang Rusia dan Ukraina serta perang yang terjadi di Palestina memperburuk arus pengiriman ekspor impor antar negara.

Risiko makroekonomi seperti kenaikan harga energi, masih tingginya nilai impor, ketidakpastian situasi menjelang proses pemilihan umum tahun 2024 serta kenaikan suku bunga The Fed sangat tinggi akan berimplikasi pada penguatan Dolar yang menekan sejumlah mata uang di berbagai negara termasuk Rupiah.

Lebih lanjut, tantangan Risiko operasional disebabkan oleh cepatnya digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan seperti digitalisasi ekonomi dan keuangan, sistem pembayaran dan proses kerja.

Selain itu, terdapat potensi Risiko Strategik yang berkaitan dengan kondisi dalam negeri sehubungan proses politik yaitu pemilihan umum di tahun 2024 serta keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Terdapat juga beberapa tantangan yang menjadi perhatian di LPEI seperti *cyber security risk* terutama yang terjadi di sektor pemerintahan di tahun 2024, perubahan regulasi, dan tuntutan hukum sejalan dengan proses hukum yang sedang berjalan.

2. Continuous improvement of governance of policies, procedures, and processes for:
 - a. Operational risk management
 - b. Liquidity and market risk management
 - c. Ecosystem business model
3. Improving Governance, Risk & Compliance (GRC) at the institutional level and the risk awareness culture of all Indonesia Eximbank employees through:
 - a. Measuring the institution's Risk Maturity
 - b. Empowering the Designated Compliance and Operational Risk Officer (DCORO) function
 - c. Carrying out the Operational Risk Management (ORM) implementation process, including control testing
 - d. Improving employee competency related to the quality of financing analysis
4. Developing and improving risk management tools, including through:
 - a. Implementation of the ORM application system.
 - b. Validation and improvement of internal credit risk ratings.
 - c. Integration of credit risk management tools.
 - d. Development of market risk and liquidity measurement methodology.

Risk Management Challenges in 2024

In 2024, the development of global economic activity, including Indonesia's major export trading partners, has shown an improving trend compared to the previous year. However, the increase in global economic activity is still overshadowed by several challenges, such as the threat of further trade wars following the election of U.S. President Donald Trump, the ongoing Russia-Ukraine war, and the conflict in Palestine, which has worsened the flow of export and import shipments between countries.

Macroeconomic risks such as rising energy prices, the still high value of imports, uncertainty surrounding the 2024 general election process, and a significant increase in the Fed's interest rates will have implications for the strengthening of the U.S. Dollar, which pressures various currencies in several countries, including the Rupiah.

Furthermore, operational risk challenges are driven by the rapid pace of digitalization across various aspects of life, such as economic and financial digitalization, payment systems, and work processes.

In addition, there are potential strategic risks related to domestic conditions, particularly concerning political processes such as the 2024 general election and the continuity of the development of the new Capital City (IKN).

There are also several challenges being closely monitored by Indonesia Eximbank, such as cyber security risks, especially in the government sector in 2024, regulatory changes, and legal demands in line with ongoing legal processes.

Implementasi Kebijakan Tahun 2024

Pada tahun 2024, LPEI terus memperkuat penerapan manajemen risiko dengan menyesuaikan kebijakan terhadap dinamika bisnis dan regulasi yang berkembang. Kebijakan ini dirancang agar selaras dengan strategi usaha serta kompleksitas kegiatan LPEI. Implementasi manajemen risiko mencakup berbagai aspek berikut:

1. Pasal 17 UU No. 2/2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, LPEI wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, prinsip penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah. Penerapan prinsip manajemen risiko mencakup pemenuhan kecukupan modal minimum, pengawasan aktif, dan pemenuhan disiplin pasar terhadap risiko yang melekat.
2. PMK No. 208/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. Kebijakan penerapan manajemen risiko di LPEI setidaknya mencakup pengawasan aktif Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, serta sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
3. POJK No. 09/2022 tanggal 23 Juni 2022 tentang Pengawasan LPEI.
4. SEOJK No. 15/2022 tanggal 7 September 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang mengatur penilaian tingkat Kesehatan LPEI.
5. Peraturan Dewan Direktur No. 0017/PDD/12/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Kebijakan Manajemen Risiko Enterprise Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. PDD tersebut berisi ketentuan manajemen risiko secara umum mencakup kerangka penerapan Manajemen Risiko.
6. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0027/PDE/12/2023 tanggal 7 Desember 2023 tentang Manajemen Risiko Enterprise Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
7. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0025/PDE/12/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Sembilan Komite di bawah Direktur Eksekutif (Edisi 1 Revisi 4)
8. Keputusan Direktur Eksekutif No. 0011/KDE/05/2024 tentang Penyesuaian Kuadran Portofolio Pada Keputusan Direktur Eksekutif Nomor 0048/KDE/11/2023 Tentang Portofolio Guideline LPEI.

Dalam menghadapi dinamika bisnis yang terus berkembang, LPEI menerapkan kebijakan strategis untuk memastikan ketahanan operasional dan keberlanjutan usaha. Setiap individu di LPEI memiliki peran dalam manajemen risiko sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Manajemen turut memastikan organisasi memiliki struktur yang jelas,

Policy Implementation in 2024

In 2024, Indonesia Eximbank continues to strengthen the implementation of risk management by adjusting policies to the dynamics of business and evolving regulations. These policies are designed to be in line with Indonesia Eximbank's business strategy and the complexity of its activities. The implementation of risk management covers the following aspects:

1. Article 17 of Act No. 2/2009 concerning Indonesia Eximbank stipulates that in carrying out its duties, Indonesia Eximbank is obliged to apply the principles of good corporate governance, risk management, and customer identification. The application of risk management principles includes compliance with minimum capital adequacy, active supervision, and compliance with market discipline regarding inherent risks.
2. Minister of Finance Regulation No. 208/2021 dated December 30, 2021, concerning Governance, Risk Management Principles, and Customer Identification of Indonesia Eximbank. The risk management implementation policy at Indonesia Eximbank covers at least active supervision by the Board of Directors and Executive Directors, adequacy of policies, procedures, and risk limit setting, adequacy of risk identification, measurement, monitoring, and control processes as well as risk management information systems, and comprehensive internal control systems.
3. Financial Services Authority Regulation No. 09/2022 dated June 23, 2022, concerning Indonesia Eximbank Supervision.
4. Financial Services Authority Regulation No. 15/2022 dated September 7, 2022, concerning Health Level Assessment of Indonesia Eximbank, which regulates the assessment of Indonesia Eximbank health level.
5. Board of Directors Regulation No. 0017/PDD/12/2022 dated December 2, 2022, concerning the Enterprise Risk Management Policy of Indonesia Eximbank. The regulation contains provisions on risk management in general, including the risk management framework.
6. Executive Director Regulation No. 0027/PDE/12/2023 dated December 7, 2023, concerning on Enterprise Risk Management of Indonesia Eximbank.
7. Executive Director Regulation No. 0025/PDE/12/2024 dated December 18, 2024 concerning Nine Committees under the Executive Director (Edition 1 Revision 4)
8. Executive Director Decree No. 0011/KDE/05/2024 concerning Portfolio Quadrant Adjustment in Executive Director Decree Number 0048/KDE/11/2023 Concerning Indonesia Eximbank Portfolio Guidelines.

In facing the ever-evolving business dynamics, Indonesia Eximbank implements strategic policies to ensure operational resilience and business sustainability. Every individual at Indonesia Eximbank has a role in risk management in accordance with their duties and authorities. Management also ensures that the organization has a clear structure,

pembagian tanggung jawab yang tepat, serta SDM yang kompeten dan memadai guna mendukung efektivitas penerapan Manajemen Risiko.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

LPEI terus memastikan bahwa Sistem Manajemen Risiko berfungsi secara optimal dalam menghadapi dinamika bisnis yang terus berkembang. Untuk itu, evaluasi berkala dilakukan guna menilai sejauh mana sistem ini mampu mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko yang mungkin timbul. Proses evaluasi mencakup analisis terhadap efektivitas kontrol internal, pemantauan risiko, serta kesiapan respons terhadap perubahan lingkungan bisnis.

Sebagai bagian dari upaya ini, LPEI mengadakan *Risk Maturity Survey*, yang pada tahun 2024 memperoleh skor 4,04 dari 5. Hasil ini menunjukkan bahwa LPEI semakin mampu mengidentifikasi risiko dengan baik serta mendekati standar pengelolaan risiko yang lebih optimal. Berdasarkan temuan tersebut, LPEI dapat menyusun berbagai program dan inisiatif untuk memperkuat budaya sadar risiko di seluruh organisasi.

Evaluasi terhadap efektivitas Sistem Manajemen Risiko juga dilakukan untuk memastikan kesesuaian dan daya tanggapnya terhadap perubahan bisnis. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan dan penguatan agar sistem tetap responsif, antisipatif, dan optimal dalam mendukung pencapaian tujuan serta strategi bisnis LPEI.

Pernyataan Kecukupan Manajemen Risiko

Sistem pengendalian internal yang diterapkan di LPEI dirancang untuk memastikan efektivitas pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap regulasi. Evaluasi terhadap kecukupan sistem ini dilakukan secara berkala dan tercermin dalam Laporan Profil Risiko yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif kepada Otoritas Jasa Keuangan. Laporan tersebut mencakup penilaian atas Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR), yang meliputi empat aspek berikut:

1. Aspek I, Tata Kelola Risiko;
2. Aspek II, Kerangka Manajemen Risiko;
3. Aspek III, Proses Manajemen Risiko, Kecukupan Sumber Daya Manusia, dan Kecukupan Sistem Informasi Manajemen; dan
4. Aspek IV, Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko, dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha LPEI.

appropriate division of responsibilities, and competent and adequate human capital to support the effective implementation of Risk Management.

Review of Risk Management System Effectiveness

Indonesia Eximbank continues to ensure that its Risk Management System functions optimally in the face of ever-changing business dynamics. To that end, periodic evaluations are conducted to assess the extent to which the system is capable of identifying, measuring, and controlling potential risks. The evaluation process includes an analysis of the effectiveness of internal controls, risk monitoring, and readiness to respond to changes in the business environment.

As part of these efforts, Indonesia Eximbank conducted a Risk Maturity Survey, which in 2024 scored 4.04 out of 5. This result indicates that Indonesia Eximbank is increasingly capable of identifying risks well and is approaching more optimal risk management standards. Based on these findings, Indonesia Eximbank can develop various programs and initiatives to strengthen a risk-aware culture throughout the organization.

An evaluation of Risk Management System effectiveness was also conducted to ensure its suitability and responsiveness to business changes. The results of this evaluation serve as a basis for formulating improvement and strengthening measures to ensure that the system remains responsive, anticipatory, and optimal in supporting the achievement of Indonesia Eximbank's objectives and business strategies.

Statement on the Adequacy of Risk Management

The internal control system implemented at Indonesia Eximbank is designed to ensure effective risk management and regulatory compliance. The adequacy of this system is evaluated periodically and reflected in the Risk Profile Report submitted by the Executive Director to Financial Services Authority. The report includes an assessment of the Quality of Risk Management Implementation (KPMR), which covers the following four aspects:

1. Aspect I, Risk Governance;
2. Aspect II, Risk Management Framework;
3. Aspect III, Risk Management Process, Adequacy of Human Capital, and Information Management System; and
4. Aspect IV, Adequacy of Risk Control Systems, considering the characteristics and complexity of Indonesia Eximbank's operations.

Hasil penilaian komposit terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko tahun 2024 berada pada tingkat 3 yang berarti meskipun persyaratan minimum telah terpenuhi, masih terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian dan perbaikan dari manajemen.

Penilaian dilakukan tidak hanya secara individual, tetapi juga secara menyeluruh dengan mempertimbangkan analisis akar penyebab (*root cause analysis*), keterkaitan antar rasio (*linkage analysis*), serta dampak suatu rasio terhadap rasio lainnya maupun terhadap kinerja LPEI (*impact analysis*). Dalam menentukan peringkat profil risiko, analisis ini memperhitungkan signifikansi serta materialitas risiko. Selain itu, penilaian rasio juga mempertimbangkan tolok ukur industri atau kelompok sejawat (*peer group benchmark*).

Rencana Strategis Manajemen Risiko tahun 2025

Pada tahun 2025, LPEI menetapkan langkah-langkah strategis dalam manajemen risiko guna memperkuat ketahanan dan efektivitas operasional. Rencana ini mencakup berbagai inisiatif, yaitu LPEI telah menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidang manajemen risiko untuk tahun 2025, sebagai berikut:

1. Peningkatan kolaborasi Risk & Business Unit.
2. Penguatan *Governance Risk and Compliance* (GRC).
3. Penyempurnaan aturan internal.
4. Pengembangan Sistem Pendukung Manajemen Risiko khusus mencakup:
 - a. Implementasi EWD secara menyeluruh
 - b. *Stress Test Tools*
 - c. *Market Liquidity Risk Dashboard*
 - d. *Internal Rating/Scoring Tools*
5. Pengembangan SDM berkolaborasi dengan unit kerja Human Capital.

The composite assessment results for Risk Management Implementation Quality in 2024 are at a level of 3, which means although the minimum requirements have been met, there are still several weaknesses that require attention and improvement from management.

The assessment was conducted not only individually but also comprehensively, taking into account root cause analysis, inter-ratio linkage analysis, and the impact of one ratio on others as well as on Indonesia Eximbank performance (impact analysis). In determining the risk profile ranking, this analysis considers the significance and materiality of risks. Additionally, ratio assessments also take into account industry benchmarks or peer group benchmarks.

Strategic Risk Management Plan for 2025

In 2025, Indonesia Eximbank established strategic measures in risk management to strengthen operational resilience and effectiveness. This plan includes various initiatives, namely:

1. Increased collaboration between Risk & Business Unit.
2. Strengthening Governance Risk and Compliance (GRC).
3. Improvement of internal rules.
4. Development of a special Risk Management Support System including:
 - a. Comprehensive EWD implementation
 - b. *Stress Test Tools*
 - c. *Market Liquidity Risk Dashboard*
 - d. *Internal Rating/Scoring Tools*
5. HC development in collaboration with the Human Capital work unit.

Perkara Hukum dan Upaya Penyelesaian

Legal Cases and the Settlement

Di tahun 2024, LPEI terlibat dalam sejumlah proses hukum, termasuk 2 (dua) perkara pidana dengan rincian sebagai berikut:

In 2024, LPEI was involved in a number of legal processes, including 2 (two) criminal cases with the following details:

No.	Pokok Perkara/Gugatan Case/Claim	Tingkat Perkara Case Level	Status Penyelesaian Settlement Status	Dampak bagi LPEI Impact to Indonesia Eximbank
1.	Pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi sehubungan dengan Pemberian Pembiayaan kepada Debitur LPEI Examination by the Corruption Eradication Commission (KPK) in connection with Alleged Corruption Crimes the Provision of Financing to Indonesia Eximbank Debtors	Penyidikan Investigation	Penyidikan (sudah terdapat penetapan Tersangka) Investigation (Suspect has been determined)	Pemeriksaan yang sedang berjalan tidak berdampak pada keuangan maupun kegiatan operasional LPEI dalam mendukung Pembiayaan Ekspor Nasional. The ongoing examination does not have an impact on Indonesia Eximbank's finances or operational activities in supporting National Export Financing.
2.	Pemeriksaan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi sehubungan dengan Pemberian Pembiayaan kepada Debitur LPEI Examination by the Corruption Eradication Commission (KPK) in connection with Alleged Corruption Crimes the Provision of Financing to Indonesia Eximbank Debtors	Penyidikan Investigation	Penyidikan Investigation	Pemeriksaan yang sedang berjalan tidak berdampak pada keuangan maupun kegiatan operasional LPEI dalam mendukung Pembiayaan Ekspor Nasional. The ongoing examination does not have an impact on Indonesia Eximbank's finances or operational activities in supporting National Export Financing.

Sanksi Administratif

Administrative Sanctions

Sepanjang tahun 2024, LPEI dikenakan sanksi yang terdiri dari 16 Sanksi Peringatan Tertulis dan 1 Denda Administratif.

Throughout 2024, Indonesia Eximbank was subject to sanctions consisting of 16 Written Warning Sanctions and 1 Administrative Fine.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access to Company Information and Data

LPEI memastikan bahwa informasi keuangan dan non-keuangan disampaikan secara terbuka dan akurat. Untuk mendukung hal ini, LPEI menyediakan berbagai kanal komunikasi yang memudahkan pemangku kepentingan dalam mengakses informasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Indonesia Eximbank ensures that financial and non-financial information is disclosed transparently and accurately. To support this, Indonesia Eximbank provides various communication channels that facilitate stakeholders in accessing information in accordance with applicable regulations.

Sebagai wujud kepatuhan terhadap regulasi, LPEI menyampaikan laporan melalui berbagai media, termasuk surat-menyurat, e-reporting kepada regulator, serta publikasi di situs resmi. Seluruh informasi dan laporan dapat diakses dengan mudah melalui sarana berikut:

As a demonstration of compliance with regulations, Indonesia Eximbank submits reports through various media, including correspondence, e-reporting to regulators, and publication on its official website. All information and reports can be easily accessed through the following channels:

1. **Siaran**
Pers LPEI secara berkala menerbitkan Siaran Pers sebagai transparansi informasi kepada publik mengenai aksi korporasi penting dan strategis yang dilakukan LPEI.
2. **Media Sosial**
LPEI juga aktif memberikan informasi kepada publik melalui akun:
Website: indonesiaeximbank.go.id
Youtube: Indonesia Eximbank
Instagram: @indonesiaeximbank
Facebook: EximbankID
LinkedIn: Indonesia-eximbank
3. **Intranet**
LPEI memiliki portal informasi internal yaitu intranet. Intranet dapat diakses oleh seluruh pegawai untuk membantu menjalankan aktivitas.

1. **Press Releases**
Indonesia Eximbank periodically publishes press releases as a means of providing transparent information to the public about important and strategic corporate actions taken by Indonesia Eximbank.
2. **Social Media**
Indonesia Eximbank also actively provides information to the public through its social media accounts.
Website: indonesiaeximbank.go.id
Youtube: Indonesia Eximbank
Instagram: @indonesiaeximbank
Facebook: EximbankID
LinkedIn: Indonesia-eximbank
3. **Intranet**
Indonesia Eximbank has an internal information portal called the intranet. The intranet can be accessed by all employees to assist in carrying out activities.

Alamat: Prosperity Tower Lantai 1 District 8, SCBD Lot 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12191, Indonesia Address: Prosperity Tower, 1st Floor, District 8, SCBD Lot 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12191, Indonesia		
Tel. Phone	(62 21) 395 03600	Email : corpsec@indonesiaeximbank.go.id
Fax.	(62 21) 395 03699	Situs Web Website : www.indonesiaeximbank.go.id

Kode Etik

Code of Conduct

Kode Etik di lingkungan LPEI menjadi pedoman utama dalam membentuk budaya kerja yang berlandaskan nilai-nilai perusahaan. Pedoman ini mengatur norma dan standar perilaku yang mencerminkan profesionalisme, integritas, serta tanggung jawab dalam setiap aspek pekerjaan.

Lebih dari sekadar dokumen kebijakan, Kode Etik LPEI memberikan panduan konkret bagi seluruh pegawai dalam menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi etika berbisnis dan perilaku yang berintegritas. Setiap individu diharapkan untuk menginternalisasi prinsip-prinsip ini agar tercipta lingkungan kerja yang harmonis dan bertanggung jawab.

Penerapan Pedoman Kode Etik LPEI tidak hanya memperkuat tata kelola yang baik, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem kerja yang mendukung keberlanjutan, saling menghormati, dan berorientasi pada kepercayaan pemangku kepentingan. Dengan demikian, Kode Etik ini menjadi elemen penting dalam perjalanan LPEI mencapai tujuan dan visi jangka panjangnya.

Code of Conduct within Indonesia Eximbank serves as the main guideline in shaping a work culture based on corporate values. This guideline regulates norms and standards of conduct that reflect professionalism, integrity, and responsibility in every work aspect.

More than just a policy document, Indonesia Eximbank Code of Conduct provides concrete guidance for all employees in carrying out their duties by upholding business ethics and integrity. Each individual is expected to internalize these principles in order to create a harmonious and responsible work environment.

The implementation of Indonesia Eximbank Code of Conduct not only strengthens good corporate governance, but also encourages the creation of a work ecosystem that supports sustainability, mutual respect, and stakeholder trust. Thus, this Code of Conduct is an important element in Indonesia Eximbank's journey to achieve its long-term goals and vision.

Dasar Hukum Kode Etik LPEI

Legal Basis of Indonesia Eximbank Code of Conduct



Tujuan Pengaturan Standar Kode Etik Pegawai

Purpose of Regulating Employee Code of Conduct Standards

LPEI menetapkan pedoman Kode Etik Pegawai yang bertujuan untuk:

- Menjadi pedoman perilaku Pegawai di Lingkungan LPEI untuk menjaga citra, martabat, integritas, kredibilitas dan kebebasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Nilai-Nilai Budaya LPEI;

Indonesia Eximbank has established Employee Code of Conduct guidelines that aim to:

- Become a guideline for employee behavior in Indonesia Eximbank to maintain the image, dignity, integrity, credibility and freedom in carrying out duties and responsibilities in accordance with Indonesia Eximbank Cultural Values;

2. Mencegah adanya Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku guna melindungi Pegawai di Lingkungan LPEI dari risiko hukum dan/atau risiko reputasi yang mungkin timbul akibat perilaku yang menyimpang dari norma sosial atau tidak sesuai dengan tata kelola LPEI; dan
3. Memperjelas mekanisme penanganan informasi, laporan dan proses penyelesaian dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai.

Standar Kode Etik Pegawai

Setiap pegawai LPEI diharapkan menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi Standar Kode Etik Pegawai. Prinsip-prinsip etika ini wajib dipatuhi sebagaimana dijelaskan berikut:

1. Pegawai adalah setiap orang yang bekerja atau terikat dalam hubungan kerja dengan LPEI dan oleh karenanya menerima gaji dan penghasilan atau imbalan dalam bentuk lain dari LPEI dan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) LPEI.
2. Standar Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, nilai dan norma yang mengikat seluruh Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pegawai LPEI maupun dalam pergaulan sehari-hari dengan masyarakat bangsa dan negara.

Pokok-Pokok Kode Etik

LPEI menjunjung tinggi standar etika dalam setiap aspek operasionalnya. Pokok-pokok kode etik dalam Kode Etik ini menjadi pedoman bagi seluruh aktivitas dan perilaku sehari-hari, mencakup:

1. **Agile**, Mendorong kecepatan, ketepatan, dan kualitas layanan; proaktif dalam menghadapi perubahan; membangun kolaborasi lintas pihak; serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan inovatif demi kesejahteraan masyarakat.
2. **Profesionalisme**, menjunjung kepentingan organisasi, disiplin dalam bekerja sesuai SOP, menjaga rahasia, bertanggung jawab atas tugas, menghargai keberagaman, dan menciptakan lingkungan kerja yang etis, rapi, serta produktif.
3. **Integritas**, berlandaskan kejujuran, komitmen, tanggung jawab, menjaga rahasia, menghindari konflik kepentingan, serta menjaga akurasi data dan sistem demi nama baik dan reputasi LPEI.
4. **Kreatif**, mendorong inovasi, keterbukaan terhadap ide dan informasi baru, serta kolaborasi aktif untuk menciptakan nilai tambah dan solusi yang efektif di lingkungan kerja.

2. Prevent violations of the Code of Conduct in order to protect employees in Indonesia Eximbank from legal risks and/or reputational risks that may arise due to behavior that deviates from social norms or is not in accordance with Indonesia Eximbank governance; and
3. Clarify the mechanism for handling information, reports and the process for resolving alleged violations of the Employee Code of Conduct.

Employee Code of Conduct Standards

Every Indonesia Eximbank employee is expected to carry out their duties by upholding the Employee Code of Conduct Standards. These ethical principles must be adhered to as described below:

1. An employee is any person who works or is engaged in an employment relationship with Indonesia Eximbank and therefore receives salary and income or other compensation from Indonesia Eximbank and has the Indonesia Eximbank Employee Identification Number (NIP).
2. The Employee Code of Conduct Standard is a guideline of attitudes, behaviors, actions, values, and norms that bind all Employees in carrying out their duties and functions as Indonesia Eximbank Employees as well as in their daily interactions with the surrounding community and the nation.

Principles of Code of Conduct

Indonesia Eximbank upholds ethical standards in every aspect of its operations. The principles of this Code of Conduct serve as guidelines for all daily activities and conduct, including:

1. **Agile**, Encouraging speed, accuracy, and quality of service; proactive in facing change; building cross-party collaboration; and creating a conducive and innovative work environment for the welfare of society.
2. **Professionalism**, upholding the interests of the organization, discipline in working according to SOP, maintaining confidentiality, being responsible for tasks, respecting diversity, and creating an ethical, neat, and productive work environment.
3. **Integrity**, based on honesty, commitment, responsibility, maintaining confidentiality, avoiding conflicts of interest, and maintaining data and system accuracy for the good name and reputation of Indonesia Eximbank.
4. **Creative**, encouraging innovation, openness to new ideas and information, and active collaboration to create added value and effective solutions in the work environment.

Pemberlakuan Kode Etik di Seluruh Level Organisasi

1. Standar kode etik merangkum nilai-nilai dasar etika, kewajiban, serta larangan yang harus diikuti ketika melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pegawai LPEI. Hal ini mencakup tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan operasional LPEI dan interaksi dengan lingkungan masyarakat.
2. Standar kode etik berlaku secara mengikat untuk seluruh pegawai LPEI, termasuk anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana.
3. Standar kode etik diterapkan tanpa toleransi dan pengecualian terhadap pelanggaran, serta memuat sanksi bagi pelanggarnya.

Sosialisasi Kode Etik dan Upaya Penegakannya

Pemahaman terhadap Kode Etik diperkuat melalui sosialisasi yang rutin dan terstruktur, menjangkau seluruh insan LPEI melalui berbagai saluran komunikasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan nilai-nilai Kode Etik tertanam dalam budaya kerja dan dipahami di setiap tingkatan organisasi. Selain itu, integrasi nilai-nilai tersebut dilakukan dalam berbagai forum internal, seperti rapat dan *briefing*, guna memperkuat implementasinya di lingkungan kerja. Unit kerja SDM bertanggung jawab atas penerapan dan pengawasan, sementara unit Kepatuhan berperan dalam menyebarkan informasi melalui *e-mail* kepada seluruh pegawai.

Adapun pelaksanaan sosialisasi terkait kode etik di tahun 2024 dilakukan melalui materi yang dapat diakses melalui aplikasi Xlearn (*Learning Management System*) LPEI, dengan program sebagai berikut antara lain:

1. Pelaksanaan Refreshment seluruh pegawai LPEI di akhir Semester 2 tahun 2024 (Desember 2024) dan dilakukan rutin setiap tahunnya
2. Bagian dari materi induksi/ orientasi pegawai baru
3. Mandatory bagi pegawai baru untuk mengerti terkait kode etik LPEI melalui pemenuhan akses materi Xlearn

Enforcement of Code of Conduct at All Levels of the Organization

1. The code of conduct standard summarizes the fundamental values of conduct, obligations, and prohibitions that must be followed when performing duties and functions as an employee of Indonesia Eximbank. This includes responsibility for carrying out Indonesia Eximbank's operational activities and interactions with the community.
2. The code of conduct standard is binding for all Indonesia Eximbank employees, including members of Board of Directors, Executive Directors, and Managing Directors.
3. The code of conduct standard is applied without tolerance and exceptions for violations and includes sanctions for violators.

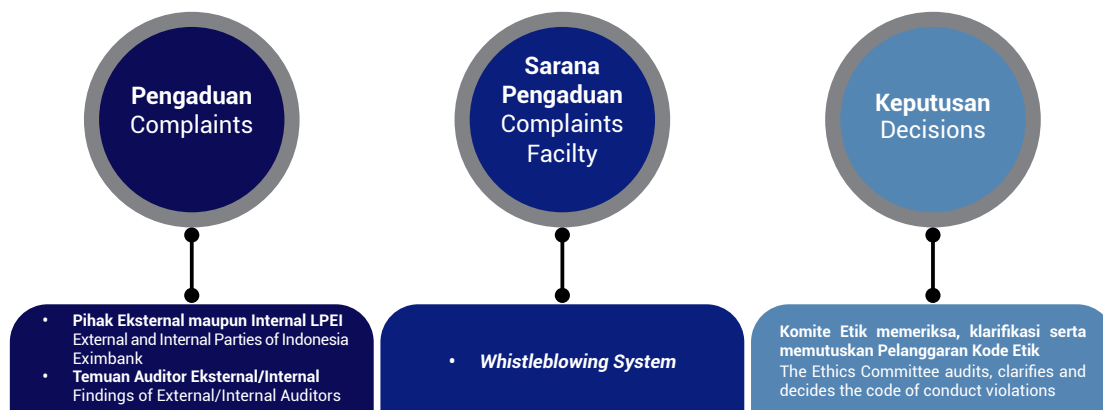
Socialization of Code of Conduct and Enforcement Efforts

Understanding of Code of Conduct is strengthened through regular and structured dissemination, reaching all Indonesia Eximbank employees through various communication channels. This activity aims to ensure that the values of Code of Conduct are embedded in the work culture and understood at every level of the organization. In addition, integration of these values is carried out in various internal forums, such as meetings and briefings, to strengthen their implementation in the work environment. The Human Capital unit is responsible for implementation and supervision, while the Compliance unit plays a role in disseminating information via email to all employees.

The socialization related to the code of conduct in 2024 is carried out through materials that can be accessed through the Xlearn (*Learning Management System*) Indonesia Eximbank application, with the following programs, including:

1. Refreshment for all Indonesia Eximbank employees at the end of Semester 2 of 2024 (December 2024) and carried out routinely every year
2. Part of the induction/orientation material for new employees
3. Mandatory for new employees to understand Indonesia Eximbank code of conduct through the fulfillment of access to Xlearn materials

Mekanisme Laporan Pelanggaran Kode Etik



Mechanism for Code of Conduct Violations Report

Jenis Sanksi untuk Setiap Pelanggaran Kode Etik

LPEI menegaskan komitmennya terhadap kepatuhan pada Kode Etik dengan menerapkan sanksi tegas terhadap setiap pelanggaran. Sanksi yang diberlakukan mencakup tindakan disiplin hingga pemutusan hubungan kerja, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan internal LPEI. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan aturan, tetapi juga membangun budaya perusahaan yang berlandaskan integritas dan moralitas.

Jika suatu pelanggaran Kode Etik mengindikasikan adanya pelanggaran hukum, LPEI berwenang mengambil langkah hukum lebih lanjut. Tindakan ini dapat mencakup proses hukum pidana atau perdata, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. LPEI memastikan bahwa setiap pelanggaran yang berkaitan dengan aspek hukum ditangani dengan serius dan sesuai prosedur yang berlaku, sebagai bagian dari upaya menjaga etika serta kepatuhan terhadap hukum.

Setiap ucapan, tulisan, atau tindakan pegawai yang bertentangan dengan ketentuan inti Kode Etik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Eksekutif, dikategorikan sebagai Pelanggaran Kode Etik. Pengaduan terkait pelanggaran ini, baik dari pihak internal maupun eksternal, diproses melalui sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) yang telah ditetapkan. Sistem ini memastikan transparansi dan keadilan dalam menangani setiap pelanggaran, sehingga dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara efektif sesuai prosedur yang berlaku.

Sanctions for Every Code of Conduct Violation

Indonesia Eximbank reaffirms its commitment to compliance with the Code of Conduct by imposing strict sanctions for any violations. The sanctions imposed include disciplinary measures up to termination of employment, in accordance with the provisions of Indonesia Eximbank's internal regulations. This measure is not only intended to enforce the rules, but also to build a corporate culture based on integrity and morality.

If a violation of Code of Conduct indicates a violation of law, Indonesia Eximbank is authorized to take further legal action. Such action may include criminal or civil legal proceedings, in accordance with applicable laws and regulations in Indonesia. Indonesia Eximbank ensures that every violation related to legal aspects is handled seriously and in accordance with applicable procedures, as part of its efforts to maintain ethics and compliance with the law.

Any speech, writing, or action by an employee that violates the core provisions of Code of Conduct, as stipulated in the Executive Director's Regulations, is categorized as a Code of Conduct Violation. Complaints regarding such violations, whether from internal or external parties, are processed through the established whistleblowing reporting system. This system ensures transparency and fairness in handling every violation, enabling them to be identified and addressed effectively in accordance with applicable procedures.

Direktur Eksekutif memiliki kewenangan untuk memberlakukan sanksi kepada pegawai di semua tingkatan. Namun, dalam praktiknya, sebagian dari wewenang tersebut dapat didelegasikan tanpa hak substitusi kepada pejabat-pejabat berikut:

1. Pegawai pada kelompok jabatan Kepala Departemen berwenang untuk mengenakan sanksi ringan berupa surat peringatan atau lisan terbatas kepada pegawai yang merupakan bawahan langsungnya.
2. Pegawai pada kelompok jabatan Kepala Divisi berwenang untuk mengenakan sanksi ringan berupa surat peringatan pertama hingga surat peringatan ketiga terbatas kepada pegawai yang berada pada unit kerjanya.
3. Kepala Divisi SDM berwenang untuk mengenakan semua sanksi ringan serta sanksi sedang berupa peringatan keras tertulis kepada seluruh pegawai.

Executive Director has the authority to impose sanctions on employees at all levels. However, in practice, some of this authority can be delegated, without substitution rights, to the following officials:

1. Employees in the Department Head position are authorized to impose minor sanctions, such as limited verbal warnings, on employees who are their direct subordinates.
2. Employees in the Division Head position are authorized to impose minor sanctions, such as first to third written warnings, on employees within their respective units.
3. Head of HC Division is authorized to impose all minor sanctions as well as moderate sanctions, such as written strong warnings, on all employees.

Pelanggaran Kode Etik dan Sanksi Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, tidak ada pelanggaran kode etik yang terjadi, sehingga tidak ada sanksi yang diberikan.

Code of Conduct Violations and Sanctions in 2024

No code of conduct violations occurred during 2024, hence no sanctions were imposed.

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja

Long-Term Performance-Based Compensation Policy

Hingga akhir tahun 2024, LPEI tidak memiliki kebijakan kompensasi jangka panjang berbasis kinerja dalam bentuk program kepemilikan saham kepada manajemen (*Management Stock Ownership Program/MSOP*) atau karyawan (*Employee Stock Ownership Program/ESOP*) maupun bentuk lain yang setara.

Until the end of 2024, Indonesia Eximbank does not have a long-term performance-based compensation policy in the form of a Management Stock Ownership Program (MSOP) or Employee Stock Ownership Program (ESOP) or any other equivalent form.

LPEI merupakan lembaga keuangan khusus yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas dan tidak memperdagangkan sahamnya di bursa efek, sehingga tidak memiliki kewajiban maupun kebijakan terkait pemberian kompensasi jangka panjang berbasis saham. Seluruh kebijakan remunerasi dan imbal jasa bagi jajaran Direksi dan karyawan LPEI ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku bagi lembaga di bawah pembinaan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada prinsip kewajaran, kepatuhan, dan kinerja.

Indonesia Eximbank is a specialized financial institution that is not incorporated as a limited liability Company and does not trade its shares on the stock exchange, and therefore has no obligations or policies related to the provision of long-term compensation based on shares. All remuneration and service compensation policies for Indonesia Eximbank's Board of Directors and employees are determined in accordance with the provisions applicable to institutions under the supervision of Ministry of Finance, with reference to the principles of fairness, compliance, and performance.

Kebijakan Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana dan Dewan Direktur

Share Ownership Disclosure Policy for Executive Director, Managing Directors, and Board Members

Hingga akhir tahun 2024, LPEI tidak memperdagangkan sahamnya di bursa efek manapun sehingga tidak memiliki kebijakan kepemilikan saham oleh Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan Anggota Dewan.

Until the end of 2024, Indonesia Eximbank does not trade its shares on any stock exchange and therefore does not have a share ownership policy for its Executive Director, Managing Directors, and Board Members.





Transparansi Manajemen Tentang Kepemilikan Saham

Management Transparency On Share Ownership

Kebijakan

PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia mengamanatkan dalam Pasal 14 dan Pasal 29 bahwa Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana wajib mengungkapkan kepemilikan sahamnya pada perusahaan lain, baik yang berlokasi di dalam maupun di luar negeri. Ketentuan serupa juga diatur dalam POJK No. 9/2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, khususnya dalam Pasal 17 dan Pasal 22.

Selain itu, Pasal 27 PMK No. 208/2021 menetapkan bahwa Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana dilarang memiliki lebih dari 25% (dua puluh lima persen) saham dari modal disetor pada perusahaan lain, baik secara individu maupun kolektif.

Dalam rangka penerapan kebijakan terkait kepemilikan saham bagi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana, LPEI mewajibkan seluruh anggota Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana untuk melaporkan kepemilikan saham perusahaan terbuka, baik di dalam maupun di luar negeri, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah kepemilikan atau perubahan kepemilikan saham tersebut terjadi. Kebijakan ini mengacu pada ketentuan dalam Pasal 2 POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

Meskipun bukan perusahaan terbuka, LPEI menilai bahwa kebijakan ini tetap relevan untuk diterapkan guna meningkatkan transparansi. Sebagai lembaga negara, LPEI berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Pelaksanaan Kebijakan Tahun 2024

Hingga akhir tahun 2024, tidak ada anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, atau Direktur Pelaksana LPEI yang memiliki saham di LPEI maupun di perusahaan lain. Informasi ini telah dijelaskan dalam Bab Profil Perusahaan, subbab Komposisi Pemegang Saham. Dengan demikian, LPEI tidak menerima laporan mengenai kepemilikan saham dari Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, atau Direktur Pelaksana.

Policy

PMK No. 208/2021 concerning Principles of Governance, Risk Management, and Know Your Customer for Indonesia Eximbank mandates in Articles 14 and 29 that the Board of Directors, Executive Directors, and Managing Directors are required to disclose their share ownership in other companies, both domestic and overseas. Similar provisions are also set forth in POJK No. 9/2022 on Supervision of Indonesia Eximbank, particularly in Articles 17 and 22.

Additionally, Article 27 of PMK No. 208/2021 stipulates that the Executive Director and Managing Director are prohibited from holding more than 25% (twenty-five percent) of the paid-in capital of other companies, either individually or collectively.

In order to implement the policy on share ownership for Board of Directors, Executive Directors, and Managing Directors, Indonesia Eximbank requires all members of Board of Directors and Managing Directors to report their share ownership in public companies, both domestic and overseas, no later than 10 (ten) days after the acquisition or change in share ownership occurs. This policy refers to the provisions of Article 2 of POJK No. 11/POJK.04/2017 on Reports on Share Ownership or Any Changes in Share Ownership of Publicly Listed Companies.

Although it is not a publicly listed Company, Indonesia Eximbank considers this policy to be relevant for implementation in order to enhance transparency. As a state-owned institution, Indonesia Eximbank is under the supervision of Financial Services Authority.

Policy Implementation in 2024

As of the end of 2024, no members of Board of Directors, Executive Directors, or Managing Directors of Indonesia Eximbank own shares in Indonesia Eximbank or in other companies. This information has been explained in the Company Profile chapter, subsection Shareholder Composition. Thus, Indonesia Eximbank does not receive reports on share ownership from Board of Directors, Executive Directors, or Managing Directors.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System

LPEI berkomitmen untuk menegakkan standar etika dan kepatuhan dalam setiap kegiatan usahanya. Untuk mendukung hal ini, LPEI telah mengembangkan Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau *Whistleblowing System* (WBS) sebagai sarana bagi individu yang ingin melaporkan pelanggaran terhadap kebijakan, prosedur, maupun nilai-nilai perusahaan.

Sistem ini menjamin kerahasiaan pelapor dan memastikan bahwa setiap laporan ditangani secara profesional dan objektif. Dengan adanya mekanisme ini, LPEI berupaya menjaga transparansi, akuntabilitas, serta memastikan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam seluruh operasionalnya.

Fungsi *Whistleblowing System*

1. Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) adalah pengungkapan yang umumnya dilakukan secara rahasia (*confidential*) atas tindakan atau perbuatan pelanggaran yang terindikasi dapat merugikan LPEI baik secara finansial maupun non finansial.
2. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) LPEI adalah suatu sistem yang dapat dijadikan media bagi Pelapor Pelanggaran untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan penyimpangan yang diindikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terjadi di LPEI.
3. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) LPEI ini berfungsi sebagai salah satu alat kontrol dan monitoring mengenai potensi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai LPEI.

Tujuan *Whistleblowing System*

1. Menciptakan Pegawai LPEI yang memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi.
2. Memperkuat penerapan prinsip tata kelola LPEI.
3. Memperkuat sistem pengendalian internal LPEI.

Dasar Kebijakan

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Indonesia Eximbank is committed to upholding ethical standards and compliance in all of its business activities. To support this, Indonesia Eximbank has developed a Violation Reporting System (SPP) or *Whistleblowing System* (WBS) as a means for individuals to report violations of Company policies, procedures, and values.

This system ensures the confidentiality of reporters and guarantees that every report is handled professionally and objectively. With this mechanism in place, Indonesia Eximbank strives to maintain transparency, accountability, and ensure the implementation of good corporate governance principles in all its operations.

Whistleblowing System Function

1. Whistleblowing is a disclosure that is generally carried out confidentially on actions or violations that are indicated to be detrimental to Indonesia Eximbank both financially and non-financially.
2. Indonesia Eximbank Whistleblowing System is a system that can be used as a medium for Whistleblowers to convey information about irregularities indicated as a violation that occurs at Indonesia Eximbank.
3. Indonesia Eximbank Whistleblowing System serves as one of the control and monitoring tools regarding potential violations committed by Indonesia Eximbank employees.

Purpose of Whistleblowing System

1. Creating Indonesia Eximbank employees who have high integrity and professionalism.
2. Strengthening the implementation of Indonesia Eximbank's governance principles.
3. Strengthening Indonesia Eximbank's internal control system.

Basis of Policy

1. Act No. 2 of 2009 concerning Indonesia Eximbank.
2. Minister of Finance Regulation No. 208/PMK.06/2021 concerning Principles of Governance, Risk Management Principles, and Know Your Customer of Indonesia Eximbank.

3. Peraturan Dewan Direktur No. 0015/PDD/12/2022 tentang Kebijakan Fungsi Kepatuhan dan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. 4. Peraturan Dewan Direktur No. 0017/PDD/12/2022 tentang Kebijakan Manajemen Risiko Enterprise Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. 5. Peraturan Dewan Direktur No. 0003/PDD/03/2024 tentang Kebijakan Sistem Pengendalian Internal. 6. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0007/PDE/07/2023 tentang Standar Pedoman Operasional Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan. 7. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0027/PDE/12/2024 tentang Standar Pedoman Operasional Penerapan Strategi Anti Fraud Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. 8. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0018/PDE/03/2012 tentang Manual Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. 9. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0028/PDE/12/2024 tentang Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT & PPPSPM).	3. Board of Director Regulation No. 0015/PDD/12/2022 concerning the Compliance Function Policy and Implementation of Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Program of Indonesia Eximbank. 4. Board of Director Regulation No. 0017/PDD/12/2022 concerning Enterprise Risk Management Policy of Indonesia Eximbank. 5. Board of Director Regulation No. 0003/PDD/12/2021 concerning Internal Control System Policy. 6. Executive Director Regulation No. 0007/PDE/07/2023 concerning Operational Guidelines Standards for Implementation of Compliance Function. 7. Executive Director Regulation No. 0027/PDE/12/2024 concerning Operational Guidelines Standards for Implementing the Anti Fraud Strategy of Indonesia Eximbank. 8. Executive Director Regulation No. 0018/PDE/03/2012 concerning the Indonesia Eximbank Whistleblowing System Manual. 9. Executive Director Regulation No. 0028/PDE/12/2023 on Implementation of Anti-Money Laundering, Countering the Financing of Terrorism, and Countering the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction (AML/CFT & PPPSPM) Program.

Jenis-Jenis Pelanggaran

1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan, antara lain pemalsuan tanda tangan, korupsi, penggelapan, *mark-up*, penggunaan narkoba, perusakan barang;
2. Pelanggaran kode etik LPEI, antara lain benturan kepentingan, pelecehan, terlibat dalam kegiatan masyarakat yang terlarang;
3. Pelanggaran prinsip akuntansi yang berlaku umum;
4. Kecurangan (*fraud*) dalam kegiatan usaha pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi termasuk kegiatan penyediaan sumber dana bagi LPEI, kegiatan penempatan dana, kegiatan pengadaan barang dan jasa serta kegiatan operasional lainnya;
5. Tindakan kecurangan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian finansial ataupun non finansial bagi LPEI;
6. Tindakan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja LPEI.

Pelapor Pelanggaran

1. Pegawai LPEI
2. Rekanan LPEI
3. Nasabah LPEI
4. Pihak Terafiliasi LPEI
5. Mitra LPEI

Types of Violation

1. Violation of laws and regulations, including signature forgery, corruption, embezzlement, mark-up, drug use, destruction of goods;
2. Violation of Indonesia Eximbank's code of conduct, including conflict of interest, harassment, involvement in prohibited community activities;
3. Violation of generally accepted accounting principles;
4. Fraud in the business activities of financing, guarantee, insurance and consulting services including the activities of providing sources of funds for Indonesia Eximbank, placement of funds, procurement of goods and services and other operational activities;
5. Other fraudulent actions that may cause financial or non-financial losses to Indonesia Eximbank;
6. Actions that jeopardize Indonesia Eximbank's occupational safety and health.

Whistleblower

1. Indonesia Eximbank employees
2. Indonesia Eximbank partners
3. Indonesia Eximbank customers
4. Indonesia Eximbank affiliates
5. Indonesia Eximbank colleagues

Unsur Pokok *Whistleblowing System*

1. Terlapor Pelanggaran
2. Pelapor Pelanggaran
3. Direktur Eksekutif
4. Direktur Pelaksana
5. Laporan Pelanggaran
6. Verifikator.
7. Investigator

Pihak yang Mengelola Pengaduan

Pengelola *Whistleblowing System* (WBS) di LPEI adalah Kepala Divisi Unit Kerja yang menjalankan fungsi Kepatuhan. Unit Kerja ini bertanggung jawab langsung kepada Direktur Eksekutif melalui Direktur Pelaksana, Head of, atau pejabat yang membawahi Kepala Divisi Unit Kerja yang menangani Kepatuhan.

Dalam menjalankan tugasnya, Pengelola WBS dibantu oleh Petugas WBS LPEI yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi dalam melaksanakan aktivitas harian WBS. Penunjukan atau pengangkatan Petugas WBS LPEI dilakukan oleh Direktur Eksekutif dan/atau Direktur Pelaksana atau Head of yang bertanggung jawab atas fungsi Kepatuhan, berdasarkan rekomendasi dari Pengelola WBS.

Adapun tugas dan tanggung jawab Pengelola WBS adalah sebagai berikut:

1. Mengelola pelaksanaan WBS.
2. Mengkoordinasikan penanganan tindak lanjut atas laporan yang masuk melalui WBS.
3. Mengkoordinasikan pemberian perlindungan terhadap Pelapor dengan unit terkait baik di Kantor Pusat maupun di luar Kantor Pusat.
4. Melakukan pemantauan terhadap penanganan penyelesaian laporan yang masuk melalui WBS.
5. Melakukan evaluasi dan tindakan perbaikan terhadap efektivitas WBS LPEI.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Pengelola WBS memiliki wewenang untuk:

1. Menetapkan tindak lanjut atas laporan khususnya laporan yang putusan tindak lanjutnya berada pada kewenangan Pengelola WBS.
2. Memberikan usulan kepada Penanggung Jawab WBS terkait dengan tindak lanjut penanganan Laporan yang melibatkan unsur Direktur Pelaksana ke atas.
3. Memberikan usulan kepada Penanggung Jawab WBS terkait dengan adanya permintaan perlindungan dari Pelapor.
4. Melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan WBS.

Main Elements of *Whistleblowing System*

1. Reported Violation
2. Whistleblower
3. Executive Director
4. Managing Director
5. Violation Report
6. Verifier
7. Investigator

Parties Managing Complaints

The *Whistleblowing System* (WBS) Manager at Indonesia Eximbank is the Head of Work Unit Division that performs compliance functions. This Work Unit is directly responsible to the Executive Director through Managing Director, Head of, or official who supervises the Head of Work Unit Division that handles compliance.

In performing their duties, WBS Manager is assisted by Indonesia Eximbank WBS Officers who possess high competence and integrity in carrying out daily WBS activities. The appointment or assignment of Indonesia Eximbank WBS Officers is made by the Executive Director and/or Managing Director or Head of the department responsible for Compliant functions, based on the WBS Manager's recommendation.

The duties and responsibilities of WBS Manager are as follows:

1. Managing the implementation of WBS.
2. Coordinating the follow-up actions on reports received through WBS.
3. Coordinating the provision of Whistleblower protection with relevant units both at the Head Office and outside the Head Office.
4. Monitoring the handling and resolution of reports received through WBS.
5. Evaluating and taking corrective actions on the effectiveness of Indonesia Eximbank WBS.

In carrying out their duties and responsibilities, WBS Manager has the authority to:

1. Determine follow-up actions on reports, especially those where the decision on follow-up actions falls within the WBS Manager authority.
2. Propose actions to the WBS Supervisor regarding the follow-up handling of Reports involving the Managing Director and above.
3. Propose actions to the WBS Supervisor regarding requests for Whistleblower protection.
4. Take any other necessary actions in the implementation of WBS.

Tugas dan tanggung jawab Petugas WBS sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

1. Membantu pengelolaan pelaksanaan WBS.
2. Melakukan verifikasi awal dan membantu penanganan tindak lanjut atas laporan yang masuk melalui WBS.
3. Membantu pemberian perlindungan terhadap Pelapor dengan unit terkait baik di Kantor Pusat maupun di luar Kantor Pusat.
4. Melakukan pemantauan terhadap penanganan penyelesaian laporan yang masuk melalui WBS.
5. Melakukan Evaluasi dan tindakan perbaikan terhadap efektivitas WBS LPEI.

Mekanisme Pelaporan

1. Pelapor Pelanggaran dapat menyampaikan Pelaporan Pelanggaran melalui sarana yang telah disediakan oleh LPEI.
2. Pelaporan Pelanggaran sekurang-kurangnya mencantumkan informasi sebagai berikut:
 - a. Nama Pegawai LPEI dan Unit Kerja yang terlibat;
 - b. Jenis perbuatan yang terindikasi adanya Pelanggaran;
 - c. Waktu terjadinya Pelanggaran;
 - d. Lokasi terjadinya Pelanggaran.
3. Pelaporan Pelanggaran harus melampirkan bukti awal yang dapat mendukung atau menjelaskan adanya Pelanggaran yang dilakukan. Bukti awal dimaksud antara lain:
 - a. Dokumen-dokumen informasi Pelanggaran;
 - b. Foto-foto kejadian Pelanggaran;
 - c. Rekaman (audio/video);
 - d. Saksi (apabila ada), dan;
 - e. Data sumber informasi untuk pendalaman lebih lanjut.

Kebijakan Perlindungan Bagi Pelapor Pelanggaran

1. Pelapor dari unsur Pegawai LPEI yang telah beritikad baik melaporkan dugaan pelanggaran melalui sarana WBS berhak untuk:
 - a. Memperoleh informasi perkembangan laporan WBS; dan
 - b. Memperoleh perlindungan yang antara lain, namun tidak terbatas pada:
 - Kerahasiaan identitas Pelapor dan laporannya.
 - Perlindungan atas tekanan fisik maupun non fisik, perlindungan penurunan jabatan atau pangkat, pemecatan yang tidak adil, diskriminasi, catatan yang merugikan catatan pribadi (*personal file record*).
 - Perlindungan apabila Pelapor bukan pihak terkait atau tidak terlibat di dalam laporan dugaan pelanggaran atau laporan dugaan pelanggaran tidak terbukti.

The duties and responsibilities of WBS Officers are at least as follows:

1. Assisting in the management of WBS implementation.
2. Conducting initial verification and assisting in the follow-up handling of reports received through WBS.
3. Assisting in providing protection to Whistleblower with relevant units both at the Head Office and outside the Head Office.
4. Monitoring the handling and resolution of reports received through WBS.
5. Evaluating and taking corrective actions on the effectiveness of Indonesia Eximbank WBS.

Reporting Mechanism

1. Whistleblower can submit Violation Reports through the channels provided by Indonesia Eximbank.
2. Whistleblower must include at least the following information:
 - a. The name of Indonesia Eximbank Employee and Work Unit involved;
 - b. Type of action indicating a Violation;
 - c. The time the Violation occurrence;
 - d. The location the Violation occurrence.
3. Whistleblower must be accompanied by initial evidence that can support or explain the committed Violation. Initial evidence includes, among others:
 - a. Documents containing Violation information;
 - b. Photos of the Violation incident;
 - c. Recordings (audio/video);
 - d. Witnesses (if any), and;
 - e. Data sources for further investigation.

Whistleblower Protection Policy

1. Employees of Indonesia Eximbank who have acted in good faith in reporting alleged violations through the WBS facility are entitled to:
 - a. Receive updates on the progress of WBS reports; and
 - b. Receive protection including, but not limited to:
 - Confidentiality of Whistleblower's identity and the report.
 - Protection against physical or non-physical pressure, protection against demotion or dismissal, unfair termination, discrimination, adverse personal record notes.
 - Protection if Whistleblower is not a related party or not involved in the alleged violation report or if the alleged violation report is not substantiated.

2. Pemberian perlindungan dilakukan dengan tetap memperhatikan asas kerahasiaan dan ketentuan terkait yang berlaku di LPEI. Permintaan perlindungan dapat ditolak atau dibatalkan oleh LPEI jika:
 - a. Pelapor tidak melakukan kewajibannya dalam menjaga kerahasiaan identitas dan laporannya.
 - b. Laporan yang dibuat oleh Pelapor tidak benar, dan berdasarkan kajian dari Petugas WBS LPEI mempunyai indikasi yang tidak sesuai dengan tujuan WBS.
 3. Perlindungan juga berlaku bagi pihak yang melakukan investigasi antara lain Satuan Kerja Internal Audit maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan laporan tindak pelanggaran.
2. Protection is provided while adhering to the principles of confidentiality and relevant regulations applicable at Indonesia Eximbank. Requests for protection may be refused or revoked by Indonesia Eximbank if:
 - a. Whistleblower fails to fulfill their obligation to maintain the confidentiality of their identity and report.
 - b. The report made by Whistleblower is untrue, and based on the assessment by WBS Officers of Indonesia Eximbank, it has indications that are not consistent with the purpose of WBS.
 3. Protection also applies to parties conducting investigations, including Internal Audit Units and parties providing information related to violation reports.

Sarana Pelaporan Pelanggaran

LPEI menyediakan sarana pelaporan pelanggaran yang independen, bebas, dan bersifat rahasia, dapat diakses oleh pihak internal maupun eksternal. Pelaporan dapat dilakukan melalui media atau saluran berikut:

Situs Web Website	https://ayolaporlpei.kemenkeu.go.id/
Email Khusus Tim WBS WBS Team Email	gcg@indonesiaeximbank.go.id
Email LPEI Indonesia Eximbank Email	corpsec@indonesiaeximbank.go.id (dengan subyek: Whistleblowing System)

Violation Reporting Tools

Indonesia Eximbank provides an independent, free and confidential violation reporting tools, both for external and internal parties. The media or channels used are:

Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran

1. Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran dilaksanakan oleh Verifikator, dengan supervisi langsung oleh Kepala Unit Kerja Kepatuhan.
2. Untuk menghindari adanya tujuan yang tidak baik dari Laporan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor Pelanggaran, maka Verifikator harus melakukan seleksi awal terhadap Laporan Pelanggaran yang diterima.
3. Apabila Pelaporan Pelanggaran tidak dilengkapi dengan bukti awal atau bukti awal yang diberikan tidak berkaitan secara langsung dengan Pelaporan Pelanggaran, maka Pelaporan Pelanggaran tersebut tidak layak untuk diproses lebih lanjut.
4. Tugas dan tanggung jawab Verifikator adalah:
 - a. Mengelola sarana Pelaporan Pelanggaran LPEI.
 - b. Menerima Pelaporan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor Pelanggaran.
 - c. Meminta bukti awal dari Pelapor Pelanggaran melalui sarana yang tersedia.
 - d. Melakukan analisa awal terhadap Pelaporan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor Pelanggaran.
 - e. Mengajukan izin prinsip tindak lanjut pemrosesan Pelaporan Pelanggaran kepada Direktur Pelaksana Bidang.

Whistleblowing System Management

1. The Management of Violation Reporting is carried out by the Verifier, under the direct supervision of Compliance Unit Head.
2. To avoid any malicious intent in Violation Reports submitted by Whistleblower, Verifier must conduct initial screening of received Violation Reports.
3. If a Violation Report is not accompanied by initial evidence or if the initial evidence provided is not directly related to the Violation Report, then such Violation Report is not eligible for further processing.
4. The Verifier duties and responsibilities are:
 - a. Managing the Indonesia Eximbank Violation Reporting Tools.
 - b. Receiving Violation Reports submitted by the Whistleblower.
 - c. Requesting initial evidence from Whistleblower through available means.
 - d. Conducting initial analysis of the Violation Reports submitted by Whistleblower.
 - e. Seeking approval for the principle permission to proceed with the processing of Violation Reports from the Executive Director of relevant department.

- f. Melakukan proses verifikasi Pelaporan Pelanggaran sesuai izin prinsip tindak-lanjut pemrosesan yang disetujui oleh Direktur Pelaksana Bidang.
- g. Menatausahakan Pelaporan Pelanggaran secara tertib dan aman sehingga aspek kerahasiaan dapat terjaga dengan baik.

Mekanisme Penanganan Laporan Pelanggaran

Berikut adalah mekanisme atau prosedur umum dalam menangani pelaporan *Whistleblowing System* (WBS):

1. Terlapor merupakan pihak pelaku pelanggaran yang diketahui atau dialami langsung oleh pihak Pelapor Pelanggaran.
2. Pelapor menyampaikan pengaduan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor melalui sistem WISE. Laporan yang sudah masuk ke Sistem WISE tersebut akan diverifikasi oleh verifikatur, yang dalam hal ini adalah Unit Kerja Kepatuhan.
3. Petugas WBS melakukan verifikasi kelengkapan unsur pengaduan berdasarkan metode 4W + 1 H. Apabila terdapat keterangan yang masih kurang lengkap, Petugas WBS perlu meminta data atau keterangan pendukung kepada Pelapor.
4. Setelah data dan keterangan lengkap, proses dilanjutkan ke Tahap Investigasi oleh Satuan Kerja Audit Internal sebagai Investigator.
 - a. Apabila terlapor adalah Unsur Manajemen (jabatan Head of ke atas), maka verifikatur meminta persetujuan kepada Direktur Pelaksana/Head of yang membidangi fungsi Kepatuhan untuk melanjutkan ke Tahap Investigasi atau langsung disampaikan kepada Direktur Eksekutif (ketua Dewan Direktur).
 - b. Apabila terlapor adalah unsur Dewan Direktur atau Direktur Pelaksana, maka laporan disampaikan kepada Direktur Eksekutif (yang selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk dilaporkan kepada Kementerian Keuangan, up. DJKN).
 - c. Direktur Pelaksana/Head of yang membidangi fungsi Kepatuhan memberikan catatan tambahan (jika ada) sebelum ke Tahap Investigasi.
5. Satuan Kerja Audit Internal menginvestigasi bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor dan menindaklanjuti hasil investigasi terhadap terlapor, dengan menginformasikan laporan tersebut "terbukti" atau "tidak terbukti," sebagai berikut:
 - a. Apabila Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka hasil investigasi diinformasikan dan diserahkan kepada Unit Kepatuhan untuk pemberhentian proses.
 - b. Apabila Terlapor Manajemen LPEI terbukti melakukan pelanggaran, maka hasil investigasi diserahkan kepada Direktur Eksekutif untuk diberikan keputusan/sanksi terhadap Terlapor. Keputusan/sanksi tersebut akan didisposisikan ke Unit Kerja SDM (melalui Direktur Pelaksana/Head of yang membidangi SDM) untuk ditindaklanjuti.

- f. Conducting verification processes of Violation Reports in accordance with the approved principle permission for further processing granted by the Executive Director of relevant department.
- g. Ensuring orderly and secure Violation Reporting so that confidentiality aspects can be well maintained.

Mechanism for Handling Violation Reports

The following is the general mechanism or procedure for handling reports through Whistleblowing System (WBS):

1. The Reported Party is the perpetrator of the violation known or directly experienced by the Reporting Party.
2. The Reporting Party submits a complaint regarding the violation committed by the Reported Party through the WISE system. The reports received in the WISE System are verified by verifiers, in this case, the Compliance Unit.
3. WBS Officers verify the completeness of the complaint elements based on the 4W + 1 H method. If there is insufficient information, WBS Officers may request additional data or information from the Reporter.
4. After obtaining complete data and information, the process proceeds to the Investigation Stage by the Internal Audit Unit as the Investigator.
 - a. If the Reported Party is a Management Entity (Head of or above), the verifier seeks approval from the Executive Director/Head of the Compliance Function to proceed to the Investigation Stage or directly reports to the Executive Director (Chairman of Board of Directors).
 - b. If the Reported Party is a member of Board of Directors or an Executive Director, the report is submitted to the Executive Director (who may then consider reporting to the Ministry of Finance, specifically the Directorate General of State Assets).
 - c. The Executive Director/Head of Compliance Function provides additional notes (if any) before proceeding to the Investigation Stage.
5. Internal Audit Unit investigates the violation evidence committed by the Reported Party and follows up on the investigation results against the Reported Party, informing whether the allegation is "proven" or "not proven," as follows:
 - a. If the Reported Party is not proven to have committed a violation, investigation results are informed and handed over to the Compliance Unit to cease the process.
 - b. If the Reported Party, a Management Entity of Indonesia Eximbank, is proven to have committed a violation, the investigation results are handed over to the Executive Director to decide/impose sanctions on the Reported Party. The decision/sanction is then forwarded to the HC Unit (via the Executive Director/ Head of HC department) for further action.

- c. Apabila Terlapor bukan Manajemen LPEI terbukti melakukan pelanggaran, maka hasil investigasi diserahkan kepada Unit Kerja SDM untuk ditindaklanjuti.
6. Untuk terlapor bukan Manajemen LPEI, Unit Kerja SDM menyerahkan proses selanjutnya kepada Komite Etik/Kepegawaian untuk diberikan keputusan/sanksi atas Terlapor.
7. Komite Etik/Kepegawaian mengeluarkan keputusan/sanksi atas Terlapor dan menyerahkan Keputusan/sanksi tersebut kepada Unit Kerja SDM untuk ditindaklanjuti.
8. Unit Kerja SDM menindaklanjuti keputusan/sanksi baik yang diberikan oleh Direktur Eksekutif maupun Komite Etik/Kepegawaian. Setelah tindak lanjut atas keputusan/sanksi tersebut, Unit Kerja yang bertanggung jawab atas WBS membuat Laporan Penanganan Pelanggaran.

Selain prosedur yang telah diuraikan di atas, LPEI juga melakukan penguatan sistem pengendalian internal melalui peluncuran *Whistleblowing System* (WBS) dan Pengendalian Gratifikasi berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan, yang diwakili oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) dan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Kemenkeu (Pusintek). Langkah ini diikuti dengan koordinasi dan asistensi dari Itjen Kemenkeu terkait sistem Pencegahan dan Penindakan (*profiling, whistleblowing*), yang menghasilkan pembentukan *front office* penerimaan laporan WBS melalui <https://ayolaporlpei.kemenkeu.go.id/>.

Hasil Penanganan Pengaduan dan Tindak Lanjut

Selama Tahun 2024, belum terdapat pengaduan dugaan pelanggaran yang disampaikan melalui portal WBS.

- c. If the Reported Party, not a Management Entity of Indonesia Eximbank, is proven to have committed a violation, the investigation results are handed over to the HC Unit for further action.
6. For Reported Parties not belonging to Management Entity of Indonesia Eximbank, the HC Unit hands over the further process to the Ethics/Personnel Committee to decide/impose sanctions on the Reported Party.
7. The Ethics/Personnel Committee issues a decision/sanction on the Reported Party and hands over the decision/sanction to the HC Unit for further action.
8. The HC Unit follows up on the decision/sanction given by the Executive Director or the Ethics/Personnel Committee. After following up on the decision/sanction, the Unit responsible for WBS creates a Violation Handling Report.

In addition to the procedures outlined above, Indonesia Eximbank also strengthens its internal control system through the launch of the *Whistleblowing System* (WBS) and Gratification Control in collaboration with the Ministry of Finance, represented by the Inspectorate General of Ministry of Finance (Itjen Kemenkeu) and the Financial Information and Technology System Center of the Ministry of Finance (Pusintek). This initiative is followed by coordination and assistance from Itjen Kemenkeu regarding Prevention and Enforcement Systems (*profiling, whistleblowing*), resulting in the establishment of a front office for receiving WBS reports through <https://ayolaporlpei.kemenkeu.go.id/>.

Complaint Handling and Follow-up Results

During 2024, there were no complaints of alleged violations submitted via the WBS portal.

Kebijakan Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi

Anti-Corruption and Anti-Gratification Policies

LPEI menempatkan integritas sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai lembaga yang mendukung kebijakan ekspor nasional, LPEI memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta berperan aktif dalam pencegahan korupsi dan gratifikasi. Seluruh jajaran Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, dan pegawai diwajibkan untuk menjunjung tinggi prinsip persaingan usaha yang sehat, profesionalisme, serta tata kelola perusahaan yang baik. LPEI juga memiliki kebijakan yang tegas dalam melarang segala bentuk korupsi, suap, atau balas jasa, serta terus memperkuat langkah-langkah pencegahan melalui berbagai inisiatif yang telah diterapkan.

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Dasar Kebijakan

1. Eksternal:
 - a. UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 - b. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - c. Peraturan KPK No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPK No. 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
 - d. Surat Edaran No. SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan LHKPN Setelah Diberlakukannya Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
 - e. Pasal 57 dan lampiran PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
 - f. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 - g. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

Indonesia Eximbank places integrity as the main foundation in carrying out its duties and responsibilities. As an institution that supports national export policies, Indonesia Eximbank ensures compliance with applicable regulations and plays an active role in preventing corruption and gratification. All members of Board of Directors, Executive Directors, and employees are required to uphold the principles of fair business competition, professionalism, and good corporate governance. Indonesia Eximbank also has a strict policy prohibiting all forms of corruption, bribery, or kickbacks, and continues to strengthen preventive measures through various initiatives that have been implemented.

Report of State of Official Wealth (LHKPN)

Legal Basis for Policy

1. External:
 - a. Law No. 28 of 1999 Concerning Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism Governance.
 - b. Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission.
 - c. Corruption Eradication Commission Regulation No. 2 of 2020 concerning Amendments to Corruption Eradication Commission Regulation No. 7 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement, and Examination of State Officials' Wealth.
 - d. Circular Letter No. SE-08/01/10/2016 regarding Technical Instructions for Submission and Management of Wealth Reports After the Implementation of Corruption Eradication Commission Regulation No. 7 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement, and Examination of State Officials' Wealth.
 - e. Article 57 and attachment to Minister of Finance Regulation No. 208/2021 concerning Principles of Governance, Risk Management Principles, and Knowing the Customer Principles of Indonesia Eximbank.
 - f. Corruption Eradication Commission Regulation No. 7 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement, and Examination of State Officials' Wealth;
 - g. Corruption Eradication Commission Regulation No. 2 of 2020 concerning Amendments to Corruption Eradication Commission Regulation No. 7 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement, and Examination of State Officials' Wealth;

- h. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- 2. Internal:
 - a. Peraturan Dewan Direktur No. 0003/PDD/06/2022 tentang Pencabutan Peraturan Dewan Direktur No. 0001/PDD/07/2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pejabat LPEI.
 - b. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0008/PDE/06/2022 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat LPEI Wajib Laporan LHKPN.

Penerapan di LPEI

Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab atas monitoring dan koordinasi dalam pelaksanaan serta penerapan LHKPN di LPEI, dengan rincian pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Pemantauan dan reminder kepada seluruh Wajib Laporan LHKPN LPEI kepada seluruh Kepala Divisi, Head of, Direktur Pelaksana, Direktur Eksekutif, dan Dewan Direktur untuk mengisi formulir e-Filling LHKPN.
2. Penunjukan sebagai petugas Admin Instansi KPK.
3. Pengisian dokumen e-Filling melalui sistem e-LHKPN dan menyampaikan surat kepada KPK perihal rekapitulasi Wajib Laporan LHKPN LPEI.
4. Penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis Tata Cara Pengisian Aplikasi E-LHKPN dengan jumlah peserta sebanyak 40 pejabat wajib laporan LHKPN dan pembicara/pemateri langsung dari KPK.
5. Pendampingan teknis pengisian e-LHKPN kepada Wajib Laporan LHKPN.

Pengendalian Gratifikasi

Dasar Kebijakan

1. Eksternal:
 - a. UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya.
 - b. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
 - c. Lampiran PMK No. 208/2021 Tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
2. Internal:
 - a. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0013/PDE/08/2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan LPEI.
 - b. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0042/PDE/09/2019 tentang Pakta Integritas LPEI.

- h. Corruption Eradication Commission Regulation No. 3 of 2024 concerning the Second Amendment to Corruption Eradication Commission Regulation No. 7 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement, and Examination of State Officials' Wealth

2. Internal:
 - a. Board of Directors Regulation No. 0003/PDD/06/2022 concerning the Revocation of Board of Directors Regulation No. 0001/PDD/07/2017 dated July 21, 2017 concerning the Obligation to Submit Wealth Reports of State Officials for Officials of Indonesia Eximbank.
 - b. Executive Director Regulation No. 0008/PDE/06/2022 concerning the Obligation to Submit Wealth Reports (LHKPN) for Indonesia Eximbank Officials Required to Report LHKPN.

Implementation at Indonesia Eximbank

The Compliance Unit is responsible for monitoring and coordinating the implementation and application of LHKPN at Indonesia Eximbank, with the following details:

1. Monitoring and reminders to all Mandatory Reporters of LHKPN in Indonesia Eximbank including all Division Heads, Heads of, Executive Directors, and Board of Directors to fill out the e-Filling LHKPN form.
2. Appointment as the KPK Admin Officer.
3. Filling out e-Filling documents through the e-LHKPN system and submitting letters to the KPK regarding the recapitulation of Mandatory Reporters of LHKPN in Indonesia Eximbank.
4. Conducting socialization and technical guidance on the Procedure for Filling out the E-LHKPN Application with a total of 40 participants, including mandatory reporters of LHKPN, with speakers directly from the KPK.
5. Technical Assistance for Filling out e-LHKPN to Mandatory LHKPN Reporters.

Gratification Control

Legal Basis for Policy

1. External:
 - a. Law No. 31 of 1999 Concerning the Eradication of Corruption Crime, as amended by Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crime.
 - b. The Corruption Eradication Commission Regulation No. 2 of 2019 concerning Gratuities Reporting.
 - c. Appendix to Minister of Finance Regulation No. 208/2021 Regarding Principles of Governance, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank.
2. Internal:
 - a. Executive Director Regulation No. 0013/PDE/08/2022 concerning Gratuities Control within Indonesia Eximbank.
 - b. Executive Director Regulation No. 0042/PDE/09/2019 concerning Indonesia Eximbank Integrity Pact.

Penerapan di LPEI

LPEI berkomitmen menjalankan usaha dengan tata kelola yang baik guna mendukung penyelenggaraan negara yang bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai bagian dari upaya tersebut, LPEI telah membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di bawah Satuan Kerja Kepatuhan. Untuk memastikan penerapan pengendalian gratifikasi yang berkelanjutan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik, LPEI menetapkan ketentuan sebagai berikut:

1. **Sosialisasi Berkelanjutan**
Dalam rangka penguatan budaya Kepatuhan dan peningkatan awareness, UPG melakukan sosialisasi kepada jajaran LPEI secara berkelanjutan dalam bentuk namun tidak terbatas pada sosialisasi yang dilakukan secara tatap muka/daring dengan pembicara/pemateri bersumber dari eksternal maupun oleh UPG sendiri. Sosialisasi Gratifikasi disampaikan pada beberapa pelatihan antara lain *New Hire Orientation* (NHO), E-Learning, maupun sosialisasi khusus dengan peserta seluruh jajaran LPEI atau pihak eksternal terkait. Selain itu sosialisasi Gratifikasi juga disampaikan dalam bentuk email blast, *flyer*, dan *screen saver*.
2. **Penandatanganan Pakta Integritas**
Pakta Integritas merupakan pernyataan seluruh jajaran LPEI untuk berkomitmen menjunjung tinggi moral dan integritas, melindungi dan menjaga citra, kredibilitas serta kepentingan LPEI dengan cara tidak meminta atau menerima Gratifikasi dari pihak yang memiliki benturan kepentingan. Pakta Integritas ditandatangani oleh Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana pada saat ditetapkan dan dilakukan penandatanganan ulang setiap setahun sekali. Selain itu, Pakta Integritas juga ditandatangani oleh seluruh pegawai LPEI (selain Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana) pada saat pertama kali bekerja di LPEI.
3. **Diseminasi Surat Edaran kepada Pegawai LPEI, Mitra/Rekanan, dan Nasabah/Debitur** perihal larangan permintaan, penerimaan dan pemberian gratifikasi dalam bentuk apapun untuk/dari Pegawai LPEI serta kepada Rekanan, Penyedia Barang/Jasa (Vendor), Mitra, dan Nasabah LPEI terutama terkait hari raya keagamaan (Idul Fitri dan Natal).
4. **Pelaporan Gratifikasi**
Jajaran LPEI wajib melakukan penolakan atas Gratifikasi yang dianggap suap dan/atau yang melampaui batas nilai kewajiban yang ditetapkan pada kesempatan pertama dan melaporkannya kepada UPG atau langsung kepada KPK. Selama tahun 2023, terdapat sebanyak 8 (delapan) laporan Gratifikasi yang diterima oleh UPG.

Pelaporan Gratifikasi di LPEI dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu:

- a. Pelaporan melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)
 - b. Pelaporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
5. **Identifikasi dan mitigasi Risiko/Titik Rawan Gratifikasi**
Melakukan identifikasi terhadap titik rawan gratifikasi dan/

Implementation at Indonesia Eximbank

Indonesia Eximbank is committed to conducting its business with good corporate governance to support clean and corruption, collusion, and nepotism free state administration. As part of these efforts, Indonesia Eximbank has established a Gratification Control Unit (UPG) under the Compliance Work Unit. To ensure the sustainable implementation of gratification control in the implementation of good corporate governance, Indonesia Eximbank has established the following provisions:

1. **Ongoing Socialization**
In order to strengthen compliance culture and increase awareness, UPG conducts continuous socialization to all levels of Indonesia Eximbank through various means including but not limited to face-to-face or online sessions with speakers from both external and internal sources. Gratuity socialization is provided during various training sessions such as New Hire Orientation (NHO), Relationship Manager Development Program (RMDP), and special sessions involving all levels of Indonesia Eximbank. Additionally, gratuity socialization is disseminated through email blasts, flyers, and screensavers.
2. **Signing of Integrity Pacts**
The Integrity Pact is a statement by all Indonesia Eximbank staff committing to uphold high moral and ethical standards, protect and preserve the image, credibility, and interests of Indonesia Eximbank by refraining from soliciting or accepting gratuities from parties with conflicting interests. The Integrity Pact is signed by the Board of Directors and Executive Directors upon establishment and re-signed annually. Furthermore, all Indonesia Eximbank employees (excluding Board of Directors and Executive Directors) sign the Integrity Pact upon joining Indonesia Eximbank.
3. **Dissemination of Circulars to Indonesia Eximbank Employees, Partners/Vendors, and Customers/Borrowers** regarding the prohibition of soliciting, receiving, and giving gratuities in any form to/from Indonesia Eximbank employees, as well as to Partners, Service Providers (Vendors), Partners, and Indonesia Eximbank Customers, especially concerning religious holidays (Eid al-Fitr and Christmas).
4. **Reporting of Gratuities**
Indonesia Eximbank officials are required to reject gratuities deemed as bribes and/or exceeding the reasonable value limit established at the first opportunity and report them to UPG or directly to the Corruption Eradication Commission (KPK). During 2023, UPG received a total of 8 (eight) gratuity reports.

Gratuity reports at Indonesia Eximbank are submitted through two mechanisms:

- a. Reporting through the Gratuity Control Unit (UPG).
 - b. Reporting to the Corruption Eradication Commission.
5. **Identification and mitigation of Gratification Risks/Vulnerable Points** Identify gratification vulnerable

atau memahami risiko terjadinya gratifikasi pada aktivitas/kewenangan/*core business* yang mempertimbangkan faktor internal maupun faktor eksternal, serta menetapkan langkah mitigasi risiko yang terukur atas hasil pemetaan/identifikasi yang dilaksanakan.

6. Penerapan Berkesinambungan
 - a. Menyusun dan/atau mengevaluasi ketentuan Internal terkait gratifikasi secara berkala dengan menyesuaikan terhadap aturan eksternal.
 - b. Menerima laporan gratifikasi berikut kelengkapan dokumennya dari penerima gratifikasi.
 - c. Menyampaikan laporan gratifikasi secara berkala kepada Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan.
 - d. Mengadministrasikan laporan gratifikasi secara tertib.
 - e. Pengisian rencana dan realisasi kerja UPG pada sistem Gratifikasi Online (GOL) KPK.
 - f. Pelaksanaan e-learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi dari KPK kepada seluruh pegawai Satuan Kerja Kepatuhan.

Strategi Anti Fraud

Dasar Kebijakan

1. Eksternal: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan.
2. Internal: Peraturan Direktur Eksekutif No. 0027/PDE/12/2024 tentang Standar Pedoman Operasional Penerapan Strategi Anti Fraud LPEI.

Penerapan di LPEI

LPEI mengimplementasikan Strategi Anti-Fraud sesuai dengan Peraturan Direktur Eksekutif No. 0027/PDE/12/2024 tentang Standar Pedoman Operasional Penerapan Strategi Anti Fraud LPEI. Penerapan strategi ini melibatkan seluruh unit kerja berdasarkan fungsi dan kewenangannya masing-masing, yaitu:

1. Pilar Pencegahan
Pilar pencegahan berisi langkah untuk mengurangi risiko terjadinya *Fraud*, mencakup kesadaran anti *Fraud*, identifikasi kerawanan, dan kebijakan mengenal pegawai, serta langkah lain yang diperlukan untuk pencegahan *Fraud*.
2. Pilar Deteksi
Pilar deteksi berisi langkah untuk mengidentifikasi dan menemukan *Fraud* dalam kegiatan usaha LPEI, mencakup kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, pemeriksaan mendadak, dan sistem pengawasan, serta langkah lain yang diperlukan untuk deteksi *Fraud*.

points and/or understand the risk of gratification in activities/authorities/*core business* that consider internal and external factors, and determine measurable risk mitigation steps for the results of the mapping/identification carried out.

6. Continuous Implementation
 - a. Periodically drafting and/or evaluating internal regulations related to gratuities by adapting to external regulations.
 - b. Receiving gratuity reports along with supporting documents from the gratuity recipients.
 - c. Regularly submitting gratuity reports to the Director overseeing the Compliance function.
 - d. Administering gratuity reports systematically.
 - e. Filling out UPG work plans and achievements in the Corruption Eradication Commission's Gratuity Online System (GOL).
 - f. Implementation of e-learning on Gratification Understanding Improvement from KPK to all employees of Compliance Unit.

Anti Fraud Strategy

Legal Basis for Policy

1. External: Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 12 of 2024 on the Implementation of Anti Fraud Strategies for Financial Services Institutions.
2. Internal: Executive Director Regulation No. 0027/PDE/12/2024 on Standard Operational Guidelines Implementation of LPEI Anti Fraud Strategy.

Implementation at Indonesia Eximbank

Indonesia Eximbank implements an Anti-Fraud Strategy in accordance with PDE No. 0027/PDE/12/2024 concerning Operational Guidelines Standards for Implementation of Anti-Fraud Strategy. The implementation of this strategy involves all work units based on their respective functions and authorities, namely:

1. Prevention Pillar
The prevention pillar contains measures to reduce the risk of Fraud, including anti Fraud awareness, vulnerability identification, and employee recognition policies, as well as other measures necessary for Fraud prevention.
2. Detection Pillar

The detection pillar contains measures to identify and discover Fraud in LPEI's business activities, including whistleblowing policies and mechanisms, surprise checks, and supervisory systems, as well as other measures required for Fraud detection.

3. Pilar Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi
Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi berisi langkah untuk penyelidikan atau investigasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi terhadap kejadian *Fraud* dalam kegiatan usaha LJK, serta langkah lain yang diperlukan untuk investigasi, pelaporan, dan pengenaan sanksi.
4. Pilar Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut
Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut berisi langkah untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan menindaklanjuti *Fraud*, serta langkah lain yang diperlukan untuk pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

Penerapan strategi Anti *Fraud* sebagai bagian dari pelaksanaan penerapan manajemen risiko tidak dapat dipisahkan dari cakupan penerapan manajemen risiko secara umum. Oleh karena itu efektivitas penerapan strategi Anti *Fraud* paling sedikit perlu didukung dengan penguatan pada aspek manajemen risiko yang fokus pada pengendalian *Fraud*. Aspek tersebut paling sedikit meliputi:

1. Pengawasan Aktif Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif;
2. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko *Fraud*; dan
4. Sistem Pengendalian Internal.

Sosialisasi Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi

LPEI menempatkan integritas sebagai landasan utama dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Untuk mewujudkan hal ini, LPEI secara konsisten mengedukasi seluruh pemangku kepentingan mengenai kebijakan anti korupsi dan anti gratifikasi. Sepanjang tahun 2024, berbagai kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan, di antaranya:

3. Pillar of Investigation, Reporting, and Sanctions
The investigation, reporting and sanctions pillar contains the steps for investigation or inquiry, the reporting system, and the imposition of sanctions on the occurrence of *Fraud* in the business activities of the Financial Services Institution, as well as other necessary steps for investigation, reporting and imposition of sanctions.
4. Pillar of Monitoring, Evaluation, and Follow-up
The monitoring, evaluation, and follow-up pillars are part of the Anti-Fraud Strategy carried out by all Work Units. Particular follow-up related to the handling of criminal cases as a result of *Fraud* is coordinated by the Work Unit in charge of Law.

The Anti-Fraud strategy as part of the risk management cannot be separated from the scope of risk management implementation in general. Therefore, the effectiveness of the Anti-Fraud strategy implementation at least needs to be supported by strengthening the risk management aspects that focus on controlling *Fraud*. At minimum, these aspects include:

1. Active Supervision of the Board of Directors and Executive Director;
2. Adequacy of Policies and Procedures;
3. Adequacy of the process of identifying, measuring, controlling, and monitoring *Fraud* risks; and
4. Internal Control System.

Anti-Corruption and Anti-Gratification Socialization

Indonesia Eximbank places integrity as the main foundation in implementing good corporate governance. To achieve this, Indonesia Eximbank consistently educates all stakeholders on anti-corruption and anti-gratification policies. Throughout 2024, various socialization activities have been carried out, including:

No.	Pelatihan/Sosialisasi Training/Socialization	Waktu Pelaksanaan Date
1	Sosialisasi "Budaya Anti Korupsi dan Pencegahan Gratifikasi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Lembaga, SMV (<i>Special Mission Vehicle</i>) atau BUMN" dengan narasumber dari KPK Socialisation of 'Anti-Corruption Culture and Prevention of Gratification in Goods/Services Procurement in Institutions, SMVs (Special Mission Vehicles) or SOEs' with speakers from the KPK.	04 April 2024 April 04, 2024
2	<i>New Hire Orientation</i> (NHO) kepada pegawai baru LPEI New Hire Orientation (NHO) for new Indonesia Eximbank employees	30 April 2024 April 30, 2024
3	<i>New Hire Orientation</i> (NHO) kepada CRDP (<i>Credit Reviewer Development Program</i>) New Hire Orientation (NHO) for CRDP (Credit Reviewer Development Program)	19 Juli 2024 July 19, 2024
4	Sosialisasi Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> LPEI Socialization of Implementation of Indonesia Eximbank Anti-Fraud Strategy	14 & 16 Agustus 2024 August 14 & 16, 2024
5	<i>New Hire Orientation</i> (NHO) kepada pegawai baru LPEI New Hire Orientation (NHO) for new Indonesia Eximbank employees	1 Oktober 2024 October 1, 2024
6	<i>Sharing Knowledge</i> Penerapan Sistem Pengendalian Internal Di Lingkungan Kementerian Keuangan Sharing Knowledge on Implementation of Internal Control System in the Ministry of Finance	9 Oktober 2024 October 9, 2024

Mekanisme Pelaporan Penerimaan Gratifikasi

Mekanisme Pelaporan Penerimaan Gratifikasi di LPEI secara umum merujuk ke UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. Untuk pengaturan secara internal, mekanisme pelaporan merujuk ke Peraturan Direktur Eksekutif No. 0013/PDE/08/2022 tentang Standar Pedoman Operasional Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Dalam hal Gratifikasi yang dianggap suap tidak dapat ditolak dan/atau tidak dapat di kembalikan kepada pihak pemberi, LPEI tetap wajib melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) LPEI atau langsung kepada KPK. Pelapor menyampaikan laporan penerimaan atau penolakan Gratifikasi kepada UPG dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan atau penolakan Gratifikasi melalui email: lapor.gratifikasi@indonesiaeximbank.go.id. Berdasarkan hasil Analisa, UPG akan mengkategorikan laporan Gratifikasi yang merupakan kewenangan LPEI atau Gratifikasi wajib lapor yang merupakan kewenangan KPK untuk penetapan status Gratifikasi nantinya. Apabila keputusan pengelolaan gratifikasi merupakan kewenangan KPK, maka UPG akan menyampaikan kepada KPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diputuskan disertai dengan dokumen pendukung; sedangkan apabila penetapan status merupakan kewenangan UPG, maka UPG akan menyampaikan keputusan status Gratifikasi kepada pelapor paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan.

Pelapor juga dapat menyampaikan laporan penerimaan atau penolakan Gratifikasi langsung kepada KPK dengan menggunakan aplikasi Gratifikasi Online KPK (GOL KPK) dengan alamat website <https://gol.kpk.go.id> paling lama 30 hari (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan. KPK akan menetapkan status kepemilikan atas barang Gratifikasi yang dilaporkan melalui Surat Keputusan KPK, di mana Pelapor wajib menyampaikan tembusan/salinan surat tersebut kepada UPG paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak surat keputusan diterima.

Laporan Penerimaan Gratifikasi di Tahun 2024

Sepanjang Tahun 2024, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) LPEI mengelola Laporan Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi dan menyampaikan sebanyak 1 (satu) laporan penerimaan gratifikasi kategori Wajib Lapor kepada KPK; dan
2. Melakukan verifikasi dan mencatat sebanyak 11 (sebelas) laporan penerimaan gratifikasi kategori Tidak Wajib Lapor dan/atau yang tidak disampaikan melalui aplikasi GOL KPK ke dalam register internal yang dikelola UPG.

Gratification Reporting Mechanism

The mechanism for reporting the receipt of gratification at Indonesia Eximbank generally refers to Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption and its amendments, as well as the Corruption Eradication Commission Regulation No. 2 of 2019 concerning Gratification Reporting. For internal regulations, the reporting mechanism refers to the Executive Director Regulation No. 0013/PDE/08/2022 concerning Operational Standards for Gratification Control within the Indonesian Eximbank (LPEI).

In cases where gratifications deemed as bribes cannot be refused and/or returned to the giver, Indonesia Eximbank is still required to report them to Indonesia Eximbank Gratification Control Unit (UPG) or directly to the Corruption Eradication Commission (KPK). The reporter must submit a report of the receipt or rejection of the gratification to UPG within 7 (seven) working days from the date of receipt or rejection of the gratification via email: lapor.gratifikasi@indonesiaeximbank.go.id. Based on the analysis, UPG will categorize the gratification report as either under Indonesia Eximbank's authority or as a mandatory report under KPK's authority for determining the gratuity status. If the decision on the gratification management falls under KPK's authority, UPG will submit the report to KPK within 7 (seven) working days from the decision date along with supporting documents; whereas if the determination is under UPG's authority, UPG will inform the reporter of the gratification status decision within 5 (five) working days from the date of determination.

Reporters can also submit reports on the receipt or rejection of gratification directly to KPK using KPK's Online Gratuity Application (GOL KPK) via the website <https://gol.kpk.go.id> no later than 30 (thirty) working days from the date of receipt. KPK will determine the ownership status of the reported gratification through a KPK Decree, and the reporter must forward a copy of the decree to UPG no later than 10 (ten) working days from the date the decree is received.

Gratification Reports in 2024

As of December 31, 2024, LPEI has not received any reports of gratuities received from reporters through the unit responsible for controlling gratuities.

1. Verifying and submitting 1 (one) report of gratification receipt in the Mandatory Report category to KPK; and
2. Verifying and recording 11 (eleven) reports of gratification receipt in the Non-Mandatory Report category and/or those not submitted through KPK GOL application into the internal register managed by the UPG.

Kebijakan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) Policy

Penerapan Kebijakan APU-PPT

LPEI secara konsisten berupaya menciptakan tata kelola yang baik dan bersih serta mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Untuk mewujudkan upaya ini, LPEI menerapkan Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) secara menyeluruh. Kebijakan tersebut mengacu pada POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program APU-PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Agar penerapan APU-PPT berjalan efektif, pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) harus diintegrasikan ke dalam Sistem Pengendalian Internal serta diinternalisasi dalam Kode Etik LPEI. Pejabat senior bertanggung jawab memastikan bahwa LPEI memiliki struktur pengendalian internal yang kuat untuk mencegah TPPU dan TPPT. Sejumlah langkah konkret yang dilakukan antara lain:

1. Dimilikinya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai;
2. Adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU-PPT; dan
3. Dilakukannya pemeriksaan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT.

Dasar Kebijakan

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
6. PMK No. 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
7. PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
8. POJK nomor 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme,

Implementation of AML-CTF Policy

Indonesia Eximbank consistently strives to create good and clean governance and prevent Money Laundering (ML) and Terrorist Financing (TF). To achieve this, Indonesia Eximbank has implemented a comprehensive Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Policy (AML-CTF). This policy refers to POJK No. 12/POJK.01/2017 concerning Implementation of AML-CTF Programs in the Financial Services Sector.

To ensure the effective implementation of AML-CTF, a risk-based approach must be integrated into the Internal Control System and internalized in Indonesia Eximbank's Code of Conduct. Senior officials are responsible for ensuring that Indonesia Eximbank has a strong internal control structure to prevent ML and TF. A number of concrete steps have been taken, including:

1. Having adequate policies, procedures, and internal monitoring;
2. Establishing clear authority limits and responsibilities for units involved in implementing AML/CFT programs; and
3. Conducting independent reviews to ensure the effectiveness of AML and CFT program implementation.

Legal Basis for Policy

1. Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2009 concerning Indonesia Eximbank
2. Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes.
3. Law of the Republic of Indonesia No. 9 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Terrorism Financing Crimes.
4. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 43 of 2015 concerning Reporting Parties in the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes.
5. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 61 of 2021 concerning Amendments to Government Regulation No. 43 of 2015 concerning Reporting Parties in the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes.
6. Regulation of the Minister of Finance No. 58/PMK.06/2020 concerning Supervision and Supervision of Indonesia Eximbank.
7. Regulation of the Minister of Finance No. 208/2021 concerning Principles of Governance, Risk Management, and Know Your Customer of Indonesia Eximbank.
8. POJK No. 8 of 2023 concerning Implementation of Anti-Money Laundering Programs, Prevention of Terrorist

dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

9. POJK No. 9/2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 37/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank.
11. Surat Edaran OJK No. 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.
12. Surat Edaran OJK No. 29/SEOJK.01/2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran OJK No. 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.
13. Surat Edaran OJK No. 31/SEOJK.01/2019 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
14. Peraturan Kepala PPAK No. PER-02/1.02/PPAK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.
15. Peraturan PPAK No. 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri Melalui Aplikasi GOAML Bagi Penyedia Jasa Keuangan.
16. Peraturan Kepala PPAK No. PER-02/1.02/PPAK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan dalam Penerapan APU dan PPT di LPEI

Dalam penerapan program APU PPT di LPEI, Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab memastikan proses identifikasi, penilaian, dan pemahaman risiko tindak pidana Pencucian Uang serta Pendanaan Terorisme telah dilakukan. Risiko tersebut mencakup aspek terkait nasabah, negara atau wilayah geografis, produk, jasa, transaksi, serta jaringan distribusi (*delivery channels*), termasuk memastikan terpenuhinya kewajiban untuk:

Financing, and Prevention of Financing the Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Financial Services Sector.

9. Financial Services Authority Regulation No. 9/2022 concerning Supervision of Indonesia Eximbank
10. Circular Letter of the Financial Services Authority No. 37/SEOJK.05/2017 concerning Guidelines for Implementation of Anti Money Laundering and Counter Terrorism Financing Programs in the NonBank Financial Industry Sector.
11. Circular Letter of the Financial Services Authority No. 38/SEOJK.01/2017 concerning Guidelines for Immediate Blocking of Customer Funds in the Financial Services Sector whose Identities are Listed in the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations.
12. Circular Letter of the Financial Services Authority No. 29/SEOJK.01/2019 concerning Amendments to Circular Letter of the Financial Services Authority No. 38/SEOJK.01/2017 concerning Guidelines for Immediate Blocking of Customer Funds in the Financial Services Sector whose Identities are Listed in the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations.
13. Circular Letter of the Financial Services Authority No. 31/SEOJK.01/2019 concerning Guidelines for Immediate Blocking of Customer Funds in the Financial Services Sector whose Identities are Listed in the List of Financing for Proliferation of Weapons of Mass Destruction.
14. Head of Financial Transaction Reports and Analysis Center Regulation No. PER-02/1.02/PPAK/02/15 concerning Categories of Service Users Potentially Engaging in Money Laundering Crimes.
15. Financial Transaction Reports and Analysis Center Regulation No. 1 of 2021 concerning Procedures for Submitting Reports on Suspicious Financial Transactions, Cash Financial Transactions, and Fund Transfer Financial Transactions from and to Abroad through the GOAML Application for Financial Services Providers.
16. Head of Financial Transaction Reports and Analysis Center 16. Regulation No. PER-02/1.02/PPAK/02/2014 concerning the Integrated User Information System.

Duties and Responsibilities of Compliance Working Unit in Implementation of AML and CFT at Indonesia Eximbank

In the implementation of AML/CFT Program at Indonesia Eximbank, the Compliance Unit is responsible for ensuring the identification, assessment, and understanding of the risks of money laundering and/ or terrorist financing related to customers, countries or geographic areas, products, services, transactions, or distribution networks (*delivery channels*), including ensuring compliance with the obligations to:

1. Mendokumentasikan penilaian risiko APU PPT.
2. Mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan.
3. Mengkinikan penilaian risiko APU PPT secara berkala.
4. Memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko APU PPT kepada instansi yang berwenang.

1. Document the AML/CFT risk assessment.
2. Consider all relevant risk factors before determining the overall risk level, as well as the level and type of risk mitigation measures to be applied.
3. Review the AML/CFT risk assessment periodically.
4. Have adequate mechanisms for providing AML/ CFT risk assessment information to competent authorities.



Transparansi Keuangan dan Non-Keuangan Lembaga

Financial and Non-Financial Transparency of Corporate

Sepanjang 2024, LPEI telah menyusun dan menyampaikan berbagai laporan kepada pemangku kepentingan. Penyusunan laporan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas. Adapun laporan-laporan tersebut mencakup:

Laporan kepada Kementerian Keuangan

- Laporan Rancangan RKAT
- Laporan Realisasi RKAT
- Laporan Pengawasan RKAT
- Laporan Pelaksanaan Penghapusbukuan dan/atau Penghapustagihan Piutang LPEI
- Laporan Pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN
- Laporan Keuangan Tahunan *Audited*
- Laporan Penerapan Prinsip Manajemen Risiko
- Laporan Pelaksanaan Prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik LPEI
- Laporan Rencana Jangka Panjang (RJP)
- Laporan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
- Laporan Hasil Pemantauan Perkembangan Pembiayaan Bermasalah LPEI
- Laporan Realisasi Penugasan Khusus Ekspor LPEI
- Laporan Pelaksanaan Penugasan Anggota Dewan Direktur yang Berasal dari Instansi/Lembaga

Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

- Laporan Rencana Bisnis
- Laporan Penyesuaian Rencana Bisnis
- Laporan Perubahan Rencana Bisnis
- Laporan Realisasi Rencana Bisnis
- Laporan Pengawasan Rencana Bisnis
- Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data Nasabah
- Laporan Realisasi Kegiatan Pengkinian Data Nasabah
- Laporan Penerapan Prinsip Manajemen Risiko
- Laporan Pelaksanaan Prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik LPEI
- Laporan Rencana Tindak Tingkat Kesehatan LPEI
- Laporan Hasil Penilaian Sendiri Tingkat Kesehatan
- Laporan Penugasan Pemerintah kepada LPEI
- Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
- Laporan Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
- Laporan Bulanan
- Laporan Tahunan
- Laporan Layanan Pengaduan Nasabah
- Laporan Rencana Literasi dan Inklusi Keuangan
- Laporan Realisasi Literasi dan Inklusi Keuangan
- Laporan Self Assesment Edukasi dan Perlindungan Konsumen
- Laporan Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

Throughout 2024, Indonesia Eximbank has compiled and submitted various reports to stakeholders. These reports were prepared in accordance with applicable regulations as a form of transparency and accountability. The reports include:

Report to the Ministry of Finance

- Report on Draft RKAT
- Report on Realization of RKAT
- Report on Supervision of RKAT
- Report on Implementation of Write-off and/or Write-off of Indonesia Eximbank Receivables
- Report on Implementation of PEN Government Investment.
- Audited Annual Financial Report
- Report on Implementation of Risk Management Principles.
- Report on Implementation of Indonesia Eximbank Good Governance Principles
- Report on Long-Term Plan (RJP)
- Report on Implementation of Know Your Customer Principles
- Report on Monitoring Results of Indonesia Eximbank Problematic Financing Development
- Report on Realization of Indonesia Eximbank National Interest Account
- Report on Implementation of Assignments of Board of Directors Members from Agencies/Institutions

Report to the Financial Services Authority (OJK)

- Business Plan Report
- Business Plan Adjustment Report
- Business Plan Change Report
- Business Plan Realization Report
- Business Plan Supervision Report
- Customer Data Update Activity Plan Report
- Customer Data Update Activity Realization Report
- Risk Management Principle Implementation Report
- Indonesia Eximbank Good Governance Principles Implementation Report
- Indonesia Eximbank Level of Soundness Action Plan Report
- Level of Soundness Self-Assessment Result Report
- Government Assignment Report to Indonesia Eximbank
- Sustainable Finance Action Plan Report
- Sustainable Finance Action Plan Realization Report
- Monthly Report
- Annual Report
- Customer Complaint Service Report
- Financial Literacy and Inclusion Plan Report
- Financial Literacy and Inclusion Realization Report
- Consumer Education and Protection Self-Assessment Report
- Minimum Capital Adequacy Ratio Calculation Report

- Laporan Informasi atau Fakta Material
- Laporan Rating Tahunan
- Laporan Profil Risiko
- Laporan Debitur
- Laporan Penunjukan AP dan/atau KAP untuk Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan
- Laporan Hasil Pemantauan Perkembangan Pembiayaan Bermasalah LPEI
- Laporan Penugasan Pemerintah kepada LPEI
- Laporan Strategi Anti Fraud
- Laporan Perubahan Strategi Anti Fraud

Laporan kepada Bank Indonesia (BI)

- Laporan Rencana Utang Luar Negeri.
- Laporan Utang Luar Negeri.
- Laporan Lalu Lintas Devisa (LLD).
- Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan BI RTGS.
- Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi.
- Laporan terkait Penerimaan dan Penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam

Laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Laporan kepada Kementerian Tenaga Kerja

Laporan Ketenagakerjaan

- Material Information or Facts Report
- Annual Rating Report
- Risk Profile Report
- Debtor Report
- AP and/or KAP Appointment Report for Audit of Annual Historical Financial Information
- Indonesia Eximbank Problematic Financing Development Monitoring Result Report
- Government Assignment Report to Indonesia Eximbank.
- Anti-Fraud Strategy Report
- Anti-Fraud Strategy Change Report

Report to Bank Indonesia (BI)

- Foreign Debt Plan Report.
- Foreign Debt Report.
- Foreign Exchange Traffic Report (LLD).
- BI RTGS Compliance Assessment Result Report.
- KPPK Report that has gone through the Attestation Procedure.
- Report related to Receipt and Placement of Foreign Exchange from Natural Resource Exports

Report to the Corruption Eradication Commission (KPK)

State Officials' Wealth Report (LHKPN)

Report to the Ministry of Manpower

Employment Report

Buyback Saham dan/atau Obligasi

Bond and Stock Buybacks

Hingga akhir tahun 2024, LPEI tidak memiliki dan tidak menerapkan kebijakan pembelian kembali (*buyback*) saham, karena LPEI tidak menerbitkan saham yang diperjualbelikan di pasar modal. Setiap kebijakan pengelolaan keuangan LPEI dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi lembaga keuangan khusus di bawah pembinaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Namun demikian, LPEI memiliki fleksibilitas dalam mengelola kewajiban keuangannya melalui instrumen pembiayaan pasar, termasuk penerbitan obligasi. LPEI tidak memiliki kebijakan baku mengenai pembelian kembali (*buyback*) obligasi, namun dapat melakukan aksi korporasi tersebut secara selektif dan situasional berdasarkan pertimbangan strategi manajemen utang, kondisi pasar, dan likuiditas Lembaga.

Sepanjang tahun 2024, LPEI tidak melakukan aksi pembelian kembali obligasi, namun LPEI aktif memenuhi kewajiban pelunasan obligasi yang jatuh tempo sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang berlaku.

Until the end of 2024, Indonesia Eximbank does not have and does not implement a share buyback policy, as LPEI does not issue shares that are traded on the capital market. All of Indonesia Eximbank's financial management policies are implemented in accordance with the laws and regulations applicable to special financial institutions under the supervision of Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

However, Indonesia Eximbank has flexibility in managing its financial obligations through market financing instruments, including the issuance of bonds. Indonesia Eximbank does not have a standard policy regarding the buyback of bonds, but may undertake such corporate actions selectively and on a case-by-case basis based on considerations of debt management strategy, market conditions, and the liquidity of the institution.

Throughout 2024, Indonesia Eximbank did not undertake any bond buyback actions; however, Indonesia Eximbank actively fulfilled its obligations to repay maturing bonds in accordance with applicable regulations and schedules.

Kebijakan Barang dan Jasa

Procurement of Goods and Services

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang/Jasa merupakan aspek penting dalam mendukung kelancaran operasional LPEI. Untuk memastikan proses yang transparan, efisien, dan sesuai dengan regulasi, LPEI menetapkan kebijakan dan standar operasional yang menjadi pedoman dalam setiap tahapan pengadaan. Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa didasarkan pada Peraturan Dewan Direktur (PDD) No. 0002/PDD/02/2022 tentang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa LPEI, serta Standar Operasional Pengadaan Barang/Jasa LPEI yang tercantum dalam PDE.0005.02/PDE/06/2023 Edisi I Revisi I. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan pelaksanaan pengadaan dapat berjalan secara optimal, selaras dengan prinsip tata kelola yang baik.

Prinsip dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Prinsip dalam pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut:

1. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa LPEI harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimal.
2. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa LPEI harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
3. Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa LPEI bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
4. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
5. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga dapat diperoleh barang/ jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
6. Adil dan tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan/atau alasan apa pun, dengan tetap memperhatikan kepentingan LPEI.
7. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan;

Goods and Services Procurement Policy

Procurement of Goods/Services is an important aspect in supporting the smooth operation of Indonesia Eximbank. To ensure a transparent, efficient, and compliant process, Indonesia Eximbank has established policies and operational standards that serve as guidelines for each stage of procurement. The Procurement Policy is based on the Board of Directors Regulation (BDR) No. 0002/BDR/02/2022 on Indonesia Eximbank Procurement Policy, as well as the Indonesia Eximbank Procurement Operational Standards outlined in PDE.0005.02/PDE/06/2023 Edition I Revision I. With this policy in place, it is hoped that procurement activities will be carried out optimally and in accordance with the principles of good corporate governance.

Principles in the Procurement of Goods and Services

The principles in procurement of goods and services are as follows:

1. Efficiency, meaning that the procurement of goods/services by Indonesia Eximbank should be pursued using minimum funds and resources to achieve the set quality and objectives within the designated time frame or using the allocated funds to achieve maximum results and quality.
2. Effectiveness, meaning that the procurement of goods/ services by Indonesia Eximbank should align with the established needs and objectives and provide the maximum possible benefits.
3. Transparency means that all provisions and information regarding the procurement of goods/services by Indonesia Eximbank are clear and widely accessible to interested Providers of Goods/Services and the general public.
4. Openness means that the procurement of goods/services can be participated in by all interested Providers of Goods/ Services and by the general public.
5. Competitive means that the procurement of goods/services must be conducted through healthy competition among as many peer Providers of Goods/Services as possible, meeting the specified requirements, thereby obtaining competitively offered goods/services without any intervention that disrupts the creation of market mechanisms in the procurement of goods/services.
6. Fair and non-discriminatory means providing equal treatment to all potential Providers of Goods/Services and not leading to advantages for any particular party through any means or reasons, while still considering Indonesia Eximbank interests.
7. Accountability means it must comply with the rules and regulations related to the procurement of goods/services so that it can be held accountable.

8. Kehati-hatian berarti senantiasa memperhatikan langkah antisipasi untuk menghindari kerugian terhadap LPEI selama proses Pengadaan Barang/Jasa; dan
9. Independen berarti dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan dengan integritas yang tinggi dan terhindar dari *conflict of interest*.

Metode Pengadaan

1. Metode pemilihan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pelelangan Umum;
 - b. Pemilihan Langsung;
 - c. Pengadaan Langsung;
 - d. Penunjukan Langsung; atau
 - e. Swakelola
2. Metode pemilihan untuk pengadaan Jasa Konsultasi dilaksanakan dengan:
 - a. Seleksi Umum;
 - b. Seleksi Langsung;
 - c. Pengadaan Langsung;
 - d. Penunjukan Langsung.

Ketentuan dalam Pengelolaan Vendor

Pengelolaan vendor diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Rekanan Pengadaan Barang/Jasa PDP No. 0009/MDI/II/2023.

Kode Etik di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di LPEI, seluruh pihak yang terlibat diwajibkan untuk menaati prinsip-prinsip etika sesuai dengan Peraturan Dewan Direktur (PDD) No. 0002/PDD/02/2022 tentang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa LPEI. Adapun etika yang harus dipatuhi meliputi:

1. Melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Bekerja secara profesional dan Independen serta menjaga kerahasiaan dokumen yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung, maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis para pihak.
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan semua pihak yang terkait baik secara langsung, maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

8. Prudence means always considering precautionary measures to avoid losses to the institution during the procurement process of goods and services.
9. Independence means that the implementation of procurement of goods and services must be carried out with high integrity and free from conflicts of interest.

Procurement Method

1. The methods of selection for procurement of Other Goods/ Services are conducted as follows:
 - a. Public Auction;
 - b. Direct Selection;
 - c. Direct Procurement;
 - d. Direct Appointment; or
 - e. Self-managed.
2. The methods of selection for procurement of Consultancy Services are conducted with:
 - a. Public Selection;
 - b. Direct Selection;
 - c. Direct Procurement;
 - d. Direct Appointment;

Provisions in Vendor Management

Provisions for vendor management are regulated in the Operational Technical Guidelines for the PDP Goods/Services Procurement Vendor Management No. 0009/MDI/II/2023.

Code of Conduct in Procurement of Goods and Services

In the implementation of Goods/Services Procurement at Indonesia Eximbank, all parties involved are required to comply with ethical principles in accordance with Board of Directors Regulation (PDD) No. 0002/PDD/02/2022 concerning Indonesia Eximbank Goods/Services Procurement Policy. The ethics that must be complied with include:

1. Carry out tasks in an orderly manner with a profound sense of responsibility to achieve predetermined objectives, thereby facilitating the seamless and accurate accomplishment of Procurement of Goods and Services goals.
2. Work professionally and independently and ensuring the safeguarding of document confidentiality pertinent to the Procurement of Goods and Services which by nature the disclosure of which could potentially lead to irregularities within said procurement processes.
3. Refrain from exerting influence, either directly or indirectly, so as to prevent unhealthy competition.
4. Acknowledge and assume accountability for all decisions made according to the written agreement of the parties.
5. Mitigate and prevent the occurrence of conflicts of interest of all parties involved, either directly or indirectly in the process of Procurement of Goods and Services.

6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan LPEI dalam Pengadaan Barang/Jasa.
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, unit kerja atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan LPEI; dan
8. Tidak menerima, tidak menawarkan dan tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat atau berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan kebijakan yang diatur dalam PDD No. 0002/PDD/02/2022 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di LPEI, terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaannya, antara lain:

1. Komite Pengadaan;
2. Unit Kerja Pengusul Pengadaan;
3. Unit Kerja Pelaksana Pengadaan;
4. Panitia Pengadaan; dan
5. Unit Kerja Pelaksana Pengendalian Biaya

Sistem Pengawasan

Berdasarkan Peraturan Dewan Direktur (PDD) No. 0002/PDD/02/2022 tentang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa LPEI Pasal 18 yaitu:

1. Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa bersifat pengawasan melekat (*built in control*) pada setiap fungsi-fungsi Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
2. Fungsi pengawasan Pengadaan Barang/Jasa harus tercermin dalam sistem pengendalian internal dan penerapan sistem manajemen risiko yang terintegrasi.
3. Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi *review* internal secara independen yang dilakukan secara berkala dan/atau insidental yang dilakukan oleh unit kerja yang membidangi audit internal.
4. Obyek pengawasan Pengadaan Barang/Jasa antara lain mencakup:
 - a. Pengawasan terhadap seluruh proses pemberian Pengadaan Barang/Jasa; dan/ atau
 - b. Pengawasan terhadap pejabat dan pegawai LPEI, termasuk pihak ketiga yang terkait proses Pengadaan Barang/Jasa.

Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan Pengadaan Barang/Jasa LPEI akan diatur pada peraturan yang lebih teknis.

6. Institute measures to avert the squandering and misappropriation of Indonesia Eximbank's financial resources during the procurement phases of goods and services.
7. Refrain from engaging in acts of authority abuse and collusion with the intent of personal gain, work units or other parties which can directly or indirectly detrimentally impacting Indonesia Eximbank.
8. Refrain from accepting, offering and promising to give or receive gifts, rewards, commissions, rebates or anything else from or to anyone known or reasonably suspected to be related to the Procurement of Goods and Services.

Activity Implementation

Based on the policy stipulated in PDD No. 0002/PDD/02/2022 concerning Procurement of Goods and Services at Indonesia Eximbank, there are several parties involved in the implementation process, including:

1. Procurement Committee
2. Procurement Initiating Work Unit
3. Procurement Implementing Work Unit;
4. Procurement Committee; and
5. Cost Control Implementation Work Unit.

Surveillance System

Base on the Board of Director Regulation (PDD) No. 0002/PDD/02/2022 concerning the Indonesia Eximbank Goods/Services Procurement Policy Article 18, namely:

1. Supervision of Goods/Services Procurement is an inherent supervision (*built in control*) in each function of Goods/Services Procurement in accordance with its authority and responsibility.
2. The Goods/Services Procurement supervision function must be reflected in the internal control system and the implementation of an integrated risk management system.
3. The Goods/Services Procurement supervision includes independent internal reviews conducted periodically and/ or incidentally by the work unit in charge of internal audit.
4. The Objects of Goods/Services Procurement supervision include, among others:
 - a. Supervision of the entire process of providing Goods/Services Procurement; and/or
 - b. Supervision of Indonesia Eximbank officials and employees, including third parties related to the Goods/Services Procurement process.

Further provisions on the supervision of Goods/Services Procurement of Indonesia Eximbank will be regulated in more technical regulations.



Kebijakan Pencegahan *Insider Trading*

Insider Trading Prevention Policy

LPEI tidak menjual saham kepada publik, sehingga pembahasan mengenai *insider trading* tidak relevan dalam Laporan Tahunan ini. Oleh karena itu, Perseroan tidak memiliki kebijakan internal maupun regulasi yang mengatur hal tersebut.

Indonesia Eximbank does not sell shares to the public, so discussion of insider trading is not relevant in this Annual Report. Therefore, the Company does not have internal policies or regulations governing this matter.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Distribution of Funds to Related Parties and Large Exposure

LPEI senantiasa menjalankan usahanya dengan prinsip tata kelola yang baik, memastikan kepatuhan terhadap seluruh regulasi yang berlaku. Dalam operasionalnya, LPEI tidak melakukan transaksi dengan pihak terkait, namun tetap menjalankan transaksi dengan pihak berelasi yang memiliki hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Setiap transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan kebijakan internal yang telah ditetapkan.

Sepanjang tahun 2024, LPEI memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP), tanpa adanya pelanggaran atau penyalahgunaan. Laporan BMPP secara rutin disusun dan dilaporkan kepada regulator sesuai dengan ketentuan dalam PMK No. 140/PMK.010/2009 dan POJK No. 040/POJK.05/2015. Hal ini mencerminkan komitmen LPEI dalam menjalankan bisnis secara transparan dan bertanggung jawab.

Indonesia Eximbank always conducts its business with good corporate governance principles, ensuring compliance with all applicable regulations. In its operations, Indonesia Eximbank does not conduct transactions with related parties, but continues to conduct transactions with related parties that have ownership and/or management relationships. Each transaction is carried out in accordance with established internal policies.

Throughout 2024, Indonesia Eximbank ensured compliance with the Maximum Financing Limit (BMPP) provisions, without any violations or misuse. The BMPP report is regularly prepared and submitted to the regulator in accordance with the provisions of PMK No. 140/PMK.010/2009 and POJK No. 040/POJK.05/2015. This reflects Indonesia Eximbank's commitment to conducting business in a transparent and responsible manner.

Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kepentingan Politik

Providing Funds for Social Activities and Political Interests

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial

LPEI berperan aktif dalam mendukung kegiatan sosial melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pelaksanaan CSR sepanjang 2024 telah memberikan manfaat bagi berbagai pihak, dengan rincian lebih lanjut tersedia dalam Bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Pemberian Dana untuk Kepentingan Politik

LPEI senantiasa menjalankan operasionalnya dengan mengedepankan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi. Sepanjang tahun 2024, LPEI tidak menyalurkan dana untuk kepentingan politik sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip tata kelola yang baik. Keputusan ini menegaskan independensi LPEI dalam menjalankan perannya serta menghindari potensi konflik kepentingan. Seluruh kebijakan yang diterapkan juga sejalan dengan visi dan misi LPEI, memastikan bahwa kegiatan bisnis tetap terfokus pada tujuan utama lembaga. Selain itu, LPEI terus berupaya memperkuat tata kelola yang selaras dengan peraturan yang berlaku demi menjaga integritas dan kepercayaan pemangku kepentingan.

Providing Funds for Social Activities

Indonesia Eximbank plays an active role in supporting social activities through its *Corporate Social Responsibility* (CSR) program. The implementation of CSR throughout 2024 has benefited various parties, with further details available in the *Corporate Social Responsibility* chapter of this Annual Report.

Providing Funds for Political Interests

Indonesia Eximbank always conducts its operations with transparency and compliance with regulations. Throughout 2024, Indonesia Eximbank did not distribute funds for political interests as a form of commitment to good corporate governance principles. This decision affirms Indonesia Eximbank's independence in carrying out its role and avoiding potential conflicts of interest. All policies implemented are aligned with Indonesia Eximbank's vision and mission, ensuring that business activities remain focused on the institution's primary objectives. Additionally, Indonesia Eximbank continues to strive to strengthen governance in accordance with applicable regulations to maintain the integrity and trust of stakeholders.



TRANSPARANSI PRAKTIK *BAD GOVERNANCE*

Transparency of Bad Governance Practices

Laporan atas Aktivitas Perusahaan yang Mencemari Lingkungan

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat laporan terkait aktivitas yang mencemari lingkungan di LPEI.

Ketidakpatuhan dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Sepanjang tahun 2024, LPEI tidak menghadapi kasus perpajakan. Hingga 31 Desember 2024, LPEI telah berkontribusi kepada negara melalui pembayaran pajak sebesar Rp278 Miliar, menurun 1,41% dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp282 Miliar.

Ketidaksesuaian Penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan Peraturan yang Berlaku dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Seluruh informasi dalam Laporan Tahunan ini, terutama terkait kinerja keuangan dan aspek lainnya, mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan. Penyajian dan pengungkapannya disesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Kasus Terkait Buruh dan Karyawan

Sepanjang tahun 2024, LPEI tidak mencatat adanya kasus yang melibatkan buruh atau karyawan.

Pengungkapan Segmen Operasi pada Laporan Keuangan

Hingga akhir tahun 2024, LPEI belum menerapkan PSAK 108 (sebelumnya PSAK 5) tentang Segmen Operasi. Untuk dapat menggambarkan segmen usaha, LPEI menggunakan struktur dan sumber pendapatan yang terdiri dari penugasan umum dan penugasan khusus.

Kesesuaian Buku Laporan Tahunan dan Laporan Tahunan di Website Perusahaan

Laporan Tahunan LPEI, baik yang diungkapkan kepada pemegang saham, pemangku kepentingan, ataupun yang telah diunggah pada situs web resmi Perusahaan telah sesuai dengan buku Laporan Tahunan yang dicetak dan diterbitkan oleh LPEI.

Reports on Company Activities that Pollute the Environment

Throughout 2024, there were no reports of activities that pollute the environment at Indonesia Eximbank.

Non-compliance with Tax Obligations

Throughout 2024, Indonesia Eximbank did not face any tax-related issues. As of December 31, 2024, Indonesia Eximbank contributed to the state through tax payments amounting to Rp278 billion, a decrease of 1.41% compared to 2023 which was recorded at Rp282 billion.

Discrepancies of Annual Report and Financial Statements with Applicable Regulations and Financial Accounting Standards (SAK)

All information in this Annual Report, particularly regarding financial performance and other aspects, refers to the Financial Statements for the year ended December 31, 2024, and December 31, 2023, which have been audited by KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan. The presentation and disclosure are in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia, namely the Financial Accounting Standards (PSAK) issued by the Indonesian Accountants Association (IAI).

Labor and Employee-Related Cases

Throughout 2024, Indonesia Eximbank did not record any cases involving workers or employees.

Disclosure of Operating Segments in Financial Statements

As of the end of 2024, Indonesia Eximbank has not implemented PSAK 108 (previously PSAK 5) on Operating Segments. To describe its business segments, Indonesia Eximbank uses a structure and sources of income consisting of general assignments and special assignments.

Consistency between Annual Report and Annual Report on Company Website

Indonesia Eximbank's Annual Report, whether disclosed to shareholders, stakeholders, or uploaded to the Company's official website, is consistent with the Annual Report printed and published by Indonesia Eximbank.

Penerapan Atas Pedoman Tata Kelola Lembaga

Implementation of Good Corporate Governance Guidelines

Peringkat Faktor Tata Kelola Governance Factor Rating		
Mencerminkan manajemen LPEI telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen LPEI.		Reflecting Indonesia Eximbank management has implemented good corporate governance which is generally good. This is reflected in the adequate fulfillment of the principles of good corporate governance. In the event of weaknesses in the implementation of good corporate governance principles, these weaknesses are generally less significant and can be resolved with normal actions by Indonesia Eximbank management.
Analisis Analysis		
- Penilaian Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk periode Desember 2024 merupakan penilaian yang kedua menggunakan Parameter dalam SEOJK No. 15/SEOJK.05/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI. - Sebelumnya terdapat Penilaian Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik menggunakan Parameter dalam SEOJK No. 15/SEOJK.05/2022 tahun 2023. - Hasil Penilaian Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik LPEI untuk posisi Desember 2024 adalah sebesar 1,50 atau mengalami peningkatan kualitas (lower is better) dibandingkan posisi Desember 2023 sebesar 1,64. Hasil rata-rata komposit sebesar 1,50 masuk ke dalam Peringkat 2 (mencerminkan manajemen LPEI telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang secara umum baik). - Adapun penilaian terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang dilakukan 2 (dua) tahun sebelumnya dilakukan sebagai berikut:		- The Good Corporate Governance Factor Assessment for the December 2024 period is the second assessment using the Parameters in SEOJK No. 15/SEOJK.05/2022 concerning the Assessment of Indonesia Eximbank Health Level. - Previously there was a Good Corporate Governance Factor Assessment using the Parameters in SEOJK No. 15/SEOJK.05/2022 in 2023. - The results of Indonesia Eximbank Good Corporate Governance Factor Assessment for the December 2024 position were 1.50 or experienced an increase in quality (lower is better) compared to the December 2023 position of 1.64. The average composite result of 1.50 is included in Rank 2 (reflecting that Indonesia Eximbank management has implemented good corporate governance which is generally good). - The assessment related to Good Corporate Governance carried out 2 (two) years previously was carried out as follows:
Periode Period	Acuan Penilaian Tata Kelola yang Baik Good Governance Assessment Reference	Nilai Score
2022	- Penilaian oleh Tim BPKP - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.06/2021 Tahun 2021 Tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia - Assessment by BPKP Team - Regulation of the Minister of Finance Number 208/PMK.06/2021 of 2021 concerning Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesian Export Financing Institutions	77,79%
2023	<i>Self Assessment</i> - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 15/SEOJK.05/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI. - Self Assessment - Circular Letter of the Financial Services Authority (SEOJK) No. 15/SEOJK.05/2022 concerning the Assessment of the Health Level of Indonesia Eximbank.	1,64
2023	- Penilaian oleh Tim BPKP - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.06/2021 Tahun 2021 Tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia - Assessment by the BPKP Team - Regulation of the Minister of Finance Number 208/PMK.06/2021 of 2021 concerning the Principles of Governance, Principles of Risk Management, and Principles of Knowing Your Customer of Indonesian Export Financing Institutions	80,04%
2024	<i>Self Assessment</i> - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 15/SEOJK.05/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI. - Self Assessment - Circular Letter of the Financial Services Authority (SEOJK) No. 15/SEOJK.05/2022 concerning the Assessment of the Health Level of Indonesia Eximbank.	1,50

Analisis Analysis

- Faktor Penilaian yang perlu mendapat perhatian adalah terkait Faktor Pengadaan Barang dan Jasa yang memiliki nilai rata-rata 2,24. Adapun hal utama yang perlu ditindaklanjuti adalah terkait parameter rencana dan laporan realisasi Dewan Direktur dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan barang/jasa dan pelaksanaannya.
- Selain itu, Faktor Penilaian yang perlu ditindaklanjuti adalah terkait Faktor Penerapan Fungsi Kepatuhan yang memiliki nilai rata-rata 2,22. Adapun hal utama yang perlu ditindaklanjuti adalah terkait meningkatnya sanksi dan teguran oleh regulator (OJK dan IDX) kepada LPEI, sampai dengan akhir 2024, LPEI telah mendapatkan 17 Surat Teguran dari OJK dan IDX.
- Faktor Penilaian yang telah memenuhi parameter-parameter dalam SEOJK No. 15/SEOJK.05/2022 adalah Faktor Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite yang memiliki nilai rata-rata 1,00. Namun tetap perlu diperhatikan aspek pemenuhan laporan dan notulen dari pelaksanaan dari masing-masing Komite.
- Untuk Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik, penjelasan per Faktor Penilaian adalah sebagai berikut:
 - a. Parameter Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana memiliki nilai rata-rata 1,61. Adapun hal yang memerlukan perhatian untuk faktor ini adalah terkait sanksi dan teguran dari regulator terkait LPEI, Per 2024, LPEI telah mendapatkan 17 surat peringatan OJK dan IDX. Selain itu masih terdapat beberapa posisi Plt pada DE dan DP dan terdapat temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal LPEI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan tertentu oleh otoritas lain, yang perlu Ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan sesuai tenggat waktu pemenuhan tindak lanjut.
 - b. Parameter Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direktur memiliki nilai rata-rata 1,17. Nilai tersebut mengalami peningkatan daripada periode sebelumnya yaitu 2023, hal tersebut dikarenakan pada tahun 2024 telah terdapat pembekalan dan program pembelajaran bagi Dewan Direktur.
 - c. Parameter Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS untuk UUS memiliki nilai rata-rata 1,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan daripada periode sebelumnya yaitu tahun 2023, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, DPS LPEI mengacu ke dalam aturan-aturan yang telah diatur di dalam Piagam DPS LPEI. Tidak ada pelaksanaan tugas DPS yang belum sesuai dengan piagam DPS.
 - d. Adapun hal yang memerlukan perhatian untuk faktor ini adalah terkait Hasil Audit OJK tahun 2024 terkait DPS yaitu berupa belum terdapat informasi gaji, penghasilan dan tunjangan pada Laporan Tahunan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (namun sudah diupdate untuk data tersebut kepada Tim LCD).
 - e. Parameter Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite memiliki nilai rata-rata 1,00. Adapun hal yang memerlukan perhatian untuk faktor ini adalah dokumentasi risalah rapat dan pelaporan Komite.
 - f. Parameter Penanganan Benturan Kepentingan memiliki nilai rata-rata 1,67. Pada tahun 2024, tidak terdapat temuan audit terkait benturan kepentingan.
 - g. Parameter Penerapan Fungsi Kepatuhan memiliki nilai rata-rata 2,22. Adapun hal utama yang perlu ditindaklanjuti adalah terkait sanksi dan teguran oleh regulator kepada LPEI, Per 2024 LPEI telah mendapatkan 17 Surat Teguran dari OJK dan IDX.
 - h. Parameter Penerapan Fungsi Audit Internal memiliki nilai rata-rata 1,24. Nilai tersebut mengalami peningkatan daripada periode sebelumnya yaitu 2023. Hal tersebut dikarenakan adanya pemenuhan SDM, sertifikasi Audit, pelaksanaan pelatihan, hingga pelaksanaan Risk Based Audit pada tahun 2024. Adapun hal yang memerlukan perhatian untuk faktor ini adalah terkait Pemantauan atas Daftar Monitoring Tindak Lanjut (DMTL) Internal.
- The Assessment Factor that needs attention is related to the Procurement of Goods and Services Factor which has an average value of 2.24. The main thing that needs to be followed up is related to the parameters of the Board of Directors' plan and realization report in supervising and providing advice on the procurement of goods/services policy and its implementation.
- In addition, the Assessment Factor that needs to be followed up is related to the Compliance Function Implementation Factor which has an average value of 2.22. The main thing that needs to be followed up is related to the increasing sanctions and warnings by regulators (OJK and IDX) to Indonesia Eximbank, until the end of 2024, Indonesia Eximbank has received 17 Warning Letters from OJK and IDX.
- The Assessment Factor that has met the parameters in SEOJK No. 15/SEOJK.05/2022 is the Completeness and Implementation of Committee Duties Factor which has an average value of 1.00. However, it is still necessary to pay attention to the aspect of fulfilling reports and minutes from the implementation of each Committee.
- For the Good Corporate Governance Factor, the explanation per Assessment Factor is as follows:
 - a. The Parameters for the Implementation of Duties and Responsibilities of Executive Director and Managing Director have an average value of 1.61. The things that require attention for this factor are related to sanctions and reprimands from regulators related to Indonesia Eximbank. As of 2024, Indonesia Eximbank has received 17 warning letters from OJK and IDX. In addition, there are still several Acting positions in DE and DP and there are audit findings and recommendations from Indonesia Eximbank internal audit work unit, external auditors, and the results of supervision by the Financial Services Authority and/or certain supervision results by other authorities, which need to be followed up according to the provisions and according to the deadline for fulfilling follow-up actions.
 - b. The Parameters for the Implementation of Duties and Responsibilities of Board of Directors have an average value of 1.17. This value has increased compared to the previous period, namely 2023, this is because in 2024 there has been provision and learning programs for the Board of Directors.
 - c. The parameters for the Implementation of Duties and Responsibilities of DPS for UUS have an average value of 1.00. This value has increased compared to the previous period, namely 2023, in carrying out its duties and responsibilities, Indonesia Eximbank DPS refers to the rules that have been regulated in Indonesia Eximbank DPS Charter. There is no implementation of DPS duties that are not in accordance with the DPS charter.
 - d. The matter that requires attention for this factor is related to the 2024 OJK Audit Results related to the DPS, namely that there is no information on salaries, income and allowances in the Annual Report on the Implementation of Good Corporate Governance (but the data has been updated to the LCD Team).
 - e. The Completeness and Implementation of Committee Duties parameter has an average value of 1.00. The matter that requires attention for this factor is the documentation of minutes of meetings and reporting of the Committee.
 - f. The Conflict of Interest Handling parameter has an average value of 1.67. In 2024, there were no audit findings related to conflicts of interest.
 - g. The Compliance Function Implementation Parameter has an average value of 2.22. The main thing that needs to be followed up is related to sanctions and warnings by regulators to LPEI. As of 2024, Indonesia Eximbank has received 17 Warning Letters from OJK and IDX.
 - h. The Internal Audit Function Implementation Parameter has an average value of 1.24. This value has increased compared to the previous period, namely 2023. This is due to the fulfillment of HC, Audit certification, implementation of training, and implementation of Risk Based Audit in 2024. The thing that requires attention for this factor is related to Monitoring of the Internal Follow-up Monitoring List (DMTL).

- i. Parameter Penerapan Fungsi Audit Eksternal memiliki nilai rata-rata 1,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan daripada periode sebelumnya yaitu 2023. Adapun hal yang mendorong peningkatan pada faktor ini adalah terkait telah dilakukannya komunikasi awal dengan OJK Pengawas.
- j. Parameter Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai rata-rata 1,51. Hal tsb dikarenakan ERM telah memiliki berbagai prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko untuk seluruh risiko, sebagaimana dijabarkan dalam Laporan Profil Risiko, khususnya pada penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (antara lain ORM dan EWD). Adapun hal yang memerlukan perhatian untuk faktor ini adalah terkait finalisasi evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko pada Q4-2024.
- k. Parameter Transparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pelaporan Internal memiliki nilai rata-rata 1,39. Nilai tersebut mengalami peningkatan daripada periode sebelumnya yaitu 2023. Hal tsb Penambahan Remunerasi bagi DPS UUS dalam laporan GCG dan dalam Aspek IT security system juga telah dilakukan dengan adanya dedicated IT Security Officer yang dibantu oleh tim Security Operation Center dan telah membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) dan telah didaftarkan kepada BSSN pada bulan Desember 2024. Saat ini sedang dalam proses validasi oleh BSSN.
- l. Parameter Rencana Strategis LPEI memiliki nilai rata-rata 2,00. Adapun hal yang memerlukan perhatian untuk faktor ini adalah terkait pelaksanaan Focus Group Discussion secara berkala dengan Direktorat Jenderal Keuangan Negara setiap bulan Oktober (terkait rencana strategis maupun dukungan yang diperlukan dan terdapat pengesahan RKAT oleh Menteri).
- m. Parameter Pengadaan Barang dan Jasa memiliki nilai rata-rata 2,24. Adapun hal yang memerlukan perhatian untuk faktor ini adalah terkait rencana hingga penyampaian Laporan kepada Dewan Direktur, termasuk telaah Dewan Direktur terhadap Pengadaan Barang dan Jasa hingga fungsi QA dalam Divisi terkait.
 - i. The External Audit Function Implementation Parameter has an average value of 1.00. This value has increased compared to the previous period, namely 2023. The thing that drives the increase in this factor is related to the initial communication with the OJK Supervisor.
 - j. The Risk Management Implementation Parameter including the Internal Control System has an average value of 1.51. This is because ERM has various procedures and tools to identify, measure, monitor, and control risks for all risks, as described in the Risk Profile Report, especially in the assessment of the Quality of Risk Management Implementation (including ORM and EWD). The things that require attention for this factor are related to the finalization of the Risk Management Policy evaluation in Q4-2024.
 - k. The Financial and Non-Financial Condition Transparency Parameter, Good Corporate Governance Implementation Report and Internal Reporting have an average value of 1.39. This value has increased compared to the previous period, namely 2023. The addition of Remuneration for DPS UUS in the GCG report and in the IT security system aspect has also been carried out with the presence of a dedicated IT Security Officer assisted by the Security Operation Center team and has formed a Cyber Incident Response Team (TTIS) and has been registered with BSSN in December 2024. Currently in the validation process by BSSN.
 - l. Indonesia Eximbank Strategic Plan Parameter has an average value of 2.00. The things that require attention for this factor are related to the implementation of periodic Focus Group Discussions with the Directorate General of State Finance every October (related to strategic plans and the support needed and there is approval of the RKAT by the Minister).
 - m. The Procurement of Goods and Services Parameter has an average value of 2.24. The things that require attention for this factor are related to the plan to submit the Report to the Board of Directors, including the Board of Directors' review of the Procurement of Goods and Services to the QA function in the related Division.

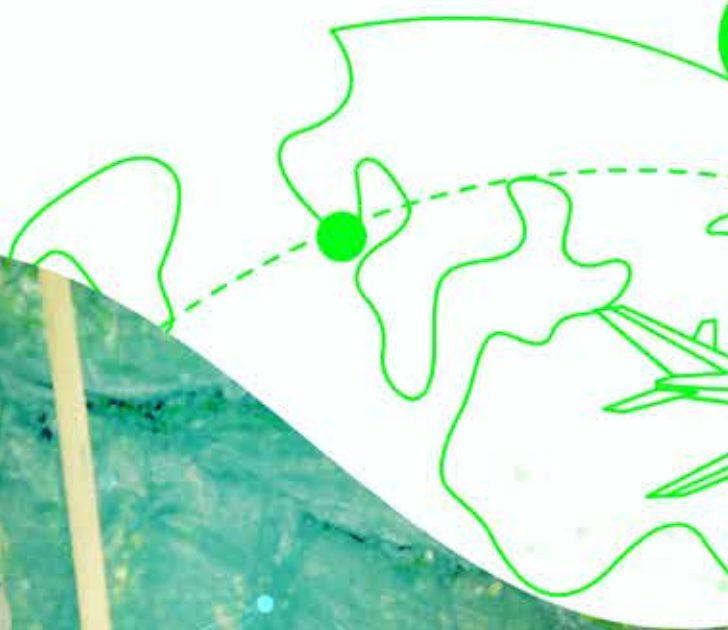
Analisis Analysis

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa:

1. Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*)
 - a. Kekuatan aspek governance structure LPEI adalah terpenuhinya struktur manajemen LPEI (Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan Dewan Pengawas Syariah) dan Komite LPEI
 - b. Hal-hal yang perlu mendapat peningkatan dalam aspek *governance structure* adalah masih terdapat beberapa posisi Plt pada Direktur Eksekutif (DE) dan Direktur Pelaksana (DP).
2. Proses tata kelola (*governance process*)
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur telah menunjukkan peningkatan dengan adanya pembekalan dan program pembelajaran yang berkesinambungan.
 - b. DPS telah melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dalam Piagam DPS LPEI, dan tidak ada pelaksanaan tugas yang bertentangan dengan piagam tersebut.
 - c. Tidak terdapat temuan audit terkait benturan kepentingan pada tahun 2024, mencerminkan pengelolaan konflik kepentingan yang baik.
 - d. Hal-hal yang perlu mendapat peningkatan dalam aspek governance process adalah pemenuhan Monitoring DMTL dan komitmen kepada regulator
3. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*)
 - a. Tidak terdapat temuan audit terkait benturan kepentingan, menunjukkan integritas operasional LPEI.
 - b. Aspek keamanan IT telah diperkuat melalui pengangkatan IT Security Officer, pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS), dan pendaftaran ke BSSN, yang saat ini sedang divalidasi.
 - c. Hal-hal yang perlu mendapat peningkatan dalam aspek *governance outcome* adalah LPEI menerima beberapa surat teguran dari regulator yang memerlukan tindak lanjut sesuai ketentuan dan tenggat waktu.

Based on the analysis of all the criteria or assessment indicators above, it is concluded that:

1. Governance structure
 - a. The strength of the governance structure aspect of Indonesia Eximbank is the fulfillment of Indonesia Eximbank management structure (Board of Directors, Executive Director, Managing Director, and Sharia Supervisory Board) and Indonesia Eximbank Committee
 - b. Things that need to be improved in the governance structure aspect are that there are still several acting positions in the Executive Director (DE) and Managing Director (DP).
2. Governance process
 - a. The implementation of duties and responsibilities of Board of Directors has shown improvement with the provision of continuous training and learning programs.
 - b. The DPS has carried out its duties in accordance with the rules in Indonesia Eximbank DPS Charter, and there has been no implementation of duties that conflict with the charter.
 - c. There were no audit findings related to conflicts of interest in 2024, reflecting good management of conflicts of interest.
 - d. Things that need to be improved in the governance process aspect are the fulfillment of DMTL Monitoring and commitment to regulators
3. Governance implementation results (governance outcomes)
 - a. There were no audit findings related to conflicts of interest, indicating the operational integrity of Indonesia Eximbank.
 - b. The IT security aspect has been strengthened through the appointment of an IT Security Officer, the formation of a Cyber Incident Response Team (TTIS), and registration with BSSN, which is currently being validated.
 - c. Things that need to be improved in the governance outcome aspect are that Indonesia Eximbank received several warning letters from regulators that require follow-up according to the provisions and deadlines.





01

Profil Laporan Keberlanjutan

Sustainability Report Profile



Pernyataan dan Batasan Tanggung Jawab

Disclaimer and Limitations of Responsibilities



Laporan Keberlanjutan ("Laporan") ini mengandung informasi rencana-rencana, strategi, kinerja, dan tujuan terkait ekonomi, sosial, dan lingkungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Indonesia Eximbank ("LPEI" atau "Indonesia Eximbank" atau "Kami"). Dalam Laporan Keberlanjutan ini setiap penyebutan salah satu dari kata ganti tersebut, berarti merujuk kepada LPEI.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Keberlanjutan dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang serta lingkungan bisnis, di mana Lembaga menjalankan kegiatan usaha. Lembaga tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

This Sustainability Report ("Report") contains information about the plans, strategies, performance, and goals related to the economic, social, and environmental aspects of the Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Indonesia Eximbank ("LPEI" or "Indonesia Eximbank" or "We/Us/Our"). In this Sustainability Report, any reference to these pronouns refers to LPEI.

The forward-looking statements in the Sustainability Report are made based on various assumptions regarding current and future conditions as well as the business environment in which the Corporate operates. The Corporate does not guarantee that the verified documents will generate specific results as expected.

Tentang Laporan Ini About This Report

LPEI mempublikasikan Laporan Keberlanjutan setiap tahunnya dan Laporan ini merupakan Laporan keempat yang mencakup kinerja keberlanjutan untuk periode 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024. Laporan ini dipersiapkan sesuai Laporan Keuangan LPEI untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Laporan ini hanya memuat data dan informasi dari LPEI, tidak termasuk entitas anak. Data pendukung upaya pelestarian lingkungan hidup yang diterapkan dan disampaikan terbatas pada aktivitas operasional Kantor Pusat di Jakarta, dengan pertimbangan karena ruang lingkup wilayah kerja LPEI yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan belum adanya keseragaman perhitungan sehingga belum dapat memaparkan konsumsi energi, konsumsi bahan bakar, konsumsi air maupun konsumsi kertas secara menyeluruh. Selain itu, LPEI juga tidak memantau, mengendalikan, dan melaporkan aktivitas para mitra usaha di luar interaksinya dengan LPEI. [GRI 2-2, 2-3]

Laporan ini disusun sesuai dengan standar berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik ("POJK 51/2017");
2. Metrik ESG IDX;
3. Global Reporting Initiative (GRI) Universal Standard 2021;
4. GRI G4 Financial Services.

Entitas yang Tercakup dalam Laporan [GRI 2-2]

Nama Perusahaan Company Name	Lokasi Location	Lini Bisnis Business Line
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Indonesia Eximbank	Jakarta	Entitas induk, sebagai lembaga keuangan khusus yang didirikan untuk melaksanakan Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN). As the parent entity, operates as a specialized financial institution to implement National Export Financing (PEN).
PT IEB Prima Aset	Jakarta	Entitas anak LPEI, bergerak di bidang jasa konsultasi, termasuk konsultasi atas kegiatan yang berorientasi ekspor. LPEI's subsidiary, engaged in consultancy services, including consulting for export-oriented activities.

Tidak ada penyajian ulang mengenai informasi dari tahun-tahun sebelumnya dalam Laporan ini. Selain itu, tidak terdapat perubahan signifikan pada organisasi, bisnis inti, rantai nilai, atau hubungan bisnis lainnya sejak Laporan kami sebelumnya. [GRI 2-4]

LPEI belum menggunakan jasa penjaminan (*assurance*); namun, untuk memastikan kredibilitas dan kualitas informasi yang disajikan dalam Laporan ini, seluruh isi dan data yang disampaikan telah melalui proses verifikasi internal. [OJK G.1] [GRI 2-5]

LPEI publishes the Sustainability Report annually, and this is its fourth edition, covering sustainability performance for the period from January 1, 2024, to December 31, 2024. This Report is prepared in accordance with LPEI's Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2024. This Report only disclosed data and information from LPEI, excluding its subsidiaries. The supporting data for environmental conservation efforts that have been implemented and reported are limited to the operational activities of the Head Office in Jakarta. This is due to the broad scope of LPEI's areas of work across Indonesia and the lack of standardized calculations, making it impossible to present comprehensive data on energy consumption, fuel consumption, water consumption, or paper consumption. Additionally, LPEI does not monitor, control, or report on the activities of business partners beyond their interactions with LPEI. [GRI 2-2, 2-3]

This Report is prepared in compliance with the following standards:

1. Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies ("POJK 51/2017");
2. IDX ESG Matrix;
3. Global Reporting Initiative (GRI) Universal Standard 2021;
4. GRI G4 Financial Services.

Entities Included in the Report [GRI 2-2]

There is no restatement of information from previous years' Report. Additionally, there have been no significant changes to the organization, core business, value chain, or other business relationships since our previous Report. [GRI 2-4]

LPEI has not utilized assurance services however, to ensure the credibility and quality of the information presented in this Report, all content and data have undergone an internal verification process. [OJK G.1] [GRI 2-5]

Laporan ini mencakup sebuah Lampiran yang berisi indeks konten, termasuk, di antaranya, indeks konten GRI yang menentukan setiap Standar GRI yang digunakan dan diungkapkan. Jika ada pertanyaan terkait Laporan ini, Anda dapat menghubungi Sekretaris Lembaga melalui surat elektronik (surel) ke corpsec@indonesiaeximbank.go.id. [GRI 2-3]

This Report includes an Appendix containing a content index, including, among others, the GRI content index, which specifies each GRI Standard used and disclosed. If you have any questions regarding this Report, you can contact the Corporate Secretary via email at corpsec@indonesiaeximbank.go.id. [GRI 2-3]

Sekretaris Lembaga

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
(LPEI) Indonesia Eximbank

Kantor Pusat

Prosperity Tower, 1st floor District 8, SCBD,
Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta,
12190, Indonesia



+62 21 39503600 (Hunting)



+62 21 5790 5789

Corporate Secretary

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
(LPEI) Indonesia Eximbank

Head Office

Prosperity Tower, 1st floor District 8, SCBD,
Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta,
12190, Indonesia



+62 21 39503600 (Hunting)



+62 21 5790 5789



Tentang LPEI

About LPEI

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia merupakan lembaga khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai *Special Mission Vehicle* (SMV) di bawah naungan Kementerian Keuangan RI untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional.

Berdasarkan mandat UU No. 2/2009, LPEI dibentuk untuk mendukung Program Ekspor nasional dengan memberikan Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) yang terdiri dari penyediaan Pembiayaan, Penjaminan, dan/atau Asuransi. Penyaluran PEN dapat dilakukan dalam bentuk Pembiayaan, Penjaminan, dan/atau Asuransi yang diberikan kepada badan usaha termasuk perseorangan berbentuk badan hukum, maupun yang tidak berbentuk badan hukum, serta kepada badan usaha yang berdomisili di dalam, maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia dan termasuk perorangan. [OJK C-4, GRI 2-6]

LPEI tergabung sebagai anggota di Asian EXIM Banks Forum (AEBF), Global Network of Export-Import Banks and Development Finance Institutions (G-NEXID), Berne Union, Aman Union, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), dan Factor Chain International (FCI). [OJK C.5] [GRI 2-28]

Hingga akhir 2024, tidak terdapat perubahan signifikan menyangkut kegiatan operasional dan segmen usaha yang dilakukan LPEI. [OJK C.6]

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia is a specialized corporate established by the Government of Indonesia as a Special Mission Vehicle (SMV) under the Ministry of Finance of RI to support the implementation of national export financing activities.

Based on the mandate of Act No. 2/2009, LPEI was established to support the National Export Program by providing National Export Financing (PEN), which includes the provision of Financing, Guarantees, and/or Insurance. PEN disbursement can be in the form of Financing, Guarantees, and/or Insurance provided to business entities, including individuals in the form of legal entities or non-legal entities, as well as to business entities domiciled within or outside the territory of the Republic of Indonesia, including individuals. [OJK C-4, GRI 2-6]

LPEI is a member of the Asian EXIM Banks Forum (AEBF), the Global Network of Export-Import Banks and Development Finance Institutions (G-NEXID), the Berne Union, Aman Union, Indonesian Payment System Association (ASPI), the General Insurance Association of Indonesia (AAUI), and Factor Chain International (FCI). [OJK C.5] [GRI 2-28]

As of the end of 2024, there were no significant changes regarding the operational activities and business segments conducted by LPEI. [OJK C.6]

Informasi Umum [GRI 2.1]

General Information [GRI 2.1]



Nama Perusahaan Company Name	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Indonesia Eximbank
Jenis/Badan Hukum Perusahaan Legal Status of Entity	Lembaga Keuangan Khusus yang didirikan berdasarkan Undang- Undang No. 2 Tahun 2009 Special Financial Institution established under the Act No. 2 of 2009
Status Perusahaan Company Status	Lembaga keuangan khusus yang didirikan untuk melaksanakan Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) dan terdaftar di IDX sebagai emiten dengan kode efek "BEXI". A special financial institution established to implement National Export Financing (PEN) and listed on the IDX as an issuer with the stock code "BEXI".
Alamat [OJK C.2] Address [OJK C.2]	Prosperity Tower, 1st floor District 8, SCBD, Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta, 12190, Indonesia ☎ +62 21 39503600 (Hunting) ☎ +62 21 5790 5789 ✉ corpsec@indonesiaeximbank.go.id

SKALA USAHA [OJK C.3]

BUSINESS SCALE [OJK C.3]

Uraian Description	Satuan Unit	2024	2023	2022
Total Aset Total Assets	Rp triliun Rp trillion	49,11	51,35	83,82
Total Liabilitas Total Liabilities	Rp triliun Rp trillion	35,12	42,59	56,95
Kepemilikan Saham Share Ownership	Sepenuhnya milik Pemerintah Indonesia (100%) dan tidak terbagi atas saham. Fully owned by the Indonesian Government (100%) and not divided into shares.			
Wilayah Operasional Operational Area	LPEI memiliki Kantor Pusat di Jakarta, 4 Kantor Cabang, 3 Kantor Wilayah, dan 3 Kantor Pemasaran. LPEI dapat melakukan aktivitas usahanya dalam menyalurkan PEN di dalam, maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia. LPEI has a Head Office in Jakarta, 4 Branch Offices, 3 Regional Offices, and 3 Marketing Offices. LPEI can carry out its business activities in channeling PEN within, as well as outside the territory of the Republic of Indonesia.			

Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan

Sustainability Performance Highlights

KINERJA EKONOMI [OJK B.1]

ECONOMIC PERFORMANCE [OJK B.1]

KINERJA KEUANGAN

FINANCIAL PERFORMANCE

Keterangan Description	Satuan Unit	2024	2023	2022
Penyaluran kredit untuk kegiatan usaha berkelanjutan Lending for sustainable business activities				
Penyaluran pembiayaan untuk UMKM Financial lending for MSMEs	Rp triliun Rp trillion	11,55	14,49	14,74
Persentase total pembiayaan atas kegiatan usaha berkelanjutan terhadap total kredit LPEI keseluruhan Percentage of total lending of sustainable business activities to total loans of the LPEI	Persentase Percentage	20,58%	19,63%	17,62%
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	Rp triliun Rp trillion	0,23	(18,11)	(3,11)
Jumlah Pendapatan Bunga dan Usaha Syariah Total Interest Income and Sharia Business	Rp triliun Rp trillion	3,38	4,05	3,71
Total Aset Total Assets	Rp triliun Rp trillion	49,11	51,35	83,82
Total Pembiayaan Total Financing	Rp triliun Rp trillion	56,11	73,82	83,64
Penjaminan Guarantee	Rp triliun Rp trillion	8,2	10,1	12,43
Asuransi (Volume) Insurance (Volume)	Rp triliun Rp trillion	10,9	12,10	11,79
Nilai Ekonomi yang Didistribusikan Distributed Economic Values	Rp triliun Rp trillion	2,47	3,77	2,07

KINERJA SOSIAL [OJK B.3]

SOCIAL PERFORMANCE [OJK B.3]

Keterangan Description	Satuan Unit	2024	2023	2022
Pengembangan masyarakat Community empowerment				
Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Number of activities related to improving community welfare	Jumlah Number	5 Program Pengembangan Desa Devisa dan 2 Kelompok Kegiatan Program CPNE 5 Go Export Village Development Programs and 2 CPNE Program Activity Groups	8 Program Pengembangan Desa Devisa dan 4 program CPNE 8 Go Export Village Development Programs and 4 CPNE Programs	6 Program Pengembangan Desa Devisa dan 7 program CPNE 6 Go Export Village Development Programs and 7 CPNE Programs
Realisasi investasi sosial dalam rangka program CSR Realization of social investment in terms of CSR programs	Rp miliar Rp billion	5,50	1,68	2,61

Keterangan Description	Satuan Unit	2024	2023	2022
Perhatian terhadap pegawai Caring for employees				
Jumlah pegawai Number of employees	Orang Person	521	563	549
Jumlah pegawai wanita Number of female employees	Orang Person	219	241	222
Rata-rata man-days pelatihan per tahun Average training man-days per year	Man-days pelatihan/pegawai Man-days of training/employee	7	5,78	6,96
Kelompok program pelatihan dan pengembangan pegawai Group of employee training and development programs	Jumlah Number	4	4	4
Rekrutmen pegawai baru Recruitment of new employees	Orang Person	26	60	53
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena berbagai alasan Termination of employment for any reason	Orang Person	68	46	71

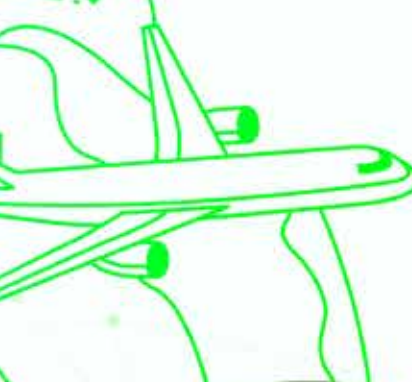
KINERJA LINGKUNGAN [OJK B.2]

ENVIRONMENTAL PERFORMANCE [OJK B.2]

Uraian Description	Satuan Unit	2024	2023	2022
Pemakaian Kertas Paper Usage	Lembar Sheet	1.022.468	1.005.022	842.375
Intensitas Pemakaian Energi Energy Consumption Intensity	Gigajoule/Rp juta Gigajoule/Rp million	0,007	0,005	0,004
Intensitas Emisi Emission Intensity	Ton CO2-eq/Rp juta Ton CO2-eq/Rp million	0,002	0,001	0,001
Kebijakan operasional berbasis ESG ESG-based operational policy	Jumlah Number	2	2	2







02

Komitmen Keberlanjutan

Sustainability Commitment



Pengelolaan Topik Material [GRI 3-1, 3-2]

Material Topic Management [GRI 3-1, 3-2]

Penetapan isi Laporan melewati 4 (empat) tahapan yang dipersyaratkan oleh Standar GRI, yaitu:

1. **Mengerti Konteks Kegiatan Usaha**
LPEI memulai proses penyusunan Laporan dengan memahami hubungan kegiatan usaha dengan konteks keberlanjutan, pemangku kepentingan terkait, serta mengenali informasi kritis untuk mengidentifikasi potensi dampak kegiatan usaha.
2. **Identifikasi Potensi dan Dampak**
LPEI mengidentifikasi dampak aktual maupun potensial kegiatan usaha yang dijalankan terhadap aspek ekonomi, lingkungan, sosial maupun SDM.
3. **Menilai Signifikansi Dampak**
LPEI menilai dan memilah seluruh dampak aktual maupun potensial yang teridentifikasi dan memutuskan mana yang memiliki dampak terbesar, untuk kemudian ditetapkan sebagai topik material.
4. **Memprioritaskan Dampak Paling Signifikan**
LPEI kemudian menetapkan topik-topik material untuk dilaporkan, berdasarkan penilaian signifikansi dampak yang ditimbulkan.

Implementasi keempat tahapan penentuan isi Laporan tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada 8 (delapan) prinsip dasar penyusunan sesuai GRI Universal Standard, yaitu:

1. **Akurasi**
LPEI melaporkan informasi dengan benar, akurat dan cukup detail sehingga memungkinkan dilakukannya penilaian dampak kegiatan usaha.
2. **Berimbang**
LPEI menyajikan informasi dengan tanpa bias dan dapat merepresentasikan keseimbangan penggambaran dampak positif maupun negatif kegiatan yang dilakukan.
3. **Kejelasan**
Lembaga menyajikan informasi yang mudah diakses dan mudah dimengerti.
4. **Dapat diperbandingkan**
LPEI memilah, mengumpulkan dan menyajikan informasi secara konsisten sehingga memungkinkan dilakukannya analisa perubahan dampak kegiatan setiap saat termasuk perbandingan dampaknya terhadap organisasi sejenis lainnya.

The determination of the Report's content follows four (4) stages as required by the GRI Standards, namely:

1. **Understanding Business Context**
LPEI begins the Report preparation process by understanding the relationship between business activities and sustainability context, relevant stakeholders, and identifying critical information to assess potential business impacts.
2. **Identifying Potential and Actual Impacts**
LPEI identifies both actual and potential impacts of its business activities on economic, environmental, social, and human resource aspects.
3. **Assessing Impact Significance**
LPEI evaluates and categorizes all identified actual and potential impacts, determining which have the most significant effect to be designated as material topics.
4. **Prioritizing the Most Significant Impacts**
LPEI then establishes the material topics to be reported based on the assessment of the significance of the impacts.

The implementation of these four stages in determining the Report's content is carried out with reference to the eight (8) fundamental principles of reporting according to the GRI Universal Standards, which are:

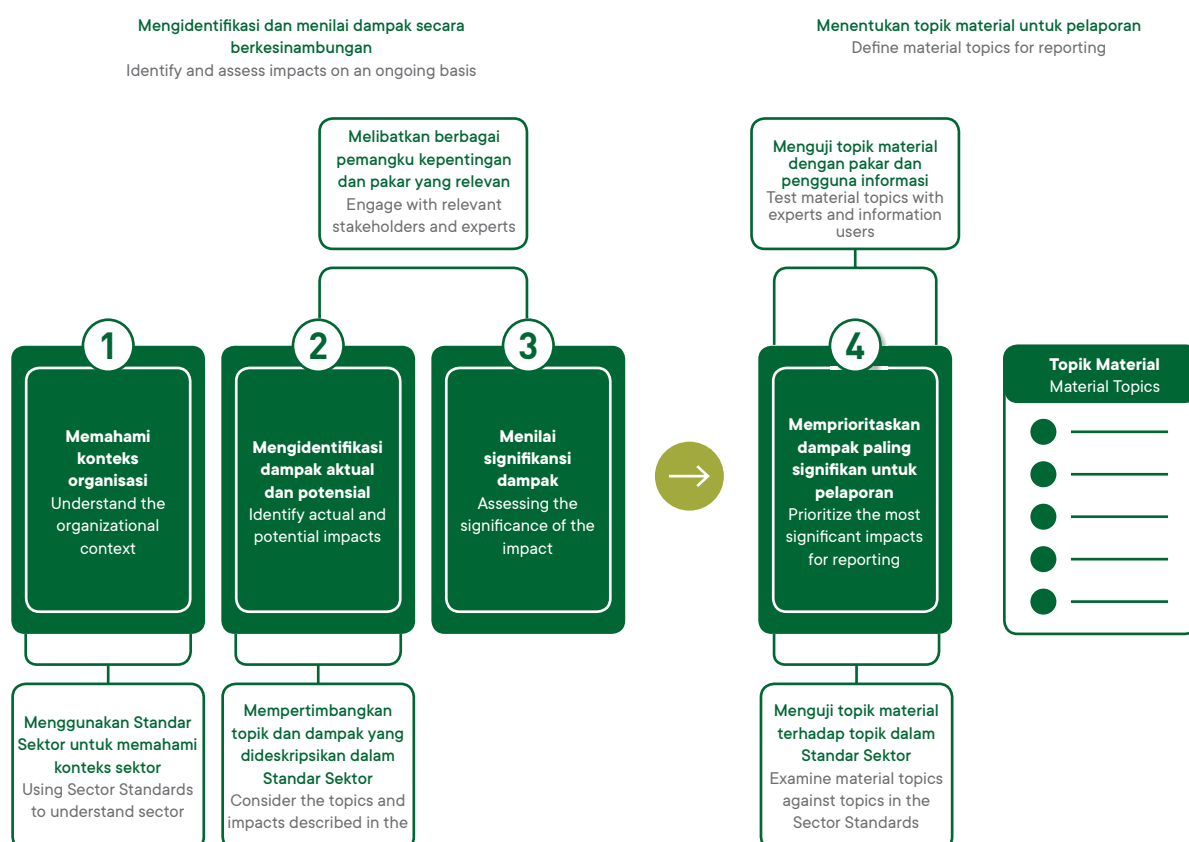
1. **Accuracy**
LPEI reports information correctly, accurately, and in sufficient detail to allow for impact assessments of business activities.
2. **Balance**
LPEI presents information without bias, ensuring a balanced representation of both positive and negative impacts of its activities.
3. **Clarity**
The corporate provides information that is easily accessible and understandable.
4. **Comparability**
LPEI selects, collects, and presents information consistently to enable the analysis of impact changes over time, including comparisons with similar organizations.

5. Kelengkapan
LPEI menyajikan informasi yang memadai sehingga memungkinkan dilakukannya asesmen dampak kegiatan selama periode pelaporan.
6. Konteks keberlanjutan
Laporan mengungkapkan kinerja LPEI dan dampak kegiatannya pada aspek-aspek utama keberlanjutan, meliputi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
7. Ketepatan waktu
LPEI melaporkan kinerja keberlanjutan secara berkala dan tepat waktu sehingga memungkinkan pembaca membuat keputusan sesuai kebutuhan.
8. Dapat verifikasi
LPEI mengumpulkan, mencatat, memilah dan menganalisa seluruh informasi dengan seksama sehingga kualitas informasi yang disajikan dapat diperiksa.

5. Completeness
LPEI presents sufficient information to allow for the assessment of business impacts throughout the reporting period.
6. Sustainability Context
The Report discloses LPEI's performance and the impacts of its activities on key sustainability aspects, including environmental, social, and economic factors.
7. Timeliness
LPEI reports sustainability performance periodically and promptly to allow stakeholders to make informed decisions.
8. Verifiability
LPEI collects, records, organizes, and analyzes all information carefully to ensure the quality of the presented information can be verified.

Bagan Alur Proses Penentuan Topik Material Laporan Keberlanjutan

Flowchart of Sustainability Report Material Topic



Setelah melalui proses diskusi internal antara Dewan Direktur dan unit bisnis lainnya, terutama tim internal keberlanjutan LPEI, terdapat perubahan dalam hal topik material. Hal ini dipandang perlu untuk lebih berfokus pada topik-topik yang benar-benar material dan dapat diungkapkan sesuai aktivitas bisnis Indonesia Eximbank. Berikut topik material yang telah diidentifikasi pada tahun 2024 ini. [GRI 2-14]

Dengan demikian, topik material yang disampaikan pada tahun sebelumnya masih relevan dengan topik material untuk tahun pelaporan 2024. Berikut topik material yang telah diidentifikasi pada tahun sebelumnya dan digunakan kembali pada tahun 2024 ini. Disampaikan juga matriks materialitas dan daftar topik material yang telah ditetapkan pada Laporan Keberlanjutan tahun sebelumnya dan akan digunakan untuk Laporan Keberlanjutan tahun pelaporan 2024 ini.

After going through an internal discussion process between the Board of Directors and other business units, especially LPEI's sustainability team, there were changes in terms of material topics. This is seen as necessary to focus more on topics that are truly material and can be disclosed according to Indonesia Eximbank's business activities. The following are the material topics that have been identified in 2024. [GRI 2-14]

Therefore, the material topics in the previous year remain relevant for the 2024 reporting year. Below are the material topics identified in the previous year, which will continue to be used in 2024. Additionally, the materiality matrix and the list of material topics in the previous Sustainability Report will be carried forward for the 2024 Sustainability Report.

Daftar Topik Material dan Batasan [OJK E-4] [GRI 2-29]

Material Topics and Boundary [OJK E-4] [GRI 2-29]

No.	Topik Material Material Topics	Alasan Materialitas Reasons for Materiality	Pengungkapan Indeks Index Disclosure		Batasan Boundary	
			SEOJK 16/2021	GRI Standard	Di dalam LPEI Internal	Di luar LPEI External
Ekonomi Economics						
1.	Kinerja Keuangan/ Ekonomi Financial/Economic Performance	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan Significant impact on stakeholders	F.2, F.3	201-1, 201- 3, 201-4	Pemerintah Government	-
2.	Praktik Pengadaan Procurement Practices	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan Significant impact on stakeholders	F.2, F.3	204-1	Pemerintah, Karyawan Government, Employees	Pemasok Suppliers
Lingkungan Environment						
3.	Energi Energy	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan Significant impact on stakeholders	F.6, F.7	302-1, 302-4	Karyawan Employees	
4.	Emisi Emission	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan Significant impact on stakeholders	F.11	305-1, 305-2	Karyawan Employees	Regulator, Nasabah Regulator, Customers
Sosial Social						
5.	Kepegawaian Employment	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan dan bagi kesinambungan usaha Significant impact on stakeholders and for business continuity	F.18	401-1, 401-2	Karyawan Employees	-
6.	Kesehatan dan Keselamatan Kerja Occupational Health and Safety	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan Significant impact on stakeholders	F.21	403-1, 403- 5, 403-8	Karyawan Employees	Masyarakat Society
7.	Pelatihan dan Pendidikan Training and Education	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan dan bagi kesinambungan usaha Significant impact on stakeholders and for business continuity	F.18	404-1, 404- 2, 404-3	Karyawan Employees	Nasabah Customers

Keterangan | Notes
Dalam penyajian tabel topik materialitas di atas, Pemerintah bertindak sebagai pemegang saham LPEI (100%)
In the materiality topic above, the Government acts as a shareholder of LPEI (100%).

Kerangka dan Strategi Keberlanjutan [OJK A.1] [GRI 2-23, 2-24, 3-3]

Sustainability Framework and Strategy [OJK A.1] [GRI 2-23, 2-24, 3-3]

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, LPEI menerapkan praktik keberlanjutan secara menyeluruh di semua aktivitas usahanya.

In conducting its business, LPEI applies the sustainability practice in all of its activities.

Dasar Utama Strategi Keberlanjutan LPEI

Main Foundation of LPEI's Sustainability Strategy

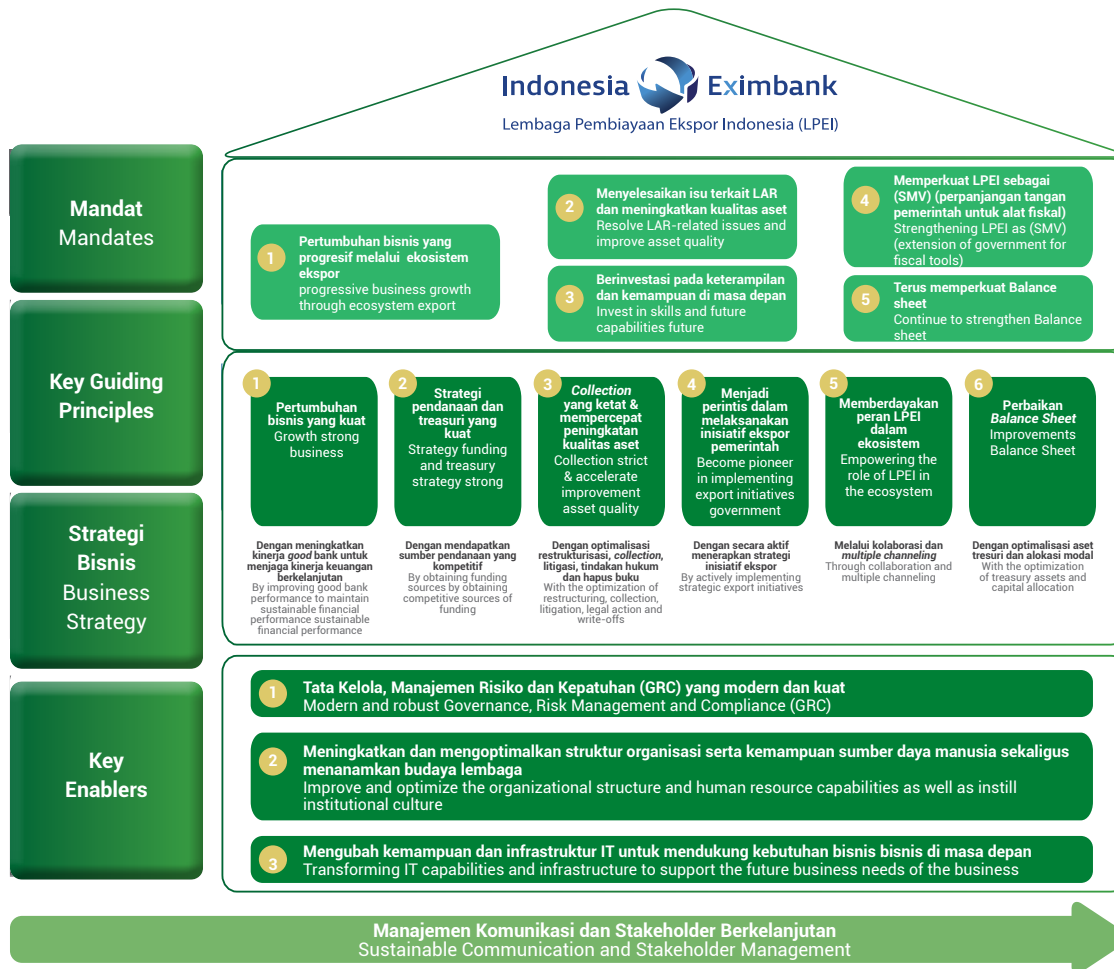
Undang-Undang No.2 tahun 2009 Aktivitas bisnis LPEI difokuskan untuk mendukung pengembangan segmen Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM)	Act No. 2 of 2009 LPEI's business activities are focused on supporting the development of the Micro, Small, Medium Enterprises, and Cooperatives (UMKM).
Rencana Aksi Nasional (RAN) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Mewujudkan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan serta pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat.	The National Action Plan (RAN) for the Sustainable Development Goals (SDGs) under the coordination of the National Development Planning Agency (Bappenas) Realizing development that ensures the continuous improvement of economic well-being for society, as well as development that maintains the sustainability of social life.
Pencapaian <i>Net Zero Emission</i> (NZE) pada tahun 2060 LPEI mengambil peran aktif sebagai agen transformasi dalam penerapan ESG, mendorong sejumlah langkah inisiatif penerapan ESG sebagai standar kinerja operasional LPEI yang berkelanjutan.	Achieving Net Zero Emission (NZE) by 2060 LPEI takes an active role as a transformation agent in implementing ESG, driving ESG initiatives as a standard for the sustainable operational performance of LPEI.

Value Proposition sebagai Target Keberlanjutan LPEI ke Depan

Value Proposition as LPEI's Future Sustainability Target

1. Beyond Financing - Menjadi pusat informasi ekspor; - Berkolaborasi dengan ekosistem ekspor; - Berorientasi pada solusi. 2. Developmental Impact - Fokus pemberian fasilitas pada sektor bernilai tambah tinggi; - Menggali potensi komoditas ekspor; - Mencetak eksportir baru yang tinggi; - Mengembangkan bisnis melalui <i>value chain</i> eksportir. 3. Sustainability - Mengintegrasikan aspek ESG ke dalam lini bisnis LPEI; - Encourage renewable projects; - Mendorong green certification; - Menerapkan green certification.	1. Beyond Financing - Becoming an export information center; - Collaborating with export ecosystem; - Focusing on solution. 2. Developmental Impact - Focusing on providing facilities for high value-added sectors; - Exploring the potential of export commodities; - Creating a high number of new exporters; - Developing businesses through the exporters' value chain. 3. Sustainability - Integrating ESG aspects into LPEI's business lines; - Encourage renewable projects; - Encourage green certification green certification; - Implementing green certification.

Strategi LPEI ke Depan LPEI's Strategy Going Forward



LPEI telah memiliki Peta Jalan (*Roadmap*) Keuangan Berkelanjutan untuk periode 2021-2025 yang berisi rencana aksi jangka pendek (satu tahun) dan jangka panjang (lima tahun) sebagai bagian dari penerapan strategi keuangan berkelanjutan. LPEI telah memiliki *Roadmap* Jangka Panjang untuk tahun 2021 - 2025 yang terdapat di dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) sebagai acuan dan pedoman bagi pegawai dalam menjalankan berbagai program dukungan pencapaian tujuan keberlanjutan.

LPEI has established a Sustainable Finance Roadmap for the 2021-2025 period, which includes short-term (one-year) and long-term (five-year) action plans as part of the of its sustainable finance strategy. LPEI has established a Long-Term Roadmap for 2021-2025, outlined in the Sustainable Finance Action Plan (RAKB), serving as a reference and guideline for employees in implementing various programs to support the achievement of sustainability goals.

Realisasi Roadmap RAKB LPEI 2021-2025
Realization of LPEI's 2021-2025 RAKB Roadmap

No	Sasaran Strategis Strategic Goals	Indikator Keberhasilan Success Indicators	Tahun Year				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersusunnya Kebijakan, Manual, SOP, atas penerapan Keuangan Berkelanjutan Preparation of Policies, Manuals, SOPs, on the implementation of Sustainable Finance	1. Tersedianya dokumen kebijakan, manual, SOP yang mengacu pada peraturan nasional maupun Internasional terkait pengelolaan lingkungan Availability of policy documents, manuals, SOPs that refer to national and international regulations related to environmental management					
		2. Terlaksananya pembentukan satuan kerja/ unit kerja yang kompeten dalam menjalankan Keuangan Berkelanjutan. Implementation of the establishment of units/ work units that are competent in carrying out Sustainable Finance.					
2	Tersedianya kapasitas sumber daya manusia untuk menjalankan Keuangan Berkelanjutan Availability of human resource capacity to manage Sustainable Finance	3. Terlaksananya <i>workshop</i> sosialisasi dan pelatihan Keuangan Berkelanjutan untuk lingkup kelembagaan. Implementation of socialization workshops and training on Sustainable Finance for the institutional scope.					
		4. Terlaksananya <i>workshop</i> sosialisasi dan pelatihan Keuangan Berkelanjutan untuk Kegiatan Usaha. Implementation of socialization workshops and training on Sustainable Finance for Business Activities.					
3	Terbangunnya proses pemenuhan aspek lingkungan dan sosial baik di dalam lingkup kelembagaan dan Kegiatan Usaha Establishment of the process of fulfilling environmental and social aspects both within the scope of institutions and business activities	5. Terlaksananya kegiatan publikasi pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan di LPEI. Implementation of publication activities on the Implementation of Sustainable Finance at Indonesia Eximbank.					
		6. Tersusunnya laporan Internal pemantauan penerapan Keuangan Berkelanjutan secara semesteran. Compilation of internal reports monitoring the Implementation of Sustainable Finance on a semiannual basis.					
		7. Penetapan sektor usaha yang akan menjadi <i>pilot project</i> Kegiatan usaha dengan memperhatikan aspek ESG. Determination of business sectors that will become pilot projects for Business Activities by taking into account ESG aspects.					
		8. Pelaksanaan Jasa konsultasi dengan penekanan aspek ESG Implementation of advisory services with emphasis on ESG aspects.					
		9. Penerapan due diligence serta perluasan sektoral Application of due diligence and sectoral expansion					
		10. Tersusunnya laporan pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan kepada OJK. Compilation of Sustainable Finance implementation report to OJK					
		11. Laporan tingkat pemenuhan atas perbaikan penerapan Keuangan Berkelanjutan sesuai tanggapan dari OJK. Report on the level of fulfillment of improvements in the Implementation of Sustainable Finance according to the response from OJK					

Realisasi Roadmap RAKB LPEI 2021-2025
Realization of LPEI's 2021-2025 RAKB Roadmap

No	Sasaran Strategis Strategic Goals	Indikator Keberhasilan Success Indicators	Tahun Year				
			2021	2022	2023	2024	2025
		12. Evaluasi atas penerapan Keuangan Berkelanjutan LPEI (Kelembagaan dan Kegiatan usaha). Evaluation of the Implementation of Sustainable Finance (Institutional and Business Activities).					
4	Terlaksananya peningkatan kapasitas LPEI untuk pemenuhan aspek lingkungan dan sosial mengikuti standar Internasional The implementation of capacity building of Indonesia Eximbank to fulfill environmental and social aspects following international standards	13. Terlaksananya kegiatan pelatihan, workshop tentang isu-isu lingkungan dan sosial secara berkesinambungan. Implementation of training activities, workshops an environmental and social issues on an ongoing basis.					
5	Terlaksananya Keuangan Berkelanjutan secara penuh dan terintegrasi dalam proses bisnis LPEI Implementation of Sustainable Finance in full and integrated in Indonesia Eximbank business processes	14. Terpenuhi pengakuan dari OJK tentang pemenuhan LPEI terhadap prinsip penerapan keuangan berkelanjutan. Fulfillment of recognition from OJK regarding Indonesia Eximbank fulfillment of the principles of implementing sustainable finance.					
6	Terpenuhi pengakuan dari OJK tentang pemenuhan LPEI terhadap prinsip penerapan keuangan berkelanjutan Fulfillment of recognition from OJK regarding Indonesia Eximbank fulfillment of sustainable finance principles practices	15. Terlaksananya akselerasi penyaluran pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi terhadap Kegiatan Usaha berkelanjutan. Implementation of accelerated distribution al financing, guarantee, insurance and advisory services to sustainable business activities.					
		16. Tersedianya sumber dana bertemakan SDGs. Availability of SDGs-themed funding sources.					
		17. Tersedianya dan diterapkannya sinkronisasi penerapan ESG Kelembagaan bagi Badan/SMV Kementerian Keuangan. Acceleration of financing, guarantees, insurance and advisory services for sustainable business activities.					

Realisasi Program RAKB 2024

Realization of the RAKB 2024

Periode Period	Aktivitas Activity	Indikator Pencapaian Indicators of Achievement	Pencapaian Achievement
Triwulan I - 2024 Quarter I - 2024	Penyusunan laporan pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan kepada OJK (laporan periode 2023). The preparation of the Sustainable Finance implementation report for OJK (2023 period).	Tersusunnya laporan pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan periode 2023 kepada OJK. The completion of the 2023 Sustainable Finance implementation report for OJK.	Telah disusun dan disampaikan Laporan Keberlanjutan Tahun 2023 secara tepat waktu sebagai bagian dari Laporan Tahunan LPEI. The 2023 Sustainability Report has been prepared and submitted on time as part of LPEI's Annual Report.
	Pelaksanaan workshop, sosialisasi dan pelatihan ESG lanjutan (pendalaman) bagi pegawai unit bisnis dan manajemen risiko (Tahap I – Kantor Pusat) Implementation of workshops, socialization, and advanced ESG training (in-depth) for business unit employees and risk management (Phase I – Head Office).	Terlaksananya workshop, sosialisasi, dan pelatihan pendalaman ESG yang diikuti oleh seluruh pegawai LPEI hingga Triwulan IV – 2024. The successful implementation of in-depth ESG workshops, socialization, and training attended by all LPEI employees until Q4 – 2024.	Telah dilakukan 2 (dua) <i>workshop</i> , sosialisasi, dan pelatihan ESG dengan rincian sebagai berikut: • <i>Training Session: Green Policy and Finance</i> oleh AEBF secara daring pada tanggal 4 Maret 2024. • Sosialisasi Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) Tahap I oleh OJK secara daring pada tanggal 6-7 Maret 2024. Two (2) ESG workshops, socialization sessions, and training have been conducted with the following details: • Training Session: Green Policy and Finance by AEBF, held online on March 4, 2024. • Socialization Session: Phase I of the Indonesian Sustainable Finance Taxonomy (TKBI) by OJK, held online on March 6-7, 2024.
	Pelaksanaan dialog/komunikasi dengan 100 Nasabah Good Bank LPEI dari 10 sektor prioritas. Implementation of dialogue/communication with 100 Good Bank LPEI customers from 10 priority sectors.	Terlaksananya dialog/komunikasi dengan nasabah-nasabah terkait dari 10 sektor prioritas. The successful implementation of dialogue/communication with relevant customers from 10 priority sectors.	Mengagendakan dialog atas hasil klasifikasi 12 Nasabah Good Bank pada 10 sektor prioritas pada bulan Juli dan Agustus sesuai dengan penempatan portofolio per tahun 2024. Klasifikasi dilakukan berdasarkan hasil ESG <i>Checklist</i> yang diperoleh pada tahun 2023 untuk kategori "Menghimbau". Hal-hal yang disampaikan antara lain himbauan terkait pemenuhan sertifikasi terkait ESG, tata kelola aspek sosial, dan pemenuhan tata kelola Nasabah. A dialogue was scheduled based on the classification results of 12 Good Bank Customers in 10 priority sectors in July and August, according to the portfolio allocation for 2024. The classification was conducted based on the ESG Checklist results obtained in 2023 for the "Encouraging" category. The discussions included recommendations regarding compliance with ESG-related certifications, governance of social aspects, and fulfillment of customer governance requirements.
	Penjajakan perolehan sumber dana bertemakan SDGs (<i>Sustainable Development Goals</i>). Exploration of obtaining funding sources with an SDGs (Sustainable Development Goals) theme.	Tersedianya mitra yang dapat memberikan sumber dana yang bertemakan SDGs pada tahun 2024 sesuai kebutuhan LPEI, salah satunya untuk <i>community development</i> . The availability of partners who can provide SDG-themed funding in 2024 according to LPEI's needs, including for community development.	Telah dilakukan penjajakan dengan 3 (tiga) lembaga dengan detail sebagai berikut: • SDG Indonesia One (SIO) dari PT Sarana Multi Infrastruktur • United Nations Development Programme (UNDP) • KfW dan alternatif penyedia dana berbasis SDG lainnya dengan prioritas pada infrastruktur atau yang sesuai dengan kebutuhan/mandat LPEI Engagement was conducted with 3 (three) institutions, with the following details: • SDG Indonesia One (SIO) from PT Sarana Multi Infrastruktur • United Nations Development Programme (UNDP) • KfW and other alternative SDG-based funding providers, with a priority on infrastructure or those aligned with LPEI's needs/mandate

Realisasi Program RAKB 2024

Realization of the RAKB 2024

Periode Period	Aktivitas Activity	Indikator Pencapaian Indicators of Achievement	Pencapaian Achievement
	Penyusunan standar penerapan ESG kelembagaan bagi Badan/Lembaga dan SMV (<i>Special Mission Vehicle</i>) Kementerian Keuangan. Development of institutional ESG implementation standards for Agencies/Institutions and Special Mission Vehicles (SMVs) under the Ministry of Finance.	Tersedianya dan dilakukannya sinkronisasi standar penerapan ESG Kelembagaan di lingkungan Badan/Lembaga dan SMV Kementerian Keuangan pada tahun 2024. The availability and synchronization of institutional ESG implementation standards within Agencies/Institutions and SMVs of the Ministry of Finance in 2024.	Telah disusun dan diterbitkan Kebijakan dan Standar Operasional Penerapan Keuangan Berkelanjutan di LPEI yang di dalamnya mencakup ESG Kelembagaan dalam 7 (tujuh) aspek Lingkungan dan 4 (empat) aspek Sosial. Selanjutnya, telah diterbitkan KMK Nomor 210 Tanggal 27 April tahun 2024 tentang Duta Transformasi Kementerian Keuangan Tahun 2024 dan ditunjuk Duta Transformasi yang baru dengan proyek "Integrasi Cross Border Digital Platform Komodoin ke dalam Mall Pelayanan Kemenkeu Sebagai jembatan Mitra Binaan UMKM Kementerian Keuangan Go Global". The Policy and Standard Operating Procedures for Sustainable Finance Implementation at LPEI have been developed and published, incorporating Institutional ESG within seven (7) Environmental aspects and four (4) Social aspects. Furthermore, Minister of Finance Decree (KMK) Number 210, dated April 27, 2024, has been issued regarding the 2024 Ministry of Finance Transformation Ambassadors, and new Transformation Ambassadors have been appointed with the project "Integration of the Komodoin Cross-Border Digital Platform into the Ministry of Finance Service Mall as a bridge for the Ministry of Finance's MSME Development Partners to Go Global."
Triwulan II - 2024 Quarter II - 2024	Pelaksanaan klasifikasi atas 100 Nasabah Good Bank LPEI dari 10 sektor prioritas dalam kategori "Menghimbau", "Mensyaratkan", dan "Membatasi". Implementation of classification for 100 LPEI Good Bank Customers from 10 priority sectors into the categories of "Encouraging," "Requiring," and "Restricting".	Tersedianya klasifikasi atas 100 Nasabah Good Bank LPEI dari 10 sektor prioritas dalam kategori "Menghimbau", "Mensyaratkan", dan "Membatasi". The availability of classification for 100 LPEI Good Bank Customers from 10 priority sectors into the categories of "Encouraging," "Requiring," and "Restricting".	Telah dilakukan klasifikasi terhadap 12 Nasabah Good Bank yang masuk dalam kategori "Menghimbau" berdasarkan hasil mapping ESG <i>Checklist</i> tahun 2023. Penerapan "Menghimbau" terhadap Nasabah dimaksud telah dikomunikasikan kepada Unit Bisnis untuk disampaikan himbauan atas masing-masing Nasabah tersebut. Classification was carried out for 12 Good Bank Customers categorized as "Encouraging" based on the ESG Checklist mapping results from 2023. The application of the "Encouraging" category for these Customers has been communicated to the Business Unit to provide recommendations accordingly.

Realisasi Program RAKB 2024

Realization of the RAKB 2024

Periode Period	Aktivitas Activity	Indikator Pencapaian Indicators of Achievement	Pencapaian Achievement
Triwulan III - 2024 Quarter III - 2024	Pemantauan realisasi penerapan ESG atas 100 Nasabah Good Bank LPEI dari 10 sektor prioritas. Monitoring the implementation of ESG for 100 LPEI Good Bank Customers from 10 priority sectors.	Terpantaunya pelaksanaan ESG oleh 100 Nasabah Good Bank dari 10 sektor prioritas dalam bentuk <i>portfolio tagging</i> . The implementation of ESG by 100 Good Bank Customers from 10 priority sectors has been monitored through portfolio tagging.	Telah dilakukan penerapan ESG terhadap 61 dari 100 Nasabah Good Bank dari 10 sektor prioritas menggunakan ESG <i>Checklist</i> . Hasil dari <i>checklist</i> akan di analisa dan digunakan sebagai dasar penyusunan <i>portfolio tagging</i> di LPEI. ESG implementation was carried out for 61 out of 100 Good Bank Customers from 10 priority sectors using the ESG Checklist. The results from the checklist will be analyzed and used as the basis for portfolio tagging at LPEI.
	Pelaksanaan <i>workshop</i> , sosialisasi, dan pelatihan ESG lanjutan (pendalaman) bagi pegawai unit bisnis dan manajemen risiko (Tahap I – Kantor Pusat). Implementation of advanced ESG workshops, socialization, and training (in-depth) for business unit employees and risk management (Phase I – Head Office).	Terlaksananya <i>workshop</i> , sosialisasi, dan pelatihan pendalaman ESG yang diikuti oleh seluruh pegawai LPEI hingga Triwulan IV – 2024. The successful implementation of in-depth ESG workshops, socialization, and training attended by all LPEI employees until Q4 – 2024.	Telah dilakukan 3 (tiga) <i>workshop</i> , sosialisasi, dan pelatihan ESG dengan rincian sebagai berikut: - Sosialisasi TKBI Tahap II oleh OJK Medan secara luring pada tanggal 24-25 April 2024. <i>Complimentary basic ESG online course</i> dengan tema "ESG Fundamentals" oleh Fitch Learning secara daring pada tanggal 1 April 2024. - Pelatihan Implementasi ESG bagi Lembaga Keuangan Indonesia oleh Infobank Institute secara daring pada tanggal 16-17 Mei 2024. There were 3 (three) ESG workshops, socialization, and training sessions conducted with the following details: - Phase II TKBI Socialization by OJK Medan in person on April 24–25, 2024. - Complimentary basic ESG online course titled "ESG Fundamentals" by Fitch Learning online on April 1, 2024. - ESG Implementation Training for Indonesian Financial Institutions by Infobank Institute online on May 16-17, 2024.
	Pelaksanaan <i>workshop</i> , sosialisasi, dan pelatihan ESG lanjutan (pendalaman) bagi pegawai unit bisnis dan manajemen risiko (Tahap II – Kantor Wilayah, Kantor Cabang, dan Kantor Pemasaran). Implementation of advanced ESG workshops, socialization, and training (in-depth) for business unit employees and risk management (Phase II – Regional Offices, Branch Offices, and Marketing Offices).	Terlaksananya <i>workshop</i> , sosialisasi dan pelatihan pendalaman ESG yang diikuti oleh seluruh pegawai LPEI dari unit bisnis dan manajemen risiko hingga Triwulan IV – 2024. The successful implementation of in-depth ESG workshops, socialization, and training attended by all LPEI employees from business units and risk management until Q4 – 2024.	Telah dilakukan 3 (tiga) <i>workshop</i> , sosialisasi, dan pelatihan ESG dengan rincian sebagai berikut: - Sosialisasi TKBI oleh OJK DSKT kepada Pegawai LPEI secara luring pada tanggal 17 Juli 2024. - Pelatihan "Membongkar Laporan ESG Menjadi Narasi Yang Menarik" oleh Kompas Institute tanggal 25 Juli 2024. - Workshop "IDX Net Zero Incubator untuk Modul 1-3" oleh Bursa Efek Indonesia pada bulan Agustus hingga Oktober 2024. There were 3 (three) ESG workshops, socialization, and training sessions conducted with the following details: - TKBI Socialization by OJK DSKT for LPEI employees in person on July 17, 2024. - Training on "Unpacking ESG Reports into Engaging Narratives" by Kompas Institute on July 25, 2024. - Workshop on "IDX Net Zero Incubator for Modules 1-3" by the Indonesia Stock Exchange from August to October 2024.

Realisasi Program RAKB 2024

Realization of the RAKB 2024

Periode Period	Aktivitas Activity	Indikator Pencapaian Indicators of Achievement	Pencapaian Achievement
	Review/penyesuaian peraturan/ketentuan/standar internal terkait penerapan ESG dan Keuangan Berkelanjutan di LPEI. Review/adjustment of internal regulations/provisions/standards related to the implementation of ESG and Sustainable Finance at LPEI.	Tersedianya peraturan internal (SPO) LPEI terkait penerapan ESG dan Keuangan Berkelanjutan yang sesuai dengan peraturan nasional dan internasional yang relevan bagi LPEI. The availability of internal regulations (SPO) at LPEI related to the implementation of ESG and Sustainable Finance that align with relevant national and international regulations for LPEI.	Untuk saat ini, peraturan/ketentuan/standar internal terkait penerapan ESG dan Keuangan Berkelanjutan di LPEI dianggap masih relevan. Di saat yang sama, LPEI secara proaktif mengikuti perkembangan yang ada, antara lain terkait dengan rencana adopsi IFRS S1 dan S2. Currently, the internal regulations/provisions/standards related to the implementation of ESG and Sustainable Finance at LPEI are still considered relevant. At the same time, LPEI proactively follows ongoing developments, including the planned adoption of IFRS S1 and S2.
	Pelaksanaan kegiatan publikasi penerapan Keuangan Berkelanjutan di LPEI. Implementation of the publication of Sustainable Finance practices at LPEI.	Publikasi oleh LPEI maupun media eksternal terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan di LPEI melalui media antara lain <i>website</i> LPEI, media sosial, dan sebagainya. Publications by LPEI or external media regarding the implementation of Sustainable Finance at LPEI through various media such as LPEI's website, social media, and others.	Telah dilakukan publikasi mengenai penerapan Keuangan Berkelanjutan LPEI sebanyak 7 (tujuh) konten di Instagram LPEI dari bulan Januari hingga Oktober 2024. Selain itu juga telah terdapat publikasi atas 5 (lima) berita di berbagai media pemberitaan <i>online</i> seperti di Kontan.co.id, Investor.id, detik.finance, Kompas.com, Medcom.id, dan sebagainya. A total of 7 (seven) publications regarding LPEI's implementation of Sustainable Finance were made on LPEI's Instagram from January to October 2024. In addition, there were 5 (five) news publications in various online news outlets such as Kontan.co.id, Investor.id, detik.finance, Kompas.com, Medcom.id, and others.

Realisasi Program RAKB 2024

Realization of the RAKB 2024

Periode Period	Aktivitas Activity	Indikator Pencapaian Indicators of Achievement	Pencapaian Achievement
Triwulan IV - 2024 Quarter IV - 2024	Evaluasi atas hasil dialog/komunikasi terkait pemetaan 10 sektor prioritas dari nasabah/mitra usaha LPEI. Evaluation of the results of dialogues/communications regarding the mapping of the 10 priority sectors from LPEI's customers/business partners.	Tersedianya <i>feedback</i> dan perbaikan yang dapat dilakukan dalam bentuk pemenuhan aspek ESG yang tertuang dalam action plan dari nasabah/mitra usaha (jika ada). Availability of feedback and improvements that can be made in the form of fulfilling ESG aspects outlined in the action plan from customers/business partners (if any).	Telah dilakukan dialog/komunikasi terkait pemetaan 10 sektor prioritas dengan rincian sebagai berikut: - Dengan 7 nasabah dari ESG <i>Checklist</i> 2023 dan diterima tambahan informasi berupa dokumen sertifikasi untuk 2 nasabah lainnya; dan - Dengan 4 nasabah dari ESG <i>Checklist</i> 2024 dan diterima total 91 ESG <i>Checklist</i> per awal November 2024. Atas dialog/komunikasi yang dilakukan akan dipilih beberapa nasabah untuk diberikan pendampingan pada tahun 2025 berdasarkan <i>feedback</i> ketika dialog/komunikasi dilaksanakan. Dialogues/communications regarding the mapping of 10 priority sectors have been conducted with the following details: - With 7 customers from the 2023 ESG Checklist, and additional information in the form of certification documents for 2 other customers; and - With 4 customers from the 2024 ESG Checklist, and a total of 91 ESG Checklists received by early November 2024. Based on the dialogues/communications, several customers will be selected to receive guidance in 2025 based on the feedback from the dialogue/communication.
	Evaluasi atas penerapan Keuangan Berkelanjutan di lingkungan LPEI (ESG Kelembagaan dan ESG Kegiatan Usaha). Evaluation of the implementation of Sustainable Finance within LPEI (Institutional ESG and Business Activity ESG).	Tersedianya <i>feedback</i> dan perbaikan yang dapat dilakukan dalam bentuk laporan evaluasi oleh Unit Kerja ESG Kelembagaan dan ESG Kegiatan Usaha kepada Board of Management. Availability of feedback and improvements that can be made in the form of an evaluation report by the Institutional ESG and Business Activity ESG Work Units to the Board of Management.	Survei kepada pegawai akan diberikan kepada Unit Kerja yang membantu penerapan ESG Kelembagaan dan ESG Kegiatan Usaha. A survey will be conducted among employees and will be provided to the Work Units that assist in the implementation of Institutional ESG and Business Activity ESG.

Realisasi Program RAKB 2024

Realization of the RAKB 2024

Periode Period	Aktivitas Activity	Indikator Pencapaian Indicators of Achievement	Pencapaian Achievement
	Pelaksanaan <i>workshop</i>, sosialisasi, dan pelatihan ESG lanjutan (pendalaman) bagi pegawai unit bisnis dan manajemen risiko (Tahap II – Kantor Wilayah, Kantor Cabang, dan Kantor Pemasaran). Implementation of workshops, socialization, and advanced ESG training (in-depth) for employees in business units and risk management (Phase II – Regional Office, Branch Office, and Marketing Office).	Terlaksananya <i>workshop</i>, sosialisasi, dan pelatihan pendalaman ESG yang diikuti oleh seluruh pegawai LPEI dari unit bisnis dan manajemen risiko hingga Triwulan IV – 2024. The workshops, socialization, and in-depth ESG training for all LPEI employees in business units and risk management are scheduled to be completed by Q4 – 2024.	Telah dilakukan 2 (dua) <i>workshop</i>, sosialisasi, dan pelatihan ESG dengan rincian sebagai berikut: • <i>Workshop</i> “IDX Net Zero Incubator untuk Modul 1-3” oleh Bursa Efek Indonesia pada bulan Agustus hingga Oktober 2024. • Pelatihan “<i>Social Return On Investment</i>” oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia tanggal 16-17 Oktober 2024. There were 2 (two) workshops, socializations, and ESG training sessions conducted with the following details: • <i>Workshop</i> “IDX Net Zero Incubator for Modules 1-3” by the Indonesia Stock Exchange from August to October 2024. • Training on “<i>Social Return On Investment</i>” by the Indonesian Banking Development Institute on October 16-17, 2024.
	Laporan tingkat pemenuhan atas perbaikan penerapan Keuangan Berkelanjutan sesuai tanggapan dari OJK (jika ada). Report on the level of fulfillment of improvements in the implementation of Sustainable Finance according to responses from OJK (if any).	Menyampaikan laporan tingkat pemenuhan atas perbaikan penerapan Keuangan Berkelanjutan sesuai tanggapan dari OJK (jika ada). Submit a report on the level of fulfillment of improvements in the implementation of Sustainable Finance according to responses from OJK (if any).	N/A (untuk saat ini). N/A (at this time).

Visi Dan Misi Keberlanjutan [OJK C.1] Sustainability Vision and Mission [OJK C.1]

Visi dan Misi Keberlanjutan LPEI

LPEI's Sustainability Vision and Mission



Visi Vision

“Menjadi Eximbank yang unggul dan kredibel dalam mendorong ekspor nasional yang berdaya saing tinggi pada tataran global dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

To become an excellent and credible Eximbank in promoting highly competitive national exports at the global level by taking into account environmental and social aspects.



Misi Mission

- Mendorong kesinambungan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekspor nasional yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.
- Memberikan layanan pembiayaan ekspor nasional dan jasa konsultasi yang berkualitas sebagai solusi terhadap kebutuhan ekspor Indonesia.
- Meningkatkan kemampuan pelaku usaha, termasuk usaha kecil dan menengah, untuk menghasilkan produk berorientasi ekspor yang unggul dan berdaya saing serta ramah lingkungan.
- Promoting the sustainability of a favorable business climate for sustainable national export growth by taking into account environmental and social aspects.
- Providing quality national export financing services and advisory services as a solution to Indonesia's export needs.
- Improve the ability of businesses, including small and medium enterprises, to manufacture excellent export-oriented products that are competitive and environmentally friendly.

Membangun Budaya Keberlanjutan [OJK F.1] [GRI 2-24]

Building a Sustainability Culture [OJK F.1] [GRI 2-24]



LPEI mengarahkan seluruh pegawai agar mengadopsi budaya *Green Office Lifestyle* dan secara konsisten menjalankan budaya ramah lingkungan. Pertama-tama dimulai dari hal-hal kecil seperti mengurangi pemakaian kertas untuk keperluan administrasi pekerjaan dan sebagai gantinya terus mengoptimalkan digitalisasi dokumen. Upaya penghematan energi listrik juga terus dilakukan dan tetap berusaha mengurangi penggunaan kemasan berbahan plastik atau *styrofoam* yang tidak bisa didaur ulang.

Dalam ranah strategis, pembangunan budaya keberlanjutan telah mencakup berbagai hal:

1. Penyusunan kebijakan, manual, dan prosedur terkait penerapan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB);
2. Penyesuaian struktur organisasi dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia terkait pengelolaan RAKB;
3. Pelaksanaan integrasi aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) atau *Environmental, Social, and Governance* (ESG) ke dalam pengelolaan portofolio pembiayaan.

Upaya membangun budaya keberlanjutan juga menjangkau pihak eksternal, yaitu pelaku usaha ekspor yang juga merupakan nasabah LPEI. Kami mendorong pelaku usaha ekspor untuk bersikap proaktif memperhatikan dan menerapkan ESG. LPEI senantiasa melakukan kegiatan pendampingan dan pelatihan agar para pelaku usaha dapat menghasilkan produk ekspor yang berdaya saing global. Realisasinya terlihat nyata pada program Desa Devisa di mana LPEI berperan dalam mendorong peningkatan kapasitas usaha, serta kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

LPEI instructed all employees to adopt a “Green Office Lifestyle” and consistently implement an eco-friendly culture. This begins with small actions such as reducing paper usage for administrative work and, instead, optimizing document digitization. Electricity conservation efforts are continuously carried out, and the use of non-recyclable plastic or styrofoam packaging will be reduced.

On a strategic level, the development of a sustainability culture has also covered various aspects:

1. Formulation of policies, manuals, systems, and procedures related to the implementation of Sustainable Finance Action Plans (RAKB);
2. Adjustment of organizational structure and fulfillment of human resource needs related to the management of RAKB;
3. Implementation of the integration of Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects into the management of the financing portfolio.

The effort to build a sustainability culture also extends to external parties, specifically export players who are LPEI's clients. We encourage exporters to be proactive in considering and implementing ESG principles. LPEI continuously provides assistance and training to help businesses produce globally competitive export products. This commitment is visibly realized through the “Desa Devisa” or Go Export Village, where LPEI plays a role in enhancing business capacity, improving community welfare, and fostering economic growth.

Kontribusi pada Pencapaian SDGs

Contribution to the Achievement of SDGs

LPEI mendukung dan berusaha berkontribusi pada seluruh pencapaian SDGs walaupun demikian, sesuai dengan aktivitas usaha dan program-program yang telah dijalankan, LPEI memiliki prioritas terhadap pencapaian dari sejumlah tujuan dari SDGs.

LPEI supports and strives to contribute to the achievement of all SDGs however, in line with its business activities and certain programs, LPEI have a priority on the achievement of certain SDGs goals.

Pencapaian Utama Tujuan SDGs

Main Achievement of SDG Goals

Tujuan Keberlanjutan Sustainability Goals	Peran LPEI LPEI's Role
	Program Desa Devisa berbasis <i>community development</i> . The Go Export Village Program which conducted based on community development.
	Pengembangan dan pelatihan pegawai, serta pelatihan atau <i>workshop</i> untuk masyarakat dalam mendukung usaha ekspor mereka. Employee development and training, as well as training or workshops for the community to support their export activities.
	Kehadiran pegawai wanita di LPEI mengindikasikan adanya kesempatan yang setara bagi wanita untuk bekerja dan mendapatkan promosi di LPEI. The presence of female employees at LPEI indicates that there are equal opportunities for women to work and receive promotions within LPEI.
	Pencapaian pembiayaan Rp11,5 triliun untuk UMBE sehingga mendukung penciptaan lapangan kerja. The financing of Rp11.5 trillion for UMBEs, thus supports job creation.
	Pembiayaan yang inklusif, membuka kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berkembang—terutama mereka yang berada di daerah terpencil. Inclusive financing creates opportunities for all segments of society to grow—especially those in remote areas.
 	Penetapan <i>Green Office Lifestyle</i> untuk mendukung efisiensi penggunaan energi dan pengurangan emisi. Enforcing the Green Office Lifestyle to support energy use efficiency and emissions reduction.
	Kolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung pelaksanaan pembiayaan hijau. Collaborating with various parties to support the initiation of green financing.



03

Tata Kelola Keberlanjutan

Sustainability Governance



Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan [GRI 2-9, 2-12, 2-13]

Those in Charge of Sustainable Finance Implementation

LPEI telah membentuk unit kerja yang mendukung penerapan ESG dan memiliki Kebijakan Keuangan Berkelanjutan (yaitu PDD No. 0012/10/PDD/2022). Walaupun demikian, terdapat sejumlah Pejabat dan Unit Kerja yang bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan sebagai berikut:

LPEI has established a work unit to support the implementation of ESG and has a Sustainable Finance Policy (i.e., PDD No. 0012/10/PDD/2022). However, there are several Officials and Work Units responsible for the implementation of Sustainable Finance as follows:

Pembagian Tanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Segregation of Responsibilities in Sustainable Finance Implementation

Unit/Pejabat Unit/Officer	Peran dan Tanggung Jawab Role and Responsibility
Dewan Direktur Board of Directors [OJK E.1] [GRI 2-11]	- Menyetujui Kebijakan terkait Keuangan Berkelanjutan. - Melakukan pengawasan terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan di LPEI - Menyetujui RAKB tahun berjalan. - Approve Policies related to Sustainable Finance. - Supervise the implementation of Sustainable Finance in Indonesia Eximbank - Approve the current year's RAKB.
Direktur Eksekutif Executive Director	- Menetapkan ketentuan pengelolaan dan penerapan aspek ESG untuk lingkup Kelembagaan dan Kegiatan Usaha. - Menetapkan struktur organisasi (satuan kerja) termasuk kewenangan dan tanggung jawab terkait pengelolaan dan penerapan ESG. - Memantau kepatuhan dan memberikan arahan perbaikan pengelolaan dan pelaksanaan ESG dalam lingkup Kelembagaan dan Kegiatan Usaha. - Establish provisions for the management and application of ESG aspects for the scope of Institutions and Business Activities. - Establish the organizational structure (work unit) including authority and responsibility related to ESG management and implementation. - Monitor compliance and provide direction for improving ESG management and implementation within the scope of Institutions and Business Activities.
Direktur Pelaksana Managing Director	- Membantu Direktur Eksekutif dalam pelaksanaan kegiatan ESG Kelembagaan dan Kegiatan Usaha. - Assist the Executive Director in the implementation of Institutions ESG activities and Business Activities.
Unit yang membidangi ESG Unit in charge of ESG	- Menyusun rancangan peraturan internal untuk menunjang pengelolaan dan penerapan ESG di LPEI. - Melakukan pengkinian peraturan internal LPEI sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memastikan pedoman ESG memenuhi ketentuan terkait lingkungan dan sosial. - Drafting internal regulations to support the management and implementation of ESG in Indonesia Eximbank. - Updating the Institution's internal regulations in accordance with applicable regulations, ensuring that ESG guidelines meet environmental and social related requirements.
Unit yang membidangi Sumber Daya Manusia Unit in charge of Human Resources	- Melakukan identifikasi kebutuhan spesifik keahlian dan juga pelatihan terkait dengan satuan kerja pengelola dan penerapan ESG. - Memastikan kecukupan pelatihan dan pembinaan pengelola lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta ketenagakerjaan kepada pegawai LPEI. - Membuat program pelatihan dan pembinaan pengelolaan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta ketenagakerjaan kepada pegawai LPEI. - Identify specific needs for expertise and also training related to the ESG management and implementation of work unit. - Ensure adequate training and coaching of environmental, occupational health and safety, and employment managers to employees. - Create training programs and guidance on environmental management, occupational health and safety, and employment for employees.

Pembagian Tanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Segregation of Responsibilities in Sustainable Finance Implementation

Unit/Pejabat Unit/Officer	Peran dan Tanggung Jawab Role and Responsibility
Unit yang mengkoordinasikan ESG dan berkolaborasi antara unit kerja yang membidangi umum, sumber daya manusia, transformation office and culture, operations, IT, dan komunikasi Unit that coordinates ESG and collaborates between work units in charge of general, human resources, transformation office and culture, operations, IT, and communication	- Membuat program aktivitas Kelembagaan dalam rangka memenuhi ketentuan pedoman ESG Kelembagaan terkait lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta ketenagakerjaan. - Melakukan identifikasi kesesuaian pedoman ESG Kelembagaan terhadap komitmen, budaya dan etika LPEI. - Melakukan sosialisasi kepada setiap unit di LPEI atas pedoman ESG Kelembagaan. - Melaksanakan program aktivitas terkait ESG Kelembagaan. - Melakukan pelaporan kepada Direktur Eksekutif mengenai realisasi hasil implementasi ESG Kelembagaan secara semesteran. - Create institutional activity programs in order to meet the provisions of Institutional ESG guidelines related to the environment, occupational health and safety, and employment. - Identify the conformity of Institutional ESG guidelines to Indonesia Eximbank's commitment, culture and ethics - Conducting socialization to each unit in Indonesia Eximbank based on Institutional ESG guidelines. - Implement activities programs related to Institutional ESG. - Reporting to the Executive Director regarding the realization of the results of Institutional ESG implementation on a semi-annual basis.
Unit yang membidangi ESG Kegiatan Usaha dan berkolaborasi antara unit yang membidangi bisnis termasuk jasa konsultasi, portofolio manajemen, dan komunikasi Unit in charge of ESG Business Activities and collaborate between work units in charge of business including advisory services, portfolio management, and communication	- Melakukan identifikasi kesesuaian antara penerapan dengan pedoman ESG Kegiatan Usaha LPEI (nasabah/ sektor). - Melakukan sosialisasi kepada unit kerja terkait di LPEI dan nasabah tertentu atas pedoman ESG Kegiatan Usaha. - Melakukan pemantauan dan pendampingan dalam pengelolaan dan penerapan ESG Kegiatan Usaha. - Melakukan pelaporan kepada manajemen mengenai realisasi hasil implementasi ESG Kegiatan Usaha secara triwulanan. - Menyusun RAKB untuk mendapatkan persetujuan Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur yang selanjutnya disampaikan kepada regulator. - Menyusun Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) untuk mendapatkan persetujuan Direktur Eksekutif yang selanjutnya dilaporkan kepada regulator. - Identify the suitability between the implementation and the ESG guidelines for Indonesia Eximbank Business Activities (Customer/sector). - Conducting socialization to related work units at Indonesia Eximbank and certain customers based on ESG guidelines for Business Activities. - Monitoring and assisting in the management and implementation of ESG Business Activities. - Reporting to management regarding the realization of the results of ESG implementation of Business Activities on a quarterly basis. - Prepare the RAKB to obtain approval from the Executive Director and Board of Directors which is then submitted to the regulator. - Prepare a Sustainability Report to obtain approval from the Executive Director, which is then reported to the regulator.

Sistem tata kelola LPEI memisahkan peran pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Direktur dan peran operasional yang dilakukan oleh Direktur Eksekutif dibantu oleh Direktur Pelaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku. [ESG G-03]

LPEI's governance system separates the supervisory role by the Board of Directors and the operational role by the Executive Directors to be assisted by the Managing Director in accordance with the prevailing regulations. [ESG G-03]

Pemilihan Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana dilakukan berdasarkan penunjukan Menteri Keuangan (KMK). Prosedur nominasi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI terdiri dari beberapa tahap. Informasi tentang tahapan nominasi tersebut dijelaskan secara lebih rinci dalam pembahasan tentang suksesi Direktur Pelaksana pada Bab Tata Kelola Lembaga. [ESG G-04, G-06]

The selection of the Board of Directors and Managing Director is based on the appointment by the Minister of Finance (KMK). The nomination procedure for the Board of Directors and Executive Director consists of several stages. More detailed information about these nomination stages is explained in the discussion on Managing Director succession in the Institution Governance chapter. [ESG G-04, G-06]

Keberagaman Komposisi Dewan Direktur dan
Direktur Eksekutif & Direktur Pelaksana [ESG G-01]

Diversity of the Composition of the Board of Directors
and Executive Director & Managing Directors [ESG G-01]

Dewan Direktur | Board of Directors

Pria | Male:
4 orang | people

Wanita | Female:
0 orang | people

Direktur | Directors

Pria | Male:
5 orang | people

Wanita | Female:
0 orang | people

Tingkat Kehadiran Dewan Direktur dan Direktur
Eksekutif & Direktur Pelaksana dalam Rapat
[ESG G-02]

Attendance Rate of the Board of Directors
and Executive Director & Managing
Directors during Meetings [ESG G-02]

Dewan Direktur | Board of Directors

Jumlah rapat internal | Total internal meetings:
32 rapat | meetings

Jumlah rapat gabungan dengan Direksi | Total joint meetings with the Board of Directors:
27 rapat | meetings

Rata-rata persentase kehadiran Dewan Direktur dalam seluruh rapat
Average attendance percentage of the Board of Directors in all meetings:
100%

Direktur | Directors

Jumlah rapat internal | Total internal meetings:
68 rapat | meetings

Jumlah rapat gabungan dengan Dewan Direktur
Total joint meetings with the Board of Directors:

27 rapat | meetings
Rata-rata persentase kehadiran Direktur dalam seluruh rapat
Average attendance percentage of Directors in all meetings:
100%

Kode Etik dan Anti Korupsi [ESG G-07, G-09]

Code of Conduct and Anti-Corruption

Kode Etik di lingkungan LPEI menjadi pedoman utama dalam membentuk budaya kerja yang berlandaskan nilai-nilai Lembaga. Pedoman ini mengatur norma dan standar perilaku yang mencerminkan profesionalisme, integritas, serta tanggung jawab dalam setiap aspek pekerjaan.

Lebih dari sekedar dokumen kebijakan, Kode Etik LPEI memberikan panduan konkret bagi seluruh pegawai dalam menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi etika berbisnis dan perilaku yang berintegritas. Setiap individu diharapkan untuk menginternalisasi prinsip-prinsip ini agar tercipta lingkungan kerja yang harmonis dan bertanggung jawab.

Penerapan Pedoman Kode Etik LPEI tidak hanya memperkuat tata Kelola yang baik, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem kerja yang mendukung keberlanjutan, saling menghormati, dan berorientasi pada kepercayaan pemangku kepentingan. Dengan demikian, Kode Etik ini menjadi elemen penting dalam perjalanan LPEI mencapai tujuan dan visi jangka panjangnya.

The Code of Conduct within LPEI serves as a fundamental guideline in shaping a work culture based on the Institution's core values. This guideline outlines the norms and standards of behavior that reflect professionalism, integrity, and responsibility in every aspect of work.

More than just a policy document, LPEI's Code of Conduct provides concrete guidance for all employees in carrying out their duties while upholding business ethics and integrity. Each individual is expected to internalize these principles to foster a harmonious and responsible work environment.

The implementation of LPEI's Code of Conduct not only strengthens good governance but also encourages the creation of a sustainable work ecosystem built on mutual respect and stakeholder trust. As such, this Code of Conduct becomes a key element in LPEI's journey toward achieving its long-term goals and vision.

Dasar Hukum Kode Etik LPEI

Legal Basis of LPEI Code of Conduct



Terkait upaya mengatasi praktik korupsi, suap, balas jasa, dan gratifikasi, LPEI menerapkan program-program sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan regulasi, mencakup kewajiban pelaporan LHKPN, pengendalian gratifikasi, strategi *anti-fraud*, Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

Informasi mengenai Kode Etik dan Anti Korupsi telah disampaikan secara rinci pada Bab Tata Kelola Lembaga.

To address corruption, bribery, kickbacks, and gratuities, LPEI implements programs in compliance with regulatory requirements, including mandatory LHKPN reporting, gratuity control, anti-fraud strategies, Anti-Money Laundering (AML), and Counter-Terrorism Financing (CTF) measures.

Detailed information on the Code of Conduct and Anti-Corruption is provided in the Corporate Governance chapter.

Kebijakan Pencegahan *Insider Trading* [ESG G-08]

Insider Trading Prevention Policy

LPEI tidak menjual saham kepada publik, sehingga pembahasan mengenai *insider trading* tidak relevan dalam laporan ini. Dengan demikian tidak terdapat kebijakan internal maupun regulasi terkait *insider trading* yang diterapkan oleh Lembaga.

LPEI does not sale its shares to the public, thus the discussion regarding insider trading is not relevant in this report. Therefore, there are no internal policies or regulations related to insider trading that apply to the institution.

Pengembangan Kompetensi Keuangan Keberlanjutan Tahun 2024 [OJK E.2] [ESG G-05] [GRI FS4, 2-17]

Improving Sustainable Finance Competency in 2024

Pada tahun 2024, sebanyak 120 pegawai telah mendapatkan pelatihan-pelatihan maupun sosialisasi terkait keuangan berkelanjutan. Para pegawai yang terlibat dalam program pelatihan mencakup para unit yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan, termasuk organ tata kelola seperti Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana, serta para pegawai lainnya.

In 2024, a total of 120 employees have received training and socialization related to sustainable finance. The employees who have participated in the training program are those from units responsible for sustainability, including governance bodies such as the Board of Directors, Executive Director, and Managing Director, as well as other employees.

Pelatihan Pengembangan Kompetensi Keuangan Berkelanjutan

Competency Development Training on Sustainable Finance

Program Pelatihan Training Program	Penyelenggara Organizer	Tanggal Pelaksanaan Training Date	Jumlah Peserta Participants
- Pelatihan <i>AEBF Green Policy and Finance</i> <i>AEBF Green Policy and Finance Training</i>	JBIC	4 Maret March 4	5 orang 5 people
Sosialisasi Taksonomi Untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) Tahap I Socialization of the Indonesian Taxonomy for Sustainable Finance (TKBI) Phase I	OJK	6-7 Maret March 6-7	2 orang 2 people
<i>Complimentary Basic ESG Online Course</i> dengan tema <i>ESG Fundamentals</i> Complimentary basic ESG online course on ESG Fundamentals	Fitch Learning	2 April April 2	4 orang 4 people
Sosialisasi Taksonomi Untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) Tahap II Socialization of the Indonesian Taxonomy for Sustainable Finance (TKBI) Phase II	OJK	24-25 April April 24-25	1 orang 1 person
Pelatihan <i>AEBF Program on Green Technology</i> Training on AEBF Program on Green Technology	the Export and Import Bank of China	15 Mei May 15	5 orang 5 people
Pelatihan Implementasi ESG bagi Lembaga Keuangan Indonesia Training on ESG Implementation for Indonesian Financial Institutions	Infobank	16-17 Mei May 16-17	7 orang 7 people
<i>Economic Outlook "The Indonesian Economic Impact"</i>	Moodys	17 Juli July 17	35 orang 35 people
Sosialisasi Buku Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia Socialization of the Taxonomy Book for Sustainable Finance in Indonesia	OJK	17 Juli July 17	54 orang 54 people
Pelatihan Membongkar Laporan ESG Menjadi Narasi yang Menarik Training on Turning ESG Reports into Engaging Narratives	Kompas Institute	25 Juli July 25	1 orang 1 person
<i>Workshop IDX Net Zero Incubator</i> untuk Modul 1-3 IDX Net Zero Incubator Workshop for Modules 1-3	Bursa Efek Indonesia	Agustus- Oktober August-October	2 orang 2 people
Pelatihan <i>Social Return on Investment</i> Training on Social Return on Investment	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia	16-17 Oktober October 16-17	2 orang 2 people
<i>Indonesia Risk Management Outlook 2025 "Pursuing Sustainable Growth Amidst Uncertainty and Volatility"</i>	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia	20 November November 20	2 orang 2 people

Pengelolaan dan Mitigasi Risiko Keuangan Berkelanjutan

[OJK E.3] [GRI 2-24] [GRI FS9]

Risk Management and Mitigation Sustainable Finance

[GRI 401-1]

Penerapan keuangan berkelanjutan memiliki tantangan dan risiko. LPEI mengelola tantangan dan risiko dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan *Four Eyes Principle* dalam mengidentifikasi, mengendalikan, memantau, dan melakukan mitigasi. Realisasinya terlihat dalam proses yang mencakup prosedur perencanaan, implementasi, pemantauan, dan pelaporan, serta kerangka kerja untuk perbaikan yang berkelanjutan.

Dalam menerapkan pengelolaan risiko, LPEI belum memiliki kebijakan khusus terkait pemberian hak suara (*voting policy*) kepada pemegang saham untuk membahas isu keberlanjutan dalam RUPS karena LPEI 100% dimiliki oleh pemerintah dan tidak terbagi atas saham sehingga tidak dilakukan pembahasan keberlanjutan dalam RUPS. [GRI FS12]

Pada tahun 2024, risiko terkait penerapan keberlanjutan dari RAKB yang telah dikelola LPEI adalah sebagai berikut:

The implementation of sustainable finance comes with challenges and risks. LPEI manages these challenges and risks by prioritizing the precautionary principle and the Four Eyes Principle in identifying, controlling, monitoring, and mitigating them. This is reflected in the process, which includes procedures for planning, implementation, monitoring, reporting, and a framework for continuous improvement.

In implementing risk management, LPEI does not yet have a specific policy related to voting policy for shareholders to discuss sustainability issues in the GMS because LPEI is 100% owned by the government and is not divided into shares so that there is no discussion of sustainability in the GMS. [GRI FS12]

In 2024, the risks associated with the implementation of sustainability from the RAKB that have been managed by LPEI are as follows:

Jenis dan Potensi Risiko Keberlanjutan
Types and Potential of Sustainability Risks

Topik Topic	Risiko Risks	Mitigasi Mitigation
Lingkungan Environment - Risiko Kredit - Credit Risk	[risiko kredit]: Risiko yang timbul dari aktivitas penyaluran kredit karena nasabah gagal memenuhinya sesuai yang dipersyaratkan dalam perjanjian pembiayaan terkait dengan pemenuhan <i>covenant</i> yang terkait dengan implementasi ESG. Credit Risk: The risk arising from public opinion or perception that LPEI is a company lacking concern for sustainable economic issues and environmental matters (if LPEI fail to implement Sustainable Finance Actions).	[risiko kredit] - Sebelum menyalurkan kredit, LPEI melakukan <i>due diligence</i> secara ketat terhadap profil risiko nasabah; - LPEI memperhatikan aspek-aspek ESG dalam menyalurkan kredit ke sektor tertentu terutama yang masuk kategori berisiko tinggi; - Melakukan pemantauan dan pembinaan kepada nasabah. Credit Risk - Before disbursing credit, LPEI conducts strict due diligence on the customer's risk profile; - LPEI considers ESG aspects when extending credit to certain sectors, especially those categorized as high-risk; - Monitoring and guidance are provided to customers.
Sosial Social - Risiko Operasional (khususnya terkait ketenagakerjaan) - Operational Risk (especially regarding employment)		
Tata Kelola Governance - Risiko Kepatuhan - Risiko Reputasi - Governance Risk - Reputation Risk	[risiko operasional]: Risiko yang timbul dalam hal pengelolaan SDM terutama terkait pemenuhan hak-hak normatif pegawai. Operational Risk: The risk arising in terms of HR management related to the fulfillment of normative rights of employees.	[risiko operasional]: - LPEI memiliki kebijakan internal yang memadai terkait pengelolaan SDM; - LPEI menjunjung tinggi komitmen terhadap keberagaman dengan memastikan terselenggaranya sistem rekrutmen dan pengembangan karier pegawai yang transparan dan objektif. Operational Risk: - LPEI has adequate internal policies related to HR management; - LPEI upholds its commitment to diversity by ensuring a transparent and objective employee recruitment and career development system.

Jenis dan Potensi Risiko Keberlanjutan

Types and Potential of Sustainability Risks

Topik Topic	Risiko Risks	Mitigasi Mitigation
	[risiko kepatuhan]: Risiko yang terjadi jika LPEI tidak dapat memenuhi ketentuan atau regulasi terkait implementasi Aksi Keuangan Berkelanjutan sehingga Lembaga mendapatkan sanksi administratif dari regulator berupa teguran atau peringatan tertulis yang dapat memengaruhi nilai tingkat kesehatan Lembaga. Governance Risk: The risk that may occur if LPEI fails to comply with provisions or regulations related to the implementation of Sustainable Finance Actions, which could result in administrative sanctions from the regulator in the form of warnings or written reprimands, potentially affecting the Institution's health rating.	[risiko kepatuhan]: - Diperlukan komunikasi dan publikasi yang intensif terkait penerapan aspek ESG dalam Keuangan Berkelanjutan kepada <i>stakeholder</i>; - Unit kerja yang bertanggung jawab atas penerapan Keuangan Berkelanjutan di Lembaga selalu mengikuti perkembangan regulasi terkait Keuangan Berkelanjutan di Indonesia dan <i>best practice</i> internasional lainnya. Governance Risk - Intensive communication and publication are required regarding the implementation of ESG aspects in Sustainable Finance to stakeholders; - The work unit responsible for implementing Sustainable Finance within the Institution continuously monitors regulatory developments related to Sustainable Finance in Indonesia as well as other international best practices.
	Risiko Reputasi: Risiko yang timbul karena adanya pendapat atau persepsi yang berkembang di publik bahwa LPEI adalah perusahaan yang tidak memiliki kepedulian terhadap isu ekonomi berkelanjutan dan isu lingkungan hidup (jika LPEI tidak menerapkan Aksi Keuangan Berkelanjutan). The risk arising from public opinion or perception that LPEI is a company lacking concern for sustainable economic issues and environmental matters (if LPEI fail to implement Sustainable Finance Actions).	Risiko Reputasi: - LPEI menerbitkan Laporan Keberlanjutan setiap tahun sebagai bentuk publikasi dan penyampaian informasi kepada <i>stakeholder</i> terkait penerapan aspek ESG dalam Keuangan Berkelanjutan; - LPEI mengembangkan program-program CSR yang berkelanjutan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kontribusi positif kepada masyarakat sekitar, salah satunya melalui program pengembangan Desa Devisa. - LPEI publishes a Sustainability Report annually as a means of communication and information disclosure to stakeholders regarding the implementation of ESG aspects in Sustainable Finance; - LPEI develops sustainable CSR programs as a way to enhance its positive contribution to surrounding communities, including through the Go Export Village development program.

Dalam mengelola, melakukan telaah berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko, Direktur Eksekutif memiliki wewenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko *Enterprise* dan eksposur Risiko yang diambil oleh LPEI secara keseluruhan. Hal ini termasuk melaksanakan kaji ulang secara berkala serta mengevaluasi dan memberikan arahan. Dewan Direktur juga memiliki wewenang dan bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko *Enterprise*, termasuk membentuk Komite Pemantau Risiko, melakukan evaluasi atas kebijakan, strategi, serta pelaksanaan kebijakan.

In managing, conducting regular reviews, and assessing the effectiveness of the risk management process, the Executive Director has the authority and responsibility for implementing the Enterprise Risk Management policy and overseeing the overall risk exposure of LPEI. This includes conducting periodic reviews, as well as evaluating and providing direction. The Board of Directors also holds the authority and responsibility for formulating Enterprise Risk Management policies and strategies, including establishing the Risk Monitoring Committee, evaluating the policies and strategies, and overseeing their implementation.

Pengelolaan Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan [OJK E.4] [GRI 2-29]

Relationship Management with Stakeholders

Pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan dilakukan dengan tujuan meningkatkan *brand awareness* serta membangun citra positif LPEI. Pengelolaan hubungan pemangku kepentingan dilaksanakan dengan mengedepankan efektivitas dan harmonisasi keterlibatan dari berbagai pemangku kepentingan LPEI yang diharapkan mampu mendukung langkah strategis dalam mendorong peran dan pelaksanaan mandat LPEI.

LPEI membina hubungan baik dan menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan dengan menerapkan strategi penguatan berupa *stakeholder engagement*, mulai dari melakukan pemetaan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan kunci bagi LPEI, sinergi dan berkomunikasi aktif dengan pemangku kepentingan, menyampaikan laporan secara tepat waktu, serta *update* isu-isu strategis LPEI. Sebagai bagian dari ekosistem ekspor, LPEI senantiasa memperkuat sinergi kelembagaan baik di dalam maupun di luar negeri untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pembiayaan Ekspor Nasional. Menjalinkan komunikasi aktif dan kolaborasi kelembagaan dengan Kementerian/Lembaga terkait di dalam negeri, *Exim Bank*, *Export Credit Agency*, Lembaga keuangan, Lembaga multilateral di luar negeri, serta terlibat aktif dalam forum-forum internasional.

Pelaksanaan *stakeholder engagement* yang efektif memungkinkan LPEI untuk mengeksplorasi isu-isu yang dianggap signifikan dan menjadi perhatian para pemangku kepentingan. LPEI kemudian menindaklanjuti dan merespon kebutuhan mereka dengan mengelola dampak dari topik dan isu yang material bagi mereka. Pengelolaan pemangku kepentingan menjadi indikator bahwa LPEI menghargai semua masukan dan perhatian mereka terhadap kelangsungan bisnis LPEI secara holistik, maupun terhadap aspek sosial dan lingkungan.

Pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan diharapkan mampu mendorong kinerja LPEI, khususnya dengan membentuk citra positif Lembaga serta memelihara reputasi Lembaga secara keseluruhan. Hal tersebut dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata Kelola yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan kewajiban.

Stakeholder relationship management is carried out to increase brand awareness and built a positive image of LPEI. The management of stakeholder relationships is conducted by prioritizing the effectiveness and harmonization of engagement with various LPEI stakeholders, who are expected to support strategic efforts in advancing the Institution's role and mandate.

LPEI fosters strong relationships and maintains communication with stakeholders through an enforcement strategy that includes stakeholder engagement. This begins with stakeholder mapping to identify key stakeholders for LPEI, building synergies and maintaining active communication, delivering timely reports, and providing updates on LPEI's strategic issues. As part of the export ecosystem, LPEI consistently enhances institutional synergies both domestically and internationally to improve the effectiveness of National Export Financing implementation. This includes active communication and collaboration with relevant Ministries/Agencies in Indonesia, Exim Banks, Export Credit Agencies, financial institutions, and multilateral organizations abroad, as well as active participation in international forums.

Effective stakeholder engagement enables LPEI to explore issues deemed significant and of concern to stakeholders. LPEI then follows up and responds to their needs by managing the impacts of material topics and issues. Stakeholder management serves as an indicator that LPEI values all input and concerns related to the continuity of its business operations holistically, as well as its social and environmental aspects.

Managing stakeholder relationships is expected to drive LPEI's performance, particularly by building a positive institutional image and maintaining the overall reputation of the institution. This is achieved by applying the principles of good governance, which include transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

Interaksi dengan Pemangku Kepentingan Stakeholders Engagement

Daftar Pemangku Kepentingan Stakeholder List	Fokus Perhatian Attention Focus	Metode & Frekuensi Pelibatan Engagement Method & Frequency	Tujuan Purpose
Pemegang Saham Shareholder	• Perkembangan nilai aset. • Penentuan RKAT • Pencapaian KPI • Pelaksanaan Hak-hak pemegang saham • Pertanggungjawaban kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial • Development of asset value • RKAT determination • Achievement of KPIs • Implementation of shareholder rights • Accountability of the economic, environmental and social performance	• Pelaporan (Laporan Kinerja Triwulanan, Laporan Realisasi Triwulanan, Laporan Keuangan Tahunan-Audited, Laporan Pengawasan Dewan Direktur. hal-hal lain yang bersifat penting) • Reporting (Quarterly Performance Report, Quarterly Realization Report, Annual Financial Report-Audited, Supervisory Report of the Board of Directors, others of an important nature)	Pembinaan dan pengawasan Coaching and supervision
Investor Surat Berharga Securities Investor	• Perkembangan nilai aset • Pencapaian target kinerja • Pertanggungjawaban kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial • The development of asset values • Achievement of performance targets • Accountability for the economic, environmental and social performance	• Pertemuan investor • Publikasi melalui <i>website</i> • Investor meeting • Publication through the website	Keterbukaan informasi Information disclosure
Pegawai Employees	• Pemenuhan hak-hak pegawai • Kesetaraan kesempatan • Proses rekrutmen • Pengembangan karier • Paket remunerasi yang memadai dan bersaing • Penyelesaian pengaduan • Fulfilment of employee rights • Equality of opportunity • Recruitment process • Career development • Adequate and competitive remuneration package • Complaint Resolution	• Survei <i>employee engagement</i> secara berkala • Regular employee engagement surveys	• Sarana perbaikan pelaksanaan sistem kepegawaian dan meningkatkan pengaduan pegawai dan pemenuhan aspek K3 • Means of improving the implementation of the personnel system and increasing employee satisfaction and fulfillment of OHS aspects
Nasabah/Debitur Customer/Debtor	• Kualitas Produk • Kualitas Layanan • Product Quality • Quality of Service	• Pertemuan berkala <i>Focus Group Discussion</i> • Periodic meetings Focus Group Discussion	• Menampung dan menyelesaikan pengaduan nasabah • Mengidentifikasi kepuasan nasabah dan peningkatan kualitas layanan • Pembinaan dan peningkatan hubungan bisnis dan edukasi layanan LPEI • Accommodating and resolving customer complaints • Identify customer satisfaction and improve service quality • Coaching and improving business relations and educating LPEI's services

Interaksi dengan Pemangku Kepentingan

Stakeholders Engagement

Daftar Pemangku Kepentingan Stakeholder List	Fokus Perhatian Attention Focus	Metode & Frekuensi Pelibatan Engagement Method & Frequency	Tujuan Purpose
Masyarakat, LSM dan Pemerintah Daerah Communities, NGOs and Local Government	- Dampak dan kinerja lingkungan - Informasi mengenai kegiatan LPEI - Kontribusi LPEI terhadap pembangunan daerah sekitar - Environmental impact and performance - Information on the activities of the Institution - LPEI's contribution to the development of the surrounding area	- Musrenbang - Pertemuan dengan tokoh masyarakat - Sarana Pengaduan Masyarakat - Musrenbang - Meetings with community leaders - Community Complaint Facility	- Kerja sama strategis dalam rangka tanggung jawab sosial - Partisipasi pada pelestarian lingkungan - Sosialisasi kebijakan dan program CSR - Strategic cooperation for social responsibility - Participation in environmental conservation - Dissemination of CSR policies and programs
Regulator Regulator	- Pengelolaan dampak ekonomi, lingkungan dan sosial - Kepatuhan terhadap regulasi - Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat - Management of economic, environmental and social impacts - Regulatory compliance - Community Assistance and Empowerment	- Komunikasi berkala - Konsultasi berkala - Periodic communication - Periodic consultations	- Memantau pemenuhan regulasi dari regulator - Pemantauan pendampingan dan penyampaian pemenuhan laporan kepada regulator (seperti laporan wajib kepada OJK, pelaporan LHKPN kepada KPK, Gratifikasi kepada KPK melalui sistem GOL dan pelaporan kepada PPAATK) - Pendampingan atas forum-forum diskusi mengenai pembahasan rancangan peraturan terkait LPEI dan mengikuti sosialisasi peraturan yang diselenggarakan oleh regulator - Monitor regulatory compliance from regulators - Monitoring, mentoring and submission of reporting fulfillment to regulators (such as mandatory reports to OJK, LHKPN reporting to the KPK, Gratification to the KPK through the GOL system and reporting to PPAATK) - Assistance in discussion forums regarding the discussion of draft regulations related to the Institution and following the socialization of regulations organized by the regulator
Media Media	- Menyampaikan informasi terkait kinerja Lembaga ke masyarakat luas - Hubungan harmonis seluruh pihak - Sosialisasi program/kebijakan Lembaga terkait ekspor - Convey information related to the performance of the Institution to the wider community - Harmonious relationship of all parties - Socialization of the Institution's program/policy related to export	- Media monitoring harian - Media Gathering - Siaran pers - Media Briefing - Media Visit - Survey Media - Daily media monitoring - Media gathering - Press release - Media Briefing - Media Visit - Media Survey	- Pemantauan - Keterbukaan Informasi - Manajemen Isu - Stakeholder engagement - Monitoring - Information Disclosure - Issue Management - Stakeholder engagement

Tantangan dan Peluang dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan [OJK E.5]

Challenges and Opportunities in Implementing Sustainable Finance

Seiring dengan meningkatnya isu-isu keberlanjutan dan risiko terkait penerapan keuangan berkelanjutan, LPEI juga mencermati munculnya sejumlah tantangan dan peluang terutama pada tahun 2024. Tantangan dan peluang tersebut adalah sebagai berikut:

Tantangan:

- LPEI Belum Memiliki Kelengkapan Sumber Daya Sebagai Pendukung Penerapan Keuangan Berkelanjutan Secara Mendalam.
LPEI masih menghadapi sejumlah tantangan dalam kelengkapan sumber daya untuk penerapan keuangan berkelanjutan. Saat ini Lembaga belum memiliki sumber daya manusia yang kompeten secara menyeluruh dalam bidang keberlanjutan, selain itu sistem informasi yang mendukung proses pemantauan aspek keberlanjutan belum terintegrasi, ketersediaan data ESG untuk analisa risiko masih terbatas serta belum adanya pengembangan alat ukur risiko ESG yang spesifik untuk Lembaga.
- Proses Transisi Menuju Penyaluran Pembiayaan Hijau Maupun Berkelanjutan Belum Menjadi Prioritas.
Penerapan Keuangan Berkelanjutan di LPEI menghadapi tantangan dalam proses transisi menuju penyaluran pembiayaan hijau maupun berkelanjutan dan terdapat keterbatasan pada kapasitas internal untuk memenuhi persyaratan dari sumber pendanaan hijau yakni dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi proyek-proyek yang memenuhi kriteria.

Peluang:

Terdapat peluang atas kemungkinan Investasi hijau atau berkelanjutan dari Lembaga dalam negeri maupun luar negeri untuk mendorong proses transisi dan transformasi menuju ekonomi berkelanjutan dan mengurangi dampak perubahan iklim.

Upaya yang telah dilakukan LPEI untuk menghadapi tantangan dan memaksimalkan peluang adalah LPEI secara bertahap berusaha memasukkan unsur-unsur Keuangan Berkelanjutan termasuk ESG ke dalam aspek kegiatan usaha dan kelembagaan. Termasuk di dalamnya melakukan peninjauan dan penyempurnaan kebijakan internal yang dimiliki, peningkatan kapasitas Pegawai dengan melakukan pelatihan atau sosialisasi secara berkala terkait Keuangan Berkelanjutan maupun ESG, perluasan pemetaan kegiatan usaha, dan pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berdasarkan ESG dan pilar-pilar TJSL.

As sustainability issues and risks related to sustainability finance implementation continue to grow, LPEI is also closely monitoring the emergence of various challenges and opportunities, especially in 2024. These challenges and opportunities are as follows:

Challenges:

- LPEI Has Yet to Fully Equip the Resources Needed to Support Comprehensive Implementation of Sustainable Finance.
LPEI continues to face several challenges in terms of resource readiness for implementing sustainable finance. Currently, the Institution does not yet have fully competent human resources in the field of sustainability. In addition, the information systems supporting the monitoring of sustainability aspects are not yet integrated, ESG-related data for risk analysis remains limited, and there is no specific ESG risk measurement tool developed for the Institution.
- The Transition Process Toward Green and Sustainable Financing Has Yet to Become a Priority.
The implementation of sustainable finance at LPEI faces challenges in the transition process toward green and sustainable financing and there are limitations in the internal capacity to meet the requirements of green funding sources, particularly in identifying and evaluating eligible projects.

Opportunities:

There are opportunities for green or sustainable investments from both domestic and international institutions that could support the transition and transformation process toward a sustainable economy and reduce the impact of climate change.

LPEI has made several efforts to address these challenges and maximize the opportunities by gradually integrating elements of sustainable finance, including ESG, into its business and institutional activities. This includes reviewing and improving existing internal policies, enhancing employee capacity through regular training and socialization related to sustainable finance and ESG, expanding the mapping of business activities, and implementing Corporate Social Responsibility (CSR) programs based on ESG and TJSL pillars.



04

Kinerja Ekonomi

Economic Performance



Komitmen dan Kebijakan Mengelola Kinerja Ekonomi

[GRI 3-3]

Commitment and Policies in Managing Economic Performance [GRI 3-3]

Kinerja ekonomi yang positif merupakan hal penting bagi LPEI. Hal ini dicapai dengan secara bertahap menerapkan menerapkan strategi pengembangan usaha yang berlandaskan pada prinsip Keuangan Berkelanjutan dan mendukung pencapaian SDGs.

LPEI menetapkan target-target operasional dan bisnis serta target kinerja keberlanjutan dalam dokumen Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2024. Dalam dokumen-dokumen tersebut, secara keseluruhan telah ditetapkan sejumlah kriteria penting bagaimana aktivitas usaha LPEI dapat memberikan manfaat ekonomi yang maksimal kepada seluruh pemangku kepentingan mencakup pemegang saham, para pegawai, dan masyarakat.

Strategi jangka menengah (2024-2025) yang telah ditetapkan LPEI berfokus pada fase *rebalancing* untuk peningkatan kinerja bisnis dan mengembangkan model bisnis baru yang berbasis ekosistem demi mencapai tujuan jangka panjang, yakni "*Enabling Export, Empowering Nation*". Penjelasan strategi telah ditampilkan secara rinci pada Laporan Tahunan, namun secara singkat, *value proposition* yang ditawarkan LPEI untuk mendorong ekspor nasional, yakni:

1. *Beyond Financing*
2. *Developmental Impact*
3. *Sustainability*

LPEI menjalankan strategi keuangan dan mengelola aspek ekonomi di bawah arahan Direktur Pelaksana yang membidangi Keuangan, Operasional, dan IT. LPEI juga melakukan audit terhadap laporan keuangan oleh auditor eksternal dari KAP dan untuk tahun pelaporan yang berakhir pada 31 Desember 2024, laporan keuangan LPEI telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dan memperoleh opini wajar dalam semua hal yang material. Laporan keuangan dan pengungkapan kinerja ekonomi disampaikan dalam Laporan Tahunan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan melalui situs web LPEI.

A positive economic performance is crucial for LPEI. This is achieved by gradually implementing business development strategies based on Sustainable Finance principles and supporting the achievement of the SDGs.

LPEI sets operational and business targets, as well as sustainability performance targets, in its Business Plan, Annual Work and Budget Plan (RKAT), and Sustainable Finance Action Plan (RAKB) 2024. These documents establish key criteria to ensure that LPEI's business activities deliver maximum economic benefits to all stakeholders, including shareholders, employees, and the community.

The medium-term strategy (2024-2025) from LPEI focuses on the rebalancing phase to enhance business performance and develop a new ecosystem-based business model to achieve its long-term goal: "*Enabling Export, Empowering Nation*." The detailed strategy is outlined in the Annual Report, but in summary, the value propositions offered by LPEI to drive national exports are:

1. *Beyond Financing*
2. *Developmental Impact*
3. *Sustainability*

LPEI executes financial strategies and manages economic aspects under the guidance of Executive Director overseeing Finance, Operation, and IT. LPEI also conducts financial audits performed by an external auditor from a Public Accounting Firm (KAP). For the reporting year ending December 31, 2024, LPEI's financial statements have been audited by KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan and obtained an unqualified opinion in all material respects. Financial statements and economic performance disclosures are published in the Annual Report, which stakeholders can access through LPEI's website.

Target dan Pencapaian

Target and Achievement

PENCAPAIAN KINERJA USAHA

Keberadaan LPEI di Indonesia turut memberikan dampak positif bagi para pemangku kepentingan. Terdapat sejumlah target yang telah ditetapkan setiap tahunnya untuk memastikan bahwa LPEI mampu berkontribusi bagi perkembangan ekonomi melalui pencapaian target pembiayaan, penjaminan, dan asuransi, dengan tetap mempertahankan keberlangsungan usaha untuk pemegang saham melalui pencapaian aset, ekuitas, dan laba.

BUSINESS PERFORMANCE

The presence of LPEI in Indonesia has a positive impact on its stakeholders. Each year, several targets are set to ensure that LPEI contributes to economic development through the achievement of financing, guarantee, and insurance targets, while maintaining business sustainability for shareholders by achieving asset, equity, and profit targets.

TARGET DAN PENCAPAIAN KINERJA EKONOMI [OJK F.2]

Dalam Rp juta | In Rp million

Uraian Description	2024		2023		2022	
	Target	Achievement	Target	Achievement	Target	Achievement
Jumlah Aset Total Assets	57.635.196	49.112.996	79.152.363	51.349.422	88.896.131	83.815.813
Jumlah Pembiayaan Total Financing	58.600.074	56.108.451	83.607.176	73.823.211	88.231.361	83.636.003
Jumlah Penjaminan (termasuk PEN) Total Guarantee (including PEN)	11.963.049	8.146.399	13.522.023	10.895.141	11.441.609	12.428.806
Jumlah Asuransi* Total Insurance	13.186.873	10.859.032	12.552	12.019	12.100.241	11,79
Jumlah Ekuitas Total Equity	19.005.398	13.992.630	27.010.912	8.761.467	30.629.927	26,868,244
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net (Loss) Profit	243.918	232.525	152.633	(18.114.327)	456.362	(3.114.554)

Keterangan | Notes:

*) Total Asuransi tahun 2022 merupakan plafon (ceiling) dan bukan volume sehingga terdapat perbedaan angka.

*) The Total Insurance in 2022 is based on the plafond (ceiling) instead of volume, which results in a difference in the total figures.

KINERJA KEBERLANJUTAN

LPEI memiliki aktivitas usaha penyaluran pembiayaan (*sustainable financing*) untuk kegiatan usaha berwawasan lingkungan sebagai realisasi dari komitmen untuk menjadi agen perubahan dalam ekonomi keberlanjutan yang mendukung langkah transisi energi di Indonesia. LPEI terus berupaya untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan hijau untuk sektor-sektor yang berkelanjutan dan memenuhi kriteria Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) sesuai dengan POJK 51/2017 dan Kebijakan ESG LPEI.

SUSTAINABILITY PERFORMANCE

LPEI conducts financing activities (sustainable financing) for eco-friendly business activities as part of its commitment to becoming an agent of change in sustainable economics, supporting Indonesia's energy transition efforts. LPEI continues to enhance green financing for sustainable sectors that meet the criteria of Environmentally Friendly Business Activities (KUBL) in accordance with POJK 51/2017 and LPEI's ESG Policy.

Kebijakan Penilaian, Penyaringan, Pemantauan Risiko Pembiayaan Keberlanjutan [GRI FS1, FS2, FS3, FS5]

Policy on Assessment, Screening, and Monitoring of Sustainable Financing Risk

[GRI FS1, FS2, FS3, FS5]

Dalam mengelola portofolio, LPEI secara bertahap melakukan analisa atas pembiayaan yang sudah diberikan dan melakukan pemetaan terhadap kegiatan-kegiatan usaha nasabah yang berpotensi memiliki dampak negatif maupun positif terhadap lingkungan dan sosial. Hal ini karena LPEI belum memiliki portofolio pembiayaan hijau untuk sektor-sektor yang berkelanjutan.

Sebagaimana diatur dalam Standar Pedoman Operasional Pembiayaan, LPEI telah mempunyai mekanisme analisis pembiayaan yang tertuang dalam Memorandum Analisa Pembiayaan yang menganalisa kualitas dan kuantitas dari calon nasabah. Aspek-aspek yang dipertimbangkan antara lain:

1. Pendirian, perizinan, kewenangan dan *track record* perusahaan/nasabah;
2. Industri dan usaha nasabah;
3. Karakter manajemen;
4. Pemasaran;
5. Teknis Produksi; dan
6. Aspek sosial dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

LPEI telah mengatur terkait *Industry Financing Reference* (IFR) yang juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. IFR berfungsi sebagai salah satu alat untuk menyeleksi calon nasabah berdasarkan standar/*benchmark* pada masing-masing industri. Penerapan IFR diharapkan membantu LPEI mendapatkan nasabah yang berkualitas dan sesuai dengan *risk appetite* LPEI.

Salah satu parameter dalam IFR berisi aspek lingkungan, yaitu kriteria standar aspek lingkungan pada setiap industri dan aspek pengembangan, yang juga mencakup dampak usaha calon nasabah terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.

LPEI belum memiliki komite khusus untuk mengawasi risiko keberlanjutan. Direktur Pelaksana tetap berperan dalam mengawasi risiko, namun pengawasan secara khusus menjadi tanggung jawab Komite Pembiayaan yang mengawasi risiko secara keseluruhan, termasuk risiko keberlanjutan.

LPEI belum memiliki produk pembiayaan berkelanjutan, namun secara bertahap melakukan analisa melalui *ESG Checklist* yang diisi berdasarkan situasi nasabah melalui dialog/komunikasi langsung dengan beberapa nasabah. Praktik ini akan dilakukan secara bertahap ke seluruh nasabah di tahun mendatang.

In managing its portfolio, LPEI gradually analyzes the financing and maps out customer business activities that may have either a negative or positive impact on the environment and society. This is done because LPEI has not yet established a green financing portfolio for sustainable sectors.

As stipulated in the Financing Operational Guideline, LPEI has established a financing analysis mechanism outlined in the Financing Analysis Memorandum, which evaluates both the qualitative and quantitative aspects of prospective customers. The aspects considered include:

1. Establishment, licensing, authority, and track record of the company/customer;
2. Industry and business activities of the customer;
3. Management character;
4. Marketing;
5. Production techniques; and
6. Social aspects and Environmental Impact Analysis (AMDAL).

LPEI has also established an Industry Financing Reference (IFR), which considers environmental and social aspects. The IFR serves as a tool to screen potential customers based on industry-specific standards and benchmarks. The implementation of IFR is expected to assist LPEI in acquiring high-quality customers that align with LPEI's risk appetite.

One of the key parameters in IFR includes environmental aspects, specifically the standard criteria for environmental aspects in each industry, as well as development aspects, which assess the impact of prospective customers' businesses on Indonesia's economic growth.

LPEI has not yet established a dedicated committee to oversee sustainability risks. The Managing Director continues to play a role in risk supervision, however, specific oversight is the responsibility of the Financing Committee, which oversees overall risks, including sustainability risks.

LPEI has not yet developed sustainable financing products; however, it is gradually analyzing using the ESG Checklist, which is completed based on the customer's situation through direct dialogue/communication with selected customers. This practice will be progressively implemented for all customers in the coming years.

Kinerja Portofolio Pembiayaan Keuangan Berkelanjutan [OJK F.3]

Sustainable Financing Performance [OJK F.3]

Pada tahun 2024, LPEI memberikan penyaluran dana kepada 424 nasabah, dan seluruh nasabah telah melewati proses penyaringan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di LPEI. [GRI FS11]

In 2024, LPEI disbursed funds to 424 customers, all of whom underwent a screening process in compliance with LPEI's applicable regulations. [GRI FS11]

Pada tahun 2024, kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah 5 Program Pengembangan Desa Devisa dan 2 Kelompok Kegiatan Program CPNE.

In 2024, activities related to improving community welfare were the adalah 5 Program of Go Export Village Development and 2 Groups of CPNE Activities Program.

Kinerja portofolio pembiayaan dan/atau investasi pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan keuangan berkelanjutan selama tahun 2024, melalui penyaluran pembiayaan untuk sektor UMKM berorientasi ekspor adalah sebagai berikut:

The performance of the financing portfolio and/or investments in financial instruments or projects aligned with sustainable finance implementation in 2024, through financing disbursement for export-oriented MSMEs, is as follows:

PORTOFOLIO PEMBIAYAAN KEUANGAN BERKELANJUTAN [OJK F.3] [GRI FS6, FS8, FS7, FS10]

SUSTAINABLE FINANCE PORTFOLIO [OJK F.3] [GRI FS6, FS8, FS7, FS10]

Uraian Description	Satuan Unit	Jumlah Penyaluran Pembiayaan Total Loan Disbursement		
		2024	2023	2022
Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Number of activities related to improving community welfare	Jumlah Total	5 Program Pengembangan Desa Devisa dan 2 Kelompok Kegiatan Program CPNE. 5 Go Export Village Development Programs and 2 CPNE Program Activity Groups.	8 Program Pengembangan Desa Devisa dan 4 program CPNE 8 Go Export Village Development Programs and 4 CPNE Programs	6 Program Pengembangan Desa Devisa dan 7 program CPNE 6 Go Export Village Development Programs and 7 CPNE Programs
Penyaluran dana: kredit/pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Funds disbursement: credit/financing of sustainable business activities for Micro, Small, and Medium Enterprise	Rp triliun Rp trillion	11,55	14,49	14,74
Persentase total pembiayaan atas kegiatan usaha berkelanjutan terhadap total kredit LPEI keseluruhan Percentage of total lending of sustainable business activities to total loans of the LPEI	%	20,58	19,63%	17,62%

Nilai Ekonomi Langsung [GRI 201-1]

Direct Economic Value [GRI 201-1]

Jumlah nilai ekonomi yang dihasilkan LPEI didapatkan dari pendapatan yang terdiri dari pendapatan bunga dan usaha syariah. Sesuai dengan statusnya sebagai SMV di bawah Kementerian Keuangan RI, LPEI menghasilkan pendapatan bunga dari penugasan umum dan penugasan khusus, sesuai arahan pemerintah sebagai pemegang saham pengendali. LPEI juga dapat menjalankan kegiatan usaha dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah sesuai regulasi UU No. 2/2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Pendapatan operasional lainnya mayoritas berasal dari pendapatan dari asuransi. Pendapatan lainnya yang tidak berasal dari aktivitas operasional dikategorikan sebagai pendapatan bukan operasional dan dalam kondisi tertentu.

Di sisi lain, jumlah nilai ekonomi yang didistribusikan mencakup pembayaran beban untuk pemasok, gaji kepada karyawan, pajak untuk pemerintah, dan kontribusi sosial melalui program TJSL. Pada tahun 2024, nilai ekonomi yang ditahan mencapai Rp2,47 triliun. Nilai ini lebih rendah 52,6% dari tahun sebelumnya yang terutama terjadi karena penurunan pendapatan. Nilai ekonomi yang didistribusikan meningkat 219,5% seiring dengan peningkatan pada penyaluran dana TJSL bagi masyarakat.

LPEI terus mempertahankan nilai positif pada nilai ekonomi yang ditahan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Hal ini membuktikan bahwa LPEI selalu menghasilkan kinerja kinerja konsisten untuk menghasilkan pendapatan dan memberikan nilai bagi pemegang saham, namun juga berkontribusi terhadap ekonomi lokal dengan memenuhi kewajiban dan mendukung pengembangan masyarakat.

NILAI EKONOMI LANGSUNG YANG DIHASILKAN DAN DIDISTRIBUSIKAN [GRI 201-1]

Dalam Rp miliar | In Rp billion

Uraian Description	2024	2023	2022
Pendapatan Bunga Interest Income			
Penugasan Umum General Assignment	3.064,60	3.643,72	2.711,98
Penugasan Khusus National Interest Accounts	312,31	408,32	404,98
Jumlah Total	3.376,91	4.052,03	3.116,96
Nilai Ekonomi yang Dihasilkan Economic Value Generated	3.376,91	4.052,03	3.116,96

The total economic value generated by LPEI is derived from revenue, which consists of interest income and sharia business income. As an SMV under the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, LPEI generates interest income from both general and special assignments, following the directives of the government as the controlling shareholder. LPEI is also authorized to conduct business activities based on sharia principles in accordance with Act No. 2/2009 on the Indonesia Export Financing Institution.

Other operating income primarily comes from insurance revenue. Non-operating income, which is not derived from operational activities, is categorized as non-operating income, and under certain conditions.

On the other hand, the amount of economic value distributed includes expenses of payment to suppliers, employee salaries, taxes to the government, and social contributions through CSR programs. In 2024, the retained economic value amounted to Rp2.47 trillion. This figure is 52.6% lower than the previous year, primarily due to a decline in revenue. Meanwhile, the distributed economic value increased by 219.5%, in line with the rise in CSR fund allocation for the community.

LPEI has consistently maintained a positive retained economic value over the past three years. This demonstrates that LPEI continues to deliver stable performance in generating revenue and providing value to shareholders while also contributing to the local economy by fulfilling its obligations and supporting community development.

DIRECT ECONOMIC VALUE GENERATED AND DISTRIBUTED [GRI 201-1]

Dalam Rp miliar | In Rp billion

Uraian Description	2024	2023	2022
Beban Umum, Administrasi dan Beban Lain-lain General, Administrative and Other Expenses	247,56	311,74	293,87
Gaji dan Tunjangan Salaries and Benefits	437,52	482,29	468,62
Pembayaran kepada Pemerintah (PPh, PPn dan PnPB) Payment to the Government (PPh, PPn and PnPB)	216,39	282,17	278,13
Penyaluran Dana CSR Bagi Masyarakat Distribution of CSR Funds for the Community	5,51	1,68	2,61
Nilai Ekonomi yang Didistribusikan Economic Value Distributed	906,98	283,85	1.043,23
Nilai Perolehan Ekonomi yang Ditahan Retained Economic Value	2.469,93	3.768,18	2.073,73

Kerja Sama Dengan Mitra Bisnis

Cooperation With Partners

LPEI bekerja sama dengan mitra, pemasok, atau vendor untuk berbagai keperluan bisnis mencakup produk dan jasa. Kerja sama ini memberikan dampak ekonomi secara tidak langsung dalam mata rantai bisnis dan menjadi salah satu upaya LPEI untuk mendukung ketahanan perekonomian nasional.

Proses kerja sama dilakukan secara transparan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan praktik pencegahan kecurangan (*fraud*) seperti korupsi dan lainnya. Upaya ini dilakukan dengan memastikan seluruh mitra telah melalui proses evaluasi yang meliputi aspek kemampuan keuangan dan operasional, pemenuhan regulasi (ketenagakerjaan dan lainnya), serta kualitas barang dan jasa. Seluruh rekan kerja, vendor, dan mitra LPEI yang saat ini telah menjalin kerja sama, dipastikan tidak memiliki benturan kepentingan dan tidak melakukan praktik terkait pemberian atau perjanjian lainnya kepada manajemen dan karyawan selain dari kontrak kerja sama yang telah disepakati.

Selain itu, dalam kaitannya dengan komitmen pelestarian lingkungan, LPEI juga menerapkan ESG di dalam seluruh kegiatan yang dilakukan LPEI melalui *green office lifestyle culture*. [GRI 308-1]

Pada tahun 2024, LPEI merealisasikan pengadaan barang dan jasa yang seluruhnya atau 100% merupakan pengadaan untuk pemasok lokal. [GRI 204-1]

LPEI collaborates with partners, suppliers, and vendors for various business needs, including products and services. This collaboration creates indirect economic impacts within the business supply chain and serves as one of LPEI's efforts to support national economic resilience.

The collaboration process is conducted transparently, in accordance with applicable regulations, and considers fraud prevention practices such as corruption and other unethical activities. This is achieved by ensuring that all partners undergo an evaluation process, which includes assessments of financial and operational capabilities, regulatory compliance (including labor regulations), and the quality of goods and services. All business partners, vendors, and suppliers currently engaged with LPEI are verified to have no conflicts of interest and do not engage in any agreements or practices with management and employees beyond the agreed contractual cooperation.

In addition, as part of its commitment to environmental conservation, LPEI also implement ESG in all its activities through a green office lifestyle culture. [GRI 308-1]

In 2024, LPEI realized the procurement of goods and services entirely from local suppliers, achieving 100% local procurement. [GRI 204-1]

Kepuasan Nasabah [GRI 3-3]

Customer Satisfaction [GRI 3-3]

Bisnis pembiayaan ekspor-impor membuat LPEI lebih banyak berhubungan dengan pelanggan korporasi. LPEI berkomitmen terhadap kepuasan nasabah dengan memastikan bahwa setiap aspek dari produk dan layanan dapat mendukung aktivitas usaha mereka dengan maksimal.

Komitmen LPEI untuk selalu memberikan pelayanan prima kepada nasabah termasuk dalam hal penanganan pengaduan nasabah berlandaskan pada sejumlah rujukan dan kebijakan internal yang berlaku di lingkungan LPEI, yaitu:

Regulasi Eksternal:

1. PMK No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI;
2. POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
3. POJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Nasabah di Sektor Jasa Keuangan;
4. SEOJK No. 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Nasabah di Sektor Jasa Keuangan; dan
5. PBI No. 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan Konsumen BI.

Regulasi Internal:

1. Peraturan Dewan Direktur (PDD) No. 0017/PDD/12/2022 tentang Kebijakan Manajemen Risiko (Enterprise Risk Management) LPEI; dan
2. Peraturan Direktur Eksekutif (PDE) No. 0022/PDE/12/2024 tentang Standar Pedoman Operasional Layanan Pengaduan Nasabah LPEI.

Kebijakan atau ketentuan terkait produk diatur dalam PDE dan pada akhir 2024, LPEI sudah memiliki 3 Standar Pedoman Produk (SPP) dan 5 Standar Pedoman Operasional (SPO) terkait produk (operasional bisnis).

The export-import financing business makes LPEI engage more with corporate customers. LPEI is committed to customer satisfaction by ensuring that every aspect of its products and services fully supports their business activities.

LPEI's commitment to providing excellent service to customers includes handling customer complaints based on various references and internal policies applicable within LPEI, namely:

External Regulations:

1. PMK No. 208/PMK.06/2021 concerning Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of LPEI;
2. POJK No. 22 of 2023 concerning Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector;
3. POJK No. 18/POJK.07/2018 concerning Customer Complaint Services in the Financial Services Sector;
4. SEOJK No. 17/SEOJK.07/2018 concerning Guidelines for the Implementation of Customer Complaint Services in the Financial Services Sector; and
5. PBI No. 3 of 2024 concerning BI Consumer Protection.

Internal Regulations:

1. Board of Directors Regulation (PDD) No. 0017/PDD/12/2022 concerning LPEI Risk Management Policy (Enterprise Risk Management); and
2. Executive Director Regulation (PDE) No. 0022/PDE/12/2024 concerning Standard Operating Guidelines for LPEI Customer Complaint Services.

Policies or provisions related to products are governed under the PDE, and by the end of 2024, LPEI had established 3 Product Guideline Standards (SPP) and 5 Operational Guideline Standards (SPO) related to products (business operations).

Komitmen untuk Memberikan Layanan yang Setara Kepada Nasabah [OJK F.17]

Commitment to Providing Equal Service to Customers [OJK F.17]

LPEI senantiasa bersikap konsisten dan memperlakukan nasabah dengan setara di seluruh rangkaian proses pembiayaan. Kebijakan yang mengatur tentang komunikasi pemasaran dan periklanan diatur dalam aturan berikut:

1. Regulasi Eksternal
 - a. PMK No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko dan Prinsip mengenal Nasabah LPEI
 - b. POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik
2. Regulasi Internal
 - a. PDD No. 0017/PDD/12/2022 tentang Kebijakan Manajemen Risiko (*Enterprise Risk Management*) LPEI
 - b. PDE No. 0029.01/PDE/12/2023 tentang SPO Komunikasi LPEI

Informasi produk dan/atau layanan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif disampaikan dengan jujur berdasarkan informasi yang sebenarnya tentang manfaat, biaya, dan risiko. Seluruh informasi produk dan layanan disampaikan kepada khalayak secara etis dengan etika dan asas perilaku yang berlaku secara umum. Prinsip kesetaraan juga kami tunjukkan melalui penyediaan informasi yang lengkap, akurat, dan transparan mengenai produk dan/atau layanan LPEI melalui situs web: <https://www.indonesiaeximbank.go.id/> atau dapat juga diperoleh dengan mengunjungi langsung kantor pusat maupun cabang terdekat.

Sesuai dengan POJK 22 tahun 2023, LPEI memiliki SLA dalam penanganan pengaduan nasabah yang diterima oleh LPEI. Adapun SLA penanganan pengaduan nasabah LPEI adalah 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan dengan pengaduan diterima secara lengkap oleh LPEI. Selain itu terdapat regulasi eksternal yang menjadi acuan yaitu POJK No. 22 tahun 2023 tentang Pelindungan

LPEI consistently upholds fairness and treats all customers equally throughout the entire financing process. The policies governing marketing communication and advertising are regulated the following regulations:

1. External Regulations
 - a. PMK No. 208/PMK.06/2021 concerning Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of LPEI
 - b. POJK No. 8/POJK.04/2015 concerning the Website of Issuers or Public Companies
2. Internal Regulations
 - a. PDD No. 0017/PDD/12/2022 concerning LPEI Risk Management Policy (*Enterprise Risk Management*)
 - b. Executive Director Regulation (PDE) No. 0029.01/PDE/12/2023 concerning the SPO of LPEI

Product and/or service information, both quantitative and qualitative, is presented truthfully based on actual facts regarding benefits, costs, and risks. All information regarding product and service is communicated to the public ethically and in accordance with commonly accepted codes of conduct and behavioral principles. We also uphold the principle of equality by providing complete, accurate, and transparent information about LPEI's products and/or services through our website: <https://www.indonesiaeximbank.go.id/> or at our head office or the nearest branch.

In accordance with POJK No. 22 of 2023, LPEI has established a SLA for handling customer complaints. The SLA for handling customer complaints at LPEI is 10 (ten) working days from the date all documents related to the complaint are fully received by LPEI. In addition, an external regulation that serves as a reference is POJK No. 22 of 2023 concerning Consumer and Public Protection in the Financial

Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. POJK tersebut juga menjadi dasar bagi LPEI untuk menetapkan regulasi internal yaitu PDE No. 0022/PDE/12/2024 tentang SPO Layanan Pengaduan Nasabah LPEI. Kami memastikan seluruh pengaduan yang disampaikan oleh nasabah senantiasa diproses dan ditangani serta ditindaklanjuti secara serius, sesuai kebijakan penanganan nasabah yang diatur dalam Peraturan Direktur Eksekutif (PDE), dimana saat ini terdapat 3 Standar Pedoman Produk (SPP) dan 5 Standar Pedoman Operasional (SPO) terkait produk (operasional bisnis).

Pada tahun 2024, tidak ditemukan pelanggaran terkait informasi produk dan jasa maupun komunikasi pemasaran, baik yang menimbulkan kerugian bagi nasabah maupun pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Services Sector. This regulation also forms the basis for LPEI in establishing its internal regulation, namely PDE No. 0022/PDE/12/2024 concerning the SPO for LPEI Customer Complaint Services. We ensure that all customer complaints are processed, addressed, and followed up on seriously, in line with the customer handling policy outlined in the Executive Director Regulation (PDE), and currently there are 3 Product Guideline Standards (SPP) and 5 Operational Guideline Standards (SPO) related to products (business operations).

In 2024, no violations were found related to product and service information or marketing communications, whether causing harm to customers or violating applicable laws and regulations.

Produk Dievaluasi untuk Keamanan Nasabah [OJK F.27]

Products Evaluated for Customer Safety [OJK F.27]

LPEI memastikan bahwa seluruh (100%) produk dan layanan yang diberikan kepada nasabah telah melalui proses evaluasi komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, seperti (i) Unit Kerja Owner, (ii) Unit Kerja Business Risk, (iii) Tim Reviewer yang melibatkan fungsi legal, compliance, manajemen risiko, dan (iv) Unit Kerja terkait lainnya yang memiliki relevansi dengan produk/layanan tersebut sebelum diajukan ke Komite Pengembangan Produk.

Mengacu pada SPO Penyusunan Peraturan, dalam pembuatan aturan, proses identifikasi risiko yang melekat pada pengembangan produk/perluasan kegiatan usaha dilakukan berkoordinasi dengan Unit Kerja yang membidangi manajemen risiko. Adapun kelompok-kelompok risiko yang relevan untuk dipertimbangkan pada tahap pengembangan produk dan/atau layanan baru (PAB), adalah sebagai berikut:

1. Kelompok risiko bisnis meliputi risiko asuransi dan risiko strategis;
2. Kelompok risiko finansial meliputi: risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko investasi (khusus untuk produk Syariah) dan risiko imbal hasil (khusus untuk produk Syariah);
3. Kelompok risiko *governance* meliputi: risiko kepatuhan, risiko hukum, dan risiko reputasi; dan
4. Risiko relevan yang melekat pada produk dan aktivitas baru, wajib diungkapkan kepada nasabah LPEI yang dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani oleh nasabah tersebut.

Dalam mengembangkan suatu PAB, ataupun dalam konteks perluasan kegiatan usaha yang memenuhi kriteria:

1. Tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh LPEI; atau
2. Telah dilaksanakan sebelumnya oleh LPEI namun dilakukan pengembangan yang mengakibatkan perubahan risiko dan material pada LPEI, baik dari sisi *target market*, *Risk Acceptance Criteria* (RAC), fitur maupun proses. Penilaian risiko berdasarkan parameter risiko bisnis, finansial, dan *governance*; dan
3. Bukan merupakan produk penugasan khusus yang diatur dalam peraturan pemerintah/surat penugasan pemerintah/ atau bentuk lainnya yang sejenis.

Pada proses telaah, jika diperlukan dapat juga mengundang Unit Kerja Teknologi Informasi dan Unit Kerja Finance. Analisa PAB tertuang pada Rencana Bisnis LPEI ke OJK maupun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) ke Kementerian Keuangan.

LPEI ensures that all (100%) products and services provided to customers undergo a comprehensive evaluation process involving various parties, such as (i) the Owner Work Unit, (ii) the Business Risk Work Unit, (iii) the Review Team involving legal, compliance, and risk management functions, and (iv) other relevant Work Units related to the product/service, before being submitted to the Product Development Committee.

Referring to the SPO on Regulation Formulation, the process of identifying inherent risks in product development/business activity expansion is carried out in coordination with the Work Unit responsible for risk management. The relevant risk categories to be considered during the development stage of new products and/or services (PAB) are as follows:

1. Business risk group, including insurance risk and strategic risk;
2. Financial risk group, including credit risk, market risk, operational risk, liquidity risk, investment risk (specifically for Sharia products), and return risk (specifically for Sharia products);
3. Governance risk group covering: compliance risk, legal risk, and reputational risk; and
4. Relevant risks inherent in new products and activities, which must be disclosed to LPEI customers and documented in a signed agreement.

In developing a new PAB, or in the context of expanding business activities that meet the following criteria:

1. Activities that have never been conducted before by LPEI; or
2. Activities that have previously been carried out by LPEI but are being developed further in a way that results in material changes and risks to LPEI, whether in terms of target market, Risk Acceptance Criteria (RAC), features, or processes. Risk assessments are conducted based on business, financial, and governance risk parameters; and
3. Not a special assignment product governed by government regulations, assignment letters, or other similar forms.

During the review process, if necessary, the Information Technology Work Unit and the Finance Work Unit may also be invited. The PAB analysis is outlined in LPEI's Business Plan submitted to the OJK and the Annual Work Plan and Budget (RKAT) submitted to the Ministry of Finance.

Sebagai wujud tanggung jawab LPEI dalam memberikan jaminan keamanan kepada nasabah, kami memastikan selalu menjalankan seluruh tahapan mekanisme dan prosedur internal yang berlaku di internal terkait peluncuran produk dan/atau layanan baru, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

As part of LPEI's responsibility to ensure security for customers, we consistently adhere to all internal mechanisms and procedures applicable to the launch of new products and/or services, while also complying with prevailing laws and regulations.

Inovasi dan Pengembangan Produk atau Jasa [OJK F.26]

Innovation and Product or Service Development [OJK F.26]

LPEI terus melakukan pengembangan melalui inovasi produk dan jasa sesuai kebutuhan pelaku ekspor nasional khususnya eksportir UMKM guna membantu menjawab tantangan global. Pada tahun 2024, inovasi produk dan layanan mencakup pengembangan produk paket, *General Purpose Financing* dan produk pembiayaan lainnya.

LPEI continues to pursue development through product and service innovation tailored to the needs of national exporters, particularly MSME exporters, to help address global challenges. In 2024, product and service innovations included the development of bundled products, General Purpose Financing, and other financing products.

Akses Kantor Cabang dan Sarana Layanan Perbankan [GRI FS14, FS15]

Access to Branch and Banking Services [GRI FS14, FS15]

LPEI memiliki Kantor Pusat di Jakarta, 4 Kantor Cabang, 3 Kantor Wilayah, dan 1 Kantor Area. Kantor cabang LPEI berada di Makassar, Balikpapan, Batam, dan Denpasar.

LPEI has its Head Office in Jakarta, along with 4 Branch Offices, 3 Regional Offices, and 1 Area Office. LPEI's branch offices are located in Makassar, Balikpapan, Batam, and Denpasar.

Keberadaan kantor cabang mampu menjangkau nasabah di wilayah Indonesia bagian barat dan tengah. Kantor wilayah ditempatkan di Jakarta, Surakarta, dan Surabaya, serta Kantor Area di Medan sesuai dengan posisi strategis dari mayoritas nasabah LPEI. Jaringan usaha yang tidak hanya berpusat di satu area, memastikan bahwa pelayanan LPEI tersedia di berbagai wilayah.

The presence of branch offices enables LPEI to reach customers in the western and central regions of Indonesia. Regional offices are located in Jakarta, Surakarta, and Surabaya, and the Area Office in Medan strategically positioned to serve the majority of LPEI's customers. With a business network that extends beyond a single location, LPEI ensures that its services are available across various regions.

Edukasi Produk dan Jasa Layanan LPEI [GRI FS16]

Products Evaluated for Customer Safety [GRI FS16]

LPEI secara konsisten melakukan kegiatan edukasi kepada para nasabahnya. Upaya ini merupakan bagian dari literasi keuangan bagi masyarakat, namun secara khusus diberikan kepada nasabah yang berfokus pada kegiatan ekspor, terutama mereka yang tergolong UMKM. Kegiatan edukasi secara khusus pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. *Coaching Program for New Exporter (capacity building) secara hybrid*
2. *Desa Devisa (community development)*
3. *Business Matching*
4. Pameran berskala internasional
5. Penguatan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga dan SMV

LPEI consistently conducts educational activities for its customers. This effort is part of financial literacy for the public, specifically targeted at customers engaged in export activities, particularly those classified as MSMEs. The specific educational activities carried out in 2024 are as follows:

1. Coaching Program for New Exporters (capacity building) in a hybrid format
2. Go Export Village (community development)
3. Business Matching
4. International-scale exhibitions
5. Strengthening collaboration with Ministries/Institutions and SMV

Jumlah Produk yang Ditarik [OJK F.29]

Number of Products Recalled [OJK F.29]

Sepanjang tahun 2024, kami melaporkan bahwa tidak ada produk atau layanan yang ditarik karena bermasalah dengan kepuasan dan keselamatan pelanggan, ataupun karena paksaan dari regulator karena permasalahan regulasi. Pencapaian ini menegaskan komitmen LPEI terhadap pengendalian kualitas produk dan jasa pembiayaan bagi nasabah, sehingga semakin meningkatkan kepercayaan mereka terhadap solusi pembiayaan yang ditawarkan oleh LPEI.

Throughout 2024, we report that no products or services were withdrawn due to issues related to customer satisfaction and safety or regulatory enforcement due to compliance issues. This achievement reaffirms LPEI's commitment to quality control in financing products and services for customers, further strengthening their trust in the financing solutions offered by LPEI.

Pengaduan Nasabah [GRI 2-25]

Customer Complaint [GRI 2-25]

LPEI membuka saluran pengaduan untuk menerima pengaduan nasabah. Kami berkomitmen menindaklanjuti dengan serius seluruh pengaduan yang masuk. LPEI memiliki prosedur mengenai tata cara penanganan pengaduan nasabah yang ditetapkan melalui PDE No. 0022/PDE/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 tentang Standar Pedoman Operasional Layanan Pengaduan Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Pihak yang bertanggung jawab atas penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah adalah unit kerja yang membidangi fungsi komunikasi dan hubungan kelembagaan serta unit kerja yang memiliki fungsi untuk menindaklanjuti (menangani dan menyelesaikan) pengaduan nasabah sesuai dengan substansi pengaduan.

PROSES PENANGANAN PENGADUAN NASABAH

- Pengaduan nasabah dapat dilakukan dalam bentuk lisan atau tertulis melalui:
 - Datang langsung ke kantor LPEI;
 - Telepon kantor pusat atau jaringan kantor LPEI lainnya;
 - Surat elektronik (*email*) khusus pengaduan ke: pengaduan@indonesiaeximbank.go.id;
 - Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (APPK OJK).
- Verifikasi dan konfirmasi pengaduan oleh LPEI;
- Tindak lanjut & pemberian tanggapan oleh LPEI;
- LPEI menyampaikan informasi perpanjangan waktu proses pengaduan (jika diperlukan);
- LPEI Menyampaikan informasi pengaduan telah diselesaikan.

Berdasarkan catatan dari pengaduan yang masuk melalui APPK OJK, pada tahun 2024, terdapat 1 (satu) pengaduan terkait pinjaman *online* yang tidak relevan dengan produk/ layanan. Per 31 Desember 2024, seluruh pengaduan tersebut telah tertangani dan terselesaikan dengan baik.

Selain pengaduan tersebut, LPEI tidak menerima adanya laporan pengaduan yang berkaitan dengan kebocoran kerahasiaan/privasi pelanggan dan hilangnya data nasabah.

LPEI provides complaint channels to receive customer grievances. We are committed to seriously addressing and following up on all incoming complaints. LPEI has established procedures for handling customer complaints, as outlined in PDE No. 0022/PDE/12/2024 dated December 6, 2024, regarding the Standard Operational Guidelines for Customer Complaint Services at Indonesia Eximbank. The units responsible for handling and resolving customer complaints are those overseeing communication and institutional relations, as well as the units responsible for following up on (handling and resolving) complaints according to their substance.

CUSTOMER COMPLAINT HANDLING PROCESS

- Customer complaints can be submitted verbally or in writing through:
 - Direct visit to LPEI office;
 - The central office telephone or other LPEI branch offices;
 - A dedicated email for complaints: pengaduan@indonesiaeximbank.go.id;
 - Customer Protection Portal of the Financial Services Authority (APPK OJK).
- Verification and confirmation of complaints by LPEI;
- Follow-up and response from LPEI;
- LPEI provides information on the extension of the complaint handling process (if necessary);
- LPEI notifies customers when their complaints have been resolved.

Based on records of complaints submitted through the APPK OJK, in 2024 there was 1 (one) complaint related to online lending that was not relevant to the products/ services offered. As of December 31, 2024, all complaints had been properly addressed and resolved.

Apart from these complaints, LPEI has not received any reports regarding breaches of customer confidentiality/ privacy or loss of customer data.

Jumlah Pengaduan dan Tindak Lanjutnya

Number of Complaints and Follow-Up

Uraian Description	2024	2023
Pengaduan yang Masuk Incoming Complaints	1	2
Pengaduan Terselesaikan Complaints Resolved	1	2
Pengaduan dalam Proses Complaints being Processed	0	0

Survei Kepuasan Nasabah [OJK F.30] [GRI FS16]

Customer Satisfaction Survey [OJK F.30] [GRI FS16]

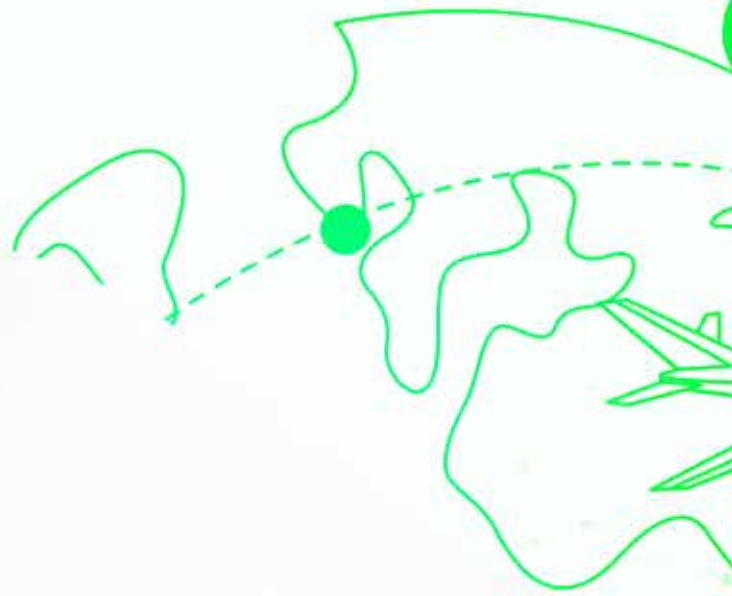
Untuk terus meningkatkan layanan dan produk yang diberikan oleh LPEI, LPEI juga kembali menyelenggarakan survei kepuasan nasabah yang akan berlangsung di Mei 2025. Survei ini juga dilakukan sebagai upaya pemenuhan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah. Hasil survei akan membantu LPEI untuk tetap fokus membantu mengatasi setiap permasalahan nasabah dengan optimal melalui peningkatan kualitas produk dan pelayanan.

Pada survei tahun sebelumnya, terdapat 12 kategori masukan dan saran dari debitur LPEI yang telah ditindaklanjuti oleh unit terkait. Langkah-langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas produk dan layanan.

To continuously improve the services and products provided by LPEI, the Institution will once again conducted a customer satisfaction survey in May 2025. Additionally, this survey was conducted to comply with the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 208/PMK.06/2021 on Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles. The survey results will help LPEI remain focused on effectively addressing customer issues by improving the quality of its products and services.

In the previous year's survey, there were 12 categories of feedback and suggestions from LPEI debtors that were followed up by the relevant units. These actions were taken as part of efforts to improve the quality of products and services.





05

Kinerja Lingkungan

Environmental Performance



Komitmen dan Kebijakan Mengelola Kinerja Lingkungan [GRI 3-3]

Commitment and Policies in Managing Environmental Performance [GRI 3-3]

Sektor keuangan memiliki peran penting dalam mendorong praktik keberlanjutan dengan memastikan fasilitas pembiayaan yang dialirkan kepada nasabah tidak berkontribusi negatif terhadap lingkungan sekitar. LPEI turut berkontribusi dalam komitmen ini dan menjalankan arahan *Environmental, Social, Governance* (ESG) dari OJK sesuai dengan terbitnya POJK 51/2017 tentang praktik Keuangan Berkelanjutan.

Komitmen LPEI dalam menjalankan bisnis inti yang berorientasi pada aspek ESG atau lingkungan hidup, sosial dan tata kelola diperlihatkan melalui eksistensi Kebijakan dan Standar Pedoman Operasional terkait Penerapan Keuangan Berkelanjutan.

LPEI bertekad menerapkan konsep Keuangan Berkelanjutan secara utuh sebagai wujud komitmen terhadap upaya pencapaian tujuan keberlanjutan dalam SDGs. Upaya tersebut diwujudkan dengan memperkuat integrasi aspek ESG yang telah dirintis selama ini dalam menganalisa portofolio pembiayaan dalam rangka mengidentifikasi kondisi nasabah berdasarkan sektor usahanya dengan mempertimbangkan aspek ESG. Sebagaimana telah disampaikan dalam dokumen RAKB, LPEI menegaskan prioritas penyusunan, sosialisasi, implementasi sistem dan kebijakan ESG, serta rancangan Standar Pedoman Operasional terkait Penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Selain melalui operasional produk pembiayaan, LPEI secara aktif mengupayakan berlangsungnya kegiatan operasional yang lebih ramah lingkungan melalui Program *Green Office Lifestyle Culture* LPEI atau yang kini menjadi bagian dari penerapan "ESG Kelembagaan". LPEI telah menjalankan program ini sejak tahun 2012 sesuai arahan PDE No. 0024/PDE/04/2012 tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk dijadikan pedoman bagi seluruh pegawai.

The financial sector plays a crucial role in promoting sustainability practices by ensuring that financing facilities provided to customers do not negatively impact the surrounding environment. LPEI contributes to this commitment and follows the Environmental, Social, and Governance (ESG) guidelines set by OJK in accordance with POJK 51/2017 on Sustainable Finance Practices.

LPEI's commitment in running its core business with orientation in ESG aspect or environment, social, governance is evident on the existence of Operational Policy and Standard regarding Sustainable Finance Implementation.

LPEI is determined to fully implement the Sustainable Finance concept as part of its commitment to achieving sustainability goals in line with the SDGs. This commitment is demonstrated by strengthening the integration of ESG aspects which have been promoted in analyzing the financing portfolio when identifying the customers' condition based on their sector of business with consideration to ESG aspects. As outlined in the RAKB document, LPEI prioritizes the development, socialization, and implementation of ESG systems and policies, as well as the design of the Operational Manual Standard regarding the Implementation of Sustainable Finance.

Beyond financing operations, LPEI actively promotes more environmentally friendly business practices through the Green Office Lifestyle Culture Program, which is part of "Institutional ESG." LPEI has been implementing this program since 2012, following the directive of PDE No. 0024/PDE/04/2012 on the Management of Facilities and Infrastructure at Indonesia Eximbank, which serves as a guideline for all employees.

Sustainable Financing & Sustainable Funding

Sustainable Financing & Sustainable Funding

LPEI bertekad untuk menerapkan konsep ESG melalui Keuangan Berkelanjutan secara bertahap sebagai wujud komitmen Lembaga dalam mendukung target pencapaian *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia baik dari aspek lingkungan hidup maupun aspek sosial.

Sebagaimana telah disampaikan dalam dokumen RAKB, LPEI menegaskan prioritas pada jangka pendek dan jangka panjang terkait penyusunan rencana, penerapan dalam bentuk sosialisasi analisa risiko, dan kebijakan terkait penerapan ESG melalui Keuangan Berkelanjutan. Melalui penerapan yang dilakukan selama ini LPEI akan dapat:

1. Memiliki Kebijakan khusus Penerapan Aspek ESG dalam Kegiatan Kelembagaan dan Kegiatan Usaha.
2. Memetakan dan mengelola portofolio berdasarkan sektor prioritas melalui hasil pelaksanaan *due diligence*.
3. Mengelola program atau kegiatan sosial yang menunjang SDGs berdasarkan aspek ESG.

Selain itu, secara bertahap LPEI juga bercita-cita untuk dapat memberikan "Pembiayaan Hijau" atau "*Green Financing*" dan menerbitkan "Obligasi Hijau" atau "*Green Bond*" guna mendukung kegiatan ekspor yang menjunjung SDG atau tujuan berkelanjutan, serta secara langsung mendukung komitmen Pemerintah dalam memenuhi target-target yang disampaikan dalam mendukung Perjanjian Paris.

Kerangka keberlanjutan LPEI berpedoman pada 8 (delapan) Prinsip Keuangan Berkelanjutan yang diterbitkan OJK pada POJK 51/2017 antara lain prinsip investasi yang bertanggung jawab, prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan, prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup, prinsip tata kelola, prinsip komunikasi yang informatif, prinsip inklusif, prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas serta prinsip koordinasi dan kolaborasi.

LPEI is committed to gradually implementing the ESG concept through Sustainable Finance as a manifestation of the Institution's commitment to supporting the achievement of Indonesia's Nationally Determined Contribution (NDC) targets, both in terms of environmental and social aspects.

As outlined in the RAKB document, LPEI emphasizes both short-term and long-term priorities regarding the formulation of plans, implementation through risk analysis socialization, and policies related to ESG implementation via Sustainable Finance. Through the implementation carried out thus far, LPEI aims to:

1. Establish a dedicated Policy for the Implementation of ESG Aspects in Institutional and Business Activities.
2. Map and manage its portfolio based on priority sectors through the results of due diligence.
3. Manage social programs or activities that support the SDGs based on ESG aspects.

In addition, LPEI also aspires to gradually provide "Green Financing" and issue "Green Bonds" to support export activities that uphold the SDGs or sustainable goals, while directly supporting the Government's commitment to meeting the targets set forth under the Paris Agreement.

LPEI's sustainability framework is guided by the 8 (eight) Sustainable Finance Principles issued by the Financial Services Authority (OJK) under POJK 51/2017, which include: the principle of responsible investment, sustainable business strategy and practices, social and environmental risk management, governance, informative communication, inclusivity, development of priority leading sectors, and coordination and collaboration.

Program Green Office LPEI

LPEI'S Green Office Program

LPEI menjalankan sejumlah kegiatan untuk mendukung pelestarian lingkungan, terutama di lingkungan kantor. LPEI berupaya mewujudkan kantor ramah lingkungan atau *green office*. Dalam pelaksanaannya, Unit Kerja Pengadaan dan Umum bertindak sebagai unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan sarana dan prasarana kantor, termasuk penghematan penggunaan energi listrik, air dan kertas. LPEI juga mendorong partisipasi pegawai melalui perilaku sehari-hari mereka untuk memastikan semua aktivitas kerja beroperasi dengan mempertahankan kualitas lingkungan hidup yang baik.

Dalam praktiknya sehari-hari, program *green office* yang dikeluarkan LPEI untuk diikuti oleh seluruh pegawai adalah sebagai berikut:

1. Penerapan *Smart Spending* yang disosialisasikan secara daring melalui *email*, *screen saver*, maupun media digital lainnya;
2. Memaksimalkan metode pelatihan daring;
3. Efisiensi penggunaan kertas dilakukan dengan penerapan *double side print*, tidak mencetak dokumen draft, dan penggunaan *digital signature*, namun tetap memperhatikan aspek fungsi, peruntukan, dan kerahasiaan dokumen;
4. Mengoptimalkan utilisasi ruang kantor dengan peluncuran program "XWoW" atau Eximbank *New Way of Working*, termasuk memberikan pilihan untuk bekerja secara *hybrid* bagi pegawai LPEI;
5. Efisiensi penggunaan listrik dilakukan dengan mematikan perangkat dan peralatan listrik seperti membatasi penggunaan peralatan listrik, komputer, printer dan alat elektronik lainnya apabila telah selesai bekerja/ meninggalkan kantor, mematikan lampu di ruangan yang tidak digunakan;
6. Efisiensi penggunaan air dilakukan dengan memastikan keran air dalam kondisi mati apabila telah selesai digunakan.

LPEI belum memanfaatkan material daur ulang untuk kegiatan operasional utamanya, namun kami menggunakan material ramah lingkungan, di antaranya penggunaan lampu LED dengan sensor gerak [OJK F.5]

LPEI carries out several activities to support environmental preservation, particularly in the office environment. LPEI strives to create a green office. In practice, the Procurement and General Work Unit is responsible for managing the office facilities and infrastructure, including energy, water, and paper usage savings. LPEI also encourages employee participation through their daily behaviors to ensure that all work activities operate while maintaining good environmental quality.

In everyday practice, LPEI's green office program that all employees are expected to follow includes the following:

1. Implementation of Smart Spending, socialized through emails, screen savers, and other digital media;
2. Maximizing the use of online training methods;
3. Paper usage efficiency, applied by using double-sided printing, not printing draft documents, and using digital signatures while still considering the document's function, purpose, and confidentiality;
4. Optimizing office space utilization through the launch of the "XWoW" (Eximbank New Way of Working) program, including offering employees the option to work in a hybrid setting;
5. Electricity usage efficiency, by turning off devices and electrical equipment such as limiting the use of electrical tools, computers, printers, and other electronic devices when finished working or leaving the office, and turning off lights in unused rooms;
6. Water usage efficiency is ensured by making sure taps are turned off when not in use.

LPEI has not utilized any recycle material for its main activity yet, nonetheless we use different kinds of eco-friendly materials such as motion sensor LED lights. [OJK F.5]

Konsumsi Energi dan Emisi yang Dihasilkan

Energy Consumption and Generated Emission

KONSUMSI ENERGI

LPEI hanya menggunakan 2 (dua) jenis sumber energi yang berasal dari energi tidak terbarukan untuk kegiatan kantor. Bahan bakar minyak (BBM) berjenis bensin digunakan sebagai bahan bakar kendaraan operasional. Listrik digunakan untuk penerangan dan mengoperasikan peralatan elektronik di kantor. Semua jenis energi tersebut dipasok oleh pihak ketiga.

Sampai akhir tahun pelaporan 2024, LPEI belum menggunakan sumber energi terbarukan. Upaya kami untuk menekan penggunaan BBM dan listrik adalah sebagai berikut: [OJK F.7] [GRI 302-4]

Upaya Penghematan Listrik:

- Memberikan himbauan agar seluruh pegawai mematikan dan melepas peralatan elektronik pribadi saat pulang kantor;
- Menghimbau kepada pegawai yang terakhir pulang untuk mematikan lampu dan AC saat mereka telah selesai bertugas di Kantor;
- Menginstruksikan pegawai untuk mematikan lampu dan AC untuk area kerja yang sudah kosong;
- Penggunaan fasilitas rapat dengan *video conference* yang dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan
- Penggunaan fasilitas webinar untuk pelatihan/sosialisasi, dan lain sebagainya.

Upaya Penghematan BBM:

- Melakukan perawatan berkala terhadap seluruh kendaraan operasional;
- Melakukan uji pengendalian emisi secara berkala;
- Memastikan setiap kendaraan menggunakan bahan bakar sesuai dengan standar dan spesifikasinya; dan
- Menekan mobilitas dan mengoptimalkan telekonferensi.

ENERGY CONSUMPTION

LPEI only utilizes 2 (two) types of non-renewable energy sources for office activities. Fuel (gasoline) is used for operational vehicles, while electricity is used for lighting and operating electronic equipment in the office. All these energy sources are supplied by third parties.

As of the end of the 2024 reporting year, LPEI has not yet used renewable energy sources. Our efforts to reduce fuel and electricity consumption are as follows: [OJK F.7] [GRI 302-4]

Electricity Saving Efforts:

- Encouraging all employees to turn off and unplug personal electronic devices before leaving the office;
- Advising the last employee to leave to turn off lights and air conditioning once they have finished their duties at the office;
- Instructing employees to turn off lights and air conditioning in unoccupied work areas;
- Utilizing video conferencing facilities for meetings in an effective and efficient manner; and
- Using webinar facilities for training, socialization, and other similar activities.

Fuel Saving Efforts:

- Conducting regular maintenance on all operational vehicles;
- Performing periodic emission control tests;
- Ensuring that each vehicle uses fuel according to its standard and specifications; and
- Reducing unnecessary mobility and optimizing teleconferencing.

Konsumsi dan Intensitas Energi [OJK F.6] [GRI 302-1, 302-3, 302-4]

Energy Consumption and Intensity

Sumber Energi Energy Source	Satuan Unit	2024	2023	2022
Pemakaian Listrik Kantor Pusat* Electricity Usage at the Head Office	kWh	1.781.882	1.708.390	1.100.879
	Gigajoule	6.415	6.150	3.963
Total Konsumsi Energi Total Energy Consumption	Gigajoule	6.415	6.150	3.963
Pendapatan Operasional – Neto Total Operating Income – Net	Rp juta Rp million	980.174	1.182.281	961.951
Intensitas Pemakaian Energi Energy Consumption Intensity	Gigajoule/Rp juta Gigajoule/Rp million	0,007	0,005	0,004

Keterangan | Notes:

*) Termasuk entitas anak yang berada di gedung kantor pusat, yaitu Prosperity Tower. | Including subsidiaries reside in the head office at Prosperity Tower.

**) Perhitungan Emisi GRK dari pemakaian kWh listrik berdasarkan ketentuan dari Dirjen Kelistrikan Kementerian ESDM (2017), 1 kWh = 0,0036 Gigajoule. | Calculation of GHG emissions from the use of kwh of electricity based on provisions from the Director General of Electricity, Ministry of Energy and Mineral Resources (2017), 1 kWh = 0.0036 Gigajoule

LPEI tidak memiliki data terkait konsumsi BBM di dalam dan luar organisasi. Inventarisasi konsumsi BBM dari penyewaan kendaraan operasional untuk saat ini masih dalam nominal Rupiah. Selain itu, perihal konsumsi energi di luar organisasi kami, seperti penggunaan BBM dan listrik oleh pemasok/mitra, tidak bisa dilaporkan karena dalam perjanjian kerja sama dengan pemasok tidak terdapat klausul tentang pencatatan volume energi yang dikeluarkan oleh mitra. LPEI juga tidak memiliki akses ataupun wewenang untuk meminta data tersebut ke pemasok/mitra.

Dengan demikian, pada tahun 2024, dapat dilaporkan bahwa total konsumsi energi yang dikonsumsi secara langsung oleh LPEI adalah 1.781.882 kWh. [ESG E-03]

EMISI DARI AKTIVITAS OPERASIONAL

Berdasarkan jenis energi yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihasilkan LPEI berasal dari penggunaan listrik (Cakupan 2) yang mengandalkan sumber energi tidak terbarukan (fosil). Dikarenakan keterbatasan data, LPEI tidak dapat mengungkapkan emisi penggunaan BBM (Cakupan 1) dan emisi tidak langsung (Cakupan 3).

Emisi GRK memiliki dampak negatif yang dapat memicu pemanasan global dan perubahan iklim. Kami berkomitmen untuk turut berpartisipasi dalam upaya penanganan emisi dengan melakukan inventarisasi konsentrasi karbondioksida (CO₂) dari konsumsi listrik dan BBM.

LPEI does not have data related to fuel consumption within or outside the organization. Fuel consumption data from rented operational vehicles is still recorded in Rupiah. Additionally, energy consumption outside the organization such as fuel and electricity use by suppliers or partners cannot be reported, as the cooperation agreements with suppliers do not include clauses requiring the recording of energy usage. LPEI also does not have access to, or authority to request, such data from suppliers or partners.

Therefore, in 2024, it can be reported that the total energy consumption directly used by LPEI is 1,781,882 kWh. [ESG E-03]

EMISSIONS FROM OPERATIONAL ACTIVITIES

Based on the types of energy used, it can be concluded that the Greenhouse Gas (GHG) emissions produced by LPEI originates from electricity consumption (Scope 2) that is still relying on non-renewable (fossil) energy sources. Due to data limitations, LPEI is unable to disclose fuel consumption (Scope 1) and indirect emissions (Scope 3).

GHG emissions have negative impacts that can trigger global warming and climate change. We are committed to participating in emission reduction efforts by conducting an inventory of carbon dioxide (CO₂) concentrations from electricity and fuel consumption.

Emisi GRK Cakupan 2 (Listrik) [OJK F.11] [GRI 305-1, 305-2]
GHG Emission Scope 2 (Electricity)

Uraian Description	Satuan Unit	2024	2023	2022
Cakupan 2 (Listrik)* Scope 2 (Electricity)	Kg CO2-eq	1.664.277,79	1.595.636,26	1.028.220,99
Total [ESG E-01]	Ton CO2-eq	1664,28	1595,64	1028,22
Pendapatan Operasional - Neto Total Operating Income - Net	Rp juta Rp million	980.174	1.182.281	961.951
Intensitas Emisi [ESG E-02] Emission Intensity	Ton CO2-eq/Rp juta Ton CO2-eq/Rp million	0,002	0,001	0,001

Keterangan | Notes

*) Perhitungan Emisi GRK dari pemakaian kWh listrik berdasarkan ketentuan dari Dirjen Kelistrikan Kementerian ESDM (2017), 1 kWh = 0,934 Kg CO2-eq/kWh.

*) Calculation of GHG Emissions from the use of kWh of electricity based on provisions from the Director General of Electricity, Ministry of Energy and Mineral Resources (2017), 1 kWh = 0.934 Kg CO2-eq/kWh.

Upaya kami untuk mengurangi emisi adalah dengan menghimbau seluruh pegawai untuk mematikan dan melepas kabel dari peralatan elektronik, mematikan lampu dan AC apabila menjadi yang terakhir selesai bertugas di ruang *meeting* maupun ruang kerja, dan memaksimalkan penggunaan ruang *meeting* secara efektif dan efisien baik daring maupun luring. [OJK F.12]

Kami tidak memiliki target khusus terkait pencapaian *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060, namun mengambil peran aktif sebagai agen transformasi dalam penerapan ESG, mendorong sejumlah langkah inisiatif penerapan ESG sebagai standar kinerja operasional LPEI yang berkelanjutan. LPEI juga telah menerapkan *ESG Checklist* dalam proses pembiayaan. [ESG E-06, E-07]

Our efforts to reduce emissions include encouraging all employees to turn off and unplug electronic devices, switch off lights and air conditioners when they are the last to leave meeting rooms or workspaces, and optimize the use of meeting rooms effectively and efficiently, both online and offline. [OJK F.12]

We do not have a specific target related to achieving *Net Zero Emissions* (NZE) by 2060, however, we actively take on the role of a transformation agent in the implementation of ESG, promoting various ESG initiatives as a standard for LPEI's sustainable operational performance. LPEI has also implemented an *ESG Checklist* in its financing processes. [ESG E-06, E-07]

Konsumsi Air [OJK F.8]

Water Consumption

LPEI menggunakan air di kantor dari PDAM setempat dalam jumlah terbatas untuk keperluan domestik, seperti toilet, *pantry*, mushalla, mesin pendingin udara, kebersihan kantor, dan beberapa aktivitas lainnya. Penggunaan air ini tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan.

Air yang digunakan di kantor LPEI dikelola oleh pengelola gedung, yang juga bertanggung jawab dalam mengelola pembuangan airnya. Hal ini membuat LPEI tidak dapat melakukan penghitungan konsumsi air karena menjadi bagian dari fasilitas penyewaan gedung kantor pusat dari pengelola Gedung Prosperity Tower. [ESG E-04]

Sebagai upaya penghematan terhadap konsumsi, kami senantiasa berupaya untuk melakukan sejumlah langkah sebagai berikut:

1. Menjalankan gerakan “gunakan air secukupnya”;
2. Melakukan pengecekan instalasi air secara berkala untuk mendeteksi kebocoran pipa atau saluran;
3. Melakukan perbaikan dan penggantian instalasi air yang bocor; dan
4. Menghimbau pegawai ataupun tamu gedung untuk selalu menutup keran dengan rapat.

LPEI uses water in its offices, sourced from the local PDAM (Regional Water Utility Company), in limited quantities for domestic purposes such as toilets, pantries, prayer rooms, air conditioning units, office cleanliness, and other activities. The use of this water does not have a significant impact on the environment.

The water used in LPEI offices is managed by the building management, which is also responsible for wastewater disposal. As a result, LPEI is unable to calculate water consumption, as it is part of the office rental facilities provided by the Prosperity Tower building management. [ESG E-04]

As an effort to conserve water consumption, we continuously implement the following measures:

1. Carrying out the “use water as needed” campaign;
2. Conducting regular inspections of water installations to detect pipe or drainage leaks;
3. Repairing and replacing leaking water installations; and
4. Encouraging employees and building visitors to always close water taps properly.

Pengelolaan Limbah [OJK F.13, F.14]

Waste Management

Limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional relatif terbatas karena LPEI tidak menjalankan proses ekstraksi/pengolahan bahan baku. LPEI juga tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) karena limbah utama yang dihasilkan berupa limbah kertas dan alat tulis kantor (ATK), seperti pulpen, kertas, printer, serta sampah organik dari sisa makanan. Kendaraan operasional yang dimiliki kantor pusat mayoritas merupakan kendaraan sewa sehingga kami tidak bertanggung jawab untuk melakukan perawatan mesin yang menghasilkan limbah oli bekas.

Limbah di kantor menjadi tanggung jawab pengelola gedung. LPEI tidak bertanggung jawab untuk menerima, menyimpan, dan mendistribusikan limbah di kantor. Dengan demikian, LPEI tidak dapat memberikan data mengenai jumlah limbah yang dihasilkan dari aktivitas kantor pusat selama tahun 2024. [ESG E-05]

Upaya untuk mengurangi volume limbah diwujudkan melalui berbagai inisiatif mulai dari kampanye penghematan kertas, himbauan untuk mengurangi penggunaan kemasan satu kali pakai di area kantor (plastik/*styrofoam*) dan dorongan untuk membawa tumbler minum kepada seluruh pegawai. Sementara itu, untuk mengurangi limbah *toner* dari penggunaan printer, LPEI menerapkan kebijakan pembaharuan terhadap sistem *printer* yang digunakan dengan teknologi yang memungkinkan sistem isi ulang tinta *toner*.

The waste generated from operational activities is relatively limited, as LPEI does not engage in raw material extraction or processing. LPEI also does not produce Hazardous and Toxic (B3) waste, as the main waste generated consists of paper waste and office supplies (ATK), such as pens, paper, printers, and organic waste from food scraps. Most of the operational vehicles at the head office are rental vehicles, so we are not responsible for engine maintenance that produces used oil waste.

Waste management at the office is the responsibility of the building management. LPEI does not handle the collection, storage, or distribution of office waste. As a result, LPEI cannot provide data on the amount of waste generated from head office activities in 2024. [ESG E-05]

Efforts to reduce waste volume are implemented through various initiatives, including paper-saving campaigns, an urge to reduce the use of single-use packaging (plastic/*styrofoam*) in office areas, and encouraging employees to bring reusable drinking tumblers. Additionally, to reduce toner waste from printer usage, LPEI has adopted a policy of upgrading its printing system to technology that enables toner refill systems.

Program Lingkungan [OJK F.9, F.10]

Environmental Program

Sehubungan dengan kegiatan usaha yang tidak bersentuhan langsung dengan aktivitas eksplorasi lingkungan hidup, maka LPEI tidak mencatatkan adanya biaya lingkungan hidup. [OJK F.4]

Kantor pusat dan cabang-cabang LPEI berada di kota-kota besar sehingga tidak ada wilayah operasi yang termasuk maupun berdekatan dengan kawasan dilindungi dan/atau di dalam area konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Dengan demikian, kegiatan yang dilaksanakan LPEI tidak memberikan dampak signifikan bagi kawasan yang dilindungi maupun kawasan konservasi beserta ekosistem yang ada di dalamnya.

In relation to its business activities, which do not directly engage in environmental exploration, LPEI does not record any environmental costs. [OJK F.4]

LPEI's head office and branches are located in major cities, ensuring that there are no operational areas within or near protected areas and/or conservation zones with high biodiversity. Therefore, LPEI's activities do not have a significant impact on protected or conservation areas and their ecosystems.

Kepatuhan Lingkungan [OJK F.15, F.16]

Environmental Compliance

LPEI membuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk melakukan pengaduan terkait lingkungan hidup apabila terdapat aktivitas operasional yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Selama tahun 2024, LPEI tidak menerima pengaduan masyarakat ataupun sanksi dari regulator terkait dampak lingkungan hidup ataupun tumpahan dari limbah dan efluen dari operasional usaha.

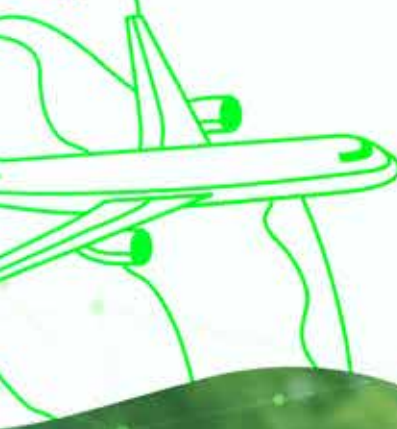
Konsistensi LPEI dalam menjalankan kegiatan operasional ramah lingkungan membuahkan hasil dengan tidak adanya pengaduan terkait isu lingkungan serta tidak menerima denda dan sanksi non-moneter karena ketidakpatuhan Lembaga terhadap Undang-Undang dan Peraturan terkait lingkungan.

LPEI provides opportunities for the public to submit environmental complaints if any operational activities negatively impact the environment. Throughout 2024, LPEI did not receive any public complaints or regulatory sanctions related to environmental impacts, waste spills, or effluents from business operations.

LPEI's consistency in carrying out environmentally friendly operational activities has yielded results, with no complaints related to environmental issues and no fines or non-monetary sanctions imposed for non-compliance with environmental laws and regulations.







06

Kinerja Sosial

Social Performance



Komitmen dan Kebijakan Mengelola Kinerja Sosial [GRI 3-3]

Commitment and Policies In Managing Social Performance

Komitmen LPEI terhadap pertumbuhan usaha, selalu diiringi dengan perhatian khusus terhadap dampak usaha yang positif bagi karyawan dan masyarakat. Pertumbuhan usaha tidak dapat berdiri sendiri dan menguntungkan LPEI semata, karena utamanya kesejahteraan pegawai harus dapat dipenuhi dan LPEI juga berperan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

LPEI menempatkan para pegawainya sebagai faktor pertama dan utama yang berperan besar dalam mendukung pencapaian tujuan usaha dan keberlanjutan. Fokus utama LPEI adalah mempertahankan talenta terbaik dengan praktik pengelolaan ketenagakerjaan yang setara, meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, serta menjamin kesejahteraan mereka.

Agar strategi dan rencana pengelolaan SDM di LPEI senantiasa berjalan efektif dan terarah, LPEI telah menyusun dan memberlakukan sejumlah kebijakan khusus terkait praktik ketenagakerjaan, antara lain:

1. PDE No. 0001/PDE/03/2022 mengatur tentang Kebijakan Sistem Kepegawaian LPEI;
2. PDE No. 0028/PDE/05/2019 mengatur tentang Penerimaan Pegawai LPEI;
3. PDE No. 0024/PDE/10/2022 mengatur tentang Mutasi Pegawai LPEI;
4. PDE No. 0023/PDE/07/2021 mengatur tentang Program Magang/Praktik Kerja, Detasering (*Secondment*) dan Pertukaran Pegawai LPEI;
5. PDE No. 0042/PDE/09/2019 mengatur tentang Manual Operasional Pakta Integritas;
6. PDE No. 0009/PDE/07/2022 mengatur tentang Waktu Kerja Pegawai LPEI;
7. PDE No. 0052/PDE/11/2019 mengatur tentang Golongan Jabatan;
8. PDE No. 0055/PDE/11/2019 mengatur tentang Remunerasi Pegawai LPEI dan KDE No. 0158/ KDE/11/2019 mengatur tentang Penetapan Remunerasi Pegawai LPEI;
9. PDE No. 0019/PDE/09/2022 mengatur tentang Perjalanan Dinas Pegawai LPEI;
10. PDE No. 0014/PDE/05/2015 mengatur tentang Program Pelatihan dan Pengembangan Pegawai LPEI;
11. PDE No. 0028/PDE/12/2020 mengatur tentang Penegakan Disiplin dan Penentuan Sanksi Atas Pelanggaran; dan
12. PDE No. 0058.01/PDE/11/2019 mengatur tentang Pensiun Pegawai LPEI.

LPEI's commitment to business growth is always accompanied by special attention to the positive impact of its operations on employees and society. Business growth cannot stand alone and benefit only LPEI, as employee welfare must be ensured, and LPEI also plays a role in meeting societal needs.

LPEI places its employees as the first and foremost factor in supporting business goals and sustainability. LPEI's main focus is on retaining top talent through fair employment management practices, enhancing competencies through education and training, and ensuring employee welfare.

To ensure that HR management strategies and plans at LPEI remain effective and well-directed, LPEI has developed and implemented several specific policies related to employment practices, including:

1. PDE No. 0001/PDE/03/2022 regulates the LPEI Employee System Policy;
2. PDE No. 0028/PDE/05/2019 regulates LPEI Employee Recruitment;
3. PDE No. 0024/PDE/10/2022 regulates LPEI Employee Transfers;
4. PDE No. 0023/PDE/07/2021 regulates Internship/ Work Practice Programs, Secondment, and Employee Exchange at LPEI;
5. PDE No. 0042/PDE/09/2019 regulates the Integrity Pact Operational Manual;
6. PDE No. 0009/PDE/07/2022 regulates LPEI Employee Working Hours;
7. PDE No. 0052/PDE/11/2019 regulates Job Classification;
8. PDE No. 0055/PDE/11/2019 regulates LPEI Employee Remuneration, and KDE No. 0158/KDE/11/2019 regulates LPEI Employee Remuneration Determination;
9. PDE No. 0019/PDE/09/2022 regulates LPEI Employee Business Travel;
10. PDE No. 0014/PDE/05/2015 regulates the LPEI Employee Training and Development Program;
11. PDE No. 0028/PDE/12/2020 regulates Discipline Enforcement and Sanctions for Violations; and
12. PDE No. 0058.01/PDE/11/2019 regulates LPEI Employee Pensions.

Di luar perhatian terhadap para pegawai kami, LPEI juga berkomitmen untuk memastikan keberadaannya bermanfaat bagi masyarakat. LPEI terus berusaha untuk menjalin kolaborasi dan membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan yang telah dijalankan secara berkesinambungan ataupun lewat berbagai inisiatif Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

LPEI memiliki Kebijakan Keuangan Berkelanjutan yang digunakan sebagai pedoman dan landasan dalam merumuskan dan melaksanakan kegiatan TJSL. Selain itu, LPEI juga memberi perhatian khusus terhadap pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan melalui Program Kemitraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Direktur (PDD) No. 0004/PDD/03/2024 tentang Kebijakan Pengelolaan Dana Program Kemitraan Eks PT Bank Ekspor Indonesia (Persero).

Program Kemitraan merupakan pembiayaan yang diberikan kepada Mitra Binaan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil atau kegiatan ekonomi rakyat yang berskala mikro dan kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Sasaran Program Kemitraan adalah meningkatkan penyaluran dana untuk mendukung program pembiayaan melalui ekosistem ekspor LPEI serta mengoptimalkan pengelolaan dana yang belum tersalurkan. Selanjutnya, program ini bertujuan menyalurkan dana melalui pemanfaatan platform digital ekspor yang tengah dikembangkan oleh LPEI.

Beyond its attention to employees, LPEI is also committed to ensuring its presence benefits the community. LPEI continuously seeks to collaborate and build harmonious relationships with the community through various ongoing empowerment programs and Corporate Social Responsibility (TJSL) initiatives tailored to societal developments and needs.

LPEI has a Sustainable Finance Policy that serves as a guideline and foundation in formulating and implementing TJSL activities. Additionally, LPEI pays special attention to community development and empowerment, realized through the Partnership Program as regulated in the Board of Directors Regulation (PDD) No. 0004/PDD/03/2024 on the Management Policy of the Program Kemitraan Fund, inherited from PT Bank Ekspor Indonesia (Persero).

The Partnership Program provides financing to Fostered Partners to enhance the capacity of small businesses or micro-scale and small-scale economic activities, enabling them to become resilient and independent. The program aims to increase fund disbursement in support of financing initiatives within LPEI's export ecosystem and to optimize the management of undisbursed funds. Furthermore, the program seeks to channel financing through the digital export platform currently being developed by LPEI.

Demografi Karyawan

Employee Demographic

Pada akhir 2024, jumlah karyawan LPEI mencapai 521 orang, mengalami penurunan sebesar 7,5% dibandingkan jumlah karyawan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 563 orang. Informasi mengenai demografi karyawan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh POJK telah disampaikan di Demografi Karyawan dalam Laporan Tahunan. [\[OJK C.3\]](#) [\[GRI 2-7\]](#)

LPEI juga menyampaikan komposisi karyawan berdasarkan Metrik ESG IDX. Sebagai catatan, dari keseluruhan tenaga kerja, LPEI juga memiliki pegawai *outsourcing* (Tenaga Alih Daya atau "TAD") dan secara *de jure* mereka adalah pegawai Koperasi LPEI dan tercatat ada 143 orang pegawai TAD. [\[ESG S-04\]](#) [\[GRI 2-8\]](#)

As of the end of 2024, the total number of LPEI employees reached 521 individuals, representing a decrease of 7.5% compared to the total number of employees in the previous year, which was recorded at 563 employees. Information regarding employee demographics, as stipulated by POJK regulations, has been provided in the Employee Demographics section of the Annual Report. [\[OJK C.3\]](#) [\[GRI 2-7\]](#)

LPEI also reports employee composition based on the IDX ESG Metrics. Additionally, among the entire workforce, LPEI also has outsourced employees (known or "TAD"), who are *de jure* employees of the LPEI Cooperative and it was recorded 143 outsourced employees. [\[ESG S-04\]](#) [\[GRI 2-8\]](#)

Kesetaraan Gender [\[ESG S-01\]](#)

Gender Equality [\[ESG S-01\]](#)

Level Organisasi Level of Organization	Pria Male		Wanita Female	
	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage
Pelaksana Officer	60	11,52%	71	13,63%
Eksekutif Executives	144	27,64%	99	19,00%
Kepala Departemen Department Head	67	12,86%	35	6,72%
Kepala Divisi/Kantor Wilayah Division Head/Regional Office	26	4,99%	11	2,11%
Senior Executive Vice President	5	0,96%	3	0,58%
Total Karyawan Total Employees	302	57,97%	219	42,03%

Level Karyawan Berdasarkan Gender dan Kelompok Umur [\[ESG S-02\]](#)

Employee Level by Gender and Age Group [\[ESG S-02\]](#)

Rentang Usia (tahun) Age Range (years old)	Level Jabatan Level of Position										Total Karyawan Total Employees
	Pelaksana Organizer		Eksekutif Executive		Kepala Departemen Head of Department		Kepala Divisi/Kantor Wilayah Head of Division/ Regional Office		Senior Executive Vice President		
	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female	
18-25	3	3	3	8	-	-	-	-	-	-	17
25-35	37	41	63	40	4	-	-	-	-	-	185
35-45	19	24	71	45	50	26	11	4	-	-	250
>45	-	3	8	6	13	9	15	7	5	3	69

Perputaran dan Perekrutan Karyawan [GRI 401-1]

Employee Turnover and Recruitment [GRI 401-1]

Sepanjang tahun 2024, terdapat pergantian pegawai dan LPEI melakukan perekrutan pegawai baru untuk mengganti mereka yang keluar ataupun menempati posisi baru.

Bila dibandingkan dengan jumlah pegawai yang dimiliki LPEI pada tahun akhir tahun 2024, tercatat bahwa pegawai yang keluar dari LPEI tercatat sebanyak 68 orang atau 22,52%. Jumlah pegawai baru yang datang ke LPEI adalah 26 orang atau 8,61%. [ESG S-03]

Dasar kebijakan penerimaan pegawai atau rekrutmen mengacu pada PDE No. 0028/PDE/05/2019 tentang Penerimaan Pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Proses rekrutmen diawali dengan kegiatan perencanaan dan analisa kebutuhan SDM yang disusun berdasarkan pengembangan dan kebutuhan organisasi. Proses pengisian jabatan yang kosong (*vacant*) dapat dilakukan melalui rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal.

Rekrutmen internal dilakukan dengan manajemen talenta, sedangkan rekrutmen eksternal dilakukan melalui pengumuman kepada publik melalui namun tidak terbatas pada portal LPEI, media sosial LPEI, dan kerja sama dengan beberapa portal karier seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Talentics, Jobstreet, LinkedIn, dan beberapa career center perguruan tinggi terpilih di Indonesia. *Referral* pegawai, alumni intern, dan Tenaga Alih Daya (TAD) juga menjadi salah satu *sourcing channels* dalam rekrutmen eksternal.

Berikut ini adalah hasil perekrutan LPEI sepanjang tahun 2024 yang juga mempengaruhi tingkat perputaran pegawai:

Throughout 2024, there were employee turnovers, and LPEI conducted new employee recruitment to replace those who left or to fill new positions.

Compared to the total number of employees at LPEI at the end of 2024, the number of employees who left LPEI was recorded at 68 individuals or 22.52%. Meanwhile, the number of new employees joining LPEI was 26 individuals or 8.61%. [ESG S-03]

The employee recruitment policy is based on PDE No. 0028/PDE/05/2019 concerning Employee Recruitment at the Indonesia Eximbank (LPEI). The recruitment process begins with human resource planning and needs analysis, which are developed based on organizational growth and requirements. The process of filling vacant positions can be carried out through internal and external recruitment.

Internal recruitment is conducted through talent management, while external recruitment is carried out by announcing vacancies to the public through, but not limited to, the LPEI portal, LPEI social media, and collaboration with several career portals such as the Indonesia Endowment Fund for Education (LPDP), Talentics, Jobstreet, LinkedIn, and selected university career centers in Indonesia. Employee referrals, former interns, and Outsourced Personnel (TAD) also serve as sourcing channels for external recruitment.

The following is the recruitment results of LPEI throughout 2024 which also affected the employee turnover rate:

Rekrutmen Menurut Usia dan Gender

Recruitment by Age and Gender

Kelompok Usia Age	2024		2023	
	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female
< 30 tahun years old	3	5	24	26
30-50 tahun years old	9	2	3	1
> 50 tahun years old	6	1	4	2
Sub-Jumlah Sub Total	18	8	31	29
Jumlah Total	26		60	

Perputaran Pegawai

Employee Turnover

Uraian Description	2024	2023
Jumlah Pegawai Total Employees	521	563
Rekrutmen Baru New Recruitment	26	60
Kontrak Berakhir Contract Expired/Terminated	3	6
Mengundurkan Diri Resigned	25	38
Meninggal Dunia Passed-away	0	0
Pensiun Dini Early Retirement	32	1
Pensiun Karier Retirement Career	3	1
Tingkat Turnover Karyawan Employee Turnover Level	12,74%	8,17%
Tingkat Regretted Turnover Karyawan Employee Regretted Turnover Level	2,96%	6,75%

Tingkat *turnover* pegawai tahun 2024 mencapai 12,74% dibandingkan tahun 2023 sebesar 8,17%. LPEI menilai kinerja *turnover* pegawai berdasarkan kemampuan mengelola *regretted turnover*, yaitu pegawai yang mengundurkan diri secara sukarela dan memiliki kinerja minimal 'BAIK'. Pada tahun 2024, tingkat *regretted turnover* adalah sebesar 2,96% dibandingkan tahun 2023 sebesar 6,75%.

LPEI menurunkan angka *regretted turnover* dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi pegawai untuk mengisi posisi *vacant* melalui mekanisme *internal job posting*, program pengembangan pegawai (*learning*) dan keterlibatan dalam proyek-proyek internal. Terdapat kesempatan yang setara bagi seluruh pegawai bertalenta untuk mengembangkan karier melalui mutasi dan promosi.

The employee turnover in 2024 reached 12.74%, compared to 8.17% in 2023. LPEI evaluates its turnover performance based on its ability to manage regretted turnover, which refers to employees who resign voluntarily and have a minimum performance rating of 'GOOD'. In 2024, the regretted turnover rate was 2.96%, compared to 6.75% in 2023.

To reduce regretted turnover, LPEI has taken proactive steps by providing broader opportunities for employees to fill vacant positions through an internal job posting mechanism, implementing employee development programs (learning initiatives), encouraging employee participation in internal projects. LPEI ensures equal career development opportunities for all talented employees through job rotations and promotions.

Praktik Kerja yang Adil dan Bertanggung Jawab

Fair and Responsible Employment Practice

LPEI berupaya untuk menjalin hubungan kerja yang baik dengan menetapkan Peraturan Lembaga (secara internal disebut Peraturan Direktur Eksekutif tentang Kebijakan Sistem Kepegawaian) yang terdaftar dan disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. Kep.4/HI.00.00/00.0000.240520007/B/IX/2024 tanggal 20 September 2024. Seluruh (100%) pegawai LPEI tercakup dalam Peraturan Lembaga dimaksud. [\[GRI 2-30\]](#)

Persentase pegawai laki-laki dan perempuan di LPEI untuk tahun 2024, yaitu 57,97% pria dan 42,03% wanita. LPEI menjalankan manajemen ketenagakerjaan yang menghargai keberagaman dan memberikan kesempatan yang setara tanpa adanya diskriminasi terhadap gender, suku, agama, ras, maupun golongan. Praktik tersebut didukung oleh kebijakan nondiskriminasi yang tertuang dalam Peraturan PDE No. 0001/PDE/03/2022. [\[OJK F.18\]](#)

Sebagaimana diatur dalam PDE No. 0028/PDE/05/2019 tentang Penerimaan Pegawai LPEI, khususnya pada Pasal 8 "Persyaratan Kandidat Pegawai", ditetapkan bahwa batas usia minimum pelamar atau kandidat pegawai LPEI adalah 21 tahun. Pada pasal tersebut juga dijelaskan lebih lanjut mengenai tata waktu bekerja, istirahat, dan hak cuti pegawai. Pada praktiknya, apabila ditemukan adanya pegawai yang karena suatu hal diharuskan bekerja melebihi waktu kerja yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan berhak atas bantuan lembur sesuai dengan kebijakan yang berlaku di internal LPEI. Kebijakan mengenai bantuan lembur bagi pegawai telah diatur pada PDE No.0055/PDE/11/2019 tentang Remunerasi Pegawai pada pasal 35-37. [\[OJK F.19\]](#) [\[ESG S-10\]](#)

LPEI strives to establish good working relationships by implementing the Institution Regulations (internally referred to as the Executive Director Regulation on the Employee System Policy), which are registered and approved by the Indonesian Ministry of Manpower through the Decree of the Director General of Industrial Relations Development and Social Security for Workers No. Kep. 4/ HI.00.00/00.0000.240520007/B/IX/2024 dated September 20, 2024. All (100%) LPEI employees are covered under the Institution Regulations. [\[GRI 2-30\]](#)

The percentage of male and female employees at LPEI in 2024 is 57.97% men and 42.03% women. LPEI implements employment management that values diversity and provides equal opportunities without discrimination based on gender, ethnicity, religion, race, or social group. This practice is supported by a non-discrimination policy outlined in PDE Regulations No. 0001/PDE/03/2022. [\[OJK F.18\]](#)

As stipulated in PDE No. 0028/PDE/05/2019 on LPEI Employee Recruitment, specifically in Article 8 "Employee Candidate Requirements," the minimum age limit for applicants or employee candidates at LPEI is set at 21 years. This article also further explains the work schedule, rest periods, and employee leave entitlements. In practice, if an employee is required to work beyond the designated working hours for any reason, they are entitled to overtime compensation in accordance with LPEI's internal policies. The policy regarding overtime assistance for employees is regulated in PDE No. 0055/PDE/11/2019 on Employee Remuneration, specifically in Articles 35-37. [\[OJK F.19\]](#) [\[ESG S-10\]](#)

Lingkungan Kerja Ramah Disabilitas

Disability-Friendly Work Environment

Kesempatan untuk bekerja di LPEI juga terbuka bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik (difabel) dan penyandang disabilitas. Pada akhir 2024, LPEI mempekerjakan 4 orang tenaga kerja alih daya (TAD) penyandang disabilitas yang bekerja sebagai pegawai Administrasi, Petugas Surat Masuk/Keluar dan *Scanner*.

Upaya-upaya yang dilakukan LPEI merupakan wujud dari praktik HAM dan kepatuhan pada peraturan pemerintah yang berlaku terkait penyandang disabilitas.

Opportunities to work at LPEI are also open to individuals with physical limitations (persons with disabilities). By the end of 2024, LPEI employed 4 outsourced employees with disabilities working as Administrative Officer, Incoming/Outgoing Letter Officer, and Scanner Officer.

These efforts reflect LPEI's commitment to human rights practices and compliance with government regulation regarding persons with disabilities.

Perlindungan Terhadap HAM, Perlindungan dari Pelecehan Seksual dan Tindakan Diskriminasi Lainnya

Protecting Human Rights, Protection Against Sexual Harassment and Other Discriminations

LPEI melindungi karyawan dari segala bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejadian pelecehan seksual atau tindakan diskriminasi lainnya. [\[ESG S-09\]](#)

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat kejadian pelanggaran terhadap hak asasi dari setiap karyawan. [\[ESG S-07\]](#)

LPEI juga memiliki kebijakan yang melindungi karyawan dari pelecehan dan tindakan diskriminasi lainnya. Kebijakan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0017/PDE/08/2024 tentang Kebijakan Sistem Kepegawaian. [\[ESG S-08\]](#)

LPEI protects its employees from all forms of human rights (HAM) violations, sexual harassment incidents, or other discriminatory actions. [\[ESG S-09\]](#)

Throughout 2024, there were no reported violations of the human rights of any employee. [\[ESG S-07\]](#)

LPEI also has policies in place to protect employees from harassment and other discriminatory actions. These policies are stipulated in the Executive Director Regulation Number 0017/PDE/08/2024 regarding the Employment System Policy. [\[ESG S-08\]](#)

Perlindungan Terhadap Hak-Hak Karyawan Perempuan

Protection of the Rights of Female Employees

Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0001/PDE/03/2022 tentang Kebijakan Sistem Kepegawaian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia juga mengatur mengenai komitmen LPEI dalam mendukung pengembangan karier pegawai perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender di tempat kerja. Dukungan lainnya terhadap pegawai perempuan juga ditunjukkan melalui berbagai inisiatif kebijakan berikut ini:

Cuti Melahirkan [GRI 401-3]

Hak cuti melahirkan ditetapkan dengan mengacu kepada UU 13/2003 dan regulasi internal yang berlaku adalah PDE 0009/PDE/07/2022 tentang Waktu Kerja Pegawai pada pasal 11. LPEI memberikan hak cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan kepada pegawai perempuan dengan membayarkan remunerasi dan tunjangan secara penuh, serta menjamin penempatan kembali di posisi kerja yang dimilikinya sebelum yang bersangkutan menjalani cuti melahirkan.

Sesuai dengan kebijakan yang berlaku di LPEI, cuti melahirkan tidak mengurangi hak cuti tahunan maupun hak cuti besar pegawai yang bersangkutan, namun pengambilan hak cuti besar dapat dilakukan paling cepat 1 (satu) tahun setelah cuti melahirkan.

Selain memberikan hak cuti bagi pegawai perempuan, LPEI juga memberikan hak cuti melahirkan ayah kepada pegawai laki-laki untuk menemani istri bersalin atau keguguran selama 2 (dua) hari, tanpa dipotong gaji.

Selama tahun 2024, sebanyak 20 pegawai perempuan mengajukan cuti melahirkan dan seluruhnya (100%) pegawai yang mengajukan cuti sudah kembali bekerja seperti sedia kala setelah periode cutinya selesai. Masih di tahun yang sama, sebanyak 19 pegawai laki-laki mengajukan cuti mendampingi istri melahirkan/keguguran dan seluruhnya (100%) sudah kembali bekerja setelah masa cuti berakhir.

Cuti Haid

Sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU 13 tahun 2003, LPEI memberikan hak cuti selama dua hari kepada pegawai perempuan yang selama periode haid merasakan sakit yang parah.

The Executive Director Regulation Number 0001/PDE/03/2022 on the Employment System Policy of the Indonesia Eximbank (LPEI) also regulates LPEI's commitment to supporting the career development of female employees and promoting gender equality in the workplace. Additional support for female employees is demonstrated through the following policy initiatives:

Maternity Leave [GRI 401-3]

The right to maternity leave is established in accordance with Act No. 13/2003 and the internal regulation PDE 0009/PDE/07/2022 on Employee Working Hours, specifically Article 11. LPEI grants three months of maternity leave to female employees, during which they receive full remuneration and benefits. Additionally, LPEI guarantees their reinstatement to their previous positions after the completion of maternity leave.

According to LPEI's policy, maternity leave does not reduce the employee's entitlement to annual leave or extended leave. However, extended leave can only be taken at least 1 (one) year after the maternity leave period.

In addition to granting maternity leave for female employees, LPEI also provides paternity leave for male employees, allowing them to accompany their wives during childbirth or miscarriage for 2 (two) days, without any salary deductions.

Throughout 2024, a total of 20 female employees took maternity leave, and all of them (100%) returned to work after their leave ended. In the same year, 19 male employees took paternity leave to accompany their wives during childbirth/miscarriage, and all of them (100%) returned to work after their leave period ended.

Menstrual Leave

As stipulated in Article 81, paragraph (1) of Act No. 13/2003, LPEI grants two days of leave to female employees who experience severe pain during their menstrual period.

Cuti Keguguran

Peraturan Internal (PDE) Nomor 0001/PDE/03/2022 Pasal 42 Ayat 3-5 tentang Kebijakan Kepegawaian mengatur bahwa pegawai perempuan di LPEI berhak atas cuti keguguran yang tidak disengaja (*abortus provocatus*) atau dengan alasan medis selama 1,5 bulan terhitung dari hari kandungannya gugur atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

Ketersediaan Ruang Laktasi

LPEI menyediakan ruang laktasi yang nyaman di tempat kerja untuk pegawai perempuan yang masih dalam masa menyusui.

Miscarriage Leave

According to the Internal Regulation (PDE) Number 0001/PDE/03/2022, Article 42, Paragraphs 3-5 regarding Employee Policy, female employees at LPEI are entitled to miscarriage leave (*abortus provocatus*) or leave due to medical reasons for 1.5 months from the date of miscarriage or as determined by a medical certificate from a gynecologist or midwife.

Availability of Lactation Room

LPEI provides a comfortable lactation room in the workplace for female employees who are breastfeeding.

Remunerasi dan Fasilitas Kesejahteraan Karyawan

Employee Remuneration and Welfare Facilities

LPEI menggunakan pendekatan *Merit Based* dan *Performance Based System* untuk menentukan remunerasi bagi para pegawainya. Kedua pendekatan tersebut digunakan pada saat menentukan upah dan bonus yang dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, golongan pegawai (*personal grading*), kelompok jabatan (*job group*), golongan jabatan (*job grading*), masa kerja pegawai, dan/atau masa jabatan. Penentuan remunerasi dilakukan secara wajar tanpa membedakan latar belakang berdasarkan politik, agama, ras, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, usia dan kondisi kesehatan.

Dasar kebijakan yang menjadi landasan dalam menentukan skema dan besaran paket remunerasi pegawai LPEI adalah regulasi internal berikut ini:

1. PDE No. 0017/PDE/08/2024 tentang Kebijakan Sistem Kepegawaian;
2. PDE No. 0013/PDE/06/2024 tentang Remunerasi Pegawai;
3. KDE No. 0019/KDE/06/2024 tentang Penerapan Remunerasi Pegawai.

Sebagaimana diatur dalam kebijakan internal LPEI, komponen remunerasi dan fasilitas bagi pegawai diberikan dalam bentuk kompensasi tetap, penghasilan lainnya, manfaat, dan fasilitas. Terdapat perbedaan signifikan dalam paket remunerasi yang diberikan kepada pegawai LPEI dengan pegawai *outsourcing* (Tenaga Alih Daya atau "TAD"). Paket remunerasi pegawai LPEI di atas normatif yaitu 16 kali gaji tetap dalam setahun, sementara paket remunerasi pegawai *outsourcing* sesuai normatif adalah 13 kali gaji tetap dalam setahun. Hal ini dikarenakan pegawai TAD secara *de jure* adalah pegawai Koperasi LPEI, sementara pegawai tetap adalah pegawai LPEI yang masing-masing mengikuti ketentuan remunerasi institusi yang menaunginya.

[GRI 401-2]

Terkait komponen remunerasi pegawai yang utama, yaitu gaji pokok, LPEI memastikan bahwa seluruh pegawai telah menerima besaran gaji yang sesuai dengan regulasi. Pegawai level terendah memiliki gaji (upah) sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku di daerah masing-masing tempat operasional LPEI berada. [OJK F.20]

LPEI memberikan kompensasi kepada setiap pegawai sesuai dengan kontribusi dan level jabatan. Seluruh pegawai, baik pria maupun wanita, menerima remunerasi yang sama untuk setiap level jabatan yang sama.

LPEI employs a Merit-Based and Performance-Based System approach to determine employee remuneration. These two approaches are used when setting salaries and bonuses based on qualifications, competencies, performance, employee classification (*personal grading*), job group, job grading, length of service, and/or tenure. Remuneration is determined fairly without discrimination based on political background, religion, race, origin, gender, marital status, age, or health condition.

The policy framework that serves as the foundation for determining the remuneration scheme and package for LPEI employees includes the following internal regulations:

1. PDE No. 0017/PDE/08/2024 on Employment System Policy;
2. PDE No. 0013/PDE/06/2024 on Employee Remuneration;
3. KDE No. 0019/KDE/06/2024 on Employee Remuneration Implementation.

As stipulated in LPEI's internal policies, remuneration components and employee benefits are provided in the form of fixed compensation, additional earnings, benefits, and facilities. There is a significant difference between the remuneration packages given to LPEI employees and outsourced employees (known as "TAD"). LPEI employees receive a remuneration package above the normative level, amounting to 16 times the fixed salary per year, while outsourced employees receive a normative remuneration package of 13 times the fixed salary per year. This distinction arises because TAD employees are *de jure* employees of the LPEI Cooperative, whereas permanent employees are LPEI employees, each following the remuneration provisions of their respective institutions. [GRI 401-2]

Regarding the primary remuneration component, which is the base salary, LPEI ensures that all employees receive salaries in accordance with regulations. The lowest-level employees receive wages aligned with the applicable Regional Minimum Wage (UMR) in each operational area of LPEI. [OJK F.20]

LPEI provides compensation to each employee based on their contribution and job level. All employees, regardless of gender, receive equal remuneration for the same job level.

Rasio Perbandingan Standar Upah Pegawai Terendah terhadap UMR [OJK F.20]

Comparison Ratio of Lowest Employee Salary Standard to UMR [OJK F.20]

Wilayah Operasional Operational Area	UMR 2024 (Rp)	Gaji Pegawai Golongan Terendah Lowest Employee Salary			
		Tetap Permanent (Rp)	Rasio Ratio	Kontrak Contract (Rp)	Rasio Ratio
Jakarta	5.067.381	7.583.000	1 : 1,50	-	-
Medan	3.769.082	14.418.000	1 : 3,82	13.841.500	1 : 3,67
Surabaya	4.725.479	9.100.000	1 : 1,93	13.607.500	1 : 2,88
Makassar	3.643.321	14.789.000	1 : 4,06	-	-
Surakarta	2.269.070	14.086.000	1 : 6,21	13.841.500	1 : 6,10
Balikpapan	3.475.595	13.593.540	1 : 3,91	13.841.500	1 : 3,99
Batam	4.685.050	13.627.000	1 : 2,91	13.841.500	1 : 2,95
Denpasar	3.096.823	13.794.000	1 : 4,45	...	-

Paket Remunerasi bagi Pegawai [GRI 401-2]

Remuneration Package for Employees [GRI 401-2]

Komponen Component	Pegawai Tetap Permanent Employee	Pegawai Kontrak Contract Employee
Tunjangan Tidak Tetap (Insentif Bulanan) Non-fixed Allowances (Monthly Incentive)		
Tunjangan Cuti Leave Allowance	X	X
Upah Lembur & Makan Lembur Overtime Pay & Overtime Meal	V	V
Program Insentif Incentive Program	V	V
Tunjangan Daerah & Penugasan Regional Allowances & Assignments	V	V
Santunan Pernikahan/Kelahiran/Kematian Marriage/Birth/ Death Compensation	V	V
Bantuan Biaya Pendidikan Anak Child Education Fee Assistance	X	X
Kecelakaan Kerja Work Accidents	V	V
Asuransi Kematian di Tempat Kerja & Luar Tempat Kerja Workplace & Outside Workplace Death Insurance	V	V
Asuransi Kesehatan Health Insurance	V	V
Asuransi Kesehatan bagi Pasangan Health Insurance for Spouse	V	V
Asuransi Kesehatan bagi Anak Health Insurance for Children	V	V
Hak Cuti Leave Entitlement	V	V

Paket Remunerasi bagi Pegawai [GRI 401-2]
Remuneration Package for Employees [GRI 401-2]

Komponen Component	Pegawai Tetap Permanent Employee	Pegawai Kontrak Contract Employee
Cuti Melahirkan Maternity Leave	V	V
Cuti Haid Period Leave	X	X
Cuti karena Keguguran untuk Wanita Leave for Miscarriage for Women	V	V
Cuti untuk Pria karena Kelahiran Anak Paternity Leave	V	V
Cuti Ibadah Religious Leave	V	V
Izin Meninggalkan Pekerjaan Tanpa Gaji Unpaid Leave	V	X
Program Pembiayaan Karyawan untuk Rumah dan/atau Kendaraan Employee Financing Program for Home and/or Vehicle	V	X
Dana Pensiun Pension Fund	V	X
Pesangon Severance	V	X
Insentif Tahunan Yearly Incentive		
Uang Kompensasi Compensation	X	V
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowance	V	V
Penghargaan Loyalitas Loyalty Rewards	V	X

Kesehatan dan Keselamatan Kerja [OJK F.21]

Occupational Health and Safety [OJK F.21]

Pengelolaan aspek keselamatan dan kesehatan, kerja (K3) dilaksanakan dengan mengacu kepada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja. Peraturan terkait K3 LPEI, saat ini mengacu pada Panduan Keselamatan Gedung (*Office Tower Safety Guide*) Treasury & Prosperity Tower District 8 yang berlaku dan wajib diikuti oleh seluruh penghuni (*tenant*) dalam melakukan pencegahan dan mengambil tindakan yang tepat ketika keadaan darurat terjadi. LPEI berkomitmen penuh untuk mematuhi peraturan tersebut dan berkeyakinan bahwa pegawai yang sehat adalah kunci untuk mendukung efektivitas kegiatan operasional dan mendorong produktivitas kinerja Lembaga. [ESG S-11]

LPEI membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai bentuk tanggung jawab terkait pengelolaan dan pemenuhan aspek K3 yang berada di bawah Divisi Sumber Daya Manusia & Pengadaan & Umum. Kepanitiaan ini tercatat dalam BS.0006/DSL/12/2024 tentang Penugasan Sebagai Tim Tanggap Darurat LPEI yang terdiri dari 1 pegawai yang bertugas sebagai *Senior Floor Warden* dan 2 pegawai di setiap lantai sebagai *Floor Warden*. Pembentukan panitia ini sejalan dengan peraturan yang berlaku pada lokasi kantor LPEI yang berada di Gedung Prosperity sehingga terintegrasi dengan panduan *Office Tower Safety Guide* yang dikeluarkan oleh pihak K3/HSE pengelola Gedung Prosperity. [GRI 403-1]

Dalam panduan K3 tersebut diatur secara jelas mengenai langkah-langkah antisipasi yang wajib dilakukan oleh pegawai saat berhadapan dengan situasi darurat di area Gedung Prosperity. Agar semua program K3 yang tercantum dalam panduan dimaksud senantiasa dapat berjalan dengan baik, maka melalui Keputusan Direktur Eksekutif, LPEI telah menunjuk beberapa orang pegawai untuk menjadi petugas *Floor Warden* apabila terjadi keadaan darurat di kantor pusat LPEI Gedung Prosperity.

Program dan fasilitas K3 yang tersedia di kantor pusat adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas Gedung Prosperity: P3K, APAR (Alat Pemadam Api Ringan), *hydrant*, *sprinkler*, jalur evakuasi (pintu darurat, koridor, dan tangga darurat);
2. Memperkuat *Disaster Recovery Center* (DRC) guna mengantisipasi jika terjadi bencana atau kondisi yang dapat menyebabkan terganggunya kegiatan operasional bisnis, sehingga keberlangsungan bisnis LPEI tetap terjaga;

The management of Occupational Health and Safety (OHS) aspects is carried out in accordance with Law No. 13 of 2003 on Manpower, Act No. 1 of 1970 on Work Safety, and Minister of Manpower Regulation No. PER.04/MEN/1987 on the Occupational Health and Safety Committee (P2K3) and the Appointment Procedure for Occupational Safety Experts. LPEI's OHS regulations currently refer to the Office Tower Safety Guide of Treasury & Prosperity Tower District 8, which is applicable and mandatory for all tenants to follow in preventing and taking appropriate actions during emergencies. LPEI is fully committed to complying with these regulations and believes that healthy employees are key to supporting the effectiveness of operational activities and driving the Institution's performance productivity. [ESG S-11]

LPEI established the Occupational Safety and Health Committee (P2K3) as part of its responsibility for managing and fulfilling OHS (K3) aspects, under the Human Resources, Procurement & General Affairs Division. This committee is documented in BS.0006/DSL/12/2024 regarding the Assignment as LPEI Emergency Response Team, consisting of 1 employee serving as Senior Floor Warden and 2 employees on each floor as Floor Wardens. The formation of this committee aligns with the applicable regulations at LPEI's office in the Prosperity Building and is integrated with the Office Tower Safety Guide issued by the Prosperity Building's K3/HSE management. [GRI 403-1]

The OHS guidelines clearly outline the necessary precautionary steps that employees must take when facing emergency situations within the Prosperity Building. To ensure that all OHS programs outlined in the guidelines are effectively implemented, the Executive Director has appointed several employees as Floor Wardens to handle emergencies at LPEI's headquarters in the Prosperity Building.

OHS programs and facilities available at LPEI head office are as follows:

1. Prosperity Building Facilities: First Aid Kits (P3K), Fire Extinguishers (APAR), hydrants, sprinklers, evacuation routes (emergency exits, corridors, and emergency stairs);
2. Strengthening the Disaster Recovery Center (DRC) to anticipate disasters or conditions that may disrupt business operations and ensure business continuity at LPEI.

3. Melakukan kegiatan latihan evakuasi secara berkala bersama-sama dengan <i>building management</i> guna mengantisipasi kondisi darurat/bencana, sehingga dapat meminimalisir risiko kecelakaan kerja; 4. Menyediakan fasilitas perangkat medis antara lain kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), tabung oksigen, kursi roda dan obat-obatan umum untuk mengantisipasi kondisi darurat pegawai di lingkungan kerja LPEI; 5. Menerapkan langkah pencegahan bahaya kebakaran di lingkungan kerja termasuk larangan merokok di tempat-tempat yang dilarang untuk merokok yang ditentukan oleh LPEI dan <i>building management</i>; 6. Melakukan pelatihan rutin tim tanggap darurat bencana, simulasi tim tanggap darurat, dan kampanye sadar dan siap melaksanakan <i>Business Continuity Plan</i> pada kondisi darurat bencana.	3. Conducting regular evacuation drills in collaboration with the building management to anticipate emergency/disaster situations, minimizing workplace accident risks; 4. Providing medical equipment and supplies including first aid kits (P3K), oxygen tanks, wheelchairs, and general medicines to anticipate employee health emergencies in the workplace; 5. Implementing fire hazard prevention measures including a smoking ban in designated non-smoking areas as determined by LPEI and the building management; 6. Conducting regular training for the emergency response team including disaster response team simulations and awareness campaigns to ensure readiness in executing the Business Continuity Plan during emergency situations.

Selama tahun 2024, LPEI tidak mencatatkan adanya kecelakaan kerja yang terjadi baik di kantor pusat maupun cabang. [ESG S-06]

Throughout 2024, LPEI recorded zero workplace accidents at its head office and branch offices. [ESG S-06]

LPEI juga mendaftarkan seluruh pegawai pada program BPJS Kesehatan dan juga menyediakan jasa asuransi kesehatan melalui kerja sama dengan PT Asuransi Astra Life, yang mana seluruh preminya menjadi tanggungan LPEI. [GRI 403-8]

LPEI also enrolls all employees in the BPJS Kesehatan (Indonesia's National Health Insurance Program) and provides additional health insurance services through a partnership with PT Asuransi Astra Life, with LPEI covering the full insurance premium. [GRI 403-8]

Selain itu, LPEI juga bekerja sama dengan klinik kesehatan untuk menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan tahunan kepada pegawai yang berusia 40 tahun ke atas, sementara bagi pegawai dengan usia di bawah 40 tahun wajib melakukan pemeriksaan kesehatan setiap 2 (dua) tahun sekali. Per 31 Desember 2024, seluruh (100%) karyawan tetap LPEI baik di kantor pusat maupun cabang sudah terdaftar pada program BPJS Kesehatan dan terlindungi oleh program asuransi PT Asuransi Astra Life. [GRI 403-8]

Additionally, LPEI collaborates with health clinics to provide annual medical check-ups for employees aged 40 and above, while employees under 40 years old are required to undergo a medical check-up every 2 (two) years. As of December 31, 2024, 100% of LPEI's permanent employees, both at head office and branch offices, are enrolled in BPJS Kesehatan and covered under PT Asuransi Astra Life's insurance program. [GRI 403-8]

Pelatihan dan Pengembangan [OJK F.22]

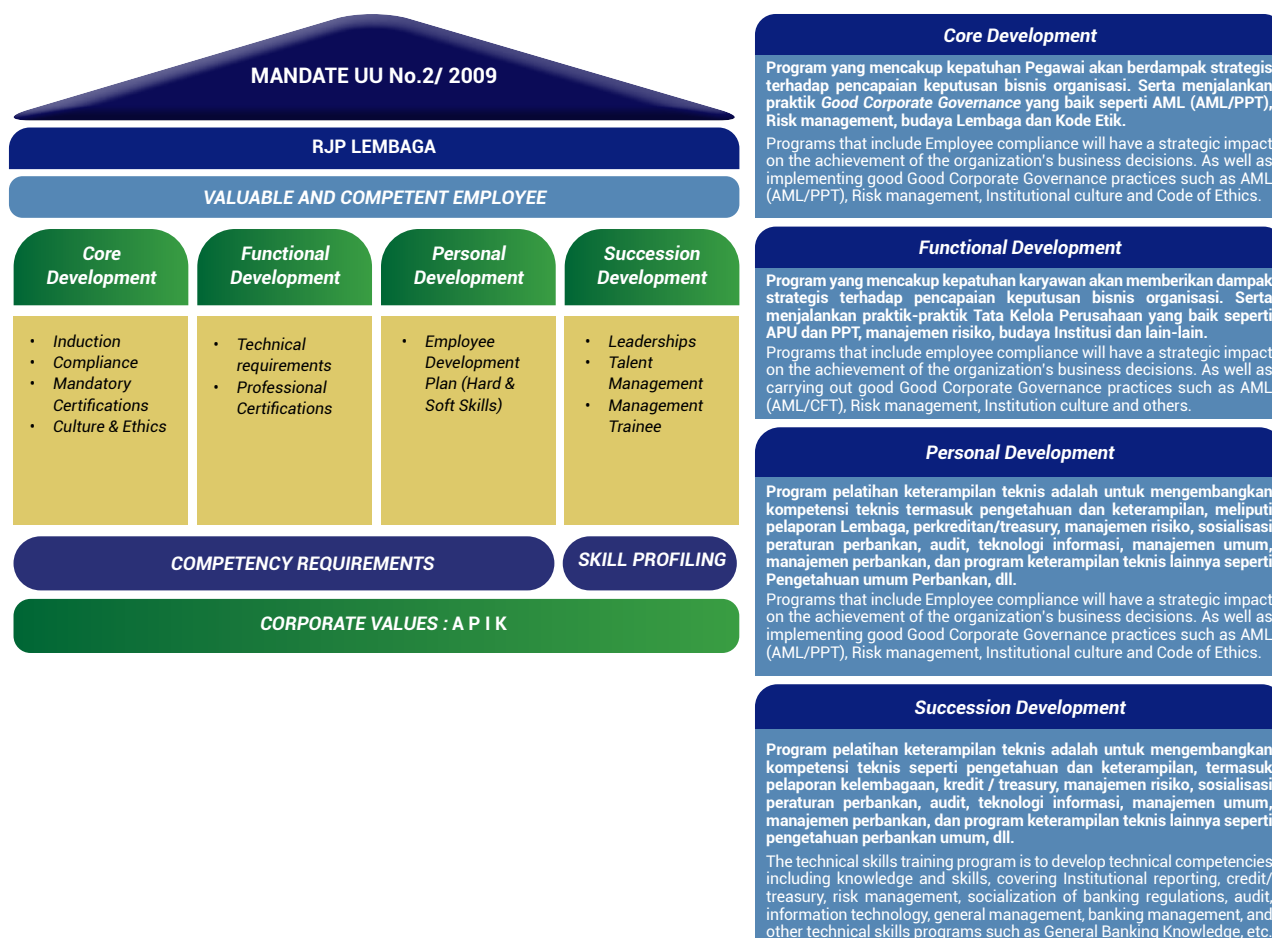
Training and Development [OJK F.22]

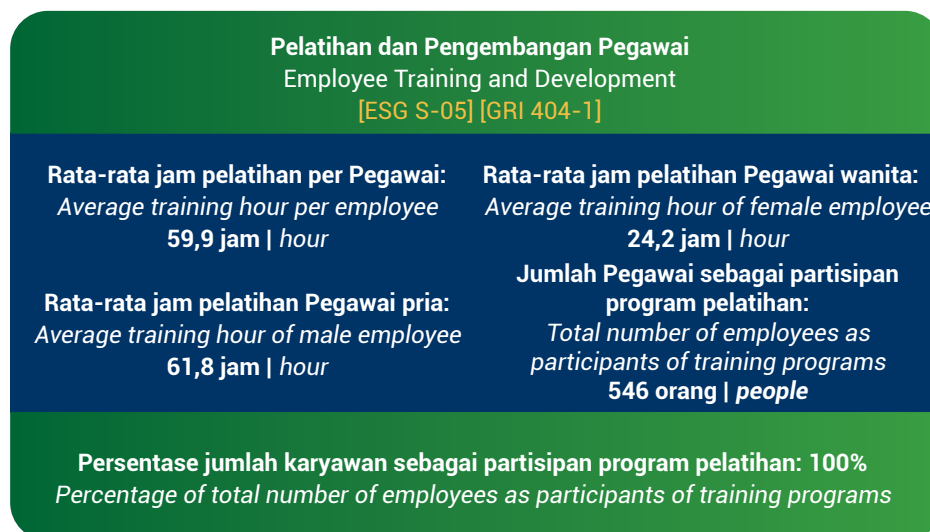
Pada tahun 2024, LPEI melanjutkan pengembangan kompetensi pegawai melalui *Reskilling* dan *Upskilling* melalui *Learning Academy* yang berfokus pada program pelatihan dan pengembangan terstruktur (*Structured Learning Program*) melalui kombinasi berbagai macam metode belajar. Program pengembangan ini menyasar kompetensi-kompetensi dasar seperti kompetensi *core*, teknik, dan kepemimpinan yang *future-ready*, untuk semua level di Lembaga. LPEI mengadakan 144 program pelatihan dan pengembangan pegawai dengan metode *in-class* (daring dan luring), belajar mandiri (*self-paced learning/e-learning*), ataupun bimbingan (*coaching/mentoring*). Pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan pegawai LPEI dilandaskan pada kerangka model sebagai berikut:

In 2024, LPEI continued to develop employee competencies through reskilling and upskilling initiatives via the Learning Academy, which focuses on structured training and development programs (Structured Learning Program) using a combination of various learning methods. This development program targets fundamental competencies such as core, technical, and future-ready leadership competencies, for all levels within the Institution. LPEI conducted 144 employee training and development programs through in-class methods (both online and offline), self-paced learning (e-learning), and guided learning (coaching/mentoring). The implementation of LPEI's employee training and development programs is based on the following model framework:

Kerangka Pengembangan Pegawai

Employee Development Framework





Adapun fokus pelatihan dan pengembangan pegawai yang akan dilakukan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. *Capability Development*

Sertifikasi Profesi sebagai pengakuan atas keahlian dan kompetensi teknis yang sejalan dengan perkembangan terkini dari industri keuangan dan kekhususan LPEI terdiri dari:

- Sertifikasi Kompetensi Wajib Pegawai**
Dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif dan terencana, LPEI mengisi jabatan Manajemen dan Pejabat Senior LPEI dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang manajemen risiko. Setiap pegawai LPEI wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko berdasarkan klasifikasi unit kerja dan jenjang jabatan Pegawai.
- Sertifikasi Kompetensi Bidang Kerja**
Sertifikasi yang diatur oleh Lembaga Pemerintahan, Kementerian dan Lembaga lainnya yang terkait dengan pengawasan dan supervisi LPEI dengan mengacu kepada Standar Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- Sertifikasi Kompetensi Bidang Teknis**
Sertifikasi Profesi yang sesuai dengan kebutuhan jasa keuangan, bisnis, dan operasional LPEI meliputi namun tidak terbatas pada bidang kerja Kepatuhan, Audit Intern, *Trade Finance*, Syariah, Teknologi Informasi, Legal, Akunting dan Perpajakan, *Vendor Management*, serta Pengadaan Barang dan Jasa.

Employee training and development program in 2024 was focused on the following:

1. *Capability Development*

Professional Certification as a recognition of technical skills and expertise in line with current developments in the financial industry and the specific nature of LPEI, consisting of:

- Mandatory Employee Competency Certification**
To implement effective and well-planned risk management, LPEI appoints individuals with the necessary competencies and expertise in risk management to fill management and senior official roles. Every LPEI employee is required to hold a Risk Management Certificate, classified according to their unit and job level.
- Job Field Competency Certification**
Certifications governed by government institutions, ministries, and other relevant bodies overseeing LPEI's activities, referring to the Indonesian National Work Competency Standards (SKKNI) and the Indonesian National Qualification Framework (KKNI).
- Technical Field Competency Certification**
Professional certifications aligned with the needs of LPEI's financial, business, and operational services, including but not limited to Compliance, Internal Audit, Trade Finance, Sharia, Information Technology, Legal, Accounting and Taxation, Vendor Management, and Procurement of Goods and Services.

2. Competency Development

Merupakan penguatan kompetensi LPEI sesuai mandat dan model bisnis baru, serta mendukung pengembangan ekosistem ekspor melalui kompetensi *technical* dan *soft skill*. Program pelatihan dilakukan melalui:

- Pengembangan kapabilitas/kompetensi pegawai dan kapasitas organisasi akan diselaraskan dengan kebutuhan Lembaga difokuskan pada penguatan pengetahuan dan kemampuan pegawai terhadap produk LPEI sesuai mandat yaitu jasa konsultasi, asuransi, penjaminan dan *trade finance*, serta syariah.
- Pengembangan kapabilitas dilakukan melalui penguatan pengetahuan terkait komoditas dan sektor industri unggulan dari hulu ke hilir (*product derivative* dan *supply chain*) melalui penguatan terkait *advisory services* dan *international relationship*.
- Pengembangan kapabilitas kompetensi teknikal di bidang perdagangan internasional seperti *supply chain*, *logistic*, kepabeanan, dan devisa hasil ekspor.
- Penguatan *soft competency* pegawai sehingga mampu memberikan peningkatan kinerja lembaga dalam menjalankan mandat melalui internasional dan *stakeholders relationship*.
- Peningkatan dan penguatan kapabilitas pegawai agar sesuai dengan kompetensi yang diperlukan pada model bisnis baru Lembaga dan sejalan dengan perkembangan terkini dari industri keuangan dan kekhususan LPEI dalam menciptakan ekosistem ekspor melalui pengembangan kompetensi teknikal fungsional masing-masing *jobs* untuk dapat melakukan pekerjaannya dengan efektif sesuai kebutuhan Lembaga. Pengembangan kapabilitas internal dilakukan tidak hanya yang bersifat vertikal (lebih tinggi dibandingkan kompetensi yang dimilikinya saat ini), melainkan juga horizontal (pengembangan kompetensi lintas fungsi).

3. Succession Development

Kebutuhan atas talenta pada pengembangan rencana suksesi secara keseluruhan dalam organisasi LPEI. Persiapan dan identifikasi potensi manajemen talenta dalam organisasi adalah untuk membangun pemimpin masa depan, diprioritaskan untuk suksesi pengganti manajemen senior dan pejabat senior (Direktur Pelaksana dan dua jabatan di bawahnya).

2. Competency Development

This involves strengthening LPEI's competencies in line with its mandate and new business model, as well as supporting export ecosystem development through both technical and soft skills. Training programs are delivered through:

- Development of employee capabilities and organizational capacity aligned with the Institution's needs, focusing on strengthening employee knowledge and skills related to LPEI's mandated products, namely consulting services, insurance, guarantees, trade finance, and sharia-based products.
- Capability development through enhanced knowledge of leading commodities and industrial sectors from upstream to downstream (product derivatives and supply chains), including enhanced advisory services and international relationship capabilities.
- Development of technical competencies in international trade fields such as supply chains, logistics, customs, and foreign exchange from export proceeds.
- Strengthening employees' soft competencies to improve institutional performance in fulfilling its mandate through international and stakeholder relationships.
- Improving and strengthening employee capabilities to align with the competencies required by the Institution's new business model, in accordance with the latest developments in the financial industry and LPEI's unique role in building an export ecosystem. This is achieved through the development of functional technical competencies specific to each role, enabling employees to perform their duties effectively based on the Institution's needs. Internal capability development is pursued both vertically (advancing beyond current competencies) and horizontally (developing cross-functional competencies).

3. Succession Development

Addressing the talent needs for succession planning across LPEI's organization. Talent identification and preparation are aimed at building future leaders, with a focus on succession for senior and executive management (Managing Directors and two levels below).

Bertumbuhnya kebutuhan atas kumpulan talenta akan ditekankan pada investasi mengembangkan talenta muda sebagai pengganti yang kuat dari pemimpin masa depan yang diprioritaskan untuk kesuksesan pengganti *middle manajemen* dan *senior management* di seluruh organisasi LPEI. Saat ini LPEI memiliki talenta dalam beberapa program, diantaranya:

- Youth Talent* merupakan talenta muda dalam program *management trainee* yaitu LFT dan RMDP. *Youth Talent* merupakan talenta dalam masa persiapan kaderisasi kepemimpinan dasar.
- Talent Scouting* merupakan talenta LPEI dalam masa persiapan kaderisasi kepemimpinan manajerial.
- Talent Pool* merupakan talenta dari program pemetaan pegawai yang dinilai bertalenta, mampu menunjukkan kinerja unggul atau istimewa, menjadi panutan atau cermin bagi pegawai lain untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh sebuah Lembaga berdasarkan penilaian kinerja, *assessment*, dan kalibrasi Direktorat.

Fokus program pengembangan dilakukan sebagai strategi besar dari pengembangan pegawai melalui program pelatihan yang terstruktur. Program-program ini telah disesuaikan dengan kebutuhan dari pengembangan bisnis LPEI yang mencakup berbagai aspek yaitu:

- Peningkatan kompetensi dan keahlian pegawai yang mendukung kesiapan *talent skill* saat ini, *market needs* dan *future skills* melalui *upskilling* dan *reskilling* pada digital dan ekosistem ekspor.
- Penguatan sinergi budaya kerja, penanaman *risk awareness*, kepatuhan, integritas dan profesionalisme pada setiap pegawai.
- Pengembangan keterampilan prioritas dilakukan melalui penguatan pengetahuan terkait produk mandat, komoditas dan sektor industri unggulan dari hulu ke hilir (*product derivative* dan *supply chain*).
- Penguatan *soft competency* pegawai sehingga mampu memberikan peningkatan kinerja lembaga dalam menjalankan mandat.
- Penguatan *Future Talent ready* dalam rangka proses manajemen suksesi dan kepemimpinan.
- Continuous learning culture* dan *agile mindset*.

Program-program pelatihan yang dilaksanakan pada tahun 2024 menghabiskan biaya sebesar sebesar Rp18,29 miliar dengan realisasi total Biaya Tenaga Kerja (BTK) sebesar 4% dari total BTK 2024. Terjadi peningkatan 27% dari total biaya pelatihan tahun sebelumnya sebesar Rp14,5 miliar yang terjadi karena adanya implementasi program transformasi dan organisasi baru serta penyelarasan Sertifikasi wajib Manajemen Risiko sesuai ketentuan yang berlaku.

As the need for a strong talent pool grows, investment is emphasized in developing young talent to serve as future leaders, especially for middle and senior management succession across LPEI. Currently, LPEI has several talent programs, including:

- Youth Talent is a management trainee program, namely LFT and RMDP. Youth Talent participants are in the preparatory phase of basic leadership development.
- Talent Scouting is undergoing preparation for managerial leadership development.
- Talent Pool is talents identified through employee mapping programs as high-performing individuals who serve as role models for others in line with institution values, based on performance appraisals, assessments, and directorate-level calibrations.

The focus of development programs is part of LPEI's overarching employee development strategy through structured training programs. These programs are tailored to meet LPEI's business development needs and cover several key aspects:

- Enhancing employee competencies and skills to support current talent readiness, market needs, and future skill requirements through digital and export ecosystem upskilling and reskilling.
- Strengthening workplace culture synergy, promoting risk awareness, compliance, integrity, and professionalism among all employees.
- Developing priority skills through enhanced knowledge of mandated products, commodities, and key industrial sectors from upstream to downstream (product derivatives and supply chains).
- Strengthening employees' soft competencies to boost the Institution's performance in carrying out its mandate.
- Preparing future-ready talent for succession and leadership development.
- Continuous learning culture and an agile mindset.

The training programs implemented in 2024 incurred a total cost of Rp18.29 billion, accounting for 4% of the total 2024 Labor Cost (BTK) from the total of 2024 BTK. This represents a 27% increase compared to the previous year's training cost of Rp14.5 billion, due to the implementation of organizational transformation programs and alignment of mandatory Risk Management Certification in accordance with applicable regulations.

Berikut ini adalah daftar realisasi kegiatan pelatihan dan pengembangan pegawai selama tahun 2024:

The following is a list of training and employee development activities carried out during 2024:

Program Pelatihan Pegawai Employee Training Program

Pilar Pillars	Program Pelatihan Training Program	Frekuensi Frequency	Jumlah Peserta Number of Participants
Mandatory	Pembekalan Manajemen Risiko Risk Management Training	28	436
Mandatory	Ujian Manajemen Risiko Risk Management Test	27	421
Mandatory	Certified Human Resources	4	7
Mandatory	Sosialisasi Budaya Anti Korupsi dan Pencegahan Gratifikasi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Lembaga SMV (Special Mission Vehicle) atau BUMN Socialization of Anti-Corruption Culture and Prevention of Gratification in Procurement of Goods/Services in SMV (Special Mission Vehicle) Institutions or SOE	1	134
Mandatory	New Hire	2	15
Mandatory	Refreshment Sertifikasi Penjaminan Refreshment of Warranty Certification	2	38
Functional Development	Penjaminan dan Asuransi Warranty and Insurance	2	53
Functional Development	Export Insurance	2	33
Functional Development	Certified Contract Management Specialist (CCMS)	2	2
Functional Development	Certified Corporate Risk Officer (CCRO)	1	1
Functional Development	Sertifikasi Profesional 3 IN 1 CERTIFICATION (CPHRM, HRBP, AND HRMP – NEXT GENERATION) HR Profesional Indonesia Professional Certification 3 IN 1 CERTIFICATION (CPHRM, HRBP, AND HRMP – NEXT GENERATION) HR Profesional Indonesia	1	1
Functional Development	National Certification For Trainer	1	1
Functional Development	ERM Fundamentals for BUMN (with ERMAP, ERMCP, QRMO, and QRMA Certifications)	1	1
Functional Development	Certified Risk Management Professional (CRMP)	1	1
Functional Development	Ujian Sertifikasi MAPPI Penilaian Internal Properti Dasar I MAPPI Certification Exam Internal Assessment of Basic Property I	1	5
Functional Development	Certified Professional Management Accountant	1	1
Functional Development	Certificate for Specialists in Demand Guarantees (CSDG)	1	1
Functional Development	Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) (Kompetensi Level 1) Government Procurement of Goods/Services Certificate (PBJ) (Competency Level 1)	1	2
Functional Development	Certified Lead Auditor ISO 37001:2016	1	1
Functional Development	Certified Lead Implementor ISO 37001:2016	1	1
Functional Development	IT Auditor	1	1
Functional Development	Cobit Foundation Exam Guide	1	1
Functional Development	DX Certified Strategy Execution Professional	1	1

Program Pelatihan Pegawai
Employee Training Program

Pilar Pillars	Program Pelatihan Training Program	Frekuensi Frequency	Jumlah Peserta Number of Participants
Functional Development	Brevet AB Terpadu untuk Persiapan Ujian Certified Tax Advisor Integrated AB Brevet for Certified Tax Advisor Exam Preparation	1	2
Employee Development	Digital Banking Transformation and Product Development for Ready Cash/ Paylater	1	1
Employee Development	Intermediate Trade Finance : Calculating & Structuring Complex Trade Finance, Supply Chain Finance & Guarantee Facilities	1	3
Employee Development	14th Indonesia Learning & Development Summit	1	2
Employee Development	ACIIA Regional Conference 2024	1	2
Employee Development	AEBF training program on Green Technology	1	5
Employee Development	Agile 4.0 Organization Development	1	1
Employee Development	Agromaritim Outlook 2024	1	5
Employee Development	API Management	1	7
Employee Development	Artificial Intelligence in Human Resources	1	1
Employee Development	Aspek Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan Legal Aspects of Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) and Bankruptcy	1	8
Employee Development	Basic Excel	3	38
Employee Development	Benchmarking dan sharing session Operational Risk Management (ORM)	1	12
Employee Development	Bootcamp Human Resource	1	4
Employee Development	CHRO Indonesia 2024	1	1
Employee Development	Commercial Loans to Business (CLB)	2	26
Employee Development	Company Law Advanced Class "Banking & Finance Law"	1	4
Employee Development	Credit Monitoring With Data Analytic For Remedial And Recovery	1	6
Employee Development	Cyber Security for banking, insurance, Multifinance	1	7
Employee Development	Demand Guarantee & Standby Letter of Credit	2	40
Employee Development	Digital Payment System and Cyber risk management	1	4
Employee Development	Digital Transformation in Insurance World	1	4
Employee Development	Economic Outlook 2024	1	35
Employee Development	Edukasi Aplikasi Core Tax secara Hands On Core Tax Application Hands On Education	1	1
Employee Development	Excel Dashboard Reporting with Simple Macros	1	15
Employee Development	Excel Macros dan VBA	1	14
Employee Development	Export Ecosystem : New Future of Indonesian's Export	1	110
Employee Development	Export Insurance	4	67
Employee Development	Fitur Aplikasi CGISS 2024 CGISS 2024 Application Feature	1	6

Program Pelatihan Pegawai

Employee Training Program

Pilar Pillars	Program Pelatihan Training Program	Frekuensi Frequency	Jumlah Peserta Number of Participants
Employee Development	Floor Warden	1	12
Employee Development	Functional training new core system	32	561
Employee Development	Fundamental of Corporate Structured & Syndication	1	4
Employee Development	Fundamentals Corporate Banking : Credit, Risk & Analysis	1	4
Employee Development	Future of Work" Summit	1	3
Employee Development	Grafony & Analisa Pemalsuan Dokumen Graphonomy & Document Forgery Analysis	5	91
Employee Development	GRC Summit 2024	1	3
Employee Development	Human Resources Data Analytics	1	2
Employee Development	Human Resources Management	1	4
Employee Development	Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Penentuan Tindak Pidana Asal Identification of Suspicious Financial Transactions and Crime-Level Determination	1	2
Employee Development	Implementasi Environmental Social Governance (ESG) bagi Lembaga Keuangan Indonesia Implementation of Environmental Social Governance (ESG) for Indonesian Financial Institutions	1	7
Employee Development	Implementasi Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Berdasarkan Permen ATR/KPBN No. 5/2020 Implementation of Electronically Integrated Mortgage Rights Based on ATR/ KPBN Regulation No. 5/2020	1	2
Employee Development	Indonesia Cyber Risk 2024	1	3
Employee Development	Indonesia Mining Summit	1	3
Employee Development	Indonesia Risk Management Outlook 2025 "Pursuing Sustainable Growth Amidst Uncertainty and Volatility	1	2
Employee Development	Industrial Relation	1	1
Employee Development	Infobank Outlook 2025	1	2
Employee Development	In-House Counsel Summit and Award 2024	1	1
Employee Development	IT Security Awareness "Reduce Risk & Protect Business"	1	308
Employee Development	Kelas Intensif: Menulis Laporan Efektif Intensive Class: Writing an Effective Report	1	2
Employee Development	Leading the Future of Talent: Growth, Innovation, and Impact.	1	1
Employee Development	Legal Framework Of Overseas Financing	1	41
Employee Development	LPEI sebagai SMV Kementerian Keuangan LPEI as SMV of Finance Ministry	1	40
Employee Development	Malaysia - Indonesia Trade Outlook 2024	1	3
Employee Development	Memahami Isu-Isu Internasional untuk Kepentingan Bisnis Understanding International Issues for Business Interest	1	7

Program Pelatihan Pegawai
Employee Training Program

Pilar Pillars	Program Pelatihan Training Program	Frekuensi Frequency	Jumlah Peserta Number of Participants
Employee Development	Membongkar Laporan ESG Menjadi Narasi Yang Menarik Reconstructing ESG Report to be More Interesting	1	1
Employee Development	Memerangi Judi Online dan Kejahatan Baru Era Ekonomi Digital 5 Fight Against Online Gambling and New Crime in Digital 5 Economic Era	1	2
Employee Development	Menjajaki Potensi UMKM Indonesia di Pasar Taiwan Exploring the Potential of Indonesian MSMEs in the Taiwanese Market	1	11
Employee Development	Microsoft Power Apps dan Power Automate	1	4
Employee Development	Mini Workshop Dalam Rangka Penguatan Fungsi Pilar ke III Mini Workshop in the Framework of Strengthening the Function of Pillar III	1	35
Employee Development	Operational Risk	1	41
Employee Development	Overseas Financing and Guarantee Business Model	1	47
Employee Development	Pelaporan Rencana dan Realisasi Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan melalui sistem Pelaporan Konsumen (SiP eduli) Reporting of Financial Literacy and Inclusion Activity Plans and Realization through the Consumer Reporting System (SiP eduli)	1	2
Employee Development	Pelatihan Awareness ISO 37001-2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001-2016 Anti-Bribery Management System Awareness Training	1	23
Employee Development	Pemahaman PSAK 74 Understanding PSAK 74	1	14
Employee Development	Penerapan dan Dampak dari Implementasi Standar Pelaporan Keuangan Internasional IFRS 17 Implementation and Impact of the Implementation of International Financial Reporting Standards IFRS 17	1	1
Employee Development	Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sesuai SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023 Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units in accordance with SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023	1	1
Employee Development	Penerapan Sistem Pengendalian Internal di Lingkungan Kementerian Keuangan Implementation of Internal Control System in the Ministry of Finance	1	38
Employee Development	Penguatan Kualitas Pembiayaan LPEI Strengthening the Quality of LPEI Financing	8	131
Employee Development	Peningkatan Perlindungan Konsumen sesuai POJK Nomor 22 Tahun 2023 Increasing Consumer Protection in accordance with POJK Number 22 of 2023	1	1
Employee Development	Penugasan Mengikuti Indonesia Secretary Summit 2024 Assignment to Participate in the 2024 Indonesia Secretary Summit	1	1
Employee Development	People Matters Tech HR Pulse Indonesia 2024 Conference	1	1
Employee Development	Perkembangan dan Regulasi Perkebunan Kelapa Sawit Development and Regulation of Oil Palm Plantation	1	62
Employee Development	Perkembangan Industri Nikel Development of Nickel Industry	1	48
Employee Development	Persiapan Sertifikasi MAPPI Penilaian Internal Properti Dasar I Preparation of MAPPI Certification Internal Assessment of Basic Property I	1	12
Employee Development	Internal Control Testing	1	2

Program Pelatihan Pegawai

Employee Training Program

Pilar Pillars	Program Pelatihan Training Program	Frekuensi Frequency	Jumlah Peserta Number of Participants
Employee Development	Quality Assurance Improvement Programs (QAIP)	1	1
Employee Development	Refreshment Sertifikat IT Auditor IT Auditor Certificate Refreshment	1	1
Employee Development	SAK Executive 2024	1	2
Employee Development	Sales Strategies to Create High Performing Sales Force	1	5
Employee Development	Salesmanship - Sales Hunter	1	20
Employee Development	Scraping and Crawling with Python	1	3
Employee Development	Sektor Industri dan Komoditas: Gula Industrial and Commodity Sector: Sugar	1	41
Employee Development	Seminar Trade & Risk Management	1	3
Employee Development	Sharing Knowledge NIA, Trade Finance, & Financing	1	70
Employee Development	Sosialisasi Refreshment Peraturan Pembiayaan LPEI Socialization of LPEI Financing Regulation Refreshment	1	22
Employee Development	Sosial Return on Investment	1	2
Employee Development	Sosialisasi Buku Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia Socialization of Taxonomy Book for Sustainable Finance in Indonesia	1	54
Employee Development	Strategi Anti-Fraud LPEI LPEI's Anti-Fraud Strategy	2	385
Employee Development	Strategi Berelasi dengan Birokrasi dan Pemerintah: Panduan Praktis Menjadi Government Relations Executive Relating Strategy to Bureaucracy and Government: Practical Guide to Becoming a Government Relations Executive	1	5
Employee Development	Strategi Hukum dalam rangka Pengamanan Kredit dan Perolehan Recovery Kredit secara optimal (End to End) Legal Strategy for Optimal Credit Security and Credit Recovery (End to End)	1	2
Employee Development	Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah melalui Optimalisasi Cessie dan Ayda Credit Issue Settlement Strategy by Optimizing Cessie and Ayda	1	6
Employee Development	Strategic Digital Marketing	1	2
Employee Development	Talent Management Summit	1	2
Employee Development	The 19th Indonesia HR Conference 2024	1	10
Employee Development	The 3rd Nickel Producers, Processors, & Buyers Conference	1	12
Employee Development	The Digital Advantage: Integrating at Solutions For Business Excellence	1	25
Employee Development	Trade Finance Update 2024	1	3
Employee Development	User Training Operational Risk Management Application	1	11
Employee Development	Verifikasi Data Laporan SLIK dan Mitigasi Penyalahgunaan Informasi Sesuai Ketentuan Regulator Verification of SLIK Report Data and Mitigation of Information Misuse According to Regulatory Provisions	1	6
Employee Development	First Line Leadership: Becoming Effective Leader	1	5

Program Pelatihan Pegawai Employee Training Program

Pilar Pillars	Program Pelatihan Training Program	Frekuensi Frequency	Jumlah Peserta Number of Participants
Employee Development	Global Mindset for Developing Leaders	1	2
Employee Development	Harmoni Eksekusi dan Kolaborasi Transformasi Harmony of Execution and Transformation Collaboration	3	499
Employee Development	IHT Keprotokolan dan Kesekretariatan di Lingkungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia IHT Protocol and Secretariat in the Environment of Indonesian Export Financing Institutions	1	19
Employee Development	Impactful Communication - Think On Your Feet	2	28
Employee Development	Inclusive Leadership	1	2
Employee Development	Layanan Pengaduan Konsumen: A World Customer Experience by Halo BCA Consumer Complaints Kit: A World Customer Experience by Halo BCA	1	2
Employee Development	Leadership Series - Coaching Skill for Manager	3	44
Succession Development	Shaping The Next Star	2	38
Succession Development	Great Leader Create Great Leader	2	46
Succession Development	Analisa Risiko Kredit Credit Risk Analysis	1	21
Succession Development	Aspek Hukum Perjanjian Kredit dan Jaminan Legal Aspect of Credit Credit and Warranty Agreement	1	21
Succession Development	Energize Your Career Journey (Finding New Spirit and Purpose)	1	33

Utilisasi XLearn XLearn Utilization

Pilar Pillars	Jumlah Modul Number of Modules	Jumlah Learner Number of Learners	Jumlah Hour Number of Hour
Mandatory	7	2223	6.25
Technical Skill	20	98	9
Soft Skill	6	36	4.5
Others	37	225	9.25

Sertifikasi Profesional Professional Certification

Program Pelatihan Training Program	Frekuensi Frequency	Jumlah Peserta Number of Participants
Certified Contract Management Specialist (CCMS)	2	2
Certified Corporate Risk Officer (CCRO)	1	1
Sertifikasi Profesional 3 IN 1 CERTIFICATION (CPHRM, HRBP, AND HRMP – NEXT GENERATION) HR Profesional Indonesia Professional Certification "3 IN 1 CERTIFICATION (CPHRM, HRBP, AND HRMP – NEXT GENERATION) HR Profesional Indonesia	1	1

Sertifikasi Profesional

Professional Certification

Program Pelatihan Training Program	Frekuensi Frequency	Jumlah Peserta Number of Participants
National Certification For Trainer	1	1
ERM Fundamentals for BUMN (with ERMAP, ERMCP, QRMQ, and QRMA Certifications)	1	1
Certified Risk Management Professional (CRMP)	1	1
Ujian Sertifikasi MAPPI Penilaian Internal Properti Dasar I MAPPI Certification Exam Internal Assessment of Basic Property I	1	5
Certified Professional Management Accountant	1	1
Certificate for Specialists in Demand Guarantees (CSDG)	1	1
Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) (Kompetensi Level 1) Government Procurement of Goods/Services (PBJ) Certificate (Competency Level 1)	1	2
Certified Lead Auditor ISO 37001:2016	1	1
Certified Lead Implementor ISO 37001:2016	1	1
IT Auditor	1	1
Cobit Foundation Exam Guide	1	1
DX Certified Strategy Execution Professional	1	1
Brevet AB Terpadu untuk Persiapan Ujian Certified Tax Advisor Integrated Brevet A and B Program for Certified Tax Advisor Exam Preparation	1	2

Pelatihan Produk dan Proses Bisnis

Product and Business Process

Program Pelatihan Training Program	Batch	Jumlah Peserta Number of Participants
Penguatan Kualitas Pembiayaan LPEI Strengthening the Quality of LPEI Financing Sales	9	153
Sales Strategies to Create High Performing Sales Force	1	5
Salesmanship - Sales Hunter	1	20
Credit Monitoring With Data Analytic For Remedial And Recovery	1	6
Demand Guarantee & Standby Letter of Credit	2	40
Fundamentals Corporate Banking : Credit, Risk & Analysis	1	4
Strategic Digital Marketing	1	2

Pelatihan Produk dan Proses Bisnis

Product and Business Process

Program Pelatihan Training Program	Batch	Jumlah Peserta Number of Participants
Sharing Knowledge Produk dan Alur Bisnis Penjaminan dan Asuransi	2	53
Aspek Hukum Perjanjian Kredit dan Jaminan Legal Aspects of Credit and Collateral Agreements	1	21
Commercial Loans to Business (CLB)	2	26
Overseas Financing and Guarantee Business Model	1	47
Sharing Knowledge NIA, Trade Finance, & Financing	1	70
Trade Finance Update 2024	1	3

Pelatihan Komoditas/Sektor Industri

Commodity/Industrial Sector

Program Pelatihan Training Program	Penyelenggara Organizer	Jumlah Peserta Number of Participants
Agromaritim Outlook 2024	IPB	5
Product Knowledge Komoditas / Sektor Industri : Gula Product Knowledge on Commodities / Industrial Sectors: Sugar	LPEI	41
Product Knowledge Komoditas / Sektor Industri : Nikel Product Knowledge on Commodities / Industrial Sectors: Nickel	LPEI	48
The 3rd Nickel Producers, Processors, & Buyers Conference	Petromindo	12
Perkembangan dan Regulasi Perkebunan Kelapa Sawit Developments and Regulations in the Palm Oil Plantation Sector	LPEI	62
Pengetahuan Dasar Komoditas dan Sektor Industri Kelapa Sawit Basic Knowledge of Palm Oil Commodities and Industrial Sector	Xlearn	4
Pengetahuan Dasar Komoditas Hasil Olahan dan Industri Kopi Basic Knowledge of Processed Coffee Commodities and Industry	Xlearn	4
Pengetahuan Dasar Komoditas dan sektor industri Aqua Culture Basic Knowledge of Commodities and the Aquaculture Industry Sector	Xlearn	3
Pengetahuan Dasar Industri Tekstil Basic Knowledge of the Textile Industry	Xlearn	18
Pengetahuan Dasar Industri Nikel Basic Knowledge of the Nickel Industry	Xlearn	2

Pengembangan Talenta dan Manajemen Suksesi

Talent Management and Succession Program

Program Pengembangan Program	Peserta Participants	Pelatihan Training
<i>Talent Pool</i>	74 orang pegawai yang terdiri dari 9 (sembilan) orang Kepala Divisi; 34 (tiga puluh empat) orang Kepala Departemen; 28 (dua puluh delapan) orang Eksekutif; 3 (tiga) orang Pelaksana A total of 74 employees participated, consisting of 9 (nine) Division Head; 34 (thirty four) Department Head; 28 (twenty eight) Officer; 3 (three) Staff	• <i>Personal Assessment</i> untuk mengoptimalkan potensi • Pendidikan Formal pengembangan <i>soft skill</i> dan <i>hard skill</i> • <i>Mentoring</i> pengembangan potensi, keterampilan, <i>mindset</i> dari <i>mentor</i> • <i>Secondment</i> di Kementerian Keuangan dan/atau <i>Special Mission Vehicle</i> (SMV) • Studi banding di Eximbank maupun ECA di beberapa negara lain
<i>Management Trainee</i>	35 orang pegawai yang terdiri dari 20 orang RMDP dan 15 CRDP. A total of 35 employees participated, consisting of 20 RMDP and 15 CRDP	• <i>Relationship Manager Development Program</i> (RMDP) dan <i>Credit Reviewer Development Program</i> (CRDP) telah mengikuti program pelatihan komprehensif terkait perbankan umum, manajemen kredit, manajemen risiko, operasional, penjualan serta pengembangan kepribadian yang kuat, kemampuan untuk berpikir kritis dan kemampuan untuk memimpin. • RMDP dan CRDP telah memiliki Sertifikasi General Banking, Sertifikasi Credit Skill dan Sertifikasi Manajemen Risiko. • Program pengembangan <i>Self Leadership</i>.

Persiapan Pensiun [GRI 201-3]

Retirement Preparation

LPEI mengikutsertakan pegawai dalam program pensiun sebagai berikut:

1. Dana Pensiun yang dikelola DPLK dengan kontribusi LPEI (6% gaji) dan kontribusi pegawai (4% gaji);
2. BPJS Pensiun oleh BPJS Ketenagakerjaan LPEI dengan kontribusi LPEI (3% gaji) dan kontribusi pegawai (0% gaji)

Setiap pegawai akan mendapat manfaat (dana) pensiun saat memasuki usia purna bakti yang dapat mereka gunakan sebagai modal berwirausaha maupun melakukan kegiatan produktif lainnya di masa pensiunnya.

LPEI includes employees in the following retirement programs:

1. Pension Fund managed by DPLK, with contributions from LPEI (6% of salary) and employees (4% of salary);
2. Retirement Program under BPJS Ketenagakerjaan, with contributions from LPEI (3% of salary) and employees (0% of salary).

Each employee will receive retirement benefits (funds) upon reaching retirement age, which they can use as capital for entrepreneurship or other productive activities during their retirement.

Rencana Pengembangan dan Pelatihan SDM

HR Development and Training Plan

LPEI berkomitmen untuk selalu meningkatkan kompetensi pegawai yang dilakukan secara konsisten pada tahun 2024, dan akan terus memberikan pengembangan karier dan manajemen talenta untuk mendukung strategi pertumbuhan LPEI. Fokus kompetensi dan perilaku LPEI meliputi kemampuan menjalankan visi dan strategi fokus ekspor dan eksportir, inspirasi dan pengembangan, sinergi dan kolaborasi, perubahan dan inovasi, serta hasil yang terdorong oleh kinerja (*performance driven*).

Rencana pengembangan kompetensi profesional mendokumentasikan tujuan, mengetahui pengembangan keterampilan dan kompetensi yang diperlukan, serta tujuan yang perlu dicapai oleh pegawai untuk mendukung peningkatan berkelanjutan dan pengembangan karier.

Implementasi kompetensi dan perilaku LPEI akan disisipkan melalui konsep strategi pembelajaran berkelanjutan yang mendekati konsep 3E:

1. *Experience* (70%): mengembangkan kemampuan dengan memiliki pengalaman kerja dan melakukan pekerjaan atau peran dan tanggung jawab dalam posisi tertentu;
2. *Exposure* (20%): mengembangkan kemampuan dengan memanfaatkan jaringan melalui pendampingan/pembinaan melalui *coaching/mentoring*, jaringan atau pengamatan/pelekatatan/proyek tertentu;
3. *Education* (10%): mengembangkan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan formal/informal termasuk menghadiri lokakarya, seminar dan *e-learning*.

Sebagai Lembaga yang menjalankan mandat peningkatan ekspor, LPEI terus memanfaatkan momentum pertumbuhan dengan model bisnis kolaboratif yang memanfaatkan posisi strategis dan memperdalam integrasi dengan ekosistem ekspor melalui peningkatan jumlah eksportir baru dan kualitas penyaluran kredit. Tema ini berfokus untuk memperdalam integrasi dengan ekosistem digital dengan terus membuka peluang pertumbuhan dan potensi masa depan sekaligus menyediakan solusi ekspor digital yang berfokus pemberdayaan pegawai, nasabah, mitra, dan komunitas.

LPEI is committed to continuously enhancing employee competencies, a commitment that was consistently upheld in 2024, and will continue to provide career development and talent management to support LPEI's growth strategy. LPEI's focus on competencies and behaviors includes the ability to execute the vision and strategy focused on exports and exporters, inspiration and development, synergy and collaboration, change and innovation, as well as performance-driven results.

The professional competency development plan outlines objectives, identifies the skills and competencies to be developed, and the goals employees need to achieve to support continuous improvement and career growth.

The implementation of LPEI's competencies and behaviors is embedded through a continuous learning strategy based on the 3E concept:

1. *Experience* (70%): developing capabilities through work experience and by performing specific roles and responsibilities;
2. *Exposure* (20%): developing capabilities through networking, mentoring/coaching, shadowing, and involvement in specific projects;
3. *Education* (10%): developing capabilities through formal and informal education and training, including attending workshops, seminars, and e-learning programs.

As an Institution mandated to support export growth, LPEI continues to capitalize on growth momentum through a collaborative business model that leverages its strategic position and deepens integration within the export ecosystem by increasing the number of new exporters and improving the quality of credit distribution. This theme focuses on deepening integration with the digital ecosystem while continuing to unlock future growth opportunities and provide digital export solutions that empower employees, customers, partners, and communities.

Rencana strategis pengembangan kapasitas dan kapabilitas pegawai dengan memfokuskan kepada fungsi *development impact* dan terdapat *sectoral industry specialist* untuk dapat mengakomodir kebutuhan pasar melalui tema strategi pengembangan dan pelatihan pegawai tahun 2025 yaitu *Building Export Ecosystem and Digital Businesses Competency Internally*".

Program pelatihan dan pengembangan yang terstruktur (*structured learning program*) selalu disesuaikan dengan hasil pengembangan kompetensi kerja yang merupakan kekhususan LPEI di mana pembelajaran dan pengembangan talenta akan memberikan pembelajaran berkelanjutan bagi para pegawai sebagai bagian dari investasi dan pengembangan SDM.

Program pelatihan dan pengembangan (*structured learning program*) pegawai LPEI sebagai berikut:

1. **Core Development**

Mencakup program yang memberikan dampak strategis dalam keberhasilan bisnis organisasi, antara lain pengetahuan tentang *good corporate governance, risk, and compliance*, kode etik dan budaya lembaga, serta sertifikasi keahlian wajib yang dipersyaratkan oleh regulator.

2. **Functional Development**

Merupakan program pelatihan teknis untuk mengembangkan kompetensi teknis yang diperlukan di suatu jabatan atau kelompok jabatan tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada pelatihan pembiayaan, penjaminan, asuransi, jasa konsultasi, *trade finance*, syariah, analisa pembiayaan, manajemen risiko, treasury, audit, teknologi informasi, dan/atau sertifikasi keahlian sebagai pengakuan atas keahlian dan kompetensinya yang sejalan dengan perkembangan terkini dari industri keuangan dan kekhususan LPEI.

3. **Personal Development**

Program pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan kapabilitas dan kapasitas pegawai agar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh lembaga berdasarkan penilaian kinerja dan kebutuhan pegawai. Jenis pelatihan termasuk namun tidak terbatas pada analisa masalah dan pengambilan keputusan, kemampuan hubungan internal dan eksternal, keterampilan komunikasi dan presentasi, dan lain sebagainya.

The strategic plan for employee capacity and capability development focuses on development impact functions and includes sectoral industry specialists to accommodate market needs. This is reflected in the 2025 employee development and training strategy theme: "Building Export Ecosystem and Digital Business Competency Internally."

The structured learning and development programs are always aligned with LPEI's unique competency development framework, in which learning and talent development are part of a continuous learning journey for employees, serving as both an investment and part of LPEI's broader human capital development strategy.

LPEI's structured employee training and development programs are as follows:

1. **Core Development**

This includes programs that have a strategic impact on the organization's business success, such as knowledge of good corporate governance, risk and compliance, the institution's code of ethics and culture, as well as mandatory professional certifications required by regulators.

2. **Functional Development**

These are technical training programs designed to develop the technical competencies required for specific roles or job groups, including but not limited to training in financing, guarantees, insurance, consulting services, trade finance, sharia finance, credit analysis, risk management, treasury, auditing, information technology, and/or professional certifications that recognize expertise and competencies aligned with current developments in the financial industry and LPEI's specific areas of focus.

3. **Personal Development**

This training program aims to develop employees' capabilities and capacities in alignment with the competencies required by the institution, based on performance assessments and individual development needs. Training topics include, but are not limited to, problem analysis and decision-making, internal and external relationship skills, communication and presentation skills, and others.

4. **Succession Development**

Program pelatihan dalam pilar ini bertujuan untuk mempersiapkan perencanaan suksesi pegawai pada kelompok *talent* dalam proses manajemen bakat yang membangun kumpulan pekerja terlatih yang siap dan mampu menjadi pemimpin yang efektif di masa yang akan datang.

Strategi pengembangan dan pelatihan pegawai tahun 2025 melalui *Building Export Ecosystem and Digital Business Competency Internally* dengan program kerja:

1. **Membangun Learning Academy**

Merupakan *collaborative place* untuk mengembangkan keterampilan mendalam yang selaras dengan kebutuhan bisnis melalui program pelatihan dan pengembangan yang terstruktur (*structured learning program*) dan mengkombinasikan aspek positif dari dua jenis lingkungan belajar yaitu perpaduan kerangka pembelajaran dan pengembangan (*framework blended learning and development*) dengan mengkombinasikan metode dan proses pembelajaran yang komprehensif, terstruktur, dan membutuhkan durasi panjang (*macro learning*) dengan konten pembelajaran yang bersifat spesifik, akurat dan dikonsumsi dalam waktu tidak lama seperti e-learning (*micro learning*). Dengan metode belajar dan menyasar kompetensi *core*, teknis dan kepemimpinan yang *future-ready*, untuk semua level di lembaga. *Learning Academy* akan menjadi pusat pengembangan kompetensi SDM berkualitas yang mampu menghadirkan Eximbankers yang profesional, adaptif & berkarakter, sehingga mampu mendorong pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan. Adapun panduan prinsip (*guiding principles*) dalam *Learning Academy*:

- a. Peningkatan kompetensi dan keahlian pegawai yang mendukung kesiapan *talent* saat ini, *market needs* dan *future skills* melalui *upskilling* dan *re-skilling* pada digital dan ekosistem ekspor;
- b. Penguatan sinergi budaya kerja, penanaman *risk awareness*, kepatuhan, integritas, dan profesionalisme pada setiap pegawai;
- c. Pengembangan keterampilan prioritas yang dilakukan melalui penguatan pengetahuan terkait produk mandat, komoditas dan sektor industri unggulan dari hulu ke hilir (*product derivative* dan *supply chain*);
- d. Penguatan *soft competency* pegawai sehingga mampu memberikan peningkatan kinerja lembaga dalam menjalani mandat;

4. **Succession Development**

Training programs under this pillar are intended to prepare succession planning for employees in talent pools, as part of the talent management process. These programs aim to build a pool of well-trained employees who are ready and capable of becoming effective leaders in the future.

The 2025 employee development and training strategy will be implemented through the "Building Export Ecosystem and Digital Business Competency Internally" initiative, with the following key program:

1. **Membangun Learning Academy**

It's a collaborative space to develop in-depth skills aligned with business needs through structured learning and development programs, combining the strengths of two learning environments by integrating a blended learning and development framework that merges comprehensive, structured, and long-duration learning methods (*macro learning*) with specific, accurate content delivered in a short time frame, such as e-learning (*micro learning*). The learning approach targets core, technical, and future-ready leadership competencies across all organizational levels. The Learning Academy will become a center for high-quality human capital development, producing professional, adaptive, and value-driven Eximbankers capable of driving sustainable performance growth. The guiding principles of the Learning Academy are as follows:

- a. Enhancing employee competencies and skills to support current talent readiness, market needs, and future skillsets through upskilling and reskilling in digital and export ecosystems;
- b. Strengthening work culture synergy, instilling risk awareness, compliance, integrity, and professionalism in every employee;
- c. Developing priority skills by deepening knowledge related to mandated products, commodities, and key industrial sectors from upstream to downstream (*product derivatives* and *supply chains*);
- d. Enhancing employees' soft competencies to support improved institutional performance in fulfilling its mandate;

- e. Penguatan *future talent readiness* dalam rangka proses manajemen suksesi dan kepemimpinan;
- f. Mendorong *continuous learning culture* dan *agile mindset*.

2. Pengembangan Kompetensi Ekosistem Ekspor dan Digital Business

Merupakan penguatan kompetensi LPEI sesuai mandat dan model bisnis baru, serta mendukung pengembangan ekosistem ekspor melalui kompetensi *technical* dan *soft skill*. Program pelatihan dilakukan melalui:

- a. Pengembangan kapabilitas pegawai dan kapasitas organisasi yang diselaraskan dengan kebutuhan Lembaga, serta fokus pada penguatan pengetahuan dan kemampuan pegawai terhadap produk LPEI sesuai mandat yaitu jasa konsultasi, asuransi, penjaminan, *trade finance*, serta syariah.
- b. Pengembangan kapabilitas dilakukan melalui penguatan pengetahuan terkait komoditas dan sektor industri unggulan dari hulu ke hilir (*product derivative* dan *supply chain*) melalui penguatan terkait *advisory services* dan *international relationship*.
- c. Pengembangan kapabilitas kompetensi teknis di bidang Perdagangan Internasional seperti: *supply chain*, *logistic*, kepabeanan, devisa hasil ekspor.
- d. Penguatan *soft competency* pegawai sehingga mampu memberikan peningkatan kinerja lembaga dalam menjalankan mandat melalui *international* dan *stakeholders' relationship*.
- e. Peningkatan dan penguatan kapabilitas pegawai agar sesuai dengan kompetensi yang diperlukan pada model bisnis baru Lembaga dan sejalan dengan perkembangan terkini dari industri keuangan dan kekhususan LPEI dalam menciptakan ekosistem ekspor melalui pengembangan kompetensi teknis fungsional masing-masing *jobs* untuk dapat melakukan pekerjaannya dengan efektif sesuai kebutuhan Lembaga. Pengembangan kapabilitas internal dilakukan tidak hanya yang bersifat vertikal (lebih tinggi dibandingkan kompetensi yang dimilikinya saat ini), melainkan juga horizontal (pengembangan kompetensi lintas fungsi).

- e. Strengthening future talent readiness to support succession and leadership planning processes;
- f. Fostering a continuous learning culture and an agile mindset.

2. Development of Export Ecosystem and Digital Business Competencies

This initiative focuses on strengthening LPEI's competencies in line with its mandate and new business model, while also supporting the development of the export ecosystem through both technical and soft skill competencies. The training programs are carried out through:

- a. Development of employee capabilities and organizational capacity aligned with the institution's needs, with a focus on enhancing employees' knowledge and skills related to LPEI's mandated products, such as consulting services, insurance, guarantees, trade finance, and sharia finance.
- b. Capability development through deepening knowledge of key commodities and industrial sectors from upstream to downstream (product derivatives and supply chains), with a focus on strengthening advisory services and international relationships.
- c. Development of technical competencies in international trade areas such as supply chain, logistics, customs, and foreign exchange from export proceeds.
- d. Strengthening employees' soft competencies to improve institutional performance in fulfilling its mandate, particularly in managing international and stakeholder relationships.
- e. Enhancing and strengthening employee capabilities to align with the competencies required by the institution's new business model and in accordance with the latest developments in the financial industry, as well as LPEI's specific role in building an export ecosystem. This includes the development of functional technical competencies for each job role to ensure effective job performance. Internal capability development will take place both vertically (advancing beyond current competencies) and horizontally (cross-functional skill development).

3. Optimalisasi Penggunaan LMS Sebagai Self Development

Program pelatihan dan pengembangan yang terstruktur (*structured learning program*) didukung oleh *in-house digital learning platform* XLEARN untuk mempermudah seluruh Eximbankers untuk mengakses materi pembelajaran mereka dengan lebih mandiri dan efisien. Penggunaan XLEARN dioptimalisasikan untuk modul – modul antara lain :

- a. Profil Lembaga;
- b. *Risk and Compliance*;
- c. Produk dan Jasa LPEI;
- d. Sektor Industri dan Komoditas;
- e. Regulasi internal dan eksternal;
- f. Kajian dan Riset;
- g. Podcast Inspirasi.

Adapun rencana Pelatihan dan Pengembangan Pegawai yang akan dilakukan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

A. Capability Development

1. Sertifikasi profesi sebagai pengakuan atas keahlian dan kompetensi teknis yang sejalan dengan perkembangan terkini dari industri keuangan dan kekhususan LPEI, tentang Penerapan Manajemen Risiko melalui Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko dan Sertifikasi Kompetensi Kerja menetapkan penerapan manajemen risiko melalui:
 - a. Sertifikasi Kompetensi Wajib Pegawai
Dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif dan terencana, LPEI mengisi jabatan manajemen dan pejabat senior LPEI dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang manajemen risiko. Setiap pegawai LPEI wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko berdasarkan klasifikasi unit kerja dan jenjang jabatan pegawai melalui kompetensi dan keahlian Sertifikasi Manajemen Risiko bidang Keuangan/Perbankan bagi pegawai dan jajaran direktur LPEI.
 - b. Sertifikasi Kompetensi Bidang Kerja
Sertifikasi yang diatur oleh Lembaga Pemerintahan, Kementerian dan Lembaga lainnya yang terkait dengan pengawasan dan supervisi LPEI dengan mengacu kepada Standar Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), meliputi namun tidak terbatas pada bidang kerja:
 - Sertifikasi Penjaminan Skema Kompetensi Bidang Okupasi;

3. Optimization of LMS Utilization for Self-Development

The structured learning and development programs are supported by the in-house digital learning platform XLEARN, which enables all Eximbankers to access their learning materials more independently and efficiently. The use of XLEARN is optimized for modules including :

- a. Institutional Profile;
- b. Risk and Compliance;
- c. LPEI Products and Services;
- d. Industrial Sectors and Commodities;
- e. Internal and External Regulations;
- f. Studies and Research;
- g. Inspirational Podcasts.

The Employee Training and Development Plan to be implemented in 2025 is as follows:

A. Capability Development

1. Professional Certification as recognition of expertise and technical competence aligned with current developments in the financial industry and LPEI's areas of specialization, particularly in Risk Management Implementation, through Risk Management Competency Certification and Occupational Competency Certification, including:
 - a. Mandatory Employee Competency Certification
To implement risk management effectively and systematically, LPEI fills its management and senior positions with human resources who possess the necessary competencies and expertise in risk management. Every LPEI employee is required to obtain a Risk Management Certification based on their unit classification and job level, with certifications in Financial/Banking Risk Management for employees and board members.
 - b. Job-Specific Competency Certification
Certifications regulated by Government Institutions, Ministries, and other agencies overseeing LPEI, based on the Indonesian National Work Competency Standards (SKKNI) and the Indonesian National Qualification Framework (KKNI), which include, but are not limited to:
 - Guarantee Scheme Competency Certification in Occupational Fields;

- Sertifikasi Asuransi;
 - Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar;
 - Standarisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah;
 - Sertifikasi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia.
- c. Sertifikasi Kompetensi Bidang Teknis
Sertifikasi Profesi yang sesuai dengan kebutuhan jasa keuangan, bisnis dan operasional LPEI meliputi namun tidak terbatas pada bidang kerja kredit atau pembiayaan, kepatuhan, audit intern, *trade finance*, syariah, teknologi informasi, legal, akunting dan perpajakan, serta pengadaan barang dan jasa.

- Insurance Certification;
- Treasury Certification and Market Conduct Code Implementation;
- Competency Standards in Payment Systems and Rupiah Currency Management;
- Human Resources Management Certification.

- c. Technical Field Competency Certification
Professional certifications tailored to the needs of LPEI's financial services, business, and operations. These include, but are not limited to, job fields such as credit or financing, compliance, internal audit, trade finance, sharia finance, information technology, legal, accounting and taxation, and procurement of goods and services.

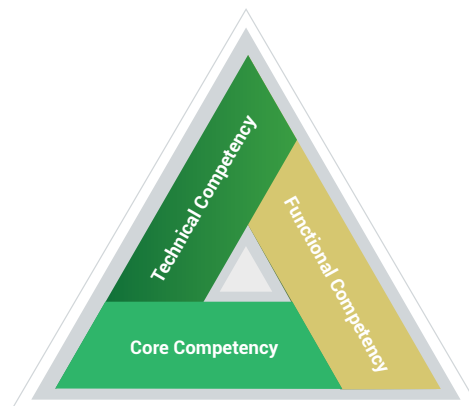
B. **Competency Development**

Merupakan penguatan kompetensi LPEI sesuai dengan model kompetensi baru antara lain:

B. **Capability Development**

This refers to the enhancement of LPEI's competencies in line with the newly adopted competency model, including but not limited to:

Model Kompetensi Baru
New Competency Model



1. **Core Competency**

Merupakan kompetensi inti atau utama yang harus dimiliki seluruh pegawai LPEI, yang akan membuat perbedaan dan menjadi ciri khas Perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya serta merupakan sumber keunggulan yang kompetitif. Terdapat 4 Kompetensi Inti yang disusun berdasarkan *Values* LPEI yaitu APIK. Memiliki 5 *level proficiency*.

1. **Core Competency**

These are the fundamental competencies that every LPEI employee must possess. They distinguish the organization from its competitors and serve as a source of competitive advantage. There are four Core Competencies, developed based on LPEI's corporate values, APIK, each with 5 proficiency levels.

2. **Functional Competency**

Merupakan suatu bagian kepribadian seseorang yang cukup dalam dan relatif menetap, serta dapat memprediksi perilaku dalam beragam situasi dan tugas-tugas jabatan, sehingga dapat memprediksi keberhasilan dalam menjalankan tugasnya. Faktor-faktor yang membedakan performa unggul dari performa rata-rata. Terdiri dari 9 kompetensi. Setiap fungsi terdiri dari 5-7 kompetensi. Memiliki 5 *level proficiency*.

3. **Technical Competency**

Penguasaan atas kompetensi tersebut. Apabila pegawai memiliki kompetensi ini sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka pegawai tersebut akan dapat menjalankan tugasnya dengan efektif (*effective performance*), terdiri dari 72 kompetensi dibagi dalam 8 cluster kompetensi. Memiliki 4 tingkatan.

4. **Succession Development**

Kebutuhan atas talenta pada pengembangan rencana suksesi secara keseluruhan dalam organisasi LPEI. Persiapan dan identifikasi potensi manajemen talenta dalam organisasi adalah untuk membangun pemimpin masa depan, diprioritaskan untuk suksesi pengganti manajemen senior dan pejabat senior (Direktur Pelaksana dan dua jabatan di bawahnya).

Bertumbuhnya kebutuhan atas kumpulan talenta akan ditekankan pada investasi mengembangkan talenta muda sebagai pengganti yang kuat dari pemimpin masa depan yang diprioritaskan untuk kesuksesan pengganti *middle management* dan *senior management* di seluruh organisasi LPEI. Saat ini LPEI memiliki talenta dalam beberapa program, di antaranya:

- Youth Talent** merupakan talenta muda dalam program *management trainee* yaitu *Relationship Manager Development Program* (RMDP) dan *Credit Reviewer Development Program* (CRDP). *Youth Talent* merupakan talenta dalam masa persiapan kaderisasi kepemimpinan dasar.
- Internal Development Program** merupakan program pengembangan talenta LPEI dalam masa persiapan untuk menaiki jenjang jabatan berikutnya terdiri dari program *Staff Development Program* (SDP), *Middle Management Development Program* (MMDP) dan *Leadership Development Program* (LDP).
- Talent Pool** merupakan talenta dari program pemetaan pegawai yang dinilai bertalenta, mampu menunjukkan kinerja unggul atau istimewa, menjadi panutan atau cermin bagi pegawai lain untuk berperilaku sesuai

2. **Functional Competency**

These are deeply rooted and relatively stable personal attributes that can predict behavior across a variety of situations and job tasks, thereby forecasting job performance. They represent the factors that differentiate superior from average performance. There are 9 competencies. Each function comprising 5 to 7 competencies, and each having 5 proficiency levels.

3. **Technical Competency**

The mastery of specific skills and knowledge required to effectively perform job responsibilities. When employees possess the required technical competencies, they are able to perform their tasks efficiently (*effective performance*). There are 72 technical competencies grouped into 8 clusters. It has 4 proficiency levels.

4. **Succession Development**

The need for talent in succession planning across the LPEI organization is a priority. The preparation and identification of talent management potential within the organization aim to build future leaders, with a focus on succession for senior management and senior officer positions (Managing Directors and two levels below).

The growing need for a talent pool emphasizes the importance of investing in the development of young talents as strong successors for future leadership roles, prioritized for the succession of middle and senior management positions throughout LPEI. Currently, LPEI has talent grouped into several programs, including:

- Youth Talent** is young talents in the management trainee programs such as the Relationship Manager Development Program (RMDP) and Credit Reviewer Development Program (CRDP). These youth talents are in the early stages of leadership succession development.
- Internal Development Program** is a talent development program that prepares LPEI talents to progress to the next level of leadership. It consists of the Staff Development Program (SDP), Middle Management Development Program (MMDP), and Leadership Development Program (LDP).
- Talent Pool** is talents identified through employee mapping, recognized for outstanding or exceptional performance, and considered role models who embody the company's core values. These talents are selected

dengan nilai-nilai yang dianut oleh sebuah Perusahaan berdasarkan Penilaian kinerja, *assessment*, dan kalibrasi Direktorat.

Perencanaan pengembangan masing-masing program dilakukan dengan menggunakan pemetaan pelatihan dan rencana pengembangan vital dengan membangun manajemen talenta yang lebih terstruktur dan memiliki pemahaman tentang Kesenjangan kompetensi talenta untuk *future-ready*. Beberapa program manajemen talenta seperti.

- a. Program pengembangan talenta: menitikberatkan pada akselerasi kompetensi dan keterampilan melalui eksposur dan pengalaman langsung. *Talent* akan diikutsertakan pada program *Secondment* baik di Kementerian Keuangan maupun *Special Mission Vehicle* (SMV) lain, *benchmarking* dan/atau *job attachment* ke lembaga/institusi lain sejenis, dilibatkan dalam *project community activities* baik dari internal maupun eksternal.
4. Selain itu, untuk menggali potensinya, *Talent* akan diikutsertakan dalam *Coaching* dan *Mentoring*, yang dapat dilakukan oleh pihak internal dan/atau eksternal.

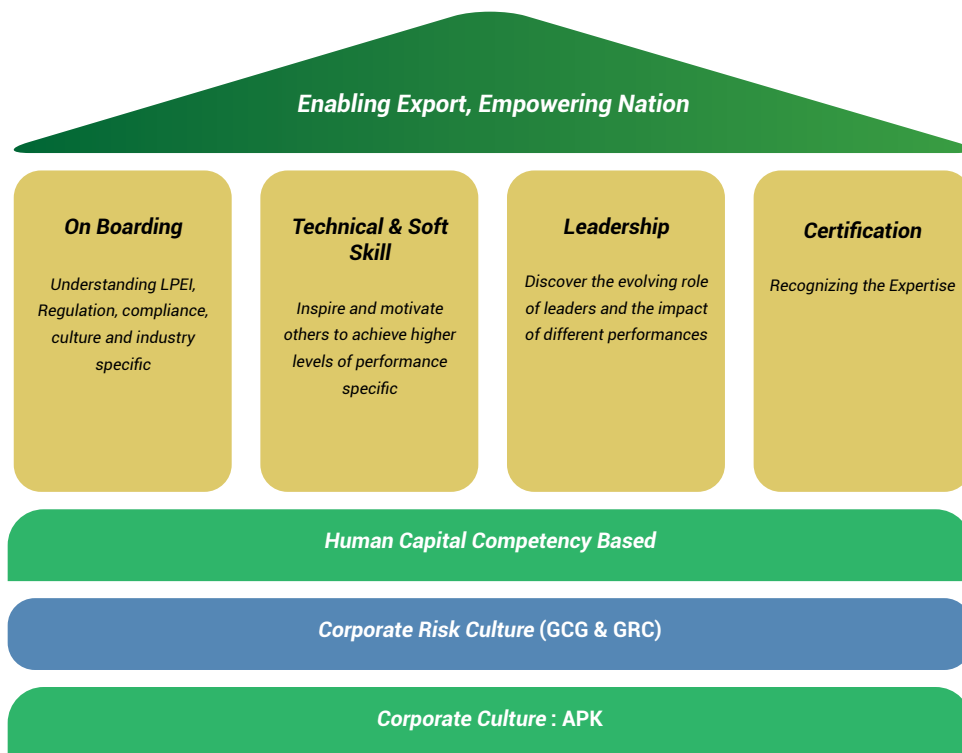
E. Directorship Program

based on performance reviews, assessments, and Directorate calibrations.

Each program's development plan is carried out through training maps and critical development plans by establishing a more structured talent management system that addresses talent competency gaps to become future-ready. Some of the talent management programs include.

- a. Talent Development Program – Focuses on accelerating competencies and skills through exposure and hands-on experience. Talents will participate in secondment programs to the Ministry of Finance or other Special Mission Vehicles (SMVs), benchmarking activities, and/or job attachments at similar institutions, as well as internal and external project community activities.
- b. In addition, to explore their potential, talents will also participate in coaching and mentoring programs, facilitated either internally or externally.

D. Directorship Program



Pelatihan dan pengembangan untuk Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana dalam bentuk *Directorship Program* dengan tujuan untuk menghasilkan meningkatkan dan mempertajam pemahaman mengenai peran dan kewajibannya sebagai penggerak utama dalam pertumbuhan Lembaga. Dengan *Directorship Program* melalui pelatihan program yang dirancang secara strategis dan sistematis untuk meningkatkan kemampuan peran pemimpin terkini dengan menginspirasi dan motivasi Lembaga untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi serta memimpin proses transformasi Lembaga.

Adapun program *Directorship* terdiri dari 4 (empat) pilar modul, sebagai berikut:

1. *On Boarding Modul*
Merupakan modul yang dirancang untuk memberikan pemahaman terkait LPEI, regulasi, kepatuhan, budaya, industri, dan bisnis.
2. *Technical dan Softskill*
Merupakan pelatihan untuk mengembangkan kemampuan teknis dan interpersonal jajaran *board* dalam menjalankan peran sebagai pimpinan.
3. *Kepemimpinan (Leadership)*
Merupakan program khusus yang ditujukan bagi pimpinan organisasi untuk meningkatkan kemampuan dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi lembaga yang efektif, pengelolaan risiko, transformasi digital dan bisnis, serta kemampuan komunikasi dan negosiasi yang efektif dalam konteks kepemimpinan.
4. *Sertifikasi*
Merupakan program peningkatan kapabilitas dan keahlian di bidang manajemen risiko dan kompetensi kerja dalam bentuk proses sertifikasi yang memberikan pengakuan kepada individu atas kompetensi, keterampilan dan pengetahuan dalam bidang profesi tertentu yang dikeluarkan oleh lembaga atau asosiasi profesional yang berwenang dan diakui.

Pelatihan dan pengembangan untuk Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana dalam bentuk *Directorship Program* dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000.

Training and Development for Members of the Board of Directors, Executive Directors, and Managing Directors through the *Directorship Program* to enhance and sharpen understanding of their roles and responsibilities as key drivers of the institution's growth. The *Directorship Program* consists of strategically and systematically designed training modules to elevate leadership capabilities, inspire and motivate the institution to reach higher levels of performance, and lead the Institution's transformation process.

The *Directorship Program* consists of four (4) core module pillars as follows:

1. *Onboarding Module*
A module designed to provide understanding related to LPEI, regulations, compliance, organizational culture, industry, and business landscape.
2. *Technical and Soft Skills*
Training programs to develop the technical and interpersonal skills of board members in performing their leadership roles.
3. *Leadership*
Merupakan program khusus yang ditujukan bagi pimpinan organisasi untuk meningkatkan kemampuan dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi lembaga yang efektif, pengelolaan risiko, transformasi digital dan bisnis, serta kemampuan komunikasi dan negosiasi yang efektif dalam konteks kepemimpinan.
4. *Certification*
A capability-building and skills enhancement program in the field of risk management and work competencies, delivered in the form of certification processes. These certifications formally recognize individuals' competencies, skills, and knowledge in specific professions, issued by authorized and recognized institutions or professional associations.

The training and development program for Members of the Board of Directors, Executive Directors, and Managing Directors through the *Directorship Program* is budgeted at Rp2,000,000,000.

Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karier

Performance Review and Career Development

Penilaian kinerja pegawai dilakukan secara objektif dengan sistem *balance scorecard* berdasarkan capaian *Key Performance Indicator* (KPI) setiap pegawai. LPEI memastikan proses evaluasi kinerja pegawai dilakukan secara adil dan transparan. Aspek penilaian kinerja pegawai meliputi pencapaian sasaran individu, perilaku kerja dan kompetensi, serta faktor penambah dan faktor pengurang.

Employee performance review is conducted objectively using a balanced scorecard system based on each employee's Key Performance Indicator (KPI) achievements. LPEI ensures that the review process is carried out fairly and transparently. The review aspects include individual target achievements, work behavior and competencies, as well as additional and deductive factors.

Ketentuan pelaksanaan penilaian kinerja adalah berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif No. 0051/PDE/2012 tanggal 2 Oktober 2012 tentang Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia beserta perubahannya pada Peraturan Direktur Eksekutif No. 0024/PDE/07/2018.

The implementation of performance evaluation is based on Executive Director Regulation No. 0051/PDE/2012 dated October 2, 2012, regarding the Employee Performance Assessment System of Indonesia Eximbank, along with its amendments in Executive Director Regulation No. 0024/PDE/07/2018.

Sistem manajemen kinerja yang dilakukan LPEI secara garis besar melewati sejumlah proses sebagai berikut:

1. Manajemen kinerja melalui *Human Resources Information System* (HRIS);
2. *Performance review* sebagai sarana *coaching & mentoring*, diskusi pencapaian kinerja setiap pegawai, dan rencana pengembangan pribadi pegawai;
3. Pengembangan jenjang karier melalui *Talent Management* sesuai Standar Pedoman Sumber Daya Manusia No. 0024/PDE/10/2022 tentang Mutasi Pegawai yang telah ditetapkan dan diberlakukan sejak 27 Oktober 2022.

LPEI's performance review system generally follows these processes:

1. Performance management through the Human Resources Information System (HRIS);
2. Performance review as a tool for coaching & mentoring, discussion of each employee's performance achievements, and personal development planning;
3. Career development through Talent Management in accordance with the Human Resource Standards Guidelines No. 0024/PDE/10/2022 regarding Employee Transfers, which was established and implemented on October 27, 2022.

Berikut ini adalah hasil dari penilaian kinerja pengembangan jenjang karier pegawai yang telah dilakukan pada tahun 2024:

The following are the results of the performance review for employee career development conducted in 2024:

Persentase Pegawai yang telah Mengikuti Penilaian

Pada akhir tahun 2024, seluruh pegawai telah melalui proses penilaian pencapaian kinerja tanpa terkecuali (100%).

Employee Participation on Review Process

By the end of 2024, all employees, without exception (100%), have participated in the review process.

Skema Distribusi Normal Penilaian Pegawai Berdasarkan Pencapaian Kinerja LPEI

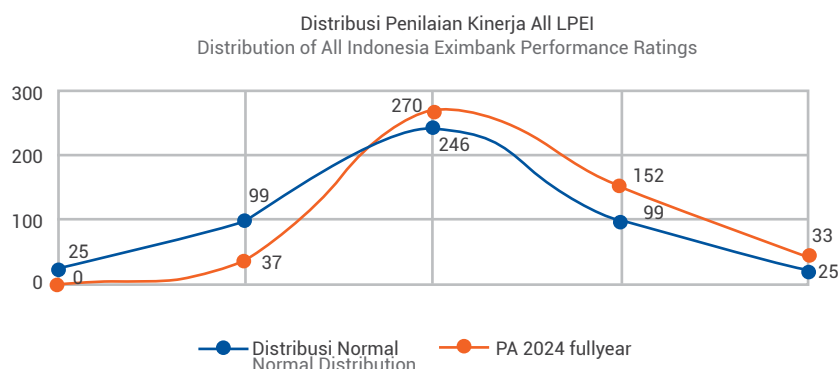
Normal Distribution Scheme for Employee Assessment Based on LPEI's Performance

Pencapaian LPEI LPEI's Achievement	Kurang Baik Not Good	Cukup Baik Moderate	Baik Good	Memuaskan Satisfactory	Istimewa Exceptional
>100%	5%	10%	50%	30%	5%
80% < X < 100%	5%	20%	50%	20%	5%
70% < X < 80%	22%	52%	17%	5%	4%
< 70%	27%	56%	12%	3%	2%

Hasil Kalibrasi Penilaian Kinerja terhadap 494 Pegawai Sesuai Target LPEI

Assessment Calibration of 494 Employees According to LPEI's Target

Sebaran Normal dan Nilai Kinerja Akhir Normal Distribution and Final Performance Rating



Sebaran Normal dan Nilai Kinerja Akhir Normal Distribution and Final Performance Rating

Kelompok Group	Nilai Range	Jumlah Total	Persentase Percentage
Istimewa Outstanding	> 115	33	7%
Memuaskan Above Expectation	105 ≤ X ≤ 115	152	31%
Baik Meet Expectation	95 ≤ X < 105	270	55%
Cukup Baik Below Expectation	85 ≤ X < 95	37	8%
Kurang Baik Poor	< 85	0	0%
Jumlah Total		492	100%

Hasil Pengembangan Karier

8 pegawai dipromosikan dan 50% di antaranya merupakan pegawai perempuan.

Career Development Results

8 employees have been promoted and among them, 50% are female employees.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Social and Environmental

Visi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan LPEI

Turut berperan aktif dalam memajukan Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fundamental ekonomi berbasis ekspor sesuai dengan visi dan misi Lembaga.

Misi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan LPEI

1. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan melalui *capacity building* guna menyejahterakan masyarakat Indonesia.
2. Meningkatkan sinergi antar Lembaga dalam memajukan ekonomi berbasis UKM berorientasi ekspor.
3. Menghantar pelaku UKM untuk melakukan ekspor.

Vision Corporate Social Responsibility LPEI

Actively participate in promoting Indonesia through community empowerment and the development of export-based economic fundamentals in accordance with the vision and mission of the Institution.

Mission Corporate Social Responsibility LPEI

1. Improving skills and knowledge through capacity building to improve the welfare of the Indonesian society.
2. Increase synergy between institutions in promoting an export-oriented SME-based economy.
3. Drive SMEs to export.

Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar

[OJK F.23, F.28]

Impact of Operations on Surrounding Communities [OJK F.23, F.28]

Kegiatan operasional LPEI secara langsung tidak memiliki dampak negatif terhadap lingkungan ataupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Hal ini dapat dipastikan karena pembiayaan ekspor-impor dilakukan di gedung kantor pusat dan cabang LPEI.

LPEI's operational activities do not have any direct negative impact on the environment or social communities. This is ensured as export-import financing is conducted within the building of head office and branch office of LPEI.

Program pemberdayaan dari LPEI untuk para pelaku UMKM dan masyarakat akan memberikan kontribusi positif dalam mendukung peningkatan nilai tambah produk Indonesia di pasar global melalui sejumlah upaya sebagai berikut:

LPEI's empowerment programs for MSMEs and communities contribute positively to enhancing the added value of Indonesian products in the global market through the following initiatives:

1. Mencetak eksportir baru dan membantu UMKM untuk meningkatkan kinerja bisnis menjadi *bankable* melalui program CPNE dan *Marketing Handholding*;
2. Menginisiasi kehadiran komunitas yang berorientasi ekspor melalui program Desa Devisa dan Rumah Ekspor.

1. Creating new exporters and helping MSMEs improve their business performance to become bankable through the CPNE and Marketing Handholding programs;
2. Initiating export-oriented communities through the Go Export Village and Rumah Ekspor programs.

Selain kegiatan bisnis yang memiliki dampak positif, LPEI juga melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ("TJSL") yang ditujukan untuk masyarakat, terutama mereka yang berada di sekitar area operasional.

In addition to business activities that generate positive impacts, LPEI also carries out Corporate Social Responsibility ("TJSL" or "CSR") programs targeted at communities, especially those in areas surrounding its operations.

Walaupun tidak memiliki dampak negatif secara langsung, LPEI mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah atau yang tidak bertanggung jawab dengan menyusun mekanisme analisis pembiayaan yang tertuang dalam Memorandum Analisa Pembiayaan. LPEI menganalisa kualitas dan kuantitas dari calon nasabah untuk menghindari pemberian pembiayaan kepada proyek atau usaha yang secara nyata membahayakan lingkungan. LPEI juga mengatur terkait *Industry Financing Reference* (IFR) yang memuat pernyataan mengenai perhatian terhadap aspek lingkungan dan sosial.

Although LPEI does not have a direct negative impact, it prevents problematic or irresponsible financing by establishing a financing analysis mechanism outlined in the Financing Analysis Memorandum. LPEI assesses both the qualitative and quantitative aspects of prospective customers to avoid financing projects or businesses that may pose environmental risks. Additionally, LPEI regulates the Industry Financing Reference (IFR), which includes statements regarding environmental and social considerations.

Pelaksanaan Program di Bidang Sosial dan Lingkungan Hidup [OJK F.25] [ESG S-12]

Implementation of Social and Environmental Program [OJK F.25] [ESG S-12]

LPEI menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat dengan moto (*tagline*): “Sahabat Ekspor”. Program ini dijalankan antara lain dalam rangka membantu proses persiapan para pelaku UKM untuk menjadi eksportir yang tangguh dan beretika, mengembangkan kemampuan masyarakat dengan senantiasa menjaga keseimbangan lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam merumuskan program setiap tahunnya, LPEI berupaya semaksimal mungkin melibatkan seluruh pemangku kepentingan, seperti komunitas dan mitra UKM binaan atau masyarakat agar program yang dihadirkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, serta dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkesinambungan serta berdampak jangka panjang.

Sepanjang tahun 2024, LPEI telah menjalankan program-program di bidang sosial dan lingkungan hidup yang menghabiskan dana Rp5,50 miliar miliar untuk 3 (tiga) kategori besar yaitu:

1. Kegiatan berbasis *community development* yang berkaitan erat dengan dukungan pencapaian SDGs melalui Desa Devisa;
2. Program pemberdayaan kelompok UMKM, salah satunya melalui *Coaching Program for New Exporter* (CPNE);
3. Program TJSL dalam bentuk pemberian dukungan dan bantuan sosial untuk membantu mengatasi sejumlah isu sosial.

Rincian program-program yang telah dilakukan LPEI pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

LPEI implements community empowerment programs which carries the *tagline*: “Sahabat Ekspor” (Export Partner). The program is conducted, among others, to help with the preparation process SMEs to become resilient and ethical exporters, improving community capability while maintaining environmental balance and improving community living standard.

In designing its annual programs, LPEI strives to involve all stakeholders, including communities, SME partners, and the general public, to ensure that the programs align with evolving needs and support current situation of the community, with additional benefits on economic, social, and environmental benefits with lasting impact.

Throughout 2024, LPEI has implemented social and environmental programs with a total expenditure of Rp5.50 billion across 3 (three) major categories:

1. Community development activities closely related to supporting the achievement of the SDGs through the Go Export Village program;
2. Empowerment programs for SME groups, among others through the Coaching Program for New Exporters (CPNE);
3. TJSL programs providing social support and assistance to help address various social issues.

The details of the programs conducted by LPEI in 2024 are as follows:

Program TJSL yang Mendukung Pencapaian Tujuan SDGs, Dana yang Dikeluarkan: Rp585 juta

CSR Programs that Support the Achievement of SDGs Goals, Disbursed Funds: Rp585 million

Jenis Kegiatan Activity	SDGs	Penjelasan Explanation	Capaian Achievement
Desa Devisa Kerajinan Bojonegoro Go Export Village Bojonegoro Arts	Produk ramah lingkungan Pemberdayaan perempuan Eco-friendly product Women empowerment	Cakupan 11 Desa dengan melibatkan 60 pengrajin dengan pendampingan dimulai pada Januari 2024 Covering 11 Villages involving 60 craftsmen, with mentoring started in January 2024	Telah melakukan ekspor langsung ke Spanyol dan Belanda Direct export to Spain and the Netherlands
Desa Devisa Lidi Sawit Riau Go Export Village Riau Palm Stick	Pemberdayaan Perempuan Ramah Lingkungan Women empowerment Eco-friendly product	Cakupan 33 Desa dengan melibatkan 925 penderes dan pengrajin, dengan pendampingan dimulai pada Oktober 2024 Covering 33 Villages involving 925 workers and craftsmen, with mentoring started in October 2024	Telah melakukan ekspor tidak langsung ke India Direct export to India
Desa Devisa Sagu Meranti Go Export Village Mereanti Sago	Pertumbuhan Ekonomi Pengentasan kemiskinan Economic growth Poverty eradication	Cakupan 16 Desa dengan melibatkan 6.000 petani, dengan pendampingan dimulai pada Agustus 2024 Covering 16 Villages involving 6,000 farmers, with mentoring started in August 2024	Telah melakukan ekspor tidak langsung ke Malaysia Indirect export to Malaysia

Program TJSL yang Mendukung Pencapaian Tujuan SDGs, Dana yang Dikeluarkan: Rp585 juta
CSR Programs that Support the Achievement of SDGs Goals, Disbursed Funds: Rp585 million

Jenis Kegiatan Activity	SDGs	Penjelasan Explanation	Capaian Achievement
Desa Devisa Kerajinan Ketak Lombok Go Export Village Lombok Ketak Art	Produk ramah lingkungan Eco-friendly product	Cakupan 31 Desa dengan melibatkan 3.100 pengrajin, dengan pendampingan dimulai pada Maret 2024 Covering 31 Villages involving 3,100 craftsmen, with mentoring started in March 2024	Telah melakukan ekspor tidak langsung ke negara Amerika Serikat dan Swedia Indirect export to the United States and Sweden
Desa Devisa Kakao Erekang Go Export Village Erekang Cacao	Pertumbuhan Ekonomi Pengentasan kemiskinan Economic growth Poverty eradication	Cakupan 130 Desa dengan melibatkan 5.570 petani, dengan pendampingan dimulai pada Juni 2024 Covering 130 Villages involving 5,570 farmers, with mentoring started in June 2024	Telah melakukan ekspor langsung ke Jepang Direct Export to Japan

Success Story: Desa Devisa Gula Aren Pacitan

Success Story: Go Export Village Pacitan Palm Sugar



Produk Gula Aren Temon
Temon Palm Sugar

LPEI terus memperkuat komitmennya untuk mewujudkan ekosistem ekspor yang berkelanjutan agar dapat berkontribusi lebih besar bagi peningkatan kinerja ekspor nasional. Bukti nyata atas komitmen tersebut salah satunya diwujudkan melalui program Desa Devisa Gula Aren Pacitan yang kini telah menaungi 299 petani yang berasal dari 11 desa yang tersebar di Kabupaten Pacitan.

LPEI continues to strengthen its commitment to building a sustainable export ecosystem to contribute more significantly to the improvement of national export performance. One concrete manifestation of this commitment is the Go Export Village Pacitan Palm Sugar program, which currently supports 299 farmers from 11 villages across Pacitan Regency.

Dalam mengembangkan Desa Devisa Gula Aren Pacitan, LPEI berkolaborasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan, Kemenkeu Satu, Kementerian Perhutanan, dan BSN Surabaya. Hasil produksi Desa Devisa Gula Aren Pacitan dipasarkan dengan brand "Gula Aren Temon". Produk Gula Aren Temon 100% organik, diambil dari tanaman liar dan diproses tanpa bahan pengawet. Masa simpan produk yakni 1 sampai dengan 1,5 tahun.

In developing the Go Export Village Pacitan Palm Sugar, LPEI collaborates with the East Java Provincial Office of Industry and Trade, the Pacitan Regency Agriculture Office, Kemenkeu Satu, the Ministry of Forestry, and BSN Surabaya. The production from this export village is marketed under the brand "Gula Aren Temon." The Gula Aren Temon product is 100% organic, sourced from wild aren palm trees and processed without preservatives. Its shelf life ranges from 1 to 1.5 years.

Pada program Desa Devisa ini, LPEI memberikan pendampingan yang komprehensif dan berkelanjutan kepada para petani mulai dari penguatan kelembagaan, perluasan akses pasar, hingga pendampingan pelatihan proses produksi. Pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan petani dan koperasi dalam mengolah dan memasarkan Gula Aren, sehingga, pada gilirannya dapat menambah pembeli potensial baru. Produk Gula Aren dari Desa Devisa ini dihasilkan oleh petani lokal di Jawa Timur dan sudah didatangi banyak peminat dari berbagai negara, seperti Jepang.

Through the Go Export Village program, LPEI provides comprehensive and continuous assistance to farmers, covering aspects such as institutional strengthening, market access expansion, and training on the production process. This support aims to enhance the skills of farmers and cooperatives in processing and marketing Palm Sugar, ultimately helping them attract new potential buyers. The palm sugar from this Go Export Village in East Java has already attracted interest from buyers in various countries, including Japan.

Program TJSL yang Mendukung Kerangka ESG, Dana yang Dikeluarkan: Rp4,467 Miliar

CSR Programs that Support the ESG Framework, Disbursed Funds: Rp4,467 Miliar

Kelompok Kegiatan Activity Group	Frekuensi Kegiatan Activity Frequency	Dana Investasi Sosial (Rp Juta) Social Investment Fund (Rp Million)
Pelatihan <i>Community Development</i> Yang Mendukung SDGs Training on Community Development that Supports SDGs	32	Rp4,457 miliar billion
Pelatihan Ekspor untuk UKM dalam Rangka Mendukung ESG Export Training for SMES in Support of ESGs	92	
Total Dana Investasi Sosial Total Social Investment Fund	124	Rp4,457 miliar billion

Success Story: Coaching Program New Exporter (CPNE)

Success Story: Coaching Program New Exporter (CPNE)



Produk Raya Craft
Raya Craft Product

PT Karya Nusa Raya (Raya Craft) adalah sebuah perusahaan yang bergerak di sektor industri kreatif khususnya dalam sub sektor kerajinan tangan dan produk rumah tangga. Produk Raya Craft berbahan dasar serat alami Indonesia, seperti rotan, alang-alang laut, eceng gondok, dan mending. Menggunakan Teknik anyaman, rotan diolah hingga menghasilkan produk dekorasi rumah seperti keranjang.

PT Karya Nusa Raya (Raya Craft) is a company engaged in the creative industry sector, particularly in the sub-sector of handicrafts and household products. Raya Craft's products are made from Indonesia's natural fibers, such as rattan, seagrass, water hyacinth, and mending. Using weaving techniques, the rattan is processed into home décor products such as baskets.

Pada tahun 2024, Raya Craft mengikuti kegiatan pelatihan CPNE yang secara intensif diselenggarakan oleh LPEI. Melalui program tersebut, LPEI memberikan bekal pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai pasar ekspor serta membagikan modul khusus guna membekali keterampilan untuk dapat menjadi eksportir baru.

In 2024, Raya Craft participated in the CPNE training program intensively organized by LPEI. Through this program, LPEI provided extensive knowledge and insights into the export market and shared specialized modules to equip participants with the necessary skills to become new exporters.

Hasilnya, program CPNE berhasil membuka peluang bisnis baru bagi Raya Craft yang kini telah memiliki tim dalam jumlah besar, yang terbagi menjadi tim desain, produksi dan administrasi. Raya Craft telah berhasil ekspor ke Taipei dan Kanada. Serta berpartisipasi pada pameran internasional yakni Trade Expo Indonesia 2024.

As a result, the CPNE program successfully opened up new business opportunities for Raya Craft, which now has a sizable team divided into design, production, and administrative units. Raya Craft has successfully exported its products to Taipei and Canada, and also participated in the 2024 Trade Expo Indonesia, an international trade exhibition.

Program TJSL—Dukungan dan Bantuan Sosial, Dana yang Dikeluarkan: Rp455 Juta

CSR Programs—Social Support and Donation, Disbursed Funds: Rp455 Million

Waktu Time	Yayasan/Lembaga Foundation/Organization	Jenis Kegiatan Activity	Lokasi Location	Dana yang Dikeluarkan Spending
11 November 2024 November 11, 2024	Yayasan Serayu Network Indonesia	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu (Joint Program TJSL SMV Kementerian Keuangan) Community Empowerment Program Based on the Environment in the Serayu River Basin (Joint TJSL Program of the Ministry of Finance's SMV)	Banjarnegara, Jawa Tengah Banjarnegara, Central Java	Rp150.000.000
12 Desember 2024 December 12, 2024	Koperasi Serba Usaha (KSU) APIKRI	Program Bantuan Penggunaan Energi Terbarukan Sebagai Alternatif Pengganti Energi Listrik Assistance Program for the Use of Renewable Energy as an Alternative to Electricity	Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) APIKRI Bantul Office of the Multi-Purpose Cooperative (KSU) APIKRI Bantul	Rp68.189.500
19 Desember 2024 December 19, 2024	RW 8, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara	Program TJSL/CSR Peduli Kesehatan, Bijak Mengelola Keuangan di Cilincing, Jakarta Utara TJSL/CSR Program for Health Awareness and Financial Literacy in Cilincing, North Jakarta	Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara Cilincing District, North Jakarta	Rp125.776.776
17 Juni 2024 June 17, 2024	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Qurban LPEI 2024 LPEI Qurban 2024	RPH Juleha Ciputat	Rp29.888.930
			RPH Tapos, Depok	Rp28.851.281
			RPH Cibinong	Rp29.701.600
18 Juni 2024 June 18, 2024	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Qurban LPEI 2024 LPEI Qurban 2024	Masyarakat Kecamatan Warudoyong, Sukabumi Community of Warudoyong District, Sukabumi	Rp23.000.000

Kepatuhan Sosial [OJK F.24] [GRI 2-27]

Social Compliance [OJK F.24] [GRI 2-27]

LPEI memberikan kemudahan akses kepada masyarakat yang ingin mengajukan pertanyaan, permintaan informasi, klarifikasi, ataupun menyampaikan pengaduan terhadap layanan yang dialaminya, melalui saluran pelaporan berikut ini:

1. Lisan: disampaikan langsung ke kantor LPEI atau menghubungi LPEI melalui nomor telepon kantor pusat/jaringan kantor lainnya yang diterima oleh resepsionis LPEI;
2. Tertulis: disampaikan melalui *e-mail* khusus pengaduan di pengaduan@indonesiaeximbank.go.id, disampaikan melalui menu Kontak pada situs web LPEI dan/atau disampaikan secara tertulis langsung ke kantor LPEI;
3. Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (APPK OJK): nasabah juga dapat menyampaikan pengaduan melalui aplikasi yang dikelola oleh OJK sesuai aturan OJK.

Semua laporan pengaduan dari nasabah/masyarakat yang diterima Lembaga akan diinvestigasi dan ditindaklanjuti sesegera mungkin oleh unit-unit terkait.

Terkait pelanggaran di tahun 2024, tidak ditemukan pelanggaran terkait informasi produk dan jasa maupun komunikasi pemasaran, baik yang menimbulkan kerugian bagi nasabah maupun pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

LPEI also provides easy access for the public to submit inquiries, request information, seek clarification, or lodge complaints regarding its services through the following reporting channels:

1. Verbal reports: Submitted directly to LPEI offices or via phone calls to the headquarters/other office networks, received by LPEI receptionists;
2. Written reports: Submitted via a designated complaint email at pengaduan@indonesiaeximbank.go.id, through the "Contact" menu on the LPEI website, or directly in writing at LPEI offices;
3. Consumer Protection Portal Application Financial Services Authority (APPK OJK): Customers may also file complaints through the application managed by the Financial Services Authority (OJK) in accordance with OJK regulations.

All incoming complaints from customers/public will be investigated and addressed as quickly as possible by the relevant units.

In 2024, no violations were found related to product and service information or marketing communications, either those that caused harm to customers or those that resulted in breaches of applicable laws and regulations.

Tanggapan Umpan Balik Laporan Tahun Sebelumnya [GJK G.3]

Feedback On Previous Year's Report [GJK G.3]

LPEI sudah mempublikasikan Laporan Keberlanjutan tahun 2023 namun hingga akhir periode pelaporan dari Laporan Keberlanjutan 2023 per 31 Desember 2024 tidak terdapat tanggapan dari para pemangku kepentingan terhadap isi dari Laporan Keberlanjutan 2023.

LPEI has published the Sustainability Report for 2023, however, until the end of the reporting period of Sustainability Report for 2023 as of December 31, 2024, there was no feedback from stakeholders on the content of the Sustainability Report for 2023.

Lembar Umpan Balik [OJK G.2]

Feedback Form [OJK G.2]

Kami meminta partisipasi kepada para pemangku kepentingan untuk memberikan umpan balik dengan mengirim formulir ini melalui fax/pos, setelah membaca Laporan Keberlanjutan ini.

We request the participation of stakeholders to provide feedback via fax/post mail after reading the Sustainability Report.

Pertanyaan Question	Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree
Laporan ini telah memberikan informasi yang bermanfaat mengenai kinerja ekonomi. This report has provided useful information regarding economic performance.		
Data dan informasi yang diungkapkan mudah dipahami, lengkap, transparan, dan berimbang. The data and information disclosed are easy to understand, complete, transparent, and balanced.		
Data dan informasi yang disajikan berguna dalam pengambilan keputusan. The data and information presented are useful in decision making.		
Laporan ini menarik dan mudah dibaca. The report is interesting and easy to read.		
* Berikan centang pada pernyataan yang Anda anggap paling tepat untuk setiap pertanyaan. Check the statement that you consider most appropriate for each question.		

Mohon berikan nilai mengenai aspek yang terdapat dalam Laporan Keberlanjutan ini:

- 1: paling penting
- 2: penting
- 3: tidak penting
- 4: sangat tidak penting

Please provide a rating for the aspects in this Sustainability Report:

- 1: most important
- 2: important
- 3: not important
- 4: very unimportant

Kinerja Ekonomi Economic Performance	[]	Kode Etik Code of Conduct	[]
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Occupational Health & Safety	[]	Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction	[]
Produk dan Layanan Products & Services	[]	Ketenagakerjaan Employment	[]
Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan Social & Community Development	[]	Penggunaan Energi Energy Usage	[]

Mohon berikan komentar/saran/usulan bagi Laporan Keberlanjutan ini.

Please provide comments/suggestions for this Sustainability Report.

Profil

Profile

Nama (bila berkenan)

Institusi/Perusahaan

Name (if inclined)

Institution/Company

Surel

Telepon/HP

E-mail

Phone/Mobile

Golongan Pemangku Kepentingan (berikan tanda ✓)

Category of Stakeholders (put ✓ in the box)

Pemerintah Government	Pekerja Employee	Perusahaan Company
Pemegang Saham Shareholders	Penyedia Barang dan Jasa Goods and Services Provider	Masyarakat Sekitar Local Community
Lembaga Pendidikan Educational Institution	Industri Industry	Media Media
Lembaga Swadaya Masyarakat Non-Governmental Organization	Lain-Lain, yaitu: Others, specifically:	

Mohon kirimkan kembali Lembar Umpan Balik ini kepada:

Please send this Feedback Form to:

Kantor Pusat
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
Prosperity Tower Lantai 1, District 8
Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel. (62-21) 395 03600
Fax. (62-21) 395 03699

Head Office
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
Prosperity Tower Lantai 1, District 8
Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel. (62-21) 395 03600
Fax. (62-21) 395 03699

Indeks Isi POJK NO.51/OJK.03/2017 [OJK G.4]

POJK NO.51/OJK.03/2017 Content Index [OJK G.4]

Indikator Indicator	Penjelasan Description	Halaman Page
Strategi Keberlanjutan Sustainability Strategy		
A.1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan Explanation on Sustainability Strategy	553-562
Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan Sustainability Performance Highlights		
B.1	Ikhtisar Kinerja Ekonomi Economic Performance Highlights	545
B.2	Ikhtisar Kinerja Lingkungan Hidup Environmental Performance Highlights	546
B.3	Ikhtisar Kinerja Sosial Social Performance Highlights	545-546
Profil Perusahaan Company Profile		
C.1	Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan Vision, Mission, and Value of Sustainability	563
C.2	Alamat Perusahaan Company's Address	544
C.3	Skala Perusahaan Business Scale	544, 614
C.4	Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan Products, services and Business Activities	543
C.5	Keanggotaan Pada Asosiasi Member of Association	543
C.6	Perubahan Organisasi Bersifat Signifikan Change of Significant Organization	543
Penjelasan Direksi Directors Statement		
D.1	Penjelasan Direksi Directors Statement	52-54
Tata Kelola Keberlanjutan Sustainability Governance		
E.1	Penanggungjawab Penerapan Keuangan berkelanjutan Management of Sustainable Finance Implementation	568
E.2	Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan berkelanjutan Competency Development on Sustainable Finance	573
E.3	Penilaian Risiko Atas Penerapan Keuangan berkelanjutan Risk Assessment for Sustainable Finance Implementation	574-575, 576-578
E.4	Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan Stakeholder Engagement	552
E.5	Permasalahan Terhadap Penerapan Keuangan berkelanjutan Challenges of Sustainable Financial Implementation	579
Kinerja Keberlanjutan Sustainability Performance		
F.1	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan Building a Culture of Sustainability	564

Indikator Indicator	Penjelasan Description	Halaman Page
Kinerja Ekonomi Economic Performance		
F.2	Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi Comparison of Performance Targets and Production, Portfolios, Financial Targets, or Investment, Revenue and Profit and Loss	583
F.3	Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi Pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan Comparison of Performance Targets and Production, Portfolios, Financial Targets, or Investment on Financial Instruments or Projects in Line with Sustainable Finance Implementation	585
Kinerja Lingkungan Environmental Performance		
Umum General		
F.4	Biaya Lingkungan Hidup Environmental Costs	608
Aspek Material Material Aspects		
F.5	Penggunaan Material Yang Ramah Lingkungan The Use of Environmentally Friendly Materials	602
Aspek Energi Energy Aspects		
F.6	Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan The Number and the Intensity of Energy Use	604
F.7	Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan The Efforts and Achievements of Energy Efficiency Including the Use of Renewable Energy Sources	603
Aspek Air Water Aspects		
F.8	Penggunaan Air Water Consumption	606
Aspek Keanekaragaman Hayati Biodiversity Aspects		
F.9	Dampak Dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati The Impact of Operational Areas Near or in the Area of Conservation or Biodiversity	608
F.10	Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati Biodiversity Conservation Efforts	608
Aspek Emisi Emission Aspects		
F.11	Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya The Number and Intensity of Emissions Produced by Type	605
F.12	Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan The Efforts and Achievement of Emission Reductions Undertaken	605
F.13	Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis The Amount of Waste and Effluent Generated by Type	607
F.14	Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen Waste and Effluent Management Mechanism	607

Indikator Indicator	Penjelasan Description	Halaman Page
F.15	Tumpahan yang Terjadi (jika ada) Spill that Occurred (if any)	608
F.16	Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima Dan Diselesaikan The Number and Material Environmental Complaints Received and Resolved	608
Kinerja Sosial Social Performance		
F.17	Komitmen LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik untuk Memberikan Layanan atas Produk dan/ atau Jasa yang Setara kepada Konsumen The Company's Commitment to Deliver Products and/or Services Equivalent to the Consumer	590
Aspek Ketenagakerjaan Employment Aspects		
F.18	Kesetaraan Kesempatan Bekerja Equality of Employment Opportunities	617
F.19	Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa Child Labor and Forced Labor	617
F.20	Upah Minimum Regional The Minimum Wage	621, 622
F.21	Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman Environmental Work Decent and Safe	624-625
F.22	Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai Training and Competency Development for Employees	626-638
Aspek Masyarakat Community Aspects		
F.23	Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar Operational Impacts to Local Communities	651
F.24	Pengaduan Masyarakat Public Complaints	656
F.25	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Social and Environmental Responsibility Activities	652-655
Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan Responsibility on the development of Sustainable Finance products and/or services		
F.26	Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan berkelanjutan Innovation and development of Sustainable Finance products and/or services	593
F.27	Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya Bagi Pelanggan Customer Safety	592-593
F.28	Dampak Produk/Jasa Impact of Products/Services	651
F.29	Jumlah Produk yang Ditarik Kembali The Number of Products Recalled	594
F.30	Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan Survey of Customer Satisfaction	596
Lain-lain Others		
G.1	Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen (jika Ada) Written Verification from an Independent Party, if Any	541
G.2	Lembar Umpan Balik Feedback Form	

Indikator Indicator	Penjelasan Description	Halaman Page
G.3	Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya Response to Feedback from the Prior Year	
G.4	Daftar Pengungkapan Sesuai POJK 51/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik List of Disclosures in accordance with POJK 51/2017 regarding the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers and Public Companies	

Keselarasan Laporan Keberlanjutan Dengan Metrik ESG [OJK G.4]

Alignment of the Sustainability Report with ESG Metrics [OJK G.4]

Kinerja Performance	Kode Code	Nama Metrik Matrix Name	Halaman Page
Lingkungan Environment	E-01	Laporan Emisi Gas Rumah Kaca Greenhouse Gas Emissions Report	605
	E-02	Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca Greenhouse Gas Emission Intensity	605
	E-03	Konsumsi Energi Listrik Electricity Consumption	604
	E-04	Konsumsi Air Water Consumption	604, 606
	E-05	Limbah yang Dihasilkan Generated Waste	607
	E-06	Komitmen Perusahaan untuk Mencapai Target Net Zero Emission Company Commitment to Achieving Net Zero Emission Target	605
	E-07	Komitmen Perusahaan untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca Company Commitment to Reducing Greenhouse Gas Emissions	605
Sosial Social	S-01	Kesetaraan Gender Gender Equality	614
	S-02	Pegawai Berdasarkan Gender dan Kelompok Umur Employees by Gender and Age Group	614
	S-03	Tingkat Pergantian Pegawai Employee Turnover Rate	615
	S-04	Jumlah Pegawai Sementara Number of Temporary Employees	614
	S-05	Pelatihan dan Pengembangan Pegawai Employee Training and Development	627
	S-06	Jumlah Kecelakaan Kerja Number of Workplace Accidents	625
	S-07	Kejadian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Incidents of Human Rights Violations	618
	S-08	Kebijakan Pelecehan Seksual dan/atau Non-diskriminasi Sexual Harassment and/or Non-Discrimination Policy	618
	S-09	Kebijakan Mengenai Hak Asasi Manusia Human Rights Policy	618
	S-10	Kebijakan Pekerja Anak dan/atau Pekerja Paksa Child Labor and/or Forced Labor Policy	617
	S-11	Kebijakan Mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan Kerja yang Aman dan Layak diberikan Kepada Seluruh Karyawan Policy on Occupational Health and Safety and Providing a Safe and Proper Work Environment for All Employees	624
	S-12	Corporate Social Responsibility	652-655

Kinerja Performance	Kode Code	Nama Metrik Matrix Name	Halaman Page
Tata Kelola Governance	G-01	Keberagaman Manajemen dan Independensi Management Diversity and Independence	570
	G-02	Total Kehadiran Direksi dan Komisaris ke Rapat Dewan Total Attendance of Directors and Commissioners at Board Meetings	570
	G-03	Kebijakan Pemisahan Chairman of the Board dan CEO Policy on Separation of Chairman of the Board and CEO	569
	G-04	Kebijakan Penilaian Dewan Direksi dan Komisaris Board of Directors and Commissioners Assessment Policy	569
	G-05	Kebijakan Pelatihan Dewan Direksi dan Komisaris Board of Directors and Commissioners Training Policy	573
	G-06	Kriteria Khusus Pemilihan Dewan Specific Criteria for Board Selection	569
	G-07	Kode Etik dan/atau Anti-Korupsi Code of Ethics and/or Anti-Corruption Policy	571-572
	G-08	Kebijakan Perlakuan Adil terhadap Pemegang Saham Fair Treatment Policy for Shareholders	572
	G-09	Pencegahan Konflik Kepentingan Conflict of Interest Prevention	571-572

Indeks Isi Consolidated GRI Standard 2021 [OJK G.4]

Consolidated Content Index of GRI Standard 2021 [OJK G.4]

INDEKS ISI STANDAR GRI CONTENT INDEX GRI STANDARD	PENGUNGKAPAN DISCLOSURE	HAL PAGE
Pernyataan Penggunaan Statement of Use	LPEI telah menyampaikan informasi yang tercantum dalam Indeks Konten GRI ini untuk periode pelaporan 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan mengacu pada Standar GRI. LPEI has reported the information cited in this GRI content index for the period January 1, 2024 until December 31, 2024 with reference to the GRI Standards.	
GRI	GRI 1: LANDASAN 2021 GRI 1: FOUNDATION 2021	
GRI 2: Pengungkapan Umum 2021 GRI 2: General Disclosures 2021	Organisasi dan Praktik Pelaporan The Organization and its Reporting Practices	
	GRI 2-1 Detail organisasi Organizational details	544
	GRI 2-2 Entitas yang termasuk dalam pelaporan keberlanjutan Entities included in the organization's sustainability reporting	541
	GRI 2-3 Periode pelaporan, frekuensi dan titik kontak Reporting period, frequency and contact point	541, 542
	GRI 2-4 Informasi tentang penyajian kembali Restatements of information	541
	GRI 2-5 Asuransi Eksternal External assurance	541
	Aktivitas dan Pekerja Activities and workers	
	GRI 2-6 Aktivitas, rantai pasok, dan relasi bisnis lainnya Activities, value chain and other business relationships	543
	GRI 2-7 Karyawan Employees	614
	GRI 2-8 Pekerja yang bukan karyawan Workers who are not employees	614
	Tata Kelola Governance	
	GRI 2-9 Struktur dan komposisi tata kelola Governance structure and composition	568-569
	GRI 2-10 Nominasi dan pemilihan badan tata kelola tertinggi Nomination and selection of the highest governance body	Terdapat di Laporan Tahunan Disclosed in Annual Report
	GRI 2-11 Ketua badan tata kelola tertinggi Chair of the highest governance body	568
	GRI 2-12 Peran badan tata kelola tertinggi dalam mengawasi pengelolaan dampak Role of the highest governance body in overseeing the management of impacts	568-569
	GRI 2-13 Pendelegasian tanggung jawab untuk mengelola dampak Delegation of responsibility for managing impacts	568-569
	GRI 2-14 Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan Role of the highest governance body in sustainability reporting	552
	GRI 2-15 Benturan kepentingan Conflicts of interest	Terdapat di Kode Etik, pada Laporan Tahunan Disclosed in Code of Conduct, in Annual Report

INDEKS ISI STANDAR GRI CONTENT INDEX GRI STANDARD	PENGUNGKAPAN DISCLOSURE	HAL PAGE
GRI 2-16	Komunikasi kepedulian terhadap permasalahan kritikal Communication of critical concerns	Terdapat di Whistleblowing System, pada Laporan Tahunan Disclosed in Whistleblowing System, in Annual Report
GRI 2-17	Pengetahuan kolektif dari badan tata kelola tertinggi Collective knowledge of the highest governance body	573
GRI 2-18	Evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi Evaluation of the performance of the highest governance body	Terdapat di Laporan Tahunan Disclosed in Annual Report
GRI 2-19	Kebijakan remunerasi Remuneration policies	Terdapat di Laporan Tahunan Disclosed in Annual Report
GRI 2-20	Proses untuk menentukan remunerasi Process to determine remuneration	Terdapat di Laporan Tahunan Disclosed in Annual Report
GRI 2-21	Rasio kompensasi total tahunan Annual total compensation ratio	N/A
Strategi, Kebijakan dan Praktik Strategy, Policies and Practices		
GRI 2-22	Pernyataan tentang strategi pembangunan berkelanjutan Statement on sustainable development strategy	52-54
GRI 2-23	Komitmen kebijakan Policy commitments	553-562
GRI 2-24	Menanamkan komitmen kebijakan Embedding policy commitments	553-562, 564, 574-575
GRI 2-25	Proses untuk memulihkan dampak negatif Processes to remediate negative impacts	595
GRI 2-26	Mekanisme pemberian umpan balik/saran dan menyampaikan kekhawatiran Mechanisms for seeking advice and raising concerns	Terdapat di Whistleblowing System, pada Laporan Tahunan Disclosed in Whistleblowing System, in Annual Report
GRI 2-27	Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan Compliance with laws and regulations	656
GRI 2-28	Keanggotaan asosiasi Membership associations	543
Keterlibatan Pemangku Kepentingan Stakeholder Engagement		
GRI 2-29	Pendekatan keterlibatan pemangku kepentingan Approach to stakeholder engagement	552, 576-578
GRI 2-30	Perjanjian kerja bersama Collective bargaining agreements	617

INDEKS ISI STANDAR GRI CONTENT INDEX GRI STANDARD	PENGUNGKAPAN DISCLOSURE	HAL PAGE
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topic 2021	GRI 3-1 Proses menentukan topik material Process to determine material topics	550-552
	GRI 3-2 Daftar topik material List of material topics	550-552
	GRI 3-3 Pengelolaan Topik Material Management of Material Topics	553-562, 582, 589, 600, 612
TOPIK EKONOMI Economic Topic		
GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016 GRI 201: Economic Performance 2016	GRI 201-1 Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan Direct economic value generated and distributed	586-587
	GRI 201-3 Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya Defined benefit plan obligations and other retirement plans	638
GRI 204: Praktik Pengadaan 2016 GRI 204: Procurement Practices 2016	GRI 204-1 Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal Proportion of spending on local suppliers	588
TOPIK LINGKUNGAN Environmental Topic		
GRI 302: Energi 2016	GRI 302-1 Konsumsi energi dalam organisasi Energy consumption within the organization	604
	GRI 302-3 Intensitas energi Energy intensity	604
	GRI 302-4 Pengurangan konsumsi energi Reduction of energy consumption	603, 604
GRI 305: Emisi 2016 GRI 305: Emission 2016	GRI 305-1 Emisi GRK (Cakupan 1) langsung Direct (Scope 1) GHG emissions	605
	GRI 305-2 Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung Energy indirect (Scope 2) GHG emissions	605
GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok 2016 GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016	GRI 308-1 Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria Lingkungan New suppliers that were screened using environmental criteria	588
TOPIK SOSIAL Social Topic		
GRI 401: Kepegawaian 2016 GRI 401: Employment 2016	GRI 401-1 Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan New employee hires and employee turnover	615-616
	GRI 401-2 Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan pada kurun waktu tertentu atau paruh waktu Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees	621, 623
	GRI 401-3 Cuti melahirkan Parental leave	619

INDEKS ISI STANDAR GRI CONTENT INDEX GRI STANDARD	PENGUNGKAPAN DISCLOSURE		HAL PAGE
GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018 GRI 403: Occupational Health and Safety 2018	GRI 403-1	Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja Occupational health and safety management system	624
	GRI 403-8	Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja Workers covered by an occupational health and safety management system	625
GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016 GRI 404: Training and Education 2016	GRI 404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan Average hours of training per year per employee	627

Indeks Isi GRI Financial Service [OJK G.4]

Consolidated Content Index of GRI Financial Service [OJK G.4]

Indikator Indicator	Pengungkapan Disclosure	Halaman Page
FS1	Kebijakan dengan komponen lingkungan dan sosial tertentu yang diterapkan pada lini bisnis Policies with specific environmental and social components applied to business lines	584
FS2	Prosedur untuk menilai dan menyaring risiko lingkungan dan sosial di lini bisnis Procedures for assessing and screening environmental and social risks in business lines	584
FS3	Proses untuk memantau implementasi dan kepatuhan klien dengan persyaratan lingkungan dan sosial termasuk dalam perjanjian atau transaksi Processes for monitoring client implementation and compliance with environmental and social requirements included in agreements or transactions	584
FS4	Proses untuk meningkatkan kompetensi staf untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedur lingkungan dan sosial sebagaimana diterapkan pada lini bisnis Processes for improving staff competency to implement environmental and social policies and procedures as applied to lines of business	573
FS5	Interaksi dengan klien/investee/mitra bisnis mengenai risiko dan peluang lingkungan sosial Interactions with clients/investments/business partners regarding environmental and social risks and opportunities	584
FS6	Persentase portofolio untuk lini bisnis berdasarkan wilayah tertentu, ukuran menurut sektor (mikro/SME/besar) Portfolio percentage for business lines by specific area size (eg micro/SME/large) and by sector	585
FS7	Nilai moneter produk dan layanan yang dirancang untuk memberikan manfaat sosial khusus untuk setiap lini bisnis yang dirinci berdasarkan tujuan The monetary value of products and services designed to provide specific social benefits for each line of business broken down by purpose or objective	585
FS8	Nilai moneter produk dan layanan yang dirancang untuk memberikan manfaat lingkungan spesifik untuk setiap lini bisnis yang dirinci berdasarkan tujuan The monetary value of products and services designed to provide specific environmental benefits for each line of business broken down by purpose or objective	585
FS9	Cakupan dan frekuensi audit untuk menilai implementasi kebijakan lingkungan dan sosial dan prosedur penilaian risiko Scope and frequency of audits to assess implementation of environmental and social policies and risk assessment procedures	574-575
FS10	Persentase dan jumlah perusahaan yang dimiliki dalam portofolio lembaga tempat organisasi pelapor berinteraksi dengan masalah lingkungan atau sosial Percentage and number of companies held in the portfolio of institutions with which the reporting organization interacts on environmental or social issues	585
FS11	Persentase aset yang terkena penyaringan lingkungan atau sosial positif dan negatif Percentage of assets that are subject to positive and negative environmental social issues	585
FS12	Kebijakan pemungutan suara yang diterapkan terhadap isu lingkungan atau sosial untuk saham di mana organisasi pelapor memiliki hak untuk memberikan suara atau memberikan nasihat terkait pemungutan suara A voting policy on where environmental or social issues are shared where the reporting organization has the right to vote to share or receive suggestions on voting	574
FS13	Jalur akses di daerah berpenduduk rendah atau kurang beruntung secara ekonomi berdasarkan jenis Access points in low-populated or economically disadvantaged areas by type	544
FS14	Inisiatif untuk meningkatkan akses ke layanan keuangan untuk orang-orang yang kurang beruntung Initiatives to improve access to financial services for disadvantaged people	593
FS15	Kebijakan untuk desain yang adil dan penjualan produk dan layanan keuangan Policies for the fair design and sale of financial products and services	593
FS16	Inisiatif untuk meningkatkan literasi keuangan berdasarkan jenis penerima manfaat Initiatives to improve financial literacy by type or beneficiary	593, 596







Laporan Keuangan

Financial Report



**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR
INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA**

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Beserta Laporan Auditor Independen**

***LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR
INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY***

***Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
With Independent Auditor's Report***

Daftar Isi	Halaman/ Page	Table of Contents
Surat Pernyataan Direksi		Directors' Statement Letter
Laporan Auditor Independen		Independent Auditor's Report
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023		Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2024 and 2023
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	Consolidated Statements of Financial Position
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	4	Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	6	Consolidated Statements of Changes in Equity
Laporan Arus Kas Konsolidasian	7	Consolidated Statements of Cash Flows
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	9	Notes to the Consolidated Financial Statements
Informasi Tambahan:		Additional Information:
Laporan Posisi Keuangan Entitas Induk	Lampiran I/ Appendix I	Statements of Financial Position of Parent Entity
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Induk	Lampiran II/ Appendix II	Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income of Parent Entity
Laporan Perubahan Ekuitas Entitas Induk	Lampiran III/ Appendix III	Statements of Changes in Equity of Parent Entity
Laporan Arus Kas Entitas Induk	Lampiran IV/ Appendix IV	Statements of Cash Flows of Parent Entity



Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Prosperity Tower, Lantai 1
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp. : (62 21) 395 03600
Fax. : (62 21) 395 03699
www.indonesiaeximbank.go.id

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**

Nomor : BS.0037/CEO/02/2025

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Yon Aرسال
Alamat Kantor : Prosperity Tower, Lantai 1,
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman. Kav.52-53
Jakarta 12190 - Indonesia

Alamat Rumah : Kemanggisan Ilir VII/21
RT 008 RW 013
Palmerah
Jakarta - Indonesia

Nomor Telepon : +6221 395 03600
Jabatan : Plt Direktur Eksekutif
2. Nama : Anwar Harsono
Alamat Kantor : Prosperity Tower, Lantai 1,
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman. Kav.52-53
Jakarta 12190 – Indonesia

Alamat Rumah : Jl. E No.7
RT 002 RW 003
Kelapa Dua, Kebon Jeruk
Jakarta - Indonesia

Nomor Telepon : +6221 395 03600
Jabatan : Plt Direktur Pelaksana Keuangan,
Operasional & Teknologi Informasi

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("Indonesia Eximbank" atau "LPEI") dan Entitas Anak;

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND SUBSIDIARY**

Number : BS.0037/CEO/02/2025

We, the undersigned:

1. Name : Yon Aرسال
Office address : Prosperity Tower, 1st Floor,
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman. Kav.52-53
Jakarta 12190 - Indonesia

Residential address : Kemanggisan Ilir VII/21
RT 008 RW 013
Palmerah
Jakarta - Indonesia

Telephone : +6221 395 03600
Title : Act Executive Director
2. Name : Anwar Harsono
Office address : Prosperity Tower, 1st Floor,
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman. Kav.52-53
Jakarta 12190 - Indonesia

Residential address : Jl. E No.7
RT 002 RW 003
Kelapa Dua, Kebon Jeruk
Jakarta - Indonesia

Telephone : +6221 395 03600
Title : Act Managing Director of Finance,
Operation & Information Technology

declare that:

1. We are responsible for the preparation and the presentation of the consolidated financial statements of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("Indonesia Eximbank" or "LPEI") and Subsidiary;

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**

Nomor : BS.0037/CEO/02/2025

2. Laporan keuangan konsolidasian LPEI dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 disusun dan disajikan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan penyajian wajar bertujuan khusus sebagai berikut:
 - a. Untuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas pembiayaan dalam rangka Penugasan Khusus yang direstrukturisasi dihitung menggunakan asumsi tingkat diskonto sebesar tingkat suku bunga setelah direstrukturisasi;

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas pembiayaan dalam rangka Penugasan Khusus yang diberikan kepada PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) dihitung menggunakan asumsi tingkat diskonto yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui surat Nomor S-194/MK.08/2023 tentang Penetapan Penggunaan Asumsi Tingkat Diskonto Berdasarkan Tingkat Suku Bunga Setelah Restrukturisasi Dalam Perhitungan CKPN.
 - b. Untuk unsur-unsur laporan keuangan konsolidasian lainnya disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian LPEI dan Entitas Anak telah diungkapkan secara lengkap dan benar;

b. Laporan keuangan konsolidasian LPEI dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam LPEI dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND SUBSIDIARY**

Number : BS.0037/CEO/02/2025

2. The consolidated financial statements of LPEI and Subsidiaries for the year ended December 31, 2024 and 2023 have been prepared and presented in accordance with fair presentation of special purpose financial reporting framework as follows:
 - a. For the Allowance for Impairment Losses (CKPN) on restructured National Interest Account financing, calculated using the assumption of the discount rate that is equal to the interest rate after the restructuring;

Allowance for Impairment Losses (CKPN) of financing for National Interest Account given to PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) is calculated using the assumption of the discount rate determined by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia through letter No. S-194/MK.08/2023 concerning the Determination of the Use of Discount Rates Assumption Based on Interest Rates After Restructuring in the Calculation of CKPN.
 - b. The other elements of the consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. a. All information in the consolidated financial statements of LPEI and Subsidiary has been disclosed in a complete and truthful manner;

b. The consolidated financial statements of LPEI and Subsidiary do not contain any material incorrect information or facts, nor do they omit material information or facts.
4. We are responsible for LPEI and Subsidiary's internal control system.

This is our declaration, which has been made truthfully.

h a

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND SUBSIDIARY**

Nomor : BS.0037/CEO/02/2025

Number : BS.0037/CEO/02/2025

Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf of Board of Directors

Jakarta, 10 Februari/February 10, 2025


Yon Aرسال
Plt Direktur Eksekutif/
Act Executive Director


Anwar Harsono
Plt Direktur Pelaksana
Keuangan, Operasional &
Teknologi Informasi/
Act Managing Director
of Finance, Operation &
Information Technology





Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Registered Public Accountants

Nomor/Number : 00018/2.1030/AU.6/09/1298-4/1/II/2025**Laporan Auditor Independen/
Independent Auditor's Report****Pemegang Saham, Dewan Direktur, dan Direktur Pelaksana/
The Shareholder, Board of Directors, and Managing Directors**RSM Indonesia
Plaza ASIA Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 IndonesiaT +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia**Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI") dan entitas anaknya, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material dan informasi penjelasan lainnya. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dengan menggunakan dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian seperti yang dijelaskan pada Catatan 2b atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dijabarkan pada Catatan 2b atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap LPEI dan entitas anaknya berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, kami telah memenuhi tanggung jawab etika

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI") and its subsidiary, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2024, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated changes in equity, and consolidated cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policies information and other explanatory information. The consolidated financial statements have been prepared in accordance with the basis for preparation of the consolidated financial statements as described in Note 2b of the accompanying consolidated financial statements.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia and its subsidiary as of December 31, 2024, and its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with the basis for preparation of the consolidated financial statements as described in Note 2b to the accompanying consolidated financial statements.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of LPEI and its subsidiary in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our



yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Penekanan Atas Hal - hal

1. Basis Akuntansi

Sebagaimana yang diungkapkan dalam Catatan 2b, 2q, dan 9i.13 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, yang menjelaskan tentang dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian LPEI dan entitas anaknya pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 disusun sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor S-194/MK.08/2023 tentang Penetapan Penggunaan Asumsi Tingkat Diskonto Berdasarkan Tingkat Suku Bunga Setelah Restrukturisasi Dalam Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). CKPN atas pembiayaan dalam rangka Penugasan Khusus yang diberikan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dihitung menggunakan asumsi tingkat diskonto yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sedangkan unsur-unsur laporan keuangan konsolidasian lainnya disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Sebagai akibatnya, laporan keuangan konsolidasian terlampir belum tentu cocok untuk tujuan lain.

Catatan 9i.13 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir mengungkapkan dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2024 apabila CKPN atas pembiayaan dalam rangka Penugasan Khusus yang diberikan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dihitung sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang diperbandingkan dengan yang dihitung berdasarkan Surat Menteri Keuangan.

2. Kasus Hukum

Kami membawa perhatian ke Catatan 45 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir yang menjelaskan adanya informasi kasus hukum atas dugaan tindak pidana dalam pemberian fasilitas pembiayaan yang melibatkan beberapa debitur LPEI.

Emphasis of Matters

1. Basis of Accounting

As disclosed in Notes 2b, 2q, 9i.13 to the accompanying consolidated financial statements, which explains the basis for the preparation of LPEI and its subsidiary consolidated financial statements as of and for the year ended December 31, 2024 prepared in accordance with the conditions set forth in the Letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, Number S-194/MK.08/2023 concerning the Determination of the Use of Discount Rates Assumptions Based on Interest Rates After Restructuring in the Calculation of Allowance for Impairment Losses (CKPN). CKPN for National Interest Account provided to PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk is calculated using the assumption of the discount rate set by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia. Meanwhile, other elements of the consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. As a result, the accompanying consolidated financial statements may not be suitable for other purposes.

Note 9i.13 to the accompanying consolidated financial statements disclose the impact to the consolidated financial statements for the 2024 financial year if the CKPN for National Interest Account provided to PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk is calculated in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards compared to those calculated based on the Letter of the Minister of Finance.

2. Legal Case

We draw attention to Note 45 to the accompanying consolidated financial statements which explains regarding information of legal case alleged unlawful acts in providing financing facilities involving several LPEI's debtors.



Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini proses kasus hukum atas dugaan tindak pidana dalam pemberian fasilitas pembiayaan yang melibatkan beberapa debitur LPEI tersebut masih dalam tahap pelaporan/penyelidikan awal maupun tahap penyidikan. Selain itu, terdapat ketidakpastian mengenai apakah terdapat kerugian keuangan dan non-keuangan lebih lanjut terhadap LPEI sebagai konsekuensi kasus tersebut. Manajemen telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi atas dampak keuangan maupun non-keuangan atas kasus hukum dugaan tindak pidana tersebut. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian diterbitkan dampak dari proses kasus hukum atas dugaan tindak pidana tersebut belum dapat diperkirakan.

Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal-hal tersebut.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Pembiayaan yang Diberikan, dan Pembiayaan dan Piutang Syariah

Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 9 (Pembiayaan dan piutang, pembiayaan dan piutang syariah dan piutang lainnya) atas laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2024, total Pembiayaan dan piutang, pembiayaan dan piutang syariah dan piutang lainnya sebesar Rp56.108.451 juta dengan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp17.132.639 juta.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas Pembiayaan dan piutang, pembiayaan dan piutang syariah dan piutang lainnya ditentukan LPEI berdasarkan kerangka kerugian kredit ekspektasian ("KKE") sesuai dengan PSAK 109: Instrumen Keuangan, seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2.q (Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan) atas laporan keuangan.

Until the issuance date of the consolidated financial statements, the process of legal case for alleged unlawful acts in providing financing facilities involving several LPEI's debtors both are still in the initial reporting/inquiry stage and investigation stage. In addition, there is uncertainty whether there will be further any financial and non-financial losses to LPEI as a consequence of this case. Management has prepared mitigation steps for the financial and non-financial impacts of this legal case for alleged unlawful acts. Until the issuance date of the consolidated financial statements, the impact of the legal case for alleged unlawful acts cannot be estimated accordingly.

Our opinion is not modified with respect to such matters.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Allowance for Impairment Losses of Financing, and Sharia Financing and Receivables

As described in Notes 9 (Financing and receivables, Sharia financing and receivables and other receivables) to the financial statements as of December 31, 2024, the total loans amounted to Rp56,108,451 million with allowance for impairment losses of loans amounted to Rp17.132.639 million.

The allowance for impairment losses of Financing and receivables, Sharia financing and receivables and other receivables is determined by the LPEI based on the Expected Credit Losses ("ECL") framework under PSAK 109: Financial Instrument, as described in Notes 2.q (Allowance for impairment losses on financial assets) to the financial statements.



Kami fokus pada area ini karena signifikansi nilai tercatat atas pembiayaan dan piutang, pembiayaan dan piutang syariah dan piutang lainnya, yang mewakili 79,36% dari jumlah aset LPEI pada tanggal 31 Desember 2024 dan besarnya nilai cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk atas pembiayaan dan piutang, pembiayaan dan piutang syariah dan piutang lainnya tersebut nilainya signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian LPEI. Lebih lanjut, penentuan KKE membutuhkan pertimbangan manajemen yang subjektif dan melibatkan penggunaan estimasi dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi.

LPEI menghitung KKE untuk pembiayaan dan piutang, pembiayaan dan piutang syariah dan piutang lainnya yang tidak memburuk dan yang memburuk. Untuk pembiayaan dan piutang, pembiayaan dan piutang syariah dan piutang lainnya yang tidak memburuk dan yang memburuk, yang secara individual tidak dianggap signifikan, LPEI menghitung KKE secara kolektif menggunakan model KKE dengan beberapa asumsi utama, antara lain *probability of default*, *loss given default*, dan *exposure at default*, setelah memperhitungkan faktor masa depan dan informasi eksternal lainnya.

Untuk pembiayaan dan piutang, pembiayaan dan piutang syariah dan piutang lainnya yang memburuk, yang secara individual dianggap signifikan, LPEI menghitung KKE secara individual dengan menggunakan estimasi arus kas ekspektasian dari pembiayaan dan piutang, pembiayaan dan piutang syariah dan piutang lainnya, yang membutuhkan pertimbangan signifikan dalam mengestimasi probabilitas rata-rata tertimbang kerugian kredit, serta estimasi waktu dan jumlah pembayaran dari pembiayaan dan piutang, pembiayaan dan piutang syariah dan piutang lainnya.

Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespons hal audit utama ini:

1. Kami memperoleh pemahaman atas pendekatan LPEI dalam mengidentifikasi pembiayaan dan piutang, pembiayaan dan piutang syariah dan piutang lainnya yang mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan atau bukti objektif penurunan nilai, dan melakukan pengujian, berdasarkan uji petik, kesesuaian dari klasifikasi kualitas kredit dengan menelaah dokumen kredit dari debitur-debitur yang menjadi sampel, serta membuat penilaian independen kami apakah ada peningkatan risiko kredit secara signifikan atau terdapat bukti objektif penurunan nilai.

We focused on this area as the total financing and receivables, Sharia financing and receivables and other receivables represents 79.36% of the total assets of LPEI as of December 31, 2024, and the allowance for impairment losses provided against the Financing and receivables, Sharia financing and receivables and other receivables were significant to the LPEI's consolidated financial statements. Furthermore, determining ECL involves subjective management judgement and is subject to a high degree of estimation uncertainty.

The LPEI calculated ECL for both non-impaired and impaired financing and receivables, sharia financing and receivables and other receivables. For non-impaired and impaired financing and receivables, sharia financing and receivables and other receivables which are not considered individually significant, LPEI assesses collective ECL using the ECL modelling approach that incorporates key assumptions, including probability of default, loss given default, and exposure at default, after considering forward-looking factors and other external information.

For impaired financing and receivables, sharia financing and receivables and other receivables, which are considered individually significant, LPEI assesses individual ECL by estimating the expected cash flows obtained from the financing and receivables, sharia financing and receivables and other receivables, which requires significant judgement in estimating the weighted average probability of credit losses, and the timing and amount of the repayments against the financing and receivables, sharia financing and receivables and other receivables.

We have performed the following audit procedures to address this key audit matters:

1. *We understood the LPEI's approach over the identification of financing and receivables, sharia financing and receivables and other receivables that have experienced a significant increase in credit risk or objective evidence of impairment, and tested, on a sample basis, the appropriateness of the credit quality classification by reviewing the credit files of those sampled debtors, and formed our own independent judgement as to whether there was a significant increase in credit risk or any objective evidence of impairment.*



2. Kami menilai kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai yang dihitung secara individual dengan menguji, berdasarkan uji petik, kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai yang dihitung oleh manajemen, dengan mengevaluasi kesesuaian estimasi probabilitas rata-rata tertimbang kerugian kredit yang diberikan, serta estimasi waktu dan jumlah pembayaran dari kredit yang diberikan, yang diterapkan oleh LPEI dalam mengestimasi arus kas ekspektasian dari kredit yang diberikan.
3. Kami menilai metodologi dan menguji asumsi permodelan signifikan yang digunakan dalam model KKE kolektif, dengan bantuan pakar permodelan kredit kami. Kami menguji *probability of default, loss given default* dan *exposure at default*, yang mencakup (i) evaluasi prakiraan makroekonomi Indonesia dengan membandingkan prakiraan dengan informasi yang tersedia untuk umum tentang prospek makroekonomi Indonesia; dan (ii) menguji kelengkapan dan keakuratan data yang digunakan dalam model dengan data aktual yang tersedia di LPEI.
4. Kami melakukan perhitungan ulang dan menguji, berdasarkan uji petik, akurasi perhitungan KKE yang dinilai secara kolektif dan individual.
5. Kami menilai kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai atas pembiayaan dan piutang syariah berdasarkan persentase tertentu untuk masing-masing kualitas pembiayaan dan piutang syariah dan menguji keakuratan perhitungannya.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan 2024 diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

2. *We assessed the adequacy of individual allowance for impairment losses by testing, on a sample basis, the adequacy of the allowance for impairment losses calculated by management, by evaluating the appropriateness of weighted average probability of credit losses, and the timing and amount of the repayments against the loans, which were applied by LPEI in estimating the expected cash flow obtained from the loans*
3. *We assessed the methodologies applied and tested the significant modelling assumptions used in collective ECL models, with assistance from our credit modelling expert. We tested probability of default, loss given default and exposure at default, which included (i) evaluating the forecasts of Indonesia macroeconomics by comparing forecasts with publicly available information on the Indonesia macroeconomic outlook; and (ii) testing the completeness and accuracy of data used in the model with the actual data available within the LPEI.*
4. *We recalculated and tested, on a sample basis, the accuracy of the collective and individual ECL calculation.*
5. *We assessed the adequacy of allowance for impairment losses of sharia financing and receivables based on specific percentage for each collectability and tested the accuracy of the calculation.*

Other information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the consolidated financial statements and our auditors' report thereon. The 2024 annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.



Ketika kami membaca laporan tahunan tahun 2024, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Hal-hal lain

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 14/POJK.4/2022, LPEI sebagai emiten wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan berkala berdasarkan standar akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik". Sebagaimana dijelaskan pada Catatan 2b atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, LPEI menyusun laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian seperti yang dijelaskan pada Catatan tersebut.

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian LPEI tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan opini atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Informasi keuangan LPEI (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

When we read the 2024 annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Other matters

Based on the Financial Services Authority Regulation No 14/POJK.4/2022, LPEI as an Issuer obliged to prepare periodic financial statement in accordance with Indonesian Financial Accounting Standard as regulated in Regulation No. VIII.G.7 regarding "Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Company". As described in Note 2b to the accompanying consolidated financial statements, LPEI has prepared the consolidated financial statements as of December 31, 2024 and for the year then ended in accordance with the basis for preparation of the consolidated financial statement as described in the above Note.

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of the LPEI as of December 31, 2024 and for the year then ended, was performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of LPEI (parent entity), which comprises the statement of financial position as of December 31, 2024 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.



Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan dasar penyusunan laporan keuangan sebagaimana dijelaskan diatas, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan LPEI dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi LPEI atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan konsolidasian LPEI.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, tetapi bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with the basis for preparation as described above, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing LPEI ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate LPEI or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing LPEI consolidated financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.



Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal LPEI.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi atas kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan LPEI untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan LPEI tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of LPEI internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on LPEI ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause LPEI to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*



- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam LPEI untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan konsolidasian LPEI. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within LPEI to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of audit of LPEI consolidated financial statement. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

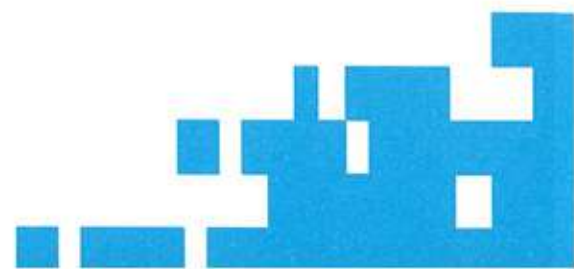
From the matters communicated with those charged with governance, we determine such matter that was of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and is therefore the key audit matter. We describe the matter in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Bimo Iman Santoso
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1298/
Public Accountant License Number: AP.1298

Jakarta, 10 Februari 2025/February 10, 2025



**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Per 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY**
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION**
As of December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
ASET				ASSETS
Kas	2b,2f	49	85	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2b,2e,2g,4	775	553	Current account with Bank Indonesia
Giro pada bank	2b,2e,2g			Current accounts with banks
Penugasan Umum	2aj,3,5,39,41	1,201,031	84,725	General Assignment
Cadangan kerugian penurunan nilai	2q,3	(4)	(2)	Allowance for impairment losses
		1,201,027	84,723	
Penugasan Khusus		16,259	23,533	National Interest Account
Cadangan kerugian penurunan nilai		--	--	Allowance for impairment losses
		16,259	23,533	
		1,217,286	108,256	
Penempatan pada bank	2b,2e,2f,2h			Placements with banks
Penugasan Umum	2aj,3,6,39,41	447,500	1,432,644	General Assignment
Cadangan kerugian penurunan nilai	2q,3	(27)	(38)	Allowance for impairment losses
		447,473	1,432,606	
Penugasan Khusus		924,333	5,982,000	National Interest Account
Cadangan kerugian penurunan nilai	2q,3	(55)	(358)	Allowance for impairment losses
		924,278	5,981,642	
		1,371,751	7,414,248	
Efek-efek	2b,2e,2f,2i,3,7,39,41	1,173,253	1,433,923	Securities
Tagihan derivatif	2b,2f,2k 2aj,3,8a,41	50,674	85	Derivatives receivable
Pembiayaan dan piutang, pembiayaan dan piutang syariah dan piutang lainnya				Financing and receivables, financing and sharia receivables and other receivables
Pembiayaan dan piutang, dan pembiayaan dan piutang syariah				Financing and receivables, financing and sharia receivables
Penugasan Umum				General Assignment
Pembiayaan dan piutang yang diberikan	2b,2e,2f,2l,2m 2aj,3,9,39,41	44,851,097	59,935,321	Financing and Receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai	2q,3	(14,517,647)	(27,665,053)	Allowance for impairment losses
		30,333,450	32,270,268	
Pembiayaan dan piutang syariah yang diberikan	2b,2e,2f,2n,2o 2aj,3,9,39,41	7,152,949	9,937,139	Financing and sharia receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai	2q,3	(2,541,149)	(4,906,231)	Allowance for impairment losses
		4,611,800	5,030,908	
Penugasan Khusus				National Interest Account
Pembiayaan dan piutang yang diberikan	2b,2e,2f,2l,2m 2aj,3,9,39,41	4,102,685	3,949,482	Financing and receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai	2q,3	(73,826)	(62,701)	Allowance for impairment losses
		4,028,859	3,886,781	
Pembiayaan dan piutang syariah yang diberikan	2b,2e,2f,2n,2o 2aj,3,9,41	1,720	1,269	Financing and sharia receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai	2q,3	(17)	(12)	Allowance for impairment losses
		1,703	1,257	
Total - neto		38,975,812	41,189,214	Total - net
Aset Ijarah	2b,2f,2p,10,41	96,281	--	Ijarah assets
Akumulasi penyusutan		(27,473)	--	Accumulated depreciation
		68,808	--	

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Per 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)**

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (Continued)
As of December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2024	2023	
Piutang lainnya				Other receivables
Piutang pembiayaan garansi	2b,2f,2l,2m,2r 2aj,3,9i,41	--	3,161	Guarantee financing receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai	2q,3	--	(3,161)	Allowance for impairment losses
		--	--	
Piutang Setoran Modal	2y,22	5,000,000	--	Capital Deposit Receivables
Pajak dibayar dimuka	2b,2f,2ak,3,16a,41	2,827	--	Prepaid tax
Biaya dibayar dimuka	2b,2f,2x,13,41	23,723	20,458	Prepaid expenses
Piutang asuransi dan penjaminan	2s,2aj,3,11a,41	6,637	75,059	Insurance and guarantee receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai	2q,3	(3,445)	--	Allowance for impairment losses
		3,192	75,059	
Piutang penjaminan ulang	2b,2f,2r,2s,11d,41	3,094	--	Reguarantee receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai	2q,3	(3,094)	--	Allowance for impairment losses
		--	--	
Aset reasuransi	2b,2f,2t,2aj,11b,41			Reinsurance assets
Penugasan Umum		3,968	2,834	General Assignment
Penugasan Khusus		88	99	National Interest Account
		4,056	2,933	
Piutang reasuransi	2b,2f,2t,11c,41	670	--	Reinsurance receivables
Tagihan akseptasi	2b,2f,2u,3			Acceptances receivable
Penugasan Umum	2aj,12,41	134,076	150,461	General Assignment
Cadangan kerugian penurunan nilai	2q,3	(504)	(604)	Allowance for impairment losses
		133,572	149,857	
Penugasan Khusus		4,571	3,391	National Interest Account
Cadangan kerugian penurunan nilai	2q,3	(17)	(18)	Allowance for impairment losses
		4,554	3,373	
		138,126	153,230	
Aset tetap				Premises and equipment
Harga perolehan	2b,2v,3,14,41	1,620,424	1,546,422	Cost
Akumulasi penyusutan		(712,843)	(631,787)	Accumulated depreciation
		907,581	914,635	
Aset pajak tangguhan - neto	2b,2ak,3b,16d,41	150,993	--	Deferred tax assets - net
Aset lain-lain	2b,2w,3,15	23,421	36,600	Other assets
TOTAL ASET		49,112,997	51,349,279	TOTAL ASSETS

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Per 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)**

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (Continued)
As of December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2024	2023	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas segera	2b,2z,41	17,283	69,131	Current liabilities
Liabilitas Devisa Hasil Ekspor	2b,2f,41	245,116	120,928	Foreign exchange export proceeds liabilities
Liabilitas akseptasi	2b,2e,2f,2u			Acceptances payable
Penugasan Umum	2aj,12,41	134,076	150,461	General Assignment
Penugasan Khusus		4,571	3,391	National Interest Account
		138,647	153,852	
Utang pajak	2b,2e,2f,16b,41	8,728	16,279	Taxes payable
Efek-efek utang yang diterbitkan	2b,2a,2aj,17,39,41	8,140,064	21,981,313	Debt securities issued
Liabilitas derivatif	2b,2k,8b,41	49,939	1,477	Derivatives payable
Pinjaman yang diterima	2b,2e,2f,2ab,18,39,41	24,863,560	18,352,943	Fund borrowings
Utang asuransi	2b,2f,2s,41			Insurance payable
Penugasan Umum		2,573	5,453	General Assignment
Penugasan Khusus		119	81	National Interest Account
		2,692	5,534	
Utang penjaminan	2b,2f,2r,41			Guarantee payable
Penugasan Umum		1,738	1,667	General Assignment
Penugasan Khusus		--	16,760	National Interest Account
		1,738	18,427	
Liabilitas asuransi	2b,2f,2s,2aj			Insurance liabilities
Penugasan Umum	11e,41	9,256	6,474	General Assignment
Penugasan Khusus		251	198	National Interest Account
		9,507	6,672	
Estimasi klaim penjaminan	2b,2f,2r			Estimated guarantee claim
Penugasan Umum	3b,19,41	3,744	5,347	General Assignment
Penugasan Khusus		441,103	443,564	National Interest Account
		444,847	448,911	
Liabilitas imbalan kerja	2b,2ai,3b,30,39	139,268	142,522	Liability for employee benefits
Liabilitas sewa	2b,2v,20,41	2,949	5,337	Lease liabilities
Liabilitas lain-lain	2b,2aj 21,41	1,056,029	1,264,486	Other liabilities
TOTAL LIABILITAS		35,120,367	42,587,812	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Kontribusi modal Pemerintah				Government capital contribution
Penugasan Umum	2b,22	23,589,123	23,589,123	General Assignment
Penugasan Khusus	2b,22	19,013,308	14,013,308	National Interest Account
		42,602,431	37,602,431	
Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak tangguhan	2b,2i,7	(22,953)	(23,492)	Unrealized loss of financial assets at fair value through other comprehensive income, net of deferred tax
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti, setelah pajak tangguhan	2b,2ai,30	148,347	150,248	Remeasurement of defined benefit obligation, net of deferred tax
Saldo laba				Retained earnings
Telah ditentukan penggunaannya:				Appropriated:
Cadangan umum	2b,23	322,161	322,161	General reserve
Cadangan tujuan	2b,23	758,235	758,235	Specific reserve
		1,080,396	1,080,396	
Belum ditentukan penggunaannya		(29,815,592)	(30,048,117)	Unappropriated
		13,992,629	8,761,466	
Kepentingan non-pengendali		1	1	Non-controlling interest
TOTAL EKUITAS		13,992,630	8,761,467	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		49,112,997	51,349,279	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				INCOME AND EXPENSES FROM OPERATIONS
Pendapatan bunga dan usaha syariah				Interest income and income from sharia
Pendapatan bunga	2b,2ad,24			Interest income
Penugasan Umum		2,674,110	3,155,266	General Assignment
Penugasan Khusus		312,263	408,176	National Interest Account
		<u>2,986,373</u>	<u>3,563,442</u>	
Usaha syariah	2b,2ag,24			Sharia
Penugasan Umum		390,492	488,450	General Assignment
Penugasan Khusus		47	141	National Interest Account
		<u>390,539</u>	<u>488,591</u>	
Jumlah pendapatan bunga dan usaha syariah		3,376,912	4,052,033	Total interest income and income from sharia
Pendapatan usaha dari Ujrah	25	6,904	64	Income from Ujrah
Beban bunga	2b,2ad,2ag,26	<u>(2,656,651)</u>	<u>(3,128,893)</u>	Interest expense
PENDAPATAN BUNGA DAN USAHA SYARIAH - NETO		<u>727,165</u>	<u>923,204</u>	INTEREST INCOME AND INCOME FROM SHARIA - NET
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA				OTHER OPERATING INCOME
Pendapatan dari asuransi				Income from insurance
Pendapatan dari asuransi	2b,2ah,11f	16,469	21,675	Income from insurance
Premi reasuransi	2b,2ah,11f	<u>(7,498)</u>	<u>(9,089)</u>	Reinsurance premiums
Pendapatan dari asuransi - neto		<u>8,971</u>	<u>12,586</u>	Income from insurance - net
(Kenaikan) penurunan pada liabilitas asuransi	2b,2s,2af 11j	<u>(2,551)</u>	<u>1,059</u>	(Increase) decrease in insurance liabilities
Kenaikan (penurunan) pada aset reasuransi	2b,2t,2af,11i	998	(494)	Increase (decrease) in reinsurance assets
Beban klaim asuransi dan lainnya	2b,2s,2ah,11g	<u>(5,626)</u>	<u>(933)</u>	Claim expense from insurance and other
Pendapatan dari penjaminan	2b,2r,11h	65,792	90,527	Income from guarantee
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	2b,2aj	4,865	6,828	Gain on foreign exchange transactions - net
Provisi dan komisi selain dari pembiayaan dan piutang	2b,2ac	36,938	52,779	Non financing and receivables related fees and commission
Keuntungan penjualan efek - efek	2b	500	12,139	Gain on sale of securities
Lain-lain	2b	<u>143,122</u>	<u>84,586</u>	Others
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA - NETO		<u>253,009</u>	<u>259,077</u>	TOTAL OTHER OPERATING INCOME - NET
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	2b,2q,3,27	<u>(277,774)</u>	<u>(16,932,394)</u>	Provision for impairment losses on financial assets
Penyisihan kerugian estimasi klaim penjaminan	2b,2r,3,19	1,185	2,994	Provision for impairment losses on estimated guarantee claim

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these
consolidated financial statements taken as a whole

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA				OTHER OPERATING EXPENSES
Gaji dan tunjangan	2b,29	(437,532)	(482,289)	Salaries and benefits
Umum dan administrasi	2b,28	(233,520)	(299,239)	General and administrative
Lain-lain		(14,037)	(12,505)	Others
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL LAINNYA		(685,089)	(794,033)	TOTAL OTHER OPERATING EXPENSES
LABA (RUGI) OPERASIONAL		18,496	(16,541,152)	INCOME (LOSS) FROM OPERATIONS
PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL - NETO		63,420	10,488	NON-OPERATING INCOME - NET
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK		81,916	(16,530,664)	INCOME (LOSS) BEFORE TAX EXPENSE
MANFAAT (BEBAN) PAJAK	2b,2ak,16c	150,609	(1,583,663)	TAX BENEFIT (EXPENSE)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		232,525	(18,114,327)	INCOME (LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:				OTHER COMPREHENSIVE INCOME:
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN YANG AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI				OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) TO BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS
Perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - neto		691	(19,145)	Changes in fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income- net
Pajak terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lainnya	2b,2ak,16d	(152)	(956)	Tax related to components of other comprehensive income
		539	(20,101)	
(RUGI) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI				OTHER COMPREHENSIVE (LOSS) INCOME NOT TO BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti		(2,437)	(3,991)	Remeasurement of defined benefit obligation
Pajak terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lainnya	2b,2ak,16d	536	31,641	Tax related to components of other comprehensive income
		(1,901)	27,650	
(RUGI) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - NETO SETELAH PAJAK		(1,362)	7,549	OTHER COMPREHENSIVE (LOSS) INCOME - NET OF TAX
JUMLAH PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		231,163	(18,106,778)	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR
Total Penghasilan (Rugi) Tahun Berjalan yang diatribusikan kepada:				Total Income (Loss) For The Year Attributable to:
Pemilik entitas induk		232,525	(18,114,327)	Equity holders of the parent entity
Kepentingan non-pengendali		--	--	Non-controlling interest
Jumlah		232,525	(18,114,327)	Total
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif yang diatribusikan kepada:				Total Comprehensive Income (Loss) For the Year Attributable To :
Pemilik entitas induk		231,163	(18,106,778)	Equity holders of the parent entity
Kepentingan non-pengendali		--	--	Non-controlling interest
Jumlah		231,163	(18,106,778)	Total

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Keuntungan/(kerugian)
Yang belum direalisasi
dari kenaikan nilai wajar
aset keuangan
dalam kelompok
pada nilai wajar melalui
penghasilan
komprehensif lain
setelah dikurangi
pajak tangguhan/
Unrealized gain/(loss)
from increase in the
fair value of
financial assets
in group at fair value
through
other comprehensive
income net of
deferred tax

Kontribusi
modal
Pemerintah/
Government
capital
contribution

Catatan/
Notes

Saldo per 31 Desember 2022

Kerugian yang belum direalisasi
atas efek-efek yang diukur pada
nilai wajar melalui penghasilan
komprehensif lain - neto
setelah pajak tangguhan
Pengukuran kembali kewajiban imbalan
pasti, setelah pajak tangguhan
Rugi tahun berjalan

Saldo per 31 Desember 2023

Modal tambahan
Penugasan Khusus
Keuntungan yang belum direalisasi
atas efek-efek yang diukur pada
nilai wajar melalui penghasilan
komprehensif lain - neto
setelah pajak tangguhan
Pengukuran kembali kewajiban imbalan
pasti, setelah pajak tangguhan
Laba tahun berjalan

Saldo per 31 Desember 2024

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

Keuntungan/(kerugian) Yang belum direalisasi dari kenaikan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah dikurangi pajak tangguhan/ Unrealized gain/(loss) from increase in the fair value of financial assets in group at fair value through other comprehensive income net of deferred tax	Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti, setelah pajak tangguhan/ Remeasurement of defined benefit obligation, net of deferred tax	Saldo laba/Retained earnings				Kepentingan nonpengendali/ Non-controlling Interest	Total ekuitas/ Total Equity		
		Telah ditentukan penggunaan/		Belum ditentukan penggunaan/	Total/				
		Appropriated						Unappropriated	Total
		Cadangan umum/ General reserve	Cadangan tujuan/ Specific reserve						
37,602,431	122,598	322,161	758,235	(11,933,790)	26,868,244	1	26,868,245		
--	--	--	--	--	(20,101)	--	(20,101)		
--	27,650	--	--	--	27,650	--	27,650		
--	150,248	--	--	(18,114,327)	(18,114,327)	--	(18,114,327)		
37,602,431	150,248	322,161	758,235	(30,048,117)	8,761,466	1	8,761,467		
5,000,000	--	--	--	--	5,000,000	--	5,000,000		
--	--	--	--	--	539	--	539		
--	--	--	--	--	(1,901)	--	(1,901)		
--	148,347	--	758,235	(29,815,592)	232,525	--	232,525		
42,602,431	148,347	322,161	758,235	(29,815,592)	13,992,629	1	13,992,630		

Balance as of December 31, 2022
Impact of transitional adjustment on
financial assets at fair value
through other comprehensive
income - net
of deferred tax
Remeasurement of defined benefit
obligation, net of deferred tax
Loss for the year
Balance as of December 31, 2023
Additional capital
National Interest Account
Unrealized gain of
financial assets at fair value
through other comprehensive
income - net
of deferred tax
Remeasurement of defined benefit
obligation, net of deferred tax
Income for the year
Balance as of December 31, 2024

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these
consolidated financial statements

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOW**
For the the Years Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga, provisi dan komisi		2,992,056	3,563,506	Interest, fees and commissions received
Pendapatan usaha syariah		424,917	488,591	Sharia income
Pendapatan operasional lainnya - neto		249,697	251,684	Other operating income - net
Klaim atas kelebihan pembayaran pajak		--	865	Claims for tax refund
Beban operasional lainnya - neto		(647,341)	(672,703)	Other operating expenses - net
Pembayaran bunga dan pembiayaan lainnya		(2,904,799)	(3,215,023)	Interest and other financing charges
Pendapatan bukan operasional - neto		10,222	10,488	Non-operating income - net
Arus kas dari operasi sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi		124,752	427,408	Cash flows from operations before changes in operating assets and liabilities
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi				Changes in operating assets and liabilities
Penurunan(kenaikan) aset operasi:				Decrease(increase) in operating assets:
Tagihan derivatif		(50,589)	(85)	Derivatives receivable
Pembiayaan dan piutang		1,967,909	6,441,424	Financing and receivables
Pembiayaan/piutang syariah		747,569	1,155,766	Sharia financing/receivables
Aset ljarah		(96,281)	--	Ijarah assets
Biaya dibayar dimuka		(3,265)	(5,329)	Prepaid expenses
				Insurance and
Piutang asuransi dan penjaminan		68,421	534,894	guarantee receivables
Piutang penjaminan ulang		(3,094)	--	Reguarantee receivables
Piutang reasuransi		(670)	--	Reinsurance receivables
Aset reasuransi		(125)	117	Reinsurance assets
Tagihan akseptasi		15,206	(2,693)	Acceptances receivable
Aset lain-lain		5,228	17,916	Other assets
(Penurunan)/kenaikan liabilitas operasi:				(Decrease)/increase in operating liabilities:
Liabilitas segera		(51,848)	23,085	Current liabilities
Liabilitas valuta asing				Foreign exchange export
hasil ekspor		124,188	120,928	proceeds liabilities
Liabilitas akseptasi		(15,206)	2,691	Acceptances payable
Utang pajak		(10,377)	5,012	Taxes payable
Liabilitas derivatif		48,462	1,421	Derivatives payable
Utang asuransi		(2,842)	287	Insurances payable
Utang penjaminan		(16,689)	(43,288)	Guarantee payable
Liabilitas asuransi		283	(1,289)	Insurance liabilities
Estimasi klaim penjaminan		(2,879)	(26,752)	Estimated guarantee claim
Liabilitas imbalan kerja		(5,692)	--	Liability for employee benefits
Liabilitas lain-lain		140,773	(104,154)	Other liabilities
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi		2,983,234	8,547,359	Net cash provided by operating activities

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these consolidated financial statements

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF CASH FLOW (Continued)**
For the Year Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	2b,14	(73,078)	(22,559)	Acquisitions of premises
Penjualan efek-efek dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya		261,361	517,053	Selling of marketable securities at fair value through other comprehensive income
Kas neto diperoleh dari aktivitas investasi		188,283	494,494	Net cash provided by investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman yang diterima		31,983,829	29,298,758	Proceeds from fund borrowings
Pembayaran pinjaman yang diterima		(26,024,418)	(40,239,514)	Payments of fund borrowings
Pembayaran efek-efek utang yang diterbitkan yang jatuh tempo		(14,065,226)	(3,322,316)	Payments for matured debt securities issued
Pembayaran liabilitas sewa	20	(4,160)	(3,944)	Payments of lease liability
Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan		(8,109,975)	(14,267,016)	Net cash used in financing activities
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada kas dan setara kas		4,865	6,828	Foreign exchange effect related to cash and cash equivalents
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS		(4,933,593)	(5,218,335)	NET DECREASE IN CASH AND EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		7,523,540	12,741,875	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		2,589,947	7,523,540	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS TERDIRI DARI:				COMPONENTS OF CASH AND CASH EQUIVALENTS:
Kas		49	85	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2b,4	775	553	Current account with Bank Indonesia
Giro pada bank	2b,5	1,217,290	108,258	Current accounts with banks
Penempatan pada bank - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	2b,6	1,371,833	7,414,644	Placements with banks - maturing within three months or less since the acquisition date
Total kas dan setara kas		2,589,947	7,523,540	Total cash and cash equivalents

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these consolidated financial statements

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

1. Umum

1.a. Pendirian dan Pembentukan LPEI

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia didirikan dengan nama PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) ("BEI") yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1999 tanggal 25 Mei 1999, tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Perbankan. Pendirian Bank ditetapkan dengan akta No. 49 tanggal 25 Juni 1999 oleh notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-13130.HT.01.01-TH.99 tanggal 19 Juli 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 8 Oktober 1999, Tambahan No. 6652.

BEI memperoleh izin usaha sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/12/KEP.GBI/1999 tanggal 18 Agustus 1999 dan beroperasi secara komersial sejak tanggal 10 September 1999. Berdasarkan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No. 2/6/KEP.DpG/2000 tanggal 24 April 2000, Bank memperoleh status sebagai bank devisa.

Pada tanggal 21 September 2007, BEI telah mendapat izin usaha syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 9/1494/DPbs.

Pemegang saham telah menyetujui perubahan pasal 3 anggaran dasar BEI tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha BEI berdasarkan (i) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Mei 2003 yang diaktakan dengan akta No. 45 tanggal 21 Mei 2003 oleh notaris Imas Fatimah, S.H., yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-11539.HT.01.04.TH.2003 tanggal 23 Mei 2003 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70 tanggal 2 September 2003, Tambahan No. 7838.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. General

1.a. Establishment and Formation of LPEI

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia was establish under the name PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) ("BEI") which established based on Government Regulation No. 37 of 1999 dated May 25, 1999, regarding the State Capital Participation of the Government of the Republic of Indonesia in the Establishment of a Limited Liability Company (Persero) in the Banking Sector. The establishment of the Bank was not arized under deed No. 49 dated June 25, 1999 of notary Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H. The deed of establishment approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C-13130.HT.01.01-TH.99 dated July 19, 1999 and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 81 dated October 8, 1999, Supplement No. 6652.

BEI has a business license to conduct commercial banking activities based on the Decision Letter No. 1/12/KEP.GBI/1999 dated August 18, 1999 of the Governor of Bank Indonesia and started commercial operations on September 10, 1999. The Bank obtained its status as a foreign exchange bank based on the Decision Letter of the Deputy Governor of Bank Indonesia No. 2/6/KEP.DpG/2000 dated April 24, 2000.

On September 21, 2007, the BEI obtained its sharia business license from the Bank Indonesia through Decision Letter No. 9/1494/DPbs.

The stockholder approved the revision of article 3 of the BEI's Articles of Association concerning the BEI's objectives and scope of activities based on (i) Shareholder's Extraordinary General Meeting held on May 19, 2003 as provided in the deed No. 45 dated May 21, 2003 of notary Imas Fatimah, S.H., which was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C-11539.HT.01.04.TH.2003 dated May 23, 2003 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 70 dated September 2, 2003, Supplement No. 7838.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

1. Umum (lanjutan)

1.a. Pendirian dan Pembentukan LPEI (lanjutan)

Dan (ii) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Maret 2007 yang diaktakan dengan Akta No. 15 tanggal 10 Mei 2007 oleh notaris Imas Fatimah, S.H., yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. W7-05624.HT.01.04-TH.2007 tanggal 21 Mei 2007 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 61 tanggal 31 Juli 2007, Tambahan No. 7655.

Di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Juli 2008, yang diaktakan dengan Akta No. 2 tanggal 1 Agustus 2008 oleh notaris Sutjipto, S.H., M.Kn. yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-73679.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 14 Oktober 2008, pemegang saham menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2003, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005.

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar BEI, maksud dan tujuan BEI adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang pembiayaan perdagangan ekspor impor melalui pemberian pinjaman/pembiayaan, penjaminan dan/atau asuransi serta jasa konsultasi yang berkaitan dengan pembiayaan perdagangan luar negeri, penerus pinjaman pemerintah, termasuk menghimpun dana pihak ketiga dalam bentuk giro, simpanan berjangka atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memperoleh pinjaman dan menerbitkan efek-efek, baik di dalam maupun di luar negeri, serta melaksanakan kegiatan perbankan syariah.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. General (continued)

1.a. Establishment and Formation of LPEI (continued)

And (ii) Stockholder's Extraordinary General Meeting held on March 22, 2007 as provided in the Deed No. 15 dated May 10, 2007 of notary Imas Fatimah, S.H., which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. W7-05624.HT.01.04-TH.2007 dated May 21, 2007 and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 61 dated July 31, 2007, Supplement No. 7655.

In the Stockholder's Extraordinary General Meeting held on July 18, 2008 as mentioned in Deed No. 2 dated August 1, 2008 of notary Sutjipto, S.H., M.Kn. which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-73679.AH.01.02.Year 2008 dated October 14, 2008, the stockholders approved the entire changes in the Bank's Articles of Association to conform with Law No. 19 Year 2003, Law No. 40 Year 2007 and Government Regulation No. 45 Year 2005.

According to article 3 of the BEI's Articles of Association, the BEI's objectives and scope are to execute and provide assistance to the government in the implementation of its policies and programs in the economic sector and in the national development in general, particularly in export and import trade financing through the disbursement/financing of trade financing and providing guarantees/insurance as well as providing consultations on foreign trade financing, the disbursement of two-step financing from the government, including collecting third-parties funds in the form of demand deposits, time deposits or other forms, obtaining borrowings and issuing securities in the local or foreign markets, and conducting sharia banking activities.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)

1.a. Pendirian dan Pembentukan LPEI (lanjutan)

Pada tanggal 12 Januari 2009, Gubernur Bank Indonesia telah mencabut izin usaha BEI sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Undang-undang No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan menegaskan bahwa dengan dicabutnya izin usaha BEI, maka seluruh aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) beralih kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI") sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang LPEI.

Undang-undang No. 2 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang LPEI Pasal 48 menyebutkan bahwa paling lama 9 (sembilan) bulan sejak Undang-undang ini diundangkan, LPEI mulai beroperasi, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 336/KMK.06/2009 tanggal 24 Agustus 2009, Pemerintah Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa tanggal 1 September 2009 sebagai tanggal mulai beroperasinya LPEI. Pada saat mulai beroperasinya LPEI, maka BEI dinyatakan bubar dan seketika itu pula seluruh aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum BEI dan pegawai BEI tersebut beralih menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum LPEI dan pegawai LPEI.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BEI yang diaktakan No. 16 tanggal 31 Agustus 2009 oleh Notaris Ny. Anne Meyanne Alwie, S.H., pemegang saham memutuskan di antaranya:

- Mengalihkan seluruh aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum BEI menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum LPEI.
- Mengalihkan semua pegawai BEI menjadi pegawai LPEI termasuk namun tidak terbatas pada masa kerja, penghargaan masa kerja, dan jasa produksi pegawai yang telah dibiayakan sampai dengan 31 Agustus 2009.
- Pembubaran BEI tanpa likuidasi.

1. General (continued)

1.a. Establishment and Formation of LPEI (continued)

On 12 January 2009, the Governor of Bank Indonesia revoked the BEI business license as a follow-up to the issuance of Law No. 2 of 2009 concerning the Indonesian Export Financing Institution and confirmed that with the revocation of the BEI business license, all assets and liabilities as well as legal rights and obligations of PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) transferred to the Indonesian Export Financing Institution ("LPEI") as stipulated in Law No. 2 of 2009 dated January 12, 2009 concerning LPEI.

Law No. 2 Year 2009 dated January 12, 2009 about LPEI Article 48 states maximum of 9 (nine) months since the Law was promulgated, LPEI started to operate, so that based on Decree of the Financial Minister No. 336/KMK.06/2009 dated August 24, 2009, the Government of Republic of Indonesia decided that September 1, 2009 is the start of operation date of LPEI. When LPEI started to operate, the BEI was dissolved and effective immediately, all legal assets and liabilities as well as rights and obligations of BEI employees become the legal assets and liabilities, as well as the rights and obligations of employees of LPEI.

Based on the decision statement of the BEI Stockholder's Extraordinary General Meeting as mentioned in the deed No. 16 dated August 31, 2009 of notary Ms. Anne Meyanne Alwie, S.H., the stockholders decided among others to:

- Transfer all the assets and liabilities, rights and obligations legal of the BEI to become the legal assets and liabilities and rights and obligations legal of LPEI.
- Transfer all of the BEI's employees to become employees of LPEI including but not limited to the working period, employee benefits and employee production service that had been expensed up to August 31, 2009.
- The dissolve the BEI without liquidation.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

1. Umum (lanjutan)

1.a. Pendirian dan Pembentukan LPEI (lanjutan)

LPEI akan lebih berfokus dalam menjalankan kegiatan usaha berupa pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi dalam rangka ekspor. Keberadaan LPEI juga akan memberikan garansi atas berbagai risiko yang selama ini tidak diberikan oleh bank komersial. Pihak asing akan lebih mempunyai keyakinan atas LPEI karena LPEI merupakan bagian dari Pemerintah dan dibentuk berdasarkan atas undang-undang (*sovereign*). LPEI juga bisa mengatur *prudential norm*-nya sendiri. Selain itu, struktur organisasi LPEI yang menggunakan *One Board System* tentu akan bisa mengefektifkan pengambilan keputusan.

Kegiatan usaha LPEI adalah:

- a. Memberikan pembiayaan konvensional maupun secara prinsip syariah baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- b. Penjaminan yang meliputi: penjaminan bagi eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang/jasa di luar negeri, penjaminan bagi importir barang/jasa Indonesia di luar negeri atas pembayaran yang telah diberikan, penjaminan bagi bank yang menyediakan pembiayaan transaksi ekspor kepada eksportir Indonesia, serta penjaminan dalam rangka tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang seluruhnya atau sebagian merupakan kegiatan yang menunjang ekspor;
- c. Asuransi ekspor yang meliputi asuransi atas risiko kegagalan ekspor, asuransi atas risiko kegagalan bayar, asuransi atas investasi yang dilakukan perusahaan Indonesia di luar negeri, dan/atau asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor;
- d. Bimbingan dan jasa konsultasi kepada bank, lembaga keuangan, eksportir, produsen barang ekspor, khususnya usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank/lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial dan/atau penting bagi perkembangan ekonomi Indonesia.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. General (continued)

1.a. Establishment and Formation of LPEI (continued)

LPEI will be more focused on running the business activities of financing, guarantees, insurance, and consulting services in order to export. The presence of LPEI also will provide warranty for a variety of risk that has not been granted by commercial banks. Foreign parties will have more confidence in LPEI because LPEI is part of the Government and was formed based on law (sovereign). LPEI can also set the prudential norm of his own. In addition, the structure of LPEI use One Board System would be effective for decision making.

LPEI business activities are:

- a. Provides local and international financing and receivable under the conventional and Syariah principles;*
- b. Guarantee that includes: underwriting for Indonesian exporters for payment received from the buyer of goods/services overseas, guarantee for importers of goods/services from Indonesia to overseas for the payment of which has been given, which provides a guarantee for bank financing on export transactions to Indonesian exporters, as well as guarantee in order to tender related to the implementation of the project in whole or in part which is supporting export activity;*
- c. Export insurances cover the risk of failure on export, failure to pay, the investment by insurance Indonesian companies abroad, and/or political risk insurance in a country's export destination;*
- d. Provides guidance and consulting services to banks, financial institutions, exporters, manufacturers of export goods, especially micro, small, medium, and cooperatives to help overcome the barriers faced by banks/financial institutions in providing financing to exporters with commercial potential and/or important to the economic development of Indonesia.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)

1.a. Pendirian dan Pembentukan LPEI (lanjutan)

Untuk membiayai kegiatan dalam melaksanakan Penugasan Umum, LPEI dapat memperoleh dana yang berasal dari:

- a. Penerbitan surat berharga;
- b. Pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang dari pemerintah Indonesia, pemerintah asing, lembaga multilateral, bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik di dalam maupun luar negeri;
- c. Hibah;
- d. Penempatan dana oleh Bank Indonesia.

Penugasan Khusus atau *National Interest Account* (NIA) adalah penugasan yang diberikan pemerintah kepada LPEI untuk menyediakan pembiayaan ekspor atas transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, tetapi dianggap perlu oleh pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor.

Penugasan Khusus kepada LPEI bertujuan untuk membantu memberikan pembiayaan pada area yang tidak dimasuki oleh bank atau lembaga keuangan komersial yang enggan atau tidak memiliki kemampuan dalam hal pembiayaan yang kompetitif dan kemampuan menyerap risiko, namun harus memenuhi kriteria meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk Indonesia, mendukung pertumbuhan industri dalam negeri dan memiliki potensi peningkatan dan pengembangan ekspor jangka panjang.

1.b. Penugasan Khusus Ekspor (PKE)

Berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, LPEI dapat memberikan pembiayaan atas transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, namun dianggap perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor nasional/Penugasan Khusus Ekspor (PKE). Penugasan khusus ini menjadi strategis karena bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk Indonesia, mendukung pertumbuhan industri dalam negeri, dan memiliki potensi peningkatan dan pengembangan ekspor jangka panjang.

1. General (continued)

1.a. Establishment and Formation of LPEI (continued)

To finance its activities in order to conduct the General Assignment, LPEI can obtain funds derived from:

- a. Issuance of securities;
- b. Short-term loan, medium-term, and/or long-term Indonesia government, foreign governments, multilateral institutions, banks and financial institutions and finance loans, both at domestic and abroad;
- c. Grant;
- d. Placement of funds by Bank Indonesia.

The Special Assignment or National Interest Account (NIA) was assigned from government to LPEI to provide export financing for transactions or projects that is difficult to be implemented commercially, but its required by the government to support the government policies or export program.

This NIA assignment to LPEI aims to help in providing finance to the area that is not accessible by banks or commercial financial institutions that are reluctant or do not have the capacity in terms of competitive financing and the ability to absorb risks, it must meet the criteria to enhance competitiveness and value-added Indonesian products, support the growth of the domestic industry and has the potential for improvement and long-term export development.

1.b. National Interest Account (NIA)

Based on the mandate of Law No. 2 Year 2009, LPEI is able to provide financing for the transaction or project that is commercially difficult to implement, but is considered necessary by the Government to support a national export policy or program/National Interest Account (NIA). This special assignment becomes strategic because it aims to improve the competitiveness and value-added products of Indonesia, supporting the growth of the domestic industry, and has the potential for improvement and long-term export development.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

1. Umum (lanjutan)

**1.b. Penugasan Khusus Ekspor (PKE)
(lanjutan)**

Kegiatan usaha LPEI dalam rangka Penugasan Khusus dapat diberikan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang meliputi pembiayaan, penjaminan, dan asuransi kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum termasuk perorangan yang berdomisili di dalam atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Di tahun 2015, LPEI telah mendapatkan penugasan PKE dari Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 134/PMK.08/2015 tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang ditetapkan tanggal 14 Juli 2015 yang telah dua kali diubah yaitu pada tahun 2017 dengan PMK No. 198/PMK.08/2017 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI yang ditetapkan tanggal 21 Desember 2017 dan pada tahun 2021, dengan PMK No. 183/PMK.08/2021 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI yang ditetapkan tanggal 14 Desember 2021. Pelaksanaan atas mandat tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK).

Pada tahun 2015, telah diterbitkan KMK No. 1156/KMK.08/2015 tanggal 13 November 2015 tentang Penugasan Khusus Kepada LPEI untuk Menyediakan Pembiayaan Ekspor Produk Gerbong Penumpang Kereta Api. KMK No. 1231/KMK.08/2015 tanggal 8 Desember 2015 tentang Penugasan Khusus Kepada LPEI Untuk Mendukung Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Tahun 2015 yang diubah berdasarkan KMK No. 167/KMK.08/2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 1231/KMK.08/2015 tentang Penugasan Khusus Kepada LPEI untuk Mendukung Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Tahun 2015.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. General (continued)

1.b. National Interest Account (NIA) (continued)

The business activities of LPEI in the framework of NIA can be administered either through conventional or based on sharia principles that include financing, guarantees and insurance to both legal entities and other entities including individuals who live inside or outside the territory of the Republic Indonesia.

In 2015, LPEI has obtained a NIA assignment from the Government through the Regulation of Minister of Finance (PMK) No. 134/PMK.08/2015 on National Interest Account Assignment To Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia issued on July 14, 2015 which has been amended twice In 2017, with PMK No. 198/PMK.08/2017 on National Interest Account Assignment to LPEI dated December 21, 2017 and In 2021, with PMK No. 183/PMK.08/2021 regarding National Interest Account Assignment to LPEI dated December 14, 2021. The implementation of the mandate is set out in Decree of the Minister of Finance (KMK).

In 2015, has been issued KMK No. 1156/KMK.08/2015 dated November 13, 2015 on Special Assignment LPEI to Provide Financing for Export of Passenger Railway Carriages Product. KMK No. 1231/KMK.08/2015 dated December 8, 2015 on Special Assignment To LPEI Economic Policy Package To Support Government in 2015 which amended based on KMK No. 167/KMK.08/2016 dated March 8, 2016 on the Amendment to Decree of the Minister of Finance No. 1231/KMK.08/2015 on Special Assignment to LPEI to Support Government Economic Policy Package year 2015.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)

**1.b. Penugasan Khusus Ekspor (PKE)
(lanjutan)**

Pada tahun 2017, telah diterbitkan KMK No. 374/KMK.08/2017 tentang Penugasan Khusus Kepada LPEI untuk Menyediakan Pembiayaan Ekspor Gerbong Penumpang Kereta Api yang ditetapkan tanggal 12 Mei 2017 dengan negara tujuan ke Bangladesh yang sudah diubah berdasarkan KMK No. 513/KMK.08/2018 tentang Perubahan atas KMK No. 374/KMK.08/2017 tentang Penugasan Khusus Kepada LPEI untuk Menyediakan Pembiayaan Ekspor Kereta Penumpang dan Gerbong Barang Kereta Api dengan Negara tujuan ke Bangladesh dan Srilanka yang memiliki jangka waktu penugasan sampai dengan 31 Desember 2020 dengan mempertimbangkan alokasi dana.

LPEI juga mendapatkan penugasan khusus dari Pemerintah melalui KMK No. 649/KMK.08/2017 tentang Penugasan Khusus Kepada LPEI untuk menyediakan Pembiayaan Ekspor Pesawat Udara yang ditetapkan tanggal 5 September 2017 dengan negara tujuan ke Thailand, Nepal, Uni Emirat Arab, dan negara- negara di kawasan Afrika yang tidak diembargo Perserikatan Bangsa-Bangsa dan telah diubah berdasarkan KMK No. 512/KMK.08/2018 tentang Perubahan atas KMK No. 649/KMK.08/2017 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI untuk Menyediakan Pembiayaan Ekspor Pesawat Udara yang memiliki jangka waktu penugasan sampai dengan 31 Desember 2020 dengan mempertimbangkan ketersediaan alokasi dana.

1. General (continued)

**1.b. National Interest Account (NIA)
(continued)**

In 2017, has been issued KMK No. 374/KMK.08/2017 on Special Assignment LPEI to Provide Financing for Export of Passenger Railway Carriages Products dated on May 12, 2017 with Bangladesh and has been amended based on the KMK No. 513/KMK.08/2018 regarding changes of KMK No. 374/KMK.08/2017 on National Interest Account Assignment to LPEI to Provide Financing for Export of Passenger Railway Carriages Products with Bangladesh and Srilanka as the country of destination and has term of assignment until December 31, 2020 taking into account the allocation of funds.

LPEI has obtained a special assignment from the Government through the KMK No. 649/KMK.08/2017 on Special Assignment LPEI to Provide Financing for Export of Aircrafts dated on September 5, 2017 with the countries of destination Thailand, Nepal, United Arab Emirates, and countries in the African region that are not in the embargo of the United Nations and have been amended based on KMK No. 512/KMK.08/2018 regarding changes of KMK No. 649/KMK.08/2017 on National Interest Account Assignment to LPEI to Provide Aircraft Export Financing which has an assignment period until December 31, 2020 taking into account the availability of fund allocation.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

1. Umum (lanjutan)

**1.b. Penugasan Khusus Ekspor (PKE)
(lanjutan)**

Pada tahun 2019 telah diterbitkan KMK No. 01/KMK.08/2019 tanggal 2 Januari 2019 sebagai Addendum KMK No.787/KMK.08/2017 tanggal 6 November 2017 tentang Penugasan Khusus Kepada LPEI untuk Mendorong Ekspor ke Negara Kawasan Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah dan telah diterbitkan KMK No. 685/KMK.08/2019 tanggal 27 Agustus 2019 dan telah diubah berdasarkan KMK No. 387/KMK.08/2022 tanggal 23 September 2022 sebagai Addendum KMK No. 685/KMK.08/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI dalam rangka Pengembangan Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

Pada tahun 2020, telah diterbitkan KMK No.372/KMK.08/2020 tanggal 11 Agustus 2020 dan telah diperbaharui berdasarkan KMK No. 409/KMK.08/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Perubahan Atas KMK No. 372/KMK.08/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penugasan Khusus Kepada LPEI dalam Rangka Mendukung Sektor Usaha Kecil dan Menengah Berorientasi Ekspor, dengan jangka penugasan sampai dengan 31 Desember 2025.

Pada tahun 2020, juga telah diterbitkan KMK No. 428/KMK.08/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI untuk Mendukung Industri Penerbangan Indonesia, dengan jangka penugasan sampai dengan 31 Desember 2021.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. General (continued)

1.b. National Interest Account (NIA) (continued)

In 2019, has been issued the KMK No. 01/KMK.08/2019 dated January 2, 2019 regarding Changes of KMK No. 787/KMK.08/2017 dated November 6, 2017 on National Interest Account Assignment to LPEI to Provide Financing Exports to Africa, South Asia, and the Middle East and issued the KMK No. 685/KMK.08/2019 dated August 27, 2019 and have been amended based on the KMK No. 387/KMK.08/2022 dated September 23, 2022 regarding changes of the KMK No. 685/KMK.08/2019 dated August 27, 2019 regarding National Interest Account Assignment to LPEI to developing Mandalika Special Economic Zone Tourism.

In 2020, has been issued the KMK No. 372/KMK.08/2020 dated August 11, 2020 and has been updated based on the Decree of KMK No. 409/KMK.08/2021 dated September 21, 2021 revision of KMK No. 372/KMK.08/2020 dated August 11, 2020 regarding National Interest Account Assignment to LPEI to Supporting the Export Oriented Small and Medium Enterprises Sector, with a term of assignment period until December 31, 2025.

In 2020, also has been issued the KMK No. 428/KMK.08/2020 dated September 23, 2020 regarding National Interest Account Assignment to LPEI to Supporting the Indonesian Aviation Industry, with a term of assignment period until December 31, 2021.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

1. Umum (lanjutan)

**1.b. Penugasan Khusus Ekspor (PKE)
(lanjutan)**

Serta di 2020 telah diterbitkan KMK No. 526/KMK.08/2020 tanggal 18 November 2020 yang telah diubah berdasarkan KMK No. 410/KMK.08/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Perubahan Atas KMK No. 526/KMK.08/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI untuk Menyediakan Fasilitas *Trade Finance* dalam Rangka Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional, dengan jangka penugasan sampai dengan 31 Desember 2022.

Pada tahun 2021, telah diterbitkan KMK No. 406/KMK.08/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI untuk Menyediakan Pembiayaan Ekspor dalam Rangka Mendukung Industri Alat Transportasi dengan jangka penugasan sampai dengan 31 Desember 2026.

Berdasarkan Pasal 9 PML No. 183/PMK/08/2021 tentang penugasan khusus kepada LPEI, perlu dibentuk komite penugasan khusus.

Dalam rangka pelaksanaan tugas komite, Ketua komite membentuk tim teknis, komite bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kementerian Keuangan.

Dalam rangka memperoleh masukan terkait kebijakan kementerian sektor sesuai surat KMK No. 191/KMK.08/2016, dibentuk kelompok advsori yang merupakan perwakilan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Berdasarkan surat KMK No. 66/KMK.08/2020, tentang Pembentukan Komite Penugasan Khusus Ekspor Tahun 2020, masa kerja komite dan kelompok Advsori ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. General (continued)

**1.b. National Interest Account (NIA)
(continued)**

In 2020, has been issued the KMK No. 526/KMK.08/2020 dated November 18, 2020 and has been amended based on the KMK No. 410/KMK.08/2021 dated September 21, 2021 revision of KMK No. 526/KMK.08/2020 dated November 18, 2020 regarding National Interest Account Assignment to LPEI to Provide Trade Finance Facilities in Order to Support National Economic Recovery, with a term of assignment period until December 31, 2022.

In 2021, has been issued the KMK No. 406/KMK.08/2021 dated September 21, 2021 regarding Special Assignment to LPEI to Provide Export Financing in Order to Support the Transportation Equipment Industry with an assignment period until December 31, 2026.

According to Article 9 PMK No. 183/PMK/08/2021 on special assignment to the LPEI, committees for NIA need to be established.

In order to execute the task of the committee, the Chairman of the committee formed a technical team, the committee which is responsible and report on performance of its duties to the Ministry of Finance.

In order to obtain feedback regarding the appropriate sector ministry policy decision in accordance with the KMK No. 191/KMK.08/2016, Advisory Group comprising representatives of the Ministries/Non-ministries Government Organization has been formed.

Based on the KMK No. 66/KMK.08/2020, about establishing committess for NIA in 2020, the tenure of committees and Advisory Group is set for 12 (twelve) months from January 1, 2020 until December 31, 2020.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

1. Umum (lanjutan)

**1.b. Penugasan Khusus Ekspor (PKE)
(lanjutan)**

Berdasarkan KMK No. 36/KMK.08/2021, tentang Pembentukan Komite Penugasan Khusus Ekspor Tahun 2021, ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

PMK No. 183/PMK.08/2021 tentang LPEI juga memuat tata cara pengajuan usul program ekspor nasional dari kementerian dan lembaga, sumber dana, denda, provisi penjaminan, premi asuransi, penggantian kerugian, pembentukan komite penugasan khusus ekspor, dan pembayaran.

Pada tahun 2022, telah diterbitkan KMK No. 272/KMK.08/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Penugasan Khusus Kepada LPEI Untuk Pengembangan Infrastruktur Marina dan Penunjang Pariwisata Pada Destinasi Pariwisata Super Prioritas dengan jangka penugasan sampai dengan 31 Desember 2024.

Kegiatan usaha LPEI dalam Penugasan Khusus:

- a. Memberikan pembiayaan konvensional maupun secara prinsip syariah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- b. Penjaminan yang meliputi Penjaminan bagi eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang dan/atau jasa diluar negeri, penjaminan bagi bank yang menjadi mitra penyedia pembiayaan transaksi yang telah diberikan kepada eksportir Indonesia;
- c. Asuransi yang meliputi asuransi atas risiko gagal bayar, asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri, dan/atau asuransi risiko politik.

Untuk membiayai kegiatannya dalam rangka penugasan khusus, LPEI dapat memperoleh dana yang berasal dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja negara berupa penyertaan modal negara yang diakui dalam ekuitas LPEI sebagaimana penambahan modal dan/atau bentuk lain yang diatur dalam peraturan menteri;

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. General (continued)

**1.b. National Interest Account (NIA)
(continued)**

Based on the KMK No. 36/KMK.08/2021, about establishing committess for NIA in 2021, the tenure of committees and Advisory Group is set for 12 (twelve) months from January 1, 2021 until December 31, 2021.

PMK No. 183/PMK.08/2021 on LPEI also includes procedure of filing a national export program proposals of ministries and agencies, sources of funds, fines, underwriting fees, insurance premiums, indemnities, committees, and special assignments export payments.

In 2022, the KMK No. 272/KMK.08/2022 dated July 5, 2022 regarding National Interest Account Assignment to LPEI to Developing Marina Infrastructure and Tourism Support in Super Priority Tourism Destinations with an assignment period until December 31, 2024.

LPEI's business activities in NIA include the following:

- a. Provides conventional and sharia financing both domestic and overseas;
- b. Guarantees for Indonesian exporters on payments received from the buyer of goods and/or services abroad, guarantee for banks that become partners in providing financing transactions that have been provided to the Indonesian exporters;
- c. Insurance that cover against payment default, insurance on the investments made by the Indonesian company in overseas, and/or insurance on political risk.

To finance its activities in the framework of a special assignment (National Interest Account), LPEI can obtain funds from:

- a. State budget of revenues and expenditures in the form of equity participation which is recognized in LPEI's equity as additional capital and/or other forms stipulated in the ministerial regulations;

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)

**1.b. Penugasan Khusus Ekspor (PKE)
(lanjutan)**

Untuk membiayai kegiatannya dalam rangka penugasan khusus, LPEI dapat memperoleh dana yang berasal dari: (lanjutan)

- b. Bagian kapitalisasi modal LPEI untuk Dana Penugasan Khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha pelaksanaan Penugasan Khusus Pemerintah kepada LPEI guna mendukung program ekspor nasional pada tanggal 31 Desember 2024, Negara Republik Indonesia telah menyetorkan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp5.000.000 untuk LPEI. Modal tersebut efektif diterima pada tanggal 2 Januari 2025.

Dana dalam rekening Penugasan Khusus hanya dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan Penugasan Khusus. Pendanaan program Penugasan Khusus dibatasi paling banyak sebesar akumulasi dana Penugasan Khusus, setelah memperhitungkan seluruh biaya terkait. Biaya terkait program Penugasan Khusus meliputi biaya dana, cadangan kerugian penurunan nilai, dan biaya operasional lain yang dibebankan oleh LPEI.

1.c. Jaringan Kantor

Kantor LPEI berlokasi di Prosperity Tower, District 8, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta - 12190. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, LPEI mempunyai tiga kantor wilayah yaitu Kantor Wilayah I yang membawahi Wilayah Jakarta, Kantor Cabang Medan, dan Kantor Pemasaran Batam; Kantor Wilayah II membawahi Kantor Cabang Surakarta dan Kantor Pemasaran Balikpapan; dan Kantor Wilayah III membawahi Kantor Cabang Makasar dan Kantor Pemasaran Denpasar.

1. General (continued)

1.b. National Interest Account (NIA) (continued)

To finance its activities in the framework of a special assignment (National Interest Account), LPEI can obtain funds from: (continued)

- b. Part of capitalization of LPEI's equity for NIA stipulated in the requirements of law;*
- c. Other legitimate sources in accordance with the requirements of law.*

In strengthening the capital structure and increase the capacity of business for the implementation of NIA to export financing to support export programs nationwide, December 31, 2024, the Republic of Indonesia has injected additional equity participation amounting to Rp5,000,000 to LPEI, respectively. The capital injection was received on January 2, 2025.

The funds available under NIA bank account can only be used for the implementation of NIA program. Financing for NIA program is limited to the accumulated funds of NIA, after taking into account all of the related costs. The cost of NIA includes cost of fund, allowance for impairment, and operational expense charge by LPEI.

1.c. Office Network

LPEI office is located at the Prosperity Tower, District 8, Jenderal Sudirman Street Lot 52-53, Jakarta - 12190. As of December 31, 2024 and 2023, LPEI has three regional offices which are Regional Office I covers Jakarta, Medan Branch, and Batam Marketing Office; Regional Office II covers Surakarta Branch Office and Balikpapan Marketing, and Office Regional Office III covers Makasar Branch and Denpasar Marketing Office.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)

**1.d. Dewan Direktur, Direktur Pelaksana,
Komite Audit dan Pegawai**

Susunan Dewan Direktur LPEI pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024
Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif ¹⁾	Yon Aرسال
Anggota Dewan Direktur ²⁾	Kasan
Anggota Dewan Direktur ³⁾	Arus Gunawan
Anggota Dewan Direktur ⁴⁾	Dwi Teguh Wibowo
Anggota Dewan Direktur ⁵⁾	-
Anggota Dewan Direktur ⁶⁾	-

1) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.06/2021 tentang Penetapan Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 31 Desember 2021, menetapkan Rijani Tirtoso sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif LPEI berlaku efektif setelah 5 hari kerja sejak tanggal ditetapkan dengan masa jabatan sampai dengan tanggal 23 Desember 2024. Berdasarkan Surat Perintah Menteri Keuangan No.PRIN-3/MK.06/2024 tanggal 23 Desember 2024 memberi perintah kepada Yon Aرسال melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (plt). Pada jabatan Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif LPEI terhitung sejak tanggal 24 Desember 2024.

2) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 274/KMK.06/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 5 Juni 2020, mengangkat Kasan sebagai anggota dewan direktur sejak 5 Juni 2020 dengan masa jabatan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 332 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Kembali Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 14 September 2023 mengangkat kembali Sdr. Kasan sebagai Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan masa jabatan 5 tahun.

1. General (continued)

**1.d. Board of Directors, Managing Directors,
Audit Committee and Employees**

The composition of the Board of Directors of LPEI as of December 31, 2024 and 2023, are as follows:

	2024	2023	
	Yon Aرسال	Rijani Tirtoso	Chairman of Board of Directors concurrently Executive Director ¹⁾
	Kasan	Kasan	Member of Board of Directors ²⁾
	Arus Gunawan	Arus Gunawan	Member of Board of Directors ³⁾
	Dwi Teguh Wibowo	Suminto	Member of Board of Directors ⁴⁾
	-	D. James Rompas	Member of Board of Directors ⁵⁾
	-	Yon Aرسال	Member of Board of Directors ⁶⁾

1) Based on Decree of Minister of Finance No. 552/KMK.06/2021 regarding Appointment of the Chairman of the Board of Directors concurrently as Executive Director Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated December 31, 2021, appointed Rijani Tirtoso as Chairman of the Board of Directors and concurrently as Executive Director LPEI, effective after 5 working days from the date of appointment with a tenure up to December 23, 2024. Based on Letter from the Minister of Finance No.PRIN-3/MK.06/2024 dated on December 23, 2024 has assigned Yon Aرسال as the Acting of Chairman of the Board of Directors and concurrently as Executive Director LPEI effective since December 24, 2024.

2) Based on Decree of Minister of Finance No. 274/KMK.06/2020 regarding Termination and Appointment of Members of the Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated June 5, 2020, Kasan was appointed as a member of the board of directors since June 5, 2020 for a tenure up to August 31, 2023. Based on Decree of Minister of Finance No. 332 Tahun 2023 regarding Reappointment of Members of the Board of Directors Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated September 14, 2023 reappointed Mr. Kasan as Member of the Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia with a term of office of 5 years.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)

**1.d. Dewan Direktur, Direktur Pelaksana,
Komite Audit dan Pegawai (lanjutan)**

- 3) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 530/KMK.06/2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 19 November 2020, mengangkat Arus Gunawan sebagai anggota dewan direktur sejak 19 November 2020 dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
- 4) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 375 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Kembali Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 19 Oktober 2023 mengangkat kembali Suminto sebagai Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 454 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 29 Desember 2024, mengangkat Dwi Teguh Wibowo sebagai Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 18 Oktober 2028.
- 5) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 522/KMK.06/2021 tentang Penetapan Ketua Dewan Direktur Merangkap Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 31 Desember 2021, menetapkan Daniel James Rompas kembali menjadi anggota Dewan Direktur LPEI berlaku efektif setelah 5 hari kerja sejak tanggal ditetapkan dengan masa jabatan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024.
- 6) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 155 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 28 April 2023, mengangkat Yon Arsal sebagai anggota dewan direktur sejak 28 April 2023 dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

1. General (continued)

**1.d. Board of Directors, Managing Directors,
Audit Committee and Employees
(continued)**

- 3) Based on Decree of Minister of Finance No. 530/KMK.06/2020 regarding Appointment of Members of the Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated November 19, 2020, Arus Gunawan was appointed as a member of the board of directors since November 19, 2020 for a tenure of 5 (five) years.
- 4) Based on Decree of Minister of Finance No. 375 Year 2023 regarding Reappointment of Members of the Board of Directors Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated October 19, 2023 reappointed Suminto as Member of the Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia for a tenure of office of 5 (five) years. Based on Decree of Minister of Finance No. 454 Tahun 2024 regarding Reappointment of Members of the Board of Directors Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated December 29, 2024 appointed Dwi Teguh Wibowo as Member of the Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia with a tenure up to October 18, 2028.
- 5) Based on Decree of Minister of Finance No. 522/KMK.06/2021 regarding Appointment of the Chairman of the Board of Directors concurrently as Executive Director Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated December 31, 2021, appointed Daniel James Rompas return to being a member of the LPEI Board of Directors effective after 5 working days from the date of appointment with a tenure up to August 31, 2024.
- 6) Based on Decree of Minister of Finance No. 155 Year 2023 regarding Appointment of Members of the Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated April 28, 2023, Yon Arsal was appointed as a member of the board of directors since April 28, 2023 for a tenure of 5 (five) years

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)

**1.d. Dewan Direktur, Direktur Pelaksana,
Komite Audit dan Pegawai (lanjutan)**

Susunan Direktur Pelaksana LPEI pada
tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah
sebagai berikut:

	2024	2023	
Direktur Pelaksana Bisnis ¹⁾	Anton Herdianto	Dikdik Yustandi	Managing Director of Business ¹⁾
Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit ²⁾	Sam Malee	Agus Windiarto	Managing Director of Risk and Credit Management ²⁾
Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional dan Teknologi Informasi ³⁾	Anwar Harsono	Agus Windiarto	Managing Director of Finance, Operations and Information Technology ³⁾
Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis ⁴⁾	Maqin U. Norhadi	Maqin U. Norhadi	Managing Director of Business Development ⁴⁾
Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia ⁵⁾	T. Wahyu P. Wibowo	Chesna F. Anwar	Managing Director of Secretary, Compliance and Human Capital ⁵⁾

1) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan
Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia No. 0010/KDD/08/2019
tanggal 30 Agustus 2019 tentang
Pengangkatan Direktur Pelaksana
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
menetapkan Dikdik Yustandi sebagai
Direktur Pelaksana sejak 1 September
2019 dengan masa jabatan sampai
dengan 31 Agustus 2024. Berdasarkan
Surat Keputusan Dewan Direktur
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
No. 0012/KDD/11/2024 tanggal 25
November 2024 tentang Pengangkatan
Direktur Pelaksana Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia
menetapkan Anton Herdianto sebagai
Direktur Pelaksana terhitung sejak
terhitung sejak 25 November 2024
sampai dengan 24 November 2029.

1. General (continued)

**1.d. Board of Directors, Managing Directors,
Audit Committee and Employees
(continued)**

The Managing Directors of LPEI as of
December 31, 2024 and 2023 are as follows:

1) Based on Board of Directors of Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia Letter No.
0010/KDD/08/2019 dated August 30, 2019
regarding Appointment of Managing
Director of Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia, Dikdik Yustandi was assigned
as Managing Director since September 1,
2019 for his term until August 31, 2024.
Based on Board of Directors of Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia Letter No.
0012/KDD/11/2024 dated November 25,
2024 regarding Appointment of Managing
Director of Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia, Anton Herdianto was assigned
as Managing Director since November 25,
2024 until November 24, 2029.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)

**1.d. Dewan Direktur, Direktur Pelaksana,
Komite Audit dan Pegawai (lanjutan)**

- 2) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia No.0001/KDD/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pelaksana Tugas Direktur Pelaksana Lembaga pembiayaan Ekspor Indonesia, masa jabatan Agus Windarto selaku pejabat Plt. Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Risiko & Kredit diperpanjang sampai dengan ditetapkan Direktur Pelaksana Manajemen Risiko dan Kredit, atau selambat-lambatnya sampai dengan 31 Maret 2024. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direktur No.0002/KDD/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 dan No.0007/KDD/07/2024 tanggal 23 Juli 2024, ditetapkan Sam Malee sebagai Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan 13 Maret 2029.
- 3) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia No. 0012/KDD/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menetapkan Agus Windarto sebagai Direktur Pelaksana sejak 1 September 2019 dengan masa jabatan sampai dengan 31 Agustus 2024. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia No. 0013/KDD/11/2024 tanggal 25 November 2024 tentang Perubahan dan Pernyataan Kembali Keputusan Dewan Direktur tentang Penetapan dan Masa Jabatan Pelaksana Tugas Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menetapkan Anwar Harsono sebagai Pelaksana Tugas Direktur Pelaksana dihitung sejak 1 September 2024 sampai dengan ditetapkan Direktur Pelaksana definitif selambat-lambatnya 31 Agustus 2025.

1. General (continued)

**1.d. Board of Directors, Managing Directors,
Audit Committee and Employees
(continued)**

- 2) Based on the Board of Directors of the Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Letter No.0001/KDD/02/2024 dated February 29, 2024 regarding Extension of the Term of Office of the Acting Managing Director of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Agus Windarto's term of office as Acting Managing Director for Risk & Credit Management extended until the assignment of Managing Director for Risk & Credit Management or at the latest March 31, 2024. In accordance with Decree of the Board of Director of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia No.0002/KDD/03/2024 dated March 14, 2024 and No.0007/KDD/07/2024 dated July 23, 2024, Sam Malee was assigned as a Managing Directors with term of office of 5 (five) years since March 14, 2024 until March 13, 2029.
- 3) Based on Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Letter No. 0012/KDD/08/2019 dated August 30, 2019 regarding Appointment of Managing Director of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Agus Windarto was assigned as Managing Director since September 1, 2019 for his term until August 31, 2024. Based on Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Letter No. 0013/KDD/11/2024 dated November 25, 2024 regarding Amandements and Restatement of Board of Directors Letter regarding Appointment and Term of office of Acting Managing Director of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Anwar Harsono was assigned as Acting Managing Director since September 1, 2024 until the definitive Managing Director is appointed, or a maximum August 31, 2025.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)

**1.d. Dewan Direktur, Direktur Pelaksana,
Komite Audit dan Pegawai (lanjutan)**

- 4) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia No. 0004/KDD/04/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Pengangkatan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menetapkan Maqin U. Norhadi sebagai Direktur Pelaksana dengan masa jabatan sampai dengan 31 Agustus 2024. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia No. 0014/KDD/11/2024 tanggal 25 November 2024 tentang Perubahan dan Pernyataan Kembali Keputusan Dewan Direktur tentang Penetapan dan Masa Jabatan Pelaksana Tugas Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menetapkan Maqin U. Norhadi sebagai Pelaksana Tugas Direktur Pelaksana terhitung sejak 1 September 2024 sampai dengan ditetapkannya Direktur Pelaksana definitif selambat-lambatnya 31 Agustus 2025.
- 5) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia No. 0014/KDD/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menetapkan Chesna Fizetty Anwar sebagai Direktur Pelaksana sejak 1 September 2019 dengan masa jabatan sampai dengan 31 Agustus 2024. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia No. 0012/KDD/11/2024 tanggal 25 November 2024 tentang Perubahan dan Pernyataan Kembali Keputusan Dewan Direktur tentang Penetapan dan Masa Jabatan Pelaksana Tugas Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menetapkan T. Wahyu P. Wibowo sebagai Pelaksana Tugas Direktur Pelaksana terhitung sejak 1 September 2024 sampai dengan ditetapkannya Direktur Pelaksana definitif selambat-lambatnya 28 Februari 2025.

1. General (continued)

**1.d. Board of Directors, Managing Directors,
Audit Committee and Employees
(continued)**

- 4) Based on Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Letter No. 0004/KDD/04/2021 dated April 12, 2021 regarding Appointment of Managing Director of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Maqin U. Norhadi was assigned as Managing Director for his term until August 31, 2024. Based on Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Letter No. 0014/KDD/11/2024 dated November 25, 2024 regarding Amandements and Restatement of Board of Directors Letter regarding Appointment and Term of Office of Acting Managing Director of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Maqin U. Norhadi was assigned as Acting Managing Director since September 1, 2024 until the definitive Managing Director is appointed, or a maximum August 31, 2025.
- 5) Based on Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Letter No. 0014/KDD/08/2019 dated August 30, 2019 regarding Appointment of Managing Director of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Chesna Fizetty Anwar was assigned as Managing Director since September 1, 2019 for her term until August 31, 2024. Based on Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Letter No. 0012/KDD/11/2024 dated November 25, 2024 regarding Amandements and Restatement of Board of Directors Letter regarding Appointment and Term of Office of Acting Managing Director of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, T. Wahyu P. Wibowo was assigned as Acting Managing Director since September 1, 2024 until the definitive Managing Director is appointed, or a maximum February 28, 2025.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

1. Umum (lanjutan)

**1.d. Dewan Direktur, Direktur Pelaksana,
Komite Audit dan Pegawai (lanjutan)**

Peranan dan tanggung jawab pembedangan Manajemen LPEI berdasarkan Struktur Organisasi LPEI per 31 Desember 2024, yang ditetapkan melalui Peraturan Direktur Eksekutif No.0001/PDE/01/2024 tentang Pedoman dan Tata Kerja Organisasi LPEI dan disempurnakan lebih lanjut sebagaimana Keputusan Direktur Eksekutif No.0013/KDE/06/2024 tentang penyempurnaan struktur organisasi LPEI, Keputusan Direktur Eksekutif No.0037.01/KDE/11/2024, serta Keputusan Direktur Eksekutif No.0046/KDE/12/2024 tentang penataan pembedangan unit kerja dalam struktur organisasi LPEI adalah sebagai berikut:

- Direktur Eksekutif membawahi Direktur Pelaksana Bisnis, Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis, Direktur Pelaksana Kredit & Manajemen Risiko, Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional & Teknologi Informasi, Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan & Sumber Daya Manusia, *Chief of Internal Audit*, *Subject Matter Experts* dan Dewan Pengawas Syariah.
- Direktur Pelaksana Bisnis membawahi Divisi Bisnis I, II, III dan IV, Ekosistem Bisnis, Eksekutif Bisnis, Pusat Layanan Pembiayaan Perdagangan, *Designated Compliance & Risk Operations* dan *Chief of Wilayah*.
- Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis membawahi Divisi Penugasan Khusus Ekspor, Perdagangan Internasional dan Pembiayaan, Divisi Penjaminan & Asuransi, Divisi Jasa Konsultasi, Unit Usaha Syariah, Proyek Khusus, dan Intelijen Pasar & Manajemen Prospek.
- Direktur Pelaksana Kredit & Manajemen Risiko membawahi Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kebijakan, Prosedur & Produk, Divisi Risiko Digital & Operasional dan *Chief of Risiko Bisnis*.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. General (continued)

**1.d. Board of Directors, Managing Directors,
Audit Committee and Employees
(continued)**

The roles and responsibilities of Management of LPEI based on the LPEI Organizational Structure, which is stipulated through the Board of Executive Directors Regulation No.0001/PDE/01/2024 regarding LPEI Organizational Guidelines and Work Procedures and further refined as Executive Director Decree No.0013/KDE/06/2024 concerning the improvement of LPEI's organizational structure, Executive Director Decree No.0037.01/KDE/11/2024, and Executive Director Decree No.0046/KDE/12/2024 concerning structuring The division of work units in the organizational structure of LPEI is as follows:

- *Executive Director is responsible for Managing Director of Business, Managing Director of Business Development, Managing Director of Credit & Risk Management, Managing Director of Finance, Operation & IT and Managing Director of Corporate Secretary, Compliance & Human Capital, Chief of Internal Audit, Subject Matter Experts and Sharia Supervisory Board.*
- *Managing Director of Business is responsible for Business Division I, II, III and IV, Business Ecosystem, Executive Business Officer, Trade Services Center, Designated Compliance & Risk Operations and Chief of Region.*
- *Managing Director of Business Development is responsible for NIA, Trade Finance & Financing Division, Guarantee & Insurance Division, SME's Advisory Services Division, Sharia Unit, Special Projects and Market Intelligence & Lead Management.*
- *Managing Director of Credit & Risk Management is responsible for Risk Management, Policy, Procedure & Product Division, Digital Risk & Operations Division and Chief of Business Risk.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

1. Umum (lanjutan)

**1.d. Dewan Direktur, Direktur Pelaksana,
Komite Audit dan Pegawai (lanjutan)**

- Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional, & Teknologi Informasi membawahi Divisi Pendanaan dan Tresuri, Divisi Perencanaan Strategi & Transformasi, Divisi Keuangan, Manajemen Neraca, Ekonom dan *Chief of Operasional & Teknologi Informasi*.
- Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan, & Sumber Daya manusia membawahi Divisi Sekretariat Lembaga dan Hubungan Kelembagaan, Divisi Hukum & Kepatuhan, dan *Chief of SDM, Pengadaan & Layanan Umum*.
- Chief of Wilayah membawahi Kantor Wilayah I, II dan III dan Kantor Area Medan..
- Chief of Risiko Bisnis membawahi *Executive Risk Officer*.
- *Chief of* SDM, Pengadaan & Layanan Umum membawahi Divisi Sumber Daya Manusia dan Divisi Pengadaan & Layanan Umum.
- *Chief of* Teknologi Informasi & Operasional membawahi Divisi Teknologi Informasi dan Divisi Operasional.
- *Chief of* Audit Internal membawahi Divisi Audit Umum, Divisi Audit Khusus dan Manajemen Mutu & Metodologi.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Eksekutif No.0034/KDE/11/2024 tanggal 11 November 2024 dan Keputusan Direktur Eksekutif No.0044/KDE/10/2023 tanggal 6 Oktober 2023 tentang Penetapan Anggota Komite Audit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, susunan Komite Audit LPEI pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024
Ketua	Arus Gunawan
Anggota	Yulida S. Marbun
Anggota	Ludovicus Sensi Wondabio
Anggota	-

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. General (continued)

**1.d. Board of Directors, Managing Directors,
Audit Committee and Employees
(continued)**

- *Managing Director of Finance, Operations & IT is responsible for Funding & Treasury Division, Strategic Planning & Transformation Division, Finance Division, Balance Sheet Management, Economist, and Chief of Information Technology & Operations.*
- *Managing Director of Corporate Secretary, Compliance & Human Capital is responsible for Corporate Secretary & Stakeholder Engagement Division, Legal & Compliance Division, and Chief of Human Capital, Procurement & General Services.*
- *Chief of Region is responsible for Regional Office I, II and III and Medan Area Office.*
- *Chief of Business Risk is responsible for Executive Risk Officer.*
- *Chief of Human Capital, Procurement & General Services is responsible for Human Capital Division and Procurement & GA Division.*
- *Chief of IT & Operations is responsible for Information Technology Division and Operations Division.*
- *Chief of Internal Audit is responsible for Regular Audit Division, Special Audit Division and QA & Methodology.*

Based on the Executive Directors Decision Letter No.0034/KDE/11/2024 dated November 11, 2024 and the Executive Directors Decision Letter No.0044/KDE/10/2023 dated October 6, 2023, regarding Appointment of Audit Committee Members, the compositions of LPEI's Audit Committee as December 31, 2024 and 2023 are as follow:

	2023	
Arus Gunawan	Chairman	
Yulida S. Marbun	Member	
Peter Umar Abdilla A. Kasan	Member	

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)

**1.d. Dewan Direktur, Direktur Pelaksana,
Komite Audit dan Pegawai (lanjutan)**

Kepala Satuan Audit Internal LPEI pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah I Nyoman Gede Suarja.

Berdasarkan Keputusan Direktur Eksekutif No.0024/KDE/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024 dan Memorandum Prosedur No.0003/KDE/01/2022 tanggal 3 Januari 2022, Sekretaris LPEI per tanggal 31 Desember 2024 adalah T. Wahyu P. Wibowo dan 2023 adalah Chesna F. Anwar.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Eksekutif No.0024.02/KDE/08/2023 tanggal 1 Agustus 2023, susunan Dewan Pengawas Syariah pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024
Ketua	Kanny Hidayat
Anggota	Yulizar D. Sanrego

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut berdasarkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui surat No. U-453/DSN-MUI/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012.

Jumlah pegawai tetap LPEI pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah 464 dan 521 (tidak diaudit).

**1.e. Penawaran umum obligasi, penerbitan
Medium Term Notes dan penawaran umum
Sukuk Mudharabah**

LPEI telah menerbitkan obligasi, *Medium Term Notes*, dan Sukuk Mudharabah sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2019. Berikut adalah rincian obligasi, *Medium Term Notes* dan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan dan belum jatuh tempo sampai 31 Desember 2024:

1. General (continued)

**1.d. Board of Directors, Managing Directors,
Audit Committee and Employees
(continued)**

LPEI's Head of Internal Audit as of December 31, 2024 and 2023 is I Nyoman Gede Suarja.

Based on the Executive Director Decision Letters No.0024/KDE/08/2024 dated August 30, 2024 and Memorandum of Procedure No.0003/KDE/01/2022 dated January 3, 2022, LPEI's secretary as of December 31, 2024 is T. Wahyu P. Wibowo and 2023 is Chesna F. Anwar.

Based on the Executive Director Decision Letters No.0024.02/KDE/08/2023 dated August 1, 2023, the composition of Sharia Supervisory Board as of December 31, 2024 and 2023 is as follows:

	2023	
Kanny Hidayat		Chairman
Yulizar D. Sanrego		Member

The appointment of member of the Sharia Supervisory Board based on the recommendation of the National Sharia Board of the Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) by the letter No. U-453/DSN-MUI/XII/2012 dated December 12, 2012.

As of December 31, 2024 and 2023, LPEI had 464 dan 521 permanent employees, respectively (unaudited).

**1.e. Public offerings of the bonds, issuance of
Medium Term Notes and public offerings
of the Sukuk Mudharabah**

LPEI issued bonds, Medium Term Notes, and Sukuk Mudharabah from 2003 until 2019. Below are the details of bonds issued, Medium Term Notes and Sukuk Mudharabah which have not yet matured until December 31, 2024:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)

i. Obligasi

Nama Obligasi	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Name of Bonds
Obligasi berkelanjutan				IEB Phase IV Shelf
IEB III Tahap IV - 2017		23 Februari/ February 2027	Tetap/Fixed - 9.40%	Registration Offering Bonds III
Seri E	1,266,000			- 2017 Series E
Obligasi berkelanjutan				IEB Phase VI Shelf
IEB III Tahap VI - 2018		14 Februari/ February 2025	Tetap/Fixed - 6.90%	Registration Offering Bonds III
Seri C	206,000			- 2018 Series C
Obligasi berkelanjutan				IEB Phase I Shelf
IEB IV Tahap I - 2018		6 Juni/ June 2025	Tetap/Fixed - 8.30%	Registration Offering Bonds IV
Seri C	1,756,000			- 2018 Series C
Obligasi berkelanjutan				IEB Phase II Shelf
IEB IV Tahap II - 2018		5 September / September 2025	Tetap/Fixed - 8.75%	Registration Offering Bonds IV
Seri D	1,324,000			- 2018 Series D
Obligasi berkelanjutan				IEB Phase III Shelf
IEB IV Tahap III - 2018		8 November/ November 2025	Tetap/Fixed - 9.75%	Registration Offering Bonds IV
Seri D	380,000			- 2018 Series D
Obligasi berkelanjutan				IEB Phase IV Shelf
IEB IV Tahap IV - 2019		23 April/ April 2026	Tetap/Fixed - 9.25%	Registration Offering Bonds IV
Seri D	278,000			- 2019 Series D
Obligasi berkelanjutan				IEB Phase IV Shelf
IEB IV Tahap IV - 2019		23 April/ April 2029	Tetap/Fixed - 9.50%	Registration Offering Bonds IV
Seri E	349,000			- 2019 Series E
Obligasi berkelanjutan				IEB Phase IV Shelf
IEB IV Tahap IV - 2019		23 April/ April 2034	Tetap/Fixed - 9.80%	Registration Offering Bonds IV
Seri F	625,000			- 2019 Series F
Obligasi berkelanjutan				IEB Phase V Shelf
IEB IV Tahap V - 2019		9 Juli/ July 2026	Tetap/Fixed - 9.20%	Registration Offering Bonds IV
Seri D	737,000			- 2019 Series D
Obligasi berkelanjutan				IEB Phase VI Shelf
IEB IV Tahap VI - 2019		3 September/ September 2026	Tetap/Fixed - 8.50%	Registration Offering Bonds IV
Seri D	714,500			- 2019 Series D
Obligasi berkelanjutan				IEB Phase VII Shelf
IEB IV Tahap VII - 2019		29 Oktober/ October 2026	Tetap/Fixed - 8.50%	Registration Offering Bonds IV
Seri D	112,000			- 2019 Series D
Obligasi berkelanjutan				IEB Phase VII Shelf
IEB IV Tahap VII - 2019		29 Oktober/ October 2029	Tetap/Fixed - 8.75%	Registration Offering Bonds IV
Seri E	219,750			- 2019 Series E
Obligasi berkelanjutan				IEB Phase VIII Shelf
IEB IV Tahap VIII - 2019		6 Desember/ December 2026	Tetap/Fixed - 8.20%	Registration Offering Bonds IV
Seri C	22,500			- 2019 Series C
Total ekuivalen Rp	7,989,750			Total equivalent in Rp

ii. Sukuk mudharabah

Nama Sukuk Mudharabah	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Name of Sukuk Mudharabah
Sukuk Mudharabah Indonesia				Shelf Sukuk Mudharabah I
Eximbank I Tahap II - 2018		8 November/ November 2025	9.75%	Indonesia Eximbank
Seri D	155,000			Phase II - 2018 Series D
Total ekuivalen Rp	155,000			Total equivalent Rp

1. General (continued)

i. Bonds

ii. Sukuk mudharabah

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)

**1.e. Penawaran umum obligasi, penerbitan
Medium Term Notes dan penawaran umum
Sukuk Mudharabah (lanjutan)**

Seluruh penerbitan obligasi, penerbitan
Medium Term Notes dan penerbitan Sukuk
Mudharabah tersebut telah terdaftar
berdasarkan surat terlampir:

i. Obligasi

1. General (continued)

**1.e. Public offerings of the bonds, issuance of
Medium Term Notes and public offerings
of the Sukuk Mudharabah (continued)**

All the offerings of the above bonds, issuance
of the Medium Term Notes and the offering of
the Sukuk Mudharabah have been registered
based on letters as follows:

i. Bonds

Nama Obligasi/ Name of Bonds	Nomor surat/ Letter number	Tanggal/ Date	Tempat terdaftar/ Register
Obligasi berkelanjutan IEB III, Tahap IV - 2017/ IEB Phase IV Shelf - Registration Offering Bonds III - 2017	S-01060/BEI.PP3/02-2017	24 Februari 2017/ February 2017	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange
Obligasi berkelanjutan IEB III, Tahap V - 2017/ IEB Phase V Shelf - Registration Offering Bonds III - 2017	S-04415/BEI.PP3/08-2017	16 Agustus 2017/ August 2017	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange
Obligasi berkelanjutan IEB III, Tahap VI - 2018/ IEB Phase VI Shelf - Registration Offering Bonds III - 2018	S-00929/BEI.PP3/02-2018	15 Februari 2018/ February 2018	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange
Obligasi berkelanjutan IEB IV, Tahap I - 2018/ IEB Phase I Shelf - Registration Offering Bonds IV - 2018	S-03393/BEI.PP3/06-2018	7 Juni 2018/ June 2018	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange
Obligasi berkelanjutan IEB IV, Tahap II - 2018/ IEB Phase II Shelf - Registration Offering Bonds IV - 2018	S-05154/BEI.PP3/09-2018	6 September 2018/ September 2018	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange
Obligasi berkelanjutan IEB IV, Tahap III - 2018/ IEB Phase III Shelf - Registration Offering Bonds IV - 2018	S-06570/BEI.PP3/11-2018	9 November 2018/ November 2018	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange
Obligasi berkelanjutan IEB IV, Tahap IV - 2019/ IEB Phase IV Shelf - Registration Offering Bonds IV - 2019	S-21441/BEI.PP3/04-2019	24 April 2019/ April 2019	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange
Obligasi berkelanjutan IEB IV, Tahap V - 2019/ IEB Phase V Shelf - Registration Offering Bonds IV - 2019	S-03751/BEI.PP3/07-2019	10 Juli 2019/ July 2019	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange
Obligasi berkelanjutan IEB IV, Tahap VI - 2019/ IEB Phase VI Shelf - Registration Offering Bonds IV - 2019	S-05189/BEI.PP3/09-2019	4 September 2019/ September 2019	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)

**1.e. Penawaran umum obligasi, penerbitan
Medium Term Notes dan penawaran umum
Sukuk Mudharabah (lanjutan)**

i. Obligasi (lanjutan)

Nama Obligasi/ Name of Bonds	Nomor surat/ Letter number	Tanggal/ Date	Tempat terdaftar/ Register
Obligasi berkelanjutan IEB IV, Tahap VII - 2019/ IEB Phase VII Shelf - Registration Offering Bonds IV - 2019	S-06891/BEI.PP3/10-2019	30 Oktober 2019/ October 2019	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange
Obligasi berkelanjutan IEB IV, Tahap VIII - 2019/ IEB Phase VIII Shelf - Registration Offering Bonds IV - 2019	S-07906/BEI.PP3/12-2019	9 Desember 2019/ December 2019	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange

ii. Sukuk mudharabah

Nama Sukuk Mudharabah/ Name of Sukuk Mudharabah	Nomor surat/ Letter number	Tanggal/ Date	Tempat terdaftar/ Register
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II - 2018/ Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II - 2018	S-06570/BEI.PP3/11-2018	9 November 2018/ November 2018	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange

1.f. Entitas Anak

LPEI mempunyai kepemilikan langsung pada
Entitas Anak berikut:

Nama Perusahaan/ Company Name	Kegiatan Usaha/ Business Activity	Tahun Mulai Beroperasi/ Year Started Operations	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Total Aset/ Total Assets	
			2024 dan 2023, 2024 and 2023	2024	2023
PT IEB Prima Aset	Jasa Konsultasi/ Consulting Services	2021	99.99%	49,548	31,232

PT IEB Prima Aset (IEBPA)

IEBPA didirikan berdasarkan Akta Notaris
No. 154 tanggal 17 Desember 2021.

1. General (continued)

**1.e. Public offerings of the bonds, issuance of
Medium Term Notes and public offerings
of the Sukuk Mudharabah (continued)**

i. Bonds (continued)

ii. Sukuk mudharabah

1.f. Subsidiary

LPEI has direct ownership in the following Its
subsidiary:

PT IEB Prima Aset (IEBPA)

IEBPA was established based on Notarial
Deed No. 154 dated December 17, 2021.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

1. Umum (lanjutan)

1.f. Entitas Anak (lanjutan)

Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-1097/MK.06/2021 pada tanggal 6 Desember 2021, ruang lingkup IEBPA khususnya dalam rangka percepatan penanganan aset bermasalah dan perbaikan struktur neraca.

Pada bulan Desember 2021 LPEI memberikan setoran modal awal kepada IEBPA sebesar Rp49.999. Modal saham tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0081370.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021.

Kantor pusat IEBPA berlokasi di Prosperity Tower Lantai 33, District 8, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta – 12190.

Dasar Pembentukan PT IEB Prima Aset

Dalam rangka mengatasi tingginya angka aset bermasalah yang lebih komprehensif, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) telah mengkaji beberapa opsi yang tersedia. Berdasarkan kajian tersebut disimpulkan, pembentukan PT IEB Prima Aset, entitas anak, sebagai *Special Purpose Vehicle* (SPV) yang mengelola aset bermasalah sebagai opsi yang paling efektif untuk mengatasi pembiayaan/piutang bermasalah LPEI. Kajian atas perlunya entitas anak dilakukan bersama dengan konsultan bisnis (Deloitte) dan konsultan hukum (Tumbuan and partner) termasuk memastikan bahwa pendirian entitas anak ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang mengatur LPEI.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. General (continued)

1.f. Subsidiary (continued)

In accordance with the Letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. S-1097/MK.06/2021 dated December 6, 2021, the scope of IEBPA in particular in order to accelerate the handling of problematic assets and improvement of balance sheet structure.

In December 2021 LPEI provided an initial capital deposit to IEBPA of Rp49,999. The share capital has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0081370.AH.01.01.Year of 2021 dated on December 20, 2021.

IEBPA head office is located in Prosperity Tower 33rd Floor, District 8, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta – 12190.

Basis for Establishment of PT IEB Prima Aset

In order to more comprehensively address the high number of non-performing assets, the Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) has reviewed several available options. Based on this study, it was concluded that the establishment of PT IEB Prima Aset, its subsidiary, as a Special Purpose Vehicle (SPV) which manages non-performing assets is the most effective option to overcome LPEI's non-performing financing/receivables. A study on the need for a its subsidiary is carried out together with a business consultant (Deloitte) and a legal consultant (Tumbuan and partners) including ensuring that the establishment of a its subsidiary does not conflict with the Law governing LPEI.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)

1.f. Entitas Anak (lanjutan)

**Dasar Pembentukan PT IEB Prima Aset
(lanjutan)**

Landasan pembentukan entitas anak mengacu pada:

1. UU No. 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Pasal 14 (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, LPEI berwenang: a. menetapkan skema Pembiayaan Ekspor Nasional; b. melakukan restrukturisasi Pembiayaan Ekspor Nasional; c. melakukan reasuransi terhadap asuransi yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan d. melakukan penyertaan modal. (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dapat dilakukan pada badan hukum atau badan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas LPEI dengan persetujuan Menteri.
2. PP No. 43/2019 tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional Pasal 16 ayat (2) Selain kegiatan menyediakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPEI dapat melaksanakan kegiatan berupa:
 - a. menyediakan jasa konsultasi;
 - b. melakukan restrukturisasi PEN;
 - c. melakukan reasuransi;
 - d. melakukan penyertaan modal; dan/atau
 - e. melakukan kegiatan lain yang menunjang fungsi, tugas, dan wewenang LPEI sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 25 ayat (1) Penyertaan modal dilakukan dengan persetujuan Menteri, dan ayat (2) Penyertaan modal dapat dilakukan kepada badan hukum dalam negeri dan badan hukum luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. General (continued)

1.f. Subsidiary (continued)

**Basis for Establishment of PT IEB Prima
Asset (continued)**

The establishment basis of a its subsidiary refers to:

1. Law No. 2 of 2009 regarding Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Article 14 (1) In order to carry out the tasks as referred to in Article 13, LPEI is authorized to: a. establish a National Export Financing scheme; b. restructure the National Export Financing; c. carry out reinsurance of the implemented insurance as referred to in Article 8; and d. make equity participation. (2) Equity participation as referred to in paragraph (1) letter d may only be made to a legal entity or other entity required to carry out LPEI duties with the approval of Minister.
2. PP No. 43/2019 regarding Basic Policy of National Export Financing Article 16 paragraph (2) In addition to providing facilities as referred to in paragraph (1), LPEI may carry out activities in the form of:
 - a. provide consulting services;
 - b. carry out restructuring of PEN;
 - c. carry out reinsurance;
 - d. make equity participation; and/or
 - e. carry out other activities that support the functions, duties, and authorities of LPEI as long as they do not conflict with the provisions of laws and regulations. Article 25 paragraph (1) states that Equity participation is carried out with the approval of Minister, and paragraph (2) Equity participation may be made to domestic legal entities and foreign legal entities in accordance with the provisions of laws and regulations.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

1. Umum (lanjutan)

1.f. Entitas Anak (lanjutan)

3. Selanjutnya, rencana pembentukan entitas anak ini telah dicantumkan pada RKAT LPEI tahun 2021 yang mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan melalui surat Menteri Keuangan No. S-121/MK.06/2021 pada tanggal 15 Februari 2021.
4. Dengan pertimbangan perlu segera dilakukan upaya penyelesaian kondisi NPL dan perbaikan kualitas aset, LPEI telah mendapat dukungan penuh dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk pembentukan entitas anak seperti yang disampaikan melalui surat nomor: S-86/KN/2021 pada tanggal 17 Juni 2021. Pada surat tersebut juga dinyatakan bahwa mengacu pada amanat Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2009 tentang LPEI, dalam hal membentuk badan hukum dan melakukan penyertaan modal, maka agar mengajukan kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan dan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
5. Menteri Keuangan melalui surat nomor: S-1097/MK/06/2021 pada tanggal 6 Desember 2021 menyetujui permohonan penyertaan modal oleh LPEI dalam rangka pembentukan entitas anak.
6. Entitas anak, yang selanjutnya disebut PT IEB Prima Aset berdiri pada tanggal 17 Desember 2021 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT IEB Prima Aset disingkat PT IEBPA No. 154 tanggal 17 Desember 2021 dengan modal dasar Rp50.000 dengan jumlah saham beredar 50.000 lembar yang dimiliki oleh LPEI sebesar 49.999 lembar saham (99,99%) dan Koperasi Konsumen Pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebesar 1 lembar saham (0,01%). Pengesahan dari Menkumham tanggal 20 Desember 2021 dengan No. AHU-0081370.AH.01.01.Tahun 2021.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. General (continued)

1.f. Subsidiary (continued)

3. Furthermore, the plan for the establishment of a its subsidiary has been included in the RKAT of LPEI 2021 which has received approval from Minister of Finance through the letter of Minister of Finance No. S-121/MK.06/2021 dated February 15, 2021.
4. Considering the need to immediately resolve the NPL condition and improve asset quality, LPEI has received full support from the Directorate General of State Assets (DJKN) for the establishment of a its subsidiary as submitted by the letter number: S-86/KN/2021 dated June 17, 2021. The letter also stated that referring to the mandate of Article 14 of Law No. 2 of 2009 concerning LPEI, in terms of establishing a legal entity and making equity participation, then to submit to Minister of Finance for approval and set forth in the Annual Work Plan and Budget.
5. Minister of Finance by the letter number: S-1097/MK/06/2021 dated December 6, 2021 approved the application for equity participation by LPEI in the context of establishing a its subsidiary.
6. The its subsidiary, hereinafter referred to as PT IEB Prima Aset was established on December 17, 2021 based on Deed of Establishment of the Limited Company PT IEB Prima Aset for the sake brevity as PT IEBPA No. 154 dated December 17, 2021 with the authorized capital of Rp50,000 with a total outstanding share of 50,000 The shares owned by LPEI is amounting to 49,999 shares (99.99%) and the Consumer Cooperative of Employees of the LPEI owns 1 share (0.01%). Ratification from Minister of Law and Human Rights was on December 20, 2021 with No. AHU-0081370.AH.01.01.Year 2021.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

1. Umum (lanjutan)

1.f. Entitas Anak (lanjutan)

7. Sesuai dengan Akta Pendirian PT IEBPA pada pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan serta kegiatan Usaha, sebagaimana tercantum pada ayat 1 mengenai maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang konsultasi, termasuk konsultasi atas kegiatan yang berorientasi ekspor. Pada ayat 2 mengenai kegiatan usaha yang meliputi kegiatan usaha sebagai berikut:
- Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209), meliputi: Bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah *agronomist* dan *agricultural economist* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan - masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur;
 - Pemberian jasa hukum terkait aset; dan
 - Kegiatan lain sesuai maksud dan tujuan LPEI.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. General (continued)

1.f. Subsidiary (continued)

7. In accordance with the Deed of Establishment of PT IEBPA Article 3 concerning Aim and Objective as well as Business Activities, as set forth in paragraph 1 the aim and objective of PT IEBPA is to engage in the field of consulting, including consulting on export-oriented activities. Paragraph 2 concerning the business activities include the following:
- Other Management Consulting Activities (KBLI 70209), including: Assistance with advice, guidance and business operations and other organizational and management issues, such as strategic and organizational planning; decisions related to finance; marketing objectives and policies; human resource planning, practices and policies; planning scheduling and controlling production. The provision of these business services may include advice, guidance and operational assistance for various management functions, management consulting for *agronomists* and *agricultural economists* in agriculture and the like, design of accounting methods and procedures, cost accounting programs, budget control procedures, providing advice and assistance to businesses and public services in planning, organizing, efficiency and control, management information and others. Including infrastructure investment study services;
 - Provision of legal services related to assets; and
 - Other activities according to the purposes and objectives of LPEI.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

1. Umum (lanjutan)

1.f. Entitas Anak (lanjutan)

8. Sampai dengan 31 Desember 2024, PT IEBPA adalah sebagai konsultasi manajemen dan dalam kegiatannya tidak ada pengalihan aset dari LPEI ke PT IEBPA.
9. Pembentukan entitas anak sebagaimana diatas sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

2.a. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian LPEI tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan dasar penyusunan laporan keuangan yang dijelaskan pada Catatan 2b di bawah ini.

2.b. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan konsolidasian LPEI dan Entitas Anaknya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 disusun dan disajikan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan penyajian wajar bertujuan khusus sebagai berikut:

1. Untuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas pembiayaan dalam rangka Penugasan Khusus yang direstrukturisasi yang telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan dihitung menggunakan asumsi tingkat diskonto sebesar tingkat suku bunga setelah direstrukturisasi.

Per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, atas pembiayaan diberikan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dihitung menggunakan asumsi tingkat diskonto yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui surat Nomor S-194/MK.08/2023 tentang Penetapan Penggunaan Asumsi Tingkat Diskonto Berdasarkan Tingkat Suku Bunga Setelah Restrukturisasi Dalam Perhitungan CKPN.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. General (continued)

1.f. Subsidiary (continued)

8. Until December 31, 2024, PT IEBPA is a management consultancy and in its activities there is no transfer of assets from LPEI to PT IEBPA.
9. Establishment of a its subsidiary as above is in accordance with the applicable provisions.

2. Material Accounting Policies Information

2.a. Statement of compliances

LPEI's consolidated financial statements as of December 31, 2024 and for the year ended on that date have been prepared and presented in accordance with the basis for preparation of the financial statements as described in Note 2b below.

2.b. Basis of measurement and preparation of the financial statements

The consolidated financial statements of LPEI and its Subsidiary for the year ended December 31, 2024 and 2023 have been prepared and presented in accordance with fair presentation of special purpose financial reporting framework as follows:

1. For the Allowance for Impairment Losses (CKPN) on restructured National Interest Account financing which has received approval from Ministry of Finance is calculated using the assumed discount rate that is equal to the interest rate after the restructuring.

As per December 31, 2024 and 2023, for financing that has been provided to PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk is calculated using the assumption of the discount rate stipulated by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia through letter No. S-194/MK.08/2023 concerning the Determination of the Use of Discount Rates Assumption Based on Interest Rates After Restructuring in the Calculation of CKPN.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.b. Dasar pengukuran dan penyusunan
laporan keuangan (lanjutan)**

2. Untuk unsur-unsur laporan keuangan konsolidasian lainnya disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI"), dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal - Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" yang terlampir dalam Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 161/PMK.010/2010 tentang Perubahan atas PMK No. 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI dan PMK No. 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9/POJK.05/2022 tanggal 23 Juni 2022 tentang Pengawasan LPEI.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 14/POJK.4/2022, LPEI sebagai emiten wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan berkala berdasarkan standar akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik". Sebagaimana dijelaskan di atas, LPEI menyusun laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut hanya sesuai dengan dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian seperti yang dijelaskan di atas.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.b. Basis of measurement and preparation of
the financial statements (continued)**

2. The other elements of the consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement and Interpretation which published by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI"), and Regulations from the Capital Markets and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) No. VIII.G.7 regarding "Financial Statements Presentation and Disclosure for Issuers or Public Companies" included in the Appendix of the Decision of the Chairman of BAPEPAM - LK No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012, Regulation of Financial Minister (PMK) No. 161/PMK.010/2010 regarding changes of No. 140/PMK.010/2009 regarding Development and Supervision of LPEI and PMK No. 58/PMK.06/2020 regarding Development and Supervision of LPEI, and Regulation of Financial Service Authority (POJK) No. 9/POJK.05/2022 dated June 23, 2022 regarding Supervision of LPEI.

Based on the Financial Services Authority Regulation No 14/POJK.4/2022, LPEI as an Issuer obliged to prepare periodic financial statement in accordance with Indonesian Financial Accounting Standard as regulated in Regulation No. VIII.G.7 regarding "Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Company". As described above, LPEI has prepared the consolidated financial statements as of December 31, 2024 and for the year then ended only in accordance with the basis for preparation of the consolidated financial statement as described above.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.b. Dasar pengukuran dan penyusunan
laporan keuangan (lanjutan)**

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep nilai historis, kecuali jika standar akuntansi mensyaratkan pengukuran nilai wajar.

Untuk unit syariah yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip perbankan syariah, laporan keuangannya disajikan sesuai dengan PSAK 401 "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK 402 "Akuntansi Murabahah", PSAK 404 "Akuntansi Istishna", PSAK 405 "Akuntansi Mudharabah", PSAK 406 "Akuntansi Musyarakah", PSAK 407 "Akuntansi Ijarah", PSAK 410 tentang "Akuntansi Sukuk", PSAK 411 "Akuntansi Wa'd", dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk keperluan laporan arus kas, yang termasuk kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank dan penempatan pada bank yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (Rp), yang merupakan mata uang fungsional. Angka-angka disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.b. Basis of measurement and preparation of
the financial statements (continued)**

The consolidated financial statements are prepared and presented based on business continuity assumptions and on an accrual basis, except for consolidated of cash flow statements. The basis for measurement in the preparation of these consolidated financial statements is the concept of historical value, unless accounting standards require fair value measurement.

For the sharia business unit which operates based on the shariah banking principles, the presentation of the financial statement is in accordance to PSAK 401 "Presentation of Sharia Financial Statements", PSAK 402 "Accounting for Murabahah", PSAK 404 "Accounting for Istishna", PSAK 405 "Accounting for Mudharabah", PSAK 406 "Accounting for Musyarakah", PSAK 407 "Accounting for Ijarah", PSAK 410 "Sukuk Accounting", PSAK 411 "Wa'd Accounting", and Accounting Guidelines for Indonesian Sharia Banking (PAPSI Revised 2013) established by Bank Indonesia and the Indonesian Institute of Accountants.

The consolidated statement of cash flows are prepared based on direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities. For purposes of the statement of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with banks and placements with banks maturing within 3 (three) months from the date of acquisition, provided they are not pledged as collateral for borrowings nor restricted.

The presentation currency used for the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah (Rp), which is LPEI's functional currency. Unless otherwise stated, all figures presented in the consolidated financial statements are rounded off to millions of Rupiah.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.b. Dasar pengukuran dan penyusunan
laporan keuangan (lanjutan)**

LPEI menyajikan laporan posisi keuangan konsolidasian sesuai tingkat likuiditas. Suatu analisis mengenai pemulihan (aset) atau penyelesaian (liabilitas) dalam dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan (lancar) dan lebih dari dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan (tidak lancar) disajikan di dalam Catatan 41.

Termasuk di dalam laporan keuangan konsolidasian LPEI adalah penyajian aset, liabilitas, modal, laba dan rugi yang berasal dari Penugasan Khusus sesuai surat yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara No. S-368/KN/2017 tanggal 16 Februari 2017.

2.c. Prinsip-prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan entitas yang mayoritas sahamnya dimiliki atau dikendalikan oleh LPEI.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh LPEI, yakni terekspos, atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana LPEI memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah LPEI mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan konsolidasian LPEI mencakup hasil usaha, arus kas, aset, dan liabilitas dari LPEI yang, secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh LPEI. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana LPEI secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.b. Basis of measurement and preparation of
the financial statements (continued)**

LPEI presents its consolidated statement of financial position based on liquidity level. An analysis regarding recovery (asset) or settlement (liability) within twelve (12) months after the reporting date (current) and more than twelve (12) months after the reporting date (non-current) is presented in Note 41.

Included in the consolidated financial statements of LPEI is the presentation of assets, liabilities, capital, profits and losses derived from Special Assignment accordance with the letter issued by the Directorate General of State No. S-368/KN/2017 dated February 16, 2017.

2.c. Principles of consolidation

The consolidated financial statements include the financial statements of entity whose majority shares are owned or controlled by the LPEI.

A its subsidiary is an entity controlled by the LPEI, is exposed, or has rights to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity's relevant activities (power over the investee).

The existence and effect of substantive potential voting rights that LPEI has the practical ability to exercise (ie substantive rights) are considered when assessing whether LPEI controls another entity.

LPEI consolidated financial statements incorporate the results, cash flows, assets, and liabilities of LPEI which, directly and indirectly, is controlled by LPEI. Its subsidiary are consolidated from the effective date of acquisition, which is the date on which LPEI effectively obtains control of the acquired business, until that control ceases.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

2.c. Prinsip konsolidasian (lanjutan)

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh.

LPEI mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non-pengendali memiliki saldo defisit. LPEI menyajikan kepentingan non-pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali berubah, LPEI menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non-pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan non-pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Jika entitas anak kehilangan pengendalian, maka LPEI akan:

- Menghentikan pengakuan aset (termasuk goodwill) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non-pengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non-pengendali);

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

2.c. Consolidation principal (continued)

A parent prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. All transactions, balances, income, expenses, and cash flows relating to transactions between entities of the group are eliminated in full.

LPEI attributed the profit or loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. LPEI presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent.

Changes in the parent's ownership interest in a its subsidiary that do not result in loss of control are equity transactions (ie transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, LPEI adjusted the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the its subsidiary. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognised directly in equity and attributed to the owners of the parent.

If subsidiary loses control, so LPEI will:

- *Derecognise the assets (including goodwill) and liabilities of the its subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;*
- *Derecognise the carrying amount of any non-controlling interests in the former its subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to non-controlling);*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

2.c. Prinsip konsolidasian (lanjutan)

- Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak; dan
- Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

2.d. Standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif pada tahun berjalan

LPEI telah menerapkan standar akuntansi yang berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan konsolidasian, yaitu:

- Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia ("KSPKI") dan perubahan nomor PSAK dan ISAK dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (sebelumnya Standar Akuntansi Keuangan), berlaku efektif tanggal 1 Januari 2024. KSPKI mengatur pilar SAK yang berlaku di Indonesia, kriteria, dan perpindahan antar pilar SAK, sedangkan perubahan nomor mengatur ketentuan penomoran PSAK dan ISAK yang mengacu pada IFRS Accounting Standards, standar akuntansi lokal, dan standar akuntansi syariah;
- Amendemen PSAK 201: "Penyajian Laporan Keuangan" terkait klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang; dan
- Amendemen PSAK 116: "Sewa" terkait liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

2.c. Consolidation principal (continued)

- Recognise the fair value of the consideration received (if any) from the transaction, event, or circumstances that resulted in the loss of control;
- Recognise any investment retained in the former its subsidiary at fair value at the date when control is lost;
- Reclassify to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other FAS, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the its subsidiary; and
- Recognise any resulting difference as a gain or loss in profit and loss attributable to the parent entity.

2.d. Financial accounting standards effective in the current year

LPEI have implemented accounting standards that are effective for financial statements beginning on or after January 1, 2023, relevant to consolidated financial statements, which are as follows:

- Indonesia Financial Reporting Standard Framework ("KSPKI") and amendment to PSAK and ISAK number, are effective on January 1, 2024. KSPKI regulate the PSAK pillars, criteria and shifting between pillars that apply in Indonesia, while amendment to PSAK and ISAK number determine the number for PSAK and ISAK which refering to IFRS Accounting Standards, local accounting standards, and syariah accounting standards;
- Amendments of PSAK 201 "Presentation of Financial Statements" regarding classification of liabilities as current or non-current; and
- Amendments of PSAK 116 "Leases" regarding lease liabilities in sale-and-lease back transactions.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.d. Standar akuntansi keuangan yang berlaku
efektif pada tahun berjalan (lanjutan)**

- Amendemen PSAK 207: Laporan Arus Kas dan PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang pengaturan pembiayaan pemasok;
- Revisi PSAK 401: Penyajian Laporan Keuangan Syariah; dan
- Revisi PSAK 409: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah.

Penerapan standar akuntansi baru ini tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

2.e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Dalam menjalankan usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 224 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan sesama entitas anak saling berelasi dengan entitas anak lainnya);

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.d. Financial accounting standards effective in
the current year (continued)**

- Amendments PSAK 207: Statement of Cash Flows and PSAK 107: Financial Instrument: Disclosure regarding supplier finance agreement.
- Revised PSAK 401: Presentation of Shariah Financial Statements; and
- Revised PSAK 409: Accounting of Zakah, Infaq, and Sadaqah.

Implementation of new accounting standards has no significant impact to the consolidated financial statements.

2.e. Transactions with related parties

In the normal course of its business, the Bank enters into transactions with related parties which are defined under PSAK 224 regarding "Related Party Disclosures".

A related party is a person or an entity that is related to the reporting entity:

- a. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
 - i. has control or joint control of the reporting entity;
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary, and fellow subsidiaries are related to the others);

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi
(lanjutan)**

- ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
- iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
- iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
- viii. Entitas atau anggota dari kelompok dimana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi, kecuali dengan personel manajemen kunci, dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Transaksi yang dilakukan LPEI akan memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.42/POJK.04/2020 tentang "Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan", pada saat transaksi-transaksi tersebut dilakukan.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.e. Transactions with related parties
(continued)**

- ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
- iii. Both entities are joint ventures of the same third party;
- iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
- v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity in itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
- vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
- vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or
- viii. The entity or any members of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Transaction with related parties, except for key management personnel is conducted under terms and conditions similar with third party transactions. The transactions to be conducted by LPEI will be in accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.42/POJK.04/2020 about "Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions", when the transactions are conducted.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional, maupun internasional.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 39.

LPEI menerapkan PSAK 109, "Instrumen Keuangan"

Aset keuangan LPEI terdiri dari giro pada Bank Indonesia, giro pada bank, penempatan pada bank, efek-efek, tagihan derivatif, pembiayaan dan piutang syariah, piutang pembiayaan garansi, piutang asuransi dan penjaminan, tagihan akseptasi, dan aset lain-lain (bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan).

Liabilitas keuangan LPEI terdiri dari liabilitas segera, liabilitas akseptasi, efek-efek utang yang diterbitkan, liabilitas terkait dengan transaksi liabilitas derivatif, pinjaman yang diterima, utang asuransi, utang penjaminan, liabilitas sewa guna usaha, dan liabilitas lain-lain (bunga yang masih harus dibayar, tantiem, dan jasa produksi, kewajiban kepada penjamin ulang).

Pengujian SPPI

Sebagai langkah pertama dari proses klasifikasi, LPEI menilai persyaratan kontraktual keuangan untuk mengidentifikasi apakah instrumen keuangan memenuhi pengujian SPPI (*Solely Payment of Principal and Interest*).

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

2.f. Financial assets and financial liabilities

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled, or significant influence by a government. Government refers to government agencies and similar bodies whether local, national, or international.

All material transactions and balances with the related parties are disclosed in the relevant notes to consolidated financial statements and the details are presented in Note 39.

LPEI adopted PSAK 109, "Financial Instruments"

LPEI financial assets consist of current accounts with Bank Indonesia, current accounts with banks, placements with banks, securities, derivative receivables, financing and sharia receivables, guarantee financing receivables, insurance and guarantee receivables, acceptances receivable, and other assets (accrued interest receivables and refundable deposits).

LPEI's financial liabilities consist of current liabilities, acceptances payable, securities issued, derivative payables, debt, fund borrowings, insurance payables, guarantee payables, liability related to reverse repos, lease liabilities, and other liabilities (accrued interest payable, tantiem and accrued bonus, liabilities to guarantor).

SPPI Test

*As a first step of its classification process, LPEI assesses the contractual terms of financial to identify whether they meet the SPPI test (*Solely Payment of Principal and Interest*).*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

Pokok pinjaman untuk tujuan pengujian ini didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal dan dapat berubah selama umur aset keuangan (misalnya, jika ada pembayaran pokok atau amortisasi premi/diskon).

Elemen bunga yang paling signifikan dalam perjanjian pembiayaan biasanya adalah pertimbangan atas nilai waktu dari uang dan risiko kredit. Untuk membuat penilaian SPPI, LPEI menerapkan pertimbangan dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan seperti mata uang dimana aset keuangan didenominasikan, dan periode pada saat suku bunga ditetapkan.

(i) Klasifikasi

Sebaliknya, persyaratan kontraktual yang memberikan eksposur lebih dari *de minimis* atas risiko atau volatilitas dalam arus kas kontraktual yang tidak terkait dengan dasar pengaturan pinjaman, tidak menimbulkan arus kas kontraktual SPPI atas jumlah saldo. Dalam kasus seperti itu, aset keuangan diharuskan untuk diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (FVPL).

Penilaian model bisnis

LPEI menentukan model bisnisnya berdasarkan tingkat yang paling mencerminkan bagaimana LPEI mengelola kelompok aset keuangannya untuk mencapai tujuan bisnisnya.

Model bisnis LPEI tidak dinilai berdasarkan masing-masing instrumen nya, tetapi pada tingkat portofolio secara agregat yang lebih tinggi dan didasarkan pada faktor-faktor yang dapat diamati seperti:

- Bagaimana kinerja model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut dievaluasi dan dilaporkan kepada personel manajemen kunci;

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.f. Financial assets and financial liabilities
(continued)**

Principal for the purpose of this test is defined as the fair value of the financial asset at initial recognition and may change over the life of the financial asset (for example, if there are repayments of principal or amortisation of the premium/discount).

The most significant elements of interest within a lending arrangement are typically the consideration for the time value of money and financing risk. To make the SPPI assessment, LPEI applies judgement and considers relevant factors such as the currency in which the financial asset is denominated, and the period for which the interest rate is set.

(i) Classification

In contrast, contractual terms that introduce a more than de minimis exposure to risks or volatility in the contractual cash flows that are unrelated to a basic lending arrangement, do not give rise to contractual cash flows that are SPPI on the amount outstanding. In such cases, the financial asset is required to be measured at Fair Value Through Profit or Loss (FVPL).

Business model assessment

LPEI determines its business model at the level that best reflects how it manages LPEI of financial assets to achieve its business objective.

LPEI business model is not assessed on an instrument-by-instrument basis, but at a higher level of aggregated portfolios and is based on observable factors such as:

- *How the performance of the business model and the financial assets held within that business model are evaluated and reported to the entity's key management personnel;*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Penilaian model bisnis (lanjutan)

- Risiko yang mempengaruhi kinerja model bisnis (dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut) dan, khususnya, bagaimana cara risiko tersebut dikelola;
- Bagaimana manajer bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang tertagih);
- Frekuensi, nilai, dan waktu penjualan yang diharapkan, juga merupakan aspek penting dari penilaian LPEI.

Penilaian model bisnis didasarkan pada skenario yang diharapkan secara wajar tanpa mempertimbangkan skenario “worst case” atau “stress case”. Jika arus kas setelah pengakuan awal direalisasikan dengan cara yang berbeda dari yang awal diharapkan, LPEI tidak mengubah klasifikasi aset keuangan dimiliki yang tersisa dalam model bisnis tersebut, tetapi memasukkan informasi tersebut dalam melakukan penilaian atas aset keuangan yang baru atau yang baru dibeli selanjutnya.

LPEI mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi
LPEI mengukur aset keuangan dengan biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.f. Financial assets and financial liabilities
(continued)**

(i) Classification (continued)

Business model assessment (continued)

- The risks that affect the performance of the business model (and the financial assets held within that business model) and, in particular how the way those risks are managed;
- How managers of the business are compensated (for example, whether the compensation is based on the fair value of the assets managed or on the contractual cash flows collected);
- The expected frequency, value, and timing of sales, are also important aspects of LPEI assessment.

The business model assessment is based on reasonably expected scenarios without taking “worst case” or “stress case” scenarios into account. If cash flows after initial recognition are realized in a way that is different from original expectations, LPEI does not change the classification of the remaining financial assets held in that business model, but incorporates such information when assessing newly originated or newly purchased financial assets going forward.

LPEI classifies its financial assets in the following categories at initial recognition:

- Financial assets measured at amortized cost
LPEI measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

(i) Klasifikasi (lanjutan)

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual.
 - Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang (SPPI).
- b. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain
LPEI mengukur aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ketika kedua kondisi berikut terpenuhi:
- Aset keuangan yang dikelola untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
 - Arus kas kontraktual tersebut semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI).
- c. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
LPEI menerapkan kategori aset keuangan berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi jika tidak memenuhi kriteria sebagai biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.f. Financial assets and financial liabilities
(continued)**

(i) Classification (continued)

- The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows.
 - The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.
- b. Financial assets measured at fair value through other comprehensive income (FVOCI)
LPEI measures financial assets at FVOCI when both of the following conditions are met:
- Financial assets are managed to collect the contractual cash flows and sell the assets; and
 - The contractual cash flows are solely payments of principal and interest (SPPI).
- c. Financial assets measured at fair value through profit or loss.
LPEI applies the category of financial assets based on fair value through profit or loss if it does not meet the criteria as amortized cost or fair value through other comprehensive income.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut:

a. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi terdiri dari dua sub-kategori, yaitu liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh LPEI untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki LPEI untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama untuk memperoleh laba jangka pendek atau *position taking*.

a. Liabilitas keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi saat pengakuan liabilitas.

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.f. Financial assets and financial liabilities
(continued)**

(i) Classification (continued)

Financial liabilities are classified into the following categories:

a. *Financial liabilities at fair value through profit or loss*

Financial liabilities at fair value through profit or loss consist of two sub-categories, financial liabilities classified as held for trading and financial liabilities designated by LPEI as at fair value through profit or loss upon initial recognition.

A financial liability is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally by LPEI for the purpose of selling or repurchasing it in the near term, or if it is part of portfolio of identified financial instrument that are managed together pattern of short term profit taking.

b. *Financial liabilities measured at amortized cost*

Financial liabilities at amortized cost are financial liabilities that are not held for trading nor designated as at fair value through profit or loss upon the recognition liability.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

(i) Klasifikasi (lanjutan)

b. Liabilitas keuangan yang diukur
berdasarkan biaya perolehan
diamortisasi

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.f. Financial assets and financial liabilities
(continued)**

(i) Classification (continued)

b. Financial liabilities measured at
amortized cost

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109 / Category as defined by PSAK 109		Golongan (ditentukan oleh LPEI)/ Class (as determined by LPEI)
Aset keuangan/ Financial assets	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/Financial assets at fair value through profit or loss	Tagihan derivatif/derivative receivables
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/Financial assets at amortised cost	Giro pada Bank Indonesia/Current accounts with Bank Indonesia
		Giro pada bank-bank lain/Current accounts with other banks
		Penempatan pada bank Indonesia dan bank-bank lain/Placements with Bank Indonesia and other banks
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/Financial assets at fair value through other comprehensive income	Tagihan akseptasi/Acceptances receivables
		Pembiayaan, piutang pembiayaan garansi, tagihan akseptasi/Financing receivables, guarantee financing receivables, acceptances receivable
	Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/Financial liabilities at fair value through profit or loss	Efek-efek/Marketable securities
		Liabilitas derivatif/Derivative payables
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/Financial liabilities at amortised cost	Liabilitas segera/Obligation due immediately
		Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali/Securities sold under agreements to repurchase
		Liabilitas akseptasi/Acceptable payables
		Efek-efek yang diterbitkan/Marketable securities issued
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/Financial liabilities at amortised cost	Pinjaman yang diterima, utang asuransi, utang penjaminan, liabilitas sewa guna usaha/Fund Borrowings, insurance payables, guarantee payables, lease liabilities
		Liabilitas lain-lain/Other liabilities

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

(ii) Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode untuk menghitung biaya diamortisasi instrumen utang dan alokasi pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif yang mendiskonto penerimaan kas masa depan (termasuk semua biaya pada poin-poin yang dibayar atau diterima yang membentuk bagian integral dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premi atau diskon lainnya) sepanjang umur ekonomis yang diharapkan dari instrumen utang, atau (jika lebih tepat) periode yang lebih singkat, dengan jumlah tercatat neto pada pengakuan awal.

(iii) Pengakuan awal

LPEI pada awalnya mengakui kredit yang diberikan serta simpanan diukur pada nilai wajar pada tanggal perolehan.

Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (*regular*) diakui pada tanggal perdagangan dimana LPEI memiliki komitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Semua aset dan liabilitas keuangan lainnya pada awalnya diakui pada tanggal perdagangan dimana LPEI menjadi suatu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah/dikurang (untuk instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan atau penerbitan liabilitas keuangan.

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.f. Financial assets and financial liabilities
(continued)**

(ii) Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a debt instrument and of allocating interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate exactly that discounts estimated future cash receipts (including all fees on points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the debt instrument, or (where appropriate) a shorter period, to the net carrying amount on the initial recognition.

(iii) Initial recognition

LPEI initially recognizes loans and deposits at fair value on the date of origination.

Regular way purchases and sales of financial assets are recognized on the trade date at which LPEI commits to purchase or sell the asset.

All other financial assets and liabilities are initially recognized on the trade date at which LPEI becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

At the first confession, a financial asset or financial liability is initially measured at fair value plus/minus (for financial instruments not subsequently measured at fair value through profit or loss) transaction costs that are directly attributable to the acquisition of financial asset or issue of financial liability.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

(iii) Pengakuan awal (lanjutan)

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada awal pengakuan liabilitas.

Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

(iv) Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, LPEI mengukur aset keuangan, sesuai dengan klasifikasi aset keuangan pada (i) Biaya perolehan diamortisasi; (ii) Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain; atau (iii) Nilai wajar melalui laba rugi.

- Aset Keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur dengan menjumlahkan aset keuangan yang diukur saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya dan disesuaikan dengan penyisihan kerugiannya.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.f. Financial assets and financial liabilities
(continued)**

(iii) Initial recognition (continued)

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issue of a financial liability and are incremental costs that would not have been incurred if the financial instrument had not been acquired or issued. In the case of financial assets, transaction costs are added to the amount recognized initially, while for financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt recognized initially.

Such transactions costs are amortized over the terms of the instruments based on the effective interest method and are recorded as part of interest income for transaction costs related to financial assets or interest expenses for transaction costs related to financial liabilities.

(iv) Subsequent measurement

After initial recognition, LPEI measures financial assets, according to the classification of financial assets at (i) Amortized cost; (ii) Fair value through other comprehensive income; or (iii) Fair value through profit or loss.

- Financial Assets at amortized cost
Financial assets at amortized cost are measured by adding up the financial assets measured at initial recognition minus principal payments, added or reduced by cumulative amortization using the effective interest method calculated from the difference between the initial value and the maturity value and adjusted for the allowance for losses.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

(iv) Pengukuran setelah pengakuan awal
(lanjutan)

Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode bunga efektif yaitu dengan menerapkan suku bunga efektif atas jumlah tercatat bruto aset keuangan, kecuali untuk:

- a) aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk. Untuk aset keuangan tersebut, LPEI menerapkan suku bunga efektif yang disesuaikan dengan kredit atas biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sejak pengakuan awal.
- b) aset keuangan yang tidak dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk tetapi selanjutnya menjadi aset keuangan memburuk. Untuk aset keuangan tersebut, LPEI menerapkan suku bunga efektif atas biaya perolehan diamortisasi aset keuangan di periode pelaporan selanjutnya.

LPEI dalam suatu periode pelaporan menghitung pendapatan bunga dengan menerapkan metode bunga efektif atas biaya perolehan diamortisasi aset keuangan, pada periode pelaporan selanjutnya, menghitung pendapatan bunga dengan menerapkan suku bunga efektif atas jumlah tercatat bruto jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut membaik sehingga aset keuangan tidak lagi mengalami penurunan nilai kredit dan perbaikan tersebut secara objektif dapat dikaitkan dengan suatu peristiwa yang terjadi setelah persyaratan yang tercantum dalam poin (b) paragraf di atas diterapkan (misalnya perbaikan peringkat kredit peminjam).

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.f. Financial assets and financial liabilities
(continued)**

(iv) Subsequent measurement (continued)

Interest income is calculated using the effective interest method by applying an effective interest rate to the gross carrying amount of financial assets, except for:

- a) financial assets purchased or originating from financial assets deteriorate. For these financial assets, LPEI applies an effective interest rate adjusted by credit for the amortized cost of the financial assets from initial recognition.
- b) financial assets that are not purchased or that originate from financial assets deteriorate but subsequently become financial assets deteriorate. For these financial assets, LPEI applies an effective interest rate on the amortized cost of the financial assets in the next reporting period.

LPEI in a reporting period calculates interest income by applying the effective interest method on the acquisition cost of amortized financial assets, in the next reporting period, calculating interest income by applying an effective interest rate on the gross carrying amount if the credit risk of the financial instrument improves so that the financial assets no longer experience impairment of credit value and improvement can be objectively related to an event that occurs after the requirements listed in point (b) of the above paragraph are applied (for example an improvement in the borrower's credit rating).

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

**(iv) Pengukuran setelah pengakuan awal
(lanjutan)**

- Aset Keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Keuntungan atau kerugian aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui dalam penghasilan komprehensif lain sampai aset keuangan dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, kecuali:

- a. bunga yang dihitung menggunakan metode bunga efektif diakui dalam laba rugi, jumlah yang diakui dalam laba rugi sama dengan jumlah yang akan diakui dalam laba rugi jika aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- b. keuntungan atau kerugian penurunan nilai; atau
- c. keuntungan atau kerugian selisih kurs.

Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Khusus untuk aset keuangan berbentuk instrumen ekuitas, jumlah yang disajikan pada penghasilan komprehensif lainnya tidak selanjutnya dialihkan ke laba rugi. Akan tetapi, LPEI dapat mengalihkan keuntungan atau kerugian kumulatif pada ekuitas.

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
Aset dinilai pada nilai wajar. Seluruh keuntungan dan kerugian yang timbul akibat perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi, kecuali instrumen lindung nilai yang ditetapkan kedalam hubungan lindung nilai tertentu.

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.f. Financial assets and financial liabilities
(continued)**

(iv) Subsequent measurement (continued)

- Financial assets measured at fair value through other comprehensive income.

Gains or losses of financial assets measured at fair value through other comprehensive income are recognized in other comprehensive income until the financial assets are derecognized or reclassified, except:

- a. interest calculated using the effective interest method is recognized in profit or loss, the amount recognized in profit or loss is equal to the amount to be recognized in profit or loss if the financial asset is measured at amortized cost;
- b. impairment gains or losses; or
- c. foreign exchange gains or losses.

When a financial asset is derecognized, the cumulative gain or loss previously recognized in other comprehensive income is reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

Specifically for financial assets in the form of equity instruments, the amounts presented in other comprehensive income are not subsequently transferred to profit or loss. However, LPEI can transfer cumulative gains or losses on equity.

- Financial assets measured at fair value through profit or loss
Assets are valued at fair value. All gains and losses arising from changes in fair value are recognized in profit or loss, except for hedging instruments that are designated in certain hedging relationships.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

**(iv) Pengukuran setelah pengakuan awal
(lanjutan)**

LPEI menerapkan persyaratan penurunan nilai untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan dalam bentuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Kebijakan akuntansi terkait pencadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dapat mengacu pada Catatan 2q.

Setelah pengakuan awal, LPEI mengukur liabilitas keuangan, yang diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut; (i) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan; (ii) Liabilitas keuangan lain. Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.

(v) Penghentian Pengakuan

LPEI menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau LPEI mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana LPEI secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau kewajiban atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh LPEI diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.f. Financial assets and financial liabilities
(continued)**

(iv) Subsequent measurement (continued)

LPEI applies an impairment requirement for financial assets measured at amortized cost and financial assets in the form of debt instruments that are measured at fair value through other comprehensive income.

The accounting policy related to the allowance for impairment losses for financial asset can be seen on Note 2q.

After initial recognition, LPEI measures financial liabilities, are classified into the following categories at; (i) Financial liabilities at fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. those designated as financial liabilities such upon initial recognition and those classified as held for trading and; (ii) Other financial liabilities. Other financial liabilities pertain to financial liabilities that are not held for trading nor designated as at fair value through profit or loss upon recognition of the liability.

(v) Derecognition

LPEI derecognizes a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or when it transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred. Any rights or liabilities in transferred financial assets that is created or retained by LPEI is recognized as a separate asset or liability.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

(v) Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Dalam transaksi dimana LPEI secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, LPEI menghentikan pengakuan aset tersebut jika LPEI tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, LPEI tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan, dimana tingkat keberlanjutan LPEI dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

a. Penghentian pengakuan atas modifikasi substansial atas syarat dan ketentuan

Jika modifikasi atas aset keuangan tidak menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan, maka LPEI akan mencatat aset keuangan tersebut sebagai aset keuangan modifikasian pada tanggal modifikasi. Selisih jumlah tercatat bruto aset keuangan awal dengan nilai wajar aset modifikasian diakui di laba rugi. Pendapatan atau biaya transaksi yang terjadi sehubungan dengan kejadian modifikasi diakui sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian atas modifikasi tersebut.

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.f. Financial assets and financial liabilities
(continued)**

(v) Derecognition (continued)

In transactions in which LPEI neither retains nor transfers substantially all the risks and rewards of ownership of a financial asset, LPEI derecognizes the asset if it does not retain control over the asset. The rights and obligations retained in the transfer are recognized separately as assets and liabilities as appropriate. In transfers in which control over the asset is retained, LPEI continues to recognize the asset to the extent of its continuing involvement, determined by the extent to which it is exposed to changes in the value of the transferred asset.

a. Derecognition due to substantial modification of terms and condition

If the modification of the financial asset does not result in the termination of recognition of the financial asset, LPEI will record the financial asset as the modified financial asset at the date of modification. The difference between the gross carrying amount of the initial financial assets and the fair value of the modified assets is recognized in profit or loss. The income or transaction costs incurred in connection with the modification event are recognized as part of the gain or loss on the modification.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

(v) Penghentian Pengakuan (lanjutan)

b. Penghentian pengakuan selain modifikasi substansial
Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:

- hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- LPEI telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dan antara (a) LPEI telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) LPEI tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

LPEI menghapusbukukan aset keuangan dan kerugian penurunan nilai terkait, pada saat LPEI menentukan bahwa kemungkinan tertagihnya aset keuangan tersebut relatif kecil. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi seperti kemungkinan tertagihnya piutang dari debitur, telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan debitur/penerbit aset keuangan sehingga debitur/penerbit tidak lagi dapat melunasi kewajibannya, atau hasil penjualan agunan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh eksposur. Jumlah hari lewat jatuh tempo yang digunakan untuk memicu penghapusan pembiayaan tanpa jaminan dalam portofolio ritel ditentukan berdasarkan pengalaman akun masa lalu yang menunjukkan ketika suatu akun mencapai jumlah hari lewat jatuh tempo tertentu, maka probabilitas pengembalian dari akun tersebut mendekati nol.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.f. Financial assets and financial liabilities
(continued)**

(v) Derecognition (continued)

b. Derecognition other than for substantial modification

Financial assets are derecognized if:

- the contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; or
- LPEI has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the cash flows in full without material delay to third parties under a 'pass-through' arrangement; and either (a) LPEI has transferred substantially all the risks and rewards of the assets, or (b) LPEI has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred the control of the asset.

LPEI writes off a financial asset and any related impairment losses, when LPEI determines that the collectibility of financial assets is relatively remote. This decision is reached after considering information such as recoverability of the amount due from borrowers, the occurrence of significant changes in the financial position of borrower/financial asset issuer such that the borrower/issuer can no longer pay the obligation, or that proceeds from collateral will not be sufficient to pay back the entire exposure. The days past due used to trigger write off of unsecured financing in retail portfolio are broadly driven by past experiences which shows that once an account reaches the certain number of days past due, the probability of recovery is almost zero.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

(v) Penghentian pengakuan (lanjutan)

Pembiayaan dan piutang atau aset keuangan lain dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pembiayaan dan piutang atau hubungan normal antara LPEI dan debitur telah berakhir. Ketika pembiayaan dan piutang tidak dapat dilunasi, maka akan dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

Penerimaan kemudian atas pembiayaan yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada tahun berjalan dikreditkan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan di laporan posisi keuangan, sedangkan jika setelah tanggal laporan posisi keuangan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Ketika LPEI telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki *pass-through arrangement* dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan LPEI yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Melanjutkan keterlibatan yang diambil dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer adalah diukur dari nilai minimum tercatat awal dari aset dan jumlah maksimum pertimbangan bahwa LPEI diminta untuk membayar kembali.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.f. Financial assets and financial liabilities
(continued)**

(v) Derecognition (continued)

Financing and receivables or other financial assets are written off when there is no realistic prospect of collection in the near future or the normal relationship between LPEI and the borrowers has ceased to exist. When financing and receivables are deemed uncollectible, they are written off against the related allowance for impairment losses.

Subsequent recoveries from financing previously written off are added to the allowance for impairment losses account in the statement of financial position, if recovered in the current year and are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as other operating income, if recovered after the statement of financial position dates.

When LPEI has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of LPEI continuing involvement in the asset.

Continuing involvement that has taken the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that LPEI could be required to repay.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

(v) Penghentian pengakuan (lanjutan)

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan, dibatalkan, atau kadaluarsa. Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru. Perbedaan antara nilai tercatat liabilitas keuangan awal dan imbalan yang dibayarkan diakui dalam laba rugi.

(vi) Pengakuan pendapatan dan beban

- a. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan dalam nilai wajar tidak diakui untuk aset yang dicatat berdasarkan perolehan diamortisasi;
- b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan dalam nilai wajar diakui dalam laba rugi untuk aset yang diklasifikasikan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- c. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain untuk aset yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas dan penghasilan komprehensif lain harus diakui pada laba rugi.

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.f. Financial assets and financial liabilities
(continued)**

(v) Derecognition (continued)

Financial liabilities are derecognized when the obligation under the liability is discharged, cancelled, or has expired. Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability. The difference between the carrying value of the original financial liability and the consideration paid is recognized in profit or loss.

(vi) Income and expense recognition

- a. Gains and losses arising from changes in fair value are not recognized for assets recorded at amortized cost;
- b. Gains and losses arising from changes in fair value are recognized in the of profit and loss for assets classified in the group of financial assets measured at fair value through profit or loss;
- c. Gains and losses arising from changes in fair value are recognized in other comprehensive income for assets classified as fair value through other comprehensive income.

When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gains or losses previously recognized in equity and other comprehensive income are must recognized in the statement of profit or loss.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

(vii) Reklasifikasi aset keuangan

Reklasifikasi atas aset keuangan yang dimiliki dilakukan jika adanya perubahan model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan dan tidak diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi atas liabilitas keuangan.

Perubahan model bisnis sifatnya harus berdampak secara signifikan terhadap kegiatan operasional LPEI seperti memperoleh, melepaskan, atau mengakhiri suatu lini bisnis. Selain itu, perlu membuktikan adanya perubahan tersebut kepada pihak eksternal.

LPEI akan mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terkena dampak dari perubahan model bisnis. Perubahan tujuan model bisnis LPEI harus berdampak sebelum tanggal reklasifikasi.

Yang bukan merupakan perubahan model bisnis adalah:

- Perubahan intensi berkaitan dengan aset keuangan tertentu (bahkan dalam situasi perubahan signifikan dalam kondisi pasar).
- Hilangnya sementara pasar tertentu untuk aset keuangan.
- Pengalihan aset keuangan antara bagian dari LPEI dengan model bisnis berbeda.

(viii) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan di laporan posisi keuangan jika dan hanya jika, saat ini terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus jumlah keduanya dan terdapat intensi untuk diselesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.f. Financial assets and financial liabilities
(continued)**

(vii) Reclassification of financial assets

Reclassification of owned financial assets is made if there is a change in the business model for managing financial assets and is not allowed to reclassify financial liabilities.

Changes in the business model must have a significant impact on the LPEI operational activities, such as acquiring, releasing, or ending a line of business. In addition, it is necessary to prove these changes to external parties.

LPEI will reclassify all financial assets affected by changes in business models. Changes in the objectives of the LPEI business model should take effect before the reclassification date.

What is not a change in the business model are:

- Change in intention relating to a particular financial asset (even in situations of significant changes in market conditions).*
- The temporary loss of certain markets for financial assets.*
- Transfers of financial assets between parts of LPEI with different business models.*

(viii) Offsetting

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position if, and only if, there is currently an enforceable legal rights to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realise the assets and settle the liabilities simultaneously.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

(viii) Saling hapus (lanjutan)

Hak yang berkekuatan hukum berarti:

- a. Tidak terdapat kontinjensi di masa yang akan datang; dan
- b. Hak yang berkekuatan hukum pada kondisi-kondisi berikut ini:
 - i. kegiatan bisnis normal;
 - ii. kondisi kegagalan usaha; dan
 - iii. kondisi gagal bayar atau bangkrut.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

(ix) Pengukuran biaya perolehan diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya dan dikurangi penurunan nilai.

(x) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Nilai pasar dapat diperoleh dari *Interdealer Market Association* (IDMA) atau harga pasar atau harga yang diberikan oleh broker (*quoted price*) dari Bloomberg dan Reuters pada tanggal pengukuran.

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.f. Financial assets and financial liabilities
(continued)**

(viii) Offsetting (continued)

This means that the right to set off:

- a. Must not be contingent on a future event; and*
- b. Must be legally enforceable in all of the following circumstances:*
 - i. the normal course of business;*
 - ii. the event of default; and*
 - iii. the event of insolvency or bankruptcy.*

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the accounting standards.

(ix) Amortized cost measurement

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount and minus any reduction for impairment.

(x) Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value can be obtained from IDMA's (Interdealer Market Association) or quoted market prices or broker's quoted price from Bloomberg and Reuters on the measurement date.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

(x) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Selain itu, untuk tujuan pelaporan keuangan, pengukuran nilai wajar dikategorikan ke Level 1, 2 atau 3 berdasarkan tingkat *input* untuk pengukuran nilai wajar yang dapat diobservasi dan signifikansi *input* pada pengukuran nilai wajar secara keseluruhan, yang digambarkan sebagai berikut:

- Tingkat 1 adalah harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran;
- Tingkat 2 adalah *input*, selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1, yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
- Tingkat 3 adalah *input* yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas.

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, LPEI menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang mengerti dan berkeinginan (jika tersedia), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial serupa dan analisis arus kas yang didiskonto. LPEI menggunakan *credit risk spread* sendiri untuk menentukan nilai wajar dari liabilitas derivatif dan liabilitas lainnya yang telah ditetapkan menggunakan opsi nilai wajar.

Ketika terjadi kenaikan di dalam *credit spread*, LPEI mengakui keuntungan atas liabilitas tersebut sebagai akibat penurunan nilai tercatat liabilitas. Ketika terjadi penurunan di dalam *credit spread*, LPEI mengakui kerugian atas liabilitas tersebut sebagai akibat kenaikan nilai tercatat liabilitas.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.f. Financial assets and financial liabilities
(continued)**

(x) Fair value measurement (continued)

In addition, for financial reporting purposes, fair value measurements are categorized into Level 1, 2 or 3 based on the degree to which the inputs to the fair value measurements are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety, which are described as follows:

- Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date;
- Level 2 inputs are inputs, other than quoted prices included within Level 1, which are observable for the asset or liability, either directly or indirectly; and
- Level 3 inputs are unobservable inputs for the asset or liability.

If a market for a financial instrument is not active, LPEI establishes fair value using a valuation technique. Valuation techniques include using the recent arm's length transactions between knowledgeable and willing parties (if available), reference to the current fair value of other instruments that are substantially the same and discounted cash flow analysis. LPEI uses its own credit risk spreads in determining the fair value for its derivative liabilities and all other liabilities for which it has elected the fair value option.

When LPEI credit spread widens, LPEI recognizes a gain on these liabilities because the value of the liabilities has decreased. When LPEI credit spread becomes narrow, Group recognizes a loss on these liabilities because the value of the liabilities has increased.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

(x) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

LPEI menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan *swap* mata uang. *Input* yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

Untuk instrumen yang lebih kompleks, LPEI menggunakan model penilaian internal, yang pada umumnya berdasarkan teknik dan metode penilaian yang umumnya diakui sebagai standar industri. Model penilaian terutama digunakan untuk menilai kontrak derivatif yang ditransaksikan melalui pasar *over-the-counter*, *unlisted debt securities* (termasuk surat utang dengan derivatif melekat) dan instrumen utang lainnya yang pasarnya tidak aktif. Beberapa input dari model ini tidak berasal dari data yang dapat diobservasi di pasar dan dengan demikian merupakan hasil estimasi berdasarkan asumsi tertentu.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar efek-efek ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

Hasil dari suatu teknik penilaian merupakan sebuah estimasi atau perkiraan dari suatu nilai yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, dan teknik penilaian yang digunakan mungkin tidak dapat menggambarkan seluruh faktor yang relevan atas posisi yang dimiliki LPEI. Dengan demikian, penilaian disesuaikan dengan faktor tambahan seperti model risk, risiko likuiditas dan risiko pembiayaan *counterparties*.

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.f. Financial assets and financial liabilities
(continued)**

(x) Fair value measurement (continued)

LPEI uses widely recognized valuation models for determining fair values of financial instruments of lower complexity, such as exchange value options and currency swaps. For these financial instruments, inputs into models are generally market-observable.

For more complex instruments, LPEI uses internally developed model which are usually based on valuation methods and techniques generally recognized as standard within the industry. Valuation models are used primarily to value derivatives transacted in the over-the-counter market, unlisted debt securities (including those with embedded derivatives) and other debt instruments for which markets were or have become liquid. Some of the inputs to these models may not be market observable and are therefore estimated based on assumptions.

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the fair value of another instrument which substantially has the same characteristics or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the marketable securities.

The output of a valuation technique is an estimate or approximation of a value that cannot be determined with certainty, and the valuation technique employed may not fully reflect all factors relevant to the positions that LPEI holds. Therefore, valuations are therefore adjusted, with additional factors such as model risks, liquidity risk and counterparties credit risk.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

(x) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Berdasarkan kebijakan teknik penilaian nilai wajar, pengendalian dan prosedur yang diterapkan, manajemen berkeyakinan bahwa penyesuaian atas penilaian tersebut di atas diperlukan dan dianggap tepat untuk menyajikan secara wajar nilai dari instrumen keuangan yang diukur berdasarkan nilai wajar dalam laporan posisi keuangan. Data harga dan parameter yang digunakan di dalam prosedur pengukuran pada umumnya telah di-review dan disesuaikan, jika diperlukan, khususnya untuk perkembangan atas pasar terkini.

Pada saat nilai wajar dari *unlisted equity instruments* tidak dapat ditentukan dengan handal, instrumen tersebut dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai. Nilai wajar atas pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada LPEI dan debitur ditentukan menggunakan nilai kini berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas pembiayaan dan piutang, likuiditas, dan biaya.

Aset keuangan, *long position*, liabilitas keuangan, dan *short position* diukur dengan harga penutupan. Dimana LPEI memiliki posisi aset dan liabilitas yang risiko pasarnya saling hapus, maka dapat digunakan nilai tengah dari nilai pasar sebagai dasar untuk menentukan nilai wajar posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan penyesuaian tersebut terhadap harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka atau neto (*net open position*), mana yang lebih sesuai.

(xi) Perbedaan hari pertama

Pada saat nilai transaksi berbeda dengan nilai wajar dari transaksi pasar lainnya yang dapat diobservasi saat ini atas instrumen yang sama atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan variabel data dari pasar yang dapat diobservasi.

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.f. Financial assets and financial liabilities
(continued)**

(x) Fair value measurement (continued)

Based on the established fair value valuation technique policy, related controls and procedures applied, management believes that these valuation adjustments are necessary and considered appropriate to fairly state the values of financial instruments measured at fair value in the statement of financial position. Price data and parameters used in the measurement procedures applied are generally reviewed and adjusted, if necessary, particularly in view of the current market developments.

In cases when the fair value of unlisted equity instruments cannot be determined reliably, the instruments are carried at cost less impairment value. The fair values of financing and receivables as well as liability to LPEI and debtors are determined using a present value model on the basis of contractually agreed cash flows, by considering quality of financing and receivables, liquidity, and costs.

Financial assets, long positions, financial liabilities, and short positions are measured at closing price. Where LPEI has assets and liabilities positions with off setting market risk, middle market prices are used to measure the off-setting risk positions and a bid or ask price adjustment is applied to the net open positions as appropriate.

(xi) Day 1 (one) difference

When the transaction price differs from the fair value of other observable current market transactions in the same instrument or based on a valuation technique whose variables include only data from observable markets.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

(xii) Perbedaan hari pertama (lanjutan)

LPEI secara langsung mengakui perbedaan antara nilai transaksi dan nilai wajar ("1 hari" keuntungan atau kerugian) pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jika nilai wajar ditentukan berdasarkan data yang tidak dapat diobservasi, maka perbedaan antara nilai transaksi dan nilai model hanya dapat diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat data menjadi dapat diobservasi atau pada saat instrumen tersebut tidak diakui lagi.

2.g. Giro pada Bank Indonesia dan bank

Giro pada Bank Indonesia dan bank diklasifikasikan masing-masing sebagai biaya perolehan diamortisasi. Giro pada Bank Indonesia dan bank dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

2.h. Penempatan pada bank

Penempatan pada bank adalah penanaman dana pada bank berupa penempatan pada pasar uang (*interbank call money*) dan deposito berjangka.

Penempatan pada bank diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Penempatan pada bank dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

2.i. Efek-efek

Efek-efek terdiri atas efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang, berupa Obligasi Negara Republik Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan obligasi korporasi.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.f. Financial assets and financial liabilities
(continued)**

(xii) Day 1 (one) difference (continued)

LPEI immediately recognizes the difference between the transaction price and fair value (a 'Day 1' profit or loss) in the statement of profit or loss and Other comprehensive income. In cases where fair value is determined using data which is not observable, the difference between the transaction price and model value is only recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income when the inputs become observable or when the instrument is derecognized.

2.g. Current accounts with Bank Indonesia and banks

Current accounts with Bank Indonesia and banks are classified as amortized cost. The current accounts with Bank Indonesia and banks are stated at amortized cost using the effective interest method less allowance for impairment losses.

2.h. Placements with banks

Placements with banks represent funds in banks in the form of interbank call money and time deposits.

Placements with banks are classified as amortized cost. The placements with banks are stated at amortized cost using the effective interest method less allowance for impairment losses.

2.i. Securities

Securities consist of securities traded on the stock exchanges and in the money market, in the form of bonds of the Republic of Indonesia, Certificates of Bank Indonesia (SBI), and corporate bonds.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

2.i. Efek-efek (lanjutan)

Efek-efek pada awalnya disajikan sebesar nilai wajarnya.

Setelah pengakuan awal, efek-efek diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Penilaian efek-efek didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut:

1. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi penghasilan komprehensif lain.
2. Pendapatan bunga diakui dalam laba rugi menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi selisih kurs diakui pada laba rugi.

2.j. Sukuk

Surat berharga syariah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah, antara lain obligasi syariah (sukuk) dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

LPEI menentukan klasifikasi investasi pada surat berharga, khususnya sukuk, berdasarkan model usaha yang ditentukan berdasarkan klasifikasi sesuai PSAK 410 tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

- 1) Sukuk diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi), yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo menggunakan metode garis lurus.
- 2) Sukuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun yang bersangkutan.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

2.i. Securities (continued)

Securities are initially measured at fair value.

After the initial recognition, the securities are classified as fair value through other comprehensive income.

The valuation of securities is stated based on the classification as follows:

1. Gains and losses from changes in fair value are recognized directly in the statement of profit or loss other comprehensive income.
2. Interest income is recognized in profit or loss using the effective interest method. Foreign exchange gains or losses are recognized in profit or loss.

2.j. Sukuk

Sharia securities is a proof of investment based on sharia principles that are commonly traded in sharia money market and/or sharia capital market, such as sharia bonds (sukuk) and other securities based on syariah principles.

LPEI defined the classification of investment in marketable securities, especially sukuk, based on business model in accordance with PSAK 410 on "Accounting for Sukuk" as follows:

- 1) Sukuk measured at cost are stated at cost (including transaction costs), adjusted by unamortized premium and/or discount. Premium and discount are amortized over the period until maturity using straight line method.
- 2) Sukuk measured at fair value through profit and loss are stated at fair value. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year statements of profit or loss and other comprehensive income.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

2.j. Sukuk (lanjutan)

- 3) Sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya. Surat berharga disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo menggunakan metode garis lurus.

2.k. Instrumen keuangan derivatif

Dalam melakukan usaha bisnisnya, LPEI melakukan transaksi instrumen keuangan derivatif seperti kontrak berjangka mata uang asing dan *swap* mata uang asing untuk mengelola eksposur pada risiko pasar, seperti risiko mata uang dan risiko tingkat suku bunga.

Seluruh instrumen derivatif dicatat dalam laporan posisi keuangan berdasarkan nilai wajarnya. Nilai wajar tersebut ditentukan berdasarkan harga pasar, kurs Reuters pada tanggal pelaporan laporan posisi keuangan, diskonto arus kas, model penentu harga atau harga yang diberikan oleh broker (*quoted price*) atas instrumen lain yang memiliki karakteristik atau model penentuan harga serupa.

Nilai wajar instrumen derivatif ditentukan berdasarkan diskonto arus kas dan model penentu harga atau harga yang diberikan oleh broker (*quoted price*) atas instrumen lainnya yang memiliki karakteristik serupa.

2.l. Tagihan wesel ekspor

Tagihan wesel ekspor diklasifikasikan dan disajikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Tagihan wesel ekspor adalah wesel ekspor yang dinegosiasikan secara diskonto dan dijamin oleh LPEI. Tagihan wesel ekspor dicatat pada biaya perolehan diamortisasi setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)**

2.j. Sukuk (continued)

- 3) *Sukuk measured at fair value through other comprehensive income. Securities are presented at fair value. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair value are presented in other comprehensive income. Premium and discount are amortized over the period until maturity using straight line method.*

2.k. Derivative financial instruments

In the normal course of business, LPEI enters into transactions involving derivative financial instruments such as foreign currency forward contracts and foreign currency swaps to manage exposures on market risks, such as currency risk and interest rate risk.

All derivative instruments are recognized in the statement of financial position at fair value. The fair value is based on market rate, Reuters exchange rate at statement of financial position date, discounted cash flows, price valuation or broker quoted price on other instruments with similar characteristics or price model.

The fair value of derivative instruments are determined based on discounted cash flows and pricing models or quoted prices from brokers of other instruments with similar characteristics.

2.l. Export bills receivable

Export bills receivable are classified and presented as amortized cost. Export bills receivable are negotiated export bills discounted and negotiated by LPEI. Export bills receivable are stated at amortized cost less allowance for impairment losses.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

2.m. Pembiayaan dan piutang

Pembiayaan dan piutang yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utang dan bunganya setelah jangka waktu tertentu, dan tagihan yang berasal dari transaksi perdagangan.

Pembiayaan dan piutang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Pembiayaan dan piutang yang diberikan pada awalnya diukur menggunakan metode EIR dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi diukur dengan memperhitungkan diskonto atau premi yang timbul pada saat akuisisi serta biaya/fee transaksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif. Amortisasi tersebut diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Cadangan kerugian atas penurunan nilai dilakukan dengan menggunakan metode perhitungan kerugian kredit ekpektasian sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2q.

2.n. Pembiayaan dan piutang berdasarkan prinsip syariah

Pembiayaan/piutang berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil antara LPEI dengan pihak lain selama jangka waktu tertentu. Pembiayaan/ piutang tersebut meliputi piutang murabahah dan pembiayaan musyarakah.

Piutang murabahah merupakan akad jual beli barang dengan harga pembelian dan margin yang telah disepakati oleh pembeli dan penjual dan dibuat secara eksplisit (dinyatakan dalam akad pembiayaan). Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, LPEI melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari debitur.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

2.m. Financing and receivables

Financing and receivables represent funds provided or receivables that can be considered as equivalents there of, based on agreements or financing contracts with borrowers, where borrowers are required to repay their debts with interest after a specified period, and matured trade finance facilities.

Financing and receivables are classified as amortized cost.

Financing and receivables provided are measured at amortized cost using EIR method less allowance for impairment losses. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and cost/fee that are an integral part of the EIR. The amortization is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Allowance for impairment losses is carried out using the expected credit loss calculation method as disclosed in Note 2q.

2.n. Sharia financing and receivables

Sharia financing/receivables are receivables from providing funds or other similar forms of receivables arising from transactions carried out based on the sale and purchase arrangements and profit sharing between LPEI and borrowers for a certain period of time. The financing/receivables consist of murabahah receivables and musyarakah financing.

Murabahah receivable is a transaction carried out based on sales and purchase agreement whereby the price and the profit margin are agreed by the buyer and seller and are disclosed explicitly (stated on the financing agreement). Murabahah may or may not be carried out based on a certain order to purchase goods. Under Murabahah, based on a certain order, the purchase will be realized by LPEI after the order is received.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.n. Pembiayaan dan piutang berdasarkan
prinsip syariah (lanjutan)**

Piutang murabahah pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerja sama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan *nisbah* pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan musyarakah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo penyisihan kerugian yang dibentuk berdasarkan hasil penelaahan oleh manajemen terhadap tingkat kolektibilitasnya pada setiap akhir tahun.

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Ijarah muntahiyah bittamlik adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa.

Piutang ijarah adalah porsi pokok atas pendapatan sewa yang belum dibayar pada saat jatuh tempo. Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang ijarah disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) piutang ijarah.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.n. Sharia financing and receivables
(continued)**

Murabahah receivable is initially recognized at fair value plus directly attributable transaction costs and is an additional cost to obtain the respected financial assets and after the initial recognition are measured at amortized cost using the effective interest rate method less any allowance for impairment losses.

Musyarakah financing is a partnership contract between fund owners (musyarakah partners) to contribute funds and conduct business through partnership. All parties share profits based on a predetermined ratio, while the loss will be distributed proportionately based on the capital contribution. At statement of financial position date, musyarakah financing is stated at the outstanding balance of the financing less allowance for possible losses based on the management's review on the musyarakah financing collectibility at the end of the year.

Ijarah is the contract of transferring the rights (benefits) of an asset within a certain period of time with the payment of rent (ujrah) without the transfer of ownership of the asset itself. Ijarah muntahiyah bittamlik is a lease agreement between lessor and lessee to obtain income from the leased object with an option to transfer the ownership title of leased object through purchase/sale or as a gift (hibah) at certain period as agreed in the lease agreement (akad).

Ijarah receivables are stated at the principal portion of unpaid rent income at maturity. Allowance for impairment losses accounts on Ijarah receivables is presented as a contra account of Ijarah receivables.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

2.o. Pinjaman qardh

Pinjaman qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan yang diperjanjikan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Pinjaman qardh dapat disertai dengan wakalah.

Wakalah digunakan dalam hal nasabah mewakilkan kepada LPEI untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen nasabah dan menagih piutang kepada *buyer*. Atas jasa tersebut, LPEI dapat memperoleh ujarah yang diakui secara proporsional selama jangka waktu pembiayaan.

Pinjaman qardh diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas qardh yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Pinjaman qardh disajikan sebesar saldonya dikurangi cadangan kerugian. LPEI menetapkan cadangan kerugian qardh berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo.

2.p. Aset yang diperoleh untuk ijarah

Aset yang diperoleh untuk ijarah merupakan aset yang menjadi objek transaksi sewa (ijarah) dan dicatat di laporan posisi keuangan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Objek sewa dalam transaksi ijarah disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aset sejenis, sedangkan objek sewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik disusutkan sesuai masa sewa.

Ijarah muntahiyah bittamlik adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)**

2.o. Funds of qardh

Funds of qardh are borrowing funds without an agreed commitment of benefits where the borrower is obligated to repay the principal simultaneously or in installments in certain periods. Funds of qardh can be combined with wakalah.

Wakalah is used in the event that the customer represents LPEI to manage customer documents and collect receivables from the buyer. For these services, LPEI can obtain ujarah which is recognized proportionally during the period.

Funds of qardh are recognized at the amount lent at the transaction date. Any excess amount paid by the borrower in repaying a qardh is recognized as revenue upon realization. Funds of qardh is stated at its outstanding balance less allowance for possible losses. LPEI provides allowance for possible losses on qardh based on the review of quality of the individual outstanding balances.

2.p. Assets acquired for ijarah

Assets acquired for ijarah represent object of leased assets and are recorded in the statement of financial position at the acquisition cost, net of accumulated depreciation.

Leased object in ijarah transaction is depreciated based on the depreciation policy for similar assets, while leased object in ijarah muntahiyah bittamlik transaction is depreciated based on leased term.

Ijarah muntahiyah bittamlik is a lease transaction between the lessor and lessee to obtain fee from the object leased with the option of transferring the title through purchase or grant at a certain time in accordance with the lease contract.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

2.p. Aset yang diperoleh untuk ijarah (lanjutan)

Perpindahan hak milik objek sewa kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik dapat dilakukan dengan cara:

- (i) hibah;
- (ii) penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa;
- (iii) penjualan pada akhir sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad; dan
- (iv) penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

2.q. Cadangan kerugian penurunan nilai

Aset keuangan

LPEI mencatat cadangan kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss*) atas instrumen keuangan sesuai dengan PSAK 109 sebagai berikut:

1. Aset keuangan yang berupa instrumen utang yang diklasifikasikan dalam biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.
 - a. Penurunan nilai atas aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset di dalam laporan posisi keuangan, dan disajikan di dalam laba rugi sebagai "Beban Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai".

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

2.p. Assets acquired for ijarah (continued)

The transfer of ownership right on the leased object to the lessee in ijarah muntahiyah bittamlik can be conducted through:

- (i) a grant;*
- (ii) sale prior to the end of contract for an amount equivalent to the remaining lease installments;*
- (iii) sale prior to the end of the agreement at a specified amount as agreed at the inception of the contract; and*
- (iv) installment sales at a specific price as agreed in the contract.*

The carrying value of asset is immediately impaired to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than the estimated recoverable amount.

2.q. Allowance for impairment losses

Financial asset

LPEI recognize the allowance for expected credit loss for all financial instruments in accordance with PSAK 109 as follows:

- 1. Financial assets in the form of debt instruments that are classified as amortized cost or fair value through other comprehensive income.*
 - a. Impairment loss for financial asset under the classification of amortized cost are recognized as a deduction from the asset's carrying value and is presented as "allowance for impairment losses" in profit or loss.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.q. Cadangan kerugian penurunan nilai
(lanjutan)**

Aset keuangan (lanjutan)

- b. Penurunan nilai atas aset keuangan (di luar instrumen ekuitas) yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui sebagai penambah dari penghasilan komprehensif lainnya di dalam laporan posisi keuangan sebagai “*unrealized gain or loss*”, (tidak mengurangi jumlah tercatat aset keuangan dalam laporan keuangan konsolidasian) dan diakui di laba rugi sebagai “Beban Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai”.
2. Komitmen pinjaman atau kelonggaran tarik yang sifatnya tidak dapat dibatalkan (*committed*)
 - a. Penurunan nilai atas komitmen pinjaman diakui sebagai provisi pada komponen liabilitas LPEI yang dicatat secara terpisah dari aset pinjaman yang terkait sebagai “Provisi Kerugian Kredit Ekspektasian Komitmen Pinjaman”, kecuali LPEI tidak dapat mengidentifikasi secara terpisah.
 - b. Dalam kondisi tersebut, penurunan nilai atas komitmen pinjaman dan aset pinjaman diakui bersama sebagai pengurang dari nilai tercatat aset di dalam laporan posisi keuangan.
 3. Kontrak penjaminan keuangan yang termasuk dalam PSAK 109 dan tidak diukur dalam nilai wajar melalui laba rugi.

Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.q. Allowance for impairment losses
(continued)**

Financial asset (continued)

- b. Allowance for impairment of financial assets (other than equity instruments) under the classification of fair value through other comprehensive income are recognized as addition to other comprehensive income in the statement of financial position as “*unrealized gain or loss*”, (which will consolidated value of a financial asset in the financial statement) and recognized in profit or loss as “*Allowance for impairment losses*”.
2. Committed loan commitment or undisbursed loan (*committed*)
 - a. Impairment loss for loan commitments are recognized as provision in liability separate from its related loan asset as “*Expected Credit Loss Provision on Loan Commitments*”, unless an event has caused LPEI to not be able to identify both components separately.
 - b. In such condition, impairment loss for loan commitment and financial asset are recognized together as deduction to a financial asset carrying value in the statement of financial position.
 3. Financial guarantee contracts included in PSAK 109 and not measured at fair value through profit or loss.

There is no allowance for expected credit losses on investment in equity instruments.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.q. Cadangan kerugian penurunan nilai
(lanjutan)**

Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset
keuangan

LPEI mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan:

- i. Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan
- ii. Instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

LPEI mengevaluasi apakah terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan atau terdapat bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

Dalam mengevaluasi hal tersebut, LPEI menetapkan kriteria berikut:

1. Tahap 1

Pada tanggal evaluasi penurunan nilai, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal yang dapat dibuktikan dengan terjadinya seluruh hal berikut, yaitu:

- a. Tidak terdapat tunggakan lebih dari 30 hari;
- b. Instrumen keuangan memiliki peringkat kolektabilitas 1 atau 2; dan
- c. Tidak direstrukturisasi (berdasarkan informasi *flag* restrukturisasi di sistem).

Pada tahap ini, LPEI akan mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.q. Allowance for impairment losses
(continued)**

Allowance for impairment losses on financial
assets

LPEI measure the allowance for losses for the lifetime of an expected credit losses, except for the following, which are measured according to 12 months expected credit losses:

- i. Debt instruments that have low credit risk at the reporting date; and
- ii. Other financial instruments for which credit risk has not increased significantly since initial recognition.

LPEI evaluates whether there is significant increase in credit risk or objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired.

In assessing those matters, LPEI applies the criteria as follows:

1. Stage 1

At the evaluation date, credit risk on financial instruments does not increase significantly since initial recognition, which can be proven by the occurrence of all of the following, namely:

- a. Does not have past due obligation not more than 30 days;
- b. The financial instrument has a collectability rating 1 or 2; and
- c. Not restructured (based on restructuring flag information in the system).

At this stage, LPEI will measure the allowance for impairment losses for the financial instrument at the amount of an expected 12 months credit loss.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.q. Cadangan kerugian penurunan nilai
(lanjutan)**

Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset
keuangan (lanjutan)

2. Tahap 2

Pada tanggal evaluasi penurunan nilai, risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal yang dapat dibuktikan dengan: terdapat tunggakan antara 31 hari sampai dengan 89 hari atau terdapat indikasi lain yang menunjukkan adanya kenaikan resiko kredit sejak pengakuan.

- Terdapat tunggakan antara 31 hari sampai dengan 89 hari;
- Terjadi restrukturisasi dalam rangka Covid-19 dimana sebelumnya aset berada pada *stage 1* atau *stage 2*; atau
- Terdapat indikasi lain yang menunjukkan adanya kenaikan resiko kredit sejak pengakuan.

Pada tahapan ini, LPEI akan mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*lifetime*).

3. Tahap 3

Pada tanggal evaluasi penurunan nilai, aset keuangan mengalami penurunan nilai yang dapat dibuktikan dengan terjadinya salah satu dari 3 (tiga) hal berikut, yaitu:

- Terdapat tunggakan lebih dari 89 hari; atau
- Instrumen keuangan memiliki peringkat kolektibilitas 3, 4, atau 5; atau
- Terdapat restrukturisasi atas aset keuangan (berdasarkan informasi *flag* restrukturisasi di sistem).
- Terjadi restrukturisasi dalam rangka Covid-19 dimana sebelumnya aset berada *stage 3*.

Pada tahap ini, LPEI akan mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya.

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.q. Allowance for impairment losses
(continued)**

Allowance for impairment losses on financial
assets (continued)

2. Stage 2

At the evaluation date, credit risk on financial instruments has increased significantly since initial recognition, when the is past due obligation of 31 days to 89 days or there are other indications indicating an increase in credit risk since recognition.

- When there is pas due obligation of 31 days to 89 days;*
- There is a restructuring of financial asset in regards of Covid-19, where before restructured the asset is at stage 1 or stage 2; or*
- There are other indications indicating arise of credit risk since recognition.*

At this stage, LPEI will measure the allowance for impairment losses for the financial instrument at the amount of the expected credit losses over its lifetime.

3. Stage 3

At the evaluation date, there is objective evidence that the financial asset is impaired, which can be proven by the occurrence of one of 3 (three) the following:

- Past day obligation for more than 89 days has occured; or*
- The financial instrument has a collectability rating of 3, 4, or 5; or*
- Restructured financial instrument (based on restructuring flag information in the system).*
- There is a restructuring of financial asset in regard of Covid-19, where before restructured the asset is at stage 3.*

At this stage, LPEI will measure the allowance for losses for financial instruments at the amount of the expected credit losses over their lifetime.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.q. Cadangan kerugian penurunan nilai
(lanjutan)**

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

i. Penilaian secara individual

1) Kriteria individual

LPEI mengevaluasi penurunan nilai secara individual jika LPEI memiliki informasi yang wajar dan didukung untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya secara individual dan aset keuangan memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Aset keuangan dikategorikan sebagai non-performing financing; atau*
- b. Aset keuangan yang mengalami restrukturisasi.*

LPEI juga dapat menetapkan aset keuangan untuk dievaluasi secara individual meskipun aset keuangan dimaksud belum memiliki kriteria untuk dievaluasi secara individual, apabila dinilai oleh manajemen akan menghasilkan kerugian kredit ekspektasi yang lebih akurat apabila dinilai secara individual.

2) Evaluasi penurunan nilai

Evaluasi penurunan nilai secara individual didasarkan pada konsep estimasi jumlah probabilitas tertimbang kerugian aset keuangan. Konsep tersebut menggunakan pembobotan masing-masing dari 3 (tiga) skenario yaitu skenario optimis, skenario moderat, dan skenario pesimis. Setiap skenario menghasilkan nilai kini arus kas yang didiskontokan menggunakan EIR, dimana arus kas tersebut didasarkan pada seluruh informasi yang tersedia dan *experienced credit judgement*.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.q. Allowance for impairment losses
(continued)**

Measurement of Expected Credit Losses

Expected Credit Loss is an estimate of the weighted probability of a credit loss measured as follows:

i. Individual assessment

1) Individual criteria

LPEI evaluates impairment individually if LPEI has reasonable and supportable information to measure the lifetime expected credit losses on an individual instrument and the financial assets have the following criteria:

- a. The financial asset is categorized as non-performing financing; or*
- b. The financial asset is restructured.*

LPEI can also assign certain financial assets to be evaluated individually even though the said criteria has not been met, if the management has determined that the individual method will result in a more accurate expected credit loss.

2) Impairment evaluation

Individual impairment evaluation is based on the concept of an estimated weighted probability of loss of financial assets. This concept uses the weighting of each of the 3 (three) scenarios, namely optimistic scenario, moderate scenario, and pessimistic scenario. Each scenario results in fair value of cashflow discounted using EIR, where the cashflow is based on readily available information and experienced credit judgement.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.q. Cadangan kerugian penurunan nilai
(lanjutan)**

2) Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Dalam membuat estimasi *recoverable amount* pada arus kas, metode individual didasarkan pada 2 (dua) konsep yaitu:

- (1) *Discounted Cashflow* berdasarkan estimasi arus kas masa depan; dan
- (2) *Expected Collateral* berdasarkan estimasi penjualan agunan dengan mempertimbangkan nilai wajar dan jangka waktu penjualan agunan di masa depan. Selisih estimasi jumlah probabilitas tertimbang dengan jumlah *outstanding* aset keuangan mencerminkan jumlah kerugian kredit ekspektasian secara individual.

Untuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas pembiayaan dalam rangka Penugasan Khusus yang direstrukturisasi yang telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan dihitung menggunakan asumsi tingkat diskonto sebesar tingkat suku bunga setelah direstrukturisasi.

Per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 LPEI menghitung CKPN atas pembiayaan dalam rangka Penugasan Khusus yang diberikan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, menggunakan metode arus kas yang didiskontokan dengan tingkat diskonto sebesar tingkat suku bunga setelah restrukturisasi, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor S-194/MK.08/2023 tentang Penetapan Penggunaan Asumsi Tingkat Diskonto Berdasarkan Tingkat Suku Bunga Setelah Restrukturisasi Dalam Perhitungan CKPN.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.q. Allowance for impairment losses
(continued)**

2) Impairment evaluation (continued)

In estimating cashflow based on *recoverable amount*, the individual method is based on 2 (two) concept, consisting of:

- (1) The *Discounted Cashflow* which is based on estimated future cashflow; and
- (2) The *Expected Collateral* which is based on estimated sale of collateral taking into consideration the fair value of the collateral and length of sale in the future. The difference between the estimated weighted average amount against the financial asset outstanding reflects the individual expected credit loss.

For the Allowance for Impairment Losses (CKPN) on restructured National Interest Account financing which has received approval from Ministry of Finance is calculated using the assumed of the discount rate that is equal to the interest rate after the restructuring.

As of December 31, 2024 and 2023 LPEI calculate the CKPN on financing for National Interest Account given to PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, using the discounted cash flow method with a discount rate equal to the interest rate after restructuring according to the Letter from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, Number S-194/MK.08/2023 concerning Determination of the Use of Discount Rates Assumption Based on Interest Rates After Restructuring in Calculation of CKPN.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.q. Cadangan kerugian penurunan nilai
(lanjutan)**

ii. Penilaian secara kolektif

1) Kriteria kolektif

LPEI mengevaluasi penurunan nilai secara kolektif jika aset keuangan memiliki kesamaan dalam karakteristik risiko kredit aset keuangan dengan tujuan untuk memfasilitasi analisis yang didesain untuk memungkinkan peningkatan risiko kredit secara signifikan dapat diidentifikasi tepat waktu. LPEI mengevaluasi pencadangan secara kolektif untuk aset keuangan yang memiliki hari tunggakan kurang dari 90 hari untuk dan bukan merupakan *non-performing financing*.

Secara garis besar, seluruh portofolio pembiayaan yang evaluasi penurunan nilainya tidak dihitung menggunakan metode individual, akan dievaluasi menggunakan metode kolektif.

- 2) Evaluasi penurunan nilai
Evaluasi penurunan nilai secara kolektif didasarkan pada konsep *probability of default* (PD), *loss given default* (LGD), dan *exposure at default* (EAD) yang mempertimbangkan informasi masa lalu, masa kini, dan masa mendatang.

a. Probability of default (PD)

Probability of default mencerminkan estimasi kemungkinan suatu debitur gagal bayar pada rentang waktu tertentu.

PD dihitung untuk setiap *bucket* pada setiap segmen yang telah ditetapkan melalui kesamaan karakteristik risiko kredit.

Dalam menghasilkan PD, LPEI menggunakan 3 tahapan perhitungan, yaitu: (1) *PD through the cycle*; (2) *PD forward looking*; dan (3) *PD point in time* melalui proses *scaling*.

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.q. Allowance for impairment losses
(continued)**

ii. Collective assessment

1) Collective criteria

LPEI evaluates impairment collectively if the financial assets share the same credit risk characteristics of the financial assets with the aim of facilitation analysis designed which allows a significant increase in credit risk to be identified in a timely manner. LPEI evaluates the financial assets collectively if the financial asset has past due obligation of less than 90 days and is not categorized as non-performing financing.

In general, all financing portfolios for which impairment evaluation is not calculated using the individual method will be evaluated using the collective method.

- 2) *Impairment evaluation*
The evaluation of collective impairment is based on the concepts of *probability of default* (PD), *loss given default* (LGD), and *exposure at default* (EAD) which take into account past, current, and future information.

a. Probability of default (PD)

Probability of default reflects the estimated probability of a debtor defaulting over a certain period of time.

PD is calculated for each bucket in each segment that reflects similarity in credit risk characteristic.

In calculating the PD, LPEI uses 3 calculation phases, namely: (1) *PD through the cycle*; (2) *PD forward looking*; and (3) *PD point in time* through a scaling process.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.q. Cadangan kerugian penurunan nilai
(lanjutan)**

a. Probability of default (PD) (lanjutan)

Dalam 3 tahapan ini, LPEI menggunakan metode *vasicek*, *roll rate transition matrix*, dan pendekatan lainnya yang lebih sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan regulator.

Metode *vasicek* adalah metode penentuan PD menggunakan formula korelasi aset yang telah ditentukan oleh *Basel Committee* digunakan untuk aset keuangan yang termasuk dalam portofolio *tresuri*, di antaranya giro pada Bank Indonesia dan Bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain, serta efek-efek.

Metode *roll rate transition matrix* menggunakan transisi historis *bucket* PD. *Bucket* PD yang digunakan dalam perhitungan historis adalah sebagai berikut:

1. *Bucket* 1: 0 day past due (DPD)
2. *Bucket* 2: 1 – 30 DPD
3. *Bucket* 3: 31 – 60 DPD
4. *Bucket* 4: 61 – 89 DPD
5. *Bucket* 5: > 89 DPD, atau restrukturisasi aset keuangan (*flag* restukturisasi), atau berada di kolektibilitas 3, 4, atau 5.

PD dilakukan *forward looking macroeconomic adjustment* untuk menentukan *forward looking PD* berdasarkan hubungan historis antara makroekonomi dengan nilai PD LPEI.

b. Loss given default (LGD)

Loss given default (LGD) merupakan estimasi kerugian dengan menghitung *recovery* yang didapatkan setelah debitur tersebut *default*. *Recovery date* dihitung mempertimbangkan *time value of money* dari pengembalian kewajiban yang telah *default*. Tingkat suku bunga yang digunakan untuk menghitung *time value of money* adalah *effective interest rate (EIR)*.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.q. Allowance for impairment losses
(continued)**

a. Probability of default (PD) (continued)

In these 3 stages, LPEI uses the *vasicek* method, *roll rate transition matrix*, and other approaches that is deemed more appropriate and is not contradictory with the regulation.

The *vasicek* method is a method of determining PD using the asset correlation formula that has been determined by the *Basel Committee*, is used for financial assets that are included in *treasury portfolios*, namely current accounts with Bank Indonesia and other Banks, placement with Bank Indonesia and other Banks, and securities.

The *roll rate transition matrix* method uses the historical transition *bucket* PD. PD buckets used in historical calculations are as follows:

1. *Bucket* 1: 0 day past due (DPD)
2. *Bucket* 2: 1 – 30 DPD
3. *Bucket* 3: 31 – 60 DPD
4. *Bucket* 4: 61 – 89 DPD
5. *Bucket* 5: > 89 DPD, or restructured financial assets (*restructuring flag*), or has a collectability rating of 3, 4, or 5.

A *forward looking macroeconomic adjustment* is made to the PD to determine the *forward looking PD* based on the historical relationship between the macroeconomic and LPEI PD value.

b. Loss given default (LGD)

Loss given default (LGD) is the estimated loss by calculating the *recoverable amount* through collateral after the debtor has defaulted. The *recovery date* is calculated by considering the *time value of money* from the repayment of the defaulted obligation. The interest rate used to calculate the *time value of money* is the *effective interest rate (EIR)*.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.q. Cadangan kerugian penurunan nilai
(lanjutan)**

LGD dihitung dengan mempertimbangkan *forward looking adjustment* berdasarkan hubungan historis antara makroekonomi dengan nilai LGD LPEI. Jika tidak terdapat hubungan antara makroekonomi dengan nilai LGD LPEI, maka LPEI dapat tidak menggunakan *forward looking* dalam penentuan nilai LGD.

c. Exposure at default (EAD)

Dalam menentukan nilai EAD dari setiap debitur, LPEI mempertimbangkan *expected lifetime*. EAD menggambarkan *exposure* yang akan ditanggung LPEI jika terdapat debitur yang *default*.

Expected lifetime adalah pendekatan yang mempelajari *behaviour* dari tingkat penyelesaian fasilitas (lunas atau *write off*) debitur dibandingkan dengan jadwal penyelesaian fasilitas.

d. Expected credit loss (ECL)

Secara umum, formula untuk menghitung ECL secara kolektif adalah perkalian antara PD, LGD, dan EAD.

Dalam menghitung besarnya cadangan kerugian penurunan nilai kolektif, LPEI menggunakan nilai *outstanding* aset keuangan dari yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai masing-masing *stage* sesuai pada karakteristik *staging*. Metode perhitungan pada masing-masing tahapan adalah sebagai berikut:

- Tahap 1: kerugian kredit ekspektasian 12 bulan
- Tahap 2: kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya
- Tahap 3: kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.q. Allowance for impairment losses
(continued)**

LGD is calculated by considering *forward looking adjustments* based on the historical relationship between macroeconomics and the LPEI LGD value. If there is no macroeconomic relationship with the LPEI LGD value, then the LPEI may not use *forward looking* in determining the LGD value.

c. Exposure at default (EAD)

In determining the EAD value of each debtor, LPEI considers the *expected lifetime*. EAD describes the *exposure* that will be borne by LPEI if a debtor has defaulted.

The *expected lifetime* is an approach that studies the behavior of the debtor's facility settlement rate (paid off or written off) compared to the facility completion schedule.

d. Expected credit loss (ECL)

In general, the formula for calculating ECL collectively is the multiplication of PD, LGD, and EAD.

In calculating the amount of collective impairment loss, LPEI uses the *outstanding* value of collectively assessed financial assets.

The impairment loss is calculated based on the criteria of respective stages according to the criteria stated above. The calculation method for respective stages are as follows:

- Stage 1: 12-months expected credit loss (ECL)
- Stage 2: Lifetime ECL
- Stage 3: Lifetime ECL

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.q. Cadangan kerugian penurunan nilai
(lanjutan)**

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah porsi aset keuangan yang mungkin akan *default* dalam 12 bulan ke depan.

Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya adalah ekspektasi kerugian yang merupakan hasil dari kejadian *default* selama umur aset keuangan atau sesuai dengan sisa tenor fasilitas.

Faktor diskonto yang digunakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian adalah suku bunga efektif (EIR).

Probabilitas rata-rata tertimbang (*probability weighted*) dalam perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai ditentukan LPEI yang mencakup skenario optimis, normal, dan pesimis.

Total rata-rata tertimbang (*weighted*) atas estimasi *cashflow* dimaksud menjadi pengurang atas nilai tercatat aset keuangan, yang dimana selisihnya akan menjadi cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan.

Estimasi dan asumsi yang digunakan untuk menghitung cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan dan piutang berdasarkan PSAK 109 diungkapkan dalam Catatan 3b.2.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah yang dinilai secara kolektif dan individual dihitung berdasarkan PSAK 402 "Akuntansi Murabahah" dan ISAK 402 "Penurunan Nilai Piutang Murabahah".

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.q. Allowance for impairment losses
(continued)**

The 12 months ECL is the portion of the financial asset possibly defaulting within the next 12 months.

The ECL lifetime is the expected credit loss that result from default events over the expected life of the financial asset or according to the remaining tenor of the facility.

The discount factor used to calculate ECL is effective interest rate (EIR).

The probability weighted calculation of ECL is determined by LPEI which consists of optimistic, normal, and pessimistic scenarios.

The total weighted cash flow estimation is deducted from the financial asset's carrying amount, where the difference between the weighted average cashflow estimation to the carrying value of the financial asset will result in the impairment loss of the financial assets.

The estimates and assumptions used to calculate allowance for impairment losses on financing and receivables based on PSAK 109 are disclosed in Note 3b.2.

Allowance for impairment losses on murabahah receivables that are assessed collectively and individually is calculated based on PSAK 402 "Murabahah Accounting" and ISAK 402 "Impairment of Murabahah Receivables".

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.q. Cadangan kerugian penurunan nilai
(lanjutan)**

Aset Keuangan yang Direstrukturisasi

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

- i. Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.
- ii. Jika restrukturisasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah ini dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

Aset Keuangan yang Memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, LPEI menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.q. Allowance for impairment losses
(continued)**

Restructured Financial Assets

If the terms of the financial assets are renegotiated or modified or the existing financial assets are replaced with new ones due to the borrower's financial difficulties, an assessment is made whether recognition of existing financial assets must be derecognized and expected credit losses measured as follows:

- i. If the restructuring does not result in the termination of recognition of existing assets, then the estimated cash flows arising from the modified financial assets are included in the calculation of cash shortages of existing assets.*
- ii. If the restructuring will result in a derecognition of the existing assets, the fair value of the new asset is treated as the final cash flow of the existing financial assets at the time of derecognition. This amount is included in the calculation of cash shortages from existing financial assets which are discounted from the date of derecognition to the reporting date using the initial effective interest rate of the existing financial assets.*

Deteriorating Financial Assets

At each reporting date, LPEI assesses whether the financial assets recorded at amortized cost and the financial assets of debt instruments which are recorded at fair value through other comprehensive income are credit impaired (worsening). Financial assets deteriorate when one or more events that have an adverse effect on the estimated future cash flows of the financial assets have occurred.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.q. Cadangan kerugian penurunan nilai
(lanjutan)**

Aset Keuangan yang Memburuk (lanjutan)

Bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi wanprestasi atau tunggakan pembayaran oleh debitur, restrukturisasi kredit, atau tagihan oleh LPEI dengan persyaratan yang tidak mungkin diberikan jika debitur tidak mengalami kesulitan keuangan, indikasi bahwa debitur atau penerbit akan dinyatakan pailit, hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan, atau data yang dapat diobservasi lainnya yang terkait dengan kelompok aset keuangan seperti memburuknya status pembayaran debitur atau penerbit dalam kelompok tersebut, atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk (Purchased or Originated Credit Impaired Financial Assets - POCI)

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari cadangan kerugian penurunan nilai.

Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian dalam Laporan Posisi Keuangan

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

- i. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan komitmen pinjaman, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Summary of Significant Accounting
Policies (continued)**

**2.q. Allowance for impairment losses
(continued)**

Deteriorating Financial Assets (continued)

Objective evidence that financial assets are impaired can include default or delinquency by a debtor, restructuring of a loan, or receivable by LPEI on terms that the LPEI would not otherwise consider if the debtor is not experiencing financial difficulties, indications that a borrower or issuer will enter bankruptcy, the disappearance of an active market for a security due to financial difficulties, or other observable data relating to a group of assets such as adverse changes in the payment status of borrowers or issuers in the group, or economic conditions that correlate with defaults in the group.

Credit-impaired Financial Assets (Purchased or originated credit impaired financial assets – POCI)

Financial assets are categorized as POCI if there is objective evidence of impairment at initial recognition. At initial recognition, no allowance for credit losses is recognized because the purchase price or value has included lifetime estimated credit losses. Furthermore, changes in lifetime credit losses, whether positive or negative, are recognized in the statement of profit or loss as part of the allowance for impairment losses.

Presentation of Allowance for Expected Credit Losses in Statements of Financial Position

Allowance for expected credit losses is presented in the statement of financial positions as follows:

- i. Financial assets measured at amortized cost and loan commitments, allowance for expected credit losses is presented as a deduction from the gross carrying amount of the asset;

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.q. Cadangan kerugian penurunan nilai
(lanjutan)**

Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit
Ekspektasian dalam Laporan Posisi
Keuangan (lanjutan)

- ii. Instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian, penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan

Ketika pinjaman yang diberikan tidak tertagih, pinjaman yang diberikan tersebut dihapusbukukan dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan tersebut dapat dihapusbukukan setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan diakui sebagai pendapatan operasional selain pendapatan bunga.

Aset keuangan syariah

Untuk aset keuangan unit usaha Pembiayaan Syariah, kecuali transaksi murabahah, LPEI Syariah menerapkan POJK No. 9/POJK.05/2022 tentang Pengawasan LPEI dalam menentukan kerugian penurunan nilai.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan

LPEI menerapkan PSAK 236 "Penurunan Nilai Aset", yang menetapkan prosedur-prosedur yang diterapkan LPEI agar aset dicatat tidak melebihi jumlah aset yang dapat dipulihkan.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.q. Allowance for impairment losses
(continued)**

Presentation of Allowance for Expected Credit
Losses in Statements of Financial Position
(continued)

- ii. Debt instruments measured at fair value through other comprehensive income, allowance for expected credit losses are not recognized in the statement of financial position because the carrying amounts of these assets are at their fair values. However, allowance for expected credit losses is disclosed and recognized in other comprehensive income.

Recoveries of written-off financial assets

When a loan is uncollectible, it is written-off against the related allowance for impairment loss. Such loans are written-off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined.

Recoveries of written-off financial assets are recognized as operational income other than interest income.

Sharia financial assets

For the financial assets of the business unit that is engaged in Sharia Financing, except for Murabahah transactions, LPEI Sharia applies POJK No. 9/POJK.05/2022 on Supervising and Monitoring of LPEI for determination of impairment loss.

Allowance for impairment losses on non-financial assets

LPEI applied PSAK 236 "Impairment of Asset", that states the procedures applicable for LPEI so that the amount of assets recorded do not exceed the assets recoverable amount.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.q. Cadangan kerugian penurunan nilai
(lanjutan)**

Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset
non-keuangan (lanjutan)

PSAK ini juga yang menentukan kapan LPEI membalik suatu rugi penurunan nilai dan pengungkapan yang diperlukan.

Pada setiap tanggal pelaporan, LPEI melakukan penilaian apakah terdapat indikasi bahwa aset non-keuangan mungkin mengalami penurunan nilai. Ketika sebuah indikator penurunan nilai ada atau ketika sebuah pengujian penurunan nilai tahunan untuk aset diperlukan, LPEI membuat estimasi resmi atas jumlah terpulihkan.

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi dari nilai wajar aset (atau unit penghasil kas) setelah dikurangi besarnya biaya pelepasan dibandingkan dengan nilai pakainya, dan ditentukan untuk aset individu, kecuali aset tersebut menghasilkan arus kas masuk yang tidak tergantung lagi dari aset yang lain atau kumpulan aset, yang dalam hal jumlah terpulihkan dinilai sebagai bagian dari unit penghasil kas. Apabila nilai tercatat suatu aset (atau unit penghasil kas) melebihi jumlah terpulihkan, maka aset (atau unit penghasil kas) tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat dipulihkan.

Dalam menilai nilai pakai suatu aset, estimasi terhadap arus kas dipulihkan di masa depan akan didiskontokan menjadi nilai kini dengan menggunakan tingkat suku bunga diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar terhadap nilai waktu dari uang (*time value of money*) dan risiko spesifik aset (atau unit penghasil kas) tersebut.

Kerugian penurunan nilai akan dibebankan pada tahun yang bersangkutan, kecuali aset tersebut telah dicatat sebesar jumlah yang direvaluasi, dalam hal ini kerugian penurunan nilai tersebut akan dibebankan langsung ke dalam selisih penilaian kembali aset bersangkutan.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.q. Allowance for impairment losses
(continued)**

Allowance for impairment losses on non-
financial assets (continued)

The PSAK also states that when LPEI is able to offset the loss from impairment and the disclosures needed.

At each reporting date, LPEI assesses whether there is any indication that its non-financial assets may be impaired. When an indicator of impairment exists or when an annual impairment testing for an asset is required, LPEI makes a formal estimate of recoverable amount.

Recoverable amount is the higher of an asset's or Cash Generating Unit (CGU)'s fair value less costs of disposal and its value in use and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets, in which case the recoverable amount is assessed as part of the CGU to which it belongs. Where the carrying amount of an asset (or CGU) exceeds its recoverable amount, the asset (or CGU) is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

In assessing value in use of assets, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pretax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset (or CGU).

An impairment loss is charged to operations on the year in which it arises, unless the asset is carried at a revalued amount, in which case the impairment loss is charged to the revaluation increment of the said asset.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.q. Cadangan kerugian penurunan nilai
(lanjutan)**

Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset
non-keuangan (lanjutan)

Penelaahan dilakukan pada setiap tanggal pelaporan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa pengakuan kerugian penurunan nilai sebelumnya mungkin tidak lagi ada atau telah menurun. Apabila terdapat indikasi tersebut, maka jumlah terpulihkan akan diestimasi. Kerugian penurunan nilai yang sebelumnya telah diakui akan dibalik hanya jika telah terjadi perubahan dalam estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset sejak kerugian penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, nilai tercatat aset akan ditingkatkan sejumlah nilai terpulihkan.

Perhitungan cadangan klaim atas aktivitas penjaminan telah dihitung berdasarkan perhitungan aktuaris.

2.r. Kontrak penjaminan

Kontrak penjaminan yang memenuhi definisi kontrak penjaminan keuangan yang tercantum dalam PSAK 109 dicatat dalam kontrak penjaminan keuangan berdasarkan PSAK 109.

Kontrak penjaminan yang tidak memenuhi definisi kontrak penjaminan keuangan dalam PSAK 109, dicatat berdasarkan PSAK 237.

Piutang yang timbul dari proses penyelesaian klaim dari kontrak garansi dengan menggunakan akta pengakuan utang dicatat sebagai aset keuangan apabila memenuhi definisi aset keuangan sesuai PSAK 109 jika probabilitas keterlambatan tinggi.

Piutang penjaminan ulang adalah piutang kepada perusahaan penjaminan ulang sehubungan dengan pembayaran klaim yang menjadi tanggungan perusahaan penjaminan ulang. Setiap periode pelaporan LPEI menelaah penurunan piutang secara berkala, dimana jika terdapat bukti objektif bahwa piutang tersebut menurun, maka LPEI mengurangi nilai tercatat piutang sebesar yang dapat dipulihkan dan mengakui rugi penurunan nilai dalam laporan laba rugi konsolidasian.

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.q. Allowance for impairment losses
(continued)**

Allowance for impairment losses on non-
financial assets (continued)

An assesment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss is reversed only if there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount.

The calculation of estimated guarantee claim was calculated based on actuary calculation.

2.r. Guarantee contracts

Guarantee contracts that meets the definition of financial guarantee contracts laid out in PSAK 109 is recorded as financial guarantee contract based on PSAK 109.

Guarantee contracts that do not meet the definition of financial guarantee contracts under PSAK 109, are recorded for under PSAK 237.

Receivables resulting from guarantee contracts claim which is settled with debentures are recorded as financial assets if they meet the definition of financial asset following PSAK 109 if estimated that the likelihood of collection is high.

Reguarantee receivables are receivables to the reinsurance company in connection with the payment of claims that are the responsibility of the reguarantee company. Each reporting period LPEI reviews the decline in receivables periodically, where if there is objective evidence that the receivables are decreasing, then LPEI reduce the carrying amount of the receivables by the amount that can be recovered and recognizes an impairment loss in the consolidated income statement.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

2.r. Kontrak penjaminan (lanjutan)

Liabilitas yang timbul dari kontrak penjaminan keuangan diakui sebesar nilai wajar pada saat pengakuan awal. Jika kontrak jaminan keuangan diterbitkan untuk pihak yang tidak berelasi dalam suatu transaksi yang wajar (*arm's length transaction*) yang berdiri sendiri, nilai wajarnya pada saat dimulainya transaksi kemungkinan sama dengan *guarantee fee* yang diterima, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya. Setelah pengakuan awal, jumlah di dalam liabilitas kontrak jaminan keuangan diukur pada jumlah yang lebih tinggi antara jumlah yang diakui provisi dan jumlah yang diakui pada saat pengakuan awal dikurangi amortisasi kumulatif (jika sesuai).

Liabilitas yang timbul atas suatu klaim yang telah disetujui namun belum dibayarkan akan dicatat sebagai utang klaim. Pendapatan *fee* kontrak penjaminan keuangan diakui sebagai pendapatan selama periode penjaminan.

2.s. Piutang asuransi, liabilitas asuransi, dan utang asuransi

Piutang asuransi merupakan tagihan premi kepada tertanggung/agen/broker dan perusahaan asuransi (*ceding company*) pada tanggal pelaporan keuangan.

Liabilitas asuransi meliputi estimasi klaim, dan premi belum merupakan pendapatan, serta pendapatan premi ditangguhkan. Estimasi klaim adalah estimasi jumlah kewajiban yang menjadi tanggungan sehubungan dengan klaim yang dilaporkan masih dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan (IBNR).

Cadangan yang terkait dengan klaim dilaporkan masih dalam proses penyelesaian menunjukkan biaya akhir atas klaim yang dilaporkan, namun belum disetujui pada tanggal pelaporan.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

2.r. Guarantee contracts (continued)

Liabilities arising from financial guarantee contracts are recognized at fair value at initial recognition. If the financial guarantee contract was issued to an unrelated party in a stand-alone arm's length transaction, its fair value at inception is likely to guarantee fee received, unless there is evidence to the contrary. After initial recognition, the amount of financial guarantee contract liabilities are measured at the higher of the provision amount recognized and amount initially recognized less cumulative amortization (when appropriate).

Liabilities incurred on claims approved but have not been paid are recorded as claims payable. Guarantee fees from financial guarantee contracts are recognized as revenue over the period of the guarantee.

2.s. Insurance receivables, insurance liabilities, and insurance payables

Insurance receivables represent premium charges due from the insured/agent/broker and insurer (ceding company) as of the reporting date.

Insurance liabilities include estimated claims, and unearned premiums, and deferred premium income. Estimated claims are based on the estimated ultimate cost of all claims incurred but not settled, including claims incurred but not reported (IBNR).

Reserves associated with claims reported but have not been settled represents the ultimate cost of claims that were reported, but is yet to be approved as of the reporting date.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.s. Piutang asuransi, liabilitas asuransi, dan
utang asuransi (lanjutan)**

IBNR adalah bagian dari klaim dimana kejadian yang diasuransikan telah terjadi namun asuradur belum memperoleh pemberitahuan atas klaim. Walaupun asuradur belum diberitahu mengenai klaim tersebut sebelum akhir tahun buku, pencadangan biaya atas klaim tersebut diperlukan untuk memenuhi konsep kehati-hatian dan konsep penandingan (*matching concept*).

Utang asuransi terdiri dari utang premi reasuransi, utang komisi, dan utang klaim.

Utang premi termasuk di antaranya adalah:

- Kewajiban pembayaran premi kepada reasuradur, sebagai akibat adanya transaksi reasuransi yang dilakukan dengan pihak reasuradur.
- Kewajiban pembayaran premi kepada koasuransi.

Utang klaim merupakan klaim yang telah disetujui namun belum dibayarkan kepada tertanggung dari transaksi asuransi langsung atau koasuransi.

Utang klaim diakui saat klaim disetujui untuk dibayar.

Utang klaim dihentikan pengakuannya saat kewajiban telah berakhir, dilepaskan, atau dibatalkan.

2.t. Aset reasuransi

Aset reasuransi adalah nilai hak kontraktual neto cedant dalam perjanjian reasuransi. Aset reasuransi terdiri dari estimasi penggantian reasuransi atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian, estimasi penggantian reasuransi atas klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, porsi reasuransi atas liabilitas premi asuransi, dan porsi reasuransi atas klaim yang disetujui untuk dibayar (piutang reasuransi). Aset reasuransi diukur secara konsisten dengan jumlah yang terkait dengan asuransi yang mendasari sesuai dengan jangka waktu kontrak reasuransi.

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.s. Insurance receivables, insurance liabilities,
and insurance payables (continued)**

IBNR is the element of claims where the insured event has occurred but where the insurer has yet to be notified of a claim. Although the insurer has not yet been notified of these claims before the end of the financial year, the cost of these claims are provided to comply with both the prudence and the matching concept.

Insurance payables consist of reinsurance premium payables, commission payables, and claims payables.

Premium payables includes:

- Premium payment obligations to the reinsurer, as a result of reinsurance transactions with reinsurers.
- Premium payment obligations due to coinsurers.

Claims payable is represents claims agreed but have not been paid to the insured arising from either direct insurance or coinsurance.

Claims payable is recognized when the claim is approved for payment.

Claims payable is derecognized when the obligation expires, is discharged, or cancelled.

2.t. Reinsurance assets

Reinsurance assets is a cedant's net contractual rights under a reinsurance contract. Reinsurance assets is consist of estimated reinsurance reimbursement for claims that are still in the process of completion, estimated reinsurance reimbursement for claims incurred but not yet reported, the portion of reinsurance premiums on liability insurance, and reinsurance portion of claims approved for payment (reinsurance receivables). Reinsurance assets are measured consistently with the amounts associated with the underlying insurance in accordance with the terms of the reinsurance contract.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

2.t. Aset reasuransi (lanjutan)

Setiap tanggal pelaporan, LPEI mengevaluasi apakah aset reasuransi mengalami penurunan nilai. Aset reasuransi mengalami penurunan nilai jika terdapat bukti objektif yang menunjukkan adanya kemungkinan besar LPEI tidak mendapatkan jumlah yang tertagih kepada reasuradur. Kerugian penurunan nilai diakui sebagai beban di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

2.u. Tagihan dan liabilitas akseptasi

Tagihan dan liabilitas akseptasi dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Tagihan akseptasi disajikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

2.v. Aset tetap, Aset Hak Guna, dan Liabilitas Sewa

Aset Tetap

Harga perolehan awal atas aset tetap terdiri dari harga beli dan semua biaya langsung yang dapat diatribusikan untuk membuat aset dalam kondisi siap pakai dan berlokasi di tempat yang digunakan. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai.

Pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu dikapitalisasi sebagai biaya penggantian atas jumlah tercatat (*carrying amount*) aset tetap sebagai suatu penggantian, jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi, diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat, dan metode penyusutan aset ditelaah kembali dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

2.t. Reinsurance assets (continued)

At each reporting date, LPEI assesses whether reinsurance assets are impaired. Reinsurance assets are impaired if objective evidence is available to suggest that it is probable that LPEI will not be able to collect the amounts due from reinsurers. The impairment loss is recognized as an expense in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

2.u. Acceptances receivable and payable

Acceptances receivable and payable are stated at amortized cost. Acceptances receivable is stated net of allowance for impairment losses.

2.v. Premises and Equipment, Right-of-Use-Assets, and Lease Liability

Premises and Equipment

The initial cost of premises and equipment consists of its purchase price and any directly attributable costs of bringing the asset to its working condition and location for its intended use. Cost includes the replacement cost of a part of the premises and equipment when the expenditure meets the criteria for recognition. Premises and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment loss.

When a significant inspection of the asset is performed, the cost of inspection is capitalized as part of the replacement cost of the asset's carrying amount if the criteria for recognition are met. All maintenance and repair costs which do not fulfill the capitalization criteria, are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income upon occurrence.

At each statement of financial position date, the assets' residual values, useful lives, and methods of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively as appropriate.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.v. Aset tetap, Aset Hak Guna, dan Liabilitas
Sewa (lanjutan)**

Aset Tetap (lanjutan)

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat aset tetap yang diestimasi sebagai berikut.

	Tahun/ Years
Gedung	20
Peralatan dan perlengkapan kantor	5
Kendaraan bermotor	5
Perangkat lunak & perangkat keras	5 - 10

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat pekerjaan aset tersebut telah selesai dan siap untuk digunakan.

Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai yang dipakai.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya dihapuskan dari akun tersebut. Keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi.

Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa

LPEI mengakui liabilitas sewa, sebagai pembayaran sewa yang tersisa termasuk atas opsi perpanjangan dimana perpanjangan hampir dapat dipastikan, didiskontokan menggunakan tingkat bunga pinjaman inkremental pada tanggal penerapan awal. Sedangkan aset hak guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dibayarkan, biaya pemulihan, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai sewa, dikurangi insentif sewa yang diterima.

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.v. Premises and Equipment, Right-of-Use-
Assets, and Lease Liability (continued)**

Premises and Equipment (continued)

Depreciation is calculated on a straight-line method over the estimated useful lives of the assets as follows.

Persentase/ Percentage	
5%	Building
20%	Office furniture and fixtures
20%	Motor vehicles
10% - 20%	Software & hardware

Construction in progress is stated at cost. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate premises and equipment account when the construction is substantially completed and the asset constructed is ready for its intended use.

When the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down to its recoverable amount, which is determined as the higher of the net selling price or value in use.

When premises and equipment are retired or disposed of, their costs and the related accumulated depreciation are derecognized from the accounts. Any resulting gain or loss is recognized in statement of profit or loss.

Right-of-use-Assets and Lease Liabilities

LPEI recognized a lease liability, being the remaining lease payments including extensions options where renewal is reasonably certain, discounted using the incremental borrowing rate at the date of initial application. Meanwhile, rights of use assets include the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs paid, recovery costs, and lease payments made on or before the start date of the lease, less rental incentives received.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.v. Aset tetap, Aset Hak Guna, dan Liabilitas
Sewa (lanjutan)**

**Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa
(lanjutan)**

Beban keuangan dicatat dalam laba rugi. Aset hak guna (disajikan sebagai bagian aset tetap) disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewa dan periode masa sewa, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa LPEI akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

2.w. Aset yang diambil alih

Aset yang diambil alih (AYDA) adalah aset yang diperoleh LPEI, baik melalui pelelangan, maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada LPEI dan diselesaikan melalui penjualan. AYDA merupakan jaminan kredit yang diberikan yang telah diambil alih sebagai bagian dari penyelesaian kredit yang diberikan. LPEI memiliki kebijakan untuk selalu berusaha menjual AYDA untuk menyelesaikan sisa kewajiban debitur.

AYDA diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realisable value*), yaitu nilai wajar agunan setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan.

LPEI membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas AYDA berdasarkan kualitas atas aset, yaitu:

- 1) 15% (lima belas persen) untuk kualitas kurang lancar, yaitu dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
- 2) 50% (lima puluh persen) untuk kualitas aset diragukan, yaitu dimiliki lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun;
- 3) 100% (seratus persen) untuk kualitas aset macet, yaitu dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.v. Premises and Equipment, Right-of-Use-
Assets, and Lease Liability (continued)**

**Right-of-use-Assets and Lease Liabilities
(continued)**

Finance expense is recorded in profit or loss. Right of used assets (presented under premises and equipment) are depreciated over the shorter of the estimated useful life of the assets and the lease term, if there is no reasonable certainty that LPEI will obtain ownership by the end of the lease term.

2.w. Foreclosed Assets

Foreclosed assets represent assets acquired by LPEI, both from auction and non-auction based on voluntary transfer by the debtors or based on debtors' approval to sell the collateral where the debtors could not fulfill their obligations to LPEI and is settled through a sale. Foreclosed assets represent loan collateral acquired in settlement of loans. LPEI has policy to sell foreclosed assets to settle debtors' liabilities.

Foreclosed assets are recognised at their net realisable value. Net realisable value is the fair value of the foreclosed assets less estimated cost of liquidating the foreclosed assets.

The allowance for impairment made on foreclosed assets is based on its asset quality:

- 1) 15% (fifteen percent) for substandard assets, which are owned for more than 1 (one) year up to 3 (three) years;
- 2) 50% (fifty percent) for doubtful assets, which are owned for more than 3 (three) years up to 5 (five) years;
- 3) 100% (one hundred percent) for non performing assests, which are owned for more than 5 (five) years.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

2.w. Aset yang diambil alih (lanjutan)

Biaya pemeliharaan atas AYDA yang terjadi setelah pengambilalihan atau akuisisi aset dibebankan sebagai laba/rugi pada saat terjadinya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset yang diambil alih diakui sebagai laba/rugi periode berjalan.

2.x. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka, diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

2.y. Piutang setoran modal

Piutang setoran modal merupakan tagihan kepada Pemerintah Republik Indonesia atas penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada LPEI yang berlaku efektif pada Tahun berjalan berdasarkan suatu dokumen resmi dari Pemerintah atau Kementerian Keuangan, namun penyetoran dananya belum diterima pada rekening LPEI pada tahun efektif. Piutang setoran modal diakui sebesar nilai penambahan modal di LPEI.

2.z. Liabilitas segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas LPEI kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas segera diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan.

2.aa. Efek-efek utang yang diterbitkan

Efek-efek utang yang diterbitkan terdiri dari surat pengakuan utang yang diterbitkan oleh LPEI berupa obligasi yang diperdagangkan di pasar modal. Obligasi yang diterbitkan disajikan sebesar nilai tercatat dengan biaya perolehan yang belum diamortisasi.

Beban yang berkaitan dengan penerbitan obligasi diakui sebagai diskonto dan dikurangkan langsung dari hasil emisi dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

Pinjaman diterima merupakan dana yang diterima dari bank atau pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

2.w. Foreclosed Assets (continued)

Maintenance costs of foreclosed assets subsequent to the foreclosure or acquisition of the assets are charged as current year profit/loss as incurred. Gains or losses from sale of foreclosed assets are charged as current period profit/loss as incurred.

2.x. Prepaid expenses

Prepaid expenses, are amortized over its benefited periods using the straight-line method.

2.y. Capital deposit receivables

Capital deposit receivables represent receivables from Government of The Republic of Indonesia for additional Government Capital Contribution to LPEI effective on the current year based on an official document from the Government of Indonesia or The Ministry of Finance, where the funds has not been received on the effective year. Capital deposit receivables are recognized at the value of the additional capital to LPEI.

2.z. Current liabilities

Current liabilities represent LPEI's obligations to outside parties which should be settled immediately based on predetermined instructions by those having the authority. Current Liabilities are recorded at amortized cost. This account is classified as financial liabilities.

2.aa. Debt securities issued

Debt securities issued consist of obligations of LPEI in the form of bonds traded in the capital market. Bonds are stated at their carrying value, net of unamortized cost.

Expenses related to bonds issuance are recognized as discount, directly deducted from the net proceeds of the bonds issuance and amortized over the term of the bonds using the effective interest method.

Fund borrowings are funds received from banks or other parties with repayment obligation based on the borrowing agreement.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

2.ab. Pinjaman yang diterima

Pinjaman diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal pinjaman diterima dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

2.ac. Provisi

Provisi diakui jika LPEI memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah liabilitas tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidak terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan liabilitas tersebut, provisi tidak diakui.

2.ad. Pendapatan dan beban bunga

Sebelum terjadinya penurunan nilai (tahap 1 dan 2), pendapatan bunga dihitung menggunakan metode EIR yaitu dengan menerapkan suku bunga efektif atas jumlah tercatat bruto aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk.

Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai (tahap 3 atau POCI) dilakukan dengan menerapkan EIR atas jumlah tercatat neto aset keuangan, yaitu jumlah *outstanding* setelah dikurangi dengan kerugian akibat penurunan nilai untuk:

- a. Aset keuangan yang dibeli atau berasal dari aset keuangan memburuk (POCI)
Untuk aset keuangan tersebut, LPEI menerapkan suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit (*risk adjusted effective interest rate*) atas biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan sejak pengakuan awal.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

2.ab. Fund borrowings

Borrowings are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of borrowings and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

2.ac. Provision

Provisions are recognized when LPEI has current liability (both legal or constructive) as a result of past events with high profitability of settlement by outflow of resources with economic benefits and a reliable estimate of the amount of liability can be made.

Provisions are reviewed at the end of each reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If there is no probable outflow of resources to settle these liabilities, provision is not recognized.

2.ad. Interest income and expense

Prior to impairment (stages 1 and 2), interest income is calculated using the EIR method, namely by applying an effective interest rate on the gross carrying amount of financial assets except for financial assets purchased or originating from credit impaired financial assets.

Interest income on impaired financial assets (stage 3 or POCI) is calculated by applying EIR to the net carrying amount of financial assets, namely the outstanding amount after deducting losses due to impairment for:

- a. *Financial assets purchased or originating from deteriorating financial assets (POCI)
For these financial assets, LPEI applies an effective interest rate that is adjusted to credit risk (risk adjusted effective interest rate) on the amortized cost of financial assets since initial disclosure.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

2.ad. Pendapatan dan beban bunga (lanjutan)

b. Tahap 3

Untuk aset keuangan tersebut, LPEI menerapkan suku bunga efektif atas biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan di periode pelaporan, yaitu nilai yang telah dikurangi kerugian akibat penurunan nilai.

Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai (tahap 3 atau POCI) dilakukan dengan menerapkan EIR atas jumlah tercatat neto aset keuangan, yaitu jumlah *outstanding* setelah dikurangi dengan kerugian akibat penurunan nilai.

Pendapatan bunga selanjutnya diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa depan dalam pengukuran kerugian penurunan nilai atau yang disebut dengan *unwinding interest*.

2.ae. Pendapatan provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pembiayaan dan piutang, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan metode suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pendapatan ini mencakup provisi dan komisi.

Pendapatan atau komponen pendapatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit atau suatu jangka waktu dan/atau terkait dengan pemberian suatu jasa, diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi dan dicatat pada akun pendapatan operasional lainnya.

2.af. Pendapatan asuransi lainnya

LPEI mengakui pendapatan asuransi seperti komisi yang diperoleh dari transaksi reasuransi dan pendapatan lainnya sebagai pendapatan asuransi lainnya.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

2.ad. Interest income and expense (continued)

b. Stage 3

For these financial assets, LPEI applies an effective interest rate on the amortized cost of financial assets in the reporting period, namely the value that has been reduced by losses due to impairment.

Interest income on impaired financial assets (stage 3 or POCI) is calculated by applying EIR to the net carrying amount of financial assets, namely the outstanding amount after deducting losses due to impairment.

Interest income is subsequently recognized based on the interest rate used to discount future cash flows in measuring impairment losses or what is known as *unwinding interest*.

2.ae. Fees and commission income

Fees and commissions directly related to financing and receivables activities, or fees and commissions income which relate to a specific period are amortized over the term of the contract using the effective interest method and classified as part of interest income in the statement of profit or loss and other comprehensive income. These fees include provision and commission.

Fees or component of fees that are not linked to loan financing activities or to a certain period and/or in regards to a service performed, is directly recognized as income when performance obligations are met and is accounted as other operational income.

2.af. Other insurance income

LPEI recognized insurance income such as commission received from reinsurance transaction and other income as other insurance income.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.ag. Pendapatan bagi hasil dan beban bonus
secara syariah**

Pendapatan usaha syariah merupakan pendapatan margin murabahah, pembiayaan musyarakah dan pendapatan dari ijarah serta aset produktif lainnya yang diakui dengan menggunakan metode akrual kecuali untuk pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Beban bonus secara syariah merupakan distribusi bonus dan bagi hasil kepada pemilik dana yang diakui berdasarkan metode akrual.

Pendapatan margin murabahah diakui menggunakan metode suku bunga efektif dengan mempertimbangkan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Jumlah pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan/piutang syariah dan dari aset produktif lainnya yang akan dibagikan kepada debitur penyimpan dana dan LPEI dihitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana debitur dan LPEI yang dipakai dalam piutang murabahah dan pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan dan aset produktif lainnya yang disalurkan.

Pendapatan ijarah diakui selama masa akad secara merata sejak aset tersedia sampai periode akhir akad.

Dari jumlah pendapatan margin dan bagi hasil yang tersedia untuk debitur tersebut kemudian dibagikan ke nasabah sebagai "shahibul maal" dan LPEI sebagai "mudharib" sesuai dengan porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang memakai dana LPEI, seluruhnya menjadi milik LPEI.

Jumlah pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan/piutang syariah dan dari aset produktif lainnya yang akan dibagikan kepada debitur penyimpan dana dan LPEI dihitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana debitur dan LPEI yang dipakai dalam piutang murabahah dan pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan dan aset produktif lainnya yang disalurkan.

Pendapatan ijarah diakui selama masa akad secara proporsional.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.ag. Sharia profit sharing income and bonus
expenses**

Sharia income represents margin income from murabahah, musyarakah financing, and income from ijarah and other earning assets which are recognized on an accrual basis except for income derived from profit sharing. Sharia bonus expenses consist of bonus distribution and profit-sharing to fund owners which are recognized on an accrual basis.

Murabahah margin is recognized using the effective interest rate method taking into consideration directly attributable transaction costs.

Total margin income and profit sharing on the sharia financing/receivables transactions and from other earning assets to be distributed to debtors of fund owners and LPEI are computed based on the proportion of funds from the debtors and LPEI used to finance the murabahah receivables and mudharabah and musyarakah financing and other earning assets.

Income from ijarah is recognized evenly over the contract period from the time the asset become available until the end of the period.

The total available margin and profit sharing are distributed to debtors as "shahibul maal" (owner of funds) and to LPEI as "mudharib" (fund manager) in accordance with a pre-determined ratio (nisbah).

Margin income and profit sharing from financing and other earning assets which use LPEI's funds belong to LPEI as a whole.

Total margin income and profit sharing on the sharia financing/receivables transactions and from other earning assets to be distributed to debtors of fund owners and LPEI are computed based on the proportion of funds from the debtors and LPEI used to finance the murabahah receivables and mudharabah and musyarakah financing and other earning assets.

Income from ijarah is recognised proportionately over the contract period.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.ah. Pengakuan pendapatan dan beban
asuransi pendapatan premi**

Premi yang diterima dari kontrak asuransi diakui sebagai pendapatan selama periode polis (kontrak) berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan. Premi dari polis bersama diakui sebesar pada bagian kepemilikan premi LPEI.

Premi yang diterima dari kontrak jangka pendek asuransi ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan secara individual ke masa pertanggungan.

Bagian tahun berjalan atas premi dari kontrak jangka panjang asuransi dicatat dengan cara yang sama seperti yang diterima untuk jangka pendek. Bagian premi tahun-tahun berikutnya ditangguhkan.

Beban klaim

Klaim meliputi klaim disetujui (*settled claims*), klaim penjaminan, klaim dalam proses penyelesaian termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, dan beban penyelesaian klaim. Klaim tersebut diakui sebagai beban pada saat timbulnya liabilitas untuk memenuhi klaim. Hak subrogasi diakui sebagai pengurang beban klaim pada saat realisasi.

Jumlah klaim dalam proses penyelesaian (estimasi klaim) ditentukan berdasarkan estimasi kerugian dari klaim masih dalam proses di tanggal pelaporan, termasuk klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan. Perubahan estimasi klaim diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode terjadinya perubahan. Kenaikan (penurunan) estimasi klaim adalah selisih antara estimasi klaim tahun berjalan dan tahun lalu.

Beban klaim menunjukkan jumlah klaim bruto, klaim reasuransi, dan kenaikan (penurunan) estimasi klaim. Klaim reasuransi disajikan sebagai pengurang klaim bruto.

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.ah. Insurance revenue and expense
recognition premium income**

Premium received from insurance contracts are recognized as income during the policy period (contracts) in proportion to the insurance coverage provided. Premiums from coinsurance policy is recognized based on LPEI's proportionate share of the premium.

Premium received from short-term insurance contracts are deferred and recognized as income on an individual basis over the coverage period.

Current portion of premium received from long-term insurance contracts are accounted for in the same manner as those received for short-term insurance contract. Portion for following years is deferred.

Claim expenses

Claims consist of settled claims, guarantee claims, outstanding claims including claims incurred but not yet reported, and claim settlement expenses. Claims are recognized as expenses when the liabilities to cover claims have been incurred. Subrogated rights are recognized as deduction from claim expenses upon realization.

Claims in process (estimated claims) are computed based on estimated loss from claims that are still in process at reporting date, including claims incurred but not yet reported. Changes in estimated claims are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income at the time of change. Increase (decrease) in estimated claims represents the difference between the balance of estimated claims in the current year and prior year.

Claim expenses represent gross claims, reinsurance claims, and increase (decrease) in estimated claims. Reinsurance claims are presented as deduction from gross claims.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.ah. Pengakuan pendapatan dan beban
asuransi pendapatan premi (lanjutan)**

Beban klaim (lanjutan)

Estimasi klaim yang diperkirakan akan diselesaikan lebih dari satu tahun setelah akhir periode harus memperhitungkan pengaruh nilai waktu uang. Perubahan dalam estimasi liabilitas klaim sebagai hasil dari proses penelaahan lebih lanjut diakui berdasarkan perbedaan antara periode berjalan dan periode kewajiban klaim sebelumnya.

2.ai. Program dana pensiun dan imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek, bonus, dan imbalan non-moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program pensiun iuran pasti

Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah iuran pensiun yang akan diterima oleh pegawai pada saat pensiun, biasanya berdasarkan pada satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja, dan kompensasi.

LPEI menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh pegawai tetap. Kontribusi LPEI adalah sebesar 6%, sedangkan kontribusi pegawai adalah sebesar 4% yang dihitung berdasarkan penghasilan dasar bulanan pegawai. Kontribusi LPEI terhadap dana pensiun dicatat sebagai beban pada saat terjadinya.

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.ah. Insurance revenue and expense
recognition premium income (continued)**

Claim expenses (continued)

Estimated claims that are expected to be settled for more than one year after the end of the period must take into account the effect of time value of money. Changes in the estimated claims liabilities as a result of further review process are recognized based on the the difference between the current period and the prior period claims liability.

2.ai. Pension plan and employee benefits

Short-term employee benefits

Short-term employee benefit such a wages, social security contribution, short-term leave, bonuses, and other non-monetary benefit are recognized over the service rendered. Short-term employee benefit is measured using undiscounted amount.

Defined contribution pension

A defined contribution pension plan is a pension plan program where the pension amount to be received by employees at the time of retirement, usually depends on one or more factors such as age, years of service, and compensation.

LPEI has a defined benefit pension plan covering all of its permanent employees. LPEI and the employees' contributions are computed at 6% and 4%, respectively, of the employees' monthly basic salaries. LPEI's contributions to the retirement plan are recognized as expense when incurred.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.ai. Program dana pensiun dan imbalan kerja
(lanjutan)**

Program pensiun Imbalan pasti

Manfaat program pensiun imbalan pasti ditentukan secara aktuarial menggunakan Metode Kredit Unit Proyeksi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya, terdiri atas:

- (i) Keuntungan dan kerugian aktuarial;
- (ii) Imbal hasil atas aset program tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset);
- (iii) Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).

Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amandemen atau *curtailment* program terjadi, dan ketika biaya restrukturisasi atau pesangon diakui, sehingga biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode *vesting* masa depan.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Imbalan kerja jangka panjang lainnya dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan yang digunakan dalam perhitungan imbalan pascakerja program imbalan pasti, yaitu dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini, kecuali untuk pengukuran kembali yang diakui pada laba rugi

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.ai. Pension plan and employee benefits
(continued)**

Defined benefit pension

Defined benefit pension plan are actuarially determined using the Projected Unit Credit Method.

Remeasurement of net defined benefit liabilities (assets), which is recognized as other comprehensive income and not reclassified to profit or loss in subsequent periods, consist of:

- (i) Actuarial gains and losses;
- (ii) Return on plan assets excluding amounts that included in net interest on liabilities (assets);
- (iii) The changes in the impact of the asset ceiling, excluding amounts that included in net interest on liabilities (assets).

All past service costs are recognised at the earlier of when the amendment or curtailment occurs, and when the related restructuring or termination costs are recognized, as a result, unvested past service cost can no longer be deferred and recognised over the future vesting period.

Other long-term employee benefits

Other long-term employee benefits is calculated using the same methodology as used in calculating post-employment benefits for defined benefit plans, which is using the projected unit credit method and discounted to their present value, except for remeasurements which are recognised in profit or loss.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

**2.aj. Transaksi dan saldo dalam mata uang
asing**

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam nilai Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal posisi keuangan, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs *Spot Reuters* pada pukul 16.00 WIB. *Reuters* adalah salah satu sumber kurs penutupan yang diakui oleh Bank Indonesia dan PSAK.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

Laba atau rugi kurs valuta asing atas aset dan liabilitas moneter merupakan selisih antara biaya perolehan diamortisasi dalam rupiah pada awal tahun, disesuaikan dengan tingkat suku bunga efektif dan pembayaran selama tahun berjalan, dan biaya perolehan diamortisasi dalam valuta asing yang dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs pada akhir tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, kurs yang digunakan adalah sebagai berikut:

	2024
Dolar Amerika Serikat	16,095
Euro Eropa	16,758
100 Yen Jepang	103
Dolar Singapura	11,845
Ringgit Malaysia	3,598

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

**2.aj. Foreign currency transactions and
balances**

Transactions in foreign currencies are recorded in Rupiah at the exchange rates prevailing at the time of the transaction. At financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated to Rupiah at the Reuters' spot exchange rates at 04.00 PM (West Indonesian local time). Reuters is one of the recognized sources of closing rate by Bank of Indonesia and PSAK.

Exchange gains and losses arising from transactions denominated in foreign currencies and from the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in profit or loss for the current year.

The foreign currency gains or losses on monetary assets and liabilities are the difference between amortized cost in rupiah at the beginning of the year, adjusted for effective interest rate and payments during the year, and the amortized cost in foreign currency translated into rupiah using the exchange rate at the end of the year.

As of December 31, 2024 and 2023, the exchange rates used are as follows:

	2023	
	15,397	United States Dollars
	17,038	European Euro
	10,888	100 Japanese Yen
	11,676	Singapore Dollars
	3,355	Malaysian Ringgit

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

2.ak. Pajak Penghasilan

Pajak kini merupakan estimasi utang atau pengembalian pajak yang dihitung atas laba atau rugi kena pajak untuk tahun yang bersangkutan dengan menggunakan tarif pajak yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan dan termasuk penyesuaian yang dibuat untuk penyisihan pajak tahun sebelumnya, baik untuk merekonsiliasi pajak penghasilan dengan pajak yang dilaporkan di surat pemberitahuan tahunan, atau untuk memperhitungkan perbedaan yang muncul dari pemeriksaan pajak.

Utang atau restitusi pajak kini diukur menggunakan estimasi terbaik atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar atau diterima, dengan mempertimbangkan ketidakpastian terkait dengan kompleksitas peraturan pajak.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas, kecuali perbedaan yang dikenakan pajak final. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan diterapkan pada periode aset atau liabilitas tersebut direalisasi atau diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan-peraturan pajak) yang berlaku atau secara substansi telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dikreditkan atau dibebankan pada laba rugi tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

2.ak. Income Tax

Current tax is the expected tax payable or refundable on taxable income or loss for the year using tax rates substantively enacted as of the reporting date and includes true-up adjustments made to the previous years' tax provisions either to reconcile them with the income tax reported in annual tax returns, or to account for differences arising from tax assessments.

Current tax payable or refundable is measured using the best estimate of the amount expected to be paid or received, taking into consideration the uncertainty associated with the complexity of tax regulations.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases, except those differences that are subject to final tax. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences while deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to be applied to the period when the assets or liabilities are realized or settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at statements of financial position date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rate are credited or charged to current year profit or loss, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

2.ak. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus di laporan keuangan, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Pajak penghasilan tangguhan dihitung dengan menggunakan metode posisi keuangan, terhadap semua perbedaan temporer pada tanggal laporan posisi keuangan antara aset dan liabilitas menurut pajak dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan.

2.al. Informasi segmen

Informasi segmen diungkapkan untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana LPEI terlibat dalam lingkungan ekonomi dimana LPEI beroperasi.

LPEI menentukan dan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang secara internal diberikan kepada pengambil keputusan operasional.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari LPEI:

- a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b) hasil operasinya dikaji ulang secara *regular* oleh pengambil keputusan operasional LPEI untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

LPEI hanya beroperasi dalam usaha perbankan konvensional dan syariah dan hanya beroperasi di Indonesia tanpa cabang. Sehingga, LPEI tidak menyajikan informasi pelaporan segmen berdasarkan wilayah geografis operasi.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

2.ak. Income Tax (continued)

Deferred tax assets and liabilities are presented on a mutually deleted basis in the financial statements, except for deferred tax assets and liabilities for different entities according to the current presentation of tax assets and liabilities.

Deferred income tax is calculated using the financial position method, on all temporary differences at the statement of financial position date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes.

2.al. Segment information

Segment information is disclosed to enable users of financial statement to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which LPEI is involved in and the economic environment where LPEI operates.

LPEI determines and presents operating segments based on the information that is internally provided to the chief operating decision maker.

An operating segment is a component of LPEI:

- a) that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);*
- b) whose operating results are reviewed regularly by the LPEI's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and*
- c) for which discrete financial information is available.*

LPEI only operates in the the business of conventional banking and sharia and only operates in Indonesia without any branches. Therefore, LPEI cannot present reporting information segment by the operation geographical area.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material
(lanjutan)**

2.a. Informasi Segmen (lanjutan)

Pendapatan, beban, hasil, aset, dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut.

3. Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi Akuntansi Signifikan

a. Pertimbangan akuntansi yang signifikan

1. Usaha yang berkelanjutan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi LPEI, manajemen telah menggunakan pertimbangan dan estimasi dalam menentukan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Manajemen telah melakukan penilaian atas kemampuan LPEI untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa LPEI memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan LPEI untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh sebab itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

2. Nilai wajar atas instrumen keuangan

Apabila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika statistik.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**2. Material Accounting Policies Information
(continued)**

2.a. Segment Information (continued)

Income, costs, outcome, assets, and liabilities segment include items that directly attributable to a certain segment and also matters that can be allocated with the basis appropriate to specified segment.

3. Significant Accounting Judgments, Estimates, and Assumptions

a. Significant accounting judgments

1. Going concern

In the process of implementing LPEI's accounting policies, management has exercised judgments and estimates in determining the amounts recognized in the financial statements.

The management has assessed LPEI's ability to continue as a going concern and believes that LPEI has the resources to continue its business in the future. In addition, management was not aware of any material uncertainty which may cast significant doubt to LPEI's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements have been prepared on a going concern basis.

2. Fair value of financial instruments

If the fair value of financial assets and financial liabilities recorded in the financial position is not available in an active market, the fair value is determined using various valuation techniques including the use of statistical mathematical model.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**3. Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi
Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

**a. Pertimbangan akuntansi yang
signifikan (lanjutan)**

**2. Nilai wajar atas instrumen keuangan
(lanjutan)**

Masukan (*input*) untuk model ini berasal dari data pasar yang dapat diobservasi. Bila data pasar yang dapat diobservasi tersebut tidak tersedia, manajemen mempertimbangkan masukan dan asumsi yang diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan seperti model umpan balik likuiditas dan volatilitas untuk transaksi derivatif dan tingkat diskonto jangka panjang, tingkat pelunasan dipercepat, dan asumsi tingkat gagal bayar.

3. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

LPEI menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK 109 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi LPEI seperti diungkapkan pada Catatan 2f.

4. Klasifikasi produk asuransi dan penjaminan

Produk LPEI berupa "Penjaminan Indonesia Eximbank" dan "Penjaminan Kepabeanan" dicatat sesuai dengan ketentuan di PSAK 237 karena produk-produk tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai kontrak penjaminan keuangan berdasarkan PSAK 109 dan tidak memenuhi kualifikasi sebagai kontrak asuransi berdasarkan PSAK 104 disebabkan tidak terdapat risiko asuransi yang signifikan.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**3. Significant Accounting Judgments,
Estimates, and Assumptions (continued)**

**a. Significant accounting judgments
(continued)**

**2. Fair value of financial instruments
(continued)**

The input for this model comes from observable market data. When observable market data are not available, management considers necessary inputs and assumptions to determine the fair value. Considerations include considerations such as liquidity and volatility feedback model for derivative transactions and long term discount rate, the level of early payment, and the level of default assumption.

3. Classification of financial assets and liabilities

LPEI specifies certain classification of assets and liabilities with consideration whether the definition specified by the PSAK 109 is fulfilled. Therefore, financial assets and liabilities have been recognized in accordance with the accounting policies of LPEI stated in Note 2f.

4. Classification of insurance products and guarantees

LPEI's "Indonesia Eximbank Guarantee" and "Customs Guarantee" products are accounted for in accordance with PSAK 237 as they are not financial guarantee contract under PSAK 109 and do not qualify as insurance contract under PSAK 104 due to the lack of significant insurance risk.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**3. Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi
Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

**a. Pertimbangan akuntansi yang
signifikan (lanjutan)**

**4. Klasifikasi produk asuransi dan
penjaminan (lanjutan)**

“Asuransi Proteksi Piutang Dagang” dicatat sesuai dengan ketentuan di PSAK 328 dan PSAK 104 karena merupakan kontrak asuransi dan LPEI telah mencatat produk tersebut sebagai kontrak asuransi dan memiliki intensi meneruskan perlakuan tersebut.

5. Penilaian mata uang fungsional

Manajemen menggunakan pertimbangan-nya untuk menentukan mata uang fungsional LPEI yang dapat merepresentasikan secara benar efek ekonomi dari transaksi yang mendasarinya, peristiwa, dan kondisi yang relevan dengan LPEI.

Dalam pembuatan pertimbangan tersebut, LPEI memperhatikan hal-hal berikut:

- a. mata uang yang sangat mempengaruhi harga jual untuk instrumen keuangan dan jasa-jasa (ini sering kali menjadi mata uang yang digunakan, yaitu mata uang dimana harga jual instrumen keuangan dan jasa-jasa didenominasi dan direalisasikan);
- b. mata uang atas dana yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan; dan
- c. mata uang dimana penerimaan dari kegiatan operasi biasanya didapatkan.

b. Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya diungkapkan di bawah ini.

**3. Significant Accounting Judgments,
Estimates, and Assumptions (continued)**

**a. Significant accounting judgments
(continued)**

**4. Classification of insurance products
and guarantees (continued)**

“Accounts Receivable Protection Insurance” is recorded in accordance with PSAK 328 and PSAK 104 because it is an insurance contract and LPEI has recorded the product as insurance contract and intended to continue such accounting treatment.

5. Assessment of functional currency

The management uses its judgment to determine LPEI's functional currency which faithfully represents the economic effects of the underlying transactions, events, and conditions that are relevant to LPEI.

In making this judgment, LPEI considers the following:

- a. the currency that mainly influences sales prices for financial instruments and services (this will often be the currency in which sales prices for its financial instruments and services are denominated and settled);
- b. the currency in which funds from financing activities are generated; and
- c. the currency in which receipts from operating activities are usually retained.

b. Estimates and assumptions

Future main assumption and main source of other uncertainty estimates on the reporting date which might have significant risk of material adjustment to the recorded asset and liabilities for the coming period are disclosed below.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**3. Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi
Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

LPEI mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali LPEI. Perubahan tersebut dicerminkan dalam estimasi dan asumsi terkait pada saat terjadinya.

1. Metode penyusutan dan masa manfaat aset tetap

Untuk kepentingan perhitungan penyusutan, nilai sisa untuk semua aset tetap, kecuali ada catatan lain untuk aset tertentu, harus lebih besar dari Rp1 (nilai penuh). LPEI melakukan peninjauan kembali atas nilai sisa, umur manfaat, dan metode penyusutan yang ditetapkan untuk setiap aset tetap minimum pada setiap akhir tahun buku. Taksiran masa manfaat dari aset tetap diungkapkan dalam Catatan 2v.

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis untuk gedung dan peralatan dan perabotan, masing-masing adalah 20 tahun dan 5 tahun.

Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana LPEI menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Lihat Catatan 14 untuk nilai buku atas aset tetap LPEI pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**3. Significant Accounting Judgments,
Estimates, and Assumptions (continued)**

b. Estimates and assumptions (continued)

LPEI based its assumptions and estimates on the provided parameter during the preparation of financial statements. The assumptions and situations regarding the future development may change due to market changes or circumstances beyond the control of LPEI. Such changes are reflected in the estimates and assumptions when they occur.

1. Depreciation method and useful lives of premises and equipment

For depreciation calculation purposes, the residual value for all premises and equipment, unless there is another note for a particular asset, must be greater than Rp1 (full value). LPEI reviews the residual value, useful life, and depreciation method set for each minimum premises and equipment at the end of each financial year. The estimated useful life of premises and equipment is disclosed in Note 2v.

Premises and equipment are depreciated using the straight-line method based on the economic useful life. Management estimates that the useful life of building and premises and equipment, are 20 years and 5 years, respectively.

This is the expected average useful life in the industry where LPEI operates. Changes in the level of usage and technology development may affect the economic useful life and also the residual value of the assets and therefore, and future depreciation costs may be revised. Refer to Note 14 for book value of LPEI's premises and equipment as of December 31, 2024 and 2023.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**3. Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi
Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

**2. Cadangan kerugian penurunan nilai
atas pembiayaan dan piutang**

Evaluasi atas kerugian penurunan nilai aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dijelaskan di Catatan 2q.

Komponen cadangan kerugian penurunan nilai debitur tertentu dalam total cadangan kerugian penurunan nilai berlaku pada tagihan yang penurunan nilainya dievaluasi secara individual berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai tunai arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas ini, manajemen membuat pertimbangan mengenai kondisi keuangan dari debitur dan nilai bersih yang dapat direalisasi dari agunan yang diterima dengan lebih dari satu skenario. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dievaluasi berdasarkan kinerjanya dan strategi penyelesaiannya serta estimasi arus kas yang dinilai dapat diperoleh kembali secara independen disetujui oleh Satuan Kerja Analisis Risiko dan Kredit *Reviewer*.

Evaluasi cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat pada portofolio tagihan dengan karakteristik ekonomi yang serupa ketika terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai tagihan dalam portofolio tersebut, namun penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menentukan perlunya membentuk cadangan kerugian penurunan nilai kredit secara kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit, besarnya portofolio, konsentrasi kredit, dan faktor-faktor ekonomi.

Dalam mengestimasi cadangan yang dibutuhkan, asumsi-asumsi dibuat untuk menentukan model kerugian bawaan dan untuk menentukan parameter *input* yang diperlukan, berdasarkan pengalaman historis dan kondisi ekonomi saat ini.

**3. Significant Accounting Judgments,
Estimates, and Assumptions (continued)**

**b. Estimates and assumptions
(continued)**

**2. Allowance for impairment losses on
financing and receivables**

Financial assets accounted for at amortized cost are evaluated for impairment on a basis described in Note 2q.

The specific counterparty component of the total allowances for impairment applies to claims evaluated individually for impairment and is based upon management's best estimate of the present value of the cash flows that are expected to be received. In estimating these cash flows, management makes judgments about the counterparty's financial situation and the net realizable value of any underlying collateral received in more than one scenario. Impaired asset is assessed on its merits, and the workout strategy and estimate of cash flows considered recoverable are independently approved by the Risk Analysis and Credit Reviewer Unit.

Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of claims with similar economic characteristics when there is objective evidence to suggest that they contain impaired claims, but the individual impaired items cannot yet be identified. In assessing the need for collective loan loss allowances, management considers factors such as credit quality, portfolio size, credit concentrations, and economic factors.

In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modeled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**3. Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi
Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

**3. Imbalan pascakerja dan imbalan kerja
jangka panjang lainnya**

Ketepatan dari cadangan ini tergantung pada seberapa tepat estimasi arus kas masa depan untuk menentukan cadangan individual serta asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

Penentuan liabilitas imbalan pascakerja serta imbalan jangka panjang lainnya, tergantung pada pemilihan asumsi-asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaria untuk menghitung estimasi tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri pegawai tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun, dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan LPEI langsung diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya. Sementara, LPEI berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Lihat Catatan 30 untuk nilai tercatat atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja pada 31 Desember 2024 dan 2023.

4. Penurunan nilai efek-efek ekuitas yang diakui pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

LPEI menelaah aset keuangan mereka pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain berdasarkan PSAK 109 yang mengharuskan untuk mengakui kerugian kredit ekspektasian pada setiap tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit dari aset keuangan tidak pada nilai wajar melalui laba rugi. PSAK 109 menggabungkan informasi *forward-looking* dan historis, terkini dan yang diperkirakan ke dalam estimasi kerugian kredit ekspektasian.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**3. Significant Accounting Judgments,
Estimates, and Assumptions (continued)**

b. Estimates and assumptions (continued)

**3. Post-employment benefit and other
long term employee benefits**

The accuracy of the allowances depends on how well the estimated future cash flows are determined for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

The determination liabilities post employment benefit and also other long term employee benefits depend on the assumptions used by the actuary in calculating the estimation. Those assumptions include discount rate, annual salary increases rate, annual resignation rate, level of disability, retirement age, and mortality rate. Difference in the actual result and assumption of LPEI is recognized in the profit or loss by the time of occurrence. While, LPEI believes that the assumptions are fair and appropriate, there could be a significant difference between the actual result or change in estimation on the pension and employee benefit and net employee benefit expense. Refer to Note 30 for carrying amount of estimated liabilities on employee benefit as of December 31, 2024 and 2023.

**4. Impairment of equity securities
classifies as fair value through other
comprehensive income**

LPEI review their financial assets at fair value through other comprehensive income under PSAK 109 which required to recognise the expected credit loss at each reporting date to reflect changes in credit risk of the financial assets not at fair value through profit or loss. PSAK 109 incorporates forward-looking and historical, current and forecasted information into expected credit loss estimation.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**3. Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi
Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

**4. Penurunan nilai efek-efek ekuitas yang
diakui pada nilai wajar melalui
penghasilan komprehensif lain
(lanjutan)**

Dalam melakukan peninjauan penurunan nilai, penilaian manajemen berikut diperlukan:

- i. Penentuan apakah aset mengalami penurunan nilai berdasarkan indikator tertentu seperti kesulitan keuangan debitur dan penurunan kualitas kredit; dan
- ii. Penentuan umur kredit ekspektasian yang mencerminkan:
 - a. Jumlah yang tidak bisa dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi kemungkinan dari berbagai hasil;
 - b. Nilai waktu dari uang; dan
 - c. Informasi yang masuk akal dan dapat didukung yang tersedia tanpa biaya atau usaha yang tidak semestinya pada tanggal pelaporan tentang peristiwa masa lalu, kondisi saat ini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Nilai tercatat efek-efek ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta cadangan kerugian penurunan nilai diungkapkan dalam Catatan 7.

5. Penurunan nilai aset non-keuangan

Dalam mengidentifikasi terdapat atau tidaknya penurunan nilai aset, LPEI mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

1. terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik aset;
2. perubahan signifikan yang bersifat merugikan sehubungan dengan cara penggunaan aset;
3. terdapat bukti bahwa kinerja ekonomi aset tidak memenuhi harapan atau lebih buruk dari yang diharapkan;
4. arus kas sesungguhnya secara material lebih kecil dari arus kas taksiran, sebelum perhitungkan diskonto.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**3. Significant Accounting Judgments,
Estimates, and Assumptions (continued)**

b. Estimates and assumptions (continued)

**4. Impairment of equity securities
classified as fair value through other
comprehensive income (continued)**

In carrying out the impairment review, the following management's judgements are required:

- i. *Determination whether the assets is impaired based on certain indicators such as financial difficulties of the debtor's and deterioration of the credit quality of the debtor's; and*
- ii. *Determination of expected credit life that reflect:*
 - a. *An unbiased and probability-weighted amount that is determined by evaluating a range of possible outcomes;*
 - b. *The time value of money; and*
 - c. *Reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions, and forecasts of future economic conditions.*

The carrying value of fair value through other comprehensive income equity securities and allowance for impairment losses are disclosed in Note 7.

5. Impairment of non-financial assets

In assessing the possibility of impairment of non-financial assets, LPEI considers these factors:

1. *evidence of obsolescence or physical damage on assets;*
2. *significant changes which might negatively affect the use of the assets;*
3. *evidence that the assets economical performance is worse than expected;*
4. *the cash flow which is materially less than expected cash flow, before any discount.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**3. Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi
Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

6. Pengakuan aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh saldo rugi fiskal yang belum digunakan sejauh terdapat kemungkinan bahwa saldo rugi tersebut dapat dikompensasikan terhadap penghasilan kena pajak di masa yang akan datang. Pertimbangan manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan saat dan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang seiring dengan strategi perencanaan pajak.

LPEI menelaah aset pajak tangguhan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan mengurangi jumlah tercatat dalam hal tidak adanya lagi kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak yang cukup akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan.

Mengacu kepada Catatan 16d tentang aset pajak tangguhan.

7. Estimasi Klaim Penjaminan

Pada setiap tanggal pelaporan, LPEI menelaah kewajibannya atas potensi klaim atas risiko-risiko yang ditanggung LPEI dalam perjanjian penjaminan untuk menilai apakah suatu liabilitas harus diakui dalam laporan keuangan. LPEI mencatat estimasi klaim penjaminan berdasarkan metode tertentu sesuai standar akuntansi keuangan di Indonesia. Hasil aktual yang berbeda dari hasil perhitungan LPEI akan dibebankan ke laba rugi tahun berjalan. Sementara LPEI berkeyakinan bahwa hasil perhitungan tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual akan dapat memengaruhi secara material laba ruginya.

**3. Significant Accounting Judgments,
Estimates, and Assumptions (continued)**

b. Estimates and assumptions (continued)

6. Recognition of deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses to the extent that it is probable that taxable income will be available against which the losses can be utilized. Significant management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and level of future taxable income together with future tax planning strategies.

LPEI reviews their deferred tax assets at each statement of financial position date and reduce the carrying amount to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.

Refer to Note 16d for the deferred tax assets.

7. Estimated Guarantee Claim

At each reporting date, LPEI assess its for potential claim on risks covered by the LPEI under guarantee agreements to determine whether such liabilities should be recognised in the financial statements. LPEI records estimated guarantee claim based on a certain method based on accounting standards in Indonesia. Actual results that differ from LPEI's calculation result will be charged to profit or loss for the year. While LPEI believes that its calculation results are reasonable and appropriate, significant differences in the actual results may materially affect its profit and loss.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**3. Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi
Akuntansi Signifikan (lanjutan)**

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

8. Liabilitas Asuransi

LPEI mencatat liabilitas asuransi berdasarkan metode perhitungan tertentu yang berlaku umum di Indonesia. Asumsi utama yang mendasari metode tersebut adalah pengalaman klaim masa lalu LPEI. Hasil aktual yang berbeda dari hasil perhitungan LPEI akan dibebankan ke laba rugi tahun berjalan. Sementara LPEI berkeyakinan bahwa hasil perhitungan tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual akan dapat mempengaruhi secara material laba ruginya.

9. Menentukan jangka waktu kontrak dengan opsi perpanjangan dan penghentian kontrak LPEI sebagai penyewa

LPEI menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu yang tidak dapat dibatalkan bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang masa sewa jika dipastikan akan dilaksanakan atau periode apa pun yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa jika cukup wajar untuk dilakukan.

LPEI memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan penghentian jangka waktu sewa. LPEI menerapkan penilaian dalam mengevaluasi apakah dapat dipastikan jika akan menggunakan opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh fakta atau keadaan yang relevan yang memberikan insentif ekonomi untuk melakukan perpanjangan atau penghentian sewa. Setelah tanggal dimulainya, LPEI menilai kembali masa sewa jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan dalam keadaan yang berada dalam kendali dan memengaruhi apakah *lessee* cukup pasti untuk mengeksekusi opsi memperpanjang atau menghentikan sewa.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**3. Significant Accounting Judgments,
Estimates, and Assumptions (continued)**

b. Estimates and assumptions (continued)

8. Insurance Liabilities

LPEI records insurance liabilities based on a certain calculation method which generally applied in Indonesia. The main assumption underlying this method is LPEI's past claim experience. Actual results that differ from LPEI's calculation result will be charged to profit or loss for the year. While LPEI believes that its calculation results are reasonable and appropriate, significant differences in the actual results may materially affect its profit and loss.

9. Determining the term of the contract with the option of contract extension and termination LPEI as lessee

The LPEI determines the lease term as the term that cannot be canceled together with the period covered by the option to extend the lease if it is determined to be implemented, or any period covered by the option to terminate the lease if it is reasonable to do so.

LPEI has several rental contracts that include options for extension and termination of the lease term. LPEI applies an assessment in evaluating whether it can be ascertained if it will use the option to extend or terminate the lease. This is done by considering all relevant facts or circumstances that provide economic incentives to extend or terminate the lease. After the commencement date, LPEI reassesses the lease term if there is a significant event or change in circumstances which is under its control and affects whether the lessee is certain enough to exercise the option to extend or terminate the lease.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

4. Giro pada Bank Indonesia

	2024	2023
Rupiah	775	553
Total	775	553

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, LPEI memiliki saldo giro pada Bank Indonesia untuk keperluan transfer dana *Real Time Gross Settlement (RTGS)*.

4. Current Account with Bank Indonesia

	2023
Rupiah	553
Total	553

As of December 31, 2024 and 2023, LPEI has current account with Bank Indonesia for Real Time Gross Settlement (RTGS) transfer of funds.

5. Giro pada Bank

a. Berdasarkan *counterparties* dan mata uang

	2024		2023	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional amount in Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional amount in Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
Rupiah				
Pihak berelasi (Catatan 39)				
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk		35,720		21
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		15,478		21,781
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		3,045		2,700
PT Bank Syariah Indonesia Tbk		2,943		1,993
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		649		807
		<u>57,835</u>		<u>27,302</u>
Pihak ketiga				
PT Bank Danamon Indonesia Tbk		633		--
PT Bank Jabar Banten Syariah		518		516
PT Bank Central Asia Tbk		99		100
PT Bank CIMB Niaga Tbk		1		6
		<u>1,251</u>		<u>622</u>
		<u>59,086</u>		<u>27,924</u>
Mata uang asing				
Dolar Amerika Serikat				
Pihak berelasi (Catatan 39)				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,076,144	17,321	1,963,305	30,229
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	210,749	3,392	529,843	8,158
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	111,663	1,797	301,942	4,649
		<u>22,510</u>		<u>43,036</u>
Pihak ketiga				
Standard Chartered Bank, New York	69,809,530	1,123,584	1,220,562	18,793
PT Bank KB Bukopin Tbk	118,399	1,906	118,335	1,822
JP Morgan Chase Bank	105,173	1,693	865,558	13,327
The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd., Jakarta	9,228	149	9,223	142
PT Bank ICBC Indonesia	5,866	94	5,845	90
PT Bank Central Asia Tbk	4,758	77	4,741	73
PT Bank Pan Indonesia Tbk	723	12	844	13
PT Bank CIMB Niaga Tbk	445	7	585	9
Citibank, N.A, Jakarta	--	--	9,352	144
		<u>1,127,522</u>		<u>34,413</u>

Rupiah
Related parties (Note 39)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Third parties
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Jabar Banten Syariah
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Foreign currencies
United States Dollars
Related parties (Note 39)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Third parties
Standard Chartered Bank, New York
PT Bank KB Bukopin Tbk
JP Morgan Chase bank
The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd., Jakarta
PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Citibank, N.A, Jakarta

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

5. Giro pada Bank (lanjutan)

a. Berdasarkan counterparties dan mata uang (lanjutan)

	2024	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional amount in Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
Euro Eropa		
Pihak berelasi (Catatan 39)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	75,287	1,262
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	400	7
		1,269
Pihak ketiga		
Commerzbank Aktiengesellschaft	139,861	2,344
Citibank, N.A., Jakarta	--	--
		2,344
Yen Jepang		
Pihak berelasi (Catatan 39)		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,422,015	147
Pihak ketiga		
Citibank, N.A., Jakarta	--	--
Ringgit Malaysia		
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1,171,335	4,214
Dolar Singapura		
Pihak ketiga		
Overseas-Chinese Banking Corporation		
Bank (OCBC) Ltd., Singapura	16,688	198
		1,158,204
		1,217,290
		(4)
Cadangan kerugian penurunan nilai		
Total		1,217,286

Termasuk dalam giro pada bank adalah giro pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, pihak berelasi (Catatan 39) sehubungan dengan Penugasan Khusus. Pemanfaatan jumlah tersebut dibatasi untuk Program NIA, sebesar Rp16.259 dan Rp23.533 masing-masing per 31 Desember 2024 dan 2023.

b. Berdasarkan tahap dan cadangan kerugian penurunan nilai

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

	2024			
	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Jumlah/ Total
Saldo awal	108,258	--	--	108,258
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--	--
Perpindahan antar tahapan	--	--	--	--
Pengukuran kembali nilai tercatat bersih	--	--	--	--
Aset baru	1,217,290	--	--	1,217,290
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(108,258)	--	--	(108,258)
Penyesuaian mata uang asing	--	--	--	--
Saldo akhir	1,217,290	--	--	1,217,290

5. Current Accounts with Banks (continued)

a. By counterparties and currencies (continued)

	2023	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional amount in Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
European Euro		
Related parties (Note 39)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	--
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	528	9
		9
Third parties		
Commerzbank Aktiengesellschaft	145,378	2,477
Citibank, N.A., Jakarta	411	7
		2,484
Japanese Yen		
Related parties (Note 39)		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	110,218	12
Third parties		
Citibank, N.A., Jakarta	1,313,433	143
Malaysian Ringgit		
PT Bank CIMB Niaga Tbk	--	--
Singapore Dollar		
Third party		
Overseas-Chinese Banking Corporation Bank (OCBC) Ltd., Singapore	20,296	237
		80,334
		108,258
		(2)
Allowance for impairment losses		
Total		108,256

Included in current accounts with banks is current account in PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, a related party (Note 39) in relation with National Interest Account. The utilization of such amount is restricted for NIA Program, amounting to Rp16,259 and Rp23,533 as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

d. By stage and allowance for impairment losses

The movements in the gross carrying amount are as follows:

Beginning balance
Transfer to stage 1 -
Transfer to stage 2 -
Transfer to stage 3 -
Transfer within stages

Net remeasurement of carrying value
New assets originated
Asset derecognized or repaid
Foreign exchange adjustment
Ending balance

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

5. Giro pada Bank (lanjutan)

**b. Berdasarkan tahap dan cadangan
kerugian penurunan nilai (lanjutan)**

2023			
Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Jumlah/ Total
Saldo awal	180,647	--	180,647
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--
Perpindahan antar tahapan	--	--	--
Pengukuran kembali nilai tercatat bersih	(72,003)	--	(72,003)
Aset baru	114	--	114
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(13)	--	(13)
Penyesuaian mata uang asing	(487)	--	(487)
Saldo akhir	108,258	--	108,258

Cadangan kerugian penurunan nilai
dibentuk terhadap saldo giro pada bank lain,
sebagai berikut:

5. Current Accounts with Banks (continued)

**b. By stage and allowance for impairment
losses (continued)**

Beginning balance
Transfer to stage 1 -
Transfer to stage 2 -
Transfer to stage 3 -
Transfer within stages
Net remeasurement of carrying value
New assets originated
Asset derecognized or repaid
Foreign exchange adjustment
Ending balance

Allowance for impairment losses is
provided for balance of current account
with other bank, as follows:

2024			
Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Jumlah/ Total
Saldo awal	2	--	2
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--
Perpindahan antar tahapan	--	--	--
Pengukuran kembali nilai tercatat bersih	--	--	--
Aset baru	5	--	5
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(2)	--	(2)
Total pembentukan tahun berjalan	3	--	3
Penyesuaian mata uang asing	(1)	--	(1)
Saldo akhir	4	--	4

Beginning balance
Transfer to stage 1 -
Transfer to stage 2 -
Transfer to stage 3 -
Transfer within stages
Net remeasurement of carrying value
New assets originated
Asset derecognized or repaid
Total addition current year
Foreign exchange adjustment
Ending balance

2023			
Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Jumlah/ Total
Saldo awal	1	--	1
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--
Perpindahan antar tahapan	--	--	--
Pengukuran kembali nilai tercatat bersih	--	--	--
Aset baru	1	--	1
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	--	--	--
Total pembentukan tahun berjalan	1	--	1
Penyesuaian mata uang asing	--	--	--
Saldo akhir	2	--	2

Beginning balance
Transfer to stage 1 -
Transfer to stage 2 -
Transfer to stage 3 -
Transfer within stages
Net remeasurement of carrying value
New assets originated
Asset derecognized or repaid
Total addition current year
Foreign exchange adjustment
Ending balance

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

5. Giro pada Bank (lanjutan)

b. Berdasarkan tahap dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

LPEI melakukan penilaian giro pada bank secara kolektif dengan mempertimbangkan informasi dan analisis kualitatif dan kuantitatif, berdasarkan pengalaman historis dan penilaian kredit termasuk informasi masa depan.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya penempatan pada bank lain.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai dan mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 33.

c. Kisaran tingkat suku bunga per tahun untuk giro pada bank

	2024
Rupiah	0.00% - 3.00%
Dolar Amerika Serikat	0.00% - 4.32%

Giro pada bank dalam mata uang Euro Eropa, Yen Jepang, dan Dolar Singapura tidak memperoleh bunga.

d. Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK

Kolektibilitas giro pada bank sesuai Peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 43.

5. Current Accounts with Banks (continued)

b. By stage and allowance for impairment losses (continued)

LPEI assesses current accounts with banks collectively by considering qualitative and quantitative information and analysis, based on historical experience and credit assessments including future information.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses arising from uncollectible placement with banks.

Information with respect to classification of not impaired and impaired financial assets are disclosed in Note 33.

c. The range of annual interest rates for current accounts with banks

	2023	
0.00% - 1.90%		Rupiah
0.00%		United States Dollars

The current accounts with banks denominated in European Euro, Japanese Yen, and Singapore Dollar do not bear interest.

d. By Financial Service Authority Rule collectibility

Collectibility current accounts with banks in accordance with Financial Service Authority Rule are disclosed in Note 43.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

5. Giro pada Bank (lanjutan)

e. Giro pada bank yang digunakan sebagai jaminan

Tidak terdapat giro pada bank yang digunakan sebagai jaminan pada 31 Desember 2024 dan 2023.

5. Current Accounts with Banks (continued)

e. Current accounts with banks pledged as collateral

There were no current accounts with banks pledged as collateral as of December 31, 2024 and 2023.

6. Penempatan pada Bank

a. Berdasarkan mata uang, jenis, dan counterparties

6. Placements with Banks

a. By currencies, type, and counterparties

	2024		2023		
	Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional amount in Foreign currencies Ekuivalen/ (Dalam nilai penuh/ Equivalent In full amount) Rupiah		Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional amount in Foreign currencies Ekuivalen/ (Dalam nilai penuh/ Equivalent In full amount) Rupiah		
Rupiah					Rupiah
Deposito berjangka					Time deposit
Pihak berelasi (Catatan 39)					Related parties (Note 39)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		--		1,007,000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk		--		30,000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		--		1,037,000	
Pihak ketiga					Third parties
PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk	861,500		2,726,000		PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk
PT Bank DKI	454,000		1,499,000		PT Bank DKI
PT Bank Mega Tbk	--		950,000		PT Bank Mega Tbk
PT BPD Jambi	--		250,000		PT BPD Jambi
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	--		100,000		PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	--		52,000		PT Bank CIMB Niaga Tbk
	1,315,500		5,577,000		
	1,315,500		6,614,000		
Dolar Amerika Serikat					United States Dollars
Deposito berjangka					Time deposit
Pihak ketiga					Third party
PT Bank Mega Tbk	3,500,000	56,333	--	--	PT Bank Mega Tbk
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	--	--	52,000,000	800,644	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
		56,333		800,644	
Total mata uang asing		56,333		800,644	Total foreign currency
Total		1,371,833		7,414,644	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai		(82)		(396)	Allowance for impairment losses
Neto		1,371,751		7,414,248	Net

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

6. Penempatan pada Bank (lanjutan)

a. Berdasarkan mata uang, jenis, dan counterparties (lanjutan)

Termasuk dalam penempatan pada bank merupakan penempatan sehubungan dengan Penugasan Khusus. Berikut adalah rincian pada 31 Desember 2024 dan 2023:

	2024		2023	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional amount in Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)		Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional amount in Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	
	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah		Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	
Rupiah				
Deposito berjangka				
Pihak berelasi (Catatan 39)				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--		1,007,000	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	--		30,000	
	--		1,037,000	
Pihak ketiga				
PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk	861,500		2,726,000	
PT Bank DKI	454,000		1,499,000	
PT Bank Mega Tbk	--		950,000	
PT BPD Jambi	--		250,000	
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	--		100,000	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	--		52,000	
	1,315,500		5,577,000	
	1,315,500		6,614,000	
Dolar Amerika Serikat				
Deposito berjangka				
Pihak ketiga				
PT Bank Mega Tbk	3,500,000	56,333	--	--
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	--	--	52,000,000	800,644
		56,333		800,644
Total mata uang asing		56,333		800,644
Total		1,371,833		7,414,644
Cadangan kerugian penurunan nilai		(82)		(396)
Neto		1,371,751		7,414,248

b. Berdasarkan periode sisa umur jatuh tempo

Klasifikasi jangka waktu penempatan pada bank berdasarkan periode sisa umur jatuh tempo adalah sebagai berikut:

6. Placements with Banks (continued)

a. By currencies, type, and counterparties (continued)

Included in placements with banks is placement in relations with National Interest Account. The details as of December 31, 2024 and 2023, are as follows:

Rupiah
Time deposit
Related parties (Note 39)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Third parties
PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk
PT Bank DKI
PT Bank Mega Tbk
PT BPD Jambi
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk
United States Dollars
Time deposit
Third party
PT Bank Mega Tbk
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Total foreign currency
Total
Allowance for impairment losses
Net

b. By remaining period to maturity

The details of placements with banks classified as to remaining period to maturity are as follows:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

6. Penempatan pada Bank (lanjutan)

b. Berdasarkan periode sisa umur jatuh tempo (lanjutan)

	2024	2023
Rupiah		
Sampai dengan 1 bulan	1,025,500	6,614,000
1 bulan sampai dengan 3 bulan	290,000	--
Dolar Amerika Serikat		
Sampai dengan 1 bulan	56,333	800,644
	1,371,833	7,414,644
Cadangan kerugian penurunan nilai	(82)	(396)
Total	1,371,751	7,414,248

c. Kisaran tingkat suku bunga per tahun untuk penempatan pada bank

	2024	2023
Rupiah		
Deposito berjangka	5.25% - 7.15%	5.50% - 7.60%
Dolar Amerika Serikat		
Deposito berjangka	5.25%	5.32%

d. Berdasarkan tahap dan cadangan kerugian penurunan nilai

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

	2024			
	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Jumlah/ Total
Saldo awal	7,414,644	--	--	7,414,644
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--	--
Perpindahan antar tahapan	--	--	--	--
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	--	--	--	--
Aset baru	1,371,833	--	--	1,371,833
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(7,414,644)	--	--	(7,414,644)
Penyesuaian mata uang asing	--	--	--	--
Saldo akhir	1,371,833	--	--	1,371,833

Balance, beginning of the year
Transfer to stage 1 -
Transfer to stage 2 -
Transfer to stage 3 -
Transfer within stages

Net remeasurement of carrying value
New assets originated
Asset derecognized or repaid
Foreign exchange adjustment
Ending balance

	2023			
	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Jumlah/ Total
Saldo awal	12,560,764	--	--	12,560,764
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--	--
Perpindahan antar tahapan	--	--	--	--
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	--	--	--	--
Aset baru	6,315,364	--	--	6,315,364
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(11,461,484)	--	--	(11,461,484)
Penyesuaian mata uang asing	--	--	--	--
Saldo akhir	7,414,644	--	--	7,414,644

Beginning balance
Transfer to stage 1 -
Transfer to stage 2 -
Transfer to stage 3 -
Transfer within stages

Net remeasurement of carrying value
New assets originated
Asset derecognized or repaid
Foreign exchange adjustment
Ending balance

6. Placements with Banks (continued)

b. By remaining period to maturity (continued)

Rupiah
Up to 1 month
1 month up to 3 months
United States Dollars
Up to 1 month
Allowance for impairment losses
Total

c. The range of annual interest rates for placement with banks

Rupiah
Time deposit
United States Dollar
Time deposit

d. By stage and allowance for impairment losses

The movements in the gross carrying amount are as follows:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

6. Penempatan pada Bank (lanjutan)

d. Berdasarkan tahap dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk terhadap saldo penempatan pada bank, sebagai berikut:

2024			
Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Jumlah/ Total
Saldo awal	396	--	396
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--
Perpindahan antar tahapan	--	--	--
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	--	--	--
Aset baru	56	--	56
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(396)	--	(396)
Total pembalikan tahun berjalan	(340)	--	(340)
Penyesuaian mata uang asing	26	--	26
Saldo akhir	82	--	82

2023			
Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Jumlah/ Total
Saldo awal	509	--	509
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--
Perpindahan antar tahapan	--	--	--
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	--	--	--
Aset baru	396	--	396
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(509)	--	(509)
Total pembalikan tahun berjalan	(113)	--	(113)
Penyesuaian mata uang asing	--	--	--
Saldo akhir	396	--	396

Beginning balance
Transfer to stage 1 -
Transfer to stage 2 -
Transfer to stage 3 -
Transfer within stages

Net remeasurement of carrying value
New assets originated
Asset derecognized or repaid
Total reverse current year

Foreign exchange adjustment
Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya penempatan pada bank lain.

e. Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK

Kolektibilitas penempatan pada bank sesuai Peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 43.

6. Placements with Banks (continued)

d. By stage and allowance for impairment losses (continued)

Allowance for impairment losses is provided for balance of placement with banks, as follows:

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses arising from uncollectible placement with banks.

e. By Financial Service Authority Rule collectibility

Collectibility placement with banks in accordance with Financial Service Authority Rule are disclosed in Note 43.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

6. Penempatan pada Bank (lanjutan)

**f. Penempatan pada bank yang
digunakan sebagai jaminan**

Tidak terdapat penempatan pada bank
yang digunakan sebagai jaminan pada
31 Desember 2024 dan 2023.

6. Placements with Banks (continued)

**f. Placements with banks pledged as
collateral**

There are no placements with banks
pledged as collateral as of December 31,
2024 and 2023.

7. Efek-Efek

**a. Berdasarkan mata uang, tujuan, dan
jenis**

7. Securities

a. By currency, purpose, and type

	2024		2023		
	Nilai nominal/ <i>Nominal value</i>	Nilai tercatat/ <i>Carrying value</i>	Nilai nominal/ <i>Nominal value</i>	Nilai tercatat/ <i>Carrying value</i>	
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					Fair value through other comprehensive income
Pihak berelasi (Catatan 39)					Related parties (Note 39)
Rupiah					Rupiah
Green Bond	620,000	618,078	720,000	712,944	Green Bond
FR0081	190,509	189,548	191,548	190,000	FR0081
FR0056	51,670	51,075	52,579	52,357	FR0056
FR0084	50,552	50,188	51,012	50,648	FR0084
FR0086	9,912	9,802	9,848	9,870	FR0086
FR0077	--	--	59,890	59,717	FR0077
FR0070	--	--	95,578	95,314	FR0070
	922,643	918,691	1,180,455	1,170,850	
Dolar Amerika Serikat					United States Dollar
Indon 29 New	64,694	59,921	61,948	57,743	Indon 29 New
Indon 25	48,286	48,207	46,236	45,731	Indon 25
Indon 27 New	48,223	46,936	46,110	45,030	Indon 27 New
Indon 28 New	40,179	38,943	38,422	37,695	Indon 28 New
Indon 49 New	40,020	29,851	38,280	32,116	Indon 49 New
Indon 28	32,007	30,704	30,566	29,476	Indon 28
Indois 24 New	--	--	15,398	15,282	Indois 24 New
	273,409	254,562	276,960	263,073	
Total	1,196,052	1,173,253	1,457,415	1,433,923	Total

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

7. Efek-Efek (lanjutan)

a. Berdasarkan mata uang, tujuan, dan jenis (lanjutan)

Efek-efek berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	2024		2023	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional amount in Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional amount in Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain Pihak berelasi (Catatan 39) Rupiah				
Obligasi Pemerintah		300,613		457,906
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		618,078		712,944
		<u>918,691</u>		<u>1,170,850</u>
Dolar Amerika Serikat				
Obligasi Pemerintah	16,734,080	254,562	17,085,977	263,073
Total	16,734,080	1,173,253	17,085,977	1,433,923

Mutasi keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi akibat kenaikan/(penurunan) nilai wajar efek-efek dicatat sebagai bagian komponen ekuitas, sehingga LPEI mengakui keuntungan/(kerugian) tahun berjalan atas perubahan nilai wajar efek-efek, sedangkan penyesuaian reklasifikasi atas keuntungan/(kerugian) sudah termasuk dalam laba rugi.

	2024	2023	
Saldo Awal	(23,492)	(3,391)	Beginning balance
Perubahan nilai wajar	1,221	(16,221)	Changes in fair value
Nilai wajar			Fair value
yang di reklasifikasi ke laba rugi	(530)	(2,924)	reclassified to profit or loss
Dampak pajak tangguhan	(152)	(956)	Deferred tax impact
Saldo Akhir	(22,953)	(23,492)	Ending Balance

Harga pasar efek-efek dalam kelompok nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya berkisar antara 82,20%-103,88% dan 83,44%-104,72% dari nilai nominal masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

7. Securities (continued)

a. By currency, purpose, and type (continued)

Securities based on currencies are as follows:

	2024		2023	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional amount in Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional amount in Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
Fair value through other comprehensive income Related party (Note 39) Rupiah				
Government Bonds PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk				
United States Dollar				
Government Bonds				
Total				

Movements of unrealized gains/(losses) resulting from the increase/(decrease) in fair value of marketable securities is recorded as part of the equity component, and LPEI recognized current year gain/(losses) from changes in fair value of marketable securities, whereas reclassification adjustment on gains/(losses) are included in profit or loss.

The market values of the fair value through other comprehensive income securities as of December 31, 2024 and 2023 ranged from 82.20%-103.88% and 83.44%-104.72% respectively, of the nominal amount.

7. Efek-Efek (lanjutan)

b. Berdasarkan penerbit, jatuh tempo, dan suku bunga

2024				
Penerbit	Jenis/ Types	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Suku bunga kontrak per tahun/ Contractual interest rate per annum	Issuer
Pemerintah Negara Republik Indonesia				The Government of the Republic of Indonesia
FR0056	Obligasi/Bond	15 September/ September 15, 2026	8.375% tetap/fixed	FR0056
FR0081	Obligasi/Bond	15 Juni/ June 15, 2025	6.50% tetap/fixed	FR0081
FR0084	Obligasi/Bond	15 Februari/ February 15, 2026	7.25% tetap/fixed	FR0084
FR0086	Obligasi/Bond	15 April/ April 15, 2026	5.50% tetap/fixed	FR0086
Indon 25	Obligasi/Bond	15 Januari/ January 15, 2025	4.125% tetap/fixed	Indon 25
Indon 28	Obligasi/Bond	11 Januari/ January 11, 2028	3.50% tetap/fixed	Indon 28
Indon 27 New	Obligasi/Bond	18 Juli/ July 18, 2027	3.85% tetap/fixed	Indon 27 New
Indon 28 New	Obligasi/Bond	24 April/ April 24, 2028	4.10% tetap/fixed	Indon 28 New
Indon 29 New	Obligasi/Bond	18 September/ September 18, 2029	3.40% tetap/fixed	Indon 29 New
Indon 49 New	Obligasi/Bond	30 Oktober/ October 30, 2049	3.70% tetap/fixed	Indon 49 New
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk				PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Green Bond	Obligasi/Bond	21 Juni/ June 21, 2025	6.35% tetap/fixed	Green Bond
2023				
Penerbit	Jenis/ Types	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Suku bunga kontrak per tahun/ Contractual interest rate per annum	Issuer
Pemerintah Negara Republik Indonesia				The Government of the Republic of Indonesia
FR0056	Obligasi/Bond	15 September/ September 15, 2026	8.37% tetap/fixed	FR0056
FR0070	Obligasi/Bond	15 Maret/ March 15, 2024	8.37% tetap/fixed	FR0070
FR0077	Obligasi/Bond	15 Mei/ May 15, 2024	8.12% tetap/fixed	FR0077
FR0081	Obligasi/Bond	15 Juni/ June 15, 2025	6.50% tetap/fixed	FR0081
FR0084	Obligasi/Bond	15 Februari/ February 15, 2026	7.25% tetap/fixed	FR0084
FR0086	Obligasi/Bond	15 April/ April 15, 2026	5.50% tetap/fixed	FR0086
Indois 24 New	Obligasi/Bond	20 Agustus/ August 20, 2024	3.90% tetap/fixed	Indois 24 New
Indon 25	Obligasi/Bond	15 Januari/ January 15, 2025	4.12% tetap/fixed	Indon 25
Indon 28	Obligasi/Bond	11 Januari/ January 11, 2028	3.50% tetap/fixed	Indon 28
Indon 27 New	Obligasi/Bond	18 Juli/ July 18, 2027	3.85% tetap/fixed	Indon 27 New
Indon 28 New	Obligasi/Bond	24 April/ April 24, 2028	4.10% tetap/fixed	Indon 28 New
Indon 29 New	Obligasi/Bond	18 September/ September 18, 2029	3.40% tetap/fixed	Indon 29 New
Indon 49 New	Obligasi/Bond	30 Oktober/ October 30, 2049	3.70% tetap/fixed	Indon 49 New
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk				PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Green Bond	Obligasi/Bond	21 Juni/ June 21, 2025	6.35% tetap/fixed	Green Bond

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

7. Efek-Efek (lanjutan)

c. Berdasarkan peringkat

Efek-efek yang dimiliki oleh LPEI pada 31 Desember 2024 dan 2023 memiliki peringkat sebagai berikut:

	Lembaga Pemeringkat/ Rating Agencies	Peringkat/Rating		
		2024	2023	
Efek pemerintah	S&P	BBB	BBB	Government Securities
Green Bond BNI	Pefindo	idAAA	idAAA	Green Bond BNI

d. Berdasarkan periode sisa umur jatuh tempo

Klasifikasi jangka waktu efek-efek berdasarkan periode sisa umur jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	2024	2023	
Sampai dengan 5 tahun	1,143,402	1,344,064	Up to 5 years
Lebih dari 5 tahun			
sampai dengan 10 tahun	--	57,743	More than 5 to 10 years
Lebih dari 10 tahun			
sampai dengan 15 tahun	29,851	32,116	More than 10 to 15 years
Total	1,173,253	1,433,923	Total

e. Berdasarkan efek Pemerintah dan bukan Pemerintah

Efek-efek yang dimiliki oleh LPEI pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023	
Efek pemerintah	555,175	720,979	Government securities
Bukan efek pemerintah	618,078	712,944	Non government securities
Total	1,173,253	1,433,923	Total

f. Berdasarkan cadangan kerugian penurunan nilai

Cadangan kerugian penurunan nilai pada efek-efek per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah nihil.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai dan mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 33.

7. Securities (continued)

c. By Rating

Securities held by LPEI as of December 31, 2024 and 2023 were rated as follows:

d. By remaining period to maturity

The details of securities classified as to remaining period to maturity are as follows:

e. By Government and non-Government securities

Securities held by LPEI as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

f. By allowance for impairment losses

Allowance for impairment losses on marketable securities as of December 31, 2024 and 2023 are nil, respectively.

Information with respect to classification of not impaired and impaired financial assets is disclosed in Note 33.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

7. Efek-Efek (lanjutan)

**g. Berdasarkan kolektibilitas sesuai
Peraturan OJK**

Kolektibilitas efek-efek sesuai Peraturan
OJK diungkapkan pada Catatan 43.

**h. Efek-efek yang digunakan sebagai
jaminan**

Tidak terdapat efek-efek yang digunakan
sebagai jaminan pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023.

8. Tagihan dan Liabilitas Derivatif

LPEI menghadapi risiko pasar atas
perubahan nilai tukar mata uang dan
menggunakan instrumen derivatif untuk
mengelola risiko tersebut. LPEI melakukan
transaksi derivatif berupa kontrak berjangka
mata uang asing (*forward* dan *swap*) dengan
beberapa *counterparties* yang memungkinkan
LPEI atau pihak lain untuk mengurangi risiko
fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

Perjanjian *swap* mata uang merupakan
kontrak antara dua pihak untuk pertukaran
 arus kas berdasarkan nilai nosional dan nilai
tukar yang ditetapkan terlebih dahulu.
Sedangkan, kontrak berjangka *forward* mata
uang asing merupakan perjanjian untuk
menjual sejumlah mata uang tertentu kepada
pihak lain atau untuk membeli sejumlah mata
uang tertentu dari pihak lain pada suatu
tanggal di masa yang akan datang dengan
harga yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Transaksi derivatif tersebut menimbulkan
risiko pasar dan risiko kredit. Risiko pasar
dari transaksi derivatif timbul sebagai akibat
dari adanya fluktuasi nilai instrumen derivatif
yang disebabkan adanya fluktuasi kurs mata
uang asing, sedangkan risiko kredit timbul
dalam hal pihak lain tidak dapat memenuhi
liabilitasnya sesuai dengan ketentuan dalam
kontrak kepada LPEI.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023,
tidak terdapat instrumen derivatif LPEI yang
memenuhi syarat sebagai transaksi lindung
nilai untuk keperluan akuntansi. Oleh sebab
itu, seluruh keuntungan atau kerugian yang
terjadi dari perubahan nilai wajar dari
transaksi derivatif ini diakui dalam laba rugi.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

7. Securities (continued)

**g. By Financial Service Authority Rule
collectibility**

*Collectibility securities in accordance with
Financial Service Authority Rule are
disclosed in Note 43.*

h. Securities pledged as collateral

*There are no securities pledged as
collateral as of December 31, 2024 and
December 31, 2023.*

8. Derivative Receivables and Payables

*LPEI faces market risk with respect to
changes in foreign currency exchange rates
and thus, LPEI uses derivative instruments to
manage this risk. LPEI enters into derivative
transactions in the form of foreign currency
forward contracts (forward and swap) with
certain counterparties that allow LPEI to
reduce the risk of fluctuations in foreign
currency exchange rates.*

*Currency swap contract is a contract between
two parties to exchange series of cash flows
based on a predetermined notional value and
exchange value. While, foreign currency
forward contract is a covenant to sell a certain
amount of currencies to other parties
or to buy a certain amount of currencies from
other parties in the future at a predetermined
price.*

*Such derivative transactions result in market
risk and credit risk. Market risk from derivative
transactions arises as a result of fluctuation in
the value of derivative instruments due to
foreign currency fluctuation, while credit risk
arises when the other parties fail to fulfill their
obligations stated in the contracts with LPEI.*

*As of December 31, 2024 and 2023, there are
no derivatives which qualify as hedging
instruments for accounting purposes.
Therefore, all gains or losses resulting from
fair value changes from these derivative
transactions are recognized in profit or loss.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

8. Tagihan dan Liabilitas Derivatif (lanjutan)

a. Tagihan derivatif

Rincian tagihan derivatif pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023 adalah
sebagai berikut:

2024	Nilai nosional mata uang asing/ <i>Notional amount</i> <i>in foreign currencies</i> (Dalam nilai penuh/ <i>In full amount</i>)	Tanggal efektif/ <i>Effective</i> <i>date</i>	Tanggal Jatuh Tempo/ <i>Maturity</i> <i>date</i>	Nilai wajar tagihan derivatif/ <i>Fair value of</i> <i>derivative</i> <i>receivables</i>	2024
Mata uang asing					Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat					United States Dollars
Cross Currency Swap					Cross Currency Swap
Pihak ketiga					Third parties
		10 Desember/ <i>December 10, 2024</i>	10 Juni/ <i>June 10, 2025</i>		
PT Bank Cimb Niaga, Tbk	3,247,709			50,600	PT Bank Cimb Niaga, Tbk
Dolar Amerika Serikat					United States Dollars
Swap Beli					Swap Bought
		19 Desember/ <i>December 19, 2024</i>	24 Januari/ <i>January 24, 2025</i>		
PT Bank Cimb Niaga, Tbk	2,950,000			74	PT Bank Cimb Niaga, Tbk
Total tagihan derivatif				50,674	Total derivative receivables
2023	Nilai nosional mata uang asing/ <i>Notional amount</i> <i>in foreign currencies</i> (Dalam nilai penuh/ <i>In full amount</i>)	Tanggal efektif/ <i>Effective</i> <i>date</i>	Tanggal Jatuh Tempo/ <i>Maturity</i> <i>date</i>	Nilai wajar tagihan derivatif/ <i>Fair value of</i> <i>derivative</i> <i>receivables</i>	2023
Mata uang asing					Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat					United States Dollars
Swap Beli					Swap Bought
Pihak ketiga					Third parties
		27 Desember/ <i>December 27, 2023</i>	29 Januari/ <i>January 29, 2024</i>		
PT Bank CIMB Niaga, Tbk	5,517			85	PT Bank CIMB Niaga, Tbk
Total tagihan derivatif				85	Total derivative receivables

Informasi mengenai klasifikasi aset
keuangan yang tidak mengalami
penurunan nilai dan mengalami penurunan
nilai diungkapkan pada Catatan 33.

b. Liabilitas derivatif

Rincian liabilitas derivatif pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023 adalah
sebagai berikut:

**8. Derivative Receivables and Payables
(continued)**

a. Derivative receivables

The derivative receivables details as of
December 31, 2024 and 2023 are as
follows:

Information with respect to classification of
not impaired and impaired financial assets
are disclosed in Note 33.

b. Derivative payables

The derivative payables details as of
December 31, 2024 and 2023 are as
follows:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

8. Tagihan dan Liabilitas Derivatif (lanjutan)

**8. Derivative Receivables and Payables
(continued)**

b. Liabilitas derivatif (lanjutan)

b. Derivative payables (continued)

2024	Nilai nosional mata uang asing/ <i>Notional amount</i> in foreign currencies (Dalam nilai penuh/ <i>In full amount</i>)	Tanggal efektif/ <i>Effective</i> date	Tanggal Jatuh Tempo/ <i>Maturity</i> date	Nilai wajar liabilitas derivatif/ <i>Fair value of</i> derivative payables	2024
Mata uang asing Ringgit Malaysia <i>Cross Currency Swap</i> Pihak ketiga					<i>Foreign currencies</i> <i>Malaysian Ringgit</i> <i>Cross Currency Swap</i> <i>Third party</i>
PT Bank Cimb Niaga, Tbk	14,350,000	10 Desember/ <i>December 10, 2024</i>	10 Juni/ <i>June 10, 2025</i>	49,939	PT Bank Cimb Niaga, Tbk
Total liabilitas derivatif				49,939	Total derivatives liabilities
2023	Nilai nosional mata uang asing/ <i>Notional amount</i> in foreign currencies (Dalam nilai penuh/ <i>In full amount</i>)	Tanggal efektif/ <i>Effective</i> date	Tanggal Jatuh Tempo/ <i>Maturity</i> date	Nilai wajar liabilitas derivatif/ <i>Fair value of</i> derivative payables	2023
Mata uang asing Dolar Amerika Serikat <i>Swap Beli</i> Pihak ketiga					<i>Foreign currencies</i> <i>United States Dollars</i> <i>Swap Bought</i> <i>Third party</i>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	25,000,000	27 Desember/ <i>December 27, 2023</i>	3 Januari/ <i>January 3, 2024</i>	339	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	25,000,000	27 Desember/ <i>December 27, 2023</i>	3 Januari/ <i>January 3, 2024</i>	339	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Forward Beli				678	Forward Bought
MUFG Bank, LTD	20,000,000	28 Desember/ <i>December 28, 2023</i>	3 Januari/ <i>January 3, 2024</i>	266	MUFG Bank, LTD
MUFG Bank, LTD	25,000,000	28 Desember/ <i>December 28, 2023</i>	4 Januari/ <i>January 4, 2024</i>	333	MUFG Bank, LTD
MUFG Bank, LTD	15,000,000	28 Desember/ <i>December 28, 2023</i>	3 Januari/ <i>January 3, 2024</i>	200	MUFG Bank, LTD
Total liabilitas derivatif				1,477	Total derivatives liabilities

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

Informasi mengenai Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya berdasarkan jenis dan mata uang adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Rupiah		
Modal kerja	16,742,896	22,183,091
Investasi	19,107,642	23,870,019
Konsumsi	124,295	126,223
	<u>35,974,833</u>	<u>46,179,333</u>
Dolar Amerika Serikat		
Modal kerja	13,254,960	14,929,171
Investasi	6,829,574	12,714,707
	<u>20,084,534</u>	<u>27,643,878</u>
Malaysia Ringgit		
Investasi	49,084	--
Total	<u>56,108,451</u>	<u>73,823,211</u>
Cadangan kerugian		
penurunan nilai	(17,132,639)	(32,633,997)
Neto	<u>38,975,812</u>	<u>41,189,214</u>

b. Berdasarkan mata uang

Perincian pembiayaan dan piutang berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	2024		2023	
	Jumlah Nosional Mata uang asing/ <i>Notional amount Foreign currencies</i> (Dalam nilai penuh/ <i>In full amount</i>)	Ekuivalen/ <i>Equivalent Rupiah</i>	Jumlah Nosional Mata uang asing/ <i>Notional amount Foreign currencies</i> (Dalam nilai penuh/ <i>In full amount</i>)	Ekuivalen/ <i>Equivalent Rupiah</i>
Rupiah	--	35,974,833	--	46,179,333
Dolar Amerika Serikat	1,247,874,042	20,084,534	1,795,406,764	27,643,878
Ringgit Malaysia	13,642,703	49,084	--	--
Total		56,108,451		73,823,211
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(17,132,639)		(32,633,997)
Neto		38,975,812		41,189,214

9. Financing and Receivables, Sharia Financing and Receivables, and Other Receivables

a. By type and currency

Information related Financing and
Receivables, Sharia Financing and
Receivables, and Other Receivables
based on type and currency are as follows:

	Rupiah
	Working capital
	Investment
	Consumption
	United States Dollars
	Working capital
	Investment
	Malaysian Ringgit
	Investment
	Total
	Allowance for
	impairment losses
	Net

b. By currency

Financing and receivables based on currencies are as follows:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan
Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya
(lanjutan)**

**9. Financing and Receivables, Sharia
Financing and Receivables, and Other
Receivables (continued)**

**c. Berdasarkan mata uang dan sektor
ekonomi**

c. By currency and economic sector

Perincian pembiayaan dan piutang
berdasarkan sektor ekonomi adalah
sebagai berikut:

*Financing and receivables based on
sector are as follows:*

	2024	2023	
Rupiah			Rupiah
Perindustrian	15,104,576	20,574,304	Manufacturing
Pertanian, perburuan dan sarana pertanian	9,636,213	11,335,483	Agriculture, hunting and agriculture services
Konstruksi	1,482,601	1,841,422	Construction
Listrik, gas dan air	613,955	804,958	Electricity, gas and water
Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi	2,830,573	3,881,654	Transportation, warehousing and communication
Perdagangan, restoran dan hotel	1,097,346	2,047,332	Trading, restaurants and hotels
Jasa dunia usaha	2,452,706	2,804,553	Business services
Pertambangan	2,493,662	2,612,653	Mining
Jasa-jasa sosial/masyarakat	15,823	26,374	Social, services/society
Lain-lain	247,378	250,600	Others
	<u>35,974,833</u>	<u>46,179,333</u>	
Dolar Amerika Serikat			United States Dollars
Perindustrian	10,234,526	15,817,178	Manufacturing
Pertambangan	5,646,944	6,737,262	Mining
Pertanian, perburuan dan sarana pertanian	2,040,590	1,905,480	Agriculture, hunting and agriculture services
Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi	238,708	907,264	Transportation, warehousing and communication
Konstruksi	580,307	215,219	Construction
Perdagangan, restoran dan hotel	1,214,961	1,291,539	Trading, restaurants and hotels
Lain-lain	128,498	195,478	Others
	<u>20,084,534</u>	<u>27,643,878</u>	
Malaysia Ringgit			Malaysian Ringgit
Perdagangan, restoran dan hotel	49,084	--	Trading, restaurants and hotels
Total	56,108,451	73,823,211	Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(17,132,639)	(32,633,997)	Allowance for Impairment Losses
Neto	<u><u>38,975,812</u></u>	<u><u>41,189,214</u></u>	Net

Pada 31 Desember 2024 dan 2023, lain-
lain termasuk pembiayaan kepada
karyawan.

*As of December 31, 2024 and 2023, others
include employee financing.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan
Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya
(lanjutan)**

**d. Berdasarkan pihak-pihak, jenis dan
mata uang**

	2024	2023
Rupiah		
Pihak berelasi (Catatan 39)		
Modal kerja	3,057,808	3,242,925
Investasi	5,175,835	6,419,887
Konsumsi	-	11,487
	<u>8,233,643</u>	<u>9,674,299</u>
Pihak ketiga		
Modal kerja	13,685,088	18,940,166
Investasi	13,931,807	17,450,132
Konsumsi	124,295	114,736
	<u>27,741,190</u>	<u>36,505,034</u>
Total Rupiah	<u>35,974,833</u>	<u>46,179,333</u>
Dolar Amerika Serikat		
Pihak berelasi (Catatan 39)		
Modal kerja	915,407	442,825
Investasi	265,447	395,107
	<u>1,180,854</u>	<u>837,932</u>
Pihak ketiga		
Modal kerja	12,339,553	14,486,346
Investasi	6,564,127	12,319,600
	<u>18,903,680</u>	<u>26,805,946</u>
Total Dolar Amerika Serikat	<u>20,084,534</u>	<u>27,643,878</u>
Ringgit Malaysia		
Pihak ketiga		
Investasi	49,084	-
Total Ringgit Malaysia	<u>49,084</u>	<u>-</u>
Total	56,108,451	73,823,211
Cadangan kerugian penurunan nilai	(17,132,639)	(32,633,997)
Neto	<u>38,975,812</u>	<u>41,189,214</u>

**9. Financing and Receivables, Sharia
Financing and Receivables, and Other
Receivables (continued)**

d. By parties, type and currency

Rupiah
Related parties (Note 39)
Working capital
Investment
Consumption
Third parties
Working capital
Investment
Consumption
Total Rupiah
United States Dollar
Related parties (Note 39)
Working capital
Investment
Third parties
Working capital
Investment
Total United States Dollar
Malaysian Ringgit
Third parties
Investment
Total Malaysia Ringgit
Total
Allowance for impairment losses
Net

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan
Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya
(lanjutan)**

e. Berdasarkan jangka waktu

	2024	2023
Rupiah		
Sampai dengan 1 tahun	5,821,552	6,884,333
Lebih dari 1 sampai dengan 3 tahun	2,155,645	2,459,546
Lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun	5,507,885	5,896,174
Lebih dari 5 tahun	22,489,751	30,939,280
	<u>35,974,833</u>	<u>46,179,333</u>
Dolar Amerika Serikat		
Sampai dengan 1 tahun	6,366,732	4,737,340
Lebih dari 1 sampai dengan 3 tahun	766,871	2,295,479
Lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun	3,574,205	5,650,323
Lebih dari 5 tahun	9,376,726	14,960,736
	<u>20,084,534</u>	<u>27,643,878</u>
Malaysia Ringgit		
Lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun	49,084	-
	<u>49,084</u>	<u>-</u>
Total	56,108,451	73,823,211
Cadangan kerugian penurunan nilai	(17,132,639)	(32,633,997)
Neto	<u>38,975,812</u>	<u>41,189,214</u>

f. Berdasarkan periode sisa jatuh tempo

	2024	2023
Rupiah		
Sampai dengan 1 tahun	8,167,933	11,009,358
Lebih dari 1 sampai dengan 3 tahun	4,594,849	4,131,004
Lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun	7,447,112	8,360,918
Lebih dari 5 tahun	15,764,939	22,678,053
	<u>35,974,833</u>	<u>46,179,333</u>
Dolar Amerika Serikat		
Sampai dengan 1 tahun	6,927,488	7,797,148
Lebih dari 1 sampai dengan 3 tahun	2,393,412	3,284,353
Lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun	7,144,895	8,662,826
Lebih dari 5 tahun	3,618,739	7,899,551
	<u>20,084,534</u>	<u>27,643,878</u>
Malaysia Ringgit		
Lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun	49,084	-
	<u>49,084</u>	<u>-</u>
Total	56,108,451	73,823,211
Cadangan kerugian penurunan nilai	(17,132,639)	(32,633,997)
Neto	<u>38,975,812</u>	<u>41,189,214</u>

**9. Financing and Receivables, Sharia
Financing and Receivables, and Other
Receivables (continued)**

e. By time period

Rupiah
Up to 1 year
More than 1 up to 3 years
More than 3 up to 5 years
More than 5 years
United States Dollars
Up to 1 year
More than 1 up to 3 years
More than 3 up to 5 years
More than 5 years
Malaysian Ringgit
More than 3 up to 5 years
Total
Allowance for impairment losses
Net

f. By remaining period to maturity

Rupiah
Up to 1 year
More than 1 up to 3 years
More than 3 up to 5 years
More than 5 years
United States Dollars
Up to 1 year
More than 1 up to 3 years
More than 3 up to 5 years
More than 5 years
Malaysian Ringgit
More than 3 up to 5 years
Total
Allowance for impairment losses
Net

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan
Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya
(lanjutan)**

g. Pembiayaan dan piutang syariah

Rincian pembiayaan dan piutang syariah
pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah
sebagai berikut:

	2024	2023
Piutang <i>Murabahah</i>	430,464	680,478
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	6,684,854	9,257,930
<i>Qardh</i>	39,351	—
Total	7,154,669	9,938,408
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2,541,166)	(4,906,243)
Neto	4,613,503	5,032,165

**h. Pembiayaan dan piutang Penugasan
Khusus**

LPEI memiliki Penugasan Khusus untuk
melakukan pembiayaan ekspor
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) No. 183/PMK.08/2021 yang
ditetapkan tanggal 14 Desember 2021 dan
mencabut (PMK) No. 198/PMK.08/2017
tentang Penugasan Khusus LPEI. Rincian
pembiayaan dan piutang Penugasan
Khusus pada tanggal 31 Desember 2024
dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Pembiayaan dan piutang konvensional	4,102,685	3,949,482
Pembiayaan dan piutang syariah	1,720	1,269
Total	4,104,405	3,950,751
Cadangan kerugian penurunan nilai	(73,843)	(62,713)
Neto	4,030,562	3,888,038

**9. Financing and Receivables, Sharia
Financing and Receivables, and Other
Receivables (continued)**

g. Sharia financing and receivables

As of December 31, 2024 and 2023, the
details of sharia financing and receivables
are as follows:

<i>Murabahah receivables</i>
<i>Musyarakah financing</i>
<i>Qardh</i>
<i>Total</i>
<i>Allowance for impairment losses</i>
<i>Net</i>

**h. Financing and receivables National
Interest Account**

LPEI has National Interest Account
(NIA) for export financing according to
PMK No. 183/PMK.08/2021 dated
December 14, 2021 and revoked PMK No.
198/PMK.08/2017 regarding NIA for LPEI.
As of December 31, 2024 and 2023, the
details of NIA financing and receivables,
are as follows:

<i>Financing and receivables conventional</i>
<i>Financing and receivables sharia</i>
<i>Total</i>
<i>Allowance for impairment losses</i>
<i>Net</i>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya (lanjutan)

h. Pembiayaan dan piutang Penugasan Khusus (lanjutan)

Rincian pembiayaan dan piutang Penugasan Khusus berdasarkan jenis dan mata uang pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Rupiah		
Modal kerja	1,766,185	1,800,755
Investasi	1,587,835	1,518,352
	<u>3,354,020</u>	<u>3,319,107</u>
Dolar Amerika Serikat		
Modal kerja	750,385	631,644
Total	4,104,405	3,950,751
Cadangan kerugian penurunan nilai	(73,843)	(62,713)
Neto	<u>4,030,562</u>	<u>3,888,038</u>

Rincian pembiayaan dan piutang Penugasan Khusus berdasarkan mata uang dan sektor ekonomi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Rupiah		
Pertanian, perburuan, dan sarana pertanian	86,705	90,776
Perdagangan, restoran dan hotel	81,037	75,284
Perindustrian	910,317	709,304
Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi	994,418	994,418
Jasa dunia usaha	1,281,543	1,449,325
	<u>3,354,020</u>	<u>3,319,107</u>
Dolar Amerika Serikat		
Pertanian, perburuan, dan sarana pertanian	4,032	85,271
Perdagangan, restoran dan hotel	215,717	92,819
Perindustrian	488,955	310,127
Konstruksi	41,681	143,427
	<u>750,385</u>	<u>631,644</u>
Total	4,104,405	3,950,751
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(73,843)	(62,713)
Neto	<u>4,030,562</u>	<u>3,888,038</u>

9. Financing and Receivables, Sharia Financing and Receivables, and Other Receivables (continued)

h. Financing and receivables National Interest Account (continued)

The details of NIA financing and receivables by type and currency as of December 31, 2024 and 2023, are as follows:

Rupiah
Working capital
Investment
United States Dollars
Working capital
Total
Allowance for impairment losses
Net

The details of NIA financing and receivables by currency and economic sectors as of December 31, 2024 and 2023, are as follows:

Rupiah
Agriculture, hunting, and agriculture services
Trading, restaurants and hotel
Industry
Transportation, warehousing, and communication
Business services
United States Dollar
Agriculture, hunting, and agriculture services
Trading, restaurants and hotel
Industry
Construction
Total
Allowance for impairment losses
Net

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya (lanjutan)

h. Pembiayaan dan piutang Penugasan Khusus (lanjutan)

Suku bunga yang digunakan untuk seluruh pembiayaan dan piutang Penugasan Khusus berkisar antara 0,10%-6,78% dan 0,10%-6,43% pada 31 Desember 2024 dan 2023. Seluruh pembiayaan dan piutang Penugasan Khusus yang diberikan telah dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai dengan menggunakan metode individual dan kolektif.

i. Informasi signifikan lainnya

1. Kisaran suku bunga per tahun untuk pembiayaan dan piutang dalam Rupiah, Dolar Amerika Serikat, dan Ringgit Malaysia adalah sebagai berikut:

	2024	2023	
Suku bunga kontrak			Contractual interest rate
Rupiah	0.00% - 14.00%	0.00% - 14.00%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	0.00% - 10.05%	0.00% - 10.10%	United States Dollars
Ringgit Malaysia	6.82%	--	Malaysia Ringgit
Suku bunga efektif			Effective interest rate
Rupiah	0.00% - 16.16%	0.00% - 16.16%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	0.00% - 9.82%	0.00% - 10.10%	United States Dollars
Ringgit Malaysia	6.83%	--	Malaysian Ringgit

2. Pembiayaan dan piutang dijamin dengan surat sanggup (*promissory note*), agunan yang diikat dengan hak tanggungan, piutang dagang, dan persediaan yang diikat secara fidusia ("*cessie*") dan jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh LPEI.
3. Jumlah pembiayaan dan piutang dalam bentuk sindikasi adalah sebesar Rp13.070.136 dan Rp18.791.744 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Keikutsertaan LPEI berkisar antara 1,53% sampai dengan 40,00% dan 3,33% sampai dengan 40,00% dari jumlah pembiayaan dan piutang sindikasi, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Risiko atas pembiayaan dan piutang sindikasi ditanggung secara proporsional di antara bank-bank yang berpartisipasi.

9. Financing and Receivables, Sharia Financing and Receivables, and Other Receivables (continued)

h. Financing and receivables National Interest Account (continued)

Interest rate for all NIA financing and receivables ranged from 0.10%-6.78% and 0.10%-6.43%, as of December 31, 2024 and 2023, respectively. Allowance method for impairment losses for NIA financing and receivables are individual and collective.

i. Other significant information

1. Range of annual interest rates for financing and receivables in Rupiah, United States Dollars, and Malaysian Ringgit are as follows:

2. Financing and receivables are secured by promissory notes, registered mortgages, trade receivables, and inventories pledged under a fiduciary transfer of ownership ("*cessie*") and by other guarantees generally accepted by LPEI.

3. Total syndicated financing and receivables amounted to Rp13,070,136 and Rp18,791,744, as of December 31, 2024 and 2023, respectively. LPEI's share in syndicated financing and receivables ranged from 1.53% to 40.00% and 3.33% to 40.00% of the total syndicated financing and receivables as of December 31, 2024 and 2023, respectively. Risks from syndicated financing and receivables are shared proportionately among the participating banks.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya (lanjutan)

i. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

4. Pinjaman pegawai adalah pinjaman yang diberikan kepada pegawai dengan tingkat bunga sebesar 0% dan 4% per tahun yang ditujukan untuk pembelian rumah, kendaraan, dan keperluan lainnya dengan jangka waktu berkisar antara 1 (satu) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun. Jumlah pinjaman pegawai adalah sebesar Rp124.295 dan Rp126.223 masing-masing pada 31 Desember 2024 dan 2023. Pembayaran pokok pinjaman dan bunga dilunasi melalui pemotongan gaji setiap bulan.

Perbedaan antara tingkat bunga pinjaman karyawan dan *Base Lending Rate* (BLR) diamortisasi sepanjang jangka waktu pembiayaan dengan menggunakan *Effective Interest Rate* (EIR).

Besarnya biaya tersebut pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp8.790 dan Rp1.621 dibukukan sebagai bagian dari beban gaji dan tunjangan.

5. Perubahan nilai tercatat bruto pembiayaan yang diberikan selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

31 Desember/December 31, 2024						
Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Jumlah/ Total		
Saldo awal	28,799,178	1,678,084	33,407,541	9,938,408	73,823,211	Balance, beginning of the year
- Perubahan ke tahap 1	148,658	(92,165)	(56,493)	--	--	Transfer to stage 1 -
- Perubahan ke tahap 2	(2,522,830)	2,522,830	--	--	--	Transfer to stage 2 -
- Perubahan ke tahap 3	(343,850)	(1,081,803)	1,425,653	--	--	Transfer to stage 3 -
Total perpindahan antar tahapan	(2,718,022)	1,348,862	1,369,160	--	--	Total transfer within stages
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(1,651,266)	(2,582)	(578,178)	(132,448)	(2,364,474)	Net remeasurement of carrying value
Aset baru	9,573,401	322	2,121,187	--	11,694,910	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(8,014,993)	(408,134)	(2,300,118)	(638,650)	(11,361,895)	Asset derecognized or repaid
Penghapusbukuan	--	--	(13,872,849)	(2,019,100)	(15,891,949)	Write-offs
Penyesuaian mata uang asing	254,160	(91,708)	39,738	6,458	208,648	Foreign exchange adjustment
Saldo akhir	26,242,458	2,524,844	20,186,481	7,154,668	56,108,451	Ending balance

9. Financing and Receivables, Sharia Financing and Receivables, and Other Receivables (continued)

i. Other significant information (continued)

4. Loans to employees which carry interest rates of 0% and 4% per annum are intended for the acquisition of houses, vehicles, and other necessities with terms ranging from 1 (one) year to 20 (twenty) years. Total loan to employees amounted to Rp124,295 and Rp126,223 as of December 31, 2024 and 2023, respectively. The loan principal and interest payments are collected through monthly payroll deductions.

The difference between the employee loan's interest rates and the Base Lending Rate (BLR) is amortized over of the term of the loan using Effective Interest Rate (EIR).

For the years ended December 31, 2024 and 2023, amortization of the difference amounted to Rp8,790 and Rp1,621, respectively, which is recorded as part of salaries and benefit expenses.

5. The change in gross carrying amount on loans during the year are as follow:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan
Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya
(lanjutan)**

i. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

	31 Desember/December 31, 2023				
	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Jumlah/ Total
Saldo awal	35,585,215	155,462	36,422,379	11,472,947	83,636,003
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 2	(1,556,775)	1,556,775	--	--	--
- Perubahan ke tahap 3	(609,690)	--	609,690	--	--
Total perpindahan antar tahapan	33,418,750	1,712,237	37,032,069	11,472,947	83,636,003
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(2,240,853)	(88,334)	(604,008)	(492,502)	(3,425,697)
Aset baru	15,764,241	222,093	6,118,074	2,467,169	24,571,577
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(18,077,287)	(155,460)	(7,172,940)	(3,122,317)	(28,528,004)
Penghapusbukuan	--	--	(1,802,483)	(378,774)	(2,181,257)
Penyesuaian mata uang asing	(65,673)	(12,452)	(163,171)	(8,115)	(249,411)
Saldo akhir	28,799,178	1,678,084	33,407,541	9,938,408	73,823,211

Balance, beginning of the year
Transfer to stage 1 -
Transfer to stage 2 -
Transfer to stage 3 -
Total transfer within stages
Net remeasurement of carrying value
New assets originated
Asset derecognized or repaid
Write-offs
Foreign exchange adjustment
Ending balance

Analisis atas perubahan cadangan
kerugian penurunan nilai adalah
sebagai berikut:

The changes in the allowance for
impairment losses on financing and
receivables are as follows:

	31 Desember/December 31, 2024				
	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Jumlah/ Total
Saldo awal	409,201	734,973	26,583,580	4,906,243	32,633,997
- Perubahan ke tahap 1	43,300	(29,237)	(14,063)	--	--
- Perubahan ke tahap 2	(94,602)	94,602	--	--	--
- Perubahan ke tahap 3	(7,015)	(447,571)	454,586	--	--
Total perpindahan antar tahapan	(58,317)	(382,206)	440,523	--	--
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(36,258)	(678)	990,676	(181,151)	772,589
Aset baru	117,364	130	825,892	--	943,386
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(110,832)	(229,307)	(954,973)	(147,756)	(1,442,868)
Total (pembalikan)/pembentukan tahun berjalan	(29,726)	(229,855)	861,595	(328,907)	273,107
Penghapusbukuan	--	--	(13,872,849)	(2,019,100)	(15,891,949)
Penyesuaian mata uang asing	(40,427)	(38,214)	213,195	(17,070)	117,484
Saldo akhir	280,731	84,698	14,226,044	2,541,166	17,132,639

Beginning Balance
Transfer to stage 1 -
Transfer to stage 2 -
Transfer to stage 3 -
Total transfer within stages
Net remeasurement of carrying value
New assets originated
Asset derecognized or repaid
Total (reverse)/addition current year
Write-offs
Foreign exchange adjustment
Ending balance

	31 Desember/December 31, 2023				
	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Jumlah/ Total
Saldo awal	748,063	9,531	14,839,964	2,285,391	17,882,949
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	--	--
- Perubahan ke tahap 2	(186,328)	186,328	--	--	--
- Perubahan ke tahap 3	(73,991)	--	73,991	--	--
Total perpindahan antar tahapan	(260,319)	186,328	73,991	--	--
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(23,738)	478,336	12,001,528	2,669,222	15,125,348
Aset baru	198,514	70,632	2,751,133	484,983	3,505,262
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(252,158)	(9,531)	(1,249,349)	(152,922)	(1,663,960)
Total (pembalikan)/pembentukan tahun berjalan	(77,382)	539,437	13,503,312	3,001,283	16,966,650
Penghapusbukuan	--	--	(1,802,483)	(378,774)	(2,181,257)
Penyesuaian mata uang asing	(1,161)	(323)	(31,204)	(1,657)	(34,345)
Saldo akhir	409,201	734,973	26,583,580	4,906,243	32,633,997

Beginning balance
Transfer to stage 1 -
Transfer to stage 2 -
Transfer to stage 3 -
Total transfer within stages
Net remeasurement of carrying value
New assets originated
Asset derecognized or repaid
Total (reverse)/addition current year
Write-offs
Foreign exchange adjustment
Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa jumlah
cadangan kerugian penurunan nilai yang
dibentuk cukup untuk menutup kerugian
yang mungkin timbul akibat tidak
tertagihnya pembiayaan dan piutang,
pembiayaan dan piutang syariah, dan
piutang lainnya.

Management believes that the allowance
for impairment losses is adequate to cover
possible losses arising from on uncollectible
financing and receivables, financing and
receivables sharia, and other receivable.

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya (lanjutan)

i. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi dari cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan dan piutang berdasarkan kelompok untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

2024					
	Modal Kerja/ <i>Working Capital</i>	Investasi/ <i>Investment</i>	Konsumsi/ <i>Consumption</i>	Total	
Saldo awal per 1 Januari	20,867,035	11,765,666	1,296	32,633,997	Beginning balance as of January 1
Pembentukan penyisihan tahun berjalan (Catatan 27)	632,723	(359,608)	(8)	273,107	Provision for impairment losses during the year (Note 27)
Penghapusbukuan	(9,999,002)	(5,892,947)	--	(15,891,949)	Written-off
Penyesuaian karena penjabaran mata uang asing	121,772	(4,288)	--	117,484	Foreign exchange translation adjustment
Saldo per 31 Desember 2024	11,622,528	5,508,823	1,288	17,132,639	Balance as of December 31, 2024
2024					
	Modal Kerja/ <i>Working Capital</i>	Investasi/ <i>Investment</i>	Konsumsi/ <i>Consumption</i>	Total	
Mengalami penurunan nilai secara individual	10,991,058	3,569,805	--	14,560,863	Individual impairment
Mengalami penurunan nilai secara kolektif	76,987	162,424	1,288	240,699	Collective impairment
Syariah	554,483	1,776,594	--	2,331,077	Sharia
Saldo per 31 Desember 2024	11,622,528	5,508,823	1,288	17,132,639	Balance as of December 31, 2024
Jumlah bruto dari pembiayaan yang mengalami penurunan nilai secara individu	16,301,300	9,680,863	--	25,982,163	Gross amount of financing determined to be individually impaired
2023					
	Modal Kerja/ <i>Working Capital</i>	Investasi/ <i>Investment</i>	Konsumsi/ <i>Consumption</i>	Total	
Saldo awal per 1 Januari	11,347,475	6,535,014	460	17,882,949	Beginning balance as of January 1
Pembentukan penyisihan tahun berjalan (Catatan 27)	11,300,106	5,665,708	836	16,966,650	Provision for impairment losses during the year (Note 27)
Penghapusbukuan	(1,768,745)	(412,512)	--	(2,181,257)	Written-off
Penyesuaian karena penjabaran mata uang asing	(11,801)	(22,544)	--	(34,345)	Foreign exchange translation adjustment
Saldo per 31 Desember 2023	20,867,035	11,765,666	1,296	32,633,997	Balance as of December 31, 2023
2023					
	Modal Kerja/ <i>Working Capital</i>	Investasi/ <i>Investment</i>	Konsumsi/ <i>Consumption</i>	Total	
Mengalami penurunan nilai secara individual	19,143,319	8,624,105	--	27,767,424	Individual impairment
Mengalami penurunan nilai secara kolektif	58,511	240,705	1,296	300,512	Collective impairment
Syariah	1,665,205	2,900,856	-	4,566,061	Sharia
Saldo per 31 Desember 2023	20,867,035	11,765,666	1,296	32,633,997	Balance as of December 31, 2023
Jumlah bruto dari pembiayaan yang mengalami penurunan nilai secara individu	25,449,014	14,755,644	--	40,204,658	Gross amount of financing determined to be individually impaired

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan
Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya
(lanjutan)**

i. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

6. Jumlah pembiayaan dan piutang yang mengalami penurunan nilai secara individual pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp25.982.163 dan Rp40.204.658 yang terdiri dari pembiayaan dan piutang dalam Rupiah masing-masing sebesar Rp17.121.158 dan Rp25.143.199 dan pembiayaan dan piutang dalam Dolar Amerika Serikat masing-masing sebesar Rp8.861.005 dan Rp15.061.459. LPEI telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas pembiayaan dan piutang yang mengalami penurunan nilai/bermasalah pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp14.560.863 dan Rp27.767.424.

7. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, saldo pembiayaan dan piutang yang direstrukturisasi oleh LPEI adalah Rp26.607.294 dan Rp42.886.446 serta cadangan kerugian penurunan nilai atas pembiayaan dan piutang tersebut, telah dibentuk oleh LPEI masing-masing sebesar Rp16.433.618 dan Rp29.800.151. Skema restrukturisasi kredit meliputi perpanjangan dan penjadwalan kembali jangka waktu kredit, penurunan suku bunga kredit dan skema restrukturisasi lain.

8. Per tanggal 23 Juni 2022, OJK telah menerbitkan POJK No. 9 tahun 2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang menggantikan POJK No. 40 tahun 2015.

Dimana berdasarkan Pasal 55 No. 3, LPEI wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah yang diperlukan agar kualitas aset senantiasa membaik dengan menjaga agar nilai pembiayaan bermasalah berada pada level yang terkendali.

**9. Financing and Receivables, Sharia
Financing and Receivables, and Other
Receivables (continued)**

**i. Other significant information
(continued)**

6. As of December 31, 2024 and 2023, gross carrying amounts of total financing and receivables that impaired individual amounted to Rp25,982,163 and Rp40,204,658, respectively, which consist of financing and receivables in Rupiah of Rp17,121,158 and Rp25,143,199, respectively, and financing and receivables in United States Dollars of Rp8,861,005 and Rp15,061,459, respectively. LPEI has provided allowance for impairment losses on the impaired/non-performing financing and receivables amounting to Rp14,560,863 and Rp27,767,424 as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

7. As of December 31, 2024 and 2023, the outstanding balance of financing and receivables which are restructured amounted to Rp26,607,294 and Rp42,886,446, respectively, and the related allowance for impairment losses provided by LPEI amounted to Rp16,433,618 and Rp29,800,151, respectively. Financing restructuring involves extension and rescheduling of loan maturity date, reduction of interest rate and other restructuring scheme.

8. As of June 23, 2022, OJK has issued POJK No. 9 of 2022 concerning Supervision of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia which replaces POJK No. 40 of 2015.

Where based on Article 55 No. 3, LPEI is obliged to assess, monitor, and take the necessary steps so that asset quality always improves by keeping the value of non-performing financing at a controlled level.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan
Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya
(lanjutan)**

**i. Informasi signifikan lainnya
(lanjutan)**

Per 31 Desember 2024 dan 2023, ikhtisar pembiayaan dan piutang bermasalah berdasarkan sektor ekonomi dan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan PMK No. 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI adalah sebagai berikut:

31 Desember 2024

	Pembiayaan dan piutang bermasalah/ <i>Non-performing financing and receivables</i>	Cadangan kerugian penurunan nilai/ <i>Allowance for impairment losses</i>
Rupiah		
Perindustrian	5,990,171	4,667,071
Pertanian, perburuan, dan sarana pertanian	2,610,996	2,596,034
Pertambangan	573,078	502,845
Perdagangan, restoran dan hotel	509,278	508,082
Listrik, Gas, dan Air	416,619	416,619
Jasa dunia usaha	313,926	313,926
Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi	206,972	113,875
Konstruksi	35,202	35,203
Jasa-jasa sosial/masyarakat	15,823	15,823
Lain-lain	121,990	60,069
	10,794,055	9,229,547
Dolar Amerika Serikat		
Perindustrian	2,360,681	1,746,362
Pertambangan	2,036,490	1,762,374
Perdagangan, restoran dan hotel	672,088	623,055
Pertanian, perburuan, dan sarana pertanian	446,658	413,191
	5,515,917	4,544,982
Total	16,309,972	13,774,529

**9. Financing and Receivables, Sharia
Financing and Receivables, and Other
Receivables (continued)**

**i. Other significant information
(continued)**

As of December 31, 2024 and 2023, a summary of non-performing financing and receivables based on economic sector and related allowance for impairment losses based on PMK No. 58/PMK.06/2020 regarding Development and Supervision of LPEI, is as follows:

December 31, 2024

Rupiah
Industry
Agriculture, hunting, and agriculture services
Mining
Trading, restaurants and hotel
Electricity, gas and water
Business services
Transportation, warehousing, and communication
Construction
Social services/society
Others
United States Dollar
Industry
Mining
Trading, restaurants and hotel
Agriculture, hunting, and agriculture services
Total

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan
Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya
(lanjutan)**

i. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

31 Desember 2023

	Pembiayaan dan piutang bermasalah/ <i>Non-performing financing and receivables</i>	Cadangan kerugian penurunan nilai/ <i>Allowance for impairment losses</i>
Rupiah		
Perindustrian	12,291,905	10,653,341
Pertanian, perburuan, dan sarana pertanian	4,261,501	4,058,990
Perdagangan, restoran dan hotel	1,187,592	1,157,460
Pertambangan	1,092,634	1,078,213
Jasa dunia usaha	441,647	441,647
Listrik, Gas, dan Air	429,295	353,081
Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi	225,375	225,375
Konstruksi	68,175	68,175
Jasa-jasa sosial/masyarakat	26,372	19,299
Lain-lain	124,379	59,493
	<u>20,148,875</u>	<u>18,115,074</u>
Dolar Amerika Serikat		
Perindustrian	8,118,618	7,316,374
Pertambangan	2,264,654	1,943,912
Perdagangan, restoran dan hotel	795,575	678,357
Pertanian, perburuan, dan sarana pertanian	457,780	379,712
Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi	304,597	304,597
Jasa-jasa sosial/masyarakat	7,699	7,699
	<u>11,948,923</u>	<u>10,630,651</u>
Total	<u>32,097,798</u>	<u>28,745,725</u>

Rupiah	
Industry	
Agriculture, hunting, and agriculture services	
Trading, restaurants and hotel	
Mining	
Business services	
Electricity, gas and water	
Transportation, warehousing, and communication	
Construction	
Social services/society	
Others	
United States Dollar	
Industry	
Mining	
Trading, restaurants and hotel	
Agriculture, hunting, and agriculture services	
Transportation, warehousing, dan communication	
Social services/society	
Total	

9. Penghapusbukuan kredit macet

Pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, LPEI melaksanakan penghapusbukuan kredit macet masing-masing sebesar Rp15.891.949 dan Rp2.181.257. Adapun kriteria debitur yang dapat dihapusbukukan meliputi:

- Fasilitas kredit telah digolongkan macet;
- Fasilitas kredit telah dibentuk dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebesar 100% (seratus persen) dari pokok kredit macetnya;
- Telah dilakukan berbagai upaya penagihan dan penyelamatan, namun tidak berhasil;

9. Writing off bad loans

For the years ending December 31, 2024 and 2023, LPEI has written off bad loans amounting to Rp15,891,949 and Rp2,181,257, respectively. The criteria for debtors that can be written off include:

- The credit facility has been classified as loss;
- The credit facility has been established with an Allowance for Impairment Losses (CKPN) of 100% (one hundred percent) of the principal for bad loans;
- Several attempts at collection and rescue have been made, but to no avail;

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan
Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya
(lanjutan)**

i. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

- d. Usaha debitur sudah tidak memiliki prospek atau kinerja debitur buruk atau tidak ada kemampuan membayar; dan
- e. Hapus buku dilakukan terhadap seluruh kewajiban kreditnya, termasuk yang berasal dari *non-cash loan* sehingga penghapusbukan tidak boleh dilakukan pada sebagian kreditnya (*partial write-off*).

10. Kredit yang dihapusbukukan dicatat di ekstra-komtabel. LPEI terus melakukan usaha-usaha penagihan atas kredit yang telah dihapusbukukan. Kredit ekstra-komtabel ini tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Ikhtisar mutasi kredit ekstra-komtabel untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Saldo awal per 1 Januari	4,823,752	2,791,496
Penghapusbukuan tahun berjalan	15,891,949	2,181,257
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan (<i>cash recoveries</i>)	(135,339)	(73,593)
Lain-lain	475,851	(75,408)
Saldo akhir	21,056,213	4,823,752

Lain-lain merupakan selisih kurs karena penjabaran mata uang asing, pencatatan kembali aset yang telah dihapusbuku dan lainnya.

11. Rasio pembiayaan dan piutang usaha kecil dan menengah terhadap total pembiayaan dan piutang LPEI yang mana tidak termasuk pembiayaan yang merupakan Penugasan Khusus pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar 18,30% dan 18,37%.

**9. Financing and Receivables, Sharia Financing
and Receivables, and Other Receivables
(continued)**

i. Other significant information (continued)

- d. The debtor's business has no prospects or the debtor's performance is poor or there is no ability to pay; and
- e. Write-offs are carried out on all of its credit obligations, including those originating from *non-cash loans* so that write-offs may not be made on a portion of its credit (*partial write-off*).

10. Write-off credits are recorded in the extra-committable. LPEI continues to make efforts to collect written-off loans. These extra-comtable credits are not presented in the consolidated statements of financial position. The summary of movements of extra-comtable credit for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:

Beginning balance as of January 1
Written-off current year
Receipt of credit that has been
Written-off
Others
Ending balance

Others represent exchange differences due to translation of foreign currencies, re-recording of assets that have been written off and others.

11. The ratio of small medium enterprises financing and receivables to total financing and receivables of LPEI, which does not include loan under National Interest Account as of December 31, 2024 and 2023, are 18.30% and 18.37%, respectively.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan
Piutang Syariah dan Piutang Lainnya
(lanjutan)**

i. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

12. LPEI memiliki pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE) pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.757 dan Rp77.457. Fasilitas KURBE merupakan bentuk pembiayaan yang disediakan oleh LPEI untuk para pelaku usaha dengan skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berorientasi ekspor. KURBE diluncurkan untuk membantu para pelaku bisnis mikro, kecil, dan UMKM yang berorientasi ekspor dalam memperoleh akses pendanaan yang murah. LPEI telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai pada pembiayaan KURBE per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp397 dan Rp73.488.

13. Pembiayaan kepada PT Garuda Indonesia Airlines Tbk

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 18 Undang-Undang No. 02 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI dapat melaksanakan penugasan khusus dari Pemerintah untuk mendukung program Ekspor nasional atas biaya Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang terkait dengan penugasan khusus pelaksanaan program Ekspor nasional diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.08/2017 tentang Penugasan Khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (PMK No. 198/2017) yang saat ini telah dicabut dan diganti dengan PMK 183/PMK.08/2021 tentang Penugasan Khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (PMK No 183/2021).

**9. Financing and Receivables, and Financing
and Sharia Receivables and Other
Receivables (continued)**

**i. Other significant information
(continued)**

12. LPEI has financing under Credit Export related to SME (KURBE) as of December 31, 2024 and 2023, amounting to Rp1,757 and Rp77,457, respectively. KURBE facility is a form of financing provided by LPEI for micro, small, and medium enterprises (SMEs) which are export-oriented. KURBE is launched to help the export-oriented micro, small, and SMEs in gaining access to low cost financing. LPEI has provided allowance for impairment losses on financing to KURBE amounting to Rp397 and Rp73,488, as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

13. Financing to PT Garuda Indonesia Airlines Tbk

Based on the provision of Article 18 of Law No. 02 Year 2009 of concerning Indonesian Export Financing Agency, LPEI may carry out special assignments from the Government to support the national Export program at the Government's expense. Further provisions regarding matters related to special assignments for the implementation of the national Export program are regulated by Regulation of Minister of Finance Number 198/PMK.08/2017 concerning Special Assignments to the Indonesian Export Financing Institution (Regulation of Minister of Finance No. 198/2017) which currently has been revoked and substituted with PMK 183/PMK.08/2021 concerning Special Assignment to the Indonesian Export Financing Institution (Regulation of Minister of Finance No 183/2021).

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan
Piutang Syariah dan Piutang Lainnya
(lanjutan)**

**i. Informasi signifikan lainnya
(lanjutan)**

Melalui PP No. 44 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI menerima PMN sebesar Rp2.500.000 dengan alokasi Rp1.500.000 untuk melaksanakan Penugasan Umum (peningkatan kapasitas usaha) dan Rp1.000.000 untuk melaksanakan program Penugasan Khusus Ekspor (PKE).

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) melalui Surat nomor S-427/MBU/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 menyampaikan usulan Program PKE Industri Penerbangan dan Komite PKE yang terdiri dari perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian sebagai anggota tetap melakukan penilaian melalui beberapa Rapat Teknis dan melaksanakan Rapat Pleno untuk menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan atas usulan program PKE Industri Penerbangan yang telah disampaikan oleh KBUMN.

Melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 428/KMK/08/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI untuk mendukung Industri Penerbangan Indonesia, LPEI ditugaskan untuk menyediakan pembiayaan ekspor dengan alokasi Dana Penugasan Khusus (DPK) sebesar Rp1.000.000 sesuai ketentuan pelaksanaan yang tercantum dalam KMK tersebut. Adapun jangka waktu penugasan atas PKE Industri Penerbangan ini telah berakhir di 31 Desember 2021.

**9. Financing and Receivables, and Financing
and Sharia Receivables and Other
Receivables (continued)**

**i. Other significant information
(continued)**

Through Government Regulation No. 44 Year 2019 regarding Additional State Equity Participation of the Republic of Indonesia into the Equity of the Indonesian Export Financing Institution, LPEI receives State Equity Participation in the amount of Rp2,500,000 with the allocation of Rp1,500,000 to carry out General Assignment (increasing of business capacity) and Rp1,000,000 to carry out the Export Special Assignment (PKE) program.

Ministry of State-Owned Enterprises by the Letter number S-427/MBU/06/2020 dated June 26, 2020 conveyed the proposed PKE Program for Aviation Industry and PKE Committee consisting of representatives of Ministry of Finance, Ministry of Trade, and Ministry of Industry as permanent members to conduct an assessment through several Technical Meetings and carry out Plenary Meetings to prepare recommendations that will be submitted to the Minister of Finance on the proposed PKE program for Aviation Industry that has been submitted by Ministry of State-Owned Enterprises.

Through Decree of Minister of Finance number 428/KMK/08/2020 dated September 23, 2020 concerning Special Assignment to LPEI to support the Indonesian Aviation Industry, LPEI is assigned to provide export financing with with the allocation of the Special Assignment Fund of Rp1,000,000 in accordance with the implementation provisions contained in the Decree of Minister of Finance. The assignment period for this Aviation Industry PKE has ended on December 31, 2021.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan
Piutang Syariah dan Piutang Lainnya
(lanjutan)**

i. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) melalui Surat nomor GARUDA/JKDZ/24610/2020 tanggal 25 September 2020 menyampaikan permohonan pembiayaan modal kerja PKE kepada LPEI. Terhadap permohonan GIAA tersebut, LPEI melakukan evaluasi pembiayaan berdasarkan *Feasibility Study* (FS) yang disusun oleh pihak independen.

LPEI dan GIAA melakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor nomor 19 tanggal 6 Oktober 2020 di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito di Jakarta, dengan limit pembiayaan sebesar Rp1.000.000 dan tujuan penggunaan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMKE) PKE sebagai berikut: (i) Tujuan Pembayaran Sewa Pesawat, (ii) Tujuan Pembayaran *Grounding Notice*, (iii) Tujuan Pembayaran *Direct Cost*, seperti : (1) biaya bahan bakar untuk Rute Penerbangan Internasional atau pengisian bahan bakar di luar wilayah Republik Indonesia; (2) biaya perawatan pesawat; (3) biaya sewa pesawat kepada *Lessor*; dan (4) biaya pelayanan pesawat dan bandara atas Rute Penerbangan Internasional.

Per 27 Juni 2022, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memutuskan Homologasi atas PKPU dan Restrukturisasi GIAA berdasarkan Putusan No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian tertanggal 27 Juni 2022 antara GIAA dengan Para Kreditornya; dan menghukum GIAA dan seluruh krediturnya serta pihak-pihak yang disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian tertanggal 27 Juni 2022 untuk tunduk dan mematuhi, serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut.

**9. Financing and Receivables, and Financing
and Sharia Receivables and Other
Receivables (continued)**

**i. Other significant information
(continued)**

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) by the Letter number GARUDA/JKDZ/24610/2020 dated September 25, 2020 submitted an application for PKE working capital financing to LPEI. With respect to the GIAA application, LPEI conducted a financing evaluation based on the *Feasibility Study* (FS) prepared by an independent party.

LPEI and GIAA signed the Export Working Capital Credit Agreement Deed number 19 dated October 6, 2020 in front of Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito in Jakarta, with a financing limit of Rp1,000,000 and the purpose of using the PKE Working Capital Credit (KMKE) facility as follows: (i) Purpose of Aircraft Charter Payment, (ii) Purpose of Grounding Notice Payment, (iii) Purpose of Direct Cost Payment, such as: (1) fuel charges for International Flight Routes or refueling outside the territory of the Republic of Indonesia; (2) aircraft maintenance costs; (3) aircraft rental fees to Lessors; and (4) aircraft and airport service fees for International Flight Routes.

As of June 27, 2022, the Central Jakarta Commercial Court has decided on the Homologation of PKPU and GIAA Restructuring based on Decision No. 425/Pdt.SusPKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst by stating san and legally binding Settlement Agreement dated June 27, 2022 between GIAA and its Creditors; and punish GIAA and all of its creditors as well as the parties mentioned in the Settlement Agreement dated June 27, 2022 to comply with, comply with, and implement the contents of the Settlement Agreement.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan
Piutang Syariah dan Piutang Lainnya
(lanjutan)**

i. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

Per 31 Desember 2023, GIAA memiliki Fasilitas KMKE PKE dengan pembiayaan sebesar Rp994.418 sesuai dengan tujuan penggunaan dan melaksanakan kegiatan monitoring pemenuhan *covenant* debitur. LPEI telah melakukan kegiatan monitoring baik *onsite* dengan melakukan *site visit* ke lokasi usaha dan *offsite* berupa penyampaian laporan-laporan kepada Komite PKE.

Pelaksanaan pemberian KMKE PKE kepada GIAA pada tahun 2020 tersebut telah sesuai dengan PMK No. 198/2017 (yang saat ini telah dicabut dan diganti dengan PMK No. 183/2021) dan ketentuan dalam KMK nomor 428/KMK/08/2020.

Per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 LPEI menghitung CKPN atas pembiayaan dalam rangka Penugasan Khusus yang diberikan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menggunakan metode arus kas yang didiskontokan dengan tingkat diskonto sebesar 0,1% (tingkat suku bunga setelah restrukturisasi) berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor S-194/MK.08/2023 tentang Penetapan Penggunaan Asumsi Tingkat Diskonto Berdasarkan Tingkat Suku Bunga Setelah Restrukturisasi Dalam Perhitungan CKPN.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, asumsi tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan CKPN atas pembiayaan dalam rangka Penugasan Khusus yang diberikan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk adalah 3,94% (tingkat suku bunga sebelum restrukturisasi).

**9. Financing and Receivables, and Financing
and Sharia Receivables and Other
Receivables (continued)**

**i. Other significant information
(continued)**

As of December 31, 2023, GIAA has the Working Capital Credit of National Interest Account Facility with outstanding in the amount of Rp994,418 in accordance with the intended use and carried out monitoring activities for the fulfillment of debtor covenants. LPEI has carried out monitoring activities both onsite by conducting site visits to business locations and offsite in the form of submitting reports to the National Interest Account Committee.

The implementation of the granting of the Working Capital Credit of National Interest Account to GIAA in 2020 was in accordance with Regulation of Minister of Finance No. 198/2017 (which has now been revoked and substituted with Regulation of Minister of Finance No. 183/2021) and the provisions in Decree of Minister of Finance number 428/KMK/08/2020.

As of December 31, 2024 and 2023, LPEI calculate CKPN on financing for National Interest Account provided to PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk using the discounted cash flow method at a discount rate of 0.1% (interest rate after restructuring) based on a Letter from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, Number S-194/MK.08/2023 concerning Determination of the Use of Discount Rates Assumption Based on Interest Rates After Restructuring in the Calculation of CKPN.

According to the Indonesian Financial Accounting Standards, the discount rate assumption used in calculating the Allowance for Impairment Losses on financing for National Interest Account provided to PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk is 3.94% (interest rate before restructuring).

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan
Piutang Syariah dan Piutang Lainnya
(lanjutan)**

i. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

Perbandingan hasil perhitungan CKPN atas pembiayaan dalam rangka Penugasan Khusus yang diberikan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk per 31 Desember 2024 dan 2023 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

Keterangan/Description	2024		2023	
	Perhitungan CKPN berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia/ Calculation of CKPN based on the Letter from the Minister	Perhitungan CKPN berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia / Calculation of CKPN based on the Indonesian Financial	Perhitungan CKPN berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia/ Calculation of CKPN based on the Letter from the Minister	Perhitungan CKPN berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia / Calculation of CKPN based on the Indonesian Financial
Metode / Methodology	Arus kas yang didiskontokan /	Arus kas yang didiskontokan /	Arus kas yang didiskontokan /	Arus kas yang didiskontokan /
Asumsi tingkat diskonto / Discount rate assumptions	0.1%	3.9%	0.1%	3.9%
Laporan posisi keuangan/ Statements of financial position				
Jumlah/ Total CKPN	10,413	525,663	8,302	542,816
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain/ Statement of profit or loss and other comprehensive income				
(Pemulihan) Pembentukan beban CKPN / (Recovery of) Provision of CKPN expense	2,111	(17,153)	(2,111)	(16,023)

Per 31 Desember 2024 dan 2023, LPEI mengakui CKPN pada laporan posisi keuangan konsolidasian atas pembiayaan dalam rangka Penugasan Khusus yang diberikan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp10.413 dan Rp8.302.

**9. Financing and Receivables, and Financing
and Sharia Receivables and Other
Receivables (continued)**

**i. Other significant information
(continued)**

Comparison of the results of CKPN calculation on financing for National Interest Account provided to PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk as of December 31, 2024 and 2023 based on the Letter from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia and Indonesian Financial Accounting Standards is as follows:

As of December 31, 2024 and 2023, LPEI recognised CKPN on the statement of consolidated financial position on financing for National Interest Account provided to PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp10,413 and Rp8,302, respectively.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan
Piutang Syariah dan Piutang Lainnya
(lanjutan)**

i. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

**14. Piutang pembiayaan garansi kepada PT
High Speed Shipyard (HSS)**

Piutang pembiayaan garansi adalah pembayaran klaim oleh LPEI kepada PT Pertamina (Persero) atas *Refund Guarantee* sebesar USD22.654.767, dimana LPEI bertindak sebagai penjamin atas Bank Garansi yang diterbitkan untuk nasabah Konsorsium PT Anggrek Hitam dan PT High Speed Shipyard ("HSS") sebesar USD22.665.347 yang diterbitkan dari tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018. Konsorsium HSS telah gagal melaksanakan pekerjaan atas penyelesaian pembuatan kapal yang dipesan oleh PT Pertamina (Persero) secara tepat waktu, yaitu melewati tenggat waktu maksimal penyelesaian yang telah disepakati bersama pada tanggal 31 Juli 2018.

Pembayaran klaim kepada PT Pertamina (Persero) tersebut di atas berasal dari porsi retensi (yang menjadi bagian) LPEI atas klaim sebesar USD6.089.430, serta cash collateral sebesar USD1.743.757, dan sisanya ditanggung oleh Penjamin Ulang (Reguarantor), yaitu konsorsium PT Asuransi Central Asia, Asia Capital Reinsurance Group Pte Ltd, PT Reasuransi Nasional Indonesia, PT Asuransi Jasa Indonesia, dan PT Asuransi Kredit Indonesia melalui skema penjaminan ulang dan kontra-bank garansi sebesar USD14.684.563.

Sehubungan dengan *recovery* atas klaim yang telah dibayarkan LPEI tersebut, HSS telah menandatangani Perjanjian Pengakuan Hutang sebesar USD20.911.010 kepada LPEI pada tanggal 5 November 2018 dengan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2019 yang diperpanjang sampai 25 Mei 2024.

Piutang pembiayaan garansi tersebut telah dilunasi pada tanggal 17 Mei 2024 sehingga pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar nihil dan Rp3.161.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**9. Financing and Receivables, and Financing
and Sharia Receivables and Other
Receivables (continued)**

i. Other significant information (continued)

**14. Guarantee financing receivables to
PT High Speed Shipyard (HSS)**

Guarantee financing receivables are claims payments by LPEI to PT Pertamina (Persero) for a Refund Guarantee of USD22,654,767 where LPEI acts as guarantor of Bank Guarantees issued to Consortium customers PT Anggrek Hitam and PT High Speed Shipyard ("HSS") amounting USD22,665,347 issued from November 1, 2017 to August 24, 2018. The HSS Consortium has failed to carry out work on the completion of shipbuilding ordered by PT Pertamina (Persero) on time, i.e past the maximum agreed deadline for completion on July 31, 2018.

The payment of claims to PT Pertamina (Persero) above originates from the own retention portion (which is part of) LPEI claims amounting to USD6,089,430, and cash collateral amounting to USD1,743,757, and the balance reinsured by the Reinsurer (Reguarantor), namely PT Asuransi Central Asia Consortium, Asia Capital Reinsurance Group Pte Ltd, PT Reasuransi Nasional Indonesia, PT Asuransi Jasa Indonesia, and PT Asuransi Kredit Indonesia through a re-guarantee scheme and counter-bank aguarantee amounting to USD14,684,563.

Due to the recovery of claims that was paid by LPEI, HSS has signed a Debt Recognition Agreement amounting to USD20,911,010 with LPEI on November 5, 2018, with maturity date on September 30, 2019 which has been extended up to May 25, 2024.

The guarantee financing receivables was paid on May 17, 2024 so that as on December 31, 2024 and 2023, are nil and Rp 3.161.

10. Aset Ijarah

Akun ini merupakan objek sewa dari *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT).

10. Ijarah Assets

This account represents lease object transaction from *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT).

	2024	2023	
Mesin	96,281	--	Machinery
	96,281	--	
Akumulasi Penyusutan	(27,473)	--	Accumulated depreciation
	68,808	--	Total

11. Asuransi dan Penjaminan

11. Insurance and Guarantee

a. Piutang asuransi dan penjaminan

a. Insurance and guarantee receivables

	2024	2023	
Piutang Asuransi			Insurance Receivables
Rupiah			Rupiah
Piutang proteksi piutang dagang	34	494	Trade receivable protection receivables
Piutang asuransi kegagalan ekspor	82	67	Export failure insurance receivables
	116	561	
Mata uang asing			Foreign currency
Piutang proteksi piutang dagang	6,478	7,408	Trade receivable protection receivables
Piutang asuransi kegagalan ekspor	43	116	Export failure insurance receivables
	6,521	7,524	
	6,637	8,085	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3,445)	--	Allowance for impairment losses
Subtotal	3,192	8,085	Subtotal
Piutang Penjaminan			Guarantee receivables
Rupiah			Rupiah
Piutang penjaminan-PEN	--	66,974	Guarantee receivables - PEN
Subtotal	--	66,974	Subtotal
Total	3,192	75,059	Total

b. Aset reasuransi

b. Reinsurance assets

	2024	2023	
Premi yang belum diakui sebagai pendapatan			Unearned premium income
Rupiah			Rupiah
Proteksi piutang dagang	52	104	Trade receivable protection
Asuransi kegagalan ekspor	--	14	Failure on export insurance
Mata uang asing			Foreign currency
Proteksi piutang dagang	997	2,114	Trade receivable protection
Asuransi kegagalan ekspor	10	17	Failure on export insurance
	1,059	2,249	
Estimasi klaim reasuransi			Estimated reinsurance claim
Rupiah			Rupiah
Proteksi piutang dagang	12	13	Trade receivable protection
Asuransi kegagalan ekspor	2	6	Failure on export insurance
Mata uang asing			Foreign currency
Proteksi piutang dagang	2,974	644	Trade receivable protection
Asuransi kegagalan ekspor	9	21	Failure on export insurance
	2,997	684	
Total	4,056	2,933	Total

Manajemen berpendapat bahwa estimasi klaim asuransi yang dibentuk cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset reasuransi tersebut.

Management believes that the estimated reinsurance claims provided is adequate to cover losses on the reinsurance assets.

11. Asuransi dan Penjaminan (lanjutan)

11. Insurance and Guarantee (continued)

c. Piutang reasuransi

c. Reinsurance receivables

	2024	2023	
Mata uang asing			Foreign currency
Proteksi piutang dagang	670	--	Trade receivable protection
Total	670	--	Total

d. Piutang penjaminan ulang

d. Reguarantee receivables

	2024	2023	
Rupiah	3,094	--	Rupiah
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3,094)	--	Allowance for impairment losses
Total	--	--	Total

e. Liabilitas asuransi

e. Insurance liabilities

	2024	2023	
Premi yang belum diakui sebagai pendapatan			Unearned premium income
Rupiah			Rupiah
Proteksi piutang dagang	120	194	Trade receivable protection
Asuransi kegagalan ekspor	1	27	Failure on export insurance
Mata uang asing			Foreign currency
Proteksi piutang dagang	2,753	4,198	Trade receivable protection
Asuransi kegagalan ekspor	22	34	Failure on export insurance
	2,896	4,453	
Estimasi klaim asuransi			Estimated insurance claim
Rupiah			Rupiah
Proteksi piutang dagang	27	19	Trade receivable protection
Asuransi kegagalan ekspor	6	36	Failure on export insurance
Mata uang asing			Foreign currency
Proteksi piutang dagang	6,551	2,117	Trade receivable protection
Asuransi kegagalan ekspor	27	47	Failure on export insurance
	6,611	2,219	
Total	9,507	6,672	Total

f. Pendapatan asuransi - neto

f. Income from insurance – net

	2024	2023	
Pendapatan asuransi - bruto			Income from insurance - gross
Rupiah			Rupiah
Pendapatan premi bruto	1,032	1,069	Gross written premiums
Pendapatan komisi	162	138	Commission income
Pendapatan asuransi lainnya	1	--	Other insurance income
	1,195	1,207	
Mata uang asing			Foreign currency
Pendapatan premi bruto	13,646	16,859	Gross written premiums
Pendapatan komisi	1,628	2,545	Commission income
Pendapatan asuransi lainnya	--	1,064	Other insurance income
	15,274	20,468	
	16,469	21,675	
Premi reasuransi			Reinsurance premiums
Rupiah			Rupiah
Premi reasuransi	(549)	(555)	Reinsurance premiums
Mata uang asing			Foreign currency
Premi reasuransi	(6,949)	(8,534)	Reinsurance premiums
	(7,498)	(9,089)	
Pendapatan dari asuransi - neto	8,971	12,586	Income from insurance - net

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

11. Asuransi dan Penjaminan (lanjutan)

11. Insurance and Guarantee (continued)

g. Beban klaim bruto asuransi dan beban asuransi lainnya

g. Gross claim expense from insurance and other insurance expenses

	2024	2023	
Beban klaim			Claim expense
Mata uang asing			Foreign currency
Klaim reasuransi	4,970	--	Reinsurance claims
Beban klaim bruto	(9,939)	--	Gross claim expense
	(4,969)	--	
Subtotal beban klaim	(4,969)	--	Subtotal claim expense
Beban asuransi lainnya			Other insurance expense
Rupiah	(163)	(124)	Rupiah
Mata uang asing	(494)	(809)	Foreign currency
Subtotal beban asuransi lainnya	(657)	(933)	Subtotal Other insurance expense
Beban klaim asuransi dan lainnya	(5,626)	(933)	Claim and other insurance expense

h. Pendapatan penjaminan

h. Income from guarantee

	2024	2023	
Rupiah	29,708	39,235	Rupiah
Mata uang asing	36,084	51,292	Foreign currency
Total	65,792	90,527	Total

i. Kenaikan/(Penurunan) pada aset reasuransi - neto

i. Increase/(Decrease) in reinsurance assets - net

	2024	2023	
Rupiah	(82)	(52)	Rupiah
Mata uang asing	1,080	(442)	Foreign currency
Total	998	(494)	Total

j. (Kenaikan)/Penurunan pada liabilitas asuransi

j. (Increase)/Decrease in insurance liabilities

	2024	2023	
Rupiah	121	237	Rupiah
Mata uang asing	(2,672)	822	Foreign currency
Total	(2,551)	1,059	Total

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

11. Asuransi dan Penjaminan (lanjutan)

k. Informasi signifikan lainnya

**Program Penjaminan Pemerintah dalam
Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional**

Dampak dari Pandemi Covid-19 yang muncul di Indonesia sejak bulan Maret 2020 membuat Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (UU No. 2/2020). Pasal 11 Lampiran UU No. 2/2020 mengatur bahwa salah satu program yang dapat dilakukan untuk pemulihan ekonomi nasional adalah kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan Pemerintah.

Skema penjaminan sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 2/2020 pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau

11. Insurance and Guarantee (continued)

k. Other significant information

**Government Guarantee Program in the
Context of National Economic Recovery**

The impact of the Covid-19 Pandemic that has emerged in Indonesia since March 2020 has made the Government stipulated a Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) No. 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic and/or in the Context of Facing Threats that endanger the National Economy and/or Financial System Stability which has been approved by the House of Representatives (DPR) to be later ratified as Law No. 2 of 2020 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2020 on State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic and/or in the Context of Facing Threats that endanger the National Economy and/or Financial System Stability into Law (Law No. 2/2020). Article 11 of Attachment to Law No. 2/2020 stipulates that one of the programs that can be carried out for national economic recovery is a guarantee activity with a scheme set by the Government.

The implementation of the guarantee scheme as stated in Law No. 2/2020 is further regulated in Government Regulation No. 23 of 2020 concerning Implementation of the National Economic Recovery Program in order to Support State Financial Policy for Handling the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic and/or

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

11. Asuransi dan Penjaminan (lanjutan)

k. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

**Program Penjaminan Pemerintah dalam
Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional
(lanjutan)**

Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta
Penyelamatan Ekonomi Nasional (PP
No. 23/2020) yang telah diubah dengan PP
No. 43 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas PP No. 23/2020 (PP No. 43/2020),
dimana Pasal 18 ayat (1) PP No. 43/2020
mengatur bahwa dalam pelaksanaan
penjaminan oleh Pemerintah, Pemerintah
dapat menugaskan LPEI dan/atau PT
Penjaminan Infrastruktur Indonesia
(PT PII) untuk melakukan Penjaminan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
Penjaminan sebagaimana dimaksud pada
PP No. 43/2020 diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan (PMK)
No. 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara
Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku
Usaha Korporasi melalui Badan Usaha
Penjaminan (PMK No. 98/2020) yang telah
diubah kedua kali dengan PMK No.
27/PMK.08/2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan
No. 98/PMK.08/2020 (PMK No. 27/2022).
Pasal 6 PMK No. 98/2020 mengatur bahwa
dalam rangka melaksanakan Penjaminan
Pemerintah, Menteri menugaskan LPEI
untuk memberikan Penjaminan Pemerintah
serta dapat menugaskan LPEI untuk
melakukan Penjaminan Bersama dengan
PT PII. Saat ini LPEI dan PT PII melalui
PMK No. 27/PMK.08/2022 yang
merupakan addendum dari PMK
No. 98/PMK.08/2020 ditunjuk kembali
menjadi badan usaha penjaminan dalam
rangka Pemulihan Ekonomi Nasional
sampai dengan Desember 2022.

11. Insurance and Guarantee (continued)

**k. Other significant information
(continued)**

**Government Guarantee Program in the
Context of National Economic Recovery
(continued)**

*Facing Threats That Endanger the National
Economy and/or Financial System Stability
and Saving the National Economy
(Government Regulation No. 23/2020) which
has been amended by Government
Regulation No. 43 of 2020 concerning
Amendment to Government Regulation
No. 23/2020 (Government Regulation
No. 43/2020), where Article 18 paragraph
(1) of Government Regulation No. 43/2020
regulates that in the implementation of
guarantee by Government, the Government
may assign LPEI and/or PT Penjaminan
Infrastruktur Indonesia (PII) to carry out
Guarantee.*

*Further provision regarding Guarantee
Procedures as referred to in Government
Regulation No. 43/2020 is regulated by
Regulation of Minister of Finance (PMK)
No. 98/PMK.08/2020 regarding Government
Guarantee Procedures for Corporate
Business Players through Guarantee
Business Entity (Regulation of Minister of
Finance No. 98/2020) which has been
amended two times by PMK
No. 27/PMK.08/2022 concerning the Second
Amendment to the Minister of Finance
Regulation of Minister of Finance
No. 98/PMK.08/2020 (Regulation of Minister
of Finance No. 27/2022). Article 6 of
Regulation of Minister of Finance
No 98/2020 regulates that in order to
implement Government Guarantee, the
Minister assigns LPEI to provide
Government Guarantee and may assign
LPEI to carry out Joint Guarantee with PT PII.
Currently LPEI and PT PII through PMK
No. 27/PMK.08/2022 which was addendum
from PMK No. 98/PMK.08/2020 were
reappointed to support the National
Economic Recovery program until December
2022.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

11. Asuransi dan Penjaminan (lanjutan)

k. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

**Program Penjaminan Pemerintah dalam
Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional
(lanjutan)**

Penugasan atas pelaksanaan Penjaminan Pemerintah tersebut kemudian ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 599/KMK.08/2020 tentang Penugasan Kepada LPEI dalam Melaksanakan Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi dalam rangka Pelaksanaan Program PEN (KMK No. 599/2020).

Berdasarkan KMK No. 599/2020 tersebut, LPEI ditugaskan untuk memberikan penjaminan pemerintah kepada pelaku usaha dengan kriteria yang memenuhi strategi pembiayaan ekspor nasional. LPEI dapat memberikan penjaminan kepada pelaku usaha yang kriteria pelaku usahanya tidak dapat dijamin LPEI secara sendiri dan/atau kapasitas penjaminan LPEI mendekati batas maksimal sesuai peraturan perundang-undangan dengan cara melakukan penjaminan bersama dengan PT PII, dengan ketentuan LPEI menanggung porsi retensi paling tinggi sebesar 49%. Pada pelaksanaannya atas Penjaminan bersama, LPEI menanggung porsi retensi sebesar 20%.

Dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Pemerintah oleh LPEI, pasal 11 PMK No. 98/2020 mengatur bahwa Pemerintah melalui Menteri dapat memberikan dukungan berupa *loss limit*, Penyertaan Modal Negara (PMN), dan Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan (IJP) *loss limit*. Dukungan berupa *loss limit* ditujukan untuk membatasi risiko LPEI dalam melaksanakan penugasan Penjaminan Pemerintah pada kondisi tertentu yang diatur dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah melalui Menteri dan LPEI.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

11. Insurance and Guarantee (continued)

**k. Other significant information
(continued)**

**Government Guarantee Program in the
Context of National Economic Recovery
(continued)**

The assignment for the implementation of Government Guarantee is then stipulated in Decree of Minister of Finance No. 599/KMK.08/2020 concerning Assignment to LPEI in Implementing Government Guarantees for Corporate Business Players in the Implementation of PEN Program (KMK No. 599/2020).

Based on the KMK No. 599/2020, LPEI assigned to provide government guarantee to business players with criteria that meet the national export financing strategy. LPEI may provide guarantees to business players whose criteria for business actors cannot be guaranteed by LPEI itself and/or guarantee capacity of LPEI approaching the maximum limit in accordance with the laws and regulations by way of joint guarantee with PT PII, provided that LPEI bears the highest retention portion of 49%. In the implementation of Joint Guarantee, LPEI bears the retention portion of 20%.

In the context of implementing Government Guarantees by LPEI, Article 11 of PMK No. 98/2020 stipulates that the Government through Minister may provide support in the form of loss limits, State Equity Participation (PMN), and Payment Guarantee Service Fees (IJP) loss limits. Support in the form of loss limits is intended to limit the risk of LPEI in carrying out Government Guarantee assignments under certain conditions stipulated in the cooperation agreement between the Government through Minister and LPEI.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

11. Asuransi dan Penjaminan (lanjutan)

k. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

**Program Penjaminan Pemerintah dalam
Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional
(lanjutan)**

Lebih lanjut dukungan *loss limit* diatur dalam perjanjian kerjasama No. PRJ-291/PR/2020 dan 314/PKS/07/2020 antara Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko (DJPPR) dengan LPEI bahwa dukungan *loss limit* diberikan dengan *threshold loss limit* sebesar 85% dari akumulasi IJP yang diterima.

Sebagai Penjamin dalam pelaksanaan Penjaminan Pemerintah, LPEI telah menerima PMN sebesar Rp5.000.000 pada tanggal 30 Desember 2020. Penyertaan modal negara ini merupakan bagian dari dana penugasan khusus dalam melaksanakan penugasan Penjaminan Pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha penjaminan LPEI dan sebagai likuiditas yang dapat digunakan untuk pembayaran ketika terjadi klaim. Tujuan penggunaan PMN tersebut akan ditetapkan kembali ketika pertanggungans Penjaminan Pemerintah telah berakhir. Pelaksanaan program Penjaminan Pemerintah berakhir pada tanggal 17 Desember 2022 dengan masa pertanggungans Penjaminan Pemerintah akan berlangsung sampai dengan tanggal 16 Desember 2025.

	2024	2023
Outstanding Penjaminan		
Penjaminan Sendiri oleh LPEI	1,160,950	2,078,965
Penjaminan bersama PT PII	400,000	1,073,970
Total	1,560,950	3,152,935

Program Penjaminan Pemerintah yang dilakukan oleh LPEI, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11. Insurance and Guarantee (continued)

**k. Other significant information
(continued)**

**Government Guarantee Program in the
Context of National Economic Recovery
(continued)**

Furthermore, *loss limit* support is regulated in the cooperation agreement No. PRJ-291/PR/2020 and 314/PKS/07/2020 between the Ministry of Finance through the Director General of Risk Financing Management (DJPPR) and LPEI that *loss limit* support is provided with a *threshold loss limit* of 85% of accumulated IJP received.

As a guarantor in the implementation of government guarantees, LPEI has received a PMN in the amount of Rp5,000,000 on December 30, 2020. This state equity participation is part of the special assignment fund in carrying out Government Guarantee assignments with the aim of increasing the LPEI guarantee business capacity and as liquidity that can be used for payments when claims occur. The purpose of using the State Equity Participation will be redefined when the Government Guarantee coverage has ended. The implementation of the Government Guarantee program ends on December 17, 2022 with the period of coverage of the Government Guarantee will last until December 16, 2025.

	2024	2023
Guarantee Outstanding		
Self-Guarantee by LPEI	1,160,950	2,078,965
Joint Guarantee with PT PII	400,000	1,073,970
Total	1,560,950	3,152,935

The Government Guarantee Program implemented out by LPEI, is in accordance with applicable regulations.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

12. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi

a. Berdasarkan mata uang, jatuh tempo, dan hubungan

Perincian tagihan dan liabilitas akseptasi berdasarkan mata uang, jatuh tempo, dan hubungan adalah sebagai berikut:

	2024		2023	
	Tagihan akseptasi/ <i>Acceptances receivable</i>	Liabilitas akseptasi/ <i>Acceptances payable</i>	Tagihan akseptasi/ <i>Acceptances receivable</i>	Liabilitas akseptasi/ <i>Acceptances payable</i>
Rupiah				
Pihak ketiga				
Sampai dengan 1 bulan	799	799	--	--
Lebih dari 1 sampai 3 bulan	--	--	7,599	7,599
	799	799	7,599	7,599
Dolar Amerika Serikat				
Pihak ketiga				
Sampai dengan 1 bulan	29,185	29,185	--	--
Lebih dari 1 sampai 3 bulan	62,357	62,357	42,719	42,719
Lebih dari 3 sampai 6 bulan	46,306	46,306	103,534	103,534
	137,848	137,848	146,253	146,253
Total	138,647	138,647	153,852	153,852
Cadangan kerugian penurunan nilai	(521)	--	(622)	--
Neto	138,126	138,647	153,230	153,852

Perincian tagihan akseptasi berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	2024		2023	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ <i>Notional Amount in Foreign currencies</i> (Dalam nilai penuh/ <i>In full amount</i>)	Ekuivalen/ <i>Equivalent Rupiah</i>	Jumlah nosional Mata uang asing/ <i>Notional Amount in Foreign currencies</i> (Dalam nilai penuh/ <i>In full amount</i>)	Ekuivalen/ <i>Equivalent Rupiah</i>
Rupiah		799		7,599
Mata uang asing				
Dolar Amerika Serikat	8,564,613	137,848	9,498,803	146,253
Total		138,647		153,852
Cadangan kerugian penurunan nilai		(521)		(622)
Neto		138,126		153,230

Manajemen LPEI berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutupi kemungkinan penurunan nilai tagihan akseptasi.

12. Acceptances Receivable and Payable

a. By currency, maturity, and relationship

Acceptance's receivable and payable based on currencies, maturity, and relationship are as follows:

			Rupiah
			<i>Third parties</i>
			<i>Up to 1 month</i>
			<i>More than 1 up to 3 months</i>
			United States Dollars
			<i>Third parties</i>
			<i>Up to 1 month</i>
			<i>More than 1 up to 3 months</i>
			<i>More than 3 up to 6 months</i>
			Total
			<i>Allowance for impairment losses</i>
			Net

Acceptances receivable based on currencies are as follows:

			Rupiah
			Foreign currencies
			United States Dollar
			Total
			<i>Allowance for impairment losses</i>
			Net

LPEI management believes that the allowance for impairment losses provided is adequate to cover any possible impairment on acceptance receivables.

12. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi (lanjutan)

**b. Tagihan dan liabilitas akseptasi
Penugasan Khusus**

Tagihan dan liabilitas akseptasi Penugasan Khusus per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah Rp4.571 dan Rp3.391.

**c. Berdasarkan kolektibilitas sesuai
Peraturan OJK**

Kolektibilitas tagihan dan liabilitas akseptasi sesuai Peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 43.

**12. Acceptances Receivable and Payable
(continued)**

**b. Acceptances receivable and payable -
National Interest Account**

Acceptances receivable and payable - National Interest Account as of December 31, 2024 and 2023, are Rp4,571 and Rp3,391, respectively.

**c. By Financial Service Authority Rule
collectibility**

Collectibility acceptance receivable and payable in accordance with Financial Service Authority Rule are disclosed in Note 43.

13. Biaya Dibayar Dimuka

	2024	2023
Asuransi	12,279	11,537
Sistem	7,365	7,723
Profesional	3,471	397
Keanggotaan	293	302
Sewa	133	174
Telekomunikasi	182	325
Total	23,723	20,458

Insurance
System
Professional
Membership
Rent
Telecommunication
Total

13. Prepaid Expenses

14. Aset Tetap

	2024				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance
Harga perolehan					
Pemilikan langsung					
Gedung	1,148,616	--	--	--	1,148,616
Peralatan dan perlengkapan kantor	366,919	188	(14)	3,464	370,557
Kendaraan bermotor	7,351	--	--	--	7,351
	<u>1,522,886</u>	<u>188</u>	<u>(14)</u>	<u>3,464</u>	<u>1,526,524</u>
Aset dalam penyelesaian	843	72,546	--	(3,464)	69,925
Aset hak guna					
Gedung	17,801	664	(544)	--	17,921
Kendaraan bermotor	4,891	1,163	--	--	6,054
Total	<u>1,546,421</u>	<u>74,561</u>	<u>(558)</u>	<u>--</u>	<u>1,620,424</u>
Akumulasi penyusutan					
Pemilikan langsung					
Gedung	303,061	57,326	--	--	360,387
Peralatan dan perlengkapan kantor	163,318	1,223	(14)	--	164,527
Perangkat keras	53,083	6,840	--	--	59,923
Perangkat lunak	92,136	10,295	--	--	102,431
Kendaraan bermotor	3,630	1,440	--	--	5,070
	<u>615,228</u>	<u>77,124</u>	<u>(14)</u>	<u>--</u>	<u>692,338</u>
Aset hak guna					
Gedung	12,198	3,353	(544)	--	15,007
Kendaraan bermotor	4,360	1,138	--	--	5,498
	<u>631,786</u>	<u>81,615</u>	<u>(558)</u>	<u>--</u>	<u>712,843</u>
Nilai buku	<u>914,635</u>				<u>907,581</u>

Cost
Acquisition
Building
Office furnitures
and fixtures
Motor vehicles
Construction in progress
Right of use asset
Building
Motor vehicles
Total
Accumulated
depreciation
Direct ownership
Building
Office furnitures
and fixtures
Hardware
Software
Motor vehicles
Right of use asset
Building
Motor vehicles
Book value

14. Premises and Equipment

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

14. Aset Tetap (lanjutan)

14. Premises and Equipment (continued)

2023						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	Cost
Harga perolehan						Acquisition
Pemilikan langsung						Direct ownership
Gedung	1,148,616	--	--	--	1,148,616	Building
Peralatan dan perlengkapan kantoor	334,105	993	--	31,822	366,920	Office furnitures and fixtures
Kendaraan bermotor	7,351	--	--	--	7,351	Motor vehicles
	<u>1,490,072</u>	<u>993</u>	<u>--</u>	<u>31,822</u>	<u>1,522,887</u>	
Aset dalam penyelesaian	16,548	17,732	(1,615)	(31,822)	843	Construction in progress
Aset hak guna						Right of use asset
Gedung	13,967	3,834	--	--	17,801	Building
Kendaraan bermotor	4,891	--	--	--	4,891	Motor vehicles
Total	<u>1,525,478</u>	<u>22,559</u>	<u>(1,615)</u>	<u>--</u>	<u>1,546,422</u>	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Pemilikan langsung						Direct ownership
Gedung	244,081	58,980	--	--	303,061	Building
Peralatan dan perlengkapan kantoor	269,439	39,099	--	--	308,538	Office furnitures and fixtures
Kendaraan bermotor	2,190	1,440	--	--	3,630	Motor vehicles
	<u>515,710</u>	<u>99,519</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>615,229</u>	
Aset hak guna						Right of use asset
Gedung	8,610	3,588	--	--	12,198	Building
Kendaraan bermotor	3,323	1,037	--	--	4,360	Motor vehicles
	<u>527,643</u>	<u>104,144</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>631,787</u>	
Nilai buku	<u>997,835</u>				<u>914,635</u>	Book value

Beban penyusutan yang dibebankan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023, adalah masing-masing sebesar Rp81.615 dan Rp104.144 (Catatan 28).

The depreciation expense for the years ended December 31, 2024 and 2023, amounted to Rp81,615 and Rp104,144, respectively (Note 28).

Rincian aset dalam penyelesaian per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Details of construction in progress as of December 31, 2024 and 2023, are as follows:

2024				
	Total	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Estimasi penyelesaian/ Estimated completion	
Aset dalam penyelesaian	<u>69,925</u>	44.83%	Q3 2025	Construction in progress
2023				
	Total	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Estimasi penyelesaian/ Estimated completion	
Aset dalam penyelesaian	<u>843</u>	10.00%	Q2 2025	Construction in progress

Pada 31 Desember 2024 dan 2023, jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah masing-masing sebesar Rp289.520 dan Rp274.363.

As of December 31, 2024 and 2023, the gross amount of premises and equipment which have been fully depreciated and are still in use amounted to Rp289,520 and Rp274,363.

Selama tahun 2024 dan 2023, LPEI tidak melakukan penjualan aset tetap.

During the year 2024 and 2023, LPEI does not sell premises and equipment.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

14. Aset Tetap (lanjutan)

Aset tetap diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan pihak ketiga. Pada 31 Desember 2024 dan 2023, LPEI menggunakan PT Asuransi Central Asia dengan nilai pertanggungan sebesar Rp5.870 dan Rp7.315, PT Askrindo dengan nilai pertanggungan sebesar nihil dan Rp147.149 dan PT Asuransi Tri Pakarta dengan nilai pertanggungan sebesar Rp129.959 dan Nihil. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungan.

Berdasarkan penelaahan Manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada 31 Desember 2024 dan 2023.

LPEI menyewa beberapa aset termasuk gedung kantor, rumah dinas, dan kendaraan. Rata-rata masa sewa berdasarkan kontrak yang dimiliki LPEI adalah 2,5 tahun. Pada 31 Desember 2024 dan 2023, LPEI memiliki sewa tertentu dengan masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa aset bernilai rendah sebesar Rp16.230 dan Rp19.030 yang dicatat sebagai beban umum dan administrasi. LPEI menerapkan pengecualian untuk sewa jangka pendek dan sewa bernilai rendah untuk sewa tersebut.

14. Premises and Equipment (continued)

Premises and equipment are covered by insurance against fire and other risks under certain package policies issued by third parties. As of December 31, 2024 and 2023, LPEI has obtained insurance coverage from PT Asuransi Central Asia with sum insured amounting to Rp5,870 and Rp7,315, PT Askrindo with sum insured amounting to Nil and Rp147,149 and PT Asuransi Tri Pakarta with sum insured amounting to Rp129,959 and Nil. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover losses arising from insured premises and equipment.

Based on Management's assessment, there are no events or changes in circumstances which may indicate any impairment in the value of premises and equipment as of December 31, 2024 and 2023.

LPEI leases several assets including office buildings, official houses, and vehicles. The average lease period based on the contracts held by LPEI is 2.5 years. As of December 31, 2024 and 2023, LPEI also has certain leases with lease terms of 12 months or less and leases of low value assets amounting Rp16,230 and Rp19,030 which are recorded as general and administrative expenses. LPEI applies exemptions a license for short term leases and low value leases for these leases.

15. Aset Lain-lain

	2024	2023
Rupiah		
Bunga yang masih akan diterima:		
Penempatan pada bank	570	5,808
Efek-efek	4,407	7,557
Uang muka	2,112	7,606
Agunan yang diambil alih setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp149.806 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	2,305	2,305
Uang jaminan	847	878
Lain-lain	1,554	2,845
	<u>11,795</u>	<u>26,999</u>
Mata uang asing		
Bunga yang masih akan diterima:		
Penempatan pada bank	3,051	355
Efek-efek	3,478	3,545
Uang muka	97	800
Lain-lain	5,000	4,901
	<u>11,626</u>	<u>9,601</u>
Total	<u>23,421</u>	<u>36,600</u>

15. Other Assets

Rupiah
Accrued interest receivable:
Placements with banks
Securities
Advances
Foreclosed assets
net of allowance for impairment losses of Rp149,806 as of December 31, 2024 and 2023
Refundable deposits
Others
Foreign currencies
Accrued interest receivable:
Placements with banks
Securities
Advances
Others
Total

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

15. Aset Lain-lain (lanjutan)

Termasuk di dalam lain-lain adalah dana talangan masing-masing sebesar Rp5.761 dan Rp12.312 pada 31 Desember 2024 dan 2023. CKPN masing-masing sebesar Rp3.946 dan Rp12.312 pada 31 Desember 2024 dan 2023.

16. Perpajakan

a. Pajak dibayar dimuka

Akun ini merupakan pajak dibayar dimuka PPh 21 sebesar Rp 2.827. Saldo tersebut merupakan kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pasal 21 yang timbul akibat perbedaan perhitungan antara *Tax Effective Rate* (TER) dan tarif progresif PPh 21 di akhir tahun.

Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, kelebihan pembayaran pajak penghasilan PPh 21 ini dapat dikompensasikan pada periode pajak berikutnya. Pada tanggal 31 Januari 2025, seluruh saldo pajak dibayar dimuka pajak penghasilan pasal 21 telah dikompensasikan terhadap kewajiban pajak penghasilan Pasal 21 masa Januari 2025 (Catatan 46b).

b. Utang pajak

	2024	2023
LPEI		
PPh Pasal 21	--	5,445
PPh Pasal 22	102	1
PPh Pasal 23	204	624
PPh Pasal 26	7,006	8,012
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	1,402	2,173
PPh Pasal 4(2)	13	24
Subtotal	8,727	16,279
Entitas Anak		
PPh Pasal 23	1	--
Total	8,728	16,279

c. Manfaat (beban) pajak

	2024	2023
LPEI		
Pajak tangguhan	150,271	(1,583,663)
Entitas Anak		
Pajak Tangguhan	338	--
Total	150,609	(1,583,663)

15. Other Assets (continued)

Include in others is bailout amounting to Rp5,761 and Rp12,312 as of December 31, 2024 and 2023. CKPN amounting to Rp3,946 and Rp12,312 as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

16. Taxes

a. Prepaid tax

This account represent prepaid PPh 21 amounting to Rp2,827. This balance represents an overpayment of employee income tax (PPh 21) due to differences in the calculation between the *Tax Effective Rate* (TER) and the progressive rate of PPh 21 at the year-end.

In accordance with applicable tax regulations, this overpayment of PPh 21 can be compensated in the following tax period. As of January 31, 2025, the entire Prepaid PPh 21 balance has been fully offset against the PPh 21 tax liability for January 2025, resulting in no remaining balance recognized as a prepaid tax asset as of that date (Note 46b).

b. Taxes payable

LPEI
Income Tax Article 21
Income Tax Article 22
Income Tax Article 23
Income Tax Article 26
Value Added Tax (VAT)
Income Tax Article 4(2)
Subtotal
Subsidiary
Income Tax Article 23
Total

c. Tax income (expense)

LPEI
Deferred tax
Subsidiaries
Deferred Tax
Total

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

16. Perpajakan (lanjutan)

c. Manfaat (beban) pajak (lanjutan)

Rekonsiliasi antara (rugi)/laba sebelum beban pajak, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Laba (rugi) sebelum beban pajak - LPEI	82,254	(16,530,664)
Perbedaan waktu:		
Penyisihan/(pembalikan) cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif untuk pembiayaan dan piutang dan pembiayaan/piutang syariah	(8,482,871)	2,902,193
Penyisihan imbalan kerja	(5,692)	(5,983)
Penyusutan aset tetap	(16,915)	7,151
Estimasi klaim asuransi	4,391	(698)
Estimasi klaim penjaminan	(982)	(3,083)
Penyisihan/cadangan kerugian piutang pembiayaan garansi	(3,161)	(40,703)
Penyisihan/cadangan kerugian piutang tresuri	(311)	(112)
Penyisihan/cadangan kerugian piutang akseptasi	(101)	378
kerugian aset lain-lain	(8,347)	4,308
Penyisihan/cadangan kerugian penurunan nilai AYDA	--	407
Lain-lain		--
Penyesuaian atas liabilitas sewa	215	3,943
Penyesuaian atas aset hak guna	134	(4,625)
Rugi fiskal	128,250	--
Penyisihan/cadangan insentif	14,294	--
Penyisihan/cadangan klaim Reguarantor	3,094	--
	(8,368,002)	2,863,176
Perbedaan tetap:		
Hubungan masyarakat	4,905	6,354
Jamuan dan representasi	2,162	3,323
Kenikmatan pegawai	14,127	1,769
Aktivitas karyawan	642	583
Lain-lain	2,764	7,396
	24,600	19,425
Penghasilan yang sudah dikenakan pajak final	(225,335)	(297,481)
Rugi fiskal	(8,486,483)	(13,945,544)
Akumulasi rugi fiskal tahun sebelumnya		
Tahun 2019	(4,738,415)	(4,740,685)
Tahun 2020	(334,775)	(334,775)
Tahun 2022	(2,970,739)	(2,970,739)
Tahun 2023	(13,945,544)	--
Akumulasi rugi fiskal	(30,475,956)	(21,991,743)

Pada tahun 2023 terdapat penambahan aset pajak tangguhan berupa penyesuaian atas liabilitas sewa dan penyesuaian aset sewa guna usaha berdasarkan amandemen PSAK 46 yang berlaku 1 Januari 2023 paragraf 98 L.

16. Taxes (continued)

c. Tax income (expense) (continued)

A reconciliation between (loss)/profit before tax expense, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income for the period ended December 31, 2024 and 2023, are as follows:

	2024	2023
Profit (loss) before tax expense - LPEI		
Timing differences:		
Provision for/(reversal of) impairment losses on earning assets for financing and receivables and sharia financing/receivables		
Provision for employee benefits		
Depreciation of premises and equipment		
Estimated insurance claim		
Estimated guarantee claim		
Provision for/allowance for impairment guarantee financing receivables		
Provision for/allowance for impairment treasury		
Provision for/allowance for impairment acceptance		
other impairment losses		
Provision for/allowance for losses on foreclosed assets		
Other		
Adjustment on lease liabilities		
Adjustment on right-of-use asset		
Fiscal loss		
Provision/allowance for other benefit		
Provision/allowance for Reguarantee receivable		
Permanent differences:		
Public relationship		
Representation and entertainment		
Employees' benefits in kind		
Employee activities		
Others		
Income subject to final tax		
Fiscal loss		
Accumulated prior year's fiscal loss		
Year 2019		
Year 2020		
Year 2022		
Year 2023		
Accumulated fiscal loss		

In 2023 there will be additional deferred tax assets in the form of adjustments to lease liabilities and adjustments to leased assets based on amendments to PSAK 46 which came into effect on January 1, 2023 paragraph 98 L.

16. Perpajakan (lanjutan)

c. Manfaat (beban) pajak (lanjutan)

Pajak atas laba sebelum pajak berbeda dari nilai teoritis yang mungkin muncul apabila menggunakan rata-rata tertimbang tarif pajak terhadap laba dalam jumlah sebagai berikut:

	2024	2023
Laba (rugi) sebelum beban pajak konsolidasian	81,916	(16,530,664)
Beban pajak penghasilan yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku	(18,022)	3,636,746
Pengaruh pajak atas beda tetap pada tarif pajak yang berlaku	44,162	61,172
Pengaruh Pajak Lainnya	150,609	-
Penyisihan atas aset pajak tangguhan	(26,140)	(5,281,581)
Manfaat (beban) pajak	150,609	(1,583,663)

Taksiran penghasilan kena pajak tahun 2023 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilaporkan LPEI kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). LPEI telah melaporkan SPT tahun 2023 kepada KPP pada tanggal 29 April 2024.

16. Taxes (continued)

c. Tax income (expense) (continued)

The tax on profit before tax differs from the theoretical amount that would arise using the weighted average tax rate applicable to profits as follows:

Profit (loss) before tax expense consolidated
Corporate income tax based on the prevailing tax rate
Effect of tax on permanent differences with prevailing tax rate
The prevailing tax rate - Others
Allowance for deferred tax assets
Tax income (expense)

Estimated taxable income in 2023 is consistent with Annual Tax Return (SPT) for corporate income tax reported by LPEI to Tax Office (KPP). LPEI has reported its SPT fiscal year 2023 to the tax office on April 29, 2024.

d. Aset (liabilitas) pajak tangguhan neto

d. Deferred tax asset (liabilities) net

	2024				
	1 Januari/ January 1	Dibebankan ke laporan laba rugi/ Charged to profit or loss	Dikreditkan ke laporan (rugi) penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive (loss) income	31 Desember/ December 31	
Liabilitas atas imbalan kerja	31,356	(1,253)	536	30,639	Liability for employee benefits
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif	2,104,126	(1,866,232)	--	237,894	Allowance for impairment losses on earning assets
Estimasi klaim penjaminan	1,429	(216)	--	1,213	Estimated guarantee claim
Laba yang belum direalisasi atau efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual - neto	5,167	--	(152)	5,015	Unrealized gain on available-for-sale securities - net
Estimasi klaim asuransi	489	966	--	1,455	Estimated insurance claim
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain - lain	2,709	(1,836)	--	873	Allowance for impairment losses on other receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang garansi	695	(695)	--	--	Allowance for impairment losses on guarantee receivables
Aset tetap	8,965	(3,721)	--	5,244	Premises and equipment
Cadangan kerugian penurunan nilai tresuri	87	(68)	--	19	Allowance for impairment losses on treasury
Cadangan kerugian penurunan nilai akseptasi	137	(22)	--	115	Allowance for impairment losses on acceptancy
Cadangan kerugian penurunan nilai AYDA	32,957	--	--	32,957	Allowance for impairment losses on AYDA
Penyesuaian atas liabilitas sewa	868	47	--	915	Adjustment on lease liabilities
Penyesuaian atas aset hak guna	(1,017)	29	--	(988)	Adjustment on right-of-use asset
Penyisihan/cadangan	--	3,483	--	3,483	Provision/allowance for other benefit
Penyisihan/cadangan klaim reguarantor	--	680	--	680	Provision/allowance for reguarantee receivable
Akumulasi rugi pajak	--	28,215	--	28,215	Tax loss carry forward
Jumlah	2,187,968	(1,840,623)	384	347,729	Total
Penyisihan atas pajak tangguhan	(2,187,968)	1,991,232	--	(196,736)	Allowance for deferred tax
Neto	--	150,609	384	150,993	Net

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

16. Perpajakan (lanjutan)

**d. Aset (liabilitas) pajak tangguhan neto
(lanjutan)**

	2023				
	1 Januari/ January 1	Dibebankan ke laporan laba rugi/ Charged to profit or loss	Dikreditkan ke laporan (rugi) penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive (loss) income	31 Desember/ December 31	
Liabilitas atas imbalan kerja	31,794	(1,316)	878	31,356	Liability for employee benefits
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif	1,465,643	638,483	--	2,104,126	Allowance for impairment losses on earning assets
Estimasi klaim penjaminan	2,107	(678)	--	1,429	Estimated guarantee claim
Laba yang belum direalisasi atau efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual - neto	955	--	4,212	5,167	Unrealized gain on available-for-sale securities - net
Estimasi klaim asuransi	642	(153)	--	489	Estimated insurance claim
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain - lain	1,761	948	--	2,709	Allowance for impairment losses on other receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang garansi	9,650	(8,955)	--	695	Allowance for impairment losses on guarantee receivables
Aset tetap	7,392	1,573	--	8,965	Premises and equipment
Cadangan kerugian penurunan nilai tresuri	112	(25)	--	87	Allowance for impairment losses on treasury
Cadangan kerugian penurunan nilai akseptasi	54	83	--	137	Allowance for impairment losses on acceptacy
Cadangan kerugian penurunan nilai AYDA	32,868	89	--	32,957	Allowance for impairment losses on AYDA
Penyesuaian atas liabilitas sewa	--	868	--	868	Adjustment on lease liabilities
Penyesuaian atas aset hak guna	--	(1,017)	--	(1,017)	Adjustment on right-of-use asset
Jumlah	1,552,978	629,900	5,090	2,187,968	Total
Penyesihan atas pajak tangguhan	--	(2,213,563)	25,595	(2,187,968)	Allowance for deferred tax
Neto	1,552,978	(1,583,663)	30,685	--	Net

e. Pemeriksaan pajak

Klaim atas kelebihan pembayaran pajak

1. Surat keputusan DJP PPh 25/29 tahun pajak 2010

LPEI mengajukan permohonan restitusi lebih bayar tahun pajak 2010 sebesar Rp124.075. Dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar No. 00013/406/10/093/12 tanggal 26 April 2012, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan pengembalian kepada LPEI sebesar Rp52.240.

Selisih antara permohonan restitusi lebih bayar tahun pajak 2010 dengan SKP disebabkan karena koreksi cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan dan piutang tahun pajak 2010 sebesar Rp71.835.

LPEI telah mengajukan permohonan keberatan dan banding sebesar Rp71.835 terkait cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan dan piutang yang diperbolehkan untuk dibiayakan.

16. Taxes (continued)

d. Deferred tax asset (liabilities) net (continued)

e. Tax assesment

Claims for tax refund

1. DGT decision letter Income Tax Article 25/29 fiscal year 2010

LPEI submitted the overpayment tax refund for fiscal year 2010 amounting to Rp124,075. In the Tax Assesment overpaid Letter No. 00013/406/10/093/12 dated April 26, 2012, the Directorate General of Taxation has decided the tax refund to LPEI amounting to Rp52,240.

The difference in the overpayment of tax refund for fiscal year 2010 with SKP is due to the correction of allowance of impairment losses financing and receivables in fiscal year 2010 amounting to Rp71,835.

LPEI has filed the tax objection and tax appeal amounting to Rp71,835 regarding the correction of allowance of impairment losses financing and receivables.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

16. Perpajakan (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

**Klaim atas kelebihan pembayaran
pajak (lanjutan)**

**1. Surat keputusan DJP PPh 25/29
tahun pajak 2010 (lanjutan)**

Pada tanggal 30 Maret 2015, LPEI menerima Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa pajak PPh Badan Tahun 2010 No. Put.59987/PP/M.IVB/15/ 2015 yang diumumkan tanggal 5 Maret 2015. Pengadilan Pajak Republik Indonesia mengabulkan seluruhnya permohonan banding LPEI atas SKPLB PPh Badan Tahun 2010 dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Surat / Letter Number	Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang dibatalkan/ Tax Assessment Letter canceled by Tax Court	Dana yang dikembalikan/ Tax Refund	Nomor keputusan pengadilan pajak/ Tax Court Decision Number
Put.59987/PP/M.IVB/15/2015	SKPLB PPh Badan Tahun 2010 Nomor 00013/406/10/093/12	75,508	Put.59987/PP/M.IVB/15/2015

Pada tanggal 27 April 2015, LPEI telah menerima pengembalian dana dari kas negara sehubungan Putusan Pengadilan Pajak atas SKPLB PPh Badan tahun 2010 sebesar Rp75.508 (sebelumnya LPEI mencatat klaim atas kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp71.835). Selisih sebesar Rp3.673, diakui sebagai penghasilan lain-lain.

Pada tanggal 1 Juli 2016, LPEI menerima surat dari Pengadilan Pajak tentang Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali atas perkara sengketa pajak PPh Badan tahun 2010 yang terdiri dari:

Nomor Surat / Letter Number	No. Surat Peninjauan Kembali Direktorat Pajak/ No. Judicial Review Letter of Directorate General of Taxation	Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang dibatalkan oleh Pengadilan Pajak/Tax Assessment Letter cancelled by Tax Court	Nomor keputusan pengadilan pajak/ Tax Court Decision Number
MPK-2119T/PAN.Wk/2019	S- 3566/PJ.07/2015	SKPLB PPh tahun 2010 No. 00013/406/10/093/12	59990/PP/M.IVB/16/2015

Sehubungan dengan Surat Peninjauan Kembali diatas, LPEI telah memberikan jawaban berupa Kontra Memori Peninjauan Kembali yang dikirimkan melalui Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Juli 2019.

16. Taxes (continued)

e. Tax assesment (continued)

Claims for tax refund (continued)

**1. DGT decision letter Income Tax
Article 25/29 fiscal year 2010
(continued)**

On March 30, 2015, LPEI has received copies of the Tax Court decision on corporate income tax year 2010 No. Put.59987/PP/M.IVB/15/2015 which was pronounced on March 5, 2015. Tax Court Republic of Indonesia granted the appeal of LPEI entirely on corporate income tax disputes in 2010, with details as follows:

On April 27, 2015, LPEI has received a refund from the state treasury in respect of the Tax Court Decision on overpayment of 2010 Corporate Income Tax amounting to Rp75,508 (previously LPEI recorded Tax Return Claim amounting to Rp71,835). The difference of Rp3,673, has been recognized as other income.

On July 1, 2016, LPEI has received a letter from the Tax Court about Judicial Review of Tax Court Decision on Tax Dispute Cases of Corporate Income Tax 2010 submitted by Direktorat General of Taxes are:

In connection with the Judicial Review Letter, LPEI has provided an answer in the form of a Counter Memorandum which was submitted to the Supreme Court through the Tax Court on July 28, 2016.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

16. Perpajakan (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

**Klaim atas kelebihan pembayaran pajak
(lanjutan)**

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan 31 Desember 2024, LPEI belum menerima Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Putusan Pengadilan Pajak PPh Badan tahun 2010.

**2. Surat keputusan DJP PPN tahun
pajak 2010**

Pada tanggal 26 April 2012, LPEI telah menerima beberapa SKP dan STP PPN dengan total seluruhnya sebesar Rp34.283 dengan rincian sebagai berikut:

	Pokok/ Principal (Rp)	Denda/ Penalty (Rp)
Tahun pajak 2010		
SKP PPN Masa Januari 2010 No. 00068/207/10/093/12	7,201	3,457
SKP PPN Masa Februari 2010 No. 00069/207/10/093/12	5,433	2,608
SKP PPN Masa Maret 2010 No. 00070/207/10/093/12	7,772	3,731
STP PPN Masa Januari 2010 No. 00037/107/10/093/12	--	1,440
STP PPN Masa Februari 2010 No. 00038/107/10/093/12	--	1,087
STP PPN Masa Maret 2010 No. 00039/107/10/093/12	--	1,554
Total	20,406	13,877

LPEI mengajukan keberatan dan banding atas penetapan SKPKB PPN tahun pajak 2010, karena atas pendapatan bunga dari pemberian pinjaman kepada debitur tidak terutang PPN sesuai UU PPN No. 18 tahun 2000.

Pada tanggal 30 Maret 2015, LPEI menerima Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa pajak PPN masa pajak Januari 2010, Februari 2010, dan Maret 2010 dengan putusan mengabulkan seluruhnya permohonan banding LPEI atas SKPKB PPN masa Januari sampai dengan Maret 2010 dengan rincian sebagai berikut:

16. Taxes (continued)

e. Tax assesment (continued)

Claims for tax refund (continued)

Until the date of completion of the financial statement as of December 31, 2024, LPEI has not received the Supreme Court Decision of the Judicial Review of Tax Court Decision on Tax Dispute Case of Corporate Income Tax 2010 proposed by the Directorate General of Taxes.

**2. DGT decision letter VAT fiscal year
2010**

On April 26, 2012, LPEI has received several TALs and TCL of VAT amounting to Rp34,283 as follows:

	Fiscal year 2010
	TAL PPN January 2010
No. 00068/207/10/093/12	
	TAL PPN February 2010
No. 00069/207/10/093/12	
	TAL PPN March 2010
No. 00070/207/10/093/12	
	TCL PPN January 2010
No. 00037/107/10/093/12	
	TCL PPN February 2010
No. 00038/107/10/093/12	
	TCL PPN March 2010
No. 00039/107/10/093/12	

Total

LPEI appealed against the assesment of underpayment of VAT in fiscal year 2010, because the interest income from financing and receivables to debtors is not subject to VAT according to VAT Law No. 18 year 2000.

On March 30, 2015, LPEI has received the Tax Court decision on the dispute for VAT tax period in January 2010, February 2010, and March 2010 with the decision to approve entirely the appeal of LPEI on the tax Assesment over the period from January to March 2010 with the following details:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

16. Perpajakan (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

**Klaim atas kelebihan pembayaran pajak
(lanjutan)**

**2. Surat keputusan DJP PPN tahun
pajak 2010 (lanjutan)**

Nomor keputusan Pengadilan pajak	Surat Ketetapan yang dibatalkan/ <i>Tax Assessment Letter canceled by Tax Court</i>
59988/PP/M.IVB/16/2014	SKPKB PPN Masa Januari 2010 No. 00068/207/10/093/12
59989/PP/M.IVB/16/2014	SKPKB PPN Masa Februari 2010 No. 00069/207/10/093/12
59990/PP/M.IVB/16/2014	SKPKB PPN Masa Maret 2010 No. 00070/207/10/093/12
Total	

Pada tanggal 27 April 2015, LPEI telah menerima pengembalian dana dari kas negara sehubungan pembatalan SKPKB PPN masa Januari sampai dengan Maret 2010 sebesar Rp30.202.

Sehubungan perkara sengketa pajak PPN masa Januari 2010, Februari 2010, dan Maret 2010 telah dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Pajak, maka sesuai dengan pasal 34 Putusan Menteri Keuangan nomor PMK.8/PMK.03/2013 maka, atas STP PPN secara otomatis akan dibatalkan secara jabatan oleh Kantor Pajak.

Pada tanggal 17 September 2015, LPEI menerima Surat Keputusan Pembatalan STP secara jabatan dari Direktorat Jenderal Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Surat / <i>Letter Number</i>	Surat Tagihan Pajak yang dibatalkan Pengadilan Pajak/ <i>(Tax Assessment Letter canceled by Tax Court)</i>
Kep 1673/WPJ.19/2015 Tanggal 15-09-2015	STP PPN Masa Januari 2010 No. 00037/107/10/093/12
Kep-1674/WPJ.19/2015 Tanggal 15-09-2015	STP PPN Masa Februari 2010 No. 00038/107/10/093/12
Kep-1675/WPJ.19/2015 Tanggal 15-09-2015	STP PPN Masa Maret 2010 No. 00039/107/10/093/12

16. Taxes (continued)

e. Tax assesment (continued)

Claims for tax refund (continued)

**2. DGT decision letter VAT fiscal year
2010 (continued)**

Dana yang dikembalikan/ <i>Tax Refund</i>	Nomor keputusan pengadilan pajak/Tax court decision number
10,658	59988/PP/M.IVB/16/2014
8,041	59989/PP/M.IVB/16/2014
11,503	59990/PP/M.IVB/16/2014
30,202	Total

On April 27, 2015, the LPEI has received a refund from the state treasury in respect of the cancellation of SKPKB VAT the tax Assesment period from January to March 2010 amounting to Rp30,202.

In respect of past VAT tax dispute case in January 2010, February 2010, and March 2010 had been granted entirely by the Tax Court, then in accordance with article 34 of Decision of the Minister of Finance number PMK.8/PMK.03/2013, the sanction (STP) of Value Added Tax automatically canceled by the office of the Tax Office.

On September 17, 2015, LPEI has received a Letter of Cancellation of STP from Directorate General of Taxation with the following details:

Jumlah nominal/ <i>Nominal amount</i>	Nomor keputusan pengadilan pajak/ <i>Tax Court Decision Number</i>
1,440	59988/PP/M.IVB/16/2014
1,087	59989/PP/M.IVB/16/2014
1,554	59990/PP/M.IVB/16/2014
4,081	

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

16. Perpajakan (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

**Klaim atas kelebihan pembayaran pajak
(lanjutan)**

**2. Surat keputusan DJP PPN tahun
pajak 2010 (lanjutan)**

Pada tanggal 1 Juli 2016, LPEI menerima surat dari Pengadilan Pajak tentang Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali atas perkara sengketa pajak PPN tahun 2010 yang terdiri dari:

<u>Nomor Surat / Letter Number</u>	<u>No. Surat Peninjauan Kembali Direktorat Pajak/ No. Judicial Review Letter of Directorate General of Taxation</u>
MPK-2116T/PAN.WK/2016	S- 3563/PJ.07/2015

Sehubungan dengan Surat Peninjauan Kembali diatas, LPEI telah memberikan jawaban berupa Kontra Memori Peninjauan Kembali atas Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung yang dikirimkan melalui Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Juli 2016. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, LPEI belum menerima Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak atas kasus sengketa pajak PPh Badan dan PPN tahun 2010 yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pada tanggal 4 September 2017, LPEI menerima surat dari Pengadilan Pajak tentang Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali atas perkara sengketa pajak PPN Masa Pajak Februari 2010.

<u>Nomor Surat / Letter Number</u>	<u>No. Surat Peninjauan Kembali Direktorat Pajak/ No. Judicial Review Letter of Directorate General of Taxation</u>
MPK-2118/PAN/2017	S- 3573/PJ.07/2015

Sehubungan dengan Surat Peninjauan Kembali diatas, LPEI telah memberikan jawaban berupa Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Februari 2019.

16. Taxes (continued)

e. Tax assesment (continued)

Claims for tax refund (continued)

**2. DGT decision letter VAT fiscal year
2010 (continued)**

On July 1, 2016, LPEI has received a letter from the Tax Court about Judicial Review of Tax Court Decision on tax dispute case in 2010 of VAT. The Judicial Review from Directorate General of Tax consists of:

<u>Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang dibatalkan oleh Pengadilan Pajak/Tax Assesment Letter cancelled by Tax Court</u>	<u>Nomor keputusan pengadilan pajak/ Tax Court Decision Number</u>
SKPKB PPN Masa Maret 2010 No. 00070/207/10/093/12	59987/PP/M.IVB/15/2015

In connection with the above Judicial Review Letter, LPEI has provided an answer in the form of a Counter Memorandum which was submitted to the Supreme Court through the Tax Court on July 28, 2016. Until the date of the finalization of this financial statements, LPEI has not received the Supreme Court Decision of the Judicial Review of Tax Court Decision on tax dispute case of Corporate Income Tax and VAT in 2010 proposed by the Directorate General of Taxes.

On September 4, 2017, LPEI has received letter from the Tax Court about Judicial Review of Tax Court Decision on Tax Dispute Cases of VAT for Period February 2010.

<u>Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang dibatalkan oleh Pengadilan Pajak/Tax Assesment Letter cancelled by Tax Court</u>	<u>Nomor keputusan pengadilan pajak/ Tax Court Decision Number</u>
SKPKB PPN Masa Februari 2010 No. 00069/207/10/093/12	59989/PP/M.IVB/16/2015

In connection with the Judicial Review Letter, LPEI has provided an answer in the form of a Counter Memorandum which was submitted to the Supreme Court through the Tax Court on February 25, 2019.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

16. Perpajakan (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

**Klaim atas kelebihan pembayaran pajak
(lanjutan)**

**2. Surat keputusan DJP PPN tahun
pajak 2010 (lanjutan)**

Pada tanggal 20 Mei 2021, LPEI menerima Putusan Mahkamah Agung No. 477/B/PPK/Pjk/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang memutuskan menolak Peninjauan Kembali Direktorat Jenderal Pajak No. Put-59989/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang Surat Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai masa Pajak Februari 2010.

Pada tanggal 28 Januari 2019, LPEI menerima surat dari Pengadilan Pajak tentang Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali atas perkara sengketa pajak PPN Masa Pajak Januari 2010.

Nomor Surat / Letter Number	No. Surat Peninjauan Kembali Direktorat Pajak/ No. Judicial Review Letter of Directorate General of Taxation
MPK-2117/PAN.WK/2019	S- 3574/PJ.07/2015

Sehubungan dengan Surat Peninjauan Kembali diatas, LPEI telah memberikan jawaban berupa Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Februari 2019.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, LPEI belum menerima Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas Putusan Pengadilan Pajak terhadap sengketa PPN Masa Januari dan Maret 2010.

16. Taxes (continued)

e. Tax assesment (continued)

Claims for tax refund (continued)

**2. DGT decision letter VAT fiscal year
2010 (continued)**

On May 20, 2021, LPEI received Indonesia Supreme Court Decision No. 477/B/PPK/Pjk/2021 dated March 18, 2021 and the Supreme Court has decided to refuse Judicial Review Directorate General of Taxation No. Put- 59989/PP/M.IVB/16/2015 dated March 5, 2015 regarding Tax Assesments Letter of VAT for the period Februari 2010.

On January 28, 2019, LPEI received a letter from the Tax Court regarding the Notice of Review Application and Submission of Review Memory on the January 2010 VAT tax dispute case.

Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang dibatalkan oleh Pengadilan Pajak/Tax Assesment Letter cancelled by Tax Court	Nomor keputusan pengadilan pajak/ Tax Court Decision Number
SKPKB PPN Masa Januari 2010 No. 00068/207/10/093/12	59988/PP/M.IVB/16/2015

In connection with the Judicial Review Letter, LPEI has provided an answer in the form of a Counter Memorandum which was submitted to the Supreme Court through the Tax Court on February 25, 2019.

Until the date of completion of the consolidated financial statements, LPEI has not received the Supreme Court Decision of the Judicial Review of Tax Court Decision on Tax Dispute Case of VAT January and March 2010 proposed by the Directorate General of Taxes.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

17. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan

Rincian efek-efek utang yang diterbitkan berdasarkan tempat terdaftar adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Dalam Negeri		
Rupiah	8,140,064	14,285,686
Luar negeri		
Dolar Amerika Serikat	--	7,695,627
Total	8,140,064	21,981,313

Rincian efek-efek utang yang diterbitkan berdasarkan jenis dan mata uang adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Rupiah		
Obligasi Berkelanjutan Indonesia		
Eximbank III Tahap IV - 2017		
Seri D	--	1,007,000
Seri E	1,266,000	1,266,000
Obligasi Berkelanjutan Indonesia		
Eximbank III Tahap V - 2017		
Seri C	--	1,706,000
Obligasi Berkelanjutan Indonesia		
Eximbank III Tahap VI - 2018		
Seri C	206,000	206,000
Obligasi Berkelanjutan Indonesia		
Eximbank IV Tahap I - 2018		
Seri C	1,756,000	1,756,000
Obligasi Berkelanjutan Indonesia		
Eximbank IV Tahap II - 2018		
Seri D	1,324,000	1,324,000
Obligasi Berkelanjutan Indonesia		
Eximbank IV Tahap III - 2018		
Seri D	380,000	380,000
Obligasi Berkelanjutan Indonesia		
Eximbank IV Tahap IV - 2019		
Seri C	--	1,473,000
Seri D	278,000	278,000
Seri E	349,000	349,000
Seri F	625,000	625,000
Obligasi Berkelanjutan Indonesia		
Eximbank IV Tahap V - 2019		
Seri C	--	315,000
Seri D	737,000	737,000
Obligasi Berkelanjutan Indonesia		
Eximbank IV Tahap VI - 2019		
Seri C	--	6,000
Seri D	714,500	714,500
Obligasi Berkelanjutan Indonesia		
Eximbank IV Tahap VII - 2019		
Seri C	--	25,500
Seri D	112,000	112,000
Seri E	219,750	219,750
Obligasi Berkelanjutan Indonesia		
Eximbank IV Tahap VIII - 2019		
Seri B	--	1,551,000
Seri C	22,500	22,500
	7,989,750	14,073,250
Dikurangi:		
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi	(4,686)	(8,564)
	7,985,064	14,064,686

17. Debt Securities Issued

The details of debt securities issued based on listed country location are as follows:

Domestic
Rupiah
Overseas
United States Dollar
Total

The details of debt securities issued based on type and currency are as follows:

Rupiah

Indonesia Eximbank Phase IV
Shelf Registration Offering III - 2017
Series D
Series E
Indonesia Eximbank Phase V
Shelf Registration Offering III - 2017
Series C
Indonesia Eximbank Phase VI
Shelf Registration Offering III - 2018
Series C
Indonesia Eximbank Phase I
Shelf Registration Offering IV - 2018
Series C
Indonesia Eximbank Phase II
Shelf Registration Offering IV - 2018
Series D
Indonesia Eximbank Phase III
Shelf Registration Offering IV - 2018
Series D
Indonesia Eximbank Phase IV
Shelf Registration Offering IV - 2019
Series C
Series D
Series E
Series F
Indonesia Eximbank Phase V
Shelf Registration Offering IV - 2019
Series C
Series D
Indonesia Eximbank Phase VI
Shelf Registration Offering IV - 2019
Series C
Series D
Indonesia Eximbank Phase VII
Shelf Registration Offering IV - 2019
Series C
Series D
Series E
Indonesia Eximbank Phase VIII
Shelf Registration Offering IV - 2019
Series B
Series C

Less:

Unamortized bonds issuance cost

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

17. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

	2024	2023
Sukuk Mudharabah		
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan		
Indonesia Eximbank I Tahap II - 2018		
Seri D	155,000	155,000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan		
Indonesia Eximbank I Tahap III - 2019		
Seri C	--	66,000
	155,000	221,000
Total Rupiah	8,140,064	14,285,686
Dolar Amerika Serikat		
Obligasi berkelanjutan		
EMTN Program IEB - 2017		
(USD500.000.000)	--	7,698,500
Diskonto obligasi yang belum		
diamortisasi	--	(1,221)
Beban emisi obligasi yang belum		
diamortisasi	--	(1,652)
	--	(2,873)
Total Dolar Amerika Serikat	--	7,695,627
Neto	8,140,064	21,981,313

Rincian efek-efek utang yang diterbitkan
berdasarkan pihak-pihak:

	2024	2023
Pihak berelasi (Catatan 39)		
Obligasi	2,330,000	3,990,000
Sukuk Mudharabah	75,000	75,000
	2,405,000	4,065,000
Pihak ketiga		
Obligasi	5,659,750	10,083,250
Sukuk Mudharabah	80,000	146,000
European Medium		
Term Notes (EMTN)	--	7,698,500
	5,739,750	17,927,750
Total	8,144,750	21,992,750
Dikurangi:		
Diskonto obligasi yang belum		
diamortisasi	--	(1,221)
Beban emisi obligasi yang belum		
diamortisasi	(4,686)	(10,216)
	(4,686)	(11,437)
Neto	8,140,064	21,981,313

17. Debt Securities Issued (continued)

Sukuk Mudharabah	
Sukuk Mudharabah Phase II	
Shelf Registration Offering I - 2018	
Series D	
Sukuk Mudharabah Phase III	
Shelf Registration Offering I - 2019	
Series C	
Total Rupiah	
United States Dollars	
Continuous bonds	
IEB EMTN Programme - 2017	
(USD500,000,000)	
Unamortized bonds discount	
Unamortized bonds issuance cost	
Total United States Dollars	
Net	

The details of debt securities issued based on
parties:

Related parties (Note 39)	
Bonds	
Sukuk Mudharabah	
Third parties	
Bonds	
Sukuk Mudharabah	
European Medium	
Term Notes (EMTN)	
Total	
Less:	
Unamortized bonds discount	
Unamortized bonds issuance cost	
Net	

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

17. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

**a. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank III Tahap IV 2017**

Pada bulan Februari 2017, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp5.221.000, dengan rincian sebagai berikut:

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV - 2017				Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III - 2017
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 Seri A	861,000	3 Maret/ March 2018	7.40% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III - 2017 Series A
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 Seri B	1,339,000	23 Februari/ February 2020	8.40% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III - 2017 Series B
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 Seri C	748,000	23 Februari/ February 2022	8.90% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III - 2017 Series C
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 Seri D	1,007,000	23 Februari/ February 2024	9.20% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III - 2017 Series D
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 Seri E	1,266,000	23 Februari/ February 2027	9.40% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III - 2017 Series E

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp24.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Februari 2017. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 23 Mei 2017.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 Seri A, B, C, dan D telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 3 Maret 2018, 23 Februari 2020, 23 Februari 2022, dan 23 Februari 2024.

17. Debt Securities Issued (continued)

**a. Indonesia Eximbank Phase IV Shelf
Registration Offering III 2017**

In February 2017, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III 2017 with a face value of Rp5,221,000, with details as follows:

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering III targeted funds to be raised amounting to Rp24,000,000, that is planned to be fully issued within 2 years.

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on February 24, 2017. Interest is payable quarterly starting on May 23, 2017.

Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III 2017 Series A, B, C, and D were fully paid upon maturity on March 3, 2018, February 23, 2020, February 23, 2022, and February 23, 2024, respectively.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

17. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

**a. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank III Tahap IV 2017 (lanjutan)**

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 digunakan untuk pembiayaan produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 sebesar Rp6.556 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

**b. Euro Medium-Term Note (EMTN)
Programme Indonesia Eximbank 2017**

Pada bulan April 2017, LPEI menerbitkan *Euro Medium Term Note (EMTN) Programme Indonesia Eximbank – 2017* dengan nilai nominal sebesar USD500.000.000 dan telah dilunasi pada tanggal 6 April 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
<i>Euro Medium Term Note (EMTN) Programme Indonesia Eximbank 2017 (nilai penuh)</i>	USD500,000,000	6 April/ April 2024	3.875% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Euro Medium Term Note (EMTN) Programme - 2017 (full amount)

EMTN *Programme Indonesia Eximbank – 2017* ini merupakan bagian dari *Euro Medium Term Note (EMTN) Programme* dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar USD1.500.000.000.

17. Debt Securities Issued (continued)

**a. Indonesia Eximbank Phase IV Shelf
Registration Offering III 2017
(continued)**

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III 2017 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III 2017 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III 2017 amounting to Rp6,556 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III 2017 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

b. Indonesia Eximbank Euro Medium-Term Note (EMTN) Programme 2017

In April 2017, LPEI issued the Indonesia Eximbank Euro Medium Term Note (EMTN) Programme 2017 with a face value of USD500,000,000 which has been repaid on April 6, 2024, with details as follows:

The Indonesia Eximbank EMTN Programme – 2017 is part of the Indonesia Eximbank Euro Medium Term Note (EMTN) Programme with fixed interest rate and targeted funds to be raised amounted to USD1,500,000,000.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

17. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

**b. Euro Medium-Term Note (EMTN)
Programme Indonesia Eximbank 2017
(lanjutan)**

Jadwal pembayaran bunga adalah semesteran dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2017. EMTN Programme Indonesia Eximbank – 2017 tercatat di Singapore Exchange Securities Trading Limited. Penerbitan EMTN Indonesia Eximbank – 2017 telah dinyatakan efektif mulai tanggal 7 April 2017.

Bertindak sebagai wali amanat EMTN Programme Indonesia Eximbank 2017 adalah *The Hong Kong Shanghai Banking Corporation Limited*. Bertindak sebagai *Join Lead Managers (JLM)* emisi *Euro Medium Term Note (EMTN) Programme Indonesia Eximbank 2017* adalah *The Hong Kong Shanghai Banking Corporation Limited*, *Overseas Chinese Banking Corporation*, dan *Mitsubishi UFJ Securities International*. Penerimaan neto dari penerbitan EMTN Programme Indonesia Eximbank 2017 digunakan untuk membayar utang yang telah ada, pembiayaan operasional dan produktif, dan untuk kegunaan umum LPEI.

LPEI mencatat beban emisi EMTN Programme Indonesia Eximbank-2017 sebesar USD1.405.097 dan diskonto sebesar USD860.000 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi EMTN Programme Indonesia Eximbank – 2017 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 31 Desember 2023, EMTN Programme Indonesia Eximbank 2017 memiliki peringkat “BBB” dari Fitch dan “Baa2” dari Moody’s Investor Inc.

17. Debt Securities Issued (continued)

**b. Indonesia Eximbank Euro Medium Term
Note (EMTN) Programme 2017
(continued)**

Interest is payable semi-annually starting on October 6, 2017. The Indonesia Eximbank EMTN Programme-2017 is listed in the Singapore Exchange Securities Trading Limited. The offering of the Indonesia Eximbank EMTN Programme – 2017 was declared effective since April 7, 2017.

The trustee for the Indonesia Eximbank EMTN -2017 are The Hong Kong Shanghai Banking Corporation Limited. The Join Lead Managers (JLM) for the Indonesia Eximbank Euro Medium Term Note (EMTN) Programme – 2017 are The Hong Kong Shanghai Banking Corporation Limited, Overseas Chinese Banking Corporation, and Mitsubishi UFJ Securities International. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank EMTN Programme – 2017 were used to refinance existing debt, finance its operations and earning assets, and for its general LPEI purposes.

LPEI recorded the issuance cost and discount on Indonesia Eximbank EMTN Programme 2017 amounting to USD1,405,097 and USD860,000, respectively, as a deduction from the proceeds of the Indonesia EMTN Programme – 2017 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

As of December 31, 2023 Indonesia Eximbank EMTN Programme 2017 were rated “BBB” by Fitch and “Baa2” by Moody’s Investor Inc.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

17. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

**c. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank III Tahap V 2017**

Pada bulan Agustus 2017, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp3.222.000 dengan rincian sebagai berikut:

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V - 2017				Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III - 2017
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017 Seri A	1,000,000	15 Agustus/ August 2020	7.60% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III - 2017 Series A
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017 Seri B	436,000	15 Agustus/ August 2022	7.90% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III - 2017 Series B
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017 Seri C	1,706,000	15 Agustus/ August 2024	8.25% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III - 2017 Series C

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp24.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2017. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 15 November 2017.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017 Seri A, B, dan C telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 15 Agustus 2020, 15 Agustus 2022, dan 15 Agustus 2024.

17. Debt Securities Issued (continued)

**c. Indonesia Eximbank Phase V Shelf
Registration Offering III 2017**

In August 2017, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III 2017 with a face value of Rp3,222,000 with details as follows:

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering III targeted funds to be raised amounting to Rp24,000,000, that is planned to be fully issued within 2 years.

These bonds are listed on Indonesia Stock Exchange on August 16, 2017. Interest is payable quarterly starting on November 15, 2017.

Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III 2017 Series A, B, and C were fully paid upon maturity on August 15, 2020, August 15, 2022, and August 15, 2024 respectively.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

17. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

**c. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank III Tahap V 2017 (lanjutan)**

Pada tanggal 9 Oktober 2023, 6 November 2023, dan 4 Desember 2023 telah dilakukan pembelian kembali dengan tujuan untuk disimpan kemudian dapat dijual kembali atas Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017 Seri C masing-masing sebesar Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000. Dengan selesainya penyelesaian atas pembelian kembali Obligasi tersebut, maka tidak ada perubahan nilai Obligasi yang tercatat pada penitipan kolektif di KSEI Rp1.786.000.

Bertindak sebagai wali amanat obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V-2017 digunakan untuk pembiayaan produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017 sebesar Rp4.333 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

17. Debt Securities Issued (continued)

**c. Indonesia Eximbank Phase V Shelf
Registration Offering III 2017
(continued)**

On October 9, 2023, November 6, 2023, and December 4, 2023, buybacks were carried out with the aim of saving and then reselling the Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III 2017 Series C amounting to Rp50,000, Rp20,000, Rp10,000, respectively. With the completion of the settlement of the Bond buyback, there will be no change in the value of the Bonds recorded in collective custody at KSEI Rp1,786,000.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III - 2017 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III 2017 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III 2017 amounting to Rp4,333 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III 2017 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

17. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

**d. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank III Tahap VI 2018**

Pada bulan Februari 2018, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp2.466.000 dengan rincian sebagai berikut:

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI - 2018				Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III - 2018
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 Seri A	610,000	14 Februari/ February 2021	6.35% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III - 2018 Series A
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 Seri B	1,650,000	14 Februari/ February 2023	6.70% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III - 2018 Series B
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 Seri C	206,000	14 Februari/ February 2025	6.90% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III - 2018 Series C

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp24.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Februari 2018. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 14 Mei 2018.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 Seri A dan B telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 14 Februari 2021 dan 14 Februari 2023.

17. Debt Securities Issued (continued)

**d. Indonesia Eximbank Phase VI Shelf
Registration Offering III 2018**

In February 2018, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III 2018 with a face value of Rp2,466,000 with details as follows:

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering III targeted funds to be raised amounting to Rp24,000,000, that is planned to be fully issued within 2 years.

These bonds are listed on Indonesia Stock Exchange on February 15, 2018. Interest is payable quarterly starting on May 14, 2018.

Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III 2018 Series A and B were fully paid upon maturity on February 14, 2021 and February 14, 2023, respectively.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

17. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

**d. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank III Tahap VI 2018 (lanjutan)**

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 digunakan untuk pembiayaan produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 sebesar Rp3.783 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

Selama periode efektif PUB III, LPEI telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Tahap I sampai dengan Tahap VI dengan total dana yang dihimpun sebesar Rp21.772.000 adapun jumlah target dana yang kurang dihimpun adalah sebesar Rp2.228.000 dari total target dana yang dihimpun sebesar Rp24.000.000. Dalam rangka pemenuhan terhadap Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, LPEI telah mengumumkan Penghentian PUB III pada Laman resmi LPEI dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Februari 2018.

**e. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank IV Tahap I 2018**

Pada bulan Juni 2018, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp2.729.000 dengan rincian sebagai berikut:

17. Debt Securities Issued (continued)

**d. Indonesia Eximbank Phase VI Shelf
Registration Offering III 2018
(continued)**

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III 2018 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III 2018 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III 2018 amounting to Rp3,783 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III 2018 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

During the Shelf Registration Offering Bond III period, LPEI has issued Bond Phase I to Phase VI with total funds raised amounting to Rp21,772,000, the deficiency of the target amount of funds raised is Rp2,228,000 from target funds amounting to Rp24,000,000. In order to comply with OJK Regulation No. 36/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 on Shelf Registration Offering of Debt Securities and/or Sukuk, LPEI announced Discontinuation of Shelf Registration Offering Bond III on LPEI's official Website and Indonesian Stock Exchange's (IDX) official Website LPEI on February 28, 2018.

**e. Indonesia Eximbank Phase I Shelf
Registration Offering IV 2018**

In June 2018, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV 2018 with a face value of Rp2,729,000 with details as follows:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

17. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

**e. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank IV Tahap I 2018 (lanjutan)**

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I - 2018				Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV - 2018
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 Seri A	938,000	6 Juni/ June 2021	7.50% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV - 2018 Series A
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 Seri B	35,000	6 Juni/ June 2023	7.70% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV - 2018 Series B
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 Seri C	1,756,000	6 Juni/ June 2025	8.30% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV - 2018 Series C

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp26.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Juni 2018. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 6 September 2018.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 Seri A dan B telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 6 Juni 2021 dan 6 Juni 2023.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 digunakan untuk pembiayaan produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 sebesar Rp4.749, yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

17. Debt Securities Issued (continued)

**e. Indonesia Eximbank Phase I Shelf
Registration Offering IV 2018
(continued)**

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering IV with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp26,000,000, that is planned to be fully issued within 2 years.

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on June 7, 2018. Interest is payable quarterly starting on September 6, 2018.

Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV 2018 Series A and B were fully paid upon maturity on June 6, 2021 and June 6, 2023.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV 2018 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV 2018 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV 2018 amounting to Rp4,749, as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV 2018 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

17. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

**f. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank IV Tahap II 2018**

Pada bulan September 2018, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp2.514.100 dengan rincian sebagai berikut:

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II - 2018				Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV - 2018
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 Seri A	724,400	15 September/ September 2019	7.00% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV - 2018 Series A
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 Seri B	190,000	5 September/ September 2021	7.50% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV - 2018 Series B
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 Seri C	275,700	5 September / September 2023	8.40% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV - 2018 Series C
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 Seri D	1,324,000	5 September / September 2025	8.75% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV - 2018 Series D

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp26.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 September 2018. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 5 Desember 2018.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 Seri A, Seri B, dan Seri C telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 15 September 2019, 5 September 2021, dan 5 September 2023.

17. Debt Securities Issued (continued)

**f. Indonesia Eximbank Phase II Shelf
Registration Offering IV 2018**

In September 2018, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV 2018 with a face value of Rp2,514,100 with details as follows:

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering IV with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp26,000,000, that is planned to be fully issued within 2 years.

These bonds are listed on Indonesia Stock Exchange on September 6, 2018. Interest is payable quarterly starting on December 5, 2018.

Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV 2018 Series A, B, and C were fully paid upon maturity on September 15, 2019, September 5, 2021, and September 5, 2023, respectively.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

17. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

**f. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank IV Tahap II 2018 (lanjutan)**

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 digunakan untuk pembiayaan produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 sebesar Rp3.912 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

**g. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank IV Tahap III 2018**

Pada bulan November 2018, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp1.004.000 dengan rincian sebagai berikut:

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III - 2018				Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV - 2018
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 Seri A	515,000	18 November/ November 2019	8.25% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV - 2018 Series A
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 Seri B	81,000	8 November/ November 2021	8.75% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV - 2018 Series B
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 Seri C	28,000	8 November/ November 2023	9.25% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV - 2018 Series C
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 Seri D	380,000	8 November/ November 2025	9.75% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV - 2018 Series D

17. Debt Securities Issued (continued)

**f. Indonesia Eximbank Phase II Shelf
Registration Offering IV 2018
(continued)**

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV 2018 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV 2018 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV 2018 amounting to Rp3,912 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV 2018 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

**g. Indonesia Eximbank Phase III Shelf
Registration Offering IV 2018**

In November 2018, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV 2018 with a face value of Rp1,004,000 with details as follows:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

17. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

**g. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank IV Tahap III 2018 (lanjutan)**

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp26.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 November 2018. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 8 Februari 2019.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 Seri A, Seri B, dan Seri C telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 18 November 2019, 8 November 2021, dan 8 November 2023.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 digunakan untuk pembiayaan produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 sebesar Rp2.996 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

**h. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan
Indonesia Eximbank I Tahap II 2018**

Pada bulan November 2018, LPEI menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indonesia Eximbank Tahap II Tahun 2018 ("Sukuk Mudharabah Berkelanjutan") sebesar Rp630.500, dengan rincian sebagai berikut:

17. Debt Securities Issued (continued)

**g. Indonesia Eximbank Phase III Shelf
Registration Offering IV 2018
(continued)**

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering IV with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp26,000,000, that plan to be fully issued within 2 years.

These bonds are listed on Indonesia Stock Exchange on November 9, 2018. Interest is payable quarterly starting on February 8, 2019.

Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV 2018 Series A, B, and C were fully paid upon maturity on November 18, 2019, November 8, 2021, and November 8, 2023 respectively.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV 2018 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV 2018 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV 2018 amounting to Rp2,996 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV 2018 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

**h. Indonesia Eximbank Phase II Shelf
Sukuk Mudharabah I 2018**

On November 2018, LPEI issued Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II Year 2018 ("Shelf Sukuk Mudharabah") amounting to Rp630,500, with detail as follows:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

17. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

**h. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan
Indonesia Eximbank I Tahap II 2018
(lanjutan)**

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II - 2018				Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II - 2018
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II 2018 Seri A	211,500	18 November/ November 2019	8.25%	Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II - 2018 Series A
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II 2018 Seri B	250,000	8 November/ November 2021	8.75%	Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II - 2018 Series B
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II 2018 Seri C	14,000	8 November/ November 2023	9.25%	Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II - 2018 Series C
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II 2018 Seri D	155,000	8 November/ November 2025	9.75%	Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II - 2018 Series D

Penerimaan dana dari penerbitan Sukuk Mudharabah ini digunakan untuk pemberian pembiayaan produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor berdasarkan prinsip syariah.

Nisbah pemegang Sukuk Mudharabah Seri A adalah sebesar 43,42% dengan indikatif bagi hasil setara 8,25% per tahun, berjangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Nisbah pemegang Sukuk Mudharabah Seri B adalah sebesar 46,05% dengan indikatif bagi hasil setara 8,75% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi yaitu 8 November 2018. Nisbah pemegang Sukuk Mudharabah Seri C adalah sebesar 48,68% dengan indikatif bagi hasil setara 9,25% per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi yaitu 8 November 2018. Nisbah pemegang Sukuk Mudharabah Seri D adalah sebesar 51,32% dengan indikatif bagi hasil setara 9,75% per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi yaitu 8 November 2018. Sukuk Mudharabah ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

17. Debt Securities Issued (continued)

**h. Indonesia Eximbank Phase II Shelf
Sukuk Mudharabah I 2018 (continued)**

The fund received from Sukuk Mudharabah issuance will be used to finance earning assets in the form of export financing with sharia principles.

Customer's nisbah of Sukuk Mudharabah Series A at 43.42% with profit sharing indicative equivalent at 8.25% per annum, with 370 days calendar tenor since Issuance Date. Customer's nisbah of Sukuk Mudharabah Series B at 46.05% with profit sharing indicative equivalent at 8.75% per annum, with 3 (three) years tenor since Issuance Date in November 8, 2018. Customer's nisbah of Sukuk Mudharabah Series C at 48.68% with profit sharing indicative equivalent at 9.25% per annum, with 5 (five) years tenor since Issuance Date in November 8, 2018. Customer's nisbah of Sukuk Mudharabah Series D at 51.32% with profit sharing indicative equivalent at 9.75% per annum with 7 (seven) years tenor since Issuance Date in November 8, 2018. This Sukuk Mudharabah is listed at Indonesian Stock Exchange.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

17. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

**h. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan
Indonesia Eximbank I Tahap II 2018
(lanjutan)**

Pendapatan bagi hasil akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran pendapatan bagi hasil pertama Sukuk Mudharabah seri A, B, C, dan D akan dilakukan pada tanggal 8 Februari 2019, sedangkan pembayaran pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah terakhir pada tanggal jatuh tempo pokok masing-masing Sukuk Mudharabah yang juga merupakan tanggal pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II 2018 Seri A, Seri B, dan Seri C telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 18 November 2019, 8 November 2021, dan 8 November 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Sukuk Mudharabah yang diterbitkan, Pefindo memberikan peringkat "idAAA(sy)".

Sukuk Mudharabah tersebut tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan LPEI, baik barang bergerak, maupun barang tidak bergerak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Mudharabah, sebelum dilunasinya dana Sukuk Mudharabah dan pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah, LPEI berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indonesia Eximbank Tahap II Tahun 2018.

17. Debt Securities Issued (continued)

**h. Indonesia Eximbank Phase II Shelf
Sukuk Mudharabah I 2018 (continued)**

The profit sharing income is paid quarterly based on profit sharing income payment date of Sukuk Mudharabah. The first profit sharing income payment of Sukuk Mudharabah Series A, B, C, and D will be paid on February 8, 2019, while the last profit sharing income payment on due date of each Sukuk Mudharabah and also the repayment date of Sukuk Mudharabah principal.

Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II 2018 Series A, B, and C were fully paid upon maturity on November 18, 2019, November 8, 2021, and November 8, 2023 respectively.

As of December 31, 2024 and 2023, Sukuk Mudharabah is rated as "idAAA(sy)" by Pefindo.

Sukuk Mudharabah are not guaranteed with specific guarantee, but guaranteed with all assets of the LPEI, whether present or future fixed or non-fixed assets in accordance with the provisions of Article 1131 and 1132 of the Civil Laws.

During the validity period of Sukuk Mudharabah and prior to the redemption of all principal and profit sharing income of Sukuk Mudharabah, LPEI agreed to maintain and/or comply with all terms stated in the trustee agreement as outlined in the Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II – 2018.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

17. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

**i. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank IV Tahap IV 2019**

Pada bulan April 2019, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp3.857.000 dengan rincian sebagai berikut:

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV - 2019				Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 Seri A	147,000	03 Mei/ May 2020	7.35% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019 Series A
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 Seri B	935,000	23 April/ April 2022	8.40% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019 Series B
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 Seri C	1,473,000	23 April/ April 2024	8.90% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019 Series C
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 Seri D	278,000	23 April/ April 2026	9.25% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019 Series D
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 Seri E	349,000	23 April/ April 2029	9.50% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019 Series E
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 Seri F	625,000	23 April/ April 2034	9.80% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019 Series F

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp26.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 April 2019. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 23 Juli 2019.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV – 2019 Seri A, B dan C telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 3 Mei 2020, 23 April 2022 dan 23 April 2024.

17. Debt Securities Issued (continued)

**i. Indonesia Eximbank Phase IV Shelf
Registration Offering IV 2019**

In April 2019, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV 2019 with a face value of Rp3,857,000 with details as follows:

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering IV with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp26,000,000, that plan to be fully issued within 2 years.

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on April 24, 2019. Interest is payable quarterly starting on July 23, 2019.

Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV – 2019 Series A, B and C were fully paid upon maturity on May 3, 2020, April, 23, 2022, and April, 23, 2024, respectively.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

17. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

**i. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank IV Tahap IV 2019 (lanjutan)**

Pada tanggal 18 Oktober 2019 dan 14 November 2023 telah dilakukan pembelian kembali dengan tujuan untuk disimpan kemudian dapat dijual kembali atas Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV Tahun – 2019 Seri C masing-masing sebesar Rp35.000 dan Rp15.000. Dengan selesainya penyelesaian atas pembelian kembali Obligasi tersebut, maka tidak ada perubahan nilai Obligasi yang tercatat pada penitipan kolektif di KSEI Rp1.523.000.

Bertindak sebagai wali amanat obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 digunakan untuk pembiayaan produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 sebesar Rp7.525 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

**j. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan
Indonesia Eximbank I Tahap III 2019**

Pada bulan April 2019, LPEI menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indonesia Eximbank Tahap III Tahun 2019 ("Sukuk Mudharabah") sebesar Rp441.000, dengan rincian sebagai berikut:

17. Debt Securities Issued (continued)

**i. Indonesia Eximbank Phase IV Shelf
Registration Offering IV 2019
(continued)**

On October 18, 2019 and November 14, 2023, buybacks were carried out with the aim of saving and then reselling the Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV 2019 Series C amounting to Rp35,000 and Rp15,000 respectively. With the completion of the settlement of the Bond buyback, there will be no change in the value of the Bonds recorded in collective custody at KSEI Rp1,523,000.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV 2019 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV 2019 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV 2019 amounting to Rp7,525 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV 2019 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

**j. Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia
Eximbank Phase III 2019**

On April 2019, LPEI issued Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III 2019 ("Sukuk Mudharabah") amounting to Rp441,000, with detail as follows:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

17. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

**j. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan
Indonesia Eximbank I Tahap III 2019
(lanjutan)**

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Eximbank I Tahap III - 2019				Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III - 2019
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III 2019 Seri A	230,000	03 Mei/ May 2020	7.35%	Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III - 2019 Series A
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III 2019 Seri B	145,000	23 April/ April 2022	8.40%	Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III - 2019 Series B
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III 2019 Seri C	66,000	23 April/ April 2024	8.90%	Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III - 2019 Series C

Penerimaan dana dari penerbitan Sukuk Mudharabah ini digunakan untuk pemberian pembiayaan produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor berdasarkan prinsip syariah.

Nisbah pemegang Sukuk Mudharabah Seri A adalah sebesar 38,68% dengan indikatif bagi hasil setara 7,35% per tahun, berjangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Nisbah pemegang Sukuk Mudharabah Seri B adalah sebesar 44,21% dengan indikatif bagi hasil setara 8,40% per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi yaitu 23 April 2019. Nisbah pemegang Sukuk Mudharabah Seri C adalah sebesar 46,84% dengan indikatif bagi hasil setara 8,90% per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi yaitu 23 April 2019. Sukuk Mudharabah ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

17. Debt Securities Issued (continued)

**j. Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia
Eximbank Phase III 2019 (continued)**

The fund received from Sukuk Mudharabah issuance will be used to finance earning assets in the form of export financing with sharia principles.

Customer's nisbah of Sukuk Mudharabah Series A at 38.68% with profit sharing indicative equivalent at 7.35% per annum, with 370 days calendar tenor since Issuance Date. Customer's nisbah of Sukuk Mudharabah Series B at 44.21% with profit sharing indicative equivalent at 8.40% per annum with 3 (three) years tenor since Issuance Date in April 23, 2019. Customer's nisbah of Sukuk Mudharabah Series C at 46.84% with profit sharing indicative equivalent at 8.90% per annum, with 5 (five) years tenor since Issuance Date in April 23, 2019. This Shelf Sukuk Mudharabah is listed at Indonesian Stock Exchange.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

17. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

**j. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan
Indonesia Eximbank I Tahap III 2019
(lanjutan)**

Pendapatan bagi hasil akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran pendapatan bagi hasil pertama Sukuk Mudharabah berkelanjutan seri A, B, dan C akan dilakukan pada tanggal 23 Juli 2019, sedangkan pembayaran pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah berkelanjutan terakhir pada tanggal jatuh tempo pokok masing-masing Sukuk Mudharabah yang juga merupakan tanggal pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III 2019 Seri A, B dan C telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 3 Mei 2020, 23 April 2022 dan 23 April 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Sukuk Mudharabah yang diterbitkan, Pefindo memberikan peringkat "idAAA(sy)".

Sukuk Mudharabah tersebut tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan LPEI baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Mudharabah dan sebelum dilunasinya dana Sukuk Mudharabah dan pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah, LPEI berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Tahap III Tahun 2019.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

17. Debt Securities Issued (continued)

**j. Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia
Eximbank Phase III 2019 (continued)**

The profit sharing income is paid quarterly based on profit sharing income payment date of Sukuk Mudharabah. The first profit sharing income payment of Shelf Sukuk Mudharabah Series A, B, and C will be paid on July 23, 2019, while the last profit sharing income payment on due date of each Shelf Sukuk Mudharabah and also the repayment date of Sukuk Mudharabah principal.

Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III 2019 Series A, B and C were fully paid upon maturity on May 3, 2020, April 23, 2022, and April 23, 2024 respectively.

As of December 31, 2024 and 2023, Sukuk Mudharabah is rated as "idAAA(sy)" by Pefindo.

Sukuk Mudharabah are not guaranteed with specific guarantee, but guaranteed with all assets of the LPEI, whether present or future fixed or non-fixed assets in accordance with the provisions of Article 1131 and 1132 of the Civil Laws.

During the validity period of Sukuk Mudharabah and prior to the redemption of all principal and profit sharing income of Sukuk Mudharabah, LPEI agreed to maintain and/or comply with all terms stated in the trustee agreement as outlined in the Self Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III – 2019.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

17. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

**k. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank IV Tahap V 2019**

Pada bulan Juli 2019, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp2.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V - 2019				Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV - 2019
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 Seri A	312,000	19 Juli/ July 2020	7.45% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV - 2019 Series A
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 Seri B	621,000	9 Juli/ July 2022	8.45% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV - 2019 Series B
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 Seri C	330,000	9 Juli/ July 2024	8.70% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV - 2019 Series C
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 Seri D	737,000	9 Juli/ July 2026	9.20% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV - 2019 Series D

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp26.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Juli 2019. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2019.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 Seri A, Seri B, dan Seri C telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 19 Juli 2020, 9 Juli 2022, dan 9 Juli 2024.

17. Debt Securities Issued (continued)

**k. Indonesia Eximbank Phase V Shelf
Registration Offering IV 2019**

In July 2019, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV 2019 with a face value of Rp2,000,000 with details as follows:

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering IV with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp26,000,000, that plan to be fully issued within 2 years.

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on July 10, 2019. Interest is payable quarterly starting on October 9, 2019.

Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV 2019 Series A, B, and C were fully paid upon maturity on July 19, 2020, July 9, 2022, and July 9, 2024, respectively.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

17. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

**k. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank IV Tahap V 2019 (lanjutan)**

Pada tanggal 9 Juli 2023 telah dilakukan pembelian kembali dengan tujuan untuk disimpan kemudian dapat dijual kembali atas Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 Seri C sebesar Rp15.000. Dengan selesainya penyelesaian atas pembelian kembali Obligasi tersebut, maka tidak ada perubahan nilai Obligasi yang tercatat pada penitipan kolektif di KSEI Rp330.000.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 digunakan untuk pembiayaan produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 sebesar Rp3.594 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

**l. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank IV Tahap VI 2019**

Pada bulan September 2019, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp1.018.500 dengan rincian sebagai berikut:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

17. Debt Securities Issued (continued)

**k. Indonesia Eximbank Phase V Shelf
Registration Offering IV 2019
(continued)**

On July 9, 2023, a repurchase was carried out with the aim of saving and then reselling the Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV 2019 Series C amounting to Rp15,000. With the completion of the settlement of the Bond buyback, there will be no change in the value of the Bonds recorded in collective custody at KSEI Rp330,000.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV 2019 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV 2019 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV 2019 amounting to Rp3,594 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV 2019 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

**l. Indonesia Eximbank Phase VI Shelf
Registration Offering IV 2019**

In September 2019, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV 2019 with a face value of Rp1,018,500 with details as follows:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

17. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

**I. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank IV Tahap VI 2019 (lanjutan)**

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI - 2019			
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 Seri A	283,000	13 September/ September 2020	7.00% tetap/fixed
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 Seri B	15,000	3 September/ September 2022	7.80% tetap/fixed
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 Seri C	6,000	3 September/ September 2024	8.10% tetap/fixed
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 Seri D	714,500	3 September / September 2026	8.50% tetap/fixed

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp26.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 September 2019. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 3 Desember 2019.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 Seri A, Seri B, dan Seri C telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 13 September 2020, 3 September 2022, dan 3 September 2024.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 digunakan untuk pembiayaan produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

17. Debt Securities Issued (continued)

**I. Indonesia Eximbank Phase VI Shelf
Registration Offering IV 2019
(continued)**

Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
	Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV - 2019
7.00% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV - 2019 Series A
	Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV - 2019 Series B
7.80% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV - 2019 Series C
	Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV - 2019 Series D
8.10% tetap/fixed	
8.50% tetap/fixed	

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering IV with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp26,000,000, that plan to be fully issued within 2 years.

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on September 4, 2019. Interest is payable quarterly starting on December 3, 2019.

Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV 2019 Series A, B, and C were fully paid upon maturity on September 13, 2020, September 3, 2022, and September 3, 2024 respectively.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV 2019 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV 2019 were used to finance earning assets in the form of export financing.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

17. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

**l. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank IV Tahap VI 2019 (lanjutan)**

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 sebesar Rp3.040 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

**m. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank IV Tahap VII 2019**

Pada bulan Oktober 2019, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp1.058.550, dengan rincian sebagai berikut:

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII - 2019				Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV - 2019
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 Seri A	600,000	9 November/ November 2020	7.00% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series A
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 Seri B	101,300	29 Oktober/ October 2022	7.80% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series B
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 Seri C	25,500	29 Oktober/ October 2024	8.10% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series C
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 Seri D	112,000	29 Oktober/ October 2026	8.50% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series D
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 Seri E	219,750	29 Oktober/ October 2029	8.75% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series E

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp26.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

17. Debt Securities Issued (continued)

**l. Indonesia Eximbank Phase VI Shelf
Registration Offering IV 2019
(continued)**

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV 2019 amounting to Rp3,040 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV 2019 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

**m. Indonesia Eximbank Phase VII Shelf
Registration Offering IV 2019**

In October 2019, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV 2019 with a face value of Rp1,058,550, with details as follows:

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering IV with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp26,000,000, that plan to be fully issued within 2 years.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

17. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

**m. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank IV Tahap VII 2019 (lanjutan)**

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Oktober 2019. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 29 Januari 2020.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 Seri A, Seri B, dan Seri C telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 9 November 2020, 29 Oktober 2022 dan 29 Oktober 2024.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 digunakan untuk pembiayaan produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 sebesar Rp4.238 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

**n. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank IV Tahap VIII 2019**

Pada bulan Desember 2019, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp1.661.500 dengan rincian sebagai berikut:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

17. Debt Securities Issued (continued)

**m. Indonesia Eximbank Phase VII Shelf
Registration Offering IV 2019
(continued)**

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on October 30, 2019. The interest payment is quarterly and the first payment was made on January 29, 2020.

Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV 2019 Series A, Series B, and Series C were fully paid upon maturity on November 9, 2020, October 29, 2022, and October 29, 2024, respectively.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV 2019 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV 2019 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV 2019 amounting to Rp4,238 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV 2019 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

**n. Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf
Registration Offering IV 2019**

In December 2019, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV 2019 with a face value of Rp1,661,500 with details as follows:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

17. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

**n. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank IV Tahap VIII 2019 (lanjutan)**

Seri/Series	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII - 2019		
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019 Seri A	88,000	6 Desember/ December 2022
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019 Seri B	1,551,000	6 Desember/ December 2024
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019 Seri C	22,500	6 Desember/ December 2026

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp26.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Desember 2019. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 6 Maret 2020.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019 Seri A dan Seri B telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 6 Desember 2022 dan 6 Desember 2024.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII – 2019 digunakan untuk pembiayaan produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019 sebesar Rp3.323, yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

17. Debt Securities Issued (continued)

**n. Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf
Registration Offering IV 2019
(continued)**

Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Obligasi/ Bonds
Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV - 2019	
7.50% tetap/fixed	Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series A Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration
7.90% tetap/fixed	Offering IV - 2019 Series B Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration
8.20% tetap/fixed	Offering IV - 2019 Series C

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering IV with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp26,000,000, that plan to be fully issued within 2 years.

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on December 9, 2019. The interest payment schedule is quarterly and the first payment was made on March 6, 2020.

Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV 2019 Series A and Series C were fully paid upon maturity on December 6, 2022 and December 6, 2024.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV 2019 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV 2019 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV 2019 amounting to Rp3,323 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV 2019 and over the term of the bonds using the effective interest rate method.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

17. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

**n. Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank IV Tahap VIII 2019 (lanjutan)**

Selama periode efektif PUB Obligasi IV dan PUB Sukuk Mudharabah I, LPEI telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Tahap I sampai dengan Tahap VIII serta Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Tahap I sampai dengan Tahap IV dengan total dana yang dihimpun sebesar Rp17.564.150, adapun jumlah target dana yang kurang dihimpun adalah sebesar Rp14.435.850 dari total target dana yang dihimpun sebesar Rp32.000.000. Dalam rangka pemenuhan terhadap Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, LPEI telah mengumumkan Penghentian PUB Obligasi IV dan PUB Sukuk Mudharabah I pada laman resmi LPEI dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Maret 2020.

Persyaratan dan kondisi pembatasan

Sebelum dilunasinya semua pokok obligasi, bunga obligasi dan biaya lain yang harus ditanggung oleh LPEI berkenaan dengan seluruh Obligasi, LPEI berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank memiliki peringkat "idAAA" berdasarkan PT Pefindo pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Obligasi-obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan LPEI, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

17. Debt Securities Issued (continued)

**n. Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf
Registration Offering IV 2019
(continued)**

During the Shelf Registration Offering Bond IV and Sukuk Mudharabah I period, LPEI has issued Bond Phase I to Phase VIII and Shelf Sukuk Mudharabah Phase I to Phase IV with total funds raised amounting to Rp17,564,150, the deficiency of the target amount of funds raised is Rp14,435,850 from target funds amounting to Rp32,000,000. In order to comply with FSA Regulation No. 36/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 on Shelf Registration Offering of Debt Securities and/or Sukuk, LPEI announced Discontinuation of Shelf Registration Offering Bond IV and Sukuk Mudharabah I on LPEI's official website and Indonesia Stock Exchange official Website on March 27, 2020.

Terms and required covenants

Before settlement of all the principal and interest on all LPEI Bonds ("Bonds") and other charges payable by LPEI in connection with the issuance of Bonds, LPEI agreed to maintain and/or comply with all terms stated in the trustee agreement as out lined in the Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering.

Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering were rated "idAAA" by PT Pefindo as of December 31, 2024 and 2023.

The bonds are not secured by specific collateral, but are secured by all of LPEI's fixed and non-fixed assets, both existing and will exist in the future, in compliance with the regulations of Indonesian Civil Law Articles 1131 and 1132.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**17. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan
(lanjutan)**

Obligasi ini tidak dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur LPEI lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LPEI juga dikenakan pembatasan-pembatasan tertentu atas penerbitan efek-efek ini.

Pada tanggal 31 Desember 2024 LPEI telah memenuhi pembatasan-pembatasan tersebut.

17. Debt Securities Issued (continued)

These bonds are not guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia.

The bondholders' right is paripassu without preference offer other LPEI creditors' rights in compliance with prevailing regulations.

LPEI is also subject to certain restrictions on the issuance of these securities.

As of December 31, 2024, LPEI has fulfilled these restrictions.

18. Pinjaman yang Diterima

	2024	2023
Pinjaman		
Sindikasi	4,012,099	4,576,529
Bilateral	20,851,461	12,298,134
Pinjaman Syirkah	--	1,478,280
Total	24,863,560	18,352,943

*Borrowings
Syndicated
Bilateral
Syirkah Fund
Total*

Di bawah ini adalah rincian pinjaman yang diterima berdasarkan pemberi pinjaman:

18. Fund Borrowings

Below are the details of fund borrowings based on the lenders:

Pinjaman Sindikasi

Syndicated Borrowings

2024			
Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional amount Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Tanggal efektif/ Effective date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date
Mata uang asing Dolar Amerika Serikat Pihak ketiga Facility agent			
SMBC SGP	249,276,087	20 September/ September 20, 2022	19 September/ September 19, 2025
Total	4,012,099		
2023			
Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional amount Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Tanggal efektif/ Effective date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date
Mata uang asing Dolar Amerika Serikat Pihak ketiga Facility agent			
SMBC SGP	248,282,279	20 September/ September 20, 2022	19 September/ September 19, 2025
SMBC SGP	48,952,878	16 November/ November 16, 2022	15 November/ November 15, 2024
Total	4,576,529		

*Foreign currencies
United States Dollar
Third parties
Facility agent*

*SMBC SGP
Total*

*Foreign currencies
United States Dollar
Third parties
Facility agent*

*SMBC SGP
SMBC SGP
Total*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

18. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

Pinjaman Bilateral

2024				
	Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional amount Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Tanggal efektif/ Effective date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date
Rupiah				Rupiah
Pihak berelasi (Catatan 39)				Related parties (Note 39)
PT Bank Tabungan Negara (Persero)		2,000,000	4 Maret/ March 4, 2024	4 Maret/ March 4, 2025
		2,000,000		Bank Tabungan Negara (Persero)
Pihak ketiga				Third parties
PT Bank Central Asia Tbk		1,000,000	21 Februari/ February 21, 2024	21 Februari/ February 21, 2025
			29 Februari/ February 29, 2024	28 Februari/ February 28, 2025
PT Bank Central Asia Tbk		2,000,000	February 29, 2024	February 28, 2025
			4 Maret/ March 4, 2024	4 Maret/ March 4, 2025
PT Bank Central Asia Tbk		2,500,000	March 4, 2024	March 4, 2025
		5,500,000		PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank UOB Indonesia		350,000	31 Desember/ December 31, 2024	3 Januari/ January 3, 2025
			18 Desember/ December 18, 2024	17 Januari/ January 17, 2025
Bank Maspion Indonesia		500,000	December 18, 2024	January 17, 2025
			4 Desember/ December 4, 2024	4 Maret/ March 4, 2025
Standard Chartered Bank, Jakarta		1,700,000	December 4, 2024	March 4, 2025
Standard Chartered Bank, Jakarta		300,000	30 Desember/ December 30, 2024	2 Juni/ June 2, 2025
Standard Chartered Bank, Jakarta		200,000	31 Desember/ December 31, 2024	2 Juni/ June 2, 2025
		2,200,000		Standard Chartered Bank, Jakarta
		8,550,000		
Total mata uang Rupiah		10,550,000		Total Rupiah
Mata uang asing				Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat				United States Dollar
Pihak ketiga				Third parties
PT Bank ICBC Indonesia	99,464,171	1,600,876	29 September/ September 29, 2020	29 September/ September 29, 2025
			19 November/ November 19, 2020	19 November/ November 19, 2025
PT Bank ICBC Indonesia	99,575,141	1,602,662	November 19, 2020	November 19, 2025
		3,203,538		PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank UOB Indonesia	60,000,000	965,700	5 Maret/ March 5, 2024	5 Maret/ March 5, 2025
			24 Desember/ December 24, 2024	24 Maret/ March 24, 2025
Standard Chartered Bank, Jakarta	100,000,000	1,609,500	December 24, 2024	March 24, 2025
Standard Chartered Bank, Jakarta	30,000,000	482,850	4 Desember/ December 4, 2024	4 Maret/ March 4, 2025
		2,092,350		Standard Chartered Bank, Jakarta
PT Bank Permata	28,000,000	450,660	5 Maret/ March 5, 2024	5 Maret/ March 5, 2025
				PT Bank Permata

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

18. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

18. Fund Borrowings (continued)

Pinjaman Bilateral (lanjutan)

Bilateral Borrowings (continued)

2024					
Mata uang asing	Jumlah nosional	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Tanggal efektif/ Effective date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	
	Mata uang asing/ Notional amount Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)				
Dolar Amerika Serikat					Foreign currencies United States Dollar
Pihak ketiga					Third parties
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	40,000,000	643,800	29 Januari/ January 29, 2024	28 Januari/ January 28, 2025	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	35,000,000	563,325	29 Januari/ January 29, 2024	28 Januari/ January 28, 2025	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	50,000,000	804,750	16 Februari/ February 16, 2024	14 Februari/ February 14, 2025	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	32,000,000	515,040	16 Februari/ February 16, 2024	14 Februari/ February 14, 2025	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	3,000,000	48,285	16 Februari/ February 16, 2024	14 Februari/ February 14, 2025	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
		<u>2,575,200</u>			
PT Bank CIMB Niaga Tbk	30,000,000	482,850	19 November/ November 19, 2024	19 Februari/ February 19, 2025	PT Bank CIMB NiagaTbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	20,000,000	321,900	25 November/ November 25, 2024	25 Februari/ February 25, 2025	PT Bank CIMB NiagaTbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	10,000,000	160,950	29 November/ November 29, 2024	28 Februari/ February 28, 2025	PT Bank CIMB NiagaTbk
		<u>965,700</u>			
Total Dolar Amerika Serikat		10,253,148			Total United States Dollar
Euro Eropa					European Euro
Pihak berelasi (Catatan 39)					Related parties (Note 39)
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	547,511	9,175	4 Juli/ July 4, 2008	30 Juni/ June 30, 2044	Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	686,324	11,502	23 Desember/ December 23, 2010	30 Juni/ June 30, 2044	Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	412,124	6,906	30 Desember/ December 30, 2010	30 Juni/ June 30, 2044	Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	701,457	11,755	9 Maret/ March 9, 2011	30 Juni/ June 30, 2044	Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	535,584	8,975	4 Mei/ May 4, 2011	30 Juni/ June 30, 2044	Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance
		<u>48,313</u>			
Total Euro Eropa		48,313			Total European Euro
Total mata uang asing		10,301,461			Total foreign currency
Total Pinjaman Bilateral		20,851,461			Total Bilateral Borrowings

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

18. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

Pinjaman Bilateral (lanjutan)

2023				
	Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional amount Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Tanggal efektif/ Effective date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date
Rupiah				
Pihak ketiga				
PT Bank UOB Indonesia		500,000	29 Desember/ December 29, 2023	3 Januari/ January 3, 2024
Total mata uang Rupiah		500,000		
Mata uang asing				
Dolar Amerika Serikat				
Pihak ketiga				
PT Bank ICBC Indonesia	148,784,735	2,290,839	29 September/ September 29, 2020	29 September/ September 29, 2025
PT Bank ICBC Indonesia	99,124,122	1,526,214	19 November/ November 19, 2020	19 November/ November 19, 2025
		3,817,053		
PT Bank UOB Indonesia	35,000,000	538,895	28 Desember/ December 28, 2023	3 Januari/ January 3, 2024
PT Bank CIMB Niaga Tbk	60,000,000	923,820	27 Desember/ December 27, 2023	29 Januari/ January 29, 2024
Standard Chartered Bank, Jakarta	100,000,000	1,539,700	19 Oktober/ October 19, 2023	18 Oktober/ October 18, 2024
Standard Chartered Bank, Jakarta	75,000,000	1,154,775	27 Desember/ December 27, 2023	29 Januari/ January 29, 2024
Standard Chartered Bank, Jakarta	50,000,000	769,850	27 Desember/ December 27, 2023	3 Januari/ January 3, 2024
Standard Chartered Bank, Jakarta	50,000,000	769,850	28 Desember/ December 28, 2023	4 Januari/ January 4, 2024
		4,234,175		
PT Bank Central Asia Tbk	35,000,000	538,895	15 November/ November 15, 2023	15 Februari/ February 15, 2024
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	50,000,000	769,850	16 November/ November 16, 2023	16 Februari/ February 16, 2024
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	10,000,000	153,970	13 Desember/ December 13, 2023	12 Januari/ January 12, 2024
		923,820		
PT Bank Mizuho Indonesia	30,000,000	461,910	27 Desember/ December 27, 2023	26 Januari/ January 26, 2024
PT Bank Pan Indonesia Tbk	20,000,000	307,940	20 November/ November 20, 2023	20 Februari/ February 20, 2024
Total Dolar Amerika Serikat		11,746,508		

18. Fund Borrowings (continued)

Bilateral Borrowings (continued)

					Rupiah
					Third parties
					PT Bank UOB Indonesia
					Total Rupiah
					Foreign currencies
					United States Dollar
					Third parties
					PT Bank ICBC Indonesia
					PT Bank ICBC Indonesia
					PT Bank UOB Indonesia
					PT Bank CIMB NiagaTbk
					Standard Chartered Bank, Jakarta
					Standard Chartered Bank, Jakarta
					Standard Chartered Bank, Jakarta
					Standard Chartered Bank, Jakarta
					PT Bank Central Asia Tbk
					PT Bank Danamon Indonesia Tbk
					PT Bank Danamon Indonesia Tbk
					PT Bank Mizuho Indonesia
					PT Bank Pan Indonesia Tbk
					Total United States Dollar

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

18. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

Pinjaman Bilateral (lanjutan)

	2023			
	Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional amount Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Tanggal efektif/ Effective date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date
Euro Eropa				
Pihak berelasi (Catatan 39)				
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	575,428	9,804	4 Juli/ July 4, 2008	30 Juni/ June 30, 2044
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	721,318	12,290	23 Desember/ December 23, 2010	30 Juni/ June 30, 2044
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	433,138	7,380	30 Desember/ December 30, 2010	30 Juni/ June 30, 2044
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	737,223	12,561	9 Maret/ March 9, 2011	30 Juni/ June 30, 2044
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	562,893	9,591	4 Mei/ May 4, 2011	30 Juni/ June 30, 2044
Total Euro Eropa		51,626		
Total Pinjaman Bilateral		12,298,134		

European Euro
Related parties (Note 39)
Government of the Republic
of Indonesia through
the Ministry of Finance
Government of the Republic
of Indonesia through
the Ministry of Finance
Government of the Republic
of Indonesia through
the Ministry of Finance
Government of the Republic
of Indonesia through
the Ministry of Finance
Government of the Republic
of Indonesia through
the Ministry of Finance
Total European Euro
Total Bilateral Borrowings

Pinjaman Syirkah

Pada tanggal 31 Desember 2024 LPEI tidak
memiliki pinjaman syirkah.

Syirkah Fund

As of December 31, 2024 LPEI does not
have syirkah fund.

	2023			
	Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional amount Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Tanggal efektif/ Effective date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date
Rupiah				
Pihak berelasi (Catatan 39)				
PT Bank Syariah Indonesia Tbk		1,478,280	27 Juni/ June 27, 2022	27 Juni/ June 27, 2024
		1,478,280		

Rupiah
Related party (Note 39)
PT Bank Syariah Indonesia Tbk

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

18. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

Di bawah ini adalah rincian masing-masing fasilitas pinjaman yang diperoleh:

Pinjaman Sindikasi

a. Pinjaman sindikasi dengan facility agent Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch (SMBC SGP)

Pada tanggal 16 November 2022, LPEI melakukan penarikan Tranche A sebesar USD200.000.000 yang telah dilunasi lebih awal sebagian pada tanggal 16 November 2023 dan telah jatuh tempo pada tanggal 15 November 2024. Pada tanggal 20 September 2022, LPEI melakukan penarikan Tranche B sebesar USD250.000.000 dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 September 2025, dengan rincian per tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tranche A

Komposisi sindikasi	Jumlah fasilitas/ Facility amount (USD)
Bank peserta:	
Australia and New Zealand Banking Group Limited Singapore Branch	11,005,231
United Overseas Bank Limited	11,005,232
Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. Singapore Branch	3,333,333
Fubon Bank (Hong Kong) Limited	2,222,222
The Chiba Bank, Ltd., (Incorporated In Japan With Limited Liability) Hong Kong Branch	1,100,000
The Export- Import Bank of The Republic of China	1,430,000
AfrAsia Bank Limited	1,668,750
The Korea Development Bank, Singapore Branch	4,400,000
The Bank of Yokohama, Ltd. Singapore Branch	2,500,000
The Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd Singapore Branch	330,000
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch	
	11,005,232
	<u>50,000,000</u>

Tranche B

Komposisi sindikasi	Jumlah fasilitas/ Facility amount (USD)
Bank peserta:	
The Chiba Bank, Ltd., (Incorporated In Japan With Limited Liability) Hong Kong Branch	5,600,000
The Export- Import Bank of The Republic of China	7,280,000
AfrAsia Bank Limited	8,325,000
The Korea Development Bank, Singapore Branch	22,400,000
The Bank of Yokohama, Ltd. Singapore Branch	20,000,000
The Hachijuni Bank, Ltd.	30,000,000
The Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd Singapore Branch	1,680,000
Australia and New Zealand Banking Group Limited Singapore Branch	42,312,408
United Overseas Bank Limited	7,312,407
Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. Singapore Branch	36,666,667
The Joyo Bank, Ltd.	10,000,000
The Shizuoka Bank, Ltd. Singapore Branch	10,000,000
Industrial Bank of Korea, London Branch	5,000,000
KEXIM Bank (UK) Limited	10,000,000
Fubon Bank (Hong Kong) Limited	11,111,111
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch	
	22,312,407
	<u>250,000,000</u>

18. Fund Borrowings (continued)

Below are the details of each loan facility obtained:

Syndicated Borrowings

a. Syndicated loan with Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch as facility agent (SMBC SGP)

On November 16, 2022, LPEI has withdrawal Tranche A amounted to USD200,000,000, that has been partially prepaid on November 16, 2023 and matured on November 15, 2024. On September 20, 2022, LPEI has withdrawal Tranche B amounted to USD250,000,000 and will be matured on September 19, 2025 with the details as of December 31, 2024 are as follows:

Tranche A

Composition of the syndicate
Participant banks:
Australia and New Zealand Banking Group Limited Singapore Branch
United Overseas Bank Limited
Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. Singapore Branch
Fubon Bank (Hong Kong) Limited
The Chiba Bank, Ltd., (Incorporated In Japan With Limited Liability) Hong Kong Branch
The Export- Import Bank of The Republic of China
AfrAsia Bank Limited
The Korea Development Bank, Singapore Branch
The Bank of Yokohama, Ltd. Singapore Branch
The Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd Singapore Branch
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch

Tranche B

Composition of the syndicate
Participant banks:
The Chiba Bank, Ltd., (Incorporated In Japan With Limited Liability) Hong Kong Branch
The Export- Import Bank of The Republic of China
AfrAsia Bank Limited
The Korea Development Bank, Singapore Branch
The Bank of Yokohama, Ltd. Singapore Branch
The Hachijuni Bank, Ltd.
The Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd Singapore Branch
Australia and New Zealand Banking Group Limited Singapore Branch
United Overseas Bank Limited
Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. Singapore Branch
The Joyo Bank, Ltd.
The Shizuoka Bank, Ltd. Singapore Branch
Industrial Bank of Korea, London Branch
KEXIM Bank (UK) Limited
Fubon Bank (Hong Kong) Limited
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

18. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

a. Pinjaman sindikasi dengan *facility agent* Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch (SMBC SGP) (lanjutan)

Tingkat kisaran suku bunga sebesar margin tertentu ditambah dengan referensi suku bunga tertentu untuk *Tranche A* dan *B* pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Pinjaman Bilateral

b. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan-Perjanjian Penerusan Pinjaman atas Fasilitas Kredit dari *Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)*

LPEI memperoleh fasilitas kredit dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan sesuai dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman No. SLA-1169/DP3/2004 tanggal 30 Juni 2004. Pinjaman ini berasal dari *Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)* melalui Pemerintah dengan jumlah maksimum sebesar EUR4.500.000 yang digunakan untuk pembiayaan efisiensi industri dan kontrol fase II terhadap polusi di Indonesia. Jangka waktu pinjaman adalah empat puluh tahun sampai dengan 30 Juni 2044, termasuk masa tenggang sepuluh tahun atas pembayaran pokok. Tingkat suku bunga tetap per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, LPEI memiliki saldo pinjaman masing-masing sebesar EUR2.883.000 dan EUR3.030.000

18. Fund Borrowings (continued)

a. Syndicated loan with Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch as *facility agent* (SMBC SGP) (continued)

The interest rate range is a certain margin plus a certain interest rate reference for Tranche A and B as of December 31, 2024 and 2023.

Bilateral Borrowings

b. Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance Its subsidiary Loan Agreement on Credit Facility from *Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)*

LPEI obtained a credit facility from the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance based on its subsidiary Loan Agreement No. SLA-1169/DP3/2004 dated June 30, 2004. This loan was granted by Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) through the Government with a maximum amount of EUR4,500,000 that is intended to be used for financing industrial efficiency and pollution control phase II in Indonesia. The facility has a term of forty years up to June 30, 2044, including a grace period of ten years for the principal payments. The loan has a fixed interest rate

As of December 31, 2024 and 2023, LPEI has a total outstanding borrowings of EUR2,883,000 and EUR3,030,000 respectively.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

18. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

Pinjaman Bilateral (lanjutan)

c. PT Bank ICBC Indonesia

Pada tanggal 24 September 2020, LPEI menandatangani fasilitas pinjaman *Bilateral Committed Loan Credit* dengan PT Bank ICBC Indonesia sebesar USD380.000.000.

Pada tanggal 29 September 2020, LPEI melakukan penarikan sebesar USD150.000.000 yang telah dilunasi sebagian pada tanggal 27 Desember 2024 dengan tingkat suku bunga saat ini sebesar margin tertentu ditambah dengan referensi suku bunga tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 September 2025.

Pada tanggal 19 November 2020, LPEI melakukan penarikan sebesar USD100.000.000 dengan tingkat suku bunga saat ini sebesar margin tertentu ditambah dengan referensi suku bunga tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 November 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2024, LPEI memiliki total saldo pinjaman sebesar USD200.000.000.

d. Standard Chartered Bank Indonesia

Pada tanggal 23 Juni 2023, LPEI menandatangani perjanjian fasilitas dengan Standard Chartered Bank Indonesia sebesar USD300.000.000.

Pada tanggal 14 Desember 2023, LPEI menandatangani perjanjian perubahan dengan Standard Chartered Bank Indonesia.

Pada tanggal 19 Oktober 2023, LPEI melakukan penarikan sebesar USD100.000.000 dengan tingkat suku bunga tertentu dan telah dilunasi pada tanggal 18 Oktober 2024.

18. Fund Borrowings (continued)

Bilateral Borrowings (continued)

c. PT Bank ICBC Indonesia

On September 24, 2020, LPEI signed a *Bilateral Committed Loan Credit* from PT Bank ICBC Indonesia amounting to USD380,000,000.

On September 29, 2020, LPEI has withdrawal amounted to USD150,000,000 which has been partially repaid on December 27, 2024, which bear interest rate at a certain margin plus a certain interest rate reference and will be mature on September 29, 2025.

On November 19, 2020, LPEI has withdrawal amounted to USD100,000,000, which bear interest rate at a certain margin plus a certain interest rate reference and will be mature on November 19, 2025.

As of December 31, 2024, LPEI has a total outstanding borrowings of USD200,000,000.

d. Standard Chartered Bank Indonesia

On June 23, 2023, LPEI signed a *Facility Agreement* from Standard Chartered Bank Indonesia amounting to USD300,000,000.

On December 14, 2023, LPEI signed an *Amendment Agreement* from Standard Chartered Bank Indonesia.

On October 19, 2023, LPEI has withdrawal amounted to USD100,000,000 which bear interest rate at a certain margin and has been repaid on October 18, 2024.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

18. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

Pinjaman Bilateral (lanjutan)

**d. Standard Chartered Bank Indonesia
(lanjutan)**

Pada tanggal 27 Desember 2023, LPEI melakukan penarikan sebesar USD50.000.000 dengan tingkat suku bunga tertentu dan telah dilunasi pada tanggal 3 Januari 2024.

Pada tanggal 27 Desember 2023, LPEI melakukan penarikan sebesar USD75.000.000 dengan tingkat suku bunga tertentu dan telah dilunasi pada tanggal 29 Januari 2024.

Pada tanggal 28 Desember 2023, LPEI melakukan penarikan sebesar USD50.000.000 dengan tingkat suku bunga tertentu dan telah dilunasi pada tanggal 4 Januari 2024.

Pada tanggal 7 Maret 2024, LPEI melakukan penarikan sebesar USD50.000.000 dengan tingkat suku bunga tertentu dan telah dilunasi pada tanggal 9 September 2024.

Pada tanggal 27 Juni 2024, LPEI melakukan penarikan sebesar USD150.000.000 dengan tingkat suku bunga tertentu dan telah dilunasi pada tanggal 2 Juli 2024.

Pada tanggal 9 September 2024, LPEI melakukan penarikan sebesar USD50.000.000 dengan tingkat suku bunga tertentu dan telah dilunasi pada tanggal 9 Oktober 2024.

Pada tanggal 2 Desember 2024, LPEI menandatangani perjanjian dengan Standard Chartered Bank Indonesia.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

18. Fund Borrowings (continued)

Bilateral Borrowings (continued)

**d. Standard Chartered Bank Indonesia
(continued)**

On December 27, 2023, LPEI has withdrawal amounted to USD50,000,000 which bear interest rate at a certain margin and has been repaid on January 3, 2024.

On December 27, 2023, LPEI has withdrawal amounted to USD75,000,000 which bear interest rate at a certain margin and has been repaid on January 29, 2024.

On December 28, 2023, LPEI has withdrawal amounted to USD50,000,000 which bear interest rate at a certain margin and has been repaid on January 4, 2024.

On March 7, 2024, LPEI has withdrawal amounted to USD50,000,000 which bear interest rate at a certain margin and has been repaid on September 9, 2024.

On June 27, 2024, LPEI has withdrawal amounted to USD150,000,000 which bear interest rate at a certain margin and has been repaid on July 2, 2024.

On September 9, 2024, LPEI has withdrawal amounted to USD50,000,000 which bear interest rate at a certain margin and has been repaid on October 9, 2024.

On December 2, 2024, LPEI signed an Agreement from Standard Chartered Bank Indonesia.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

18. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

Pinjaman Bilateral (lanjutan)

**d. Standard Chartered Bank Indonesia
(lanjutan)**

Pada tanggal 4 Desember 2024, LPEI melakukan penarikan sebesar USD30.000.000 dengan tingkat suku bunga tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Maret 2025.

Pada tanggal 4 Desember 2024, LPEI melakukan penarikan sebesar Rp1.700.000 dengan tingkat suku bunga tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Maret 2025.

Pada tanggal 24 Desember 2024, LPEI melakukan penarikan sebesar USD100.000.000 dengan tingkat suku bunga tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2025.

Pada tanggal 30 Desember 2024, LPEI melakukan penarikan sebesar Rp300.000 dengan tingkat suku bunga tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 2 Juni 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2024, LPEI melakukan penarikan sebesar Rp200.000 dengan tingkat suku bunga tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 2 Juni 2025.

e. PT Bank ANZ Indonesia

Pada tanggal 10 Juni 2022, LPEI menandatangani perjanjian fasilitas dengan PT Bank ANZ Indonesia sebesar USD50.000.000.

Pada tanggal 28 Desember 2022, LPEI melakukan penarikan sebesar Rp150.000, dengan tingkat suku bunga tertentu dan telah dilunasi pada tanggal 4 Januari 2023.

18. Fund Borrowings (continued)

Bilateral Borrowings (continued)

**d. Standard Chartered Bank Indonesia
(continued)**

On December 4, 2024, LPEI has withdrawal amounted to USD30,000,000 which bear interest rate at a certain margin and will be matured on March 4, 2025.

On December 4, 2024, LPEI has withdrawal amounted to Rp1,700,000 which bear interest rate at a certain margin and will be matured on March 4, 2025.

On December 24, 2024, LPEI has withdrawal amounted to USD100,000,000 which bear interest rate at a certain margin and will be matured on March 24, 2025.

On December 30, 2024, LPEI has withdrawal amounted to Rp300,000 which bear interest rate at a certain margin and will be matured on June 2, 2025.

On December 31, 2024, LPEI has withdrawal amounted to Rp200,000 which bear interest rate at a certain margin and will be matured on June 2, 2025.

e. PT Bank ANZ Indonesia

On June 10, 2022, LPEI signed a Facility Agreement from PT Bank ANZ Indonesia amounting to USD50,000,000.

On December 28, 2022, LPEI has withdrawal amounted to Rp150,000, which bear interest rate at a certain margin and has been repaid on January 4, 2023.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

18. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

Pinjaman Bilateral (lanjutan)

e. PT Bank ANZ Indonesia (lanjutan)

Pada tanggal 15 Mei 2023, LPEI menandatangani perubahan perjanjian fasilitas dengan PT Bank ANZ Indonesia sebesar USD50.000.000.

Pada tanggal 29 Februari 2024, LPEI melakukan penarikan sebesar USD30.000.000, dengan tingkat suku bunga tertentu dan telah dilunasi pada tanggal 29 Agustus 2024.

Pada tanggal 30 April 2024, LPEI menandatangani perubahan perjanjian fasilitas dengan PT Bank ANZ Indonesia sebesar USD50.000.000.

Pada tanggal 17 Oktober 2024, LPEI melakukan penarikan sebesar USD25.000.000, dengan tingkat suku bunga tertentu dan telah dilunasi pada tanggal 18 November 2024.

Pada tanggal 29 Februari 2024, LPEI melakukan penarikan sebesar USD30.000.000, dengan tingkat suku bunga tertentu dan telah dilunasi pada tanggal 29 Agustus 2024.

f. PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Pada tanggal 20 Maret 2023 LPEI mendapatkan perpanjangan terhadap Perjanjian Kredit dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebesar Rp1.075.000 dan sebesar Rp1.500.000.

Pada tanggal 16 November 2023, LPEI melakukan penarikan sebesar USD50.000.000, dengan tingkat suku bunga tertentu dan telah dilunasi pada tanggal 16 Februari 2024.

Pada tanggal 13 Desember 2023, LPEI melakukan penarikan sebesar USD10.000.000, dengan tingkat suku bunga tertentu dan telah dilunasi pada tanggal 12 Januari 2024.

18. Fund Borrowings (continued)

Bilateral Borrowings (continued)

e. PT Bank ANZ Indonesia (continued)

On May 15, 2023, LPEI signed an Amendment of Facility Agreement from PT Bank ANZ Indonesia amounting to USD50,000,000.

On February 29, 2024, LPEI has withdrawal amounted to USD30,000,000, which bear interest rate at a certain margin and has been repaid on August 24, 2024.

On May 30, 2024, LPEI signed an Amendment of Facility Agreement from PT Bank ANZ Indonesia amounting to USD50,000,000.

On October 17, 2024, LPEI has withdrawal amounted to USD25,000,000, which bear interest rate at a certain margin and has been repaid on November 18, 2024.

On February 29, 2024, LPEI has withdrawal amounted to USD30,000,000, which bear interest rate at a certain margin and has been repaid on August 24, 2024.

f. PT Bank Danamon Indonesia Tbk

On March, 20, 2023 LPEI obtained an extension on the Credit Agreement with PT Bank Danamon Indonesia Tbk amounting to Rp1,075,000 and Rp1,500,000.

On November 16, 2023, LPEI has withdrawal amounted to USD50,000,000 which bear interest rate at a certain margin and has been repaid on February 16, 2024.

On December 13, 2023, LPEI has withdrawal amounted to USD10,000,000 which bear interest rate at a certain margin and has been repaid on January 12, 2024.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

18. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

Pinjaman Bilateral (lanjutan)

**f. PT Bank Danamon Indonesia Tbk
(lanjutan)**

Pada tanggal 29 Januari 2024, LPEI melakukan penarikan sebesar USD40.000.000, dengan tingkat suku bunga tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 2025.

Pada tanggal 29 Januari 2024, LPEI melakukan penarikan sebesar USD35.000.000, dengan tingkat suku bunga tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 2025.

Pada tanggal 16 Februari 2024, LPEI melakukan penarikan sebesar USD50.000.000, dengan tingkat suku bunga tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 14 Februari 2025.

Pada tanggal 16 Februari 2024, LPEI melakukan penarikan sebesar USD32.000.000, dengan tingkat suku bunga tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 14 Februari 2025.

Pada tanggal 16 Februari 2024, LPEI melakukan penarikan sebesar USD3.000.000, dengan tingkat suku bunga tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 14 Februari 2025.

Pada tanggal 26 April 2024, LPEI menandatangani perpanjangan dan penambahan fasilitas perjanjian kredit.

18. Fund Borrowings (continued)

Bilateral Borrowings (continued)

**f. PT Bank Danamon Indonesia Tbk
(continued)**

On January 29, 2024, LPEI has withdrawal amounted to USD40,000,000 which bear interest rate at a certain margin and will be matured on January 28, 2025.

On January 29, 2024, LPEI has withdrawal amounted to USD35,000,000 which bear interest rate at a certain margin and will be matured on January 28, 2025.

On February 16, 2024, LPEI has withdrawal amounted to USD50,000,000 which bear interest rate at a certain margin and will be matured on February 14, 2025.

On February 16, 2024, LPEI has withdrawal amounted to USD32,000,000 which bear interest rate at a certain margin and will be matured on February 14, 2025.

On February 16, 2024, LPEI has withdrawal amounted to USD3,000,000 which bear interest rate at a certain margin and will be matured on February 14, 2025.

On April 26, 2024, LPEI has signed extension and facilities addition of credit agreement.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

18. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

Pinjaman Bilateral (lanjutan)

g. PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 15 November 2023, LPEI melakukan penarikan sebesar USD35.000.000, dengan tingkat suku bunga tertentu dan telah dilunasi pada tanggal 15 Februari 2024.

Pada tanggal 20 Februari 2024 LPEI menandatangani perubahan Perjanjian Kredit dengan PT Bank Central Asia Tbk.

Pada tanggal 21 Februari 2024, LPEI melakukan penarikan sebesar Rp1.000.000, dengan tingkat suku bunga tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Februari 2025.

Pada tanggal 29 Februari 2024, LPEI melakukan penarikan sebesar Rp2.000.000, dengan tingkat suku bunga tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2025.

Pada tanggal 4 Maret 2024, LPEI melakukan penarikan sebesar Rp2.500.000, dengan tingkat suku bunga tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Maret 2025.

h. PT Bank UOB Indonesia

Pada tanggal 28 Desember 2023, LPEI melakukan penarikan sebesar USD35.000.000, dengan tingkat suku bunga tertentu dan telah dilunasi pada tanggal 3 Januari 2024.

Pada tanggal 29 Desember 2023, LPEI melakukan penarikan sebesar Rp500.000, dengan tingkat suku bunga tertentu dan telah dilunasi pada tanggal 3 Januari 2024.

18. Fund Borrowings (continued)

Bilateral Borrowings (continued)

g. PT Bank Central Asia Tbk

On November 15, 2023, LPEI has withdrawal amounted to USD35,000,000, which bear interest rate at a certain margin and has been repaid on February 15, 2024.

On February 20, 2024, LPEI signed an extension of the Credit Agreement with PT Bank Central Asia Tbk.

On February 21, 2024, LPEI has withdrawal amounted to Rp1,000,000 which bear interest rate at a certain margin and will be matured on February 21, 2025.

On February 29, 2024, LPEI has withdrawal amounted to Rp2,000,000, which bear interest rate at a certain margin and will be matured on February 28, 2025.

On March 4, 2024, LPEI has withdrawal amounted to Rp2,500,000, which bear interest rate at a certain margin and will be matured on March 4, 2025.

h. PT Bank UOB Indonesia

On December 28, 2023, LPEI has withdrawal amounted to USD35,000,000, which bear interest rate at a certain margin and has been repaid on January 3, 2024.

On December 29, 2023, LPEI has withdrawal amounted to Rp500,000, which bear interest rate at a certain margin and has been repaid on January 3, 2024.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

18. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

Pinjaman Bilateral (lanjutan)

h. PT Bank UOB Indonesia (lanjutan)

Pada tanggal 5 Maret 2024, LPEI melakukan penarikan sebesar USD60,000,000, dengan tingkat suku bunga tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 5 Maret 2025.

Pada tanggal 7 Maret 2024, LPEI melakukan penarikan sebesar USD50,000,000, dengan tingkat suku bunga tertentu dan telah dilunasi pada tanggal 6 September 2024.

Pada tanggal 27 Juni 2024, LPEI melakukan penarikan sebesar Rp500.000, dengan tingkat suku bunga tertentu dan telah dilunasi pada tanggal 1 Juli 2024.

Pada tanggal 23 Agustus 2024 LPEI menandatangani perpanjangan Perjanjian Kredit dengan PT Bank UOB Indonesia.

Pada tanggal 30 Agustus 2024, LPEI melakukan penarikan sebesar Rp500.000, dengan tingkat suku bunga tertentu dan telah dilunasi pada tanggal 3 September 2024.

Pada tanggal 17 September 2024, LPEI melakukan penarikan sebesar Rp500.000, dengan tingkat suku bunga tertentu dan telah dilunasi pada tanggal 17 Oktober 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2024, LPEI melakukan penarikan sebesar Rp350.000, dengan tingkat suku bunga tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2025.

18. Fund Borrowings (continued)

Bilateral Borrowings (continued)

h. PT Bank UOB Indonesia (continued)

On March 5, 2024, LPEI has withdrawal amounted to USD60,000,000, which bear interest rate at a certain margin and will be matured on March 5, 2025.

On March 7, 2024, LPEI has withdrawal amounted to USD50,000,000, which bear interest rate at a certain margin and has been repaid on September 6, 2024.

On June 27, 2024, LPEI has withdrawal amounted to Rp500,000, which bear interest rate at a certain margin and has been repaid on July 1, 2024.

On August 23, 2024, LPEI signed an extension of the Credit Agreement with PT Bank UOB Indonesia.

On August 30, 2024, LPEI has withdrawal amounted to Rp500,000, which bear interest rate at a certain margin and has been repaid on September 3, 2024.

On September 17, 2024, LPEI has withdrawal amounted to Rp500,000, which bear interest rate at a certain margin and has been repaid on October 17, 2024.

On December 31, 2024, LPEI has withdrawal amounted to Rp350,000, which bear interest rate at a certain margin and will be matured on January 3, 2025.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

18. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

Pinjaman Bilateral (lanjutan)

i. PT Bank Pan Indonesia Tbk

Pada tanggal 20 November 2023, LPEI melakukan penarikan sebesar USD20.000.000, dengan tingkat suku bunga tertentu dan telah dilunasi pada tanggal 20 Februari 2024.

Pada tanggal 23 Agustus 2024 LPEI menandatangani perubahan Perjanjian Kredit dengan PT Bank Pan Indonesia Tbk.

j. PT Bank Mizuho Indonesia

Pada tanggal 14 November 2023, LPEI menandatangani Perubahan Perjanjian dengan PT Bank Mizuho Indonesia.

Pada tanggal 27 Desember 2023, LPEI melakukan penarikan sebesar USD30.000.000, dengan tingkat suku bunga tertentu dan telah dilunasi pada tanggal 26 Januari 2024.

Pada tanggal 14 November 2024 LPEI menandatangani perubahan Perjanjian Kredit dengan PT Bank Mizuho Indonesia.

k. PT Bank CIMB Niaga Tbk

Pada tanggal 21 Desember 2023, LPEI menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit *interchangeable* Fasilitas Pinjaman Musyarakah dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebesar Rp1.000.000.

Pada tanggal 27 Desember 2023, LPEI melakukan penarikan sebesar USD60.000.000, dengan tingkat suku bunga tertentu dan telah dilunasi pada tanggal 29 Januari 2024.

18. Fund Borrowings (continued)

Bilateral Borrowings (continued)

i. PT Bank Pan Indonesia Tbk

On November 20, 2023, LPEI has withdrawal amounted to USD20,000,000, which bear interest rate at a certain margin and has been repaid on February 20, 2024.

On August 23, 2024, LPEI signed an Amendment to the Credit Agreement with PT Bank Pan Indonesia Tbk.

j. PT Bank Mizuho Indonesia

On November 14, 2023, LPEI signed an Amendment Agreement from PT Bank Mizuho Indonesia.

On December 27, 2023, LPEI has withdrawal amounted to USD30,000,000, which bear interest rate at a certain margin and has been repaid on Januari 26, 2024.

On November 14, 2024, LPEI signed an Amendment Agreement from PT Bank Mizuho Indonesia.

k. PT Bank CIMB Niaga Tbk

On December 21, 2023, LPEI signed a Credit Facility *interchangeable* with Musyarakah Facility Agreement from PT Bank CIMB Niaga Tbk amounting to Rp1,000,000.

On December 27, 2023, LPEI has withdrawal amounted to USD60,000,000, which bear interest rate at a certain margin and has been repaid on January 29, 2024.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

18. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

Pinjaman Bilateral (lanjutan)

k. PT Bank CIMB Niaga Tbk (lanjutan)

Pada tanggal 6 Maret 2024, LPEI melakukan penarikan sebesar USD60,000,000, dengan tingkat suku bunga tertentu dan telah dilunasi pada tanggal 6 September 2024.

Pada tanggal 14 Oktober 2024, LPEI menandatangani Perubahan Perjanjian dengan PT CIMB Niaga Tbk.

Pada tanggal 19 November 2024, LPEI melakukan penarikan sebesar USD30,000,000, dengan tingkat suku bunga tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Februari 2025.

Pada tanggal 25 November 2024, LPEI melakukan penarikan sebesar USD20,000,000, dengan tingkat suku bunga tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Februari 2025.

Pada tanggal 29 November 2024, LPEI melakukan penarikan sebesar USD10,000,000, dengan tingkat suku bunga tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2025.

l. PT Bank Permata Tbk

Pada tanggal 3 Oktober 2023, LPEI menandatangani Perjanjian Perubahan atas Perjanjian Kredit dengan PT Bank Permata Tbk sebesar Rp500.000.

Pada tanggal 5 Maret 2024, LPEI melakukan penarikan sebesar USD28,000,000 dari PT Bank Permata Tbk, dengan tingkat suku bunga tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 5 Maret 2025.

Pada tanggal 3 Oktober 2024, LPEI menandatangani Perjanjian Perubahan atas Perjanjian Kredit dengan PT Bank Permata Tbk sebesar Rp500.000.

18. Fund Borrowings (continued)

Bilateral Borrowings (continued)

k. PT Bank CIMB Niaga Tbk (continued)

On March 6, 2024, LPEI has withdrawal amounted to USD60,000,000, which bear interest rate at a certain margin and has been repaid on September 6, 2024.

On October 14, 2024, LPEI signed an Amendment Agreement from PT Bank CIMB Niaga Tbk.

On November 19, 2024, LPEI has withdrawal amounted to USD30,000,000, which bear interest rate at a certain margin and will be matured on February 19, 2025.

On November 25, 2024, LPEI has withdrawal amounted to USD20,000,000, which bear interest rate at a certain margin and will be matured on February 25, 2025.

On November 29, 2024, LPEI has withdrawal amounted to USD10,000,000, which bear interest rate at a certain margin and will be matured on February 28, 2025.

l. PT Bank Permata Tbk

On October 3, 2023, LPEI signed an Amendment of Credit Agreement from PT Bank Permata Tbk amounting to Rp500,000.

On March 5, 2024, LPEI has withdrawal amounted to USD28,000,000 from PT Bank Permata Tbk, which bear interest rate at a certain margin and will be matured on March 5, 2025.

On October 3, 2024, LPEI signed an Amendment of Credit Agreement from PT Bank Permata Tbk amounting to Rp500,000

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

18. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

Pinjaman Bilateral (lanjutan)

m. PT Bank Maspion Indonesia Tbk

Pada tanggal 2 April 2024, LPEI menandatangani Perjanjian Kredit dengan PT Bank Maspion Indonesia Tbk sebesar Rp500.000.

Pada tanggal 13 September 2024, LPEI melakukan penarikan sebesar Rp200.000, dengan tingkat suku bunga tertentu dan telah dilunasi pada tanggal 11 Oktober 2024.

Pada tanggal 19 September 2024, LPEI melakukan penarikan sebesar Rp200.000, dengan tingkat suku bunga tertentu dan telah dilunasi pada tanggal 18 Oktober 2024.

Pada tanggal 18 Desember 2024, LPEI melakukan penarikan sebesar Rp500.000, dengan tingkat suku bunga tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Januari 2025.

n. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Pada tanggal 27 September 2022, LPEI menandatangani addendum kedua Perjanjian Pinjaman dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebesar Rp2.000.000.

Pada tanggal 4 Maret 2024, LPEI melakukan penarikan sebesar Rp2.000.000, dengan tingkat suku bunga tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Maret 2025.

Pinjaman Syirkah

o. PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Pada tanggal 31 Maret 2022, LPEI telah menandatangani perjanjian kredit *uncommitted* dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebesar Rp3.000.000.

Pada tanggal 27 Juni 2022, LPEI melakukan penarikan pinjaman sebesar Rp1.500.000, dengan tingkat margin bagi hasil tertentu dan telah dilunasi pada tanggal 27 Juni 2024.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

18. Fund Borrowings (continued)

Bilateral Borrowings (continued)

m. PT Bank Maspion Indonesia Tbk

On April 2, 2024, LPEI signed a Facility Agreement from PT Bank Maspion Indonesia Tbk amounting to Rp500,000.

On September 13, 2024, LPEI has withdrawal amounted to Rp200,000, which bear interest rate at a certain margin and has been repaid on October 11, 2024.

On September 19, 2024, LPEI has withdrawal amounted to Rp200,000, which bear interest rate at a certain margin and has been repaid on October 18, 2024.

On December 18, 2024, LPEI has withdrawal amounted to Rp500,000, which bear interest rate at a certain margin and will be matured on January 17, 2025.

n. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

On September 27, 2022, LPEI signed the second addendum to the Loan Agreement with PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk amounting to Rp2,000,000.

On March 4, 2024, LPEI has withdrawal amounted to Rp2,000,000, which bear interest rate at a certain margin and will be matured on March 4, 2025.

Syirkah Fund

o. PT Bank Syariah Indonesia Tbk

On March 31, 2022, LPEI signed a uncommitted credit agreement with PT Bank Syariah Indonesia Tbk amounting Rp3,000,000.

On June 27, 2022, LPEI has withdrawal borrowing amounted to Rp1,500,000, which bear profit sharing margin at a certain margin and has been repaid on June 27, 2024.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

18. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

Berikut ini merupakan persyaratan penting terkait dengan pinjaman yang diterima:

- Tidak dapat melakukan penggabungan, konsolidasi atau rekonstruksi.
- Tidak dapat membuat/mengizinkan tetap berlakunya segala jaminan (sekuritas) atas seluruh atau sebagian dari aset-aset dan pendapatannya.
- Tidak akan menjual, mengalihkan bahkan melepaskan setiap aset-aset dengan ketentuan dapat disewa atau dibeli kembali.
- Tidak dapat menjual, mengalihkan bahkan melepaskan piutang berdasarkan ketentuan tanpa alih.
- Tidak dapat mengajukan perubahan apapun terhadap dokumen-dokumen konstitusional (termasuk untuk menghindari keraguan).
- Tidak dapat mempergunakan dana Fasilitas Kredit menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan.
- Tidak akan mengadakan perjanjian apapun yang mungkin memiliki dampak yang merugikan secara materil atau mengakibatkan pelanggaran terhadap segala dokumen pembiayaan oleh Debitur.
- Tidak dapat membuat atau mengadakan pengumuman apapun, siaran pers atau publikasi lainnya yang berhubungan dengan perjanjian yang menjadikan referensi atas pihak pembiayaan.
- Memastikan bahwa modal yang dimiliki tidak kurang dari Rp4.000.000.
- *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum 10,5% (sepuluh koma lima persen).
- Rasio *Non Performing Loan* (NPF) maksimum 5% (lima persen).
- Rasio *Financing to Asset* minimum 75% (tujuh puluh lima persen).
- *Gearing Ratio* maksimal 20x.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

18. Fund Borrowings (continued)

Below are significant covenant of the borrowings:

- *Cannot carry out merge, consolidation or reconstruction.*
- *Cannot create or allow the validity of all guarantees over all or part of its assets and income.*
- *Cannot sell, transfer or even dispose of its assets provided on condition that can be rented or repurchased.*
- *Cannot sell, transfer or even dispose of its receivables based on non-transfer provisions.*
- *Cannot propose any changes to constitutional documents (including for avoidance of doubt).*
- *Cannot use credit facility funds in violation of provisions.*
- *Will not enter into any agreement or obligation that may have a material adverse impact or whose implementation result in a violation of any provision of the financing documents by the Debtor.*
- *Cannot make or provide any announcements, press releases or other publications in connection with the Agreement in any way related to the Facility or which reference towards financing parties.*
- *Ensure that the Capital owned is not less than Rp4,000,000.*
- *Capital Adequacy Ratio (CAR) minimum 10,5% (ten point five percent)*
- *Not Performing Financing (NPF) Ratio Creditor are a maximum of 5% (five percent).*
- *The Financing to Asset Ratio is at least 75% (seventy-five percent).*
- *Maximum Gearing Ratio is 20x.*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

19. Estimasi Klaim Penjaminan

Perubahan estimasi klaim penjaminan

Perubahan estimasi klaim penjaminan adalah sebagai berikut:

	2024		
	Rupiah	Mata uang asing/ Foreign currencies	Total
Saldo awal	444,003	4,908	448,911
Pembalikan tahun berjalan penjaminan	(990)	(783)	(1,773)
Pembentukan tahun berjalan penjaminan - NIA	917	(329)	588
Pembalikan cadangan <i>stop loss</i> penjaminan - PEN	(3,084)	--	(3,084)
Selisih kurs penjabaran tahun berjalan	--	205	205
Saldo akhir	440,846	4,001	444,847

	2023		
	Rupiah	Mata uang asing/ Foreign currencies	Total
Saldo awal	473,170	5,487	478,657
Pembalikan tahun berjalan penjaminan	(2,504)	(490)	(2,994)
Pembalikan cadangan <i>stop loss</i> penjaminan - PEN	(26,663)	--	(26,663)
Selisih kurs penjabaran tahun berjalan	--	(89)	(89)
Saldo akhir	444,003	4,908	448,911

Beginning balance
Reversal during the year of guarantee
Addition during the year guarantee - NIA
Reversal stop loss guarantee - PEN
Foreign currency translation during the year
Ending balance

Beginning balance
Reversal during the year of guarantee
Reversal stop loss guarantee - PEN
Foreign currency translation during the year
Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa estimasi klaim penjaminan yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian klaim penjaminan.

Management believes that the estimated guarantee claims as provided is adequate to cover losses on guarantee claim.

20. Liabilitas Sewa

Rincian liabilitas sewa berdasarkan jatuh tempo pembayaran pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Rincian liabilitas sewa berdasarkan jatuh tempo		
Sampai dengan 1 tahun	2,443	2,961
Lebih dari 1 sampai dengan 3 tahun	506	2,376
Total	2,949	5,337

Detail of lease liabilities based on maturity
Up to 1 year
More than 1 up to 3 years
Total

19. Estimated Guarantee Claims

Changes in estimated guarantee claims

The changes in estimated guarantee claims are as follows:

20. Lease Liabilities

Detail of lease liabilities based on maturity payment as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

20. Liabilitas Sewa (lanjutan)

Semua liabilitas utang sewa didenominasi dalam Rupiah yang dibayar setiap bulan dalam suatu jumlah tetap.

Berikut adalah rincian liabilitas sewa pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

Rincian liabilitas sewa	Saldo awal 1 Januari 2024/ Beginning balance January 1, 2024	Penambahan liabilitas sewa/ Additions of lease liabilities	(Pengurangan) liabilitas sewa/ (Deduction) of lease liabilities	Beban bunga liabilitas sewa/ Interest expense of lease liabilities	Pembayaran sewa/ Payments of lease liabilities	Saldo, 31 Desember 2024 Balance, December 31, 2024	Detail of lease liabilities
Kendaraan bermotor	598	1,163	--	47	(1,236)	572	Vehicles
Bangunan	4,739	320	--	242	(2,924)	2,377	Building
Total	5,337	1,483	--	289	(4,160)	2,949	Total

Rincian liabilitas sewa	Saldo awal 1 Januari 2023/ Beginning balance January 1, 2023	Penambahan liabilitas sewa/ Additions of lease liabilities	(Pengurangan) liabilitas sewa/ (Deduction) of lease liabilities	Beban bunga liabilitas sewa/ Interest expense of lease liabilities	Pembayaran sewa/ Payments of lease liabilities	Saldo, 31 Desember 2023 Balance, December 31, 2023	Detail of lease liabilities
Kendaraan bermotor	1,801	--	--	61	(1,264)	598	Vehicles
Bangunan	3,752	3,388	--	279	(2,680)	4,739	Building
Total	5,553	3,388	--	340	(3,944)	5,337	Total

20. Lease Liabilities (continued)

All the lease liabilities are denominated in Rupiah, payable every month at fixed amounts.

Following is the details of lease liabilities as of December 31, 2024 and 2023:

21. Liabilitas Lain-lain

	2024	2023
Rupiah		
Rekening penampungan	170,015	258,163
Bunga yang masih harus dibayar	124,176	153,486
Biaya yang masih harus dibayar	28,012	101,029
Pendapatan yang ditangguhkan	27,301	50,796
Jaminan atas pembukaan L/C dan bank garansi	7,373	10,697
Lain-lain	37,317	47,873
	394,194	622,044
Mata uang asing		
Rekening penampungan	313,903	152,912
Jaminan atas pembukaan L/C dan bank garansi	193,317	292,064
Bunga yang masih harus dibayar	110,594	127,438
Pendapatan yang ditangguhkan	43,536	67,843
Lain-lain	485	2,185
	661,835	642,442
Total	1,056,029	1,264,486

Termasuk dalam rekening penampungan adalah rekening yang digunakan oleh debitur untuk melakukan pembayaran pokok kembali maupun bunga atas pembiayaan dan piutang.

21. Other Liabilities

Rupiah
Suspense accounts
Accrued interest payable
Accrued expenses
Deferred fee
Collateral for L/C and bank guarantee opening
Others
Foreign currencies
Suspense accounts
Collateral for L/C and bank guarantee opening
Accrued interest payable
Deferred fee
Others
Total

The suspense accounts include accounts used by debtors for the repayment of principal and interest of financing and receivables.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

22. Kontribusi Modal Pemerintah

Berdasarkan penjelasan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dinyatakan bahwa modal awal LPEI berasal dari seluruh kekayaan negara yang tertanam dalam PT Bank Ekspor Indonesia (Persero). Selanjutnya, berdasarkan pasal 19 ayat (2) dari undang-undang di atas, dinyatakan bahwa modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Berdasarkan surat Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan Republik Indonesia No. S-139/SJ.3/2010 tanggal 3 Februari 2010 perihal Permintaan Tinjauan Hukum Terkait Penerapan Modal Awal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dinyatakan bahwa saldo laba yang ditahan termasuk dalam pengertian seluruh kekayaan negara yang tertanam di PT Bank Ekspor Indonesia (Persero).

Dengan demikian, modal saham dan saldo laba direklasifikasi sebagai Kontribusi Modal Pemerintah yang sebelumnya dalam bentuk modal saham, cadangan umum, cadangan tujuan, dan belum ditentukan penggunaannya masing-masing sebesar Rp3.000.000, Rp1.088.094, Rp140.470, dan Rp93.022.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Modal awal LPEI ditetapkan paling sedikit Rp4.000.000. Dalam hal modal LPEI berkurang dari Rp4.000.000, Pemerintah menutup kekurangan tersebut dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan mekanisme yang berlaku. Penambahan modal LPEI untuk menutup kekurangan modal ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pada tanggal 22 Desember 2010, LPEI menerima kontribusi modal dari Pemerintah Negara Republik Indonesia sebesar Rp2.000.000. Dengan demikian, pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, kontribusi modal dari Pemerintah Negara Republik Indonesia pada LPEI menjadi sebesar Rp6.321.586.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

22. Government Capital Contribution

Based on the explanation on article 19 paragraph (1) Law No. 2 of Year 2009 dated January 12, 2009 regarding Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, it was stated that LPEI's initial capital is composed of all shares of the state's treasury in PT Bank Ekspor Indonesia (Persero). Furthermore, based on article 19 paragraph (2) of above mentioned law, the paid up capital as specified in paragraph (1) here of, shall be the state's treasury and is separated and undivided into shares. Based on the letter of the Head of Legal Department of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. S-139/SJ.3/2010 dated February 3, 2010 regarding Request for Legal Review Related Legal to the Initial Capital of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, retained earnings included all state's treasury in PT Bank Ekspor Indonesia (Persero).

Therefore, the share capital and retained earnings were reclassified as Government Contributed Capital which were previously in the form of capital stocks, general reserve, specific reserve, and unappropriated retained earnings amounting to Rp3,000,000, Rp1,088,094, Rp140,470, and Rp93,022, respectively.

Based on Law No. 2 of Year 2009 dated January 12, 2009 regarding Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. LPEI's initial capital shall be at least Rp4,000,000. In the event that LPEI's capital becomes less than Rp4,000,000, the Government shall cover such deficiency from the State Budget based on the applicable mechanism. LPEI's additional capital to cover such capital deficiency shall be determined by Government Regulation.

On December 22, 2010, LPEI received the contributed capital from the Government of the Republic of Indonesia which amounted to Rp2,000,000. Therefore, as of December 31, 2013 and 2012, the contributed capital from the Government of the Republic of Indonesia in LPEI amounted to Rp6,321,586.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

22. Kontribusi Modal Pemerintah (lanjutan)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Perencanaan, Penetapan, Alokasi, dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara, perencanaan investasi pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) salah satunya adalah penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN/Lembaga dan untuk tahun anggaran 2014. LPEI telah melakukan permohonan PMN sebesar Rp1.000.000. Permohonan tersebut telah masuk ke dalam nota APBN tahun 2014.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp1.000.000.

Berdasarkan perencanaan pemerintah, maka pada tanggal 30 Desember 2014, LPEI menerima kontribusi modal dari Pemerintah Negara Republik Indonesia sebesar Rp1.000.000.

Untuk memperkuat struktur permodalan dan berdasarkan pada UU No. 2 tahun 2009, atas kelebihan akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan telah melebihi 25% dari modal, 75% telah dilakukan kapitalisasi modal sebesar Rp54.370 dan 25% sebagai penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp18.123. LPEI telah menyetorkan ke Pemerintah Negara Republik Indonesia sebesar Rp18.123 pada bulan Agustus 2014.

Dengan demikian, pada tanggal 31 Desember 2014, kontribusi modal dari Pemerintah Negara Republik Indonesia pada LPEI menjadi sebesar Rp7.375.956.

**22. Government Capital Contribution
(continued)**

Based on the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 247/PMK.02/2012 on Procedures for Planning, Determination, Allocation, and Implementation Document Legalization of State General Treasury, the government plans to increase the Capital Participation of the Government of the Republic of Indonesia (PMN) to State Owned Company/Institutions for the year 2014. Hence, LPEI has made a request for PMN amounting to Rp1,000,000. The request has been incorporated in APBN year 2014.

Based on Government Regulation No. 86 year 2014 dated October 17, 2014 regarding the Capital Contribution from the State's Treasury into The Capital of LPEI, stated that the Republic of Indonesia increased its capital of the state amounting to Rp1,000,000.

Based on the above government plan on December 30, 2014, LPEI received the contributed capital from the Government of the Republic of Indonesia amounting to Rp1,000,000.

To strengthen the capital structure and based on Law No. 2 of 2009, the excess of the general reserve and the reserve accumulation of interest has exceeded 25% of the capital, 75% has been capitalized amounting to Rp54,370 and 25% as non-tax revenue amounting to Rp18,123. LPEI has deposited to the Government of the Republic of Indonesia at Rp18,123 in August 2014.

Therefore, as of December 31, 2014, the contributed capital from the Government of the Republic of Indonesia in LPEI amounted to Rp7,375,956.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

22. Kontribusi Modal Pemerintah (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 2015 tanggal 20 Agustus 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp1.000.000. Penambahan penyertaan modal tersebut efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI pada tanggal 26 November 2015.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1154/KMK.06/2015 tanggal 12 November 2015, tentang Penetapan Kapitalisasi Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang berasal dari surplus tahun 2013 dan 2014, Menteri Keuangan menetapkan Kapitalisasi Modal LPEI yang berasal dari surplus tahun buku 2013 dan 2014 sebesar Rp554.586 dan Rp798.046.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp4.000.000. Penambahan penyertaan modal dimaksud terdiri dari Rp2.000.000 digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha LPEI dan Rp2.000.000 untuk melaksanakan Penugasan Khusus. Modal tersebut efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI pada tanggal 31 Desember 2016.

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan LPEI berdasarkan pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 2 tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan No. 260/PMK.06/2015, ditetapkan bahwa dalam hal akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan telah melebihi 25% dari modal awal LPEI, kelebihanannya 75% digunakan untuk kapitalisasi modal, dan 25% sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**22. Government Capital Contribution
(continued)**

Based on Government Regulation No. 67 year 2015 dated August 20, 2015 regarding the Capital Contribution from the state's treasury into the capital of Indonesia Eximbank, stated that the Republic of Indonesia increased its capital of the state amounting to Rp1,000,000. This increase in capital was received and recorded effectively by LPEI on November 26, 2015.

Based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 1154/KMK.06/2015 dated November 12, 2015, on the Establishment of Share Capitalization for Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia from surplus in year 2013 and 2014, the Ministry of Finance set share Capitalization from LPEI 2013 and 2014 surplus amounting to Rp554,586 and Rp798,046.

Based on Government Regulation No. 81 year 2016 dated December 30, 2016 regarding Government of Indonesia's capital contribution to Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia stated that the Government of Indonesia increased its capital contribution by Rp4,000,000. The increase in capital is composed of Rp2,000,000 to increase LPEI's business capacity and Rp2,000,000 to carry out National Interest Account. The capital injection was received and recorded by LPEI effective on December 31, 2016.

In order to strengthen LPEI's capital structure, pursuant to Article 20 paragraph (2) of Law No. 2 of 2009 dated January 12, 2009 of LPEI and Ministry of Finance No. 260/PMK.06/2015, if the accumulated general and specific reserves has exceeded 25% of the initial capital of LPEI, the excess of 75% is used for the capitalization of capital, and 25% as non-Tax Revenue.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

22. Kontribusi Modal Pemerintah (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 463/KMK.06/2016 tanggal 15 Juni 2016, tentang Penetapan Kapitalisasi Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang berasal dari surplus tahun 2015, Menteri Keuangan menetapkan Kapitalisasi Modal LPEI yang berasal dari surplus tahun buku 2015 sebesar Rp963.600.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp3.200.000. Penambahan penyertaan modal dimaksud terdiri dari Rp1.000.000 digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha LPEI dan Rp2.200.000 untuk melaksanakan Penugasan Khusus. Modal tersebut efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI pada tanggal 30 Desember 2017.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 788/KMK.06/2017 tanggal 6 November 2017, tentang Penetapan Kapitalisasi Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang berasal dari surplus tahun 2016, Menteri Keuangan menetapkan Kapitalisasi Modal LPEI yang berasal dari surplus tahun buku 2016 sebesar Rp951.998.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 620/KMK.06/2018 tanggal 24 September 2018, tentang Penetapan Kapitalisasi Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang berasal dari surplus tahun 2017, Menteri Keuangan menetapkan Kapitalisasi Modal LPEI yang berasal dari surplus tahun buku 2017 sebesar Rp686.211.

**22. Government Capital Contribution
(continued)**

Based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 463/KMK.06/2016 dated June 15, 2016, on the Establishment of Share Capitalization for LPEI derived from surplus in year 2015, the Ministry of Finance set share Capitalization from LPEI 2015 surplus amounting to Rp963,600.

Based on Government Regulation No. 55 year 2017 dated December 28, 2017 regarding Government of Indonesia's Capital Contribution to LPEI, stated that the Government of Indonesia increased its capital contribution by Rp3,200,000. The increase in capital is composed of Rp1,000,000 to increase LPEI's business capacity and Rp2,200,000 to carry out National Interest Account. The capital injection was received and recorded by LPEI effective on December 30, 2017.

Based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 788/KMK.06/2017 dated November 6, 2017, on the Establishment of Share Capitalization for Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia derived from surplus in year 2016, the Ministry of Finance set Share Capitalization from LPEI 2016 surplus amounting to Rp951,998.

Based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 620/KMK.06/2018 dated September 24, 2018, on the Establishment of Share Capitalization for LPEI derived from surplus in year 2017, the Ministry of Finance set Share Capitalization from LPEI 2017 surplus amounting to Rp686,211.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

22. Kontribusi Modal Pemerintah (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp2.500.000. Penambahan penyertaan modal dimaksud terdiri dari Rp1.500.000 digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha LPEI dan Rp1.000.000 untuk melaksanakan Penugasan Khusus. Modal tersebut efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI pada tanggal 28 Juni 2019.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-838/MK.06/2019 tanggal 22 November 2019, tentang Pertanggungjawaban Laporan Keuangan LPEI Tahun 2018 dan Penetapan Penggunaan Surplus Usaha Tahun 2018, Menteri Keuangan menetapkan Kapitalisasi Modal LPEI yang berasal dari surplus tahun buku 2018 sebesar Rp115.879.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp5.000.000. Penambahan penyertaan modal dimaksud terdiri dari Rp4.000.000 digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha LPEI dan Rp1.000.000 untuk melaksanakan Penugasan Khusus. Modal Rp4.000.000 tersebut efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI pada tanggal 12 Agustus 2020 dan Rp1.000.000 tersebut efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI tanggal 18 Agustus 2020.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp5.000.000. Penambahan penyertaan modal dimaksud digunakan untuk Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI tanggal 30 Desember 2020.

22. Government Capital Contribution (continued)

Based on Government Regulation No. 44 year 2019 dated June 26, 2019 regarding Government of Indonesia's capital Contribution to LPEI stated that the Government of Indonesia increased its capital contribution by Rp2,500,000. The increase in capital is composed of Rp1,500,000 to increase LPEI's business capacity and Rp1,000,000 to carry out National Interest Account. The capital injection was received and recorded by LPEI effective on June 28, 2019.

According to the Letter of Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. S-838/MK.06/2019 dated November 22, 2019, on Accountability of LPEI Financial Report of 2018, Determination of Business from Surplus in Year 2018, the Ministry of Finance set Share Capitalization from LPEI 2018 surplus amounted to Rp115,879.

Based on Government Regulation No. 40 year 2020 dated July 21, 2020 regarding Government of Indonesia's Capital Contribution to LPEI, stated that the Government of Indonesia increased its capital contribution by Rp5,000,000. The increase in capital is composed of Rp4,000,000 to increase LPEI's business capacity and Rp1,000,000 to carry out National Interest Account. The capital injection amounting Rp4,000,000 was received and recorded by LPEI effective on August 12, 2020 and Rp1,000,000 was received and recorded by LPEI effective on August 18, 2020.

Based on Government Regulation No. 78 year 2020 dated December 30, 2020 regarding Government of Indonesia's Capital Contribution to LPEI, stated that the Government of Indonesia increased its capital contribution by Rp5,000,000. The increase in capital is to carry Implementation of The National Economic Recovery Program. The capital injection was received and recorded by LPEI effective on December 30, 2020.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

22. Kontribusi Modal Pemerintah (lanjutan)

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-688/MK.06/2021 tanggal 3 Agustus 2021, tentang Pertanggungjawaban Laporan Keuangan LPEI Tahun 2020, Menteri Keuangan menetapkan Kapitalisasi Modal LPEI yang berasal dari surplus tahun buku 2020 sebesar Rp194.663.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 117 tahun 2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp5.000.000. Penambahan penyertaan modal dimaksud terdiri dari Rp2.500.000 digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha LPEI dan sebesar Rp2.500.000 digunakan untuk melaksanakan Penugasan Khusus. Modal tersebut efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI pada tanggal 29 Desember 2021 dan tanggal 30 Desember 2021.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-688/MK.06/2021, dinyatakan bahwa atas kelebihan akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan berdasarkan surplus tahun buku 2020, terdapat PNBPN yang harus disetorkan ke kas negara sebesar Rp 64.888 dan Menteri Keuangan menetapkan Kapitalisasi Modal LPEI yang berasal dari Surplus tahun buku 2020 sebesar Rp194.663. LPEI telah menyetorkan PNBPN tersebut pada bulan Agustus 2021.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-662/MK.06/2022 dinyatakan bahwa atas kelebihan akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan berdasarkan surplus tahun buku 2021, terdapat PNBPN yang harus disetorkan ke kas negara sebesar Rp87.164 dan Menteri Keuangan menetapkan Kapitalisasi Modal LPEI yang berasal dari surplus tahun buku 2021 sebesar Rp261.492. LPEI telah menyetorkan PNBPN tersebut pada bulan Agustus 2022.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**22. Government Capital Contribution
(continued)**

According to the Letter of Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. S-688/MK.06/2021 dated August 3, 2021, on Accountability of LPEI Financial Report of 2020, the Ministry of Finance set Share Capitalization from LPEI 2020 surplus amounted to Rp194,663.

Based on Government Regulation No. 117 year 2021 dated December 15, 2021 regarding Government of Indonesia's Capital Contribution to LPEI stated that the Government of Indonesia increased its Capital Contribution by Rp5,000,000. The increase in capital is composed of Rp2,500,000 to increase LPEI's business capacity and Rp2,500,000 to carry out National Interest Account. The capital injection was received and recorded by LPEI effective on December 29, 2021 and December 30, 2021.

Based on the Letter of the Minister of Finance No. S-688/MK.06/2021, regarding the excess accumulated general and specific reserves based on surplus of year 2020, there are non-tax revenues to be deposited into the state treasury amounting to Rp64,888 and the Ministry of Finance set Share Capitalization from LPEI 2020 surplus amounted to Rp194,663. LPEI has deposited the non-tax revenues in August 2021.

Based on the Letter of the Minister of Finance No. S-662/MK.06/2022 regarding the excess accumulated general and specific reserves based on surplus of year 2021, there are non-tax revenues to be deposited into the state treasury amounting to Rp87,164. and the Ministry of Finance set Share Capitalization from LPEI 2021 surplus amounted to Rp261,492. LPEI has deposited the non-tax revenues in August 2022.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

22. Kontribusi Modal Pemerintah (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp5.000.000. Penambahan penyertaan modal dimaksud digunakan untuk melaksanakan Penugasan Khusus. Modal tersebut efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI pada tanggal 2 Januari 2025 dan tanggal 31 Desember 2024 (Catatan 46a).

Dengan demikian, pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 kontribusi modal dari Pemerintah Negara Republik Indonesia pada LPEI adalah sebesar Rp42.602.431 dan Rp37.602.431.

23. Pembagian Laba Tahun Berjalan

Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang LPEI dan Peraturan Menteri Keuangan No. 260/PMK.06/2015, surplus yang diperoleh LPEI dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kegiatan digunakan untuk cadangan umum, cadangan tujuan, jasa produksi dan tantiem, dan bagian laba Pemerintah. Persentase alokasi surplus ditetapkan sebagai cadangan umum dan cadangan tujuan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari surplus dan jasa produksi dan tantiem serta bagian laba Pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari surplus. Besarnya persentase untuk cadangan umum, cadangan tujuan, jasa produksi dan tantiem, serta bagian laba Pemerintah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

**22. Government Capital Contribution
(continued)**

Based on Government Regulation No. 50 year 2024 dated December 31, 2024 regarding Government of Indonesia's Capital Contribution to LPEI stated that the Government of Indonesia increased its Capital Contribution by Rp5,000,000. The increase in capital to carry out National Interest Account. The capital injection was received and recorded by LPEI effective on January 2, 2025 and December 30, 2024 (Note 46a).

Therefore, as of December 31, 2024 and 2023, the capital contribution from the Government of the Republic of Indonesia in LPEI amounted to Rp42,602,431 and Rp37,602,431.

23. Distribution of Income for the Current Year

According to article 21 of Republic of Indonesia Law No. 2 Year 2009 regarding LPEI and Regulation of the Minister of Finance No. 260/PMK.06/2015, the surplus gained by LPEI in 1 (one) year operation shall be used for general reserve, special purpose reserve, performance bonus and tantiem, and the Government's profit share. The surplus allocation percentage shall be determined as follows: general reserve and special purpose reserve shall be 90% (ninety percent) of the surplus and performance bonus and tantiem and the Government's profit share shall be 10% (ten percent) of the surplus. The percentage amount for general reserve, special purpose reserve, performance bonus and tantiem, including Government's profit share shall be determined by the Ministry of Finance.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

24. Pendapatan Bunga dan Usaha Syariah

	2024	2023
Penugasan Umum		
Pembiayaan dan piutang		
Investasi	1,411,485	1,656,597
Modal kerja	994,736	1,298,830
Konsumsi	10,831	10,595
Pendapatan Usaha Syariah	390,492	488,450
Penempatan pada bank		
Call money	148,287	141,862
Deposito berjangka	15,852	26,405
Efek-efek	10,394	18,860
Giro pada bank	82,525	2,117
	<u>3,064,602</u>	<u>3,643,716</u>
Penugasan Khusus		
Deposito berjangka	94,833	212,983
Pembiayaan dan piutang		
Modal kerja	78,796	43,054
Investasi	76,910	65,567
Pendapatan Usaha Syariah	47	141
Efek-efek	60,226	83,971
Giro pada bank	1,498	2,601
	<u>312,310</u>	<u>408,317</u>
Total	<u>3,376,912</u>	<u>4,052,033</u>

Berikut adalah rincian pendapatan bunga berdasarkan klasifikasi aset keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

	2024	2023
Biaya perolehan diamortisasi		
Pembiayaan dan piutang	1,551,812	3,562,626
Penempatan pada bank	110,685	381,250
Giro pada bank	84,023	4,732
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		
Efek-efek	70,620	103,425
Total	<u>1,817,140</u>	<u>4,052,033</u>

25. Pendapatan Usaha Dari Ujrah

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, pendapatan usaha dari ujrah adalah sebesar Rp6.904 dan Rp64.

26. Beban Bunga

Akun ini merupakan beban bunga atas:

	2024	2023
Rupiah		
Efek-efek utang yang diterbitkan	987,318	1,357,630
Pinjaman yang diterima	507,465	85,662
	<u>1,494,783</u>	<u>1,443,292</u>
Mata uang asing		
Efek-efek utang yang diterbitkan	91,310	332,475
Pinjaman yang diterima	1,070,558	1,353,126
	<u>1,161,868</u>	<u>1,685,601</u>
Total	<u>2,656,651</u>	<u>3,128,893</u>

24. Interest Income and Income from Sharia

General Assignment
Financing and receivables
 Investment
 Working capital
 Consumption
Income from sharia
Placements with banks
 Call money
 Time deposit
 Securities
Current accounts with banks

National Interest Account
Time deposit
Financing and receivables
 Working capital
 Investment
Income from sharia
 Securities
Current account with banks

Total

Following is the details of interest income according to the classification of financial assets for the years ended December 31, 2024 and 2023:

Amortised cost
Financing and receivables
Placements with banks
Current accounts with banks
Fair value through
other comprehensive income
Securities
Total

25. Income From Ujrah

For the years ended December 31, 2024 and 2023, income from ujrah were amounted to Rp6,904 and Rp64, respectively.

26. Interest Expense

Interest expense was derived from:

Rupiah
Debt securities issued
Fund borrowing
Foreign currency
Debt securities issued
Fund borrowing
Total

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**27. Pembentukan (Pembalikan) Kerugian
Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Non
Keuangan**

	2024	2023
Giro pada bank (Catatan 5b)	3	1
Penempatan pada bank (Catatan 6d)	(340)	(113)
Pembiayaan dan piutang, dan piutang syariah (Catatan 9i)	273,107	16,966,650
Tagihan akseptasi (Catatan 12a)	(468)	380
Piutang pembiayaan garansi (Catatan 9i)	(3,266)	(39,297)
Piutang lainnya	2,268	4,366
Piutang asuransi (Catatan 11a)	3,376	--
Piutang penjaminan ulang (Catatan 11d)	3,094	--
Agunan yang diambil alih (Catatan 15)	--	407
Total	277,774	16,932,394

**27. Provision (Reversal) for Impairment
Losses on Financial Assets and Non-
Financial Asset**

Current accounts with banks (Note 5b)
Placements with banks (Note 6d)
Financing and receivables
and sharia financing and
receivables (Note 9i)
Acceptance receivables (Note 12a)
Guarantee financing
receivables (Note 9i)
Other receivables
Insurance receivables (Note 11a)
Reguarantee receivables (Note 11d)
Foreclosed assets (Note 15)

Total

28. Beban Umum dan Administrasi

	2024	2023
Penyusutan aset tetap (Catatan 14)	81,615	104,144
Jasa profesional	61,168	97,699
Perbaikan dan pemeliharaan	23,346	20,644
Sewa	16,230	19,030
Perjalanan dinas	12,155	12,214
Iklan dan promosi	11,410	12,177
Komunikasi	10,240	9,642
Corporate social responsibilities	3,563	6,727
Biaya berlangganan	3,196	3,489
Listrik dan air	3,050	3,238
Percetakan dan perlengkapan kantor	1,753	1,395
Kegiatan perusahaan	1,407	1,706
Aktivitas pegawai	691	586
Lain-lain	3,696	6,548
Total	233,520	299,239

28. General and Administrative Expenses

Depreciation of premises
and equipment (Note 14)
Professional services
Repairs and maintenance
Rent
Travelling
Advertising and promotions
Communications
Corporate social responsibilities
Subscription cost
Electricity and water
Printing and office supplies
Corporate activities
Employee activities
Others

Total

Termasuk dalam lain-lain adalah beban-beban yang dikeluarkan untuk transportasi, donasi, asuransi atas kendaraan dinas, dan bea materai.

Included in others are expenses disbursed for transportation, donation, insurance on official vehicles, and stamp duty.

29. Beban Gaji dan Tunjangan

	2024	2023
Gaji dan tunjangan	284,165	274,787
Tunjangan hari raya	36,913	38,713
Tunjangan kesehatan	30,666	27,064
Imbalan kerja (Catatan 30)	15,985	2,032
Pendidikan dan pelatihan	18,927	14,824
Asuransi	18,483	17,123
Manfaat lain-lain	16,028	93,834
Lain-lain	16,365	13,912
Total	437,532	482,289

29. Salaries and Benefits

Salaries and benefits
Religion holiday benefits
Medical allowance
Employee benefits (Note 30)
Training and education
Insurance
Other benefits
Others

Total

Termasuk di dalam beban gaji dan tunjangan adalah beban atas perbedaan antara tingkat bunga pinjaman karyawan dan *Base Lending Rate* (BLR) sebesar Rp8.790 dan Rp1.505 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Catatan 9i).

Included in salaries and benefits expenses is the amount expensed arising from the difference between the employee loan's interest rates and the *Base Lending Rate* (BLR) which amounted to Rp8,790 and Rp1,505 for the years ended December 31, 2024 and 2023, respectively (Note 9i).

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

29. Beban Gaji dan Tunjangan (lanjutan)

Termasuk dalam lain-lain adalah honorarium atas karyawan magang dan konsultan perorangan, tunjangan kacamata,.

Rincian gaji, tunjangan, serta jasa produksi dan tantiem atas Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah, untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

2024					
Jumlah Pegawai/ Number of Employees	Gaji/ Salaries	Tunjangan/ Allowances	Bonus dan Tantiem/ Bonuses and Tantiem	Total	
Dewan Direktur	5	4,885	5,970	--	10,855
Direktur Pelaksana	6	9,111	10,795	--	19,906
Komite Audit	2	649	17	--	666
Komite Pemantau Risiko	2	693	18	--	711
Dewan Pengawas Syariah	2	693	18	--	711
Chief of	4	6,064	10,315	--	16,379
Total	21	22,095	27,133	--	49,228

Board of Directors
Managing Directors
Audit Committee
Risk Management Committee
Sharia Supervisory Board
Chief of
Total

2023					
Jumlah Pegawai/ Number of Employees	Gaji/ Salaries	Tunjangan/ Allowances	Bonus dan Tantiem/ Bonuses and Tantiem	Total	
Dewan Direktur	5	5,448	6,797	--	12,245
Direktur Pelaksana	5	9,709	13,829	--	23,538
Komite Audit	2	768	49	--	817
Komite Pemantau Risiko	2	726	46	--	772
Dewan Pengawas Syariah	2	693	43	--	736
Wakil Ketua Eksekutif Senior	5	6,760	14,229	--	20,989
Total	21	24,104	34,993	--	59,097

Board of Directors
Managing Directors
Audit Committee
Risk Management Committee
Sharia Supervisory Board
Senior Executive Vice President
Total

30. Liabilitas Imbalan Kerja

Berdasarkan kebijakan LPEI, pegawai memperoleh tunjangan dan manfaat selain gaji berupa tunjangan hari raya (THR), penggantian biaya pengobatan, tunjangan kematian, tunjangan cuti, masa persiapan pensiun, penghargaan masa bakti, dana pensiun, jasa produksi, asuransi, dan manfaat lainnya berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

29. Salaries and Benefits (continued)

Included in others are honorarium for interns and individual consultants, glasses allowance.

The details of salaries, allowances, and bonuses and tantiem of the Boards of Directors, Managing Directors, Audit Committee, and Sharia Supervisory Board, for the period ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:

30. Liability For Employee Benefits

Under LPEI's policy, in addition to salaries, the employees are entitled to allowances and benefits, which are religion holiday benefits (THR), medical reimbursements, death allowances, leave allowances, pension preparation period, long service award, pension plan, bonus, insurance, and other benefits based on Job Creation Law No. 11/2020.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

30. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

Pensiun iuran pasti

LPEI menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh pegawai tetapnya yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia. Jumlah kontribusi LPEI untuk dana pensiun adalah sebesar 6,00% dari gaji pokok pegawai yang disajikan sebagai bagian dari "beban gaji dan tunjangan" dalam laba rugi. Jumlah kontribusi LPEI adalah sebesar Rp7.265 dan Rp6.092 masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023.

Pensiun manfaat pasti

LPEI menyiapkan penyisihan imbalan kerja jangka panjang dan pascakerja sesuai dengan Undang-Undang No.6/2023 dan Peraturan Pemerintah RI No.35/2021 yang meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak serta imbalan kerja atas *long-service award*.

LPEI memberikan imbalan tersebut mana yang lebih tinggi antara Peraturan Perusahaan dengan Undang-Undang No.6/2023.

Liabilitas imbalan kerja dihitung oleh aktuaris independen, Kantor Konsultan Aktuaria Enny Diah Awal tertanggal 10 Januari 2024 dan 7 Januari 2025, masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023:

Penyisihan imbalan kerja

Penyisihan imbalan kerja terdiri dari:

	2024	2023
Program imbalan pascakerja	77,167	80,562
Imbalan jangka panjang lainnya	57,497	58,805
Program PKWT	4,604	3,155
Jumlah	<u>139,268</u>	<u>142,522</u>

Program imbalan pascakerja terdiri dari program pesangon dan program kesehatan pensiun. Program imbalan jangka panjang lainnya terdiri dari program masa persiapan pensiun, program penghargaan masa kerja, dan program cuti besar berimbalan.

30. Liability For Employee Benefits (continued)

Defined contribution plan

LPEI implements a defined contribution plan covering all of their permanent employees, which is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia. LPEI's contribution to the pension plan retirement fund is 6.00% of the employees' basic salaries and is presented as part of "salaries and benefits" in profit or loss. LPEI's contributions were amounted to Rp7,265 and Rp6,092 for the years ended December 31, 2024 and 2023.

Defined benefit plan

LPEI has provided allowance for employee long-service and post-employment benefits in accordance with Law No.6/2023 and Government Regulation of The Republic of Indonesia No.35/2021 which include severance fee, service pay benefits, and compensation fees as well as employee benefit long-service award.

LPEI has provided the benefits whichever is higher between Collective Labor Agreement with Law No.6/2023.

Liability for employee benefits is computed by an independent actuary, Kantor Konsultan Aktuaria Enny Diah Awal dated January 10, 2024 and January 7, 2025 for the years ended December 31, 2024 and 2023, respectively:

Provision for employee benefits

The provision for employee benefits consist of:

Post-employment benefit plan
Other long-term employee benefit
PKWT Program
Total

Post-employment benefit plan consist of severance cost and pension healthcare. Other long-term employee benefit consist of period prior to pension, long service pay, and long service leave.

30. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

Penyisihan imbalan kerja (lanjutan)

Beban yang diakui di laba rugi untuk imbalan kerja adalah:

	2024	2023
Program imbalan pascakerja	6,992	15,163
Imbalan jangka panjang lainnya	7,005	(15,579)
Program PKWT	1,988	2,448
Beban yang diakui dalam laporan laba rugi	15,985	2,032

Beban yang diakui di laporan laba rugi konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain berdasarkan klasifikasi akun adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Beban gaji dan tunjangan (Catatan 29)	15,985	2,032
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja - kerugian/(laba) aktuarial	2,437	3,991
Beban yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	18,422	6,023

Program imbalan pascakerja

Berikut ini adalah hal-hal penting yang diungkapkan dalam laporan aktuaris:

	2024	2023
Tingkat diskonto pertahun	7.10%	6.90%
Tingkat kenaikan Gaji per tahun	4.00%	4.00%
Tingkat pengunduran diri pertahun untuk pegawai dibawah usia 30 tahun dan akan menurun menjadi 0% pada umur 46 tahun	3.50%	3.50%
Tingkat kematian	TMI 2019	TMI 2019
Usia pensiun	56 tahun/years	56 tahun/years
Ekspektasi sisa masa kerja rata-rata karyawan (tahun)	13.82	12.82

30. Liability For Employee Benefits (continued)

Provision for employee benefits (continued)

The expense recognized in the profit or loss for the employee benefits are as follows:

Post-employment benefit plan
Other long-term employee benefit
PKWT program
Expense recognized in the statement of profit or loss

The expense recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income based on account classification are as follows:

Salaries and benefits expense (Note 29)
Remeasurement of liability for employee benefits - actuarial loss/(gains)
Expense recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income

Post-employment benefit plan

The following are the significant items disclosed in the actuarial reports:

Annual discount rates
Increase rates
Annual salary
Annual resignation rates for employee before the age of 30 and will decrease until 0% at the age of 46
Mortality rate
Retirement age
Average remaining working periods (years)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

30. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

Program imbalan pascakerja (lanjutan)

- a. Beban yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Biaya jasa kini dan jasa lalu	5,517	11,112
Biaya bunga	5,143	4,618
Beban pesangon	9,675	(567)
(Keuntungan)/kerugian aktuarial	(13,343)	--
Beban yang diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian	6,992	15,163
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja - neto:		
Keuntungan aktuarial dari perubahan asumsi keuangan	7,501	3,834
Keuntungan aktuarial dari penyesuaian sebelumnya	(5,064)	157
Keuntungan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	2,437	3,991
Total beban yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	9,429	19,154

- b. Perubahan cadangan penyisihan adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Saldo awal	80,562	63,403
Penambahan tahun berjalan	6,992	15,163
Nilai yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain	2,437	3,991
Pembayaran tahun berjalan	(12,824)	(1,995)
Saldo akhir	77,167	80,562

- c. Perubahan nilai kini liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Saldo awal tahun	80,562	63,403
Biaya jasa kini (Kurtailmen)/ Settlement	10,967	11,112
(13,343)	(567)	--
Biaya jasa lalu	(5,450)	--
Biaya bunga	5,143	4,618
Beban pesangon	9,675	--
Pembayaran tahun berjalan	(12,824)	(1,995)
Pengukuran kembali kerugian aktuarial:		
Keuntungan aktuarial dari perubahan asumsi keuangan	7,501	3,834
Keuntungan aktuarial dari penyesuaian sebelumnya	(5,064)	157
Saldo akhir tahun nilai kini liabilitas imbalan kerja	77,167	80,562

30. Liability For Employee Benefits (continued)

Post-employment benefit plan (continued)

- a. Expense recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for post-employment benefit plan follows:

Current and past service cost
Interest cost
Termination cost
Actuarial (gain)/loss
Expense recognized in the consolidated statement of profit or loss
Remeasurement of the net liability for employee benefits:
Actuarial gains from changes in financial assumption
Actuarial gains from experience adjustments
Gain recognized in other comprehensive income
Total expense recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income

- b. The movements in the allowance are as follows:

Beginning balance
Addition during the year
Amount recognized in other comprehensive income
Payment during the year
Ending balance

- c. The movements for the present value of employee benefit are as follows:

Balance at beginning of the year
Current service cost
(Curtailment)/ Settlement
Past service cost
Interest cost
Termination Cost
Payment during the year
Remeasurement of actuarial losses:
Actuarial gain from changes in financial assumption
Actuarial gain from experience adjustments
Ending balance present value of employee benefit liabilities

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

30. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

Program imbalan pascakerja (lanjutan)

d. Analisa tingkat sensitivitas untuk risiko
tingkat diskonto (tidak diaudit):

2024			
Perubahan Persentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ Impact to present value of employee benefit obligation	Perubahan Persentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap biaya jasa kini/ Impact to current service cost
-1%	8,805	-1%	22
+1%	(7,490)	+1%	(17)

2023			
Perubahan Persentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ Impact to present value of employee benefit obligation	Perubahan Persentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap biaya jasa kini/ Impact to current service cost
-1%	8,019	-1%	52
+1%	(6,889)	+1%	(40)

e. Analisa tingkat sensitivitas untuk risiko
tingkat kenaikan gaji (tidak diaudit)

30. Liability for Employee Benefits (continued)

Post-employment benefit plan (continued)

d. Sensitivity analysis for discount rate risk
(unaudited):

2024			
Perubahan Persentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ Impact to present value of employee benefit obligation	Perubahan Persentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap biaya jasa kini/ Impact to current service cost
-1%	8,805	-1%	22
+1%	(7,490)	+1%	(17)

2023			
Perubahan Persentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ Impact to present value of employee benefit obligation	Perubahan Persentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap biaya jasa kini/ Impact to current service cost
-1%	8,019	-1%	52
+1%	(6,889)	+1%	(40)

e. Sensitivity analysis for salary increase risk
(unaudited)

2024			
Perubahan Persentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ Impact to present value of employee benefit obligation	Perubahan Persentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap biaya jasa kini/ Impact to current service cost
-1%	(9,881)	-1%	(19)
+1%	11,411	+1%	24

2023			
Perubahan Persentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ Impact to present value of employee benefit obligation	Perubahan Persentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap biaya jasa kini/ Impact to current service cost
-1%	(6,982)	-1%	(44)
+1%	7,963	+1%	56

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

30. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

Program imbalan pascakerja (lanjutan)

- e. Analisa tingkat sensitivitas untuk risiko tingkat kenaikan gaji (tidak diaudit) (lanjutan)

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

Imbalan jangka panjang lainnya

Imbalan jangka panjang lainnya terdiri dari *Long-Service Award (LSA)*, masa persiapan pensiun, pemberian logam mulia, dan *long leave (LL)*.

Asumsi-asumsi yang digunakan oleh aktuaris dalam perhitungan imbalan jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Tingkat diskonto pertahun	7.00%	7.40%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	4.00%	4.00%
Tingkat pengunduran diri pertahun untuk pegawai dibawah usia 30 tahun dan akan menurun menjadi 0% pada umur 46 tahun	3.50%	3.50%
Tingkat kematian	TMI 2019	TMI 2019
Usia pensiun	56 tahun/years	56 tahun/years
Ekspektasi sisa masa kerja rata-rata karyawan (tahun)	8.91	11.73

30. Liability for Employee Benefits (continued)

Post-employment benefit plan (continued)

- e. Sensitivity analysis for salary increase risk (unaudited) (continued)

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefit obligation liability recognised in the statement of financial position.

There was no change in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from prior years.

Other long-term benefits

Other long-term benefits consist of Long-Service Award (LSA), pre-retirement period, gold granting, and long leave (LL).

The assumptions used by the actuary for other long-term benefits calculation are as follows:

*Annual discount rates
Annual salary increase rates
Annual resignation rates for employee before the age of 30 and will decrease until 0% at the age of 46
Mortality rate
Retirement age
Average remaining working period (years)*

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

30. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan jangka panjang lainnya (lanjutan)

- a. Beban imbalan jangka panjang lainnya yang diakui di laba rugi adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Biaya jasa:		
Biaya jasa kini dan jasa lalu	6,968	6,026
Pengukuran kembali imbalan jangka panjang lainnya	(3,679)	(27,249)
Beban bunga neto pada liabilitas imbalan yang ditetapkan	3,716	5,644
Beban yang diakui dalam laporan laba rugi	7,005	(15,579)

- b. Perubahan penyisihan adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Saldo awal	58,805	79,381
Penambahan tahun berjalan	7,005	(15,579)
Pembayaran tahun berjalan	(8,313)	(4,997)
Saldo akhir	57,497	58,805

- c. Perubahan nilai kini liabilitas imbalan jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Saldo awal tahun	58,805	79,381
Biaya jasa kini	6,968	6,026
Biaya bunga	3,716	5,644
Beban kurtailmen	(4,868)	(36,184)
Pembayaran tahun berjalan	(8,313)	(4,997)
Keuntungan aktuarial dari perubahan asumsi keuangan	(730)	1,752
Keuntungan aktuarial dari experience adjustment	1,919	7,183
Saldo akhir tahun nilai kini liabilitas imbalan jangka panjang lainnya	57,497	58,805

30. Liability For Employee Benefits (continued)

Other long-term benefits (continued)

- a. Other long term benefit plan expense recognized in profit or loss are as follows:

Service cost:
Current and past service cost
Remeasurement of other long term benefit
Net interest on net defined benefit liability
Expense recognized in the statement of profit or loss

- b. The movements in the provision are as follows:

Beginning balance
Addition during the year
Payments during the year
Ending balance

- c. The movements for the present value of other long term benefit plan are as follows:

Balance at beginning of the year
Current service cost
Interest cost
Curtailment cost
Payments during the year
Actuarial gains from changes in financial assumptions
Actuarial gains from experience adjustment
Ending balance present value of other long term benefit

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

30. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan jangka panjang lainnya (lanjutan)

- d. Analisa tingkat sensitivitas untuk risiko tingkat diskonto (tidak diaudit)

Tabel berikut menunjukkan analisa sensitivitas atas nilai kini liabilitas imbalan kerja dan biaya jasa kini dengan asumsi perubahan atas tingkat diskonto:

2024			
Perubahan Persentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ Impact to present value of employee benefit obligation	Perubahan Persentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap biaya jasa kini/ Impact to current service cost
-1%	3,812	-1%	10
1%	(3,428)	1%	-9
2023			
Perubahan Persentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ Impact to present value of employee benefit obligation	Perubahan Persentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap biaya jasa kini/ Impact to current service cost
-1%	3,804	-1%	44
1%	(3,413)	1%	(38)

- e. Analisa tingkat sensitivitas untuk risiko kenaikan gaji (tidak diaudit):

2024			
Perubahan Persentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ Impact to present value of employee benefit obligation	Perubahan Persentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap biaya jasa kini/ Impact to current service cost
-1%	(3,554)	-1%	(10)
1%	3,888	1%	12
2023			
Perubahan Persentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ Impact to present value of employee benefit obligation	Perubahan Persentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap biaya jasa kini/ Impact to current service cost
-1%	(3,972)	-1%	(44)
1%	4,397	1%	51

30. Liability For Employee Benefits (continued)

Other long-term benefits (continued)

- d. Sensitivity analysis for discount rate risk (unaudited)

The tables below show the sensitivity analysis of the present value of employee benefit liabilities and current service cost in the assumed changes in the discount rate:

- e. Sensitivity analysis for salary increase risk (unaudited):

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

30. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan jangka panjang lainnya (lanjutan)

e. Analisa tingkat sensitivitas untuk risiko kenaikan gaji (tidak diaudit):

Jatuh tempo dari liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

2024							
Jumlah Pembayaran Manfaat Pensiun/Amount Benefit Payment for Pension	Pembayaran Manfaat OLTEB/Amount of Benefit Payment for OLTEB	Pembayaran Manfaat Kesehatan/Amount of Benefit Payment for Healthcare	Pembayaran Manfaat PKWT/Amount of Benefit Payment for PKWT	Total			
Di bawah 1 tahun	8,325	6,029	125	--	14,478	Below 1 year	
Antara 1 - 2 tahun	1,825	8,387	261	--	10,474	Within 1 - 2 years	
Antara 2 - 3 tahun	6,903	5,663	322	--	12,888	Within 2 - 3 years	
Antara 3 - 4 tahun	6,222	8,224	563	--	15,009	Within 3 - 4 years	
Antara 4 - 5 tahun	9,401	8,412	483	--	18,296	Within 4 - 5 years	
Di atas 5 tahun	411,174	176,037	286,867	--	874,079	Up 5 years	

2023							
Jumlah Pembayaran Manfaat Pensiun/Amount Benefit Payment for Pension	Pembayaran Manfaat OLTEB/Amount of Benefit Payment for OLTEB	Pembayaran Manfaat Kesehatan/Amount of Benefit Payment for Healthcare	Pembayaran Manfaat PKWT/Amount of Benefit Payment for PKWT	Total			
Di bawah 1 tahun	4,206	9,391	117	2,709	16,423	Below 1 year	
Antara 1 - 2 tahun	12,158	6,413	145	1,463	20,179	Within 1 - 2 years	
Antara 2 - 3 tahun	3,572	9,647	303	216	13,738	Within 2 - 3 years	
Antara 3 - 4 tahun	11,253	6,337	386	--	17,976	Within 3 - 4 years	
Antara 4 - 5 tahun	12,530	8,055	604	--	21,189	Within 4 - 5 years	
Di atas 5 tahun	434,369	183,607	223,845	--	841,821	Up 5 years	

Rata-rata durasi dari liabilitas imbalan pasca-kerja adalah 13,82 dan 12,82 tahun pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

30. Liability For Employee Benefits (continued)

Other long-term benefits (continued)

e. Sensitivity analysis for salary increase risk (unaudited):

The maturity of the obligation for employee benefits as of December 31, 2024 and 2023 is as follows:

The average of duration of the obligation for post employment benefits is 13.82 and 12.82 for the years as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

31. Komitmen dan Kontinjensi

31. Commitments and Contingencies

	2024	2023	
KOMITMEN			COMMITMENTS
Liabilitas komitmen			Commitment liabilities
Rupiah			Rupiah
Pihak berelasi (Catatan 39)			Related parties (Note 39)
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	200,000	592,565	Unused loan facilities to debtors
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	--	8,968	Outstanding irrevocable L/C
	200,000	601,533	
Pihak ketiga			Third parties
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	1,322,069	1,226,048	Unused loan facilities to debtors
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	25,393	810	Outstanding irrevocable L/C
	1,347,462	1,226,858	
Total Rupiah	1,547,462	1,828,391	Total Rupiah
Mata uang asing			Foreign currencies
Pihak berelasi (Catatan 39)			Related parties (Note 39)
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	545,926	781,271	Unused loan facilities to debtors
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	223,382	80,536	Outstanding irrevocable L/C
	769,308	861,807	
Pihak ketiga			Third parties
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	1,022,196	1,735,875	Unused loan facilities to debtors
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	236,752	35,342	Outstanding irrevocable L/C
	1,258,948	1,771,217	
Total mata uang asing	2,028,256	2,633,024	Total foreign currencies
Total liabilitas komitmen	3,575,718	4,461,415	Total commitment liabilities
Komitmen	(3,575,718)	(4,461,415)	Commitments
KONTINJENSI			CONTINGENCIES
Tagihan kontinjensi			Contingent receivables
Rupiah			Rupiah
Pihak berelasi (Catatan 39)			Related parties (Note 39)
Pendapatan bunga kredit bermasalah	407,318	167,252	Interest income on non-performing loans
Pihak ketiga			Third parties
Pendapatan bunga kredit bermasalah	7,248,988	5,085,766	Interest income on non-performing loans
Mata uang asing			Foreign currencies
Pihak berelasi (Catatan 39)			Related parties (Note 39)
Pendapatan bunga kredit bermasalah	167,609	160,340	Interest income on non-performing loans
Pihak ketiga			Third parties
Pendapatan bunga kredit bermasalah	3,052,320	2,485,215	Interest income on non-performing loans
Total tagihan kontinjensi	10,876,235	7,898,573	Total contingent receivables
Liabilitas kontinjensi			Contingent liabilities
Rupiah			Rupiah
Pihak berelasi (Catatan 39)			Related parties (Note 39)
Penjaminan Kredit - PEN	1,000,000	1,000,000	Credit Guarantee - PEN
Asuransi kegagalan ekspor	--	63,581	Failure on export insurance
Bank garansi	--	409,571	Bank guarantee
	1,000,000	1,473,152	
Pihak ketiga			Third parties
Bank garansi	1,073,703	1,267,782	Bank guarantee
Penjaminan Kredit - PEN	400,000	1,306,100	Credit Guarantee - PEN
Penjaminan Kredit - PKE	70,000	--	Credit Guarantee - PKE
Asuransi kegagalan ekspor	69,873	--	Failure on export insurance
Proteksi piutang dagang	6,378	40,015	Receivable protection
	1,619,954	2,613,897	
Mata uang asing			Foreign currencies
Pihak berelasi (Catatan 39)			Related parties (Note 39)
Bank garansi	27,216	1,374,394	Bank guarantee
Penjaminan Kredit - PKE	190,936	--	Credit Guarantee - PKE
Asuransi kegagalan ekspor	--	5,409	Failure on export insurance
Pihak ketiga			Third parties
Bank garansi	5,146,366	4,690,459	Bank guarantee
Proteksi piutang dagang	1,920,741	1,856,006	Receivable protection
Penjaminan Kredit	39,433	--	Credit Guarantee
Penjaminan Kredit - PEN	160,950	846,835	Credit Guarantee - PEN
Penjaminan Kredit - PKE	37,795	--	Credit Guarantee - PKE
Asuransi kegagalan ekspor	91,943	74,575	Failure on export insurance
	7,615,380	8,847,678	
Total liabilitas kontinjensi	10,235,334	12,934,727	Total contingent liabilities
Kontinjensi - neto	640,901	(5,036,154)	Contingencies - net

32. Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko dilakukan berdasarkan Pasal 17 UU No. 2 Tahun 2009 tentang LPEI dengan mencakup pemenuhan modal minimum, pengawasan aktif, dan pemenuhan disiplin pasar terhadap risiko yang melekat. Penerapan ini dilaksanakan melalui (i) implementasi manajemen risiko pada setiap aktivitas operasional sehingga manajemen risiko mampu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap aktivitas operasionalnya dan (ii) pengelolaan permodalan agar mampu menyerap risiko yang dihadapi LPEI.

Pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif, merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9/POJK.05/2022 tentang Pengawasan LPEI, bentuk penerapannya paling kurang mencakup:

1. Pengawasan aktif Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan Dewan Pengawas Syariah;
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Sasaran Penerapan Manajemen Risiko LPEI adalah untuk memelihara dan/atau meningkatkan tingkat kesehatan LPEI dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan Manajemen Risiko yang antara lain berfungsi sebagai penyaring dan pemberi peringatan dini (*early warning system*) Lembaga dalam melaksanakan kegiatan usaha.

LPEI menerapkan manajemen risiko secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, kriteria, kompleksitas, serta kemampuan mengelola risiko yang baik yang diharapkan tidak hanya meningkatkan *stakeholder value*, tetapi juga memberikan gambaran mengenai potensi kerugian yang mungkin dihadapi di masa mendatang, memelihara tingkat *risk-adjusted-return* yang optimal dan membantu dalam proses pengambilan keputusan usaha secara tepat.

32. Risk Management

LPEI implements risk management in accordance with Article 17 Law No. 2 Year 2009 about LPEI which encompasses the fulfillment of capital adequacy, active supervision, and compliance of market discipline against inherent risk. This implementation is realized in the form of (i) risk management implementation in each operational activity so that risk management becomes an inseparable part of every operational activity and (ii) capital management in order to be able to absorb risks that LPEI faces.

Effective risk management processes and system, referring to the Regulation of the Indonesia Financial Services Authority (POJK) No. 9/POJK.05/2022 regarding LPEI Supervision, in which the forms of application at the very least include:

1. *Active monitoring by the Executive Directors, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board;*
2. *Adequacy of Risk Management policies, procedures, and determination of Risk limits;*
3. *Adequacy of the Risk identification, measurement, control and monitoring processes, as well as the Risk Management information system; and*
4. *Comprehensive internal control system.*

The target of LPEI Risk Management Implementation is to maintain and/or improve the health status of LPEI by applying the precautionary principle and risk management which, among other things. Function as a filter and early warning system for institutions in carrying out business activities.

LPEI applied effective risk management which aligned with target, policy, criteria, complexity, and good risk mitigation, which expected to increase stakeholder value and provide a good prediction of potential loss in the upcoming future. This also expected to maintain optimum risk-adjusted-return and also helping on making a good decision.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

32. Manajemen Risiko (lanjutan)

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usaha, risiko yang dihadapi LPEI juga berkembang secara luas, antara lain mencakup risiko kredit, risiko asuransi, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko investasi serta risiko imbal hasil khusus untuk Unit Usaha Syariah. Risiko kredit merupakan risiko yang paling signifikan dibanding jenis risiko lainnya. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada LPEI, termasuk di dalamnya risiko penjaminan.

Sampai dengan 31 Desember 2024, LPEI tengah berproses dalam memperkuat implementasi kebijakan manajemen risiko, proses manajemen risiko, dan penerapan kerangka manajemen risiko yang sesuai dengan POJK No. 9/POJK.05/2022, khususnya pada cakupan jenis risiko, *Risk Appetite Statement*, pengkinian *three lines model*, alat dan metodologi pengukuran, menjalankan *Early Warning Detection* berkala terhadap portofolio pembiayaan yang berpotensi mengalami pemburukan, melakukan pengkinian *Industry Financing Reference* dan *Portfolio Guideline*, hingga inisiatif pengembangan Manajemen Risiko Operasional dalam rangka mendukung *Enterprise Risk Management Framework*. Pengelolaan risiko juga termasuk pengelolaan risiko penugasan khusus melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 183/PMK.08/2021 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI.

Penerapan manajemen risiko dicerminkan dari hasil penilaian profil risiko LPEI yang mencakup penilaian risiko inheren, yaitu penilaian atas risiko yang melekat (*inherent*) pada pelaksanaan kegiatan usaha LPEI, yang mencakup pembiayaan, penjaminan dan asuransi, dan penilaian atas Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yang mencakup seluruh pilar-pilar penerapan manajemen risiko sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Hasil penggabungan penilaian risiko inheren dan penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko akan menghasilkan Profil Risiko secara komposit. Profil risiko LPEI merupakan salah satu faktor penilaian Tingkat Kesehatan LPEI sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Direktur Eksekutif No. 0009/PDE/07/2023 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

32. Risk Management (continued)

In line with the development of business activities, LPEI also deal with higher risk. These risks include credit risk, insurance risk, liquidity risk, market risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk, compliance risk, and investment risk as well as risk of return specifically for Sharia Business Units. Credit risk is the most significant among others. Credit risk is a risk that occur because of the failure of the debtor to pay its liabilities, including guarantee risk.

As of December 31, 2024, LPEI is in the process of strengthening the implementation of risk management policies, and the implementation of a risk management framework in accordance with POJK No. 9/POJK.05/2022, especially in the scope of risk types, Risk Appetite Statement, updating three lines models, measurement tools and methodologies, running periodic Early Warning Detection of financing portfolios that have the potential to experience aggravation, updating the Industry Financing Reference and Portfolio Guidelines, to initiatives to develop Operational Risk Management in order to support the Enterprise Risk Management Framework. Risk management also includes risk management of special assignments through the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 183/PMK.08/2021 concerning Special Assignments to LPEI.

Risk management implementation is also reflected in LPEI risk profile assessment that consists of inherent risk assessment in the implementation of LPEI business activities that include financing activity, guarantee and insurance, and an assessment of the Quality of Risk Management Implementation (KPMR) which includes all pillars of risk management implementation in accordance with the Financial Services Authority Regulations. The result of inherent risk assessment and risk control management implementation quality assessment will produce a composite Risk Profile. The LPEI's risk profile which is one of the factors in Risk Based LPEI Rating as stipulated in the Regulation of the Executive Directors No. 0009/PDE/07/2023 concerning Risk Based LPEI Rating Assessment.

32. Manajemen Risiko (lanjutan)

Dalam kerangka manajemen risiko terpadu (*enterprise risk management*), LPEI menerapkan konsep *three lines model*, yakni:

- Lini pertama (*First line*) merupakan unit kerja yang berada pada setiap *risk taking function* yang mana merupakan unit kerja pemilik risiko (*risk owners*) yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pencapaian kegiatan usaha dan pelaksanaan mandat LPEI serta unit kerja yang merupakan pendukung langsung dari unit kerja pemilik risiko (*risk owner*) tersebut. Lini pertama melakukan *self-assurance* berupa menerapkan budaya kepatuhan dan budaya peduli risiko pada setiap kegiatan yang dilakukan.
- Lini kedua (*Second line*) merupakan fungsi Manajemen Risiko yang fokus pada pengembangan metodologi terkait manajemen risiko, termasuk di dalamnya fungsi Analisa Risiko Bisnis sebagai *four eyes principles* pada level transaksi, dan fungsi Kepatuhan. Lini kedua memiliki peran antara lain pemantauan, pemberian advis, pengujian, analisis, pengaturan dan pelaporan tentang hal-hal yang berkaitan dengan manajemen risiko dan kepatuhan.
- Lini ketiga (*Third line*) merupakan Audit Function yang berfungsi melakukan audit terhadap pelaksanaan kegiatan di seluruh unit kerja termasuk berfungsi untuk melakukan penilaian secara independen atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan pengendalian internal di LPEI. Lini ketiga memiliki peran antara lain memberikan *assurance* dan melakukan evaluasi yang independen dan obyektif terhadap pengendalian internal, penerapan tata kelola dan manajemen risiko.

LPEI secara berkala melakukan kajian dan *backtesting* pada beberapa alat pengukuran risiko, yaitu pelaksanaan *Stress Testing* secara berkala, *backtesting* terhadap *forward looking model* PD yang telah diimplementasikan saat ini serta permodelan kembali atas komponen historis dan *forward looking* untuk perhitungan ECL (PD, LGD dan EAD) untuk mengakomodasi potensi dampak perubahan makro ekonomi.

32. Risk Management (continued)

In the organizational structure to enterprise risk management. LPEI has implemented the concept of three lines model:

- The first line (*First line*) are unit that is in each risk taking function which is a unit that is a risk owner who is directly responsible for achieving business activities and carrying out the mandate of LPEI as well as units that support the the risk owner. The first line performs self-assurance in the form of implementing risk and compliance culture in every activity carried out.
- The second line (*Second line*) is a Risk Management function that focuses on the development of methodologies related to risk management, including the Business Risk Analysis function as four eyes principles at the transaction level, and the Compliance function. The second line has roles including monitoring, providing advice, testing, analysis, regulation and reporting on matters relating to risk management and compliance.
- The third line (*Third line*) is the Audit Function which audit the implementation of activities in all units, including carry out independent assessments of the effectiveness of the implementation of Risk Management and internal control at LPEI. The third line has roles including providing assurance and conducting independent and objective evaluations of internal control, implementation of governance and risk management.

LPEI periodically conducted studies and back-testing processes on several risk measurement tools, including conducting Stress Testing practices regularly, back-testing on the current forward looking PD model, and re-modeling of the historical and forward looking ECL components (i.e., PD, LGD and EAD) to accommodate potential impact of macro economic changes.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

33. Risiko Kredit

Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada LPEI, termasuk di dalamnya risiko penjaminan. Jenis risiko ini merupakan risiko terbesar yang dihadapi LPEI. LPEI menerapkan manajemen risiko kredit melalui tahapan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko kredit baik secara individual maupun secara portofolio. Pembiayaan posisi 31 Desember 2024 memiliki rasio NPF Gross sebesar 29,07% menurun terhadap posisi 31 Desember 2023 sebelumnya yang sebesar 43,48%. Rasio NPF Net posisi 31 Desember 2024 sebesar 4,52% atau menurun dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yang sebesar 4,54%. Pengelolaan risiko kredit di antaranya dilakukan dengan pengelolaan limit pada batasan eksposur risiko yang dapat diterima untuk individu debitur, pengelolaan limit pada batasan geografis tertentu, pengelolaan limit konsentrasi per industri, dan sektor ekonomi tertentu. Penetapan limit juga dilakukan melalui penggolongan risiko kredit (*rating*) per individu debitur. *Rating* risiko kredit dikinikan secara berkala untuk memperkirakan *potential loss* sebagai risiko kredit akibat ekspansi pembiayaan dan penentuan tindak lanjut perbaikan. Penerapan manajemen risiko kredit tidak hanya ditujukan untuk memenuhi ketentuan regulator, namun merupakan suatu tuntutan manajemen untuk menerapkan sistem pengelolaan risiko kredit pada tingkat *risk and return* yang optimum dan sesuai dengan praktik di lembaga keuangan, sehingga diharapkan mampu mendorong kegiatan usaha LPEI.

Proses analisa dan persetujuan pembiayaan diawali dengan proses pengenalan calon debitur melalui penilaian tingkat risiko masing-masing calon debitur dengan menggunakan IEB *Credit Risk Rating System* untuk pembiayaan korporasi. Hasil *rating* dimaksud dipergunakan pula untuk penerapan *risk-based pricing* dalam *Asset Liabilities Committee (ALCO)*.

33. Credit Risk

Credit risk is defined as the risk of the inability of debtors or counterparties to fulfill their obligation to LPEI (counterparties default). This type of risk is the biggest risk which is faced by LPEI. LPEI implements credit risk management through the stages of identification, measurement, control, and monitoring of credit risk either individually or as portfolio. As of December 31, 2024, LPEI has a Gross NPF ratio of 29.07%, which showed an increase from December 31, 2023, 43.48%. Net NPF ratio as of December 31, 2024, was 4.52%, also decreasing compared to that as of December 31, 2023, 4.54%. Credit risk management implemented by managing risk exposure at acceptable limit for individual debtors, specific geographic boundaries, concentration limit per industry, and economic sectors. Set-up limit is also done through the classification of credit risk (rating) per individual debtor. Credit risk ratings are periodically updated to estimate potential losses (as credit risk) as a result of financing expansion and determining follow-up improvement. Credit risk management is not only intended to comply with regulator, but also Management's intention to implement credit risk management system at the optimum risk and return and commonly practiced in financial institutions, so that is expected to encourage LPEI's business activities.

Loan analysis and approval process begins with the introduction of the applicants through risk evaluation of each prospective debtor by using the IEB Credit Risk Rating System for corporate funding. Rating result is also used by the Asset Liabilities Committee (ALCO) to set risk-based pricing.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

33. Risiko Kredit (lanjutan)

Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh unit bisnis telah mempertimbangkan dan memperhatikan risiko kredit sejak pembiayaan dimaksud diberikan sampai dengan pelunasannya. Pemantauan dilakukan secara berkala terhadap kualitas pembiayaan untuk mencegah terjadinya *Non-Performing Financing (NPF)* termasuk memantau ada atau tidaknya bukti obyektif penurunan nilai serta perhitungan besarnya cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) baik secara kolektif maupun secara individual.

Melalui penerapan *Early Warning Detection (EWD)* terhadap kondisi perkembangan debitur, maka pengelolaan risiko kredit yang efektif dapat meminimalkan risiko terjadinya kerugian dan mengoptimalkan penggunaan modal untuk mendukung pembiayaan ekspor nasional.

Pengelolaan risiko kredit di LPEI dimaksudkan agar kemungkinan kerugian yang diakibatkan oleh tidak terbayarnya pinjaman yang diberikan dan kontrak keuangan lainnya, baik secara tingkat individual maupun portofolio pembiayaan secara keseluruhan dapat dikelola seminimal mungkin. Pengelolaan risiko kredit ini juga dilakukan LPEI dalam upaya memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundangan-undangan termasuk Peraturan Menteri Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan.

- a. Analisis eksposur maksimum risiko kredit dengan mempertimbangkan dampak keuangan dari agunan dan peningkatan kredit lainnya.

Nilai tercatat aset keuangan LPEI selain pembiayaan dan piutang merupakan eksposur maksimum risiko kredit per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

33. Credit Risk (continued)

In granting its financing, the business unit has considered credit risk since loan being drawdowned up until the said facility is settled. Monitoring of loan quality is conducted periodically to prevent non-performing Financing (NPF), including to monitor any objective evidence of impairment, as well as to calculate the allowance for impairment losses, both collectively and individually.

Through the implementation of Early Warning Detection (EWD) in monitoring debtors, LPEI could enhance the effectiveness of credit risk management and eventually minimize potential loss as well as optimize capital utilization to support national export programme.

The purpose of LPEI's credit risk management is to manage the possible losses on loan and other financial contracts default at minimum level, both as individual and as loan portfolio. Besides, credit risk management also intended to comply with regulations including the Regulation of the Minister of Finance and Financial Services Authority.

- a. *Analysis of maximum exposure to credit risk considering the financial effect of collateral and other credit enhancement.*

As of December 31, 2024, and 2023, the carrying value of LPEI's financial assets other than financing and receivables represents the maximum exposure to credit risk.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

33. Risiko Kredit (lanjutan)

- a. Analisis eksposur maksimum risiko kredit dengan mempertimbangkan dampak keuangan dari agunan dan peningkatan kredit lainnya. (lanjutan)

Pembiayaan dan piutang LPEI dijamin dengan agunan (misalnya piutang, persediaan, mesin, dan lain-lain). LPEI menggunakan nilai wajar agunan sebagai dasar arus kas masa depan untuk tujuan penurunan jika pembiayaan dan piutang bersifat *collateral dependent* dan penyitaan agunan kemungkinan besar terjadi berdasarkan perjanjian.

Agunan adalah hak dan kekuasaan atas benda berwujud dan/atau benda tidak berwujud yang diserahkan oleh nasabah dan/atau pihak ketiga sebagai pemilik agunan kepada LPEI sebagai *second way out* guna menjamin pelunasan utang nasabah, apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan atau addendumnya. Objek agunan yang dibiayai berupa:

- Barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang dibiayai dengan pembiayaan.
- Fungsi agunan berupa objek yang dibiayai tersebut tidak hanya sebagai bukti penggunaan pembiayaan, keseriusan/ kesungguhan debitur atau calon debitur, tetapi juga sebagai faktor pengurang risiko pembiayaan dikemudian hari jika fasilitas pembiayaan yang diberikan tersebut mengalami macet.

Untuk meminimalkan risiko, LPEI mengutamakan untuk memperoleh aset tetap sebagai agunan.

Manajemen meyakini kemampuan LPEI untuk mengendalikan dan memelihara eksposur risiko kredit yang berasal dari pembiayaan dan piutang berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- LPEI telah memiliki pedoman tertulis mengenai kebijakan dan proses pembiayaan dan piutang yang mencakup seluruh aspek pemberian pembiayaan dan piutang yang dilakukan. Setiap pemberian pembiayaan dan piutang harus senantiasa mengacu pada kebijakan tersebut.

33. Credit Risk (continued)

- a. Analysis of maximum exposure to credit risk considering the financial effect of collateral and other credit enhancement. (continued)

LPEI's financing and receivables are secured by collateral (e.g. receivables, inventories, machineries, and etc.). LPEI uses the fair value of collateral as a basis of future cash flows for impairment purposes if financing and receivables are collateral dependent and foreclosure of collateral is most likely to occur based on the agreement.

Collateral is the right and power over tangible and/or intangible assets submitted by the debtor and the owner or a third party as collateral to LPEI as a second way out to ensure repayment of a debt of the debtor, if financing cannot be paid based on receipt of the financing agreement time or its addendum. Object of financed collateral is follows:

- Moveable and immoveable goods funded by financing.
- Function of object collateral not only as evidence of financing, seriousness/ earnestness debtor, but also as a risk-reducing financing in the future if the financing facilities cannot be paid.

To minimize the risk, LPEI prioritizes to acquire premises and equipment as collateral.

Management believes on LPEI's ability to control and sustain minimal exposure on credit risk of LPEI resulting from its financing and receivables based on the following:

- LPEI has written financing and receivables policy and manual procedures that covers all aspects of LPEI's lending activities. At all times, the financing and receivables must adhere to the requirements of LPEI's policy.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

33. Risiko Kredit (lanjutan)

- a. Analisis eksposur maksimum risiko kredit dengan mempertimbangkan dampak keuangan dari agunan dan peningkatan kredit lainnya. (lanjutan)

Manajemen meyakini kemampuan LPEI untuk mengendalikan dan memelihara eksposur risiko kredit yang berasal dari pembiayaan dan piutang berdasarkan hal-hal sebagai berikut: (lanjutan)

- LPEI telah memiliki sistem deteksi dini permasalahan melalui “early warning system” dan pemantauan yang disiplin.
 - Seluruh pembiayaan dan piutang diberikan dengan agunan, kecuali untuk jenis pembiayaan dan piutang tertentu seperti fasilitas antar bank (pinjaman yang diberikan).
- b. Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit
- 1) Sektor geografis, neto cadangan kerugian penurunan nilai

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit LPEI pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung pembiayaan dan piutang lainnya), yang dikategorikan berdasarkan area geografis pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

2024									
Dalam Negeri/Domestic									
	DKI Jakarta	Jawa Barat/ West Java	Jawa Tengah/ Central Java	Jawa Timur/ East Java	Sumatera	Kalimantan	Indonesia Timur/ East Indonesia	Luar Negeri/ Overseas	Total
Giro pada Bank Indonesia	775	--	--	--	--	--	--	--	775
Giro pada bank	88,552	517	--	--	--	--	--	1,127,817	1,217,286
Penempatan pada bank	510,302	861,449	--	--	--	--	--	--	1,371,751
Efek-efek	1,173,253	--	--	--	--	--	--	--	1,173,253
Tagihan derivatif	50,674	--	--	--	--	--	--	--	50,674
Pembiayaan dan piutang									
Modal kerja	1,942,857	2,478,388	1,491,114	3,014,503	6,095,063	717,123	2,636,280	--	18,375,328
Investasi	4,766,986	699,021	130,108	452,692	6,390,351	4,696,893	3,133,276	208,150	20,477,477
Konsumsi	121,346	1,661	--	--	--	--	--	--	123,007
Aset Ijarah	--	--	--	--	--	68,808	--	--	68,808
Piutang asuransi dan penjaminan	3,192	--	--	--	--	--	--	--	3,192
Piutang reasuransi	670	--	--	--	--	--	--	--	670
Tagihan akseptasi	115,941	--	4,554	17,631	--	--	--	--	138,126
Aset lain-lain neto *)	12,353	--	--	--	--	--	--	--	12,353
Neto	8,787,301	4,041,036	1,625,776	3,484,826	12,485,414	5,482,824	5,769,556	1,335,967	43,012,700
2023									
Dalam Negeri/Domestic									
	DKI Jakarta	Jawa Barat/ West Java	Jawa Tengah/ Central Java	Jawa Timur/ East Java	Sumatera	Kalimantan	Indonesia Timur/ East Indonesia	Luar Negeri/ Overseas	Total
Giro pada Bank Indonesia	553	--	--	--	--	--	--	--	553
Giro pada bank	72,905	516	--	--	--	--	--	34,835	108,256
Penempatan pada bank	3,637,838	2,725,819	--	249,955	--	--	--	800,636	7,414,248
Efek-efek	1,433,923	--	--	--	--	--	--	--	1,433,923
Tagihan derivatif	85	--	--	--	--	--	--	--	85
Pembiayaan dan piutang									
Modal kerja	5,485,071	2,261,063	1,571,902	3,524,655	1,312,460	1,000,086	982,164	107,829	16,245,230
Investasi	10,989,816	1,211,120	325,543	611,351	5,618,884	3,454,835	2,607,507	--	24,819,056
Konsumsi	124,928	--	--	--	--	--	--	--	124,928
Piutang asuransi dan penjaminan	75,059	--	--	--	--	--	--	--	75,059
Tagihan akseptasi	93,673	37,714	3,373	17,238	--	--	--	1,232	153,230
Aset lain-lain neto *)	18,143	--	--	--	--	--	--	--	18,143
Neto	21,931,994	6,236,232	1,900,818	4,403,199	6,931,344	4,454,921	3,589,671	944,532	50,392,711

*) Aset keuangan dalam “aset lain-lain” terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan.

*) Financial assets under “other assets” consist of accrued interest receivables and refundable deposits.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

33. Risiko Kredit (lanjutan)

- b. Konsentrasi risiko aset keuangan dengan
eksposur risiko kredit (lanjutan)

- 1) Sektor geografis, neto cadangan kerugian
penurunan nilai (lanjutan)

Eksposur risiko kredit atas rekening
administratif gross adalah sebagai berikut:

2024								
Dalam Negeri/Domestic								
	DKI Jakarta	Jawa Barat/ West Java	Jawa Tengah/ Central Java	Jawa Timur/ East Java	Sumatera	Kalimantan	Indonesia Timur/ East Indonesia	Luar Negeri/ Overseas
Bank garansi	4,878,649	258,122	58,591	122,086	757,755	107,249	254,923	148,074
Penjaminan Kredit PEN	300,000	160,950	--	1,100,000	--	--	--	--
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	174,235	249,576	357	61,360	--	--	--	--
Total	5,352,883	668,649	68,948	1,283,446	757,755	107,249	254,923	148,074
Estimasi klaim Penjaminan								(444,847)
Total								8,187,080

Bank guarantee
Credit Guarantee - PEN
Outstanding irrevocable L/C
Total
Estimated Guarantee claim
Total

33. Credit Risk (continued)

- b. Concentration of financial assets risk with
credit risk exposure (continued)

- 1) Geographical sectors, net of allowance for
impairment losses (continued)

Credit risk exposure related to gross
administrative accounts items are as
follows:

- 2) Jenis *counterparties*

Tabel berikut ini menggambarkan rincian
eksposur risiko kredit LPEI pada nilai
tercatat (tanpa memperhitungkan agunan
atau pendukung pembiayaan dan piutang
lainnya), yang dikategorikan berdasarkan
jenis *counterparties* pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023:

- 2) Type of counterparties

The following tables provide the details of
LPEI's credit risk exposure at carrying
amounts (without taking into account any
collateral held or financing and
receivables support), as categorized
based on type of counterparties as of
December 31, 2024 and 2023:

2024					
Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies	Perseorangan/ Individuals	Total
Giro pada					
Bank Indonesia	775	--	--	--	775
Giro pada bank	--	1,217,286	--	--	1,217,286
Penempatan pada bank	--	1,371,751	--	--	1,371,751
Efek-efek	555,175	618,078	--	--	1,173,253
Tagihan derivatif	--	50,674	--	--	50,674
Pembiayaan dan piutang					
Modal kerja	3,053,857	--	15,300,893	20,578	18,375,328
Investasi	5,228,225	--	56,857	15,184,159	20,477,477
Konsumsi	--	--	--	123,007	123,007
Aset Ijarah	--	--	68,808	--	68,808
Piutang asuransi dan penjaminan	--	--	3,192	--	3,192
Piutang reasuransi	--	--	670	--	670
Tagihan akseptasi	--	--	138,126	--	138,126
Aset lain-lain *)	--	--	12,353	--	12,353
Neto	8,838,032	3,257,789	57,527	30,707,531	43,012,700

Current account with
Bank Indonesia
Current accounts with banks
Placements with
banks
Securities
Derivatives receivable
Financing and receivables
Working capital
Investment
Consumption
Ijarah assets
Insurance and guarantee
receivables
Reinsurance receivables
Acceptances receivable
Other assets *)
Net

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

33. Risiko Kredit (lanjutan)

- b. Konsentrasi risiko aset keuangan dengan
eksposur risiko kredit (lanjutan)

2) Jenis *counterparties* (lanjutan)

33. Credit Risk (continued)

- b. Concentration of financial assets risk with
credit risk exposure (continued)

2) Type of counterparties (continued)

2023						
Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies	Perseorangan/ Individuals	Total	
Giro pada						Current account with
Bank Indonesia	553	--	--	--	553	Bank Indonesia
Giro pada bank	--	108,256	--	--	108,256	Current accounts with banks
Penempatan pada						Placements with
bank	--	7,414,248	--	--	7,414,248	banks
Efek-efek	720,979	712,944	--	--	1,433,923	Securities
Pembiayaan dan piutang						Financing and receivables
Modal kerja	2,736,968	--	30	13,484,801	23,431	Working capital
Investasi	6,365,814	--	65,750	18,386,621	871	Investment
Konsumsi	--	--	--	--	124,928	Consumption
Piutang asuransi dan						Insurance and guarantee
penjaminan	--	--	--	75,059	--	receivables
Tagihan akseptasi	--	--	--	153,230	--	Acceptances receivable
Aset lain-lain *)	--	--	--	18,143	--	Other assets *)
Neto	9,824,314	8,235,533	65,780	32,117,854	149,230	50,392,711 Net

*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan.

*) Financial assets under "other assets" consist of accrued interest receivables and refundable deposits.

Tabel berikut ini menggambarkan rincian
eksposur risiko kredit LPEI yang
dikategorikan berdasarkan jenis
counterparties terhadap komitmen dan
kontinjensi:

The following tables provide the details of
LPEI's credit risk exposure as categorized
based on type of counterparties to
commitments and contingencies:

2024						
Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies	Perseorangan/ Individuals	Total	
Bank garansi	--	--	--	6,585,449	--	6,585,449
Penjaminan Kredit PEN	--	--	--	1,560,950	--	1,560,950
Penerbitan L/C						
yang tidak dapat dibatalkan	--	--	--	485,527	--	485,527
Total	--	--	--	8,631,927	--	8,631,927
Estimasi klaim penjaminan						(444,847)
Neto						8,187,080 Net

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

33. Risiko Kredit (lanjutan)

- b. Konsentrasi risiko aset keuangan dengan
eksposur risiko kredit (lanjutan)

2) Jenis *counterparties* (lanjutan)

2023						
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies	Perseorangan/ Individuals	Total
Bank garansi	--	--	--	7,742,206	--	7,742,206
Penjaminan Kredit PEN	--	--	--	3,152,935	--	3,152,935
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	--	--	--	125,656	--	125,656
Total	--	--	--	11,020,797	--	11,020,797
Estimasi klaim penjaminan					(448,911)	
Neto					10,571,886	

Bank Guarantee
Credit Guarantee - PEN

Outstanding
irrevocable L/C
Total
Estimated guarantee
claim
Net

3) Sektor industri

Tabel di bawah menggambarkan rincian
eksposur kredit pada nilai tercatat yang
dikategorikan berdasarkan sektor industri:

33. Credit Risk (continued)

- b. Concentration of financial assets risk with
credit risk exposure (continued)

2) Type of counterparties (continued)

2023						
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies	Perseorangan/ Individuals	Total
Bank guarantee	--	--	--	7,742,206	--	7,742,206
Credit Guarantee - PEN	--	--	--	3,152,935	--	3,152,935
Outstanding irrevocable L/C	--	--	--	125,656	--	125,656
Total	--	--	--	11,020,797	--	11,020,797
Estimated guarantee claim					(448,911)	
Net					10,571,886	

3) Industrial sectors

The following tables provide details of
LPEI's credit exposures at their carrying
amounts as categorized by industrial
sectors:

2024											
	Industri tekstil/ Textile industry	Industri minyak kelapa sawit/ Crude palm oil industry	Industri tanaman perkebunan- kelapa sawit/ Palm oil - plantation industry	Pengang- kutan umum- laut/ General transport sea	Industri crumb rubber/ Crumb rubber industry	Pengang- kutan umum udara/ General transport air	Industri perabot/ Furniture industry	Industri logam dasar/ Basic metal industry	Pertam- bangan batubara/ Coal mining	Lainnya/ Others	Total
Giro pada Bank Indonesia	--	--	--	--	--	--	--	--	--	775	775
Giro pada Bank	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,217,286	1,217,286
Penempatan pada Bank	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,371,751	1,371,751
Efek-efek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,173,253	1,173,253
Tagihan derivatif	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,674	50,674
Pembayaran dan piutang											
Pembayaran											
Modal kerja	1,464,109	2,775,031	1,387,650	112,747	--	984,004	46,033	956,335	1,775,033	8,874,386	18,375,328
Investasi	218,009	1,630,595	3,470,266	627,511	2,405,324	327,301	47,359	312,986	1,989,582	9,448,544	20,477,477
Konsumsi	--	--	--	--	--	--	--	--	--	123,007	123,007
Aset (jarah Piutang asuransi dan penjaminan	--	--	--	--	--	--	--	--	68,808	--	68,808
Piutang reasuransi	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,192	3,192
Tagihan akseptasi	4,554	--	--	--	--	--	--	--	--	670	670
Aset lain-lain - neto *)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	133,572	138,126
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,353	12,353
Neto	1,686,672	4,405,626	4,857,916	740,258	2,405,324	1,311,305	93,392	1,269,321	3,833,423	22,409,463	43,012,700
2023											
	Industri tekstil/ Textile industry	Industri minyak kelapa sawit/ Crude palm oil industry	Industri tanaman perkebunan- kelapa sawit/ Palm oil - plantation industry	Pengang- kutan umum- laut/ General transport sea	Industri crumb rubber/ Crumb rubber industry	Pengang- kutan umum udara/ General transport air	Industri perabot/ Furniture industry	Industri logam dasar/ Basic metal industry	Pertam- bangan batubara/ Coal mining	Lainnya/ Others	Total
Giro pada Bank Indonesia	--	--	--	--	--	--	--	--	--	553	553
Giro pada Bank	--	--	--	--	--	--	--	--	--	108,256	108,256
Penempatan pada Bank	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,414,248	7,414,248
Efek-efek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,433,923	1,433,923
Tagihan derivatif	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85	85
Pembayaran dan piutang											
Pembayaran											
Modal kerja	1,803,713	1,138,727	983,779	59,364	--	986,115	255,351	182,313	838,947	9,996,921	16,245,230
Investasi	414,905	2,307,447	5,260,112	988,806	1,182,240	984,598	62,482	538,587	3,251,713	9,828,166	24,819,056
Konsumsi	--	--	--	--	--	--	--	--	--	124,928	124,928
Piutang asuransi dan penjaminan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,059	75,059
Tagihan akseptasi	3,373	--	--	--	--	--	--	--	--	149,857	153,230
Aset lain-lain - neto *)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,143	18,143
Neto	2,221,991	3,446,174	6,243,891	1,048,170	1,182,240	1,970,713	317,833	720,900	4,090,660	29,150,139	50,392,711

*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang
masih akan diterima dan uang jaminan.

*) Financial assets under "other assets" consist of accrued interest
receivables and refundable deposits.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

33. Risiko Kredit (lanjutan)

- b. Konsentrasi risiko aset keuangan dengan
eksposur risiko kredit (lanjutan)

3) Sektor industri (lanjutan)

Tabel di bawah menggambarkan rincian
eksposur kredit pada nilai tercatat yang
dikategorikan berdasarkan sektor industri
terhadap rekening administrative:

2024										
Industri tekstil/ Textile industry	Industri minyak kelapa mentah/ Crude palm oil industry	Industri tanaman perkebunan- kelapa sawit/ Palm oil - plantation industry	Pengang- kutan umum- laut/ General transport sea	Industri crumb rubber/ Crumb rubber industry	Pengang- kutan umum udara/ General transport air	Industri perabot/ Furniture industry	Industri logam dasar/ Basic metal industry	Pertam- bangan batubara/ Coal mining	Lainnya/ Others	Total
Bank garansi	39,433	--	--	1,338,949	--	56,950	--	669,551	90,132	4,390,435
Penjaminan Kredit PEN	--	--	--	--	--	--	--	100,000	--	1,560,950
Pemberian L/C yang tidak dapat dibatalakan	--	--	357	--	--	--	--	172,832	--	485,527
Total	39,433	--	357	1,338,949	--	56,950	--	942,383	90,132	8,631,927
Estimasi klaim penjaminan Neto										(444,847)
										8,187,080
2023										
Industri tekstil/ Textile industry	Industri minyak kelapa mentah/ Crude palm oil industry	Industri tanaman perkebunan- kelapa sawit/ Palm oil - plantation industry	Pengang- kutan umum- laut/ General transport sea	Industri crumb rubber/ Crumb rubber industry	Pengang- kutan umum udara/ General transport air	Industri perabot/ Furniture industry	Industri logam dasar/ Basic metal industry	Pertam- bangan batubara/ Coal mining	Lainnya/ Others	Total
Bank garansi	--	--	--	985,745	--	54,480	--	718,774	109,319	5,867,588
Penjaminan Kredit PEN	--	--	153,970	--	--	--	--	100,000	--	7,742,206
Pemberian L/C yang tidak dapat dibatalakan	--	--	1,316	--	--	--	--	--	--	3,152,935
Total	--	--	155,286	985,745	--	54,480	6,300	818,774	109,319	125,656
Estimasi klaim penjaminan Neto										(448,911)
										10,571,886

4) Sektor ekonomi

Tabel berikut ini menyajikan rincian
eksposur risiko kredit berdasarkan sektor
ekonomi:

33. Credit Risk (continued)

- b. Concentration of financial assets risk with
credit risk exposure (continued)

3) Industrial sectors (continued)

The following tables provide details of
LPEI's credit exposures at their carrying
amounts as categorized by industrial
sectors to administrative accounts items:

2024										
Perindustrian/ Industry	Pertanian/ Agriculture	Jasa dunia Usaha/ Business services	Pengang- kutan/ Transportation	Pertam- bangan/ Mining	Perdagangan, restoran dan hotel/ Trading, restaurant and hotels	Konstruksi/ Construction	Lainnya/ Others	Total		
Giro pada Bank Indonesia	--	--	--	--	--	--	775	775	Current account with Bank Indonesia	
Giro pada Bank	--	--	--	--	--	--	1,217,286	1,217,286	Current accounts with banks	
Penempatan pada Bank	--	--	--	--	--	--	1,371,751	1,371,751	Placements with Banks	
Efek-efek	--	--	--	--	--	--	1,173,253	1,173,253	Securities	
Tagihan derivatif	--	--	--	--	--	--	50,674	50,674	Derivative receivable	
Pembiayaan dan piutang	--	--	--	--	--	--	--	--	Financing and receivables	
Pembiayaan	--	--	--	--	--	--	--	--	Financing	
Modal kerja	9,737,207	1,947,500	94,079	1,396,802	2,365,097	943,376	1,127,188	764,079	Working Capital	
Investasi	6,458,090	6,227,490	2,091,043	1,441,260	2,896,977	212,015	468,654	681,948	Investment	
Konsumsi	--	--	--	--	--	--	--	123,007	Consumption	
Aset Ijarah	--	--	--	--	68,808	--	--	--	Ijarah assets	
Piutang asuransi	--	--	--	--	--	--	--	--	Insurance and guarantee	
dan penjaminan	--	--	--	--	--	--	--	3,192	receivables	
Piutang penjaminan ulang	--	--	--	--	--	--	--	--	Reguarantee receivables	
Piutang reasuransi	--	--	--	--	--	--	--	670	Reinsurance receivables	
Tagihan akseptasi	22,185	--	--	--	--	115,941	--	--	Acceptances receivable	
Aset lain-lain neto *)	--	--	--	--	--	--	--	12,353	Other assets - net *)	
Neto	16,217,482	8,174,990	2,185,122	2,838,062	5,330,882	1,271,332	1,595,842	5,398,988	43,012,700	Net

4) Economic sectors

The following tables provide details of
LPEI's credit risk exposures by economic
sectors:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

33. Risiko Kredit (lanjutan)

4) Sektor ekonomi (lanjutan)

2023								
Perindustrian/ Industry	Pertanian/ Agriculture	Jasa dunia Usaha/ Business services	Pengang- kutan/ Transportation	Pertam- bangan/ Mining	Perdagangan, restoran dan hotel/ Trading, restaurant and hotels	Konstruksi/ Construction	Lainnya/ Others	Total
Giro pada Bank Indonesia	--	--	--	--	--	--	553	553
Giro pada Bank	--	--	--	--	--	--	108,256	108,256
Penempatan pada Bank	--	--	--	--	--	--	7,414,248	7,414,248
Efek-efek	--	--	--	--	--	--	1,433,923	1,433,923
Tagihan derivatif	--	--	--	--	--	--	85	85
Pembiayaan dan piutang								
Pembiayaan								
Modal kerja	8,015,707	1,683,851	364,974	1,046,164	1,707,374	1,098,511	779,905	16,245,230
Investasi	7,525,880	6,727,944	2,258,029	2,737,830	4,606,075	230,169	718,015	24,819,056
Konsumsi	--	--	--	--	--	--	124,928	124,928
Piutang pembiayaan								
garansi	--	--	--	--	--	--	--	--
Piutang asuransi								
dan penjaminan	--	--	--	--	--	--	75,059	75,059
Tagihan akseptasi	58,325	--	--	--	--	--	94,905	153,230
Aset lain-lain neto *)	--	--	--	--	--	--	18,143	18,143
Neto	15,599,912	8,411,795	2,623,003	3,783,994	6,313,449	1,328,680	10,768,020	50,392,711

Current account with
Bank Indonesia
Current accounts with banks
Placements with Banks
Securities
Derivative receivable
Financing and receivables
Financing
Working Capital
Investment
Consumption
Guarantee financing
Receivables
Insurance and guarantee
receivables
Acceptances receivable
Other assets - net *)
Net

*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan.

*) Financial assets under "other assets" consist of accrued interest receivables and refundable deposits.

Tabel berikut ini menyajikan rincian eksposur risiko kredit terhadap rekening administratif berdasarkan sektor ekonomi terhadap rekening administratif:

The following tables provide details of LPEI's credit risk exposures relating to administrative accounts items by economic sectors to administrative accounts:

2024								
Perindustrian/ Industry	Pertanian/ Agriculture	Jasa dunia Usaha/ Business services	Pengang- kutan/ Transportation	Pertam- bangan/ Mining	Perdagangan, restoran dan hotel/ Trading, restaurant and hotels	Konstruksi/ Construction	Lainnya/ Others	Total
Bank garansi	294,972	--	2,071,148	1,543,973	886,210	264,565	647,097	6,585,449
Penjaminan Kredit PEN	1,260,950	--	300,000	--	--	--	--	1,560,950
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	485,527	--	--	--	--	--	--	485,527
Total	2,041,450	--	2,371,148	1,543,973	886,210	264,565	647,097	8,631,927
Estimasi klaim Penjaminan								(444,847)
Total								8,187,080

2023								
Perindustrian/ Industry	Pertanian/ Agriculture	Jasa dunia Usaha/ Business services	Pengang- kutan/ Transportation	Pertam- bangan/ Mining	Perdagangan, restoran dan hotel/ Trading, restaurant and hotels	Konstruksi/ Construction	Lainnya/ Others	Total
Bank garansi	339,845	--	2,176,759	1,185,101	950,304	474,792	892,707	7,742,206
Penjaminan Kredit PEN	1,721,895	--	310,000	--	--	417,100	--	3,152,935
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	116,688	--	8,968	--	--	--	--	125,656
Total	2,178,428	--	2,495,727	1,185,101	950,304	891,892	892,707	11,020,797
Estimasi klaim Penjaminan								(448,911)
Total								10,571,886

Bank guarantee
Credit Guarantee - PEN
Outstanding irrevocable L/C
Total
Estimated Guarantee claim
Total

Bank guarantee
Credit Guarantee - PEN
Outstanding irrevocable L/C
Total
Estimated Guarantee claim
Total

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

33. Risiko Kredit (lanjutan)

5) Kualitas kredit dari aset keuangan

Informasi kualitas kredit dari aset keuangan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

33. Credit Risk (continued)

5) Credit quality of financial assets

The information on the credit quality of neither past due nor impaired financial assets as of December 31, 2024 and 2023, are as follows:

		2024								
		Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired				Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Past-due but not impaired		Mengalami penurunan nilai/ Impaired		
		Tingkat tinggi/ High grade	Tingkat standar/ Standard grade	Tingkat sub standar/ Sub-standard grade	Tidak diperingkat/ Unrated				Total	
Giro pada										Current account with Bank Indonesia
Bank Indonesia	--		775	--	--	--	--	--	775	
Giro pada bank	55,398		1,161,888	--	--	--	--	--	1,217,286	Current accounts with banks
Penempatan pada bank	1,371,751		--	--	--	--	--	--	1,371,751	Placements with banks
Efek-efek	618,078		555,175	--	--	--	--	--	1,173,253	Securities
Tagihan derivatif	50,674		--	--	--	--	--	--	50,674	Derivatives receivable
Pembiayaan dan piutang										Financing and receivables
Pembiayaan										Financing
Modal kerja	3,066,840		9,666,730	57,176	238,384	35,957	5,310,242		18,375,329	Working capital
Investasi	1,648,524		5,827,042	939,695	4,983,443	967,714	6,111,058		20,477,476	Investment
Konsumsi	--		--	--	123,007	--	--		123,007	Consumption
Aset Ijarah	--		--	--	68,808	--	--		68,808	Ijarah assets
Piutang asuransi dan penjaminan	--		--	--	3,192	--	--		3,192	Insurance and guarantee receivables
Piutang reasuransi	--		--	--	670	--	--		670	Reinsurance receivables
Tagihan akseptasi	--		138,126	--	--	--	--		138,126	Acceptances receivable
Aset lain-lain - neto *)	--		--	--	12,353	--	--		12,353	Other assets - net *)
Neto		6,811,265	17,349,736	996,871	5,429,857	1,003,671	11,421,300		43,012,700	Net
		2023								
		Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired				Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Past-due but not impaired		Mengalami penurunan nilai/ Impaired		
		Tingkat tinggi/ High grade	Tingkat standar/ Standard grade	Tingkat sub standar/ Sub-standard grade	Tidak diperingkat/ Unrated				Total	
Giro pada										Current account with Bank Indonesia
Bank Indonesia	--		553	--	--	--	--	--	553	
Giro pada bank	86,020		22,236	--	--	--	--	--	108,256	Current accounts with banks
Penempatan pada bank	6,513,612		900,636	--	--	--	--	--	7,414,248	Placements with banks
Efek-efek	--		1,433,923	--	--	--	--	--	1,433,923	Securities
Tagihan derivatif	--		85	--	--	--	--	--	85	Derivatives receivable
Pembiayaan dan piutang										Financing and receivables
Pembiayaan										Financing
Modal kerja	1,498,962		7,415,865	99,803	676,346	248,558	6,305,696		16,245,230	Working capital
Investasi	2,123,056		9,213,564	1,226,091	6,123,129	1,678	6,131,538		24,819,056	Investment
Konsumsi	--		--	--	124,928	--	--		124,928	Consumption
Piutang asuransi dan penjaminan	--		--	--	75,059	--	--		75,059	Insurance and guarantee receivables
Tagihan akseptasi	--		153,230	--	--	--	--		153,230	Acceptances receivable
Aset lain-lain - neto *)	--		--	--	18,143	--	--		18,143	Other assets - net *)
Neto		10,221,650	19,140,092	1,325,894	7,017,605	250,236	12,437,234		50,392,711	Net

*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan.

*) Financial assets under "other assets" consist of accrued interest receivables and refundable deposits.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

33. Risiko Kredit (lanjutan)

**5) Kualitas kredit dari aset keuangan
(lanjutan)**

Kualitas kredit aset keuangan LPEI dinilai dan dikelola berdasarkan peringkat eksternal dan internal.

Kualitas kredit dimonitor dengan menggunakan sistem peringkat IEB *Credit Rating System*. Sistem peringkat dinilai dan diperbarui secara berkala dan peringkat risiko debitur individual divalidasi untuk menjaga akurasi dan konsistensi peringkat risiko. Kualitas kredit berdasarkan sistem peringkat IEB *Credit Rating System* dinilai sebagai berikut:

• **Tingkat tinggi**

Luar biasa

Debitur diberi peringkat luar biasa (nilai 'AAA') jika memiliki *debt service capacity* yang sangat kuat. Debitur 'AAA' dinilai dapat memiliki sebuah kualitas *outlook* kualitas kredit yang tinggi dalam segala kondisi ekonomi. 'AAA' adalah peringkat tertinggi yang diberikan kepada debitur berdasarkan IEB *Credit Rating System*.

• **Tingkat standar**

Kuat

Debitur yang diberi peringkat kuat (nilai 'AA') adalah debitur yang dianggap memiliki *debt service capacity* yang sangat kuat dan probabilitas yang rendah pinjamannya akan gagal bayar. Terdapat perbedaan yang kecil antara debitur dengan peringkat 'AA' dan debitur dengan nilai tertinggi.

Baik

Debitur yang diberi peringkat baik (nilai 'A') adalah debitur yang dianggap memiliki *debt service capacity* yang kuat. Walaupun probabilitas gagal bayar rendah, debitur dengan peringkat 'A' dinilai lebih rentan terhadap efek yang merugikan perubahan kondisi ekonomi.

33. Credit Risk (continued)

**5) Credit quality of financial assets
(continued)**

The credit quality of LPEI's financial assets is assessed and managed using external and internal ratings.

The credit quality is monitored using IEB Credit Rating System. The rating system is assessed and updated regularly and individual borrower risk rating is validated to maintain accuracy and consistency of risk rating. The credit quality and the corresponding IEB Credit Rating System grade are as follows:

• **High grade**

Outstanding

A debtor given an outstanding outlook (rated 'AAA') if it has an extremely strong debt service capacity. 'AAA' rated debtors are viewed to possess a high credit quality outlook under all economic conditions. 'AAA' is the highest rating provided to a borrower under the IEB Credit Rating System.

• **Standard grade**

Strong

A debtor given a strong outlook (rated 'AA') is deemed to have a very strong debt service capacity and a low probability of going into default. An 'AA' rated debtor differs from the highest rated debtors in a small degree.

Good

A debtor given a good outlook (rated 'A') is deemed to have a strong debt service capacity. While the probability of default is low, 'A' rated debtors are more susceptible to the adverse effects of changes in economic conditions.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

33. Risiko Kredit (lanjutan)

5) Kualitas kredit dari aset keuangan
(lanjutan)

Rata-rata

Debitur yang diberi peringkat rata-rata (nilai 'BBB') adalah debitur yang dianggap memiliki *debt service capacity* yang memadai. Namun, kondisi ekonomi yang buruk atau perubahan keadaan yang akan cenderung membuat *debt service capacity* melemah.

• **Tingkat sub standar**

Dapat diterima

Debitur diberi peringkat rata-rata (nilai 'BB') adalah debitur yang dalam jangka pendek dianggap lebih tidak rentan daripada debitur pada peringkat yang lebih rendah lain. Namun, debitur ini menghadapi ketidakpastian yang besar dan terpapar kondisi bisnis yang rugi, kondisi keuangan, atau kondisi ekonomi yang dapat menyebabkan debitur tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya.

Risiko tinggi

Debitur diberi peringkat berisiko tinggi (nilai 'BB-' sampai 'B+') adalah debitur yang dianggap kurang rentan daripada debitur dengan peringkat yang lebih rendah lain. Namun, kondisi bisnis yang merugikan, kondisi keuangan, atau kondisi ekonomi kemungkinan akan menurunkan kemampuan debitur atau menurunkan kesediaan debitur untuk memenuhi komitmen keuangannya.

Dalam perhatian

Eksposur kredit bagi debitur diberi peringkat dalam perhatian (nilai 'B') adalah debitur yang untuk sementara waktu dianggap tidak berisiko tetapi kinerja debitur telah melemah dan kecuali tren berubah, dapat menyebabkan kerugian.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

33. Credit Risk (continued)

5) *Credit quality of financial assets
(continued)*

Average

A debtor given an average outlook (rated 'BBB') is deemed to have an adequate debt service capacity. However, adverse economic conditions or changing circumstances are more likely to lead to a weakened debt service capacity.

• **Sub-standard grade**

Acceptable

A debtor given an acceptable outlook (rated 'BB') is deemed to be less vulnerable in the near term than other lower rated debtors. However, it faces major ongoing uncertainties and exposure to adverse business, financial, or economic conditions which could lead to the debtor being unable to meet its financial obligations.

High risk

A borrower given a high risk outlook (rated 'BB-' to 'B+') is deemed to be less vulnerable than lower rated debtors. However, adverse business, financial, or economic conditions will likely impair the debtors capacity or willingness to meet its financial commitments.

Watch list

Credit exposures for a debtor given a watch list outlook (rated 'B') is deemed to be not at risk for the moment but the debtor's performance has already weakened and unless present trends are reversed, could lead to losses.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

33. Risiko Kredit (lanjutan)

5) Kualitas kredit dari aset keuangan
(lanjutan)

• Tidak diperingkat

Aset keuangan yang tidak diperingkat adalah aset yang tidak dinilai dengan Sistem Penilaian IEB atau *provider* peringkat kredit eksternal.

Transaksi tresuri

Untuk memastikan kualitas portofolio investasi LPEI, LPEI menggunakan peringkat kredit eksternal.

6) Efek-efek

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, seluruh efek-efek tidak mengalami penurunan nilai dan tergolong lancar sehingga tidak terdapat pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai terkait akun tersebut.

7) Pembiayaan, piutang, dan piutang pembiayaan garansi

Aset keuangan yang signifikan dianalisa berdasarkan secara individual per debitur. Selanjutnya nasabah signifikan yang memiliki bukti objektif penurunan nilai dan perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai dilakukan secara individual berdasarkan arus kas masing-masing debitur, sedangkan debitur yang tidak terdapat penurunan nilai dan perhitungan penyisihan kerugian penurunan nilai dilakukan secara kolektif.

33. Credit Risk (continued)

5) Credit quality of financial assets
(continued)

• Unrated

Unrated financial assets are those who have not been assessed under the IEB Rating System or by external rating agencies.

Treasury transaction

To ensure the quality of LPEI's investment portfolio, LPEI uses the credit risk rating of external provider.

6) Securities

As of December 31, 2024 and 2023, all securities are not impaired and are classified as current and there is no allowance for impairment losses related to this account.

7) Financing, receivables, and guarantee financing receivables

Individually significant financial asset is analyzed if objective evidence of impairment exist. For significant debtors with of impairment and the allowance for impairment losses is calculated individually based on the cash flow while for debtors with no impairment dan the allowance for impairment losses is calculated collectively.

33. Risiko Kredit (lanjutan)

7) Pembiayaan, piutang dan piutang pembiayaan garansi (lanjutan)

Ikhtisar pembiayaan dan piutang yang diberikan dan piutang pembiayaan garansi adalah sebagai berikut:

33. Credit Risk (continued)

7) *Financing, receivables, and guarantee financing receivables (continued)*

Financing and receivables and guarantee financing receivables are summarized as follows:

	2024		
	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>		Total
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Not impaired</i>	Kolektif/ <i>Collective</i>	
	Individual		
Rupiah			
Perindustrian	5,745,589	3,715,239	--
Pertanian	5,174,020	1,629,271	--
Jasa dunia usaha	1,032,290	1,152,832	--
Perdagangan, restoran dan hotel	443,200	110,770	--
Pengangkutan	1,290,144	1,394,785	--
Konstruksi	654,716	468,159	--
Pertambangan	2,063,426	98,801	--
Lain-lain	141,459	61,921	--
Total Rupiah	16,544,844	8,631,778	--
Mata uang asing			
Perindustrian	5,572,800	1,161,669	--
Pertanian	938,128	433,571	--
Jasa dunia usaha	--	--	--
Perdagangan, restoran dan hotel	558,522	42,899	--
Pengangkutan	--	153,133	--
Konstruksi	465,175	7,791	--
Pertambangan	2,219,178	880,669	--
Lain-lain	1,255,865	109,790	--
Total mata uang asing	11,009,668	2,789,522	--
Total	27,554,512	11,421,300	--

Rupiah	
Manufacturing	
Agriculture	
Business services	
Trading, restaurants and hotels	
Transportation	
Construction	
Mining	
Others	
Total Rupiah	
Foreign currencies	
Manufacturing	
Agriculture	
Business services	
Trading, restaurants and hotels	
Transportation	
Construction	
Mining	
Others	
Total foreign currencies	
Total	

	2023		
	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>		Total
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Not impaired</i>	Kolektif/ <i>Collective</i>	
	Individual		
Rupiah			
Perindustrian	4,279,212	4,567,581	--
Pertanian	5,104,040	1,914,602	--
Jasa dunia usaha	2,435,182	-	--
Perdagangan, restoran dan hotel	853,884	25,716	--
Pengangkutan	1,893,552	1,403,873	--
Konstruksi	976,936	477,955	--
Pertambangan	1,546,152	259,216	--
Lain-lain	135,183	71,959	--
Total Rupiah	17,224,141	8,720,902	--
Mata uang asing			
Perindustrian	4,710,470	1,984,323	--
Pertanian	1,299,000	94,153	--
Jasa dunia usaha	187,821	--	--
Perdagangan, restoran dan hotel	284,595	164,485	--
Pengangkutan	278,187	208,382	--
Konstruksi	102,026	6,941	--
Pertambangan	3,422,775	1,085,307	--
Lain-lain	1,242,965	172,741	--
Total mata uang asing	11,527,839	3,716,332	--
Total	28,751,980	12,437,234	--

Rupiah	
Manufacturing	
Agriculture	
Business services	
Trading, restaurants and hotels	
Transportation	
Construction	
Mining	
Others	
Total Rupiah	
Foreign currencies	
Manufacturing	
Agriculture	
Business services	
Trading, restaurants and hotels	
Transportation	
Construction	
Mining	
Others	
Total foreign currencies	
Total	

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

33. Risiko Kredit (lanjutan)

- 8) Analisis umur pinjaman yang jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

	2024			
	Kurang dari 30 hari/ Less than 30 days	30 sampai 90 hari/ 30 to 90 days	Total	
Modal kerja	3,544	32,413	35,957	Working capital
Investasi	4,288	963,426	967,714	Investment
Neto	7,832	995,839	1,003,671	Net
	2023			
	Kurang dari 30 hari/ Less than 30 days	30 sampai 90 hari/ 30 to 90 days	Total	
Modal kerja	248,558	--	248,558	Working capital
Investasi	1,678	--	1,678	Investment
Neto	250,236	--	250,236	Net

9) Komitmen dan Kontinjensi

9) Commitments and contingencies

	2024	2023	
Rupiah			Rupiah
Bank garansi	1,143,701	1,677,354	Bank guarantee
Penjaminan Kredit PEN	1,400,000	2,306,100	Credit Guarantee - PEN
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	25,394	9,760	Outstanding irrevocable L/C
	2,569,095	3,993,214	
Mata uang asing			Foreign currencies
Bank garansi	5,441,749	6,064,852	Bank guarantee
Penjaminan Kredit PEN	160,950	846,835	Credit Guarantee - PEN
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	460,133	115,896	Outstanding irrevocable L/C
	6,062,832	7,027,583	
Total	8,631,927	11,020,797	Total

34. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan LPEI untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan LPEI. LPEI mengelola risiko likuiditas agar dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, serta dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal.

Untuk membatasi risiko ini, manajemen telah mengatur diversifikasi sumber dana selain dasar modal intinya, mengelola aset yang terkait likuiditas dan memonitor arus kas dan likuiditas masa depan setiap hari. Hal ini menggabungkan penilaian atas arus kas yang masa depan dan ketersediaan jaminan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk mengamankan dana tambahan jika diperlukan.

LPEI telah merencanakan langkah-langkah untuk mengatasi perbedaan jatuh tempo antara aset dan liabilitas, di antaranya:

- Menjaga stabilitas dan kontinuitas sumber dan dengan melakukan pengelolaan Aset-Liabilitas secara hati-hati dan terencana.
- Menjaga ketersediaan fasilitas pinjaman *money market line* dari berbagai bank, baik di dalam maupun di luar negeri.

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual berdasarkan Undiscounted Cash flows

Potensi risiko likuiditas yang akan dihadapi LPEI di masa mendatang diukur melalui *Liquidity Gap Analysis*, yang merupakan proyeksi kelebihan atau kekurangan likuiditas atas dasar jatuh tempo aset dan liabilitas, setelah memperhitungkan kebutuhan untuk ekspansi bisnis. Informasi ini menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan pengelolaan likuiditas, termasuk juga kebutuhan ekspansi bisnis. Dengan diterapkannya pengelolaan likuiditas yang efektif, diharapkan dapat meminimalkan risiko likuiditas di LPEI.

34. Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk resulting from LPEI's inability to meet maturing liabilities from cash flow funding sources and/or from liquid assets that can be easily converted into cash, without disrupting LPEI's activities and financial condition. LPEI manages liquidity risk to fulfill every financial obligation that has been agreed in a timely manner and can maintain an adequate and optimal level of liquidity.

To limit this risk, management has arranged diversified funding sources in addition to its core capital base, manages assets with liquidity in mind, and monitors future cash flows and liquidity on a daily basis. This incorporates an assessment of expected cash flows and the availability of high-grade collateral which could be used to secure additional funding if required.

LPEI has planned step to overcome the maturity gap between assets and liabilities, among others by:

- *Maintaining the stability and continuity of funding sources by managing the Assets-Liabilities carefully and proper planning.*
- *Maintaining the sufficiency of money market line credit facility from several banks, either on-shore or off-shore.*

Analysis of Assets and Liabilities by Remaining Contractual Maturity based on the Undiscounted Cash flows

The potential liquidity risk that LPEI may be exposed in the future is measured through Liquidity Gap Analysis, which is the projection of excess or shortage of liquidity base on maturity of assets and liabilities, after taking into account the need for business expansion. This information is also used as a base consideration when planning and managing liquidity as well as business expansion plan. By implementing effective liquidity management, it is expected to minimize liquidity risk at LPEI.

34. Risiko Likuiditas (lanjutan)

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual berdasarkan Undiscounted Cash flows (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan-neto dalam skala waktu tertentu (*maturity bucket*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*).

		2024								
		Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	Lebih dari 1-3 bulan/ More than 1-3 months	Lebih dari 3-6 bulan/ More than 3-6 months	Lebih dari 6-12 bulan/ More than 6-12 months	Lebih dari 1-3 tahun/ More than 1-3 years	Lebih dari 3-5 tahun/ More than 3-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Total	
Aset Keuangan										Financial Assets
Giro pada Bank Indonesia	775	--	--	--	--	--	--	--	775	Current account with Bank Indonesia
Giro pada bank	1,217,286	--	--	--	--	--	--	--	1,217,286	Current accounts with Bank
Penempatan pada Bank	1,315,500	56,919	--	--	--	--	--	--	1,372,419	Placements with Bank
Efek-efek	51,458	49,400	813,745	16,873	198,355	164,556	181,742	--	1,476,129	Securities
Tagihan akseptasi	30,197	63,077	47,190	--	--	--	--	--	140,464	Acceptances receivable
Pembiayaan dan piutang										Financing and receivables
Modal Kerja	5,589,972	4,684,065	1,845,181	2,027,419	1,908,363	5,037,880	13,109,198	34,202,078		Working Capital
Investasi	276,701	3,450	388,684	646,237	5,128,127	9,797,878	15,579,324	31,820,401		Investment
Konsumsi	14	--	10	385	8,737	22,347	147,410	178,903		Consumption
Piutang asuransi dan penjaminan	3,192	--	--	--	--	--	--	--	3,192	Insurance and guarantee receivables
Piutang penjaminan ulang	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Reguarantee receivables
Piutang reasuransi	670	--	--	--	--	--	--	--	670	Reinsurance receivables
Aset lain-lain - neto *)	12,353	--	--	--	--	--	--	--	12,353	Other assets *)
Sub total	8,498,118	4,856,911	3,094,810	2,690,914	7,243,582	15,022,661	29,017,674	--	70,424,670	Sub total
Liabilitas Keuangan										Financial Liabilities
Liabilitas segera	17,283	--	--	--	--	--	--	--	17,283	Current liabilities
Liabilitas Devisa Hasil Ekspor	--	245,116	--	--	--	--	--	--	245,116	Foreign exchange export proceeds liabilities
Liabilitas akseptasi	30,197	63,077	47,190	--	--	--	--	--	140,464	Acceptances payable
Liabilitas derivatif	49,939	--	--	--	--	--	--	--	49,939	Derivatives payable
Efek-efek hutang yang diterbitkan	216,672	701,342	2,322,266	2,707,670	4,831,964	1,359,122	1,666,250	13,805,286		Debt securities issued
Pinjaman yang diterima	2,067,846	15,112,661	500,000	7,388,907	--	--	123,074	25,192,488		Fund borrowings
Utang asuransi dan penjaminan	4,430	--	--	--	--	--	--	--	4,430	Insurance and guarantee payables
Liabilitas asuransi	9,507	--	--	--	--	--	--	--	9,507	Insurance liabilities
Liabilitas lain-lain**	262,782	--	--	--	--	--	--	--	262,782	Other liabilities**
Sub total	2,658,656	16,122,196	2,869,456	10,096,577	4,831,964	1,359,122	1,789,324	39,727,295		Sub total
Maturity gap	5,839,462	(11,265,285)	225,354	(7,405,663)	2,411,618	13,663,539	27,228,351	30,697,376		Maturity gap
		2023								
		Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	Lebih dari 1-3 bulan/ More than 1-3 months	Lebih dari 3-6 bulan/ More than 3-6 months	Lebih dari 6-12 bulan/ More than 6-12 months	Lebih dari 1-3 tahun/ More than 1-3 years	Lebih dari 3-5 tahun/ More than 3-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Total	
Aset Keuangan										Financial Assets
Giro pada Bank Indonesia	553	--	--	--	--	--	--	--	553	Current account with Bank Indonesia
Giro pada bank	108,256	--	--	--	--	--	--	--	108,256	Current accounts with Bank
Penempatan pada Bank	7,414,644	29,886	--	--	--	--	--	--	7,444,530	Placements with Bank
Efek-efek	4,763	151,228	121,013	137,475	1,165,772	146,707	236,065	1,963,023		Securities
Tagihan akseptasi	50,867	55,178	47,839	--	--	--	--	--	153,884	Acceptances receivable
Tagihan derivatif	85	--	--	--	--	--	--	--	85	Derivatives receivable
Pembiayaan dan piutang										Financing and receivables
Modal Kerja	5,109,195	2,019,590	2,720,015	1,219,418	1,766,462	3,385,595	10,392,162	26,612,437		Working Capital
Investasi	397,645	1,968	448,590	236,413	3,360,252	6,653,984	21,351,996	32,450,848		Investment
Konsumsi	38,249	74,618	414	1,058	5,306	21,791	179,452	320,888		Consumption
Piutang asuransi dan penjaminan	75,059	--	--	--	--	--	--	--	75,059	Insurance and guarantee receivables
Aset lain-lain - neto *)	18,143	--	--	--	--	--	--	--	18,143	Other assets *)
Sub total	13,217,459	2,332,468	3,337,871	1,594,364	6,297,792	10,208,077	32,159,675	69,147,706		Sub total
Liabilitas Keuangan										Financial Liabilities
Liabilitas segera	69,132	--	--	--	--	--	--	--	69,132	Current liabilities
Liabilitas Devisa Hasil Ekspor	39,247	81,690	--	--	--	--	--	--	120,937	Foreign exchange export proceeds liabilities
Liabilitas akseptasi	50,867	55,178	47,839	--	--	--	--	--	153,884	Acceptances payable
Liabilitas derivatif	1,477	--	--	--	--	--	--	--	1,477	Derivatives payable
Efek-efek hutang yang diterbitkan	383,114	1,780,316	10,256,829	5,180,551	9,059,382	2,175,065	2,570,839	31,406,096		Debt securities issued
Pinjaman yang diterima	5,272,615	1,616,657	1,478,280	2,303,415	7,795,127	--	111,545	18,577,639		Fund borrowings
Utang asuransi dan penjaminan	23,961	--	--	--	--	--	--	--	23,961	Insurance and guarantee payables
Liabilitas asuransi	6,672	--	--	--	--	--	--	--	6,672	Insurance liabilities
Liabilitas lain-lain**	305,987	--	--	--	--	--	--	--	305,987	Other liabilities**
Sub total	6,153,072	3,533,841	11,782,948	7,483,966	16,854,509	2,175,065	2,682,384	50,665,785		Sub total
Maturity gap	7,064,387	(1,201,373)	(8,445,077)	(5,889,602)	(10,556,717)	8,033,012	29,477,291	18,481,921		Maturity gap

*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan.

**) Liabilitas keuangan dalam "liabilitas lain-lain" terdiri dari bunga yang masih harus dibayar, tantiem dan jasa produksi dan kewajiban kepada penjamin ulang.

34. Liquidity Risk (continued)

Analysis of Assets and Liabilities by Remaining Contractual Maturity based on the Undiscounted Cash flows (continued)

The tables below present the mapping of net financial assets and liabilities undiscounted cash flows in a specific timescale (*maturity bucket*) based on remaining period until maturity.

Lebih dari 1-3 tahun/ More than 1-3 years	Lebih dari 3-5 tahun/ More than 3-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Total	
				Financial Assets
--	--	--	775	Current account with Bank Indonesia
--	--	--	1,217,286	Current accounts with Bank
198,355	164,556	181,742	1,372,419	Placements with Bank
--	--	--	1,476,129	Securities
--	--	--	140,464	Acceptances receivable
				Financing and receivables
1,908,363	5,037,880	13,109,198	34,202,078	Working Capital
5,128,127	9,797,878	15,579,324	31,820,401	Investment
8,737	22,347	147,410	178,903	Consumption
--	--	--	3,192	Insurance and guarantee receivables
--	--	--	--	Reguarantee receivables
--	--	--	670	Reinsurance receivables
--	--	--	12,353	Other assets *)
7,243,582	15,022,661	29,017,674	70,424,670	Sub total
				Financial Liabilities
--	--	--	17,283	Current liabilities
--	--	--	245,116	Foreign exchange export proceeds liabilities
--	--	--	140,464	Acceptances payable
--	--	--	49,939	Derivatives payable
4,831,964	1,359,122	1,666,250	13,805,286	Debt securities issued
--	--	123,074	25,192,488	Fund borrowings
--	--	--	4,430	Insurance and guarantee payables
--	--	--	9,507	Insurance liabilities
--	--	--	262,782	Other liabilities**
4,831,964	1,359,122	1,789,324	39,727,295	Sub total
2,411,618	13,663,539	27,228,351	30,697,376	Maturity gap
Lebih dari 1-3 tahun/ More than 1-3 years	Lebih dari 3-5 tahun/ More than 3-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Total	
				Financial Assets
--	--	--	553	Current account with Bank Indonesia
--	--	--	108,256	Current accounts with Bank
--	--	--	7,444,530	Placements with Bank
1,165,772	146,707	236,065	1,963,023	Securities
--	--	--	153,884	Acceptances receivable
--	--	--	85	Derivatives receivable
				Financing and receivables
1,766,462	3,385,595	10,392,162	26,612,437	Working Capital
3,360,252	6,653,984	21,351,996	32,450,848	Investment
5,306	21,791	179,452	320,888	Consumption
--	--	--	75,059	Insurance and guarantee receivables
--	--	--	18,143	Other assets *)
6,297,792	10,208,077	32,159,675	69,147,706	Sub total
				Financial Liabilities
--	--	--	69,132	Current liabilities
--	--	--	120,937	Foreign exchange export proceeds liabilities
--	--	--	153,884	Acceptances payable
--	--	--	1,477	Derivatives payable
				Debt securities issued
9,059,382	2,175,065	2,570,839	31,406,096	Fund borrowings
7,795,127	--	111,545	18,577,639	Insurance and guarantee payables
--	--	--	23,961	Insurance liabilities
--	--	--	6,672	Other liabilities**
--	--	--	305,987	
6,854,509	2,175,065	2,682,384	50,665,785	Sub total
6,556,717	8,033,012	29,477,291	18,481,921	Maturity gap

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

34. Risiko Likuiditas (lanjutan)

**Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa
Jatuh Tempo Kontraktual berdasarkan
Undiscounted Cash flows (lanjutan)**

2024									
	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	Lebih dari 1-3 bulan/ More than 1-3 months	Lebih dari 3-6 bulan/ More than 3-6 months	Lebih dari 6-12 bulan/ More than 6-12 months	Lebih dari 1-3 tahun/ More than 1-3 years	Lebih dari 3-5 tahun/ More than 3-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Total	
Liabilitas komitmen dan kontinjensi									Commitment and contingent liabilities
Bank garansi	353,831	546,388	1,096,363	3,317,634	1,573,493	1,331,092	151,401	8,370,202	Bank guarantee
Penerbit LC yang tidak dibatalkan	11,414	225,141	28,718	669	232,875	--	--	498,817	Outstanding irrevocable L/C
Total	365,245	771,529	1,125,081	3,318,303	1,806,368	1,331,092	151,401	8,869,019	Total
2023									
	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	Lebih dari 1-3 bulan/ More than 1-3 months	Lebih dari 3-6 bulan/ More than 3-6 months	Lebih dari 6-12 bulan/ More than 6-12 months	Lebih dari 1-3 tahun/ More than 1-3 years	Lebih dari 3-5 tahun/ More than 3-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Total	
Liabilitas komitmen dan kontinjensi									Commitment and contingent liabilities
Bank garansi	795,422	266,963	2,043,428	1,791,794	4,503,820	1,253,214	423,066	11,077,707	Bank guarantee
Penerbit LC yang tidak dibatalkan	5,034	68,550	6319.0	740	45,349	--	--	125,992	Outstanding irrevocable L/C
Total	800,456	335,513	2,049,747	1,792,534	4,549,169	1,253,214	423,066	11,203,699	Total

Untuk aset keuangan, analisis pengelompokan jatuh tempo didasarkan pada sisa periode dari akhir periode pelaporan ke tanggal jatuh tempo kontraktual atau jika lebih awal tanggal perkiraan aset akan direalisasi.

Untuk liabilitas keuangan, analisis jatuh tempo didasarkan pada tanggal yang lebih awal dimana LPEI disyaratkan untuk membayar.

Termasuk di tabel di atas adalah arus kas bunga dan pokok. Sepanjang bunga adalah suku bunga mengambang, jumlah yang tidak didiskonto diperoleh dari kurva suku bunga pada akhir periode pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang didenominasi dengan mata uang asing, jumlah yang tidak didiskonto ditranslasi dengan kurva nilai tukar *forward* yang relevan pada akhir periode pelaporan.

Tabel selanjutnya menyajikan mengenai pemetaan liabilitas komitmen dan kontinjensi dalam skala waktu tertentu (*maturity bucket*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*).

Sebagai upaya LPEI dalam penyelesaian kredit bermasalah, LPEI telah membukukan penambahan cadangan kerugian penurunan nilai yang terefleksi pada Laporan Keuangan tahun 2023. Kerugian yang terjadi sebagai dampak penambahan cadangan kerugian adalah komponen *non-cash* yang tidak berdampak langsung pada likuiditas.

34. Liquidity Risk (continued)

**Analysis of Assets and Liabilities by
Remaining Contractual Maturity based on
the Undiscounted Cash flows (continued)**

For financial assets, the analysis into maturity buckets is based on the remaining period from the end of the reporting period to the contractual maturity date or if earlier the expected date the assets will be realized.

For financial liabilities, the maturity analysis is based on the earliest date on which LPEI may be required to pay.

The tables above include both interest and principal cash flows. To the extent that interest flows are floating rate, the undiscounted amount is derived from interest rate curves at the end of the reporting period. For foreign currency denominated financial instruments, the undiscounted amount is translated by the relevant forward exchange curve at the end of the reporting period.

The following tables present the mapping of commitment and contingent liabilities in a specific timescale (*maturity bucket*) based on remaining maturity.

As LPEI's efforts to resolve bad loans, LPEI has recorded additional reserves for impairment losses which are reflected in the 2023 Financial Report. Losses that occur as a result of additional loss reserves are non-cash components that do not have a direct impact on liquidity.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

35. Risiko Pasar

Manajemen telah memberikan penjelasan bahwa dukungan likuiditas telah diperoleh dari Pemerintah dan Perbankan baik dalam bentuk pinjaman jangka pendek maupun jangka menengah.

Risiko pasar merupakan risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas dan/atau rekening administratif termasuk Transaksi Derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Eksposur risiko pasar pada LPEI hanya pada *banking book* karena LPEI tidak melakukan transaksional pada *trading book*, sedangkan trading hanya dilaksanakan dalam rangka lindung nilai (*hedging*) dan bersifat *natural hedge*.

LPEI telah memiliki sistem aplikasi treasury untuk mengukur risiko pasar (*Opics Plus*) yang merupakan sistem terintegrasi, dan digunakan oleh *front office*, *middle office*, dan *back office* untuk fungsi portofolio *treasury*. Saat ini penggunaan sistem ini belum dioptimalkan karena masih terkendala ketersediaan data dan terbatas pada portofolio *treasury*.

Selain melakukan *monitoring* eksposur risiko instrumen, LPEI juga melakukan monitoring limit risiko pasar dan limit transaksi khusus untuk transaksi *banking book* antara lain limit nominal transaksi *dealer* dan limit *counterpart*. *Monitoring* dilakukan secara harian sehingga mempercepat penyediaan informasi terkini yang mendukung pengambilan keputusan oleh pejabat lini dan manajemen secara tepat waktu.

Termasuk di dalam risiko pasar adalah risiko perubahan harga instrumen keuangan akibat perubahan faktor-faktor pasar, seperti perubahan nilai tukar mata uang dan perubahan suku bunga.

35. Market Risk

Management has explained that liquidity support has been obtained from the Government and Banking in the form of short-term and medium-term loans.

Market risk is risk to the position of assets, liabilities, equity and/or administrative accounts including Derivative Transactions due to changes in overall market conditions. Market risk exposure to LPEI is only in the banking book because LPEI does not make transactions on the trading book, while trading is only carried out in the context of hedging and is a natural hedge.

LPEI has a treasury application system to measure market risk (Opics Plus) which is an integrated system, and is used by front office, middle office, and back office for treasury portfolios functions. Currently the use of this system is yet to be optimized because it is still constrained by data availability and is limited to treasury portfolios.

In addition to monitoring instrument risk exposure, LPEI also monitors market risk limits and transaction limits specifically for banking book transactions, including nominal limits for dealer transactions and counterparty limits. Monitoring is carried out on a daily basis so as to accelerate the provision of up-to-date information that supports decision-making by line officials and management in a timely manner.

Included in the market risk is the risk of the changes of financial instruments price due to the changes in market factors, such as exchange rate and interest rate changes.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

35. Risiko Pasar (lanjutan)

(i) Risiko nilai tukar

Risiko nilai tukar merupakan risiko yang timbul karena adanya gap posisi valuta asing yang dimiliki LPEI yang tercermin dalam Posisi Devisa Neto (PDN) LPEI baik secara keseluruhan ataupun laporan posisi keuangan. Termasuk dalam posisi valuta asing tersebut yaitu posisi *trading book* dan *banking book* dalam rangka pengendalian PDN.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN) didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.05/2022.

PDN untuk laporan posisi keuangan adalah selisih neto jumlah aset dan jumlah liabilitas dalam setiap mata uang asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.

PDN secara keseluruhan adalah penjumlahan nilai absolut dari selisih neto antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan selisih neto dari tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi yang dicatat dalam rekening administratif yang didenominasi dalam setiap mata uang asing, yang dinyatakan dalam Rupiah.

Berdasarkan peraturan tersebut, LPEI wajib memelihara rasio PDN secara keseluruhan dan laporan posisi keuangan setinggi-tingginya sebesar 20% dari modal.

35. Market Risk (continued)

(i) Currency risk

Exchange rate risk is the risk of foreign exchange positions gap held by LPEI and reflected in Net Open Position (NOP) either on or off balance sheet. Included in the NOP is trading book and banking book.

As of December 31, 2024 and 2023, the calculation of Net Open Position (NOP) is based on the Regulation of the Financial Services Authority No. 9/POJK.05/2022.

The NOP for the statement of financial position is the net difference of total assets and total liabilities in each foreign currency which are stated in Rupiah.

The overall NOP is the total of the absolute values of the net difference between the assets and liabilities denominated in each foreign currency and the net difference of the receivables and payables of both commitments and contingencies recorded in the administrative accounts denominated in each foreign currency which are stated in Rupiah.

Based on the regulation, LPEI has to maintain the overall NOP at a maximum of 20% of the total capital.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

35. Risiko Pasar (lanjutan)

(i) Risiko nilai tukar (lanjutan)

Tabel berikut ini menunjukkan rincian sensitivitas perubahan eksposur LPEI atas perubahan nilai tukar mata uang asing. Analisis sensitivitas hanya termasuk pos moneter yang didenominasi dalam mata uang asing dan menyesuaikan translasinya pada akhir periode atas perubahan nilai tukar mata uang asing yang relevan. Persentase kenaikan dan penurunan menunjukkan penilaian LPEI atas perubahan yang mungkin terjadi pada nilai tukar mata uang asing setelah memperhatikan kondisi ekonomi saat ini.

35. Market Risk (continued)

(i) Currency risk (continued)

The following tables detail the sensitivity of LPEI's exposure to changes in foreign exchange rate. The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency denominated monetary items and adjusts their translation at the period end for a change in the relevant foreign currency rates. The percentage increase or decrease represents LPEI's assesment of the reasonably possible change in the relevant foreign exchange rates after considering the current economic conditions.

	2024										
	USD		EUR		JPY		SGD		MYR		
	3.38%	-3.38%	4.88%	-4.88%	7.43%	-7.43%	4.88%	-4.88%	3.82%	-3.82%	
Aset Keuangan											Financial Assets
											<i>Current accounts</i>
Giro pada bank	38,836	(38,836)	176	(176)	11	(11)	10	(10)	--	--	<i>with banks</i>
Penempatan pada bank	1,902	(1,902)	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>Placements with banks</i>
Efek-efek	8,597	(8,597)	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>Securities</i>
Tagihan akseptasi	4,655	(4,655)	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>Acceptances receivable</i>
Tagihan derivatif	1,709	(1,709)	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>Derivatives receivable</i>
Pembiayaan dan piutang	716,911	(716,911)	--	--	--	--	--	--	2,505	(2,505)	<i>Financing and receivables</i>
Piutang asuransi dan penjaminan	107	(107)	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>Insurance and guarantee receivables</i>
Aset reasuransi	132	(132)	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>Reinsurance assets</i>
Piutang reasuransi	22	(22)	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>Reinsurance receivables</i>
Piutang pembiayaan garansi	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>Guarantee financing receivables</i>
Aset lain-lain - bersih *)	531	(531)	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>Other assets - net *)</i>
Total - neto	773,402	(773,402)	176	(176)	11	(11)	10	(10)	2,505	(2,505)	Total - net
Liabilitas Keuangan											Financial Liabilities
<i>Liabilitas devisa</i>											<i>Foreign exchange export</i>
hasil ekspor	(8,278)	8,278	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>proceeds liabilities</i>
Liabilitas akseptasi	(4,655)	4,655	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>Acceptances payable</i>
Efek-efek utang	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>Debt securities</i>
yang diterbitkan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>issued</i>
Pinjaman yang diterima	(482,006)	482,006	(2,359)	2,359	--	--	--	--	--	--	<i>Fund borrowings</i>
Liabilitas asuransi	(316)	316	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>Insurance liabilities</i>
Liabilitas lain-lain	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
- bersih **)	(3,881)	3,881	(6)	6	--	--	--	--	--	--	<i>Other liabilities- net **)</i>
Total - neto	(499,136)	499,136	(2,365)	2,365	--	--	--	--	--	--	Total - net

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

35. Risiko Pasar (lanjutan)

(i) Risiko nilai tukar (lanjutan)

	2023								
	USD		EUR		JPY		SGD		
	0.63%	-0.63%	1.97%	-1.97%	5.82%	-5.82%	2.13%	-2.13%	
Aset Keuangan									Financial Assets
									Current accounts
Giro pada bank	348	(348)	49	(49)	9	(9)	5	(5)	with banks
Efek-efek	1,576	(1,576)	--	--	--	--	--	--	Securities
Tagihan akseptasi	897	(897)	--	--	--	--	--	--	Acceptances receivable
Tagihan derivatif	--	--	--	--	--	--	--	--	Derivatives receivable
									Financing and
Pembiayaan dan piutang	164,372	(164,372)	--	--	--	--	--	--	receivables
Piutang asuransi	46	(46)	--	--	--	--	--	--	Insurance receivables
Aset reasuransi	16	(16)	--	--	--	--	--	--	Reinsurance assets
Piutang pembiayaan garansi	--	--	--	--	--	--	--	--	Guarantee financing receivables
Aset lain-lain - bersih *)	13	(13)	--	--	--	--	--	--	Other assets - net *)
Total - neto	167,268	(167,268)	49	(49)	9	(9)	5	(5)	Total - net
Liabilitas Keuangan									Financial Liabilities
Liabilitas devisa									Foreign exchange export
hasil ekspor	(759)	759	--	--	--	--	--	--	proceeds liabilities
Liabilitas akseptasi	(897)	897	--	--	--	--	--	--	Acceptances payable
Liabilitas derivatif	--	--	--	--	--	--	--	--	Derivatives payable
Efek-efek utang									Debt securities
yang diterbitkan	(48,739)	48,739	--	--	--	--	--	--	issued
Pinjaman yang diterima	(102,859)	102,859	(1,015)	1,015	--	--	--	--	Fund borrowings
Liabilitas asuransi	(34)	34	--	--	--	--	--	--	Insurance liabilities
Liabilitas lain-lain - bersih **)	(1,862)	1,862	(19)	19	(7)	7	--	--	Other liabilities-net **)
Total - neto	(155,150)	155,150	(1,034)	1,034	(7)	7	--	--	Total - net

*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan.

**) Liabilitas keuangan dalam "liabilitas lain-lain" terdiri dari bunga yang masih harus dibayar, tantiem dan jasa produksi dan kewajiban kepada penjamin ulang.

*) Financial assets under "other assets" consist of accrued interest receivables and refundable deposits.

**) Financial liabilities under "other liabilities" consist of accrued interest payable, tantiem and accrued bonus and liability to reguarantor.

(ii) Risiko suku bunga

LPEI terekspos risiko tingkat suku bunga karena meminjamkan dananya atas dasar bunga tetap dan mengambang. LPEI menerapkan kebijakan pengelolaan aset dan liabilitas untuk memastikan eksposur atas fluktuasi suku bunga dalam batasan yang dapat diterima.

Tabel berikut ini merangkum perbedaan sensitivitas tingkat suku bunga LPEI. Tabel menunjukkan penyesuaian nilai kontraktual untuk setiap kategori aset liabilitas dan item rekening administratif pada pembukuan LPEI. Posisi negatif gap (*short position*) muncul ketika liabilitas menyesuaikan nilai lebih cepat atau pada proporsi yang lebih besar daripada aset sepanjang periode dan cenderung menghasilkan pendapatan bunga neto di dalam lingkungan tingkat suku bunga menurun. Posisi positif gap (*long position*) muncul ketika aset menyesuaikan nilai lebih cepat atau berada pada proporsi yang lebih besar daripada liabilitas sepanjang periode dan cenderung menghasilkan pendapatan bunga neto di dalam lingkungan tingkat suku bunga meningkat.

(ii) Interest rate risk

LPEI is exposed to interest rate risk because it borrows funds at both fixed and floating interest rates. LPEI follows a prudent policy on managing its assets and liabilities to ensure that exposure to fluctuations in interest rates are kept within acceptable limits.

The following tables summarize the interest rate sensitivity gap of LPEI. The tables show the contractual repricing for each category of asset liability and administrative accounts items in LPEI's book. A liability (or negative) gap position exists when liabilities reprice more quickly or in greater proportion than assets during a given period and tends to benefit net interest income in a declining interest rate environment. An asset (or positive) gap position exists when assets reprice more quickly or in greater proportion than liabilities during a given period and tends to benefit net interest income in a rising interest rate environment.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

35. Risiko Pasar (lanjutan)

(ii) Risiko suku bunga (lanjutan)

Syarat penyesuaian nilai kontraktual tidak merefleksikan dampak potensial dari pembayaran kembali awal atau penarikan. Posisi dapat tidak merepresentasikan posisi pada periode tanggal laporan posisi keuangan. Perubahan besar pada posisi dapat dibuat saat terjadi perubahan potensi pasar. Sebagai tambahan, variasi signifikan pada sensitivitas tingkat suku bunga dapat muncul pada periode penyesuaian nilai dan di antara mata uang dimana LPEI memiliki posisi tingkat suku bunga.

35. Market Risk (continued)

(ii) Interest rate risk (continued)

Contractual repricing terms do not reflect the potential impact of early repayment or withdrawal. Positions may not be reflective of those in subsequent periods. changes in positions can be made promptly as market outlooks change. In addition, significant variations in interest rate sensitivity may exist within the repricing periods presented and among the currencies in which LPEI has interest rate positions.

2024								
Suku bunga mengambang/Floating interest rate								
	Tidak lebih dari 3 bulan/ Less than 3 months	Lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ More than 3 months but less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Total		
Aset Keuangan							Financial Assets	
Giro pada Bank Indonesia	--	--	--	--	775	775	Current account with Bank Indonesia	
Giro pada bank	--	--	--	1,217,286	--	1,217,286	Current accounts with banks	
Penempatan pada bank	--	--	--	1,371,751	--	1,371,751	Placements with banks	
Efek-efek	--	--	--	1,173,253	--	1,173,253	Securities	
Tagihan derivatif	--	--	--	--	50,674	50,674	Derivatives receivable	
Pembiayaan dan piutang							Financing and receivables	
Modal kerja	9,433,069	2,934,797	6,007,461	--	--	18,375,327	Working capital	
Investasi	--	902,791	19,574,686	--	--	20,477,477	Investment	
Konsumsi	--	--	--	114,765	8,243	123,008	Consumption	
Piutang asuransi dan penjaminan	--	--	--	--	3,192	3,192	Insurance and guarantee receivables	
Aset reasuransi	--	--	--	--	4,056	4,056	Reinsurance assets	
Tagihan akseptasi	--	--	--	--	138,126	138,126	Acceptances receivable	
Aset lain-lain *)	--	--	--	--	12,353	12,353	Other assets *)	
Total aset keuangan	9,433,069	3,837,588	25,582,147	3,877,055	217,419	42,947,278	Total financial assets	
Liabilitas Keuangan							Financial Liabilities	
Liabilitas segera	--	--	--	--	17,283	17,283	Current liabilities	
Liabilitas Devisa Hasil Ekspor	--	--	--	--	245,116	245,116	Foreign exchange export proceeds liabilities	
Liabilitas akseptasi	--	--	--	--	138,647	138,647	Acceptances payable	
Liabilitas derivatif	--	--	--	--	49,939	49,939	Derivatives payable	
Efek-efek utang yang diterbitkan	--	--	--	8,140,064	--	8,140,064	Debt securities issued	
Pinjaman yang diterima	2,000,000	7,215,636	--	15,647,924	--	24,863,560	Fund borrowings	
Utang asuransi	--	--	--	--	2,692	2,692	Insurance payable	
Utang penjaminan	--	--	--	--	1,738	1,738	Guarantee payable	
Liabilitas Asuransi	--	--	--	--	9,507	9,507	Insurance liabilities	
Liabilitas lain-lain **)	--	--	--	--	262,782	262,782	Other liabilities**)	
Total liabilitas keuangan	2,000,000	7,215,636	--	23,787,988	727,704	33,731,328	Total financial liabilities	
Interest Gap	7,433,069	(3,378,048)	25,582,147	(19,910,933)	(510,285)	9,215,950	Interest Gap	

35. Risiko Pasar (lanjutan)

(ii) Risiko suku bunga (lanjutan)

2023						
Suku bunga mengambang/Floating interest rate						
	Tidak lebih dari 3 bulan/ Less than 3 months	Lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ More than 3 months but less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Total
Aset Keuangan						
Giro pada						
Bank Indonesia	--	--	--	--	553	553
Giro pada bank	599	--	--	107,657	--	108,256
Penempatan pada bank	--	--	--	7,414,248	--	7,414,248
Efek-efek	--	--	--	1,433,923	--	1,433,923
Tagihan derivatif	--	--	--	--	85	85
Pembiayaan dan piutang						
Modal kerja	6,886,068	3,894,882	5,464,280	--	--	16,245,230
Investasi	28,112	340,328	24,450,616	--	--	24,819,056
Konsumsi	--	--	--	118,747	6,181	124,928
Piutang pembiayaan garansi	--	--	--	--	--	--
Piutang asuransi dan penjaminan	--	--	--	--	75,059	75,059
Tagihan akseptasi	--	--	--	--	153,230	153,230
Aset lain-lain *)	--	--	--	--	18,143	18,143
Total aset keuangan	6,914,779	4,235,210	29,914,896	9,074,575	253,251	50,392,711
Liabilitas Keuangan						
Liabilitas segera	--	--	--	--	69,132	69,132
Liabilitas Devisa Hasil Ekspor	--	--	--	--	120,928	120,928
Liabilitas akseptasi	--	--	--	--	153,852	153,852
Liabilitas derivatif	--	--	--	--	1,477	1,477
Efek-efek utang yang diterbitkan	--	--	--	21,981,313	--	21,981,313
Pinjaman yang diterima	6,889,755	3,771,707	7,691,481	--	--	18,352,943
Utang asuransi	--	--	--	--	5,534	5,534
Utang penjaminan	--	--	--	--	18,427	18,427
Liabilitas lain-lain **)	--	--	--	--	305,987	305,987
Total liabilitas keuangan	6,889,755	3,771,707	7,691,481	21,981,313	675,337	41,009,593
Interest Gap	25,024	463,503	22,223,415	(12,906,738)	(422,086)	9,383,118

*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan.

**) Liabilitas keuangan dalam "liabilitas lain-lain" terdiri dari bunga yang masih harus dibayar, tantiem dan jasa produksi dan kewajiban kepada penjamin ulang.

Tabel di bawah ini menunjukkan suku bunga efektif dari mata uang utama untuk instrumen keuangan moneter yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

2024				
	Suku Bunga Efektif/ Effective Interest Rate		Suku Bunga Kontraktual/ Contractual Interest Rate	
	Mata uang asing/ Foreign Currency		Mata uang asing/ Foreign Currency	
	Rupiah %	Rupiah %	Rupiah %	Rupiah %
ASET				
Giro pada bank	0.00 - 3.00	0.00 - 4.32	0.00 - 3.00	0.00 - 4.32
Penempatan pada bank	5.25 - 7.15	5.25	5.25 - 7.15	5.25
Efek-efek	5.50 - 8.38	3.40 - 4.13	5.50 - 8.38	3.40 - 4.13
Pembiayaan dan piutang	0.00 - 14.00	0.00 - 10.05	0.00 - 14.00	0.00 - 10.05
LIABILITAS				
Efek-efek utang yang diterbitkan	6.90 - 9.80	0.00 - 0.00	6.90 - 9.80	0.00 - 0.00
Pinjaman yang diterima	5.30 - 7.05	5.05 - 5.10	5.30 - 7.05	5.05 - 5.10

35. Market Risk (continued)

(ii) Interest rate risk (continued)

Financial Assets
Current account with Bank Indonesia
Current accounts with banks
Placements with banks
Securities
Derivatives receivable
Financing and receivables
Working capital
Investment
Consumption
Guarantee financing receivables
Insurance and guarantee receivables
Acceptances receivable
Other assets *)
Total financial assets
Financial Liabilities
Current liabilities
Foreign exchange export proceeds liabilities
Acceptances payable
Derivatives payable
Debt securities issued
Fund borrowings
Insurance payable
Guarantee payable
Other liabilities **)
Total financial liabilities
Interest Gap

*) Financial assets under "other assets" consist of accrued interest receivables and refundable deposits.

**) Financial liabilities under "other liabilities" consist of accrued interest payable, tantiem and accrued bonus and liability to reguarantor.

The tables below summarize the effective interest rate by major currencies for monetary financial instruments not carried at fair value through profit or loss.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

35. Risiko Pasar (lanjutan)

(ii) Risiko suku bunga (lanjutan)

	2023			
	Suku Bunga Efektif/ Effective Interest Rate		Suku Bunga Kontraktual/ Contractual Interest Rate	
	Rupiah %	Mata uang asing/ Foreign Currency %	Rupiah %	Mata uang asing/ Foreign Currency %
ASET				
Giro pada bank	0.00 - 0.00	0.00 - 0.00	0.00 - 0.00	0.00 - 0.00
Penempatan pada bank	5.70 - 7.60	5.32	5.70 - 7.60	5.32
Efek-efek	5.50 - 8.38	3.40 - 4.13	5.50 - 8.38	3.40 - 4.13
Pembiayaan dan piutang	0.00 - 14.00	0.00 - 11.09	0.00 - 14.00	0.00 - 11.09
LIABILITAS				
Efek-efek utang yang diterbitkan	6.90 - 9.80	3.88	6.90 - 9.80	3.88
Pinjaman yang diterima	4.75 - 5.35	1.25 - 6.58	4.75 - 5.35	1.25 - 6.58

Tabel selanjutnya menunjukkan rincian sensitivitas laba dan ekuitas LPEI terhadap perubahan tingkat suku bunga. Analisis disusun dengan menggunakan asumsi atas saldo instrumen keuangan dengan bunga mengambang pada tanggal pelaporan telah beredar sepanjang tahun, dengan memperhatikan pergerakan aktual atas pokok selama tahun berjalan. Basis poin kenaikan dan penurunan menunjukkan penilaian manajemen atas perubahan yang mungkin terjadi atas suku bunga yang relevan setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.

Tingkat sensitivitas yang digunakan untuk menganalisis kemungkinan perubahan suku bunga yang berdampak pada keuntungan dan kerugian portofolio banking book. Pada analisa sensitivitas menggunakan asumsi perubahan suku bunga untuk *portfolio banking book* dengan IDR+/-62bp, USD+/-136bp, EUR +/-146bp, JPY +/-102bp, MYR +/-69bp dan SGD +/-91bp pada tanggal 31 Desember 2024 dan IDR+50bp, USD+/-117bp, EUR +/-147bp, JPY +/-45bp dan SGD +/-88bp pada tanggal 31 Desember 2023.

35. Market Risk (continued)

(ii) Interest rate risk (continued)

The following tables detail the sensitivity of LPEI's profit and equity to changes in interest rate. The analysis is prepared assuming the amount of floating rate financial instrument outstanding at the reporting date was outstanding for the whole year, taking into account actual principal movements during the year. The basis point increase and decrease represents the management's assesment of the reasonably possible change in the relevant interest rates after considering the current economic conditions.

The level of sensitivity that is used to analyze possible changes in interest rates which affect the profit and loss portfolio of banking book. Sensitivity analysis using assumptions of interest rates changes for banking book portfolio with base IDR+/-62bp, USD+/-136bp, EUR +/-146bp, JPY +/-102bp, MYR +/-69bp and SGD +/-91bp as of December 31, 2024 and IDR+50bp, USD+/-117bp, EUR +/-147bp, JPY +/-45bp and SGD +/-88bp as of December 31, 2023.

	2024							
	Efek pada laba rugi/ Impact to profit or loss				Efek pada laba rugi komprehensif/ Impact to statement on profit or loss and other comprehensive income			
	IDR	USD	Lain-lain/Others		IDR	USD	Lain-lain/Others	
	+62bp	-62bp	+136bp	-136bp	+62bp	-62bp	+136bp	-136bp
Aset Keuangan								
Penempatan pada bank	8,350	(8,350)	33,405	(33,405)	80	(80)	--	--
Efek-efek	--	--	--	--	--	--	70,203	111,255
Pembiayaan dan piutang	229,328	(229,328)	281,995	(281,995)	340	--	--	--
Neto	237,678	(237,678)	315,400	(315,400)	420	(80)	70,203	111,255
							(1,816,596)	2,154,803

Financial Assets
Placements with banks
Securities
Financing and receivables
Net

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

35. Risiko Pasar (lanjutan)

(ii) Risiko suku bunga (lanjutan)

	2023									
	Efek pada laba rugi/ Impact to profit or loss						Efek pada laba rugi komprehensif/ Impact to statement on profit or loss and other comprehensive income			
	IDR		USD		Lain-lain/Others		IDR		USD	
	+50bp	-50bp	+117bp	-117bp			+50bp	-50bp	+117bp	-117bp
Aset Keuangan										
Penempatan										
pada bank	28,664	(28,664)	12,410	(12,410)	70	(70)	--	--	--	--
Efek-efek	--	--	--	--	--	--	(22,345)	23,032	(1,694,660)	1,951,743
Pembiayaan dan										
piutang	223,932	(223,932)	320,597	(320,597)	--	--	--	--	--	--
Neto	252,596	(252,596)	333,007	(333,007)	70	(70)	(22,345)	23,032	(1,694,660)	1,951,743

Financial Assets
Placements
with banks
Securities
Financing and
receivables
Net

36. Risiko Operasional

Identifikasi dan analisa risiko operasional dilakukan terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko operasional yang melekat (*inherent*) pada seluruh aktivitas fungsional, produk, proses dan sistem informasi, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi dan permodalan LPEI. Kerangka kerja identifikasi risiko operasional berdasarkan faktor-faktor penyebab (*causes*), kejadian (*event*) dan akibat (*impact*).

Secara rutin telah dilakukan proses identifikasi Risiko Operasional secara umum melalui penilaian profil risiko triwulanan. Telah dilakukan pula pengkinian *risk register* yang telah mengacu pada struktur organisasi terbaru, dan dilakukan identifikasi risiko-risiko lain pada unit kerja secara berkala.

Proses pengukuran risiko operasional selain dilakukan secara manual dan telah mulai dilakukan *Risk Control and Self Assessment* (RCSA) sehingga lebih persisi dalam mengukur risiko operasional pada masing-masing divisi dan proses operasional. Pengukuran RCSA dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Saat ini LPEI mulai melakukan pengukuran RCSA secara kualitatif. Kedepannya RCSA akan dilakukan secara kuantitatif untuk mengukur seberapa besar dampak dan kemungkinan kejadian operasional sehingga dapat dibangun mitigasi yang lebih baik dan tepat. Untuk kemudian dilakukan mitigasi agar dapat menurunkan risiko operasional lembaga melalui peningkatan tata kelola atas seluruh proses transaksi yang berjalan.

35. Market Risk (continued)

(ii) Interest rate risk (continued)

36. Operational Risk

Operational risk is identified and analyzed through risk factor inherent in all business activities, products, process, and information system, either external or internal factor, that might cause negative impact on objectives and equity of LPEI. The framework of operational risk identification is based on cause, event, and impact.

Identification of Operational Risk in general has been carried out through the quarterly assessment of risk profile. Risk register referring to the latest organizational structure has also been updated, along with the identification of other risks in each working unit periodically.

The process of measuring operational risk is not only done manually and has begun to carry out Risk Control and Self Assessment (RCSA) so that it is more precise in measuring operational risks in each division and operational process. RCSA measurements are carried out qualitatively and quantitatively. Currently, LPEI has begun to measure RCSA qualitatively. In the future, RCSA will be carried out quantitatively to measure how much impact and possibility of operational events so that better and appropriate mitigation can be built. Mitigation is then carried out in order to reduce the operational risk of the institution through improved governance of the entire transaction process.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

37. Risiko Asuransi

Risiko utama yang dihadapi LPEI dalam kontrak asuransi adalah klaim aktual dan pembayaran manfaat atau waktu terkait dengan hal tersebut, berbeda dengan yang diperkirakan. Hal ini dipengaruhi oleh frekuensi klaim, besarnya klaim, manfaat klaim yang dibayarkan dan perkembangan selanjutnya atas klaim jangka panjang. Oleh karena itu, tujuan LPEI adalah untuk memastikan terdapat cadangan yang cukup untuk menyelesaikan liabilitas tersebut.

Aktivitas pengelolaan risiko asuransi LPEI dilakukan pada tingkat transaksi dan portofolio. Pada tingkatan transaksi, LPEI membuat batasan risiko atas jumlah yang diasuransikan. Pada tingkatan portofolio, LPEI memastikan bahwa strategi besarnya asuransi dalam sektor ekonomi/industri merefleksikan seluruh struktur ekonomi/industri nasional. Sebagai tambahan, LPEI juga mengalihkan risiko asuransi kepada pihak lain melalui reasuransi atau koasuransi.

38. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari semua aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal ini.

37. Insurance Risk

The principal risk that LPEI faces under insurance contracts is that the actual claims and benefit payments or the timing thereof, differ from expectations. This is influenced by the frequency of claims, severity of claims, actual benefits paid and subsequent development of long-term claims. Therefore, LPEI's objective is to ensure that sufficient reserves are available to cover these liabilities.

LPEI's insurance risk management activities are carried out on a transaction and portfolio level. At the transaction level, LPEI establishes risk limits on the the insured amount. At the portfolio level, LPEI ensures that insurance coverage strategy in the economic/industry sector reflects the overall national economic/ industry structure. Additionally, LPEI also transfers insurance risk to other parties through the use of reinsurance or coinsurance.

38. Fair Value of Financial Assets and Liabilities

The tables below summarize the comparison between the carrying amounts and fair values of all financial assets and liabilities. The fair values disclosed are based on relevant information available and not updated to reflect changes in market conditions which have occurred after this date.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**38. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan
(lanjutan)**

**38. Fair Value of Financial Assets and
Liabilities (continued)**

	2024		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset Keuangan			Financial Assets
Giro pada Bank Indonesia	775	775	Current account with Bank Indonesia
Giro pada bank	1,217,286	1,217,286	Current accounts with banks
Penempatan pada bank	1,371,751	1,371,751	Placements with banks
Efek-efek	1,173,253	1,173,253	Securities
Tagihan akseptasi	138,126	138,126	Acceptances receivable
Tagihan derivatif	50,674	50,674	Derivatives receivable
Pembiayaan dan piutang			Financing and receivables
Modal kerja	18,375,328	18,375,328	Working capital
Investasi	20,477,477	20,477,477	Investment
Konsumsi	123,007	123,007	Consumption
Aset Ijarah	68,808	68,808	Ijarah assets
Piutang asuransi dan penjaminan	3,192	3,192	Insurance and guarantee receivables
Piutang reasuransi	670	670	Reinsurance receivables
Aset lain-lain*)	12,353	12,353	Other assets*)
	43,012,700	43,012,700	
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Liabilitas segera	17,283	17,283	Current liabilities
			Foreign exchange export
Liabilitas Devisa Hasil Ekspor	245,116	245,116	proceeds liabilities
Liabilitas akseptasi	138,647	138,647	Acceptances payable
Efek-efek utang yang diterbitkan	8,140,064	8,140,064	Debt securities issued
Liabilitas derivatif	49,939	49,939	Derivatives payables
Pinjaman yang diterima	24,863,560	24,863,560	Fund borrowings
Utang asuransi	2,692	2,692	Insurance payable
Utang penjaminan	1,738	1,738	Guarantee payable
Liabilitas Asuransi	9,507	9,507	Insurance liabilities
Liabilitas lain-lain**)	262,782	262,782	Other liabilities**)
	33,731,328	33,731,328	

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**38. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan
(lanjutan)**

	2023	
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value
Aset Keuangan		
Giro pada Bank Indonesia	553	553
Giro pada bank	108,256	108,256
Penempatan pada bank	7,414,248	7,414,248
Efek-efek	1,433,923	1,433,923
Tagihan akseptasi	153,230	153,230
Tagihan derivatif	85	85
Pembiayaan dan piutang		
Modal kerja	16,245,230	16,245,230
Investasi	24,819,056	24,819,056
Konsumsi	124,928	124,928
Piutang asuransi	75,059	75,059
Aset lain-lain*)	18,143	18,143
	50,392,711	50,392,711
Liabilitas Keuangan		
Liabilitas segera	69,131	69,131
Liabilitas Devisa Hasil Ekspor	120,928	120,928
Liabilitas akseptasi	153,852	153,852
Efek-efek utang yang diterbitkan	21,981,313	21,981,313
Liabilitas derivatif	1,477	1,477
Pinjaman yang diterima	18,352,943	18,352,943
Utang asuransi	5,534	5,534
Utang penjaminan	18,427	18,427
Liabilitas lain-lain**)	305,987	305,987
	41,009,592	41,009,592

*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan.

**) Liabilitas keuangan dalam "liabilitas lain-lain" terdiri dari bunga yang masih harus dibayar, tantiem dan jasa produksi dan kewajiban kepada penjamin ulang.

Metode dan asumsi yang digunakan oleh LPEI dalam mengestimasi nilai wajar dari instrumen keuangan adalah sebagai berikut:

- (i) Nilai tercatat dari giro pada Bank Indonesia, giro pada bank, penempatan pada bank dengan suku bunga tetap, kas, piutang pembiayaan garansi, tagihan dan liabilitas akseptasi, piutang asuransi, aset reasuransi, utang asuransi, utang penjaminan, liabilitas asuransi dan aset lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar karena sisa jatuh tempo di bawah satu tahun.

38. Fair Value of Financial Assets and Liabilities (continued)

Financial Assets
Current account with Bank Indonesia
Current accounts with banks
Placements with banks
Securities
Acceptances receivable
Derivatives receivable
Financing and receivables
Working capital
Investment
Consumption
Insurance receivables
Other assets*)
Financial Liabilities
Current liabilities
Foreign exchange export
proceeds liabilities
Acceptances payable
Debt securities issued
Derivatives payables
Fund borrowings
Insurance payable
Guarantee payable
Other liabilities**)

*) Financial assets under "other assets" consist of accrued interest receivables and refundable deposits.

**) Financial liabilities under "other liabilities" consist of accrued interest payable, tantiem and accrued bonus and liability to reguarantor.

The methods and assumptions used by LPEI in estimating the fair value of the financial instruments are as follows:

- (i) The carrying value of fixed rate current accounts with Bank Indonesia, current accounts with banks, fixed rates placements with banks, cash, guarantee financing receivable, acceptances receivables and payable, insurances receivable, reinsurance assets, insurances payable, guarantee payable, insurance liabilities and other assets were the reasonable approximation of its fair values since the maturity is below one year.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**38. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan
(lanjutan)**

- (ii) Pembiayaan dan piutang LPEI secara umum terdiri dari pembiayaan dan piutang yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan suku bunga tetap. Pembiayaan dan piutang yang diberikan dinyatakan berdasarkan jumlah nilai tercatat. Nilai wajar dari pembiayaan dan piutang yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh LPEI. Perkiraan arus kas ini didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pasar untuk menentukan nilai wajar.
- (iii) Nilai wajar atas instrumen derivatif yang didapatkan dari teknik penilaian dengan menggunakan masukan yang dapat diamati di pasar terutama adalah suku bunga dan nilai tukar mata uang asing.
- (iv) Estimasi nilai wajar liabilitas segera adalah sebesar jumlah yang harus dibayarkan kembali sewaktu-waktu.
- (v) Nilai wajar untuk efek-efek ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (broker)/pedagang efek (*dealer*). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa atau dinilai dengan menggunakan metode penilaian internal.
- (vi) Nilai wajar agregat untuk efek-efek utang yang diterbitkan dan pinjaman yang diterima dengan tingkat bunga tetap didasarkan pada arus kas diskonto model yang menggunakan kurva *yield* terkini yang sesuai dengan sisa periode jatuh temponya. Untuk efek-efek utang yang diterbitkan dan pinjaman yang diterima dengan suku bunga mengambang nilai tercatat mendekati nilai wajarnya.

LPEI menggunakan hierarki berikut untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

- (i) Tingkat 1: nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga pasar aktif (*unadjusted*) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang identik;

38. Fair Value of Financial Assets and Liabilities (continued)

- (ii) Financing and receivables of LPEI generally consists of financing and receivables granted at floating rate and fixed rate. Financing and receivables granted are stated at carrying amount. The fair value of financing and credit extended show discounted value of the estimated future cash flows expected to be received by LPEI. These discounted cash flows use market rates to determine fair value.
- (iii) The fair values of derivative instruments are obtained from valuation techniques by using inputs that can be observed in the market such as interest rate and foreign currency exchange rate.
- (iv) The estimated fair values of current liabilities are the amounts repayable on demand.
- (v) The fair values of securities are based on the market prices (broker)/dealer price quotations. When this information is not available, the fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit, maturity and yield characteristics or using internal valuation model.
- (vi) The aggregate fair values for debt securities issued and fund borrowings with fixed interest rate are based on discounted cash flow model using current yield curve appropriate for the remaining term to maturity. For debt securities issued and fund borrowings with floating interest rate the carrying value approximates its fair value.

LPEI adopts the following hierarchy for determining and disclosing the fair value of financial instruments:

- (i) Level 1: fair values derived from quoted prices (*unadjusted*) in active markets for identical assets or liabilities;

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**38. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan
(lanjutan)**

- (ii) Tingkat 2: pengukuran nilai wajar diperoleh dari input selain dari kuotasi harga pasar yang termasuk dalam Tingkat yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (seperti harga) maupun tidak langsung (diperoleh dari harga);
- (iii) Tingkat 3: pengukuran nilai wajar diperoleh dari teknik valuasi yang di dalamnya terdapat input untuk aset dan liabilitas yang tidak didasarkan pada data yang dapat diobservasi di pasar (input yang tidak dapat diobservasi).

Tabel berikut menunjukkan suatu analisa instrumen keuangan yang dicatat pada nilai wajar berdasarkan tingkatan hierarki:

	2024		
	Tingkat/ Level 1	Tingkat/ Level 2	Tingkat/ Level 3
<u>Aset yang diukur pada nilai wajar</u>			
Tersedia untuk dijual			
Efek-efek	1,173,253	--	--
Aset keuangan pada FVTPL			
Tagihan derivatif	--	50,674	--
Total	1,173,253	50,674	--

	2023		
	Tingkat/ Level 1	Tingkat/ Level 2	Tingkat/ Level 3
<u>Aset yang diukur pada nilai wajar</u>			
Tersedia untuk dijual			
Efek-efek	1,433,923	--	--
Aset keuangan pada FVTPL			
Tagihan derivatif	--	85	--
Total	1,433,923	85	--

- *) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masih akan diterima, dan uang jaminan.
- **) Liabilitas keuangan dalam "liabilitas lain-lain" terdiri dari bunga yang masih harus dibayar, tantiem dan jasa produksi dan kewajiban kepada penjamin ulang.

Tidak terdapat perpindahan level untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023.

38. Fair Value of Financial Assets and Liabilities (continued)

- (ii) Level 2: fair value measurements derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices);
- (iii) Level 3: fair value measurements derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

The following table shows an analysis of financial instruments recorded at fair value by level of the hierarchy:

<u>Assets measured at fair value</u>
Available-for-sale
Securities
Financial assets at FVTPL
Derivatives receivable
Total

<u>Assets measured at fair value</u>
Available-for-sale
Securities
Financial assets at FVTPL
Derivatives receivable
Total

- *) Financial assets under "other assets" consist of accrued interest receivables and refundable deposits.
- **) Financial liabilities under "other liabilities" consist of accrued interest payable, tantiem and accrued bonus and liability to guarantor.

There were no transfers between levels for the years ended December 31, 2024 and 2023.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

39. Informasi Mengenai Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan normal usaha, LPEI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

39. Information of Transaction With Related Parties

In the normal course of business, LPEI enters into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder. All transactions with related parties have met the terms and conditions agreed by the parties.

Pihak berelasi/Related parties	Sifat dari hubungan/Nature of relationship	Sifat dari transaksi/Nature of transactions
1. Personel manajemen kunci/ <i>Key management personnel</i>	Dewan direktur, direktur pelaksana, komite audit, dewan pengawas syariah dan kepala divisi/ <i>Board of directors, managing directors, audit committee, sharia supervisory board and head of divisions</i>	Pembiayaan dan piutang dan penyisihan imbalan kerja/ <i>Financing and receivables, provision for employee benefits</i>
2. Kementerian Keuangan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Government of the Republic Indonesia Through the Ministry of Finance</i>	Pemilik/ <i>Owner</i>	Efek-efek dan pinjaman yang diterima/ <i>Securities and fund borrowings</i>
3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Giro pada bank dan penempatan pada bank <i>/Current account with banks and placements with banks</i>
4. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Giro pada bank, penempatan pada bank dan efek <i>/Current account with banks, placements with banks and securities</i>
5. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Giro pada bank, penempatan pada bank dan pinjaman yang diterima/ <i>Current account with bank placements with banks and fund borrowings</i>
6. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Giro pada bank, Penempatan pada bank, dan pin yang diterima/ <i>Current account with banks, placen with banks dan fund borrowings</i>
7. PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Giro pada bank, pinjaman yang diterima/ <i>Current account with banks and fund borrowings</i>
8. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
9. PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
10. PT PAL Indonesia (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**39. Informasi Mengenai Transaksi Dengan
Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)**

**39. Information of Transaction With Related
Parties (continued)**

Pihak berelasi/Related parties	Sifat dari hubungan/Nature of relationship	Sifat dari transaksi/Nature of transactions
11. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
12. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
13. Pengembangan Pariwisata Indonesia	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
14. INKA Multi Solusi	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
14. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
15. PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
16. PT Angkasa Pura II (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
17. PT Pembangunan Perumahan (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
18. PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
19. PT Jasamarga Manado Bitung	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>
20. PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/ <i>Financing and receivables</i>

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**39. Informasi Mengenai Transaksi Dengan
Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)**

**39. Information of Transaction With Related
Parties (continued)**

Pihak berelasi/Related parties	Sifat dari hubungan/Nature of relationship	Sifat dari transaksi/Nature of transactions
21. PT Perkebunan Nusantara I (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/Financing and receivables
22. PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/Financing and receivables
23. Mineral Industri Indonesia	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/Financing and receivables
24. PT Pembangunan Perumahan Presisi, Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/Financing and receivables
25. PT Sinergi Gula Nusantara	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/Financing and receivables
26. PT Biofarma (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ <i>Controlling through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan dan piutang/Financing and receivables

ASET

ASSETS

a. Giro pada bank (Catatan 5a)

a. Current accounts with banks (Note 5a)

	2024	2023	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	35,720	21	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	21,628	32,929	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	17,275	26,430	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4,195	8,986	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk	2,943	1,993	PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk
Total	81,761	70,359	Total

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**39. Informasi Mengenai Transaksi Dengan
Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)**

ASET (lanjutan)

b. Penempatan pada bank (Catatan 6a)

	2024	2023
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--	1,007,000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	--	30,000
Total	--	1,037,000

c. Efek-efek (Catatan 7a)

	2024	2023
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia	555,175	720,979
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	618,078	712,944
Total	1,173,253	1,433,923

d. Pembiayaan dan piutang (Catatan 9d)

	2024	2023
PT Perkebunan Nusantara I (Persero)	1,397,070	--
Pengembangan Pariwisata Indonesia	1,180,481	1,349,246
PT Garuda Indonesia (Persero)	994,418	994,418
PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)	989,156	1,115,087
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	977,144	965,632
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	733,543	734,000
Mineral Industri Indonesia	536,392	--
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (Persero) Tbk	468,347	475,410
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	434,262	201,683
PT Angkasa Pura II (Persero)	328,840	998,478
PT PAL Indonesia (Persero)	313,826	255,450
PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk	300,543	303,359
PT Sinergi Gula Nusantara	249,523	296,026
PT Jasamarga Manado Bitung	231,440	238,722
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	197,336	375,663
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	65,189	141,171
PT Biofarma (Persero) Tbk	16,987	--
PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	--	1,472,422
PT Pembangunan Perumahan	--	315,760
Personel manajemen kunci	--	11,487
Total	9,414,497	10,512,231
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1,241,022)	(1,301,009)
Neto	8,173,475	9,211,222

**39. Information of Transaction With Related
Parties (continued)**

ASSETS (continued)

b. Placements with Banks (Note 6a)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
Total	

c. Securities (Note 7a)

The Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
Total	

d. Financing and receivables (Note 9d)

PT Perkebunan Nusantara I (Persero)	
Pengembangan Pariwisata Indonesia	
PT Garuda Indonesia (Persero)	
PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)	
PT Krakatau Steel Persero (Tbk)	
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	
Mineral Industri Indonesia	
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (Persero) Tbk	
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	
PT Angkasa Pura II (Persero)	
PT PAL Indonesia (Persero)	
PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk	
PT Sinergi Gula Nusantara	
PT Jasamarga Manado Bitung	
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	
PT Biofarma (Persero) Tbk	
PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	
PT Pembangunan Perumahan	
Key management personnel	
Total	
Less allowance for impairment losses	
Net	

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**39. Informasi Mengenai Transaksi Dengan
Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)**

LIABILITAS

e. Pinjaman yang diterima (Catatan 18)

	2024	2023
PT Bank Tabungan Negara (Persero)	2,000,000	--
PT Bank Syariah Indonesia Tbk Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Melalui Kementerian keuangan	--	1,478,280
	48,313	51,626
Total	2,048,313	1,529,906

f. Penyisihan imbalan kerja

	2024	2023
Personel manajemen kunci	28,311	33,837

**g. Fasilitas pinjaman kepada debitur yang
belum digunakan (Catatan 31)**

	2024	2023
Entitas dan lembaga Pemerintah	745,926	1,373,836

**h. Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan
(Catatan 31)**

	2024	2023
Entitas dan lembaga Pemerintah	223,382	89,504

**i. Pendapatan Bunga Kredit Bermasalah
(Catatan 31)**

	2024	2023
Entitas dan lembaga Pemerintah	574,927	327,592

j. Bank garansi (Catatan 31)

	2024	2023
Entitas dan lembaga Pemerintah	27,216	1,783,965

**39. Information of Transaction With Related
Parties (continued)**

LIABILITIES

e. Fund borrowings (Note 18)

PT Bank Tabungan Negara (Persero)	--
PT Bank Syariah Indonesia Tbk Controlling through the Government of Republic of Indonesia	1,478,280
Total	1,529,906

f. Provision for employee benefits

Key management personnel	33,837

g. Unused loan facilities to debtors (Note 31)

Government entities and institutions	1,373,836

h. Outstanding irrevocable L/C (Note 31)

Government entities and institutions	89,504

**i. Interest income on non-performing loans
(Note 31)**

Government entities and institutions	327,592

j. Bank guarantee (Note 31)

Government entities and institutions	1,783,965

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**39. Informasi Mengenai Transaksi Dengan
Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)**

LIABILITAS (lanjutan)

k. Asuransi kegagalan ekspor (Catatan 31)

	2024	2023	
Entitas dan lembaga Pemerintah	--	68,990	Government entities and institutions

**l. Efek-efek utang yang diterbitkan
(Catatan 17)**

	2024	2023	
Entitas dan lembaga Pemerintah	2,405,000	4,065,000	Government entities and institutions

Suku bunga untuk pembiayaan dan piutang dalam Rupiah dan Dolar Amerika Serikat dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	2024	2023	
Suku bunga kontrak			Contractual interest rate
Rupiah	0.10% - 10.06%	0.10% - 10.30%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	1.27% - 7.49%	4.00% - 8.20%	United States Dollar
Suku bunga efektif			Effective interest rate
Rupiah	0.10% - 10.06%	0.00% - 10.80%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	4.00% - 16.27%	4.00% - 8.78%	United States Dollar

Persentase saldo dengan pihak-pihak berelasi terhadap total aset dan liabilitas LPEI adalah sebagai berikut:

Percentage of balances with related parties to total assets and liabilities of LPEI are as follows:

	2024	2023	
Aset			Asset
Giro pada bank	0.19%	0.10%	Current accounts with banks
Penempatan pada bank	0.00%	1.54%	Placements with banks
Efek-efek	2.70%	2.12%	Securities
Pembiayaan dan piutang	18.81%	13.61%	Financing and receivables
Total	21.70%	17.37%	Total
Liabilitas			Liabilities
Pinjaman yang diterima	5.92%	3.59%	Fund borrowings
Penyisihan imbalan kerja	0.08%	0.08%	Liability for employee benefits
Efek-efek utang yang diterbitkan	6.96%	9.55%	Debt securities issued
Total	12.96%	13.22%	Total

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**39. Informasi Mengenai Transaksi Dengan
Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)**

m. Informasi signifikan lainnya

Pelaksanaan Program Investasi
Pemerintah dalam Rangka Program
Pemulihan Ekonomi Nasional.

Dampak dari Pandemi Covid-19 yang muncul di Indonesia sejak bulan Maret 2020 membuat Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (UU No 2/2020).

Salah satu program pemulihan ekonomi nasional yakni melalui Program Investasi Pemerintah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 11 Lampiran UU No 2/2020 pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PP No 23/2020) yang telah diubah dengan PP No. 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 23/2020 (PP No 43/2020).

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**39. Information of Transaction With Related
Parties (continued)**

m. Other significant information

Implementation of Government Investment Program in the Context of the National Economic Recovery Program.

The impact of the Covid-19 Pandemic that has emerged in Indonesia since March 2020 has made the Government stipulated Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic and/or in the Context of Facing Threats that endanger the National Economy and/or Financial System Stability which has been approved by the House of Representatives (DPR) to be later ratified as Law No. 2 of 2020 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2020 on State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the 2019 Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic and/or in the Context of Facing Threats that endanger the National Economy and/or Financial System Stability into Law (Law No 2/2020).

One of the national economic recovery programs is through the Government Investment Program as stated in Article 11 of Attachment of Law No. 2/2020 whose implementation is further regulated in Government Regulation No. 23 of 2020 concerning Implementation of the National Economic Recovery Program in order to Support State Financial Policy for Handling the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic and/or Facing Threats That Endanger the National Economy and/or Financial System Stability and Saving the National Economy (Government Regulation No 23/2020) which has been amended by Government Regulation No. 43 of 2020 concerning Amendment to Government Regulation No. 23/2020 (Government Regulation No 43/2020).

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**39. Informasi Mengenai Transaksi Dengan
Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)**

m. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada PP 43/2020 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PMK No.118/2020) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.06/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PMK No. 189/2021).

Penugasan atas pelaksanaan Investasi Pemerintah tersebut kemudian ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK.06/2020 tentang Penugasan Kepada LPEI sebagai Pelaksana Investasi untuk Melaksanakan Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (KMK No. 545/2020).

Pada 28 Desember 2020, telah ditandatangani Perjanjian Pelaksanaan Investasi antara Kementerian Keuangan dan LPEI tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) No. PRJ-16/KN/2020 dan No.595/PKS/12/2020 tanggal 28 Desember 2020 (Perjanjian Pelaksanaan Investasi) serta Perjanjian Pemberian Dana Investasi Pemerintah Republik Indonesia kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dalam Bentuk Pinjaman Subordinasi dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional No. 75 tanggal 28 Desember 2020 antara LPEI dengan PTPN, yang dibuat dihadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta (Perjanjian Pemberian Dana Investasi).

**39. Information of Transaction With Related
Parties (continued)**

m. Other significant information (continued)

Further provisions regarding Government Investment Procedures as referred to in PP 43/2020 are regulated by Regulation of Minister of Finance No. 118/PMK.06/2020 concerning Government Investments in the Context of the National Economic Recovery Program (PMK No.118/2020) and Regulation of Minister of Finance Number 189/PMK.06/2021 concerning to amendment to Regulation of Minister of Finance No 118/PMK.06/2020 concerning Government Investments in the Context of the National Economic Recovery Program (PMK No. 189/2021).

The assignment for the implementation of Government Investment was then stipulated in the Decree of Minister of Finance No. 545/KMK.06/2020 concerning Assignment to LPEI as Investment Executor to Implement Government Investment in the Framework of the National Economic Recovery Program for the Company (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (KMK No. 545/2020).

On December 28, 2020, an Investment Implementation Agreement was signed between the Ministry of Finance and LPEI regarding the Implementation of Government Investments in the Context of the National Economic Recovery Program to PT Perkebunan Nusantara III (Persero) No. PRJ-16/KN/2020 and No. 595/PKS/12/2020 dated December 28, 2020 (Investment Implementation Agreement) and the Investment Fund Provision Agreement by the Government of the Republic of Indonesia to PT Perkebunan Nusantara III (Persero) in the form of a subordinated loan in the context of the National Economic Recovery Program No. 75 dated December 28, 2020 between LPEI and PTPN, which was made before Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notary in Jakarta (Investment Fund Provision Agreement).

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**39. Informasi Mengenai Transaksi Dengan
Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)**

m. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

Serta Perjanjian Pemberian Dana Investasi Pemerintah Republik Indonesia kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dalam Bentuk Pinjaman Subordinasi dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional No. 75 tanggal 28 Desember 2020 antara LPEI dengan PTPN, yang dibuat dihadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta (Perjanjian Pemberian Dana Investasi) yang telah diubah melalui Perubahan Perjanjian Pemberian Dana Investasi Pemerintah Republik Indonesia Kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dalam Bentuk Pinjaman Subordinasi dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional No. 21 tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat dihadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta (Perubahan Perjanjian Pemberian Dana Investasi).

Berdasarkan Perjanjian Pelaksanaan Investasi dan Perjanjian Pemberian Dana Investasi, limit Investasi Pemerintah PEN (IP PEN) kepada PTPN sebesar Rp4.000.000 yang digunakan untuk membiayai kegiatan belanja modal perkebunan dan pabrik serta modal kerja untuk komoditas sawit dan tebu. Jangka waktu pemberian IP PEN ditetapkan selama 10 tahun atau sampai dengan tahun 2030 termasuk *grace period* selama 7 tahun.

Di tahun 2023, LPEI selaku Pelaksana Investasi telah melakukan kegiatan penyaluran dana IP PEN sebesar Rp3.999.999 termasuk melaksanakan kegiatan *monitoring* baik *onsite* dengan melakukan *site visit* ke lokasi perkebunan dan pabrik PTPN yang dibiayai IP PEN, serta *monitoring offsite* yang telah dilaporkan kepada Pemberi Investasi antara lain: Laporan Bulanan, Laporan Tengah Tahun, Laporan Tahunan, dan Laporan realisasi pencapaian *Key Achievement Indicator*.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**39. Information of Transaction With Related
Parties (continued)**

m. Other significant information (continued)

And the Investment Fund Provision Agreement by the Government of the Republic of Indonesia to PT Perkebunan Nusantara III (Persero) in the form of a subordinated loan in the context of the National Economic Recovery Program No. 75 dated December 28, 2020 between LPEI and PTPN, which was made before Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notary in Jakarta (Investment Fund Provision Agreement) that already changed by an Amendment of Investment Fund Provision Agreement by the Government of the Republic of Indonesia to PT Perkebunan Nusantara III (Persero) in the form of a subordinated loan in the context of the National Economic Recovery Program No. 21 dated October 25, 2023 between LPEI and PTPN, which was made before Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notary in Jakarta (Investment Fund Provision Agreement Amendment).

Based on the Investment Implementation Agreement and the Investment Fund Provision Agreement, the limit of Government Investment PEN (IP PEN) to PTPN is in the amount of Rp4,000,000 which is used to finance capital expenditures for plantations and factories as well as working capital for oil palm and sugar cane commodities. The period of granting of the IP PEN is set for 10 years or up to 2030 including a grace period of 7 years.

In 2023, LPEI as the Investment Executor has carried out the distribution of IP PEN funds of Rp3,999,999 including carrying out monitoring activities both onsite by conducting site visits to PTPN plantation and mill locations financed by IP PEN, as well as offsite monitoring that has been reported to the Investment Provider, among others: Monthly Reports, Mid-Year Reports, Annual Reports, and Key Achievement Indicator realization reports.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

39. Informasi Mengenai Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

m. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

Pelaksanaan kegiatan penyaluran dana dan *monitoring* IP PEN selama tahun 2024 dan 2023 telah sesuai dengan ketentuan di dalam PMK No. 118/PMK/2020, PMK No.189/PMK.06/2021, KMK No.545/KMK.06/2020, Perjanjian Pelaksanaan Investasi, dan Perjanjian Pemberian Dana Investasi.

40. Informasi Segmen Usaha

Informasi segmen berdasarkan jenis usaha adalah sebagai berikut:

39. Information of Transaction With Related Parties (continued)

m. Other significant information (continued)

Implementation of fund distribution activities and monitoring of IP PEN during 2024 and 2023 has complied with the provisions in Regulation of Minister PMK of Finance No. 118/PMK/2020, Regulation of Minister of Finance No. 189/PMK.06/2021, KMK No.545/KMK.06/2020, the Investment Implementation Agreement, and the Investment Fund Provision Agreement.

40. Business Segment Information

Segment information based on business type is as follows:

2024								
Penugasan Umum/ General Assignment		Penugasan Khusus/ National Interest Account		Entitas anak/ Subsidiary	Eliminasi/ Elimination	Total		
Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia					
Pendapatan segmen	2,672,990	397,396	312,263	47	1,120	--	3,383,816	Segment income
Beban segmen	(2,128,374)	(528,277)	--	--	--	--	(2,656,651)	Segment expenses
Pendapatan segmen - neto	544,616	(130,881)	312,263	47	1,120	--	727,165	Segment income - net
Pendapatan operasional lainnya	118,359	65,928	68,721	1	30,861	(30,861)	253,009	Other operating income
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(596,406)	328,912	(10,275)	(5)	--	--	(277,774)	Provision for impairment losses on financial assets
Penyisihan kerugian estimasi klaim penjaminan	1,775	--	(590)	--	--	--	1,185	Provision for impairment Losses on estimated guarantee claim
Beban operasional lainnya	(653,174)	(3,559)	(9,484)	--	(18,872)	--	(685,089)	Other operating expenses
Laba operasional	(584,830)	260,400	360,635	43	13,109	(30,861)	18,496	Income from operations
Pendapatan bukan operasional - neto	76,762	101	3	--	--	(13,446)	63,420	Non-operating income - net
Pendapatan (Beban) pajak	150,271	--	--	--	338	--	150,609	Tax Income (expense)
Laba tahun berjalan							232,525	Income for the year
Aset	33,522,301	4,681,522	21,721,799	1,702	49,548	(10,863,875)	49,112,997	Assets
Liabilitas	42,621,891	2,621,020	690,125	1,660	5,471	(10,819,800)	35,120,367	Liabilities
2023								
Penugasan Umum/ General Assignment		Penugasan Khusus/ National Interest Account		Entitas anak/ Subsidiary	Eliminasi/ Elimination	Total		
Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia					
Pendapatan segmen	3,153,922	488,513	408,176	141	1,345	--	4,052,097	Segment income
Beban segmen	(2,604,887)	(524,006)	--	--	--	--	(3,128,893)	Segment expenses
Pendapatan segmen - neto	549,035	(35,493)	408,176	141	1,345	--	923,204	Segment income - net
Pendapatan operasional lainnya	208,463	6,155	44,458	--	--	--	259,076	Other operating income
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(13,920,444)	(2,997,999)	(13,979)	28.0	--	--	(16,932,394)	Provision for impairment losses on financial assets
Penyisihan kerugian estimasi klaim penjaminan	4,006	--	(1,012)	--	--	--	2,994	Provision for impairment Losses on estimated guarantee claim
Beban operasional lainnya	(765,280)	(8,971)	(8,594)	--	(11,187)	--	(794,032)	Other operating expenses
Rugi operasional	(13,924,220)	(3,036,308)	429,049	169	(9,842)	--	(16,541,152)	Loss from operations
Pendapatan bukan operasional - neto	(50)	78	599	--	--	9,861	10,488	Non-operating income - net
Pendapatan (Beban) pajak	--	--	--	--	--	--	(1,583,663)	Tax Income (expense)
Rugi tahun berjalan							(18,114,327)	Loss for the year
Aset	35,231,615	5,047,668	15,968,370	1,257	31,232	(4,930,863)	51,349,279	Assets
Liabilitas	40,577,099	6,124,427	815,060	1,088	603	(4,930,465)	42,587,812	Liabilities

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

41. Analisis Jatuh Tempo Aset dan Liabilitas

41. Maturity Analysis of Assets and Liabilities

	2024			2023			
	Jatuh tempo dalam satu tahun/ One year And below	Jatuh tempo lebih dari satu tahun/ Due beyond one year	Total	Jatuh tempo dalam satu tahun/ One year And below	Jatuh tempo lebih dari satu tahun/ Due beyond one year	Total	
Aset Keuangan							Financial Assets
Giro pada							Current accounts with
Bank Indonesia	775	--	775	553	--	553	Bank Indonesia
Giro pada bank	1,217,290	--	1,217,290	108,258	--	108,258	Current accounts with banks
Penempatan pada bank	1,371,833	--	1,371,833	7,414,644	--	7,414,644	Placements with banks
Efek-efek	--	1,173,253	1,173,253	170,312	1,263,611	1,433,923	Securities
Tagihan akseptasi	138,647	--	138,647	153,852	--	153,852	Acceptances receivable
Tagihan derivatif	50,674	--	50,674	85	--	85	Derivatives receivable
Pembiayaan dan piutang syariah	15,095,421	41,013,030	56,108,451	18,806,506	55,016,705	73,823,211	Financing and sharia receivables
Piutang pembiayaan garansi lainnya	--	--	--	3,161	--	3,161	Other guarantee receivables
Piutang Setoran Modal	5,000,000	--	5,000,000	--	--	--	Capital deposit receivables
Piutang asuransi dan penjaminan	6,637	--	6,637	75,059	--	75,059	Insurance and guarantee receivables
Piutang penjaminan ulang	3,094	--	3,094	--	--	--	Reguarantee receivables
Piutang reasuransi	670	--	670	--	--	--	Reinsurance receivables
Aset lain-lain	12,353	--	12,353	18,142	--	18,142	Other assets
Total aset keuangan	22,897,394	42,186,283	65,083,677	26,750,572	56,280,316	83,030,888	Total financial assets
Aset Non Keuangan							Non-financial Assets
Kas	49	--	49	85	--	85	Cash
Ijarah	--	96,281	96,281	--	--	--	Ijarah
Biaya dibayar dimuka	--	23,723	23,723	--	20,458	20,458	Prepaid expenses
Aset pajak tangguhan-neto	--	150,993	150,993	--	--	--	Deferred tax assets-net
Pajak dibayar dimuka	--	2,827	2,827	--	--	--	Prepaid Tax
Aset tetap	--	1,620,424	1,620,424	--	1,546,422	1,546,422	Premises and equipment
Aset reasuransi	4,056	--	4,056	2,933	--	2,933	Reinsurance assets
Aset lain-lain	11,068	--	11,068	18,458	--	18,458	Other assets
Total aset non keuangan	15,173	2,041,007	1,909,421	21,476	1,566,880	1,588,356	Total non-financial assets
	22,912,567	44,227,290	66,993,098	26,772,048	57,847,196	84,619,244	
Akumulasi penyusutan			(740,316)			(631,787)	Accumulated depreciation
Cadangan kerugian penurunan nilai			(17,139,785)			(32,638,178)	Allowance for impairment losses
Total			49,112,997			51,349,279	Total
Liabilitas Keuangan							Financial Liabilities
Liabilitas segera	17,283	--	17,283	69,131	--	69,131	Current liabilities
Liabilitas Devisa Hasil Ekspor	245,116	--	245,116	120,928	--	120,928	Foreign exchange export proceeds liabilities
Efek-efek utang yang diterbitkan	3,820,127	4,319,937	8,140,064	13,843,494	8,137,819	21,981,313	Debt securities issued
Pinjaman yang diterima	24,815,246	48,314	24,863,560	10,661,462	7,691,481	18,352,943	Fund borrowings
Liabilitas akseptasi	138,647	--	138,647	153,852	--	153,852	Acceptances payable
Liabilitas derivatif	49,939	--	49,939	1,477	--	1,477	Derivatives payable
Utang asuransi	2,692	--	2,692	5,534	--	5,534	Insurance payable
Utang penjaminan	1,738	--	1,738	18,427	--	18,427	Guarantee payable
Liabilitas sewa guna usaha	2,443	506	2,949	2,961	2,376	5,337	Lease payable
Liabilitas lain-lain	259,164	--	259,164	305,988	--	305,988	Other liabilities
Total liabilitas keuangan	29,352,395	4,368,757	33,721,152	25,183,254	15,831,676	41,014,930	Total financial liabilities
Liabilitas Non Keuangan							Non-financial Liabilities
Utang pajak	8,728	--	8,728	16,279	--	16,279	Taxes payable
Liabilitas imbalan kerja	--	139,268	139,268	--	142,522	142,522	Liability for employee benefits
Estimasi klaim	444,847	--	444,847	448,911	--	448,911	Estimated claims
Liabilitas asuransi	9,507	--	9,507	6,672	--	6,672	Insurances liabilities
Liabilitas lain-lain	796,865	--	796,865	958,498	--	958,498	Other liabilities
Total liabilitas non keuangan	1,259,947	139,268	1,399,215	1,430,360	142,522	1,572,882	Total non-financial liabilities
Total	30,612,342	4,508,025	35,120,367	26,613,614	15,974,198	42,587,812	Total

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

42. Tambahan Informasi Arus Kas

LPEI melakukan transaksi pendanaan yang tidak mempengaruhi kas dan tidak termasuk dalam laporan arus kas konsolidasian sebagai berikut:

	2024	2023	
Penambahan modal melalui Penyertaan Modal Negara	5,000,000	--	Capital increase through State Equity Participation

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

42. Additional Cash Flow Information

LPEI conducted financing transactions that did not affect cash and were not included in the consolidated statement of cash flows as follows:

Changes in liabilities arising from financing activities in the cash flow statement are as follows:

Perubahan Non Kas/ Non Cash Changes							
Arus kas/Cash flow			Pergerakan Kurs				
	Penerimaan/ Receipt	Pembayaran/ Payment	Mata Uang Asing/ Foreign Exchange Rate	Lain-lain/ Others			
2023					2024		
Rupiah					Rupiah		
Liabilitas sewa	5,337	--	(4,160)	--	1,772	2,949	Lease liabilities
Pinjaman yang diterima	18,352,943	31,983,829	(26,024,418)	551,206	-	24,863,560	Fund borrowing
Efek-efek yang diterbitkan	21,981,313	--	(14,065,226)	223,977	-	8,140,064	Debt securities issued
Total	40,339,593	31,983,829	(40,093,804)	775,183	1,772	33,006,573	Total

Perubahan Non Kas/ Non Cash Changes							
Arus kas/Cash flow			Pergerakan Kurs				
	Penerimaan/ Receipt	Pembayaran/ Payment	Mata Uang Asing/ Foreign Exchange Rate	Lain-lain/ Others			
2022					2023		
Rupiah					Rupiah		
Liabilitas sewa	5,553	--	(3,944)	--	3,728	5,337	Lease liabilities
Pinjaman yang diterima	29,297,065	23,924,143	(34,513,500)	(354,765)	--	18,352,943	Fund borrowing
Efek-efek yang diterbitkan	25,290,672	--	(3,322,316)	(83,790)	96,747	21,981,313	Debt securities issued
Total	54,993,290	23,924,143	(37,839,760)	(438,555)	100,475	40,339,593	Total

43. Informasi Tambahan yang Tidak dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia:

a. Giro pada Bank

Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK

Seluruh giro pada bank lain yang dimiliki LPEI diklasifikasikan lancar dan tahap 1 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Pengungkapan lebih lanjut pada giro pada bank diungkapkan pada Catatan 5.

43. Additional Information that is Not Required by Indonesia Financial Accounting Standards

The following additional information is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Financial Accounting Standards:

a. Current accounts with banks

By Financial Service Authority Rule collectibility

As of December 31, 2024 and 2023, all LPEI current account with banks are classified as current and stage 1.

The further disclosures on current accounts with banks are presented in Note 5.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**43. Informasi Tambahan yang Tidak
dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia (lanjutan)**

b. Penempatan pada Bank

**Berdasarkan kolektibilitas sesuai
Peraturan OJK**

Seluruh penempatan pada bank yang dimiliki LPEI diklasifikasikan lancar dan tahap 1 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Pengungkapan lebih lanjut pada penempatan pada bank diungkapkan pada Catatan 6.

c. Efek-efek

**Berdasarkan kolektibilitas sesuai
Peraturan OJK**

Seluruh efek-efek yang dimiliki LPEI diklasifikasikan lancar dan tahap 1 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Pengungkapan lebih lanjut pada efek-efek diungkapkan pada Catatan 7.

**d. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan
dan Piutang Syariah, dan Piutang
Lainnya**

**Berdasarkan kolektibilitas sesuai
Peraturan OJK**

Kolektibilitas pada seluruh pembiayaan dan piutang Penugasan Khusus pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Lancar	4,059,276	3,928,791
Dalam perhatian khusus	34,956	10,891
Kurang lancar	9,532	11,069
Macet	641	--
Jumlah	4,104,405	3,950,751
Cadangan kerugian penurunan nilai	(73,843)	(62,713)
Neto	4,030,562	3,888,038

**43. Additional Information that is Not Required
by Indonesia Financial Accounting
Standards (continued)**

b. Placements with Banks

**By Financial Service Authority Rule
collectibility**

As of December 31, 2024 and 2023, all LPEI placement with banks are classified as current and stage 1.

The further disclosures on placement with banks are presented in Note 6.

c. Securities

**By Financial Service Authority Rule
collectibility**

As of December 31, 2024 and 2023, all LPEI securities are classified as current and stage 1.

The further disclosures on securities are presented in Note 7.

**d. Financing and Receivables, Sharia
Financing and Receivables, and Other
Receivables**

**By Financial Service Authority Rule
collectibility**

The collectibility for all of NIA financing and receivables as of December 31, 2024 and 2023, are as follows:

Current
Special mention
Substandard
Doubtful
Total
Allowance for impairment losses
Net

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**43. Informasi Tambahan yang Tidak
dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia (lanjutan)**

**d. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan
dan Piutang Syariah, dan Piutang
Lainnya (lanjutan)**

Pembiayaan dan piutang yang
direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas
adalah sebagai berikut:

	2024	2023	
Lancar	3,745,640	5,971,951	Current
Dalam perhatian khusus	6,912,466	6,985,581	Special mention
Kurang lancar	3,934,899	6,907,793	Substandard
Diragukan	979,268	5,292,395	Doubtful
Macet	11,035,021	17,728,726	Loss
Total	26,607,294	42,886,446	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(16,433,618)	(29,800,151)	Allowance for impairment losses
Neto	10,173,676	13,086,295	Net

Pembiayaan dan piutang yang
direstrukturisasi berdasarkan jenis dan
kolektibilitas adalah sebagai berikut:

	Dalam perhatian khusus/ Special mention Kurang lancar/ Substandard Diragukan/ Doubtful Macet/ Loss						
2024	Lancar/ Current	Special mention	Substandard	Doubtful	Loss	Total	2024
Modal kerja	1,355,253	4,531,869	2,935,386	292,503	7,545,686	16,660,697	Working capital
Investasi	2,390,387	2,380,597	999,513	686,765	3,489,335	9,946,597	Investment
Total	3,745,640	6,912,466	3,934,899	979,268	11,035,021	26,607,294	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(172,932)	(2,846,942)	(2,785,643)	(792,426)	(9,835,675)	(16,433,618)	Allowance for impairment losses
Neto	3,572,708	4,065,524	1,149,256	186,842	1,199,346	10,173,676	Net

	Dalam perhatian khusus/ Special mention Kurang lancar/ Substandard Diragukan/ Doubtful Macet/ Loss						
2023	Lancar/ Current	Special mention	Substandard	Doubtful	Loss	Total	2023
Modal kerja	1,839,083	3,647,473	4,784,013	4,728,875	9,624,103	24,623,547	Working capital
Investasi	4,132,868	3,338,108	2,123,780	563,520	8,104,623	18,262,899	Investment
Total	5,971,951	6,985,581	6,907,793	5,292,395	17,728,726	42,886,446	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(334,368)	(2,817,579)	(4,883,473)	(4,036,005)	(17,728,726)	(29,800,151)	Allowance for impairment losses
Neto	5,637,583	4,168,002	2,024,320	1,256,390	--	13,086,295	Net

Rasio pembiayaan dan piutang yang
diklasifikasikan NPF/NPL adalah sebagai
berikut:

	2024	2023	
Rasio NPF bruto	29.07%	43.48%	Gross NPF ratio
Rasio NPF neto	4.52%	4.54%	Net NPF ratio

**43. Additional Information that is Not Required
by Indonesia Financial Accounting
Standards (continued)**

**d. Financing and Receivables, Sharia
Financing and Receivables, and Other
Receivables (continued)**

Restructured financing and receivables by
collectibility are as follows:

Restructured financing and receivables by
type and collectibility are as follows:

Financing and receivables ratios classified
as NPF/NPL are as follows:

**43. Informasi Tambahan yang Tidak
dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia (lanjutan)**

**d. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan
dan Piutang Syariah, dan Piutang
Lainnya (lanjutan)**

Pengungkapan lebih lanjut pada pembiayaan dan piutang, pembiayaan dan piutang syariah, dan piutang lainnya diungkapkan pada Catatan 9.

Perincian pembiayaan dan piutang berdasarkan sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

**43. Additional Information that is Not Required
by Indonesia Financial Accounting
Standards (continued)**

**d. Financing and Receivables, Sharia
Financing and Receivables, and Other
Receivables (continued)**

The further disclosures on financing and receivables, sharia financing and receivables, and other receivables are presented in Note 9.

Financing and receivables based on sector are as follows:

2024	Lancar/ Current	khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Total	2024
Rupiah							Rupiah
Perindustrian	7,789,794	1,324,611	1,338,990	380,004	4,271,177	15,104,576	Manufacturing
Pertanian, perburuan dan sarana pertanian	6,273,686	751,531	24,868	--	2,586,128	9,636,213	Agriculture, hunting and agriculture services
Konstruksi	699,480	747,918	--	--	35,203	1,482,601	Construction
Listrik, gas dan air	197,336	--	--	416,619	--	613,955	Electricity, gas and water
Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi	2,608,006	15,595	194,484	--	12,488	2,830,573	Transportation, warehousing and communication
Perdagangan, restoran dan hotel	468,214	119,854	9,532	--	499,746	1,097,346	Trading, restaurants and hotels
Jasa dunia usaha	2,138,780	--	--	--	313,926	2,452,706	Business services
Pertambangan	1,917,038	3,547	286,382	--	286,695	2,493,662	Mining
Jasa-jasa sosial/masyarakat	--	--	--	--	15,823	15,823	Social, services/society
Lain-lain	125,388	--	121,990	--	--	247,378	Others
	<u>22,217,722</u>	<u>2,963,056</u>	<u>1,976,246</u>	<u>796,623</u>	<u>8,021,186</u>	<u>35,974,833</u>	
Dolar Amerika Serikat							United States Dollars
Perindustrian	6,868,078	1,005,766	342,166	65,469	1,953,047	10,234,526	Manufacturing
Pertambangan	2,256,239	1,354,215	1,417,519	--	618,971	5,646,944	Mining
Pertanian, perburuan dan sarana pertanian	120,306	1,473,626	184,334	--	262,324	2,040,590	Agriculture, hunting and agriculture services
Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi	165,513	73,195	--	--	--	238,708	Transportation, warehousing and communication
Konstruksi	537,698	42,609	--	--	--	580,307	Construction
Perdagangan, restoran dan hotel	542,874	--	14,632	117,177	540,278	1,214,961	Trading, restaurants and hotels
Lain-lain	128,498	--	--	--	--	128,498	Others
	<u>10,619,206</u>	<u>3,949,411</u>	<u>1,958,651</u>	<u>182,646</u>	<u>3,374,620</u>	<u>20,084,534</u>	
Malaysia Ringgit							Malaysian Ringgit
Perdagangan, restoran dan hotel	49,084	--	--	--	--	49,084	Trading, restaurants and hotels
	<u>49,084</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>49,084</u>	
Total	32,886,012	6,912,467	3,934,897	979,269	11,395,806	56,108,451	Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(511,168)	(2,846,942)	(2,785,644)	(792,426)	(10,196,459)	(17,132,639)	Allowance for Impairment Losses

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**43. Informasi Tambahan yang Tidak
dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia (lanjutan)**

**d. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan
dan Piutang Syariah, dan Piutang
Lainnya (lanjutan)**

2023	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Total	2023
Rupiah							Rupiah
Perindustrian	6,744,491	1,537,908	2,525,998	2,886,123	6,879,784	20,574,304	Manufacturing
Pertanian, perburuan dan sarana pertanian	6,295,878	778,104	268,804	542,213	3,450,484	11,335,483	Agriculture, hunting and agriculture services
Konstruksi	1,023,191	750,056	--	--	68,175	1,841,422	Construction
Listrik, gas dan air	375,663	--	--	429,295	--	804,958	Electricity, gas and water
Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi	3,104,592	551,687	--	--	225,375	3,881,654	Transportation, warehousing and communication
Perdagangan, restoran dan hotel	856,754	2,987	11,070	244,275	932,246	2,047,332	Trading, restaurants and hotels
Jasa dunia usaha	2,362,906	--	--	--	441,647	2,804,553	Business services
Pertambangan	1,226,365	293,654	149,650	--	942,984	2,612,653	Mining
Jasa-jasa sosial/masyarakat	--	--	16,572	--	9,802	26,374	Social, services/society
Lain-lain	126,222	--	124,378	--	--	250,600	Others
	<u>22,116,062</u>	<u>3,914,396</u>	<u>3,096,472</u>	<u>4,101,906</u>	<u>12,950,497</u>	<u>46,179,333</u>	
Dolar Amerika Serikat							United States Dollars
Perindustrian	6,329,215	1,369,345	1,765,913	509,878	5,842,827	15,817,178	Manufacturing
Pertambangan	2,994,838	1,477,770	1,809,847	--	454,807	6,737,262	Mining
Pertanian, perburuan dan sarana pertanian	515,731	931,969	176,985	246,171	34,624	1,905,480	Agriculture, hunting and agriculture services
Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi	602,667	--	--	--	304,597	907,264	Transportation, warehousing and communication
Konstruksi	174,198	41,021	--	--	--	215,219	Construction
Perdagangan, restoran dan hotel	495,965	--	218,874	434,440	142,260	1,291,539	Trading, restaurants and hotels
Jasa dunia usaha	190,661	--	--	--	--	190,661	Business services
Listrik, gas dan air	376,097	--	--	--	--	376,097	Electricity, gas and water
Jasa-jasa sosial/masyarakat	--	--	--	--	7,700	7,700	Social, services/society
Lain-lain	195,478	--	--	--	--	195,478	Others
	<u>11,874,850</u>	<u>3,820,105</u>	<u>3,971,619</u>	<u>1,190,489</u>	<u>6,786,815</u>	<u>27,643,878</u>	
Total	33,990,912	7,734,501	7,068,091	5,292,395	19,737,312	73,823,211	Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(738,014)	(3,150,258)	(4,972,408)	(4,036,005)	(19,737,312)	(32,633,997)	Allowance for Impairment Losses
Neto	<u><u>33,252,898</u></u>	<u><u>4,584,243</u></u>	<u><u>2,095,683</u></u>	<u><u>1,256,390</u></u>	<u><u>--</u></u>	<u><u>41,189,214</u></u>	Net

Pengungkapan lebih lanjut pada pembiayaan dan piutang, pembiayaan dan piutang syariah, dan piutang lainnya diungkapkan pada Catatan 9.

e. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi

**Berdasarkan kolektibilitas sesuai
Peraturan OJK**

Seluruh tagihan akseptasi yang dimiliki LPEI diklasifikasikan lancar dan tahap 1 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Pengungkapan lebih lanjut pada tagihan dan liabilitas akseptasi diungkapkan pada Catatan 12.

**43. Additional Information that is Not Required
by Indonesia Financial Accounting
Standards (continued)**

**d. Financing and Receivables, Sharia
Financing and Receivables, and Other
Receivables (continued)**

The further disclosures on financing and receivables, sharia financing and receivables, and other receivables are presented in Note 9.

e. Acceptance Receivables and Payable

**By Financial Service Authority Rule
collectibility**

As of December 31, 2024 and 2023, all LPEI acceptances receivable are classified as current and stage 1.

The further disclosures on acceptance receivables and payable are presented in Note 12.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**43. Informasi Tambahan yang Tidak
dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia (lanjutan)**

f. Komitmen dan Kontinjensi

Transaksi komitmen dan kontinjensi yang
mempunyai risiko kredit berdasarkan
kolektibilitas adalah sebagai berikut:

**43. Additional Information that is Not Required
by Indonesia Financial Accounting
Standards (continued)**

f. Commitments and Contingencies

Commitments and contingent transactions
that have credit risk by collectability are as
follows:

2024							
	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Total	
Rupiah							Rupiah
Pihak berelasi (Catatan 39)							Related parties (Note 39)
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	200,000	--	--	--	--	200,000	Unused loan facilities to debtors
Penjaminan kredit - PEN	--	1,000,000	--	--	--	1,000,000	Credit guarantee - PEN
	200,000	1,000,000	--	--	--	1,200,000	
Pihak ketiga							Third parties
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	1,320,543	1,526	--	--	--	1,322,069	Unused loan facilities to debtors
Bank garansi	1,073,703	--	--	--	--	1,073,703	Bank guarantee
Penjaminan kredit - PEN	400,000	--	--	--	--	400,000	Credit guarantee - PEN
Penjaminan kredit - PKE	70,000	--	--	--	--	70,000	Penjaminan kredit - PKE
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	25,393	--	--	--	--	25,393	Outstanding irrevocable L/C
	2,889,639	1,526	--	--	--	2,891,165	
Total mata uang Rupiah	3,089,639	1,001,526	--	--	--	4,091,165	Total Indonesia Rupiah
Mata uang asing							Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat							United States Dollars
Pihak berelasi (Catatan 39)							Related parties (Note 39)
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	545,926	--	--	--	--	545,926	Unused loan facilities to debtors
Bank garansi	27,216	--	--	--	--	27,216	Bank guarantee
Penjaminan kredit - PKE	190,936	--	--	--	--	190,936	Penjaminan kredit - PKE
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	217,098	--	--	--	--	217,098	Outstanding irrevocable L/C
	981,176	--	--	--	--	981,176	
Pihak ketiga							Third parties
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	1,021,642	--	--	--	554	1,022,196	Unused loan facilities to debtors
Bank garansi	4,956,910	--	--	--	--	4,956,910	Bank guarantee
Penjaminan Kredit	39,433	--	--	--	--	39,433	Penjaminan Kredit
Penjaminan Kredit - PEN	160,950	--	--	--	--	160,950	Credit Guarantee - PEN
Penjaminan Kredit - PKE	37,795	--	--	--	--	37,795	Penjaminan Kredit - PKE
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	236,752	--	--	--	--	236,752	Outstanding irrevocable L/C
	6,453,482	--	--	--	554	6,454,036	
Sub Total	7,434,658	--	--	--	554	7,435,212	Sub Total
Yen Jepang							Japanese Yen
Pihak ketiga							Third parties
Bank garansi	3,086	--	--	--	--	3,086	Bank guarantee
Sub Total	3,086	--	--	--	--	3,086	Sub Total
Euro Eropa							European Euro
Pihak berelasi (Catatan 39)							Related parties (Note 39)
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	6,284	--	--	--	--	6,284	Outstanding irrevocable L/C
	6,284	--	--	--	--	6,284	
Pihak ketiga							Third parties
Bank garansi	186,370	--	--	--	--	186,370	Bank guarantee
	186,370	--	--	--	--	186,370	
Sub Total	192,654	--	--	--	--	192,654	Sub Total
Total mata uang asing	7,630,398	-	--	--	554	7,630,952	Total foreign currencies
Total	10,720,037	1,001,526	--	--	554	11,722,117	Total

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**43. Informasi Tambahan yang Tidak
dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia (lanjutan)**

f. Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan)

Transaksi komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut: (lanjutan)

**43. Additional Information that is Not Required
by Indonesia Financial Accounting
Standards (continued)**

**f. Commitments and Contingencies
(continued)**

Commitments and contingent transactions that have credit risk by collectability are as follows: (continued)

2023							
	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Total	
Rupiah							Rupiah
Pihak berelasi (Catatan 39)							Related parties (Note 39)
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	592,565	--	--	--	--	592,565	Unused loan facilities to debtors
Bank garansi	409,571	--	--	--	--	409,571	Bank guarantee
Penjaminan kredit - PEN	--	1,000,000	--	--	--	1,000,000	Credit guarantee - PEN
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	8,968	--	--	--	--	8,968	Outstanding irrevocable L/C
	1,011,104	1,000,000	--	--	--	2,011,104	
Pihak ketiga							Third parties
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	1,164,486	--	--	--	61,562	1,226,048	Unused loan facilities to debtors
Bank garansi	1,267,782	--	--	--	--	1,267,782	Bank guarantee
Penjaminan kredit - PEN	1,306,100	--	--	--	--	1,306,100	Credit guarantee - PEN
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	810	--	--	--	--	810	Outstanding irrevocable L/C
	3,739,178	--	--	--	61,562	3,800,740	
Total mata uang Rupiah	4,750,282	1,000,000	--	--	61,562	5,811,844	Total Indonesia Rupiah
Mata uang asing							Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat							United States Dollars
Pihak berelasi (Catatan 39)							Related parties (Note 39)
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	781,271	--	--	--	--	781,271	Unused loan facilities to debtors
Bank garansi	1,374,394	--	--	--	--	1,374,394	Bank guarantee
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	73,944	--	--	--	--	73,944	Outstanding irrevocable L/C
	2,229,609	--	--	--	--	2,229,609	
Pihak ketiga							Third parties
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	1,735,314	--	31	--	530	1,735,875	Unused loan facilities to debtors
Bank garansi	4,486,470	--	--	--	--	4,486,470	Bank guarantee
Penjaminan Kredit - PEN	846,835	--	--	--	--	846,835	Credit Guarantee - PEN
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	35,342	--	--	--	--	35,342	Outstanding irrevocable L/C
	7,103,961	--	31	--	530	7,104,522	
Sub Total	9,333,570	--	31	--	530	9,334,131	Sub Total
Yen Jepang							Japanese Yen
Pihak ketiga							Third parties
Bank garansi	14,503	--	--	--	--	14,503	Bank guarantee
Sub Total	14,503	--	--	--	--	14,503	Sub Total
Euro Eropa							European Euro
Pihak berelasi (Catatan 39)							Related parties (Note 39)
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	6,592	--	--	--	--	6,592	Outstanding irrevocable L/C
	6,592	--	--	--	--	6,592	
Pihak ketiga							Third parties
Bank garansi	189,486	--	--	--	--	189,486	Bank guarantee
	189,486	--	--	--	--	189,486	
Sub Total	196,078	--	--	--	--	196,078	Sub Total
Total mata uang asing	9,544,151	--	31	--	530	9,544,712	Total foreign currencies
Total	14,294,433	1,000,000	31	--	62,092	15,356,556	Total

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**43. Informasi Tambahan yang Tidak
dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia (lanjutan)**

g. Posisi Devisa Neto (PDN)

Berikut adalah Posisi Devisa Neto (PDN),
dalam nilai absolut, LPEI pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023 per mata
uang, sesuai dengan peraturan Bank
Indonesia:

2024		
	Aset/ Assets	Kewajiban/ Liabilities
Keseluruhan (Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif)		
Dolar Amerika Serikat	53,220	296
Ringgit Malaysia	50,077	49,048
Euro Eropa	48,148	49,436
Yen Jepang	147	119
Dolar Singapura	198	1
Total		55,466
Laporan Posisi keuangan		
Dolar Amerika Serikat	53,220	--
Ringgit Malaysia	50,077	--
Euro Eropa	48,148	--
Yen Jepang	27	--
Dolar Singapura	197	--
Total		151,669
Modal (Catatan 43.h)		14,012,511
Rasio Posisi Devisa Neto (Laporan posisi keuangan)		1.08%
Rasio Posisi Devisa Neto Keseluruhan		0.40%

2023		
	Aset/ Assets	Kewajiban/ Liabilities
Keseluruhan (Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif)		
Dolar Amerika Serikat	24,024,592	25,103,058
Euro Eropa	63,610	63,860
Yen Jepang	156	126
Dolar Singapura	237	1
Total		1,078,982
Laporan Posisi keuangan		
Dolar Amerika Serikat	22,221,620	24,939,319
Euro Eropa	2,494	57,267
Yen Jepang	156	126
Dolar Singapura	237	1
Total		2,772,738
Modal (Catatan 43.h)		8,923,975
Rasio Posisi Devisa Neto (Laporan posisi keuangan)		31.07%
Rasio Posisi Devisa Neto Keseluruhan		12.09%

**43. Additional Information that is Not Required
by Indonesia Accounting Standards
(continued)**

g. Net Open Position (NOP)

Presented below is the Net Open Position
(NOP), in absolute amounts, of LPEI as of
December 31, 2024 and 2023, respectively,
by currency, based on Bank
Indonesia regulations:

Overall (Statement of Financial Position and Administrative Accounts)
United States Dollars
Malaysian Ringgit
European Euro
Japanese Yen
Singapore Dollars
Statement of Financial Position
United States Dollars
Malaysian Ringgit
European Euro
Japanese Yen
Singapore Dollars
Total
Capital (Note 43.h)
Net Open Position Ratio (Statement of financial position)
Overall Net Open Position Ratio

Overall (Statement of Financial Position and Administrative Accounts)
United States Dollars
European Euro
Japanese Yen
Singapore Dollars
Total
Statement of Financial Position
United States Dollars
European Euro
Japanese Yen
Singapore Dollars
Total
Capital (Note 43.h)
Net Open Position Ratio (Statement of financial position)
Overall Net Open Position Ratio

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**43. Informasi Tambahan yang Tidak
dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia (lanjutan)**

**h. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal
Minimum**

Manajemen Modal

Tujuan utama dari kebijakan LPEI atas kebijakan pengelolaan modal adalah untuk memastikan LPEI memiliki modal yang kuat untuk mendukung strategi ekspansi usaha LPEI dan memenuhi ketentuan kecukupan permodalan oleh regulator. Rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) merupakan rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).

	2024	2023
ATMR (tanpa memperhitungkan risiko pasar dan operasional)	40,100,244	48,571,877
ATMR (dengan memperhitungkan risiko pasar dan operasional)	40,915,852	50,082,730
Modal		
Modal inti	13,728,020	8,611,218
Modal pelengkap	328,567	343,385
Penyertaan Modal	(44,076)	(30,628)
Total modal	14,012,511	8,923,975
Rasio KPMM (tanpa memperhitungkan risiko pasar dan operasional)	34.94%	18.37%
Rasio KPMM (dengan memperhitungkan risiko pasar dan operasional)	34.25%	17.82%

Perhitungan rasio KPMM LPEI (entitas induk) pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 didasarkan pada Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.05/2023.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, berdasarkan profil risiko LPEI triwulan III 2024, KPMM minimum ditetapkan sebesar 10% sampai dengan kurang dari 11%.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, LPEI telah memenuhi ketentuan rasio KPMM.

Rasio kewajiban penyediaan modal minimum LPEI secara konsolidasian dengan memperhitungkan risiko kredit, pasar dan operasional pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah 34,35% dan 17,88%.

**43. Additional Information that is Not Required
by Indonesia Financial Accounting
Standards (continued)**

**h. Minimum Required Capital Adequacy
Ratio**

Capital management

The main purpose of LPEI's policy on capital management policies is to ensure that LPEI has strong capital to support expansive business strategy and to comply with provisions from the regulator. The Capital Adequacy Ratio (CAR) is the ratio of capital of risk weight asset (RWA).

Risk Weighted Assets (RWA) (without market and operational risk charge)
RWA (considering market and operational risk charge)
Capital
Core capital
Supplementary capital
Equity Investment
Total capital
CAR (without market and operational risk charge)
CAR (considering market and operational risk charge)

The CAR calculation of LPEI (parent only) as of December 31, 2024 and 2023 is based on OJK Circular Letter No.5/SEOJK.05/2023.

As of December 31, 2024 and 2023, based on LPEI's risk profile third quarter of 2024, minimum CAR is set at 10% up to less than 11%.

As of December 31, 2024 and 2023, LPEI has complied with the required capital adequacy ratio.

LPEI's minimum capital adequacy ratio on a consolidated basis as at December 31, 2024 and 2023 after considering credit, market and operational risk is 34.35% and 17.88%.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**44. Standar Akuntansi dan Interpretasi
Standar yang Telah Disahkan Namun
Belum Berlaku Efektif**

Amandemen dan revisi atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 117 tentang “Kontrak Asuransi”, yang diadopsi dari IFRS 17.
- Amandemen PSAK 221 tentang “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing”. Amandemen ini memperjelas pengaturan terkait kondisi ketika suatu mata uang tidak tertukarkan serta pengungkapannya.

LPEI masih dalam proses melakukan evaluasi atas dampak dari amandemen dan PSAK baru tersebut atas laporan keuangan konsolidasian LPEI.

45. Kasus Hukum

Terdapat kejadian penting setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2023 yaitu adanya informasi kasus hukum atas dugaan tindak pidana dalam pemberian fasilitas pembiayaan yang melibatkan beberapa debitur LPEI, baik yang masih dalam tahap pelaporan/penyelidikan awal maupun tahap penyidikan oleh institusi penegak hukum Indonesia. Namun demikian, mengingat kasus hukum atas dugaan tindak pidana tersebut diindikasikan bukan merupakan tindak pidana korporasi, maka dampak hukum akan tertuju kepada pertanggungjawaban perorangan dan bukan kepada Lembaga (LPEI). Berdasarkan premis tersebut dan mengingat pembiayaan kepada debitur yang terkait dengan kasus hukum atas dugaan tindak pidana tersebut sudah dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai secara memadai, sehingga manajemen berpendapat bahwa kasus hukum yang sedang dihadapi LPEI dipandang tidak akan memberikan dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian LPEI pada 31 Desember 2024.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**44. Accounting Standards and Standard
Interpretations which Has Issued But Not
Yet Effective**

Amendment and revised to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2025, with early adoption is permitted, are as follows:

- PSAK 117, “Insurance Contract”, adopted from IFRS 17.
- Amendments to PSAK 221 on “The Effects of Changes in Foreign Currency Exchange Rates”. This amendments clarifies the requirements regarding the condition where the currency is not exchangeable and its disclosure.

The LPEI is still in the process of evaluating the impact of the amendments and the new PSAK mentioned above to the LPEI's consolidated financial statements.

45. Legal Case

There was an important event after the date of the consolidated financial statements on December 31, 2023, namely the existence of information on legal cases for alleged criminal acts in the provision of financing facilities involving several LPEI debtors, both those who are still in the initial reporting/investigation stage and the investigation stage by Indonesian law enforcement institutions. However, considering that the legal case for the alleged criminal act is indicated not to be a corporate criminal act, the legal impact will be directed to individual liability and not to the Institution (LPEI). Based on this premise and considering that financing to debtors related to the legal case for the alleged criminal act has been adequately prepared for impairment losses, so the management is of the opinion that the legal case being faced by LPEI is not seen as having a material impact on LPEI's consolidated financial statements as of December 31, 2024.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

45. Kasus Hukum (lanjutan)

Namun demikian, sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini proses kasus hukum atas dugaan tindak pidana dalam pemberian fasilitas pembiayaan yang melibatkan beberapa debitur LPEI tersebut masih dalam tahap pelaporan/penyelidikan awal maupun tahap penyidikan. Selain itu, terdapat ketidakpastian mengenai apakah terdapat kerugian keuangan dan non-keuangan lebih lanjut terhadap LPEI sebagai konsekuensi kasus tersebut. Manajemen telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi atas dampak keuangan maupun non-keuangan atas kasus hukum dugaan tindak pidana tersebut. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian diterbitkan dampak dari proses kasus hukum atas dugaan tindak pidana tersebut belum dapat diperkirakan.

46. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

a. Kontribusi Modal Pemerintah

Pada tanggal 2 Januari 2025, LPEI menerima dana sebesar Rp5.000.000 sebagai bagian dari Penyertaan Modal Negara, yang selanjutnya disebut PMN. Dana tersebut berasal dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan pada 31 Desember 2024, yang baru masuk ke rekening LPEI pada 2 Januari 2025.

PMN ini telah diajukan berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (TA) 2024 sebagaimana ditetapkan kembali dalam Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2024 dan setelah dilaksanakan Rapat Kerja ke-11 Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan, dengan agenda Pengambilan Keputusan Penyertaan Modal Negara (PMN) APBN TA 2024 pada tanggal 3 Juli 2024, diperoleh keputusan bahwa Komisi XI DPR RI menyetujui PMN Tunai TA 2024 untuk LPEI sebesar Rp5.000.000.

45. Legal Case (continued)

However, until the issuance date of the consolidated financial statements, the process of legal case for alleged unlawful acts in providing financing facilities involving several LPEI's debtors both are still in the initial reporting/inquiry stage and investigation stage. In addition, there is uncertainty whether there will be further any financial and non-financial losses to LPEI as a consequence of this case. Management has prepared mitigation steps for the financial and non-financial impacts of this legal case for alleged unlawful acts. Until the issuance date of the consolidated financial statements, the impact of the legal case for alleged unlawful acts cannot be estimated accordingly.

46. Events After Reporting Date

a. Government Capital Contribution

On January 2, 2025, LPEI received funds amounting to Rp5,000,000 as part of the State Capital Participation (Penyertaan Modal Negara - PMN). These funds originated from the Fund Disbursement Order (SP2D) issued on December 31, 2024, which was credited to LPEI's account on January 2, 2025.

The PMN was proposed in accordance with Law No. 19 of 2023 concerning the State Budget for Fiscal Year (FY) 2024, as reaffirmed in Presidential Regulation No. 76 of 2023 on the Details of the State Budget for FY 2024 and following the 11th Working Meeting of Commission XI of the Indonesian House of Representatives (DPR RI) with the Minister of Finance, held on July 3, 2024, Commission XI approved a cash PMN for FY 2024 to LPEI amounting to Rp5,000,000.

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**46. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan
(lanjutan)**

a. Kontribusi Modal Pemerintah (lanjutan)

Pada tanggal 5 Februari 2025, LPEI telah menerima salinan Peraturan Pemerintah No.50 tahun 2024 atas Penyertaan Modal Negara (PMN).

Pada tanggal 31 Desember 2024, LPEI telah mengakui PMN tersebut sebagai piutang setoran modal dan tambahan ekuitas (Catatan 22).

b. Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21)

Pada tahun 2025, LPEI telah sepenuhnya mengompensasi saldo pajak penghasilan pasal 21 yang dibayar dimuka terhadap perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk periode pajak selama tahun 2025.

c. Dewan Direktur dan Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 24 Januari 2025, mengangkat Sukatmo Padmosukarso dan Bambang Setyatmojo sebagai anggota dewan direktur sejak 24 Januari 2025 dengan masa jabatan 5 tahun.

Susunan anggota dewan direktur LPEI sampai dengan laporan keuangan konsolidasi diterbitkan adalah sebagai berikut:

Plt Ketua Dewan Direktur merangkap
Direktur Eksekutif
Anggota Dewan Direktur
Anggota Dewan Direktur
Anggota Dewan Direktur
Anggota Dewan Direktur
Anggota Dewan Direktur

31 Januari/January 31, 2025

Yon Aarsal
Kasan
Arus Gunawan
Dwi Teguh Wibowo
Sukatmo Padmosukarso
Bambang Setyatmojo

Act Chairman of Board of Directors
concurrently Executive Director
Member of Board of Directors
Member of Board of Directors
Member of Board of Directors
Member of Board of Directors
Member of Board of Directors

46. Events After Reporting Date (continued)

**a. Government Capital Contribution
(continued)**

On February 5, 2025, LPEI received a copy of Government Regulation No. 50 of 2024 regarding State Capital Participation (PMN).

On December 31, 2024, LPEI recognized the PMN as a capital contribution receivable and an addition to equity (Note 22).

b. Overpayment of Income Tax Art 21

In 2025, LPEI has fully compensated the prepaid income tax under Article 21 against the income tax calculation under Article 21 for the tax period of 2025.

c. Board of Directors and Audit Committee

Based on the Decree of the Minister of Finance Number 13 Year 2025 regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of the Indonesian Export Financing Institution dated January 24, 2025, appointing Sukatmo Padmosukarso and Bambang Setyatmojo as members of the board of directors since January 24, 2025 with a term of office of 5 years.

The composition of the board of directors of LPEI until the consolidated financial statements are published is as follows:

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

**LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

**46. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan
(lanjutan)**

**c. Dewan Direktur dan Komite Audit
(lanjutan)**

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Eksekutif No.0004/KDE/01/2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, menetapkan Bambang Setyatmojo sebagai Ketua Komite Audit menggantikan Arus Gunawan.

Susunan Komite Audit LPEI sampai dengan laporan keuangan konsolidasian diterbitkan adalah sebagai berikut:

	31 Januari/January 31, 2025
Ketua	Bambang Setyatmojo
Anggota	Yulida S. Marbun
Anggota	Ludovicus Sensi Wondabio

46. Events After Reporting Date (continued)

**c. Board of Directors and Audit
Committee (continued)**

Based on the Executive Directors Decision Letter No.0004/KDE/01/2025 dated January 31, 2025 regarding Appointment of Board of Directors Committee Members of the Indonesian Export Financing Institution, appointed Bambang Setyatmojo as Chairman of Audit Committee replacing Arus Gunawan.

The compositions of LPEI's Audit Committee until the consolidated financial statements are published is as follow:

Chairman
Member
Member

47. Informasi Keuangan Tambahan

Informasi keuangan LPEI (entitas induk) yang terdapat dalam lampiran, yang terdiri dari laporan posisi keuangan 31 Desember 2024 dan 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (secara kolektif yang disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir.

47. Additional Financial Information

The accompanying financial information of LPEI (parent entity), which comprises the statement of financial position as of December 31, 2024 and 2023, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the years then ended December 31, 2024 and 2023 (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and related directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements.

48. Penyelesaian Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh manajemen pada tanggal 10 Februari 2025.

48. Completion of The Financial Statements

The management is responsible for the preparation of financial statements which are completed and authorized for issue on February 10, 2025.

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

Lampiran I
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
 Per 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah
 kecuali dinyatakan lain)

Attachment I
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(PARENT ENTITY)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
 As of December 31, 2024
 (Expressed in million Rupiah
 unless otherwise stated)

	2024	2023	
ASET			ASSETS
Kas	49	85	Cash
Giro pada Bank Indonesia	775	553	Current account with Bank Indonesia
Giro pada bank			Current accounts with banks
Penugasan Umum	1,165,313	84,285	General Assignment
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4)	(2)	Allowance for impairment losses
	1,165,309	84,283	
Penugasan Khusus	16,259	23,533	National Interest Account
Cadangan kerugian penurunan nilai	--	--	Allowance for impairment losses
	16,259	23,533	
	1,181,568	107,816	
Penempatan pada bank			Placements with banks
Penugasan Umum	447,500	1,402,644	General Assignment
Cadangan kerugian penurunan nilai	(27)	(38)	Allowance for impairment losses
	447,473	1,402,606	
Penugasan Khusus	924,333	5,982,000	National Interest Account
Cadangan kerugian penurunan nilai	(55)	(358)	Allowance for impairment losses
	924,278	5,981,642	
	1,371,751	7,384,248	
Efek-efek	1,173,253	1,433,923	Securities
Tagihan derivatif	50,674	85	Derivatives receivable
Pembiayaan dan piutang, pembiayaan dan piutang syariah dan piutang lainnya			Financing and receivables, financing and sharia receivables and other receivables
Pembiayaan dan piutang, dan pembiayaan dan piutang syariah			Financing and receivables, and financing and sharia receivables
Penugasan Umum			General Assignment
Pembiayaan dan piutang yang diberikan	44,851,097	59,935,321	Financing and Receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai	(14,517,647)	(27,665,053)	Allowance for impairment losses
	30,333,450	32,270,268	
Pembiayaan dan piutang syariah yang diberikan	7,152,949	9,937,139	Financing and sharia receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2,541,149)	(4,906,231)	Allowance for impairment losses
	4,611,800	5,030,908	
Penugasan Khusus			National Interest Account
Pembiayaan dan piutang yang diberikan	4,102,685	3,949,482	Financing and receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai	(73,826)	(62,701)	Allowance for impairment losses
	4,028,859	3,886,781	
Pembiayaan dan piutang syariah yang diberikan	1,720	1,269	Financing and sharia receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai	(17)	(12)	Allowance for impairment losses
	1,703	1,257	
Total - neto	38,975,812	41,189,214	Total - net
Aset Ijarah	96,281	--	Ijarah assets
Akumulasi penyusutan	(27,473)	--	Accumulated depreciation
	68,808	--	

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

Lampiran I
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(Lanjutan)
 Per 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah
 kecuali dinyatakan lain)

Attachment I
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(PARENT ENTITY)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(Continued)
 As of December 31, 2024
 (Expressed in million Rupiah
 unless otherwise stated)

	2024	2023	
ASET (lanjutan)			ASSETS (continued)
Piutang lainnya			Other receivables
Piutang pembiayaan garansi	--	3,161	Guarantee financing receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai	--	(3,161)	Allowance for impairment losses
	--	--	
Piutang setoran modal	5,000,000	--	Capital deposit receivables
Pajak dibayar dimuka	2,827	--	Prepaid tax
Biaya dibayar dimuka	22,837	19,936	Prepaid expenses
			Insurance and
Piutang asuransi dan penjaminan	6,637	75,059	guarantee receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3,445)	--	Allowance for impairment losses
	3,192	75,059	
Piutang penjaminan ulang	3,094	--	Reguarantee receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3,094)	--	Allowance for impairment losses
	--	--	
Aset reasuransi			Reinsurance assets
Penugasan Umum	3,968	2,834	General Assignment
Penugasan Khusus	88	99	National Interest Account
	4,056	2,933	
Piutang reasuransi	670	--	Reinsurance receivables
Tagihan akseptasi			Acceptances receivable
Penugasan Umum	134,076	150,461	General Assignment
Cadangan kerugian penurunan nilai	(504)	(604)	Allowance for impairment losses
	133,572	149,857	
Penugasan Khusus	4,571	3,391	National Interest Account
Cadangan kerugian penurunan nilai	(17)	(18)	Allowance for impairment losses
	4,554	3,373	
	138,126	153,230	
Penyertaan saham - neto	44,076	30,628	Equity investment - net
Aset tetap			Premises and equipment
Harga perolehan	1,620,424	1,546,408	Cost
Akumulasi penyusutan	(712,843)	(631,786)	Accumulated depreciation
	907,581	914,622	
Aset pajak tangguhan - neto	150,655	--	Deferred tax assets - net
Aset lain-lain	27,574	37,090	Other assets
TOTAL ASET	49,124,284	51,349,422	TOTAL ASSETS

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

Lampiran I
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(Lanjutan)
 Per 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah
 kecuali dinyatakan lain)

Attachment I
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(PARENT ENTITY)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(Continued)
 As of December 31, 2024
 (Expressed in million Rupiah
 unless otherwise stated)

	2024	2023	
LIABILITAS DAN EKUITAS			LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS			LIABILITIES
Liabilitas segera	17,283	69,131	Current liabilities
Liabilitas devisa			Foreign exchange export
hasil ekspor	245,116	120,928	proceeds liabilities
Liabilitas akseptasi			Acceptances payable
Penugasan Umum	134,076	150,461	General Assignment
Penugasan Khusus	4,571	3,391	National Interest Account
	<u>138,647</u>	<u>153,852</u>	
Utang pajak	8,727	16,279	Taxes payable
Efek-efek utang yang diterbitkan	8,140,064	21,981,313	Debt securities issued
Liabilitas derivatif	49,939	1,477	Derivatives payable
Pinjaman yang diterima	24,863,560	18,352,943	Fund borrowings
Utang asuransi			Insurance payable
Penugasan Umum	2,573	5,453	General Assignment
Penugasan Khusus	119	81	National Interest Account
	<u>2,692</u>	<u>5,534</u>	
Utang penjaminan			Guarantee payable
Penugasan Umum	1,738	1,667	General Assignment
Penugasan Khusus	--	16,760	National Interest Account
	<u>1,738</u>	<u>18,427</u>	
Liabilitas asuransi			Insurance liabilities
Penugasan Umum	9,256	6,474	General Assignment
Penugasan Khusus	251	198	National Interest Account
	<u>9,507</u>	<u>6,672</u>	
Estimasi klaim penjaminan			Estimated guarantee claim
Penugasan Umum	3,744	5,347	General Assignment
Penugasan Khusus	441,103	443,564	National Interest Account
	<u>444,847</u>	<u>448,911</u>	
Liabilitas imbalan kerja	139,268	142,522	Liability for employee benefits
Liabilitas sewa	2,949	5,337	Lease liabilities
Liabilitas lain-lain	1,067,318	1,264,630	Other liabilities
TOTAL LIABILITAS	35,131,655	42,587,956	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS			EQUITY
Kontribusi modal Pemerintah			Government capital contribution
Penugasan Umum	23,589,123	23,589,123	General Assignment
Penugasan Khusus	19,013,308	14,013,308	National Interest Account
	<u>42,602,431</u>	<u>37,602,431</u>	
Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak tangguhan	(22,953)	(23,492)	Unrealized loss of financial assets at fair value through other comprehensive income, net of deferred tax
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti, setelah pajak tangguhan	148,347	150,248	Remeasurement of defined benefit obligation, net of deferred tax
Saldo laba			Retained earnings
Telah ditentukan penggunaannya:			Appropriated:
Cadangan umum	322,161	322,161	General reserve
Cadangan tujuan	758,235	758,235	Specific reserve
	<u>1,080,396</u>	<u>1,080,396</u>	
Belum ditentukan penggunaannya	(29,815,592)	(30,048,117)	Unappropriated
TOTAL EKUITAS	13,992,629	8,761,466	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	49,124,284	51,349,422	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

Lampiran II
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk Tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah
 kecuali dinyatakan lain)

Attachment II
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(PARENT ENTITY)
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
 For the Years Ended
 December 31, 2024
 (Expressed in million Rupiah
 unless otherwise stated)

	2024	2023	
PENDAPATAN DAN			INCOME AND EXPENSES
BEBAN OPERASIONAL			FROM OPERATIONS
Pendapatan bunga dan			Interest income and
usaha syariah			income from sharia
Pendapatan bunga			Interest income
Penugasan Umum	2,672,990	3,153,922	General Assignment
Penugasan Khusus	312,263	408,176	National Interest Account
	<u>2,985,253</u>	<u>3,562,098</u>	
Usaha syariah			Income from sharia
Penugasan Umum	390,492	488,450	General Assignment
Penugasan Khusus	47	141	National Interest Account
	<u>390,539</u>	<u>488,591</u>	
Total pendapatan bunga			Total interest income and
dan usaha syariah	3,375,792	4,050,689	income from sharia
Pendapatan usaha dari Ujrah	6,904	64	Income from Ujrah
Beban bunga	<u>(2,656,651)</u>	<u>(3,128,893)</u>	Interest expense
PENDAPATAN BUNGA DAN			INTEREST INCOME AND
USAHA SYARIAH - NETO	<u>726,045</u>	<u>921,860</u>	INCOME FROM SHARIA - NET
PENDAPATAN OPERASIONAL			OTHER OPERATING
LAINNYA			INCOME
Pendapatan dari asuransi			Income from insurance
Pendapatan dari asuransi	16,469	21,675	Income from insurance
Premi reasuransi	<u>(7,498)</u>	<u>(9,089)</u>	Reinsurance premiums
Pendapatan dari asuransi - neto	<u>8,971</u>	<u>12,586</u>	Income from insurance - net
Penurunan (kenaikan) pada			Decrease (increase) in
liabilitas asuransi	(2,551)	1,059	insurance liabilities
Kenaikan (penurunan) pada			Increase (decrease) in
aset reasuransi	998	(494)	reinsurance assets
Beban klaim asuransi			Claim expense from insurance
dan lainnya	(5,626)	(933)	and other
Pendapatan dari penjaminan	65,792	90,527	Income from guarantee
Keuntungan transaksi			Gain on foreign exchange
mata uang asing - neto	4,865	6,828	transactions - net
Provisi dan komisi selain dari			Non financing and receivables
pembiayaan dan piutang	36,938	52,779	related fees and commission
Keuntungan penjualan efek - efek	500	12,139	Gain on sale of securities
Lain-lain	<u>143,122</u>	<u>84,585</u>	Others
TOTAL PENDAPATAN			TOTAL OTHER
OPERASIONAL LAINNYA - NETO	<u>253,009</u>	<u>259,076</u>	OPERATING INCOME - NET
Pembentukan cadangan kerugian			Provision for impairment
penurunan nilai aset keuangan	(277,774)	(16,932,394)	losses on financial assets
Penyisihan kerugian			Provision for impairment
estimasi klaim penjaminan	1,185	2,994	losses on estimated
			guarantee claim

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

Lampiran II
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
(Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah
 kecuali dinyatakan lain)

Attachment II
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(PARENT ENTITY)
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(Continued)

For the Years Ended
 December 31, 2024
 (Expressed in million Rupiah
 unless otherwise stated)

	2024	2023	
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA			OTHER OPERATING EXPENSES
Gaji dan tunjangan	(420,035)	(471,598)	Salaries and benefits
Umum dan administrasi	(263,039)	(298,743)	General and administrative
Lain-lain	(14,004)	(12,486)	Others
TOTAL BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	(697,078)	(782,827)	TOTAL OTHER OPERATING EXPENSES
LABA (RUGI) OPERASIONAL	5,387	(16,531,291)	INCOME (LOSS) FROM OPERATIONS
PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL - NETO	76,867	627	NON-OPERATING INCOME - NET
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK	82,254	(16,530,664)	INCOME (LOSS) BEFORE TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK	150,271	(1,583,663)	TAX EXPENSE
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	232,525	(18,114,327)	INCOME (LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:			OTHER COMPREHENSIVE INCOME:
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN YANG AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI			OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) TO BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS
Perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - neto	691	(19,145)	Changes in fair value of financial assets fair value through other comprehensive income- net
Pajak terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lainnya	(152)	(956)	Tax related to components of other comprehensive income
	539	(20,101)	
(RUGI) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI			OTHER COMPREHENSIVE (LOSS) INCOME NOT TO BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti	(2,437)	(3,991)	Remeasurement of defined benefit obligation
Pajak terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lainnya	536	31,641	Tax related to components of other comprehensive income
	(1,901)	27,650	
(RUGI) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - NETO SETELAH PAJAK	(1,362)	7,549	OTHER COMPREHENSIVE (LOSS) INCOME - NET OF TAX
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	231,163	(18,106,778)	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR

ATTACHMENT III
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(PARENT ENTITY)
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

Keuntungan/(kerugian)
yang belum direalisasi
dari kenaikan nilai wajar
aset keuangan
dalam kelompok
pada nilai wajar melalui
penghasilan
komprehensif lain
setelah dikurangi
pajak tangguhan/
Unrealized gain/(loss)

Balance as of December 31, 2022	
Impact of transitional adjustment on	
Unrealized loss of	
financial assets at fair value	
through other comprehensive	
income - net	
of deferred tax	
Remeasurement of defined benefit	
obligation, net of deferred tax	
Loss for the year	
Balance as of December 31, 2023	
Additional capital	
General Assignment	
National Interest Account	
Unrealized gain of	
financial assets at fair value	
through other comprehensive	
income - net	
of deferred tax	
Remeasurement of defined benefit	
obligation, net of deferred tax	
Income for the year	
Balance as of December 31, 2024	

LAMPIRAN IV
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah
 kecuali dinyatakan lain)

ATTACHMENT IV
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(PARENT ENTITY)
STATEMENTS OF CASH FLOW
 For the Years Ended
 December 31, 2024
 (Expressed in million Rupiah
 unless otherwise stated)

	2024	2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga, provisi dan komisi	2,990,936	2,759,770	Interest, fees and commissions received
Pendapatan usaha syariah	424,917	377,497	Sharia income
Pendapatan operasional lainnya - neto	249,697	172,325	Other operating income - net
Pembayaran pajak penghasilan badan - neto	--	(2,369)	Payments of corporate income tax - net
Beban operasional lainnya - neto	(619,976)	(574,925)	Other operating expenses - net
Pembayaran bunga dan pembiayaan lainnya	(2,702,805)	(2,432,550)	Interest and other financing charges
Pendapatan bukan operasional - neto	10,222	4,438	Non-operating income - net
Arus kas dari operasi sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi	352,991	304,186	Cash flows from operations before changes in operating assets and liabilities
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi			Changes in operating assets and liabilities
Penurunan/(kenaikan) aset operasi:			Decrease/(increase) in operating assets:
Tagihan derivatif	(50,589)	(158)	Derivatives receivable
Pembiayaan dan piutang	1,967,909	4,987,314	Financing and receivables
Pembiayaan/piutang syariah	747,569	934,101	Sharia financing/receivables
Aset ljarah	(96,281)	--	Ijarah assets
Biaya dibayar dimuka	(2,901)	(3,444)	Prepaid expenses
			Insurance and
Piutang asuransi dan penjaminan	68,421	62,330	guarantee receivables
Piutang penjaminan ulang	(3,094)		Reguarantee receivables
Piutang reasuransi	(670)		Reinsurance receivables
Aset reasuransi	(125)	1,655	Reinsurance assets
Tagihan akseptasi	15,206	73,493	Acceptances receivable
Aset lain-lain	1,565	11,151	Other assets
(Penurunan)/kenaikan liabilitas operasi:			(Decrease)/increase in operating liabilities:
Liabilitas segera	(51,848)	(23,918)	Current liabilities
Liabilitas devisa hasil ekspor	124,188	--	Foreign exchange export proceeds liabilities
Liabilitas akseptasi	(15,206)	(73,494)	Acceptances payable
Utang pajak	(10,378)	(4,271)	Taxes payable
Liabilitas derivatif	48,462	(56)	Derivatives payable
Utang asuransi	(2,842)	(1,477)	Insurances payable
Utang penjaminan	(16,689)	(175)	Guarantee payable
Liabilitas asuransi	283	(3,867)	Insurance liabilities
Estimasi klaim penjaminan	(2,879)	(4,264)	Estimated guarantee claim
Liabilitas imbalan kerja	(5,692)	10,456	Liability for employee benefits
Liabilitas lain-lain	(89,444)	92,350	Other liabilities
Kas neto diperoleh dari aktivitas investasi	2,977,956	6,361,912	Net cash provided by operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset sewa guna usaha	--	(3,324)	Acquisitions of leases assets
Penjualan efek-efek dalam kelompok nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya	261,361	521,593	Selling of marketable securities at fair value through other comprehensive income
Perolehan aset tetap	(73,078)	(2,873)	Acquisitions of premises and equipment
Kas neto diperoleh dari aktivitas investasi	188,283	515,396	Net cash provided by investing activities

LAMPIRAN IV
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(ENTITAS INDUK)

LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah
 kecuali dinyatakan lain)

ATTACHMENT IV
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(PARENT ENTITY)

STATEMENTS OF CASH FLOW (Continued)

For the Years Ended
 December 31, 2024
 (Expressed in million Rupiah
 unless otherwise stated)

	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan pinjaman yang diterima	31,983,829	18,714,934
Pembayaran pinjaman yang diterima	(26,024,418)	(26,014,285)
Pembayaran efek-efek utang yang diterbitkan yang jatuh tempo	(14,065,226)	(2,064,950)
Pembayaran liabilitas sewa	(4,160)	--
Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan	(8,109,975)	(9,364,301)
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada kas dan setara kas	4,865	9,595
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS	(4,938,871)	(2,477,398)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	7,493,100	12,700,537
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	2,554,229	10,223,139
KAS DAN SETARA KAS TERDIRI DARI:		
Kas	49	36
Giro pada Bank Indonesia	775	1,856
Giro pada bank	1,181,572	115,012
Penempatan pada bank - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	1,371,833	10,106,235
Total kas dan setara kas	2,554,229	10,223,139

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Proceeds from fund borrowings
Payments of fund borrowings
Payments for matured debt securities issued
Payments of lease liability
Net cash used in financing activities
Foreign exchange effect related to cash and cash equivalents
NET DECREASE IN CASH AND EQUIVALENTS CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR
COMPONENTS OF CASH AND CASH EQUIVALENTS:
Cash
Current account with Bank Indonesia
Current accounts with banks
Placements with banks - maturing within three months or less since the acquisition date
Total cash and cash equivalents

Annual Report
Laporan Tahunan
2024

Rising Stronger for a Brighter Tomorrow

Bangkit Lebih Kuat untuk Masa Depan Lebih Cerah



Prosperity Tower Lantai 1, District 8,
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Tel. (62-21) 395 03600
Fax. (62-21) 395 03699
Email: corpsec@indonesiaeximbank.go.id

www.indonesiaeximbank.go.id

